Laporan Kota-Kota Dunia 2020

Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

UN HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

Laporan Kota-Kota Dunia 2020

Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Laporan Kota-Kota Dunia 2020

Publikasi pertama 2020 oleh United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
Hak Cipta © United Nations Human Settlements Programme, 2020

Seluruh hak cipta

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
P.O. Box 20020, Nairobi, Kenya
Website: www.unhabitat.org

PENAFIAN

Desain yang digunakan dan penyajian materi dalam laporan ini tidak menyiratkan ekspresi apapun pendapat apapun dari pihak Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota atau daerah, atau otoritasnya, atau tentang delimitasi perbatasan atau batas-batasnya, atau mengenai sistem ekonomi atau tingkat perkembangan. Analisis, kesimpulan dan rekomendasi dari laporan ini tidak mencerminkan pandangan United Nations Human Settlements Programme atau Dewan Pengaturnya.

Laporan ini dibuat dengan data resmi yang disediakan oleh pemerintah dan informasi tambahan yang dikumpulkan oleh Observatorium Perkotaan Global. Kota dan negara diundang untuk memperbarui data yang relevan dengan mereka. Ini penting untuk mengakui bahwa data bervariasi menurut definisi dan sumber. Meskipun UN-Habitat memeriksa data yang diberikan semaksimal mungkin, tanggung jawab atas keakuratan informasi terletak pada penyedia asli data. Informasi yang terkandung dalam Laporan ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk, tanpa batasan, jaminan dapat diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. UN-Habitat secara khusus tidak memberikan jaminan atau pernyataan apa pun mengenai keakuratan atau kelengkapan dari setiap data tersebut. Dalam situasi apa pun UN-Habitat tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kewajiban, atau biaya apa pun yang timbul atau menderita yang diklaim sebagai akibat dari penggunaan Laporan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, segala kesalahan, kekeliruan, kelalaian sehubungan dengan itu. Penggunaan Laporan ini menjadi satu-satunya risiko Pengguna. Dalam keadaan apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada kelalaian, UN-Habitat atau afiliasinya bertanggung jawab atas segala bentuk langsung, tidak langsung, insidental, khusus atau kerusakan penting, bahkan jika UN-Habitat telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut.

Nomor HS: HS/045/20E

Bahasa : Bahasa Indonesia
No Penjualan : E.21.III.Q.1
ISBN :

Kata Pengantar

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Urbanisasi merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dan terjadi secara global di berbagai Negara. Diperlukan peran Pemerintah Pusat untuk melakukan keterpaduan efektif sejak proses perencanaan hingga pembangunan di lapangan sebagai antisipasi terhadap potensi dan permasalahan urbanisasi. Negara Indonesia melalui Kementerian PUPR berupaya memberikan solusi dengan mewujudkan perencanaan pembangunan infrastruktur dan wilayah secara terpadu. Proses keterpaduan diwujudkan dengan melibatkan empat sektor terkait yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan. Kementerian PUPR selalu berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan wilayah untuk semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembangunan secara inklusif yang dimulai dari proses perencanaan hingga implementasi dilakukan dengan pelibatan Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menghasilkan program-program yang terpadu. Pembangunan inklusif juga dilakukan sebagai antisipasi terhadap dampak pandemi COVID-19 melalui program pembangunan padat karya yang melibatkan masyarakat, sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menangani pengangguran dan kemiskinan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyambut baik atas publikasi terbaru tahun 2020 dari UN-Habitat dengan judul *The Value of Sustainable Urbanization*. Buku tersebut menunjukkan komitmen UN-Habitat terhadap pentingnya penanganan urbanisasi dengan memperhatikan nilai yang terkait dengan ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, tata kelola, politik, budaya serta persepsi masyarakat.

Mengingat pentingnya laporan UN-Habitat tersebut, maka dipandang perlu untuk menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk lebih memperluas pemahaman insan PUPR dan juga masyarakat luas terhadap urbanisasi berkelanjutan. Kementerian PUPR di Indonesia bertekad mensukseskan agenda global SDGs dan NUA dengan mengakomodasi empat nilai urbanisasi yang diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur dan wilayah.

Semoga usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun infrastruktur dan wilayah dapat memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat.

Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal

Antonio Guterres
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pandemi COVID-19 telah mengacaukan kehidupan dan ekonomi di seluruh dunia. Dampak sosial dan ekonomi yang timbul membalikkan capaian pembangunan, dan kemiskinan global nampaknya akan meningkat untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.

Kota harus menanggung beban akibat pandemi. Kawasan perkotaan yang sudah dihuni oleh 55 persen populasi dunia, diperkirakan akan meningkat menjadi 68 persen pada 2050. Dunia kita yang sangat cepat mengota harus merespon pandemi ini dengan efektif dan bersiap untuk wabah penyakit menular di masa yang akan datang.

Golongan yang paling rentan terhadap pandemi ini adalah mereka yang hidup di pinggiran kota. Kehidupan perkotaan yang tidak terencana membuat mereka rentan. Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan dalamnya jurang kesenjangan dan menunjukkan bahwa menangani virus di kawasan perkotaan akan lebih menantang, yang mana akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas masih tidak merata, hunian yang tidak layak, air dan sanitasi yang tidak memadai, infrastruktur transportasi yang tidak lengkap, serta lapangan kerja yang tidak pasti.

Kita tidak bisa bergerak seperti biasa (*business-as-usual*). Kota dan komunitas menuntut para pihak berwenang untuk membangun kembali secara lebih baik (*build back better*). Untuk bangkit lebih tegar, kita membutuhkan pemulihan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan hijau. Itu artinya kita harus berurusan dengan tantangan eksisting atas bagaimana kota direncanakan, dikelola dan dibiayai, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut mengacu ke tujuan "*Net Zero Emission*" pada 2050.

Dengan kebijakan yang tepat dan kerangka kerja yang mendukung, kota yang tangguh dengan hunian dan infrastruktur layak dapat bangkit dari dampak bencana, termasuk pandemi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) memberikan cetak biru (*blueprint*) untuk mengimplementasikan langkah-langkah ini.

Laporan Kota-Kota Dunia 2020 menegaskan kembali bahwa urbanisasi berkelanjutan tetap menjadi pusat dari pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendukung pengentasan kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, dan tantangan global lainnya. Pesan yang terasa sederhana namun kokoh ini harus memandu upaya pembangunan saat dunia pulih dari pandemi COVID-19 dan sepanjang Dekade Aksi dalam mewujudkan TPB.

Pengantar

Direktur Eksekutif

Maimunah Mohd Sharif
Direktur Eksekutif UN-Habitat

Dalam kurun waktu beberapa bulan, dunia telah berubah tanpa dapat diantisipasi sebelumnya. Pandemi virus korona memicu krisis kesehatan publik terburuk dalam abad terakhir dan saat ini kita hidup dalam resesi ekonomi terburuk setelah *Great Depression*. Dengan lebih dari 90 persen kasus terkonfirmasi berasal dari kawasan perkotaan, kota tetap menjadi episentrum penyebaran COVID-19. Di dunia yang dengan cepat mengalami urbanisasi dan globalisasi, virus tersebut telah menyebar ke hampir setiap sudut dunia; pertama, di antara kota-kota yang terhubung secara global, dan sekarang, melalui transmisi komunitas, dari kota ke perdesaan.

COVID-19 telah memperlihatkan dan memperburuk ketimpangan yang ada di kota. Masyarakat miskin merupakan pihak yang paling rentan dan paling mungkin kehilangan nyawa akibat penyakit tersebut. Pekerja informal yang menggantungkan hidupnya pada upah harian telah kehilangan mata pencahariannya. Anak-anak tanpa akses internet telah kehilangan satu tahun pendidikan formal. Para lansia, menghadapi risiko dan stigmatisasi, terkurung di rumah mereka tanpa kesempatan untuk berinteraksi secara sosial. Pekerja migran kembali ke rumah dan menghadapi masa depan dalam kemiskinan. Beberapa lainnya dikurung di asrama dengan tingkat paparan penyakit yang tinggi. Kelompok minoritas juga terpengaruh secara tidak proporsional. Perempuan terpaksa berubah mengasuh anak, mendidik dan bekerja secara bersamaan akibat tidak adanya akses ke sekolah dan layanan penitipan anak. Para pekerja pada sektor penting terus bekerja keras tanpa lelah dan dengan risiko yang besar untuk memastikan bahwa fungsi layanan perkotaan tidak terganggu. Di atas segalanya, COVID-19 membalikkan pencapaian yang diperoleh dari pengentasan kemiskinan dan kemungkinan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang semestinya dicapai setidaknya dalam satu dekade ini.

Di tengah semua ini, kawasan perkotaan menawarkan secercah harapan karena kota dan lembaga pada garis terdepan memiliki peran kunci dalam membalikkan situasi kelam ini. *Laporan Kota-Kota Dunia 2020* menyatakan bahwa kota tetap menjadi pusat pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 11, menunjukkan peran transformatif yang dapat dimainkan oleh kota. COVID-19 mengedepankan efektivitas dan tumpuan pada pemerintah dan masyarakat lokal untuk proses pemulihan. Agenda Baru Perkotaan (NUA) menjelaskan nilai urbanisasi berkelanjutan, bagaimana

masyarakat yang memilih untuk hidup di kota dapat berkontribusi pada kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, keadilan sosial dan penguatan lembaga sipil dan budaya. Urbanisasi penting bagi upaya global untuk membangun kembali secara lebih baik serta transisi pembangunan berkelanjutan.

COVID-19 tidak akan membalikkan urbanisasi. Dorongan utama untuk datang ke kota dalam mengejar aspirasi dan kehidupan yang lebih baik akan terus berlanjut. Namun kita memiliki kesempatan untuk membuat proses aglomerasi ini agar lebih inklusif, dengan fokus yang jelas pada kesejahteraan bersama. Untuk memanfaatkan kekuatan transformatif urbanisasi menuju pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan tata kelola yang efektif. Selain itu, kita juga perlu membangun kembali kota menjadi lebih hijau. Pertumbuhan tidak dapat mengorbankan lingkungan.

Laporan Kota-Kota Dunia 2020 menegaskan bahwa kota yang terencana, dikelola, dan didanai dengan baik dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan nilai tak berwujud lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua. Urbanisasi dapat dimanfaatkan untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, perubahan iklim, dan tantangan global lain yang mendesak. Dalam hal ini, urbanisasi berkelanjutan dapat memainkan peran penting dalam Dekade Aksi untuk mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan bersama demi pencapaian TPB pada tahun 2030.

Urbanisasi seharusnya tidak mengorbankan pembangunan perdesaan. Pada kenyataannya, keduanya harus bersimbiosis dan saling menguatkan

Agenda global menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, multisektor dan multi-pemangku kepentingan untuk menyajikan nilai yang melekat pada urbanisasi. Namun perlu dilakukan hal yang benar dengan memastikan bahwa kota-kota terencana dengan baik, dikelola dengan baik dan dengan pembiayaan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah pusat harus menciptakan lingkungan yang mendukung kota untuk berkembang, serta pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang diberikan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang. Urbanisasi seharusnya tidak mengorbankan pembangunan perdesaan. Pada kenyataannya, keduanya harus bersimbiosis dan saling menguatkan. Sektor swasta harus berinvestasi dalam proyek pembangunan berkelanjutan, menyebarkan ide-ide inovatif untuk perumahan yang terjangkau, infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan. Masyarakat sipil harus memperkuat lembaga dan berkontribusi dengan kekuatan imajinasi yang dimiliki untuk menjadi bagian dari proses transformatif ini dengan rasa keterbukaan, partisipasi dan komitmen yang baru. Ketika semua bagian yang saling terkait beroperasi secara harmonis dan didukung oleh lembaga dan kebijakan yang sesuai, kota akan berkembang dan nilainya akan ditingkatkan serta disebarkan kepada semua; dan dalam prosesnya, tidak ada seorang pun dan satu wilayah pun terabaikan.

Pengakuan

Penulis: Tim Utama UN-Habitat
Christine Knudsen (Direktur Divisi); Eduardo Moreno (Kepala Cabang); Ben Arimah (Kepala Unit dan Manajer Tugas); Raymond Otieno Otieno; Ololade Ogunsanya

Penulis: Konsultan Eksternal
Godwin Arku; Remi Jedwab; Vanesa Castán Broto; Alfonso Iracheta; Jackie Klopp; Edgardo Bilsky; Tomás Dentinho; David Simon; Hayley Leck

Lampiran Statistik
Robert Ndugwa; Donatien Beguy; Julius Majale; Dennis Mwaniki; Daniel Githira; Pauline Masita; Edwin Kochulem

Kontributor: Staf UN-Habitat
Raf Tuts; Donatien Beguy; Robert Ndugwa; Remy Sietchiping; Chris Williams; Marco Kamiya; Ananda Weliwita; Joel Jere; John Gituri Mureithi; Lennart Fleck; Hannes Berggren; Stephanie Gerretsen; Robert Lewis-Lettington, Anne Klen-Amin, Samuel Njuguna; Diana Lopez Caramazana; Pontus Westerburg; Paula Pennanen-Rebeiro-Hargrave; George Gachie; Cecilia Andersson; Mark Ojal; Pireh Otieno; Debashish Bhattacharjee; Stefanie Holzwarth; Trang Nguyen; Catherine Otono

Kontributor: Eksternal
Susan Parnell; James Duminy; Merlin Chatwin; Afeikhena Jerome; James Mbata; Cecilia Cota, Alejandra Marulanda; Sergio González López; Nicholas Barrett; Joel Goh; Elizabeth Lenz; Luc Aldon; Anna Calvete; Andrea Ciambra; Ainara Fernández; Sara Hoeflich; Mathilde Penard; Massimo Perrino

Tim Pendukung Administratif
Nelly Kang'ethe; Anne Idukitta; Mary Dibo; Jacqueline Macha; Samuel Muraga; Duncan Kimani Kamau

Dewan Penasehat Internasional
Christine Platt; Obas John Ebohon; Taibat Lawanson; Yu Zhu; Matt Benson; Nikolai Bobylev; Ryan Centner; Bharat Dahiya

Pendukung Pembiayaan
Kantor Direktur Eksekutif, UN-Habitat

Pertamuan Kelompok Ahli
Jenewa: Pemimpin-pemimpin Kota Internasional International City Leaders
Mombasa: Kantor Direktur Eksekutif, UN-Habitat

Konsultan Editorial
Gregory Scruggs

Tim Media dan Komunikasi
Susannah Price; Victor Mgendi; Ivy Mutisya

Desain dan Tata Letak: Peter Cheseret
Illustrasi: Andrea Posada
Pengembangan Web: Joshua Gichuhi, Andrew Ouko

Daftar Isi

Kata Pengantar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat……...…… iii
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal……iv
Pengantar Direktur Eksekutif……v
Pengakuan……...vii
Daftar Gambar, Kotak, dan Tabel……..xi-xiii
Akronim dan Singkatan……xiv-xvi
Temuan dan Pesan Utama……...xvii-xliv

1

Urbanisasi dan Kota-Kota: *Arah Kekuatan Baru Global* 1

1.1. Urbanisasi: Agenda Utama dalam Kebijakan Pembangunan Internasional 2
1.2. Kota dan Pembangunan: Isu Abadi 6
1.3. Implementasi Agenda Baru Perkotaan 7
1.4. Kondisi dan Kecenderungan Perkotaan Global Terkini 12
1.5. Catatan Kesimpulan 42

2

Mengurai Nilai Urbanisasi Berkelanjutan 46

2.1. Konsep Nilai Urbanisasi Berkelanjutan 48
2.2. Nilai dalam Konteks Urbanisasi Berkelanjutan 50
2.3. Memanfaatkan Nilai Urbanisasi untuk Masyarakat 52
2.4. Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan 52
2.5. Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan 62
2.6. Nilai Sosial Urbanisasi Berkelanjutan 67
2.7. Nilai Tak Berwujud dan Nilai Budaya 76
2.8. Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 78

3

Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan: *Kemakmuran Inklusif dan Peluang bagi Semua* 81

3.1. Kota: Akselerator Pertumbuhan Berkelanjutan 86
3.2. Cara Perkotaan Berkontribusi terhadap Kemakmuran dan Inklusivitas Nasional 97
3.3. Urbanisasi Berkelanjutan Sangat Penting untuk Menuai Manfaat Ekonomi dari Kota 102
3.4. Bagaimana Berbagai Tingkatan Pemerintah Dapat Membantu Kota untuk Berkembang 113
3.5. Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 116

4

Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan: *Membangun Perkotaan yang Tangguh* 118

4.1. Nilai Lingkungan dari Lensa Agenda Pengembangan Global 121
4.2 Tantangan untuk Mewujudkan Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan 129
4.3. Memetakan Ruang Aksi untuk Nilai Lingkungan Perkotaan 134
4.4. Dampak Kebijakan Keberlanjutan Kota yang Tidak Disengaja 146
4.5. Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 149

5

Nilai Sosial Urbanisasi Berkelanjutan: *Tidak Meninggalkan Satu Orang pun dan Satu Wilayah pun* 152

5.1. Memahami Nilai Tak Berwujud Urbanisasi Berkelanjutan 154
5.2. Mengejar Inklusi melalui Urbanisasi Berkelanjutan 155
5.3: Menggapai Keadilan melalui Urbanisasi Berkelanjutan 168
5.4. Nilai Tak Berwujud Urbanisasi Berkelanjutan 176
5.5 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 188

6

Inovasi, Teknologi, dan Nilai-Nilai Urbanisasi Berkelanjutan 190

6.1. Apa itu Inovasi dan Mengapa Penting? 192
6.2. Teknologi Sipil untuk Inovasi Perkotaan 194
6.3. Perusahaan Teknologi dan Kota Cerdas 202
6.4. Kota Cerdas yang *Bottom-up:* Laboratorium Perkotaan, Data Terbuka, dan Gerakan *Open-Source* 206
6.5. Kota dan Geografi Inovasi Teknologi yang Tidak Merata 210
6.6. Eksklusi Digital, Privasi Data, dan Maha Bahaya Teknologi Baru 214
6.7. Pentingnya Tata Kelola dan Hak Digital 215
6.8. Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 217

7

Pemerintah Daerah dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan 220

7.1. Munculnya Alternatif Perkotaan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan 223
7.2 Evolusi Kerangka Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Relevansinya dalam Memanfaatkan Potensi Urbanisasi Berkelanjutan 229
7.3. Pemerintah Daerah sebagai Pilar Perpaduan Kekuatan Lokal Transformatif 234
7.4. Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 244

8

Investasi dalam Nilai Urbanisasi Berkelanjutan 249

8.1. Permintaan akan Investasi di Perkotaan 252
8.2. Tantangan Pembiayaan Perkotaan 264
8.3. Mobilisasi Pembiayaan untuk Urbanisasi Berkelanjutan 271
8.4. Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan 285

9

Agenda Baru Perkotaan dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan 289

9.1. Menuju Dekade Aksi: Memanfaatkan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan dengan Cepat 292
9.2. Meningkatkan Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan 295
9.3. Meningkatkan Nilai Lingkungan Urbanisasi 299
9.4. Meningkatkan Nilai Sosial Urbanisasi 303
9.5. Tata Kelola, Kerangka Kelembagaan, dan Legislasi Perkotaan 306
9.6. Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan? 307
9.7. Refleksi Penutup: Menerapkan Agenda Baru Perkotaan di Tengah Ketidakpastian dan Tantangan Global yang Belum Pernah Ada Sebelumnya 318

Daftar Gambar, Kotak, dan Tabel

Daftar Gambar

Gambar 1.1: Koefisien Gini di kota-kota pilihan di Eropa dan Amerika Utara 23
Gambar 1.2: Koefisien Gini untuk beberapa kota di Amerika Latin 23
Gambar 1.3: Koefisien Gini untuk kota-kota terpilih di Asia 24
Gambar 1.4: Koefisien Gini untuk kota-kota terpilih di Afrika 25
Gambar 1.5: Persentase populasi penduduk kota yang tinggal di permukiman kumuh 27
Gambar 1.6: Perubahan konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO_2) di atmosfer bagi beberapa metropolitan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia (perubahan persentase) 39
Gambar 1.7: Aplikasi teknologi digital di kota-kota Afrika Selatan 41
Gambar 2.1 : Pengertian nilai urbanisasi berkelanjutan 50
Gambar 3.1: Urbanisasi dan pembangunan ekonomi 83
Gambar 3.2: Porsi penduduk dengan akses yang memadai kepada transportasi umum, 2019 (dalam persen) 84
Gambar 3.3: Porsi dari limbah padat perkotaan yang dikumpulkan 2001 – 2010 dan 2010 – 2018 (dalam persen) 85
Gambar 3.4: Konsentrasi dari material partikel halus (PM2.5) di wilayah perkotaan 2016 85
Gambar 3.5: Produktivitas pekerja dan kepadatan penduduk kota Afrika Selatan 2007 90
Gambar 3.6: Kepadatan kota dan tingkat infeksi COVID-19 di Tiongkok 93
Gambar 3.7: Persentase dari populasi dengan kemiskinan multidimensi 100
Gambar 3.8 Ketersediaan peraturan terkait dengan ukuran gedung di berbagai daerah 104
Gambar 3.9 Hubungan urbanisasi dan pendapatan untuk sumber ekspor dan negara lain 108
Gambar 3.10: Output urbanisasi, industri, dan jasa 108
Gambar 3.11: Evolusi perencanaan di dalam perluasan kota-dengan contoh dari total 30 kota 112
Gambar 4.1: Kerangka penilaian Solusi Berbasis Alam (NBS) 137
Gambar 4.2: Kerangka kerja paparan ganda yang diterapkan pada perencanaan infrastruktur kota 139
Gambar 4.3: Prinsip keberlanjutan 142
Gambar 4.4: Prinsip desain Siklus Kota Bersama yang digunakan di Bologna, Italia 144
Gambar 4.5: Bagaimana gentrifikasi hijau mempengaruhi masyarakat miskin perkotaan dalam konteks ketahanan bangunan 149
Gambar 5.1: Topik kota ramah usia 163
Gambar 5.2 Populasi yang lahir di luar negeri di beberapa kota besar 165
Gambar 5.3: Kesetaraan dibandingkan dengan Keadilan 169
Gambar 5.4: Kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan: Tiga model 185
Gambar 6.1: Peta transportasi publik Kota Nairobi 197
Gambar 6.2: Misi kota cerdas oleh Pemerintah India 206
Gambar 6.3: Prinsip digital untuk pembangunan 208
Gambar 6.4: Distribusi global dari 100 perusahaan digital teratas dan kapitalisasi pasar (miliar USD) 211
Gambar 6.5: Distribusi global dari modal ventura 212
Gambar 6.6: Sistem inovasi Wilayah Teluk San Francisco 213
Gambar 7.1: Rata-rata pembelanjaan, pendapatan dan investasi langsung pemerintah daerah sebagai bagian dari pembelanjaan, pendapatan dan investasi berdasarkan wilayah, 2016 229
Gambar 8.1: Defisit perumahan di Afrika 256
Gambar 8.2: Peluang investasi dalam bangunan hijau antarwilayah 260
Gambar 8.3 Contoh kriteria lembaga pemeringkat 265

Gambar 8.4 Pajak peroperti sebagai persentase PDB di beberapa negara Afrika (sekitar tahun 2012) 267
Gambar 8.5: Menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan investasi..... 274
Gambar 8.6 Pembiayaan campuran: Jumlah transaksi dan rata-rata besar transaksi menurut wilayah 279
Gambar 8.7: Dana pembangunan hijau Shandong: Distribusi portofolio 283
Gambar 8.8: Investasi perkotaan berkelanjutan: tantangan kunci dan opsi kebijakan bagi Negara terbelakang (LDCs) 286
Gambar 9.1: Tinggi dan rendah prioritas tema di KPN per kawasan..... 313

Daftar Kotak

Kotak 1.1: Pandangan dari bawah: Apa yang diungkapkan oleh Voluntary National Reviews (VNRs) dari TPB 11 5
Kotak 1.2: Penyediaan untuk pemuda di Wau, Sudan Selatan..... 16
Kotak 1.3: Seattle semakin kompak tapi Austin justru merebak: Mitos kembali ke kota..... 19
Kotak 1.4: Ketimpangan memicu ketidakpuasan global akan kota-kota..... 24
Kotak 3.1: Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 di berbagai wilayah. 94
Kotak 3.2: Ekonomi informal: sumber perekonomian perkotaan 101
Kotak 3.3: Ekonomi Informal: Sumber Perekonomian Perkotaan..... 101
Kotak 3.4: Jaringan transportasi umum: BRT dan manfaat ekonomi kota..... 113
Kotak 3.5: Iskandar Malaysia: Sebuah koridor katalisator pembangunan..... 115
Kotak 4.1 : Pandemi COVID-19 dan kelebihan sampah plastik..... 121
Kotak 4.2: Menciptakan nilai lingkungan melalui ruang publik..... 127
Kotak 4.3: Dilema nexus energi - air di Bengaluru, India..... 132
Kotak 4.4: Mengembangkan agenda penelitian tentang akses energi perkotaan: pengalaman dari Maputo, Mozambik 133
Kotak 4.5: COVID-19 dan pengurangan emisi..... 135
Kotak 4.6: Dari krisis ke ketahanan: pertanian perkotaan dan pinggiran kota di Rosario, Argentina 138
Kotak 4.7: Jaringan Favela berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brasil..... 140
Kotak 4.8: Enam prinsip penciptaan nilai lingkungan perkotaan..... 144
Kotak 4.9: Di masa krisis, jaringan akar rumput adalah benteng pekerja informal 145
Kotak 4.10: Mengapa orang tua di Eropa menuntut kota mereka atas kualitas udara yang buruk..... 146
Kotak 5.1: Pengarusutamaan gender di Wina..... 160
Kotak 5.2: Hak anak dan prinsip-prinsip perencanaan kota 162
Kotak 5.3: Montreal: Kota kaum pendatang..... 167
Kotak 5.4: *Black Lives Matter* memicu gerakan sosial perkotaan secara global menyusul pembunuhan George Floyd di Minneapolis (AS)..... 170
Kotak 5.5: COVID-19: Memperdalam ketimpangan di lingkungan perkotaan 172
Kotak 5.6: Penghapusan kemiskinan melalui perbaikan sumber air dan sanitasi di Provinsi Surkhandarya 175
Kotak 5.7: Kartu lapor warga: sebuah alat untuk tata kelola perkotaan 180
Kotak 5.8: Model kewirausahaan inovatif untuk regenerasi perkotaan berbasis budaya di Ségou, Mali..... 183
Kotak 5.9: Keadilan distribusi dan akses ke sumber daya budaya di dalam negara..... 187
Kotak 6.1: Bagaimana pelaporan warga untuk respons kota berevolusi dari "Putar 311" ke SeeClickFix ke aplikasi sipil 196
Kotak 6.2: Proyek Matatus Digital memetakan minibus di Nairobi 198
Kotak 6.3: Sepuluh tren teknologi dipercepat oleh COVID-19..... 199
Kotak 6.4: Mengukur polusi udara dengan jaringan pemantauan kualitas udara berbiaya rendah..... 203

Kotak 6.5: Google Sidewalks Lab menghadapi perlawanan terhadap Toronto Tomorrow 205
Kotak 6.6: *Hackathons* memanfaatkan data terbuka untuk membangun alat teknologi kota..... 209
Kotak 6.7: Program "Town and Gown" Kota New York..... 210
Kotak 7.1: Pelokalan agenda global pembangunan berkelanjutan..... 224
Kotak 7.2: Perjanjian Global para Wali Kota untuk Iklim dan Energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM)) 225
Kotak 7.3: Prakarsa kota-kota untuk perumahan layak huni..... 227
Kotak 7.4: Seoul: Perencanaan kota dan Agenda Global 235
Kotak 8.1: Membiayai urbanisasi berkelanjutan: Penghitungan biaya 258
Kotak 8.2: Berinvestasi dalam urbanisasi berkelanjutan melalui pengawasan dan pelaporan efektif 264
Kotak 8.3: Perkotaan: Kebutuhan investasi vs. kapasitas investasi pemerintah dan swasta 273
Kotak 8.4: Dana masyarakat miskin perkotaan: Memanfaatkan keuangan masyarakat 275
Kotak 8.5: Inisiatif Belt and Road Tiongkok 284
Kotak 9.1: Memanfaatkan Agenda Baru Perkotaan (NUA) untuk mempercepat nilai urbanisasi 294
Kotak 9.2: Fitur utama dari Platform Agenda Perkotaan 318

Daftar Tabel

Tabel 1.1: Populasi penduduk perkotaan dan tingkat urbanisasi (2000-2035) 12
Tabel 1.2: Perubahan proporsi penduduk perkotaan 2000-2035..... 13
Tabel 1.3: Pertumbuhan ekspansi lahan perkotaan dan penduduk perkotaan 18
Tabel 1.4: Populasi penduduk kota yang tinggal di permukiman kumuh 27
Tabel 1.5: Kasus COVID-19 di kawasan perkotaan (Juli 2020) 32
Tabel 2.1: Kelompok prioritas dalam pengaturan perkotaan 53
Tabel 2.2:Nilai urbanisasi bagi generasi muda 61
Tabel 2.3: Nilai urbanisasi bagi kaum perempuan miskin..... 65
Tabel 2.4: Nilai urbanisasi untuk anak-anak..... 73
Tabel 3.1 : Kontribusi sektor berbasis perkotaan terhadap PDB dan penggunaan lahan, 2015 84
Tabel 3.2: Faktor khusus kota yang menentukan produktivitas suatu kota 87
Tabel 3.3 Mega-region terbesar di dunia, 2015..... 99
Tabel 4.1: Contoh nilai lingkungan yang terkait dengan target TPB 11 dan proyek saat ini yang meningkatkan nilai-nilai tersebut..... 124
Tabel 4.2: Beragam tipe solusi berbasis alam dengan dampak di berbagai tingkatan..... 136
Tabel 5.1: Orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensional, 2013..... 173
Tabel 5.2: Kota-kota destinasi utama 2018 184
Tabel 8.1: Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat dari Urbanisasi berkelanjutan 253
Tabel 8.2 Instrumen pembiayaan berbasis tanah 269
Tabel 9.1 Meningkatkan Nilai Urbanisasi: Pesan utama dan mekanisme implementasi..... 322

Akronim dan Singkatan

AAAAA	Agenda Aksi Addis Ababa
ADB	Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
AFINUA	Kerangka Kerja Aksi untuk Implementasi Agenda Baru Perkotaan
AS	Amerika Serikat
BASIC	Konsorsium Inovasi dan Ilmu Pengetahuan Wilayah Teluk (Bay Area Science and Innovation Consortium)
BCR	rasio manfaat biaya (*benefit cost ratio*)
BRI	Inisiatif Belt and Road (Belt and Road Initiative)
BRT	*Bus Rapid Transit*
C40	Grup Kepemimpinan Kota Iklim (Cities Climate Leadership Group)
CAD	dolar Kanada
CAF	Bank Pembangunan untuk Amerika Latin (Development Bank for Latin America)
CCI	Pusat Inisiatif Komunitas (Centre for Community Initiatives, Tanzania)
CDIA	Prakarsa Pembangunan Kota-Kota untuk Asia (Cities Development Initiative for Asia)
CDP	Carbon Disclosure Project
CIO	Climate Investor One
CIS	Persemakmuran Negara-negara Independen (Commonwealth of Independent States)
CIT	Chicago Infrastructure Trust
CLT	*cross laminated timber*
COVID – 19	Coronavirus Disease
COP21	Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015
COP24	Konferensi Perubahan Iklim PBB 2018
COP25	Konferensi Perubahan Iklim PBB 2019
COP26	Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021
CPI	Indeks Kemakmuran Kota (City Prosperity Index)
CRC	kartu lapor warga (*citizen report card*)
DAU	Unit Data dan Analisis (*Data and Analytics Unit*)
DNI	Dudley Neighbours Incorporated
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ECLAC	United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean
EDGE	Excellence in Design for Greater Efficiencies
FMDV	Global Fund for Cities Development
FSD	pembiayaan pembangunan berkelanjutan (*financing sustainable development*)
GCF	Green Climate Fund
GCoM	Perjanjian Global para Wali Kota untuk Iklim dan Energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)
GPS	*Global Positioning System*
GRIDES	Kelompok Manajemen Risiko, Bencana, dan Perubahan Iklim
GRK	gas rumah kaca
GTF	Gugus Tugas Global untuk Pemerintah Daerah dan Regional
GUO	Global Urban Observatory
HLM	Perumahan Berpenghasilan Rendah (*Habitation a Loyer Modere*)
HLPF	Forum Politik Tingkat Tinggi (United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development)
IBM	International Business Machines Corporation
ICLEI	Local Governments for Sustainability
IDPs	*internally displaced persons*
ILO	Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization)
IoT	*Internet of Things*
IPBES	Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IPCC	Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IRDA	Otoritas Pembangunan Daerah Iskandar (Iskandar Regional Development Authority)

IUCN	Persatuan untuk Konservasi Alam Internasional (International Union for Conservation of Nature)
KIC	Komunitas Inovasi dan Pengetahuan (Knowledge and Innovation Community)
KDB	koefisien dasar bangunan
KLB	koefisien lantai bangunan
KPBU	kerja sama pemerintah dan badan usaha
KPN	Kebijakan Perkotaan Nasional
LDCs	negara terbelakang (Least Developed Countries)
LCP	Liga Persatuan Kota Filipina (League of Cities of the Philippines)
LGFAs	lembaga pendanaan pemerintah daerah (*local government funding agencies*)
LINQ	Laboratorio de Innovacion Quito
Litbang	penelitian dan pengembangan
LMP	Liga Persatuan Kotamadya Filipina (League of Municipalities of the Philippines)
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MBR	masyarakat berpenghasilan rendah
MEII	Inisiatif Investasi Timur Tengah (Middle East Investment Initiative)
MENA	Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa*)
MRT	*Mass Rapid Transit*
NAZCA	Zona Aktor Non-Pemerintah untuk Aksi Iklim (Non-State Actor Zone for Climate Action)
NBS	solusi berbasis alam (*nature-based solutions*)
NDCs	Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (Nationally Determined Contributions)
NEN	Jaringan Ekologi Nasional (National Ecological Network)
NUA	Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda)
ODA	Bantuan Pembangunan Resmi (*Official Development Assistance*)
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OPD	organisasi perangkat daerah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PCT	Platform Kolaborasi untuk Perpajakan (Platform for Collaboration on Tax)
PFM	Mekanisme Pembiayaan Gabungan (*Pool Financing Mechanism*)
PIF	Dana Investasi Gabungan (*Pooled Investment Fund*)
PKL	pedagang kaki lima
PMA	penanaman modal asing
PSUP	Program Peningkatan Permukiman Kumuh Partisipatif (Participatory Slum Upgrading Programme)
RALGA	Asosiasi Otoritas Pemerintah Daerah Rwanda (Rwanda Association of Local Government Authorities)
RAP	Rencana Aksi Regional (*Regional Action Plan*)
ROSRA	Analisis Cepat Pendapatan Bersumber Sendiri (Rapid Own-Source Revenues Analysis)
RTH	ruang terbuka hijau
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RUU	Rancangan Undang-Undang
RDP	Program Pembangunan dan Rekonstruksi (Reconstruction and Development Programme)
SALGA	Asosiasi Pemerintah Daerah Afrika Selatan (South African Local Government Association)
SDA	sumber daya alam
SDM	sumber daya manusia
SDSN	Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Solutions Network)
SFDRP	Kerangka Kerja Sendai untuk Pencegahan Risiko Bencana (Sendai Framework on Disaster Risk Prevention)
SFDRR	Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework on Disaster Risk Reduction)
SIDA	Swedish International Development Cooperation Agency
SIODS	Sistem Informasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SPV	*Special Purpose Vehicle*
SPDL	Stasiun Pengisian Daya Listrik
SSRF	Dana Bergulir Penyediaan Lahan (*Sites and Services Revolving Fund*)
SWaCH	Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah Padat Seva Sahakari Sanstha
TfL	Transport for London
TIK	teknologi informasi dan komunikasi
TOD	*Transit Oriented Development*

TPB/SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developmnet Goals)
UCLG	Persatuan Pemerintah Kota dan Daerah (United Cities and Local Government)
UE	Uni Eropa
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UNCDF	United Nations Capital Development Fund
UNDESA	United Nations Department of Economic and Social Affairs
UNDP	United Nations Development Programme
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNHRC	United Nations Human Rights Council
UNICEF	United Nations Children's Fund US United States
USD	dolar amerika
VLR	Tinjauan Lokal Sukarela (Voluntary Local Reviews)
VNR	Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Review)
WALRG	World Assembly of Local and Regional Governments
WEIGO	Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)
WUF	Forum Perkotaan Dunia (World Urban Forum)
WUI	*Wildland-Urban Interface*

Temuan dan Pesan Utama

Bab 1 Urbanisasi dan Kota-Kota: Arah Kekuatan Baru Global

Tahun 2020 menandai titik balik dalam upaya global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan kota sebagai tempat tinggal bagi lebih dari separuh penduduk dunia sebagai pusatnya. Di satu sisi, dunia memasuki Dekade Aksi, yaitu periode sepuluh tahun di mana pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil harus mempercepat upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mulai dari persoalan kemiskinan, diskriminasi berbasis gender hingga perubahan iklim, ketimpangan serta kesenjangan finansial. Hingga tahun 2030, berbagai aksi lokal – yang sebagian besar terjadi di kota-kota atau oleh para pemimpin kota – harus secara kolektif menciptakan pergeseran global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dengan mengentaskan kemiskinan, memperbaiki tingkat kesehatan, memperluas akses pendidikan dan mengurangi emisi karbon di antara berbagai persoalan masyarakat lainnya.

Di sisi lain, umat manusia secara bersamaan menghadapi pandemi virus korona, krisis kesehatan yang terburuk dalam seabad terakhir yang telah memicu prospek ekonomi terburuk sejak periode *Great Depression* (di tahun 1930-an). Di dunia yang semakin mengglobal, penularan virus telah menyebar ke segala penjuru dunia, mulai dari kota-kota yang sangat terkoneksi secara global sampai ke kawasan-kawasan perdesaan yang terpencil. Akibatnya, geliat ekonomi pun terhenti karena berbagai negara bergegas menerapkan karantina wilayah (*lockdown)*. Perjalanan internasional yang biasanya bergerak cepat pun terhenti. Pekerja kerah putih pun harus bekerja dari rumah dan membuat gedung-gedung perkantoran di pusat-pusat kota New York, London hingga Sydney kosong. Pekerja esensial ("*essential workers*") seperti perawat, pengemudi bis, hingga pedagang bahan makanan sehari-hari pun tiba-tiba menjadi garda depan dalam menghadapi penyakit baru yang belum sepenuhnya dipahami. Karantina wilayah juga mengakibatkan jutaan warga kota di berbagai negara seperti India dan Peru pergi kembali ke desa, sebagian mungkin untuk selamanya.

Dengan munculnya disrupsi yang tidak terduga ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa pada tahun ini, 71 juta warga dunia kembali jatuh sangat miskin, sebuah kenaikan angka kemiskinan global pertama sejak 1998. Sejumlah 1,6 miliar pekerja informal, atau separuh dari jumlah pekerja informal di seluruh dunia, mengalami pengurangan pendapatan. Penutupan sekolah-sekolah membuat 1,57 miliar anak, atau 90 persen dari total siswa di seluruh dunia, tidak dapat menghadiri kelas secara fisik dalam suatu kurun waktu pada tahun ini.

Di tengah kondisi yang belum pernah terjadi, *Laporan Kota-Kota Dunia 2020* ini mengajukan argumen bahwa kota tetap berperan penting dalam pewujudan pembangunan yang berkelanjutan. Peran ini dikukuhkan oleh serangkaian kesepakatan PBB yang secara keseluruhan menjadi agenda pembangunan global. Salah satu yang utama adalah Agenda Baru Perkotaan (NUA). Agenda ini menekankan pentingnya urbanisasi yang berkelanjutan, di mana pilihan orang-orang untuk tinggal di kawasan perkotaan dapat berkontribusi pada kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, keadilan sosial, penguatan institusi-institusi sipil dan budaya. Urbanisasi yang berkelanjutan akan berperan penting dalam upaya global untuk membangun kembali secara lebih baik dari dampak pandemi COVID-19 serta kembali pada jalur yang benar dalam pencapaian TPB

dan target-target Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim.

Temuan Utama

Pentingnya peran kota telah dikukuhkan dalam kebijakan pembangunan global: Sejak 2015, masyarakat internasional telah mengadopsi beberapa kesepakatan untuk memandu pembangunan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (atau yang lebih dikenal sebagai TPB), Persetujuan Paris, Agenda Baru Perkotaan, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Frameworks on Disaster Risk Reduction (SFDRR)), dan Agenda Aksi Addis Ababa (Addis Ababa Action Agenda (AAAA)). Berbagai komitmen global tersebut secara kolektif telah membentuk tulang punggung untuk kebijakan, rekomendasi, tujuan, target, dan indikator pembangunan internasional untuk Negara-negara Anggota. Di setiap dokumen tersebut, pemerintah daerah diakui sebagai mitra penting untuk mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan. Peran dari kota-kota dirajut melalui berbagai kesepakatan ini, yang paling menonjol adalah TPB 11 dan dimensi perkotaan dari TPB.

Agenda Baru Perkotaan (NUA) berkaitan erat dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Mengakui bahwa TPB merupakan serangkaian tujuan menyeluruh yang membutuhkan peta jalan yang lebih detail, NUA menyediakan kerangka spasial untuk mencapai sejumlah tujuan dan target. NUA memperluas sarana implementasi TPB 11 yang relatif terbatas dengan menggali lebih jauh proses-proses yang dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih baik, seperti kebijakan perkotaan nasional (KPN), kerangka regulasi, rencana tata ruang, dan kerangka pembiayaan daerah.

Dunia semakin mengota: Masih sangat awal untuk mengetahui jika pengalaman pandemi di tahun 2020 ini dapat berimplikasi pada perubahan demografi. Secara prospek jangka panjang diprediksi bahwa dunia akan terus menjadi kota pada dekade berikutnya, dari sekarang 56,2 persen menjadi 60,4 persen di tahun 2030. Setiap wilayah juga diprediksi akan menjadi kota dalam kurun waktu 10 tahun berikutnya, meskipun kawasan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi akan sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan perkotaan. Sekitar 96 persen pertumbuhan kota akan terjadi di kawasan yang belum berkembang di Asia Timur, Asia Selatan, dan Afrika, dengan tiga negara—India, Tiongkok, dan Nigeria—berkontribusi sebesar 35 persen dari total penambahan penduduk kota dunia dari 2018 hingga 2050.

Kota mengonsumsi lahan lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya: Perebakan kota (*urban sprawl*) menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Perluasan kota seperti ini awalnya dikaitkan dengan negara-negara maju yang lahannya masih luas seperti Amerika Utara dan Australia. Akan tetapi, sekarang fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Baik penyebaran secara horizontal, urbanisasi yang tersebar maupun peri-urbanisasi, luas fisik kawasan perkotaan meningkat lebih pesat daripada jumlah penduduknya, sehingga membutuhkan lahan lebih banyak untuk pembangunan perkotaan. Perluasan kawasan perkotaan yang tidak terkendali memiliki dampak yang sangat besar terhadap konsumsi energi, emisi gas rumah kaca (GRK), perubahan iklim, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Studi-studi dari sampel kota global menunjukkan bahwa di antara 1990-2015, kota-kota di negara maju memiliki penambahan kawasan perkotaan sebesar 1,8 kali, sedangkan penduduknya bertambah 1,2 kali. Dengan demikian, hal ini mengimplikasikan bahwa rasio perluasan kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan penduduk kota telah meningkat sebesar 1,5 kali.

Migrasi merupakan pendorong utama dalam urbanisasi: Satu dari tujuh orang di dunia adalah migran. Saat ini, terdapat 763 juta migran internal dan 272 juta migran internasional. Kekuatan demografi ini telah menjadi kontributor utama dari urbanisasi, baik itu perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam satu negara maupun sekelompok migran internasional di kota-kota global. Migran internasional menyumbang sepertiga dari pertumbuhan kota di negara maju semakin mentransformasikan kota menjadi ruang yang heterogen, multietnis, multikultur, dan menggunakan berbagai bahasa. Di hub migrasi seperti di Brussels, Dubai dan Miami, jumlah migran luar negeri justru

melebihi daripada penduduk asli. Namun, kota-kota juga menjadi garis terdepan dalam migrasi yang tidak teratur, mulai dari pendatang Mediterania hingga Amerika Tengah yang berupaya untuk menyeberangi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko hingga Rohingnya di penampungan pengungsi di Bangladesh.

***Ketimpangan merupakan tren yang tetap terjadi di kawasan perkotaan*:** Ketimpangan dan eksklusi yang semakin meningkat merupakan tren yang terus terjadi di kawasan perkotaan. Bagi lebih dari dua per tiga penduduk kota di dunia, kesenjangan pendapatan telah meningkat sejak 1980. Jurang antara yang semakin melebar menandakan sekitar 2,9 milyar penduduk tinggal di kota dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang lebih lebar daripada satu generasi yang lalu. Di dunia yang semakin mengota, sifat dari kesenjangan akan sangat bergantung pada apa yang terjadi di kota. Saat ini, banyak kota di Amerika, Inggris, Amerika Latin, Kepulauan Karibia, dan Afrika memiliki tingkat kesenjangan yang lebih tinggi dari negara masing-masing. Kesenjangan dapat menjadi alasan di balik adanya kericuhan sosial, sebagaimana yang terjadi di Chile di tahun 2019.

***Perumahan yang terjangkau masih sulit diwujudkan*:** Perumahan terjangkau bukan masalah yang dihadapi di kota-kota mahal saja; tapi merupakan tantangan global yang mempengaruhi semua rumah tangga. Di tingkat global, calon pembeli rumah harus menabung lebih dari lima kali penghasilan setahun untuk dapat membeli rumah standar. Rumah tangga penyewa harus menghabiskan 25 persen penghasilan bulanan untuk membayar uang sewa. Tingginya tingkat ketidakterjangkauan menjadikan perumahan tidak layak dan permukiman kumuh sebagai opsi satu-satunya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Saat ini, 1,6 milyar penduduk atau 20 persen dari populasi dunia tinggal di rumah yang tidak layak, yang mana satu milyar di antaranya tinggal di permukiman kumuh dan hunian informal. Di negara maju, jumlah gelandangan atau mereka yang tidak memiliki rumah sedikit, tetapi menjadi aspek yang signifikan di tengah pemandangan kota maju.

***Kawasan perkotaan menanggung beban awal pandemi COVID-19*:** Bahkan ketika virus korona telah tersebar di kawasan perdesaan, pandemi ini awalnya merupakan fenomena perkotaan karena episentrum wabah berada di kota-kota besar seperti Wuhan, Milan, Madrid, New York, Guayaquil, dan Manaus. Ketika dunia jatuh ke jurang resesi, kawasan perkotaan, yang menyumbang 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia, akan terdampak di beberapa hal. Pertama, merosotnya perekonomian global berimplikasi terhadap semakin sedikitnya dana yang tersedia untuk pembangunan perkotaan seperti air, sanitasi, sistem transportasi publik, perbaikan kampung kumuh, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan fasilitas kesehatan untuk merespon pandemi saat ini dan masa mendatang. Diperkirakan pendapatan pemerintah daerah akan berkurang sebesar 15-25 persen di tahun 2021, sehingga dapat mengurangi anggaran untuk pelayanan dasar di kota. Penurunan pendapatan ini akan lebih banyak dialami oleh kota-kota di negara berkembang, karena kota-kota tersebut belum memiliki infrastruktur penting dan sistem kesehatan yang memadai.

Pesan Utama

***Implementasi NUA harus menjadi prioritas global*:** Di tengah tantangan yang semakin kompleks, NUA sebagai sarana implementasi TPB 11 dan dimensi perkotaan dalam TPB menawarkan peta jalan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kemakmuran yang berkeadilan. Empat tahun sejak NUA disahkan di Quito, UN-Habitat telah menyiapkan alat dan metode untuk memandu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan kerangka kerja kota yang terencana, dikelola, diatur, diregulasi dan dibiayai dengan baik.

Kota dan perluasan kota yang terencana dapat membatasi konsumsi lahan yang berlebihan: Peraturan zonasi yang fleksibel yang selaras dengan kondisi sosioekonomi serta peraturan bangunan gedung dan rencana umum merupakan beberapa contoh alat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kota untuk mengatasi perebakan kota. Kota dapat dan harus membangun jejak lingkungan terbangunnya untuk

mengakomodasi bertambahnya penduduk, tetapi kota tidak harus menumbuhkan jejak tersebut secara tidak proporsional.

Kota dapat merespon ancaman perubahan iklim dengan aksi lokal: Urbanisasi menawarkan berbagai peluang untuk menjalankan strategi mitigasi dan adaptasi untuk membatasi kenaikan suhu global sebesar 1,5^{0}C. Kota-kota menghasilkan 70 persen dari total emisi karbon global dan mengonsumsi dua pertiga energi di dunia. Untuk merespon dengan proaktif, kota-kota telah mengambil langkah untuk inventarisasi emisi dan mengadopsi target pengurangan emisi. Kawasan perkotaan yang telah mengadopsi guna lahan kompak dan campuran mampu mengurangi penggunaan sumber daya dan emisi GRK per kapita. Ketika kota mulai memperkenalkan solusi berbasis alam (*nature-based solutions* (NBS)) ke dalam perencanaan dan pengelolaan kota, sistem perkotaan dapat mengambil manfaat dari berbagai jasa ekosistem, termasuk penyerapan karbon, regulasi iklim lokal, penampungan air hujan, serta penjernihan air.

Kota tujuan pendatang harus mengintegrasikan para migran untuk mendorong keberagaman, kemakmuran, dan kewirausahaan: Para pendatang tidak boleh dilihat sebagai beban bagi kota, tetapi sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Pendatang asing yang terpelajar serta pendatang, baik lokal maupun asing, yang kurang terpelajar, dapat membawa semangat kewirausahaan, keragaman budaya, dan mendorong peluang baru jika diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang. Penduduk kota yang bertambah bukan berarti menyingkirkan pekerja penduduk asli dari pasar lapangan kerja. Tidak ada angka maksimal pekerjaan yang tersedia untuk diperebutkan. Migran justru membawa keragaman kemampuan, kapasitas, perspektif, jejaring, dan modal yang akhirnya akan "mengembangkan kondisi yang lebih inovatif" dan menciptakan lebih banyak peluang bagi semua.

Mengatasi perumahan yang tidak terjangkau serta kesenjangan di perkotaan masih menjadi prioritas yang mendesak: Kota-kota tidak akan mampu untuk menawarkan peluang dan menciptakan nilai jika para pekerja tidak mendapatkan gaji yang layak, yang memungkinkan mereka untuk mengakses rumah layak dan layanan lainnya. Kebijakan seperti upah minimum dan formalisasi pekerja informal dapat meningkatkan pendapatan. Meskipun demikian, beberapa kebijakan lainnya seperti bantuan tunai, juga menjadi ruang lingkup program pemerintah pusat. Hunian yang tidak layak dan tidak terjangkau dapat diatasi dengan perubahan kerangka peraturan untuk menjawab permasalahan mahalnya harga lahan, bahan bangunan, dan pembiayaan perumahan yang mencegah penduduk kota untuk memiliki rumah atau membayar biaya sewa yang terjangkau dan tetap terlindungi dari penggusuran. Upaya pewujudan tujuan mulia ini termasuk dengan meningkatkan pasokan ketika terjadi kekurangan jumlah rumah, subsidi akses untuk perumahan formal jika pasokan rumah mencukupi, serta mengatur pasar hunian untuk menghindari aksi-aksi spekulatif.

Pandemi COVID-19 tidak menandai akhir dari kota: Meskipun ada ketakutan bahwa kepadatan di kota berkorelasi dengan penyebaran wabah, kota-kota yang sukses menangani wabah, seperti Seoul, Singapura, Tokyo, bahkan New York tergolong relatif padat. Kota, sebagai episentrum awal pandemi, mampu mengelola penyebaran virus, meskipun saat itu virus telah tersebar di desa dan komunitas yang lebih kecil. Ketika pakar epidemiologi semakin memahami sifat dari COVID-19 ini, ada konsensus yang terbangun bahwa kebersesakan, bukan kepadatan, adalah faktor utama penyebaran virus di kota. Di kawasan perkotaan, mengatasi kebersesakan dan menjaga tingkat kebersihan di rumah, toko, tempat kerja, dan transportasi publik adalah hal yang penting dilakukan dalam mengatasi pandemi. Panduan kesehatan masyarakat ini merupakan sebuah tantangan di hunian informal, yang lebih rentan mengalami kebersesakan dan sanitasi tidak layak. Di kasus ini, pemerintah daerah harus bekerja untuk menyediakan infrastruktur sanitasi di ruang publik untuk memitigasi risiko kesehatannya. Kesehatan harus menjadi prinsip yang harus diikuti dalam perencanaan dan pengelolaan kota. Di lain pihak, pandemi ini telah mendorong terjadinya inovasi di kota seperti penutupan jalan untuk mobil dan memungkinkan orang untuk berjalan kaki, bersepeda, bahkan untuk makan.

Skyline dan pemandangan Kota Global Bonifacio, Metro Manila, Filipina

Bab 2 Mengurai Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Ketika kota direncanakan dan dikelola dengan baik, kota menciptakan nilai yang merupakan keseluruhan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kondisi yang tak berwujud (kelembagaan, tata kelola, politik, budaya, dan persepsi masyarakat) yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk secara lebih bermanfaat dan nyata. Dengan semakin meningkatnya pemahaman para pembuat kebijakan di setiap tingkatan pemerintahan, urbanisasi yang direncanakan dengan baik dapat berimplikasi terhadap hasil pembangunan yang baik serta dapat menjadi alat ungkit untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan semua pihak. Kota-kota bukan hanya sebagai tempat orang-orang berkumpul, tetapi sebagai arena produksi ekonomi dan budaya serta tempat pembangunan lingkungan dan sosial.

Kawasan perkotaan merupakan tempat yang memberikan peluang bagi terwujudnya aspirasi. Hal ini yang memotivasi orang-orang untuk bermigrasi dari desa ke kota bahkan hingga meninggalkan negara asalnya untuk menuju kota-kota global. Karena itu, narasi tentang kota telah bergeser: dari yang awalnya memandang kota sebagai tantangan yang harus ditangani menjadi kota sebagai alat penting untuk meningkatkan dampak pembangunan. Terdapat peningkatan pemahaman bahwa kota-kota mampu menciptakan dan menjaga nilai.

Temuan Utama

***Nilai dari urbanisasi harus dapat dirasakan oleh setiap kelompok masyarakat yang hidup di kota*:** Kota merupakan kawasan yang sangat heterogen dan dihuni oleh masyarakat yang beragam. Kawasan hunian bagi penduduk yang mampu kadang terletak berdampingan dengan permukiman kumuh yang dihuni penduduk miskin. Para pemuda yang tengah mencari peluang pekerjaan baru boleh jadi akan menaiki bus dan duduk di sebelah orang lanjut usia yang mencari layanan kesehatan yang berkualitas. Penduduk asli, pengungsi, pendatang, dan mereka yang memiliki identitas dan orientasi yang berbeda hidup berdampingan di kota. Nilai dari urbanisasi harus dapat dirasakan oleh setiap kelompok penduduk, mengingat setiap kelompok

memiliki perbedaan prinsip dalam hidup di perkotaan, terkadang berselisih dan terkadang harmoni.

Ekonomi perkotaan menggerakkan kinerja ekonomi nasional: Ekonomi global merupakan fungsi barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan di antara kota-kota dan metropolitan. Ekonomi berbasis sumber daya membutuhkan pelabuhan dan simpul logistik untuk memindahkan barang. Ekonomi berbasis konsumsi mengelompokkan kegiatan ekonominya di kota. Ekonomi berbasis pengetahuan terus berkembang dekat dengan kawasan perkotaan.

Urbanisasi tidak memiliki ancaman langsung terhadap lingkungan hidup: pembangunan kota yang direncanakan dengan baik dan kompak mampu menghasilkan nilai lingkungan yang sangat besar. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya berarti lebih sedikit energi yang dikonsumsi. Menghindari konsumsi lahan dapat melindungi kawasan lindung dan pertanian. Kota juga dapat mendorong keanekaragaman hayati melalui penghijauan kota. Pada akhirnya, kawasan perkotaan hanya sebesar 2 persen dari total lahan di dunia, yang berarti bahwa sebagian besar penduduk dunia memiliki jejak ekologis yang relatif kecil, sehingga konservasi kehidupan liar dan keanekaragaman hayati tidak terganggu.

Kawasan perkotaan dapat mendorong inklusi sosial dan mengurangi kemiskinan: Beberapa komitmen perkotaan yang transformatif seperti memastikan "hak atas kota" atau "kota untuk semua" membangkitkan nilai sosial dari urbanisasi. Selama berabad-abad, manusia telah berkumpul di kota untuk mengejar aspirasi dan mimpinya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif. Namun, mendorong nilai sosial dari urbanisasi yang berkelanjutan bukan lah sebuah konsekuensi alami dari pertumbuhan ekonomi di kota, karena peningkatan investasi di kota tidak secara langsung dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangi angka kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan kebijakan afirmatif yang memungkinkan penduduk miskin kota atau kelompok rentan dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Kelembagaan sosial dan budaya yang kuat merupakan elemen penting dalam pewujudan urbanisasi yang berkelanjutan: Kelembagaan yang kuat -terdiri atas konstitusi, peraturan perundang-undangan, norma sosial, adat, dan tradisi- menjadi struktur dasar dalam pewujudan urbanisasi yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada kesejahteraan yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup. Nilai urbanisasi yang sifatnya tak berwujud ini menimbulkan rasa bangga akan persepsi kotanya secara keseluruhan. Ketika seluruh kelembagaan ini berfungsi dengan baik, maka setiap penghuni kota akan memiliki identitas sipil sebagai penduduk kota.

Pesan Utama

Urbanisasi akan terus menjadi penggerak pertumbuhan global: Namun, dikarenakan tingginya laju urbanisasi, proses ini membutuhkan perencanaan dan tata kelola yang efektif jika nilai dari urbanisasi ingin diwujudkan sebagai proses yang transformatif. Berbagai kebijakan di tingkat internasional seperti agenda pembangunan global dapat memandu proses ini. Akan tetapi, proses tersebut harus diadaptasikan dengan konteks lokal untuk menjamin koherensi dari kebijakan. Perspektif pemerintah daerah harus diintegrasikan di dalam berbagai diskusi internasional karena perannya yang penting dalam pencapaian agenda global.

Kemakmuran ekonomi perkotaan dapat menjadi landasan bagi negara-negara untuk mewujudkan TPB dan NUA serta untuk pemulihan dampak dari resesi global akibat COVID-19: Di tengah ketiadaan ekonomi perkotaan yang sehat dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menjadi sangat sulit, terutama dalam mendorong peluang ekonomi bagi masyarakat miskin perkotaan. Dengan kebijakan makroekonomi yang tepat, urbanisasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi saluran bagi pasar global dengan menciptakan lingkungan yang produktif yang menarik investasi luar

negari dan mendorong efisiensi ekonomi. Pemulihan ekonomi perkotaan menjadi hal yang penting untuk mengeluarkan negara-negara dari resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19.

***Integrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam pembangunan perkotaan*:** Kota yang berkelanjutan menawarkan nilai lingkungan, baik itu melalui lingkungan terbangun maupun yang masih alami. Ketika dirancang dengan komponen adaptasi, mitigasi, dan ketangguhan terhadap perubahan iklim, kota, mulai dari bangunan hingga ruang terbukanya, mampu menciptakan masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai lingkungan hidup, seperti keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon. Jika seluruh upaya tersebut digabungkan, maka kota tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menyediakan solusi terhadap dampak dari perubahan iklim.

***Nilai sosial dari urbanisasi dapat dirasakan dengan melindungi hak dari kelompok rentan*:** Nilai sosial di kota dapat terlihat ketika kota mempromosikan kesetaraan gender dan memastikan partisipasi masyarakat luas. Memberdayakan kelompok rentan seperti penduduk permukiman kumuh, gelandangan, penduduk asli, LGBTQ$_{2+}$, dan pemuda menjadikan kota yang lebih berkeadilan bagi semua. Pada akhirnya, urbanisasi yang berkelanjutan dapat dirasakan melalui adanya kebudayaan perkotaan yang tak berwujud. Karena kota-kota dunia semakin heterogen, semakin besar pula peluang untuk memasukkan keragaman budaya sebagai bagian dari identitas (*branding)* suatu kota, sehingga menarik yang terbaik dan terpintar. Nilai yang tak berwujud seperti ini juga dapat mendukung terwujudnya sirkulasi antara nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial secara positif.

Bab 3 Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan: Kemakmuran Inklusif dan Peluang Bagi Semua

Kota bukan sekedar simbol dari mimpi, aspirasi, dan harapan bagi setiap individu dan masyarakat. Kota adalah katalis utama atau penggerak pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh dunia. Kawasan perkotaan menghasilkan nilai ekonomi yang begitu besar karena kota merupakan tempat produksi, inovasi, dan perdagangan global, yang menghasilkan lapangan kerja di sektor formal dan informal. Bab ini tidak hanya menyampaikan ringkasan terkait mekanisme fundamental yang memungkinkan kota sebagai pendorong pertumbuhan, tetapi juga menunjukkan berbagai risiko yang mungkin timbul di dalam struktur suatu kota yang menghasilkan nilai ekonomi. Risiko tersebut semakin diperbesar dengan adanya pandemi virus korona serta dampak negatifnya terhadap sosial dan ekonomi.

Temuan Utama

***Kawasan perkotaan merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi*:** Kota menghasilkan nilai ekonomi di setiap tingkatan ruang – lokal, regional, dan nasional. Kota merupakan iklan untuk menarik investasi asing karena menjadi lokasi tempat berkumpulnya faktor-faktor terbesar penarik investasi – rezim perdagangan, kelembagaan yang berkualitas, tenaga kerja, dan infrastruktur. Melalui keterkaitan desa-kota, aktivitas ekonomi di perkotaan memiliki dampak yang signifikan dalam kontinum perkotaan-perdesaan (*urban-rural continuum*). Sistem perkotaan juga merupakan produksi pengetahuan yang terintegrasi dan gabungan berbagai jaringan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Berbagai limpahan yang positif seperti difusi inovasi dan teknologi dari kota ke wilayah sekitarnya mampu meningkatkan pertumbuhan regional dan nasional.

***Urbanisasi yang berkelanjutan merupakan alat untuk menciptakan kemakmuran yang inklusif*:** Nilai urbanisasi berkelanjutan terletak pada kontribusinya terhadap lapangan kerja yang produktif. Kota-kota berkelanjutan mendorong terciptanya lebih banyak peluang ekonomi bagi semua, termasuk kelompok rentan dan penyandang difabel. Hal ini dapat menjamin terwujudnya potensi produktivitas setiap penduduknya.

Pembatasan kegiatan akibat COVID-19 di kawasan perkotaan berdampak luas melampaui batas

administrasi kota: Ekonomi nasional dan kota tengah terpuruk akibat pandemi, menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar serta berkurangnya pendapatan, terutama di sektor informal. Masyarakat yang hidup di hunian informal dan permukiman kumuh sudah lama termasuk kelompok rentan ekonomi karena mereka sangat mengandalkan pendapatan harian dari sektor informal. Sebagai contoh, jutaan pekerja informal di India kembali ke desa-desa ketika lapangan pekerjaan di kota semakin langka. Hingga Mei 2020, setidaknya 170.000 penduduk kota di Peru meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk kembali ke desa. Di Kenya, kesulitan ekonomi akibat pandemi telah menyebabkan banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya sewa rumah, berpindah ke rumah yang lebih murah, atau relokasi ke desa-desa.

Interaksi antarmanusia yang begitu rapat, yang merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, juga berisiko, seperti yang ditunjukkan pandemi COVID-19: Risiko tersebut membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan cepat serta merespon di tingkat lokal, nasional, dan global untuk jangka panjang. Kapasitas untuk merespon risiko tersebut dengan cepat didorong oleh tata kelola yang baik serta kapasitas fiskal yang sehat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pusat. Kota yang direncanakan dan dikelola dengan baik telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk merespon ancaman bencana, termasuk bencana kesehatan.

Ekonomi informal telah menjadi tulang punggung di negara-negara berkembang: Lapangan kerja informal menyerap lebih dari separuh pekerja di sektor non-pertanian di sebagian besar kawasan di negara berkembang: 82 persen di Asia Selatan, 66 persen di Afrika Sub-Sahara, 65 persen di Asia Timur dan Tenggara, 51 persen di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, 45 persen di Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, sifat dari ekonomi informal juga merupakan tantangan besar terkait hak pekerja. Contohnya, ekonomi informal berskala mikro, kecil, dan menengah yang menyumbang 80 persen dari total usaha di seluruh dunia, umumnya tidak terdeteksi dan tersentuh kebijakan pemerintah, seperti program pemerintah untuk melindungi pekerja, dukungan pembiayaan usaha, serta penyediaan tambahan pendapatan bagi pekerja informal.

Hak atas properti, peraturan tata guna lahan, dan sistem transportasi yang buruk membatasi pemanfaatan urbanisasi di kota-kota di negara berkembang: Di berbagai negara berkembang dan maju, hak atas properti dan/atau peraturan penggunaan lahan yang tidak didefinisikan dengan baik memiliki dampak ekonomi yang besar yang dapat menghambat penciptaan kemanfaatan. Adanya defisit dalam kelembagaan ini berimplikasi terhadap tingginya harga rumah dan kota yang kurang inklusif. Selain itu, sistem transportasi perkotaan yang kurang memadai juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya perjalanan dan menjadikan kota kurang inklusif.

Tata pemerintahan provinsi dapat memfasilitasi atau sebaliknya menghambat terwujudnya ekonomi aglomerasi: Aglomerasi perkotaan, yang juga merupakan bagian dari sistem perekonomian yang menghubungkannya dengan aglomerasi lainnya, kota kecil, dan desa, umumnya adalah entitas ekonomi yang berdiri sendiri. Namun, pertumbuhan ekonomi regional di sebagian besar kawasan seringkali terdampak negatif akibat beberapa fungsi yang tumpang tindih, skala ekonomi yang tidak optimal, dan fragmentasi kebijakan publik. Mendorong tata kelola metropolitan dan mekanisme kolaborasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah merupakan kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi dari urbanisasi.

Pesan Utama

Perencanaan kota dan wilayah yang didukung oleh struktur pemerintahan yang memadai akan meningkatkan nilai ekonomi dari urbanisasi: Cara kawasan perkotaan dipilah dan dikelola memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan nilai ekonomi dari urbanisasi. Urbanisasi yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik dapat menghilangkan potensi skala ekonomi dan efek aglomerasi. Oleh karena itu, ruang di kota-kota harus dialokasikan secara efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus berlangsung.

Pusat kota Nairobi, Kenya © UN-Habitat/Julius Mwelu

***Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kapasitas produksi di perkotaan*:** Kota-kota dapat meningkatkan kapasitas produktivitas dengan mereformasi kerangka hukum dan regulasi serta mengintegrasikan perencanaan dan perancangan kota dengan berbagai upaya penyediaan jaminan bagi pekerja, terutama pekerja di sektor informal.

***Pergeseran paradigma perencanaan dan pengelolaan kota terkait ekonomi informal sangat diperlukan*:** Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif akan sulit tercapai di negara-negara berkembang tanpa adanya upaya yang memadai untuk memfasilitasi transisi para pekerja dan unit ekonomi di sektor informal ke dalam ekonomi formal.

***Ketika semua kota membuat kemajuan dalam pencapaian TPB dan NUA, maka nilai ekonomi dari urbanisasi juga semakin besar*:** Kota-kota dapat menjadi katalis yang efektif bagi inklusivitas, pembangkit pertumbuhan ekonomi yang adil, dan tempat yang dapat mendorong produktivitas berbagai kelompok masyarakat dapat diwujudkan untuk kebaikan masyarakat. Agar dampak ini dapat terus dijaga, penguatan kapasitas produktivitas menjadi kunci penting. Kota-kota harus memberikan peluang yang setara untuk setiap warganya agar dapat mengakses pendidikan yang layak dan meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi secara produktif di ekonomi lokal.

***Pertumbuhan ekonomi dan potensi tingkat konsumsi di kota harus dikelola agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan*:** Pemerintah dapat mengevaluasi kembali pola pertumbuhan konsumsi, terutama di era pandemi COVID-19 yang telah mengganggu pola konsumsi yang biasa dilakukan seperti penerbangan jarak pendek dan rantai pasok barang dan jasa yang banyak menghasilkan emisi karbon. Pemerintah juga perlu menjamin kemakmuran bersama dan kesempatan bagi semua.

***Tingkatkan kepadatan tetapi cegah kebersesakan*:** Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa kepadatan di perkotaan tidak berkaitan langsung dengan risiko transmisi virus. Kota-kota umumnya rentan karena cara penduduk kota tinggal, bekerja, dan

bepergian. Kepadatan telah meningkatkan pelayanan dasar di era pandemi COVID-19, yakni dengan efisiensi penyediaan pelayanan publik yang esensial seperti layanan kesehatan dan infrastruktur penting lainnya. Di lain pihak, kepadatan penduduk yang tidak direncanakan dengan baik dan cenderung menciptakan kebersesakan yang dapat meningkatkan risiko transmisi virus dengan cepat.

***Kota dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas yang tinggi bahkan ketika menghadapi transisi demografi*:** Kota-kota tengah menghadapi pergeseran demografi, mulai dari meningkatnya jumlah pemuda hingga "*silver tsunamis*" yang dikaitkan dengan penduduk yang menua. Kebijakan imperatif (seperti keluarga berencana, pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja) serta proses perencanaan kota dan wilayah, karenanya, perlu dilakukan berdasarkan data yang akurat dan valid, misalnya dengan menggunakan data terdisagregasi. Metode ini menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi perkotaan serta memastikan kota ramah usia yang tidak mengabaikan seorang pun.

***Kerangka tata kelola, kelembagaan, kebijakan, serta peraturan harus selaras dengan kenyataan di lapangan sehingga tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi*:** Pengendalian pembangunan perlu dinilai secara berkala untuk mengenal relevansi dan responnya terhadap kebutuhan sekarang. Pemerintah daerah harus menyediakan hak milik atas properti yang jelas untuk memfasilitasi fungsi pasar tanah, perumahan, serta bangunan komersil yang efisien. Upaya tersebut merupakan kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang kompak dan terintegrasi.

***Keberlanjutan dan produktivitas dapat berjalan beriringan*:** Meskipun membangun kota yang lebih terjangkau dan inklusif serta meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup di kota merupakan tujuan tersendiri, upaya tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang penting. Di lain pihak, kota-kota yang menawarkan kualitas hidup yang buruk umumnya memiliki pertumbuhan yang terbatas jika dibandingkan dengan potensinya. Pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan insentif kepada perusahaan dan penduduk untuk meminimalisasi biaya sosial yang dihasilkan, misalnya kontribusi terhadap kemacetan atau polusi.

***Pembiayaan daerah yang efektif merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan yang berkeadilan*:** Kerangka dan instrumen pembiayaan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan dapat memperkuat kapasitas dan sistem fiskal daerah yang dapat menciptakan dan menjamin manfaat ekonomi dari pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah daerah di negara-negara berkembang perlu membangun kapasitas produktivitas serta memanfaatkan sumber daya finansial di masing-masing daerah sambil menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan. Pada sektor kegiatan yang memungut pajak dan mengenakan tarif, pertimbangan keadilan seperti penerimaan daerah secara progresif semakin diperlukan guna menjamin kemakmuran yang inklusif.

Bab 4 Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan: Membangun Perkotaan yang Tangguh

Saat ini perdebatan internasional bercirikan optimisme perkotaan, yang mana urbanisasi berkelanjutan dikenal sebagai kekuatan transformatif untuk memanfaatkan nilai lingkungan. Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, Agenda Baru Perkotaan (NUA), Persetujuan Paris dan SFDRR tertanam dalam optimisme perkotaan. Terdapat pula kesepakatan implisit yang terjadi di tingkat lokal yang akan menjembatani jurang antara kontribusi yang diinginkan dari negara dan pengurangan emisi aktual yang diperlukan untuk menjaga perubahan suhu rata-rata global tetap dalam tingkat aman. Penerapan agenda pembangunan global yang mengantarkan Dekade Aksi untuk perwujudan TPB, menghadirkan peluang yang pragmatis di mana pelaku perkotaan harus menunjukkan efektivitas tindakan yang sudah ada.

Urbanisasi tidak terencana dan tidak terkelola merupakan ancaman bagi kelestarian lingkungan, termasuk perebakan kota yang tidak terkendali,

perubahan guna lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak dapat dikembalikan (*irreversible*), pola konsumsi sumber daya dan energi yang intensif, serta tingkat polusi dan emisi karbon yang tinggi. Namun, bila direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi memberikan peluang untuk mengatasi tantangan dan berkontribusi pada nilai lingkungan melalui inovasi energi, pola permukiman berkelanjutan, perubahan perilaku dan gaya hidup manusia, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan terkait lingkungan, serta efisiensi sumber daya.

Temuan Utama

***Solusi berbasis alam (NBS) merupakan pendekatan terpadu untuk menyampaikan nilai lingkungan melintas kontinum perkotaan-perdesaan, namun masih ada tantangan yang harus diatasi*:** Di daerah perkotaan, NBS dikaitkan dengan efek positif alam perkotaan dan kesehatan manusia. Namun, saat menerapkan NBS untuk lingkungan perkotaan, masih terdapat jurang antara pengetahuan tentang efektivitas solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang berbeda, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tantangan implementasi tertentu terkait persaingan lahan, peraturan tumpang tindih, serta integrasi infrastruktur yang ada. Selain itu, terdapat kelangkaan informasi terkait pemahaman dan status konservasi infrastruktur hijau dan biru yang melintasi berbagai wilayah dunia.

***Beberapa kebijakan keberlanjutan dan aksi hijau di perkotaan memiliki dampak tak terduga*:** Meskipun proyek lingkungan dan konservasi memberi nilai tambah lingkungan perkotaan, kelompok marginal semakin terpinggirkan oleh perubahan kondisi tempat tinggal, akibat kenaikan harga rumah atau ongkos sewa. Daerah perkotaan menghadapi tantangan baru dengan adanya gentrifikasi hijau dan iklim di mana masyarakat dikucilkan dari akses ke perumahan dan ruang publik tetapi juga dari lingkungan yang aman dan terlindungi. Penilaian mengenai inisiatif penghijauan perkotaan menunjukkan hasil lingkungan yang positif (peningkatan ruang hijau, pengurangan polusi), namun juga dikaitkan dengan penggusuran penduduk berpenghasilan rendah.

***Beragam tantangan lingkungan yang saling terhubung mempengaruhi kehidupan di perkotaan yang berkembang pesat*:** Hal ini termasuk kebutuhan yang terus tumbuh untuk mengakses sumber daya serta menyediakan infrastruktur dan layanan publik untuk menopang kehidupan perkotaan, peningkatan insiden risiko lingkungan terkait dampak perubahan iklim dan polusi udara, ancaman terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan pertumbuhannya penting untuk memungkinkan transformasi struktural pengurangan emisi. Di AS, perluasan *Wildland-Urban Interface* (WUI) berkontribusi memperparah kebakaran hutan akibat perebakan kota yang merambah hutan. Di Eropa, satu dari setiap delapan (atau 13 persen) kematian diakibatkan kualitas lingkungan yang buruk.

***Salah satu tantangan dalam pengelolaan lingkungan kota sangat terkait dengan kondisi dan latar belakang kelompok tertentu*:** permukiman kumuh dan informal menderita akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam secara tidak proporsional dibandingkan dengan permukiman lain. Meskipun ada peningkatan dalam cakupan layanan dasar global selama lebih dari dua dekade, yang memiliki manfaat lingkungan terutama bagi penduduk kampung kumuh, masih dibutuhkan lebih banyak tindakan bagi populasi yang paling berisiko terabaikan.

***Mengenali konteks dan mendorong prinsip-prinsip keadilan sangat penting*:** Kebijakan keberlanjutan untuk mengurai nilai lingkungan bergantung pada kemampuan para pelaku untuk mencocokkan pilihan dengan konteks tempat mereka beroperasi. Ada berbagai cara dalam perencanaan, pengelolaan, dan tata kelola kawasan perkotaan yang dapat meningkatkan nilai lingkungan urbanisasi. Namun, langkah ini perlu penyesuaian kondisi spesifik suatu area, sumber daya tersedia, dan potensi bertindak. Memasukkan prinsip keadilan perlu memperhatikan implikasi politik dan sosial akibat dari tindakan yang dimaksudkan untuk mengurai nilai lingkungan dari urbanisasi. Ada 400 inisiatif keberlanjutan di lebih dari 200 kawasan perkotaan, prinsip ini sudah tertanam dalam arus aksi lingkungan di tingkat lokal dalam upaya kota mencapai NUA dan TPB.

***Meskipun dampaknya merusak, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa masa depan perkotaan yang hijau dapat diwujudkan*:** Gangguan pandemi COVID-19 memperburuk beberapa tantangan lingkungan, seperti peningkatan sampah plastik. Di sisi lain, pada puncak karantina wilayah, COVID-19 menyebabkan penurunan emisi karbon secara mendadak dan peningkatan kualitas udara di kota, menggambarkan pengurangan karbon dan lingkungan masa depan yang berkelanjutan yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade.

***Memobilisasi semua jenis data*:** Pergeseran ke ranah evaluasi efektivitas respon perkotaan untuk memanfaatkan nilai lingkungan telah memunculkan minat mobilisasi semua jenis data. Pemanfaatan nilai lingkungan urbanisasi dalam konteks data dan sumber daya yang terbatas juga berarti menggerakkan tindakan strategis melalui kemampuan pemetaan saat ini, mendaftarkan banyak pelaku dan mengidentifikasi jurang antara pengetahuan dan informasi kritis yang ditargetkan menuju bentuk tertentu dari perubahan perkotaan.

Pesan Utama

***Tangani penyebab struktural dari degradasi lingkungan*:** Pemerintah daerah dan pelaku lainnya yang berada di perkotaan perlu mengenali penyebab struktural degradasi lingkungan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam kehidupan masyarakat (karena menyebabkan kerentanan dan mengurangi ketahanan perkotaan). Memanfaatkan nilai lingkungan urbanisasi membutuhkan perencanaan bersama masyarakat, alih-alih perencanaan untuk masyarakat. Penduduk kota memiliki pengetahuan untuk menjalankan keberlanjutan dan ketahanan, serta meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memanfaatkan nilai lingkungan urbanisasi. Pengakuan dari berbagai penyebab kerugian dan bagaimana mereka membentuk pengalaman perkotaan (dikenal sebagai "analisis lintas sektoral" dalam literatur tata kelola perkotaan) merupakan prasyarat menuju keadilan lingkungan dalam lingkup penataan perkotaan. Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan lingkungan lintas sektoral yang mampu mempertanyakan hak istimewa sebagai akar permasalahan lingkungan dan merayakan keberagaman sosial. Pendekatan lintas sektoral juga merupakan kunci utama dalam memahami kebutuhan dan kepedulian berbagai kelompok masyarakat, seperti memfasilitasi inklusivitas otentik/murni.

***Inisiatif penghijauan kota meningkatkan keseluruhan nilai urbanisasi, tetapi memerlukan instrumen memadai agar tidak memperburuk ketimpangan dan kerentanan sosial*:** Inisiatif hijau memiliki tambahan manfaat bersama (*co-benefit*) yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga meningkatkan nilai keseluruhan urbanisasi. Agenda Baru Perkotaan dan TPB 11 menekankan permukiman inklusif dan kerangka kerja untuk membuka kunci nilai lingkungan urbanisasi untuk semua, bukan hanya untuk kelompok elit.

***Nilai lingkungan dari urbanisasi berkelanjutan tidak bisa terwujud tanpa memprioritaskan kebutuhan kelompok terpinggirkan*:** Memprioritaskan kebutuhan sarana bagi yang kurang beruntung menciptakan peluang menyampaikan pandangan mereka di dalam proses perencanaan lokal, yang telah tercermin dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Pemanfaatan nilai urbanisasi berkelanjutan membutuhkan penyuaraan manfaat lingkungan di kawasan perkotaan yang menjangkau setiap sektor penduduk perkotaan, khususnya bagi yang kurang beruntung. Masyarakat miskin perkotaan harus terwakili dan kebutuhan mereka diprioritaskan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik yang terkait dengan ruang kota bersama (*urban commons*), ruang udara bersama (*atmospheric commons*), ruang publik, atau penggunaan sumber daya lainnya.

***Menerapkan Agenda 2030 dan NUA merupakan kunci untuk menambah nilai lingkungan dari urbanisasi*:** Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan NUA memberikan peluang untuk mencapai program inovasi sejati bagi aksi perkotaan yang memanfaatkan kekuatan transformatif urbanisasi untuk mencapai nilai lingkungan di semua skala. Agenda 2030 memuat target yang mengarahkan aksi lingkungan. Agenda Baru Perkotaan memuat pedoman untuk

mengintegrasikan tujuan pembangunan ke dalam visi menyeluruh kota layak huni dan berkelanjutan.

***Ada banyak inisiatif untuk mewujudkan nilai lingkungan di perkotaan, tetapi hasilnya sangat tergantung pada implementasi di lapangan*:** Nilai lingkungan urbanisasi bergantung bagaimana kota direncanakan dan dikelola. Adanya kepastian hukum dan dikenalinya berbagai sudut pandang merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk semua, persyaratan yang telah tercantum di NUA. Contohnya, peningkatan pemahaman tentang potensi NBS dan infrastruktur hijau dan biru untuk mendapatkan manfaat lingkungan seiring dengan intervensi pengelolaan transportasi konvensional dan sampah perlu diseimbangkan dengan perwujudan bagaimana gentrifikasi hijau melanggengkan proses eksklusi perkotaan.

***Mengakui ruang kota bersama (urban commons) sebagai aset sosio-ekologis*:** Urbanisasi memiliki kekuatan transformatif karena potensinya memungkinkan untuk berbagi modal alam, sosial, dan budaya. Ruang kota bersama termasuk berbagi sumber daya, ruang, dan pengetahuan. Hal itu bisa terkait dengan penyediaan layanan khusus (pengendalian banjir, pangan, air dan area rekreasi), serta perlindungan dan peningkatan ekosistem perkotaan. Inventarisasi aset bersama yang dikembangkan secara kolektif membantu mengenali dan melindungi sumber daya bersama. Pemerintah daerah berperan dalam memediasi pembentukan pengetahuan kolektif yang dapat dimobilisasi untuk melindungi kepentingan bersama. Sumber daya perkotaan bersama merupakan basis bagi proses perancangan kolektif. Pada 2014, Bologna, Italia, mengadopsi Regulasi Bologna terkait Kolaborasi Sipil untuk Ruang Kota Bersama, sebagai alat kolaborasi antara warga, pemerintah daerah, dan organisasi lain yang sepakat merawat dan meregenerasi untuk meningkatkan ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH).

***Pengaruh teknologi bagi aksi lingkungan*:** Teknologi dan data terbuka *(open data*) membuka peluang baru untuk mengaktifkan jaringan kolaboratif di dalam dan antarkota. Program Ruang Publik Global UN-Habitat (Global Public Space Programme) memanfaatkan teknologi seperti *video game* Kobo Toolbox dan Minecraft untuk melibatkan kelompok lebih luas misalnya anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan dan perancangan kota untuk ruang publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses. Potensi digital ini tidak boleh diabaikan, tetapi tidak boleh mengabaikan proses perencanaan kolaboratif yang mapan dan potensi proses ini untuk mewujudkan aksi lingkungan.

***Pemulihan ekonomi hijau dari pandemi COVID-19 dapat memberikan manfaat lingkungan jangka panjang*:** Walaupun karantina wilayah COVID-19 berkaitan dengan pengurangan emisi dan polutan dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya akan sangat kecil, dan tidak akan mengubah jejak emisi rumah kaca global kecuali pemulihan ini memfasilitasi masyarakat untuk mengubah bisnis dan kelembagaan secara intensif. Negara harus memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan berinvestasi pada energi terbarukan yang lebih bersih dan tangguh agar tercapai solusi yang lestari, mengurangi risiko krisis masa depan dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Bab 5 Nilai Sosial Urbanisasi Berkelanjutan: Tidak Meninggalkan Satu Orang pun dan Satu Wilayah pun

Berbagai peluang yang ditawarkan kota memberikan nilai sosial pada urbanisasi. Ketika kota direncanakan dan dikelola dengan baik, kota dapat mengangkat banyak keluarga dari jurang kemiskinan, membebaskan perempuan dari diskriminasi gender, mengarahkan masa depan yang cerah bagi anak-anak dan pemuda, menawarkan kenyamanan dan dukungan bagi penduduk lansia di masa emasnya, serta menyambut para pendatang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Berbagai manfaat dari urbanisasi tersebut merupakan salah satu fitur yang paling penting. Kota merupakan wadah di mana hasil sosial akan ditingkatkan bagi setiap kelompok rentan dan terpinggirkan.

Namun, nilai sosial hanya dapat dirasakan berbarengan dengan nilai tak berwujud lainnya dari urbanisasi. Yang

termasuk kategori ini antara lain kelembagaan -di antaranya supremasi hukum, hak milik, dan sistem partisipasi yang demokratis- yang memungkinkan kota untuk berfungsi secara efektif. Nilai tak berwujud lainnya adalah elemen kebudayaan kota, mulai dari keberagaman latar belakang penduduk hingga kepemilikan aset warisan budaya yang dimilikinya.

Temuan Utama

***Konsep "hak atas kota" mendukung nilai sosial dari urbanisasi*:** "Kota untuk semua" berarti bahwa setiap orang, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan, harus memiliki peluang dan akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan perkotaan. *Piagam Dunia tentang Hak atas Kota* mengakui bahwa kota merupakan sumber penciptaan kesejahteraan, keragaman sosial, politik, dan budaya, serta pelestarian lingkungan. Akses terhadap berbagai peluang tersebut tidak lah sama untuk setiap orang, tetapi pemerintah daerah yang mengedepankan hak atas kota dapat menciptakan dampak yang lebih setara. Contohnya, hak atas kota diabadikan di konstitusi Kota Meksiko, yang mendorong upaya pemerintah daerah untuk memberi bantuan bagi pendatang dari Amerika Tengah ketika mereka melintasi Meksiko.

***Diskriminasi gender merupakan masalah sistematis*:** Perempuan merupakan separuh dari populasi total global, tetapi justru harus menghadapi diskriminasi gender di kota. Perempuan yang termasuk kelompok miskin harus menyediakan waktu sebanyak 12,5 milyar jam kerja domestik tidak berbayar setiap harinya, atau tiga kali lebih banyak daripada laki-laki. Di dunia, laki-laki memiliki 50 persen kekayaan lebih besar daripada perempuan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, beberapa pemerintah daerah telah mengimplementasikan pendekatan feminis di dalam perencanaan kota. Di Kota Girona, Gava, dan Donosti, Spanyol, informasi terkait perspektif gender dimasukkan ke dalam program pembangunan ruang terbuka dan perumahan, sehingga menghasilkan penerangan jalan yang lebih terang di ruang terbuka dan trotoar yang aman. Kesetaraan gender di kota juga didorong oleh organisasi akar rumput, karena beberapa kota telah bertransformasi menjadi tempat yang inklusif akibat upaya dari organisasi komunitas dan masyarakat.

***Perencanaan kota sering kali mengabaikan kebutuhan anak-anak dan pemuda*:** Perencanaan kota tidak menjawab kebutuhan kaum pemuda karena mereka merupakan tanggung jawab dari orang tua masing-masing dan tidak memiliki hak untuk memilih atau berpartisipasi di proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, kebutuhan para pemuda ini tidak menjadi prioritas, seperti yang ditunjukkan ketika pandemi COVID-19, yang berakibat kepada penutupan sekolah dan pembatasan aktivitas yang ketat untuk kegiatan di luar ruang dan interaksi sosial. Namun, kota-kota seperti Calgary, Ghent, Antwerp, dan Rotterdam tengah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan peluang bermain yang ramah anak.

***Jumlah penduduk lansia yang menua di kawasan perkotaan semakin banyak*:** Penduduk berusia 65 tahun ke atas merupakan kelompok usia yang bertambah dengan cepat, dengan proporsi lansia yang semakin banyak yang menetap di kota daripada memilih pensiun di desa atau kampung halaman. Penduduk lansia memiliki kebutuhan khusus, seperti hunian yang mampu mengakomodasi keterbatasan fisik, akses terhadap layanan kesehatan, serta transportasi umum yang aman dan dapat diandalkan. Pemerintah Hong Kong telah mengadopsi prinsip kota ramah usia yang fokus pada pendekatan multidimensi, termasuk layanan kesehatan, dukungan masyarakat setempat, transportasi dan mobilitas, hunian dan lingkungan binaan, lansia yang aktif (*active ageing*), lapangan pekerjaan yang fleksibel, serta dukungan di tingkat keluarga yang dibantu oleh pemerintah daerah. Lebih dari 700 kota merupakan bagian dari Jaringan Global untuk Kota dan Komunitas Ramah Usia (Global Network for Age-friendly Cities and Communities) yang mempromosikan gaya hidup sehat, lansia aktif (*active ageing*), serta upaya peningkatan kualitas hidup bagi penduduk lansia.

***Para pendatang yang miskin menghadapi ketidakpastian di kota*:** Saat di mana terdapat hampir satu miliar penduduk migran di dunia, pemerintah pusat seolah bersikap memusuhi para pendatang tersebut. Migran dari Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin

berani mengambil langkah untuk menyeberangi gurun dan pantai tanpa adanya jaminan akan terintegrasi secara sosial ke negara tujuan mereka. Migran internasional seringkali tidak mendapatkan hak asasi yang paling mendasar dan menghadapi berbagai bentuk eksklusi sosial dan ekonomi. Namun, di berbagai kasus, kota-kota telah membuka pintunya. Montreal menyadari bahwa keragaman budaya merupakan aset yang semakin memperkaya kualitas hidup di kota dan pemerintah kota menyediakan hunian, pendidikan, dan pekerjaan untuk mengintegrasikan migran. Kota tersebut percaya bahwa integrasi pendatang memiliki prinsip tanggung jawab bersama antara pendatang dan warga lokal, yang telah terbukti sebagai salah satu pendekatan yang positif dan memberdayakan.

Urbanisasi dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan: Kawasan perkotaan menawarkan beragam peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatasi jurang antara infrastruktur, seperti perumahan, air, sanitasi, dan transportasi. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat urbanisasi maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Ketika kota direncanakan dan dikelola dengan baik, kota bisa menjadi pejuang pengentasan kemiskinan. Hal ini membutuhkan kebijakan yang memadai, seperti peta jalan penyediaan air dan sanitasi di Provinsi Surkhandarya, Uzbekistan. Kesulitan utama yang dihadapi adalah kebijakan yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi—dan kesejahteraan kota—tidak langsung memberikan dampak terhadap peluang ekonomi dan sosial para penduduk miskin kota. Kebijakan tersebut bahkan dapat memperparah tingkat kemiskinan eksisting, meskipun ekonomi kota membaik. Para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan faktor non-ekonomi dan keadilan yang harus diseimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pandemi COVID-19 semakin memperlebar kesenjangan perkotaan: Upaya karantina wilayah dan berbagai langkah kesehatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 telah menunjukkan dan memperparah kesenjangan di kota. Pekerja informal yang sangat bergantung kepada upah harian menghadapi kesulitan mempertahankan mata pencahariannya. Anak-anak tanpa akses internet tidak dapat menerima pendidikan. Penduduk lansia yang terisolasi harus terkurung di rumahnya masing-masing tanpa adanya kesempatan untuk berinteraksi sosial. Para pendatang kembali (mudik) ke rumahnya dari perjalanan yang melelahkan. Perempuan terpaksa melakukan pekerjaan rumah, merawat anak, dan pekerjaan kantor tanpa adanya akses terhadap sekolah dan pelayanan penitipan anak. Kemiskinan ekstrim diperkirakan meningkat di tingkat global untuk pertama kalinya sejak dua dekade lalu karena dampak signifikan pandemi COVID-19.

Kelembagaan yang efektif merupakan landasan utama dari urbanisasi berkelanjutan: Kelembagaan yang efektif sangat diperlukan dalam tata kelola kota mana pun. Komponen yang tak berwujud ini memiliki dampak yang terlihat di kehidupan penduduk, seperti apakah sampah dan limbah dikelola, apakah bus kota datang tepat waktu, atau apakah jalan berlubang sudah ditambal. Institusi dan kelembagaan yang kuat yang memberdayakan dan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di kota menjadi ujung tombak dalam memberi manfaat melalui urbanisasi. Kelembagaan yang kuat dapat menyediakan kerangka yang mendukung untuk mengarahkan pembangunan perkotaan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Keragaman budaya dan etnis merupakan aset perkotaan: Keragaman budaya di kota-kota turut berkontribusi terhadap pewujudan kota yang dinamis, makmur, inklusif, berdaya saing, atraktif, memiliki persepsi positif, dan pembangunan pada umumnya. Kota yang memiliki keragaman budaya memiliki angkatan kerja yang lebih inovatif karena kota tersebut mengambil manfaat dari beragam jejaring pengetahuan, penciptaan ide, penyelesaian masalah, serta pengambilan keputusan. Bukan sebuah kebetulan bahwa kota-kota ekonomi global seringkali dicirikan dengan lingkungan multikultur, supermarket etnik, fasilitas keagamaan yang beragam serta berbagai acara kebudayaan seperti Festival Drogo di Amsterdam, Caribana di Toronto, Karnaval Notting Hill di London, Parade dan festival Tahun Baru Imlek di San Fransisco serta "Living in Harmony" di Sydney.

Kota dapat membangun ekonomi berbasis sektor budaya dan industri kreatif: Industri kreatif berkembang menjadi salah satu dimensi ekonomi baru di berbagai belahan dunia. Kota-kota yang beragam seperti Austin (musik dan teknologi), Berlin (seni visual), Meksiko (seni kontemporer dan televisi), Mumbai (film), dan Seoul (permainan game dan media digital) memiliki industri kreatif yang progresif, sehingga telah mendorong perekonomian kotanya. Tujuan wisata dunia juga dikenal karena tengara (*landmarks*) kebudayaannya. Kota kecil seperti Segou di Mali telah membangun perekonomian lokalnya dari festival budaya.

Pesan Utama

Pemerintah harus mulai menggeser paradigma dari "kesetaraan" menjadi "keadilan" dan menghilangkan pembatas yang sistemik: Konsep keadilan mengakui adanya mekanisme redistribusi untuk pemanfaatan sumber daya, kemampuan, dan peluang yang lebih efisien, baik itu dalam konteks perumahan, pendidikan, transportasi, maupun berbagai bentuk layanan publik lainnya. Mekanisme redistribusi ini ditargetkan bagi kelompok penduduk yang paling rentan yang membutuhkan dukungan terbesar. Agar manfaat sosial dari urbanisasi dapat dirasakan secara utuh, diperlukan identifikasi akar masalah dari eksklusi dan ketidakadilan. Sebagai contoh, kebijakan yang berkeadilan di bidang perumahan tidak hanya sekedar membangun rumah murah di seluruh kota, tetapi justru harus menargetkan permukiman kumuh akibat gentrifikasi atau relokasi proyek-proyek pembangunan.

"Pengarusutamaan" gender dapat mengatasi diskriminasi yang sistemik terhadap perempuan: Pendekatan feminis di dalam perencanaan kota juga memasukkan diskursus "pengarusutamaan gender", yang mengaplikasikan pandangan berbasis gender di setiap kebijakan publik. Vienna telah melakukan praktik ini lebih dari 20 tahun, termasuk dalam proses penganggaran, kebijakan, dan alokasi sumber daya. Sementara itu, Rwanda memiliki anggota dewan perempuan terbesar. Di skala yang lebih besar, berbagai negara telah bermitra dengan Program Kota Ramah Perempuan PBB (United Nations Women Friendly Cities Programme) untuk membangun kota yang dapat menikmati berbagai peluang ekonomi, sosial, dan politik yang ditawarkan secara setara untuk semua, terutama bagi perempuan.

Prinsip-prinsip hak para pemuda dan perencanaan kota dapat mendorong perwujudan kota ramah anak: Membangun ruang bermain dan menyediakan pendidikan yang berkualitas merupakan sebagian dari program yang spesifik untuk pemuda, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dan selaras dengan inisiatif Kota Ramah Anak United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Banyak kebijakan di kota yang bermanfaat bagi anak-anak dan pemuda juga bermanfaat bagi seluruh penduduk, seperti memastikan pangan sehat, transportasi publik yang aman dan dapat diandalkan, hunian terjangkau, serta peluang kerja yang layak.

Pemerintah daerah dapat mendorong lansia yang aktif di kota-kota: Sejalan dengan inisiatif Kota Ramah Usia dari World Health Organization (WHO), terdapat delapan pintu masuk bagi kota-kota untuk mengadaptasikan struktur dan pelayanannya agar sesuai dengan kebutuhan penduduk lansia. Delapan pintu masuk tersebut antara lain ruang terbuka dan bangunan, transportasi, perumahan, partisipasi sosial, saling menghormati dan inklusi sosial, partisipasi sipil dan pekerjaan, komunikasi dan informasi, serta dukungan komunitas dan layanan kesehatan. Beberapa kota mungkin hanya mampu menjalankan beberapa elemen di atas lalu secara bertahap dapat ditambahkan elemen lainnya. Seperti inisiatif Kota Ramah Anak, prinsip Kota Ramah Usia ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk lansia. Kota yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan lansia juga berarti dapat memenuhi kebutuhan manusia di setiap kelompok umurnya.

Kota harus membangun kerangka untuk melibatkan para migran dalam kehidupan kota secara layak: Meskipun di tengah keramaian politik mengenai imigrasi, pemerintah daerah berada di garis terdepan dalam menghadapi para pendatang dan dapat mempersiapkan kedatangan para pengungsi dan pendatang dengan menyediakan "unit penyambutan" (*"welcome department"*). Jika kota dan pemerintah daerah

dapat melihat jauh dari sekedar pandangan darurat kemanusiaan, mereka dapat melihat migran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sosial-ekonomi kota. Perspektif ini memerlukan integrasi program yang efektif di sektor perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan jaminan sosial serta memberikan para migran rasa memiliki.

***Investasi dalam infrastruktur budaya untuk keuntungan jangka panjang*:** Bangunan bersejarah yang memerlukan renovasi, kesenian dan tradisi kerajinan yang dapat mendorong ekonomi, serta institusi budaya seperti museum dan gedung pertunjukan kesenian merupakan blok pembangunan ekonomi kreatif. Kota dengan kehidupan budaya dan aset yang hidup akan menarik bakat terampil yang akan meningkatkan prospek kota jangka panjang.

Bab 6 Inovasi, Teknologi, dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Dunia ini secara pasti telah memasuki di Era Informasi. Teknologi membentuk kembali perekonomian dan masyarakat di tengah revolusi industri keempat, atau mendisrupsi secara eksponensial miliaran orang yang terhubung oleh gawai, dengan kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan akses menuju pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini diperkuat secara berlipat ganda dengan munculnya sejumlah terobosan teknologi di bidang kecerdasan buatan (AI), robotika, *Internet of Things* (IoT), kendaraan otonom, cetak 3-D, teknologi nano, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum.

Kota merupakan pusat dari berbagai perubahan karena adanya sekumpulan orang berbakat dan aktivitas manusia yang mendorong terkonsentrasinya (*co-locate*) teknologi dan inovasi. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, kota menjadi tempat di mana fasilitas kesehatan dan lembaga penelitian terbaik berada dan bekerja keras untuk mengembangkan vaksin. Kota merupakan tempat berpusatnya perusahaan teknologi yang memproduksi alat dan kemudahan bagi jutaan orang untuk bekerja dari rumah. Keterkaitan erat antara teknologi dan inovasi berdampak pada pola urbanisasi dan akan membentuk masa depan kota.

Temuan Utama

Banyak kota menggunakan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan: urbanisasi yang pesat, perubahan teknologi dan krisis iklim yang terjadi di waktu yang bersamaan, menciptakan tantangan baru bagi perkotaan. Akibatnya, kota-kota juga berinovasi, menggunakan teknologi, ide, dan pendekatan baru untuk mencapai NUA dan TPB serta kerangka pembangunan internasional lainnya yang relevan dengan urbanisasi berkelanjutan. Teknologi dan inovasi baru menyediakan peluang bagi kota-kota untuk memberikan makna yang besar bagi kehidupan perkotaan. Kota-kota yang dapat mendorong aktivitas, komunitas, dan masyarakat yang kreatif adalah kota yang paling mampu berinovasi.

Inovasi bukan eksklusif milik sektor swasta - sektor publik pun berinovasi: Inovasi sering kali diasosiasikan dengan bisnis perusahaan rintisan (*start-up*) dan pengusaha teknologi, namun terdapat pemahaman yang berkembang bahwa ketika kota dapat menyediakan platform inovasi, kreativitas, dan penciptaan pengetahuan, pemerintah kota juga dapat menjadi inovator yang memanfaatkan, dan dalam beberapa kasus menciptakan, teknologi baru dan mengembangkan inovasi kelembagaan dan hukum untuk memperbaiki dan mengubah proses dan pelayanan pemerintah.

Teknologi baru memfasilitasi pemantauan perkotaan dengan lebih baik: Semakin banyak kota yang menggunakan teknologi paten seperti sensor yang lebih murah dan lebih efektif untuk memantau dan membagikan informasi tentang air, udara, sampah, infrastruktur, energi, lalu lintas dan transportasi umum, dan lain-lain. Pemantauan tersebut juga dapat berkontribusi pada penurunan dampak negatif lingkungan perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah.

***Kota-kota memiliki kumpulan maha data* (*big data*)**: Selain untuk memantau dan mendeteksi, kota-

kota mengumpulkan data dari aplikasi ponsel cerdas, dasbor data kota, layar informasi pada ruang publik, pusat operasi cerdas dan situs web dengan informasi penting dan mekanisme umpan balik. Sumber ini dikombinasikan membentuk maha data yang sangat masif sehingga teknik dan perangkat lunak tradisional tidak dapat menganalisisnya. Analisis maha data, pemantauan langsung dan otomatisasi berbagai pelayanan kota mulai dari penerangan jalan hingga sistem pengaduan sangatlah berguna bagi perencanaan dan pelayanan kota.

Ketika kota-kota memperbolehkan datanya terbuka dan transparan, inovasi akan tumbuh: Kota-kota memperbolehkan datanya agar dapat diakses publik. Ketika kota-kota membuka portal data untuk publik, industri swasta, kelompok masyarakat, dan warga melalui aktivitas seperti "*hackathons*" sipil dapat menciptakan alat yang berguna. Contohnya, data transportasi publik, yang dulunya tersembunyi, sekarang sudah terstandardisasi dan membuat sistem transportasi di seluruh dunia mengintegrasikan rute dan jadwalnya dengan aplikasi peta.

Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan inovasi dan teknologi di wilayah perkotaan: Inovasi, dirancang untuk mengendalikan penyebaran virus dan membuat masyarakat tetap aman, produktif, dan tetap terhubung ketika terpisah secara fisik, memberikan implikasi yang besar terhadap lingkungan terbangun perkotaan, hubungan sosial, pendidikan dan pasar tenaga kerja, dsb. Teknologi yang berkembang ini memungkinkan masyarakat bekerja jarak jauh, belajar secara daring, pembayaran digital, *telehealth*, belanja daring dan pengiriman menggunakan robot atau *drone*. Ketika tren teknologi ini membuat kota semakin tangguh terhadap pandemi saat ini dan mendatang, kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang nyata untuk memperdalam kesenjangan digital dan kesenjangan sosial, terutama ketika jutaan orang tidak dapat bekerja atau sekolah dari jauh, atau tidak dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi.

Retorika Kota Cerdas tidak selalu sesuai kenyataan: "Kota Cerdas" adalah satu di antara banyak kata kunci terkait teknologi dan urbanisasi. Namun, pendekatan *top-down* yang dipimpin oleh sektor swasta yang umumnya didorong oleh perusahaan teknologi, sering kali tidak mendorong urbanisasi yang inklusif seperti yang telah divisikan oleh NUA. Perusahaan teknologi secara meningkat memberi fokus pada kota sebagai pasar dari teknologi kota cerdas. Hasil dari prakarsa Kota Cerdas menjadi tercampur aduk dan khususnya menjadi lemah ketika usaha ini didorong oleh teknologi, bukan dari masyarakat. Kota-kota harus fokus menerapkan teknologi perkotaan dan mendorong inovasi sektor publik untuk mengatasi masalah yang ada.

Kota-kota tidak memiliki kapasitas peraturan dan kebijakan yang mumpuni untuk mengatasi tantangan teknologi: Pemerintah berbagai tingkatan mencoba untuk memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan, pelibatan masyarakat dan tata kelola seperti menurunkan jejak karbon di kota. Beberapa pemerintah sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk memaksimalkan penggunaan, mengelola, dan mengatur teknologi ini dengan tetap mengatasi permasalahan seperti eksklusi digital, privasi, pengawasan dan penyalahgunaan media sosial untuk politik serta dampak terhadap pasar tenaga kerja, kemiskinan, dan ketimpangan. Untuk mengatasi masalah ini, dukungan kapasitas perlu diberikan kepada kota.

Investasi di bidang teknologi tersebar tidak merata di seluruh dunia: Distribusi global dari 100 perusahaan digital dan modal ventura yang mendukung perusahaan rintisan tersebar tidak merata, mengincar ke metropolitan tertentu seperti Sillicon Valley, Koridor Timur Laut Amerika Serikat, London, Paris, Toronto, Beijing, Tel Aviv, Shanghai, Mumbai, dan Bengaluru. Jaringan inovasi teknologi besar dan perusahaan di dalamnya hampir selalu berlokasi di kota-kota global yang menarik pekerja muda terpelajar, yang mayoritas adalah pendatang, sementara kota yang tidak terkoneksi secara global tertinggal.

Stasiun detektor polusi milik Kepala Inspektur Perlindungan Lingkungan, Warsawa, Polandia © HAL-9000/Shutterstock

Pesan Utama

Inovasi dan teknologi memainkan peran yang multidimensi di wilayah perkotaan: Teknologi disruptif dan cara baru mengelola kota sangat mendasar bagi pengalaman perkotaan. Teknologi membentuk ulang hubungan sosial, pasar tenaga kerja, dan tata kelola. Pada saat yang sama, teknologi tidak dapat menggantikan hubungan masyarakat di tingkat lingkungan maupun pada urusan kota. Teknologi paling efektif ketika digabungkan dengan inovasi kelembagaan, dan bukan pengganti untuk memperbaiki tata kelola, perencanaan, operasional, dan pengelolaan.

Kota Cerdas yang sesungguhnya adalah yang berorientasi pada penduduknya: Warga adalah sumber daya terbesar bagi suatu kota karena warga memantik berbagai ide untuk inovasi, berperan sebagai mata dan telinga dari kota, membantu memantau kondisi di lapangan dan melibatkan kota secara lebih aktif dalam penentuan prioritas. Inisiatif kota cerdas berbasis teknologi perlu berpusat pada warga (*people centered*) dan digerakkan oleh masyarakat.

Penguatan jaringan kolaborasi untuk mendorong riset dan pengembangan: Kota-kota seharusnya memperkuat institusi riset dan pengembangan serta jaringan kolaboratif antara tingkatan pemerintah untuk membangun riset, data, dan kapasitas pengaturan untuk memastikan bahwa teknologi baru dapat mengatasi masalah perkotaan daripada memperburuknya atau memunculkan tantangan baru. Menemukan jalan menuju kerjasama global dalam mengatasi tantangan dan peluang adalah penting, termasuk melalui jaringan kota yang saling berbagi ide inovatif.

Pemerintah harus membangun kapasitas untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur penggunaan teknologi dengan efektif: Kota-kota seharusnya proaktif dengan teknologi yang mereka pilih untuk penggunaan publik. Pemerintah seharusnya juga berkenan untuk menggunakan pendekatan pengaturan terhadap teknologi disruptif seperti perusahaan rintisan transportasi yang apabila dibiarkan tidak diperiksa akan menciptakan eksternalitas negatif seperti kemacetan. Kota-kota membutuhkan akses dan kapasitas untuk mengelola data, seperti halnya manfaat dari pengembangan data terbuka dan ekosistem sumber

terbuka sejalan dengan prinsip pengembangan digital. Untuk meningkatkan manfaat potensial, kota-kota harus mengembangkan portal data terbuka, laboratorium inovasi perkotaan, *hackathons*, tantangan inovasi, program *town-gown,* dan dukungan untuk riset dan pengetahuan data lokal.

Pemerintah harus menyelesaikan ketimpangan dan ekslusivitas digital: kota harus merumuskan dan menjalankan strategi untuk menyelesaikan ekslusivitas digital terutama pada masyarakat rentan agar terhindar dari semakin memburuknya ketimpangan, serta sebaliknya segera mempekerjakan beragam bakat. Di zaman pembelajaran jarak jauh, memastikan akses teknologi merupakan tanggung jawab pendidikan publik. Sementara itu, bentuk tradisional masih diperlukan untuk menjangkau masyarakat kelompok tertentu seperti lansia atau tuna wisma, yang tidak memiliki akses terhadap gawai cerdas atau terhubung internet untuk menjawab survei atau mendapat pelayanan dari pemerintah kota.

Kota-kota harus menempatkan kerangka etik dan pengaturan kelembagaan yang jelas dalam pengumpulan dan bagi data: Kerangka kerja tata kelola ini perlu menetapkan standar etika, termasuk siapa yang memiliki hak terhadap data, akses dan kepemilikan, dan siapa yang dapat memanfaatkan data tersebut. Untuk hal ini, penting bahwa sektor publik, sebagai penjamin hak warga, memegang semua tanggung jawab. Bagi banyak pemerintah daerah, bidang ini sama sekali baru sehingga kebijakan digital dan kapasitas pemerintahan sangat butuh untuk diperkuat atau dibangun dari nol. Kota-kota harus bekerja dengan pemerintah untuk melindungi privasi dan diskursus publik yang terbuka dan faktual. Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan berbasis masyarakat inovatif dibandingkan solusi teknologi. Bagaimana teknologi ini didesain dan digunakan seharusnya dapat menegakkan demokrasi dan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan ekologis yang seperti tercantum dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*.

Bab 7 Pemerintahan Daerah dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Pemerintah daerah adalah penggerak utama dari urbanisasi berkelanjutan. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan keseharian masyarakat, pemerintah daerah paling akrab dengan kebutuhan dan keinginan warganya. Keberhasilan penerapan agenda pembangunan global dan efektivitas untuk mendayagunakan nilai urbanisasi berkelanjutan bergantung pada fungsi tingkatan pemerintahan ini dalam tata kelola perkotaan yang demokratis, efisien, dan inklusif.

Temuan Utama

Pemerintahan daerah adalah pangkal dari agenda global pembangunan berkelanjutan: Semakin besar gerakan di pemerintah kota/kabupaten dan provinsi untuk melokalkan agenda global agar dapat memanfaatkan nilai dari urbanisasi berkelanjutan. Di semua wilayah, pemerintah daerah dan kelembagaannya telah berkontribusi dalam peningkatan urbanisasi berkelanjutan dengan mendorong aksi mitigasi perubahan iklim, kota berketahanan, model ekonomi alternatif dan kebijakan inklusi sosial. Misalnya pada 2019, lebih dari 10.000 kota dari 139 negara telah berkomitmen untuk mengambil langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terukur.

Secara keseluruhan, terjadi kemajuan desentralisasi global, meskipun terdapat beberapa kemunduran: Pemerintah daerah memainkan peran yang semakin penting dalam tata kelola perkotaan seiring dengan implementasi proses desentralisasi di berbagai wilayahnya. Secara global, pemerintah daerah memberikan sumbangan 24,1 persen belanja publik, 25,7 persen pendapatan publik dan 36,6 persen investasi publik.

Lemahnya ekosistem kelembagaan menghalangi aksi lokal: Di banyak negara, lemahnya "ekosistem kelembagaan yang mendukung" – kewenangan, kapasitas dan sumber daya yang diserahkan ke tingkat daerah – memiliki dampak melemahkan yang menghalangi tata kelola perkotaan, dan konsekuensinya

adalah pada realisasi nilai urbanisasi. Lebarnya desentralisasi fiskal tidak merata antarwilayah, padahal aliran pembiayaan yang memadai dibutuhkan untuk mendukung investasi perkotaan, seperti dinyatakan dalam AAAA.

Pemerintahan daerah dapat menjadi kekuatan transformatif: Dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan NUA, banyak kota memainkan peran sebagai pusat eksperimen, dan pengalaman mereka dapat digunakan sebagai masukan kebijakan untuk diangkat ke tingkat nasional. Banyak kota yang memperbaiki kebijakan dan rencana strategisnya dengan memasukkan TPB, memperkuat nilai dari urbanisasi. Perencanaan partisipatif, sebagai contoh, sedang banyak dilaksanakan untuk menciptakan bersama kota-kota yang lebih berkeadilan, lebih inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan. Terutama, banyak kota yang semakin melembagakan hubungannya dengan pemangku kepentingan lokal sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih inklusif dengan tanpa mengabaikan siapapun.

Koordinasi, pemantauan, dan pelaporan yang lemah menghambat upaya pelokalan: Meskipun berbagai negara mengambil manfaat dari prakarsa koordinasi nasional yang berbasis TPB, untuk memastikan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah daerah di semua wilayah menghadapi kesulitan dalam memastikan inklusivitas pada mekanisme koordinasi nasional dan proses pelaporan. Banyak kota kekurangan kapasitas statistik yang memadai. Dilema ini membuat sulitnya memantau implementasi TPB dan NUA, termasuk dalam memastikan agar perencanaan lokal dan nasional telah dirumuskan dengan sasaran yang realistis.

Pesan Utama

Membangkitkan kekuatan dari pelokalan Agenda 2030 dan NUA pada kota dan wilayah: Strategi pelokalan harus diarusutamakan ke dalam semua rencana, program dan penganggaran dari tingkat nasional hingga lokal. Kota perlu mengadopsi TPB dan NUA sebagai kerangka referensi untuk memandu kebijakan dan rencana, serta untuk memastikan implementasi yang koheren dan terpadu. Negara perlu mengintegrasikan dan memperkuat pendekatan pelokalan yang kuat ke dalam strategi dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Melibatkan pemerintah daerah di dalam mekanisme koordinasi nasional secara efektif: Pemerintah pusat harus memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pemantauan KPN dan TPB. Strategi yang terkoordinasi untuk mendukung proses pelokalan juga menjadi penting.

Negara harus menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung untuk melepaskan nilai dari urbanisasi berkelanjutan secara efektif: Kebijakan desentralisasi yang efektif dapat memperkuat kapasitas otoritas daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara peningkatan tanggung jawab yang dialihkan dan pendapatan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, perhatian khusus harus diberikan kepada desentralisasi fiskal dan aliran pembiayaan yang memadai untuk mendukung investasi perkotaan.

Menciptakan kerangka kerja tata kelola berjenjang yang kuat untuk mendorong kerja sama vertikal dan horizontal antara berbagai tingkatan pemerintahan, dan antarpemerintah daerah: Tata kelola berjenjang yang efektif memerlukan struktur hukum dan kelembagaan yang jelas berdasarkan prinsip penugasan dan desentralisasi, serta alokasi sumber daya keuangan antarpemerintahan yang memadai.

Menjadikan tata kelola metropolitan yang kuat sebagai komponen utama dari tata kelola perkotaan yang baru: Pemerintah pusat harus memberdayakan tata kelola metropolitan yang merespon realitas ekonomi dan geografi sosial, tidak hanya batas-batas yurisdiksi, serta memastikan keterlibatan baik pemerintah daerah maupun wilayah dalam proses reformasi.

Anggota komunitas mendesain ruang publik di permukiman terpadu Kalobeyei di Turkana, Kenya. © UN-Habitat

Mendukung transformasi perkotaan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif: Pendekatan perencanaan terpadu adalah sangat penting untuk menciptakan kota-kota yang inklusif, dan memperkuat hubungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perencanaan yang partisipatif dan inklusif merupakan pendorong utama untuk pelibatan aktor lokal pada tahapan penetapan, pelaksanaan dan evaluasi visi bersama, dan mendukung koalisi kekuatan lokal yang transformatif. Proses partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah transparan dan dilaksanakan secara teratur dan berlanjut, serta yang memberi kekuasaan kepada warga dalam pengambilan keputusan.

Diseminasi dan produksi data terpilah untuk pemantauan dan evaluasi dampak adalah hal penting: Kota harus dapat melacak pelokalan agenda global untuk memastikan bahwa proses perencanaan pada semua tingkatan telah didasarkan pada sasaran yang realistis, dan agar pelaksanaan yang efektif dapat dipantau, serta untuk memastikan akuntabilitas dan tindak lanjut kepada warganya.

Bab 8 Investasi dalam Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Investasi yang signifikan diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial dari urbanisasi, termasuk di dalamnya pada kondisi kota yang tak berwujud. Seperti halnya semua aspek pembangunan, urbanisasi berkelanjutan membutuhkan pembiayaan yang memadai. Sejauh mana sebuah kota dan negara dapat menarik dan memanfaatkan investasi publik dan swasta untuk mencapai TPB 11 serta NUA merupakan kunci untuk meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan. Untuk dapat menutup jurang antara investasi dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar-berbagai pemangku kepentingan, termasuk seluruh tingkat pemerintahan, sektor swasta, serta lembaga bilateral dan multilateral.

Temuan Utama

Investasi yang memadai dalam infrastruktur perkotaan adalah inti untuk meningkatkan nilai

***dari urbanisasi berkelanjutan*:** Infrastruktur perkotaan dalam seluruh dimensinya - termasuk aset fisik, sumber daya manusia (SDM), lembaga-lembaga, struktur tata kelola yang baik dan inovasi teknologi - sangat penting untuk memberikan pelayanan dasar di area perkotaan untuk meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan.

***Penyampaian dimensi perkotaan dalam TPB akan berbiaya sebesar USD 38 triliun*:** UN-Habitat mengestimasi total investasi yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan TPB sebesar USD 38 triliun untuk tahun 2020-2030. Lebih lanjut, berdasarkan estimasi dalam tren investasi dari periode sebelum COVID-19 mengindikasikan bahwa akan ada jurang antara investasi sebesar USD 5,6 triliun mengikuti tren saat itu. Dengan adanya COVID-19 yang memicu resesi global, laju investasi di negara berkembang dapat menurun dalam beberapa tahun, dan mengakibatkan jurang antara investasi semakin melebar.

***Terdapat sumber pembiayaan global yang memadai untuk memenuhi kebutuhan investasi saat ini, namun pendanaan tersebut tidak disalurkan ke wilayah yang paling membutuhkan*:** Di saat ada pertimbangan jumlah dana tersedia yang dapat diinvestasikan pada tingkat global dan peningkatan investasi di kota-kota dunia, pembiayaan yang memadai tidak langsung diarahkan ke dalam kota-kota dan wilayah yang membutuhkan sumber pendanaan. Namun, sebagaimana estimasi UN-Habitat menunjukkan, total kapasitas investasi publik dan swasta sebesar USD 98 triliun jauh melampaui total investasi yang dibutuhkan. Secara sederhana, ketika kapasitas pembiayaan memang ada, saat ini tidak mengalir ke area yang seharusnya untuk mencapai kebutuhan ini. Mengalihkan bahkan sebagian dari aset ini dapat memberikan perbedaan yang signifikan, namun sangat penting bahwa aset tersebut diarahkan ke proyek infrastruktur dan TPB untuk mencapai kebutuhan investasi saat ini.

***Pandemi COVID-19 menciptakan iklim investasi yang tidak menentu*:** ketika dampak keseluruhan dari pandemi COVID-19 belum dapat diketahui hingga beberapa waktu, konsekuensi ekonomi global dari pandemi menggoyahkan keyakinan pada investasi infrastruktur. Sebagai contoh, hanya lima persen dari para pemimpin di sektor publik dan swasta yakin bahwa investasi akan "meningkat secara signifikan" setelah pandemi, penurunan tajam dari 34 persen sebelum krisis.

***Kebutuhan akan investasi sangat beragam*:** kebutuhan investasi pada kota-kota dan negara-negara untuk mencapai urbanisasi berkelanjutan bergantung pada ukuran kota, tren demografi, susunan perkotaan, lokasi geografi, tingkatan pembangunan ekonomi negara dan kualitas aset perkotaan yang ada. Sebagai contoh, kebutuhan investasi kota-kota pada negara maju adalah peningkatan kualitas (*upgrading*) untuk mengganti infrastruktur lawas, kota-kota pada negara berkembang membutuhkan investasi baru yang memadai bagi infrastruktur ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan populasi perkotaan yang tumbuh secara cepat. Secara khusus, sebuah studi yang dilakukan oleh UN-Habitat menunjukkan bahwa biaya tahunan rata-rata dalam mencapai TPB 11 beragam tergantung pada keadaan, mulai dari puluhan juta hingga miliar dolar.

***Pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan terkait pembiayaan perkotaan*:** hambatan tersebut termasuk di dalamnya adalah transfer dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi dan tidak dapat diprediksi, lemahnya pengelolaan fiskal, pendapatan yang buruk, dan hambatan hukum yang mempengaruhi kapasitas lembaga. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan hambatan yang besar seperti membatasi akses kota-kota terhadap pasar modal - hanya 4 persen dari 500 kota-kota terbesar di negara berkembang dianggap layak mendapatkan kredit dari pasar pembiayaan internasional. Kota-kota juga menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya untuk kegiatan pra-investasi seperti prasyarat struktur keuangan untuk menciptakan proyek-proyek yang *bankable* dan proyek-proyek percontohan yang mendemonstrasikan kapasitas pemerintah daerah.

***Pendapatan pemerintah masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk pembangunan perkotaan*:** Rata-rata pendapatan di negara-negara

berpenghasilan rendah masih di bawah 15 persen dari PDB - ambang batas dipertimbangkan sebagai dasar untuk fungsi efektif dari negara. Selain itu, kebanyakan kota-kota di negara-negara berkembang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan terkadang memiliki keterbatasan dalam instrumen pembiayaan; sebagai contoh, pajak provinsi di negara-negara berkembang adalah sekitar 2,3 persen dari PDB apabila dibandingkan dengan 6,4 persen di negara maju. Kontrol yang ketat dari pemerintah pusat pada pengeluaran dan kondisi-kondisi yang terikat pada transfer fiskal antarpemerintahan sering kali mengakibatkan risiko dalam mendorong pemerintah daerah untuk membelanjakan dana pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, merusak tujuan utama dari desentralisasi di negara-negara berkembang.

***Investasi yang kurang memadai dalam urbanisasi berkelanjutan memunculkan biaya yang tinggi*:** investasi yang tidak mencukupi dalam urbanisasi berkelanjutan meningkatkan kesenjangan dan seringkali mengancam daya saing dan produktivitas kota dan ekonomi nasional. Ketidaksesuaian investasi juga memengaruhi hasil kesehatan - panduan kesehatan publik mengenai pandemi COVID-19 hampir tidak mungkin untuk diimplementasikan di permukiman informal akibat infrastruktur yang tidak memadai.

***Investasi pada berbagai aspek kapasitas SDM dan lembaga sangat penting bagi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan*:** Kurangnya kapasitas yang memadai menghambat penyampaian pelayanan perkotaan, pendapatan, pengelolaan pembiayaan dan implementasi proyek di kebanyakan kota-kota di negara-negara berkembang.

Pesan Utama

***Pendanaan yang memadai selama dekade aksi merupakan kunci untuk mewujudkan TPB 11, dimensi perkotaan dari TPB dan NUA*:** Sebagaimana saat ini dunia memasuki Dekade Aksi, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempercepat aksi yang mendukung investasi yang memadai di infrastruktur perkotaan (aset-aset fisik, SDM, lembaga-lembaga, inovasi dan teknologi) yang dibutuhkan untuk membuat kota-kota dan permukiman menjadi aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Percepatan aksi dalam investasi dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat urbanisasi berkelanjutan.

***Kota-kota membutuhkan sumber-sumber pendanaan yang stabil, berkelanjutan*:** dalam rangka mewujudkan kebutuhan investasi untuk urbanisasi berkelanjutan, sumber-sumber pendanaan daerah haruslah berkelanjutan. Kestabilan ini muncul ketika kota-kota memiliki sumber pemasukan yang beragam dan kapasitas kelembagaan yang memadai yang memungkinkan untuk memanfaatkan mekanisme pembiayaan yang inovatif - pembiayaan gabungan (*pooled financing*), pembiayaan campuran (*blended financing*), obligasi hijau daerah (*green municipal bonds)*, dan instrumen pembiayaan berbasis lahan, lainnya. Area perkotaan memiliki aset yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk investasi dan pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah harus mengembangkan cara untuk menghubungkan pendapatan dengan pertumbuhan perkotaan untuk memastikan bahwa pembiayaan daerah dapat berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk dapat menampilkan potensi khas mereka dalam rangka meningkatkan dan memperkaya sumber pendapatan daerah secara inovatif, yang dalam waktu panjang meningkatkan otonomi daerah dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

***Penyusunan kembali kerangka pembiayaan untuk urbanisasi berkelanjutan*:** melakukan investasi pada urbanisasi berkelanjutan membutuhkan kerangka kebijakan yang sesuai dengan alur kebijakan lokal untuk tujuan pembangunan publik. Tata kelola perkotaan harus didukung oleh fiskal yang terkoordinasi dengan baik, desentralisasi politik dan administrasi, di mana tanggung jawab pengeluaran lokal didukung oleh transfer antarpemerintah dan pemberdayaan fiskal yang terprediksi.

***Kebijakan yang koheren antara pemangku kepentingan global, wilayah, nasional, dan lokal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan investasi*:** untuk meningkatkan seluruh potensi urbanisasi berkelanjutan, investasi yang dilakukan dalam

segala bentuk infrastruktur harus sesuai dengan Agenda 2030, NUA dan agenda-agenda pembangunan lainnya. Tujuannya tidak hanya sekedar melakukan lebih banyak belanja, namun lebih kepada belanja yang lebih efisien dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan untuk meningkatkan nilai urbanisasi.

Keberagaman berbagai aktor dan usaha yang kolaboratif diperlukan untuk membiayai infrastruktur perkotaan yang memadai: entitas sektor publik, perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pendanaan, bank pembangunan multilateral, pendanaan publik internasional dan investasi langsung luar negeri seluruhnya memiliki peran-peran yang signifikan untuk turut serta dalam investasi pembiayaan perkotaan.

***Inti dari kota-kota berkelanjutan tidak hanya berasal dari aset fisik, namun juga berasal dari kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat*:** menjadikan kota-kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan aset fisik di dalam kota, tetapi juga membutuhkan investasi dalam tata kelola perkotaan yang efektif, kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat serta kapasitas yang diperkuat untuk penyusunan, implementasi, pengembangan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan-kebijakan publik untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah juga integral untuk memfasilitasi keberlanjutan pembiayaan daerah. Kemampuan sebuah kota dalam memaksimalkan peningkatan dari sumber daya lokal menjadi subjek dari kecocokan peraturan kelembagaan, begitu pula dengan kapasitas teknis perencanaan, pengaksesan dan pengadministrasian instrumen pembiayaan yang lengkap.

***Mengoptimalkan mobilisasi pendapatan itu penting, seperti meningkatkan nilai uang (value of money) dari investasi*:** pengelolaan yang efektif sangat penting untuk melindungi investasi publik. Pemerintah daerah harus memperkuat lembaga-lembaga untuk pengelolaan investasi publik untuk mencapai hasil pembangunan yang diinginkan, sementara dalam waktu yang sama, mencapai kualitas dan efisiensi pembelanjaan dalam aset fisik kota.

***Penilaian kebutuhan investasi yang akurat menjadi dasar untuk investasi perkotaan yang berkelanjutan*:** kebijakan-kebijakan perkotaan dan berbagai investasi harus berdasarkan bukti dan didasari target-target yang realistik yang dapat dipantau. Menyiapkan estimasi yang tepat dari investasi perkotaan haruslah menjadi titik mula untuk seluruh tingkatan pemerintahan dalam mencapai urbanisasi berkelanjutan. Estimasi-estimasi tersebut harus dipertimbangkan secara berdampingan dengan manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari investasi perkotaan. Kebutuhan-kebutuhan dan kombinasi dari potensi sumber pendanaan adalah bersifat unik untuk masing-masing negara. Beberapa negara mungkin membutuhkan bantuan teknis untuk mengembangkan agenda reformasi nasional yang dapat memetakan kebutuhan infrastruktur dan TPB pada keadaan nasionalnya. Beberapa mungkin membutuhkan bantuan teknis untuk menyelaraskan peran-peran pelengkap di mana berbagai mitra pengembangan dapat berperan dalam pembiayaan pengembangan infrastruktur dan kebutuhan pemeliharaan.

Bab 9 Agenda Baru Perkotaan (NUA) dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Urbanisasi berkelanjutan menghasilkan nilai ekonomi, lingkungan, sosial, dan nilai yang tak berwujud yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua. Pesan ini dapat dan harus memandu upaya pembangunan selama masa Dekade Aksi untuk mencapai TPB dan bersamaan dengan dunia yang pulih dari pandemi COVID-19. Untungnya, sudah terdapat peta jalan menuju urbanisasi berkelanjutan di dalam NUA, yang menyediakan kerangka yang komprehensif untuk membuka nilai yang melekat di dalam kota-kota yang terencana, terkelola, dan didanai dengan baik.

Menguak nilai dari urbanisasi berkelanjutan merupakan upaya berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah pusat harus menciptakan lingkungan yang mendukung kota-kota dapat berkembang. Pemerintah daerah harus memanfaatkan berbagai kesempatan yang mereka miliki dan mengatur wilayahnya secara efektif, sebagaimana telah disebutkan di dalam NUA. Sektor

swasta harus berinvestasi dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, dari perumahan terjangkau hingga infrastruktur ramah lingkungan. Masyarakat sipil harus memperkuat kelembagaan dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi masyarakat yang beragam. Filantropi haruslah mengisi jurang antara untuk mendukung yang paling rentan. Berbagai universitas harus mengedukasi generasi selanjutnya dan mendorong kesempatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk inovasi dan kesejahteraan yang inklusif. Ketika seluruh bagian yang saling terkait dapat bergerak secara harmonis dan didukung oleh kelembagaan dan kebijakan yang memadai, kota-kota akan berkembang dan nilai mereka akan ditingkatkan serta dimanfaatkan oleh semua.

Pesan Utama

***Seruan untuk aksi dan komitmen bagi implementasi NUA*:** Harus ada rasa urgensi dan komitmen jangka panjang untuk mengimplementasikan NUA sebagai dasar untuk mencapai perkotaan berkelanjutan. Kelambanan dan penundaan akan menimbulkan biaya yang tinggi. Pemikiran ulang yang dilakukan secara mendalam untuk merumuskan aksi yang tepat sangatlah dibutuhkan. Fase permulaan dari NUA dan implementasi TPB berjalan dengan cukup lambat. Langkah yang tanggap diperlukan untuk mempercepat dekade aksi dalam mencapai TPB.

***Implementasi efektif dari NUA akan mengangkat nilai dari urbanisasi berkelanjutan*:** Kerangka kerja aksi yang efektif secara substantif dapat meningkatkan nilai dari urbanisasi berkelanjutan, terutama melalui struktur tata kelola perkotaan yang mendukung, perencanaan dan pengelolaan pembangunan spasial, serta sarana implementasi yang efektif dalam bentuk pembiayaan yang memadai, kapasitas pembangunan, informasi, teknologi dan inovasi. Rencana-rencana aksi yang spesifik pada tingkat regional dan inisiatif lokal dari pemerintah kota dan kelompok masyarakat sipil saling melengkapi satu sama lain. Secara bersama-sama mereka dapat mengangkat kepekaan, antusiasme dan menyerap agenda berkelanjutan tersebut.

***Menilai kemajuan dalam implementasi dan pencapaian agenda pembangunan yang relevan dengan urbanisasi berkelanjutan*:** Kota-kota haruslah melakukan audit dan memetakan upaya mereka ke dalam komitmen-komitmen yang transformatif dari NUA, TPB 11 dan dimensi perkotaan lainnya di dalam TPB. Penilaian ini merupakan langkah yang penting di mana dapat mendemonstrasikan apa yang sudah dilakukan dan dengan begitu dapat membantu dalam mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang harus dilakukan, begitu pula dengan berbagai kelemahan kunci dan jurang antara yang menjadi fokus baru dalam intervensi dan mengerahkan sumber daya yang sesuai.

***Tujuan-tujuan dan target-target pembangunan dapat ditangani secara bersamaan*:** Mampu untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sinergi dari TPB dan NUA memperkuat kebutuhan untuk koherensi kebijakan yang terintegrasi dan kesinambungan lintas sektor dari skala global hingga lokal. Lebih awal mendemonstrasikan kemajuan, meskipun tanpa sumbangan investasi baru, memiliki keuntungan tambahan untuk mengurangi skala dari biaya baru yang dikeluarkan secara relatif dibandingkan dengan memulai dari awal. "Kemenangan mudah" ("*easy wins*") ini mempermudah untuk mengumpulkan dukungan dari pejabat dan perwakilan provinsi serta nasional yang harus bertukar tentang kebutuhan sumber daya yang beragam dan saling bersaing.

***Kolaborasi dan kerjasama lintas aras sangat penting untuk meningkatkan pembangunan perkotaan berkelanjutan*:** Mengadakan lokakarya multi-pemangku kepentingan seperti forum-forum perkotaan nasional dan regional dapat bertindak sebagai katalisator yang kuat untuk perubahan, melibatkan sektor publik, swasta dan masyarakat sipil bersama-sama untuk menentukan berbagai perubahan yang dibutuhkan, mengukur reaksi dan menjelajahi cara-cara lebih banyak transdisiplin dan kolaborasi ke depannya. Format yang lebih mendalam dari ko-kreasi dan ko-produksi multisektor menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan pelayanan publik yang memadai begitu juga dalam penelitian dan praktik untuk urbanisasi berkelanjutan yang lebih baik.

***Tata kelola yang efektif dengan kerjasama antara pelaku formal dan informal adalah kunci untuk mencapai TPB dan memantapkan NUA*:** Informalitas merupakan fakta kehidupan, mulai dari perumahan hingga ekonomi, dan tidak boleh diabaikan. Berbagai prakarsa pembangunan perkotaan di mana hubungan antara negara-warga negara telah direformasi dan diperkuat, dapat dibangun dan disebarkan secara lebih luas untuk mendukung urbanisasi berkelanjutan. Ko-produksi perumahan dan infrastruktur pada permukiman informal dan lahan-lahan di mana masyarakat sipil dan pemerintah terlibat dalam aksi bersama adalah model yang efektif untuk menjembatani jurang antara formal dan informal, serta meningkatkan nilai urbanisasi.

***Urbanisasi berkelanjutan mengarah pada pembangunan ekonomi serta kesempatan kerja*:** Kota-kota secara alamiah menawarkan kesempatan kerja yang signifikan karena area perkotaan menciptakan lapangan pekerjaan yang didasarkan pada keuntungan komparatif serta karakteristiknya yang unik. Urbanisasi menciptakan pembangunan ekonomi melalui penyediaan pekerjaan yang layak, pendapatan dan kesempatan yang sama bagi semua. Memastikan akses ke lapangan pekerjaan produktif berkelanjutan, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memelihara bakat dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi perkotaan yang modern, mengembangkan industri kreatif, dan memanfaatkan berbagai bentuk pendanaan kota, seluruhnya memiliki peran kunci dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai ekonomi dari urbanisasi.

***Penghijauan perkotaan meningkatkan nilai lingkungan dari kota-kota*:** Salah satu persyaratan utama untuk percepatan perkotaan berkelanjutan adalah agar seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan ekonomi hijau atau sirkular secara sungguh-sungguh dan mempromosikannya secara proaktif. Bukti dari seluruh dunia menunjukkan bahwa perkotaan hijau secara proaktif mengarahkan pada peningkatan lapangan pekerjaan lintas berbagai kategori keterampilan, sehingga menghapuskan kekhawatiran sebelumnya tentang hilangnya lapangan pekerjaan akibat penghentian kegiatan ekonomi yang intensif karbon.

***Pertimbangan lintas sektor mendukung seluruh upaya untuk meningkatkan keadilan sosial, kesetaraan, dan nilai keseluruhan dari urbanisasi berkelanjutan dengan tidak meninggalkan siapa pun dan satu wilayah pun*:** Meskipun sangat diakui dalam NUA dan TPB, masalah keragaman budaya, gender, usia, dan dimensi lintas lainnya, serta kelompok marginal atas dasar dari karakteristik lain, membutuhkan inklusi yang lebih besar dalam rancangan kebijakan nasional dan lokal tentang keberlanjutan dan ketahanan perkotaan. Tidak mengabaikan siapa pun dan satu wilayah pun adalah seruan agenda pembangunan.

***Inovasi dalam teknologi dan data yang terpadu untuk meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan*:** Inovasi teknologi bukan lagi merupakan sebuah kemewahan, melainkan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dalam pembangunan dan tata kelola perkotaan. Mobilisasi berbagai sumber data dan melakukan aksi strategis yang efektif dalam kendala data saat ini merupakan kunci, bersama dengan pembangunan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola, menyebarkan, dan mengatur penggunaan teknologi secara efektif.

***Pemerintah daerah merupakan agen perubahan utama untuk mencapai komitmen-komitmen transformatif NUA dan meningkatkan nilai urbanisasi*:** Namun, bukti untuk implementasi dan pemantauan di tingkat kota masih terbatas dan tidak merata sebagaimana sedikit pemerintah kota yang secara eksplisit membuka jalur untuk mengimplementasikan NUA. Pertumbuhan jaringan kota nasional dan internasional, serta bertambahnya jumlah anggota, merupakan katalisator yang potensial untuk mengubah kondisi ini. Jaringan ini memainkan peran utama dalam berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik-praktik baik terkait dengan perubahan iklim, perkotaan yang keberlanjutan dan berketahanan.

***Pembiayaan urbanisasi berkelanjutan membutuhkan lingkungan yang mendukung*:** Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan untuk merencanakan serta mengelola pembangunan dan

pengembangan perkotaan berkelanjutan. Terdapat kekayaan instrumen fiskal yang tersedia bagi pemerintah dengan syarat pemerintah daerah diberi kewenangan yang diperlukan untuk menerapkannya secara efektif.

***Kota-kota dapat mengubah krisis COVID-19 menjadi sebuah peluang dengan moto "membangun kembali secara lebih baik"*:** Pandemi COVID-19 telah menunjukkan permasalahan dan ketidaksetaraan yang ada saat ini dalam hal bagaimana kota-kota direncanakan dan dikelola, mulai dari terlalu banyak ruang publik dialokasikan untuk kendaraan pribadi hingga kondisi perumahan yang padat dan sanitasi yang tidak memadai di permukiman kumuh dan informal. Perlunya langkah-langkah kesehatan publik seperti menjaga jarak dan praktik kebersihan yang sesuai menggarisbawahi urgensi dari pengentasan kemiskinan di perkotaan dan memperbaiki perumahan serta infrastruktur, sementara agenda pembangunan berkelanjutan global, terutama TPB dan NUA, memberikan kerangka kerja dan peluang yang unik untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan.

Bab 1

Urbanisasi dan Kota-Kota:
Arah Kekuatan Baru Global

Tahun 2020 menandai titik balik dalam upaya global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan kota sebagai tempat tinggal bagi lebih dari separuh penduduk dunia sebagai pusatnya. Di satu sisi, dunia memasuki Dekade Aksi, yaitu periode sepuluh tahun di mana pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil harus mempercepat upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mulai dari persoalan kemiskinan, diskriminasi berbasis gender hingga perubahan iklim, ketimpangan serta kesenjangan finansial. Hingga tahun 2030, berbagai aksi lokal – yang sebagian besar terjadi di kota-kota atau oleh para pemimpin kota – harus secara kolektif menciptakan pergeseran global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dengan mengentaskan kemiskinan, memperbaiki tingkat kesehatan, memperluas akses pendidikan dan mengurangi emisi karbon di antara berbagai persoalan masyarakat lainnya.

Fakta Singkat

1. Setelah perdebatan para pengambil kebijakan selama beberapa dekade, urbanisasi akhirnya muncul sebagai agenda kunci dalam kebijakan pembangunan internasional.
2. Agenda Baru Perkotaan (NUA) menekankan pada pentingnya implementasi di tingkat lokal dan peran pemerintah daerah yang efektif.
3. Semua kawasan diperkirakan akan menjadi semakin mengota dalam 10 tahun ke depan, meskipun kawasan yang saat ini memiliki tingkat urbanisasi tinggi diperkirakan akan memiliki laju urbanisasi yang lebih rendah.
4. Agenda Baru Perkotaan dan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diadopsi saat tantangan global semakin sulit, yang mana beberapa di antaranya diperparah oleh pandemi virus korona.
5. Dengan lebih dari 90 persen kasus COVID-19 terkonfirmasi di perkotaan, kota harus menanggung beban dari pandemi ini.

Butir Kebijakan

1. Agenda Baru Perkotaan (NUA) merupakan alat untuk mencapai TPB 11 yang menawarkan kerangka untuk mengoptimalkan manfaat urbanisasi.
2. Walaupun banyak negara telah mencapai kemajuan dalam implementasi NUA dan dimensi perkotaan dari TPB, ternyata masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
3. Urbanisasi yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Dekade Aksi sebagai solusi berkelanjutan menuju pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, jawaban perubahan iklim, dan peningkatan kesetaraan gender.
4. Investasi besar-besaran dalam teknologi bersih, seperti energi terbarukan, merupakan cara paling efektif biaya untuk membangkitkan ekonomi yang terdampak COVID-19 sambil menurunkan emisi.
5. Untuk jangka panjang, COVID-19 memberikan peluang bagi kota-kota untuk "Membangun Kembali secara Lebih Baik" dan membangun ketangguhan dalam menghadapi pandemi di masa depan.

1.1 Urbanisasi: Agenda Utama dalam Kebijakan Pembangunan Internasional

Sejak pergantian abad, kota menjadi semakin penting dalam diskusi global terkait pembangunan berkelanjutan. Setelah perdebatan para pembuat kebijakan selama beberapa dekade, urbanisasi muncul sebagai agenda kunci dalam kebijakan pembangunan internasional. Kesepakatan penetapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2015, yang memasukkan tujuan untuk "membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan", dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) pada tahun 2016, menegaskan posisi urbanisasi dalam lini depan diskusi pembangunan internasional. Pengakuan tersebut membuat urbanisasi tidak sekedar dilihat sebagai fenomena kependudukan, tapi sebagai proses transformatif yang mampu membangkitkan momentum pembangunan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, dan sektor swasta harus menekankan implementasi NUA, yang menjabarkan visi 20 tahun pembangunan kota yang berkelanjutan, sebagai akselerator untuk mencapai perwujudan dimensi perkotaan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Konsep berpikir sistem untuk perkotaan tidak hanya relevan bagi beberapa simpul metropolitan yang saling terhubung secara global. Sudut pandang ini telah menyebar ke seluruh spektrum permukiman, dari kota mega ke kota sekunder atau kota kecil, yang membentuk sebagian besar perkotaan di dunia. Setelah lebih dari satu dekade sejak dunia ini didominasi kawasan perkotaan, urbanisasi terus berlanjut, terutama dengan kecepatan tinggi di negara berkembang. Tren tersebut telah menempatkan perkotaan di garis terdepan pada perdebatan kebijakan global. Sentralnya proses urbanisasi untuk memastikan terwujudnya masa depan yang berkelanjutan di berbagai bidang tidak dapat disangkal. Beberapa bidang tersebut antara lain perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, perumahan, infrastruktur, layanan dasar, pekerjaan layak, ketahanan pangan, kesehatan publik –

termasuk pandemi virus korona –yang tengah melanda seluruh belahan dunia.[1]

Terdapat berbagai nuansa pemikiran tentang urbanisasi di tingkat global, dari pemikiran tradisional bahwa urbanisasi menciptakan dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan penurunan jumlah penduduk desa, maupun pemikiran lebih kini tentang potensi urbanisasi untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam berbagai pertimbangan, dilema tersebut tumbuh dari kesadaran bahwa meskipun kota memegang kunci untuk menyelesaikan berbagai tantangan keberlanjutan dunia, model pembangunan perkotaan saat ini tidak berkelanjutan. Sejauh ini, meski mandat dari TPB adalah "tidak meninggalkan seorang pun" ("*leave no one behind*"), kebijakan pembangunan perkotaan masih terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sebaliknya, kecenderungannya justru meningkat di seluruh dunia. Padahal, jika direncanakan dan dikelola secara tepat, urbanisasi dapat berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan.[2]

Kota menjadi perhatian baru pembangunan internasional disebabkan oleh adanya pertumbuhan demografi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dampak perubahan iklim, peningkatan keterpaparan manusia terhadap bencana alam dan berbagai risiko lainnya. Penerimaan komunitas internasional akan potensi positif urbanisasi merupakan kelanjutan dari pemikiran ekologis. Jika aktivitas di kota, misalnya saja konsumsi yang tidak terkendali, memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan global dan dapat mendorong planet ini melampaui batas ekologisnya.[3]

Kota menjadi perhatian baru pembangunan internasional disebabkan pertumbuhan demografi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dampak perubahan iklim, peningkatan keterpaparan manusia terhadap bencana alam dan berbagai risiko perkotaan lainnya.

Kenaikan citra urbanisasi dalam diskusi kebijakan global merupakan hasil advokasi dan aktivitas dari Koalisi Kelompok 77+Tiongkok yang terdiri dari negara-negara berkembang di PBB. Kelompok tersebut bekerja dalam proses-proses multilateral yang membentuk prioritas pembangunan global. Upaya diplomatik mereka juga didukung oleh United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN), sebuah badan yang dibentuk di bawah pengawasan Sekretariat Jenderal PBB dan UN-Habitat. Bekerja sama dengan aktor-aktor kunci dari seluruh sektor perkotaan, kelompok tersebut membentuk Kampanye untuk TPB Perkotaan, yang berhasil merundingkan masuknya perkotaan sebagai salah satu tujuan tersendiri pada saat negosiasi TPB yaitu TPB 11.[4] Dengan ratifikasi TPB di tahun 2015, pertemuan Majelis Umum PBB yang juga dihadiri Paus Fransiskus, diikuti proses multilateral yang paling partisipatif dalam sejarah PBB, maka urbanisasi menjadi pusat perhatian global. Kompleksitas untuk mencapai kesepakatan global dalam mengamankan tujuan perkotaan dan menyetujui agenda yang menarik semua pihak merupakan bagian dari proses yang dideskripsikan sebagai perang politik yang penting. Proses tersebut dicirikan dengan adanya berbagai variasi atau bahkan konflik kepentingan yang dipegang masing-masing aktor. Ciri lainnya adalah kompetisi berbagai prioritas, yang memaksa pendukung urbanisasi berkelanjutan membuat beberapa kumpulan studi kasus yang menonjolkan kota sebagai pusat pendorong utama prioritas pembangunan global.[5]

Kajian kasus tersebut dapat sukses karena besarnya optimisme terkait urbanisasi sejak awal Abad 20, khususnya peran penting kota-kota di negara maju. Gerakan "revolusi devolusi" menyerukan adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kota juga diyakini dapat mengambil tindakan yang lebih tepat daripada negara yang bekerja lintas batasan dalam menghadapi berbagai masalah bersama. Hal tersebut juga akan membangkitkan politik kawasan perkotaan di arena diplomatik.[6]

Addis Ababa, Ethiopia. © Eduardo Moreno

Komunitas peneliti internasional berperan penting dalam mengedepankan pertanyaan terkait perkotaan. Mereka membantu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan memprioritaskan bukti dan ide dari seluruh pertanyaan yang kompleks dan beragam bentuk. Sebagai contoh, dalam beberapa dekade terakhir ini perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan alam, telah mengangkat fokus penelitian perkotaan yang lebih tinggi sebagai upaya bersama untuk menunjukkan jika "kota-kota tidak harus menjadi kumpulan limbah lingkungan".[7] Menghidupkan kembali "ilmu kota" telah meningkatkan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, di mana sebagian besar disebabkan oleh keterkaitan teknologi dan pembangunan.

Kemunculan agenda global dari proses multilateral merupakan pengakuan akan pentingnya kota dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 tidak hanya sebagai landasan untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan, tapi juga menyediakan platform multilateral untuk kota-kota membangun dan memperkuat kerjasama serta mendapat sumber daya tambahan demi peningkatan pembangunan perkotaan berkelanjutan.[8] Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 dideskripsikan sebagai "ekspresi terkuat saat ini dari komunitas pembangunan internasional terkait peran penting kota-kota dalam membentuk masa depan planet ini."[9] Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 diyakini akan:

i. Mendidik para pemimpin serta masyarakat umum dan memfokuskan perhatian politik pada tantangan perkotaan yang mendesak dan peluang masa depan.
ii. Mengarahkan dan memberdayakan semua aktor perkotaan dalam penyelesaian masalah praktis, sehingga mereka dapat bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
iii. Mengatasi tantangan spesifik kemiskinan perkotaan dan akses ke infrastruktur serta perumahan yang dibiayai secara efektif, yang memberikan manfaat bagi seluruh TPB.
iv. Mendorong rancangan infrastruktur dan pelayanan jasa yang terintegrasi dan inovatif, menggunakan solusi berbasis teknologi dan efisiensi energi.

v. Mendorong perencanaan guna lahan dan konsentrasi spasial yang efisien, sambil membawa pendekatan teritorial ke dalam TPB.
vi. Memastikan ketangguhan perkotaan terhadap perubahan iklim dan penurunan risiko bencana, dan
vii. Memberikan peluang pemerintah kota dan daerah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.[10]

Beberapa isu penting yang muncul dari implementasi TPB 11 diringkas dalam Kotak 1.1

Kotak 1.1: Pandangan dari bawah: Apa yang diungkapkan oleh Voluntary National Reviews (VNRs) dari TPB 11

Negara-negara anggota PBB mengirimkan laporan kemajuan pencapaian TPB setiap tahunnya secara sukarela pada sebuah kegiatan yang disebut Forum Politik Tingkat Tinggi (High-Level Political Forum (HLPF)). Pada 2018, TPB 11 adalah salah satu dari enam TPB yang ditinjau. Analisis UN-Habitat terhadap 46 Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Reviews (VNRs)) untuk TPB 11 mengungkapkan jika Negara-negara Anggota menerapkan berbagai pendekatan dalam pencapaian tujuan untuk "membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan". Pendekatan tersebut disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Gagasan untuk tidak meninggalkan siapa pun atau suatu tempat sangat terlihat dalam VNRs. Gagasan tersebut berkaitan erat dengan strategi nasional dan isu spesifik, seperti perumahan, pertumbuhan permukiman kumuh, kesenjangan desa-kota dan kesetaraan gender, dan ruang publik. Negara-negara anggota juga fokus pada kelompok rentan seperti difabel, perempuan, pemuda dan lansia.

Di negara yang sangat urban, topik yang sering muncul antara lain konektivitas desa-kota, depopulasi, transportasi berkelanjutan, ketangguhan terhadap perubahan iklim, ekonomi hijau dan polusi. Dari laporan seluruh negara yang menangani pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, hanya beberapa negara yang mendiskusikan bantuan untuk negara berkembang yang rawan bencana. Dalam laporan tersebut, penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembuatan kebijakan dan respon terhadap tantangan perkotaan sangat menonjol, seperti yang dijelaskan dalam gagasan "kota cerdas".

Negara-negara pelopor dari Asia dan Afrika mengakui pentingnya berinvestasi di kota. Namun, di kawasan-kawasan tersebut pertumbuhan urbanisasi yang tinggi sering diasosiasikan dengan eksternalitas negatif yang perlu ditangani. Lebih dari 90 persen negara juga melaporkan tantangan terkait perumahan dan kebutuhan untuk membentuk program perumahan sosial untuk memotong perkembangan perumahan informal. Selain itu, 82 persen negara pelapor menekankan pentingnya berinvestasi pada transportasi yang aman dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas dalam kota. Negara-negara pelapor juga mendukung penggunaan sistem transportasi tidak bermotor untuk mengejar pelayanan transportasi yang lebih berkelanjutan dan kota yang hijau, ramah pejalan kaki. Meskipun banyak kota menyadari dasar TPB dan NUA yang saling terkait, mereka hanya menampilkan sedikit intervensi kebijakan yang memanfaatkan hubungan tersebut.

Untuk memastikan pencapaian TPB 11, VNR mengidentifikasi empat area kunci yang perlu ditingkatkan, antara lain:

i. Menghidupkan kembali tata kelola dan partisipasi masyarakat sipil: membangun institusi dan struktur yang efektif untuk mengawasi implementasi rencana perkotaan nasional; meningkatkan kolaborasi tata kelola perkotaan dengan pemangku kepentingan; meningkatkan partisipasi masyarakat sipil; dan mengintegrasikan perencanaan kota ke dalam pembangunan lokal.
ii. Memperkuat mekanisme finansial: Membangun kerangka finansial yang menarik investasi berkelanjutan; mempromosikan desentralisasi fiskal terutama di negara-negara berkembang; meningkatkan peran kota-kota dan wilayah perkotaan yang produktif; dan meningkatkan kolaborasi dengan bank pembangunan internasional dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi perkotaan yang sesuai dengan prinsip NUA.
iii. Peningkatan kapasitas: menambah SDM; dan meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan serta pegawai teknis untuk mengimplementasikan NUA dan aspek perkotaan dalam TPB.
iv. Teknologi dan informasi: meningkatkan penggunaan teknologi untuk memproduksi data yang dapat diakses semua orang untuk mengawasi dan mengelola pembangunan perkotaan dengan lebih baik.

Sumber: UN-Habitat, 2019a

Selain TPB 11 yang secara eksplisit menangani kota dan komunitas yang berkelanjutan, hampir semua tujuan membutuhkan proses penanganan yang serius di tingkat kota agar dapat tercapai. Selain itu, banyak target-target yang relevan dengan pemerintah daerah, selain yang memang berkaitan khusus dengan TPB perkotaan. Analis pembangunan berpendapat jika 65 persen target TPB berisiko tidak tercapai jika para pemangku kepentingan perkotaan tidak diberikan peran yang jelas dalam implementasi agenda tersebut.[11]

Menerima bahwa kita hidup di dunia yang didominasi oleh perkotaan membuat kita lebih mudah untuk menghargai kota sebagai titik penting pembangunan. Namun, dalam memberikan pertimbangan besar terhadap perkotaan tersebut, perlu dicatat meskipun saat ini hampir semua orang setuju jika kota itu penting dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar, masih terdapat perdebatan yang tersisa tentang mengapa dan bagaimana kota dapat dan harus memberikan nilai tambah pada tujuan di tahun 2030.

1.2 Kota dan Pembangunan: Isu Abadi

Kota dan urbanisasi memiliki hubungan yang panjang dan erat dengan pembangunan. Namun, apa yang terjadi di kota tidak selalu dikaitkan dengan proses yang ada di nasional maupun global. Terutama ketika penduduk dunia tinggal di perkotaan hanya sedikit, perumus kebijakan dengan mudahnya mengabaikan kota sebagai suatu hal yang tidak membutuhkan perhatian khusus dan dapat mandiri. Hal yang baru saat ini adalah melihat kota sebagai bagian dari sistem global. Ada lebih banyak perhatian pada skala dan intensitas proses perkotaan saat ini dan ke depannya karena hubungan dan pergerakan antara kota dan negara. Keterkaitan kota dan negara telah meningkatkan kehidupan di kota secara signifikan dalam membentuk dinamika dunia. Kemunculan ”agenda perkotaan global” diabadikan dalam kesepakatan multilateral menandai pengakuan formal dari negara-negara anggota PBB bahwa proses perkotaan merupakan kunci pembangunan berkelanjutan di skala dunia. Agenda perkotaan global tersebut antara lain Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Agenda Baru Perkotaan, Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim, dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030.

Kota menjadi pusat perdebatan pembangunan karena apresiasi tinggi pada sifat dan manfaat yang menyertai urbanisasi yang direncanakan dengan baik.

Kota menjadi pusat perdebatan pembangunan karena apresiasi tinggi pada sifat dan manfaat yang menyertai urbanisasi yang direncanakan dengan baik. Ketika direncanakan dengan baik, urbanisasi diasosiasikan dengan produktivitas yang lebih besar, peluang-peluang, dan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua.[12] Kota-kota dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kebebasan masyarakat. Perubahan institusi yang terus meningkat – seperti kemajuan wanita, kesetaraan gender dan perluasan hak kelompok minoritas –umumnya pertama kali terjadi di kota (Bab 5). Negara-negara yang didominasi perkotaan biasanya dikaitkan dengan hasil pembangunan yang positif misalnya pendapatan yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan institusi yang kuat serta berketahanan. Hasil positif tersebut selanjutnya akan dapat memungkinkan ekonomi untuk bertahan dari guncangan global, meningkatkan akuntabilitas demokrasi, kesetaraan gender dan teknologi inovasi yang lebih besar.[13]

Manfaat kumulatif tersebut mengarah pada satu kesimpulan: Ada manfaat intrinsik yang berkaitan dengan urbanisasi yang berkelanjutan. Urbanisasi sebelumnya merepresentasikan peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan penghuni kota maupun warga terkait lainnya.[14] Dengan meningkatnya perhatian global dan nasional terhadap perkotaan, pertanyaan bagaimana dan mengapa urbanisasi berkembang menjadi penting. Dengan adanya agenda perkotaan, maka urbanisasi telah ditulis sebagai politik global kontemporer melalui berbagai sektor dan jenis disiplin ilmu.[15] Lebih lanjut, berbagai tradisi teoritis dan disipliner yang digunakan untuk legitimasi NUA – pandangan umum tentang kota sebagai alat pembangunan daripada hanya sebagai dokumen hasil negosiasi – memiliki cara masing-masing untuk mengonseptualisasikan proses perkotaan sebagai

obyek pertanyaan dan intervensi.[16] Status yang diberikan pada agenda perkotaan merupakan bagian dari fungsi kerangka sektoral dan intelektual yang tidak seimbang. Penggunaan konsep dasar tersebut kemudian tertanam dalam praktek profesional, termasuk dalam mendefinisikan indikator yang merujuk pada manfaat tertentu dibanding masalah-masalah lain.

Namun, dalam mempromosikan sektor perkotaan baik dalam dunia politik maupun pembangunan global dan mendorong kota-kota agar terlihat lebih jelas sebagai sesuatu yang tidak dapat diabaikan, masih terdapat kesan-kesan yang salah. Terdapat kesepakatan terkait mengapa masyarakat, sumber daya, dan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di suatu wilayah geografis tertentu menjadi begitu penting. Dalam membuat argumen umum untuk kota, berbagai fenomena dan pengetahuan perkotaan telah diberikan secara lebih menonjol atau jelas. Berdasarkan kecenderungan tersebut, penting untuk tidak hanya menggambarkan isi dan penekanan dalam NUA, tapi juga hal yang tidak terhubung dan hal yang tidak dicantumkan. Dengan begitu, simplifikasi atau perayaan yang berlebihan dengan mengambil contoh-contoh yang sudah ada ketika berbicara mengenai implikasi dari dunia yang semakin mengota dan lanskap kebijakan global, dapat dicegah.

1.3 Implementasi Agenda Baru Perkotaan

Meskipun sangat bermanfaat, urbanisasi muncul di tengah-tengah berbagai tantangan bumi yang belum terselesaikan. Banyak kota yang menderita karena dampak perubahan iklim, kesenjangan dan eksklusi, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pelayanan dasar yang belum merata dan kesempatan ekonomi untuk pemuda serta kelompok minoritas yang minim. Ditambah lagi, kerangka regulasi yang tidak tegas membuat kelompok elit dan penguasa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari urbanisasi melalui spekulasi perumahan, atau bahkan akses langsung aset kota yang layak.[17] Di samping itu, proses urbanisasi di berbagai konteks didasari dari model lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tidak berkelanjutan.[18] Dalam konteks tersebut, proses urbanisasi yang tidak berkelanjutan dapat mengikis manfaat yang terkandung di dalamnya.

Banyak kota yang menderita karena dampak perubahan iklim, kesenjangan dan eksklusi, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pelayanan dasar yang belum merata dan kesempatan ekonomi untuk pemuda serta kelompok minoritas yang minim.

Di tengah berbagai tantangan urbanisasi yang sulit dan muncul terus menerus, NUA menyediakan peta jalan yang berbasis aksi untuk memberikan pedoman urbanisasi berkelanjutan secara global pada tahun 2036. Dalam banyak hal, NUA merepresentasikan perubahan paradigma untuk:

a. Mengubah cara kota dan permukiman direncanakan, dibiayai, dibangun, dipimpin dan dikelola, sambil mengenali pembangunan perkotaan dan kewilayahan yang berkelanjutan sebagai pencapaian penting dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan untuk semua.
b. Mengakui peran utama pemerintah pusat, sewajarnya, dalam definisi dan implementasi kebijakan serta peraturan perkotaan yang inklusif dan efektif untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan pentingnya kontribusi yang setara dari pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), serta masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain yang relevan, dengan cara yang transparan dan akuntabel.
c. Mengadopsi pendekatan pembangunan perkotaan dan teritorial yang berkelanjutan, berpusat pada manusia, peka umur dan gender serta terintegrasi dengan mengimplementasikan kebijakan, strategi, kapasitas pembangunan dan aksi di semua tingkatan.[19]

Agenda Baru Perkotaan berpatokan pada tiga komitmen transformatif yang berdasarkan pada dimensi pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan – sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komitmen transformatif tersebut antara lain: pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi

sosial dan mengakhiri kemiskinan; kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan inklusif untuk semua; dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.[20] Nilai urbanisasi berkelanjutan dibahas di bab 3, 4, dan 5 yang merangkum tiga komitmen transformatif dari NUA. Implementasi NUA yang efektif, yang menjadi akselerator Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dapat meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan melalui penciptaan kota inklusif secara sosial di mana kemiskinan dihilangkan; penciptaan kemakmuran dan peluang perkotaan yang inklusif untuk semua; dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan. Tentu saja, NUA juga menawarkan visi global untuk masyarakat, planet dan kemakmuran jangka panjang di mana urbanisasi menempati posisi penting untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

NUA memberikan penekanan pada implementasi yang efektif pada skala lokal dan peran pemerintah daerah.

Agenda Baru Perkotaan memberikan penekanan pada implementasi yang efektif pada skala lokal dan peran pemerintah daerah. Hal itu menegaskan "pembangunan perkotaan berkelanjutan menjadi tahap penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan cara yang terintegrasi dan terkoordinasi di skala global, regional, nasional, provinsi dan lokal."[21] Implementasi NUA berkontribusi pada pencapaian dan pelokalan TPB dengan menyediakan kerangka implementasi untuk penyampaian beberapa TPB yang terintegrasi di skala kota. Secara khusus, kerangka tersebut mencakup ranah baru atau belum pernah dibahas dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yaitu sarana tambahan untuk implementasi dan pelokalan.

Dengan diadopsinya NUA, tugas utamanya adalah membentuk kerangka yang memungkinkan implementasi yang efektif di tingkat nasional, provinsi dan lokal yang dapat menempatkan NUA ke TPB. Dampak NUA akan bergantung pada efektivitas implementasi dan seberapa luas pengarusutamaannya pada kebijakan pembangunan. Pendekatan urbanisasi berkelanjutan yang terintegrasi oleh berbagai aktor, serta peningkatan koordinasi dan koherensi, adalah penting untuk implementasi NUA.

Sesuai dengan cara kerja normatif dan operasionalnya, UN-Habitat mengajukan Kerangka Kerja Aksi untuk Implementasi NUA (Action Framework for Implementation of the New Urban Agenda (AFINUA)).[22] Kerangka tersebut didesain sebagai dasar pencapaian dimensi perkotaan dari TPB, serta kerangka pembangunan internasional lain yang relevan dengan urbanisasi berkelanjutan – Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim, SFDRR, dan Agenda Aksi Addis Ababa (AAAA). AFINUA mengidentifikasi bahan dasar untuk implementasi NUA, siapa yang harus memimpin, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana menghubungkannya dengan program-program dalam NUA. AFINUA mengemukakan lima tema, yang dapat disebut sebagai "elemen urbanisasi yang terencana": kebijakan perkotaan nasional (KPN); undang-undang perkotaan, peraturan dan perundang-undangan; integrasi rancangan kota dengan perencanaan kewilayahan; ekonomi kota dan keuangan daerah; dan implementasi lokal.

Elemen-elemen tersebut membutuhkan dukungan politis pada tingkat nasional dan kapasitas yang memadai di tingkat daerah. Dalam kondisi ideal, elemen-elemen tersebut harus saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Hubungan tersebut tidak akan muncul secara otomatis, tapi perlu difasilitasi oleh kebijakan, perencanaan, dan institusi yang efisien. Upaya tersebut melibatkan prioritas aksi serta pemilihan intervensi melalui keputusan dan pemantauan yang tepat. Tindakan harmonisasi strategi ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada efektivitas AFINUA.

Perwujudan kesenjangan spasial di Mumbai, India
© Johnny Miller Photography

1.3.1 Hubungan antara NUA dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.[23]

Agenda Baru Perkotaan menekankan pada pentingnya bertindak berdasarkan keterkaitan antara agenda-agenda pembangunan global. Fokusnya adalah pemerintah pusat harus bermitra dengan pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, kelompok akar rumput, harus melakukan perubahan untuk memastikan kota dan permukiman direncanakan, dibangun, dan dikelola secara berkelanjutan. Agenda Baru Perkotaan mempromosikan visi tersebut karena ada dimensi spasial dalam pembangunan berkelanjutan. Lingkungan terbangun yang merupakan tempat masyarakat tinggal, bekerja, belajar, dan bermain akan mempengaruhi hasil pembangunan mereka. Dalam pengakuan keterkaitan dengan agenda global lainnya, NUA melengkapi TPB 11 dengan memberikan penjelasan lebih detail terkait aksi strategis yang dibutuhkan kota dan permukiman untuk mendukung dan memfasilitasi implementasi Agenda 2030 dan TPB yang efektif. Agenda Baru Perkotaan adalah dokumen internasional pertama yang disetujui yang mendetailkan implementasi dimensi perkotaan dari TPB. Dokumen tersebut dibuat berdasarkan TPB 11 tapi menangani masalah urbanisasi dan permukiman yang lebih luas.

Urbanisasi berkelanjutan yang dijabarkan dalam NUA memiliki peran kunci dalam Dekade Aksi PBB untuk mengakselerasikan solusi yang berkelanjutan dari masalah-masalah terbesar dunia.[24] Dalam waktu 10 tahun tersisa untuk mencapai TPB, perlu adanya penekanan kembali mengenai pentingnya urbanisasi berkelanjutan sebagai titik masuk untuk memastikan kemajuan lintas berbagai kebutuhan TPB. Ketika direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menjadi katalis perwujudan beberapa TPB yang terkait kota. Urbanisasi yang direncanakan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, mengatasi perubahan iklim, meningkatkan kesetaraan gender, menyediakan peluang pekerjaan yang produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta dampak positif lainnya.

Dalam sisa waktu 10 tahun untuk mencapai TPB, perlu menekankan pentingnya urbanisasi berkelanjutan sebagai titik masuk untuk memastikan kemajuan lintas berbagai kebutuhan TPB

Sifat sektoral TPB membutuhkan kerangka spasial, yang disediakan oleh NUA. Misalnya saja, akan mustahil mengatasi kemiskinan (TPB 1), kesenjangan (TPB 10), perubahan iklim (TPB 13), kesetaraan gender (TPB 5), air bersih dan sanitasi (TPB 6), pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak (SDG 8), industrialisasi dan inovasi (TPB 9) dan pola konsumsi dan produksi (TPB 12) tanpa menangani cara kota direncanakan dan dikelola.

Sebagian besar tujuan dan target TPB yang relevan dengan kota dan permukiman lebih fokus pada masyarakat, rumah tangga, dan komunitas daripada proses. Sebagai contoh, sarana implementasi pada TPB 11 sangat terbatas. Target dari TPB 11 meliputi aspek seperti keterkaitan desa-kota (11a), rencana kebertahanan (11b), dan material bangunan lokal (11c). Target-target tersebut belum mencakup cara paling relevan dari implementasi yang dibutuhkan untuk mencapai urbanisasi berkelanjutan. Sama halnya dengan sarana implementasi dari TPB lain yang relevan dengan perkotaan (air bersih, energi, industrialisasi dan perubahan iklim) tidak memasukkan beberapa syarat penting dalam konteks kota dan permukiman. Jurang antara tersebut diisi oleh sarana implementasi yang dielaborasikan dalam dokumen NUA.

Salah satu cara NUA memperluas sarana implementasi Agenda 2030 dan TPB adalah dengan menyentuh strategi spasial dan kerangka tata kelola utama untuk implementasi Agenda 2030 dan TPB dalam lingkup perkotaan seperti KPN, perundang-undangan, perencanaan spasial dan kerangka keuangan lokal. Kerangka-kerangka tersebut, yang berpusat pada NUA, akan memfasilitasi implementasi tidak hanya TPB 11 tapi juga TPB lain dalam lingkup kota.

Di beberapa aspek, misalnya pelayanan dasar perkotaan, NUA memperdalam cakupan beberapa target TPB 11. Sebagai contoh, transportasi digambarkan lebih

komprehensif dalam NUA daripada dalam TPB, di mana hanya terbatas pada target 11.2 (akses ke transportasi umum) dan 3.6 (kecelakaan lalu lintas). Sebaliknya, NUA memiliki beberapa rekomendasi yang menyinggung transportasi berkelanjutan dan mobilitas. Rekomendasi tersebut misalnya bangkitan lalu lintas dan pelayanan transportasi berkelanjutan; keterkaitan desa-kota; tata kelola permintaan perjalanan; keselamatan lalu lintas; perubahan iklim, kualitas udara dan efisiensi energi; transportasi barang; guna lahan, perencanaan transportasi perkotaan; keterbatasan akses transportasi, keadilan dan inklusi; peningkatan kapasitas; dan pembiayaan transportasi yang berkelanjutan. NUA tidak hanya memperdalam cakupan implementasi, tapi juga merespon yang lebih terintegrasi pada skala kota, hingga menyediakan peta jalan yang lebih rinci yang akan membantu pembuat kebijakan dalam menciptakan masa depan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Meskipun telah menjadi dokumen yang dinegosiasikan dan disetujui oleh Negara-negara Anggota, NUA menekankan pada implementasi pada skala lokal. Berdasarkan hal tersebut, Bab 7 mendiskusikan kontribusi penting dari pemerintah daerah dalam membuka nilai urbanisasi berkelanjutan. Walaupun Agenda 2030 juga mengakui pentingnya implementasi pada skala lokal dan pentingnya peran pemerintah daerah, agenda tersebut meletakkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam posisi yang sama dengan kelompok mayoritas dan pemangku kepentingan lain sementara pemerintah pusat diberikan keunggulan. Agenda Baru Perkotaan lebih menekankan pada distribusi kekuasaan yang lebih seimbang untuk implementasi dimensi perkotaan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan pemerintah daerah. Peran tersebut sudah sewajarnya mengingat pemerintah daerah sudah terbiasa memfasilitasi pembangunan dan menyediakan pelayanan langsung ke rumah tangga, serta mengawasi pembangunan spasial melalui kebijakan perencanaan daerah, tata kelola, dan keuangan. Konsekuensinya, NUA juga menekankan pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan aktor lokal lainnya untuk mengimplementasikan NUA dan TPB.

Mengingat substansi NUA yang menangani masalah perkotaan yang lebih luas daripada TPB, NUA membutuhkan tindak lanjut dan proses tinjauan tersendiri, yang terdiri atas rangkaian laporan setiap empat tahun, peninjauan paruh waktu NUA (Quito+10) dan dialog tahunan saat Forum Perkotaan Dunia (World Urban Forum (WUF)) dan UN-Habitat Governing Council. Tindak lanjut dan proses peninjauan kembali merupakan pelengkap proses serupa yang dilakukan untuk Agenda 2030 dan TPB, yang bersimpangan rutin setiap tiga tahun sekali dengan HLPF membahas TPB 11. Sebelum peninjauan paruh waktu TPB di tahun 2022, hasil tindak lanjut dan peninjauan kembali NUA harus dapat digunakan untuk memberikan masukan pada keseluruhan proses tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda 2030 dan TPB.

Laporan empat tahunan pertama implementasi NUA, yang diterbitkan 18 bulan setelah agenda tersebut diadopsi, memberikan banyak pelajaran, tantangan dan peluang.[25] Dalam beberapa kasus, terdapat tingkat kesadaran yang rendah terkait potensi manfaat dari urbanisasi dan komitmen terkait perkotaan yang dibuat dalam agenda pembangunan global. Pemerintah pusat terbebani dengan rendahnya kapasitas institusi maupun keuangan dan struktur tata kelola pemerintahan yang berjenjang serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang lemah. Implementasi NUA membutuhkan aksi-aksi lokal; aksi seperti ini membutuhkan kapasitas kelembagaan, organisasi, kebijakan dan finansial yang terkadang terbatas atau kurang berkembang di banyak negara. Kapasitas untuk memperkuat kekuasaan dan otonomi daerah di banyak negara masih rendah, dan masih banyak kota yang selalu kekurangan sumber daya finansial dan kapasitas teknis untuk mengelola tantangan-tantangan urbanisasi.

Agenda Baru Perkotaan lebih menekankan pada distribusi kekuasaan yang lebih seimbang untuk implementasi dimensi perkotaan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan pemerintah daerah.

1.4 Kondisi dan Kecenderungan Perkotaan Global Terkini

Agenda Baru Perkotaan, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan kerangka global lain yang relevan dengan urbanisasi berkelanjutan diadopsi dalam masa-masa perubahan dan penuh tantangan besar global. *Deklarasi Kuala Lumpur: Kota 2030* diadopsi pada WUF Kesembilan tahun 2018 mengakui beberapa tren dan tantangan khas dunia yang semakin mengota. Contohnya adalah kesempatan yang semakin terbatas untuk pembangunan kota kolektif, ketidakmerataan akses ke pelayanan perkotaan, kesenjangan gender dalam ekonomi dan kepemimpinan perkotaan, perlindungan yang kurang memadai terhadap pelanggaran hak manusia seperti penggusuran paksa.[26] *Aksi yang Dideklarasikan Abu Dhabi* (*Abu Dhabi Declared Actions*) yang diadopsi pada WUF Kesepuluh tahun 2020 bergeser dari tantangan ke solusi seiring dengan adanya dukungan organisasi internasional, pemerintah daerah dan regional, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi dan kelompok lain yang satu per satu mendeklarasikan komitmennya untuk mempercepat implementasi NUA.[27] Dari tantangan tersebut, banyak di antaranya semakin menguat sejak 2016 dan semakin diperparah dengan wabah virus korona baru-baru ini, termasuk berbagai solusi untuk menanganinya, merupakan hal yang penting untuk pencapaian urbanisasi yang berkelanjutan. Tren tersebut juga memiliki implikasi untuk mengurai nilai urbanisasi berkelanjutan.

1.4.1 Perubahan Demografi dan Tren yang Berkaitan

Dunia terus mengalami peningkatan jumlah penduduk kotanya meskipun tingkat urbanisasi di beberapa wilayah mulai melambat sejak beberapa dekade lalu. Namun, wilayah perkotaan diperkirakan akan menyerap hampir seluruh pertumbuhan penduduk dunia di masa depan. Pada saat adopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2015, 54 persen (4 milyar) penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan (Tabel 1.1); pada akhir 20 tahun implementasi NUA yaitu tahun 2036, 62 persen (5,4 milyar) penduduk global diperkirakan tinggal di daerah perkotaan.[28] Sembilan puluh enam persen pertumbuhan perkotaan akan terjadi di daerah-daerah yang kurang berkembang di Asia Timur, Asia Selatan dan Afrika dengan tiga negara –India, Tiongkok, Nigeria– berkontribusi pada 35 persen dari total penambahan penduduk perkotaan dunia dari 2018 sampai 2050.[29] Negara-negara tersebut diperkirakan menambah masing-masing 416 juta, 255 juta, dan 189 juta penduduk perkotaan baru.

Tabel 1.1: Populasi penduduk perkotaan dan tingkat urbanisasi (2000-2035)

Wilayah	Populasi perkotaan (juta)								Persentase perkotaan							
	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Dunia	2868	3216	3595	3981	4379	4775	5167	5556	46.7	49.2	51.7	53.9	56.2	58.3	60.4	62.5
Negara Berpendapatan Tinggi	822	870	919	955	989	1019	1049	1076	76.8	78.6	80	80.9	81.9	82.8	83.9	85.0
Negara Berpendapatan Menengah	1935	2211	2511	2825	3145	3456	3757	4045	41.6	44.7	47.9	50.8	53.7	56.5	59	61.5
Negara Berpendapatan Rendah	109	133	162	199	243	296	359	432	25.7	27.2	28.9	30.9	33.2	35.7	38.3	41.2
Afrika	286	341	409	492	588	698	824	966	35	36.9	38.9	41.2	43.5	45.9	48.4	50.9
Asia	1400	1631	1877	2120	2361	2590	2802	2999	37.5	41.2	44.8	48	51.1	54	56.7	59.2
Eropa	517	525	538	547	557	565	573	580	71.1	71.9	72.9	73.9	74.9	76.1	77.5	79.0
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia	397	433	470	505	539	571	600	627	75.5	77.1	78.6	79.9	81.2	82.4	83.6	84.7
Amerika Utara	247	262	277	291	305	320	335	349	79.1	80	80.8	81.6	82.6	83.6	84.7	85.8
Oseania	21	23	25	27	29	31	33	35	68.3	68	68.1	68.1	68.2	68.5	68.9	69.4

Sumber: PBB, 2018b

Tabel 1.2: Perubahan proporsi penduduk perkotaan 2000-2035

Wilayah	Laju Rata-Rata Tahunan Perubahan Populasi Perkotaan							Keseluruhan Periode
	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2000-2035
Dunia	2.29%	2.23%	2.04%	1.90%	1.73%	1.58%	1.45%	1.89%
Negara Berpendapatan Tinggi	1.13%	1.11%	0.76%	0.69%	0.61%	0.57%	0.51%	0.77%
Negara Berpendapatan Menengah	2.67%	2.54%	2.36%	2.14%	1.89%	1.67%	1.48%	2.11%
Negara Berpendapatan Rendah	3.90%	3.98%	4.08%	4.03%	3.96%	3.85%	3.70%	3.93%
Afrika	3.52%	3.61%	3.70%	3.58%	3.44%	3.32%	3.19%	3.48%
Asia	3.06%	2.80%	2.43%	2.16%	1.84%	1.58%	1.35%	2.18%
Eropa	0.33%	0.46%	0.35%	0.35%	0.30%	0.28%	0.26%	0.33%
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia	1.74%	1.61%	1.47%	1.30%	1.15%	1.00%	0.85%	1.30%
Amerika Utara	1.13%	1.13%	0.95%	0.95%	0.96%	0.92%	0.84%	0.98%
Oseania	1.35%	1.78%	1.54%	1.42%	1.30%	1.24%	1.18%	1.40%

Sumber: PBB, 2018b

Dengan 2,3 milyar penduduk tinggal di kota, Asia memiliki jumlah penduduk perkotaan tertinggi di seluruh dunia. Sekitar 50,1 persen kawasan Asia telah mengota dan menyumbang 54 persen dari jumlah penduduk perkotaan dunia.[30] Proses urbanisasi di Asia, khususnya Asia Tenggara, sangat berkaitan dengan transisi ekonomi dan integrasi yang lebih besar dengan ekonomi global. Hal itu disebabkan oleh banyak kota yang menjadi penerima investasi asing secara langsung, utamanya dalam bentuk kontrak pabrik barang konsumsi dari perusahaan induknya di negara maju. Urbanisasi di Asia Tenggara mengarah ke transformasi ekonomi di seluruh kawasan seiring dengan pekerja yang semakin tertarik ke sektor jasa.[31] Dengan demikian, pusat kegiatan ekonomi di Asia hampir semuanya berdasarkan pada kegiatan perkotaan seiring kota-kotanya yang berkembang dengan investasi, infrastruktur, inovasi dan kompetisi

Laju pertumbuhan perkotaan sangat bervariasi di seluruh dunia. Laju pertumbuhan tertinggi terdapat di kawasan-kawasan berkembang. Afrika mengalami urbanisasi yang sangat cepat pada angka 3,7 persen setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai 2015 (Tabel 1.2). Gambaran tersebut diproyeksikan akan sedikit menurun ke 3,57 persen antara tahun 2015 sampai 2020, namun masih akan menjadi tertinggi dari seluruh kawasan. Urbanisasi di Afrika yang sangat cepat, utamanya, disebabkan oleh pertumbuhan alamiah, migrasi desa-kota dan ekspansi pemukiman perkotaan melalui pencaplokan dan reklasifikasi kawasan perdesaan.

Dibandingkan dengan kawasan berkembang lainnya, Afrika menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih rendah dari kawasan lain dengan tingkat urbanisasi yang hampir sama.[32] Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan Afrika belum memetik manfaat dari potensi pembangunan ekonomi dari urbanisasi. Sebaliknya, negara-negara Asia Timur dan Pasifik dengan tingkat urbanisasi di atas 50 persen pada tahun 2009 memiliki PDB per kapita rata-rata USD 5.300. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang setengahnya telah menjadi perkotaan pada tahun 1981 memiliki PDB per kapita rata-rata USD 3.700. Amerika Latin dan Kepulauan Karibia yang melewati ambang 50 persen pada tahun 1961 dengan PDB per kapita rata-rata USD 2.300. Sementara itu, kawasan Afrika Sub-Sahara saat ini telah 41,4 persen mengota dengan PDB per kapita rata-rata USD 1.574 (2018).[33]

Dibandingkan dengan kawasan berkembang lainnya, Afrika menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih rendah dari kawasan lain yang memiliki tingkat urbanisasi yang hampir sama.

Populasi perkotaan dunia yang berjumlah 4,3 milyar tersebut belum terdistribusi merata di antara permukiman yang besarnya berbeda-beda. Dunia telah menjadi saksi pertumbuhan konsentrasi penduduk di area yang sangat terurbanisasi, khususnya kota-kota mega (*megacities*) atau kawasan metropolitan yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 10 juta. Terdapat 33 kota mega di seluruh dunia, yang menyumbang pada 13 persen dari penduduk perkotaan dunia di tahun 2018, naik dari 9 persen pada tahun 2000. Amerika Latin paling bertanggung jawab dalam hal ini karena 18 persen penduduk perkotaannya tinggal di kota-kota mega. Meskipun kota mega terkenal karena ukurannya, konsentrasi kegiatan ekonomi dan pengaruhnya ke ekonomi global, kota-kota tersebut bukanlah tipe yang cepat berkembang dan tidak pula mewakili sebagian besar penduduk perkotaan. Dengan kata lain, kota-kota yang paling cepat berkembang adalah kota kecil dan sedang "menengah" atau "sekunder" dengan penduduk kurang dari 1 juta. Kota-kota itulah yang menyumbang 59 persen dari populasi penduduk dunia dan mayoritas penduduk perkotaan di masing-masing kawasan.[34] Pertumbuhan kota-kota menengah akan membantu memelihara hubungan desa-kota yang lebih baik dan meringankan beberapa masalah kualitas hidup, seperti perumahan informal yang merajalela, kerusakan lingkungan dan perjalanan ulang-alik yang lama, yang dapat mewabah di kota-kota mega.

Terlepas dari kepentingan demografis dan peran potensial dari kota-kota menengah, perencanaan kota di negara-negara berkembang memiliki fokus yang kurang proporsional pada masalah-masalah di kawasan metropolitan. Hal tersebut semakin memicu masalah adanya kota-kota yang sangat mendominasi. Jika kota-kota kecil dan sedang dapat mencapai potensi mereka, selanjutnya mereka seharusnya menjadi bagian dari agenda perencanaan perkotaan untuk negara-negara berkembang di Abad 20.[35] Dalam konteks tersebut, NUA mempromosikan penguatan peran kota-kota kecil dan menengah dalam menyediakan akses perumahan, infrastruktur, dan pelayanan yang berkelanjutan, terjangkau, layak, memadai, berketahanan, dan aman serta memfasilitasi hubungan perdagangan yang efektif di seluruh rangkaian kesatuan perkotaan-perdesaan.

Meskipun kota mega dikenal karena ukurannya, konsentrasi kegiatan ekonomi dan pengaruhnya ke ekonomi global, namun bukan merupakan kota yang paling pesat pertumbuhannya.

Gender, Pemuda dan Lansia

Urbanisasi memberikan momen yang unik untuk mempercepat kesetaraan gender. Pasalnya, urbanisasi kerap diasosiasikan dengan akses yang lebih besar ke peluang pendidikan dan pekerjaan, laju fertilitas yang lebih rendah dan peningkatan kemandirian. Namun, kesetaraan perempuan untuk "hak atas kota" masih belum terealisasi, terutama di antara perempuan yang memiliki penghasilan rendah.[36] Kenaikan jumlah rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan di kota dan partisipasi perempuan yang bekerja membutuhkan kriteria tambahan terkait lokasi rumah dengan tempat kerja dan pelayanan perkotaan, serta tata letak dan manajemen sistem transportasi.[37]

Laki-laki, perempuan, dan anak-anak memiliki pengalaman yang berbeda akan kota. Perbedaan tersebut tergantung pada aturan sosial, norma, dan budaya gender; diskriminasi terhadap perempuan seperti pelecehan; bias gender yang terlembaga; distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pengalaman tersebut menandakan jika nilai urbanisasi yang diterima akan berbeda berdasarkan gender masing-masing (Bab 2). Transportasi publik dapat memberikan kebebasan pada laki-laki untuk merasakan pengalaman kehidupan kota dengan terjangkau, tapi meningkatkan rasa khawatir bagi perempuan yang menjadi korban transportasi yang kurang aman. Sebagai contoh, lebih dari 60 persen perempuan pengguna transportasi publik di Kota Meksiko mengalami pelecehan seksual dalam perjalanan.[38] Ruang publik dapat menjadi tempat laki-laki mencari nafkah dengan menjual makanan di pinggir jalan, sesuatu yang belum tentu dapat dilakukan perempuan. Contohnya, 92 persen perempuan di Rabat, Maroko dan 68 persen perempuan di Quito, Ekuador mengalami pelecehan seksual di ruang publik.[39] Ketimpangan tersebut juga terlihat dari jumlah kepemilikan lahan (di mana hanya 25 persen perempuan yang menjadi pemilik lahan di Amerika Latin).[40]

Proyek MindtheStep di Sao Paulo, Brazil © UN-Habitat

Tren demografi yang penting dan berimplikasi pada kawasan perkotaan, terutama di negara-negara berkembang, adalah proporsi penduduk usia muda (usia 15-24) yang sangat besar.

Tren demografi yang penting dan berimplikasi pada kawasan perkotaan, terutama di negara-negara berkembang, adalah proporsi penduduk muda (usia 15-24) yang sangat besar. Jumlah penduduk dunia berusia muda diproyeksikan akan berjumlah 1,3 milyar pada tahun 2030.[41] Di banyak negara berkembang, penurunan angka kematian bayi dan peningkatan angka kelahiran dalam beberapa dekade telah mengakibatkan ledakan penduduk usia muda. Di Afrika, penduduk usia muda menyumbang 20 persen dari total populasi mereka dan 35 persen dari total penduduk usia muda di seluruh dunia.[42] Meskipun populasi penduduk berusia muda dapat memberikan tantangan untuk penyediaan pendidikan dan pekerjaan, hal tersebut dapat merupakan sebuah keuntungan untuk melawan dampak negatif dari COVID-19 (lihat sub bab 1.4.7). Di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Asia Selatan, dan Asia Barat, pemuda menyumbang 17-19 persen dari total penduduk. Di beberapa kawasan, potensi kepemudaan telah disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. Tingginya tingkat pengangguran muda di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia dikaitkan dengan berkembangnya mafia pemuda dan tingkat kejahatan dan kekerasan yang tinggi di perkotaan.[43]

Saat ini, penduduk usia muda dan anak-anak total berkontribusi pada sekitar 40 persen dari penduduk dunia. Pada tahun 2030, diperkirakan 60 persen penduduk perkotaan di negara-negara berkembang akan berusia di bawah 18 tahun.[44] Proporsi penduduk usia muda yang besar memberikan tantangan terkait pengangguran usia muda, yang lebih tinggi (sekitar 2-3 kali lipat) daripada pengangguran dewasa. Program pelatihan dan kesempatan kerja, serta investasi pada fasilitas olahraga dan rekreasi akan membuat kota yang lebih menarik dan sehat untuk pemuda sambil mendorong mereka berkontribusi ke masyarakat. Pusat Pemuda Serba Ada UN-Habitat (*One Stop Youth Centres*) di Afrika Timur menyediakan tempat berkumpul bagi pemuda untuk menyediakan akses informasi dan menjadi sumber daya utama dari program pembangunan kepemimpinan kepemudaan (Kotak 1.2)

Kotak 1.2: Penyediaan untuk pemuda di Wau, Sudan Selatan

Di Sudan Selatan, negara paling muda di dunia, saat ini penduduk usia muda di bagian barat laut kota Wau memiliki tempat untuk bersantai, belajar, dan berkumpul dengan dibukanya Pusat Pemuda Serba Ada (*One Stop Youth Centre*) dengan bantuan dana Jepang. Pusat kegiatan baru tersebut menyediakan tempat diskusi untuk menyelesaikan masalah serta memberikan kesempatan untuk pelatihan vokasi dan komputer, kegiatan rekreasi, penempatan kerja dan pengembangan keterampilan kewirausahaan. Model UN-Habitat tersebut telah menjadi proyek percontohan dalam promosi pembangunan kepemudaan di kawasan Afrika Timur.

Pusat kegiatan tersebut telah melatih 72 pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan penyembuhan trauma. Selain itu, 170 pemuda telah mendaftar kursus komputer, menjahit, dan bahasa Inggris. Selain itu, hampir 100 pemuda menggunakan fasilitas olahraga setiap harinya dan Pusat Kepemudaan tersebut telah menarik pemuda dari seluruh negara, termasuk orang terlantar.

Dalam peresmian fasilitas tersebut, Duta Besar Jepang untuk Sudan Selatan menyerahkan alat basket, voli, dan bola tangan di hadapan Gubernur, Menteri Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Sudan Selatan dan kepada Dinas Informasi, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Kota Wau. Duta Besar Jepang meminta pemuda untuk bercita-cita setinggi mungkin dan membangun negaranya, menekankan jika "Tanggung jawab selanjutnya untuk pembangunan Sudan Selatan ada di kalian, anak muda."

Sumber: UN-Habitat, 2019b

Penduduk yang menua digambarkan sebagai salah satu megatren demografi yang berdampak signifikan pada pembangunan ekonomi dan sosial serta keberlanjutan lingkungan.[45] Istilah "dunia yang menua – *global greying*" adalah salah satu transformasi sosial di Abad 20 yang paling signifikan karena berimplikasi pada pasar keuangan dan pekerja seiring dengan pensiunnya para pekerja. Gelombang kependudukan tersebut akan

memberikan dampak pada permintaan barang dan jasa seperti perumahan, transportasi, dan jaring pengaman sosial, di mana semua berkaitan erat dengan kawasan perkotaan. Pada tahun 2018, pertama kalinya dalam sejarah, jumlah penduduk dunia berusia di atas 65 tahun melampaui jumlah anak-anak usia 5 tahun.[46] Penduduk yang mulai menua terjadi di semua negara di dunia, dengan penduduk berusia di atas 65 tahun menjadi kelompok yang paling cepat bertambah – naik dari 6,9 persen di tahun 2000[47] menjadi 9,1 persen di tahun 2019.[48] Proporsi penduduk usia tua di dunia diproyeksikan akan menyentuh angka 11,7 persen di tahun 2030 dan 15,9 persen di tahun 2050. Peningkatan proporsi penduduk usia tua tersebut juga diikuti oleh menurunnya angka kelahiran dan peningkatan usia harapan hidup selama paruh Abad 20.

Penuaan dan konsekuensinya mulai terlihat dan dapat diprediksi, misalnya jumlah pekerja yang lebih kecil untuk menopang beban besarnya pensiunan dan kebutuhan untuk menata rumah untuk memenuhi kebutuhan fisik lansia. Dengan demikian, pembuat kebijakan masih memiliki waktu untuk menangani isu tersebut sebelum menjadi masalah akut.[49] Berdasarkan hal-hal tersebut, negara-negara perlu merencanakan untuk penduduk yang menua, perlindungan kesejahteraan penduduk lansia dan menjamin hak asasi dan ketahanan ekonomi mereka agar masih terlindungi serta memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas di lingkungan terbangun, kesempatan belajar seumur hidup dan jaringan pendukung baik formal maupun informal. Wabah COVID-19 baru-baru ini memberikan ancaman serius untuk penduduk usia lebih dari 65 tahun karena dari semua penduduk yang terinfeksi, penduduk usia lanjut menyumbang sekitar 80 persen total kematian yang terjadi, membuat negara-negara dengan penduduk lansia yang cukup besar menjadi rentan.

Tren demografi yang penting dan memiliki implikasi pada kawasan perkotaan, terutama di negara-negara berkembang, adalah proporsi penduduk muda (usia 15-24) yang sangat besar.

1.4.2 Jejak Perkotaan Tumbuh Lebih Cepat Daripada Populasi Perkotaan

Perebakan kota, fenomena spasial yang awalnya digunakan untuk menjelaskan urbanisasi ke pinggiran kota di negara-negara maju dan luas seperti Amerika Utara dan Australia, sekarang banyak terjadi di kota-kota di seluruh dunia. Saat ini, fenomena tersebut terjadi di banyak kota di seluruh dunia.[50] Baik perluasan kota secara horizontal, penyebaran urbanisasi atau sub urbanisasi, luas kawasan perkotaan tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya, sehingga kebutuhan lahan untuk pembangunan kota lebih banyak. Perluasan wilayah perkotaan yang tidak terkendali sangat berdampak pada konsumsi energi, emisi gas rumah kaca (GRK), perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Satu kajian yang mengambil sampel 200 kota di seluruh dunia dengan 100.000 penduduk menunjukkan jika antara tahun 1990 dan 2015, kota-kota di negara-negara maju menambah luas wilayah perkotaan sebesar 1,8 kali lipat, sementara jumlah penduduknya hanya bertambah 1,2 kali lipat. Dengan demikian, hal tersebut menyiratkan jika rasio perluasan wilayah perkotaan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan sekitar 1,5.[51]

Kasus di negara-negara berkembang, dalam kurun waktu yang sama, luas penggunaan lahan perkotaan meningkat 3,5 kali lipat, sementara jumlah penduduk bertambah satu atau dua kali lipat. Hal tersebut menunjukkan jika ekspansi lahan perkotaan dibandingkan jumlah penduduknya meningkat 3,5 kali lipat. Temuan selanjutnya memaparkan jika perluasan wilayah perkotaan di negara maju dan berkembang, masing-masing, diperkirakan akan bertumbuh sebesar 1,9 dan 3,7 kali lipat dari tahun 2015 ke tahun 2050.[52] Meskipun begitu, jika kawasan perkotaan direncanakan, dikelola dan ditata dengan efektif, maka pertumbuhan perkotaan, baik di negara maju maupun berkembang, masing-masing diperkirakan hanya akan bertambah sebanyak 1,1 dan 2,5 kali lipat. Sementara itu, kajian lain memperkirakan pada tahun 2030, kota diperkirakan akan berkembang tiga kali lipat daripada luas yang ada pada tahun 2000, dengan sebagian besar perluasannya terjadi di lokasi strategis yang selama ini keanekaragaman hayatinya ini tidak terganggu.[53] Proyeksi tersebut menunjukkan nilai kuantitatif dari

urbanisasi yang direncanakan dengan baik, yang dapat melindungi lahan-lahan tidak terbangun dari pembangunan kembali di pinggiran kota.

Tabel 1.3 menjelaskan indikasi ekspansi wilayah perkotaan di beberapa kawasan yang berbeda. Meskipun pertumbuhan penduduk perkotaan di kawasan berkembang sangat cepat, perluasan wilayah perkotaan ternyata terjadi lebih cepat. Misalnya saja, kawasan perkotaan di Afrika Sub-Sahara yang meningkat dengan tingkat 5,1 persen per tahun dari tahun 2000 sampai 2015, berada di belakang Asia Timur dan Asia Tenggara, di mana perluasan kawasan perkotaannya tumbuh masing-masing sebesar 7,2 persen dan 5,7 persen. Tingkat perluasan lahan perkotaan di kawasan-kawasan ini lebih tinggi daripada rata-rata global yang berada di angka 4,3 persen.

Perluasan kota-kota di Afrika sulit untuk dikelola karena karakteristik dan tingkat penyebarannya yang terjadi di kota-kota besar sangat cepat.[54] Dalam prosesnya, kota-kota tersebut memakan lahan-lahan perdesaan dan kota kecil di sekitarnya, yang selanjutnya mengarah ke pertumbuhan permukiman yang terus menerus.[55] Proses urbanisasi di pinggiran kota, yang mayoritas informal, didorong oleh adanya upaya rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengamankan lahan di lokasi yang layak. Hal tersebut menyebabkan peningkatan banyak permukiman baru, yang mana belum dapat ditangani secara efektif oleh kerangka perencanaan dan peraturan yang ada saat ini. Pertumbuhan yang merebak di pinggir kota tersebut terkadang juga tidak terintegrasi dengan struktur kota utamanya. Permukiman tersebut belum tersambung dengan jaringan jalan yang dibutuhkan untuk perjalanan perkotaan yang efisien dan meningkatkan biaya untuk pelayanan yang disediakan pemerintah. Kegagalan dari perencanaan dan pengelolaan perluasan wilayah perkotaan yang efektif menyebabkan adanya berbagai tantangan serius seperti keterjangkauan perumahan, kemacetan, buruknya akses ke lapangan kerja dan ruang publik, risiko bencana alam, hilangnya lingkungan dan ekosistem alami serta kurangnya pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi dan listrik.[56] Tidak adanya layanan dasar pun meningkatkan kerentanan kawasan tersebut akan penyakit yang disebabkan oleh virus korona, seperti yang saat ini terjadi.

Tabel 1.3: Pertumbuhan ekspansi lahan perkotaan dan penduduk perkotaan

Wilayah Geografis	Rata-rata Perluasan Perkotaan Perubahan Tahunan 2000-2015	Rata-rata Perluasan Perkotaan Perubahan Populasi Tahunan 2000-2015	Rasio Perluasan Perkotaan Terhadap Populasi Perkotaan
Afrika Sub-Sahara	5.1%	4.2%	1.20
Afrika Utara dan Asia Barat	4.0%	2.7%	1.45
Afrika Utara	4.5%	3.1%	1.43
Asia Barat	3.5%	2.4%	1.46
Asia Tengah dan Asia Selatan	4.3%	3.0%	1.46
Asia Tengah	5.1%	4.3%	1.18
Asia Selatan	4.3%	2.8%	1.50
Asia Timur dan Asia Tenggara	6.9%	4.2%	1.65
Asia Timur	7.2%	4.1%	1.77
Asia Tenggara	5.7%	4.4%	1.31
Amerika Latin dan Karibia	2.1%	1.9%	1.12
Kepulauan Karibia*	0.3%	0.8%	0.35
Amerika Tengah	2.6%	2.3%	1.14
Amerika Selatan	2.0%	1.8%	1.13
Oseania	1.2%	1.4%	0.86
Australia dan Selandia Baru**	1.1%	1.7%	0.67
Oseania [kecuali Australia dan Selandia Baru]***	1.3%	0.8%	1.64
Eropa dan Amerika Utara	2.1%	1.0%	2.06
Amerika Utara	2.0%	1.5%	1.32
Eropa	2.1%	0.7%	2.88
Rata-rata Sampel Kota-kota di Dunia	4.3%	2.8%	1.52

*Satu kota (Holguin)
**Dua kota (Sidney dan Auckland)
***Satu kota (Suva)

Sumber: PBB, 2016b

Rasio perluasan lahan perkotaan dibandingkan pertumbuhan penduduk perkotaan di kota-kota di Afrika Sub-Sahara cenderung rendah (1,2) dibandingkan dengan Asia Timur (1,77) dan Eropa dan Amerika Utara (2,06). Meskipun begitu, kota-kota di kawasan tersebut lebih berhasil menurunkan kepadatannya melalui perencanaan inovatif dengan menahan perebakan kota dan meningkatkan konektivitas, misalnya dengan menerapkan proyek sempadan pertumbuhan perkotaan (*urban growth boundaries*) dan pengisian lahan kosong perkotaan (*urban infill*).[57] Struktur perencanaan yang kurang memadai di kota-kota Afrika yang tumbuh merebak, membuat pembangunan ekonomi aglomerasi dan program penyediaan barang dan layanan publik yang efisien sulit untuk dilakukan. Karena sebagian besar infrastruktur yang dapat mengakomodasi cepatnya perluasan wilayah perkotaan di Afrika belum terbangun, perencanaan perluasan perkotaan memberikan peluang yang menguntungkan untuk merencanakan pertumbuhan kota yang dapat mendorong keuntungan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan yang inklusif.

Di Amerika Serikat, 80 persen kawasan metropolitan menjadi lebih tidak kompak sejak tahun 2010 (Kotak 1.3). Meskipun banyak perkerjaan yang beralih ke pusat kota, penduduk Amerika Serikat masih menunjukkan ketertarikan untuk tinggal di pinggir kota. Sementara itu, mereka yang memilih untuk tinggal di kota harus berhadapan dengan ketidakterjangkauan perumahan yang ekstrim karena kota yang dituju tidak mengizinkan pembangunan perumahan baru yang sesuai dengan jumlah permintaan. Tren tersebut menyebabkan tingginya tingkat kepemilikan mobil di negara tersebut, jarak tempuh untuk bekerja, panjang jalan, konsumsi bahan bakar dan tingginya jejak karbon individu.

Perluasan kota secara spasial adalah sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pertumbuhan penduduk perkotaan dan faktor kontekstual lainnya. Tantangan bagi perencanaan saat ini adalah menentukan mekanisme untuk mengarahkan atau mengatur waktu, tingkat, dan lokasi dari pertumbuhan perkotaan. Perebakan kota– baik suburbanisasi di Amerika Utara, peri-urbanisasi di Afrika atau metropolitanisasi di Asia dan Amerika Latin – semuanya adalah bentuk dari peraturan perencanaan yang kurang tepat dan efektif. Semua model dari perebakan menegaskan pentingnya adopsi kebijakan pengelolaan pertumbuhan perkotaan yang lebih berkelanjutan, di mana perluasan dan pengisian lahan perkotaan yang direncanakan memiliki peran yang sangat penting.

Kotak 1.3: Seattle semakin kompak tapi Austin justru merebak: Mitos kembali ke kota

Bersikap skeptis ketika mendengar tentang kejayaan kembali kota Amerika – dengan visi ideal tentang gedung pencakar langit menjulang tinggi serta pusat kota yang ramai dan padat. Berlawanan dengan persepsi, negara tersebut semakin berkembang ke pinggir kota dan pada kecepatan yang terus meningkat. Pola yang ada saat ini terjadi adalah pelebaran ke sekitarnya, bukan ke atas, meskipun ada beberapa pengecualian.

Dilihat dari berbagai alat ukur, kawasan perdesaan jauh tertinggal daripada kawasan metropolitan. Namun di dalam kawasan metro sendiri, jumlah penduduk dan pekerjaan di pinggir kota meningkat dengan cepat. Di sisi lain, saat semua orang berupaya untuk menyewa apartemen atau kondominium di kota besar, harga rumah di lingkungan perkotaan meningkat lebih cepat daripada di pinggir kota. Selain itu, perumahan perkotaan dihuni kelompok yang lebih muda dan kaya daripada penghuni sebelumnya, dengan penghuni yang lebih terdidik dan lebih sedikit dari anak-anak usia sekolah. Pekerjaan dengan gaji tinggi meningkat di pusat kota, dengan banyaknya layanan ritel yang melayani para pekerja dan penghuni yang bergaji tinggi tersebut.

Kombinasi pertumbuhan penduduk yang lebih cepat di kawasan pinggir dan peningkatan harga yang lebih besar di kota menunjukkan terbatasnya pasokan perumahan menjadi kendala pertumbuhan perkotaan, sehingga memaksa orang pergi ke suburban. Hal tersebut menjadi pengingat jika tempat yang ditinggali penduduk belum tentu sesuai dengan keinginannya – tapi bergantung pada yang tersedia dan sesuai dengan harga yang harus dibayar. Meskipun begitu, tren nasional tersebut ternyata menyembunyikan kasus unik yang ada di daerah. Beberapa kawasan metropolitan memang mengota dari tahun 2010 sampai 2016. Dari 51 kawasan metropolitan dengan penduduk lebih dari satu juta, rata-rata kepadatan permukiman penduduk meningkat di 10 metropolitan dan menurun di 41 metropolitan, hasil tersebut diambil dari data Sensus Penduduk dan perhitungan Layanan Pos Amerika Serikat yang menghitung jumlah rumah yang dihuni. Dengan begitu, empat dari lima kawasan metropolitan telah menjadi lebih suburban sejak tahun 2010, sementara itu hanya seperlimanya yang semakin mengota.

Sumber: Kolko, 2017

1.4.3 Migrasi: Peluang dan Tantangan untuk Kota yang Inklusif

Migrasi adalah salah satu faktor pendorong peningkatan urbanisasi global, dan proses tersebut membuat kota menjadi tempat yang semakin beragam.[58] Saat ini terdapat sekitar 763 juta migran domestik[59] dan 272 juta migran internasional di seluruh dunia,[60] yang berarti satu dari tujuh orang di dunia adalah migran. Di banyak negara berkembang, migrasi desa-kota di satu negara, untuk mencari peluang ekonomi secara historis menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan urbanisasi.[61] Migrasi yang aman, tertib dan teratur dapat menjadi alat yang kuat untuk mengangkat penduduk dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan baik di tempat asal maupun tujuan.[62] Pada saat yang sama, kebijakan untuk menangani faktor pendorong migrasi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakamanan dapat membuat suatu negara menjadi lebih menarik bagi pendatang potensial.

Mayoritas pendatang berlokasi di kawasan-kawasan perkotaan. Pendatang internasional mewakili lebih dari sepertiga penduduk di kota-kota global yang menjadi magnet untuk orang asing berbakat, mulai dari pelajar sampai profesional, misalnya Toronto, Los Angeles, Sydney, London, Melbourne, Vancouver, San Francisco, Malmö, Montréal, Brisbane, Den Haag dan New York. Di pusat kegiatan internasional seperti Brussels, Dubai, dan Miami, jumlah pendatang melebihi jumlah penduduk lokal.[63] Migrasi internasional menyumbang sepertiga dari pertumbuhan perkotaan di negara-negara maju[64] dan mendorong transformasi kawasan perkotaan menjadi lebih heterogen, multi-etnis, multikultural dan multibahasa, dengan kota besar dan kecil yang merespon untuk menampung para pendatang tersebut. Keanekaragaman budaya tersebut berkontribusi terhadap kota yang lebih semarak, sejahtera, inklusif, kompetitif, atraktif, dan optimis serta pembangunan kota secara keseluruhan, yang kemudian akan meningkatkan nilai tak berwujud kota (Bab 5). Telah ada bukti jika kota yang memiliki keanekaragaman budaya lebih inovatif. Hal tersebut merupakan manfaat yang mereka dapatkan dari keterkaitan berbagai aspek pengetahuan internasional yang lebih luas, pembentukan ide, penyelesaian masalah, berbagai pengambilan keputusan dan kemampuan untuk membuat lingkungan kerja yang lebih inovatif.[65]

Pengungsi bermigrasi ke Eropa © Fishman64/Shutterstock

Peningkatan migrasi membawa peluang dan tantangan bagi para pendatang, komunitas lokal dan pemerintah. Peningkatan migrasi internasional menyebabkan perlu adanya kebijakan untuk memasukkan kaum pendatang ke dalam kota dengan pendekatan yang inklusif. Berdasarkan hal itu, PBB mengadopsi *Deklarasi New York terkait Pengungsi dan Migran di tahun 2016*(*New York Decalaration for Refugees and Migrants*)[66] serta *Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Teratur* (*Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration*) dan *Kesepakatan Global terkait Pengungsi pada tahun 2018* (*Global Compact on Refugees*) sebagai respon adanya gerakan besar dari pengungsi dan kondisi pengungsi yang berlarut-larut serta untuk merumuskan proses pembagian tanggung jawab.[67] Agenda 2030 mengakui jika migrasi internasional adalah kasus multidimensi dan memberikan dampak berarti bagi pembangunan di negara asal, transit, dan tujuan. Hal tersebut membutuhkan respon yang koheren dan komprehensif. Kerangka global tersebut menekankan pada pentingnya peran pemerintah daerah sebagai aktor utama untuk integrasi pengungsi dan migran seiring dengan fungsi kota yang berada di garda depan penerima migran. Jika tidak ada kebijakan yang efektif untuk integrasi, migrasi bisa mengarah ke pembentukan komunitas-komunitas marginal, yang selanjutnya dapat memicu eksklusi, kekecewaan, kerentanan, dan bahkan radikalisasi.[68]

Kota juga berada dalam garda depan terkait migrasi yang tidak diatur, yang juga didefinisikan sebagai pergerakan yang terjadi di luar norma peraturan di negara pengirim, transit, dan penerima.[69] Pada tahun 2017 terdapat 58 juta migran tidak teratur (*irregular migrant*), naik dari 50 juta di tahun 2009.[70] Sebab utama dari migrasi tidak teratur adalah kebijakan yang mengekang dari rezim kepemimpinan baik di negara asal maupun tujuan yang tidak hanya meniadakan kesempatan migrasi secara normal tapi juga memaksa migran untuk bermigrasi di luar aturan yang ada.[71] Ketika jalur untuk bermigrasi formal terbatas, orang-orang yang berniat untuk bermigrasi cenderung memilih cara-cara yang tidak diatur yang terkadang mahal, penuh risiko, dan berpotensi tidak begitu bermanfaat bagi para migran dan masyarakat yang dituju. Meskipun migran dapat meningkatkan prospek ekonomi, dalam beberapa dekade belakangan ini, kenaikan jumlah migran baik yang teratur maupun tidak teratur telah memicu reaksi populis xenofobia yang dipicu oleh peristiwa seperti dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik di Jerman pada malam Tahun Baru 2016[72] dan ketakutan akan "karavan migran" dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat pada tahun 2018.[73] Hal itu membuat iklim politik yang cenderung membatasi masuknya migran, terutama dari negara-negara miskin dan bahkan terkadang dari negara yang memiliki perbedaan ras, etnis, atau agama dibandingkan negara tujuan. Penutupan perbatasan sebagai respon pandemi COVID-19 memperparah tren tersebut.[74]

Kota juga berada dalam garda depan terkait migrasi yang tidak diatur, yang juga didefinisikan sebagai pergerakan yang terjadi di luar norma peraturan di negara pengirim, transit dan penerima

Migran tidak diatur (*irreguler migrant*) terkadang dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Pada tahun 2016, sekitar 1,5 juta migran yang tidak diatur diselundupkan untuk keuntungan ekonomi sebesar USD 5,5-7 juta.[75] Mereka juga menjadi objek berbagai resiko, kesulitan yang parah, dan bahaya fisik, bahkan terkadang menyebabkan kematian, karena mereka telah melalui medan yang berbahaya seperti lautan dan gurun. Pada Oktober 2019, penemuan 39 mayat migran yang di kereta gandeng berpendingin di Essex, Britania Raya adalah salah satu contoh mengerikan risiko proses migrasi yang tidak diatur.[76]

Dalam upaya untuk mencari masa depan yang lebih baik, migran berani melawan praktik yang dibuat untuk menghalangi, mencegah, dan menghukum orang yang masuk tidak sesuai aturan. Meskipun jika mereka sampai dengan selamat, migran harus menghadapi berbagai kesulitan di negara tujuan yang dapat memperparah kemiskinan, stereotip, rasisme dan kenyataan yang sangat berbeda dengan apa yang diharapkan. Migran yang tidak sesuai aturan menghadapi hambatan hukum dan kesulitan untuk masuk ke komunitas, kondisi hidup dan kerja yang buruk, akses ke layanan, termasuk sistem perlindungan sosial yang terbatas dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan pendidikan dan keterampilan

mereka yang dapat membuat mereka kehilangan keterampilan atau "berkurangnya kinerja otak".[77]

1.4.4 Kenaikan Tingkat Ketimpangan di Kota

Ketimpangan dan eksklusi yang terus meningkat telah menjadi tren yang terus menerus terjadi di kawasan perkotaan di mana mayoritas pertumbuhan penduduk akan terus bertambah dalam 30 tahun ke depan.[78] Bagi lebih dari dua per tiga penduduk perkotaan dunia, ketimpangan pendapatan telah meningkat sejak 1980.[79] Dengan jurang antara yang semakin lebar, berarti ada sekitar 2,9 juta penduduk yang tinggal di kota-kota di mana ketimpangan pendapatan lebih tinggi daripada satu generasi yang lalu. Di dunia yang semakin mengota, ketimpangan yang terjadi akan sangat tergantung apa yang terjadi di kawasan perkotaan. Ketimpangan di dalam kota dimanifestasikan dalam aspek ekonomi, sosial dan spasial. Hal itu dicirikan dengan akses ke pendapatan, konsumsi, kesempatan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, teknologi, ruang publik, layanan pemerintah dan barang pribadi.

Ketimpangan dapat tercermin dari bagaimana ruang kota dibentuk dan digunakan, dengan konsentrasi kerugian yang menonjol di beberapa lokasi tertentu. Lebih dari sebelumnya, kota-kota semakin terkotak-kotak baik oleh pembatas yang terlihat maupun tidak, sehingga mengakibatkan berbagai bentuk eksklusi sosial, budaya dan ekonomi.[80] Ketimpangan sangat berdampak bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, kelompok adat, difabel, migran, pengungsi, dan orang miskin, semua yang dikucilkan dari partisipasi ke kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Pandemi COVID-19 dengan aturan karantina wilayah yang menyertainya semakin memperparah ketimpangan yang didiskusikan pada subbab 1.4.7 dan Bab 5

Secara umum, tingkat ketimpangan di negara maju lebih rendah daripada negara berkembang. Hal itu diindikasikan dari akses yang lebih besar ke barang dan jasa publik dan kehadiran institusi yang menerapkan kebijakan yang lebih egaliter. Meskipun begitu, ketimpangan pendapatan di negara-negara maju telah semakin menyebar dan signifikan sejak 1980an. Ketimpangan juga menjadi alasan polarisasi politik di beberapa negara.[81] Konsekuensinya, eksklusi sosial, marginalisasi, segregasi perkotaan, dan kemiskinan semakin marak di kota-kota maju.

Di negara dengan jurang antara pendapatan yang melebar, ketimpangan perkotaan seringkali berada di atas angka rata-rata nasional. Banyak kota di Amerika Serikat memiliki koefisien Gini yang lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 0,42.[82] Sebagai contoh, Kota New York, Gainesville, Cleveland, Philadelphia dan Chicago masing-masing memiliki koefisien Gini sebesar 0,51; 0,52; 0,48; 0,50 dan 0,48 (Gambar 1.1). Kota New York melambangkan peningkatan ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat, di mana satu persen penduduk terkaya mendapatkan 40 persen dari total pendapatan seluruh kota, atau dua kali lipat dari persentase satu persen penduduk terkaya di tingkat nasional.[83] Kota-kota terkadang menjadi gambaran dari tren nasional. Dalam konteks yang mencemaskan ini, pemerintah kota yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat memiliki peran kunci dalam membuat kota yang lebih setara dan berakibat negara yang lebih serata.

Pandemi COVID-19 dengan aturan karantina wilayah yang menyertainya semakin memperparah ketimpangan

Secara global, kawasan dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara. Meskipun kota-kota di Amerika Latin telah menjadi lebih egaliter dalam dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan masih tinggi (Gambar 1.2). Tingkat ketimpangan tertinggi berada di Curitiba, Santiago, São Paulo, Kota Guatemala, Buenos Aires, Córdoba, Cochabamba dan Bogotá, dengan koefisien Gini masing-masing kota bervariasi antara 0,50 dan 0,67. Antara 1990 dan 2010, gabungan koefisien Gini untuk kawasan perkotaan di Amerika Latin turun dari 0,517 di tahun 1990 ke 0,494.[84] Peningkatan tersebut disebabkan pula oleh kebijakan-kebijakan redistribusi di beberapa negara seperti Prospera di Meksiko[85] dan Bolsa Familia di Brazil[86] yang didesain untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin perkotaan melalui transfer tunai bersyarat dan investasi besar-besaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Gambar 1.1: Koefisien Gini di kota-kota pilihan di Eropa dan Amerika Utara

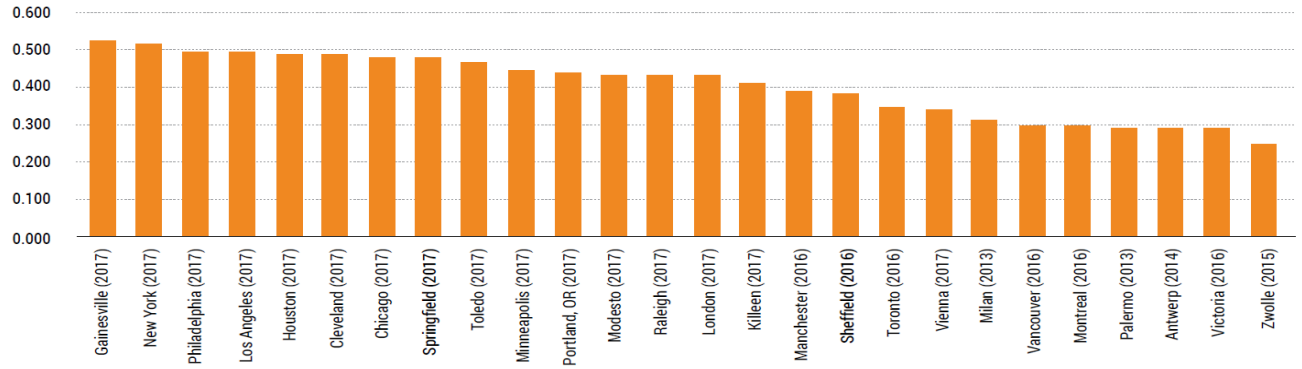

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global 2020

Ketimpangan yang ekstrim dapat menyebabkan keresahan sosial atau bahkan konflik besar-besaran seperti yang terlihat di Santiago, Chile pada Oktober 2019. Aksi yang berawal dari protes pelajar untuk penurunan tarif kereta bawah tanah (yang naik sekitar 30 peso atau sekitar USD 0,04) kemudian berkembang menjadi demonstrasi anarkis dan vandalisme yang melibatkan lebih dari 1 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kemarahan orang Chile yang merasa dikucilkan dari pertumbuhan ekonomi negaranya.[87] Beberapa demonstrasi yang serupa tentang ketidakpuasan banyak orang sebagai respon peningkatan ketimpangan juga terjadi berbagai belahan dunia (Kotak 1.4)

Kota-kota Asia memiliki tingkat ketimpangan terendah di antara negara-negara berkembang. Tingkat ketimpangan kota-kota Tiongkok sangat menonjol (Gambar 1.3). Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat, yang mengarah ke penurunan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.[88] Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Tiongkok diikuti dengan pertumbuhan ketimpangan.[89] Analisis empiris menunjukkan jika kenaikan populasi perkotaan di Tiongkok dari 23 persen di 1985 ke 51 persen di 2010 menyebabkan kenaikan koefisien Gini sebesar 20,5 poin.[90] Lompatan tersebut menunjukkan ketimpangan yang semakin lebar di kawasan perkotaan, disebabkan oleh migrasi internal dan kurangnya jaring pengaman sosial untuk migran.

Gambar 1.2: Koefisien Gini untuk beberapa kota di Amerika Latin

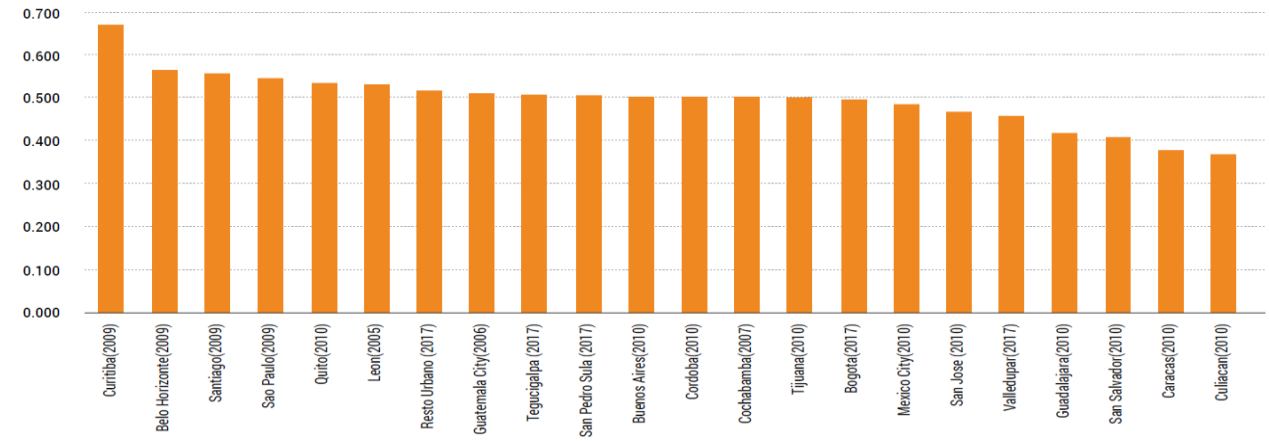

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global, 2020

Kotak 1.4: Ketimpangan memicu ketidakpuasan global akan kota-kota

Kekhawatiran akan ketimpangan mendasari keresahan sosial sebelum pandemi yang terjadi di hampir semua benua di tahun 2019, meskipun dengan pemicu yang bervariasi mulai dari korupsi, ancaman konstitusi sampai kenaikan harga barang dan jasa publik. Meskipun ketimpangan global telah menurun dalam tiga dekade terakhir, ketimpangan pendapatan domestik meningkat di banyak negara – terutama di negara yang ekonominya meningkat – dan mencetak sejarah tertinggi di beberapa negara. Dalam negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ketimpangan pendapatan mencapai titik tertinggi dalam setengah abad terkakhir. Banyak kritikus yang dikucilkan dari kekayaan negara mereka dan menyatakan kekhawatirannya bahwa kaum elit telah memperoleh keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Di Chile, sebagai contohnya, peningkatan tarif kereta bawah tanah sebesar 3 persen telah memicu demonstrasi anarkis, yang akhirnya memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan di tengah seruan *"¡dignidad!"* (martabat – dignity). Chile menjadi salah satu negara paling cepat berkembang, kaya dan stabil secara ekonomi di Amerika Latin. Diamati dari berbagai pendekatan, keberhasilan tersebut menurunkan ketimpangan. Sementara 10 persen penduduk terkaya menikmati 38 persen pendapatan di tahun 2015, 10 persen penduduk termiskin hanya mendapatkan 1,7 persen. Koefisien Gininya – alat ukur ketimpangan pendapatan yang paling umum digunakan – turun dari 0,57 di tahun 1990 ke 0,47 di 2017. Meskipun begitu, Chile masih menempati posisi kedua sebagai negara dengan koefisien Gini tertinggi di antara anggota OECD, termasuk lebih tinggi dari rata-rata koefisien Gini kelompok negara kayak (0,32).

Di Hong Kong, demonstrasi yang terjadi berbulan-bulan baru-baru ini terkait isu politik juga diperparah dengan ketimpangan. Berada di angka 0,54, koefisien Gini di Hong Kong menjadi yang tertinggi dalam 45 tahun terakhir, berada jauh di atas Tiongkok (0,39) atau Amerika Serikat (0,42). Ketimpangan adalah faktor yang kuat, tapi sering terabaikan, yang mendasari rasa frustasi warga Hong Kong akan disparitas di pasar kerja, peningkatan kemiskinan terutama diantara etnis minoritas, pertumbuhan upah riil yang lambat dan pengeluaran yang lebih kecil untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Di Lebanon, dengan koefisien Gini 0,51, protes skala nasional dipicu oleh keputusan pemerintah untuk menerapkan pajak pada aplikasi komunikasi popular yaitu WhatsApp. Di Irak, protes dimulai bulan Oktober – kebanyakan dipimpin oleh kelas pekerja yang haknya dicabut dan kelompok berpenghasilan menegah – atas isu korupsi, pengangguran dan tuntutan untuk akses ke pelayanan dasar publik.

Sumber: World Economic Forum, 2020a

Gambar 1.3: Koefisien Gini untuk kota-kota terpilih di Asia

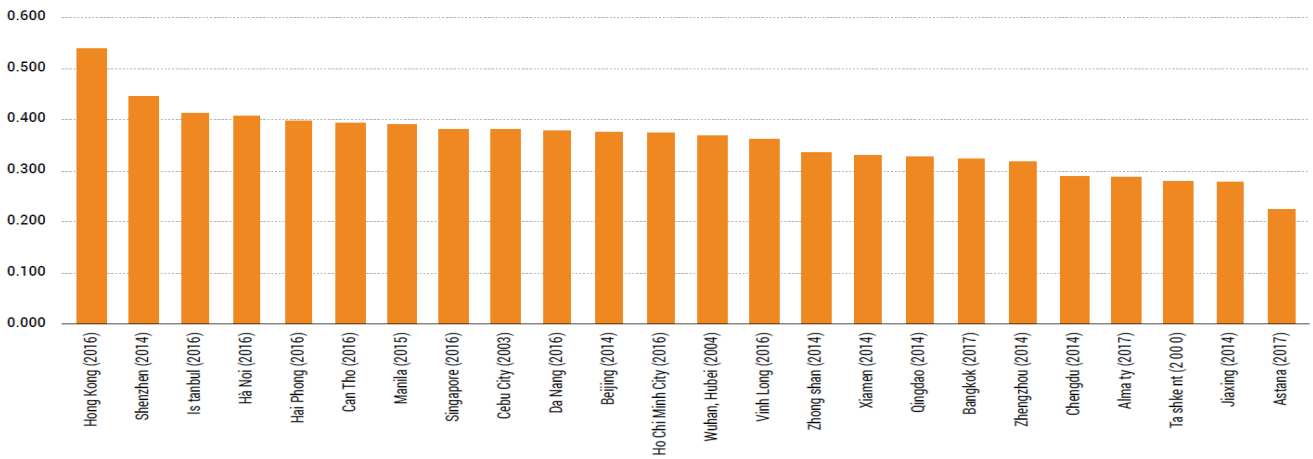

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global, 2020

Petugas kesehatan menggunakan APD memantau suhu tubuh masyarakat selama cek kesehatan di kawasan kumuh di Mumbai, India © Shutterstock/Manoej Paateel

Gambar 1.4: Koefisien Gini untuk kota-kota terpilih di Afrika

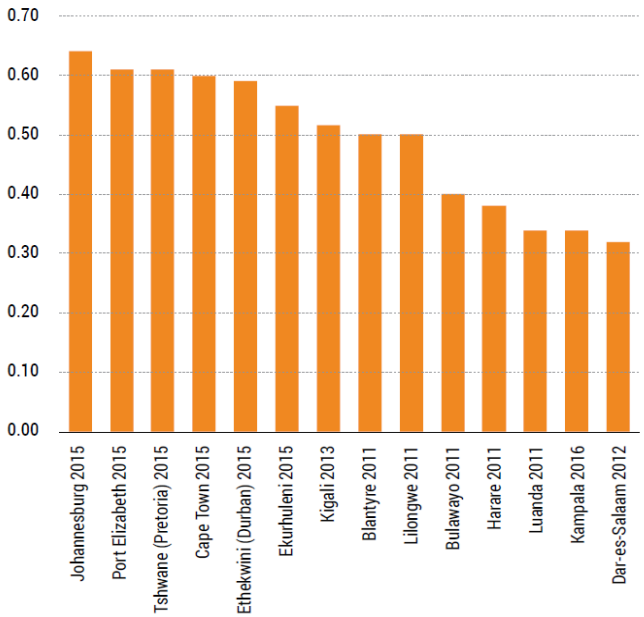

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global, 2020

Afrika Sub-Sahara menempati posisi kedua untuk ketimpangan pendapatan tertinggi setelah Amerika Latin. Hampir tiga per empat kota-kotanya di Gambar 1.4 memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi seperti digambarkan dengan koefisien Gini yang melampaui 0,4, dengan kota-kota di Afrika bagian Selatan menjadi kawasan paling timpang. Dengan demikian, hal tersebut menegaskan Afrika Selatan sebagai negara paling timpang di dunia dengan koefisien Gini yang tinggi (0,63).[91] Pendorong utama ketimpangan di Afrika Selatan adalah ketimpangan kesempatan. Negara tersebut memiliki tingkat pengangguran tinggi, yang berada di angka 29,1 persen secara nasional dan 58,2 persen di antara pemuda[92]; pertumbuhan ekonomi yang rendah; hambatan finansial; dan pasar pekerja yang terpolarisasi. Hal tersebut dicirikan dengan jurang antara upah yang besar dan mobilitas antargenerasi yang rendah.[93] Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan pelayanan jasa yang meningkat yang diabadikan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2030 akan sangat membantu pengurangan ketimpangan di kota-kota Afrika Selatan. Namun, rencana tersebut akan sangat

terhalang oleh dampak negatif COVID-19, yang menyebabkan ekonomi negara tersebut terkontraksi 51 persen pada kuartal kedua 2020.[94]

1.4.5 Perumahan Layak dan Terjangkau: Masih Sebatas Ilusi bagi Banyak Orang

Hunian yang terjangkau merupakan tantangan global yang mempengaruhi seluruh rumah tangga. Di tingkat global, calon pemilik rumah terpaksa untuk menabung lima kali lipat lebih besar daripada pendapatan tahunan mereka agar mampu membeli rumah standar.[95] Penyewa rumah sering kali menghabiskan lebih dari 25 persen pendapatan bulanannya untuk membayar biaya sewa. Ketidakterjangkauan hunian yang layak ini menunjukkan bahwa hunian yang tidak sesuai standar dan permukiman kumuh menjadi satu-satunya pilihan hunian bagi kelompok miskin. Saat ini, 1,6 milyar penduduk atau sekitar 20 persen dari total penduduk dunia tinggal di hunian yang tidak layak, padat, dan tidak aman.[96]

Tunawisma merupakan salah satu kelompok paling rentan selama pandemi COVID-19.

Para pengembang perumahan swasta mendominasi pasar hunian di sebagian besar negara. Dominasi pengembang swasta tersebut secara sistematis memungkinkan kelompok menengah ke atas untuk memiliki rumah secara formal, tetapi pasar bebas juga telah menghambat penduduk miskin kota untuk mengakses hunian layak dan terjangkau. Penduduk miskin tersebut terpaksa harus tinggal di kamar petak atau hunian yang ilegal, bahkan hingga menjadi tunawisma, yang jumlahnya sekarang mencapai sekitar 150 juta orang atau sekitar 2 persen dari populasi total dunia.[97] Tunawisma merupakan salah satu kelompok paling rentan selama pandemi COVID-19. Mereka sering kali memiliki penyakit bawaan yang dapat meningkatkan risiko kematian akibat virus korona serta kondisi hunian mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan mencuci tangan. Meski demikian, beberapa kota telah menerapkan langkah-langkah darurat, seperti menyewa kamar hotel atau membangun tempat cuci tangan dekat dengan permukiman padat penduduk.[98]

Meskipun negara-negara maju memiliki kelebihan pasokan hunian, di Eropa bagian timur dan tengah[99] serta di negara-negara berkembang justru kekurangan hunian formal.[100] Di Asia Selatan, defisit hunian mencapai 38 juta penduduk.[101] Pada umumnya, mekanisme pasar bebas bagi hunian telah gagal untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi penduduk miskin yang tinggal di kota-kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sektor publik maupun swasta dianggap tidak mampu menyediakan hunian yang layak bagi penduduk miskin yang sejalan dengan meningkatnya laju urbanisasi dan jumlah penduduk.

Di banyak negara berkembang, terdapat sekitar 60-70 persen hunian informal di Zambia,[102] 70 persen di Lima, 80 persen dari hunian baru di Caracas,[103] dan hingga 90 persen di Ghana.[104] Tanpa adanya akses terhadap pembiayaan perumahan, hunian informal seringkali tidak mampu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan bangunan dan gedung atau penggunaan tenaga kerja profesional. Hal ini berarti hunian tersebut memiliki kondisi fisik bangunan yang buruk, penuh sesak, tidak memiliki ventilasi yang baik, tidak memiliki akses pelayanan publik yang memadai serta berlokasi jauh dari simpul transportasi dan fasilitas dasar lainnya. Lebih jauh, perumahan sosial yang ditelantarkan bertahun-tahun serta terbatasnya intervensi pemerintah dalam mengatur pasar hunian swasta guna menjamin hunian layak dan terjangkau bagi setiap orang telah menyebabkan polarisasi politik perkotaan, melemahnya kohesi sosial, dan semakin meningkatnya kesenjangan.[105]

Salah satu hal yang berkaitan langsung dengan keterjangkauan hunian adalah tumbuhnya permukiman kumuh dan hunian informal di negara-negara berkembang, yang mana menjadi salah satu hal yang belum dapat diselesaikan oleh agenda perkotaan. Permukiman kumuh mengindikasikan salah satu bentuk kemiskinan, ketimpangan, eksklusi, serta kelangkaan. Warga di permukiman kumuh harus berjuang dengan akses air minum yang tidak layak, sanitasi buruk, kebersesakan, hunian yang tidak layak di tempat-tempat berbahaya, jaminan kepemilikan rumah yang tidak pasti serta risiko penggusuran, kerentanan pangan, malnutrisi,

kondisi kesehatan yang buruk, pengangguran, dan stigmatisasi. Seluruh kondisi di atas menyebabkan warga permukiman kumuh menjadi rentan terhadap pandemi COVID-19 dan pandemi lainnya. Di tengah kondisi hunian yang tidak ideal, berbagai upaya penting dalam menghentikan penyebaran COVID-19, seperti anjuran jaga jarak, isolasi mandiri, cuci tangan serta menjaga standar kebersihan adalah suatu kemustahilan untuk dilakukan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi proporsi penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dari 28 persen di tahun 2000 menjadi 24 persen di tahun 2018 (Gambar 1.5), lebih dari 1 milyar penduduk masih tinggal di kawasan permukiman kumuh. Separuh dari mereka berada di Asia bagian timur, tenggara, tengah, dan selatan serta sekitar 23 persen di Afrika Sub-Sahara.

Gambar 1.5: Persentase populasi penduduk kota yang tinggal di permukiman kumuh

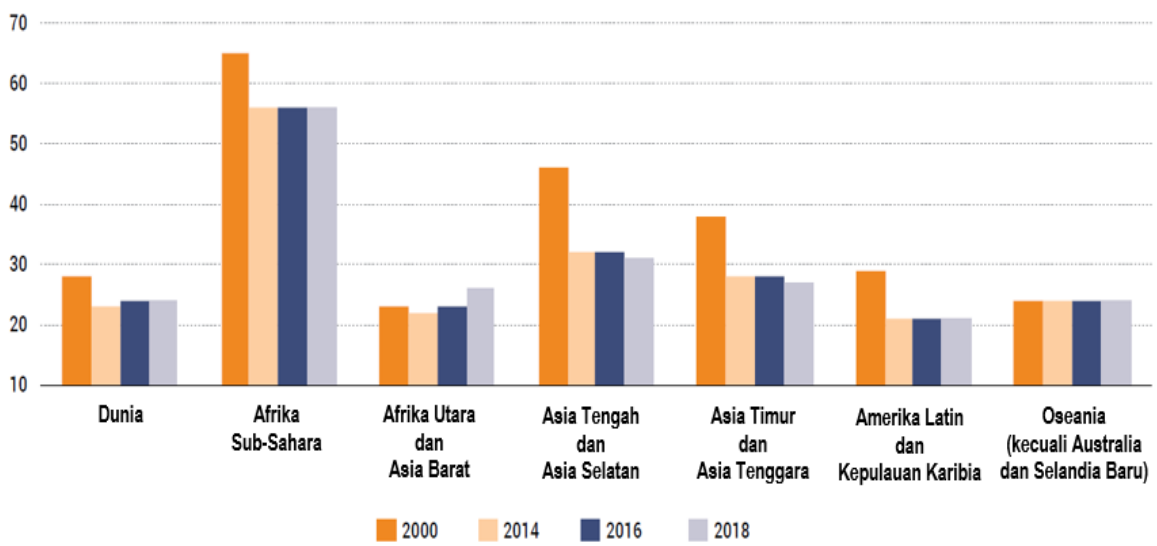

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global, 2020

Tabel 1.4: Populasi penduduk kota yang tinggal di permukiman kumuh

	Populasi Perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh (juta)			
Wilayah	2000	2014	2016	2018
Dunia	803.126	897.651	1003.083	1033.546
Afrika Sub-Sahara	131.716	202.042	228.936	237.840
Afrika Utara dan Asia Barat	46.335	63.814	71.720	82.123
Asia Tengah dan Asia Selatan	205.661	206.704	223.643	221.092
Asia Timur dan Asia Tenggara	317.123	349.409	364.684	368.898
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia	115.148	104.652	112.602	109.946
Oseania [kecuali Australia dan Selandia Baru]	0.234	0.602	0.648	0.643
Australia dan Selandia Baru	0.03	0.03	0.01	0.01
Eropa dan Amerika Utara	0.764	0.833	0.842	1.022

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global, 2020

Ada beberapa faktor pendorong berkembangnya permukiman kumuh di negara berkembang, yaitu urbanisasi yang begitu cepat, perencanaan yang tidak efektif, pilihan hunian yang terbatas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kebijakan perkotaan, pertanahan, dan perumahan yang tidak berjalan dengan baik, sedikitnya pilihan pembiayaan perumahan, serta kemiskinan dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Studi empiris menyebutkan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan berkorelasi terhadap peningkatan permukiman kumuh sebesar 2,3 persen di Afrika dan 5,3 persen di Asia.[106] Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa di beberapa kawasan di Asia dan Afrika, urbanisasi tidak direncanakan dengan baik. Dalam konteks pendapatan yang jauh lebih rendah, peningkatan urbanisasi berarti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, kota yang lemah dan kekurangan sumber daya, struktur tata kelola yang lemah, serta tidak adanya kebijakan perencanaan kota dan perumahan yang koheren. Di tengah berbagai kondisi tersebut, pertumbuhan kota yang sangat cepat hanya akan semakin mendorong berkembangnya permukiman kumuh.

Permukiman kumuh mengindikasikan salah satu bentuk kemiskinan, ketimpangan, eksklusi, serta kelangkaan.

Urbanisasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat menjadi katalis bagi transformasi sosial-ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bagi semua orang. Namun, warga di permukiman kumuh akan tertinggal dalam proses penyejahteraan ini jika kepentingan dan kebutuhan mereka tidak diintegrasikan ke dalam perencanaan kota, kebijakan perumahan, serta kerangka regulasi dan pendanaan. Jika kepentingan masyarakat miskin dan marginal perkotaan tetap diabaikan, maka tujuan untuk "membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan" hanya dapat tercapai sebagian, bahkan dapat menghambat terasanya manfaat dari urbanisasi. Tantangan tersebut ditimbulkan oleh peningkatan permukiman kumuh secara terus menerus, terutama di Afrika Sub-Sahara dan di Asia bagian timur, tenggara, tengah, dan selatan. Tanpa adanya upaya bersama dari pemerintah di setiap aras, termasuk masyarakat sipil serta mitra pembangunan, maka jumlah penduduk di permukiman kumuh akan selalu meningkat di sebagian besar negara berkembang.

1.4.6 Perubahan Iklim: Ancaman Abadi bagi Kota

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi kota karena memiliki keragaman konsekuensi. Kawasan perkotaan merupakan penyumbang terbesar emisi karbon dunia dan juga merupakan rumah bagi lebih dari separuh penduduk dunia yang akan menjadi korban terdampak dari perubahan iklim. Urbanisasi merupakan salah satu megatren yang harus ditangani untuk mencapai pembatasan kenaikan suhu global sebesar 1,5^{0}C.[107] Kota-kota, khususnya yang berada di daerah dengan udara hangat atau kawasan pesisir, menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh risiko dan dampak dari perubahan iklim dan bencana alam, seperti gelombang panas ekstrim di New Delhi dan banjir di Jakarta.

Jika tren pemanasan global ini terus berlanjut, dunia akan menjadi lebih hangat 1,5^{0}C pada tahun 2030.[108] Pemanasan wilayah akan meningkat dua kali lipat daripada rata-rata global di beberapa tempat. Hal ini berarti setidaknya 136 kota pesisir akan berisiko banjir yang dapat berdampak terhadap 280 juta orang, termasuk para penduduk di permukiman informal.[109] Mengingat bahwa lebih dari separuh penduduk dunia tinggal dalam radius 3 kilometer dari sumber air permukaan dan lebih dari 40 persen penduduk tinggal di kawasan pesisir, populasi penduduk tersebut akan lebih rentan terhadap risiko dari kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem yang diakibatkan oleh perubahan iklim.[110] Urbanisasi, terutama di kawasan pesisir, seperti mengabaikan dampak dari perubahan iklim, sehingga meningkatkan kerentanan dan keterpaparan terhadap bahaya dari perubahan iklim.

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi kota karena memiliki keragaman konsekuensi.

Lalu lintas pada jalan yang tergenang banjir di kota, Houston, Amerika Serikat © IrinaK/Shutterstock

Kombinasi dari ancaman kenaikan muka air laut serta gelombang badai dapat mengakibatkan kerugian lebih dari satu triliun dolar setiap tahunnya di 2050.[111] Infrastruktur, bangunan, dan aset yang hancur karena siklon tropis atau banjir merupakan salah satu dampak yang nyata dari bencana. Akan tetapi, kerusakan akibat ancaman penyakit sekunder, penggusuran, peningkatan kejahatan, dan potensi kerusuhan juga tidak boleh dikesampingkan.

Dampak dari perubahan iklim dapat memperparah berbagai persoalan perkotaan yang dihadapi sebelumnya, seperti kemiskinan, ketimpangan, serta defisit infrastruktur dan perumahan.[112] Berbagai persoalan tersebut dapat menghambat tercapainya beberapa tujuan dalam TPB, terutama yang terkait dengan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, air dan sanitasi, dan ekosistem, sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab 4. Di negara berkembang, dampak jangka panjang dari perubahan iklim serta bila dikombinasikan dengan dampak jangka pendek dari pandemi COVID-19, maka akan menambah 100 juta orang miskin baru.[113] Kota-kota dengan tingkat urbanisasi yang cepat di Afrika dan Asia lebih rentan terhadap perubahan iklim, namun belum mampu merespon dampaknya dengan optimal. Kota-kota tersebut umumnya memiliki keterbatasan kapasitas manusia, teknis dan finansial, serta institusi dan struktur tata kelola yang lemah, terutama yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi bencana. Di saat yang bersamaan, kota-kota tersebut justru tidak berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global, sehingga membuat kerugian yang mereka alami menjadi tidak proporsional.

Kombinasi dari ancaman kenaikan muka air laut serta gelombang badai dapat mengakibatkan kerugian lebih dari satu triliun dolar setiap tahunnya di 2050.

Urbanisasi menawarkan beragam peluang untuk menyusun strategi adaptasi dan mitigasi yang dapat membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5°C, terutama melalui perencanaan dan perancangan kota. Dalam hal ini, 105 kota, yang mana sebagian besar berada di Amerika Utara dan Eropa, telah melakukan inventarisasi emisi serta telah mengadopsi target pengurangan emisi dengan berbagai kebijakan pengungkit.[114] Inovasi di perkotaan, skala ekonomi, dan konsentrasi sektor swasta merupakan tiga hal yang memungkinkan kota untuk mengambil aksi-aksi pengurangan emisi dan risiko bencana iklim.[115] Kota-kota dengan guna lahan campur dan kompak mampu

mengurangi penggunaan sumber daya per kapita serta emisi GRK. Kota-kota memiliki peluang yang besar untuk mengurangi risiko bencana, mempercepat respon dan pemulihan pasca-bencana melalui perencanaan guna lahan, peraturan bangunan dan gedung, serta pendekatan membangun kembali secara lebih baik di tahapan respon dan rekonstruksi (Bab 4). Lebih penting lagi, ketika kota-kota mulai memperkenalkan solusi berbasis alam (NBS) ke dalam perencanaan dan pengelolaan kota, sistem perkotaan dapat mengambil manfaat dari berbagai jasa ekosistem, termasuk penyerapan karbon, regulasi iklim lokal, penampungan air hujan, serta penjernihan air.[116]

Laporan IPCC terbaru menunjukkan bahwa agar rata-rata kenaikan suhu global tetap di bawah 1,5°C dan dampak dari pemanasan global dapat ditangani, maka diperlukan langkah-langkah yang tegas untuk mentransformasikan cara kota dan hunian dibangun dan dikelola. Membangun kota-kota yang lebih berketahanan dan berkeadilan memerlukan pengarusutamaan informasi terkait risiko iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perkotaan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan memperkuat kapasitas lokal, memanfaatkan kekuatan alam untuk merespon terhadap risiko banjir dan kekeringan, membangun ketahanan iklim dengan meningkatkan kualitas kehidupan kelompok rentan dan hunian informal berdasarkan pengetahuan komunitas, meningkatkan investasi ketahanan iklim, serta mengambil manfaat dari langkah-langkah adaptasi.[117]

Untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan dan beradaptasi terhadap pemanasan global, analisis biaya-manfaat (*cost-benefit*) yang dilakukan oleh Komisi Adaptasi Global (Global Commission on Adaptation) menunjukkan bahwa dunia perlu menginvestasikan USD 1,8 trilyun ketahanan di lima bidang utama. Kelima bidang utama itu adalah memperkuat sistem peringatan dini, mendorong pembangunan infrastruktur baru yang berketahanan, meningkatkan pertanian di lahan kering, melindungi mangrove, dan mengelola sumber daya air.[118] Investasi di lima bidang tersebut dapat menghasilkan manfaat sebesar USD 7,1 trilyun serta dapat berkontribusi kepada "*triple dividend*" dalam pencegahan kerugian di masa mendatang. Investasi ini juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dengan mengurangi risiko, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Tidak hanya itu, investasi ini dapat meningkatkan manfaat sosial dan bagi lingkungan.

Urbanisasi menawarkan beragam peluang untuk menyusun strategi adaptasi dan mitigasi yang dapat membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5°C, terutama melalui perencanaan dan perancangan kota.

Dalam beberapa tahun terakhir, kaum pemuda telah menjadi garda terdepan dalam mendorong aksi-aksi global untuk perubahan iklim. Semangat ini dapat terlihat dari berbagai individu dan organisasi pemuda yang terlibat dalam konferensi antarnegara terkait perubahan iklim. Lebih jauh, kaum pemuda telah memobilisasi gerakan sosial baru terkait perubahan iklim, yang dirancang secara daring tetapi justru menjadi aksi nyata di ruang publik. Pada Agustus 2018, seorang aktivis remaja dari Swedia, Greta Thunberg, memegang sebuah poster di luar Gedung parlemen Swedia yang bertuliskan "*Skolstrejk för klimatet*" ("Protes dari sekolah untuk perubahan iklim"). Yang dilakukan Greta kemudian menyebar menjadi Gerakan "Fridays for Future" ("Jumat untuk Masa Depan"), sebuah aksi mingguan para pelajar untuk perubahan iklim di dunia. Gerakan ini kemudian tumbuh lebih besar menjadi aksi iklim global, yang bertepatan dengan Pertemuan Aksi Iklim PBB (United Nations Climate Action Summit) pada September 2019. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang menyuarakan isu perubahan iklim. Demonstrasi yang dipimpin oleh organisasi pemuda ini kemudian menyebar ke 185 negara dan melibatkan 7,3 juta orang, 73 serikat buruh, 3.024 sektor swasta, serta 820 LSM.[119] Demonstrasi oleh para pemuda ini membawa satu pesan: untuk memunculkan urgensi dari perubahan iklim serta untuk memprotes lambatnya langkah-langkah pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim oleh sebuah generasi yang harus hidup dengan konsekuensinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kaum pemuda telah menjadi garda terdepan dalam mendorong aksi-aksi global untuk perubahan iklim.

Penarikan partisipasi formal Amerika Serikat dalam Persetujuan Paris, sejak 4 November 2019, merupakan pukulan besar dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim. Sebagai ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat bukan hanya sebagai pemimpin dalam tata kelola lingkungan global, tetapi juga berkontribusi terhadap 15 persen dari total emisi karbon dunia. Amerika Serikat juga merupakan sumber keuangan dan teknologi bagi negara-negara berkembang yang menghadapi dampak dari pemanasan global.[120] Penarikan partisipasi Amerika Serikat memberikan peluang bagi negara lainnya seperti Kanada, Tiongkok, Uni Eropa (UE), dan India, untuk mengambil alih kepemimpinan.[121] Sebaliknya, para wali kota dan gubernur negara bagian di Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya terhadap Persetujuan Paris dan telah berjanji untuk tetap pada jalurnya. Hal ini juga berarti bahwa peran pemerintah provinsi menjadi sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim.[122] Namun, penarikan Amerika Serikat ini tidak hanya akan memperlemah implementasi kebijakan dan strategi perubahan iklim, tetapi justru menunjukkan bahwa ada gerakan anti-perubahan iklim di negara-negara yang sangat tergantung kepada bahan bakar fosil dan akan memperluas industri ekstraktif sumber daya alam (SDA).[123] Amerika Serikat, Rusia, dan Arab Saudi menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam pengetahuan terkait perubahan iklim ketika Konferensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Climate Change Conference (COP 24)) di tahun 2018.[124]

Keputusan ini berlawanan dengan semangat kerja sama dan konsensus dalam Persetujuan Paris di tahun 2015. Keputusan ini adalah pengingat yang sangat jelas bahwa ada keterbatasan di aksi-aksi lokal dalam konteks kesepakatan multilateral yang didorong oleh pemerintah pusat. Bahkan ketika kelompok pemuda berdemonstrasi di jalanan dan otoritas setempat mencoba untuk mengurangi emisi karbon, beberapa negara justru melanjutkan kebijakan energi yang sangat tergantung kepada bahan bakar fosil.

1.4.7 Kota sebagai Tempat Krisis: Pandemi Virus Korona

Kota-kota di berbagai belahan dunia semakin terpapar terhadap berbagai risiko seperti teroris, kekerasan, kejahatan, berbagai jenis konflik, perang, peningkatan sekuritisasi, serta penyebaran penyakit. Kota yang semakin mengglobal dan terhubung juga turut meningkatkan risiko kesehatan masyarakat kota. Yang terbaru adalah virus SARS-Cov-2 atau virus novel korona yang mengakibatkan penyakit COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 yang kemudian menyebar luas dengan cepat ke berbagai belahan dunia. COVID-19 telah melumpuhkan layanan dan fasilitas kesehatan serta melumpuhkan perekonomian. Tujuh bulan setelah WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020,[125] kasus COVID-19 di dunia mencapai 40 juta orang dan lebih dari 1 juta kematian.[126] Seluruh negara di dunia terkena dampak dari pandemi COVID-19, namun yang terdampak paling besar dalam konteks kasus konfirmasi positif antara lain Amerika Serikat, India, Brazil, dan Rusia.

Kota-kota di berbagai belahan dunia semakin terpapar berbagai risiko seperti teroris, kekerasan, kejahatan, berbagai jenis konflik, perang, peningkatan sekuritisasi serta penyebaran penyakit.

Sejak merebaknya wabah di Wuhan, episentrum penyebaran virus telah bergeser dari Eropa ke Amerika Serikat ke Amerika Latin dan juga India. Karena COVID-19 menyebar dengan cepat dan luas serta berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi, penyakit ini merupakan salah satu tantangan yang belum banyak diketahui oleh manusia di sejarah modern.[127]

Kawasan perkotaan menanggung beban dampak COVID-19

Meskipun COVID-19 merupakan krisis kesehatan global, krisis ini memiliki dampak yang luas bagi kawasan perkotaan. Dengan lebih dari 90 persen kasus yang terkonfirmasi berasal dari kawasan perkotaan, kota telah menjadi episentrum bagi penyebaran COVID-19.[128] konsentrasi kasus COVID-19 di kawasan perkotaan dikonfirmasi oleh sampel beberapa negara dalam Tabel 1.5. Di antara negara-negara Afrika, sekitar 77-89 persen kasus positif terkonsentrasi di ibu kota negara serta empat kota besar. Yang tertinggi adalah Afrika Selatan, yang telah menjadi episentrum COVID-19 di Afrika. Di Amerika Latin, kasus virus korona lebih

banyak terkonsentrasi di kota-kota besar di Argentina, Chile, Kolombia, dan Meksiko. Di Brazil, sekitar 57 persen kasus positif berada di kota besar, yang bisa mengindikasikan bahwa virus ini telah menyebar ke kota-kota kecil dan kawasan perdesaan. Pola konsentrasi penyebaran COVID-19 di kota-kota besar ini serupa dengan yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat.

Di banyak negara berkembang, terutama di Afrika, penyebaran virus ini dimulai dari bandara, ke kota besar, lalu ke kota-kota menengah dan kecil.[129] Penyebaran COVID-19 di kawasan perkotaan di seluruh dunia ini semakin dipercepat dengan adanya globalisasi dan keterhubungan kota-kota yang difasilitasi oleh penerbangan udara. Pergerakan di kota-kota di dunia ini telah memungkinkan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Bentuk penyebaran ini dapat menjelaskan mengapa sebagian negara menerapkan penutupan perbatasan secara total dan sebagian lagi perjalanan dari luar negeri. Saat ini, COVID-19 menyebar melalui transmisi lokal dan bergerak dari kota-kota besar ke kota kecil dan kawasan perdesaan.

Tabel 1.5: Kasus COVID-19 di kawasan perkotaan (Juli 2020)

Negara	Jumlah kasus terkonfirmasi	Jumlah kasus tercatat di Ibukota dan empat kota besar	Persentase kasus tercatat di Ibukota dan empat kota besar (%)	Jumlah kota dengan populasi di atas 100 ribu	Jumlah kota dengan populasi di atas 100 ribu dengan kasus tercatat
Algeria	26,764	23,174	87	40	39
Argentina	173,355	163,217	94	30	27
Bangladesh	223,453	174,733	78	30	29
Brazil	2,554,042	1,460,545	57	324	308
Chile	351,575	299,844	85	49	49
China	82,880	76,441	92	401	322
Colombia	257,101	216,196	84	65	65
Egypt	91,583	74,119	81	41	39
Germany	212,331	184,691	87	79	79
Ghana	31,851	24,532	77	13	13
Iraq	110,032	84,662	77	29	29
Italy	248,229	224,381	90	48	48
Mexico	450,570	367,561	82	188	164
Nigeria	39,977	23,661	59	82	82
Peru	389,717	292,833	75	26	24
Qatar	109,305	104,123	95	2	2
Russia	864,948	651,147	75	168	157
Saudi Arabia	266,941	225,971	85	24	24
South Africa	434,200	388,154	89	57	56
Spain	302,814	181,433	60	56	49
United Kingdom	307,256	267,884	87	84	84
United States	4,748,806	3,874,766	82	317	317

Sumber: UN-Habitat, Basis Data Indikator Global, 2020

Secara alamiah, kota-kota merupakan aglomerasi lahan terbangun dengan konsentrasi penduduk dan kepadatan tinggi. Dengan kondisi tersebut, dampak dari pandemi, seperti COVID-19 akan meningkat sejalan dengan semakin padatnya penduduk. Jika potensi kepadatan ini tidak dikelola dengan baik, kawasan dengan kepadatan tinggi atau kota-kota besar akan semakin rentan terhadap penyebaran wabah penyakit. Risiko ini telah dibuktikan dengan penyebaran COVID-19 di berbagai kota-kota besar di dunia, termasuk Milan, New York, Madrid, São Paulo, London, Lima, Lagos, Paris, dan Tokyo. Pada umumnya, negara-negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi memiliki laju penyebaran COVID-19 yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi yang dikelola dengan baik dapat berperan penting dalam mengatasi pandemi di masa sekarang dan masa mendatang.

Saat ini, COVID-19 menyebar melalui transmisi lokal dan bergerak dari kota-kota besar ke kota kecil dan kawasan perdesaan.

COVID-19 dan Ekonomi Perkotaan

International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa perekonomian global akan terkontraksi sebesar 3 persen di tahun 2020 karena pandemi virus korona.[130] Jika prediksi tersebut akurat, virus korona akan menghilangkan USD 2,6 trilyun dari total nilai perekonomian dunia. Kontraksi ekonomi ini lebih dalam daripada krisis finansial global tahun 2008-2009 serta merepresentasikan resesi terburuk sejak *Great Depression*. Total kerugian global di tahun 2020-2021 diperkirakan sebesar USD 9 trilyun, di mana angka ini lebih besar daripada total perekonomian Jepang dan Jerman.[131] COVID-19 akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Berbagai upaya pembatasan sosial untuk mengatasi wabah serta sentimen negatif sektor konsumsi dan bisnis akan menahan jumlah permintaan, sehingga akan berimplikasi kepada pengurangan pengeluaran yang meluas. Pembatasan aktivitas ekonomi, penutupan pabrik serta gangguan dalam rantai pasok akan menciptakan hambatan dalam jumlah pasokan.[132]

Ketika dunia terus berjatuhan dalam jurang resesi, kawasan perkotaan, yang menyumbang 80 persen dari total PDB dunia, akan terdampak di berbagai bidang. Pertama, menyusutnya ekonomi global mengimplikasikan bahwa lebih sedikit uang yang tersedia untuk berbagai proyek pembangunan di perkotaan, seperti air dan sanitasi, sistem transportasi publik, hunian layak dan terjangkau, perbaikan kampung, pengentasan kemiskinan serta peningkatan layanan kesehatan untuk merespon pandemi saat ini maupun di masa mendatang. Bank Dunia memproyeksikan bahwa pendapatan pemerintah daerah akan berkurang sebesar 15-25 persen di tahun 2021, sehingga akan mengurangi porsi anggaran untuk pelayanan publik.[133]

Potensi penurunan pendapatan pemerintah daerah akan lebih parah di kota-kota di negara berkembang, karena infrastruktur penting dan sistem kesehatan yang belum memadai. Berkurangnya pendapatan tersebut dapat menghambat pencapaian TPB 11 serta berbagai komitmen global lainnya terkait urbanisasi yang berkelanjutan. Di samping itu, kota-kota akan semakin kesulitan untuk mendapatkan investasi tahunan sebesar USD 2,5 trilyun, yang dibutuhkan untuk mencapai TPB (Bab 4).[134]

Pandemi virus korona telah mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama di kawasan perkotaan. Perempuan dan kaum pemuda terdampak kehilangan pekerjaan ini secara signifikan. Pada minggu-minggu awal karantina wilayah, 2,7 milyar pekerja, atau sekitar 81 persen dari total angkatan kerja global, terkena dampak dari penutupan tempat-tempat kerja mereka.[135] Angka ini berkurang menjadi 68 persen pada periode pertengahan April ketika pembatasan aktivitas sudah agak dilonggarkan, terutama di Tiongkok.[136] Di Amerika Serikat, dalam kurun waktu 7 minggu hingga 2 Mei 2020, 33,3 juta orang, atau sekitar 20 persen dari angkatan kerja melaporkan diri sebagai penganggur.[137] Tingkat pengangguran di Amerika Serikat termasuk tinggi, yaitu sekitar 8,4 persen di Agustus 2020, yang mana angka pengangguran mencapai 13,6 juta orang.[138] Kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat ini berdampak pula pada jangkauan asuransi kesehatan bagi 5,4 juta orang di bulan Februari dan Maret 2020. Oleh karenanya, mereka yang kehilangan pekerjaan dan asuransi kesehatan menjadi semakin rentan dan tidak mampu untuk

membayar layanan kesehatan tanpa menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar.[139] Di Inggris, 9,6 juta pekerjaan telah hilang sejak pemerintah meluncurkan skema subsidi gaji di bulan Maret,[140] dengan 2,7 juta orang mengajukan bantuan untuk pengangguran di sepanjang Maret hingga Juli.[141] Sektor yang paling terdampak akibat kebijakan karantina wilayah dan pembatasan kegiatan antara lain pariwisata dan makanan minuman, yang kehilangan 75 persen pekerjaan.[142] Sejak penduduk kota masih merasa ketakutan di tengah kerumunan di ruang tertutup, pandemi virus korona telah menjadi "kiamat" bagi restoran dan kafe di seluruh dunia, yang mana industri ini umumnya memiliki margin keuntungan yang kecil.[143]

Pandemi virus korona telah menimbulkan banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama di kawasan perkotaan. Perempuan dan kaum pemuda terdampak kehilangan pekerjaan ini secara signifikan.

Cerita ini bahkan lebih buruk di berbagai negara berkembang. Di Bangladesh, 2,43 juta pekerja di industri tekstil telah dirumahkan atau kehilangan pekerjaannya karena penahanan atau pembatalan ekspor sebesar USD 3,2 milyar ke berbagai negara maju.[144] Di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, COVID-19 telah menghilangkan 14 juta pekerjaan, yang mana 50 persen pekerja bergerak di sektor komersil dan jasa yang terdampak parah akibat krisis.[145] Di Afrika, karantina wilayah diprediksi dapat mengganggu sistem rantai pasok dan jatuhnya harga komoditas, sehingga 20 juta pekerjaan akan hilang. Sektor informal juga terdampak signifikan, karena sekitar 90 persen pekerja di beberapa negara merupakan pekerja informal[146] yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, tabungan, dan jaminan perlindungan sosial. Di negara-negara teluk, puluhan ribu pekerja migran di sektor konstruksi, pariwisata, ritel, dan transportasi telah kehilangan pekerjaannya dan terpaksa pulang ke negaranya masing-masing. Di beberapa negara berkembang, perlambatan ekonomi telah menimbulkan gelombang eksodus para pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya, sehingga harus kembali ke desanya masing-masing. Banyak pekerja tersebut yang harus berjalan kaki ke rumahnya karena pembatasan aktivitas di sektor transportasi publik.

Meskipun dampak dari COVID-19 ini akan dialami oleh seluruh ekonomi global, sektor yang paling terdampak adalah sektor grosir dan ritel, perbaikan kendaraan, perumahan, aktivitas bisnis dan administrasi, manufaktur, akomodasi dan layanan makanan, transportasi, tempat penyimpanan dan komunikasi, serta seni, hiburan, dan rekreasi. Sektor-sektor tersebut menyerap 1,62 trilyun pekerja atau sebesar 49 persen dari total pekerjaan di dunia.[147] Sektor-sektor ini berkaitan erat dengan perekonomian kota-kota. Di seluruh dunia, kota-kota yang awalnya sangat ramai seketika menjadi sunyi sejak bulan Maret hingga Juli, karena hotel, restoran, bar, pusat hiburan, pedagang kaki lima (PKL), stadium olahraga, pabrik, pusat bisnis, mall dan berbagai ruang publik lainnya ditutup karena karantina wilayah akibat COVID-19. Di masa puncak karantina wilayah, jumlah orang yang menggunakan kereta bawah tanah di New York turun hingga 90 persen dan taksi kuning menghilang di jalan-jalan di Manhattan.[148] Di Seattle, permintaan untuk layanan Uber turun hingga 60-70 persen pada bulan Maret 2020.[149] Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih karena banyak kota di dunia yang mengalami serangan gelombang kedua virus korona, beberapa di antaranya bahkan lebih serius daripada gelombang pertama.[150] Peristiwa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini telah melumpuhkan kegiatan ekonomi serta mengancam penghidupan kota-kota di seluruh dunia.

COVID-19 semakin meningkatkan kesenjangan perkotaan serta mempengaruhi kelompok rentan secara tidak proporsional

Karantina wilayah akibat dari COVID-19 serta aturan jaga jarak mendorong melebarnya kesenjangan serta menguak kegagalan pembangunan yang menjadi ciri di banyak kota. Langkah-langkah tersebut telah mempengaruhi rumah tangga miskin, kelompok rentan, pekerja informal, serta pekerja dengan upah harian secara tidak proporsional, karena mereka harus meninggalkan rumahnya untuk mendapatkan penghasilan. Kebutuhan akan pekerjaan jarak jauh meningkat selama pandemi, termasuk sekolah jarak jauh. Namun, konsep *work from home* atau jarak jauh lebih

menarik pekerja kantoran, berpenghasilan tinggi yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan. Konsep ini tidak mungkin dilakukan pekerja sektor informal yang mayoritas berada di kota-kota di negara berkembang dan bergantung kepada penghasilan harian, sehingga dengan karantina wilayah beberapa hari saja dapat mengubah kemiskinan menjadi kelaparan.[151] Sebagian besar pekerja informal merupakan kontributor terbesar dari tingkat infeksi penyakit, meskipun karantina wilayah telah diberlakukan sejak awal.[152] Pembelajaran sekolah daring tidak dapat dinikmati keluarga miskin yang tinggal di permukiman informal atau di daerah yang tidak didukung fasilitas teknologi memadai. Selain itu, kondisi rumah di keluarga miskin sering kali tidak kondusif bagi pembelajaran yang efektif. Seluruh isu ini semakin memperlebar jurang ketimpangan dalam sektor pendidikan di antara berbagai kelompok pendapatan, yang justru semakin memperjelas ketimpangan peluang di kota.

Kondisi permukiman kumuh dan informal yang penuh sesak, yang menjadi satu-satunya pilihan bagi 60 persen penduduk di beberapa kota[153], serta ruang keluarga yang harus berbagi dengan beberapa keluarga, infrastruktur yang tidak memadai, layanan publik yang buruk, dan lokasi yang berbahaya menjadikan isolasi mandiri dan jaga jarak menjadi ilusi semata. Sebagai contoh, bagaimana mungkin upaya jaga jarak dapat dilakukan di Dharavi, sebuah kawasan permukiman kumuh di Mumbai yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 270 ribu orang per kilometer persegi[154] atau di penampungan pengungsi terbesar dunia di Cox's Bazar?[155] Tidak heran apabila Dharavi, yang memiliki penduduk sekitar satu juta orang dan salah satu kawasan terpadat di dunia, menjadi salah satu episentrum penyebaran COVID-19 di India.[156]

Karantina wilayah akibat dari COVID-19 serta aturan jaga jarak mendorong melebarnya kesenjangan serta menguak kegagalan pembangunan yang menjadi ciri di banyak kota.

Kawasan kumuh Dharavi selama Pemerintah menerapkan karantina wilayah nasional sebagai langkah preventif melawan COVID-19, Mumbai/India © Manoej Paateel/Patel

Konsep *work from home* atau jarak jauh lebih menarik pekerja kantoran, berpenghasilan tinggi yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, dan tidak mungkin dilakukan pekerja sektor informal

Pembelajaran sekolah daring tidak dapat dinikmati keluarga miskin yang tinggal di permukiman informal atau di daerah yang tidak didukung fasilitas teknologi memadai.

Infrastruktur air yang tidak memadai, sanitasi dan higienitas buruk di permukiman kumuh dan informal, tempat penampungan pengungsi yang padat dan tempat penginapan pekerja migran[157] menunjukkan bahwa anjuran cuci tangan sebagai langkah pencegahan meluasnya transmisi virus korona masih merupakan tantangan besar. Di tahun 2017, 3 trilyun penduduk dunia tidak memiliki fasilitas mencuci tangan di rumah, yang mana 1,6 trilyun penduduk dunia memiliki fasilitas cuci tangan yang terbatas sabun atau airnya, dan 1,4 trilyun penduduk dunia tidak memiliki fasilitas cuci tangan sama sekali.[158] Di negara-negara miskin, sekitar tiga per empat populasi tidak memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai. Kondisi tersebut malah menjadi kondisi ideal bagi percepatan transmisi penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya.

Penduduk lansia dan kelompok minoritas di kawasan perkotaan memiliki risiko yang tinggi terkena dan sekarat dari COVID-19. Data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok (Chinese Centre for Disease Control and Prevention) menunjukkan bahwa meskipun proporsi penduduk yang berusia di atas 60 tahun yang terkena COVID-19 sebesar 31,2 persen, angka kematian kelompok ini hampir sebesar 81 persen dari total kematian akibat COVID-19.[159] Pola yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, seperti data yang ditunjukkan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention) bahwa 80 persen kematian akibat COVID-19 adalah penduduk berusia di atas 65 tahun.[160] Di Italia, 83,4 persen kematian merupakan penduduk berusia di atas 70 tahun.[161] Hal ini dapat disebabkan oleh proporsi penduduk lansia di Italia yang merupakan terbesar kedua di dunia setelah Jepang, dengan sekitar 23 persen penduduk berusia di atas 65 tahun.[162] Fakta bahwa penduduk lansia cenderung memiliki risiko kematian akibat virus korona lebih tinggi telah mendorong para pekerja kesehatan untuk lebih memilih merawat penduduk usia muda. Kondisi ini semakin memperparah stigma negatif bagi penduduk lansia, yang seringkali diasumsikan sebagai orang yang lemah, tidak penting, serta menjadi beban bagi masyarakat.[163] Di beberapa negara, anjuran menjaga jarak yang ketat telah memaksa penduduk lansia untuk tetap di rumah atau berisiko terkena denda. Apabila kebijakan tersebut tidak dikelola dengan baik, meskipun tujuannya baik, anjuran jaga jarak dapat memiliki dampak yang tidak diinginkan terkait stigmatisasi dan diskriminasi penduduk lansia.

Data terkini menunjukkan bahwa etnis minoritas di Amerika Serikat terdampak secara signifikan akibat COVID-19, terutama etnis Afrika-Amerika yang mana hanya sejumlah 13 persen dari penduduk Amerika, tetapi justru menyumbang sepertiga dari kematian akibat COVID-19.[164] Di hampir setiap kota yang menyediakan data terkait etnisitas, penduduk berkulit hitam cenderung memiliki proporsi kematian COVID-19 relatif lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi total penduduknya. Di Chicago, penduduk Afrika-Amerika menyumbang 72 persen kematian COVID-19, meskipun hanya total penduduk mereka hanya 30 persen dari total populasi.[165] Di New York, yang merupakan salah satu episentrum pandemi di Amerika Serikat, penduduk Afrika-Amerika berkontribusi sepertiga kematian akibat COVID-19, tetapi hanya sebesar 22 persen dari total populasi.[166] Penduduk kulit hitam di New York dua kali lebih berisiko meninggal dibandingkan penduduk kulit putih jika terkena COVID-19.[167] Kondisi di atas menunjukkan adanya kesenjangan terhadap peluang ekonomi, akses fasilitas kesehatan, kemiskinan struktural, dan sebagainya. Penduduk Afrika-Amerika sering kali mendapatkan gaji lebih kecil, tidak memiliki asuransi kesehatan, serta lebih banyak bekerja di sektor esensial selama karantina wilayah, sehingga mereka tidak bisa tinggal di rumah.[168] Penduduk Afrika-Amerika juga umumnya tinggal di hunian yang tidak sesuai standar, penuh sesak, di tengah kawasan yang tersegregasi dan mengandalkan transportasi umum, sehingga mereka sulit untuk

menjaga jarak dan berisiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19.

COVID-19 memperparah tingkat kemiskinan

Kontraksi ekonomi global dan peningkatan pengangguran akibat dari karantina wilayah, terutama apabila tidak ada jaminan perlindungan sosial, akan semakin meningkatkan kemiskinan. Analisis terbaru terkait potensi peningkatan kemiskinan akibat dampak dari COVID-19 menunjukkan bahwa sekitar 500 milyar penduduk dunia atau 8 persen dari total populasi dapat jatuh ke jurang kemiskinan.[169] Kawasan yang paling terkena dampak berdasarkan garis kemiskinan ekstrim (USD 1,90 dan USD 3,2 per hari) adalah Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Kedua kawasan tersebut menyumbang dua pertiga dan 85 persen dari total penduduk miskin dunia.[170] Di Afrika Sub-Suhara dan Asia Selatan, jumlah orang yang menjadi miskin meningkat antara 80 hingga 420 juta, bergantung pada kontraksi di pendapatan ataupun konsumsi rumah tangga. Skenario ini akan semakin memperburuk kondisi kemiskinan di berbagai kawasan perkotaan di Bangladesh, India, Kongo, Ethiopia, dan Nigeria, yang mana negara-negara tersebut sudah memiliki proporsi penduduk miskin cukup besar sebelumnya. Sementara itu, kawasan-kawasan terdampak lainnya berdasarkan garis kemiskinan yang lebih tinggi (USD 5,50 per hari) adalah Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Di kawasan tersebut, jumlah kemiskinan baru dapat meningkat sebesar 124 hingga 580 juta orang.[171] Peningkatan jumlah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, karena pandemi juga dialami oleh negara maju yang jatuh ke jurang resesi. Namun, negara-negara maju cenderung memiliki jaminan perlindungan sosial bagi warganya guna memitigasi dampak-dampak negatif dari COVID-19.

Kontraksi ekonomi global dan peningkatan pengangguran akibat dari karantina wilayah, terutama apabila tidak ada jaminan perlindungan sosial, akan semakin meningkatkan kemiskinan.

Proyeksi peningkatan angka kemiskinan ini menandai bahwa kemiskinan global akan semakin bertambah sejak pertama kalinya dalam tiga dekade terakhir. Hal ini seolah membalikkan pencapaian pengurangan kemiskinan yang progresif sebelumnya. Di tahun 1990, 1,9 milyar penduduk atau 36 persen dari populasi dunia hidup di kemiskinan ekstrim.[172] Pada tahun 2015, angka tersebut telah berkurang drastis hingga 736 juta orang atau sebesar 10 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut mengimplikasikan bahwa sekitar 1,2 milyar penduduk dunia sudah keluar dari garis kemiskinan ekstrim antara tahun 1990-2015. Pengurangan angka kemiskinan ini lebih banyak didorong oleh pertumbuhan ekonomi global serta peningkatan kesejahteraan di berbagai negara berkembang, terutama di Asia Timur, Kepulauan Pasifik dan Asia Selatan.[173] Tiongkok telah menjadi garis terdepan dalam pengentasan kemiskinan. Urbanisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kemudian mengeluarkan 850 juta orang dari kemiskinan ekstrim antara tahun 1981-2015 dan menurunkan proporsi penduduk miskin hingga 7 persen.[174] COVID-19 dapat menghapus pencapaian pengentasan kemiskinan global serta mengancam terwujudnya TPB 1 (mengentaskan kemiskinan dalam setiap bentuk dan di mana pun) di tahun 2030. Kemunduran ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian beberapa tujuan lainnya seperti kelaparan dan nutrisi yang baik, hidup sehat, serta pendidikan inklusif dan berkeadilan, yang mana setiap tujuan tersebut sangat bergantung pada pengentasan kemiskinan.

COVID-19 dapat menghapus pencapaian pengentasan kemiskinan global serta mengancam terwujudnya TPB 1 (mengentaskan kemiskinan dalam setiap bentuk dan di mana pun) di tahun 2030.

COVID-19: Memperbaiki kualitas lingkungan dalam jangka pendek

Karantina wilayah akibat COVID-19 telah mempengaruhi lingkungan perkotaan di berbagai aspek. Emisi CO_2 di tingkat global diperkirakan akan turun sebesar 8 persen atau hampir 2,6 milyar ton di tahun 2020.[175] Pengurangan emisi karbon ini merupakan yang terbesar sejak penurunan emisi karbon sebesar 400 juta ton akibat dari krisis finansial global di tahun 2009. Sebagian besar pengurangan emisi karbon tersebut

berasal dari kota-kota, yang juga menghasilkan 70 persen emisi gas karbon akibat aktivitas manusia melalui konsumsi bahan bakar fosil untuk sektor energi dan transportasi.[176] Di India, emisi CO_2 turun untuk pertama kalinya dalam 40 tahun (15 persen di bulan Maret dan 30 persen di bulan April 2020). Hal ini tidak hanya sebagai konsekuensi dari karantina wilayah, tetapi juga karena berkurangnya permintaan akan batu bara, yang juga sudah menurun sebelum pandemi ini merebak.[177] Pengurangan emisi ini dapat dilihat sebagai berkah ketika pandemi,[178] namun hanya akan dalam jangka pendek dan akan meningkat kembali ketika ekonomi global bergerak kembali. Hal ini tidak akan terjadi kecuali jika negara-negara berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan berinvestasi di energi yang lebih ramah lingkungan dan berketahanan.[179]

Pengurangan emisi CO_2 disumbang oleh berbagai jenis karantina wilayah yang dilakukan, yang mana berimplikasi terhadap aktivitas ekonomi, sehingga mengurangi konsumsi energi. Negara-negara dengan kebijakan karantina wilayah total (*full lockdown*) mengalami rata-rata penurunan permintaan energi sebesar 25 persen per minggu, sedangkan yang karantina wilayah sebagian (*partial lockdown)* berkurang sebesar 18 persen.[180] COVID-19 membuat dunia berhenti sementara. Dalam hitungan minggu, pesawat terbang menghilang di langit-langit, perbatasan lokal dan nasional ditutup, pabrik-pabrik menghentikan produksi, sektor bisnis tidak berfungsi normal, rantai pasok global terhambat serta jutaan pekerjaan hilang. Industri perminyakan, salah satu kontributor utama emisi CO_2, merupakan industri yang paling terpukul akibat pembatasan pergerakan dan turunnya permintaan penerbangan, yang berkontribusi terhadap 60 persen konsumsi minyak dunia.[181] Di akhir Maret 2020, aktivitas di jalan raya turun sebesar 50 persen dan sektor penerbangan sebesar 60 persen daripada rata-rata di 2019.[182]

Di Tiongkok, emisi CO_2 turun sebesar lebih dari 25 persen di Januari 2020 apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hal ini lebih banyak didorong oleh berkurangnya konsumsi batu bara dan minyak mentah sebesar 37 persen.[183] Di Maret 2020, New York mengalami penurunan emisi CO_2 sebesar 5-10 persen dan emisi karbon monoksida sebesar 50 persen, yang lebih banyak disebabkan oleh penurunan lalu lintas sebesar 35 persen.[184] Tren penurunan karbon monoksida ini juga ditemukan di Wuhan dan Beijing (Bab 4). Di Amerika Latin dan kota-kota di Kepulauan Karibia, kemacetan lalu lintas berkurang drastis hingga 47-97 persen di bulan Maret 2020. Penggunaan transportasi publik juga berkurang hingga 60 persen di Guadalajara, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, dan Brasília dan hingga 80 persen di Lima, Bogotá, Mexico City, Buenos Aires dan Santiago[185]. Kondisi kemacetan di kota-kota di Amerika Latin tersebut berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO_2 dan peningkatan kualitas udara.

Dalam kurun waktu dua bulan karantina wilayah akibat COVID-19, terdapat peningkatan kualitas udara dan penurunan pencemaran udara, sebagaimana yang diamati di berbagai tempat di dunia. Citra satelit untuk Provinsi Hubei di Tiongkok menunjukkan pengurangan PM2,5 nitrat yang signifikan karena pembatasan perjalanan.[186] Meskipun kecepatan angin dan suhu mempengaruhi konsentrasi nitrogen oksida, perbaikan kualitas udara di Tiongkok lebih banyak dikontribusikan oleh berbagai intervensi untuk mengatasi wabah COVID-19. Beberapa contoh misalnya, pembatasan lalu lintas yang ketat dan isolasi mandiri, yang dimulai pertama kali di Wuhan dan sekitarnya hingga menyebar ke seluruh provinsi di Tiongkok.[187] Tren yang sama juga diamati di Korea, Italia, Spanyol, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di negara tersebut.[188]

Negara-negara dengan kebijakan karantina wilayah total (*full lockdown*) mengalami rata-rata penurunan permintaan energi sebesar 25 persen per minggu, sedangkan yang karantina wilayah Sebagian (*partial lockdown*) berkurang sebesar 18 persen.

Kota-kota di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia juga mendapati pengurangan tingkat nitrogen oksida sebagai akibat dari kebijakan karantina wilayah. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.6, di antara sepuluh hari terakhir dan sepuluh hari pertama di bulan Maret 2020, perubahan persentase konsentrasi nitrogen dioksida di atmosfer turun sebesar 40-70 persen di kota-kota yang menjalankan karantina wilayah total seperti Bogotá, Lima, Buenos Aires, Medellín, Quito, dan Guayaquil. Di kota-kota yang menjalankan karantina wilayah sebagian seperti Rio de Janeiro, Mexico City, São Paulo, Kingston, dan Santiago, angka konsentrasi nitrogen dioksida turun antara 5-35 persen. Perbedaan yang sangat kontras ini menunjukkan bahwa karantina wilayah yang sangat ketat dapat semakin meningkatkan kualitas udara.

Investasi besar dalam teknologi bersih, seperti energi terbarukan merupakan cara paling efektif untuk mendorong perekonomian yang terdampak akibat COVID-19, sambil mengurangi emisi.

Senada dengan pandangan dari ekonom terkemuka, pengurangan emisi dan polutan jangka pendek akibat dari karantina wilayah memiliki dampak yang sangat kecil di jangka panjang. Hal ini juga tidak akan mengubah banyak proyeksi emisi GRK, kecuali negara-negara memfasilitasi perubahan mendasar dan jangka panjang pada SDM, bisnis, dan institusi.[189] Investasi besar dalam teknologi bersih, seperti energi terbarukan merupakan cara paling efektif untuk mendorong perekonomian yang terdampak akibat COVID-19, sambil mengurangi emisi. Dalam krisis sebelumnya, peningkatan emisi setelah krisis akan lebih besar daripada pengurangannya, kecuali jika negara-negara berkomitmen untuk infrastruktur energi bersih dan terbarukan. Tiongkok sudah menghadapi peningkatan emisi ketika pembatasan pergerakan mulai dilonggarkan dan pabrik-pabrik mulai dibuka kembali.[190] Dengan mulai dilonggarkannya karantina wilayah dan pembukaan kembali perekonomian, pola yang serupa juga ditemukan di berbagai kota dunia, karena banyak orang yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dan menghindari transportasi publik untuk menghindari terkena COVID-19. Keputusan banyak orang tersebut justru berkontribusi lebih besar terhadap emisi dan kemacetan.[191]

Gambar 1.6: Perubahan konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO_2) di atmosfer bagi beberapa metropolitan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia (perubahan persentase)

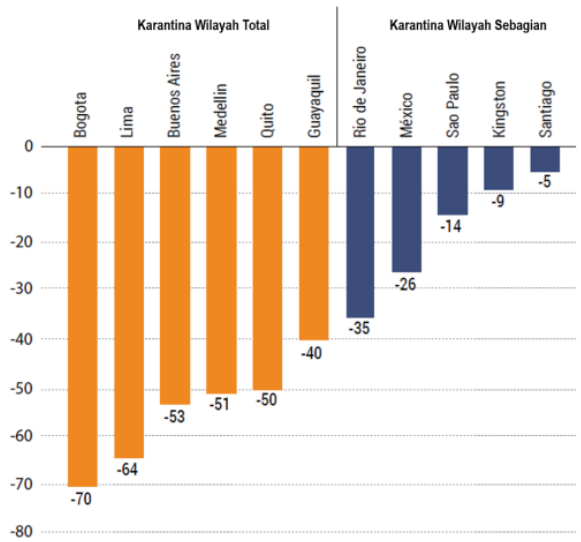

Sumber: IADB, 2000

Pertanyaan yang lebih penting, apakah perbaikan lingkungan akibat pembatasan aktivitas dan karantina wilayah dapat berlanjut terus? Keberhasilan karantina wilayah di berbagai kota untuk meratakan kurva infeksi virus korona juga menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dengan bepergian dengan transportasi lebih hijau dan mengonsumsi karbon lebih sedikit. Perbaikan kualitas lingkungan hidup ketika ekonomi global sudah kembali normal akan sangat tergantung bagaimana perilaku manusia dikelola dengan efektif. Perilaku masyarakat ini bisa saja berupa kembalinya kebiasaan (*business-as-usual)* atau melanjutkan gaya hidup sebelum pandemi seperti penerbangan jarak pendek yang murah. Pada dasarnya, pandemi ini menunjukkan bahwa masyarakat mau mengubah kebiasaannya ketika menghadapi kesulitan dan demi kebaikan bersama. Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengubah narasi terkait perubahan iklim menjadi salah satu isu besar dan penting yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Agar perilaku manusia dapat berubah, pesan yang

disampaikan harus efektif dan menargetkan seluruh pemangku kepentingan. Jika perubahan iklim ditangani dengan komitmen dan semangat yang sama dengan penanganan COVID-19, maka sangat mungkin untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup agar mampu memitigasi dan beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim.

Pada dasarnya, pandemi ini menunjukkan bahwa masyarakat mau mengubah kebiasaannya ketika menghadapi kesulitan dan demi kebaikan bersama.

1.4.8 Penyebaran Inovasi dan Teknologi di Kawasan Perkotaan

Karena penduduk kota sangat mengandalkan teknologi untuk mengakses tempat kerja, memesan makanan, berbelanja, serta berkomunikasi dengan keluarga di saat karantina wilayah, perkembangan teknologi terbaru semakin cepat. Bahkan sebelum pandemi, kota-kota memiliki karakteristik sebagai pusat inovasi dan teknologi sebagai bahan baku untuk maha data (*big data*). Hal ini kemudian digunakan untuk membuka proses perumusan kebijakan di sektor publik dan swasta.[192] Meskipun kemajuan teknologi ini sering dianggap disruptif[193], kecenderungan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang mengandalkan kemampuan analisis daripada fisik. Revolusi industri 4.0[194] ditandai dengan berbagai penemuan dan inovasi teknologi seperti otomasi, robotik, kecerdasan buatan, penggunaan *drone*, dan *Internet of Things* (IoT).

Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kota karena hal tersebut dapat memfasilitasi inovasi, efisiensi, dan layanan dasar yang efektif. Inovasi tersebut dapat berkontribusi untuk mewujudkan kota yang lebih berkelanjutan dan menyediakan solusi terhadap berbagai tantangan perkotaan, seperti pengelolaan air, transportasi berkelanjutan, keamanan, pengelolaan sampah, kota hijau, energi terbarukan, serta pertanian perkotaan.[195] Implementasi teknologi yang termutakhir ini akhirnya akan merevolusi bagaimana kota-kota tersebut direncanakan, dikelola, dan dianalisis.

Inovasi teknologi juga mendefinisikan kembali pasar tenaga kerja di kota serta membaurkan batas-batas konvensional antara pekerjaan yang bisa digantikan (*tradeable employment/manufacturing-based*) dan yang tidak bisa digantikan (*non-tradeable employment/service-based*). Pergeseran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur lapangan pekerjaan di perkotaan di sektor jasa, yang berubah menjadi dapat digantikan (*tradeable*) dengan relokasi yang dapat terjadi di dalam maupun antarwilayah. Meskipun pergeseran tersebut menciptakan lapangan kerja baru di kota, fenomena ini dikhawatirkan dapat memunculkan kerentanan di bidang-bidang pekerjaan lainnya.[196] Di tahun 2025, hampir separuh dari lapangan pekerjaan baru dan pengganti di UE merupakan tenaga kerja berketerampilan tinggi, sehingga memaksa mobilitas yang lebih cepat di dalam Eropa.[197] Kemajuan teknologi juga telah menciptakan angkatan kerja mandiri yang berpartisipasi di ekonomi digital "*gig economy*" dengan bekerja melalui platform digital. Jenis pekerjaan tersebut menawarkan fleksibilitas dan kemudahan untuk masuk, tetapi juga tidak memiliki sistem perlindungan pekerja yang tradisional. Meski demikian, beberapa kota telah menyusun regulasi yang mendorong perusahaan teknologi untuk memperlakukan pegawai independen/lepasan mereka sebagai pegawai tetap. Meskipun "*gig economy*" ini masih menjadi tren, Bank Dunia mengestimasikan bahwa hanya sekitar 0,5 persen pekerja global yang bergerak di bidang tersebut.[198]

Penggunaan data yang semakin penting turut mendorong fenomena kota cerdas (Bab 6). Konsep kota cerdas menggunakan berbagai inovasi dari teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi layanan perkotaan, serta daya saing kota.[199] Kota cerdas dapat membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan kesejahteraan, keberlanjutan, ketahanan, respon darurat, hingga pelayanan dasar yang efektif dan berkeadilan. Permintaan global akan kota cerdas semakin meningkat dengan cepat, yang bernilai hampir 19 persen atau USD 622 milyar di 2017 menjadi USD 3,48 trilyun di tahun 2026.[200] Peningkatan ini umumnya didorong oleh pemerintah yang berinvestasi di teknologi untuk memenuhi kebutuhan dunia yang semakin menjadi kota.

Gambar 1.7: Aplikasi teknologi digital di kota-kota Afrika Selatan

Sumber: Jaringan Kota-Kota Afrika Selatan, 2018a

Pembangunan kota cerdas sebagian besar difasilitasi oleh semakin besarnya penetrasi teknologi digital. Hal ini karena lebih dari separuh penduduk dunia sudah terhubung dengan internet dan dua pertiganya memiliki perangkat seluler.[201] Singapura menjadi salah satu garda terdepan dalam gerakan kota cerdas. Program "*Smart Nation*" ("*Bangsa Cerdas*") Singapura berupaya untuk memanfaatkan teknologi, jaringan, dan data untuk mendorong kualitas hidup yang lebih baik, menciptakan lebih banyak peluang, dan mendukung masyarakat yang lebih kuat.[202] Meskipun kota cerdas masih dalam tahap awal di negara-negara di Afrika, Afrika Selatan telah menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola perkotaan serta keterlibatan masyarakat (Gambar 1.7).[203]

Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kota karena hal tersebut dapat memfasilitasi inovasi, efisiensi, dan layanan dasar yang efektif.

Tidak semua inisiatif kota cerdas tersebut sukses, seperti janji 100 Kota Cerdas di India.[204] Di samping itu, terdapat beberapa kendala terkait investasi sumber daya publik dalam prinsip kota cerdas (Bab 6). Teknologi dan platform digital, yang seringkali diidentikkan dengan kota cerdas, dibangun dan disediakan oleh perusahaan swasta. Hal ini justru dapat mengunci kota-kota agar menggunakan teknologi tertentu, sehingga dapat mengganggu pencapaian prioritas investasi nasional dan pemerintah kota.[205] Di samping itu, isu kepemilikan data juga muncul antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang menyediakan teknologi untuk memperoleh informasi tersebut.

Meskipun teknologi terbaru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan inklusi sosial, tidak jarang teknologi justru menciptakan ketimpangan digital (*digital divide*) yang semakin memperlebar kesenjangan, jika aksesnya tidak merata. Ketimpangan tersebut dicirikan dengan lingkungan perkotaan yang makmur dan terhubung dengan baik serta kawasan pusat bisnis yang berdampingan dengan permukiman bagi MBR di kota. Penduduk menengah ke atas cenderung memiliki akses terhadap teknologi yang lebih baik dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mereka manfaatkan untuk memperluas jangkauan dan kendali mereka sambil membatasi penduduk yang lebih terpinggirkan secara sosial dan ekonomi (Bab 6). Untuk memanfaatkan potensi dari inovasi dan teknologi guna

mewujudkan urbanisasi yang berkelanjutan, diperlukan penciptaan lingkungan yang mendukung dengan kelembagaan yang tepat agar mampu menjamin inklusivitas.

Meskipun teknologi terbaru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan inklusi sosial, tidak jarang teknologi justru menciptakan ketimpangan digital (*digital divide*) yang semakin memperlebar kesenjangan, jika aksesnya tidak merata.

1.4.9 Di mana Uangnya: Defisit Pembiayaan untuk Pembangunan Perkotaan?

Agenda Baru Perkotaan dan berbagai agenda pembangunan lain yang terkait dengan urbanisasi yang berkelanjutan diimplementasikan dalam kondisi defisit anggaran untuk program pembangunan perkotaan. Kekurangan biaya ini diperparah oleh efek dari pandemi virus korona. Bab 8 menunjukkan bahwa untuk mencapai TPB dibutuhkan dana yang begitu besar. Kubu konservatif versi PBB dan Bank Dunia mengestimasi kebutuhan dana sebesar USD 3,9 trilyun per tahun untuk mencapai TPB.[206] Beberapa organisasi lain memprediksi lebih besar sekitar USD 4 trilyun hingga 7 trilyun per tahunnya.[207] Berbagai perkiraan ini nilainya jauh lebih tinggi daripada sumber-sumber bantuan pembangunan yang saat ini tersedia untuk pembangunan perkotaan. Investasi tahunan saat ini yang tersedia untuk TPB hanya berkisar USD 1,4 trilyun, sehingga terdapat kekurangan sekitar USD 2,5 trilyun yang harus diperoleh dari berbagai sumber yang telah diidentifikasi pada Bab 8 jika menginginkan target TPB 2030 tercapai.

Saat ini, terdapat kebutuhan untuk menyediakan dan memanfaatkan berbagai alternatif untuk pembiayaan pembangunan kota. Sebagai contoh, investasi senilai USD 26 trilyun di instrumen keuangan yang menghasilkan keuntungan rendah dapat dimanfaatkan untuk berbagai proyek di kota.[208] Memanfaatkan sumber daya tersebut membutuhkan inovasi pimpinan daerah untuk mengubah permasalahan di kota menjadi proyek-proyek yang berkualitas dan layak. Hal ini perlu dilakukan agar jurang antara investasi sebesar USD 2,5 trilyun yang dibutuhkan untuk mencapai TPB dapat semakin diperkecil.[209] Peluang pendanaan lain yang dapat dipelajari lebih jauh adalah penerbitan surat utang pemerintah, penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, peningkatan transfer pusat-daerah, memobilisasi sumber daya dari pembiayaan berbasis lahan (*land-based finance*), peningkatan kapasitas finansial untuk pelayanan publik, perluasan pasar modal untuk penyediaan dan pembiayaan perumahan, serta pemanfaatan anggaran pemerintah (contohnya subsidi yang tepat sasaran) yang lebih efektif untuk meningkatkan investasi swasta.

Agenda Baru Perkotaan dan berbagai agenda pembangunan lain yang terkait dengan urbanisasi yang berkelanjutan diimplementasikan dalam kondisi defisit anggaran untuk program pembangunan perkotaan.

Dalam merespon perubahan iklim, kota-kota harus mengeksplorasi berbagai cara untuk menghasilkan pembiayaan terkait investasi di bidang adaptasi dan ketahanan. Kota-kota di negara maju akan membutuhkan sistem perpajakan dan langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang dengan skema asuransi yang relevan. Sementara itu, kota-kota di negara berkembang perlu memperkuat sistem pengelolaan lahan serta berinvestasi dalam infrastruktur yang berketahanan untuk mendapat manfaat yang lebih besar.[210]

1.5 Catatan Kesimpulan

Dengan diadopsinya NUA dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (TPB), masyarakat internasional percaya bahwa urbanisasi adalah pendorong untuk perubahan yang positif dengan tidak meninggalkan seorang pun dan satu wilayah pun. Agenda Baru Perkotaan merupakan kerangka untuk mengintegrasikan dan meningkatkan peran kota-kota dalam pengambilan keputusan dan transformasi pembangunan.

Pengiriman UAV drone mengirimkan paket besar berwarna cokelat © Flystock/Shutterstock

Walaupun berbagai negara telah membuat kemajuan dalam implementasi NUA dan komponen perkotaan dalam TPB, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi.

Walaupun berbagai negara telah membuat kemajuan dalam implementasi NUA dan komponen perkotaan dalam TPB, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Tantangan ini termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya perkotaan di dalam berbagai komitmen pembangunan global, rendahnya kapasitas institusi dan fiskal, serta lemahnya struktur pemerintahan di berbagai tingkatan dan kemitraan multipihak. Sebagaimana tertulis dalam Bab 7, implementasi NUA membutuhkan aksi-aksi di tingkat lokal. Aksi tersebut membutuhkan kebijakan kelembagaan dan kapasitas finansial di tingkat lokal, yang mana masih sangat sulit dipenuhi di berbagai negara. Kapasitas untuk meningkatkan devolusi dan otonomi daerah di berbagai negara masih rendah dan kota-kota terus menghadapi kondisi keterbatasan sumber daya untuk mengatasi tantangan terkait urbanisasi.

Terlepas dari tantangan ini, urbanisasi yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam Dekade Aksi untuk mempercepat solusi-solusi berkelanjutan untuk seluruh tantangan besar di dunia. Urbanisasi menjadi salah satu titik masuk untuk memastikan berbagai pencapaian di berbagai tujuan dalam Agenda 2030. Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menjadi salah satu katalis dalam pewujudan TPB terkait perkotaan. Beberapa tujuan tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penanganan dampak dari perubahan iklim, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan yang produktif, pertumbuhan ekonomi, serta fasilitasi pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Meskipun COVID-19 membuat dunia seolah berhenti dan melumpuhkan ekonomi perkotaan di berbagai aspek, masih terdapat peluang bagi kota untuk membangun kembali secara lebih baik dalam jangka panjang serta membangun ketahanan terhadap pandemi di masa mendatang. Kota, dengan berkolaborasi dengan mitra pembangunan, harus merangkul peluang ini dengan sepenuh hati.

Meskipun COVID-19 membuat dunia seolah berhenti dan melumpuhkan ekonomi perkotaan di berbagai aspek, masih terdapat peluang bagi kota untuk membangun kembali secara lebih baik dalam jangka panjang serta membangun ketahanan terhadap pandemi di masa mendatang. Kota, dengan berkolaborasi dengan mitra pembangunan, harus merangkul peluang ini dengan sepenuh hati.

Pencegahan COVID-19 di Mathare, Nairobi, Kenya © UN-Habitat/Kirsten Milhahn

Catatan Akhir

1. Barnett and Parnell, 2006.
2. UN-Habitat, 2016.
3. Parnell et al,2016.
4. SDSN, 2014.
5. Parnell, 2016; Watson, 2016.
6. Barber, 2016.
7. Parnell, 2016.
8. SDSN, 2016.
9. SDSN, 2016.
10. SDSN, 2016.
11. Cities Alliance, 2015.
12. UN-Habitat, 2016.
13. UN-Habitat, 2010a.
14. UN Environment, 2019.
15. Robin dan Acuto 2018.
16. Barnett dan Parnell, 2016.
17. UN-Habitat, 2013.
18. UN-Habitat, 2016.
19. PBB, 2017a.
20. PBB, 2017a.
21. PBB, 2017a p.3.
22. UN-Habitat, 2017a.
23. Bagian ini mayoritas diambil dari dokumen UN-Habitat dengan judul sama.
24. PBB, 2020a.
25. PBB, 2018a.
26. Deklarasi Kuala Lumpur tentang Kota-kota 2030.
27. UN-Habitat, 2020a.
28. PBB, 2018b.
29. PBB, 2018b.
30. PBB, 2018b.
31. Florida dan Fasche, 2017.
32. Freire, et al, 2014.
33. Bank Dunia, 2019a.
34. PBB, 2018b.
35. UN-Habitat, 2009.
36. Sistem PBB, 2019.
37. PBB, 2017b.
38. Agencia EFE, 2015.
39. UN-Women 2017.
40. Chant dan Mcilwaine, 2013.
41. PBB, 2018c.
42. Population Reference Bureau, 2017.
43. UN-Habitat, 2007.
44. UNFPA, 2007.
45. PBB, 2019a.
46. PBB, 2019a.
47. Rand Corporation, tak bertanggal.
48. PBB, 2019a.
49. Rand Corporation, tak bertanggal.
50. Moreno dan Panda, 2017.
51. UN-Habitat, 2016b.
52. UN-Habitat, 2016b.
53. Seto et al, 2012.
54. Moreno dan Panda, 2017.
55. UN-Habitat, 2009.
56. Laberenne dan Lamson-Hall, 2018.
57. UN-Habitat, 2020b.
58. IOM, 2015.
59. UNDESA, 2013.
60. UNDESA, 2019.
61. PBB, 2018b.
62. PBB, 2019b.
63. Portal Data Migrasi, 2020
64. UN-Habitat, 2008b.
65. Lee dan Nathan, 2011.
66. UNSG, 2016.
67. UNHCR, 2018
68. World Economic Forum, 2016.
69. Portal Data Migrasi, 2019.
70. Pusat Analisis Data Migrasi Global, 2018
71. Hagen-Zanker et al, 2018.
72. The Local, 2016.
73. Lind, 2018.
74. Reidy, 2020.
75. Pusat Analisis Data Migrasi Global, 2018.
76. BBC, 2019.
77. Hagen-Zanker et al, 2018.
78. UNDESA, 2020a.
79. UN-Habitat, 2016a.
80. UN-Habitat, 2010b.
81. Partington, 2019.
82. Bank Dunia, 2019b.
83. Inequality.org, 2018.
84. UN-Habitat dan CAF, 2014.
85. Bank Dunia, 2014a.
86. Ćirkovic´, 2019.
87. Regan dan Ulloa, 2019.
88. Menurut Bank Dunia, lebih dari 850 juta warga Tiongkok keluar dari kemiskinan ekstrem; Tingkat kemiskinan Tiongkok turun dari 88 persen pada 1981 menjadi 0,7 persen pada 2015.
89. UN-Habitat, 2016a.
90. Jain-Chandra, 2018.
91. Bank Dunia, 2018a.
92. Statistik Afrika Selatan, 2019.
93. Bank Dunia, 2018a.
94. Patel dan Steinhauser, 2020.
95. UN-Habitat, 2016b.
96. Institut McKinsey Global, 2014.
97. UN-Habitat; 2016a; Chami, 2020.
98. World Economic Forum, 2020b.
99. Economic Commission for Europe, 2014.
100. Stephens, 2005.
101. Nenova, 2010.
102. UN-Habitat, 2012a.
103. Hernandez dan Kellett, 2008.
104. UN-Habitat, 2011b.
105. PBB, 2016.
106. Arimah, 2010.
107. IPCC, 2018a.
108. IPCC, 2018a.
109. IPCC, 2018a.
110. Barragan dan De Andrés, 2015.
111. Hallegatte, et al, 2013.
112. Komisi Global untuk Adaptasi, 2019.
113. Komisi Global untuk Adaptasi , 2019.
114. Tuxford, 2020.
115. UN-Habitat, 2016a.
116. PBB, 2019b.
117. Komisi Global untuk Adaptasi , 2019.
118. Komisi Global untuk Adaptasi , 2019.
119. https://globalclimatestrike.net/#join- in.
120. McGrath, 2017.
121. Bonanno, 2017.
122. https://www.wearestillin.com/.
123. Rosenthal, 2018.
124. Chemnick, 2018.
125. World Health Organization, 2020.
126. Universitas Pusat Sistem Teknik Rekayasa Sains Johns Hopkins, 2020.
127. PBB, 2020b.
128. UN-Habitat, 2020a.
129. UN-Habitat, 2020b.
130. IMF, 2020.
131. Gopinath, 2020
132. The Economist Intelligence Unit, 2020.
133. Wahba et al, 2020.
134. Oteh, 2019.
135. ILO, 2020a.
136. ILO, 2020b.
137. Cheung, 2020.
138. BLS, 2020.
139. Families USA, 2020.
140. Voce, et al, 2020.
141. King, 2020.
142. Institut Riset Sosial dan Ekonomi, 2020.
143. Krader dan Vines, 2020.
144. Bangladeshi dan Garment Manufacturers Exporters Association, 2020.
145. ILO, 2020c.
146. African Union, 2020.
147. ILO, 2020a.
148. The Economist, 2020a.
149. Conger, 2020.
150. Tait dan Walker, 2020.
151. de Waal dan Richards, 2020.
152. Welsh, 2020.
153. Winter, et al, 2019.
154. Al Jazeera dan News Agencies, 2020.
155. Ratcliffe et al, 2020.
156. Shaikh, 2020.
157. Kondisi hidup yang bersesakan dan jorok di hostel pekerja migran menjadi sumber COVID-19 di Singapura (see Ratcliffe, 2020).
158. UNICEF dan WHO, 2019.
159. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok, 2020.
160. CDC COVID-19 Response Team, 2020.
161. EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità, 2020.
162. Balmer, 2020.
163. UNDESA, 2020b.
164. Associated Press dan dailymail. com, 2020.
165. BBC, 2020.
166. Sharp, 2020.
167. 92,3 kaum kulit hitam meninggal setiap 100.000 kasus dibandingkan 45,2 kaum kulit putih setiap 100.000 kasus
168. van Dorn et al, 2020.
169. Sumner et al, 2020.
170. Sumner et at, 2020.
171. Sumner, et at. 2020.
172. Bank Dunia, 2018.
173. Bank Dunia. 2018.
174. Bank Dunia, 2020a.
175. IEA, 2020a.
176. UN-Habitat, 2011a.
177. Rowlatt, 2020.
178. Teale, 2020.
179. PBB, 2020b; United Nations, 2020c.
180. IEA, 2020a.
181. IEA, 2020a.
182. IEA, 2020a.
183. Myllyvirta, 2020.
184. McGrath, 2020.
185. IADB, 2020.
186. Hernandez, 2020
187. Chen et al, 2020.
188. Tobías et al, 2020; Lembaga Antariksa Eropa, 2020.
189. Hepburn et al, 2020.
190. Hepburn et al, 2020.
191. Newburger, 2020.
192. UN-Habitat, 2016.
193. Publish0x.com, 2019.
194. Schwab, 2016.
195. World Economic Forum, 2015
196. Koutroumpis dan Lafond, 2018
197. ESPON, 2017.
198. Bank Dunia, 2019c.
199. ITU, 2015.
200. Asosiasi Kota Cerdas, 2017.
201. Persistence Market Research, 2017; World Economic Forum, 2020.
202. Kantor Perdana Menteri Singapura, 2019.
203. Jaringan Kota Afrika Selatan, 2018a.
204. Pettit dan White, 2018.
205. Pieterse, 2019.
206. Oteh, 2019.
207. Muggah et al, 2019.
208. Muggah et al, 2019.
209. Muggah et al, 2019.
210. Komisi Global untuk Adaptasi , 2019.

Bab 2

Mengurai Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, kota akan menciptakan nilai yang merupakan keseluruhan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kondisi tak berwujud (kelembagaan, tata kelola, politik, budaya dan persepsi masyarakat) yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup penduduk secara lebih bermakna dan nyata. Dengan semakin meningkatnya pemahaman para pembuat kebijakan di setiap tingkatan pemerintahan, urbanisasi yang direncanakan dengan baik dapat berimplikasi terhadap hasil pembangunan yang baik seta dapat menjadi alat ungkit untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan semua pihak. Kota bukan hanya sebagai tempat orang-orang berkumpul, akan tetapi juga sebagai tempat produksi ekonomi dan budaya, serta ruang pembangunan lingkungan dan sosial.

Kawasan perkotaan merupakan tempat yang memberikan peluang bagi terwujudnya aspirasi. Peluang ini memotivasi orang untuk berpindah dari desa ke kota bahkan meninggalkan negara asalnya menuju kota-kota global. Akibatnya, diskursus tentang kota telah bergeser: dari perspektif kota sebagai tantangan yang harus diatasi menjadi pandangan bahwa kota adalah kunci untuk meningkatkan dampak pembangunan. Terdapat peningkatan pemahaman bahwa kota dapat menciptakan dan menjaga nilai.

Fakta Singkat

1. Nilai urbanisasi berkelanjutan adalah keseluruhan dari kondisi ekonomi, lingkungan, sosial dan kondisi tak berwujud kota yang mendukung kualitas hidup penghuni menjadi lebih bermakna, nyata dan konkret.
2. Banyak individu dan kelompok penduduk kota di dunia yang tidak menikmati manfaat urbanisasi.
3. Memprioritaskan lapangan kerja bagi generasi muda menciptakan manfaat yang akan berdampak pada nilai ekonomi yang dihasilkan kota.
4. Nilai lingkungan dari urbanisasi meningkatkan kualitas kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraan.
5. Keragaman budaya berkontribusi terhadap nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dari urbanisasi melalui toleransi, integrasi, dan berkumpul bersama di ruang publik.

Butir Kebijakan

1. Karena urbanisasi akan tetap menjadi penggerak pertumbuhan global, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan tata kelola yang efektif untuk menjadikannya aset yang transformatif.
2. Nilai ekonomi dari urbanisasi akan menjadi dasar bagi negara untuk berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA), maupun pemulihan dari resesi global akibat COVID-19.
3. Dalam konteks adaptasi iklim, mitigasi dan ketangguhan, kota dapat menciptakan komunitas yang mendukung nilai lingkungan, seperti udara yang bersih, lebih kompak, terintegrasi dan kota yang bisa dilalui dengan berjalan kaki (kota ramah pejalan kaki)
4. Setiap proses urbanisasi yang tidak menekankan kendala kelembagaan untuk dikenal secara utuh adalah tidak adil, maka melemahkan nilai urbanisasi.
5. Mewujudkan nilai sosial urbanisasi berkelanjutan bukan konsekuensi alamiah dari pertumbuhan ekonomi, yang tidak otomatis mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Selama dua dekade terakhir, upaya luar biasa telah dilaksanakan untuk mendorong dan menonjolkan peran penting dari kota dalam membangun dunia yang lebih baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seperti yang telah dibahas di Bab 1, lembaga internasional dan akademisi telah memainkan peran utama di dalam mendorong urbanisasi yang berkelanjutan untuk melawan konteks tradisional yang mengabaikan kota-kota di kebijakan pembangunan nasional. Seperti yang semakin dipahami oleh pembuat kebijakan di semua tingkatan pemerintah, urbanisasi yang direncanakan mengarah pada hasil pembangunan yang positif dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran secara keseluruhan. Kota tidak sebatas pada konteks geografi sebagai tempat orang berkumpul akan tetapi juga sebagai wadah produksi ekonomi dan budaya, serta ruang dan pembangunan sosial. Meskipun pemahaman ini merupakan kecenderungan yang relatif baru dalam wacana global, peran kota dalam perkembangannya memiliki sejarah yang panjang. Kota memiliki sejarah sebagai tempat inovasi dan kreativitas dan sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Dalam konteks dunia yang mengalami urbanisasi yang pesat, peran ini menjadi menarik, dengan perencanaan, tata kelola kota yang sekarang menjadi alat utama untuk menciptakan pertumbuhan inklusif dan kemakmuran dengan mendorong konsumsi yang berkelanjutan dan investasi sosial yang bertanggung jawab. Lebih penting lagi, kota telah menjadi laboratorium di mana kebijakan publik lahir dan gerakan akar rumput pertama kali dilakukan untuk mengatasi tantangan kritis abad dua puluh satu, termasuk perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan perumahan tidak layak. Hasilnya, kota-kota di seluruh dunia ikut mengambil peran di dalam menentukan dan membumikan agenda pembangunan global.

Kota telah menjadi laboratorium di mana kebijakan publik lahir dan aksi akar rumput pertama kali dilakukan untuk mengatasi tantangan kritis abad dua puluh satu, termasuk perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan perumahan tidak layak.

Dilihat dari sudut pandang tantangan yang dihadapi, kota-kota sekarang dikenali sebagai pusat untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial di masa depan. Bab 3 sampai 5 menjelaskan lebih detil mengenai nilai urbanisasi berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagai pendahuluan,

bab ini mengenalkan konsep yang luas dari nilai urbanisasi berkelanjutan dan mengkajinya dari berbagai dimensi. Diskusi awal yang menjadi pertanyaan penting seperti: Apakah nilai urbanisasi berkelanjutan? Siapa yang saat ini mendapat manfaat dari urbanisasi berkelanjutan? Bagaimana nilai urbanisasi berkelanjutan dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal? Bab ini juga membuktikan lebih lanjut bagaimana nilai urbanisasi berkelanjutan mendukung implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Baru Perkotaan (NUA).

2.1 Konsep Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Praktisi perkotaan di seluruh dunia terus menghadapi tantangan kompleks di dalam mengelola proses pembangunan kota dan melindungi masyarakat yang paling rentan. Tantangan kota ditemukan di negara maju dan negara berkembang yang membatasi perwujudan potensi manfaat yang dapat diturunkan dari urbanisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bagaimana berbagai pemangku kepentingan yang memperjuangkan agenda perkotaan dapat menekankan dan mendorong nilai urbanisasi menjadi sangat penting.

Laporan Kota-Kota Dunia 2020 ini menawarkan peta jalan sebagai pendukung perwujudan urbanisasi di semua tingkatan dari lingkungan sampai negara, dan merumuskan nilai urbanisasi sebagai totalitas kondisi ekonomi, lingkungan, sosial dan kondisi tak berwujud atau gambaran yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup penduduk menjadi bermakna, nyata, dan konkret. Bab ini memperkenalkan keterkaitan ekonomi, lingkungan, sosial, dan kondisi tak berwujud pada urbanisasi berkelanjutan dengan mengelompokkan dalam beberapa komponen (Gambar 2.1). Nilai ekonomi urbanisasi berkelanjutan dapat dipahami melalui sudut pandang ekonomi nasional, pembangunan properti, dan kesejahteraan di seluruh rangkaian perkotaan-perdesaan. Begitu pula, nilai lingkungan urbanisasi berkelanjutan dapat dipahami melalui sudut pandang kota dan perubahan iklim, bangunan dan lingkungan binaan serta pelayanan ekosistem. Nilai sosial urbanisasi berkelanjutan bisa dipahami melalui kualitas hidup dan fokus pada keterlibatan dan keadilan. Terakhir, nilai tak berwujud urbanisasi berkelanjutan dapat dipahami melalui sistem tata kelolanya, lembaga politik, produksi budaya dan perpaduan kebijakan yang berjenjang. Nilai dan karakteristik akan diperkenalkan dan dieksplorasi sepanjang bab ini.

Urbanisasi adalah fenomena multidimensi di mana manfaatnya harus disampaikan dalam bahasa multidimensi. Laporan ini mengeksploitasi nilai dalam arti luas terkait ekonomi, lingkungan, sosial dan yang tak berwujud. Konseptualisasi ini menyiratkan bahwa proses urbanisasi harus menguntungkan, tidak memberatkan, semua penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebagai kekuatan transformatif, urbanisasi harus mempercepat kemampuan pemerintah untuk memenuhi beragam kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan warga. Laporan ini mengakui perihal kota yang dihuni oleh penduduk yang beragam, mengakibatkan kebutuhan dan harapan terhadap proses perkotaan yang berbeda. Dalam banyak kasus, perbedaan pengalaman sejarah, budaya dan politik masyarakat mempengaruhi cara mereka memandang dan menilai urbanisasi. Contohnya, pedagang yang menjadi pengungsi melarikan diri dari zona perang dari Aleppo (Suriah) karena takut akan nyawa mereka, para profesional muda yang sengaja membuat pilihan gaya hidup untuk membeli gedung kondominium bertingkat tinggi di lingkungan yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki di Vancouver (Kanada) atau keluarga kaya yang tinggal di balik perumahan berpagar yang terjaga keamanannya di Buenos Aires (Argentina) di mana semuanya akan memandang dan menilai urbanisasi secara berbeda satu sama lain. Dengan demikian, meskipun kota mungkin memiliki tantangan seperti perang, kekerasan, ketimpangan, dan kemiskinan, kota juga menawarkan kesempatan untuk kemakmuran, harapan, kebebasan dan keamanan.

Urbanisasi adalah fenomena multidimensi di mana nilainya harus disampaikan dalam bahasa multidimensi ... Sebagai kekuatan transformatif, urbanisasi harus mempercepat kemampuan pemerintah untuk memenuhi beragam kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan warga.

Pasar Borough di Southwark, London, Britania Raya. © ndreyspb21/Shutterstock

Laporan ini juga mengakui bahwa nilai tersebut sensitif terhadap waktu dan variabel. Dalam konteks urbanisasi, peran ekonomi kota telah berkembang seiring waktu. Selama puncak ekonomi industri abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh, kota-kota seperti Manchester, Philadelphia, Lille, dan Osaka adalah kekuatan ekonomi yang digerakkan oleh industri. Namun, restrukturisasi ekonomi global telah menyebabkan pengikisan manufaktur tradisional menjauh dari warisan ekonomi ke wilayah berkembang yang lebih murah. Sebagai gantinya, kota-kota dunia maju telah menjadi fungsi ekonomi baru, berpusat pada industri pengetahuan, teknologi, layanan produsen canggih, dan perbankan. Kota-kota industri yang pernah perkasa ini sekarang menjadi kota kedua yang prospek ekonominya tertinggal dari ibu kota New York, London, Paris, dan Tokyo. Beberapa kota menengah, termasuk bekas pusat manufaktur yang mewarisi gudang yang, pabrik dan infrastruktur industri yang kurang dimanfaatkan, telah mengejar kebijakan membentuk kembali ekonomi mereka, dan akhirnya memiliki identitas sebagai "ibu kota budaya".

Di seluruh dunia, dari Montréal hingga Melbourne, dari Essen hingga Katowice, kota-kota sengaja mengembangkan aktivitas kesenian sebagai alternatif ekonomi berkelanjutan untuk industri berat. Kebijakan publik telah berhasil menata ulang kota ini dengan mendorong regenerasi fisik pada situs industri yang ditinggalkan dan penciptaan fasilitas budaya ikonik, yang telah berkontribusi pada reorientasi ekonomi menuju industri konsumsi, jasa dan pengetahuan. Ketika kota industri dapat beralih sepenuhnya ke ekonomi yang berbeda — dan pabrik bisa menjadi museum atau gudang bisa menjadi klub malam — ini menunjukkan nilai penduduk yang diperoleh dari daerah perkotaan dapat berubah sebagai hasil dari kecenderungan ekonomi makro. Karena persepsi manfaat bervariasi dari waktu ke waktu, kebijakan dan program perkotaan harus diperbarui secara berkala melalui proses partisipasi publik untuk merefleksikan harapan dan pengalaman penduduk kota. Di bidang budaya, misalnya yang disebut "pengalaman ekonomi" dari festival, konferensi, pameran seni dan pertemuan langsung lainnya mengalami resiko yang disebabkan pandemik COVID-19 dan kota-kota diharapkan melakukan evaluasi kembali pendekatan mereka terhadap pertemuan skala besar di dunia pasca-pandemi.

Gambar 2.1 : Pengertian nilai urbanisasi berkelanjutan

2.2 Nilai dalam Konteks Urbanisasi Berkelanjutan

Selama beberapa dekade, nilai yang dirasakan dari pembangunan kota berkelanjutan sebagian besar telah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Namun, Laporan ini berpendapat bahwa nilai tidak dapat dibatasi secara eksklusif pada bidang ekonomi. Pengurangan nilai urbanisasi hanya untuk perihal yang dapat diukur mengabaikan kompleksitas dan meniadakan keuntungan yang tidak mudah diukur, termasuk nilai tak berwujud seperti lembaga yang efektif, tata kelola yang baik, keragaman budaya, rasa memiliki dan identitas sipil.

Alasan lain untuk memperluas pengertian yang dianggap berasal dari nilai urbanisasi adalah bahwa kemajuan ekonomi sebagian besar menguntungkan sekelompok kecil elit, sehingga memperburuk ketimpangan. Jika hanya dimensi ekonomi dari urbanisasi diukur, maka potensi dampak negatif seperti dampak pada marginalisasi sosial, degradasi lingkungan dan kerusakan tanggung jawab bersama menjadi terabaikan. Laporan ini bahkan mendorong langkah urbanisasi yang menjelaskan kebutuhan unik dan aspirasi dari semua kategori penduduk kota, sehingga tidak ada yang tertinggal (Tabel 2.1).

Pembangunan yang dilembagakan sampai dengan saat ini adalah pembangunan tidak berkelanjutan yang datang dengan biaya tinggi bagi manusia, ekologi, dan sosial ekonomi. Agenda 2030 dan NUA menunjukkan cara baru dalam konsep pembangunan perkotaan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) didasarkan pada saling ketergantungan terhadap pembangunan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat pengakuan eksplisit terkait pola konsumsi dan produksi saat ini yang melampaui batas bumi serta perubahan iklim global yang tidak terkendali sehingga memberikan bahaya langsung. Agenda Baru Perkotaan berkomitmen untuk pembangunan yang berpusat pada masyarakat di seluruh perkotaan-perdesaan dalam rangkaian kesatuan pemukiman manusia yang melindungi bumi dan tanggap terhadap realisasi semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hal pokok ini merupakan komitmen untuk berbagi nilai yang dihasilkan oleh urbanisasi secara inklusif.

Pada saat keadilan sosial menjadi dasar pembangunan perkotaan, yang memastikan akses layanan inti kepada pihak yang paling membutuhkan, akan menjadikan kota berkembang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada regenerasi lingkungan. Siklus mulia ini merupakan inti dari gagasan yang diperluas tentang nilai urbanisasi yang mendasari Laporan ini, dengan keyakinan bahwa kota seharusnya tidak berusaha untuk menjadi kota terbaik di dunia, tetapi kota-kota terbaik untuk dunia. Ide ini mengembalikan gagasan pada tanggung jawab kolektif serta keterkaitan kota dan penduduknya yang membutuhkan keseimbangan antara keinginan individu dan keinginan bersama serta kebutuhan bumi.

Proses kalibrasi ulang harus dimulai dengan penduduk asli di suatu lokasi. Ketika manusia berpindah dan mendirikan permukiman yang jauh dari tempat asal, NUA memperhatikan nilai masyarakat pribumi secara global dan berkomitmen secara terus menerus melakukan diseminasi ilmu pengetahuan terkait kearifan lokal yang berasal dari hunian jangka panjang di suatu wilayah. Ilmu kearifan lokal melihat individu sebagai bagian dari alam yang membuat keputusan mempertimbangkan generasi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Saat masyarakat perkotaan mulai mengenali manfaat pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keterpaduan sosial, timbul ketertarikan terhadap ilmu kearifan lokal, termasuk di kota-kota yang memiliki masyarakat adat yang secara historis telah dikecualikan oleh hukum dan kebijakan dengan memandang penduduk asli tidak sesuai dengan gaya hidup perkotaan.

Pola pikir seperti itu juga harus berkontribusi pada pemahaman nilai ekonomi yang tidak hanya menghasilkan kekayaan, tetapi juga tempat bermain untuk orang-orang yang saat ini dikecualikan dari kemakmuran ekonomi. Demikian pula, nilai lingkungan tidak bisa sebatas menghentikan kerusakan ekologis, tetapi juga harus membangun ketahanan ekologis dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Nilai sosial tidak bisa diartikan secara dangkal, melainkan lebih diidentifikasi dan diarahkan pada akar penyebab pengecualian dan ketidakadilan. Dalam praktiknya, pendekatan ini bermakna bahwa kota harus menyambut pendatang dan lebih memperhatikan mereka yang terpinggirkan dan penduduk yang kurang terlayani. Pemerintah daerah harus bekerja dengan konstituennya dan melakukan gerakan sosial untuk membangun ekonomi yang berkontribusi pada tujuan lingkungan dan sosial. Akhirnya, kota dapat mengurai nilai tak berwujud dari urbanisasi dengan menciptakan ruang publik dan peluang bagi partisipasi demokratis dan keterlibatan sosial yang memungkinkan berkembangnya tatanan budaya kehidupan kota.

Dalam mengonseptualisasikan nilai urbanisasi, Laporan ini memahami bahwa detail keadaan setiap kawasan/daerah perkotaan berbeda-beda

Dalam mengonseptualisasikan nilai urbanisasi, Laporan ini memahami bahwa detail keadaan setiap kawasan/daerah perkotaan berbeda-beda. Sementara ruang lingkup TPB dan NUA bersifat universal dengan target agenda perkotaan global meliputi indikator terukur, penetapan prioritas dan tindakan di berbagai tingkat geografis membutuhkan pembangunan komunitas akar rumput berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman ini, masih mungkin untuk mengonsepkan nilai urbanisasi berkelanjutan secara umum. Namun, implementasi dan evaluasi harus dibangun dengan model keberlanjutan yang didasarkan

pada realitas hidup masyarakat lokal. Kota-kota di dunia menghadapi tantangan serupa dan memiliki aspirasi yang sama, sementara itu prioritas penduduk perkotaan dapat berbeda berdasarkan berbagai faktor kontekstual seperti ekonomi, politik, ketahanan ekologi, lokasi geografis dan kedekatan sosial. Selanjutnya, dalam setiap wilayah perkotaan terdapat banyak sekali individu dengan pengalaman hidup berbeda yang mencari berbagai jenis nilai di kota berdasarkan tujuan dan aspirasi unik mereka (Tabel 2.1).

2.3 Memanfaatkan Nilai Urbanisasi untuk Masyarakat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan NUA secara eksplisit membutuhkan urbanisasi berkelanjutan yang berpusat pada manusia, yang berarti harus melayani beragam kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi warga. Di seluruh dunia, orang yang melakukan perpindahan dari perdesaan ke perkotaan selalu membawa harapan. Seorang pendatang Afrika yang melintasi Laut Mediterania menuju Eropa dan orang muda yang meninggalkan perdesaannya di Amerika Selatan memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi keduanya mencari peluang. Keunikan lokasi di mana orang bertempat tinggal juga akan membentuk nilai yang diharapkan dari urbanisasi berkelanjutan. Misalnya penduduk pemukiman kecil di Hutan Amazon yang berkepentingan untuk mendapatkan klinik kesehatan yang layak di mana rumah sakit daerah terdekat berjarak beberapa hari dengan menggunakan kapal kecil, dibandingkan dengan perencana kota yang berharap menempatkan lokasi layanan dasar yang layak di kawasan pinggiran Sydney sehingga penduduk dapat tinggal di ”lingkungan perumahan 15 menit” dan menghindari penambahan kemacetan di kota. Begitu pula penduduk di kawasan kumuh yang tinggal di perumahan tidak layak di Mumbai membutuhkan rumah susun yang lebih besar untuk menghindari kepadatan tinggi, sementara yang membutuhkan akomodasi di daerah kaya Los Angeles di mana rumah tunggal merupakan mayoritas, mendorong pemerintah daerah untuk mengendurkan peraturan zonasi dan membiarkan unit rumah lebih kecil dengan biaya lebih sedikit. Meskipun kedua kasus ekstrim sangat kontras, tapi nilai yang diinginkan berbagai kelompok di perkotaan dapat beririsan. Sebagai contoh, kebutuhan lingkungan hidup kebanyakan kelompok menghargai perlindungan dari bencana alam dan perubahan pola iklim. Jadi urbanisasi berkelanjutan perlu menampung kebutuhan khusus dan beririsan dari berbagai kelompok dengan tujuan menyediakan nilai ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang berarti. (Tabel 2.1)

Dalam praktiknya, menjamin nilai urbanisasi yang tanggap terhadap kebutuhan semua kelompok akan menghadapi beberapa tantangan, termasuk kapasitas pemerintah kota untuk menangani prioritas yang bersaing. Meski pemerintah daerah dan jaringan pemerintahannya tidak mungkin memperhatikan kebutuhan semua kelompok yang berbeda di kota, mereka dapat merencanakan proses dan layanan urbanisasi untuk mengatasi tantangan yang paling kompleks, yang pada akhirnya akan menghasilkan manfaat bagi sebagian besar penduduk. UNICEF, dalam sebuah laporan tentang perkembangan kota untuk anak-anak, menyarankan desain kota yang responsif terhadap anak akan memenuhi kebutuhan tidak hanya keluarga tetapi juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan kelompok lanjut usia.

Dalam prakteknya, menjamin nilai urbanisasi yang tanggap terhadap kebutuhan semua kelompok akan menghadapi beberapa tantangan, termasuk kapasitas pemerintah kota untuk menangani prioritas yang bersaing.

2.4 Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan

Dimensi ekonomi adalah ciri yang paling terlihat dari nilai urbanisasi.[12] Selama beberapa dekade, para ekonom memperdebatkan pentingnya kota bagi pembangunan ekonomi. Di seluruh dunia, kemakmuran atau pembangunan nasional sangat bergantung pada kinerja ekonomi dari kota-kota. Tidak ada negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan beralih status menjadi negara berpenghasilan menengah atau tinggi tanpa urbanisasi yang substansial dan berkelanjutan. Beralih dari status negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan menengah hampir selalu disertai dengan transisi ekonomi dari desa ke kota.[13] Di sebagian besar negara berkembang, kota berkontribusi pada pertumbuhan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja seiring dengan transisi ekonomi dari industri primer menuju industri sekunder dan tersier.[14]

Tabel 2.1: Kelompok prioritas dalam pengaturan perkotaan

Kelompok	Nilai Ekonomi	Nilai Lingkungan	Nilai Sosial	Hubungan antara TPB dan NUA
Generasi Muda	• pendidikan dan keterampilan yang tepat untuk partisipasi produktif di masyarakat • lapangan pekerjaan produktif masyarakat dan peluang mata pencaharian	• lingkungan yang sehat dan produktif untuk masa depan • aksi terpadu untuk iklim lokal dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	• harapan dan aspirasi untuk masa depan • hubungan dengan komunitas dan manfaat bersama	• Kota yang aman, sehat, inklusif dan terjamin • Partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan • pekerjaan penuh waktu dan produktif, peluang kerja dan mata pencaharian yang layak • akses ke pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas
Anak anak	lingkungan yang melindungi kemampuan anak-anak untuk bersekolah dan tidak dipaksa menjadi pekerja	• lingkungan perkotaan yang aman dan terjamin. • Lingkungan yang sehat dan produktif untuk masa depan • Akses fasilitas rekreasi dan kesempatan bermain yang sesuai dengan usia mereka	• akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, air, sanitasi, dll. • perlindungan dari perdagangan manusia, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan	• akses yang adil terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur sosial: perumahan, air minum, makanan, perawatan kesehatan, pendidikan • kota yang aman, sehat dan terjamin
Perempuan miskin perkotaan	• pemberdayaan di dalam pengambilan keputusan • pengakuan tanggung jawab rumah tangga yang tidak proporsional	• perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim	• kesetaraan gender, memungkinkan mereka untuk pemberdayaan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang setara di masyarakat • meningkatkan kesehatan ibu hamil dan akses terhadap kesehatan reproduksi	• mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi • jaminan pemilikan lahan • pemberdayaan untuk hidup, bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan perkotaan tanpa takut terhadap kekerasan • pekerjaan penuh waktu dan produktif, peluang kerja dan mata pencaharian yang layak untuk semua
Kaum pendatang miskin perkotaan	• peluang akses memperoleh kesempatan kerja • peningkatan dan perlindungan kondisi kerja	• perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim	• akses ke pengetahuan, peningkatan keterampilan, fasilitas pendidikan dan pelatihan • keterjangkauan aksesibilitas dan keamanan	• mendorong akses non-diskriminatif terhadap peluang memperoleh penghasilan legal, pekerjaan penuh waktu dan produktif, peluang kerja dan mata pencaharian yang layak untuk semua • memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Kaum tua miskin perkotaan	• mobilitas dan akses ke kota • peluang untuk berkontribusi	• perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim	akses ke program perlindungan sosial	• akses yang setara terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur sosial: perumahan, air minum, makanan, perawatan kesehatan, budaya dan teknologi informasi • Peluang untuk berdialog dengan pemerintah
Penduduk di permukiman kumuh atau komunitas infomal	• keamanan kepemilikan tanah dan aset lainnya • pengakuan ekonomi informal	• perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim • proaktif berpartisipasi dalam perencanaan menuju kota tanpa karbon	• akses terhadap fasilitas (misalnya sanitasi, air, listrik, dll). • terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pemilikan dan perbaikan lahan	• memperkuat dan memperbaiki semua stok perumahan yang berisiko agar tahan terhadap bencana, • mengatasi berbagai bentuk diskriminasi, • meningkatkan kondisi kehidupan, • jaminan kepemilikan lahan
Tantangan fisik, mental dan pembangunan	akses terhadap transportasi dan pilihan mobilitas yang memadai (misalnya : pedestrian yang layak dan bersih)	• mobilitas diprioritaskan selama kondisi cuaca ekstrim • kota yang kompak, terhubung, dan bersih untuk	• akses terhadap layanan kesehatan dasar yang terjangkau • berkecimpung dalam kelompok masyarakat	• mobilitas berkelanjutan dan infrastruktur transportasi yang responsif terhadap berbagai tantangan fisik, mental dan pembangunan,

Kelompok	Nilai Ekonomi	Nilai Lingkungan	Nilai Sosial	Hubungan antara TPB dan NUA
		mengantisipasi perubahan iklim	yang menghormati dan menghargai sesama	• peluang lapangan kerja penuh waktu dan produktif, peluang kerja dan mata pencaharian yang layak untuk semua • menangani berbagai bentuk diskriminasi
Masyarakat yang hidup dengan HIV/AIDS serta yang berkaitan dengan kekebalan tubuh	perlindungan dari pencitraan buruk dan penolakan dari kesempatan kerja	• lingkungan perkotaan yang sehat dan ramah untuk ditempati • desain lingkungan yang dapat mengurangi tingkat gangguan mental	• akses terhadap layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan mereka, • perlindungan dari pencitraan buruk	• menangani berbagai bentuk diskriminasi • memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan • membangun masyarakat yang adil dan inklusif • memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Pengungsi, Pencari Suaka, dan Orang Terlantar	• akses ke pekerjaan produktif • perlindungan hukum bagi karyawan	• perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim	• menghargai lingkungan dan non-diskriminasi • perlindungan hukum dan sosial	• mendorong akses non-diskriminatif terhadap peluang mendapatkan penghasilan legal, pekerjaan penuh waktu dan produktif, peluang kerja dan mata pencaharian yang layak untuk semua • memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Petani skala kecil (Hubungan desa kota)	• akses ke pasar - secara fisik (misalnya transportasi) dan melalui penyederhanaan peraturan • akses menuju input dasar dan layanan • harga pasar yang adil • "bayar sesuai yang diperoleh" untuk akses pasar	• kepemimpinan lingkungan berfokus pada adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, • akses ke input ramah lingkungan dan teknologi • perencanaan proaktif untuk transisi yang adil dan memusatkan peran petani perdesaan	• perayaan "petani memberi makan kota" • jaring pengaman jika terjadi penurunan ekonomi	• memfasilitasi hubungan perdagangan yang efektif di seluruh rangkaian perkotaan-perdesaan • memastikan bahwa petani skala kecil terhubung dengan rantai nilai dan pasar lokal, subnasional, nasional, regional dan global
Para Tunawisma	• perumahan bersubsidi yang dibangun untuk pengembangan masa depan • unit sewa yang memadai dan terkontrol	• perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim • kota yang kompak, terhubung, dan bersih untuk mengantisipasi perubahan iklim	• akses ke perumahan yang layak dan terjangkau • perlindungan sosial dan layanan yang memadai	• menangani berbagai bentuk diskriminasi • mendukung kebijakan yang berkembang terhadap hak atas perumahan yang layak untuk semua dan untuk mencegah penggusuran sewenang-wenang • memfasilitasi keterlibatan penuh di dalam masyarakat dan menghilangkan kriminalisasi tunawisma
Penduduk asli	• kesempatan kerja yang memadai dan sesuai secara budaya • mendukung pengembangan bisnis pribumi	• pengelolaan lingkungan dan SDA yang efektif • Pengakuan keterikatan budaya terhadap lahan • ikut andil di dalam memakmurkan kota melalui partisipasi yang adil untuk berkelanjutan	• menghormati budaya dan bahasa • ketepatan bercerita tentang sejarah	• akses yang setara terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur sosial: perumahan, air minum, makanan, perawatan kesehatan, dan budaya • mengakui peran warisan budaya dan alam dalam penguatan partisipasi sosial
Orang dengan kelainan identitas dan orientasi	perlindungan dari pencitraan buruk dan	Kualitas lingkungan, termasuk kenyamanan akses seperti	• mendorong masyarakat yang adil dan inklusif, • menghargai perbedaan	menangani berbagai bentuk diskriminasi

Kelompok	Nilai Ekonomi	Nilai Lingkungan	Nilai Sosial	Hubungan antara TPB dan NUA
seksual (LGBTQ2+)	penolakan dari kesempatan kerja	ruang hijau, ruang publik, hiburan, dll.	• hak pengakuan hukum dan perlindungan	
Pensiunan dan orang yang lebih tua	• kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (yaitu perumahan dan nutrisi) • perlindungan investasi (yaitu properti)	• lingkungan perkotaan yang sehat dan ramah untuk ditempati • manfaat dari kota yang terkoneksi, bersih dan kompak yang dibangun untuk mengatasi perubahan iklim	mengurangi isolasi atau peningkatan program terintegrasi	• akses yang setara terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur sosial: perumahan, air minum, makanan, perawatan kesehatan, budaya dan teknologi informasi • peluang untuk berdialog dengan pemerintah
Upah Buruh	• produktif, layak dan pekerjaan terjamin • kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (yaitu perumahan dan nutrisi) • upah yang sesuai dengan biaya hidup di perkotaan	• kesempatan yang sama, memungkinkan orang untuk hidup sehat, produktif, sejahtera dan memenuhi kehidupan • manfaat dari kota yang terhubung, bersih dan kompak yang dibangun untuk mengatasi perubahan iklim	• jaring pengaman jika terjadi penurunan ekonomi • kemampuan untuk mencapai harapan dan aspirasi	Akses untuk kesempatan mendapatkan penghasilan, pengetahuan, keterampilan dan fasilitas pendidikan, pekerjaan penuh waktu dan produktif serta peluang kerja dan mata pencaharian yang layak
Kelas menengah	• ekonomi yang kuat untuk menumbuhkan investasi • mengatasi tantangan yang dihadapi oleh bisnis lokal	• kualitas lingkungan, termasuk kenyamanan akses seperti ruang hijau, ruang publik, hiburan, dll. • rencana proaktif sebagai adaptasi dan mitigasi terhadap efek perubahan iklim	• menghormati budaya dan bahasa • kemampuan untuk mencapai harapan dan aspirasi	mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas bisnis lokal dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di seluruh rantai manfaat
Kaum kaya dan elit	• perlindungan properti - keamanan investasi • lingkungan yang mendukung untuk bisnis dan investasi • pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	• kualitas lingkungan, termasuk kenyamanan akses seperti ruang hijau, ruang publik, hiburan, dll. • rencana proaktif sebagai adaptasi dan mitigasi terhadap efek perubahan iklim	• peluang dan ruang untuk bersosialisasi dan membangun jaringan • mengutamakan kesejahteraan secara menyeluruh untuk menghargai kota • kemampuan untuk mengembangkan ideologi dan manfaat	• memajukan produktivitas ekonomi • mendorong perijinan dengan lingkungan bisnis yang adil dan responsif berdasarkan prinsip lingkungan berkelanjutan, kesejahteraan bersama, mendorong investasi, inovasi dan kewiraswastaan

Kota memiliki kapasitas untuk menghasilkan kegiatan ekonomi lokal dan menarik investasi asing, yang merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Perkuatan pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing adalah tujuan utama dari banyak kota di dunia. Kota memiliki kapasitas untuk menghasilkan kegiatan ekonomi lokal dan menarik investasi asing, yang merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada tingkat makro, nilai yang dihasilkan oleh pertumbuhan perkotaan, seperti peningkatan nilai tanah, perumahan, dan real estat, merupakan ciri utama dari dimensi ekonomi dari manfaat urbanisasi. Bagian berikut membahas nilai ekonomi dari urbanisasi berkelanjutan pada tiga tingkatan: nasional, individu, dan properti fisik.

Anak-anak di Taman Kalijodo, Jakarta, Indonesia. © Pepsco Studio/Shutterstock

2.4.1 Perekonomian Nasional

Kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada kinerja ekonomi perkotaan. Negara-negara dengan tingkat urbanisasi tinggi memiliki pendapatan yang lebih tinggi,[15] memberikan peluang yang lebih baik untuk investasi dan lapangan kerja, serta memiliki institusi yang lebih kuat dan lebih mampu menahan kelabilan ekonomi global daripada negara dengan populasi yang urbanisasinya lebih sedikit.[16] Urbanisasi secara geografis mengelompokkan orang dan kegiatan ekonomi. Manfaat dari mengelompokkan orang dan aktivitas ekonomi tersebut mencakup peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di bidang jasa dan manufaktur, serta standar hidup yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kota menghasilkan produktivitas dan dengan demikian meningkatkan dampak aglomerasi dari urbanisasi.[17] Sebagai contoh, produktivitas daerah perkotaan di Asia diperkirakan lebih tinggi 5,5 kali lipat dibandingkan produktivitas daerah perdesaannya.[18]

Kota mendapatkan keuntungan dari efek aglomerasi ketika perusahaan dan talenta lokal berada pada lokasi yang berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini mendorong inovasi, yang umumnya mengarah pada kelompok industri yang sejenis. Dengan demikian, kota-kota yang sukses biasanya mengembangkan merek yang terkait dengan bidang tertentu — keuangan, perawatan kesehatan, perangkat lunak, mode, bioteknologi, hiburan, pendidikan tinggi, dan media — yang menarik investasi dan bisnis, menghasilkan manfaat bagi ekonomi lokal yang mendorong angka ekonomi nasional.[19] Kota juga merupakan simpul penting yang mengartikulasikan dan membentuk ekonomi global. Di negara-negara maju, yang disebut "*alpha world cities*" seperti New York, Paris, London, dan Tokyo telah lama memberikan dorongan besar tidak hanya kepada ekonomi nasional di negara mereka, tetapi juga kepada ekonomi global.[20] Sementara pengaruh ekonomi mereka sebagai kota-kota dunia terkemuka terus berlanjut, mereka telah bergabung dengan mengembangkan daftar kota yang profil ekonominya telah meningkat selama dua dekade terakhir, termasuk Bangkok, Beijing, Dubai, Guangzhou, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, Mexico City, Mumbai, Seoul, Shanghai dan

Sydney.[21] Dalam ekonomi dunia yang sedang berubah, kota-kota global yang baru-baru ini disahkan dan sejumlah besar kota lapis kedua memainkan peran penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi di suatu negara. Peran kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara telah mengambil dimensi baru dalam perkembangan ekonomi global. Dimensi baru ini telah menegaskan pandangan lama bahwa kota, bukan negara, adalah unit ekonomi utama dan mendorong prioritisasi kebijakan provinsi.[22]

Kota menghasilkan produktivitas dan dengan demikian meningkatkan dampak aglomerasi dari urbanisasi.

Di banyak kota, nilai ekonomi dari kota tersebut telah meningkat di era urbanisasi yang pesat dan daya saing global saat ini.

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab 3, di banyak kota, nilai ekonomi dari kota tersebut telah meningkat di era urbanisasi yang pesat dan daya saing global saat ini. Pengalaman menunjukkan bahwa seiring dengan berkembangnya ekonomi suatu negara, permukiman perkotaan menyumbang bagian yang lebih besar dari pertumbuhan nasional. Meskipun daerah perkotaan hanya mencakup 55 persen dari populasi dunia, daerah tersebut menghasilkan sekitar 80 persen dari PDB dunia.[23] Di beberapa negara, satu kota memberikan kontribusi yang tidak proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional — hingga 50 persen dalam kasus tertentu, terutama di Korea Selatan di mana Seoul menyumbang hampir setengah PDB nasional, serta Hongaria dan Belgia di mana Budapest dan Brussel masing-masing menyumbang sekitar 45 persen dari PDB nasional.[24]

Di banyak kota, nilai ekonomi dari kota tersebut telah meningkat di era urbanisasi yang pesat dan daya saing global saat ini.

Sejak awal 1990-an, "sebaran ekonomi baru" telah berperan penting dalam penekanan kembali penurunan biaya transportasi yang ditimbulkan oleh peningkatan kepadatan sebagai kekuatan aglomeratif pusat.[25] Bersamaan dengan penelitian dalam ekonomi perkotaan dan ilmu regional, para peneliti yang terkait dengan gerakan intelektual ini berusaha untuk menyuntikkan kesadaran spasial dalam analisis ekonomi yang menyoroti hubungan antara kepadatan perkotaan dan spesialisasi yang lebih besar, pendapatan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas pekerja. Namun demikian, harus diakui bahwa kepadatan atau aglomerasi yang terlalu besar juga menimbulkan risiko dan dampak negatif. Salah satu Laporan Bank Dunia yang penting pada tahun 2009, yang berjudul "*Reshaping Economic Geography*" ("*Membentuk Kembali Geografi Ekonomi*"), mengacu pada beberapa penelitian tersebut dalam membuat kasus yang kuat untuk peran kota dalam pembangunan ekonomi, menyoroti kebutuhan untuk mempromosikan tingkat kepadatan, serta meningkatkan kekuatan pasar dari aglomerasi, migrasi, dan spesialisasi sambil menghindari skala disekonomi yang timbul dari kemacetan.[26] Optimisme baru para ekonom terhadap daerah perkotaan juga tercermin dalam buku Edward Glaeser yang berjudul *Triumph of the City* (*Kemenangan Kota*).[27] Setelah pandemi COVID-19, kaum optimis perkotaan menjadi lebih semangat dalam antusiasme mereka, baik itu dalam hal penegasan kembali kepercayaan mereka pada ekonomi aglomerasi sembari mengharapkan penyebaran aktivitas ekonomi dari kota-kota "superstar" yang mahal ke daerah pinggiran kota.[28]

Di luar manfaat aglomerasi yang diasumsikan secara teoritis, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa jauh lebih murah untuk menyediakan layanan dan infrastruktur di daerah perkotaan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi individu, terutama yang terampil, memfasilitasi pertukaran ide dan berbagi pengetahuan, sehingga meningkatkan inovasi dan produktivitas.[29] Konsentrasi perkotaan mendorong dimulainya usaha bisnis baru. Silicon Valley, yang berada di wilayah Teluk San Francisco (Amerika Serikat), adalah contoh klasiknya. Daerah tersebut merupakan rumah bagi ribuan perusahaan rintisan

dalam inovasi teknologi tinggi dan pengembangan ilmiah (Bagian 6).

Pada umumnya, perusahaan di daerah perkotaan memiliki keunggulan berupa akses ke pasar lokal yang besar, yang dalam banyak kasus mungkin juga terhubung dengan baik ke pasar kota-kota tetangga dan pasar global. Akses ke pasar yang lebih besar mendorong keragaman barang dan jasa yang lebih luas, di mana sebagian besar diantaranya merupakan input untuk produksi perusahaan lain. Perusahaan di kota-kota yang berada dalam *mega-region* memiliki keuntungan yang lebih besar dalam hal akses ke pasar dan perekonomian regional yang lebih luas. Sebagai contoh, Megalopolis Timur Laut (*Northeast Megalopolis*) di Amerika Serikat merupakan perekonomian dengan nilai sebesar USD 3,8 triliun yang membentang dari Boston ke Washington melalui Kota New York. Meskipun hanya mencakup dua persen dari luas daratan nasional, *mega-region* tersebut dihuni oleh 44 juta penduduk dan menghasilkan 20 persen dari PDB nasional.[30] Eropa juga memiliki *mega-region* transnasional, yaitu di Delta Sungai Rhine/Scheldt yang membentang di Belgia, Belanda, dan Jerman dengan populasi sebesar 26 juta. Melalui investasi infrastruktur seperti kereta api berkecepatan tinggi dan jembatan luar negeri terpanjang di dunia, Tiongkok telah menyatukan kota-kota di Delta Sungai Pearl di Guangzhou, Hong Kong dan Shenzhen menjadi *Greater Bay Area*, sebuah *mega-region* dengan populasi sebesar 70 juta.[31] Di wilayah ini, ekonomi aglomerasi menciptakan manfaat lebih pada tingkat lokal melalui kedekatan faktor-faktor produksi serta peningkatan ukuran dan spesialisasi pasar.[32]

Di samping mendapatkan manfaat aglomerasi, konsentrasi orang dan perusahaan di wilayah tertentu juga memiliki kelemahan. Meningkatnya biaya tanah, perumahan, tenaga kerja, kemacetan, dan polusi merupakan dampak potensial dari urbanisasi. Dampak negatif ini pada akhirnya membuat biaya hidup dan menjalankan bisnis menjadi menantang dan dapat membatasi keunggulan kompetitif dari area tertentu. Secara spasial, aglomerasi dapat meningkatkan ketimpangan di dalam dan antarkota dalam sistem perkotaan nasional dan global. Pemerintah pada tingkat nasional harus mengelola sistem kota mereka dengan baik di seluruh rangkaian perkotaan untuk menyeimbangkan manfaat aglomerasi dengan potensi konsekuensi negatif dari pembentukan "kota superstar" yang meninggalkan kota-kota kecil dan daerah perdesaan.

Jika direncanakan dengan baik, kawasan perkotaan juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui sinergi yang terjalin antara perekonomian perdesaan dan perkotaan.

Jika direncanakan dengan baik, kawasan perkotaan juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui sinergi yang terjalin antara perekonomian perdesaan dan perkotaan. Daerah perkotaan dan perdesaan tidak eksklusif satu sama lain, tetapi lebih merupakan rangkaian yang mulus dari kegiatan ekonomi dan permukiman.[33] Pasar perkotaan memberikan insentif dan dukungan yang kuat untuk peningkatan produksi perdesaan, dan pasar perdesaan telah memberikan landasan yang sama kuatnya untuk peningkatan produksi barang dan jasa perkotaan.[34] Konsentrasi sumber daya ekonomi di perkotaan merupakan aset penting bagi perekonomian nasional, termasuk di seluruh daerah perdesaan. Jika dikelola dengan baik, nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial dari urbanisasi yang berkelanjutan tidak akan terbatas pada pinggiran metropolitan, tetapi juga akan menguntungkan daerah perdesaan. Idealnya, urbanisasi berkelanjutan akan mempercepat pemusatan jangka panjang dalam standar hidup antara daerah perkotaan dan perdesaan.[35] Bukti empiris menunjukkan efek limpahan yang menguntungkan dari perkotaan ke perdesaan untuk negara-negara seperti India dan Nepal.[36]

Di sebagian besar negara, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung membuat sulit untuk menyadari manfaat dari saling ketergantungan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Prinsip utama dari urbanisasi berkelanjutan harus mencakup hubungan dinamis yang bertahan lama yang telah ada di semua skala pemukiman manusia, dari kota kecil hingga kota metropolitan, serta antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan sekitarnya.[37]

Kairo, Mesir, jalanan yang penuh desak dan perdagangan yang kacau di bazar. © Byleshiy985/Shutterstock

Sayangnya, di sebagian besar negara, terutama di negara berkembang, nilai ekonomi dari urbanisasi dirusak oleh urbanisasi yang tidak terencana dan spontan.

Sayangnya, di sebagian besar negara, terutama di negara berkembang, manfaat ekonomi dari urbanisasi dirusak oleh urbanisasi yang tidak terencana dan spontan, yang tercermin dalam ekspansi permukiman kumuh yang terus menerus, pembangunan yang merebak, meningkatnya ketimpangan, layanan yang tidak memadai, dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Kondisi ini merusak produktivitas ekonomi kota dan kelayakan lingkungan perkotaan. Urbanisasi harus direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas, memastikan kelayakan hidup, mempromosikan kesetaraan, dan tidak meninggalkan siapapun.[38]

2.4.2 Nilai Urbanisasi untuk Warga

Urbanisasi menawarkan nilai ekonomi bagi mereka yang memilih untuk tinggal di kota dengan menyediakan struktur pasar, pekerjaan, rekreasi, dan hiburan yang lebih beragam.[39] Penduduk kota umumnya memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan dan peluang untuk mengejar ide-ide kreatif. Mereka memiliki pasar konsumen lokal yang padat untuk mendukung upaya mereka. Demikian pula dengan pekerja perkotaan yang seringkali memiliki akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti transportasi, air, listrik, dan telekomunikasi termasuk telepon seluler dan akses internet. Konsentrasi kegiatan ekonomi di kota-kota menarik lebih banyak jenis usaha bisnis dan menawarkan kesempatan kerja yang memberikan pendapatan lebih tinggi bagi pekerja. Ini juga menghasilkan peluang untuk peningkatan mobilitas dan status sosial.[40] Dalam banyak kasus, keluaran ekonomi per kapita di kota jauh lebih besar daripada keluaran ekonomi per kapita di kawasan perdesaan. Di kota-kota seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila, keluaran ekonomi per kapita bervariasi antara USD 14.200 dan USD 66.800, meskipun angka Singapura akan bersinggungan dengan angka nasional.[41] Di Amerika Latin, kota-kota seperti Kota Meksiko, São Paulo, dan Santiago telah menjadi pusat investasi yang menarik bagi perusahaan multinasional dan perusahaan rintisan regional dalam beberapa tahun terakhir, meskipun resesi global yang disebabkan oleh pandemi dapat mengubah nasib kota-kota tersebut.[42]

Penduduk kota juga mendapat manfaat dari fakta bahwa urbanisasi mengurangi kemiskinan. Studi telah menemukan bahwa urbanisasi telah membantu mengangkat potensi produktif dan standar hidup milyaran pekerja.[43] Di Tiongkok, urbanisasi telah berkontribusi untuk mengangkat lebih dari 700 juta orang keluar dari kemiskinan dalam 15 tahun terakhir, dengan lebih dari 70 persen di antaranya adalah pendatang dari daerah perdesaan. Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menemukan bahwa antara tahun 1990 dan 2008, jumlah masyarakat miskin perkotaan turun dari 137 juta menjadi 37 juta, meskipun populasi perkotaan meningkat dua kali lipat.[44] Angka-angka ini mencerminkan kekuatan transformatif kota dan mengindikasikan bahwa jika dikelola dengan baik, daerah perkotaan dapat beradaptasi dan tangguh, dengan menyerap banyak pendatang tanpa terjerumus ke dalam kemiskinan. Meskipun terdapat kemajuan besar dalam pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan, kehidupan di kota masih menjadi tantangan bagi sebagian besar penduduk. Dalam lingkungan ekonomi global yang tidak pasti yang diperparah oleh cuaca ekstrim yang sering terjadi dan pandemi COVID-19, kemiskinan dan pengangguran perkotaan meningkat dalam skala luas di banyak negara. Secara global, hampir setengah miliar orang diperkirakan masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030, sebagian besar di Afrika, di mana urbanisasi sebagian besar tidak terkelola.[45]

Dalam lingkungan ekonomi global yang tidak pasti yang diperparah oleh cuaca ekstrim yang sering terjadi dan pandemi COVID-19, kemiskinan dan pengangguran perkotaan meningkat dalam skala dan luas di banyak negara.

Sementara komposisi kelompok dalam kemiskinan akan bervariasi antarnegara dan antarkota, salah satu kelompok pengangguran atau setengah pengangguran

yang konsisten di kota-kota di negara maju dan berkembang adalah generasi muda. Memprioritaskan lapangan kerja bagi kaum muda menciptakan manfaat yang akan berdampak signifikan pada keseluruhan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh kota-kota di seluruh dunia (Tabel 2.2).

Memprioritaskan lapangan kerja bagi generasi muda menciptakan manfaat yang akan berdampak signifikan pada keseluruhan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh kota-kota di seluruh dunia.

2.4.3 Urbanisasi dan Properti

Konsentrasi penduduk di daerah perkotaan meningkatkan permintaan akan perumahan dan lahan. Permintaan yang lebih tinggi dan kekuatan pasar sering kali mengarah pada peningkatan nilai tanah, perumahan, dan real estat, yang merupakan ciri utama dari manfaat ekonomi dari urbanisasi. Di seluruh dunia, nilai lahan yang dihasilkan oleh urbanisasi telah meningkat. Sebagai contoh, daerah perkotaan yang berkembang pesat seperti Dhaka (Bangladesh) telah mengalami peningkatan tahunan sebesar 74 persen sejak awal tahun 2000-an.[46] Kota-kota yang berkembang pesat tampaknya paling mengalami peningkatan harga perumahan. Indeks Global Kota Hunian (*Global Residential Cities Index*) untuk Q1 2020 menunjukkan peningkatan tahunan rata-rata sebesar 4,3 persen untuk 150 kota teratas di seluruh dunia, dengan 85 persen kota yang mempunyai indeks mengalami peningkatan harga dari tahun ke tahun. Ibu kota Filipina, Manila, mengalami peningkatan tertinggi (22,2 persen), diikuti oleh Budapest, Hongaria (16,3 persen) dan Izmir, Turki (16,3 persen).[47]

Tabel 2.2:Nilai urbanisasi bagi generasi muda

Nilai Urbanisasi	Kondisi Generasi Muda di Kota
Ekonomi • Pendidikan dan keterampilan yang sesuai untuk partisipasi produktif dalam masyarakat • Kesempatan kerja dan mata pencaharian yang produktif	Pengangguran generasi muda dan pekerja tidak tetap berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di kota dan negara secara keseluruhan. Hampir 74 juta generasi muda usia kerja menganggur di seluruh dunia. Pada tahun 2018, seperlima dari generasi muda dunia tidak terlibat dalam program pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Selain itu, lebih banyak generasi muda yang menganggur dan bekerja berjam-jam dengan gaji rendah. Diperkirakan 59 juta remaja berusia antara 15 dan 17 tahun saat ini terlibat dalam bentuk pekerjaan berbahaya. Pengangguran generasi muda adalah masalah ekonomi yang mendesak baik di negara maju dan berkembang.
Lingkungan • Lingkungan yang sehat dan produktif untuk masa depan	Perubahan iklim akan berdampak buruk bagi generasi masa depan saat mereka memasuki usia dewasa, meninggalkan generasi muda perkotaan terutama dalam risiko kenaikan permukaan laut, pola cuaca ekstrim, dan bencana alam. Degradasi lingkungan yang tidak terkendali seperti kualitas udara yang buruk memperpendek harapan hidup bagi generasi muda yang harus menanggung materi polutan yang tidak sehat selama hidup mereka.
Sosial • Harapan dan cita-cita untuk masa depan • Hubungan dengan komunitas dan nilai-nilai bersama	Bagi generasi muda yang ingin memasuki pasar kerja, pengangguran berkelanjutan dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pengucilan sosial dan rentan terhadap kekerasan. Kebijakan sosial di kota-kota harus secara khusus menargetkan krisis pengangguran generasi muda yang muncul. Agar pemuda dapat merasakan manfaat sosial dari urbanisasi yang berkelanjutan, prioritas harus memenuhi kebutuhan unik mereka di wilayah perkotaan. Dengan lapangan kerja yang memadai, pemuda dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab secara sosial yang berkontribusi untuk mengatasi tantangan lain yang dihadapi di kota. Mengatasi pengangguran dan pengucilan sosial merupakan hal yang kompleks dan solusi di setiap kota perlu disesuaikan oleh pemangku kepentingan lokal sesuai dengan konteks budaya.

Sumber: https://www.un.org/youthenvoy/employment/

Secara makro, pasar perumahan perkotaan merupakan sektor ekonomi utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Pasokan dan konsumsi perumahan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap lapangan kerja, penciptaan pendapatan, investasi, dan tabungan. Di Singapura dan Hong Kong, real estat memainkan peran utama dalam fungsi ekonomi, sehingga seorang peneliti menggambarkan kedua kota tersebut sebagai "negara properti".[48] Real estat merupakan bagian penting dari pasar saham dan telah menikmati pertumbuhan yang cukup besar sambil memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah dan kekayaan bagi individu. Ada juga interaksi yang signifikan dengan sistem keuangan, melalui bank perumahan, skema hipotek, suku bunga, dan konsumsi dari layanan perumahan.[49]

Terlepas dari manfaat ekonominya, kepentingan spekulatif di pasar properti menciptakan apa yang disebut "*hedge cities*", di mana elit global menyimpan kelebihan modal di luar negara asal mereka. Kecenderungan ini mengesampingkan jutaan penduduk perkotaan dan memperburuk ketimpangan di banyak kota. Dari Auckland hingga London, Toronto hingga Sydney, kota-kota dengan kualitas hidup tinggi yang terletak di negara-negara stabil menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyediakan perumahan yang aman dan layak bagi penduduk perkotaan. Apresiasi yang tinggi terhadap real estat telah mendorong pembangunan perumahan berpenghasilan tinggi dan menengah oleh perusahaan swasta yang mencari keuntungan, sehingga merugikan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Vancouver (Kanada), median total pendapatan rumah tangga adalah USD 72.662, sedangkan harga rumah rata-rata sekitar USD 1,1 juta, meskipun pemerintah daerah melawan balik dengan alat kebijakan seperti pajak provinsi untuk pembeli asing dan pajak kota untuk rumah yang tidak dihuni.[50] Harga sewa hunian sangat tinggi di sebagian besar kota besar dan menengah dan tidak sejalan dengan pendapatan penduduk, sehingga memaksa banyak orang untuk membayar lebih dari setengah pendapatan bulanan mereka untuk perumahan.[51] Di sebagian besar negara, investasi perumahan sebagai bagian dari PDB tidak sejalan dengan laju urbanisasi. Khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, investasi perumahan sebagai persentase dari PDB tertinggal dari apa yang dibutuhkan untuk mengakomodasi urbanisasi yang berkelanjutan.[52] Sekitar sepertiga dari semua penduduk perkotaan di seluruh dunia, yaitu sebanyak 1,2 miliar orang, tidak memiliki akses ke perumahan yang aman dan terjamin.

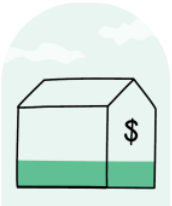

Di sebagian besar negara, investasi perumahan sebagai bagian dari PDB tidak sejalan dengan laju urbanisasi.

Pada saat perumahan baru dibangun, infrastruktur yang memadai harus menyertai untuk mendukung pertumbuhan perkotaan. Infrastruktur sangat terbatas di sebagian besar wilayah perkotaan, yang berdampak buruk pada lingkungan alam dan lingkungan terbangun, serta memperburuk kemiskinan karena pengaruhnya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup orang miskin. Tantangan yang dihadapi sebagian besar pemerintah kota adalah bagaimana berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur untuk mengimbangi urbanisasi yang cepat dengan cara yang berkelanjutan secara finansial dan lingkungan, sambil memastikan akses ke tingkat layanan yang memadai bagi masyarakat miskin.

2.5 Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan

Laporan ini mengonseptualisasikan nilai lingkungan urbanisasi berkelanjutan sebagai manfaat yang diperoleh dari tindakan yang diambil untuk melindungi aset lingkungan, meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal tersebut juga melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari urbanisasi. Nilai lingkungan dari urbanisasi berkelanjutan tidak akan terwujud secara kebetulan; sebaliknya, hal itu membutuhkan intervensi urbanisasi yang terencana dan terkelola. Perencanaan ini membutuhkan visi jangka panjang dan pemahaman mengenai manfaat dan konsekuensi (*trade-off*), yang didukung oleh peraturan dan kerangka kerja

pemantauan yang kuat, terutama perjanjian internasional seperti Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR). Kota-kota memiliki potensi untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana serta mempercepat respons dan pemulihan. Mereka dapat melakukannya dengan mengaktifkan perencanaan penggunaan lahan, aturan bangunan, regulasi, penilaian risiko, pemantauan, sistem peringatan dini, respon membangun kembali secara lebih baik, dan pendekatan rekonstruksi. Meningkatkan nilai lingkungan dari urbanisasi sangat bergantung pada kelembagaan yang efektif, tata kelola yang baik, perencanaan kota, infrastruktur, dan budaya konservasi ekologi.

Urbanisasi sering dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian lingkungan. Seperti dibahas dalam Bab 1, urbanisasi yang tidak direncanakan dan pengelolaan lahan yang buruk dapat menyebabkan perubahan tutupan lahan yang tidak boleh diubah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan. Di seluruh dunia, perluasan kota yang tidak terkelola, di mana tapak perkotaan tumbuh lebih cepat daripada populasi, menimbulkan ancaman yang luar biasa. Perebakan kota yang tidak terkendali berkontribusi pada peningkatan kepemilikan mobil pribadi, jarak yang ditempuh dengan mobil, total panjang jalan yang diaspal, konsumsi bahan bakar, perubahan struktur ekologi, serta konversi lahan pertanian atau perdesaan menjadi penggunaan perkotaan (Bab 4).

Nilai lingkungan dari urbanisasi meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan. Urbanisasi yang terencana menawarkan banyak peluang untuk menangani kelestarian lingkungan dan membangun ketangguhan kota.

Namun, bila direncanakan dan diatur dengan baik, urbanisasi dapat menciptakan nilai lingkungan yang luar biasa. Kota menghasilkan nilai lingkungan dengan mencapai pembangunan yang harmonis dan seimbang, melestarikan alam, melindungi keanekaragaman hayati, dan memperkuat aset lingkungan. Kota-kota yang terencana dengan baik menggunakan sumber daya dengan lebih efisien dan mengurangi penggunaan energi.[53] Nilai lingkungan dari urbanisasi meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan. Urbanisasi yang terencana menawarkan banyak peluang untuk menangani kelestarian lingkungan dan membangun ketangguhan kota.

2.5.1 Lingkungan Binaan Kota

Lingkungan binaan adalah produk pembangunan infrastruktur manusia. Ini mengacu pada setiap perubahan fisik dari lingkungan alam, dari kediaman ke kota, melalui konstruksi oleh manusia.[54] Lingkungan binaan dan bentuknya memiliki implikasi yang signifikan terhadap lingkungan alam. Kawasan perkotaan yang tidak direncanakan, dikelola, dan diatur dengan baik akan membebani ekosistem. Namun, lingkungan binaan dapat dimanipulasi melalui perencanaan dan desain yang disengaja untuk mengurangi dampak negatif dan menghasilkan manfaat lingkungan. Sebagaimana dibahas dalam Bab 4, perencanaan yang peka terhadap lingkungan menghasilkan kota yang kompak, peningkatan kepadatan, lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, dan peluang untuk transportasi aktif.

Agenda Baru Perkotaan mendukung pembangunan perkotaan yang kompak, mempunyai kepadatan yang tinggi, dan fungsi campuran (*mixed-use*). Kepadatan kota berpotensi memicu skala ekonomi dan aglomerasi. Kota yang padat dan teratur dengan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan memiliki dampak lingkungan yang positif.[55] Bentuk dan kepadatan perkotaan secara langsung mempengaruhi tingkat konsumsi energi: kota-kota padat menggunakan lebih banyak energi bersih, tidak terlalu bergantung pada transportasi bermotor, dan lebih sedikit berkontribusi pada emisi GRK. Selain itu, kota-kota yang mengkonsumsi lebih sedikit energi lebih bersih dan memberikan standar hidup yang lebih tinggi, termasuk pekerjaan dengan gaji yang baik. Perkiraan menunjukkan bahwa investasi dalam tindakan rendah karbon di kota-kota dapat mendukung 87 juta pekerjaan setiap tahun pada tahun 2030.[56]

Permukiman kumuh Korail di Dhaka, Bangladesh. © UN-Habitat-Kirsten Milhahn/UN-Habitat

Perbandingan emisi karbon terkait transportasi di seluruh dunia menunjukkan bahwa emisi tertinggi terjadi di Amerika Utara dan Australia. Urbanisasi di Amerika Utara umumnya dicirikan oleh pembangunan yang merebak dan sistem transportasi yang sangat bergantung pada penggunaan transportasi bermotor pribadi, yang menyebabkan emisi karbon tingkat tinggi. Sebaliknya, Eropa Barat menghasilkan sekitar seperempat dari emisi terkait transportasi di Amerika Utara. Adanya perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh kecenderungan kota-kota Eropa untuk mempromosikan penggunaan energi bersih dan penggunaan transportasi publik yang lebih umum di wilayah tersebut. Kota-kota di Eropa, terutama Amsterdam, Barcelona, Kopenhagen, dan Ljubljana adalah kota yang paling ramah sepeda dan pejalan kaki di dunia, dengan kecenderungan yang akan meningkat setelah pandemi COVID-19, karena kota-kota tersebut membangun infrastruktur baru untuk sepeda untuk mengakomodasi penumpang yang sekarang lebih memilih bersepeda daripada transportasi umum karena risiko kesehatan masyarakat tertular virus korona.[57] Sebagian besar kota di Eropa memiliki pusat kepadatan tinggi, di mana penduduk didorong untuk berjalan kaki atau bersepeda, yang secara signifikan mengurangi stres manusia terhadap lingkungan alam.[58] Ketika transportasi bertenaga manusia tidak tersedia, penggunaan sistem angkutan umum adalah pilihan terbaik berikutnya untuk mengurangi emisi secara substansial.[59] Pemerintah yang berinvestasi di kota-kota rendah karbon dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi, menjadikan kota menjadi tempat tinggal yang lebih baik, dan dengan cepat mengurangi emisi karbon.[60]

Tabel 2.3: Nilai urbanisasi bagi kaum perempuan miskin

Nilai Urbanisasi	Kondisi Kaum Perempuan Miskin di Kota
Ekonomi • Pemberdayaan dalam pengambilan keputusan • Pengakuan atas jumlah tanggung jawab rumah tangga yang tidak proporsional	Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan di dunia adalah perempuan, yang mempunyai prospek pekerjaan relatif terbatas. Ketika perempuan miskin perkotaan benar-benar mendapatkan pekerjaan, pekerjaan itu seringkali sulit, dan upah yang diterima tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan. Secara global, mereka mendapatkan 24 persen lebih sedikit dari laki-laki dan terdapat 700 juta lebih sedikit perempuan daripada laki-laki dalam pekerjaan formal berbayar. Mereka seringkali bekerja di perekonomian informal di mana mereka cenderung tidak memiliki kontrak kerja, hak hukum, dan perlindungan sosial. Perempuan miskin perkotaan memikul tanggung jawab domestik yang tidak proporsional, sehingga membatasi jumlah waktu yang dapat mereka dedikasikan untuk menghasilkan uang. The World Economic Forum telah menghitung bahwa perempuan membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk mencapai kesetaraan gender dengan tingkat penghasilan saat ini.
Lingkungan • Perlindungan dari bencana alam dan perubahan iklim	Perempuan miskin perkotaan berada pada risiko yang tidak proporsional terhadap dampak negatif dari perubahan iklim dan bencana alam karena mereka semakin dipaksa untuk tinggal di lokasi yang tidak diinginkan di dalam kota, sehingga membuat mereka terpapar pada kejadian cuaca yang lebih intens dan sering. Rumah mereka seringkali dibangun dan dirawat dengan buruk. Jika rumah mereka rusak atau hancur, mereka menghadapi tantangan yang sangat besar untuk memulihkan dan membangun kembali.
Sosial • Kesetaraan gender, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang setara di masyarakat • Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan akses kesehatan reproduksi	Kemajuan dalam seluruh program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akan terhenti jika pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tidak diprioritaskan dalam pengambilan keputusan. Seiring kota-kota mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan tindakan untuk mengatasi peningkatan urbanisasi yang berkelanjutan, penderitaan perempuan miskin perkotaan harus dipertimbangkan. Dengan mengambil pendekatan pengarusutamaan gender yang memusatkan kebutuhan perempuan miskin di kota-kota saat merumuskan kebijakan publik, pemerintah daerah dapat memperbaiki ketidakadilan sistemik.

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

Para ahli energi dan transportasi telah lama melihat kota sebagai kunci transisi paska karbon. Bagi para ahli tersebut, transisi perkotaan menghadirkan peluang untuk perubahan sistemik positif yang terkait dengan inovasi teknologi. Urbanisasi yang pesat pada perekonomian berbasis batu bara seperti India dan Tiongkok menghadirkan peluang untuk beralih ke model pembangunan dan konsumsi energi yang lebih hemat energi.[61] Di Afrika, penerapan teknologi energi dan sanitasi *off-grid* menciptakan potensi lebih banyak pelaku untuk menyediakan layanan perkotaan yang hemat biaya dengan cara yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.[62]

Selain itu, desain lingkungan binaan menawarkan peluang di mana pemerintah daerah dapat menghormati hak berbagai kelompok atas kota dengan memberikan manfaat kepada penduduk mereka yang paling rentan. Sebagai contoh, perempuan miskin di kota sering memikul tanggung jawab secara bersamaan untuk mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan memperoleh pendapatan di luar rumah. Kebijakan perkotaan perlu mengenali risiko yang tidak proporsional yang dihadapi perempuan dari perubahan iklim, bencana alam, dan dampak dari urbanisasi yang tidak terencana terhadap perempuan, serta kemampuan mereka untuk menghidupi keluarga inti dan keluarga besar (Tabel.2.3).

Kebijakan perkotaan perlu mengenali risiko yang tidak proporsional yang dihadapi perempuan dari perubahan iklim, bencana alam, dan dampak dari urbanisasi yang tidak terencana terhadap perempuan, serta kemampuan mereka untuk menghidupi keluarga inti dan keluarga.

2.5.2 Kota dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar abad kedua puluh satu. Kota-kota mengkonsumsi lebih dari dua pertiga energi dunia dan menyumbang sebanyak 70 persen dari emisi GRK yang disebabkan oleh manusia, terutama melalui konsumsi bahan bakar fosil untuk bangunan dan transportasi.[63] Dengan demikian, perubahan iklim tanpa investasi dalam ketahanan dan adaptasi dapat mengikis nilai lingkungan dari urbanisasi. Namun, seperti yang dijelaskan dalam Bab 1, investasi dalam strategi ketahanan iklim dapat memiliki tiga bagian: mencegah kerugian di masa depan, menghasilkan nilai ekonomi dengan mengurangi risiko, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi, serta memberikan nilai sosial dan lingkungan.[64]

Hampir 10.000 kota dan pemerintah daerah telah menetapkan target pengurangan emisi disertai program kebijakan untuk memenuhi target tersebut.[65] Semakin banyak kota yang menjadi pusat inovasi dalam energi alternatif, mengembangkan sumber daya yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membuat masyarakat kita lebih berkelanjutan. Pada 2017, misalnya, 158 pemerintah kota, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penelitian menandatangani *Deklarasi Nagano* (*Nagano Declaration*), berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan mempercepat transisi menuju 100 persen energi terbarukan.[66]

Perubahan iklim tanpa investasi dalam ketahanan dan adaptasi dapat mengikis nilai lingkungan dari urbanisasi.

Perencanaan kota dapat memainkan peran kunci dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai lingkungan dari wilayah perkotaan. Skala ekonomi perkotaan membuatnya lebih murah dan lebih mudah untuk mengambil tindakan untuk meminimalkan emisi dan bahaya iklim di tingkat kota.[67]

Kota-kota memiliki jumlah penduduk, kemampuan teknologi, dan pengetahuan kelembagaan yang diperlukan untuk mengadopsi inisiatif ekonomi hijau dalam skala besar, seperti beralih ke energi terbarukan. Di luar nilai lingkungannya, inisiatif energi alternatif merupakan sektor ekonomi yang muncul untuk ekonomi nasional. Investasi global dalam energi terbarukan pada 2018 mencapai USD 288,9 miliar. Di seluruh dunia, jumlah pekerjaan di bidang energi terbarukan, seperti litbang, pengembangan proyek, teknik, instalasi, serta operasi dan pemeliharaan terus meningkat, mencapai sekitar 11 juta pada akhir 2018.[68]

Jika kota-kota menindaklanjuti janji mereka dan mengadopsi energi terbarukan dalam skala besar, mereka dapat mendorong transformasi ekonomi nasional.[69]

Para ahli cuaca telah menjadi salah satu kelompok paling berpengaruh yang menekankan bahwa kota memainkan peran sentral dalam perang melawan perubahan iklim. Di bawah naungan Panel Antarpemerintah terkait Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), para pemimpin kota berkumpul di Edmonton (Kanada) dalam sebuah konferensi pada Maret 2018 untuk menginspirasi penelitian berikutnya yang berfokus pada ilmu alam dari kota (*science of cities*) dan perubahan iklim, yang akan menginformasikan laporan khusus IPCC pada tahun 2028.[70] Kota itu sendiri terus menjadi pusat perhatian dalam membuktikan hubungan antara urbanisasi dan perubahan iklim. Misalnya, Grup Kepemimpinan Kota Iklim C40 (C40 Cities Climate Leadership Group (C40)) meluncurkan gugus tugas pemulihan COVID-19 yang menekankan bahwa dunia pasca-pandemi tidak dapat kembali ke kondisi biasa.[71]

Perencanaan kota dapat memainkan peran kunci dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai lingkungan dari wilayah perkotaan.

Baik dalam hubungannya dengan wilayah alami di luar batas geografisnya maupun melalui ruang terbuka yang bercampur dengan wilayah metropolitan, kota bergantung pada sistem kehidupan. Para ahli alam mengakui bahwa proses perkotaan mendorong perubahan pola keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem secara global, yang menjadi semakin terlihat selama karantina wilayah akibat virus korona karena flora dan fauna perkotaan tumbuh subur tanpa kehadiran manusia.[72] Pemahaman ini telah membantu membingkai ulang urbanisasi sebagai tantangan dan peluang untuk mengelola ekosistem pada skala planet.[73] Terdapat kawasan perkotaan yang berada di dalam 36 titik keanekaragaman hayati yang diidentifikasi oleh Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (Critical Ecosystem Partnership Fund).[74] Sebanyak 22 kota berbagi ide tentang bagaimana meningkatkan keanekaragaman hayati perkotaan melalui partisipasi mereka dalam Jaringan Kota Biofilik (Biophilic Cities Network). Baik ahli ekologi maupun para ahli cuaca melihat kota sebagai laboratorium di mana teknologi baru, praktik sosial baru, serta model ekonomi dan tata kelola alternatif dapat diperkenalkan, dilacak, dan disempurnakan.

2.6 Nilai Sosial Urbanisasi Berkelanjutan

Laporan ini mengonseptualisasikan nilai sosial urbanisasi berkelanjutan melalui komitmen transformatif yang meningkatkan inklusi sosial dan mengurangi kemiskinan. Nilai sosial dari urbanisasi lebih jauh dikonseptualisasikan melalui kerangka kerja yang memastikan "hak atas kota", sebuah visi intelektual dengan hukum pengakuan di beberapa negara yang dibangun di atas pilar "Kekayaan sumber daya, kekuasaan politik, serta keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya hanya terjadi secara spasial."[75] Laporan ini juga mengangkat gagasan "kota untuk semua," atau keyakinan bahwa semua orang dalam lingkup perkotaan-perdesaan harus memiliki hak, kesempatan, dan kebebasan mendasar yang sama untuk mendapatkan manfaat dari urbanisasi yang berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan ini tercermin dalam komitmen transformatif NUA untuk "tidak meninggalkan siapa pun, dengan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya.[76]

Selama berabad-abad, orang berpindah ke kota untuk mengejar aspirasi dan mimpi mereka, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan individu dan kesejahteraan bersama. Namun, mewujudkan nilai sosial dari urbanisasi yang berkelanjutan bukanlah konsekuensi yang langsung dari pertumbuhan ekonomi kota, seperti halnya bahwa peningkatan investasi di perkotaan tidak secara otomatis bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri tidak bisa mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan bila tidak disertai dengan kebijakan pemerataan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah atau kurang beruntung untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.[77] Faktanya, seiring kota tumbuh menjadi lebih

besar dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, kota juga menjadi tempat meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan (Bab 1 dan Bab 5). Semakin melebarnya jurang antara ini disebabkan karena tidak adanya lembaga untuk melaksanakan kebijakan egaliter, terbatasnya SDM dan kapasitas dalam berbagai tingkat pemerintah, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perkotaan dan dalam pengambilan keputusan.

Dibutuhkan perubahan transformatif untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berorientasi kepada manusia dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan nilai sosial. Kota-kota memberikan kesempatan untuk menciptakan dan memelihara sistem sosial yang inklusif dan adil serta untuk menghasilkan pelayanan dan pengalaman. Sebuah kota hanya berkelanjutan sejauh kota itu mampu menangani kemiskinan, ketidakadilan, perumahan dan permukiman kumuh, di antara kebutuhan mendesak lainnya. Sementara belum ada kota atau negara telah sepenuhnya mengatasi kompleksitas pembangunan kota yang berkelanjutan, beberapa negara sedang melakukan upaya luar biasa, seperti Kota Meksiko yang menampung pendatang dari Amerika Tengah.[78]

Mewujudkan nilai sosial dari urbanisasi yang berkelanjutan bukanlah konsekuensi yang langsung dari pertumbuhan ekonomi kota, seperti halnya bahwa peningkatan investasi di perkotaan tidak secara otomatis bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan

Irisan antara inklusivitas, kesetaraan, dan kemakmuran membingkai bagaimana nilai sosial diwujudkan dari urbanisasi berkelanjutan. Tema yang luas dan saling berhubungan ini perlu diurai untuk bisa memahami bagaimana pengalaman individu yang berada dalam kelompok sosial yang unik atau yang dikecualikan dari nilai urbanisasi yang berkelanjutan.

2.6.1 Inklusivitas

Perencanaan dan tata kelola kota yang inklusif dan visioner yang mencakup pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh, digabungkan dengan kebijakan pembangunan perkotaan yang pro-kaum miskin yang memperluas dan meningkatkan kesempatan kerja, adalah kunci dari pembangunan kota yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan NUA dan TPB.

Banyak individu dan kelompok penduduk di kota-kota seluruh dunia tidak mendapatkan manfaat dari urbanisasi

Banyak individu dan kelompok penduduk di kota-kota seluruh dunia yang tidak mendapatkan manfaat dari urbanisasi. Urbanisasi yang berkelanjutan seharusnya mencakup populasi yang kurang terwakili dan yang kurang terlayani dalam proses partisipasi sipil. Misalnya, konsekuensi negatif dari urbanisasi cenderung berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dalam hal keamanan, mobilitas yang tidak memadai di kota-kota dan akses yang tidak sama terhadap sumber daya. Di Amerika Latin dan Karibia, lebih dari setengah pengguna transportasi publik adalah perempuan.[79] Namun, sistem transportasi tidak selalu dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan perempuan. Rute tidak langsung menyebabkan perjalanan kaki cukup jauh menuju tempat komersial dan tempat kerja dengan sedikit akomodasi untuk anak-anak.[80] Misalnya, di Puebla (Meksiko), lebih dari dua per tiga keluarga dengan ibu tunggal tinggal di perumahan yang terjangkau yang lokasinya berjarak 30 km atau lebih dari pusat kota. Perempuan-perempuan ini harus bepergian pada dini hari di mana pilihan transportasi sangat terbatas dalam ruang publik yang miskin pencahayaan yang mungkin membahayakan mereka. Jam kerja yang panjang juga membatasi kemampuan/kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan normal sehari-hari.[81] Bila sebuah kota seperti Puebla ingin merubah paradigma ini, maka bisa melakukan upaya dengan mengadakan transportasi yang memadai dan penyediaan perumahan yang aman. Contoh bagus mengenai perencanaan dengan kesetaraan gender adalah di Wina (Austria), di mana Departemen Perencanaan Kota menyusun "*Pedoman untuk Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Kota dan Perkotaan*" ("*Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development*") yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penduduk wanita. Di dalamnya memasukkan pertimbangan-pertimbangan

gender ke dalam perencanaan ruang publik, perencanaan dan perancangan tata guna lahan, kamar mandi umum, sarana rekreasi dan transportasi.[82]

Pendatang dari perdesaan adalah kelompok populasi lain yang sering dikecualikan dari manfaat urbanisasi. Seringkali, di negara berpenghasilan rendah dan menengah, para pendatang pindah karena pertanian yang tidak menguntungkan, terbatasnya pilihan mata pencaharian, kondisi kehidupan yang buruk, dan tidak memadainya infrastruktur dan pelayanan.[83] Pemerintah kota yang fokus pada penyertaan pendatang dari perdesaan perlu mengembangkan kebijakan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka dan memastikan bahwa para pendatang mendapatkan hak mereka untuk mengakses ruang dan pelayanan publik. Untuk tujuan ini, Argentina telah memperkenalkan program sertifikasi tanah bagi penduduk rentan sehingga dapat memperoleh "Sertifikat Rumah" yang memungkinkan mereka untuk mengakses layanan dasar dan mengesahkan alamat mereka.[84] Kota-kota di Italia dan Afrika Selatan menerapkan undang-undang mengenai pendapatan dasar dan upah hidup untuk memastikan keberpihakan terhadap populasi rentan.[85]

Pendatang dari perdesaan adalah kelompok masyarakat lain yang sering dikecualikan dari manfaat urbanisasi

Reformasi ini perlu untuk mengatasi pengucilan kelompok dan individu bergantung pada konteksnya, seperti kota di Pantai Gading akan memiliki prioritas yang berbeda dengan kota di Kanada. Ada contoh kota yang memulai inisiatif untuk mencapai komitmen mereka melalui NUA dengan membangun kemitraan yang menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan kota yang memberikan dampak pada hidup mereka. Di Ghana, Majelis Metropolitan Accra, dengan bantuan Aliansi Kota dan Dialog Rakyat, meluncurkan program untuk melibatkan penghuni kawasan kumuh dalam meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Program dilakukan bersama warga untuk memetakan permukiman kumuh dan mendapatkan informasi tentang jumlah penduduk, akses ke layanan dasar dan sistem sanitasi.[86] Program ini menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan untuk partisipasi sipil yang inklusif dengan melibatkan warga yang memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan pemerintah dan pembangunan perkotaan.

Desain sederhana pemandangan perkotaan dengan penduduk yang beraktivitas sehari-hari © Danielle Parentoni/Shutterstock

Seorang wanita muda berjalan menuruni tangga. Zanzibar, Tanzania. © Eduardo Moreno

2.6.2 Keadilan

Ketika pemangku kepentingan perkotaan sering mengadvokasi tentang keadilan, perubahan yang berarti dan nyata melalui perencanaan masih terbatas. Seperti yang telah dicatat oleh UN-Habitat sebelumnya, "Tantangan perencanaan kota dalam mengatasi ketimpangan sangat sulit, karena perencanaan kota saja tidak akan bisa melawan kekuatan pasar. Oleh karena itu, perencanaan kota harus mencari cara untuk mempromosikan integrasi dan kohesi sosial. [87] Keadilan dapat dipahami sebagai irisan dari keterwakilan, pengakuan, dan keadilan distributif di kota-kota. [88] Secara spesifik, keterwakilan adalah dimensi politik, pengakuan adalah dimensi budaya, dan redistribusi adalah dimensi ekonomi dari keadilan. Proses urbanisasi apapun, terlepas dari negara atau konteksnya, yang tidak secara aktif mengatasi hambatan yang telah melembaga sampai mendapat representasi, pengakuan dan redistribusi sepenuhnya, merupakan hal yang tidak berkeadilan dan merusak nilai-nilai yang terkait dengan urbanisasi. *Laporan Kondisi Kota Dunia 2012/2013* (*State of the World Cities Report 2012/2013*) mengusulkan dua syarat yang diperlukan untuk sebuah kota yang adil: menyediakan kondisi yang memungkinkan individu dan kelompok sosial untuk mewujudkan potensi mereka secara penuh dan mendapatkan manfaat dan peluang kolektif yang ditawarkan kota serta menghilangkan semua hambatan sistemik yang mendiskriminasi individu atau kelompok sosial mana pun.[89] Dua syarat yang diusulkan untuk kota yang berkeadilan ini menggambarkan adanya perbedaan yang signifikan antara konsep "keadilan" dan istilah yang sering digunakan "kesetaraan". Secara historis, kelompok yang kurang diakui dan kurang terwakili, membutuhkan adanya persamaan dan pendekatan yang konsisten untuk setiap layanan atau dukungan bagi setiap penduduk, bukan hanya untuk mempertahankan *status quo*. Di tempat lain, telah terbukti bahwa kebijakan terbaik untuk pengurangan kemiskinan melibatkan lebih banyak redistribusi, pengaruh, keuntungan, dan subsidi dari kelompok yang lebih berwenang dan lebih sejahtera untuk mereka yang kurang beruntung.[90]

Proses urbanisasi apapun, terlepas dari negara atau konteksnya, yang tidak secara aktif mengatasi hambatan yang telah melembaga sampai mendapat representasi, pengakuan dan redistribusi sepenuhnya, merupakan hal yang tidak berkeadilan dan merusak nilai-nilai yang terkait urbanisasi

Keadilan dalam pembangunan perkotaan menuntut penolakan terhadap pendekatan universal yang mengabaikan realitas keberadaan kelompok-kelompok yang berbeda dalam sebuah kota yang diperlakukan tidak sama, baik dalam mendukung sistem maupun sumber daya sosial.[91] Akses yang adil untuk perumahan yang layak, infrastruktur fisik dasar, infrastruktur sosial, kesempatan mendapatkan pekerjaan, akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan, keamanan, ketahanan pangan, dan rekreasi membutuhkan strategi pembangunan yang terarah dan memiliki target yang mengenali permasalahan unik dari populasi yang kurang terlayani dan kurang terwakili tersebut. Sebuah laporan terbaru di Amerika Serikat menemukan bahwa komunitas dengan warna kulit yang berbeda, komunitas berpenghasilan rendah, komunitas bukan berbahasa Inggris, dan komunitas yang memiliki akses terbatas terhadap transportasi dan/atau yang tinggal di permukiman padat memiliki akses air minum layak yang lebih rendah daripada komunitas yang lebih makmur. Faktanya, ras memiliki korelasi terkuat dengan penegakan hukum yang lambat dan tidak memadai dalam hukum kualitas air.[92] Ketidakadilan seperti itu juga terjadi pada masa pandemi COVID-19 yang diamati terhadap perbedaan rasial di Amerika Serikat dan Inggris.[93] Kegagalan untuk melindungi komunitas yang rentan bukanlah kebetulan; ini adalah akibat dari faktor sosial, politik dan keputusan yang dihasilkan dalam kebijakan publik yang merugikan komunitas kulit berwarna dan komunitas adat.[94]

Tantangan terbesar dalam memastikan keadilan bukan pada jumlah sumber daya yang diarahkan pada suatu masalah; lebih tepatnya pada kepastian bahwa kehidupan kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya dihargai dalam proses dan kebijakan publik. Ketidakadilan ditangani melalui kebijakan redistributif, dikembangkan dalam konsultasi dengan orang-orang yang langsung mengalaminya, yang akan memberikan prioritas kepada kelompok yang tersisih atau terpinggirkan dalam penyediaan pelayanan dan peluang.

Contoh memilukan dari pentingnya keadilan vs. kesetaraan bisa terlihat dalam kondisi anak-anak di lingkungan perkotaan (Tabel 2.4). Memastikan bahwa kebutuhan unik anak-anak disediakan secara adil dan berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi kelompok lain di daerah perkotaan.

Tantangan terbesar untuk memastikan keadilan bukan pada jumlah sumber daya yang diarahkan pada suatu masalah; lebih tepatnya memastikan bahwa kehidupan kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya dihargai dalam proses dan kebijakan publik.

Negara-negara yang berusaha mengatasi ketimpangan dengan berinvestasi dalam kesehatan, perumahan dan pendidikan untuk populasi paling rentan cenderung berkinerja lebih baik dalam semua indikator pembangunan manusia, termasuk PDB.

Bila keadilan dikedepankan sebagai prioritas maka kota-kota akan berkembang sebagai tempat tumbuhnya ekonomi yang sekaligus berkontribusi pada ketahanan lingkungan.[95]

Negara-negara yang berusaha mengatasi ketimpangan dengan berinvestasi dalam kesehatan, perumahan dan pendidikan untuk populasi paling rentan cenderung berkinerja lebih baik dalam semua indikator pembangunan manusia, termasuk PDB.[96] Negara-negara tersebut termasuk Brazil, Kuba, Mesir, Sri Lanka, Thailand dan Tunisia, yang menunjukkan kinerja relatif baik pada banyak indikator pembangunan manusia dan berhasil menekan atau mengurangi pertumbuhan permukiman kumuh sebagian besar melalui komitmen politik - didukung oleh sumber daya - untuk masyarakat miskin perkotaan. Bukti menunjukkan bahwa urbanisasi yang berpusat pada prinsip keadilan dapat menghasilkan kinerja yang terukur untuk kelompok marginal di perkotaan.[97] Sebuah komponen penting untuk mencapai keadilan adalah melalui partisipasi publik secara inklusif dan memastikan bahwa populasi yang kurang terlayani dan terwakili dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.

Anak-anak dengan pendidikan berkebutuhan khusus di taman kota inklusif, Dnipro, Ukraina. © Shultay Baltaay/Shutterstock

Tabel 2.4: Nilai urbanisasi untuk anak-anak

Nilai Urbanisasi	Kondisi Anak-anak di Kota
Ekonomi • **Lingkungan yang melindungi kesempatan anak-anak untuk pergi ke sekolah dan tidak dipaksa bekerja**	Anak-anak merupakan kelompok populasi paling rentan di perkotaan secara global. Paling ekstrem, diperkirakan 300 juta dari populasi global penghuni kawasan kumuh adalah anak-anak. Anak-anak yang paling kurang beruntung dan keluarga mereka dihadapkan dengan biaya hidup yang tinggi, distribusi dan akses ke layanan yang tidak merata, dan karakteristik buruk dari lingkungan binaan. Membangun target TPB untuk anak-anak, NUA berkomitmen untuk menciptakan kota yang aman, sehat dan terjamin bagi anak-anak. NUA mempromosikan akses yang adil ke infrastruktur fisik dan sosial dasar yang berkelanjutan seperti perumahan, air minum, ruang rekreasi umum, perawatan kesehatan, makanan dan pendidikan.
Lingkungan • **Lingkungan perkotaan yang aman dan terjamin** • **Lingkungan yang sehat dan produktif untuk masa depan mereka** • **Akses ke fasilitas permainan dan rekreasi yang sesuai usia anak-anak**	Perilaku anak-anak dibentuk oleh pengalaman hidup di tahun-tahun pertumbuhan mereka. Seorang anak yang berinteraksi dengan lingkungan perkotaan akan berdampak signifikan pada kemampuan dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan di masa depan. Pemangku kepentingan di daerah perkotaan perlu diinformasikan tentang bagaimana kerentanan anak-anak terkait dengan lingkungan binaan dan memastikan kebijakan perkotaan mencerminkan kebutuhan mereka dalam perencanaan dan pembangunan.
Sosial • **Akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, sanitasi, dll.** • **Perlindungan dari perdagangan manusia, kekerasan dan pelecehan**	Ketika anak-anak terpinggirkan dan dikucilkan dalam perencanaan kota dan proses pembangunan, suara mereka dibungkam. Pelibatan keluarga yang berarti membutuhkan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan kapasitas anak-anak dan orang tua mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan perkotaan. Kolaborasi komunitas untuk bersama-sama menghasilkan hasil yang lebih baik memastikan bahwa anak-anak mendapat manfaat sosial dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Sumber: UNICEF, 2018

2.6.3 Kualitas Hidup

Umumnya, penduduk perkotaan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Namun, sebagian besar nilai sosial dari urbanisasi seharusnya dilihat dari segi bagaimana kelompok rentan dan terpinggirkan memiliki akses ke layanan berkualitas dan standar hidup yang lebih baik. Indikator kualitas hidup mempertimbangkan serangkaian faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Indikator tersebut termasuk perumahan, kesehatan dan pendidikan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungannya dan ketersediaan fasilitas dan aset budaya.[98] Pakar pembangunan perkotaan menyarankan bahwa perencanaan dan manajemen kota yang efektif, yang bersikap proaktif daripada reaktif, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan.

Perencanaan dan manajemen kota yang efektif, yang bersikap proaktif daripada reaktif, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan.

Saat dunia menjadi semakin mengota dan pemerintah pusat tidak selalu dapat diandalkan untuk mewujudkan pelayanan di tingkat lokal, kota harus semakin menyediakan jaring pengaman mereka sendiri untuk memastikan kualitas kehidupan yang layak bagi penghuninya yang paling rentan. Program jaring pengaman sosial tingkat kota mulai bermunculan di kota-kota di dunia. Misalnya, Delhi memiliki program pensiun sosial untuk orang tua, yang alokasinya menjadi dua kali lipat oleh pemerintah kota pada awal karantina wilayah akibat virus korona. Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa dengan pendekatan di daerah perkotaan, program keamanan sosial dapat memainkan peran terpadu dalam mendukung warga termiskin untuk mendapatkan manfaat dari urbanisasi.[99] Sistem jaminan sosial di Tiongkok telah mengadaptasi mekanisme dari negara maju agar sesuai dengan kebudayaan masyarakat Tionghoa. Reformasi baru-baru ini berusaha untuk memperluas cakupan dengan memasukkan daerah

perdesaan dan semua penduduk perkotaan. Sebagai hasil dari upaya mereka, Tiongkok mengalami penurunan kesenjangan antardaerah, tetapi masih berjuang dengan ketimpangan yang tidak menurun seperti yang diharapkan (Bab 1).[100]

Ketika urbanisasi direncanakan dengan baik, hal itu berkaitan dengan produktivitas yang lebih besar, peluang, peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran untuk semua. Sayangnya, banyak kota yang memiliki infrastruktur yang tidak memadai dan akses terhadap pelayanan sosial yang tidak adil, sementara populasi yang terpinggirkan dikecualikan dari manfaat turun temurun dari urbanisasi. Ketidakadilan dalam tingkat kemakmuran dapat terlihat secara kontras antara penduduk dalam kota yang terencana dan yang terlayani dengan baik, aman, dengan penduduk yang tinggal di pinggiran, kawasan kumuh, dan permukiman informal. Sebuah kota hanya dinilai makmur jika semua penduduknya sejahtera, hanya terdapat sedikit ketimpangan dan kemiskinan. Kota-kota yang fokus mengintegrasikan aspek peningkatan kualitas hidup ke dalam perencanaan kota yang menyediakan pelayanan sosial yang memadai berupa pendidikan, kesehatan, rekreasi, keselamatan dan keamanan untuk meningkatkan taraf hidup dan membantu semua penghuni mewujudkan potensi maksimal mereka. UN-Habitat mendukung visi kota abad kedua puluh satu yang berfokus pada rakyat, mampu menghasilkan kesejahteraan dan membuang pola yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan pada abad sebelumnya.[101]

2.6.4 Sistem Tata Kelola

Urbanisasi yang berkelanjutan membutuhkan fungsi badan musyawarah untuk menyusun undang-undang, juga birokrasi yang mampu untuk melaksanakannya dalam rangka mewujudkan kota dan permukiman yang aman, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Hal yang mendasari proses ini adalah struktur keuangan kota yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendanainya. Untuk mencapai cita-cita ini, sektor publik harus bekerja sama dengan erat dengan pemangku kepentingan di semua tingkat pemerintahan, masyarakat sipil, asosiasi komunitas, masyarakat adat, kelompok marginal, investor swasta, akademisi dan mitra lainnya. Meskipun semua tingkat pemerintahan harus terwakili dalam sistem ini, urbanisasi berkelanjutan akan menjadi yang sukses jika mematuhi pendelegasian atau prinsip pengorganisasian bahwa keputusan politik harus diambil pada tingkat yang paling bawah, seperti yang ditekankan di NUA.[102]

Pendelegasian menekankan bahwa ada kapasitas dasar yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang berhasil. Kapasitas ini seringkali ditentukan oleh lingkungan yang mendukung di mana pemerintah daerah tersebut berada. Secara global, pemerintah daerah memiliki berbagai tingkat kapasitas kelembagaan dalam membuat keputusan urbanisasi sendiri karena belum baiknya penerapan desentralisasi, di antara faktor-faktor lain (Bab 7). Namun, dalam demokrasi desentralisasi, pemerintah pusat lah yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga negara. Ada juga peran tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa proses lokal tidak diambil alih oleh elit lokal.

Sementara kepemimpinan pemerintah dalam mengatasi isu inklusi dan keadilan tidak dapat digantikan, peran serta masyarakat sipil merupakan komponen penting urbanisasi berkelanjutan

Sementara kepemimpinan pemerintah dalam mengatasi isu inklusi dan keadilan tidak dapat digantikan, peran serta masyarakat sipil merupakan komponen penting dalam urbanisasi berkelanjutan. Masyarakat sipil yang aktif dan terinformasi memiliki potensi untuk membekali dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota mereka, membangun modal sosial modal dan memberikan pengaruh terhadap perancangan perkotaan. Begitu pula dengan dunia bisnis, akademisi, serikat pekerja dan asosiasi profesional semuanya perlu berkontribusi pada proses perancangan dan implementasi kebijakan dan peraturan untuk menjaga kota terus bergerak pada jalur untuk mewujudkan kemakmuran berkelanjutan untuk semua. Proses negosiasi dengan pemangku kepentingan

lokal dapat menjalin kemitraan baru yang memperkuat pemerintah nasional.[103] Partisipasi yang aktif dan kuat dari pemangku kepentingan dan masyarakat adalah hasil dari nilai tak berwujud urbanisasi berkelanjutan.

2.6.5 Kebijakan Perkotaan yang Selaras

Nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tercipta melalui proses urbanisasi adalah hasil dari kebijakan yang dibuat di semua tingkat pemerintahan, dalam bisnis dan organisasi supranasional. Keputusan-keputusan ini harus dipandu oleh "kebijakan perkotaan nasional," atau sebuah pedoman yang dikembangkan bersama dengan semua pemangku kepentingan secara kolaboratif yang mengedepankan pembangunan perkotaan jangka panjang yang transformatif, produktif, inklusif, adil dan ramah lingkungan (Gambar 2.1). Semakin banyaknya adopsi kebijakan perkotaan nasional (KPN) menjadi sebuah langkah maju yang penting dalam mengelola urbanisasi. Selama dua dekade terakhir, setidaknya seratus lima puluh negara telah mengembangkan KPN yang mendukung keberlanjutan urbanisasi dan hampir setengahnya (sebanyak 73) sedang dilaksanakan. Kebijakan Perkotaan Nasional adalah instrumen kebijakan utama yang bisa digunakan oleh pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan manfaat pembangunan berkelanjutan baik di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan.

Untuk memastikan urbanisasi yang inklusif dan adil maka dibutuhkan KPN yang mempertimbangkan hak-hak kaum paling rentan dan terpinggirkan. Kebijakan ini juga harus mengutamakan identitas dan rasa memiliki, nilai kolektif, partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, kebijakan harus mendukung hak perempuan, termasuk hak kepemilikan, akses pada pelayanan dan partisipasi sipil; pemberdayaan pemuda, termasuk pendidikan dan pekerjaan; orang tua, termasuk kebijakan untuk mempromosikan usia lansia yang sehat; dan fokus pada masyarakat miskin perkotaan.[105] Ciri yang ada di dalam permukiman kumuh dan informal yang disebabkan oleh urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi masalah kompleks dengan efek negatif. Pemerintah kota harus memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, sumber daya, dan kemauan politik mereka untuk meningkatkan kehidupan semua penghuni, termasuk yang berada di daerah kumuh.

Untuk pemerintah daerah, mengelola urbanisasi berkelanjutan membutuhkan kebijakan internasional yang diselaraskan dengan kebijakan domestik yang dijalankan bersama, sehingga terbentuk kekuatan perubahan.[106] Dukungan yang tepat waktu harus dimobilisasi di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan pendekatan kohesif untuk merencanakan dan mengelola kota dan interaksi lintas batas-batas yurisdiksi dan dengan daerah perdesaan. Pemerintah daerah sendiri tidak dapat menangani tantangan kompleks yang dihadapi kota-kota modern. Meskipun NUA dan perjanjian internasional relevan dengan urbanisasi yang keberlanjutan ditandatangani oleh pemerintah pusat, banyak dari komitmen tersebut berada dalam lingkup pemerintah daerah. Sangat penting bagi pemerintah pusat untuk membekali pemerintah daerah dengan kemampuan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan anggaran pembiayaan keuangan yang diperlukan.[107] Sama pentingnya agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien menuju pencapaian agenda pembangunan internasional.[108]

Pemerintah kota harus memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan kemauan politik mereka untuk meningkatkan kehidupan semua penghuni, termasuk yang berada di daerah kumuh.

Upaya untuk mempromosikan urbanisasi yang berkelanjutan harus dilakukan secara nasional. Pada saat yang sama, mereka harus peka terhadap kesiapan politik dan budaya daerah setempat dalam mendukung kebijakan inklusi dan keadilan daripada perebakan yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi elit. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan konteks dari setiap kota, termasuk peran dari kebijakan nasional, wilayah, perdesaan dan regional. Sudah terlalu lama bagi negara berkembang memberlakukan kebijakan dari luar yang tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Perubahan tentu saja membutuhkan sebuah tinjauan kebijakan dan

restrukturisasi kelembagaan dalam rangka mendukung langkah-langkah progresif untuk menangani tantangan perkotaan yang kompleks secara inklusif dan adil.

2.7 Nilai Tak Berwujud dan Nilai Budaya

Nilai tak berwujud dari urbanisasi dapat dikonsepkan sebagai sinergi antara tata kelola yang efektif dan kelembagaan yang membangkitkan rasa bangga terhadap persepsi dari suatu kota. Misalnya, lembaga yang sehat – konstitusi, hukum, peraturan, norma sosial, adat istiadat dan tradisi – menyediakan superstruktur agar nilai urbanisasi dapat terpenuhi dan mengarah pada kemakmuran yang inklusif dan meningkatnya kualitas hidup.

Pada urbanisasi berkelanjutan terdapat dua proses yang bersamaan terjadi yaitu: membangun politik, institusi, dan dukungan pemangku kepentingan untuk bersama-sama membentuk dan mengarahkan pertumbuhan perkotaan dengan cara yang adil dan inklusif, dan mengembangkan kapabilitas kelembagaan, kolaborasi jaringan, kapasitas teknis, kerangka hukum dan instrumen keuangan untuk mengelola pertumbuhan perkotaan. Setiap tingkatan pemerintahan harus mengendalikan kembali urbanisasi dengan komitmen baru untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan bertumpu pada masyarakat yang melengkapi masyarakat untuk secara kolektif mempengaruhi arah dari kota.

Keragaman budaya berkontribusi terhadap nilai sosial, ekonomi dan lingkungan dari urbanisasi melalui pembelajaran dan kesehatan yang membaik, peningkatan toleransi dan pemahaman, dan kesempatan untuk bersama-sama dengan lainnya di ruang publik.

Dukun Suku Indian, Zocalo, Kota Meksiko, Meksiko. © Dowraik / Shutterstock

Pemandangan udara dari Gedung Yick Fat, Quarry Bay, Hong Kong © Tavarius/Shutterstock

Budaya adalah suatu kaitan nilai tak berwujud di mana sebagai sumber kehidupan dari daerah perkotaan. Ekspresi kreatif membantu mendefinisikan persepsi orang terhadap kota dan berempati dengan tetangga mereka dengan melihat melalui orang lain. Keanekaragaman budaya berkontribusi pada nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dari urbanisasi melalui peningkatan pembelajaran dan kesehatan, peningkatan toleransi dan pemahaman, dan kesempatan untuk bersama-sama dengan lainnya di ruang publik. Kualitas kehidupan kebudayaan di suatu kota membawa daya saing, menarik bisnis, dan mendorong pembangunan ekonomi, tetapi lebih penting adalah memperkuat tatanan sosial kota. Investasi pada kebudayaan dapat melestarikan sejarah dan warisan serta dapat menciptakan manfaat bagi warga melalui hubungan dan proses yang terjadi dalam konteks dari hubungan masing-masing individu dalam keluarga, komunitas dan di institusi publik. Partisipasi dalam kesenian di ranah publik dan peluang kebudayaan dapat menghilangkan isolasi dan mempromosikan bentuk identitas dan pembelajaran antarbudaya, pemahaman dan apresiasi.

Di negara maju, peningkatan perpindahan penduduk telah menyebabkan peningkatan keragaman budaya dari populasi di kota (Bab 1 dan 5). Di sebagian besar kota, keragaman dirayakan, dan pemerintah kota mengembangkan program serta menciptakan lingkungan untuk membuat mereka yang datang dari budaya yang berbeda merasa bahwa nilai dan latar belakang tidak hanya diterima tapi juga dirayakan. Tidak hanya metropolitan besar yang dipenuhi dengan lingkungan budaya internasional, tetapi juga toko retail barang etnis, lansekap religius yang beragam, dan acara keragaman budaya seperti Festival Drongo di Amsterdam, Caribana di Toronto, Karnaval Notting Hill di London, Festival Tahun Baru Imlek, dan Parade di San Francisco dan "Living in Harmony" di Sydney. Praktisi perkotaan semakin mengakui nilai tak berwujud dari budaya untuk menciptakan rasa terhadap suatu tempat dan kepuasan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan mengurangi ketidakadilan melalui perencanaan budaya yang terdiri dari beberapa tingkatan.

2.8 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan

Bab ini telah mengonsepkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan dalam 4 dimensi yaitu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan dimensi tak berwujud, yang semuanya akan dijelaskan lebih detil dalam 4 Bab berikutnya. Dapat diberikan catatan walaupun urbanisasi memiliki nilai, cara dan sikap dari pemangku kepentingan dalam menonjolkan dan mempromosikan nilai urbanisasi yang sangat penting. Bab ini mencatat bahwa setiap diskusi tentang nilai haruslah bertumpu pada orang dan harusnya melayani kepentingan yang berbeda-beda, kebutuhan dan aspirasi dari orang yang urbanisasi memiliki manfaat, tapi manfaatnya tidak terjadi secara kebetulan. Urbanisasi membutuhkan perencanaan yang tepat, manajemen yang efektif dan tata kelola perkotaan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bab ini menawarkan pelajaran dalam kebijakan sebagai berikut:

- Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat membantu negara-negara untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dan berfungsi sebagai jalur menuju pasar global dengan menciptakan lingkungan yang produktif dan menarik investasi asing internasional, dan meningkatkan efisiensi ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang ditawarkan oleh kota-kota yang akan menyediakan hal dasar di mana negara-negara dapat berkontribusi untuk mencapai target TPB, termasuk meningkatkan peluang ekonomi sosial untuk masyarakat miskin perkotaan. Dengan ketiadaan perekonomian perkotaan yang sehat, TPB 2030 akan sulit untuk dicapai.
- Kebijakan harus mengusahakan pencapaian ekonomi pembangunan yang pro terhadap kemiskinan tetapi juga untuk mengurangi dampak lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan perkotaan pada lingkungan.

Habima Square, ruang publik yang menjadi rumah bagi lembaga budaya, Tel Aviv, Israel. © ChameleonsEye/Shutterstock

- Hal penting bagi perkotaan adalah untuk terus menjadi terdepan dalam mencari solusi perubahan iklim. Urbanisasi menawarkan banyak kesempatan untuk membangun strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya melalui perencanaan perkotaan yang baik dan praktek manajemennya.
- Urbanisasi berkelanjutan memiliki nilai sosial ketika dapat meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak kelompok yang tidak terlayani, dan tidak terwakilkan serta memastikan partisipasi warga yang inklusif.
- Urbanisasi berkelanjutan dirasakan melalui nilai tak berwujud dari suatu budaya. Di dunia perkotaan yang menjadi lebih heterogen, terdapat lebih banyak kesempatan untuk merayakan perbedaan kebudayaan sebagai bagian dari identitas kota.
- Urbanisasi akan terus menjadi penggerak untuk pertumbuhan global. Namun, mengingat kecepatan urbanisasi, prosesnya membutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan tata kelola yang efektif jika ingin menjadi aset yang transformatif.
- Pembuatan kebijakan internasional harus bisa beradaptasi dengan konteks lokal untuk memastikan kesesuaian dari kebijakan. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam agenda internasional untuk menyumbangkan perspektif unik mereka.

Catatan Akhir

1. Turok dan McGranahan, 2013.
2. PBB, tak bertanggal.
3. Johnson, 2016.
4. Johnson, 2016.
5. Gelles, 2020
6. NUA, paragraph 26.
7. Landry, 2006.
8. Sefa Dei et al, 2000.
9. Porter, et.al, 2018.
10. McGranahan et al, 2016.
11. UNICEF, 2018.
12. Glaeser, 2012; Krugman, 1996; Scott, 2000, 2001; Turok dan McGranahan, 2013.
13. UN-Habitat, 2010a.
14. OECD, 2006; Turok dan Parnell, 2009; Bank Dunia, 2009.
15. Martin et al, 2014.
16. UN-Habitat, 2006.
17. Ferreyra dan Roberts, 2018.
18. ADB, 2013.
19. Cleave et al, 2017.
20. Simpul keuangan seperti Hong Kong dan Singapura juga telah menggerakkan ekonomi global, namun tidak mengikat ekonomi nasional yang lebih besar.
21. Jaringan Riset Kota Dunia dan Globalisasi, 2018.
22. Jacobs, 1984.
23. Bank Dunia, 2015a.
24. UN-Habitat, 2010a.
25. Krugman, 1991.
26. Bank Dunia, 2009.
27. Glaeser, 2012.
28. Muro, et al, 2020; Muro, 2020; Porter 2020.
29. Ferreyra dan Roberts, 2018.
30. Regional Plan Association, 2017.
31. Routley, 2018.
32. Bank Dunia, 2009.
33. Mumtaz dan Wegelin, 2001.
34. UN-Habitat dan DFID, 2002.
35. Bank Dunia, 2009.
36. Cali dan Menon 2013; Fafchamps dan Shilpi 2005; dikutip dalam Ellis dan Roberts, 2016.
37. UN-Habitat dan DFID, 2002.
38. Arku, 2009a; PBB, tak bertanggal.
39. Arku, 2009b; Bloom et al, 2008.
40. Bank Dunia, 2009.
41. Florida, 2017.
42. Gutman dan Patel, 2018.
43. Bouchet et al, 2018.
44. Ellis dan Roberts, 2016.
45. Brown, 2020.
46. Ellis dan Roberts, 2016.
47. Frank Knight, 2020
48. Haila, 2000; Arku dan Harris, 2005; Harris dan Arku, 2006; Harris dan Arku, 2007.
49. Arku, 2006; Tibaijuka, 2009.
50. Pearson, 2019.
51. Arku, 2009c; World Economic Forum, 2019.
52. Dasgupta et al, 2014.
53. UNEP, 2019.
54. Lawrence dan Low, 1990.
55. UN-Habitat, 2008.
56. Koalisi Transisi Urban, 2019.
57. Alderman, 2020.
58. Satterwaite, 2010.
59. UN-Habitat, 2008.
60. Coalition for Urban Transitions, 2019.
61. Glaeser, 1994.
62. Cartwright et al, 2013.
63. UN-Habitat, 2011c.
64. Global Commission on Adaptation, 2019.
65. Coalition for Urban Transitions. 2019.
66. ICLEI, 2019.
67. UN-Habitat, 2016a.
68. https://www.ren21.net.
69. Barbier, 2009.
70. IPCC, 2018b.
71. C40 Cities, 2020.
72. Asher, 2020.
73. Elmqvist, et al, 2013.
74. Dana Kemitraan Ekosistem Kritis, 2020.
75. PBB, 2017b.
76. NUA, paragraph 14a.
77. Bank Dunia, 2014b.
78. Pskowski, 2018.
79. IADB, 2016.
80. IADB, 2016.
81. Urban 20, 2018.
82. Kota Wina, 2013.
83. Cobbinah et al, 2015.
84. Buenos Aires Action Plan, 2018.
85. Buenos Aires Action Plan, 2018.
86. Kurth, 2016.
87. UN-Habitat, 2009.
88. Fraser, 2007.
89. UN-Habitat, 2013.
90. Bank Dunia, 2018b.
91. Powell, 2016.
92. NDRC, 2019.
93. CDC, 2020); Kesehatan Masyarakat Inggris, 2020.
94. NDRC, 2019.
95. UNICEF, 2018.
96. UNDP, 2019.
97. UN-Habitat, 2013.
98. Gilmore, 2014
99. Gentilini, 2015.
100. Gentilini, 2015.
101. Gentilini, 2015.
102. NUA, Paragraph 89
103. UN-Habitat, 2013
104. PBB, tak bertanggal.
105. WUP 2018 report
106. Zeigermann, 2018
107. Chatwin, dan Arku, 2017
108. UN-Habitat, 2018
109. UN-Habitat, 2014
110. Chatwin et al, 2019
111. Gilmore, 2014
112. Florida, 2002
113. Gilmore, 2014
114. Ripley, 2010

Bab 3

Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan: *Kemakmuran Inklusif dan Peluang bagi Semua*

Kota bukan sekedar simbol dari mimpi, aspirasi dan harapan bagi setiap individu dan masyarakat, tetapi juga merupakan katalis utama atau pendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran di seluruh dunia. Kawasan perkotaan menghasilkan nilai ekonomi yang begitu besar karena kota adalah tempat produksi, inovasi, dan perdagangan global, yang menghasilkan lapangan pekerjaan di sektor formal dan informal. Bab ini tidak hanya menyampaikan ringkasan terkait mekanisme fundamental yang memungkinkan kota berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan, tetapi juga menyoroti resiko-resiko yang mungkin timbul dalam struktur suatu kota untuk menghasilkan nilai ekonomi. Resiko ini semakin diperbesar oleh pandemi COVID-19 dan dampak-dampak negatif sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Fakta Singkat

1. Pertumbuhan kota yang terencana dan terkelola dengan baik akan mendorong perekonomian di berbagai tingkat wilayah (lokal, regional, dan nasional) melalui penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap PDB dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Urbanisasi yang berkelanjutan adalah pendorong kemakmuran yang inklusif; hal ini akan membuka peluang ekonomi untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal.
3. Perekonomian informal adalah sumber kehidupan banyak kota di negara berkembang. Namun, usaha sektor informal pada umumnya berada di bawah radar intervensi kebijakan publik.
4. Interaksi antarmanusia yang sangat kental adalah faktor di balik potensi kota sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa resiko, sebagaimana dibuktikan oleh Pandemi COVID-19.
5. Hak milik, peraturan penggunaan lahan, dan sistem transportasi yang buruk membatasi penciptaan nilai ekonomi di kota kota negara berkembang.

Butir Kebijakan

1. Perencanaan perkotaan dan kewilayahan yang didukung oleh struktur tata kelola yang memadai akan meningkatkan nilai ekonomi urbanisasi.
2. Kota dapat meningkatkan kapasitas produktif dengan melakukan reformasi kerangka hukum dan kebijakan, serta mengadopsi langkah-langkah yang memberikan keamanan lebih besar kepada pekerja, terutama mereka yang berada di sektor ekonomi informal.
3. Langkah-langkah yang memadai untuk memfasilitasi transisi pekerja dan unit ekonomi dari perekonomian informal menuju formal merupakan hal mendasar untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, terutama di negara berkembang.
4. Membangun ketangguhan pasca-COVID-19 adalah fondasi untuk mengelola bencana pandemi di masa depan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Kerangka tata kelola, kelembagaan, kebijakan dan peraturan harus selaras dengan realitas lokal dan justru tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kota adalah fondasi di mana kemakmuran masyarakat modern dan peradaban masa lalu dibangun. Kota telah menjadi katalis dan pendorong utama perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Saat ini, kota menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Kota adalah wadah dunia untuk kegiatan produksi, inovasi, dan perdagangan, menghasilkan baik lapangan pekerjaan formal maupun informal. Kota mendukung pembangunan ekonomi dan kemakmuran bangsa, sebagaimana dibuktikan dengan jelas oleh kontribusi kota yang signifikan kepada keluaran (*output*) ekonomi global.

Selain menjadi konsentrasi kemakmuran dan kapasitas produktif, kota juga bisa menjadi pusat terjadinya eksklusi (Bab 1 dan 5). Kesenjangan perkotaan tidak pernah terlihat sebesar seperti sekarang ini, di mana manfaat urbanisasi belum banyak dirasakan semua lapisan masyarakat. Selain itu, sementara kota hanya menempati sedikit lahan secara global, aktivitas perkotaan sering menimbulkan masalah besar dan tantangan untuk keberlanjutan yang melampaui batas spasial kota itu sendiri (Bab 1 dan 4).

Penerapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) tidak hanya menempatkan urbanisasi sebagai garis terdepan pada agenda pembangunan internasional, namun juga menetapkan perubahan paradigma yang diperlukan untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan. Agenda Baru Perkotaan mendefinisikan bahwa "Pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan, inklusif dan berkelanjutan, dengan penciptaan lapangan kerja tetap dan produktif serta layak untuk semua, adalah elemen kunci dari pembangunan perkotaan dan wilayah yang berkelanjutan dan bahwa kota dan permukiman harus menjadi tempat dengan kesempatan yang sama untuk semua, memungkinkan semua orang untuk hidup sehat, produktif, dan sejahtera."

Seperti yang dijelaskan pada Bab 1 dan 2, urbanisasi berkelanjutan berarti bahwa kota direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan pertimbangan: bukan hanya manfaat, tetapi biaya-biaya; bukan hanya pendapatan, tetapi juga kualitas kehidupannya; bukan hanya manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat aspek sosial dan lingkungannya; bukan hanya dampak lokal, tetapi juga dampak globalnya; bukan hanya jangka pendek, namun juga jangka panjangnya. Tentu saja, mewujudkan

ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif yang menjamin kemakmuran dan peluang untuk semua lapisan, membutuhkan: pemanfaatan aglomerasi dari urbanisasi yang terencana dengan baik, termasuk produktivitas, daya saing, dan inovasi yang tinggi; penciptaan pekerjaan tetap, produktif, dan layak untuk semua; memastikan penciptaan pekerjaan yang layak dan akses yang sama terhadap sumber daya yang produktif dan mempunyai nilai ekonomi, dan kesempatan yang tersedia; serta mencegah spekulasi lahan, mendorong kepemilikan tanah yang aman, dan mengendalikan penurunan kualitas kota, bila diperlukan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kota menghasilkan bagian yang signifikan dari keluaran ekonomi global — lebih dari 80 persen PDB global— namun, kota juga memusatkan setengah dari populasi dunia pada sekitar tiga persen dari luas daratan bumi.[1] Akibatnya, keluaran ekonomi per kapita selalu tercatat tinggi di daerah perkotaan. Selanjutnya, negara yang memiliki lebih banyak area perkotaan cenderung lebih sejahtera, seperti yang diilustrasikan oleh hubungan positif yang kuat antara urbanisasi dan pendapatan di berbagai negara (Gambar 3.1).

Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan oleh setiap kota berbeda tergantung pada konteks lokalnya. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1, persentase bagian dari aktivitas perkotaan — industri dan jasa — dalam PDB tercatat tinggi di semua wilayah, dari sekitar 70 persen di negara berkembang seperti Oseania, hingga 90 persen persen di negara maju. Menariknya, daerah perkotaan menghasilkan keluaran ini dengan menggunakan sedikit lahan, dari sekitar satu persen di Afrika hingga 10 persen di negara berkembang Oseania.

Produktivitas perkotaan — diproksikan dengan total PDB (dihasilkan oleh industri dan jasa) dibagi dengan total populasi perkotaan — tercatat tertinggi di negara maju, mencapai hampir USD 50.000 per kapita. Selanjutnya, produktivitas ini relatif lebih rendah di negara-negara eks-transisi (sekitar USD 30.000) dan negara berkembang di Asia (USD 20.000), negara-negara berkembang di Benua Amerika (USD 15.000), Oseania dan Afrika (masing - masing USD 10.000). Dengan kata lain, kawasan perkotaan di negara berkembang menghasilkan keluaran per kapita lebih rendah dibandingkan kawasan perkotaan di negara maju.

Gambar 3.1: Urbanisasi dan pembangunan ekonomi

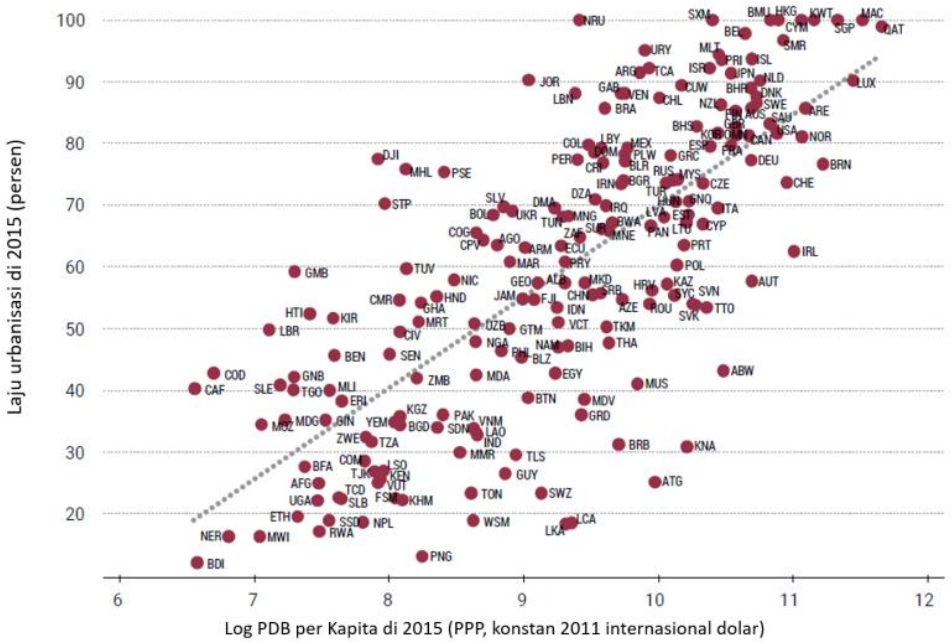

Sumber: PBB, 2018b; Bank Dunia, 2019d

Tabel 3.1 : Kontribusi sektor berbasis perkotaan terhadap PDB dan penggunaan lahan, 2015

	Kawasan maju	Negara Ekstransisi	Asia *	Amerika Latin dan Karibia	Oseania *	Afrika
Persentase Industri dan Jasa dalam PDB (%)	92.5	85.2	87.3	85.4	70.7	80.7
Persentase Lahan Perkotaan dalam Total Lahan (%)	5.3	1.6	4.2	2.4	10.1	1.1
PDB Industri dan Jasa (USD)/Penduduk Perkotaan	48,244	28,514	20,162	15,978	10,387	9,436

Catatan: *Negara Berkembang
Sumber: PBB, 2018b; Bank Dunia, 2019

Proses urbanisasi di negara maju diyakini relatif lebih berkelanjutan, dengan menggarisbawahi hubungan antara urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai perbandingan dengan negara berkembang, negara maju mencatat skor lebih tinggi pada indikator tertentu yang menunjukan kemajuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2– 3.4, Negara maju memiliki porsi lebih kecil akan populasi perkotaan yang tinggal di daerah kumuh; porsi lebih besar akan populasi perkotaan yang memiliki akses ke fasilitas pembuangan limbah terkontrol; rata-rata materi partikel halus yang lebih rendah di perkotaan mereka; dan porsi lebih besar akan penduduk dengan akses ke transportasi publik.

Seiring kota-kota di semua wilayah membuat kemajuan dalam merealisasikan TPB dan NUA, maka nilai ekonomi urbanisasi semakin meningkat. Misalnya, memperluas akses ke transportasi publik — pelayanan yang vital bagi penduduk perkotaan — tidak hanya mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan inklusi sosial.

Seiring kota-kota di semua wilayah membuat kemajuan dalam merealisasikan TPB dan NUA, maka nilai ekonomi urbanisasi semakin meningkat

Gambar 3.2: Porsi penduduk dengan akses yang memadai kepada transportasi umum, 2019 (dalam persen)

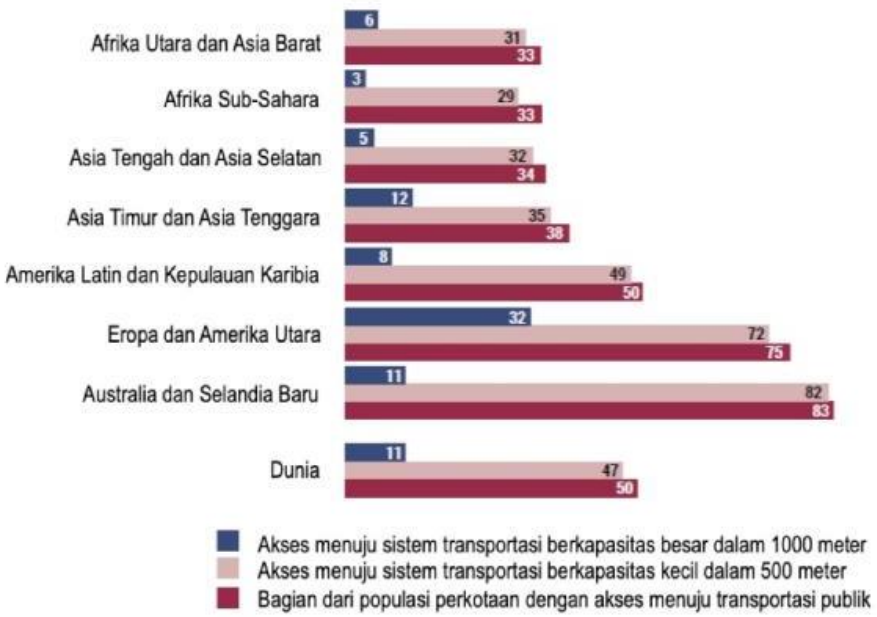

Sumber: PBB, 2020d

Gambar 3.3: Porsi dari limbah padat perkotaan yang dikumpulkan 2001 – 2010 dan 2010 – 2018 (dalam persen)

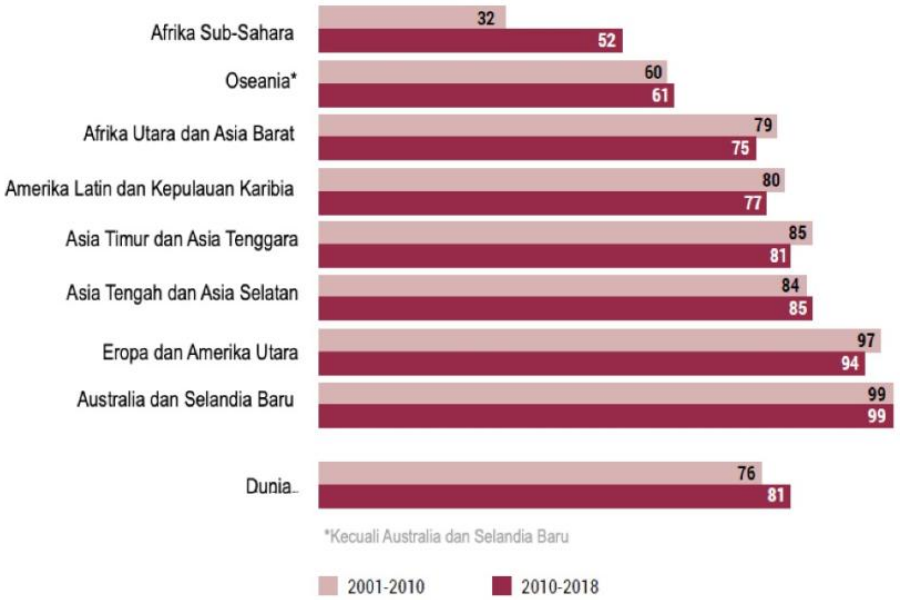

Sumber: PBB, 2020d

Gambar 3.4: Konsentrasi dari material partikel halus (PM2.5) di wilayah perkotaan 2016

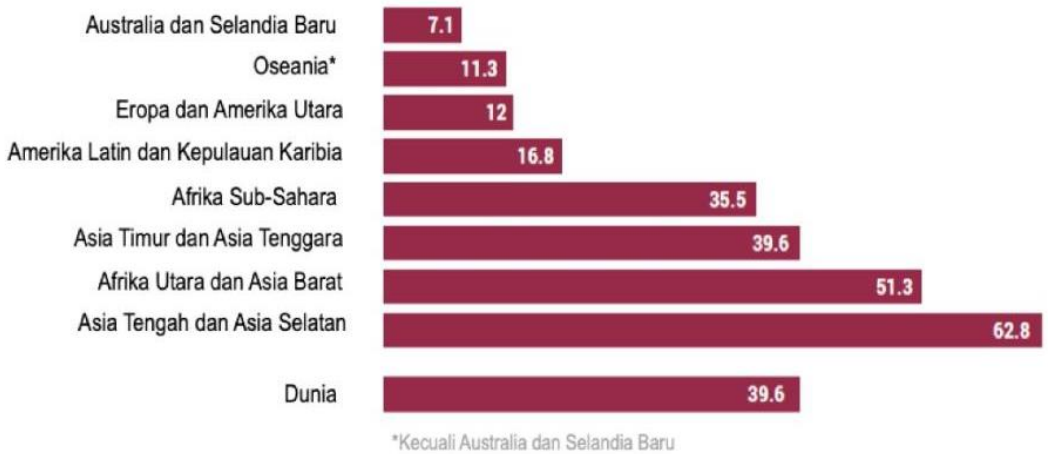

Sumber: Berdasarkan data Global Health Observatory WHO, 2018

Secara keseluruhan, fakta ini menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kota untuk mencapai peran sebagai akselerator pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang inklusif. Apa saja mekanisme-mekanisme yang digunakan kota untuk meningkatkan hasil keluaran ekonomi per kapita dan berdasarkan luas lahan? Dengan kata lain, apa yang membuat kepadatan begitu produktif dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi hal yang berkelanjutan setelah pandemi COVID-19? Bagaimana kota berkontribusi terhadap kemakmuran dan inklusivitas melintasi skala spasial? Mengapa berbagai perkotaan di belahan dunia berbeda menghasilkan tingkat keluaran ekonomi yang berbeda? Apakah semua daerah berkembang mengalami proses urbanisasi yang berkelanjutan, dan jika tidak, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keluaran jangka panjang yang dihasilkan oleh daerah perkotaan mereka? Terakhir, kondisi dan kebijakan apa yang diperlukan kawasan perkotaan agar menjadi produktif secara berkelanjutan seperti layaknya perkotaan di negara-negara maju?

3.1 Kota: Akselerator Pertumbuhan Berkelanjutan

Sejak karya besar Jane Jacobs, banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas di daerah perkotaan, dan dengan demikian, juga pendapatan penduduk mereka. Untuk tingkat pendapatan tertentu, terdapat peningkatan konsumsi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingkat kepuasan hidup. Tetapi, langkah apa yang bisa diambil kota untuk mewujudkan potensi pertumbuhan dan konsumsi?

Mekanisme yang digunakan kota untuk mencapai manfaat tersebut dikenal sebagai "ekonomi aglomerasi": dengan memusatkan sumber daya di wilayah geografis yang kecil, kota membantu penduduk dan dunia usaha dengan menghemat waktu, uang dan upaya produksi; memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide, sehingga mendorong inovasi dan SDM; dan menyediakan pusat-pusat konsumsi.[5] Akhirnya, melalui skala ekonomi dan ekonomi aglomerasi, kota memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi sosial. Pada dasarnya, hal tersebut adalah faktor pertumbuhan produktivitas intrinsik (alami) untuk kota (Tabel 3.2).

Skala ekonomi produksi mungkin konsep yang paling diketahui dari mekanisme ini. Fenomena ini telah memicu penciptaan permukiman manusia yang padat. Di seluruh dunia, banyak kota telah berkembang dari yang awalnya merupakan satu pabrik atau satu perusahaan pusat pelayanan. Misalnya, banyak kota pada era revolusi industri di Inggris berkembang di sekitar satu pabrik kapas di mana kapas akan diolah menjadi benang atau kain.[6] Baru-baru ini, pusat *call-centre* sedang dibangun di kota-kota kecil di India, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan kota-kota tersebut dan memperluas akses ke peluang pekonomian.[7] Kemudian ada skala ekonomi pasar: kota terbentuk karena ada perdagangan antardaerah dan kota sebagai tempat fisik untuk pertukaran barang. Sebagai contoh, banyak kota perdagangan muncul di sepanjang Jalur Sutra antara Eropa dan Asia.[8] Demikian pula, kota terbesar saat ini adalah kota-kota pelabuhan. Walaupun hubungan antara pelabuhan dan pertumbuhan kota dapat dikatakan melemah dari waktu ke waktu, beberapa kota, khususnya di Asia, selama beberapa dekade terakhir terus mengalami pertumbuhan populasi yang kuat seiring dengan semakin ramainya lalu lintas ke pelabuhan kargo mereka — misalnya, Shenzhen, Dubai, Shanghai, Singapura, Mumbai dan Kolkata.[9] Terakhir, terdapat skala ekonomi dalam konsumsi, distribusi, penyediaan barang publik dan rekreasi. Misalnya supermarket, rumah sakit dan stadion cenderung berlokasi di kota-kota besar. Kota membuat konsumsi beberapa barang dan jasa lebih murah bagi penduduknya, dengan demikian menghasilkan daya beli.

Hyderabad, kota paling padat keempat dan aglomerasi perkotaan paling padat keenam di India. © Snehit Photo/Shutterstock

Tabel 3.2: Faktor khusus kota yang menentukan produktivitas suatu kota

Faktor Pertumbuhan produktivitas intrinsik	**Ekonomi Aglomerasi :** • Mencocokkan • Berbagi/Bersama • Belajar	**Skala Ekonomi :** • Produksi • Konsumsi • Penyediaan layanan perkotaan	
Faktor Pertumbuhan produktivitas ekstrinsik	**Efisiensi Teknis:** • Efisiensi struktural • Kebijakan pengelolaan lahan • Efisiensi ruang • Investasi infrastrktur • Perpajakan • Pencegahan bencana (ketangguhan) • Efisiensi operasional • Manajemen perkotaan sehari-hari • Pengiriman layanan • Manajemen darurat	**Kerangka Kelembagaan:** • Institusi lokal yang sehat (misalnya, desentralisasi) • Tata kelola yang baik • Kemudahan berbisnis	**Kualitas hidup (Kualitas pendidikan, keselamatan, kebudayaan, keaktifan):** • Daya tarik industri berbasis pengetahuan • Daya tarik dan daya ingat 'kelas kreatif' • Efisiensi berbasis pembelajaran • Kreativitas dan inovasi • Litbang dan perkembangan teknologi • Kewirausahaan • Visi • Kepemimpinan daerah • Pemerintahan daerah

Sumber: UN-Habitat, 2013

Selama bertahun-tahun, kerangka teoritis telah menjelaskan mekanisme dasar yang mana aglomerasi menghasilkan keuntungan bagi kota. Hal tersebut karena perusahaan dan penduduk perkotaan memahami nilai ekonomi yang diperoleh dari kota sehingga bersedia bersaing untuk ruang yang lebih di kota. Manfaat kota ini terkait hingga proses berbagi, mencocokkan, dan belajar di kota-kota.[10] Dengan memusatkan perusahaan dan penduduk kota di lokasi yang sama, kota memberikan akses lebih luas dan lebih baik ke layanan "bersama" (*shared services*), mencapai skala ekonomi bersama, menyediakan infrastruktur dan pelayanan, memberikan insentif terhadap perusahaan dan pekerja dengan spesialisasi tertentu dan mencapai ketahanan terhadap "guncangan" ("*shock*") bagi perusahaan-perusahaan dan sektor usaha. Kota memungkinkan dunia usaha untuk "menyesuaikan" persyaratan mereka untuk tenaga kerja, tempat usaha dan pemasok yang dikarenakan pilihan yang banyak tersedia. Dengan banyaknya pelaku atau aktor, kota mendorong

terciptanya "pembelajaran": kota adalah pusat inovasi, ilmu pengetahuan, seni dan kreativitas. Kota adalah laboratorium eksperimen, yang menjelaskan pentingnya revolusi industri keempat, didorong dengan munculnya komputasi (Bab 6).

Kedekatan jarak satu sama lain di kota memberikan peluang yang lebih besar terjadinya interaksi manusia, sehingga memungkinkan terciptanya jaringan para ahli yang mendorong perbandingan, kompetisi, dan kolaborasi.[11] Kota juga memfasilitasi penyebaran pengetahuan ke populasi yang lebih luas. Memang, jika kota memiliki porsi pekerja terdidik yang besar dan jika pertukaran ide lebih memungkinkan terjadi setelah interaksi tatap muka antara individu yang terampil atau terpelajar, maka pengetahuan akan menyebar lebih cepat di kota. Hasilnya, sering dikenal sebagai limpahan modal manusia (*human capital spillovers*), menyiratkan bahwa kota dengan porsi lebih tinggi akan pekerja muda, terampil dan berpendidikan — "kelas kreatif" yang disinggung di Bab 6 (dan Tabel 3.2) — akan tumbuh lebih cepat.[12]

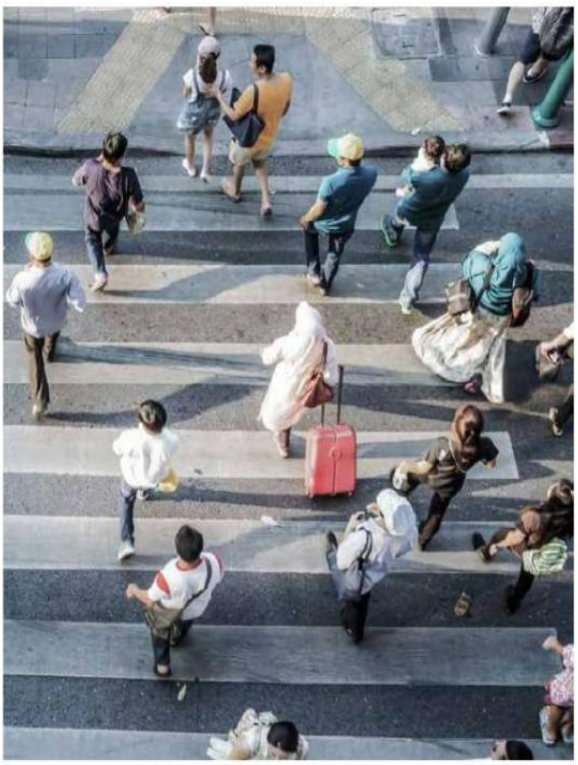

Penyeberangan orang di jalan kota © Ultramansk/Shutterstock

Akibat dinamika tersebut, banyak pekerja lebih produktif, sehingga menerima upah yang relatif lebih tinggi (bahkan untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah) di daerah perkotaan— upah premium perkotaan. Generasi upah premium ini, bagaimanapun, dibentuk oleh karakteristik sistem perkotaan di negara tertentu. Misalnya, baru-baru ini studi yang dilakukan di Nigeria, Tanzania, dan Uganda menunjukkan hanya pekerja di Uganda yang menikmati upah premium di seluruh kawasan perkotaan Uganda. Di Nigeria dan Tanzania, upah premium terbesar hanya dinikmati pekerja di kota yang mendominasi (*primate cities*) dan, dalam beberapa kasus, tidak untuk pekerja di kota-kota sekunder.[13] Kota yang mendominasi di negara berkembang biasanya memiliki kekuatan ekonomi tertinggi, terutama karena kota tersebut adalah pusat pelayanan keuangan nasional dan bisnis besar. Kota-kota ini juga merupakan pusat kantor pemerintah, dengan mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri umumnya menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di sektor swasta dan informal.

Lebih lanjut lagi, kota-kota yang lebih besar dan padat sering kali menawarkan upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan upah di kota lain. Perbedaan upah bahkan terjadi untuk pekerjaan dengan nilai yang sama; hal ini dikarenakan pekerja di kota-kota besar lebih produktif dibandingkan di kota lainnya.[14] Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa semakin besar lapangan pekerjaan sering kali menyebabkan peningkatan rata – rata produktivitas tenaga kerja. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa penggandaan kepadatan tenaga kerja (*employment density*) meningkatkan produktivitas rata-rata tenaga kerja sekitar enam persen. Studi lain menemukan bahwa pekerja yang tinggal di 30 wilayah metropolitan terbesar di AS memperoleh upah 33 persen lebih besar dibandingkan pekerja yang tinggal di luar wilayah ini.[16] Pengamatan serupa tentang pendapatan yang lebih tinggi di kota-kota besar dan padat telah dilakukan di tiga wilayah metropolitan utama di Jepang (Tokyo, Osaka dan Nagoya).[17] Di Afrika Selatan, peningkatan kepadatan penduduk perkotaan sebanyak dua kali lipat dapat menyebabkan kenaikan gaji rata-rata yang serupa — lima kota terbesar dan terpadat menawarkan upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain (Gambar 3.5).

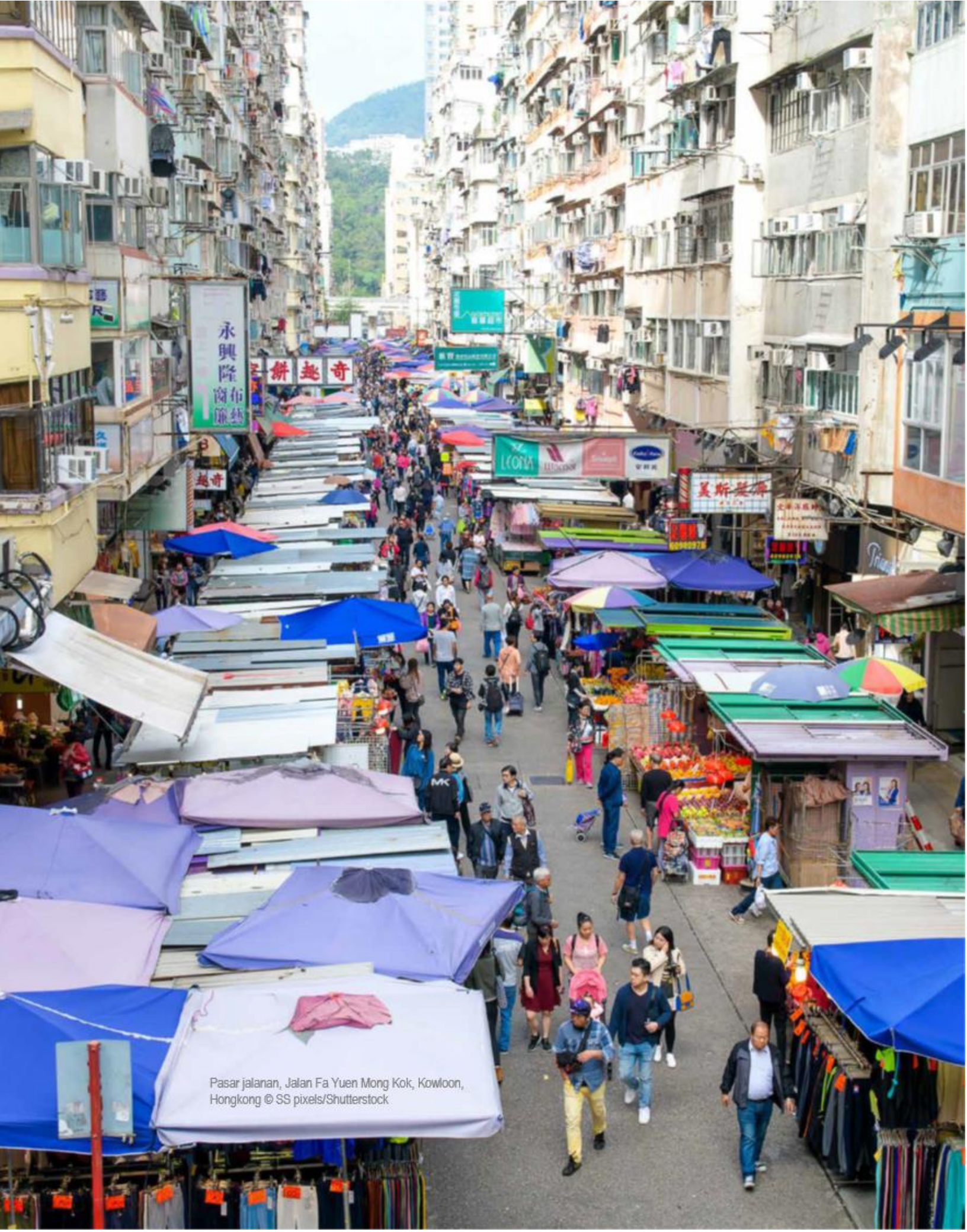

Pasar jalanan, Jalan Fa Yuen Mong Kok, Kowloon, Hongkong © SS pixels/Shutterstock

Gambar 3.5: Produktivitas pekerja dan kepadatan penduduk kota Afrika Selatan 2007

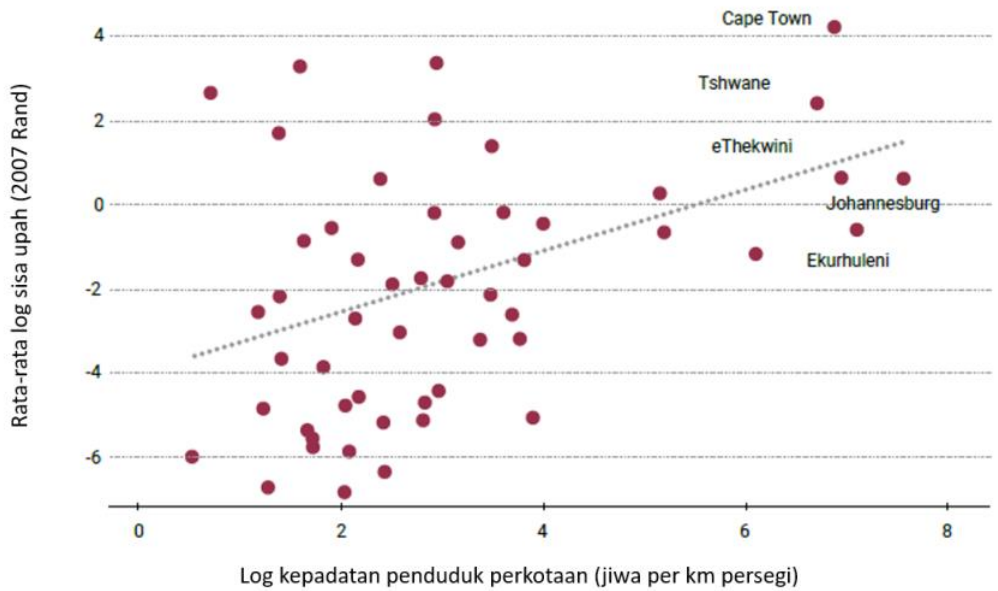

Sumber: Survei komunitas Afrika 2007. Sisa upah adalah perkiraan upah setelah dinormalisasi dari karakteristik seseorang seperti pencapaian pendidikan, umur, gender, status pernikahan, industri, dan pekerjaa

Untuk merealisasikan nilai ekonomi dari urbanisasi, pengembangan SDM menjadi penting. Kota harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengakses pendidikan yang bermutu yang selanjutnya akan mengembangkan keterampilan mereka sehingga dapat berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat

Walaupun ada hubungan yang kuat antara produktivitas pekerja dan kota-kota besar, efek aglomerasi jauh lebih kuat terjadi di kota-kota dengan *keterampilan yang lebih banyak tersedia*. Dengan demikian, untuk merealisasikan nilai ekonomi dari urbanisasi, pengembangan SDM menjadi penting. Kota harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengakses pendidikan yang bermutu yang selanjutnya akan mengembangkan keterampilan mereka sehingga dapat berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat.

Selain itu, bagaimana kota dibangun dan dikelola secara spasial adalah kunci untuk terjadinya ekonomi aglomerasi dan dituainya manfaat produktivitas. Perencanaan dan pengelolaan urbanisasi yang buruk akan menghasilkan kepadatan rendah, penggunan tanah yang terpisah-pisah (fragmentasi spasial tinggi), ketidaksesuaian antara penyediaan infrastruktur dan konsentrasi pemukiman, jaringan jalan yang tidak memadai dan kurangnya sistem transportasi publik yang dapat diandalkan. Kondisi negatif ini meminimalkan potensi untuk memanfaatkan skala ekonomi dan aglomerasi.[19] Di Afrika Sub-Sahara, misalnya, kawasan perkotaan menderita karena biaya perkotaan yang tinggi, mempengaruhi tidak hanya rumah tangga tetapi juga perusahaan. Rumah tangga perkotaan di negara-negara Sub-Sahara membayar 20–31 persen lebih tinggi daripada rumah tangga perkotaan di negara lain pada tingkat pendapatan yang sama. Misalnya, biaya untuk menyewa rumah tercatat 55 persen lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan di wilayah lain. Hal ini terkait kegagalan koordinasi, kebijakan yang dirancang dengan buruk, hak kepemilikan yang lemah dan faktor lain yang menurunkan kepadatan ekonomi. [20]

Bagaimana kota dibangun dan dikelola secara spasial adalah kunci untuk terjadinya

ekonomi aglomerasi dan dituainya manfaat produktivitas

Beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa keterkaitan jaringan di belakang potensi kota sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi juga membuat kota rentan terhadap bencana dan ancaman kesehatan masyarakat seperti penyakit menular. Jaringan interaksi tinggi tersebut sering dipandang sebagai faktor penyebaran epidemi dan pandemi yang cepat. Saat ini pun tidak berbeda, resiko penyakit menular seperti itu tertanam di dalam struktur dan pola masyarakat kontemporer, dan hal ini membutuhkan kemampuan adaptasi secara cepat untuk tanggap di jangka panjang dengan situasi yang lebih kompleks baik di tingkat lokal, nasional, maupun tingkat global.[21] Pandemi virus korona (COVID-19), misalnya, berdampak signifikan terhadap ekonomi perkotaan di berbagai negara (Kotak 3.1). Pelayanan dasar untuk ekonomi dapat berputar di kota, misalnya sistem transportasi publik, dianggap sangat potensial untuk menjadi pusat penularan.[22] Selain tingkat kematian yang tinggi di beberapa kota mega di dunia, pandemi telah menempatkan berbagai negara, dan dunia pada umumnya, pada krisis ekonomi.

Langkah-langkah cepat telah diadopsi untuk memerangi penyebaran virus seperti menutup perbatasan dan kebijakan pembatasan karantina wilayah yang mengharuskan orang untuk tinggal di dalam rumah telah mengakibatkan pengurangan kegiatan ekonomi, produksi, dan gangguan rantai pasokan, serta permintaan yang berkurang tajam. Beberapa konsekuensi dari tindakan ini telah terjadi seperti berkurangnya pendapatan dan hilangnya mata pencaharian. Pandemi telah dengan jelas mengungkap ketimpangan yang dibahas dalam Bab 1 dan 2 dan selanjutnya telah menunjukkan bagaimana ketimpangan tersebut mendikte dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi di berbagai sektor. Populasi yang tinggal di permukiman informal dan permukiman kumuh yang padat, secara ekonomi lebih rentan karena ketergantungan mereka pada pendapatan harian di sektor informal. Misalnya jutaan pekerja informal di India kembali ke desa mereka ketika pekerjaan perkotaan berkurang.[23] Pada Mei 2020, setidaknya 170.000 jiwa di area perkotaan Peru meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk kembali ke perdesaan mereka.[24] Di Kenya, menurunnya keadaan ekonomi karena pandemi menyebabkan rumah tangga perkotaan tidak mampu membayar sewa, sehingga menyebabkan mereka berpindah ke perumahan yang lebih murah atau ke perdesaan.[25] Mengingat konsekuensi ekonomi dan sosial yang begitu mendalam, jika pandemi semacam itu tidak dikelola dengan baik, akan ada banyak hambatan untuk mewujudkan TPB dan NUA.

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya memanfaatkan keutamaan dari kepadatan yang terdapat di daerah perkotaan, sekaligus mencegah sisi negatifnya.[26] Kepadatan mendorong skala ekonomi dalam penyediaan pelayanan publik yang penting seperti pelayanan kesehatan. Hasilnya, kemampuan untuk pengawasan kesehatan masyarakat, program pengendalian, pencegahan, dan program pengetahuan publik jauh lebih baik di kota, asalkan pemerintah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur tersebut.[27] Dalam beberapa kasus, setelah pendekatan baru diterapkan di daerah perkotaan telah terjadi perubahan. Pusat pengujian *drive-through* untuk COVID-19 di daerah perkotaan di seluruh Korea Selatan misalnya, telah menghadirkan sistem penyaringan efisien dan aman di negara itu, yang hingga saat ini telah mencegah penyebaran wabah di komunitas secara besar-besaran.

Meskipun kepadatan di perkotaan mendapat kritikan tajam dalam hubungannya dengan penyebaran COVID-19, telah diamati bahwa bukan semata-mata kepadatan tersebutlah yang membuat kota menjadi rentan, tetapi jenis kepadatan dan pengaruhnya terhadap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.[28] Besar rumah tangga, seperti jumlah orang per unit hunian, lebih penting dari jumlah kepadatan penduduk per kilometer persegi.[29] Sebuah studi tentang kepadatan perkotaan dan COVID-19 di AS menemukan bahwa kota yang lebih padat lebih memungkin terjadi wabah lebih awal — karena keterkaitan dengan lokasi lain — namun bukan berarti kota ini akan lebih terdampak di jangka panjang jika dibandingkan dengan kota yang lebih kecil atau kota pinggiran yang jarang penduduk; jumlah kematian terkait COVID-19 tidak dipengaruhi oleh kepadatan.[30]

Kepadatan mendorong skala ekonomi dalam penyediaan pelayanan publik yang penting seperti pelayanan kesehatan

Kota bisa sangat padat, namun juga masih dapat menyediakan tempat bagi penduduknya untuk mengisolasi dan mempraktikkan jarak fisik yang diperlukan dalam menghadapi penyakit yang sangat menular.[31] Kota yang direncanakan dan dikelola dengan baik, lebih siap merespon semua bencana, termasuk ancaman kesehatan masyarakat. Kemampuan merespon dengan cepat juga merupakan faktor yang dipengaruhi tata kelola yang baik, serta kesehatan keuangan daerah dan nasional. Di Tiongkok, beberapa kota padat (seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, Tianjin dan Zhuhai) berkinerja lebih baik daripada kota-kota dengan populasi yang lebih sedikit dalam memerangi virus seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.6. Hal ini dijelaskan sebagian oleh kemampuan kota padat untuk memobilisasi sumber daya fiskal yang cukup untuk mengatasi virus korona.[32] Di Korea Selatan dan Jerman, tata kelola dan kesehatan fiskal yang baik telah memungkinkan respons cepat terhadap pandemi di daerah perkotaan dan memastikan angka kematian yang rendah.[33] Tata kelola yang proaktif dan sumber daya keuangan yang memadai penting dalam menggabungkan respon kesehatan yang diperlukan dengan tepat seperti investasi dalam pengujian dan fasilitas karantina dengan tindakan mitigasi sosial ekonomi — seperti program jaring pengaman bencana yang responsif seperti asuransi pengangguran atau bantuan langsung tunai — untuk mendukung mereka yang mata pencahariannya telah terdampak oleh penanganan dan langkah-langkah mitigasi pandemi yang diperlukan.

Kota yang direncanakan dan dikelola dengan baik, lebih siap merespon semua bencana termasuk ancaman terhadap kesehatan masyarakat

Seseorang membersihkan permukaan interior kereta di Kota Meksiko, Meksiko © Eduardo Moreno

Gambar 3.6: Kepadatan kota dan tingkat infeksi COVID-19 di Tiongkok

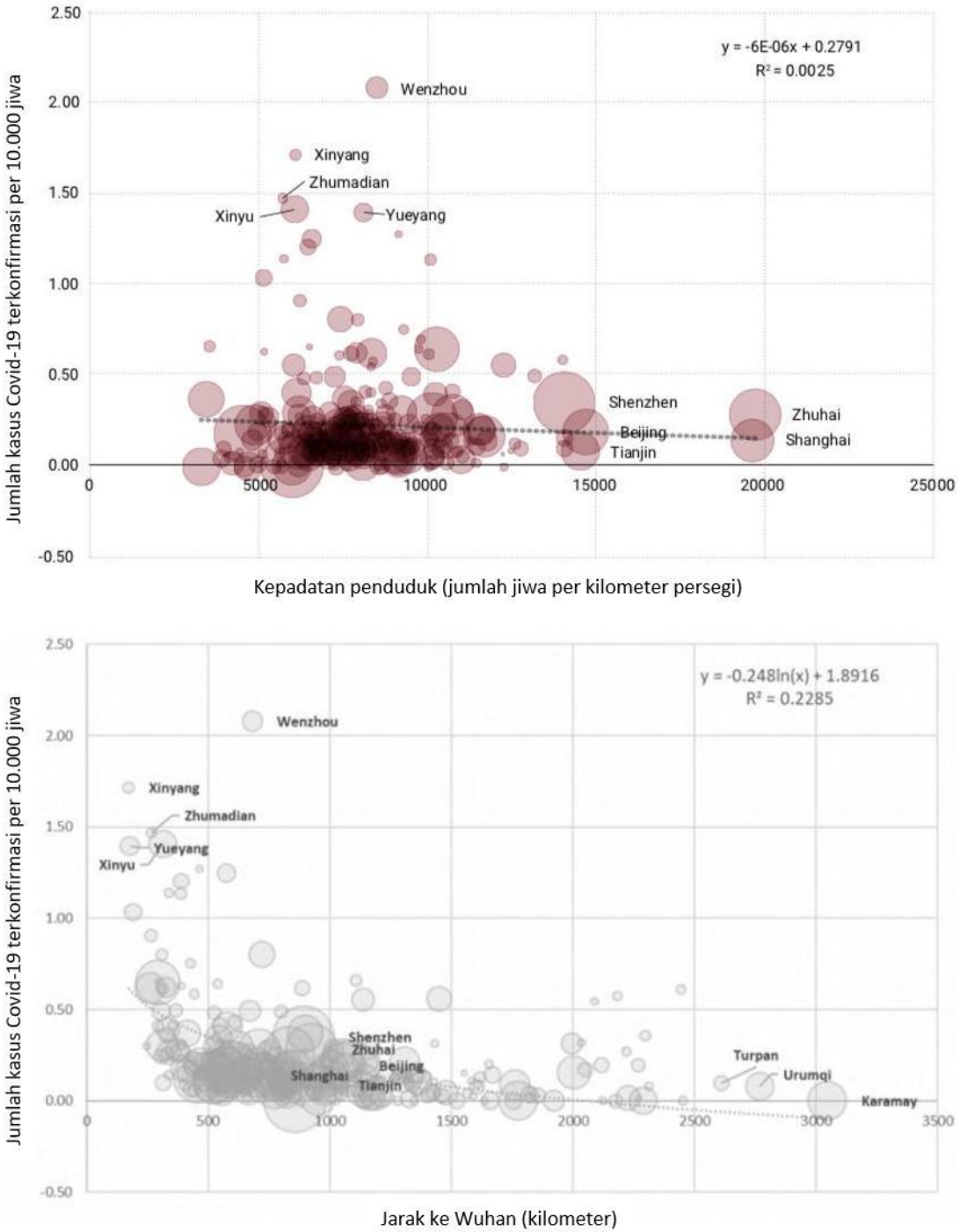

Sumber: Wanli dan Wahba, 2020

Kotak 3.1: Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 di berbagai wilayah.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis dunia yang mendalam. Sebagaimana disoroti di Bab 1, ekonomi global diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar tiga persen karena dampak dari pandemi COVID-19, menjadikannya resesi terburuk sejak *Great Depression*. Juga diperkirakan bahwa pandemi akan mendorong antara 71 dan 100 juta jiwa ke dalam kemiskinan ekstrem.[34] Kegiatan remitansi di tingkat global juga diproyeksikan turun tajam sekitar 20 persen pada tahun 2020.[35] Rantai nilai global telah terpengaruh secara signifikan dan kepercayaan investor secara umum menurun, investasi asing langsung diperkirakan turun 30-40 persen pada tahun 2020.[36]

Di tengah berbagai dampak ekonomi ini, terdapat langkah-langkah untuk mengendalikan COVID-19. Berbagai kebijakan pengendalian transmisi di berbagai tingkat pemerintahan (lokal, regional, dan nasional) serta usaha pencegahan individu telah mendorong biaya ekonomi akibat pandemi di berbagai wilayah geografis. Seperti disebutkan di Bab 1, pandemi memperkuat ketimpangan perkotaan; pekerja di sektor ekonomi informal dan pekerja migran sangat terpengaruh oleh konsekuensi ekonomi COVID-19. Khususnya di beberapa daerah, tingkat kemiskinan yang tinggi, pekerjaan informal dan pekerjaan yang tidak terlindungi telah mempersulit pelaksanaan sebagian kebijakan pengendalian transmisi.[37]

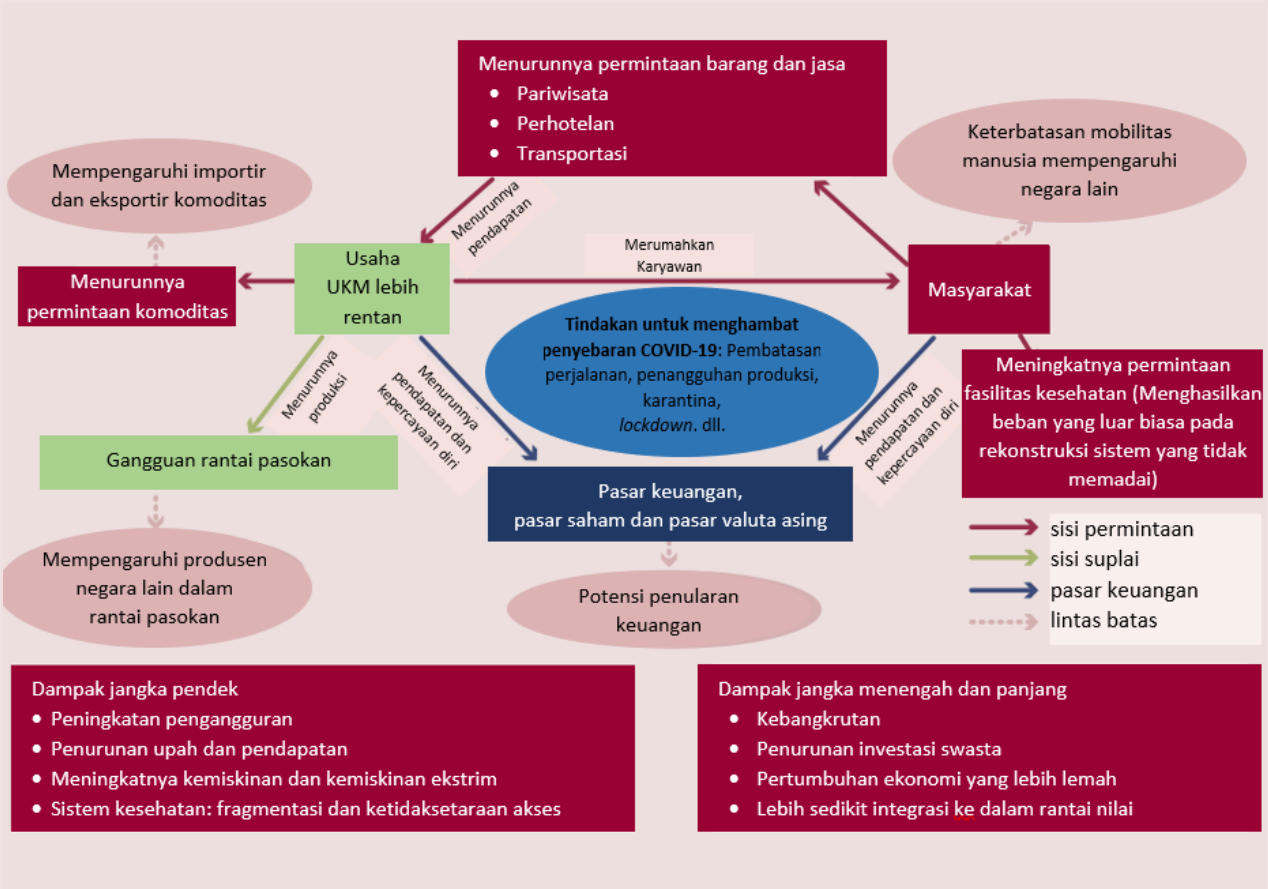

Sumber: Diadaptasi dari UNESCAP (2020) dan ECLAC (2020a.)

Dampak COVID-19 terhadap perekonomian berbeda di daerah perkotaan di berbagai wilayah di dunia. Di Afrika, efek COVID-19 di ketenagakerjaan cenderung berdampak lebih buruk di kota-kota karena sektor ekonomi berbasis perkotaan (manufaktur dan jasa) diperkirakan akan terpukul keras, mengakibatkan kerugian besar dalam pekerjaan produktif. Selain itu, mata pencaharian sekitar 250 juta orang-orang yang bekerja di perkotaan informal di Afrika Sub-Sahara akan berisiko terdampak. Efek pandemi akan meningkatkan kerentanan usaha di kota-kota Afrika, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), yang mencakup 80 persen lapangan kerja. Konsumsi di kota-kota besar, yang rata-rata 80 persen lebih tinggi dari tingkat nasional, cenderung menurun dan memberikan dampak pada rantai nilai domestik, termasuk daerah perdesaan. Penurunan arus pendapatan untuk pemerintah daerah telah diperkirakan, demikian juga penurunan kegiatan pengiriman uang antarpemerintah dan nasional karena respon nasional yang bersifat segera dan keperluan pemulihan.[38]

Wilayah Amerika Latin dan Karibia, di mana delapan dari setiap 10 orang tinggal di kota, menanggung beban global akibat krisis COVID-19: penurunan perdagangan internasional, penurunan harga komoditas, intensifikasi penghindaran resiko dan memburuknya kondisi keuangan global, permintaan yang lebih rendah untuk layanan pariwisata dan pengurangan kegiatan pengiriman uang. Akibatnya, PDB wilayah Amerika Latin dan Karibia diproyeksikan turun 5,3 persen. Perkiraan juga menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Selatan akan berkontraksi sebesar 5,2 persen karena aktivitas yang lebih rendah di Tiongkok, pasar ekspor Amerika Selatan yang penting. Perekonomian Amerika Tengah diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen, karena penurunan pariwisata serta berkurangnya aktivitas ekonomi di Amerika Serikat, mitra dagang utama dan sumber kegiatan pelayanan pengiriman uang. Akhirnya, penurunan permintaan untuk jasa pariwisata akan membuat ekonomi Karibia menyusut sebesar 2,5 persen.[39]

Proyeksi juga menunjukkan peningkatan pengangguran menjadi 11,5 persen pada tahun 2020, meningkat dari 3,4 persen pada 2019, atau peningkatan pengangguran 37,7 juta orang. Dampak negatif COVID-19 terhadap lapangan pekerjaan juga terjadi akibat dampak buruk pandemi terhadap UKM, di mana kontribusi UKM adalah lebih dari 50 persen pekerjaan formal. Banyak usaha di segmen UKM berjuang untuk tetap bertahan.[40] Secara keseluruhan, penurunan PDB dan peningkatan pengangguran diperkirakan akan berdampak negatif secara langsung terhadap pendapatan rumah tangga. Akibatnya, angka kemiskinan di kawasan tersebut diproyeksikan naik menjadi 34,7 persen pada tahun 2020, naik 4,4 persen dari 2019; menandakan bahwa 29 juta lebih orang akan masuk ke kategori miskin. Sementara itu, kemiskinan ekstrim terlihat meningkat sebesar 2,5 persen, dari 11 persen menjadi 13,5 persen, yang merepresentasikan peningkatan 16 juta orang pada kategori miskin ekstrim.[41]

Di kawasan Asia dan Pasifik, ketika kebijakan pengendalian penyebaran virus mulai diterapkan, secara umum terjadi penurunan permintaan agregat, dengan sektor yang sangat terdampak pada sektor jasa (seperti pariwisata, ritel, perhotelan, dan penerbangan sipil). Permintaan internasional untuk komoditas juga turun, terutama untuk minyak, yang selanjutnya berdampak pada ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi dan keuangan.

Penurunan permintaan global diperkirakan akan merugikan kawasan Asia dan Pasifik sekitar USD 172 miliar dari hanya sektor perdagangan, setara dengan 0,8 persen penurunan PDB pada kawasan tersebut.[42] Di Asia Selatan, pertumbuhan ekonomi kawasan diperkirakan akan turun ke kisaran 1,8 sampai 2,8 persen pada tahun 2020. Wilayah ini terdampak negatif terutama gangguan arus pengiriman uang dan kehilangan pekerjaan di bidang perhotelan dan transportasi. Dampak negatif COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan diperkirakan akan lebih tinggi di pusat perkotaan.[43] Di Asia Timur dan Pasifik, kontraksi ekonomi yang tajam diperkirakan akan terjadi, menurunkan pertumbuhan 2020 menjadi 2,1 persen, dari 5,8 persen pada 2019. Pertumbuhan di Tiongkok diproyeksikan menurun menjadi 2,3 persen dari 6,1 persen pada 2019 sementara kawasan EAP lainnya diproyeksikan melambat menjadi 1,3 persen dari 4,7 persen pada 2019. Kemiskinan di subkawasan diperkirakan meningkat sekitar 11 juta orang.[44]

Di Asia Barat, PDB kawasan Arab diproyeksikan turun setidaknya USD 42 miliar pada tahun 2020. Pandemi, ditambah dengan perang harga minyak, telah menyebabkan penurunan harga minyak yang terus menerus, menyebabkan wilayah Arab kehilangan pendapatan bersih dari minyak hampir USD 11 miliar antara Januari dan pertengahan Maret 2020. Selama periode ini, bisnis di kawasan Arab kehilangan modal pasar sebesar USD 420 miliar— setara dengan delapan persen dari total kekayaan wilayah tersebut. Wilayah ini diproyeksikan kehilangan 1,7 juta pekerjaan pada tahun 2020, sehingga tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,2 persen — Hal ini dikarenakan sektor jasa yang terkena dampak parah adalah penyedia lapangan kerja utama. Selanjutnya, perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi diperkirakan berdampak negatif pada upah dan aliran kegiatan pengiriman uang. Hasilnya, diperkirakan 8,3 juta orang akan jatuh miskin. Efek negatif COVID-19 pada rantai pasokan global, produksi, transportasi, dan distribusi diproyeksikan berdampak pada ketahanan pangan di wilayah tersebut.[45]

PDB Eropa dan Amerika Utara diproyeksikan turun 6–7 persen pada tahun 2020 sebagai akibat dari krisis. Berbicara mengenai fiskal,negara-negara di Eropa Timur, Balkan, Kaukasus dan Asia Tengah paling terpukul. Penurunan pengiriman uang dari tenaga kerja migran, arus keluar modal besar-besaran dari pasar negara berkembang, jatuhnya harga minyak dan memburuknya kondisi pembiayaan eksternal merugikan ekonomi dan masyarakat di subkawasan ini.[46]

Lingkungan modern berkelanjutan di Almere, Belanda © Pavlo Glazkov/Shutterstock

Seperti yang diilustrasikan melalui konsep dasar pada bagian ini, kota dapat secara efektif berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan. Namun, potensi pertumbuhan dan konsumsi sangat penting dikelola dengan cara yang mendukung pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan dan membangun ketahanan. Hasil yang didapat dari nilai ekonomi yang terkait dengan urbanisasi harus berlaku untuk semua dengan memastikan kemakmuran yang inklusif dan meningkatkan kesempatan untuk semua. Kesadaran bahwa urbanisasi yang berkelanjutan adalah perjalanan transformasional, yang membutuhkan kolaborasi elemen khusus, merupakan jalan bagi kota mencapai hasil yang dimaksud. Rencana Strategis NUA dan UN-Habitat 2020-2023 mengidentifikasi elemen-elemen ini sebagai penggerak perubahan yang mendasar: kebijakan dan perundang-undangan; tata kelola; mekanisme pembiayaan; dan perencanaan dan desain kota.

Merupakan hal yang penting bahwa pertumbuhan dan potensi konsumsi dari kota dikelola sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan

Elemen-elemen ini menghasilkan kerangka kerja yang akan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi daerah perkotaan. Hal ini penting untuk meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan dengan urbanisasi untuk mencapai kemakmuran yang inklusif dan kesempatan untuk semua. Elemen-elemen yang menghasilkan kerangka kerja untuk menyeimbangkan nilai ekonomi urbanisasi dengan nilai-nilai yang melekat lainnya: sosial, lingkungan, dan nilai tak berwujud. Elemen-elemen ini memiliki pengaruh langsung pada diskusi mengenai berbagai bagian dari bab ini — dan laporan ini secara umum — dan UN-Habitat menganggap elemen-elemen ini penting untuk pencapaian tujuan dari rencana strategisnya.

- *Kebijakan dan legislasi*: Pengembangan dan implementasi kebijakan perkotaan di tingkat yang sesuai, termasuk lokal dan nasional, memberikan kerangka vital untuk memanfaatkan potensi ekonomi kota. Kebijakan Perkotaan Nasional, misalnya, menyatukan energi dan potensi pusat perkotaan di dalam sistem kota nasional.
- *Memperkuat tata kelola perkotaan*: Tata kelola perkotaan yang efektif adalah prasyarat untuk ketahanan ekonomi. Lembaga dan mekanisme tata kelola yang efektif akan menentukan bagaimana masyarakat, organisasi sektor publik akan membuat keputusan ekonomi, sosial atau politik, yang akan memaksimalkan potensi dan mengoptimalkan segala sumber daya.
- *Mekanisme pembiayaan*: Kerangka dan instrumen pembiayaan yang efektif, dan berkelanjutan akan memperkuat keuangan kota dan sistem fiskal daerah sehingga menciptakan, menopang, dan berbagi nilai ekonomi dihasilkan oleh pembangunan kota yang berkelanjutan dengan cara yang inklusif.
- *Perencanaan dan desain kota dan wilayah* memiliki sifat yang melekat dan fungsi ekonomi yang fundamental. Menegaskan kembali perencanaan terintegrasi kota dan wilayah jangka panjang adalah kunci untuk mengoptimalkan dimensi spasial bentuk perkotaan dan memberikan hasil positif dari urbanisasi seperti mendorong pertumbuhan ekonomi. Perencanaan tata ruang multiskala yang berkelanjutan memastikan kota dan wilayah yang terintegrasi dan terhubung yang mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan demikian, nilai ekonomi yang dihasilkan suatu kota melebihi batas kota hingga wilayah, seperti yang dibahas di bagian selanjutnya.

3.2 Cara Perkotaan Berkontribusi terhadap Kemakmuran dan Inklusivitas Nasional

Kota adalah wadah ekonomi dunia untuk berproduksi, berinovasi dan melakukan perdagangan.[47] Bersamaan dengan itu, ketika direncanakan dan dikelola dengan baik, kota juga merupakan wadah bagi penduduk untuk merealisasikan potensi produktivitas mereka. Dalam menganalisis peran kawasan perkotaan dalam berkontribusi untuk kemakmuran dan inklusivitas, bagian ini dapat dimulai dengan gambaran umum tentang bagaimana kota meningkatkan ekonomi dalam berbagai skala. Selanjutnya, bagian ini menyajikan peran unik perkotaan sebagai "pengiklan" untuk menarik

investasi langsung asing serta peran kunci perkotaan dalam pengentasan kemiskinan dan inklusivitas untuk kelompok marginal di negara-negara di mana akses terhadap peluang tidak sama untuk setiap individu.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Lintas Skala Spasial

Pertumbuhan perkotaan yang terencana dan terkelola dengan baik meningkatkan ekonomi dalam berbagai skala: lokal, regional, dan nasional. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, kawasan perkotaan pada umumnya meningkatkan produktivitas penduduknya. Dengan mengedepankan pembangunan ekonomi lokal, maka akan tercipta peluang lapangan pekerjaan yang dibangun berdasarkan keunggulan komparatif dan ciri khas dari lokalitas dan komunitas wilayah tersebut. Ketika negara-negara mengalami urbanisasi, bagian populasi yang lebih besar akan menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh kota. Dengan demikian, keseluruhan produktivitas meningkat secara regional dan untuk keseluruhan bangsa. Pedalaman perdesaan misalnya, mengalami dampak positif dari efek limpahan dari daerah perkotaan. Segala hubungan perkotaan-perdesaan dalam produksi, konsumsi, dan keuangan memberikan dampak yang besar ke seluruh kontinum perkotaan-perdesaan. Mengingat besarnya keterkaitan ini, pertumbuhan kota yang berkelanjutan memiliki manfaat ekonomi yang besar terhadap daerah perdesaan terdekat.[48] Memperkuat hubungan timbal balik ini juga penting untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan.

Terdapat juga limpahan antarkota dalam satu wilayah.[49] Selain aktivitas perdagangan barang antar satu kota dan kota lain, kota juga bertukar ide. Inovasi apapun yang berasal dari satu kota muncul dengan cepat di kota-kota lain, dari munculnya mobilitas bersama seperti kendaraan angkut pesanan (*ride-hailing*) sampai inisiatif untuk menanggulangi pandemi. Sistem perkotaan dapat mendorong penciptaan pengetahuan dan jaringan difusi yang terintegrasi, yang akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Secara khusus, terbukti bahwa kegiatan ekonomi akan semakin terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, atau "*mega-region*" yang berpusat di dan sekitar kota-kota global. *Mega-region* ini seringkali mencakup kota besar, kota kecil, desa, dan daerah perdesaan, yang dapat melintasi batas negara dalam bentuk koridor perkotaan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Seringkali, hal tersebut beroperasi sebagai sebuah entitas ekonomi tunggal yang bergerak memperkuat wilayahnya sendiri, dengan pola pertumbuhan kumulatif yang menghasilkan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi dunia — Kekuatan ekonomi dan batas wilayah *mega-region* ini seringkali melampaui negara mereka sendiri. Tabel 3.3 menyajikan 29 *mega-region* tersebut yang diidentifikasi menggunakan satelit dan data keluaran ekonomi.[50]

Wilayah *mega-region* ini mewakili hampir 40 persen PDB dunia. Seperti terlihat pada Tabel 3.3, 11 di antaranya berada di Asia, 10 berada di Amerika Utara, dan 6 di Eropa (Amerika Latin dan Afrika hanya memiliki tiga *mega-region* yang digabungkan). Lima *mega-region* terbesar di dunia terdiri dari Bos-Wash (dari Boston ke Washington D.C. melalui New York City), Par-Am-Mun (dari Paris ke Munich melalui Amsterdam), Chi-Pitts (dari Chicago hingga Pittsburgh), Tokyo dan area sekitar, dan SoCal (dari Los Angeles hingga San Diego).

Jika *mega-region* yang lebih produktif mampu melakukan investasi infrastruktur, mereka akan mampu menangkap kegiatan ekonomi dari *mega-region* yang kurang produktif. Namun, persaingan seperti itu termasuk "sehat", di mana *mega-region* yang lebih produktif cenderung tumbuh lebih cepat dibanding *mega-region* yang kurang produktif, hal ini akan membuat seluruh sistem perkotaan lebih produktif. Namun, *mega-region* bisa "terlalu" bersaing satu sama lain, yang akan mengarah kepada ketidakseimbangan geografis, di mana *mega-region* menyerap kegiatan ekonomi dan membuat daerah lain menjadi miskin. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa dua pertiga dari *mega-region* ini adalah bagian dari negara maju. Pendekatan "pemenang mengambil semua" ini mendorong ekonomi negara maju untuk terus tumbuh secara cepat, atau terkadang bahkan lebih cepat, daripada negara berkembang, yang akan memperlebar ketimpangan spasial. Seringkali, konfigurasi perkotaan ini mengakibatkan pembangunan daerah yang tidak seimbang ditambah dengan keinginan untuk memperkuat wilayahnya sendiri— sehingga akan memperkuat ikatan dengan pusat ekonomi yang ada dan

selanjutnya menciptakan pembangunan yang lebih terlokalisasi dibandingkan untuk pengembangan spasial yang lebih tersebar. Perkembangan asimetris seperti itu berpotensi memperparah kesenjangan perkotaan.[51]

Terdapat bukti yang menunjukan bahwa kluster kota di negara berkembang tidak menunjukkan peningkatan ekonomi dengan bertambah luasnya wilayahnya karena pertumbuhan yang lambat dari industri endogen dan meningkatnya biaya eksternalitas.[52] Hal ini semakin diperburuk oleh sistem tata kelola yang sangat terfragmentasi, di seluruh tingkatan kota dan terkadang hingga skala nasional. Dalam rangka mewujudkan nilai ekonomi urbanisasi berkelanjutan dan memastikan kemakmuran yang inklusif, negara berkembang membutuhkan strategi yang memastikan pertumbuhan dan pembangunan spasial terintegrasi – untuk mengembangkan *mega-region* baru lahir di wilayah mereka, serta wilayah negara tetangga, yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Misalnya, mengembangkan dan melaksanakan KPN menjadi sangat penting untuk yang memaksimalkan manfaat dari urbanisasi, menanggapi bentuk-bentuk interkonektivitas dan saling ketergantungan antarperkotaan, serta mengantisipasi dan mengelola bersama konsekuensi negatif dari pertumbuhan perkotaan dan regional.

Tabel 3.3 Mega-region terbesar di dunia, 2015

Peringkat	Megaregion	Kota	Keluaran (miliar)	Penduduk (juta)
1	Bos-Wash	New York; Washington, D.C.; Boston	US$3,650	47.6
2	Par-Am-Mun	Paris, Amsterdam, Brussels, Munich	US$2,505	43.5
3	Chi-Pitts	Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh	US$2,130	32.9
4	Greater Tokyo	Tokyo	US$1,800	39.1
5	SoCal	Los Angeles, San Diego	US$1,424	22
6	Seoul-San	Seoul, Busan	US$1,325	35.5
7	Texas Triangle	Dallas, Houston, San Antonio, Austin	US$1,227	18.4
8	Beijing	Beijing, Tianjin	US$1,226	37.4
9	Lon-Leed-Chester	London, Leeds, Manchester	US$1,177	22.6
10	Hong-Shen	Hong Kong, Shenzhen	US$1,043	19.5
11	NorCal	San Francisco, San Jose	US$925	10.8
12	Shanghai	Shanghai, Hangzhou	US$892	24.2
13	Taipei	Taipei	US$827	16.7
14	São Paulo	São Paulo	US$780	33.5
15	Char-Lanta	Charlotte, Atlanta	US$656	10.5
16	Cascadia	Seattle, Portland	US$627	8.8
17	Ista-Burs	Istanbul, Bursa	US$626	14.8
18	Vienna-Budapest	Vienna, Budapest	US$555	12.8
19	Mexico City	Mexico City	US$524	24.5
20	Rome-Mil-Tur	Rome, Milan, Turin	US$513	13.8
21	Singa-Lumpur	Singapore, Kuala Lumpur	US$493	12.7
22	Cairo-Aviv	Cairo, Tel Aviv	US$472	19.8
23	So-Flo	Miami, Tampa	US$470	9.1
24	Abu-Dubai	Abu Dhabi, Dubai	US$431	5
25	Osaka-Nagoya	Osaka, Nagoya	US$424	9.1
26	Tor-Buff-Chester	Toronto, Buffalo, Rochester	US$424	8.5
27	Delhi-Lahore	New Delhi, Lahore	US$417	27.9
28	Barcelona-Lyon	Barcelona, Lyon	US$323	7
29	Shandong	Jinan, Zibo, Dongying	US$249	14.2

Sumber: Florida, 2019

3.2.2 Daya Tarik Penanaman Modal Asing (PMA)

Kota dengan daya tarik investasi penting untuk menarik PMA, yang pada gilirannya dapat mendongkrak prospek perekonomian nasional. Dengan pengecualian sektor SDA, PMA sering mengalir ke sektor manufaktur atau sektor jasa padat-pengetahuan.[53] Studi juga menunjukkan bahwa faktor terbesar yang menarik PMA adalah rezim perdagangan, kualitas institusi, kemampuan angkatan kerja, dan infrastruktur.[54] Karena kota adalah tempat di mana faktor-faktor ini paling mudah terlihat oleh para investor dan juga di mana industri cenderung terkonsentrasi, maka kota adalah promotor penting untuk PMA di negara tersebut.[55]

Akan terdapat efek bola salju karena PMA akan menarik investasi serupa yang lain. Saat PMA tumbuh, siklus yang bermanfaat terbentuk: ketika beberapa kota berhasil secara ekonomi, kota tersebut mampu melakukan lebih banyak investasi yang akan meningkatkan daya saing internasional negara tersebut, dan pada gilirannya akan menarik lebih banyak PMA. Urbanisasi di Asia, khususnya Asia Tenggara, sangat terkait dengan transformasi ekonomi dan tingkat integrasi tinggi ke ekonomi global di mana banyak kota telah menjadi penerima PMA. Di Afrika, PMA telah menciptakan lapangan pekerjaan terbesar di Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, dan Maroko.[56]

3.2.3 Pengentasan Kemiskinan dan Inklusivitas untuk Kelompok Marginal

Kota adalah tempat di mana aspirasi, ambisi, dan aspek kehidupan tak berwujud lainnya diwujudkan untuk semua, termasuk peluang ekonomi bagi kelompok marginal. Untuk mereka yang berada di bagian bawah dari tangga ekonomi, nilai urbanisasi terletak pada kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, baik melalui pekerjaan formal maupun informal. Meskipun sebagian besar penduduk kota tidak memilih untuk memasuki perekonomian informal, penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari lapangan pekerjaan informal merupakan kontributor yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Kotak 3.2).[57] Hal yang sama, perkiraan kemiskinan multidimensi, yang memperhitungkan kurangnya pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan, menunjukkan bahwa kemiskinan umumnya lebih rendah di perkotaan daripada di daerah perdesaan (Gambar 3.7).[58] Akses kepada infrastruktur (seperti kesehatan dan pendidikan yang lebih baik) di perkotaan umumnya meningkatkan kualitas hidup dan dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Seorang perempuan lansia dari permukiman informal, Georgetown, Guyana © UN-Habitat/Kirsten Milhahn

Gambar 3.7: Persentase dari populasi dengan kemiskinan multidimensi

Sumber: UNDESA, 2020a

Kotak 3.2: Ekonomi informal: sumber perekonomian perkotaan

Perekonomian informal telah menjadi sumber kehidupan banyak kota. Pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif tidak mungkin dilakukan di banyak tempat negara berkembang tanpa mengatasi tantangan yang dihadapi pekerja formal. Pada tahun 2020, lebih dari 2 miliar jiwa menggantungkan mata pencaharian pada perekonomian informal, jumlah ini mewakili 62 persen tenaga kerja di dunia. Pekerjaan informal mewakili 90 persen dari total pekerjaan di negara-negara berpenghasilan rendah, 67 persen negara berpenghasilan menengah dan 18 persen di negara berpenghasilan tinggi.

Pekerjaan informal non-pertanian mencakup lebih dari setengah pekerjaan informal di sebagian besar wilayah dunia berkembang: 82 persen di Asia Selatan, 66 persen di Afrika Sub-Sahara, 65 persen di Asia Timur dan Tenggara, 51 persen di Amerika Latin dan Karibia dan 45 persen di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Perekonomian informal dalam segala aspeknya juga menjadi tantangan utama dalam konteks hak para pekerja. Karena itu, untuk merealisasikan kemakmuran inklusif diperlukan pendekatan berbasis hak yang dibangun di atas kemitraan yang efektif antara pekerja informal dan pemerintah daerah, pemikiran radikal diperlukan dalam memikirkan kembali paradigma tata kelola dan perencanaan kota untuk memfasilitasi transisi pekerja dan unit ekonomi dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Sehingga, akan selaras dengan prioritas di Dekade Aksi untuk mencapai Tujuan Global, khususnya TPB 8, dengan komitmen para Negara Anggota untuk "... membangun ekonomi untuk masa depan dan memastikan pekerjaan yang layak untuk semua."

Persentase ketenagakerjaan informal terhadap total ketenagakerjaan non-pertanian

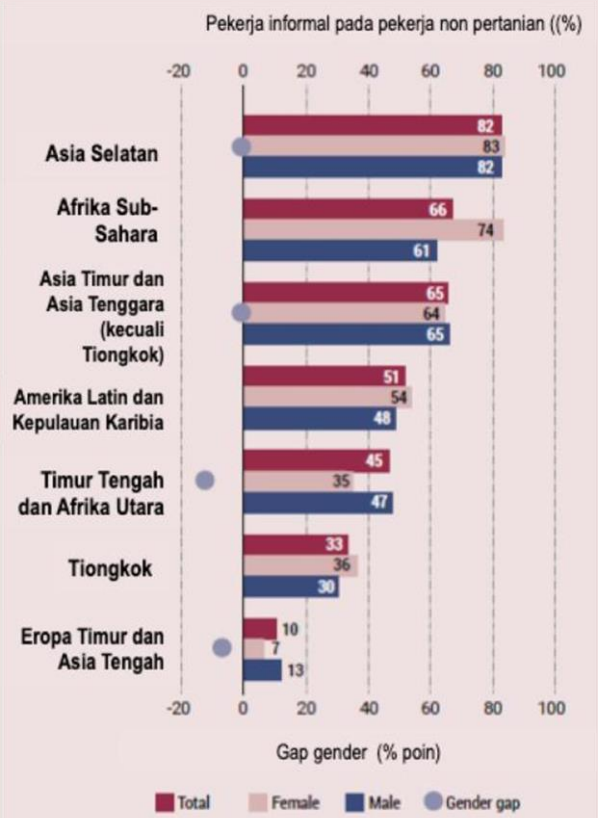

Sumber: UN-Habitat, 2018b; UN-Habitat, 2016c; ILO, 2017; ILO, 2019; ILO, 2020e

Di negara di mana perempuan, penyandang difabel, etnis tertentu, agama dan/atau kelompok minoritas seksual menghadapi diskriminasi dalam sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja, potensi untuk memaksimalkan produktivitas menjadi terbatas.[59] Studi menunjukkan bahwa dengan tinggal di perkotaan, seseorang lebih mudah menerima kehadiran kelompok ini.[60] Jadi, di dalam suatu negara, kota menawarkan lingkungan yang tidak terlalu diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan memungkinkan kelompok tersebut untuk mengakses pengembangan SDM dan peluang pekerjaan yang sebaliknya tidak mudah mereka akses di tempat lain (Bab 5). Misalnya, beberapa kota memiliki saluran dan program formal khusus untuk orang-orang penyandang difabel dalam mengakses pekerjaan yang layak seperti Access to City Employment di San Francisco dan EmployAbilities di Edmonton.

Secara keseluruhan, urbanisasi menghasilkan nilai ekonomi melalui banyak cara. Namun, tidak jarang ada kasus di mana urbanisasi tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana disorot di bagian ini, kota yang terencana dan dikelola dengan baik dapat menjadi katalisator untuk inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi yang adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan proses urbanisasi bisa berkelanjutan agar dapat memaksimalkan manfaat ekonomi daerah perkotaan. Selanjutnya, saat ini dunia sedang bertarung dengan dampak pandemi COVID-19, kota memiliki peran kunci dalam pemulihan secara ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang akan menjadi motor pertumbuhan.

Pemandangan udara Kota Helsinki saat musim semi, Finlandia © Subodh Agnihotri/Shutterstock

3.3 Urbanisasi Berkelanjutan Sangat Penting untuk Menuai Manfaat Ekonomi dari Kota

Walaupun urbanisasi secara historis telah dikaitkan dengan perkembangan ekonomi, kenyataannya hubungan ini telah melemah dari waktu ke waktu.[61] Berbagai penjelasan telah dikemukakan untuk menjelaskan fenomena "urbanisasi tanpa pertumbuhan," misalnya globalisasi dan impor pangan berkontribusi pada harga pangan yang lebih rendah atau pertumbuhan demografi yang cepat di negara-negara miskin, mendorong orang berpindah ke kota-kota.[62] Demikian pula, beberapa wilayah di dunia tampaknya berubah menjadi layaknya sebuah kota, namun mengalami pola pertumbuhan dan industrialisasi yang berbeda. Contohnya Afrika versus Asia (lihat Bab 1).[63] Negara dengan urbanisasi dan tingkat pendapatan yang serupa mungkin saja memiliki struktur ekonomi perkotaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa proses urbanisasi memiliki faktor penentu yang berbeda di setiap negara. Akhirnya, bahkan dalam kasus di mana urbanisasi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, ada cara untuk membuat proses urbanisasi tersebut lebih berkelanjutan. Berbagai skenario ini diuraikan lebih rinci di bawah dan harus memperhatikan proses perencanaan wilayah dan perkotaan untuk meningkatkan nilai ekonomi urbanisasi pada permukiman yang sudah ada ataupun yang akan terbentuk di masa depan.

3.3.1 Tingkat Urbanisasi dan Daya Serap Kota

Dunia terus mengalami tren urbanisasi dengan cepat, bahkan jika pandemi COVID-19 akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga terhadap megatren global tersebut. Diproyeksikan sekitar 90 persen dari

pertumbuhan perkotaan yang diharapkan pada tahun 2050 akan terjadi di wilayah yang saat ini kurang berkembang. Seperti yang telah disorot pada Bab 1, pertumbuhan kota yang cepat akan menghadirkan peluang emas, tetapi juga akan menimbulkan tantangan dalam penerapan NUA, dimensi perkotaan dari TPB, dan kerangka kerja pembangunan global lainnya yang relevan dengan urbanisasi keberkelanjutan. Jika populasi perkotaan meningkat terlalu cepat, terutama dalam situasi sistem perencanaan dan kapasitas yang lemah, akan timbul resiko "urbanisasi yang tidak terkendali". Dalam skenario ini, manfaat dari pemusatan di perkotaan akan diimbangi dengan meningkatnya kemacetan, kepadatan, minimnya infrastruktur, tekanan pada ekosistem, dan biaya hidup yang tinggi. Semua hal ini akan mempengaruhi produktivitas secara negatif.[64] Jika daerah perkotaan tidak memiliki kapasitas untuk menyerap pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan penduduk tersebut akan menurunkan produktivitas.[65] Misalnya, jaringan transportasi menjadi penuh sesak dan padat, lonjakan permintaan perumahan akan menyebabkan lingkungan berkembang secara tidak terencana dan teratur, sehingga kota akan kehilangan keuntungan ekonomi yang terkait dengan urbanisasi yang terencana dengan baik. Pola pertumbuhan perkotaan ini akan menghasilkan perebakan kota, dengan banyak pembangunan yang akan terjadi sebelum pembangunan infrastruktur dasar dilakukan. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya dalam penyediaan pelayanan dasar karena rendahnya kepadatan penduduk. Akhirnya, pelayanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan tidak tersedia secara maksimal. Dalam situasi ini akan terjadi kekurangan sekolah dan fasilitas kesehatan, termasuk guru dan tenaga kesehatan terlatih, di mana semua ini diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Akibatnya, akan menghambat ketersediaan SDM yang berkualitas dalam perekonomian.

Jika daerah perkotaan tidak mempunyai kapasitas untuk menyerap pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan penduduk tersebut akan menurunkan produktivitas

Selain meningkatkan efisiensi penggunaan lahan kota yang ada melalui pembangunan yang direncanakan, sangat penting bagi perkotaan untuk merencanakan ekspansi pembangunan dengan baik, khususnya dengan mencadangkan lahan yang dapat dikembangkan untuk memenuhi permintaan masa depan.[66] Lahan ini harus: (i) di pinggiran kota yang sudah berkembang agar dapat mendorong pembangunan yang kompak, berdekatan dan menghindari pembangunan kota baru dari nol (*ex nihilo*) yang biayanya mahal; (ii) mempunyai nilai lingkungan yang lebih rendah, agar meminimalkan dampak lingkungan dari perluasan kota[67] ; dan (iii) dirancang dan dilengkapi pelayanan yang baik, seperti blok perumahan yang jelas, jalan, serta trotoar, dan ruang publik yang aman.[68] Trotoar, jalan, alun-alun, dan taman tetap menjadi milik publik, namun perlu ada hak atas tanah yang jelas untuk bidang tanah di blok perumahan. Seiring perekonomian kota-kota tersebut tumbuh, pengembang akan mengakuisisi bidang tanah, membangun struktur dengan berbagai ketinggian, dan membagi struktur tersebut menjadi unit perumahan atau ruang komersial. Jika pemerintah daerah tidak melihat dengan cara pandang ini, mereka akan mengabaikan kebutuhan penduduk kota masa depan. Biaya untuk pembangunan kembali daerah ini di kemudian hari akan menjadi lebih tinggi.[69]

Saat kota merencanakan pertumbuhan di masa depan, pemerintah mungkin harus mengkaji ulang pengawasan peraturan pengendalian bangunan, seperti koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar bangunan (KDB), batas ketinggian, dan batasan lainnya. Sebuah kajian UN-Habitat menemukan bahwa 85 persen kota mempunyai satu atau lebih peraturan yang membatasi ukuran bangunan di kawasan perluasan mereka (Gambar 3.8). Dari angka tersebut, 68 persen memiliki peraturan KLB maksimum, 59 persen memiliki peraturan ketinggian bangunan maksimum, dan 57 persen memiliki peraturan KDB maksimum. Menariknya, 62 persen dari semua kota, dan 72 persen kota-kota di wilayah yang kurang berkembang, melarang pembangunan rumah susun atau hanya membolehkan di kawasan tertentu kota. Pembatasan tersebut mengurangi pasokan perumahan (sehingga meningkatkan harga rumah), membatasi kesempatan untuk densifikasi dan akibatnya juga membatasi daya serap kota-kota ini.[70] Sebagian besar kota di Afrika masih mempertahankan peraturan standar yang diwariskan dari era kolonial yang

kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan saat ini, yang selanjutnya membuat perumahan tidak terjangkau oleh mayoritas penduduk.[71]

Gambar 3.8 Ketersediaan peraturan terkait dengan ukuran gedung di berbagai daerah

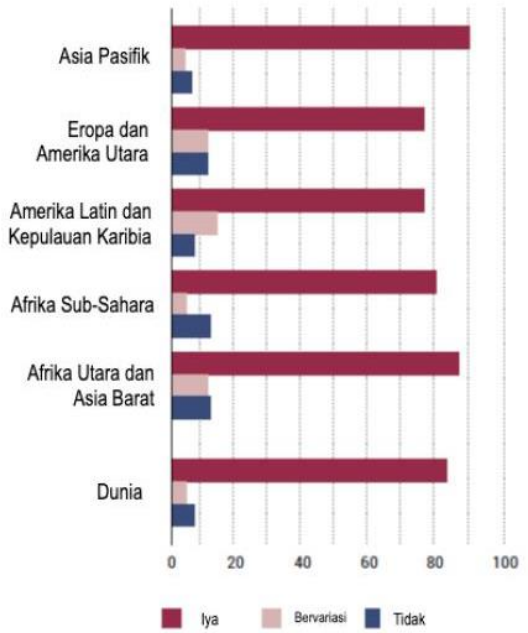

Sumber: UN-Habitat, 2016c

Oleh karena itu, agar keuntungan ekonomi urbanisasi dapat direalisasikan, pertumbuhan eksponensial harus disertai dengan tata kelola, kelembagaan, kebijakan dan kerangka hukum yang diperlukan untuk kota tersebut.[72] Jika tidak, perencanaan yang lemah atau pengendalian pembangunan yang terlalu membatasi akan mengakibatkan krisis regulasi pertanahan yang ditandai dengan maraknya spekulasi dan tumbuhnya informalitas.

Selanjutnya, sangat penting untuk menyelaraskan tujuan kerangka kerja hukum dengan realitas lokal, sehingga legislasi tidak terlalu ambisius menetapkan target yang tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. UN-Habitat telah mengembangkan instrumen penilaian bagi kota dan negara secara sistematis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan hukum perencanaan kota mereka. *Kerangka Kerja Penilaian Hukum Perencanaan* (*Planning Law Assessment Framework*) mengidentifikasi hukum, peraturan, dan perundangan yang dapat diterapkan di kota tersebut, dan diberlakukan di berbagai tingkatan. instrumen penilaian ini telah diuji di Kolombia (2012), Filipina (2013), Rwanda (2014), Mozambik (2014), Mesir (2015) dan Arab Saudi (2016).[73]

Sangat penting untuk menyelaraskan tujuan kerangka kerja hukum dengan realitas lokal, sehingga legislasi tidak terlalu ambisius menetapkan target yang tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal

3.3.2 Komposisi Demografis dan Implikasi dari Pertumbuhan

Tren demografis yang disorot dalam Bab 1 dengan jelas menunjukan komposisi penduduk kota yang berubah. Terdapat variasi pada struktur usia penduduk kota-kota di seluruh dunia dan struktur komposisi pekerja dan non-pekerja.[74] Misalnya, Kota New York memiliki rata-rata dua orang dewasa per anak pada tahun 1850, sekarang terdapat empat orang dewasa per anak. Sebagian besar kota di Tiongkok dan Jepang memiliki 10 orang dewasa per anak, yang menunjukkan rasio ketergantungan pada anak yang sangat rendah. Sebaliknya, kota-kota seperti Dhaka (1,5 dewasa per anak) dan Bamako (satu orang dewasa per anak) memiliki rasio ketergantungan pada anak yang tinggi. Akhirnya, banyak kota di negara maju berada pada fase penduduk yang menua. Milan, Munich, Orlando dan Tokyo memiliki tiga orang dewasa pada usia kerja per satu orang yang lebih tua, sedangkan sebagai perbandingan Bogotá, Istanbul, La Paz dan Manila memiliki 10 usia kerja dewasa per satu orang lebih tua.

Rasio ketergantungan usia yang lebih tinggi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi kota secara negatif.[75] Penduduk yang secara ekonomi aktif dan keseluruhan ekonomi mungkin akan menanggung beban yang lebih besar untuk mendukung dan menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh anak-anak dan yang orang lebih tua, keduanya sering bergantung secara ekonomi pada orang dewasa usia kerja. Rasio ketergantungan yang rendah mendorong pertumbuhan ekonomi. Di wilayah yang mengalami urbanisasi cepat seperti Afrika, misalnya, penelitian

menunjukkan bahwa perubahan persentase dalam populasi usia kerja dapat menyebabkan hingga peningkatan PDB sebesar 1,1 persen. Namun, keunggulan ini juga bergantung pada investasi besar pada SDM dan industri padat karya dan jasa. [76]

Pemerintah daerah dan pusat dapat mendukung rasio ketergantungan yang rendah dengan mengadopsi kebijakan program keluarga berencana, serta memperluas kebijakan pendidikan dan partisipasi angkatan kerja yang akan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi untuk membantu perekonomian mengarahkan melalui transisi demografis. Kebijakan semacam itu biasanya lebih efisien untuk diterapkan pada daerah perkotaan. Dalam jangka pendek dan menengah, kota sebaiknya mengumpulkan data tentang struktur usia dan kesuburan mereka, kematian dan tren migrasi dalam populasi mereka, sejalan dengan Butir Utama 1.1 dari AFINUA.[77] Kota-kota dapat menggunakan informasi ini untuk memperkirakan bagaimana jumlah dan komposisi penduduk akan berkembang di masa depan, yang akan berguna bagi proses perencanaan kota dan wilayah, misalnya, dalam perencanaan lingkungan masa depan mereka dan mengadaptasi pelayanan publik untuk kebutuhan penduduk saat ini.

Misalnya daerah dengan persentase penduduk usia anak yang tinggi harus mempunyai strategi pengembangan sektor yang mempekerjakan pekerja usia muda- dan pada akhirnya meningkatkan dividen demografis yang dihasilkan dari peluang dari peningkatan populasi usia kerja. Penduduk usia anak ini pada akhirnya akan memasuki pasar ketenagakerjaan, akibatnya ekonomi kota akan berkembang jika ada pekerjaan yang tersedia untuk mereka.[78] Upaya tersebut sejalan dengan NUA, di mana Negara Anggota berkomitmen untuk "memanfaatkan bonus demografis perkotaan, dan untuk membuka akses bagi pemuda ke pendidikan, pengembangan keterampilan dan pekerjaan untuk mencapai peningkatan produktivitas dan kemakmuran di pemukiman dan perkotaan."[79]

Seperti yang disorot pada Bab 1 dan 5, proporsi orang tua yang tinggal di kota meningkat pesat, baik di wilayah berkembang maupun maju, dengan implikasi penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga untuk keberlanjutan lingkungan. Perencanaan untuk penduduk perkotaan usia tua membutuhkan inovasi sekaligus sumber daya yang memadai untuk perawatan geriatri dan jasa pelayanan sosial lainnya. Di negara-negara Asia, misalnya, pengeluaran publik terkait usia, seperti pensiun, dan perawatan kesehatan diproyeksikan meningkat, mengikis keuangan publik hingga menjadi 10 persen dari PDB pada tahun 2050.[80] Namun demikian, Negara Anggota harus mendukung populasi usia lanjut mereka sejalan dengan prinsip utama TPB yaitu "tidak meninggalkan siapa pun" dan komitmen "Agenda Baru Perkotaan" untuk menangani implikasi sosial, ekonomi dan spasial populasi yang menua… dan memanfaatkan faktor penuaan sebagai peluang untuk pekerjaan baru yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan."[81] Dalam nada yang sama, inisiatif Kota Ramah Usia WHO mendorong pembelajaran timbal balik antara kota dan komunitas di seluruh dunia (Bab 5). Memang, memastikan akses ke layanan perawatan kesehatan yang sesuai dengan usia, merupakan proses pembelajaran seumur hidup. Dukungan jaringan formal dan informal sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk usia tua yang lebih baik. Kesehatan yang lebih baik memberikan akses ke lebih banyak peluang ekonomi yang memungkinkan penduduk usia tua untuk berkontribusi secara kreatif kepada pembangunan berkelanjutan.[82]

Seorang wanita menjahit pakaian di Pusat Pelatihan di Kota Savar, Dhaka, Bangladesh
©UN-Habitat-Kirsten Milhahn

3.3.3 Kota Konsumtif vs Kota Produktif

Ekonomi aglomerasi biasanya terjadi lebih kuat pada sektor manufaktur dan jasa berketerampilan tinggi, kedua sektor yang cenderung ditemukan di sebagian besar negara Asia atau Amerika Latin, tetapi tidak di Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, atau negara-negara Afrika Utara. [83]

Pola urbanisasi dan industrialisasi bervariasi di berbagai wilayah di dunia. Kuwait, Gabon, Arab Saudi, Libya, Aljazair, Angola dan Nigeria sama halnya dengan wilayah urban Uruguay, Korea Selatan, Meksiko, Malaysia, Afrika Selatan dan Tiongkok, namun memang "negara-negara di awal daftar ini belum menjadi negara industri semaju negara terakhir pada daftar ini."[84] Dapat dikatakan, urbanisasi tidak harus dikaitkan dengan revolusi industri atau jasa, karena ada faktor lain seperti ekspor SDA yang dapat mendorong urbanisasi. Seiring negara menemukan SDA, baik minyak, berlian, atau kakao, tingkat pendapatan mereka akan meningkat. Sebagai penerima hasil dari ekspor sumber daya ("*resource rents*"), negara-negara penerima akan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk barang-barang dan layanan yang diproduksi di kota, maka peluang ekonomi akan dibuat di kota-kota. Selain itu, jika *resource rents* digunakan untuk mengimpor makanan dan kota berfungsi sebagai tempat perdagangan untuk ekspor dan impor, maka akan menjadi lebih murah untuk menetap di kota. Sebagai akibatnya, lebih banyak migran akan tertarik ke kota.

Gambar 3.9 menegaskan bahwa hubungan antara urbanisasi dan pendapatan yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 tidak berbeda secara signifikan antara negara kaya sumber daya dan negara miskin sumber daya. Dengan kata lain, negara yang lebih kaya akan lebih mengalami transformasi urban, tidak peduli apakah industrialisasi (dan/atau jasa) atau SDA yang menjadi sumber pendapatan mereka yang lebih tinggi. Gambar 3.10 kemudian menggambarkan hubungan antara industrialisasi dan urbanisasi pada negara pengekspor sumber daya versus negara non-pengekspor sumber daya. Untuk negara-negara non-pengekspor sumber daya, urbanisasi sangat kuat terkait dengan industrialisasi. Hubungan yang sama tidak terlihat di negara pengekspor sumber daya.

Kota yang konsumtif, karena struktur ekonominya, tidak akan menghasilkan pertumbuhan produktivitas yang sama dengan kota yang produktif

Urbanisasi di negara-negara kaya sumber daya didorong oleh efek pendapatan dari dana abadi; orang mengonsumsi *resource rents* di kota-kota. Karena sebagian besar pekerja kota di negara-negara ini bekerja di sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan (khususnya, perdagangan, transportasi, layanan pribadi, dan layanan pemerintah), kota-kota ini disebut sebagai "Kota konsumsi." Di sisi lain, kota-kota di negara miskin sumber daya cenderung menjadi "kota produksi", dengan lebih banyak pekerja di bidang manufaktur atau di sektor jasa yang dapat diperdagangkan seperti keuangan dan pelayanan bisnis. Contohnya di perkotaan negara yang kaya sumber daya Angola, Pantai Gading, Kuwait, Nigeria dan Arab Saudi, 60-70 persen individu bekerja di sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan (sebagaimana didefinisikan di atas) versus 5–10 persen di bidang manufaktur dan jasa yang dapat diperdagangkan.[85] Di daerah perkotaan negara-negara dengan sumber daya yang relatif miskin seperti Tiongkok, Lesotho, Malaysia dan Mauritius, pekerja yang bekerja di sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan mencapai sekitar 35–40 persen dan 35–45 persen untuk masing-masing negara. Lebih lanjut lagi, pada sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan, pekerja pemerintah mewakili 5–10 persen pekerja di negara-negara miskin sumber daya, 10 persen di negara kaya sumber daya Afrika dan 20 persen di negara-negara kaya sumber daya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa* (MENA)). Oleh karenanya, kota yang konsumtif, karena struktur ekonominya, tidak akan menghasilkan pertumbuhan produktivitas yang sama dibanding dengan kota yang produktif.

Gambar 3.9 Hubungan urbanisasi dan pendapatan untuk sumber ekspor dan negara lain

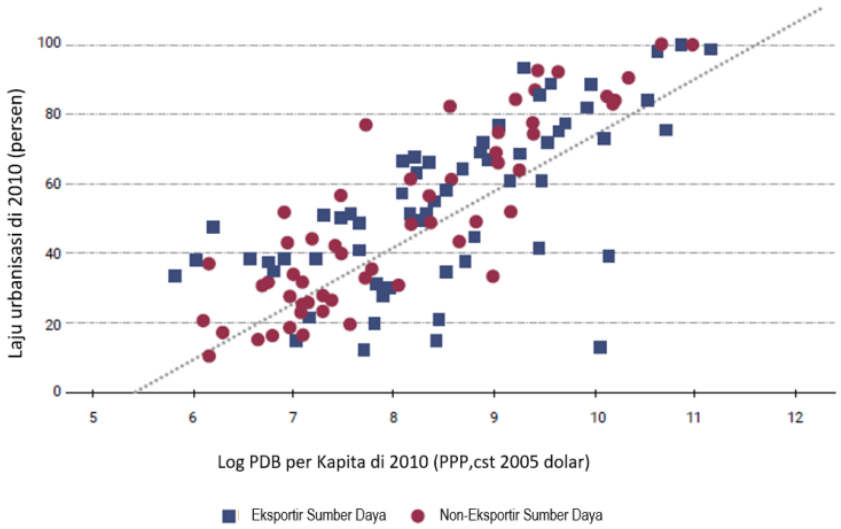

Sumber: Gollin dkk. 2016

Gambar 3.10: Output urbanisasi, industri, dan jasa

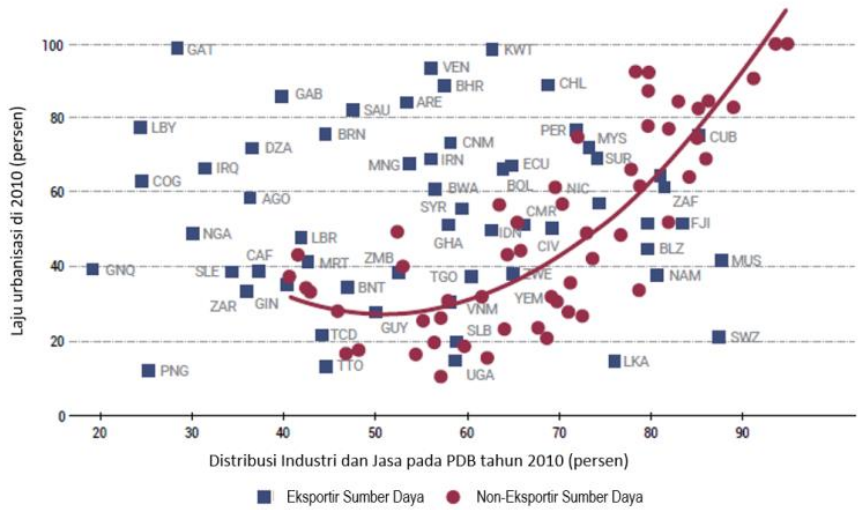

Sumber: Gollin dkk. 2016

Selain itu, pemerintah beberapa negara kaya sumber daya berperan sebagai agen utama untuk pertumbuhan kota dan sebagai akibatnya sistem perkotaan mereka lebih condong ke arah kota yang mendominasi (*primate cities*) atau kota-kota yang mempunyai populasi yang lebih besar dibanding kota-kota lainnya secara tidak proporsional. Hal ini terjadi di Angola, Chile, Gabon, Guinea Ekuatorial dan Mongolia, di mana tingkat dominasi (*primacy rate*) berada pada kisaran 40–60 persen. Negara Teluk yang kaya akan minyak juga memiliki tingkat dominasi yang sangat tinggi. Memang, *resource rents* secara tidak proporsional "dihabiskan" untuk barang dan jasa (termasuk layanan pemerintah) yang diproduksi di kota yang paling penting secara administratif dan/atau ekonomi. Karena struktur pemerintahan terpusat mereka, negara-negara kaya sumber daya juga sering kurang mampu mengartikulasikan dengan jelas mekanisme inklusi dan partisipasi pemangku kepentingan publik dalam tata kelola perkotaan. Pada gilirannya, pendekatan *top-down*

mereka cenderung mengadopsi kebijakan perkotaan yang bias atau kebijakan yang mendukung kota yang mendominasi.[86] Secara umum, kebijakan yang dihasilkan dari perencanaan terpusat akan membatasi pengelolaan urbanisasi yang proaktif di tingkat pemerintah yang lebih rendah, sehingga mengarah pada pola yang tidak berkelanjutan, seperti perebakan kota, yang mengakibatkan pengembangan kota yang tidak efisien. Di beberapa kota di negara Teluk yang kaya minyak, misalnya, praktik perencanaan yang dilakukan telah mendorong terciptanya kepadatan perkotaan yang rendah, hal ini juga disebabkan oleh ketersediaan lahan di beberapa negara, preferensi untuk perumahan tunggal untuk satu keluarga, dan juga ketidakmampuan untuk mengontrol pembangunan di lahan yang telah ditentukan.

Kota meningkatkan produktivitasnya karena skala ekonomi pada infrastruktur produktif dan efek aglomerasi. Namun, di kota-kota konsumsi, ketiadaan kebutuhan untuk fokus pada pengoptimalan produksi sektor swasta memberikan insentif terbatas untuk berinvestasi dalam infrastruktur produktif seperti jalan, rumah sakit dan sekolah. Justru, lebih sering ada investasi publik dalam proyek pembangunan dengan profil tinggi seperti monumen, pusat konferensi, dan tempat olahraga yang seluruhnya ini (mungkin) tidak menghasilkan pengembalian investasi. Begitu juga dengan sektor ekonomi di kota konsumsi, mereka tidak mendapat manfaat dari potensi generasi dan difusi pengetahuan karena mereka tidak terlalu berfokus pada pengetahuan.

Kota berpotensi menjadi mesin pertumbuhan, hanya jika memiliki industri sektor swasta yang produktif dan dapat memanfaatkan skala ekonomi dan aglomerasi yang ditawarkan kota. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan industri ini seharusnya tidak didukung oleh subsidi publik yang besar dan umumnya tidak efisien. Seperti yang dinyatakan dalam *Laporan Kota-Kota Dunia edisi 2016*, pemerintah perlu beralih "dari intervensi sektoral ke perencanaan kota strategis dan kebijakan perkotaan yang lebih komprehensif. "[87] Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar industri dapat tumbuh secara organik, investasi pada infrastruktur produktif dibutuhkan, disertai dengan lembaga yang kuat dan responsif (Bab 1 dan 7). Ada beberapa kasus ketika institusi yang kuat telah membantu mencapai pembangunan jangka panjang dari produksi sumber daya. Misalnya, demam emas menyebabkan tumbuhnya kota-kota seperti San Francisco, Denver, dan Seattle pada abad ke-19, sementara ledakan minyak (*oil boom*) menjelaskan mengapa Calgary, Dallas-Ft , Worth, dan Houston adalah wilayah metropolitan besar Amerika Utara saat ini. Baik di Kanada dan AS, lembaga federal didirikan sebelum ditemukannya SDA. Dengan demikian, *resource rents* digunakan untuk berinvestasi pada infrastruktur produktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan kota-kota di negara tersebut dan perekonomian nasional mereka. Didukung juga dengan kebijakan yang mendorong sektor swasta untuk tumbuh, kota-kota ini pada akhirnya berubah menjadi kota industri dan sekarang mengkhususkan pada jasa yang dapat diperdagangkan, terutama teknologi dalam kasus bekas kota dengan demam emas pada masa lampau.

Kota berpotensi menjadi mesin pertumbuhan, hanya jika memiliki industri sektor swasta yang produktif dan dapat memanfaatkan skala ekonomi dan aglomerasi yang ditawarkan kota

Dalam konteks ini, kebijakan nasional harus diarahkan untuk mencegah efek dari apa yang disebut "penyakit Belanda", di mana penemuan SDA, secara paradoks, dapat merugikan ekonomi negara saat sektor lain melambat. Cara menangkal penyakit Belanda antara lain memperkuat lembaga dan memastikan warga negara memiliki kebebasan untuk mengejar peluang ekonomi baru. Selain itu, di negara dengan inefisiensi birokrasi atau korupsi di tingkat nasional, tingkat pemerintah daerah akan kurang mampu menangani tantangan yang timbul dari pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah mereka. Terakhir, negara kaya sumber daya harus berfokus pada penciptaan kondisi kota mereka menjadi pusat produksi, bukan pusat konsumsi publik.

Pemandangan udara lingkungan yang kompak © Jaggat Rashid/Shutterstock

3.3.4 Keterjangkauan, Kekompakan, dan Konektivitas

Seiring pertumbuhan kota, sebagian besar populasi akan dapat mengakses manfaat yang terdapat di kota. Memang karena kota menawarkan manfaat ekonomi, perusahaan ingin ditempatkan, dan penduduk menginginkan untuk tinggal, di perkotaan. Namun, seiring kota tumbuh menjadi lebih besar, faktor eksternalitas akan muncul, yang akan mempersulit akses untuk perumahan yang terjangkau, tenaga kerja dan berbagai pelayanan.[88] Akan ada peningkatan tekanan pada tanah, pasar real estat komersial dan perumahan. Terdapat pula peningkatan tekanan terhadap jaringan transportasi, yang akan berkontribusi pada kemacetan — dan efek negatif lingkungan dan kesehatan terkait dengan hal tersebut. Selain itu, masyarakat miskin perkotaan cenderung kurang dapat menikmati manfaat ekonomi di perkotaan, sehingga membatasi nilai kontribusi ekonomi mereka pada ekonomi perkotaan (Bab 5). Mereka juga lebih mungkin menderita menetap di perkotaan karena biaya perumahan yang tinggi, kemacetan, dan polusi (Bab 4 dan 5).

Sebuah studi oleh UN-Habitat hanya menemukan 13 persen kota-kota di dunia memiliki perumahan yang terjangkau.[89] Rumah tangga perkotaan di berbagai daerah menghabiskan porsi pendapatan mereka secara tidak proporsional untuk perumahan. Masyarakat miskin di perkotaan berada pada resiko tertinggi terbebani oleh biaya perumahan. Di 16 negara-negara OECD, misalnya, lebih dari 40 persen populasi berpenghasilan rendah menghabiskan lebih dari 40 persen dari pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk hipotek perumahan pada tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi untuk penyewa perumahan berpenghasilan rendah di 14 negara-negara OECD.[90] Seiring dengan kenaikan harga rumah, penduduk yang tidak mampu harus mencari tempat tinggal yang jauh dari kota, terutama masyarakat miskin perkotaan yang harus

tinggal di pinggiran kota. Permukiman kumuh seperti Ciudad Bolivar di Bogotá atau perumahan berpenghasilan rendah di daerah pinggiran seperti rumah Program Pembangunan dan Rekonstruksi (Reconstruction and Development Programme (RDP)) di Afrika Selatan dan Perumahan Berpenghasilan Rendah (Habitation à Loyer Modéré (HLM)) di Prancis.[91] Akibatnya, kota menjadi kurang produktif dan kurang adil, sehingga memperkecil peluang untuk memenuhi TPB Target 11.1: "pada tahun 2030, pastikan akses untuk semua perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman, dan terjangkau dan merevitalisasi daerah kumuh."[92]

Fakta bahwa kota terlalu mahal untuk ditinggali orang miskin mengancam "hak atas perumahan yang layak" mereka dan karenanya mengancam "Hak atas kota" (Bab 5) .[93] Meskipun adanya perbaikan kawasan kumuh, sertifikasi lahan, dan program perumahan sosial lainnya akan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk kota yang lebih miskin (Bab 2 dan 5), kota tidak dapat memenuhi permintaan ruang kota yang meningkat pesat tanpa mengelola densifikasi. Kepadatan berkelanjutan itu memastikan ekspansi kepadatan ke atas daripada ke samping yang dapat dicapai melalui pembangunan hunian dan real estat komersial bertingkat. Pada saat yang sama, kota dapat bekerja untuk melakukan konfigurasi ulang permukiman padat agar membuat pemukiman tersebut lebih layak huni dan produktif.[94] Modifikasi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan jarak fisik yang didorong oleh COVID-19, menyerukan untuk penataan kembali ruang publik selama dan setelah pandemi.

Penggunaan lahan yang tidak efisien memperburuk perebakan kota yang padat lahan. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat konsumsi tanah melalui perluasan perkotaan melebihi pertumbuhan penduduk dalam beberapa dekade terakhir, tren yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan. Misalnya, antara tahun 2000 dan 2014, area daratan yang ditempati oleh kota tumbuh 1,28 kali lebih cepat dari populasi mereka.[95] Bersamaan dengan penurunan kepadatan, kota menghadapi penurunan proporsi wilayah yang direncanakan (Gambar 3.11).[96] Implikasinya, jika tren ini terus berlanjut, akan ada peningkatan yang stabil dalam unit biaya operasi daerah untuk melayani daerah perkotaan. Kota yang terus mengalami penurunan kepadatan populasi dengan cepat, akan mengalami penurunan daya saing.

Kota yang terus mengalami penurunan kepadatan populasi dengan cepat, akan mengalami penurunan daya saing

Rasio tingkat konsumsi lahan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk adalah indikasi kapasitas perencanaan dan manajemen kota (TPB Target 11.3), yaitu kemampuan untuk mencapai pembangunan terpadu dan terhubung yang kompak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan investasi yang memadai untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan dengan baik-kota yang telah direncanakan dan dirancang, di antara aspek lainnya dari urbanisasi berkelanjutan (Bab 8). Kota yang terencana dan yang dirancang dengan baik akan dapat mengoptimalkan ekonomi aglomerasi serta mengantisipasi ekspansi dengan kebijakan yang tepat — seperti contohnya dalam perluasan kota — yang akan mendorong pertumbuhan serta mengawasi spekulasi yang dapat terjadi terkait perebakan kota.

Komponen penting lain untuk kota yang sukses adalah mobilitas penduduk yang berkelanjutan, namun hanya setengahnya (50 persen) penduduk perkotaan memiliki akses mudah ke transportasi umum (Gambar 3.2). Ketika pekerja menghabiskan terlalu banyak waktu dalam perjalanan, mereka kehilangan waktu yang dapat mereka gunakan untuk bekerja, mengurus tugas rumah tangga atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Data lalu lintas menunjukkan bahwa pengemudi di lima kota-kota padat di dunia — Mumbai, Bogotá, Lima, New Delhi dan Moskow — menghabiskan rata-rata 55–65 per persen waktu perjalanan lebih banyak karena terjebak dalam kemacetan.

Mengingat dampak negatif kemacetan lalu lintas terhadap produktivitas, investasi dalam sistem transportasi umum dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan di mana akses mereka ke peluang ekonomi terbatasi oleh segregasi sosio-spasial (Bab 5). Angkutan umum massal adalah kunci untuk transisi mencapai kota dengan emisi karbon yang rendah, berketahanan, dan inklusif (Bab 4).[98] Di daerah dengan akses sulit ke angkutan publik, moda transportasi informal telah muncul. Namun, mode seperti itu kurang efisien, kurang

aman, dan kurang ramah lingkungan dibandingkan angkutan umum. Dalam kondisi yang ideal, angkutan umum bisa mengurangi total jumlah waktu perjalanan dan menciptakan distribusi penduduk yang efisien dan kegiatan ekonomi di sebuah kota. Transformasi seperti itu dimungkinkan bahkan di kota dengan jaringan transportasi informal yang kuat. UN-Habitat bekerja dengan kota-kota tersebut untuk memperkuat kebijakan dan pedoman untuk akses transportasi yang adil dan berkelanjutan. UN-Habitat telah mengembangkan perangkat untuk mendukung penciptaan transportasi umum yang aman, berkelanjutan, dan dapat diakses untuk perempuan dan kelompok rentan.[99] Dengan terjadinya pandemi, dengan merangkul operator transportasi informal dalam upaya pemulihan COVID-19 memberikan peluang untuk membuat "layanan ini, lebih aman, dan lebih efisien, di saat yang sama melindungi jutaan pekerjaan."[100]

Bagaimana kota direncanakan, dirancang, dan dibangun menunjukan hal apa saja yang diprioritaskan di kota tersebut. Proses perencanaan dapat membantu atau menghambat pertumbuhan dan kesempatan untuk semua

Terakhir, seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, faktor yang mendorong perubahan yang teridentifikasi dalam NUA adalah hal mendasar untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan. Misalnya, perencanaan perkotaan dan wilayah adalah katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan dan inklusif, yang akan menghasilkan kerangka kerja untuk mencapai peluang ekonomi baru, peraturan pasar pertanahan dan perumahan, dan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tepat waktu serta memadai.[101] Cara kota direncanakan, dirancang, dan dibangun menjelaskan banyak hal, terutama faktor apa yang dipandang penting di kota tersebut, dan proses perencanaan bisa membantu ataupun menghalangi pengembangan peluang untuk semua.[102] Jika biaya perumahan dan transportasi terhitung tinggi — misalnya, karena hak milik yang didefinisikan dengan buruk dan peraturan penggunaan lahan membatasi pasokan perumahan, kurangnya investasi transportasi umum sistem dan kebijakan yang tidak mengarah pada pembangunan berorientasi transit — pertumbuhan ekonomi kota akan mengalami keterbatasan. Keberlanjutan dan produktivitas saling berkesinambungan. Membuat kota lebih terjangkau, inklusif, kompak dan terhubung adalah tujuan yang diinginkan yang kesemuanya mempunyai nilai ekonomi tersendiri.

Gambar 3.11: Evolusi perencanaan di dalam perluasan kota-dengan contoh dari total 30 kota

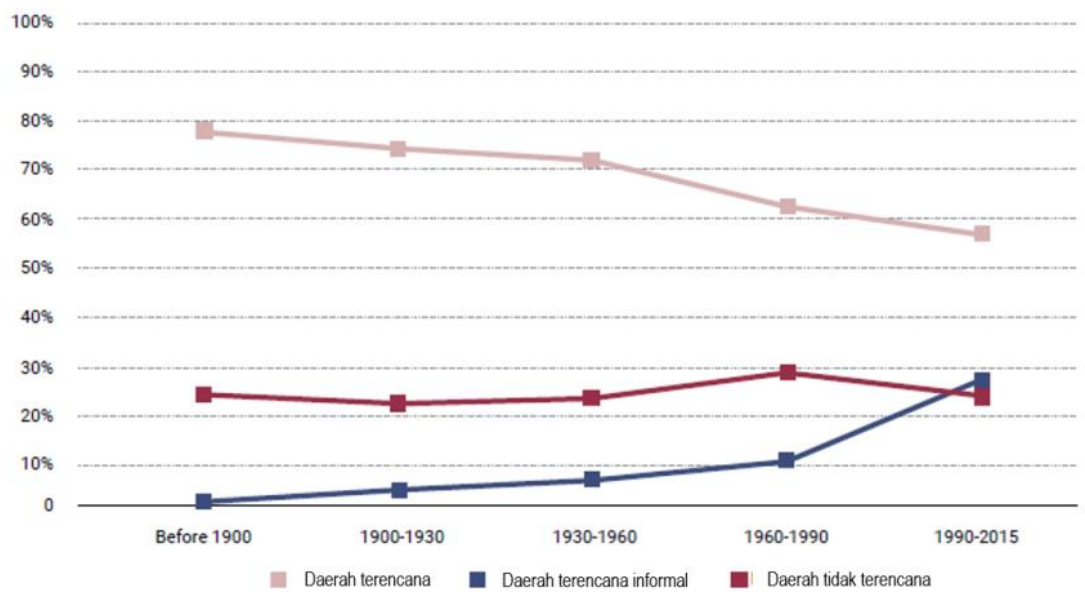

Sumber: UN-Habitat, 2016c

Kotak 3.4: Jaringan transportasi umum: BRT dan manfaat ekonomi kota

Kota-kota di negara berkembang semakin berinvestasi pada angkutan massal untuk mengelola kemacetan yang terkait dengan pertumbuhan urban yang cepat. Bogotá TransMilenio (dibuka pada tahun 2000) dipandang sebagai standar emas *Bus Rapid Transit* (BRT), dengan penumpang harian sekitar 2,5 juta penumpang. TransMilenio memiliki manfaat ekonomi yang besar, memungkinkan pekerja memiliki mobilitas yang lebih besar dan mencapai pencapaian yang signifikan terhadap pengurangan waktu tempuh untuk para komuter. Manfaat serupa telah diamati di kota-kota yang baru-baru ini menerapkan proyek BRT. Di Dar es Salaam, sistem BRT (DART) telah berubah, baik secara sosial maupun ekonomi; pencapaian penghematan waktu perjalanan sekitar 16 hari per tahun untuk para komuter. Pada awal tahun 2020, terdapat 172 kota di dunia mengoperasikan BRT dengan penumpang harian 34 juta penumpang.

Data BRT Global

Kawasan	Penumpang per hari	Jumlah Kota	Panjang (km)
Afrika	491,578	5	131
Asia	9,471,593	44	1,624
Eropa	1,613,580	44	875
Amerika Latin	20,939,780	55	1,835
Amerika Utara	912,598	19	588
Oseania	436,200	5	109

Sumber: https://brtdata.org/(version 3.48, Januari 13, 2020); ITDP (https://staward.org/winners/2018-dar-es-salaam-tanzania)

3.4 Bagaimana Berbagai Tingkatan Pemerintah dapat Membantu Kota untuk Berkembang

Pemerintah daerah, regional, dan pusat memiliki peran dalam memastikan daerah perkotaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang inklusif. Inklusi ekonomi sangat terkait dengan fungsi perencanaan di semua tingkatan pemerintah, partisipasi aktif berbagai aktor yang mengadvokasi kemauan politik yang lebih kuat, serta kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Koneksi antara inklusi ekonomi dan sosial dan kebebasan politik muncul sebagai tanggapan atas *rent-seeking* yang ekstensif oleh elit politik dan ekonomi yang seringkali mendominasi ekonomi perkotaan, sehingga menghasilkan manfaat ekonomi urbanisasi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.[103]

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mencari cara untuk memperkuat kapasitas produktif semua penduduk dengan mereformasi kerangka hukum dan peraturan serta mengintegrasikan perencanaan dan desain kota dengan langkah-langkah yang memberikan keamanan yang lebih besar kepada pekerja terutama yang bekerja di perekonomian informal.[104] Langkah-langkah ini harus disusun dengan pendekatan berbasis hak dan sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO) untuk proses transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal.[105] Dalam hal ini, beberapa negara telah memulai melembagakan tata kelola yang partisipatif. India misalnya, memberlakukan *Pedagang Kaki Lima – Akta Proteksi Penghidupan dan Regulasi Pedagang Kali Lima 2014* (*Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act)*) yang mensyaratkan kota untuk membentuk komite penjual kota untuk mengatur pedagang kaki lima, dengan setidaknya mengikutsertakan 40 persen representasi pedagang di dalam komite.[106] Kota juga dapat mendukung model ekonomi alternatif untuk mengembangkan pekerjaan yang layak sejalan dengan TPB 8 dan NUA, sambil membina usaha kecil, sedang, dan mikro (Bab 7).

Pandemi COVID-19 semakin menunjukkan kerentanan ekonomi informal di perkotaan. Usaha mikro dan kecil informal yang mencapai 80 persen usaha di seluruh dunia umumnya berada di luar jangkauan kebijakan publik, misalnya, kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan pekerjaan dan perusahaan, dan

memberi bantuan penghasilan bagi para pekerja. Dalam menanggapi dan mengatasi keadaan krisis seperti sekarang ini, semua tingkat pemerintahan perlu memberlakukan mekanisme kebijakan yang adil dan inklusif. Misalnya, bantuan pendapatan dapat diperpanjang melalui skema jaminan sosial non-kontribusi atau program bantuan langsung tunai yang sudah dilakukan.[107] Di Kota Meksiko, misalnya, pemerintah kota telah meluncurkan program transfer uang tunai untuk para pekerja dengan upah harian. [108]

Bagaimana kawasan perkotaan secara spasial dirancang sangat terkait dengan bagaimana kawasan tersebut menghasilkan nilai ekonomi, terutama kapasitas untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Semua tingkat pemerintahan juga memainkan peranan penting dalam mengelola kota dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan di mana akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya dengan efektif melaksanakan perencanaan dan desain kota terpadu yang menghasilkan bentuk perkotaan yang kompak, sebuah kota yang direncanakan pada jalur untuk menghasilkan eksternalitas yang selaras dengan tujuan keberlanjutan. Fungsi-fungsi ini sejalan dengan tujuan penting NUA "untuk mengoptimalkan dimensi spasial dari perkotaan dan mencapai hasil positif dari urbanisasi."[109] Selain itu, bagi AFINUA, "urbanisasi yang baik tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui desain."[110]

Bagaimana kawasan perkotaan secara spasial dirancang sangat terkait dengan bagaimana kawasan tersebut menghasilkan nilai ekonomi, terutama kapasitas untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

Dalam hal perencanaan untuk perluasan kota, berbagai tingkatan pemerintah — diperlukan untuk bekerja dalam koordinasi dan kolaborasi dengan entitas publik dan pemangku kepentingan lainnya — yang bertujuan untuk: (i) menciptakan proyeksi realistis pertumbuhan perkotaan di masa depan berdasarkan informasi demografis yang tersedia serta sejarah perluasan ruang suatu wilayah; (ii) mengidentifikasi ekspansi wilayah yang berdekatan langsung dengan perkotaan yang ada dan dalam kaitannya dengan fitur dan risiko yang terkait dengan alam; dan (iii) perencanaan jaringan atau rute untuk jalan arteri dan mobilitas yang berkelanjutan. Malaysia, misalnya, telah melakukan pendekatan proaktif untuk pengembangan koridor ekonomi di Iskandar (Kotak 3.4). Fungsi perencanaan berwawasan ke depan sangat penting untuk menghindari pengembangan tidak terencana, yang ditandai dengan *curvilinear loop* atau desain jalan buntu (*cul-de-sac*) dan hak milik properti yang tidak tercatat dengan baik. Hal ini dapat diamati di daerah kumuh negara berkembang, dari Kibera di Kenya hingga Dharavi di India, hingga komunitas eks-urban di Amerika Utara dan Australia. Memang, suatu daerah yang sudah terlanjur dikembangkan, dengan pembagian tanah dan struktur, akan menjadi lebih mahal ketika ingin dibangun kembali dengan cara yang efisien.[111] Selain itu, kota yang terencana dengan baik akan menawarkan kualitas hidup yang lebih tinggi, sehingga menarik investasi dan pekerja berkeahlian yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi aglomerasi.

Kota yang menawarkan kualitas hidup rendah biasanya memiliki keterbatasan pertumbuhan relatif terhadap potensi mereka. Jadi, selain infrastruktur dan pelayanan sosial yang dibutuhkan, pemerintah daerah berada di garis depan dalam mengatasi tantangan berkaitan dengan keberlanjutan. Hasilnya, pemerintah daerah dan pusat perlu memberi insentif kepada perusahaan dan penduduk untuk meminimalkan biaya sosial yang mereka hasilkan, misalnya kontribusi mereka terhadap kemacetan lalu lintas atau polusi. Pemerintah daerah mungkin, kadang-kadang, menggunakan peraturan penggunaan lahan yang relevan seperti zonasi dan jalur hijau untuk memastikan keberlanjutan. Untuk memastikan perumahan yang terjangkau, kota dapat mengadopsi strategi yang meningkatkan pasokan untuk penduduk lokal. Paris, misalnya, meningkatkan pajak sebanyak tiga kali untuk 100.000 rumah kedua. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemilik rumah agar menjual atau menyewakan properti mereka untuk meningkatkan pasokan perumahan lebih banyak untuk penduduk tetap kota.[112] Contoh lainnya, Vancouver menerapkan Pajak Rumah Kosong (*Empty Home Tax* (*Vacancy Tax*)) yang hasil pengumpulan pajak akan diinvestasikan kembali untuk pembangunan perumahan yang terjangkau.

Kotak 3.5: Iskandar Malaysia: Sebuah koridor katalisator pembangunan

Dicanangkan sebagai koridor katalisator pembangunan, Iskandar Malaysia adalah salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di Malaysia dalam konteks populasi dan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2025, populasi diproyeksikan meningkat dua kali lipat dari 1,6 juta pada tahun 2006 menjadi 3 juta, sedangkan PDB diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari tujuh persen. Dikembangkan pada tahun 2006, Iskandar Malaysia sebagian besar didanai oleh badan investasi pemerintah federal, Khazanah Nasional Berhad. Tujuan didirikannya Iskandar Malaysia adalah untuk memperkuat daya saing ekonomi Malaysia dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Otoritas Pembangunan Daerah Iskandar (IRDA) didirikan berdasarkan Undang-Undang IRDA (Undang-undang 664) tahun 2007 untuk mengawasi pengembangan Iskandar Malaysia. UU 664 menetapkan kekuasaan IRDA untuk memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan program pembangunan ekonomi untuk mendukung visi Iskandar Malaysia. IRDA telah merumuskan Rencana Pengembangan Komprehensif dan beberapa cetak biru sektoral, termasuk Cetak Biru Transportasi 2010-2030 dan Masyarakat Rendah Emisi Karbon untuk Iskandar 2025.

Karena letak geografisnya yang strategis sebagai pintu gerbang di selatan menuju Malaysia dan negara tetangga Singapura, Iskandar Malaysia diposisikan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lintas perbatasan. Kawasan ekonomi Iskandar terbagi menjadi lima zona unggulan. Setiap zona andalan adalah area prioritas untuk investasi besar dan pengembangan baru termasuk taman industri, pusat pendidikan dan taman kesehatan.

Sumber: UN-Habitat, 2019c.

Kota yang menawarkan kualitas hidup yang rendah biasanya mempunyai batasan pertumbuhan akan potensi kota tersebut

Struktur administrasi provinsi dapat menjadi katalisator atau menghambat realisasi ekonomi aglomerasi. Aglomerasi perkotaan, di mana merupakan bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas yang menghubungkan mereka dengan aglomerasi lain, kota dan desa, pada umumnya merupakan entitas ekonomi yang mandiri. Saat lokalitas berkembang dan bergabung dengan satu sama lain, wilayah kota akan berkembang. Di situasi di mana struktur administrasi provinsi tidak tanggap dan responsif terhadap dinamika seperti itu, seringkali fungsi yang tumpang tindih, skala ekonomi tidak akan tercapai dan fragmentasi kebijakan menjadi hal yang umum. Fragmentasi kebijakan telah terbukti berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi regional (seperti yang ditunjukkan oleh per kapita PDB) .[113] Pengaturan tata kelola yang baru di seluruh batas administratif dan sektor yang ada diperlukan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan di semua tingkatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghasilkan struktur tata kelola metropolitan dan mekanisme kolaborasi (lihat Bab 7).

Urbanisasi yang berkelanjutan membutuhkan pembiayaan kota yang berkelanjutan. Seperti yang disoroti pada bagian sebelumnya, daerah perkotaan adalah penyumbang terbesar peningkatan kekayaan negara. Namun, di kebanyakan negara berkembang, kota mengalami keterbatasan finansial di mana kota hanya mampu menghasilkan pendapatan tahunan sebesar, berkisar dari USD 100 hingga USD 500 per penduduk. Angka itu bahkan lebih rendah (kurang dari USD 50) di kota-kota kecil di Afrika dan Asia Selatan.[114] Akibatnya, pemerintah kota ini selalu bergantung kepada bantuan pemerintah pusat untuk melakukan investasi infrastruktur dan menyediakan berbagai pelayanan publik. Di Afrika misalnya, bantuan ini mencakup 70–80 persen keuangan pemerintah kota.[115] Di sisi lain, kota-kota di negara maju relatif kurang bergantung pada bantuan antarpemerintah. Di kota seperti New York, Stockholm, Seattle, dan Tokyo, pendapatan pemerintah daerah berbasis lebih dari USD 3.000 per kapita setiap tahun. Kota-kota seperti itu lebih siap untuk menarik perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan dari hak kepemilikan yang kuat dan berkontribusi pada pendapatan kota dan nasional.[116] Pemerintah kota di negara berkembang perlu membangun kapasitas produktif dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan

endogen serta menjalankan tata kelola keuangan yang hati-hati sehingga memastikan keuangan berkelanjutan (Bab 8). Di daerah di mana perpajakan dan biaya dipungut, pertimbangan keadilan seperti pendapatan progresif harus diperhitungkan untuk memastikan kemakmuran inklusif.

Urbanisasi yang berkelanjutan memerlukan pembiayaan kota yang berkelanjutan

Terakhir, sebagaimana disoroti di Bab 6 dan 8, otoritas lokal juga perlu memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional di tengah potensi penurunan pendapatan. Selain meningkatkan efisiensi, memanfaatkan kemajuan teknologi secara tepat dapat membuat sebuah kota menjadi "pintar" dalam hal menjadi lebih responsif, dan juga peningkatan kapasitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan inovatif untuk memenuhi TPB dan NUA.

3.5 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan

Meskipun pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejarah dunia dengan tegar menunjukkan bahwa keberlanjutan proses urbanisasi di dunia tidak dapat dihindari. Dengan itu, bab ini mengisyaratkan bahwa keberlanjutan dan produktivitas di kota bisa berjalan beriringan. Kota besar dan kecil berpotensi menciptakan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua. Agar kota menjadi motor pertumbuhan dan menghasilkan manfaat ekonomi dari urbanisasi yang berkelanjutan, bab ini telah menempatkan penekanan pada area utama berikut di berbagai tingkatan pemerintah untuk mencapai nilai ekonomi dari urbanisasi yang berkelanjutan:

- Memperkuat kapasitas produktif di kota dan memastikan bahwa kerangka hukum dan peraturan tersedia adil untuk semua.
- Memastikan bahwa spasial kota dikelola dengan cara paling efisien dan berkelanjutan yang akan meningkatkan daya serap kota dan menopang pertumbuhan ekonomi.
- Mengawasi kegiatan pengendalian pembangunan untuk memastikan bahwa tujuan kerangka hukum disesuaikan dengan realitas lokal dan tidak menjadi halangan bagi pertumbuhan ekonomi.
- Memprioritaskan strategi peningkatan pasokan perumahan yang terjangkau dan, jika memungkinkan, klusterisasi pekerjaan dengan area tempat tinggal untuk mengurangi jarak perjalanan.
- Melakukan dokumentasi secara teratur mengenai data demografis untuk melakukan proyeksi perkembangan dan jumlah penduduk dan komposisi demografi untuk Menyusun kebijakan partisipasi angkatan kerja, serta kebijakan perencanaan perkotaan dan wilayah.
- Mengadopsi kebijakan keluarga berencana, pendidikan dan partisipasi angkatan kerja yang memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi melalui transisi demografis dari ledakan usia muda ke usia tua ("*silver tsunami*") di kota-kota yang menua.
- Menetapkan hak kepemilikan yang jelas untuk memfasilitasi efisiensi kegunaan lahan, pasar perumahan dan real estat komersial.
- Memanfaatkan skala ekonomi dalam penyediaan berbagai jenis infrastruktur dan pelayanan sosial.
- Mendorong tata kelola perkotaan dan investasi yang baik untuk infrastruktur produktif, terutama di dan negara kaya sumber daya dan negara yang mengalami pertumbuhan demografis perkotaan yang pesat.
- Memanfaatkan sumber keuangan endogen.

Pemerintah daerah di negara berkembang perlu membangun kemampuan yang produktif dan memanfaatkan sumber keuangan dari dalam serta menerapkan praktik manajemen keuangan yang penuh kehati-hatian untuk memastikan keuangan yang berkelanjutan

Catatan Akhir

1. Penggunaan data Bank Dunia, 2019d, kota memenuhi 2,85 persen wilayah daratan bumi pada 2010. Ketika mempertimbangkan kota-kota dengan penduduk lebih dari 50.000, proporsi ini turun menjadi 0,1 persen dari daratan bumi (menggunakan data dari Komisi Eropa, 2019). Namun, lingkungannya mempengaruhi di luar batas spasialnya (UNHabitat, 2017a).
2. Jacobs, 1961.
3. Rosenthal dan Strange, 2004; Combes et al, 2012; Combes dan Gobillon, 2015; Duranton, 2016; Chauvin et al, 2017; dan Quintero dan Roberts, 2018.
4. Glaeser et al, 2001; Albouy, 2008; dan Albouy dan Stuart, 2014.
5. Rosenthal dan Strange, 2004; dan Duranton dan Puga, 2004.
6. Rimmer, 1970.
7. The Economic Times, 2016.
8. Coulibaly et al, 2012.
9. OECD, 2014.
10. Duranton dan Puga, 2004.
11. MIER, 2015.
12. Rauch, 1993; Glaeser, 1999; Glaeser dan Mare, 2001; Moretti, 2004a; Moretti, 2004b; Moretti, 2004c.
13. Jones et al, 2017.
14. Kota yang lebih besar mendorong laju akumulasi SDM yang lebih besar pada pekerjaan, utamanya untuk pekerja yang lebih terampil (Baum-Snow dan Pavan, 2008; Baum-Snow dan Pavan, 2012).
15. Ciccone dan Hall, 1996.
16. Glaeser dan Maré, 2001.
17. Kondo, 2015.
18. Glaeser, 2009.
19. UN-Habitat, 2016a.
20. Lall et al, 2017; Nakamura et al, 2016.
21. Benson dan Faiez, 2020.
22. Florida, 2020.
23. Agarwal et al, 2020.
24. Nolte, 2020.
25. Kivuva, 2000; As of May 2020, 37 persen rumah tangga tidak mampu membayar uang sewa. Penurunan pendapatan dikutip menjadi alasan utama ketidakmampuan membayar sewa oleh 61 persen rumah tangga (Biro Statistik Nasional Kenya, 2020).
26. Florida, 2020.
27. Neiderud, 2015.
28. Florida, 2020.
29. UN-Habitat mempertimbangkan sebuah bangunan tidak bersesakan (menyediakan luasan yang memadai untuk anggota keluarga) jika tidak lebih dari tiga orang berbagi ruang yang layak huni.
30. Carozzi et al, 2020.
31. Florida, 2020.
32. Wangli dan Wahba, 2020.
33. Ahn, 2020; Jowett, 2020.
34. Mahler et al, 2020.
35. Bank Dunia, 2020b.
36. QiangYan et al, 2020.
37. ILO, 2020d.
38. UNECA, 2020.
39. ECLAC, 2020b.
40. Boston Consulting Group, 2020.
41. ECLAC, 2020b.
42. UNESCAP, 2020.
43. Bank Dunia, 2020c.
44. Bank Dunia, 2020d.
45. UNESCWA, 2020.
46. UNECE, 2020.
47. UN-Habitat, 2016a.
48. Cali dan Menon, 2013; UN-Habitat, 2016a; Vandercasteelen et al, 2018; Asher et al, 2019.
49. Abdel-Rahman dan Anas, 2014.
50. *Mega-regions* didefinisikan sebagai "wilayah dengan cahaya terus menerus yang terdiri atas setidaknya dua kawasan metro, memiliki populasi 5 juta atau lebih, dan memicu output ekonomi lebih dari USD 300 juta" (Florida, 2019).
51. UN-Habitat, 2010a.
52. Tsen dan Furuoka, 2005.
53. Wall dan Van der Knaap, 2011; Burger et al, 2012.
54. Wall dan Stavropoulos, 2016; UNHabitat, 2018a.
55. UN-Habitat 2016b, pp33-34.
56. UN-Habitat, 2018a.
57. Rogan dan Cichello, 2017.
58. PBB, 2020b.
59. Badgett, 2014; Bank Dunia, 2015b; Panter et al, 2017.
60. Wirth, 1938; Stouffer, 1955; Tuch, 1987; Huggins dan Debies-Carl, 2015.
61. Jedwab dan Vollrath, 2015; Glaeser, 2014; Fay dan Opal, 2000.
62. Glaeser, 2014; Jedwab et al, 2017; Jedwab dan Vollrath, 2019.
63. Gollin et al, 2016.
64. Turok dan McGranahan, 2013; UNHabitat 2016b, p3.
65. Jedwab dan Vollrath, 2019.
66. Angel, 2012; Institut Kebijakan Pertanahan Lincoln, 2016; Lamson-Hall et al, 2018.
67. Butir utama 1.2 AFINUA menetapkan bahwa "Pasokan lahan perkotaan harus cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan perkotaan sekaligus melindungi daerah rentan dan menghindari perebakan yang tidak terkendali (UNHabitat, 2017, p5).
68. Butir utama 2.2 menuntut pentingnya memisahkan "ruang publik dari lahan perkotaan yang bisa dibangun" (UN-Habitat, 2017b, p7). Butir utama 3.5 menuntut rancang kota harus menyediakan "ruang layak huni, kemudahan berjalan, dan rasa terhadap ruang" (UN-Habitat, 2017b, p10); Pada daerah yang diproyeksikan meluas, rute untuk jalan arteri yang lebar harus berjarak tidak lebih dari satu kilometer. Ruang itu harus memiliki kisi "besi" yang jelas (seperti Kota New York) atau "radial" (Washington, DC) dengan blok, trotoar, jalan, trotoar, dan ruang publik yang jelas, sejalan dengan butir utama 3.3 AFINUA
69. Lamson-Hall et al, 2018; fokus pada kasus Ethiopia untuk mendokumentasikan bagaimana memberi ruang untuk perluasan perkotaan dapat diterapkan di kota-kota Afrika, di mana rata-rata 78 persen dari daerah permukiman baru yang dikembangkan sejak tahun 1990-an adalah informal, yang 27 persennya tidak dapat dicapai dengan berjalan kaki.
70. UN-Habitat, 2016c; Butir utama 2.4 AFINUA menetapkan bahwa "luas dan proporsi plot yang dapat dibangun dan ketinggian bangunan serta ruang lantai yang diizinkan merupakan hal mendasar untuk dihargai dan memiliki dampak signifikan pada dinamika jalan dan permintaan layanan. Elemen-elemen ini harus diatur secara efektif dan dikelola secara aktif untuk secara adil menyeimbangkan beban dan manfaat" (UN-Habitat, 2017b) Ketika kota dengan lebih sedikit gedung tinggi menawarkan kualitas hidup yang lebih baik karena cahaya alami yang lebih sedikit terhalang, penduduk yang sama mungkin lebih memilih memiliki akses ke perumahan yang lebih murah, dan kota yang lebih tinggi dan lebih padat dapat menyediakan layanan sosial dan lainnya dengan biaya per kapita yang lebih rendah karena kembali ke skala.
71. Visagie dan Turok, 2020.
72. UN-Habitat, 2016a.
73. UN-Habitat, 2018c.
74. Jedwab et al, 2019.
75. Jedwab et al, 2019.
76. Drummond et al, 2014.
77. UN-Habitat, 2017a.
78. UN-Habitat, 2016a, p9.
79. PBB, 2017a, p18.
80. IMF, 2017.
81. PBB, 2018d; PBB, 2017a, p18.
82. Stakeholder Group on Ageing, 2018.
83. Rosenthal dan Strange, 2004; Combes dan Gobillon, 2015.
84. Gollin et al, 2016, p55.
85. Gollin et al 2016.
86. Ades dan Glaeser, 1995; Davis dan Henderson, 2003; Campante, Do dan Guimaraes, 2019.
87. UN-Habitat, 2016a, p27.
88. Glaeser, 1998.
89. UN-Habitat, 2016b.
90. OECD, 2019a.
91. RDP merupakan singkatan dari "Reconstruction and Development Programme" dan HLM for "Habitation à Loyer Modéré" ("Moderate Rent Lodging").
92. PBB, 2015.
93. PBB, 2017.
94. Visagie dan Turok, 2020; Pentingnya melonggarkan peraturan sejenis yang telah disorot dalam Laporan sebelumnya (UN-Habitat, 2016a, p35).
95. PBB, 2019d.
96. UN-Habitat, 2016b.
97. TomTom, 2018.
98. Calnec-Sugin dan Heeckt, 2020.
99. Layanan Bus Mini Peka Gender & Infrastruktur Transportasi untuk Kota-Kota di Afrika: Perangkat Praktis.
100. Calnec-Sugin dan Heeckt, 2020.
101. UN-Habitat, 2015a.
102. UN-Habitat, 2010a.
103. UN-Habitat 2010.
104. UN-Habitat, 2018b.
105. ILO, 2015.
106. UN-Habitat, 2016d.
107. ILO, 2020d.
108. Patut diperhatikan, pekerja rumah tangga di Meksiko telah memperoleh banyak kemenangan bersejarah selama beberapa tahun terakhir, termasuk Keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga pada akhir 2018 (WEIGO, 2020).
109. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017a, p8.
110. UN-Habitat, 2017b.
111. Henderson et al, 2016.
112. O'Sullivan, 2017.
113. Bartolini, 2015.
114. UN-Habitat, 2017b.
115. UNECA, 2020.
116. UN-Habitat, 2017b.

Bab 4

Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan: *Membangun Perkotaan yang Tangguh*

Saat ini perdebatan internasional dicirikan oleh optimisme perkotaan, sebagaimana urbanisasi berkelanjutan dikenal sebagai kekuatan transformatif untuk memanfaatkan nilai lingkungan. Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, Agenda Baru Perkotaan, Persetujuan Paris dan SFDRR tertanam dalam optimisme perkotaan ini. Terdapat pula kesepakatan implisit yang dilakukan di tingkat lokal untuk menjembatani jurang antara kontribusi yang diinginkan oleh negara dan pengurangan emisi aktual yang diperlukan untuk menjaga perubahan suhu rata-rata global tetap dalam tingkat yang aman. Penerapan agenda pembangunan global yang mengantarkan Dekade Aksi untuk mewujudkan TPB, menghadirkan peluang yang pragmatis di mana pelaku perkotaan harus menunjukkan efektivitas aksi yang sudah ada.

Urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkelola merupakan ancaman bagi kelestarian lingkungan, termasuk perebakan kota yang tak terkendali, perubahan guna lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak dapat dikembalikan (*irreversible*), pola konsumsi sumber daya dan energi yang intensif, serta tingkat polusi dan emisi karbon yang tinggi. Namun, bila direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi memberikan peluang untuk mengatasi tantangan ini dan berkontribusi pada nilai lingkungan melalui inovasi energi, pola permukiman berkelanjutan, perubahan perilaku dan gaya hidup manusia, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang terkait dengan lingkungan, dan efisiensi sumber daya.

Fakta Singkat

1. Solusi berbasis alam (NBS) merupakan pendekatan terpadu untuk menyampaikan nilai lingkungan melintas kontinum perkotaan-perdesaan.
2. Meskipun proyek lingkungan dan konservasi menambah nilai lingkungan perkotaan, kelompok marginal semakin terpinggirkan oleh perubahan kondisi tempat tinggal, seperti kenaikan harga rumah dan biaya sewa.
3. Kebijakan keberlanjutan untuk mengurai nilai lingkungan urbanisasi bergantung pada kemampuan para pelaku untuk mencocokkan pilihan dengan konteks operasional sekaligus memasukkan prinsip keadilan.
4. Meskipun dampaknya merusak, COVID-19 menunjukkan bahwa masa depan perkotaan yang hijau bisa terwujud akibat perubahan perilaku; COVID-19-memaksa karantina wilayah yang mengakibatkan penurunan emisi karbon dan peningkatan kualitas udara jangka pendek di kota.
5. Walaupun terjadi peningkatan layanan dasar secara global yang memiliki manfaat lingkungan selama dua dekade terakhir terutama bagi penghuni permukiman kumuh, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk populasi yang paling berisiko terabaikan.

Butir Kebijakan

1. Memanfaatkan nilai lingkungan dari urbanisasi membutuhkan pendekatan perencanaan partisipatif. Pendekatan lintas sektoral merupakan kunci untuk memahami kebutuhan dan kepedulian dari kelompok yang berbeda.
2. Inisiatif penghijauan kota meningkatkan nilai lingkungan urbanisasi, tetapi aksi yang memadai diperlukan untuk memastikan agar tidak memperburuk ketimpangan dan kerentanan sosial.
3. Pemulihan ekonomi hijau dari pandemi COVID-19 melibatkan investasi teknologi bersih seperti energi terbarukan yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekaligus mengurangi emisi.
4. Nilai lingkungan dari urbanisasi berkelanjutan tidak bisa terwujud tanpa memprioritaskan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung.
5. Menerapkan Agenda 2030 dan Agenda Baru Perkotaan merupakan kunci meningkatkan nilai urbanisasi.

Urbanisasi mengubah hubungan masyarakat dengan lingkungan hidup. Urbanisasi menghadirkan tantangan lingkungan, termasuk perubahan penggunaan lahan dan kehilangan keanekaragaman hayati,[1] pola konsumsi sumber daya dan energi intensif,[2] tingkat polusi dan emisi karbon tinggi.[3] Pada saat sama, urbanisasi abad 21 membuka peluang untuk mengatasi tantangan dan berkontribusi untuk nilai lingkungan melalui inovasi energi, pola permukiman berkelanjutan, perubahan perilaku dan gaya hidup manusia, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan terkait lingkungan, serta efisiensi sumber daya. Perdebatan dampak urbanisasi terhadap lingkungan seringkali terpolarisasi antara mereka yang melihat kota sebagai peluang untuk mengurangi jejak lingkungan global dan mereka yang memandang pertumbuhan perkotaan mengarah pada konsekuensi dan manfaat (*trade-off)* lingkungan yang tidak menguntungkan.[4] Meskipun laporan ini mengakui adanya ancaman lingkungan dari urbanisasi yang tidak direncanakan dan tidak terkelola dengan baik, bab ini fokus bagaimana memanfaatkan kekuatan transformatif urbanisasi berkelanjutan untuk meningkatkan nilai lingkungan dan memajukan Agenda Baru Perkotaan (NUA) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berbagai model ilmiah telah mengaitkan urbanisasi dengan dampak lingkungan dalam skala global.[5] Mengembangkan infrastruktur dunia ke tingkat negara industri (yang termasuk dalam Lampiran 1 Protokol Kyoto) diperkirakan memerlukan 350 Gt CO_2 setara dengan produksi material (atau antara 35-60 persen dari anggaran karbon tersedia sebelum 2050, jika peningkatan suhu rata-rata secara global tetap di bawah 2ºC) .[6] Urbanisasi tidak berkelanjutan berdampak pada perubahan lahan dan mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati.[7] Terlebih, bukti menunjukkan peningkatan dampak lingkungan akibat urbanisasi, tidak hanya pada iklim tetapi juga polusi udara, ekosistem, penggunaan lahan, siklus biogeokimia, pencemaran air dan pengelolaan limbah padat, yang menghancurkan.[8] Di AS, perluasan *Wildland-Urban Interface* (WUI) berkontribusi memperparah kebakaran hutan akibat perebakan kota yang merambah hutan.[9] Di Eropa, satu

dari setiap delapan (atau 13 persen) kematian diakibatkan kualitas lingkungan yang buruk; lingkungan perkotaan ditandai dengan adanya beragam tekanan, di mana penduduk kota lebih terpapar polusi udara, kebisingan dan bahan kimia, serta memiliki akses lebih sedikit ke ruang hijau daripada penduduk di perdesaan.[10] Gangguan yang disebabkan pandemi COVID-19 memperburuk tantangan lingkungan (Kotak 4.1). Gaya hidup kota disalahkan karena mengikis adat dan pengetahuan tradisional yang menghargai keterikatan harmonis dengan tanah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem.[11]

Terdapat pandangan alternatif yang melihat urbanisasi sebagai gaya yang kuat untuk menumbuhkan keterikatan dengan bumi yang menggerakkan umat manusia menuju hubungan sosio-ekologis yang lebih berkelanjutan. Menurut pandangan ini, urbanisasi dapat memfasilitasi perubahan radikal yang dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat berkelanjutan.[12] Urbanisasi yang terencana dan terkelola dengan baik berkontribusi pada kelestarian lingkungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sambil membangun ketahanan jangka panjang yang meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan dan perdesaan dalam kemakmuran ekonomi. Bab 1 menguraikan seberapa baik perencanaan dan pengelolaan urbanisasi menambah nilai lingkungan, termasuk mempromosikan energi bersih; pola penggunaan lahan berkelanjutan pembangunan perkotaan; perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati; gaya hidup sehat selaras alam; pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; membangun ketahanan perkotaan; pengurangan risiko bencana; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, pola urbanisasi juga sangat tidak merata.[13] Memanfaatkan nilai lingkungan dari urbanisasi bergantung pada kemampuan berbagai pelaku untuk menyampaikan serangkaian aksi pada skala perkotaan yang merespon kepada tantangan tertentu, yang dampaknya dapat meluas lintas aras.

Gagasan tentang nilai yang diperkenalkan di Bab 2 menekankan bahwa nilai relatif dari sesuatu bergantung pada beberapa dimensi. Pertanyaan "nilai untuk siapa?" yang dirumuskan pada Bab 2 menekankan bahwa posisi sosial, kebutuhan, dan kepentingan menentukan nilai. Nilai lingkungan bergantung pada hubungan sosial dan ekologi yang ada, dan terkait erat dengan pertanyaan pengambilan keputusan, inklusi sosial, dan hak asasi manusia.[14] Penilaian lingkungan memiliki dimensi etika yang mendalam.[15] Menentukan bagaimana menghitung nilai lingkungan membutuhkan pemahaman tantangan lintas sektoral yang saling mempengaruhi kota dan permukiman, serta bagaimana kelompok sosial yang berbeda mengakses SDA dan merasakan dampak lingkungan. Upaya aktif merencanakan urbanisasi dapat mengintegrasikan keragaman perspektif dan menghasilkan proposal bersama untuk aksi keberlanjutan. Upaya itu menyeimbangkan efektivitas yang dirasakan akibat aksi tertentu dengan tantangan spesifik yang dihadapi berbagai kelompok sosial di kota dan permukiman. Definisi nilai lingkungan sejalan dengan temuan *Laporan Kota-Kota Dunia 2016*, menekankan bagaimana prinsip keadilan lingkungan, termasuk pengakuan skala valuasi dan partisipasi masyarakat yang beragam dalam pengambilan keputusan, merupakan bagian dari paradigma praktis pengelolaan perkotaan.

Urbanisasi yang terencana dan terkelola baik meningkatkan nilai lingkungan dalam banyak hal. Tetap saja, efektivitas berbagai inisiatif akan bergantung pada kapasitas pelaku yang beragam untuk mempertahankan proses tata kelola jangka panjang dan perencanaan keberlanjutan yang terintegrasi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan. Pembangunan kota berketahanan bergantung pada fasilitas yang memungkinkan untuk mewujudkan visi keberlanjutan jangka panjang. Inisiatif internasional seperti NUA menyoroti pentingnya tindakan di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kota dan permukiman, serta peran yang dimainkan dalam menyampaikan TPB.[16] Kekuatan transformatif urbanisasi adalah pusat untuk mewujudkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. [17] *Laporan Kota dan Perubahan Iklim: Laporan Global terkait Permukiman UN-Habitat 2011 (Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements 2011*) mengungkapkan berbagai inisiatif kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim di kota dan permukiman. [18] Sejak itu, pendekatan baru untuk mengatur perubahan iklim di kota dan permukiman telah mengarah ke banyak inovasi teknis, sosial, dan kebijakan.[19] Adopsi Persetujuan Paris mengenai

Perubahan Iklim pada 2015 menghasilkan perubahan tata kelola iklim yang pragmatis, dengan fokus evaluasi aksi di lapangan.[20] Agenda Baru Perkotaan dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menunjukkan kerangka kerja yang memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi potensi urbanisasi transformatif. Namun, masih ada kekurangan penilaian skala besar atas aksi keberlanjutan dan keterkaitannya terhadap urbanisasi. Persepsi bahwa aksi lokal terlalu terfragmentasi untuk berdampak global masih menyebar di kalangan kebijakan internasional, meskipun sikap itu berubah ketika pemerintah provinsi terlibat secara tegas dalam diplomasi iklim (Bab 7).

Pembangunan kota tangguh bergantung pada fasilitas yang memungkinkan untuk mewujudkan visi keberlanjutan jangka panjang

Terakhir, tidak semua inisiatif lingkungan bersifat ramah. Beberapa terkesan dangkal, atau "*greenwashing*". Lainnya mengarah pada "gentrifikasi hijau," yang memperburuk kesenjangan dan kerentanan sosial di kota. Misal, penilaian inisiatif penghijauan perkotaan seperti High Line dan Taman Jembatan Brooklyn di Kota New York menunjukkan hasil lingkungan yang positif (peningkatan ruang hijau, pengurangan polusi), dikaitkan dengan penggusur penduduk berpenghasilan rendah.[21] Demikian pula dengan kantong hijau perkotaan yang menunjukkan eksklusi sosial dan spasial, telah muncul di mana kelompok populasi berpenghasilan tinggi mampu mengamankan tanah dan sumber daya dengan mengesampingkan kelompok lain.[22] Agenda Baru Perkotaan dan TPB 11 menekankan pada permukiman inklusif dan menyediakan kerangka kerja untuk membuka kunci nilai lingkungan urbanisasi untuk semua, bukan untuk kelompok elit.

Agenda Baru Perkotaan dan TPB 11 menekankan pada pemukiman inklusif dan menyediakan kerangka kerja untuk membuka kunci nilai lingkungan dari urbanisasi untuk semua, bukan untuk kelompok elit

Bab ini diawali dengan pembahasan tentang agenda internasional untuk memanfaatkan nilai lingkungan dari urbanisasi sebagaimana diabadikan dalam agenda kebijakan global. Kemudian, dibahas tantangan untuk mewujudkan nilai lingkungan dari urbanisasi. Bab ini memetakan ruang aksi untuk memberikan nilai lingkungan dan membahas prinsip keadilan lingkungan yang mendukung upaya membuka nilai lingkungan kota dan menghindari kontradiksi pembangunan kota hijau.

4.1 Nilai Lingkungan melalui Lensa Agenda Pembangunan Global

Strategi sistemik PBB tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan mengenali titik temu TPB 11 dengan TPB lain, misalnya, aksi iklim yang lebih tegas adalah salah satu keluaran menyeluruh yang harus muncul dari pola pembangunan perkotaan berkelanjutan. [23] IPCC menyatakan bahwa dunia 1,5ºC akan sulit tercapai kecuali jika TPB di kota dan urbanisasi berkelanjutan tercapai di negara berkembang. [24]

Kotak 4.1 : Pandemi COVID-19 dan kelebihan sampah plastik

Pandemi COVID-19 telah memperparah jatuhnya harga minyak, bahan utama plastik, menjadi lebih murah untuk dihasilkan. Pandemi meningkatkan konsumsi plastik sekali pakai, hingga sekitar 250-300 persen di AS. Kota seperti Athena, Yunani, tercatat peningkatan 150 persen dari jumlah plastik yang ditemukan di aliran limbah umum. Di negara-negara berpenghasilan rendah, kemungkinan situasinya berbahaya karena 93 persen limbah dibuang ke tempat pembuangan terbuka.

Sumber: The Economist, 2020b

Pemisahan sampah rumah tangga di pabrik daur ulang, Provinsi Lampang, Thailand. © Gigira / Shutterstock

Akibatnya, kota memainkan peran besar dalam upaya membatasi dampak terburuk dari pemanasan global. Seperti yang disampaikan Persatuan Pemerintah Kota dan Daerah (United Cities and Local Governments (UCLG)), Agenda 2030 mewakili "kontrak sosial baru" secara bersama untuk menciptakan masa depan berkelanjutan bagi bumi.[25] Pemerintah daerah adalah pemain kunci pada aksi ko-kreasi dan target TPB 11 memberikan titik awal bagi pemerintah daerah dan lembaga mitra seperti pemerintah regional dan pusat, kelompok masyarakat, dan sektor swasta untuk meluncurkan aksi inisiatif guna mencapai target tersebut. Pencapaian target itu bergantung pada pemanfaatan nilai lingkungan dari proses urbanisasi. Tabel 4.1 mengilustrasikan contoh spesifik di mana berbagai organisasi dapat melakukan intervensi untuk mewujudkan nilai lingkungan.

Agenda Baru Perkotaan adalah alat khusus untuk mencapai TPB dari perspektif kebijakan pembangunan perkotaan yang mendefinisikan perlindungan lingkungan sebagai landasan pembangunan perkotaan. Agenda Baru Perkotaan berbeda karena menetapkan prosedur untuk melokalkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda Baru Perkotaan fokus pada saling ketergantungan antara sektor sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk mewujudkan TPB 11 bersama dengan tujuan global lainnya. Komitmen yang dibuat dalam rencana implementasi NUA menunjukkan perlunya diagnosis spasial antara tantangan sosio-ekologis dan potensi aksi berbasis tempat untuk mewujudkan nilai lingkungan.[37]

Agenda Baru Perkotaan mendukung aksi lokal untuk meningkatkan nilai lingkungan di kota dan permukiman seperti melestarikan hak milik bersama, memungkinkan akses berkelanjutan ke sumber daya dan mencegah pencemaran lingkungan. Secara bersamaan, NUA mengeksplisitkan keharusan global untuk menopang kebijakan perkotaan. Misal, Persetujuan Paris menekankan perlunya membangun kapasitas untuk aksi di berbagai tingkat — nasional, provinsi, dan lokal. Agenda Baru Perkotaan mendukung mekanisme koordinasi kegiatan berbagai pihak untuk memperbaiki ketahanan dan keberlanjutan di kota untuk semua, sekaligus memperkuat komitmen Persetujuan Paris.

Agenda Baru Perkotaan mendukung aksi lokal untuk meningkatkan nilai lingkungan di kota dan pemukiman seperti melestarikan hak milik bersama, memungkinkan akses berkelanjutan ke sumber daya dan mencegah pencemaran lingkungan.

Aspirasi NUA juga didukung dengan laporan ilmiah global terkini yang menekankan nilai transformatif urbanisasi. *Laporan Khusus Pemanasan Global 1,5°C IPCC* (*Special Report Global Warming of 1.5°C*) menetapkan bahwa kombinasi opsi adaptasi dan mitigasi yang diperlukan untuk mewujudkan transisi terakselerasi dan menjaga keamanan dunia harus dilaksanakan secara partisipatif dan terintegrasi.[38] Laporan Platform Kebijakan-Ilmu Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)) menjelaskan tren saat ini merupakan akibat pandangan antroposentris dan materialis dunia yang menekankan ekstraksi secara bermanfaat.[39] Laporan IPBES menilai migrasi dan urbanisasi sebagai pengganggu yang dapat mengkatalisasi pergeseran radikal pada nilai alam dan lingkungan berkelanjutan yang akan mengubah hubungan antara masyarakat dan ekosistem. Alih-alih mengusulkan intervensi sektoral yang tepat waktu, laporan ini menyerukan perubahan budaya dan sosial yang mendasar pada gaya hidup manusia. Terkadang, bahasa laporan global tidak selalu menyampaikan konsekuensi politik secara mendalam akibat transformasi semacam itu, yang justru terwujud dalam gerakan iklim perkotaan di seluruh dunia seperti pemogokan sekolah "Fridays for Future" ("Jumat untuk Masa Depan") dan "Extinction Rebellion" ("Pemberontakan Kepunahan"), yang sejak 2018 telah menekan pembuat kebijakan tentang perubahan iklim melalui aksi langsung.

Tabel 4.1: Contoh nilai lingkungan yang terkait dengan target TPB 11 dan proyek saat ini yang meningkatkan nilai-nilai tersebut

Target SDG11	Indikator SDG 11	Relevansi untuk memberikan nilai lingkungan	Contoh Tindakan khusus konteks
11.1 Di tahun 2030, menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh.	11.1.1 Proporsi populasi perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman informal atau perumahan yang tidak layak huni	Akses terhadap layanan dasar dan perumahan yang memadai dan terjangkau meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas; serta mencegah perkembangan kota informal yang secara ekosistem sensitif, serta air, kontaminasi tanah dan udara dari limbah yang tidak diolah dan pengumpulan limbah padat secara tidak layak.	Pusat Inisiatif Komunitas (Center for Community Initiatives (CCI)) di Dar es Salaam, Tanzania, mendukung proyek pengelolaan komunitas untuk menyediakan akses air dan sanitasi.[26] CCI semakin berkomitmen pada perspektif lintas sektor dan berbasis gender tentang pembangunan yang mengungkapkan keberagaman dampak akibat kerentanan struktural.
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya dengan memperbanyak transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang difabel dan lansia.	11.2.1 Proporsi penduduk yang memiliki akses mudah ke transportasi umum, berdasarkan jenis kelamin, usia, dan penyandang difabel.	Angkutan umum mendukung kebutuhan mobilitas sekaligus mengurangi keseluruhan dampak lingkungan (pengurangan polusi emisi, emisi GRK dan konsumsi lahan).	Sistem BRT telah menyebar di seluruh penjuru dunia sebagai angkutan massal yang efisien dan terpisah kelas dengan harga yang lebih rendah daripada proyek kereta api. Hanoi, Vietnam meluncurkan jalur bus 14,7 km pertamanya pada tahun 2017, melayani 14.000 penumpang setiap hari. Proyek Pengembangan Transportasi Perkotaan Hanoi (Hanoi Urban Transport Development Project) memperkirakan 23 persen penumpang beralih ke BRT dari kendaraan pribadi, yang akan mengurangi emisi karbon kota sebesar 122.177 ton sampai tahun 2025. [27]
11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara.	11.3.1 Rasio laju konsumsi lahan terhadap laju pertumbuhan penduduk 11.3.2 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil di perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang beroperasi secara teratur dan secara demokratis	Transformasi lahan mewakili satu dari dampak utama urbanisasi. Meningkatkan nilai lingkungan sehingga membutuhkan penggabungan berbagai perspektif pada proses perencanaan mengenai dampak dan manfaat relatif.	The Dutch NGO Both ENDS telah menerapkan pendekatan berbasis hak untuk tata kelola lahan yang disebut Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif untuk mengakui dan mengamankan hak atas tanah.[28] Proyek percontohan untuk meningkatkan perencanaan tata ruang di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi masyarakat ' dengan perusahaan terjadi secara tidak setara karena hak atas tanah tidak selalu diakui secara resmi. Dengan memetakan tanahnya, masyarakat memiliki alat tambahan untuk mengklaim hak tersebut. Contoh serupa dapat membantu menyelesaikan konflik tanah di daerah perkotaan yang berkembang pesat, terutama untuk menghadapi penggusuran.[29]

Target SDG11	Indikator SDG 11	Relevansi untuk memberikan nilai lingkungan	Contoh Tindakan khusus konteks
11.4 Memperkuat upaya melindungi dan untuk menjaga warisan alam dan budaya dunia	11.4.1 Pengeluaran Total (publik dan pribadi) per kapita digunakan untuk pelestarian, perlindungan dan konservasi warisan alam dan budaya	Pelestarian warisan alam dan budaya memastikan akses untuk generasi masa depan.	Museum Baiheliang adalah situs arkeologi di Fuling, Tiongkok yang terendam air oleh bendungan baru Three Gorges. Museum ini menampilkan beberapa prasasti hidrologi tertua di dunia, mencatat 1.200 tahun perubahan permukaan air Sungai Yangtze.[30] Proyek ini telah mendapat dukungan dari The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), sebagai proyek andalan program warisan terendam mereka.
11.5 Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang diakibatkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus melindungi masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan.	11.5.1 Jumlah kematian, orang hilang dan orang terkena bencana per 100.000 orang 11.5.2 Kerugian ekonomi bencana langsung dalam kaitannya dengan PDB global, termasuk kerusakan akibat bencana untuk infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar.	Respons terhadap bencana dapat menjadi penentu sejauh mana kota tersebut dapat pulih dari bencana. Strategi yang efektif untuk mengelola risiko bencana mengurangi kerentanan di kota-kota dan mendukung pembentukan pemukiman yang lebih tangguh dengan manfaat tambahan yang substansial bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	Kementerian Lingkungan Peru mengembangkan Rencana Aksi tentang Gender dan Perubahan Iklim pada tahun 2015 yang menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengenali kerentanan gender dan tindakan yang mungkin dilakukan. Pada manajemen risiko, rencana tersebut menyoroti peran Kelompok Manajemen Risiko, Bencana, dan Perubahan Iklim (Group of Management of Risks, Disasters, and Climate Change (GRIDES)), jaringan lembaga yang bertujuan untuk memulihkan pengetahuan tradisional dan mengintegrasikannya dengan keahlian, yang secara sengaja mengintegrasikan perspektif gender dalam pekerjaan mereka. [31]
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan pengelolaan limbah.	11.6.1 Proporsi sampah kota yang dikumpulkan dan dikelola di fasilitas terkendali dari sampah total yang dihasilkan oleh kota 11.6.2 Tingkat rata-rata tahunan zat partikulat (misalnya PM2.5 dan PM10) di kota (bobot populasi)	Pengurangan polusi di area perkotaan (limbah padat, emisi) meningkatkan kehidupan lingkungan bagi penduduk perkotaan secara langsung.	The Seva Sahakari Sanstha (SWaCH), di Pune, India, adalah koperasi pemulung yang dimiliki dan dioperasikan oleh lebih dari 3.000 anggota, yang sebagian besar adalah perempuan dan Dalit. Mereka menyediakan layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu kepada lebih dari 2,3 juta penduduk, termasuk lebih dari 450.000 warga kampung kumuh.[32]
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap RTH dan publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak,	11.7.1 Bagian rata-rata dari area terbangun kota yang merupakan RTH publik, berdasarkan jenis kelamin, usia dan penyandang difabel 11.7.2	RTH dapat diakses semua warga sebagai sumber daya kolektif bersama yang tidak hanya meningkatkan kohesi komunitas tetapi memiliki manfaat langsung bagi kesehatan, kesejahteraan, dan sistem ekologi.	UN-Habitat tengah melaksanakan Program Ruang Publik Global (Global Public Space Programme) untuk mendukung kota dalam meningkatkan kualitas ruang publik (Kotak 4.2). Di Kenya, program ini mendukung pemerintah Kota Nairobi untuk merevitalisasi ruang publik. Inventarisasi dan pengkajian ruang terbuka publik sudah dilakukan. Inventarisasi ini merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih

Target SDG11	Indikator SDG 11	Relevansi untuk memberikan nilai lingkungan	Contoh Tindakan khusus konteks
lansia, dan penyandang difabel.	Proporsi orang korban pelecehan fisik atau seksual, menurut jenis kelamin, usia, status difabel, dan tempat terjadinya, dalam 12 bulan terakhir		luas untuk meningkatkan kapasitas ASN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas ruang publik bagi semua.
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara kawasan urban, peri-urban dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan wilayah dan nasional.	11.a.1 Jumlah negara yang memiliki KPN atau rencana pembangunan daerah yang (a) menanggapi dinamika populasi; (b) memastikan pengembangan teritorial yang seimbang; dan C) meningkatkan fiskal daerah	Rencana pembangunan kota dan daerah berkontribusi pada hasil pembangunan yang adil antara daerah perkotaan dan perdesaan dengan membatasi perebakan perkotaan untuk melestarikan lahan pertanian yang berfungsi dan kawasan alami yang menyediakan jasa ekosistem.	Pertumbuhan kota yang pesat di Ulaanbaatar, Mongolia, mengancam keberlanjutan kota, yang bergantung pada pengelolaan wilayah Ger yang dilayani di sekitar kota. Pada 2014, Institut Perencanaan Kota, Arsitektur, dan Desain Kota Ulaanbaatar (The Urban Planning, Architecture and Design Institute of Ulaanbaatar City) mengusulkan rencana induk yang mengakui warisan nomaden kota sambil berusaha menyelesaikan hubungan yang kompleks dengan daerah penyangga.[33]
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi terkait inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, melakukan pengembangan dan implementasi yang sejalan dengan SFDRR 2015-2030	11.b.1 Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan melaksanakan strategi pengurangan risiko bencana lokal sejalan dengan SFDRR 2015-2030 11.b.2 Jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal	Strategi inklusif untuk pengurangan risiko bencana meningkatkan ketahanan kota secara keseluruhan. Pendekatan menyeluruh mengurangi risiko bencana mencakup langkah-langkah untuk mengurangi keterpaparan dan kerentanan, sejalan dengan persyaratan Kerangka Kerja Sendai.	Boston, AS, telah menjadikan kesetaraan rasial sebagai dasar dari strategi ketahanannya. Salah satu fokusnya adalah lingkungan Dudley Square yang beragam secara ras dan etnis. Kota ini telah bermitra dengan komunitas lokal, Dudley Neighbours Incorporated (DNI), untuk memperoleh tanah guna menyediakan layanan penting di lingkungan tersebut, termasuk kebun masyarakat dan pertanian perkotaan, yang meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat infrastruktur untuk kolaborasi erat dengan komunitas jika terjadi peristiwa syok atau stres di masa depan. [34] Birmingham, Inggris, membentuk Majelis Warga Inggris (UK Citizens Assembly) perubahan iklim yang pertama. Majelis tersebut ditugaskan oleh enam Komite Terpilih di DPRD lintas partai. Ini menunjukkan bagaimana Inggris akan mencapai target iklim bebas emisi dan apa yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat untuk membantu mengurangi emisi karbon.[35]
11.c Mendukung negara-negara terbelakang untuk membangun bangunan yang tangguh dan berkelanjutan menggunakan bahan dan material lokal, termasuk melalui pemberian bantuan teknis dan finansial.	11.c.1 Proporsi dukungan keuangan ke negara-negara kurang berkembang yang dialokasikan untuk konstruksi dan perkuatan bangunan berkelanjutan,	Kinerja lingkungan binaan mempengaruhi pola konsumsi dan mengurangi emisi karbon dari bangunan. Prakarsa lingkungan binaan dapat memiliki banyak manfaat bersama (*co-benefit*) antara sosial dan lingkungan.	"*Reinventing Cities*" adalah kompetisi yang diselenggarakan C40, didukung Institut Eropa untuk Inovasi dan Teknologi Komunitas Inovasi dan Pengetahuan Iklim (European Institute of Innovation and Technology Climate Knowledge and Innovation Community (KIC)). Tujuannya adalah melaksanakan proyek perkotaan untuk mendorong regenerasi perkotaan yang netral karbon dan tangguh di lokasi yang memburuk.

Target SDG11	Indikator SDG 11	Relevansi untuk memberikan nilai lingkungan	Contoh Tindakan khusus konteks
	tangguh dan efisien serta menggunakan sumber daya berbahan lokal		Semua proyek menggabungkan pendekatan berbasis desain untuk *retrofitting* dengan kepedulian sosial yang mendalam. Dua puluh pemenang kompetisi ini termasuk di antaranya proyek perumahan sosial di Milan (Italia), pasar di Madrid (Spanyol) dan komunitas perkotaan untuk mendukung perumahan dengan fokus pada penyandang difabel di San Francisco (AS) .[36]

Kotak 4.2: Menciptakan nilai lingkungan melalui ruang publik

Diluncurkan pada 2012, saat ini aktif di lebih dari 75 kota, Program Ruang Publik Global UN-Habitat (Global Public Space Programme) mempromosikan keamanan, inklusif dan ruang publik yang dapat diakses sebagai landasan kota dan komunitas berkelanjutan. Area fokus program ini meliputi:

• **Penilaian ruang publik**: Inventaris dan penilaian ruang publik seluruh kota yang komprehensif memungkinkan para kepala daerah untuk mengetahui keadaan ruang publik di yurisdiksi mereka, memahami jurang antara, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk menyediakan ruang publik.

• **Pengembangan kapasitas**: Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pada isu-isu ruang publik di tingkat lingkungan, kota, dan nasional melalui pendekatan multi-pihak.

• **Perbaikan ruang publik**: Melalui pengajuan proposal tahunan yang didukung oleh Block by Block Foundation, UN-Habitat mendukung sejumlah proyek peningkatan ruang publik di wilayah berkembang. Proses peningkatan ini bersifat partisipatif, menarik komunitas dan pengguna.

• **Teknologi**: Program ini menggalakkan teknologi digital TIK untuk melibatkan audiens yang lebih luas seperti anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan dan perancangan kota. Teknologi seperti Kobo Toolbox dan *video game* Minecraft dimanfaatkan sebagai alat untuk menghimpun beragam ide.

• **Kebijakan**: UN-Habitat mendukung pemerintah pusat untuk mengarusutamakan ruang publik dalam KPN serta pemerintah daerah dalam mengembangkan kerangka kerja dan strategi ruang publik.

Di Nairobi, Kenya, program ini menerapkan proyek percontohan yang menunjukkan pendekatan pembangunan ruang publik yang partisipatif dan terintegrasi.

Gambar A: Penilaian dan inventarisasi seluruh kota di berbagai wilayah

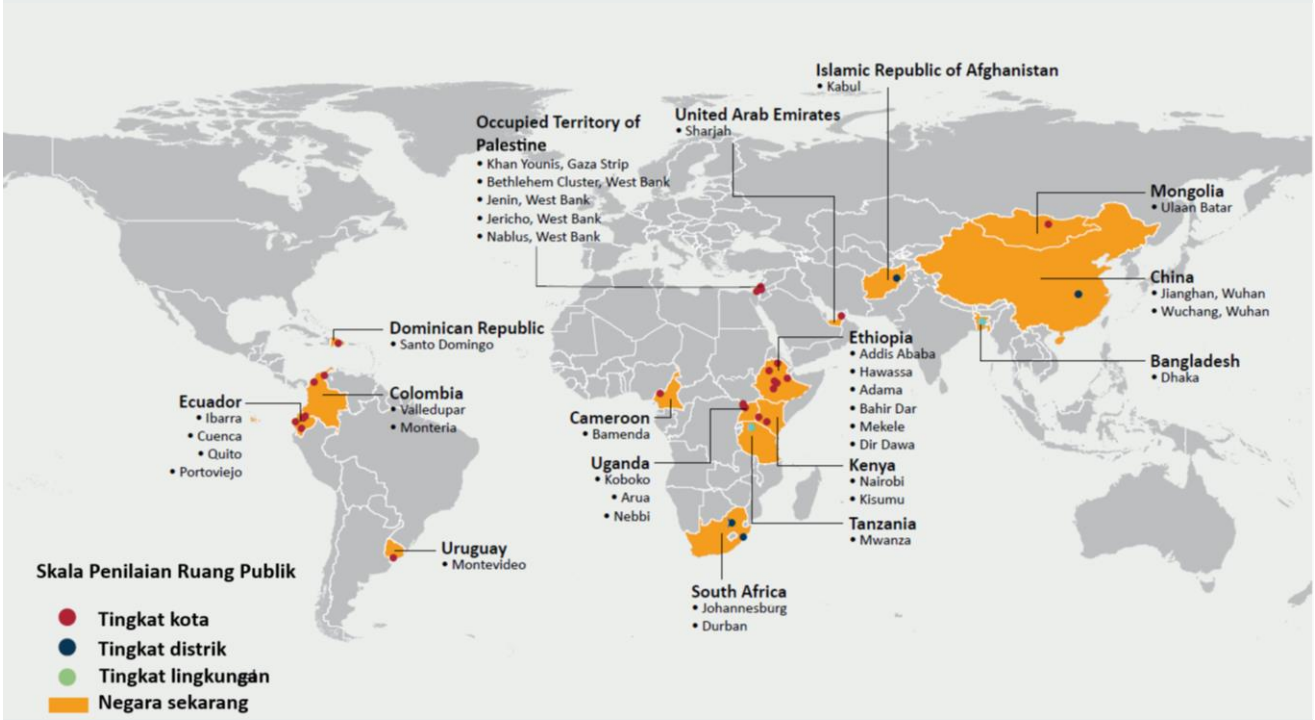

Gambar B: Komponen Implementasi Proyek Ruang Publik Nairobi

Sumber: Global Public Space Programme, UN-Habitat

Pedestrianisasi jalanan di Nairobi, Jalan Luthuli, Kenya © Mark Ojal/UN-Habitat

4.2 Tantangan untuk Mewujudkan Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan

Nilai lingkungan telah menjadi perhatian utama perencanaan keberlanjutan karena berkaitan dengan pertanyaan klasik "Bagaimana kita dapat merencanakan dan mengembangkan komunitas yang akan memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan secara jangka panjang?" Untuk menambah nilai lingkungan membutuhkan penanganan atas tantangan lingkungan di tingkat global maupun lokal bersamaan dengan penanganan kebutuhan rumah tangga yang mendesak.[40] *Laporan Kota-Kota Dunia 2016* mengidentifikasi empat tantangan lingkungan yang dihadapi kota dan memerlukan tanggapan sesuai:

- akses merata ke sumber daya dan layanan publik;
- mengelola risiko lingkungan, dari polusi hingga dampak perubahan iklim;
- meminimalkan dampak negatif dari transformasi tanah dalam penggunaan sumber daya, keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
- menanggapi seruan global untuk dekarbonisasi dan penggunaan sumber daya secara rasional[41]

Alih-alih membuat daftar intervensi, empat elemen ini harus diamati sebagai rangkaian tantangan yang saling terkait yang harus ditangani bersamaan. Hal ini karena terdapat beberapa manfaat dan konsekuensi (*trade-off*) di antara aspek berbeda seperti berikut:

- menyediakan layanan publik secara merata bergantung kepada kelestarian ekosistem dan penggunaan sumber daya secara rasional;
- Ketangguhan terhadap resiko lingkungan dan dampak perubahan iklim bergantung pada penanganan pemicu kerentanan struktural dengan memastikan akses merata ke layanan perkotaan;
- Transformasi lahan berjalan seiring dengan memburuknya layanan esensial bagi penduduk perkotaan yang kurang beruntung;
- Kapasitas untuk mengurangi emisi karbon dan jejak global tergantung pada kepastian konservasi ekosistem dan penyediaan layanan kota yang efisien.

Komitmen transformatif NUA membutuhkan pemahaman akan konsekuensi dan manfaat (*trade-off*).

Agenda Baru Perkotaan menyadari bahwa dampak urbanisasi terlihat di berbagai skala. Meskipun wilayah perkotaan mencakup kurang dari tiga persen dari luas daratan global, terdapat percepatan laju konsumsi lahan melebihi laju pertumbuhan penduduk (Bab 3). Tren ini berdampak langsung pada keanekaragaman hayati dan sumber karbon.[42] *Laporan Khusus terkait Lahan dan Perubahan Iklim IPCC 2019* (*Special Report on Land and Climate Change*) menjelaskan hubungan erat antara transformasi lahan dengan iklim global dan regional.[43] Contoh, laporan menyatakan urbanisasi meningkatkan suhu di kota dan lingkungan sekitarnya (efek pulau panas/*heat island effect*) dan dapat meningkatkan curah hujan ekstrim.

Urbanisasi dalam konteks di mana perencanaan kota dan manajemen risiko yang masih banyak kekurangan serta struktur tata kelola lingkungan yang terfragmentasi dan tumpeng tindih, berdampak pada langkah-langkah pembangunan ketangguhan. Ini terbukti dari pertumbuhan lahan perkotaan di dataran banjir di Tiongkok, yang mencakup 44 persen dari lahan perkotaan total di Tiongkok.[44] Di Afrika, halo matahari di sekitar kota menunjukkan bagaimana transformasi lahan berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan penyangga kota. Namun, ada harapan urbanisasi akan mengurangi tekanan ekosistem di tempat lain.[45]

Urbanisasi dalam konteks di mana perencanaan kota dan manajemen risiko masih banyak kekurangan serta struktur tata kelola lingkungan terfragmentasi dan tumpeng tindih, berdampak pada langkah-langkah pembangunan ketangguhan

Kelompok sosial yang berbeda memiliki pengalaman berbeda di kota. Bagaimana tantangan lingkungan dialami dan ditangani sangat bergantung pada kondisi kehidupan kelompok tersebut

Anak-anak bermain di taman bermain di Ras Mekonnen, Addis Ababa. © Katla Studios

Kebakaran di pinggiran kota Lviv Oblast, Ukraina © Maryana UA/Shutterstock

Kelompok sosial yang berbeda memiliki pengalaman berbeda di kota. Bagaimana tantangan lingkungan dialami dan ditangani umumnya bergantung pada kondisi kehidupan kelompok tertentu. Lebih dari 1 miliar penduduk tinggal di permukiman kumuh dan informal terutama di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara (Bab 1). UN-Habitat mendefinisikan "kondisi permukiman kumuh" berdasarkan akses ke air dan sanitasi, kondisi perumahan, dan kepastian atas tanah.[46] Namun, ini bukan satu-satunya kesulitan di daerah kumuh. Sebaliknya, ini adalah indikator jurang antara yang lebih luas dalam tata kelola, kelembagaan, serta penyediaan fisik lingkungan dan infrastruktur terbangun. Sementara terdapat kebutuhan untuk mengenali kreativitas penduduk di kampung kumuh untuk bertahan di kondisi lingkungan buruk di kota, perlu dipahami bahwa permukiman kumuh menunjukkan hubungan disfungsional antara struktur tempat tinggal, kebutuhan warga, ekonomi perkotaan, dan tata kelola pemerintahan. Permukiman informal mencerminkan kondisi hunian yang diciptakan oleh persaingan ketat kapitalisme global untuk mendapatkan lahan dan keuntungan. Daripada mengenal permukiman kumuh sebagai tempat untuk dibenahi, berbagai tingkat pemerintahan perlu menangani kondisi struktural yang menyebabkan hunian di bawah standar sembari mengenali praktik tempat tinggal saat ini.

Meskipun ada peningkatan cakupan air minum global yang dikelola dengan aman (dari 61 persen pada 2000 menjadi 71 persen pada 2017) dan sanitasi (dari 28 persen pada 2000 menjadi 45 persen pada 2017), yang memiliki manfaat lingkungan terutama bagi penduduk kampung kumuh, dibutuhkan lebih banyak aksi untuk penduduk paling berisiko tertinggal. Ketika penghuni permukiman informal kekurangan layanan, mereka menciptakan "institusi" alternatif yang menyediakan layanan tersebut, seringkali dengan sistem harga tidak diatur. Di India, rumah tangga miskin di permukiman informal menggunakan penyedia swasta dengan harga lebih mahal dari air yang dipasok pemerintah setempat (Kotak 4.3).

Kotak 4.3: Dilema nexus energi - air di Bengaluru, India

Bengaluru memiliki peran penting dalam sejarah inovasi infrastruktur, misalnya, setelah pembangunan saluran air Chamarajendra 1894 dan pemasangan pembangkit listrik tenaga air Shivanasamudra pada tahun 1906, yang menjadikan Bangalore sebagai kota pertama yang memiliki listrik di India. Infrastruktur perkotaan memainkan peran penting dalam konstitusi Bengaluru sebagai kota global, tetapi tantangan infrastruktur di Bengaluru juga besar. Penyediaan air dan energi adalah dua kunci tantangan di kota. Seiring waktu berevolusi, hubungan antara air dan energi telah berubah, dari keadaan awal di mana air dianggap sebagai kekuatan produktif, melalui produksi listrik di PLTA, secara bertahap di mana listrik muncul sebagai cara untuk mengirimkan air ke kota, melalui transfer air jarak jauh.

Sistem tata kelola air yang tumpang tindih juga sebagai hasil dari ketidakadilan sistem penyediaan air saat ini dalam akses air karena jaringan perpipaan hanya mencakup daerah tertentu, mengabaikan masyarakat miskin yang bergantung pada penyedia swasta atau bahkan mafia air dalam mengakses air. Komunitas di pinggiran atau daerah marginal juga berjuang untuk menegosiasikan hak dasar mereka dengan pihak berwenang.

Sementara itu, Bengaluru telah mengalami kebangkitan aksi yang dipimpin warga yang berusaha memanfaatkan tradisi jaringan tangki air untuk berbagai penggunaan, termasuk aksi untuk meremajakan infrastruktur biru, menyediakan ruang untuk rekreasi dan membuat saluran akhir untuk air limbah yang telah diolah. Mendokumentasikan danau, menyelidiki alternatif sumber pasokan alternatif dan pemulihan danau yang selama ini terdegradasi atau tercemar adalah beberapa upaya aksi untuk meningkatkan infrastruktur biru kota sehari-hari, membantu memberikan akses air alternatif untuk mereka yang kurang beruntung.

Sumber: Castán Broto dan Sudhira 2019; Ranganathan, Kamath, dan Baindur 2009; Ranganathan dan Balazs 2015; Unnikrishnan 2018; Unnikrishnan, Sen, dan Nagendra 2017.

Kerentanan terhadap dampak dan bencana perubahan iklim tergantung pada kondisi struktural yang menentukan kemungkinan tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana yang efektif

Kerentanan terhadap dampak dan bencana perubahan iklim bergantung pada kondisi struktural yang menentukan kemungkinan tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana yang efektif. Meskipun beberapa kerentanan bisa ditangani melalui intervensi yang dipimpin pemerintah seperti sistem peringatan dini, skema perlindungan infrastruktur dan program rekonstruksi pasca-bencana, kondisi kehidupan sehari-hari sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan masyarakat untuk tanggap terhadap bencana.[47] Permukiman kumuh dan informal secara tidak proporsional menderita akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam dibandingkan jenis permukiman lain.

Transformasi lahan berdampak pada penghuni permukiman informal secara langsung, seperti jika mereka terlibat pada pertanian pinggiran kota atau di perkotaan, atau tinggal di atas tanah yang ingin dikembangkan oleh real estat. Proliferasi global akan ruang yang aman seperti komunitas berpagar, menggunakan lahan lebih luas bagi tiap penghuni, mengucilkan penduduk miskin perkotaan yang secara politik dirugikan dari proses pembangunan perkotaan melalui struktur tata kelola yang ada. Di Brazil, komunitas Favela mengungsi menjelang Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro.[48] Kesulitan mengklaim hak atas tanah sering diterjemahkan menjadi kurangnya akses ke sumber daya dan lingkungan.

Seperti seluruh warga kota, penghuni kawasan kumuh berperan dalam mengurangi emisi karbon. Tanggung jawab kolektif tidak berarti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama, tetapi keputusan tentang pengurangan emisi harus diambil secara kolektif. Keputusan ini harus mempertimbangkan dampak kebijakan publik untuk mempromosikan penggunaan energi rendah karbon terhadap pihak yang paling dirugikan, yang cenderung memiliki jejak karbon lebih rendah, seperti membatasi akses energi (Kotak 4.4).[49] Untuk membuka kunci nilai lingkungan urbanisasi, masyarakat miskin perkotaan harus terwakili dan kebutuhannya diprioritaskan dalam segala hal proses pengambilan keputusan, baik itu tentang ruang kota bersama (*urban commons*), ruang udara bersama (*atmospheric commons*), ruang terbuka, dan penggunaan sumber daya.

Kotak 4.4: Mengembangkan agenda penelitian tentang akses energi perkotaan: pengalaman dari Maputo, Mozambik

Di Maputo, Mozambik, distribusi listrik tidak merata dan beragam, tetapi penggunaan arang ada di mana-mana. Anggota rumah tangga menyesuaikan penggunaan energinya tergantung pada sumber daya yang tersedia. Mereka menggabungkan berbagai bahan bakar untuk mengamankan pasokan, menyesuaikan kebutuhan mereka sendiri untuk mengatasi saat-saat kelangkaan. Arang tetap menjadi sumber energi dominan bagi sebagian besar rumah tangga. Faktor seperti kemungkinan untuk membatasi penggunaan, pengendalian rantai pasokan dan persepsi keamanan rumah tangga mempersulit transformasi ke energi alternatif seperti gas alam cair (LPG), meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi perubahan tersebut.

Ada kebutuhan meningkat akan penelitian yang menantang asumsi lama tentang akses energi di area perkotaan, sejalan dengan persyaratan TPB untuk menyelaraskannya dengan hasil kebutuhan, perspektif dan aspirasi masyarakat. Akses energi terkait dengan ketahanan masyarakat kota dan kemungkinan untuk melahirkan masyarakat berkelanjutan secara jangka panjang.

Tiga pertanyaan harus memandu agenda penelitian di energi perkotaan terinspirasi dari prinsip keadilan lingkungan:

"Apa kebutuhan pengguna pada konteks tertentu?" membutuhkan pemahaman aspirasi masyarakat dalam kendala sosial dan spasial tertentu.

"Apakah kita memiliki informasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan tentang akses energi? " mencerminkan kekurangan data kronis tentang permintaan dan penggunaan energi, khususnya di daerah perkotaan yang berkembang pesat.

"Apakah ada kesesuaian antara kebijakan pemerintah tentang akses energi dan kebutuhan masyarakat miskin perkotaan? " membahas peran mendasar yang dapat dimainkan oleh perencanaan dalam mentransformasikan tentang akses energi berkelanjutan.

Sumber: Castán Broto et al. 2017; Castán Broto 2017a.

Untuk membuka kunci nilai lingkungan urbanisasi, masyarakat miskin perkotaan harus terwakili dan kebutuhannya diprioritaskan dalam segala hal proses pengambilan keputusan, baik itu tentang ruang kota bersama (*urban commons*), ruang udara bersama (*atmospheric commons*), ruang terbuka, dan penggunaan sumber daya.

Representasi berbagai kelompok sosial di proses pengambilan keputusan adalah kunci mencapai hasil yang lebih kuat. Selain kondisi kehidupan fisik dan keberhasilan atau kegagalan struktural tata kelola, kapasitas untuk menanggapi tantangan lingkungan dan nilai tambah lingkungan tergantung proses sosial dan budaya di perkotaan. Perspektif holistik diperlukan karena proses ini memainkan peran penting dalam mendefinisikan tujuan keberlanjutan dan ketahanan, ambang batas, dan keluaran. Contohnya, aspek seperti modal sosial dan keragaman budaya terkait erat dengan proses meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.[50]

Meski urbanisasi merupakan fenomena global, hal ini juga merupakan proses kompleks yang keberagaman dan dinamikanya tidak dapat dijelaskan secara memadai dalam seperangkat prinsip universal.[51] Misalnya, upaya memodelkan dampak urbanisasi menunjukkan bahwa jejak lingkungan beragam secara signifikan di seluruh kelompok pendapatan (umumnya peningkatan emisi karbon di kelompok berpenghasilan rendah tetapi menghambat peningkatan emisi di kelompok berpenghasilan tinggi).[52] Kepadatan pembangunan perkotaan memungkinkan pengurangan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi karbon, meski hubungan ini beragam secara geografis.[53] Ada kebutuhan untuk mencirikan banyak proses dalam hubungannya terhadap dampak terhadap lingkungan perkotaan, memahami urbanisasi sebagai rangkaian proses saling terkait yang konsekuensinya tergantung beragam pelaku. [54]

Dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, lingkungan perkotaan dianggap sebagai bidang yang

terbagi menjadi sektor terpisah (bukan saling berhubungan), terfokus pada intervensi individu yang tidak membahas penyebab degradasi struktural lingkungan. Transformasi bergantung pada kemungkinan proses perkotaan untuk mengatasi penggerak struktural di lintas sektor yang berbeda. Bukti terbaru menunjukkan bahwa gerakan sosial dan kelompok aktivis memiliki peran penting agar pelaku tersebut terlihat. Pada Mei 2019, pemogokan sekolah "Fridays for Future" ("Jumat untuk Masa Depan") terjadi di 1.594 kota di 118 negara, [55] membuktikan bahwa kota merupakan tempat penting mobilisasi menuntut tindakan perubahan iklim.[56] Greta Thunberg adalah tokoh paling menonjol dalam gerakan global generasi muda yang meminta pertanggungjawaban pemerintah. Dia menekankan kurangnya kemauan politik dan tanggung jawab dalam menyelamatkan bumi. Urbanisasi dan dampak lingkungan harus dipahami para politisi dan ekonom sebagai sumber krisis lingkungan global.

Pandemi COVID-19 membawa perubahan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah darurat melawan virus korona meningkatkan harapan penggiat lingkungan untuk merespon pemanasan global; COVID-19 menegaskan masa depan kota hijau adalah sebuah keharusan. Pada puncak karantina wilayah global pada Maret dan April 2020 untuk memperlambat penyebaran virus, COVID-19 menyebabkan penurunan emisi karbon secara mendadak dan peningkatan kualitas udara di kota, menggambarkan pengurangan karbon dan lingkungan masa depan berkelanjutan yang telah diperjuangan selama beberapa dekade (Kotak 4.5). "Langkah stimulus yang dirancang dengan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi hijau, dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, mencegah aset terlantar dan menghindari sistem infrastruktur dan transportasi yang meningkatkan emisi dan polusi tinggi yang mungkin bertahan beberapa dekade. Penyelarasan perencanaan dan pembangunan kota dengan kesehatan bumi dan manusia menjadi penting untuk menghindari ketidakseimbangan ekologis, peningkatan risiko paparan patogen, dan munculnya penyakit baru. Hanya dengan memanfaatkan momen ini untuk memperluas investasi di transformasi hijau yang adil akan menciptakan solusi langgeng dan mengurangi risiko krisis masa depan dan memitigasi dampak perubahan iklim secara memadai. "[57]

Langkah stimulus yang dirancang dengan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi hijau, dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, mencegah aset terlantar dan menghindari sistem infrastruktur dan transportasi yang meningkatkan emisi dan polusi tinggi yang mungkin bertahan beberapa dekade.

4.3 Memetakan Ruang Aksi untuk Nilai Lingkungan Perkotaan

Penggiat, perencana, dan pengelola kota yang berkecimpung di lapangan telah lama menyadari tidak ada satu solusi sederhana yang dapat diterapkan sama di seluruh kota untuk meningkatkan nilai lingkungan urbanisasi.[58] Terdapat beberapa model urbanisme yang mencakup berbagai aspek kehidupan perkotaan yang utopis, visi berorientasi teknologi berkelanjutan dan rendah karbon. Namun model "cerdas" ini mengutamakan kepentingan korporasi di atas kebutuhan sehari-hari warga, perusahaan menengah, dan lembaga daerah, yang akhirnya gagal mengatasi tantangan perkotaan.[59] Hal ini memerlukan pendekatan kebijakan pengembangan perkotaan jangka panjang terintegrasi, NUA menghindari model urbanisme teknokratis. Ada beberapa kebijakan, strategi, praktek, dan pelaku yang efektif ditingkatkan untuk memperkuat nilai lingkungan urbanisasi berkelanjutan dalam konteks berbeda, seperti keselarasan alam di kota untuk mewujudkan nilai lingkungan.

Kotak 4.5: COVID-19 dan pengurangan emisi

Karantina wilayah yang disebabkan COVID-19 telah mengakibatkan perbaikan di lingkungan perkotaan. Emisi CO_2 global pada tahun 2020 diperkirakan turun delapan persen atau hampir 2,6 miliar ton oleh apa yang dianggap sebagai penurunan emisi karbon tahunan terbesar yang pernah ada. Di Tiongkok, emisi CO_2 turun 25 persen atau lebih pada Januari 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019, terutama didorong oleh 37 persen penurunan konsumsi batu bara dan penggunaan minyak mentah. Di India, emisi CO_2 turun untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Emisi ini berkurang 15 persen pada Maret dan 30 persen pada April 2020 tidak hanya sebagai konsekuensi dari karantina wilayah COVID-19, tetapi juga karena prekoronavirus yang melemahkan permintaan batu bara. Pada Maret 2020, Kota New York mengalami penurunan 5–10 persen emisi CO_2 dan 50 persen penurunan emisi karbon monoksida terutama disebabkan oleh penurunan lalu lintas sebesar 35 persen.

Hanya dalam dua bulan setelah PSBB COVID-19, para ilmuwan dan penduduk mengamati penurunan polusi udara yang luar biasa. Citra satelit dari Provinsi Hubei di Tiongkok menunjukkan penurunan signifikan ke tingkat PM2,5 nitrat setelah pemberlakuan pembatasan perjalanan untuk mengekang penyebaran virus. Tren serupa diamati di Korea Selatan, Italia, Spanyol, Inggris, India, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Kota-kota di Amerika Latin dan Karibia menyaksikan penurunan tingkat nitrogen oksida setelah karantina wilayah. Sekitar sepuluh hari terakhir dan sepuluh hari pertama Maret 2020, persentase perubahan nitrogen dioksida di atmosfer menurun sebesar 40–70 persen di Bogotá, Lima, Buenos Aires, Medellín, Quito dan Guayaquil, yang berada di bawah karantina wilayah total; dan 5–35 persen di Rio de Janeiro, Kota Meksiko, São Paulo, Kingston dan Santiago, yang menerapkan karantina wilayah sebagian.

Meskipun luar biasa, perbaikan lingkungan ini kemungkinan hanya berumur pendek dan akan pulih kembali setelah ekonomi global kembali ke tingkat produksi dan konsumsi sebelum virus korona, kecuali negara-negara menggunakan krisis untuk memenuhi komitmen pembangunan berkelanjutan dengan berinvestasi dalam bentuk energi yang lebih bersih dan lebih tangguh. Negara harus melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi bersih. Energi terbarukan adalah cara paling hemat biaya untuk mengurangi emisi karena negara tidak dapat bergantung pada dampak pandemi yang tidak disengaja untuk memicu perbaikan lingkungan. Seperti dalam kasus krisis sebelumnya, kecuali gelombang Investasi untuk memulai kembali ekonomi didedikasikan untuk infrastruktur energi yang lebih bersih dan lebih tangguh, dapat meningkatkan emisi menjadi lebih besar dari penurunan.

Sumber: Disarikan dari Bab 1.

4.3.1 Memperkenalkan Solusi Berbasis Alam

Aksi perubahan iklim dan keberlanjutan di lingkungan perkotaan lebih efektif bila dikaitkan dengan manfaat sosial dan lingkungan.[60] Dalam hal ini, pendekatan sektoral bermasalah tidak hanya karena tidak memadai untuk menangani berbagai tantangan lingkungan pada sistem yang kompleks seperti kota, namun juga merugikan aksi transformatif jika manfaat bersama dibatasi dan berdampak negatif pada kehidupan dan pihak penerima manfaat. Dalam konteks internasional saat ini, aksi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati akan paling efektif bila dikaitkan dengan agenda keberlanjutan yang sedang berjalan.[61]

Dalam konteks internasional saat ini, aksi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati akan paling efektif bila dikaitkan dengan agenda keberlanjutan yang sedang berjalan.

Solusi berbasis alam (NBS) merupakan pendekatan terintegrasi untuk memberikan nilai lingkungan di seluruh kontinum perkotaan-perdesaan. Persatuan untuk Konservasi Alam Internasional (International Union for Conservation of Nature (IUCN)) mendefinisikan Solusi berbasis alam sebagai "tindakan melindungi, mengelola, dan memulihkan alam atau ekosistem terbangun secara berkelanjutan dengan

mengatasi tantangan sosial secara efektif dan adaptif, menyediakan kesejahteraan manusia dan manfaat keanekaragaman hayati dengan secara bersamaan"(Gambar 4.1).[62] Solusi berbasis alam melekatkan nilai lingkungan pada praktik pengelolaan air dan lahan dari tingkat mikro, seperti meningkatkan porositas dan permeabilitas tanah, ke tingkat makro, seperti meningkatkan konektivitas dan ketahanan lanskap (Tabel 4.2).[63] Di daerah perkotaan, NBS dikaitkan dengan efek positif pada kedua hal: perkotaan alami dan kesehatan manusia.[64] Namun, saat menerapkan NBS untuk lingkungan perkotaan, masih ada jurang antara pengetahuan tentang efektivitas solusi untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tantangan implementasi terkait persaingan lahan, peraturan tumpang tindih, dan integrasi infrastruktur yang ada.[65]

Solusi berbasis alam dikaitkan dengan efek positif pada kedua hal: perkotaan alami dan kesehatan manusia

Tabel 4.2: Beragam tipe solusi berbasis alam dengan dampak di berbagai tingkatan

Jenis tindakan	Definisi	Parameter fisik terpengaruh	Jasa ekosistem yang diberikan (menambah nilai lingkungan)
1 Pertanian organik [66]	Praktik pertanian terintegrasi dengan tujuan keberlanjutan, dengan sistem sertifikasi yang diakui	Infiltrasi Intersepsi Kolam penampungan Perlindungan permukaan tanah Ketahanan ekosistem	Perlindungan tanah Keanekaragaman Hayati Penangkapan karbon Pengaturan kualitas air Pertumbuhan biomassa Pengaturan nutrisi Pengendalian banjir
2 Merimbakan kembali yang terkelola[67]	Teknik manajemen pertanahan untuk memulihkan proses alamiah seperti peraliran sungai alamiah, suksesi habitat dan rantai trofika	Infiltrasi Intersepsi Perlindungan permukaan tanah Ketahanan ekosistem Ketidakterhubungan	Perlindungan tanah Keanekaragaman Hayati Penangkapan karbon Pengaturan kualitas air Pengendalian banjir
3 Hutan pertanian (*agro forestry*)[68]	Teknik manajemen pertanahan yang menggabungkan kehutanan dan pertanian / padang rumput	Infiltrasi Retensi air tanah Perlindungan permukaan tanah Ketahanan pohon	Perlindungan tanah Regulasi mengatasi kekeringan Regulasi pengelolaan kualitas air Penangkapan karbon Keanekaragaman Hayati
5 Pemulihan lahan [69]	Aksi konservasi untuk memulihkan lahan rusak (tercemar atau terdegradasi) menjadi lahan produktif, termasuk tanah dan lanskap yang sehat	Infiltrasi Intersepsi Ketahanan ekosistem Ketidakterhubungan Retensi air dan sedimen	Perlindungan tanah Keanekaragaman Hayati Penangkapan karbon Regulasi pengelolaan air Pertumbuhan biomassa Pengaturan nutrisi Pengendalian banjir
6 Pemulihan rawa[70]	Aksi konservasi untuk memulihkan fungsi alami lahan basah	Ketidakterhubungan Retensi air dan sedimen	Keanekaragaman Hayati Pengaturan pengelolaan air Regulasi nutrisi Pengendalian banjir
7 Perangkap sedimen [71]	Alat pencegahan erosi dan limpasan berbasis vegetasi di tingkat tangkapan	Ketidakterhubungan Infiltrasi Kolam penampungan Intersepsi Retensi air dan sedimen	Perlindungan tanah Penangkapan karbon Pengaturan pengelolaan air Pertumbuhan biomassa Pengaturan nutrisi Pengendalian banjir

Sumber: Adaptasi dari Keesstra dkk, 2018

Gambar 4.1: Kerangka penilaian Solusi Berbasis Alam (NBS)

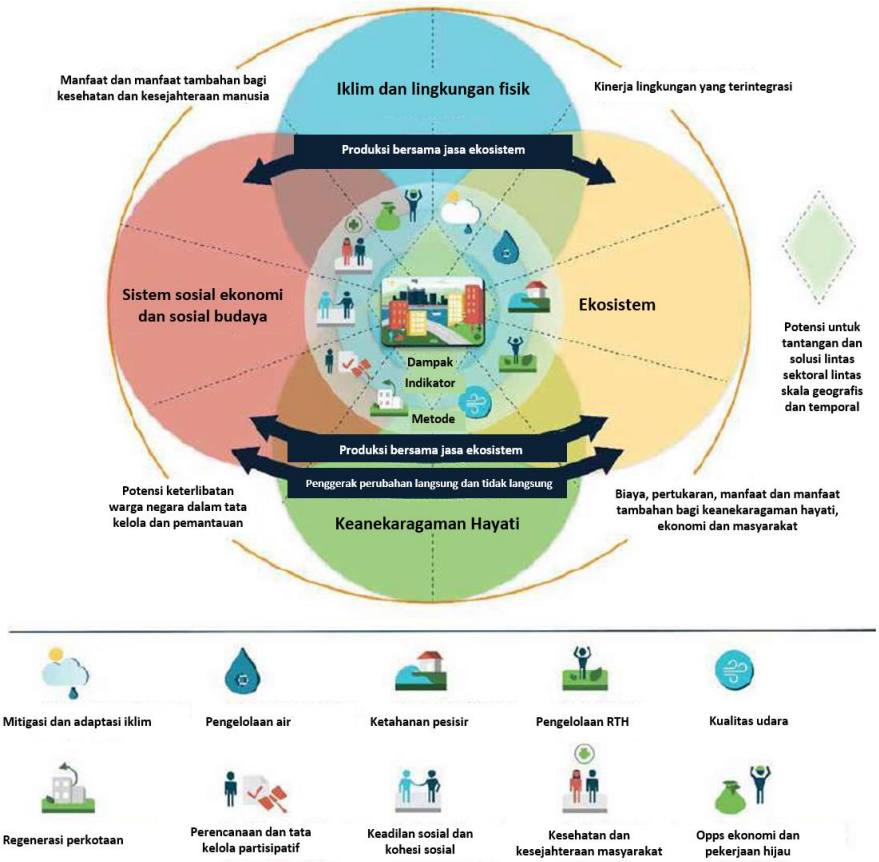

Kerangka penilaian Solusi Berbasis Alam (NBS) mempertimbangkan berbagai elemen sistem, 10 area tantangan yang dapat ditangani NBS di lingkungan perkotaan dan serangkaian indikator dan metode untuk menilai dampak NBS di dalam dan di seluruh area tantangan (Raymond et al.2017 , Kabisch dkk. 2016).

Solusi berbasis alam terkait erat dengan infrastruktur hijau dan biru yaitu jaringan terencana fitur berbasis alam dan air secara strategis, terintegrasi dengan lingkungan perkotaan, serta menyediakan banyak fungsi.[72] Terdapat contoh infrastruktur hijau terpadu yang menarik dalam proses urbanisasi. Belanda telah menerapkan Jaringan Ekologi Nasional (National Ecological Network (NEN)) sejak 1990-an, sebuah proyek nasional yang menghubungkan kawasan alam dan lahan pertanian kota sekitar. Proyek ini telah meningkatkan, menghubungkan dan memperluas kawasan alam mencakup 20 taman nasional, habitat baru satwa liar, lahan pertanian ramah lingkungan, dan lebih dari 6 juta hektar lanskap perairan dilestarikan.[73] Namun, contoh global masih sedikit dan jarang. Di banyak wilayah, terdapat kelangkaan informasi tentang luas dan status konservasi infrastruktur hijau dan biru. Di Afrika, ada hambatan pengembangan infrastruktur hijau, termasuk hambatan teknis (kurangnya data dan kapasitas) serta budaya dan hambatan politik yang lebih rumit (nilai dan persepsi lokal infrastruktur hijau, ketidaksetaraan akses, pertaruhan konflik dan ketidaksetaraan ruang).[74] Proyek restorasi lahan memiliki potensi untuk memberikan manfaat bersama semua TPB sejalan dengan rekomendasi NUA, tetapi bergantung pada adopsi pendekatan lanskap terintegrasi yang memperhitungkan variabilitas ruang kawasan perkotaan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam. [75]

Di banyak wilayah, terdapat kelangkaan informasi tentang luas dan status konservasi infrastruktur hijau dan biru

Tanner Springs Park adalah lahan basah yang telah diperbaiki dan ruang publik yang dinaturalisasi, Portland, Oregon, AS. © Stephanie Braconnier / Shutterstock

Kotak 4.6: Dari krisis ke ketahanan: pertanian perkotaan dan pinggiran kota di Rosario, Argentina

Kota Rosario digambarkan oleh para aktivis lingkungan sebagai pulau praktik agroekologis di lautan kedelai. Sejak Argentina menyetujui penanaman kedelai hasil rekayasa genetika pada tahun 1996, area panen telah berkembang dari 6 juta ha menjadi 20 juta ha (FAO, 2015). Sebagian besar kedelai Argentina ditanam di Provinsi Santa Fe dan diproses di Kota Rosario untuk ekspor. Produksi kedelai telah menggusur tanaman ekspor tradisional lainnya. Hortikultura di sekitar Kota Rosario berada di bawah tekanan karena petani menyewa tanah mereka untuk produksi kedelai.

Setelah krisis ekonomi 2000, 60 persen penduduk Rosario memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Pada 2002, pemerintah kota, bekerja sama dengan dua mitra (National Pro-Huerta programme dan Centre for Agroecological Production Studies, sebuah LSM) menemukan solusi untuk kekurangan pangan yang diderita penduduk kurang beruntung. Rencana awal untuk 20 kelompok tani di seluruh kota segera berkembang menjadi 800 kebun komunitas untuk memenuhi kebutuhan 40.000 orang. Pada 2004, UN-Habitat menganugerahi Penghargaan Internasional untuk Praktik Baik Pengembangan Perkotaan kepada Rosario. Kini, diperkirakan 1.800 petani bekerja di Kebun komunitas Rosario, 250 di antaranya adalah produsen komersial penuh waktu yang diselenggarakan di Jaringan Pengebun Rosario (Rosario Gardeners' Network).

Program ini mempromosikan praktik agroekologi sambil mengembangkan pelatihan sesama. Penjatahan dikembangkan di lahan marginal yang tidak cocok untuk infrastruktur perkotaan. Rosario memiliki pertanian perkotaan dan pinggiran kota yang terintegrasi dalam rencana pembangunan perkotaan dan terkoordinasi dengan strategi pengelolaan ekosistem dan pengelolaan alam.

Sumber: Food and Agriculture Organization (FAO (http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/ggclac/rosario.html)).

Penyelarasan infrastruktur biru dan hijau melalui kegiatan produktif yang mengaktifkan pengetahuan sosio-ekologis lokal dapat membangun ketahanan jangka panjang. Di Rosario, Argentina, program pertanian perkotaan dan pinggiran kota menangani kebutuhan kelompok marginal sekaligus mengembangkan model agroekologi alternatif untuk produksi pangan yang meningkatkan ekosistem perkotaan (Kotak 4.6). Program agroekologi perkotaan dan pinggiran kota membutuhkan lebih dari sekedar data kuantitatif seperti indikator untuk mengidentifikasi kelompok target. Bentuk pengetahuan penting yang membuat proyek ini terwujud berasal dari pengalaman aktual pertanian: penguasaan pertanian teknik; identifikasi pertanian dan peruntukan lokasi (pemahaman prosedur penguasaan lahan, memanfaatkan jejaring sosial dan mengakses pendaftaran tanah lokal); terpenting, identifikasi dan penerapan pengetahuan sosio-ekologi yang relevan untuk keberlanjutan program jangka panjang, seperti, pendirian bank benih. Ketika petani Rosario tertarik untuk bereksperimen dengan beragam jenis tanaman, bank benih yang ada menekankan pada pendokumentasian pengetahuan lokal tentang lingkungan alam (tradisi Guaraní tentang tumbuhan dan potensi manfaatnya). Meskipun pengalaman pelokalan bertani di perkotaan tampak terbatas, perebutan pangan di perkotaan terkait erat dengan perjuangan untuk mengklaim hak atas kota dan gerakan pangan perkotaan menyediakan kesempatan untuk memberdayakan komunitas rentan dan membangun ketahanan perkotaan.[76]

4.3.2 Mengatasi Penyebab Struktural Kerentanan

Perencanaan pembangunan kota perlu mengenali urgensi tantangan adaptasi, terutama bagi mereka yang tinggal di permukiman informal. Dampak perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati berinteraksi dengan proses restrukturisasi ekonomi dan perubahan sosial global yang berdampak langsung pada kehidupan penduduk perkotaan. Kerangka kerja "eksposur ganda" (Gambar 4.2) mengilustrasikan hubungan proses perubahan ekonomi global dan hasil akhir perubahan lingkungan.[77] Di Manila, Filipina, globalisasi mengubah model urbanisme sehingga respon perencanaan infrastruktur berupa privatisasi. Konsekuensi langsung dari privatisasi adalah meningkatnya ketimpangan dan ketahanan iklim yang tidak merata, menciptakan metropolis terpolarisasi. Masyarakat yang tinggal di situasi permukiman informal atau rawan memiliki kerentanan ganda. Pertama, area permukiman berada di kawasan rawan bencana (dataran banjir, lereng rawan longsor), kedua, ketika bencana, daerah tersebut mengalami kesulitan layanan darurat. Lembaga perlu menilai dan menangani karakter risiko berjenjang yang rumit dan saling berhubungan.[78] Solusi berbasis alam saja tidak cukup untuk mengatasi pemicu struktural kerentanan, yang membutuhkan proses perubahan sosio-ekologis mendalam, termasuk langkah perlindungan sosial, mendukung ekonomi lokal, dan memberikan akses ke layanan penting dan infrastruktur pelindung.

Gambar 4.2: Kerangka kerja paparan ganda yang diterapkan pada perencanaan infrastruktur kota

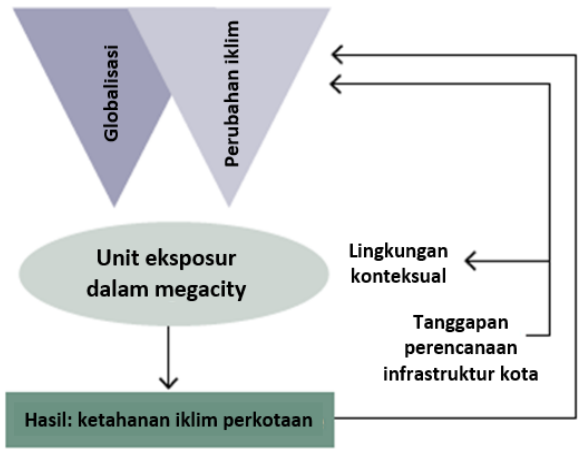

Sumber: diadaptasi dari Meerow, 2017; Leichenko dan O'Brien, 2008.

Pergerakan privatisasi dan kota terpolarisasi serta jurang pemisah kaya dan miskin adalah salah kaprah. Pembangunan tidak terencana dan kurangnya layanan di permukiman informal dapat mengarah pada degradasi ekologi pada tapak tertentu, di mana hasil desain buatan mandiri biasanya dalam bentuk perkotaan ramah pejalan kaki dan rendah karbon dengan jejak karbon lebih rendah daripada lingkungan formal berpenghasilan tinggi. Peneliti di Rio de Janeiro memetakan 111 inisiatif perkotaan berkelanjutan yang dihasilkan komunitas Kota Favela (Kotak 4.7). Kota bisa merangkum pelajaran berguna tentang urbanisasi berkelanjutan dan nilai

lingkungan dari permukiman informal yang berusaha memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kebutuhan dasar layanan kota.

Kota bisa merangkum pelajaran berguna tentang urbanisasi berkelanjutan dan nilai lingkungan dari permukiman informal yang berusaha memenuhi kewajibannya dalam menyediakan kebutuhan dasar layanan kota.

Kotak 4.7: Jaringan Favela berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brasil

Favela adalah rumah bagi inisiatif komunitas yang tak terhitung jumlahnya yang mana penghuni sendiri menangani berbagai tantangan. Semua inisiatif berfungsi untuk meningkatkan kesadaran penghuni yang mendapat manfaat yang dibuat perlu akibat hilangnya investasi publik. Banyak inisiatif memajukan kota berkelanjutan ditemukan di Kota Favela - kualitas yang sulit untuk dikembangkan melalui perencanaan terpusat dan perencana kota di seluruh dunia berusaha susah payah menstimulan, agak sedikit dan terlambat.

Misal, Vale Encantado dipasang biodigester dengan bantuan universitas lokal untuk menghasilkan gas memasak untuk beberapa dari 25 rumah Favela dan sebuah koperasi ekowisata setempat.

Favela menanggapi berbagai tantangan hidup melalui aksi individu dan proyek kolektif lokal, menciptakan pabrik solusi bersama. Mengingat sejarahnya, Favela adalah area kota yang membutuhkan proses pembangunan sendiri berdasarkan aset mereka, dan mengatasi tantangan mereka dengan kualitas positif sebagai titik awal, tanpa mengikuti karakteristik model pembangunan tidak berkelanjutan yang sering terjadi di area formal kota. Favelas menggambarkan peluang pembangunan berkelanjutan di luar prinsip formal tradisional, berdasarkan aset tak terhitung dari Favela itu sendiri.

Sumber: Komunitas Catalytic, 2018; Mendes, 2018.

Permukiman kumuh Rocinha di Rio de Janeiro, Brazil. © UN-Habitat/José Bernardo Junior

4.3.3 Kondisi Memanfaatkan Nilai Lingkungan melalui Urbanisasi

Agenda Baru Perkotaan mengakui bahwa tidak ada solusi universal yang siap pakai untuk mewujudkan keberlanjutan. Sebaliknya, pengerahan agenda pembangunan global di kota-kota dan permukiman membutuhkan pendekatan terintegrasi. Aksi keberlanjutan untuk menguak nilai lingkungan bergantung pada kemampuan berbagai pelaku untuk menyesuaikan pilihan terhadap konteks tempat di mana mereka beroperasi. Terlebih pengakuan agenda terhadap: "hak atas kota" dan "Kota untuk semua" secara langsung mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan sebagai pendukung penyampaian tindakan inklusif.[79] Dalam hal ini hal, memanen nilai lingkungan dari urbanisasi berkelanjutan bertumpu pada dua pertimbangan mendasar.

Pertimbangan pertama adalah **menempatkan setiap tantangan perkotaan pada konteks yang lebih luas yang di mana hal itu terjadi. Ini membutuhkan pandangan lingkungan perkotaan yang mencerminkan kompleksitas dan memungkinkan identifikasi konsekuensi dan manfaat (*trade-off*) serta interkoneksi antara berbagai dampak**. Hal ini mengakui kota sebagai sistem kompleks dan melibatkan hubungan sosio-ekologis di kota. Hubungan sosio-ekologis ini perlu untuk dipahami secara historis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan institusi perkotaan. Misalnya tren segregasi dalam sejarah Kota Guatemala saat ini terwujud dalam pola segregasi sosial-spasial — di mana populasi berpenghasilan rendah menetap di wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya seismik dan geomorfik dengan akses air terbatas, sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi menempati tempat yang lebih aman dengan lokasi yang mereka ubah menjadi lingkungan yang aman.[80]

Aksi keberlanjutan untuk menguak nilai lingkungan bergantung pada kemampuan berbagai pelaku untuk menyesuaikan pilihan terhadap konteks tempat di mana mereka beroperasi

Memahami sejarah perkotaan sangat penting untuk menilai bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kelompok sosial yang berbeda dan memperluas aksi keberlanjutan yang dapat mengekspos dampak yang tidak diinginkan

Memahami konteks membutuhkan data konteks. Bagi manajer kota, membuktikan tindakan mereka menambah nilai lingkungan bergantung pada ketersediaan dan kualitas data. Strategi tindakan efektif membutuhkan data untuk menentukan nilai lingkungan sekarang dan bagaimana itu mungkin berubah. Jurang antara yang besar dalam data perkotaan ada di kota dan kawasan perkotaan, terutama di daerah yang mengalami urbanisasi cepat seperti Afrika dan Asia Selatan. Data permukiman informal dan kawasan perkotaan dan pinggiran kota yang cepat tumbuh, kurang tersedia, terutama berkaitan pengurangan risiko bencana.[81] Jurang antara ini mengakibatkan muncul proyek pencacahan mandiri: sebuah praktik yang dilakukan penghuni permukiman informal selama beberapa dekade, dan terkini, berbagai bentuk pemetaan permukiman perkotaan seperti Inisiatif Jutaan Lingkungan (Million Neighbourhood Initiative).[82] Ketersediaan platform data terbuka meningkatkan ketahanan dengan memungkinkan warga berbagi data waktu nyata (*real-time*) saat bencana dan menghimpun sumber data (*crowdsourcing*) untuk memetakan akibat dan dampak.[83] Pengembangan sumber data baru memerlukan standarisasi dan keterandalan.[84]

Data ditargetkan ke bidang strategis prioritas. Sebuah studi meneliti 28 basis data perkotaan internasional[85] untuk wawasan politik manajemen data perkotaan.[86] Di sini ditemukan bahwa basis data ini kekurangan informasi area kritis di mana aksi diperlukan. Selain itu, identifikasi jaringan pelaku yang menguasai pengelolaan dan aliran data, sebagian besar lembaga internasional (PBB dan Bank Dunia) serta organisasi filantropis. Selain hal genting ini, masih ada ketidakseimbangan cakupan global dibuktikan kurangnya keterwakilan memadai dari daerah tertinggal.[87]

Meski pemerintah daerah mengumpulkan data secara efektif, mereka menyadari tidak memiliki kapasitas menganalisis,[88] bahkan, tanpa kemampuan membagikannya dengan warga dan memperdebatkan

implikasinya. Selain itu, menggenggam pengetahuan tertentu tentang lingkungannya mungkin merupakan satu-satunya cara efektif bagi masyarakat termarginalkan untuk menegaskan segala bentuk kontrol atas lingkungan perkotaan dan proses biofisik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.[89]

Agenda Baru Perkotaan mendukung pendekatan manajemen perkotaan yang holistik yang mengintegrasikan berbagai cara untuk mengetahui dan mengalami hubungan sosio-ekologis. "Ko-produksi pengetahuan atau pengetahuan yang dihasilkan bersama" menjadi prinsip penting bagi perencanaan dan manajemen perkotaan, baik terkait bentuk pemerintahan kooperatif, perencanaan kolaboratif atau pengambilan keputusan partisipatif. Ko-produksi pengetahuan memungkinkan terbentuknya keputusan kolektif terkait lingkungan dan pengelolaan perkotaan yang mengakui berbagai bentuk keahlian, melampaui batas kelembagaan, dan menghindari legitimasi perspektif tertentu di atas yang lain. [90] Pendekatan perumusan kebijakan perkotaan memudahkan dimasukkannya berbagai perspektif sekaligus mempertanyakan penyebab struktural ketimpangan dan memfasilitasi adopsi pendekatan titik-temu untuk menghasilkan pengetahuan dan data.[91] Ko-produksi bergerak melampaui fokus indikator yang masih mendominasi baik agenda pembangunan internasional dan manajemen perkotaan.[92]

Ko-produksi pengetahuan memungkinkan terbentuknya keputusan kolektif lingkungan dan pengelolaan perkotaan yang mencakup berbagai keahlian, melampaui batas kelembagaan dan menutup legitimasi beberapa perspektif lain

Pertimbangan kedua adalah **setiap gagasan manajemen atau pembangunan perkotaan harus eksplisit memasukkan prinsip keadilan**. Keharusan ini mempertimbangkan implikasi tindakan politik dan sosial yang dimaksudkan membuka nilai lingkungan dari urbanisasi ketika tindakan kebijakan ditentukan. Dengan prinsip ini, keadilan sosial menjadi syarat transisi adil menuju keberlanjutan.[93] Kerangka "keberlanjutan yang adil" menuntut keadilan sosial dan lingkungan di dalam dan antarnegara harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan kesepakatan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Gambar 4.3).[94] Menurut salah satu studi terbaru tentang 400 inisiatif berkelanjutan di lebih dari 200 wilayah perkotaan, prinsip ini sudah tertanam dalam arus aksi lingkungan tingkat lokal ketika kota berupaya mencapai NUA dan TPB.[95]

Namun, wacana keadilan lingkungan harus memastikan bahwa hal itu tidak menutup pengakuan atas alternatif perspektif tradisi pengetahuan lain, seperti masyarakat adat yang tinggal di kota. Sebaliknya, proses partisipasi publik untuk aksi lingkungan perkotaan harus membuka kesempatan yang adil untuk beragam suara, dengan perhatian khusus pada pencegahan cengkeraman kerangka acuan yang dominan, seperti yang didukung oleh ahli atau dikuantifikasi melalui indikator daripada nilai kehidupan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat itu sendiri. Kerangka hukum internasional harus melindungi budaya dan integritas biologis masyarakat adat.[96] Budaya dan penderitaan sosial sebagian masyarakat adat terkait migrasi desa-kota dan degradasi ekosistem terkadang terkait dampak perubahan iklim.

Wacana keadilan lingkungan harus memastikan bahwa itu tidak menutup pengakuan atas alternatif perspektif dari tradisi pengetahuan lain, seperti sebagai masyarakat adat yang tinggal di kota

Gambar 4.3: Prinsip keberlanjutan

Sumber: Agyeman, 2013

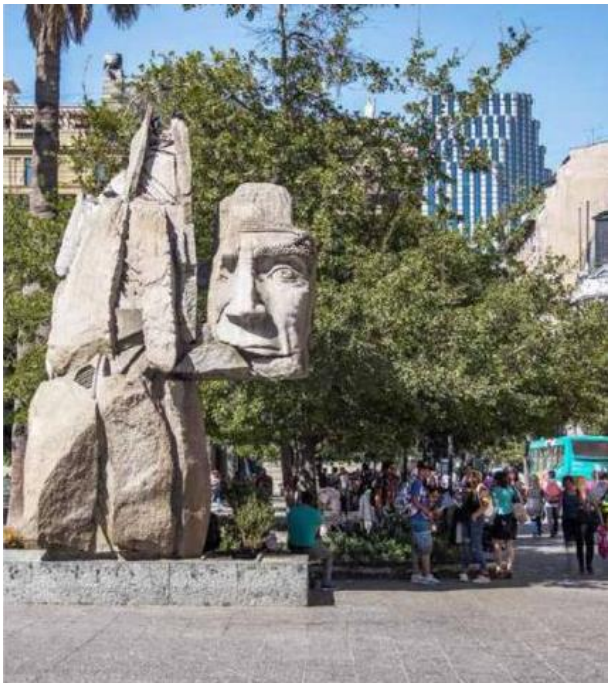

Monumen masyarakat adat (al Pueblo Indígena) di Plaza de Armas Square, patung dari Enrique Villalobos, Santiago, Chile. © Diego Grandi / Shutterstock

Seiring pertumbuhan penduduk asli perkotaan, kota berkembang melalui inisiatif nasional dan hasil tekanan akar rumput. Di Kanada, *laporan Komisi Fakta dan Rekonsiliasi tentang Warisan Sistem Residential School Indian 2015* (*Truth and Reconciliation Commission on the Legacy of the Indian Residential School System*) menuntut pemerintah untuk bertindak.[97] Di Australia, Redfern Aboriginal Tent Embassy menuntut otoritas Sydney untuk menjamin ketersediaan perumahan terjangkau.[98] Warga negara non-pribumi di Seattle, AS, membayar sewa sukarela kepada suku asli yang diberi nama kota itu dan pemilik properti di Portland mulai memberikan kembali tanahnya untuk kepemilikan adat. Pada Juli 2020, Hakim Agung AS menegaskan hak atas tanah adat, yang memutuskan Oklahoma Timur, termasuk sebagian besar Kota Tulsa, masuk reservasi Indian.[99] Secara keseluruhan, kota telah menanggapi dengan menambahkan bahasa asli untuk nama tempat dan papan nama, berkonsultasi dengan First Nations tentang proyek infrastruktur perkotaan, melakukan pengakuan tanah sebelum acara publik, serta mempromosikan penduduk asli kepemilikan tanah perkotaan dan pengembangan properti. Seperti yang ditunjukkan oleh upaya pemerintah dan akar rumput, kemitraan untuk masa depan yang kolektif dan berkelanjutan membutuhkan upaya kelembagaan untuk mengenali nilai lingkungan dan sosial dari kearifan lokal. [100]

Mengembangkan dari dua pertimbangan penting ini—mengenali konteks dan prinsip memajukan keadilan — ada enam prinsip yang membantu mempromosikan tindakan inklusif untuk penciptaan nilai lingkungan di perkotaan dan menyampaikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sejalan dengan penerapan kerangka kerja NUA (Kotak 4.8).

Ruang kota bersama (*urban commons*) merupakan sumber daya biofisik atau budaya yang dapat diakses oleh semua warga, terutama sumber daya yang berkontribusi terhadap pengembangan permukiman.[101] Urbanisasi memiliki kekuatan transformatif karena potensinya memungkinkan berbagi modal alam, sosial, dan budaya.[102] Ruang kota bersama (*urban commons*) merupakan dasar proses perancangan kolektif. Pada 2014, Bologna, Italia, mengadopsi Regulasi Bologna terkait Kolaborasi Sipil untuk Ruang Kota Bersama, sebagai alat kolaborasi antara warga, pemerintah daerah dan organisasi lainnya yang sepakat untuk merawat dan meregenerasi serta meningkatkan ruang publik dan RTH (Gambar 4.4). Sejak mengadopsi regulasi itu, Kota Bologna telah menandatangani lebih dari 400 kesepakatan regenerasi, yang semua berkontribusi pada nilai lingkungan kota.[103]

Pengalaman dan kebutuhan bagi yang kurang beruntung perlu dipertimbangkan terlebih dahulu karena mereka mungkin saja diabaikan dari perhatian kelompok hegemonik yang memiliki kewenangan kebijakan politik yang mengarah pada ketidaksetaraan lingkungan.[104] Memprioritaskan kelompok yang kurang beruntung dapat membangkitkan hasil lingkungan perkotaan yang lebih baik; kinerja lingkungan terkait praktik perekonomian informal di sektor utama seperti transportasi publik,[105] pengelolaan sampah[106] dan sanitasi.[107] Hal ini menunjukkan bukti bahwa menggabungkan ekonomi informal – urat nadi berbagai kota (Bab 3) — kebijakan dan riset keberlanjutan akan memberikan efek manfaat yang menambah nilai lingkungan.[108]

Memprioritaskan kelompok yang kurang beruntung dapat membangkitkan hasil lingkungan perkotaan yang lebih baik; kinerja lingkungan terkait praktik perekonomian informal di sektor utama seperti transportasi publik, pengelolaan sampah dan sanitasi.

Pengenalan kelompok sosial dalam ekonomi informal merupakan strategi penting untuk menunjukkan nilai lingkungan yang mementingkan kebutuhan kelompok rentan, misal, melalui strategi yang menguntungkannya secara langsung seperti mereformasi kerangka peraturan, menyederhanakan peraturan lingkungan, mendorong pengaturan tata kelola kolaboratif, dan mendukung lebih banyak pendekatan perencanaan kota inklusif yang meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan untuk "transisi ke ekonomi yang tidak hanya hijau, tetapi lebih inklusif".[109] Langkah ini terkait erat proses demokratisasi dan kreasi ruang untuk partisipasi yang cenderung terkikis pada saat krisis (Kotak 4.9). Mereka membutuhkan pendekatan lintas sektoral untuk memahami kebutuhan dan kepedulian kelompok masyarakat yang berbeda melalui diagnosis struktural penyebab diskriminasi dan eksklusi, daripada analisis dangkal dari karakteristik berbasis identitas.[110] Dengan kata lain, inklusivitas otentik harus menjadi pusat proses perencanaan kota dan wilayah.

Kotak 4.8: Enam prinsip penciptaan nilai lingkungan perkotaan

1. Kenali dan pahami ruang kota bersama.
2. Prioritaskan kebutuhan kelompok kurang beruntung, ciptakan forum inklusif di mana mereka dapat diwakili dengan cara bergerak melebihi standar umum.
3. Daftarkan berbagai pelaku melalui berbagai pengaturan kelembagaan dan tata kelola, seperti kemitraan dan jaringan, bereksperimen dengan bentuk baru tata kelola lingkungan kooperatif.
4. Mengadopsi kebijakan lingkungan antarbidang yang menantang hak istimewa, mengakui dan merayakan keragaman sosial dan ekologi.
5. Selidiki poin-poin intervensi yang memungkinkan transformasi cepat dari institusi yang ada.
6. Ciptakan peluang untuk inovasi dan eksperimen.

Gambar 4.4: Prinsip desain Siklus Kota Bersama yang digunakan di Bologna, Italia

Sumber: LabGov.City, 2018

Kotak 4.9: Di masa krisis, jaringan akar rumput adalah benteng pekerja informal

Perempuan di Pekerjaan Informal: Mendunia dan Menata (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)) melaporkan bahwa hak informal pekerja di seluruh dunia berada di bawah ancaman pembalikan keuntungan yang telah dimenangkan selama beberapa dekade. Namun, PKL menemukan jalan ke depan dengan mengaktifkan / memobilisasi jaringan pendukung (membangun gerakan) untuk menavigasi konteks yang menantang ini. Di Bangkok, Thailand, pemerintah daerah bekerja sama dengan PKL untuk menciptakan ruang komersial bersama yang bersih dan hidup. Setelah krisis politik 2014, penggusuran PKL besar-besaran pun terjadi, membahayakan mata pencaharian. Akibatnya, para PKL membentuk Pedagang Thailand untuk Pembangunan Berkelanjutan (Thai Vendors for Sustainable Development). Jaringan menciptakan ruang untuk mendukung tuntutan mereka terhadap pengelolaan ruang publik. Melalui pawai, kampanye sosial media dan perlawanan sipil, jaringan ini menampilkan tipe praktik partisipatif yang menambahkan nilai ruang publik Bangkok.

Belo Horizonte mendirikan ruang untuk kelembagaan partisipasi pemulung,yang bermanfaat bagi sistem pengelolaan sampah kota. Perubahan ideologis politik menyebabkan pemotongan anggaran ke Lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan daur ulang yang inklusif. Pemulung memobilisasi organisasi lokal dan nasional untuk menyampaikan strategi perjuangan. Pada 2017, mereka mampu membatalkan RUU pembakaran pada dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan. Baru-baru ini, mereka telah melobi aliansi negara untuk melanjutkan dialog seputar masalah krusial yang memengaruhi mereka.

Di Lima, sebuah peraturan kota yang berpihak pada kaum miskin didukung PKL secara langsung, setelah melalui proses dialog kolaborasi antara pembuat kebijakan dan PKL pada 2014. Namun, penerapan peraturan telah lemah, dan sebaliknya, PKL terus menghadapi penggusuran di sebagian besar pasar. Menanggapi hal ini, PKL Lima menggelar forum ahli dengan harapan bahwa pejabat kota akan mempertimbangkan proposal inovatif mereka.

Sumber: Harvey dan Ogando, 2019; UN-Habitat, 2018b.

Para pelaku dapat didaftarkan melalui pengaturan kelembagaan dan tata kelola, seperti kemitraan dan jaringan yang bereksperimen dengan bentuk baru tata kelola lingkungan kooperatif. Kebutuhan melibatkan banyak pelaku pada skala berbeda merupakan persyaratan yang dipersyaratkan oleh tata kelola lingkungan global.[111] Hal ini mungkin kurang dipahami adalah sejauh mana kemitraan tingkat lokal dapat melaksanakan aksi yang menciptakan perubahan secara global.[112] Gagasan kemitraan global tercantum di TPB 17, di mana penekanan diberikan pada penyelarasan tindakan pelaku internasional dan koordinasi penyampaian agenda nasional daripada melakukan aksi inkremental di tingkat lokal yang hanya memungkinkan perubahan kualitas hidup penduduk kota.[113] Fokus penyelarasan dan kepemimpinan pejabat kota dan pendukung kebijakan lingkungan dapat mengaburkan kompleksitas interaksi yang mendukung tindakan untuk meningkatkan nilai lingkungan daerah perkotaan. Para sarjana yang mempelajari proses tata kelola menggambarkan tindakan kebijakan muncul dari "kesemrawutan" sebuah proses yang bergantung pada bentuk konsensus temporal dan pendekatan eksperimental yang memungkinkan aksi.[114] Pertanyaannya adalah sejauh mana proses tata kelola musyawarah menghasilkan refleksi mendalam dari dinamika kekuasaan yang membentuk proses dan apakah secara eksplisit diakui melalui interaksi antara pelaku.[115]

Kebutuhan untuk melibatkan banyak pelaku pada skala berbeda merupakan persyaratan yang diakui dari tata kelola lingkungan global

Kebutuhan untuk **mengembangkan kebijakan lingkungan lintas sektoral** yang mempertanyakan hak istimewa sebagai akar masalah lingkungan dan merayakan keberagaman sosial. Lensa kebijakan ini sejalan dengan komitmen NUA untuk melaksanakan perencanaan dan investasi responsif usia dan gender, meskipun pendekatan lintas sektoral mempertimbangkan ras dan etnis. Dengan akar gerakan anti-rasisme dan feminis, keadilan lingkungan, sebagai gerakan sosial, memperhatikan mekanisme lintas sektoral eksklusi dan pengalaman orang marginal dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bagaimana struktur

sosial membentuk proses degradasi lingkungan mengkonsolidasikan gerakan keadilan lingkungan yang mengubah kebijakan perkotaan melampaui aksi ruang lokal.[116]

Aksi lingkungan lokal **difokuskan secara khusus di titik intervensi yang dapat mengaktifkan transformasi kelembagaan secara cepat**. Meskipun keterkaitan struktur biofisik dan budaya perkotaan membutuhkan visi menyeluruh yang memadukan pandangan konteks multidimensi perkotaan, tindakan mungkin juga memerlukan perspektif analitis yang mampu mengidentifikasi di mana perlu intervensi yang memberikan dampak maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Contohnya, sistem pengadilan menjadi arena baru di mana terjadi pertarungan lingkungan. London mengadakan pemeriksaan polusi udara yang mengakibatkan kematian Ella Kissi-Debrah berusia 9 tahun pada 2013 terkait asma.[117] Lembaga Swadaya Masyarakat Eropa ClientEarth menggugat 80 pemerintah kota terkait kualitas udara yang melanggar standar UE (Kotak 4.10). Agenda Baru Perkotaan tidak secara tegas mengakui peran pengadilan dalam membentuk kebijakan lingkungan.

Terakhir, terciptanya nilai lingkungan perkotaan membutuhkan **proses pemahaman kompleks dan beragam lokasi inovasi**. Seperti dibahas di Bab 6, inovasi dalam arti luas terletak pada pengembangan sains dan teknologi serta aksi kreatif pemerintah dan masyarakat yang berusaha untuk menggunakan pengaturan kelembagaan baru dalam mengatasi tantangan perkotaan. Proses ini beragam dan sekarang banyak strategi mendorong inovasi di lingkungan perkotaan dari inkubator teknologi yang dipimpin negara maupun oleh perintis kewirausahaan, atau laboratorium perkotaan kolaboratif (Bab 6).[118] Ruang inovasi dibentuk melalui interaksi wirausaha atau pelaku eksperimen, proses tata kelola perkotaan dan dinamika di mana inovasi ditanamkan pada struktur kota dan diadaptasi untuk praktik sosial. Analisis transisi energi di Kota Rizhao atau Shenzhen (Tiongkok), menunjukkan faktor keberhasilan kemitraan lokal pemerintah dan industri berinovasi.[119]

4.4 Dampak Kebijakan Keberlanjutan Kota yang Tidak Disengaja

Praktik perencanaan dan perumusan kebijakan dikaitkan dengan jurang antara aksi perkotaan dan tantangan yang dihadapi terhadap gentrifikasi hijau dan konversi alam perkotaan. Apakah kota dan kawasan perkotaan diharapkan dapat mengisi jurang antara janji dan tindakan yang diperlukan di tingkat global? Sementara daerah perkotaan memimpin pelokalan agenda global, mereka seharusnya tidak diharapkan untuk memenuhi "jurang antara tindakan" karena komitmen global untuk perubahan sosial adalah sesuatu yang berkaitan dengan perubahan budaya dan politik yang lebih luas, yang sebagian berada di luar wewenang aksi pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan bisnis lokal. Potensi inovasi di perkotaan diakui tetapi seharusnya tidak mengalihkan analisis dari keharusan aktual untuk aksi nasional atau global. Sedangkan dokumen penelitian empiris bersifat spesifik studi kasus secara rinci, tidak memberikan generalisasi penjelasan jurang antara retorika dan aksi dalam kebijakan lingkungan perkotaan.[120] Sistemasi dampak aksi lokal melalui perhitungan hasil agregat global mungkin tidak akan pernah terjadi.

Kotak 4.10: Mengapa orang tua di Eropa menuntut kota mereka atas kualitas udara yang buruk

Tujuh tahun lalu, Lies Craeynest memenangkan hibah perbaikan lingkungan sebesar € 10.000 dari dewan lokal di distriknya di Brussel. Dia berencana untuk merapikan jalan arteri yang sibuk di sekitar tempat tinggalnya dan bersama tetangganya untuk menanam tanaman merambat di sepanjang rumah. Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperingatkan tentang tanaman pilihannya: Jika Anda tinggal di jalan arteri, varietas yang lemah akan mati akibat udara beracun.

Bagi Craeynest, seorang ibu dari dua anak, peringatan itu sangat tepat. Craeynest adalah salah satu penggugat dalam gugatan terhadap pemerintah Brussels karena gagal memenuhi standar kualitas udara UE. Gugatan tersebut adalah salah satu dari 80 kasus hukum lingkungan nirlaba ClientEarth telah dilancarkan terhadap pemerintah kota di Eropa dan bisa dibilang yang paling signifikan, dengan Putusan Pengadilan berkeadilan di Eropa berpihak pada aktivis warga di bulan Juni 2019.

Sumber: Scruggs, 2020.

Wanita dengan e-bike di kota yang diselimuti kabut asap. Beijing, Tiongkok. © TonyV3112 / Shutterstock

Potensi inovasi di daerah perkotaan diakui tetapi seharusnya tidak mengalihkan analisis dari keharusan aktual untuk nasional atau aksi global.

Persetujuan Paris merumuskan prinsip komitmen aksi iklim secara sukarela.[121] Di bawah kesepakatan, berbagai negara mempresentasikan komitmennya dalam bentuk Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (*Nationally Determined Contributions* (NDCs)).[122] Sejak Persetujuan Paris diadopsi, telah ada seruan bagi pelaku provinsi untuk menjembatani jurang antara emisi.[123] Tindakan di luar Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) yang dipimpin sejumlah pelaku, termasuk masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah provinsi berpendapat bahwa mereka bisa mencapai pengurangan emisi GRK yang lebih besar. Zona Aktor Non-Pemerintah untuk Aksi Iklim (Non-State Actor Zone for Climate Action (NAZCA)) mencatat inisiatif di tingkat global dan menandai pengaruh dan signifikansinya.[124] Tindakan ini bervariasi. Tindakan ini tidak dapat menjadi ukuran pengurangan emisi karena memiliki banyak manfaat bersama. Tidakan ini tidak dapat diagregasikan karena melibatkan aksi berbasis konteks tertentu. Terlebih sulitnya mengintegrasikan tujuan berkelanjutan lokal dalam kebijakan internasional seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari berbagai cara aksi lokal dalam menambah nilai lingkungan.

Aspirasi global untuk menjembatani jurang antara aksi berkelanjutan menimbulkan tuntutan tambahan pada pemerintah daerah dan lembaga lokal, tanpa kapasitas atau sumber daya tambahan bagi pemerintah daerah dan perkotaan yang sudah kekurangan sumber daya dan perlengkapan dalam menghadapi tantangan ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memaparkan kerangka kerja berbasis target untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan: sebuah instrumen yang memandu tindakan perjanjian kolektif. Agenda Baru Perkotaan melampaui aspirasi dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan memberikan visi terintegrasi yang menempatkannya dalam konteks tujuan, selain pendekatan yang meremehkan kesejahteraan manusia dan ekologi menjadi sekadar indikator. Perdebatan keadilan lingkungan telah memperjelas bahwa keluaran, target tidak seharusnya memandu maksud dari aksi berkelanjutan. Bagaimana nilai lingkungan dicapai sama penting dengan hasilnya.

Belakangan ini keilmuan terkini semakin peduli pada bentuk ketimpangan baru yang berkaitan dengan aksi hijau dan kebijakan berkelanjutan. Apakah aksi hijau di daerah perkotaan merupakan pendorong baru ketimpangan? Studi kasus kritis menunjukkan adanya keterbatasan dalam berasosiasi dengan kebijakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Contoh, kawasan perkotaan menemukan tantangan baru dalam proses gentrifikasi hijau dan perubahan iklim di mana masyarakat dikecualikan tidak hanya dari perumahan dan ruang publik tetapi juga dari lingkungan yang aman dan terlindungi. Keamanan ekologi perkotaan muncul sebagai paradigma baru manajemen perkotaan di dekade pertama milenium ini, di mana perkotaan elit terfokus pada memastikan kelangsungan kota dengan sumber daya yang tersedia.[125] Perhatian ini merupakan upaya mengamankan areal kantong (*enclaves*) yang mengarah pada fragmentasi ruang kota, dengan efek fragmentasi itu terasa paling parah bagi kelompok kurang beruntung.

Praktik ini berkembang membentuk diferensiasi intra-urban dan ekstra-urban yang dinamis di mana akses ke sumber daya lingkungan dan risiko paparan lingkungan merupakan ukuran baru ketimpangan perkotaan. Kini, telah ada gelombang studi, terutama difokuskan di kota-kota di Amerika Utara, yang telah memeriksa tren menuju "gentrifikasi hijau" dan kaitannya dengan ketahanan dan kebijakan adaptasi perubahan iklim.[126] Gentrifikasi hijau artinya proyek lingkungan dan konservasi yang memberi nilai tambah lingkungan perkotaan, namun kelompok termarginalkan semakin terpinggirkan oleh perubahan kondisi tempat tinggal, karena kenaikan harga rumah dan sewa. Dampak gentrifikasi hijau berakibat selamanya (Gambar 4.5). Ada ketakutan bahwa dinamika ini akan mengajegkan bentuk kawasan eksklusif yang aman dan terlindungi dari dampak perubahan iklim, yang pada dasarnya merupakan bentuk apartheid iklim.[127] Walaupun praktek ini akan memperburuk perbedaan pendapatan antar-kelompok masyarakat, bentuk ini akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi meraka yang secara khusus rentan terhadap dampak iklim.

Gambar 4.5: Bagaimana gentrifikasi hijau mempengaruhi masyarakat miskin perkotaan dalam konteks ketahanan bangunan

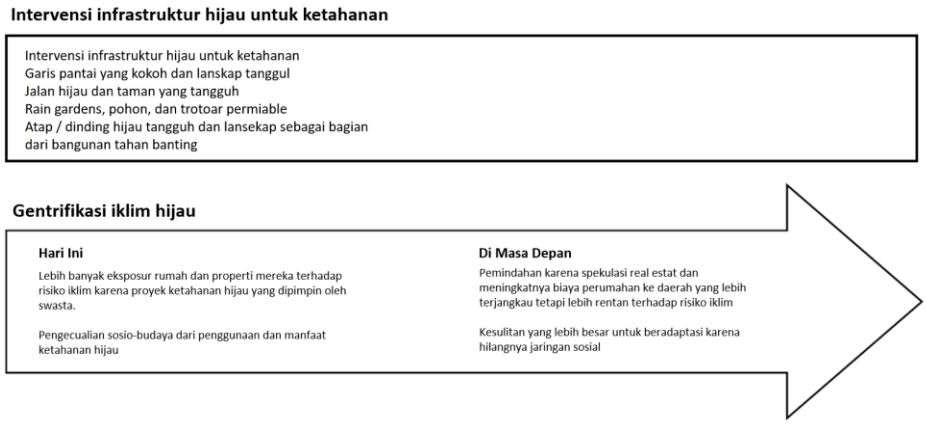

Sumber: Anguelovski et al. 2019.

4.5 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran Kebijakan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda Baru Perkotaan memberikan peluang untuk mencapai program inovasi sejati bagi aksi perkotaan dengan memanfaatkan kekuatan transformatif urbanisasi untuk mencapai nilai lingkungan di semua skala. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan kota memberikan banyak peluang untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan di lingkungan sekitar, membangun ketahanan skala kota dan menangani tantangan lingkungan global. Agenda 2030 menuangkan target untuk mengarahkan aksi lingkungan. Agenda Baru Perkotaan menyediakan arahan untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan ke dalam visi menyeluruh kota layak huni dan berkelanjutan.

Ada banyak inisiatif mencapai nilai lingkungan kawasan perkotaan. Namun, hasilnya sangat tergantung pada cara eksekusi. Kemungkinan manfaat lingkungan dari urbanisasi bergantung pada bagaimana kota direncanakan dan dikelola. Memastikan proses yang adil dan pengenalan kondisi dari berbagai sudut pandang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk semua, persyaratan yang tercantum di NUA. Contoh, meningkatkan pemahaman potensi NBS dan infrastruktur hijau dan biru untuk mencapai manfaat lingkungan selain intervensi transportasi konvensional dan pengelolaan sampah perlu diseimbangkan dengan realisasi bagaimana gentrifikasi hijau mendorong proses eksklusi perkotaan semakin berlanjut.

Manajer perkotaan perlu mengintegrasikan kebijakan berkelanjutan dengan kebijakan perencanaan dan sosial. Salah satunya adalah penerapan enam prinsip untuk memasukkan nilai lingkungan melalui intervensi perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang diusulkan dalam laporan ini.

Pengakuan **ruang kota bersama (*urban commons*)** sebagai aset sosio-ekologis, yang tersebar di kota, dimulai pada konseptualisasi kebijakan dan rencana perkotaan. Inventaris yang dikembangkan secara kolektif atas aset bersama membantu mengenali dan melindungi sumber daya bersama. Pemerintah daerah berperan memediasi generasi kelompok pengetahuan kolektif yang dapat dimobilisasi untuk melindungi sumber daya bersama.

Memprioritaskan **kebutuhan kelompok yang paling kurang beruntung** menciptakan peluang dalam proses perencanaan lokal agar pandangan mereka terwakili, sesuatu yang telah tercermin dalam Agenda 2030.

Manajer kota dapat mengembangkan mekanisme untuk memastikan **keragaman pelaku** dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme ini membutuhkan lebih dari sekedar konsultasi atau partisipasi. Pemerintah kota adalah pendukung utama aksi, menyediakan aset dan keuangan untuk organisasi

masyarakat sipil dan bisnis. Mereka juga bisa memasuki kemitraan formal untuk mencapai tujuan tertentu.

Penambahan nilai lingkungan tergantung pada kemampuan pelaku perkotaan, terutama pemerintah daerah, untuk mengenali **keragaman sosial dan ekologis** yang menggerakkan kota. Keragaman sangat penting untuk mempromosikan dan mendorong inovasi di berbagai tingkatan. Pengambil keputusan dapat menyediakan forum khusus untuk pembelajaran bersama di mana keragaman dirayakan, serta keragaman dimobilisasi menghasilkan inovasi relevan dengan lingkungan, yang dapat ditingkatkan untuk mencapai dampak global.

Mengaktifkan kekuatan transformatif urbanisasi tergantung kapasitas kolektif untuk **mengaktifkan poin intervensi** yang memungkinkan transformasi cepat. Mengidentifikasi titik intervensi tergantung pada pemahaman sejarah dan pengalaman lingkungan perkotaan. Pengambil keputusan harus bekerja dengan pembuat perubahan dan komunitas terkemuka untuk mengenali perubahan radikal yang bisa dipelihara agar menambah nilai lingkungan.

Teknologi dan data terbuka telah membuka peluang baru untuk mengaktifkan jaringan kolaboratif di dalam dan antarkota. Potensi ini tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak boleh dialihkan dari proses perencanaan kolaboratif yang sudah mapan dan potensi mereka untuk menggerakkan aksi lingkungan.

Koordinasi tindakan di berbagai tingkat pemerintah dan perumusan KPN sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB. Dukungan pemerintah daerah mampu mengembangkan kapasitas transformatif untuk memastikan masa depan perkotaan berkelanjutan untuk semua. Namun, belum adanya mekanisme koordinasi itu seharusnya tidak mengurangi perluasan gerakan perkotaan yang berusaha mewujudkan keberlanjutan melalui tugas pemerintah daerah dalam kemitraan dengan komunitas, warga, bisnis, dan LSM. Menambah nilai lingkungan melalui urbanisasi yang direncanakan membutuhkan komitmen praktek dan kebijakan jangka panjang yang bertujuan membangun proses inklusif pembuatan keputusan mengakui dan melibatkan kompleksitas perkotaan.

Catatan Akhir

1. Elmqvist et al, 2016; Güneralp dan Seto, 2013.
2. Swilling et al, 2018; Ebeke dan Etoundi, 2017.
3. Zhang dan Chen, 2017; Liang dan Li, 2019.
4. Seto et al, 2017.
5. Li dan Lin 2015; Aronson et al, 2012; Liddle dan Lung, 2010.
6. Müller et al, 2013.
7. IPBES, 2019.
8. Bai et al, 2017.
9. Sekitar 95 persen kebakaran liar disebabkan oleh manusia, menurut CalFire (Shepherd, 2018); Doumar, 2018.
10. Lembaga Lingkungan Eropa, 2020.
11. IPBES, 2019.
12. Frantzeskaki et al, 2017.
13. Frantzeskaki et al, 2017.
14. Sarkar, 2012; Hancock, 2019.
15. O'Neill dan Spash, 2000.
16. Parnell, 2016; Barnett dan Parnell, 2016.
17. IPCC, 2018a.
18. UN-Habitat, 2011.
19. Hughes dan Mason, 2018.
20. Castan Broto dan Westman, 2020.
21. Gould dan Lewis, 2012; Gould dan Lewis, 2016; Anguelovski et al, 2018.
22. Davoudi, 2014; Long dan Rice, 2019; Hodson dan Marvin, 2010; Sebagai contoh, Chicureo di kawasan metropolitan Santiago de Chile menjadi tuan rumah untuk tujuh perumahan berpagar elit yang menunjukkan ketidakberlanjutan penggunaan lahan dan sumber daya, meski dipasarkan sebagai Pasar Hijau (Sanzana Calvet, 2016).
23. PBB, 2019b.
24. IPCC, 2018a.
25. UCLG, 2019a.
26. Centre for Community Initiatives (http://www.ccitanzania.org/)
27. C40 Cities, 2019.
28. Dossier available at Both ENDS website (https://www.bothends.org/en/Our-work/Dossiers/Participatory-Land-Use-Planning-PLUP-/).
29. Lihat pekerjaan jangka panjang pada area ini dari Asian Coalition of Housing Rights (http://www.achr.net/activities-landtenre.php).
30. UNESCO Cagar Budaya Bawah Air: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwatercultural-heritage/about-the-heritage/underwater-museums/
31. MINAM, Plan de acción en géneroy cambio climático: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wpcontent/uploads/sites/11/2015/12/PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf
32. WRI Ross Prize: https://www.wri.org/news/2019/04/release-first-ever-wriross-prize-cities-awarded-sarsai
33. Program Perencanaan Partisipatif JICA (https://www.jica.go.jp/english/news/field/2019/20191016_01.html); CitiesAlliance Participatory Planning Case Study (https://www.citiesalliance.org/resources/knowledge/project-case-studies/promotingparticipatory-development-mongoliagusip);Ulaanbaatar Masterplan (https://asiafoundation.org/.../pdfs/1-MasterPlanPublicSummaryEnglish.pdf).
34. Boston Government (https://www.boston.gov/departments/resilienceand-racial-equity).
35. UK Parliament, 2020.
36. C40 Reinventing Cities (https://www.c40reinventingcities.org/).
37. UN-Habitat, 2019d.
38. IPCC, 2018a.
39. IPBES, 2019.
40. Wheeler dan Beatley, 2014.
41. UN-Habitat, 2016a.
42. Güneralp dan Seto 2013; Seto et al, 2012.
43. IPCC, 2019.
44. Du et al, 2018.
45. Güneralp et al, 2017.
46. UN-Habitat, 2016d.
47. Pelling dan Wisner, 2012.
48. Carvalho et al, 2016.
49. Castán Broto et al, 2017; Castán Broto, 2017a.
50. Romero-Lankao et al, 2016;Saavedra, 2011.
51. Brenner, 2013.
52. Li dan Lin, 2015.
53. Güneralp et al, 2017.
54. Brenner, 2013.
55. Andrewartha, 2019.
56. See also https://www.fridaysforfuture.org/.
57. PBB, 2020c.
58. Innes dan Booher, 2010; Gunder et al, 2017; Forester, 1999; Bhan et al, 2017.
59. Rapoport, 2015; Castán Broto, 2014.
60. Harlan dan Ruddell, 2011; Bain et al,2016.
61. Carmin et al, 2012; Bartlett dan Satterthwaite, 2016.
62. IUCN, 2016.
63. Keesstra et al, 2018
64. van den Bosch dan Ode Sang, 2017.
65. Kabisch et al, 2016.
66. Cerdà et al, 2016; Novara et al, 2016.
67. Keesstra et al, 2009.
68. Correia, 1993; Thaman et al, 2017, den Herder et al, 2017.
69. Cited in Keesstra et al, 2018.
70. Kalantari dan Folkeson, 2013.
71. Mekonnen et al, 2015.
72. Simon, 2016a.
73. National Ecological Network (https://www.government.nl/topics/natureand-biodiversity/national-ecologicalnetwork-nen).
74. du Toit et al, 2018.
75. IRP, 2019.
76. Tornaghi, 2017.
77. Leichenko dan O'Brien, 2008; Meerow, 2017.
78. Pescaroli dan Alexander, 2018.
79. PBB, 2017b.
80. Castillo Cabrera dan Haase, 2018.
81. Osuteye et al, 2017.
82. Mansueto Institute for Urban Innovation, 2019; Karanja, 2010; Hasan, 2006; Patel et al, 2012.
83. Landry et al, 2016.
84. Bai et al, 2018; Beberapa komentator, misalnya, menganjurkan penggunaan citra satelit untuk memetakan permukiman informal tetapi aplikasi dan manfaatnya, dalam menghadapi sebagian besar kesenjangan data, tidak diketahui. Lihat untuk contoh: Dovey dan King, 2011.
85. Urban Data Initiatives termasuk dalam studi ini: 100 Resilient Cities; basis data polusi udara AmbientUrban; portal data terbuka C40; Cities 100; City Prosperity Index; City Statistics; European Cities Data Tool; European Urban HealthIndicator System; Global Observatory on Local Democracy and Decentralisation; Global Rural-Urban Mapping Project; Global Cities of the Future; How Cities are Governed; Inclusive Cities Observatory; International Observatory on Participatory Democracy (OIDP); Knowledge Centre on Cities and Climate Change (K4C); Platform for Urban Management and Analysis; Shack/SDI Know Your City; The Atlas of Urban Expansion; The Global HumanSettlement Layer; Urban Data; Urban Health Index; Urban Lex; UrbanObservatory; Bank Dunia Urban Development Indicators; World Cities Culture Forum; World Council on City Data; basis data dunia kawasan perkotaan yang besar, 1950–2050; World Urban Database.
86. Robin dan Acuto, 2018.
87. Robin dan Acuto, 2018.
88. Simon et al, 2016.
89. Patel et al, 2012.
90. Patel et al, 2015.
91. Castán Broto dan Neves Alves 2018.
92. Caprotti et al, 2017.
93. Holifield et al, 2017; Agyeman et al, 2016; Temper et al, 2015.
94. Agyeman, 2013.
95. Castán Broto dan Westman, 2017.
96. Westra, 2012.
97. Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015.
98. Ellis, 2018.
99. Healey dan Liptak, 2020.
100. Vizina dan Wilson, 2019.
101. Garnett, 2011; Foster 2011.
102. Foster dan Iaione, 2019; Foster, 2006.
103. LabGov.City, 2018.
104. Heynen et al, 2006.
105. Cervero dan Golub, 2007; Goodfellow, 2015.
106. Mbah dan Nzeadibe, 2017; Schenck dan Blaauw, 2011.
107. McFarlane et al, 2014.
108. Ruzek, 2015; Oka, 2011; Nzeadibe dan Mbah, 2015; Guibrunet, 2017; Guibrunet, 2019; Brownet al, 2014.
109. Brown dan McGranahan, 2016.
110. Seperti yang tercermin dalam literatur interseksionalitas, misalnya: Yon dan Nadimpalli, 2017; Lejano dan Gonzalez, 2017; Venkataraman, 2015; Marquardt dan Schreiber, 2015; Walker et al,2013; Nightingale, 2011; Valentine, 2007; Yuval-Davis, 2006.
111. Chan et al, 2015.
112. Forsyth, 2006; Van Huijstee et al, 2007.
113. Simone dan Pieterse, 2018.
114. Marsden et al, 2014.
115. Blakeley, 2010.
116. Agyeman et al, 2016.
117. Dyer, 2019.
118. Karvonen dan Van Heur, 2014.
119. Huang dan Broto, 2018; Huang et al, 2018.
120. Hughes et al, 2018; Frantzeskaki et al, 2017.
121. Bodansky, 2016; Hale, 2016.
122. UNFCCC, (tak bertanggal).
123. Rogelj et al, 2016.
124. Bäckstrand et al, 2017.
125. Hodson dan Marvin, 2010; Hodson dan Marvin, 2009.
126. Anguelovski et al, 2018; Gould dan Lewis, 2016; Gould dan Lewis, 2012.
127. Bond, 2016; Hall dan Weiss, 2012; Long dan Rice, 2019.

Bab 5

Nilai Sosial Urbanisasi Berkelanjutan:
Tidak Meninggalkan Satu Orang pun dan Satu Wilayah pun

Berbagai peluang yang ditawarkan oleh kota memberikan nilai sosial pada urbanisasi. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, kota dapat mengangkat banyak keluarga keluar dari kemiskinan, membebaskan perempuan dari diskriminasi gender, mengarahkan masa depan yang cerah untuk anak-anak dan pemuda, menawarkan kenyamanan dan dukungan bagi penduduk lansia di masa emasnya, dan menyambut para migran yang mencari kehidupan yang lebih baik. Nilai urbanisasi yang sangat luas ini adalah salah satu fitur yang paling penting. Kota merupakan wadah di mana hasil sosial akan ditingkatkan bagi semua jenis kelompok yang terpinggirkan dan rentan.

Namun nilai sosial urbanisasi hanya akan muncul jika berdampingan dengan nilai tak berwujud (*intangible*) urbanisasi. Kategori yang luas ini meliputi kelembagaan – antara lain, supremasi hukum, hak milik dan sistem partisipasi demokratis — yang memungkinkan kota berfungsi secara efektif. Nilai tak berwujud lainnya adalah elemen budaya kota, dimulai dari keberagaman latar belakang penduduknya hingga aset warisan budaya yang dimilikinya.

Fakta Singkat

1. Hak atas kota, yang menopang nilai sosial urbanisasi, artinya semua orang terutama kelompok rentan harus memiliki kesempatan dan akses yang sama ke sumber daya, jasa, dan barang perkotaan.
2. Nilai urbanisasi menjadi inklusif secara sosial jika dapat meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan, serta memastikan inklusi sosial.
3. Banyak kota di dunia sedang merancang dan memperkuat pemenuhan kebutuhan dan prioritas anak-anak.
4. Pandemi COVID-19 mengikis nilai sosial urbanisasi dengan memperburuk ketimpangan, semakin meminggirkan kelompok rentan, dan menarik lebih banyak orang di dunia ke dalam jurang kemiskinan.
5. Keragaman budaya berkontribusi pada semangat, kemakmuran, inklusivitas, daya saing, dan persepsi positif tentang kota.

Butir Kebijakan

1. Bila dimanfaatkan secara memadai, nilai sosial urbanisasi berkelanjutan menawarkan jalur untuk meningkatkan inklusi sosial, mengurangi ketimpangan, dan mengakhiri kemiskinan; sehingga tidak mengabaikan seorang pun dan satu wilayah pun dari upaya mendapatkan manfaat urbanisasi.
2. Jika warga migran dapat terintegrasi secara inklusif, keberadaannya tidak akan hanya mengisi kekurangan jumlah pekerja terampil, tetapi juga berkontribusi pada pengayaan sosial, ekonomi, dan budaya di komunitas tempat tinggal barunya.
3. Sistem yang tidak meninggalkan satu orang pun dan satu wilayah pun serta menciptakan kesempatan yang sama untuk semua, mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
4. Kota yang berkelanjutan dan inklusif adalah hasil dari tata kelola yang baik yang mencakup kepemimpinan efektif; perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi; koordinasi yurisdiksi dan banyak tingkat; partisipasi warga negara yang inklusif; dan pembiayaan yang memadai.
5. Untuk mengangkat nilai sosial urbanisasi, pemerintah harus mengatasi ancaman yang melawan kota yang lebih egaliter.

Kota memiliki keunikan dalam kemampuannya untuk meningkatkan keluaran sosial dan menciptakan banyak kesempatan. Urbanisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan nilai sosial kota dengan mengakhiri kemiskinan, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua. Wilayah perkotaan adalah tempat untuk mewujudkan aspirasi, dari mengejar ambisi ekonomi hingga merangkul identitas sosial. Namun, seperti yang telah ditekankan secara konsisten di seluruh bagian Laporan ini, nilai urbanisasi berkelanjutan tidak akan terealisasikan tanpa aksi-aksi strategis. Membuka kunci nilai sosial urbanisasi membutuhkan perubahan transformatif, menuju kebijakan dan program yang berpusat-pada-orang dan berakar pada cita-cita pembangunan kota yang berkelanjutan.

Urbanisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan nilai sosial kota dengan mengakhiri kemiskinan, mendorong kesetaraan dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua

Untuk itu, upaya mewujudkan nilai sosial urbanisasi yang berkelanjutan juga tergantung pada berbagai fitur kota yang berwujud dan tak berwujud, seperti pertumbuhan kota dan norma budaya. Setiap harinya ada pertambahan sekitar 200.000 penduduk baru kota ke dalam populasi dunia, atau sekitar 5 juta penduduk baru kota per bulan di negara berkembang dan 500.000 di negara maju.[1]

Wilayah-wilayah tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi arus masuk penduduk. Tingkat pertumbuhan perkotaan jauh lebih cepat di wilayah yang sedang berkembang seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan di Afrika, yang sepuluh kali lebih tinggi dari Eropa.[2] Adanya penurunan tingkat kesuburan di sebagian besar negara berkembang berarti penduduk usia kerja (25 hingga 64 tahun) tumbuh lebih cepat daripada kelompok usia lainnya, sehingga tersedia peluang untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, atau dikenal sebagai "bonus demografi".[3] Tren ini berarti adanya kemampuan yang berbeda di antara berbagai pemerintah kota untuk mencapai nilai sosial urbanisasi dan

meningkatkan kualitas hidup hunian dengan cara yang nyata dan bermakna.

Bab ini membahas dimensi sosial dan tak berwujud dari urbanisasi berkelanjutan. Selain itu juga membahas bagaimana urbanisasi berkelanjutan dapat berkontribusi pada nilai sosial kota dengan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan; meningkatkan inklusi sosial dengan fokus pada gender, orang tua, anak-anak dan remaja; dan membina sistem tata kelola dan kelembagaan yang efektif. Bab ini turut mengeksplorasi lebih lanjut tanggapan kebijakan dan studi-studi kasus untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial dan nilai tak berwujud dari urbanisasi berkelanjutan ditingkatkan dan diperkuat di tingkat lokal dan nasional. Jika digunakan, pendekatan ini dapat memastikan bahwa tidak ada satu orang dan satu tempat pun yang tertinggal dalam proses urbanisasi.

5.1 Memahami Nilai Tak Berwujud Urbanisasi Berkelanjutan

Nilai sosial urbanisasi adalah tema yang sering muncul dalam agenda pembangunan global sebagai salah satu dimensi intrinsik pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut adalah dasar dari komitmen transformatif pertama Agenda Baru Perkotaan (NUA): "Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan".[4] Komitmen ini mengakui pentingnya pembangunan kota yang berpusat-pada-orang dan penghormatan terhadap hak asasi kaum migran, orang terlantar, dan pengungsi. Komitmen ini juga mempromosikan akses yang adil bagi semua orang atas infrastruktur fisik dan sosial.[5] Agenda Baru Perkotaan menyebutkan integrasi dan inklusi sosial, menekankan pentingnya mengelola perkotaan secara berkelanjutan lingkungan, dan mengembangkan program untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua. Nilai sosial urbanisasi dibangun di atas pilar distribusi sumber daya keruangan yang adil, lembaga politik, serta keanekaragaman sosial, ekonomi dan budaya.[6]

Nilai tak berwujud dari urbanisasi berkelanjutan mengacu pada kelembagaan yang efektif (baik formal maupun informal), tata kelola yang baik, penghormatan hak asasi manusia, dan keragaman budaya. Adanya sinergi antarlembaga formal, konstitusi nasional, hukum, peraturan, dan norma sosial dapat membentuk superstruktur bagi nilai urbanisasi untuk terwujud secara maksimal dan meningkatkan kualitas kehidupan. Fitur informal mungkin tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi setidaknya sudah memasukkan fenomena sosiologis seperti adat istiadat, tradisi, rasa memiliki dan identitas, kebanggaan sipil, nilai-nilai bersama dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Pemberdayaan perempuan dan pembangunan bentuk gender lainnya saling berhubungan dengan kelembagaan formal dan dapat diperkuat atau dibatasi, tergantung pada berbagai faktor kontekstual. Sikap dan praktik ini adalah dasar dalam gagasan memiliki, yang menjamin bahwa kota akan dapat melayani semua penduduk dan menawarkan akses yang sama terhadap layanan publik, dana dan hak demokrasi, termasuk hak untuk menjabat atau terwakili dalam pemerintahan.

Meningkatkan nilai sosial dan tak berwujud dari urbanisasi adalah kunci untuk mengatasi pandemi virus korona yang sedang berlangsung, baik untuk mengurangi penyebarannya maupun memberikan perlindungan keamanan sosial yang setara untuk semua warga. Kebutuhan mendesak ini hampir seluruhnya bergantung pada kapasitas pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan fisik dan mental. Dalam kasus ini, pemerintah kota dan mitra pembangunannya harus secara aktif memfasilitasi transisi menuju pembangunan kota berkelanjutan yang adil dan inklusif.

Proses urbanisasi dapat diangkat perannya untuk mengatasi tantangan global, seperti ketimpangan, perubahan iklim, kemiskinan, perumahan terjangkau, pekerjaan produktif, dan akses ke infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.[7] Urbanisasi adalah cara yang efisien untuk meningkatkan nilai sosial ketika kota dan perkotaan terencana dan diatur dengan baik, melalui proses partisipatif dan demokrasi. Penyediaan layanan dan infrastruktur di kota berbiaya 30-50 persen lebih murah, dengan skala ekonomi yang besar; akibatnya, daerah perkotaan menyediakan layanan ini secara lebih efisien di lingkungan miskin yang, dalam jangka panjang, dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan dan eksklusi. Ketimpangan juga bisa ditangani melalui

kebijakan redistributif yang mengutamakan kelompok berpenghasilan rendah dan rentan dalam penyediaan layanan perkotaan melalui solusi berbasis daerah.

Meningkatkan nilai sosial yang tak berwujud dari urbanisasi adalah kunci untuk mengatasi pandemi virus korona yang sedang berlangsung, baik untuk mengurangi penyebarannya maupun memberikan perlindungan jaring pengaman sosial yang setara untuk semua warga

5.2 Mengejar Inklusi melalui Urbanisasi Berkelanjutan

Ada konsensus yang berkembang bahwa inklusi perlu secara eksplisit diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pembangunan perkotaan dan bahwa fokus ini harus memenuhi kebutuhan unik individu dan kelompok (Bab 2). Nilai urbanisasi secara sosial bersifat inklusif ketika dapat meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan, serta memastikan partisipasi sipil. Baik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun NUA secara eksplisit mengakui pentingnya untuk memastikan distribusi peluang dalam proses pembangunan perkotaan sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat urbanisasi.

Nilai urbanisasi dapat dikatakan inklusif secara sosial ketika meningkatkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan serta memastikan partisipasi sipil

5.2.1 Menjamin Hak atas Kota

Piagam Dunia tentang Hak atas Kota mengakui bahwa kota adalah inti dari penciptaan kemakmuran; keragaman sosial, politik dan budaya; dan upaya pelestarian lingkungan. Namun, akses ke peluang ini masih tidak sama ke semua warga. "Hak atas kota" berarti bahwa semua orang, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan, harus memiliki kesempatan dan akses yang sama ke sumber daya, layanan dan barang perkotaan. Partisipasi warga yang efektif dalam kebijakan lokal menciptakan tanggung jawab bagi pemerintah untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mengakui keragaman sosial budaya sebagai sumber peningkatan sosial.[8]

Setiap kota perlu menangani hak asasi manusia secara penuh di empat bidang utama.[9] Pertama, undang-undang perkotaan harus mengatur hak-hak penduduk kota. Ini termasuk perumahan yang layak, perawatan kesehatan, air dan sanitasi yang aman dan terjangkau, keamanan, rekreasi, dan ruang publik untuk semua. Kedua, kota harus menetapkan nilai-nilai pedoman perlakuan individu di daerah perkotaan, dengan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, non-diskriminasi, inklusivitas, dan realisasi potensi semua manusia. Ketiga, pihak berwenang harus memberdayakan penduduk kota untuk berpartisipasi dalam perencanaan kota, manajemen dan keputusan pemerintahan, serta meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Keempat, masyarakat harus ikut memandu penyelesaian persaingan kepentingan atas barang dan jasa perkotaan.

Untuk mencapai tujuan ini, NUA menyatakan bahwa negara-negara anggota harus "memiliki tujuan untuk mewujudkan kota dan pemukiman manusia di mana semua orang dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama, serta kebebasan fundamental."[10] Agenda Baru Perkotaan mengakui hak atas sebuah taraf hidup yang layak bagi semua, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Ini juga menekankan pengambilan keputusan partisipatif dan inklusif di semua tingkat pemerintahan dan antara pemangku kepentingan; mempromosikan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; mendorong inklusi dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, pengungsi, pengungsi internal dan migran; dan menyerukan diakhirinya kriminalisasi tunawisma.

Beirut, Lebanon. © Eduardo Moreno

Komitmen ini sangat bergantung pada kebijakan yang ditargetkan, kerangka hukum, dan mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, peran hukum dan lembaga adalah untuk mengidentifikasi tidak hanya hak tetapi juga tugas dan pengemban tugas yang sesuai. Hukum harus dapat dipahami, ditegakkan dan efektif, dan dengan demikian[11]:

- menawarkan manfaat dan konsekuensi (*trade-off*) yang wajar antara biaya dan manfaat kepatuhan;
- mencerminkan konteks perkotaan saat ini;
- merupakan produk dari proses konsultatif dan inklusif;
- menjadi inklusif secara ekonomi dan politik sambil menciptakan prasyarat dasar untuk pertumbuhan ekonomi;
- melindungi kepentingan publik (dengan fokus pada orang miskin) ketika dihadapkan pada kepentingan komersial dan politik yang lebih kuat;
- mempromosikan tata kelola perkotaan yang stabil dan berkelanjutan;
- membangun kontrak sosial yang kuat antara aktor-aktor negara dan non-negara; dan
- didesain sedemikian rupa sehingga bahkan negara atau kota yang relatif rapuh dapat menerapkannya secara efektif.

Agenda Baru Perkotaan mengakui hak atas sebuah standar layak hidup yang memadai bagi semua, terutama untuk kelompok miskin dan rentan

Ada contoh praktis dari hak atas kota yang telah memasukkan inklusi sosial yang kuat dan agenda partisipatif di berbagai belahan dunia. Dublin, Irlandia telah memberikan hak kepada penduduk non-Irlandia dan non-UE untuk menyalurkan suara dalam pemilihan lokal terlepas dari status hukum mereka.[12] Bentuk inklusi politik ini mencakup pendidikan pemilih dan kampanye kesadaran, dan menandai penyimpangan dari hubungan yang telah lama terjalin antara hak sipil dan kebangsaan.[13] Setelah melalui upaya advokasi yang berlarut-larut, Pemerintah India mengeluarkan undang-undang pada tahun 2014 untuk melindungi mata pencaharian para PKL dan membentuk mekanisme partisipatif untuk mengatur PKL.[14] Di Kolombia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses hingga layanan dasar — pasokan air, sanitasi, listrik, pengumpulan sampah, telekomunikasi dan gas — untuk semua penduduk termasuk penghuni permukiman kumuh.[15] Kurangnya layanan dasar merupakan ciri utama dari permukiman informal, di mana hal ini secara turun-temurun disebabkan oleh kurangnya jaminan kepemilikan formal; jaminan layanan dasar yang secara efektif memutus hubungan ini dan mengintegrasikan penghuni permukiman kumuh ke dalam jaringan utama dari layanan dasar bersama dengan atau tanpa sertifikat tanah.

Keberagaman penduduk di kota menghadirkan tantangan bagi pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang kurang terlayani dan rentan. Dengan memfokuskan sumber daya mereka pada masalah lintas sektor dan titik-temu, mereka dapat mulai menangani masalah yang signifikan. Meskipun kebutuhan dan keinginan akan nilai sosial adalah unik di berbagai kelompok di dalam kota (Bab 2), pemerintah kota dapat mewujudkan nilai sosial urbanisasi dengan menciptakan kota yang setara gender, dirancang bagi anak-anak dan remaja, mudah diakses penduduk lanjut usia, ramah bagi para migran dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan.

5.2.2 Mempromosikan Kebijakan dan Program Perkotaan yang Inklusif Gender

Lebih dari separuh penduduk dunia adalah perempuan. Meskipun demikian perempuan masih mengalami diskriminasi yang sistemik di kota-kota. Menurut Oxfam, perempuan di tangga ekonomi terbawah menyediakan 12,5 miliar jam kerja perawatan tidak berbayar setiap hari, tiga kali lebih banyak daripada laki-laki. Di seluruh dunia, pria memiliki 50 persen lebih banyak kekayaan daripada perempuan.[16] Kebijakan perkotaan yang peka gender dapat menguntungkan perempuan dalam berbagai cara: meningkatkan perlindungan hukum; mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan di semua tingkatan; meningkatkan akses ke layanan dan infrastruktur; menciptakan peluang kerja yang lebih besar; dan menghapus batasan sosio-budaya gender dibandingkan dengan perempuan di daerah perdesaan.

Gerbong kereta khusus penumpang perempuan di India. (C) Joyfull/Shutterstock

Bukti anekdot menyebutkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif dalam mengatasi dampak pandemi yang saling terkait antara kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi berbasis gender, pemerintah harus memastikan bahwa ekonomi dapat menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dengan berinvestasi dalam sistem perawatan nasional dan memperkenalkan perpajakan progresif yang mengutamakan karier daripada kekayaan.[17] Masalah kritis dalam menangani ketidakadilan gender ini diperjelas dalam masa pandemi COVID-19, di mana perempuan berada di garis depan untuk mendidik anak-anak dan merawat orang tua dalam keluarga inti dan besarnya, sekaligus menanggung risiko kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat di seluruh dunia.[18] Memang, bukti anekdot menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif dalam mengatasi dampak pandemi yang saling terkait antara kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi.[19] Beberapa penjelasan untuk efek ini di antaranya kecenderungan pemimpin perempuan untuk mengadopsi tanggapan kebijakan yang proaktif dan terkoordinasi, sifat mereka yang lebih bersahaja, penerimaan mereka terhadap sudut pandang yang beragam, kurang terkekang pola kepemimpinan tradisional, lebih menerima argumen ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang pandemi dan memiliki gaya kepemimpinan yang sigap.[20]

Tata kelola yang peka gender berarti ada keterwakilan kaum perempuan yang substansial dalam semua tingkat pengambilan keputusan di pemerintahan dan peningkatan pemahaman tentang kebutuhan khusus gender dalam struktur tata kelola, karena perempuan sangat kurang terwakili dalam kepemimpinan politik lokal. Dalam sebuah studi di 127 kota, hanya 40 hingga 50 kota yang memiliki wakil perempuan dalam kepemimpinan politik mereka, atau hanya 13 persen dari posisi yang ada.[21] *Deklarasi dan Platform Aksi Beijing* merekomendasikan bahwa perempuan harus menempati sedikitnya 30 persen kursi politik di masing-

masing tingkat pemerintahan. Di UE, di mana 52 persen dari populasi adalah perempuan, hanya ada 15 persen walikota perempuan.[22] Di sisi lain, Rwanda telah selangkah lebih maju dalam inklusi perempuan, di mana sebanyak 61 persen kursi legislatif nasional diisi kaum perempuan — jauh lebih banyak daripada negara mana pun di dunia.[23]

Tata kelola yang peka gender dapat dicapai dengan mengurangi jurang antara kebijakan dan penyediaan layanan yang secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan mengakui kontribusi unik mereka dalam pembentukan kebijakan dan program perkotaan. Pengakuan ini melibatkan interaksi yang bermakna antara perwakilan pemerintah dengan gerakan perempuan akar rumput dan kelompok masyarakat sipil yang secara aktif mengadvokasi isu perempuan dan kesetaraan gender. Strategi untuk memberi perempuan suara dan pilihan yang lebih besar meliputi: [24]

- aksi kolektif melalui serikat pekerja, gerakan keadilan sosial dan penggunaan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan akses perempuan ke berbagai sumber daya sosial, ekonomi dan politik;
- kuota gender di tingkat lokal, regional dan nasional;
- badan-badan pemerintah dengan sumber daya yang baik dan strategis, seperti kaukus legislatif atau layanan birokrasi, didedikasikan untuk memajukan kepentingan perempuan;
- pelatihan literasi politik untuk perempuan;
- peningkatan sumber daya keuangan dan dukungan untuk perempuan yang mencalonkan diri untuk jabatan publik; dan
- peningkatan dukungan sosial seperti penitipan anak dan tunjangan cuti orang tua.

Tata kelola yang peka gender dapat dicapai dengan mengurangi jurang antara kebijakan dan penyediaan layanan yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan mengakui kontribusi unik mereka dalam pembentukan kebijakan dan program perkotaan

Mengingat bahwa laki-laki dan perempuan menikmati kota dan ruang publik secara berbeda karena aturan sosial, norma dan budaya gender, maka perencanaan kota harus mempertimbangkan kebutuhan unik mereka. Kurang terwakili atau dikucilkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan perkotaan di semua tingkat pemerintahan memiliki implikasi yang mendalam bagi perempuan di kota dalam hal mobilitas, keselamatan dan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja. Menanggapi pengecualian ini, perempuan menciptakan alternatif mereka sendiri dalam sistem di mana kaum laki-laki dominan. Misalnya, layanan transportasi khusus gender dengan pengemudi perempuan atau dengan penumpang khusus perempuan yang menawarkan tumpangan kepada perempuan lain yang bersedia membayar demi layanan yang lebih aman. Layanan semacam itu ada di, antara lain El Salvador (Linea Rosa), Kota New York (SheTaxi, She Rides), Kairo (PinkTaxi) dan Kerala (SheTaxi).[25]

Mengingat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman kota dan ruang publik secara berbeda karena aturan sosial, norma dan budaya gender mereka, maka perencanaan kota harus mempertimbangkan kebutuhan unik mereka

Dalam skala yang lebih besar, berbagai pemerintah bermitra dengan program "Kota Ramah Perempuan" PBB untuk mengembangkan kawasan perkotaan, di mana setiap orang, terutama perempuan, dapat secara setara menikmati peluang ekonomi, sosial dan politik yang ditawarkan oleh kota. Di kota-kota ini, perempuan memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan sosial; peluang kerja; layanan perkotaan yang berkualitas tinggi dan komprehensif (seperti transportasi, akomodasi dan keamanan); dan mekanisme yang akan menjamin hak-hak mereka jika mengalami kekerasan.[26] Kota yang berpartisipasi mengembangkan rencana aksi kesetaraan lokal dengan pendekatan partisipatif dan berfungsi sebagai peta jalan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi dalam mekanisme manajemen, kekerasan terhadap perempuan dan layanan perkotaan. Kota-kota dipandu oleh *Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* (*United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan rencana nasional lainnya serta konvensi internasional.[27]

Beberapa pemerintah daerah di Eropa telah menerapkan pendekatan feminis dalam perencanaan kota. Di Kota Girona, Gavà dan Donosti di Spanyol, perspektif gender menginformasikan ruang publik dan proyek perumahan, yang menghasilkan pencahayaan yang lebih baik di ruang umum dan ruang yang lebih baik untuk pejalan kaki.[28] Kesetaraan gender di kota juga didorong oleh organisasi akar rumput, karena beberapa kota sedang diubah menjadi ruang inklusi karena upaya organisasi masyarakat dan warga yang berkomitmen. Wina adalah mercusuar praktik terbaik dalam perencanaan kota yang peka gender (Kotak 5.1).

5.2.3 Anak-Anak dan Remaja

Anak-anak dan remaja berjumlah sekitar 40 persen dari populasi dunia.[29] Dari 4,2 miliar orang yang saat ini tinggal di daerah perkotaan, sekitar sepertiganya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun; pada tahun 2050, diperkirakan 70 persen anak-anak dunia akan tinggal di daerah perkotaan.[30] Banyak dari anak-anak ini, terutama di negara maju, menikmati keuntungan kehidupan perkotaan, termasuk akses ke fasilitas pendidikan, medis, dan rekreasi. Sebaliknya, banyak di daerah berkembang tidak memperoleh fasilitas penting tersebut; dipaksa melakukan pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif; dan menghadapi ancaman penggusuran terus menerus, bahkan di perumahan yang berada di bawah standar. Anak-anak terhitung antara 22–55 persen dari hampir 2,5 juta orang yang diperdagangkan setiap tahun. Di seluruh dunia, diperkirakan 215 juta anak laki-laki dan perempuan berusia 5–17 tahun terlibat dalam pekerja anak, di mana 115 juta di antaranya tergolong dalam pekerjaan berbahaya.[31]

Perencanaan kota sering mengabaikan kebutuhan khusus anak-anak karena pemikiran kuno bahwa anak-anak tidak mampu berkontribusi pada pembangunan kota.[32] Pengabaian kebutuhan anak jelas terlihat dalam pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penutupan sekolah dan pembatasan signifikan pada aktivitas luar ruangan dan sosialisasi mereka bahkan saat aktivitas orang dewasa seperti bar dan restoran diizinkan dibuka kembali. UNICEF menunjukkan bahwa kesehatan mental dan dampak psikososial dari gerakan terbatas, penutupan sekolah, dan isolasi selanjutnya cenderung meningkatkan stres yang sudah tinggi, terutama bagi remaja yang rentan.[33]

Kotak 5.1: Pengarusutamaan gender di Wina

Wina adalah contoh pengarusutamaan gender dalam perencanaan kota. Kota ini memiliki salah satu warisan terpanjang dari perencanaan peka gender. Wina membuka Kantor Wanita di pemerintah daerah pada tahun 1992 dan mulai pengarusutamaan gender — praktik tersebut memastikan perempuan dan laki-laki diperhitungkan secara setara dalam kebijakan, legislasi dan alokasi sumber daya — pada tahun 2000.

Gender diintegrasikan ke dalam strategi kota dan semua ruang publik yang dirancang dan dibangun oleh kota dilakukan dengan mempertimbangkan gender. Hasilnya adalah lanskap perkotaan yang menguntungkan bagi semua: penerangan yang baik di taman-taman untuk memberikan keamanan dan akses; perumahan sosial dirancang secara arsitektural dengan fleksibilitas untuk kepentingan keluarga yang berbeda; trotoar lebih lebar untuk orang tua dan lansia; penyeberangan jalan lebih panjang; dan prioritas bagi pejalan kaki.

Saat ini prinsip pengarusutamaan gender dituangkan dalam kebijakan, dengan adanya sanksi bagi yang tidak mematuhinya. Penganggaran yang sensitif gender, diperkenalkan pada tahun 2005, mengharuskan setiap departemen untuk melaporkan dua kali setahun tentang bagaimana pengeluaran mereka telah memberi manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Proyek perumahan baru harus memenuhi kriteria sensitivitas gender demi mendapatkan subsidi. Sekarang sudah menjadi praktik yang cukup umum di Wina untuk mengenali kehidupan kota melalui lensa gender. Pada tahun 2008, UN-Habitat mengakui strategi perencanaan kota Wina sebagai praktik terbaik.

Kota-kota lain sekarang ingin mengikuti contoh Wina, dengan Berlin, Barcelona, dan Kopenhagen memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam upaya desain perkotaan mereka. Sebagai pencipta tren, Kota Wina sangat ingin berbagi pengalamannya dengan kota-kota lain di seluruh dunia dan telah menerbitkan dua panduan, "Pengarusutamaan Gender Menjadi Mudah" dan "Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Kota." Mereka menyediakan alat dan tip praktis, termasuk bahasa sensitif gender, pengumpulan data dan saran tentang bagaimana menghindari pengarusutamaan gender menjadi kata kunci yang mencakup semua. Panduan terakhir terfokus secara eksplisit pada bagaimana mencapai pengarusutamaan gender di era penghematan dan sumber daya yang terbatas. Pejabat Wina percaya bahwa perencanaan sensitif gender lebih efisien karena dapat menargetkan sumber daya dengan lebih baik bagi mereka yang membutuhkan.

Sumber: Pusat Pengetahuan URBACT, 2019; Berburu, 2019.

Taman bermain anak-anak, Helsingborg, Sweden. © Art of line/Shutterstock

Mengingat bahwa lingkungan yang terbentuk menawarkan peluang di mana kota dapat berkomitmen untuk menghormati hak-hak anak, perencanaan kota dapat diterapkan untuk menciptakan kota yang berkembang dan adil di mana anak-anak tinggal dan bermain di komunitas yang sehat, aman, inklusif, hijau, dan sejahtera.[34] Banyak kota di seluruh dunia merancang dan menyesuaikan kota mereka untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas anak-anak. Di Calgary (Kanada), Antwerpen (Belanda), Ghent (Belgia), dan Rotterdam (Belanda), para perencana merancang permainan menjadi elemen perkotaan, sehingga memperluas peluang rekreasi anak-anak.[35] Di Belanda dan Finlandia, di mana bersepeda dan berjalan kaki ke sekolah merupakan praktik standar, jalan dan ruang publik telah dirancang untuk meningkatkan keselamatan anak-anak.[36] Di banyak kota di Afrika, hingga 70 persen siswa berjalan kaki ke sekolah, seringkali menempuh jarak yang cukup jauh, karena mereka tidak punya pilihan lain, namun trotoar dan jalur sepeda masih kurang banyak.[37]

Banyak kota di seluruh dunia merancang dan menyesuaikan kota mereka untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas anak-anak.

Manfaat kesehatan dari bersepeda atau berjalan kaki ke sekolah mendukung inisiatif perencanaan yang memberikan rute berjalan kaki dan bersepeda yang berkualitas seperti yang terlihat dalam program yang berhasil yaitu Belfast Healthy City (Kota Sehat Belfast), Irlandia Utara dan Greenways (Jalur Hijau) di Los Angeles Timur (AS)[38]. Program yang memenuhi kebutuhan khusus anak-anak di lingkungan perkotaan sejalan dengan Inisiatif Kota Ramah Anak dari UNICEF, yang memberikan pedoman perencanaan dan desain kota yang baik untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja dapat menggunakan hak mereka atas kota (Kotak 5.2).

Kotak 5.2: Hak anak dan prinsip-prinsip perencanaan kota

Dengan mengadopsi sepuluh hak anak dan prinsip perencanaan kota, kota tidak hanya akan mendukung perkembangan anak tetapi juga berkembang sebagai rumah untuk generasi mendatang. Semua kota harus berkomitmen untuk:

Prinsip 1: Investasi - Hormati hak-hak anak dan berinvestasi dalam perencanaan kota yang tanggap terhadap anak yang memastikan lingkungan yang aman dan bersih untuk anak-anak dan melibatkan partisipasi anak dalam intervensi berbasis wilayah; keterlibatan pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan berbasis bukti; dan mengamankan kesehatan, keselamatan, kewarganegaraan, kelestarian lingkungan, dan kemakmuran anak-anak, dari usia dini hingga remaja.

Prinsip 2: Perumahan dan Penguasaan Lahan - Sediakan perumahan yang terjangkau dan layak serta penguasaan lahan yang terjamin bagi anak-anak dan masyarakat, di mana mereka merasa aman dan terjamin untuk tinggal, tidur, bermain dan belajar.

Prinsip 3: Fasilitas Umum - Menyediakan infrastruktur untuk layanan kesehatan, pendidikan dan sosial bagi anak-anak dan masyarakat, di mana mereka memiliki akses ke alat yang diperlukan untuk berkembang dan mengembangkan kecakapan hidup.

Prinsip 4: Ruang Publik - Sediakan ruang publik dan hijau yang aman dan inklusif untuk anak-anak dan komunitas, di mana mereka dapat bertemu dan terlibat dalam aktivitas luar ruangan.

Prinsip 5: Sistem Transportasi - Kembangkan sistem transportasi dan angkutan umum yang aktif dan pastikan mobilitas mandiri untuk anak-anak dan masyarakat, sehingga mereka memiliki akses yang sama dan aman ke semua layanan dan peluang di kota mereka.

Prinsip 6: Sistem Pengelolaan Air dan Sanitasi Terpadu - Mengembangkan layanan air dan sanitasi yang dikelola dengan aman dan memastikan sistem pengelolaan air perkotaan yang terintegrasi untuk anak-anak dan masyarakat, sehingga mereka memiliki akses yang memadai dan merata ke air, sanitasi, dan kebersihan yang aman dan terjangkau.

Prinsip 7: Sistem Pangan - Kembangkan sistem pangan dengan pertanian, pasar, dan penjual, sehingga anak-anak dan masyarakat memiliki akses permanen ke pangan dan gizi yang sehat, terjangkau, dan diproduksi secara berkelanjutan.

Prinsip 8: Sistem Siklus Limbah - Kembangkan sistem tanpa limbah dan pastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sehingga anak-anak dan masyarakat dapat berkembang dalam lingkungan yang aman dan bersih.

Prinsip 9: Jaringan Energi - Integrasikan jaringan energi bersih dan pastikan akses yang andal ke listrik, sehingga anak-anak dan masyarakat memiliki akses ke semua layanan perkotaan siang dan malam.

Prinsip 10: Jaringan Data dan TIK - Mengintegrasikan data dan jaringan TIK dan memastikan konektivitas digital untuk anak-anak dan masyarakat untuk memastikan informasi dan komunikasi yang dapat diakses secara universal, terjangkau, aman dan dapat diandalkan.

Sumber: UNICEF, 2018.

5.2.4 Penuaan di Kota

Populasi dunia kini semakin tua, di mana warga berusia 65 tahun ke atas sekarang menjadi kelompok usia yang tumbuh paling cepat (Bab 1). Seiring dengan meningkatnya proporsi populasi dunia yang menua dan pindah ke atau tetap di kota, alih-alih pensiun ke perdesaan atau kembali ke desa leluhur, pemerintah

harus lebih memperhatikan kebutuhan para lansia di dalam desain dan perencanaan perkotaan. COVID-19, yang secara tidak proporsional berdampak pada lansia, sementara dapat memperlambat tren ini.

WHO mengembangkan prakarsa Kota Ramah Usia untuk mendorong penuaan aktif dengan mengoptimalkan peluang kesehatan, partisipasi, dan keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup seiring bertambahnya usia.[39] Dalam istilah praktis, Kota Ramah Usia menyesuaikan struktur dan layanannya agar dapat diakses dan inklusif lansia sesuai dengan berbagai kebutuhan dan kapasitas.[40] Kota Ramah Usia WHO terdiri dari delapan kriteria untuk menyesuaikan struktur dan layanan kota dengan kebutuhan lansia: bangunan dan ruangan luar; transportasi; perumahan; partisipasi sosial dan lapangan pekerjaan; penghargaan dan inklusi sosial; partisipasi sosial; komunikasi dan informasi; dan dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan (Gambar 5.1). Lebih dari 700 kota di 39 negara berpartisipasi dalam Jaringan Global untuk Kota dan Komunitas Ramah Usia WHO (Global Network for Age-friendly Cities and Communities) untuk mempromosikan penuaan aktif yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas.[41]

Gambar 5.1: Topik kota ramah usia

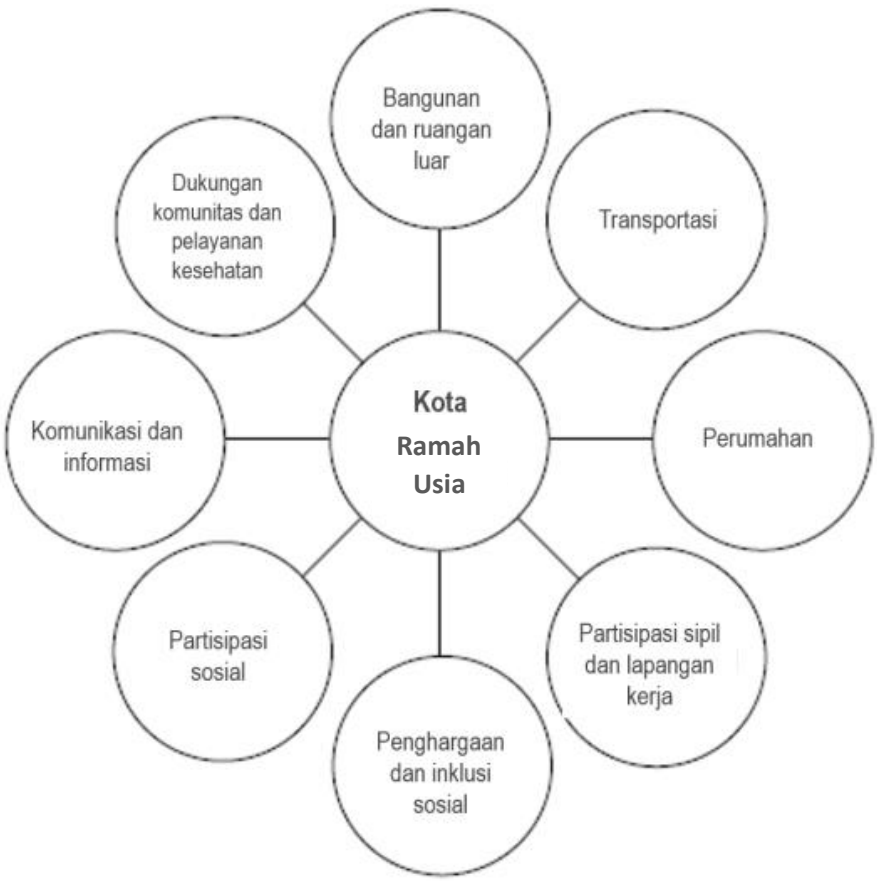

Sumber: World Health Organization, 2007

Tiga perempuan lansia duduk di bangku. Santiago de Compostela, Spain. © Lina Balciunaite/Shutterstock

Pemerintah Hong Kong SAR telah mengadopsi prinsip-prinsip Kota Ramah Usia dengan berfokus pada pendekatan multidimensi yang mencakup bantuan keuangan, perawatan medis, dukungan komunitas dan perumahan, transportasi dan mobilitas, perumahan dan lingkungan binaan, penuaan aktif, pekerjaan yang lebih fleksibel, dan tindakan ramah keluarga dengan pemerintah daerah memainkan peran kunci.[42] Tantangan Hong Kong dalam menciptakan kota yang ramah usia bermula dari modifikasi hunian di apartemen kecil bertingkat tinggi dan mobilitas yang dapat diakses di kota di mana kebanyakan orang bergantung pada transportasi umum. Spanyol memberikan contoh lain tentang pemerintah daerah yang mengambil peran proaktif dalam penuaan perkotaan. Kota telah mengadopsi kebijakan kota ramah usia dengan tujuan memperbaiki lingkungan fisik dan sosial kota dengan cara yang memungkinkan lansia hidup bermartabat, menikmati kesehatan yang baik, dan terus berpartisipasi penuh dan aktif dalam masyarakat.[43] Di Indonesia, pemerintah meningkatkan kesehatan mental dan fisik dengan mempromosikan kegiatan sosial, manajemen stres, dan deteksi dini penurunan kognitif atau gangguan vaskular atau degeneratif terkait pada orang dewasa yang lebih tua.[44] Mengatasi masalah ini, terutama isolasi sosial dan kesehatan mental, menjadi sangat akut setelah terjadinya pandemi COVID-19, yang telah membatasi kesempatan banyak lansia untuk berinteraksi sosial.

Megatren penuaan berdampak pada lingkungan binaan terutama yang berkaitan dengan perumahan, transportasi, rekreasi, dan layanan sosial. Komponen inti kota ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang semakin menua. Perencanaan untuk populasi perkotaan yang menua membutuhkan inovasi untuk mengatasi peningkatan permintaan akan perawatan kesehatan, rekreasi, transportasi dan fasilitas lainnya.[45] Perencana dalam berbagai konteks, terutama di negara berkembang, harus memikirkan kembali asumsi dasar saat mereka belajar mengintegrasikan kehidupan lansia yang aktif ke dalam lansekap perkotaan.

5.2.5 Masyarakat Migran Miskin Perkotaan

Perpindahan ke perkotaan yang ajeg, baik dari perdesaan maupun melalui jalur migrasi intranasional dan transnasional, berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan populasi dan distribusi usia di perkotaan, mengingat kaum migran biasanya berusia muda. Kota merupakan tujuan yang paling diminati oleh para migran. Di Toronto, Los Angeles, Sydney, London, Melbourne dan New York, warga yang lahir di luar negeri lebih dari sepertiga populasi total. Di Brussels dan Dubai, jumlahnya bahkan melebihi jumlah populasi lokal (Grafik 5.2). Migrasi internasional mengubah daerah perkotaan menjadi lingkungan yang heterogen, multietnik, multikultural, dan multilingual (Bab 1).

Saat ini terdapat 763 juta migran internal[46] dan 272 juta migran internasional[47] (Bab 1). Di Tiongkok, sekitar sepersepuluh dari populasi anak-anak (27,3 juta) telah bermigrasi internal bersama orang tua mereka. Namun, sejumlah anak-anak dan remaja juga telah bermigrasi internal sendiri. Analisis di 12 negara menunjukkan bahwa satu dari lima migran anak-anak berusia 12-14 tahun dan setengah dari yang berusia 15-17 tahun bermigrasi tanpa orang tuanya.[48]

Migrasi tidak teratur dan terpaksa akibat konflik, perubahan iklim, banjir, dan kelaparan menunjukkan wajah lain dari migrasi yang lebih dramatis karena besarnya jumlah pengungsi dan orang terlantar yang meninggalkan rumah mereka untuk pindah ke wilayah lain di dalam negaranya atau ke negara lain. Puluhan ribu migran dari Afrika, misalnya, menantang bahaya untuk menyeberangi gurun dan laut, tanpa jaminan dapat terintegrasi ke dalam kehidupan sosial negara-negara penerima di Eropa. Tren yang sama juga terlihat dalam kasus migrasi di antara sejumlah kawasan rentan kekerasan di Kolombia, Venezuela, Amerika Tengah dan Meksiko, mengakibatkan orang-orang untuk bermigrasi ke negara tetangga – sebagai contoh dari Venezuela ke Kolombia, dari Honduras dan El Salvador ke Meksiko atau dari Amerika Tengah dan Meksiko ke AS.

Migran internasional kerap tidak memiliki hak-hak sipil yang mendasar di negara penerima dan sering dikecualikan dari berbagai fasilitas sosial dan ekonomi, termasuk dari proses demokrasi. Imigrasi merupakan salah satu isu dengan muatan politik terbesar di negara maju.[49] Sebuah survei opini UE di tahun 2014 menunjukkan bahwa imigrasi merupakan isu nomor tiga yang paling sering didiskusikan dalam debat politik, setelah pengangguran dan ekonomi.[50] Imigrasi juga menjadi isu penentu dalam referendum Brexit yang mengakibatkan keluarnya Inggris dari UE.

Gambar 5.2 Populasi yang lahir di luar negeri di beberapa kota besar

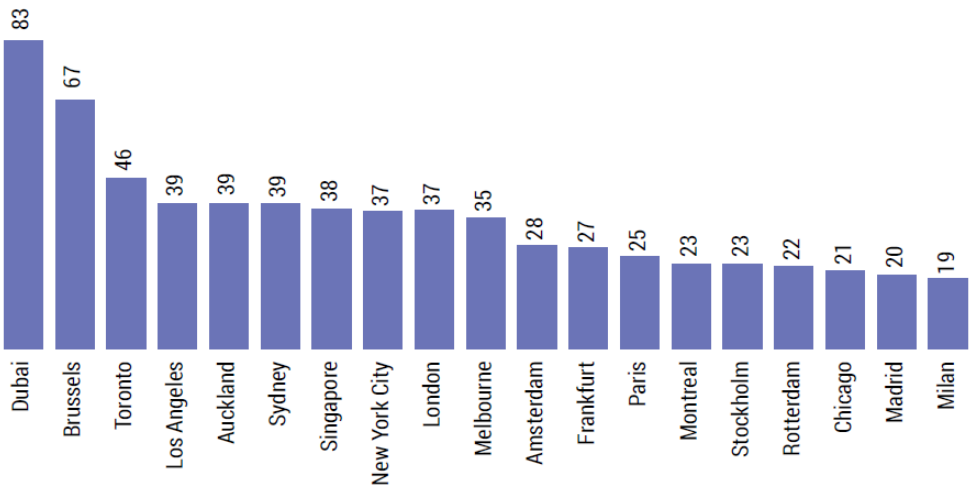

Sumber: IMO: Global Migration Data Analysis Centre.

Para pekerja migran pulang ke rumah asal di masa karantina wilayah (*lockdown)* pandemi COVID-19. © Manoej Paateel/Shutterstock

Di saat yang bersamaan, sejumlah kota dan pemerintah daerah telah menerima para pendatang dan pengungsi dengan tangan terbuka.[51] Kota Munich, Düsseldorf, Stuttgart, dan Freiburg di Jerman telah membentuk "unit penyambutan" di masing-masing balai kotanya untuk mempersiapkan kedatangan para pengungsi dan pendatang. Bagi sejumlah kota-kota di Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Korea Selatan yang mengalami isu populasi menua, rendahnya tingkat kelahiran dan deindustrialisasi, kedatangan para pendatang merupakan kesempatan untuk membangkitkan kembali kejayaannya.

Migran internasional kerap tidak memiliki hak-hak sipil yang mendasar di negara penerima dan sering dikecualikan dari berbagai fasilitas sosial dan ekonomi, termasuk dari proses demokrasi

Seandainya pandangan pihak kota dan pemerintah daerah tidak dibatasi pada aspek kemanusiaan, mereka dapat melihat migran sebagai bagian penting dari pertumbuhan sosial ekonomi kota. Perspektif ini membutuhkan program integrasi yang efektif yang melibatkan permukiman, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, jaminan perlindungan sosial serta munculnya 'rasa memiliki' bagi para migran.[52] Jika diintegrasikan melalui kebijakan inklusif, kehadiran migran dapat mengurangi masalah kurangnya pekerja terampil, sekaligus memberikan sumbangsih terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di komunitas barunya. Sebagai contoh, lebih dari satu setengah dekade terakhir, 47 persen dari peningkatan jumlah tenaga kerja di AS dan 70 persen di Eropa adalah pendatang.[53] Pembayaran pajak dan kontribusi sosial pekerja migran lebih banyak daripada manfaat individu yang mereka peroleh, kecuali di mana jumlah migran senior lebih besar.

Jika diintegrasikan melalui kebijakan inklusif, kehadiran migran dapat mengurangi masalah kurangnya pekerja terampil, sekaligus memberikan sumbangsih terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di komunitas barunya

Kotak 5.3: Montreal: Kota kaum pendatang

Satu dari dua penduduk di Montreal lahir di luar Kanada atau memiliki orang tua yang lahir di luar Kanada. Pendatang di Montreal mencapai 33,2 persen dari populasi total. Penduduk Kota Montreal berasal dari 120 negara, dengan 200 bahasa dan dialek. Setiap tahunnya, Montreal menerima rata-rata 35.000 pendatang baru dengan status pendatang permanen dan 68.000 dengan status pendatang sementara, didorong oleh kebijakan imigrasi nasional Kanada yang baik. Jumlah tersebut berarti hampir 280 orang tiba di Montreal setiap harinya.

Salah satu tantangan demografi yang dihadapi oleh Montreal adalah populasi menua. Peningkatan imigrasi menjadi elemen penting untuk menyeimbangkan demografi ini. Montreal menyebut dirinya sebagai "kota perlindungan" bagi penduduk yang tidak memiliki status legal atau pendatang gelap (tanpa dokumen). Walaupun imigrasi seharusnya legal, namun jumlah pendatang gelap terus meningkat akibat kebijakan imigrasi AS.

Dampak positif dari keberadaan para pendatang terhadap demografi, perkembangan sosial dan ekonomi Montreal sangat besar. Namun, pemerintah kota harus mampu menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan penduduk baru, menyesuaikan layanan yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan migran yang mengalami kesulitan dan mengurangi hambatan bagi proses integrasi mereka ke dalam masyarakat. Tantangan yang muncul antara lain pemeliharaan, pembiayaan dan koordinasi dengan berbagai tingkat pemerintahan; membuat langkah-langkah yang ada lebih mudah dipahami; serta berurusan dengan kebutuhan khusus yang terkait dengan perbedaan Bahasa yang dapat menimbulkan situasi yang mengisolasi dan mengucilkan.

Perumahan: Hampir setengah dari penerima bantuan sosial di Montreal lahir di luar Kanada. Keluarga pendatang kerap mengalami kesulitan dalam mencari perumahan yang layak dan terjangkau.

Pendidikan: Dalam menerima kedatangan migran baru, perlu disediakan kelas dan layanan khusus dalam bahasa yang dipahami migran. Akses ke pendidikan bagi anak-anak dengan status pendatang gelap merupakan isu penting.

Kesempatan kerja: Sejumlah kelompok pendatang, terutama yang berasal dari kelompok minoritas, mengalami kesulitan dalam integrasi ke pekerjaan, meskipun sesungguhnya mereka memiliki tingkat pendidikan yang cukup dan bahkan lebih tinggi dari populasi Montreal yang ada. Masalah yang umum dihadapi oleh migran antara lain rendahnya pengakuan terhadap capaian serta pekerjaan yang berada di bawah tingkat kemampuan yang dimiliki.

Integrasi dan kohesi sosial: Montreal dikenal sebagai kota yang terbuka dan ramah dengan tingkat keragaman yang kaya dan positif. Namun, kohabitasi diantara masyarakat dengan budaya, kondisi sosio-ekonomi dan agama yang berbeda kerap menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan di dalam dan diantara masyarakat. Salah satu masalah yang muncul di Montreal (meskipun kecil) adalah radikalisasi kekerasan yang dapat dikaitkan kepada kerentanan sosial, masalah keluarga, perasaan termarginalisasi dan terpapar ideologi ekstremis. Integrasi dalam dunia kerja juga merupakan tantangan tersendiri.

Montreal mengenal keragaman budaya sebagai aset yang dapat memperkaya kehidupan di kota. Memahami nilai dari keragaman budaya merupakan salah satu dari langkah dasar yang diaplikasikan oleh Montreal, yang kemudian memungkinkan Montreal untuk terus berinovasi secara berkala melalui pendekatan dan program yang dimiliki. Montreal percaya bahwa kesuksesan integrasi pendatang ada pada prinsip tanggung jawab yang diemban bersama oleh pendatang dan masyarakat setempat, yang terbukti menjadi pendekatan yang positif.

Faktor utama yang berkontribusi pada kesuksesan prakarsa yang diaplikasikan oleh Montreal antara lain tersedianya layanan pelengkap yang memfasilitasi penerimaan dan integrasi pendatang baru (yaitu dukungan di tingkat awal untuk membantu pencarian hunian dan bantuan dalam mencari pekerjaan), serta konsultasi dan koordinasi bersama. Layanan yang dibuat khusus serta komunikasi yang sesuai juga penting, mengingat kebutuhan seseorang akan berbeda-beda tergantung dari status keimigrasian masing-masing. Lebih lanjut, bagi pendatang baru tidak mudah untuk menyaring dan memahami berbagai macam layanan yang tersedia di kota yang baru.

Sumber: World Economic Forum, 2017.

Tidak adanya kebijakan integrasi dan kohesi sosial yang efektif akan memicu komunitas yang terpisah dan termarginalisasi, yang kemudian dapat menjadi sumber tumbuhnya perasaan frustrasi, kekecewaan, kerentanan dan bahkan radikalisasi di dalam masyarakat.[54] Kebijakan-kebijakan integrasi migran banyak perbedaan, mulai dari kebijakan yang lunak yang berempati terhadap migran, hingga yang keras dan brutal di pihak lembaga penegak hukum. Sejak 1989, Montreal, Kanada, telah menetapkan kerangka kebijakan untuk mengatasi tantangan bagi migrasi dan integrasi dengan cara yang ramah (Kotak 5.3).[55]

Pekerja migran merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi virus korona. Karantina wilayah yang dirancang untuk menekan penyebaran COVID-19 berdampak pada kehilangan pekerjaan yang besar di seluruh dunia dengan migran sebagai kelompok yang paling rentan (Bab 1, 3). Tren ini tentu akan berdampak terhadap 164 juta pekerja migran di seluruh dunia[56] jika mereka harus kembali ke negara asal, yang artinya kembali ke kemiskinan. Di negara-negara Teluk, puluhan ribu pekerja migran di sektor konstruksi, perhotelan, ritel, dan transportasi telah kehilangan pekerjaan dan terpaksa kembali ke negara asalnya (Bab 1).

Karantina wilayah yang dirancang untuk menekan penyebaran COVID-19 berdampak pada kehilangan pekerjaan yang besar di seluruh dunia dengan migran sebagai kelompok yang paling rentan

Kehilangan pekerjaan akan berdampak pada kemampuan migran untuk mengirim uang ke negara asalnya. Banyak negara berkembang yang akan terpukul akibat pemasukan melalui pengiriman uang dari luar negeri yang diprediksi turun hingga 20 persen, dari USD 551 miliar di tahun 2019[57] menjadi USD 445 miliar di 2020[58] akibat pelemahan ekonomi dampak dari COVID-19. Negara-negara penerima remitansi tertinggi di tahun 2019 adalah India, Tiongkok, Meksiko, Filipina, Mesir, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan Ukraina. Negara-negara tersebut menerima USD 350 miliar atau 63,5 persen dari seluruh remitansi di negara berkembang.[59] Penurunan jumlah remitansi akan berdampak sangat besar terhadap daerah perkotaan, mempertimbangkan peran mereka dalam pengurangan kemiskinan, pembiayaan perumahan, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga.

5.3 Menggapai Keadilan melalui Urbanisasi Berkelanjutan

Perkembangan daerah perkotaan memberikan kesempatan perubahan dari kesetaraan menuju keadilan, dan menghapus hambatan sistemik yang menghalangi individu dan kelompok rentan untuk menikmati manfaat sosial urbanisasi (Gambar 5.3). Pandangan terkandung dalam nilai sosial adalah bahwa ruang perkotaan seharusnya tidak mendukung kesenjangan atau membiarkan manfaat urbanisasi hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, dengan mengucilkan kelompok lain. Dalam kondisi ini, kelembagaan dan struktur yang ada akan lebih condong kepada kelompok masyarakat yang lebih dominan, yang dapat berusaha memaksimalkan keuntungan ini untuk kelompok mereka sendiri, baik secara legal ataupun tidak, dengan terus mempercepat situasi yang menguntungkan mereka sendiri.[60]

Perkembangan daerah perkotaan memberikan kesempatan perubahan dari kesetaraan menuju keadilan, dan menghapus hambatan sistemik yang menghalangi individu dan kelompok rentan untuk menikmati manfaat sosial urbanisasi

Konsep keadilan menyebutkan bahwa pelaksanaan mekanisme redistribusi ditujukan untuk menjamin penggunaan sumber daya lebih efisien dan adil, keterampilan, dan kesempatan yang ditujukan untuk kelompok yang paling rentan dengan tingkat dukungan yang tinggi. Upaya untuk mencapai keadilan juga melibatkan peningkatan kesetaraan sosio-ekonomi dan penyediaan partisipasi sipil yang universal di lingkungan sosial, politik, dan kebudayaan.[61] Untuk memperoleh nilai sosial dari urbanisasi keberlanjutan yang maksimal, penting untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab pengucilan dan ketidakadilan.

Gambar 5.3: Kesetaraan dibandingkan dengan Keadilan

Pada gambar pertama, diasumsikan bahwa semua orang akan menikmati manfaat yang ada dari pemberian dukungan yang sama. Mereka mendapat perlakuan yang sama rata.

Pada gambar kedua, masing-masing individu diberikan dukungan yang berbeda untuk memastikan mereka memiliki akses terhadap pertandingan. Mereka diperlakukan secara adil.

Pada gambar ketiga, ketiga individu dapat menyaksikan pertandingan tanpa bantuan apa pun, karena sumber ketidakadilan telah ditangani. Tantangan sistemis yang ada telah dihapuskan.

Sumber: City for All Women Initiative, 2015, hlm. 17

5.3.1 Mengatasi Ketidakadilan dan Ketimpangan Perkotaan

Agar nilai sosial dapat sepenuhnya dimanfaatkan, mekanisme perkotaan harus dapat mengatasi permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam beberapa konteks perkotaan, sayangnya, penekanan pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kekayaan yang terkonsentrasi pada satu tempat dan mendorong peningkatan kemiskinan perkotaan dan ketimpangan baik di negara berkembang dan maju. Tingginya ketimpangan dari pengambilan keputusan berdampak negatif terhadap kohesi sosial dan juga kualitas institusi dan kebijakan yang dihasilkan, yang kemudian berdampak pada lambatnya perkembangan manusia dan pertumbuhan sosial.[62] Selain itu, banyak kota yang tidak siap dalam menghadapi tantangan multidimensional yang terkait dengan ketimpangan perkotaan karena tidak memiliki institusi yang cukup matang yang justru sangat penting dalam mencapai kota yang lebih adil bagi seluruh masyarakatnya.

Kesenjangan antara negara berkembang dengan negara maju tidak melulu karena perbedaan pendapatan, kekayaan, akses ke kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kredit, SDA dan kualitas kehidupan

Institusi tersebut mempersiapkan struktur yang kuat yang memungkinkan pemberian manfaat secara maksimal untuk masyarakat secara keseluruhan. Institusi yang tidak memadai terlihat dari lemahnya kerangka hukum, pengabaian terhadap peraturan dan hukum yang ada, lemahnya penegakan hak properti, birokrasi yang berlebihan, dan praktek yang korup, yang tentu saja tidak cocok dengan semangat kota yang setara.

Meningkatnya kesenjangan antara negara berkembang dengan negara maju tidak melulu karena perbedaan pendapatan, kekayaan, akses ke kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kredit, SDA, dan kualitas kehidupan. Bagi mayoritas kelompok kurang mampu, tempat lahir dan

jenis kelamin mereka turut berkontribusi pada tantangan yang mereka hadapi.[63] Ketimpangan bersifat multidimensional tersebut tercermin di dalam kota, di mana terdapat pengecualian serta diskriminasi akibat ras, jenis kelamin, identitas kelompok, usia, dan faktor lainnya. Di dalam kelompok masyarakat multietnik tetapi dengan mayoritas kulit putih, keturunan kulit hitam Afrika mengalami diskriminasi akut, terutama bagaimana mereka diawasi oleh kepolisian. Isu diskriminasi tersebut akhirnya memuncak di bulan Juni 2020 setelah meninggalnya satu orang kulit hitam di Minneapolis, AS (Kotak 5.4).

Tingkat ketimpangan pendapatan di kota-kota sebagaimana terefleksikan oleh koefisien Gini bervariasi di berbagai wilayah di dunia (Bab 1). Kota-kota di Eropa memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah di antara negara-negara maju, sedangkan kota-kota di Amerika Utara terutama di AS memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi. Di antara negara-negara berkembang, kota-kota di Asia memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah; bahkan di beberapa kasus, hal tersebut dapat dibandingkan dengan kota-kota di Eropa. Namun, ketimpangan di sejumlah kota di Tiongkok kini semakin tinggi akibat migrasi internal dan kurangnya jaring pengaman bagi para migran. Kota-kota di Amerika Latin dan Afrika memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi. Selama beberapa dekade terakhir, ketimpangan pendapatan di sejumlah kota-kota di Amerika Latin mulai menyusut akibat dukungan program bantuan sosial yang berusaha mengatasi ketimpangan pendapatan dan isu sosial lainnya seperti pemukiman informal, ekonomi informal, kekerasan di perkotaan dan marginalisasi perempuan. Tingkat ketimpangan lebih besar di kota-kota besar dibandingkan kota yang lebih kecil dan lebih terlihat pada tingkatan perkotaan ketimbang nasional (Bab 1). Pandemi COVID-19 semakin menunjukkan dan memperburuk ketimpangan di lingkungan perkotaan (Kotak 5.5).

Kotak 5.4: *Black Lives Matter* memicu gerakan sosial perkotaan secara global menyusul pembunuhan George Floyd di Minneapolis (AS)

Pada tanggal 25 Mei 2020, petugas kepolisian Minneapolis menangkap George Floyd, pria kulit hitam berusia 46 tahun, setelah seorang karyawan toko melapor melalui 911 bahwa Floyd telah membeli rokok dengan uang USD 20 palsu. Tujuh belas menit setelah ketibaan mobil polisi yang pertama di lokasi, Floyd tidak sadarkan diri dan tertindih di bawah tiga petugas polisi, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Kematian Floyd memicu protes di lebih dari 550 lokasi di seluruh AS dan di lebih dari 60 negara untuk melawan rasisme dan kekejaman polisi. Sekitar 15-26 juta orang di AS telah berpartisipasi dalam demonstrasi di bulan Juni 2020. Angka tersebut menunjukkan bahwa protes baru-baru ini merupakan gerakan terbesar dalam sejarah AS.

Protes tersebut meningkatkan kesadaran mengenai ketimpangan, ekslusi sosial dan bias rasial di banyak aspek masyarakat. Perencana perkotaan, desainer, dan arsitek menyampaikan kebutuhan untuk "rancangan keadilan," atau sebuah prinsip bahwa untuk setiap ketidakadilan di dunia, ada arsitektur yang telah direncanakan dan didesain untuk mengabadikannya. Desain keadilan berupaya untuk menghancurkan hak istimewa dan kekuasaan yang menggunakan arsitektur sebagai alat penindasan dan untuk menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk mendesain ruang-ruang adil yang radikal yang berpusat pada pembebasan bagi kelompok yang dirugikan.

Penindasan yang tertanam tersebut muncul dalam berbagai macam bentuk. Terlihat dari keputusan perencanaan yang menargetkan kelompok non kulit putih untuk proyek pembangunan jalan raya dan skema "pembaruan kota" yang dirancang untuk menjauhkan manfaat ekonomi dari warga yang sudah ada. Juga terlihat di dalam filosofi desain yang mengubah lingkungan menjadi sebuah labirin "ruang yang dapat dipertahankan" yang justru mengkriminalisasi kelompok kulit hitam dengan dalih untuk keamanan. Penindasan tersebut juga terlihat dari tersedianya ruang publik yang gagal memberikan rasa aman bagi sejumlah kelompok untuk berkumpul dari kekhawatiran akan dilecehkan.

Sumber: *Hill et al, 2020; Buchanan et al, 2020; Lee Jr, 2020*

Ketimpangan di lingkungan perkotaan menafikan nilai sosial dari urbanisasi. Pendekatan yang lebih proaktif diperlukan untuk mengatasi tantangan ketimpangan perkotaan dan untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi dan sosial yang ditawarkan oleh urbanisasi. Kebijakan ekonomi makro yang terfokus pada sosial adalah hal yang utama untuk mendorong program sosial perkotaan yang progresif; artinya, jika manfaat yang dihasilkan oleh urbanisasi dan investasi publik didistribusikan secara merata kepada seluruh kelompok rentan di lingkungan perkotaan, maka akan muncul kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan prospek ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas dan terutama mengatasi ketimpangan isu sosial.

Ketimpangan di lingkungan perkotaan menafikan nilai sosial dari urbanisasi

Dalam upaya untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan, penting untuk mengaplikasikan kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk melawan dorongan pasar dengan memberikan prioritas dalam menyediakan layanan perkotaan bagi daerah dengan pendapatan rendah dan tertinggal.

Dalam upaya untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan, penting untuk mengaplikasikan kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk melawan dorongan pasar dengan memberikan prioritas dalam menyediakan layanan perkotaan bagi daerah dengan pendapatan rendah dan tertinggal

Tersedianya infrastruktur dan layanan sosial yang memadai di pemukiman miskin akan menekan tingkat ketimpangan yang ada dan meningkatkan nilai sosial, kohesi dan inklusi. Di kota-kota di negara maju, isu utama yang perlu ditangani adalah berbagai macam eksklusi dan marginalisasi yang dialami oleh kelompok minoritas dan migran, banyak di antaranya diperburuk oleh dampak dari COVID-19 (Kotak 5.5).

Sebuah sistem yang tidak mengabaikan siapa pun dan juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama rata bagi semua pihak menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat ketimpangan yang ada. Pemerintah di Amerika Latin menggunakan kebijakan redistribusi untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan secara signifikan melalui investasi di Kesehatan dan Pendidikan. Contoh klasik adalah program *Bolsa Familia* (Tunjangan Keluarga) di Brasil yang membantu jutaan kaum miskin sebagai penerima bantuan, yang Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan, melalui transfer yang harus dibuktikan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan seperti kehadiran di sekolah, kunjungan ke klinik, imunisasi secara rutin, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, dan pendidikan ulang untuk anak-anak dan mereka yang berisiko untuk menjadi pekerja anak. Di tahun 2015, *Bolsa Familia* berkontribusi terhadap 12 – 21 persen turunnya ketimpangan dan turunnya proporsi penduduk Brasil yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga tujuh juta, dari 13 menjadi tiga persen.[64]

Sebuah sistem yang tidak mengabaikan siapapun dan juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama rata bagi semua pihak menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat ketimpangan yang ada

Dalam menciptakan manfaat urbanisasi yang inklusif perlu dilakukan upaya-upaya untuk menghapus tantangan sistemis yang menghalangi akses terhadap barang, jasa dan kesempatan, sebagaimana yang dilakukan oleh UE melalui inisiatif Kota-kota Melawan Ekslusi Sosial (Cities Against Social Exclusion). Program ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh kota-kota dan kawasan untuk menyusun kebijakan yang efektif untuk melawan segregasi sosial, mengidentifikasi praktek yang baik dan mengembangkan solusi yang inovatif untuk membina inklusi sosial.[65] Stockholm tengah berupaya untuk menghapus hambatan terhadap keterlibatan yang menyeluruh bagi perempuan, pemuda, tunawisma, kaum lansia, dan kaum difabel.[66] Wina tengah mengembangkan sebuah rencana aksi yang mencakup non-diskriminasi pada seluruh tingkatan dengan tetap meningkatkan partisipasi politik dan sosial bagi seluruh kelompok minoritas, termasuk migran, dan memantau keragaman sosial dan integrasi menggunakan indikator terukur.

Kotak 5.5: COVID-19: Memperdalam ketimpangan di lingkungan perkotaan

COVID-19 memperdalam ketimpangan yang menjadi karakter di banyak daerah perkotaan. Kebijakan karantina wilayah dan pembatasan fisik berdampak sangat negatif bagi rumah tangga berpendapatan rendah, terutama pekerja di sektor informal yang harus meninggalkan rumah mereka dan bekerja demi memperoleh pendapatan. Bekerja dari rumah menguntungkan bagi pekerja kerah putih dan pekerja dengan pendapatan tinggi yang memiliki fasilitas yang diperlukan. Hal yang sama juga berlaku bagi sekolah-dari-rumah secara daring yang hanya berlaku bagi rumah tangga dengan pendapatan yang cukup, namun tidak untuk keluarga dengan pendapatan rendah yang mengirimkan anak-anak mereka untuk sekolah di permukiman informal, atau di mana fasilitas belajar dengan teknologi yang cukup tidak tersedia.

Permukiman kumuh dan informal, yang menampung hingga 60 persen populasi perkotaan di lokasi yang buruk, mengakibatkan isolasi mandiri dan pembatasan fisik tidak mungkin untuk dilakukan. Pembatasan fisik di Dharavi di Mumbai (India), misalnya, dengan kepadatan populasi 270.000 orang per kilometer persegi, atau di kamp pengungsi, Cox's Bazar (Bangladesh), dengan populasi sekitar 3 juta orang, sangat sulit dibayangkan.

Kekurangan air bersih, sanitasi dan kebersihan yang buruk di pemukiman kumuh yang padat, serta kamp pengungsi dan hostel yang menampung pekerja migran menunjukkan bahwa mencuci tangan sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap virus korona adalah tantangan yang besar. Di tahun 2017, 3 miliar orang di dunia tidak memiliki fasilitas untuk mencuci tangan di rumah mereka, 1,6 miliar memiliki fasilitas yang kurang memadai tanpa sabun atau air dan 1,4 miliar bahkan tidak memiliki fasilitas apapun. Di negara kurang berkembang, hampir tiga perempat dari penduduk tidak memiliki fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air.

Orang tua dan kelompok minoritas berisiko lebih tinggi untuk terjangkit dan meninggal akibat COVID-19. Di Tiongkok, warga berusia di atas 60 tahun ke atas mencapai 81 persen dari keseluruhan jumlah korban meninggal akibat COVID-19. Pola serupa terlihat di AS, di mana 80 persen dari kematian akibat COVID-19 terjadi di antara penduduk dengan usia di atas 65 tahun. Di Italia, 83,4 persen dari korban meninggal akibat COVID-19 terdiri dari mereka yang berusia di atas 70 tahun. Kecenderungan penduduk senior yang meninggal akibat COVID-19 mengakibatkan pemberian prioritas terhadap perawatan kesehatan bagi penduduk usia muda, yang kemudian justru mendorong stereotip negatif yang berdampak pada diskriminasi dan stigma bagi penduduk lanjut usia.

Kelompok etnis minoritas juga terdampak secara negatif oleh pandemi COVID-19. Di AS, kelompok Afrika-Amerika mencapai lebih dari sepertiga kematian total akibat COVID-19, padahal jumlahnya 14 persen dari populasi total. Di Chicago, kelompok Afrika-Amerika mencapai 72 persen dari kematian akibat COVID-19, padahal merupakan 30 persen dari populasi. Di New York, kelompok kulit hitam dan Latin dua kali lebih mungkin meninggal dibandingkan kelompok kulit putih dan Asia. Hal ini menunjukkan ketimpangan akan akses terhadap kesempatan ekonomi, layanan kesehatan, kemiskinan, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dianggap penting selama karantina wilayah yang mana mengakibatkan kelompok Afrika-Amerika sangat rentan terhadap COVID-19.

Sumber: *Diambil dari Bab 1.*

5.3.2 Menghapus Kemiskinan di Kota-Kota

Diperkirakan sepertiga dari seluruh penduduk perkotaan adalah masyarakat miskin, yang mewakili seperempat dari seluruh jumlah masyarakat miskin di dunia yang mayoritas tinggal di kota-kota kecil.[67] Tingkat pertumbuhan masyarakat miskin perkotaan lebih besar dari tingkat pertumbuhan populasi masyarakat perkotaan di dunia.[68] Fakta ini menunjukkan bahwa proporsi kemiskinan ikut meningkat seiring dengan peningkatan laju urbanisasi, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat konsentrasi kemiskinan di daerah perkotaan. Peningkatan kemiskinan ekstrem di Afrika berdampak pada tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mempertimbangkan cepatnya laju urbanisasi. Kemiskinan perkotaan di banyak negara di Afrika

meningkat lebih cepat daripada kemiskinan secara nasional.[69] Tren ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya migran dari daerah perdesaan ke perkotaan dan ketidakmampuan pemerintah kota untuk merespons kebutuhan mereka secara memadai.

Diperkirakan sepertiga dari seluruh penduduk perkotaan tergolong miskin, yang mewakili seperempat dari seluruh jumlah masyarakat miskin di dunia yang mayoritas tinggal di kota-kota kecil

Afrika Sub-Sahara tercatat memiliki tingkat kemiskinan perkotaan tertinggi secara global dengan jumlah sekitar 23 persen dari jumlah penduduk perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional dan 29 persen mengalami kemiskinan multidimensional (Tabel 5.1). Di Kenya, meskipun kemiskinan di daerah perdesaan mengalami penurunan tajam dari 51 persen di tahun 2005 – 2006 menjadi 39 persen di tahun 2015-2016, kemiskinan di daerah perkotaan hanya turun dari 32 persen menjadi 29 persen, namun meningkat dari segi jumlah absolut dari 2,3 juta menjadi 3,8 juta.[70] Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh tingginya pertumbuhan populasi, meningkatnya biaya kehidupan akibat tingginya harga perumahan, tingginya harga transportasi dan pangan, serta langkanya lapangan pekerjaan, yang semuanya secara signifikan mengurangi pendapatan yang dibutuhkan oleh rumah tangga di daerah perkotaan.

Angka kemiskinan semakin buruk akibat pandemi COVID-19 (Bab 1). Penduduk daerah perkotaan di India, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, dan Bangladesh, yang merupakan setengah dari 736 juta populasi dunia yang hidup di dalam kemiskinan ekstrem akan semakin terpuruk. Bahkan di kawasan lain yang lebih baik – Asia Timur, Pasifik, Timur Tengah, Afrika Utara, Amerika Latin dan Karibia – diperkirakan jutaan akan jatuh ke tingkat kemiskinan akibat COVID-19. Di Amerika Latin, 28 juta penduduk diperkirakan akan jatuh ke tingkat kemiskinan, di mana kaum perempuan terkena dampak besar akibat turunnya aktivitas ekonomi akibat COVID-19.[71] Meningkatnya tingkat kemiskinan akan berdampak pada upaya pencapaian TPB 1 (Menghapus Kemiskinan) di tahun 2030. Dampak dari kegagalan untuk mencapai TPB 1 akan turut berdampak negatif terhadap tujuan yang lain seperti kelaparan dan perbaikan nutrisi (TPB 2); kesehatan yang baik dan kesejahteraan (TPB 3); dan pendidikan yang bermutu dan inklusif (TPB 4).

Tabel 5.1: Orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensional, 2013

Kawasan	Rasio jumlah keuangan per orang (%)			Rasio jumlah multidimensional per orang (%)			Jumlah negara	Cakupan populasi (%)
	Perkotaan	Perdesaan	Pembagian kemiskinan di desa	Perkotaan	Perdesaan	Pembagian kemiskinan di desa		
Asia Timur dan Pasifik	3,9	6,5	67,8	4,2	10,2	75,5	13	28,9
Eropa dan Asia Tengah	0,2	0,5	52,7	0,8	1,8	52,2	17	90,0
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia	1,9	11,2	61,0	2,5	19,9	68,2	17	91,5
Timur Tengah dan Afrika Utara	0,9	6,4	84,8	1,9	11,5	83,2	9	72,1
Asia Selatan	3,9	15,2	90,3	10,5	33,3	88,4	5	23,0
Afrika Sub-Sahara	22,6	55,9	83,4	28,8	81,8	85,2	29	60,7
Negara lainnya	0,4	0,6	30,7	0,4	0,6	30,7	29	39,6
Total	4,1	21,0	81,3	5,6	33,6	83,5	119	45,0

Catatan: Perkiraan berdasarkan survei harmonisasi rumah tangga di 119 negara
Sumber: Bank Dunia, 2018b, h. 113

Kawasan perkotaan membuka banyak peluang bagi penciptaan kesejahteraan, yang menjadi penggerak pengentasan kemiskinan. Pada umumnya, tingginya tingkat urbanisasi dikaitkan dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Saat sebuah kota direncanakan dan dikelola dengan baik, maka dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan, dengan catatan kebijakan yang memadai telah diaplikasikan.[72] Pengentasan kemiskinan di dalam urbanisasi bergantung pada seberapa baik pertumbuhan perkotaan telah dirancang dan dikelola, dan sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh urbanisasi didistribusikan dengan merata. Menyusun kebijakan yang tepat dan memungkinkan perubahan kelembagaan dan institusi merupakan hal yang krusial dalam pengentasan kemiskinan. Di tengah cepatnya urbanisasi yang terjadi di negara berkembang, penting untuk melakukan investasi yang tepat dan memadai untuk dapat menangani meningkatnya pertumbuhan populasi di perkotaan. Oleh sebab itu, pengelolaan urbanisasi merupakan komponen yang penting dalam mengelola pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

Kawasan perkotaan membuka banyak peluang bagi penciptaan kesejahteraan, yang menjadi penggerak pengentasan kemiskinan

Tidak ada satu kota pun yang dapat menikmati nilai sosial dari urbanisasi saat sebagian besar populasinya masih berada di dalam kemiskinan ekstrem. Ada beberapa cara di mana nilai sosial dari daerah perkotaan dapat ditingkatkan untuk membantu pengentasan kemiskinan, termasuk melalui penyediaan perumahan yang terjangkau, akses tanah dan keuangan, kesempatan kerja, lingkungan yang memudahkan bagi kewirausahaan dan infrastruktur dasar. Akses terhadap berbagai macam barang dan jasa, seperti pendidikan, kesehatan dan rekreasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan potensi mereka secara menyeluruh dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan menjalani kehidupan yang produktif. Dalam memanfaatkan nilai sosial juga berarti mendorong kesetaraan gender dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan, serta menjamin partisipasi sipil yang luas di bidang sosial, budaya dan politik. Kota yang gagal mengintegrasikan seluruh kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusannya akan menghasilkan dan mendorong berkembangnya kemiskinan.

Tidak ada satu kota pun yang dapat memanfaatkan nilai sosial dari urbanisasi saat sebagian besar populasinya masih berada di dalam kemiskinan ekstrem

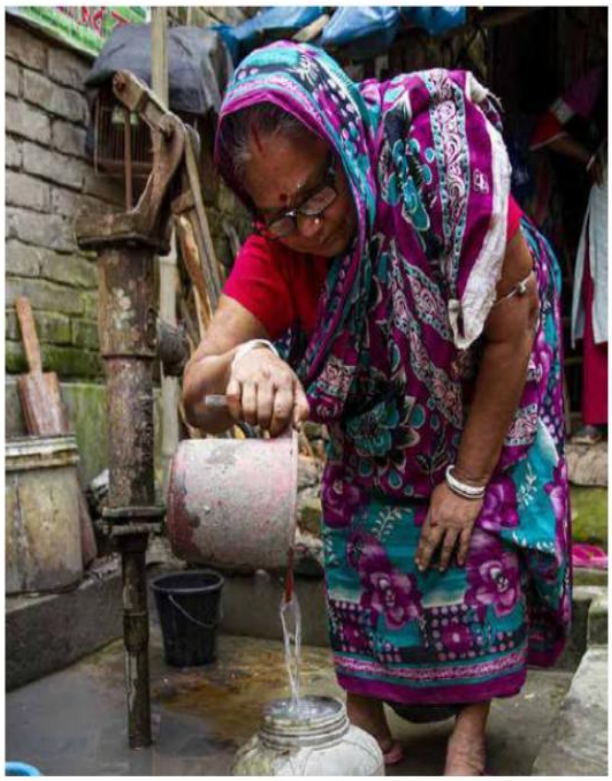

Seorang perempuan mengambil air. Sathkira, Bangladesh. © UN-Habitat/Kirsten Milhahn

Urbanisasi yang terencana telah mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan melalui tingkat produktivitas yang tinggi, kesempatan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik yang tercapai melalui pendidikan dan kesehatan serta investasi publik dengan skala besar dan akses kepada infrastruktur dan layanan yang lebih baik.[73] Hal ini terlihat nyata di Kawasan Asia Timur, di mana peningkatan urbanisasi dalam tiga dekade terakhir yang dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Ketersediaan sumber air dan sanitasi yang lebih baik memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan di Provinsi Surkhandarya, Uzbekistan (Kotak 5.6).

Kotak 5.6: Penghapusan kemiskinan melalui perbaikan sumber air dan sanitasi di Provinsi Surkhandarya

Di awal tahun 2000, Provinsi Surkhandarya, Uzbekistan, mengalami tantangan dalam ketersediaan air dan sanitasi. Infrastruktur yang sudah tua serta seringnya terjadi pemadaman listrik dan kurangnya anggaran menghambat pemberian layanan publik yang baik. Memperbaiki kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat dengan menyediakan sumber air yang aman dan terpercaya serta memperbaiki sanitasi merupakan prioritas utama pemerintah. Sekalipun cakupan air dan sanitasi di Uzbekistan cukup luas, banyak rumah tangga di daerah perkotaan hanya memiliki akses ke air dalam 6 hingga 16 jam dalam satu hari, sedangkan di daerah perdesaan hanya antara 2 hingga 10 jam dalam satu hari.

Hal tersebut yang mendorong Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank (ADB)) untuk menyetujui Proyek Ketersediaan Air dan Sanitasi Surkhandarya (Surkhandarya Water Supply and Sanitation Project) di tahun 2009. Tujuan dari proyek tersebut antara lain untuk memperbaiki standar kehidupan, lingkungan dan kesehatan publik di daerah perkotaan di Provinsi Surkhandarya dengan menyediakan layanan dasar dan air yang aman dan berkelanjutan, serta mendorong kebersihan bagi 340.000 orang yang tinggal di distrik Kizirik, Angor, Muzrabad, Shurchi, Kumjurgan, Jarkurgan, Sariasiya dan Kota Termez.

ADB telah menyiapkan strategi sektor, peta jalan dan rencana investasi hingga 2020; pihak berwenang telah merehabilitasi dan membangun sistem pasokan air, memperkuat kapasitas *vodokanal* (Badan Pasokan Air dan Sanitasi) dan mengembangkan pendekatan komersial untuk penanganan layanan pelanggan. Provinsi Surkhandarya mengadopsi tiga strategi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin, yang merupakan 32 persen dari total populasi di tahun 2014. Pertama, proyek tersebut meliputi biaya koneksi, yang kemudian menghapus segala tantangan akses ke air bersih. Kedua, *vodokanal* memasang meteran wajib yang akan dibayarkan kembali dalam waktu tiga tahun. Ketiga, para mitra turut membangun proses yang inklusif secara sosial ke dalam proyek yang dilaksanakan untuk menjamin bahwa semua orang dapat menikmati manfaat secara merata.

Perbaikan suplai air membantu rumah tangga di Sukhandarya untuk menghemat biaya per bulannya, di mana sebelumnya konsumsi air bersih dapat memakan sekitar 30 persen pengeluaran tiap rumah tangga dalam satu bulan. Akses terhadap sumber air yang lebih baik telah membantu perbaikan kualitas kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil dan menengah di Provinsi Surkhandarya. Sekitar 367.000 penduduk sekarang menikmati air melalui jalur perpipaan yang bersih dan terpercaya, dengan penerima manfaat utama sekitar 3.079 keluarga berpenghasilan rendah, di mana 47 persen diantaranya adalah rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Proyek ini juga membantu memberikan akses terhadap air yang aman dan layak pada kelompok miskin perkotaan dan perdesaan serta kelompok rentan, yang kemudian turut membantu dalam meningkatkan ketersediaan waktu untuk digunakan melakukan aktivitas yang lebih produktif, Kesehatan yang lebih baik, dan pengeluaran untuk perawatan kesehatan.

Selain menyediakan air yang bersih untuk dikonsumsi, proyek ini juga menyediakan jamban yang berventilasi dan tangki septik di 17 sekolah negeri di tujuh distrik, serta perbaikan sanitasi dan promosi perilaku kebersihan yang baik diantara anak-anak usia sekolah untuk mencegah penyakit menular. Jika ketersediaan listrik dapat dipastikan tidak terputus, maka diperkirakan 90 persen dari populasi akan menikmati air yang bersih selama lebih dari 20 jam dalam satu hari di tahun 2020. Hingga akhir Maret 2015, air bersih tersedia dalam 15-22 jam sehari dibandingkan sebelumnya yang hanya 2-6 jam sehari.

Sumber: Asian Development Bank, 2019.

Urbanisasi yang terencana telah mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan melalui tingkat produktivitas yang tinggi, kesempatan kerja dan kualitas hidup yang lebih baik yang tercapai melalui pendidikan dan kesehatan serta investasi publik dengan skala besar dan akses kepada infrastruktur dan layanan yang lebih baik

Urbanisasi dan pengentasan kemiskinan terkait erat dengan kebijakan dan institusi ekonomi dan sosial yang inklusif dalam proses pembangunan. Namun, hubungan keterkaitannya tidak sesederhana dan bersifat satu arah yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dan sejauh mana manfaat dan kesempatan yang terkait dengan urbanisasi dibagikan

secara merata.[74] Selain itu, pertumbuhan perkotaan yang terencana juga penting untuk pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan, mengingat urbanisasi yang berkelanjutan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan.[75] Kota berperan penting dalam membantu perkembangan daerah perdesaan dengan memberikan kesempatan akses terhadap informasi, pekerjaan, dan layanan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun bukan satu-satunya kondisi yang diperlukan. Tantangan utamanya tidak hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat.[76] Meningkatnya tingkat kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tampak di beberapa negara menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu terdistribusikan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti bahwa kemiskinan berhasil dihapuskan. Salah satu isu utamanya adalah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi – yang kemudian mendorong kesejahteraan kota – tidak selalu menghasilkan perbaikan ekonomi bagi kelompok rentan dan justru terkadang memperburuk kondisi kemiskinan meskipun perbaikan ekonomi perkotaan tengah tercapai. Pembuat kebijakan harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan terkait non-ekonomi dan keadilan yang penting yang harus diseimbangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebuah kota yang tidak inklusif secara sosial akan sulit untuk menikmati manfaat dari urbanisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun bukan satu-satunya kondisi yang diperlukan

5.4 Nilai Tak Berwujud Urbanisasi Berkelanjutan

Selain manfaat yang jelas terlihat, kota-kota juga menawarkan sejumlah nilai yang sifatnya tak berwujud (Bab 2). Bagian ini menganalisis sejumlah elemen tak berwujud dari urbanisasi, termasuk adanya lembaga-lembaga terpercaya, sistem tata kelola yang efektif, dan budaya kota – di mana semuanya menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan di antara para penghuni kota.

5.4.1 Kelembagaan yang Efektif

Perkotaan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya institusi-institusi yang efektif, baik yang bersifat formal (konstitusi, hukum dan peraturan) maupun informal (norma sosial, kebiasaan dan tradisi), untuk mendukung kebijakan-kebijakan dan program-program yang bermanfaat bagi peningkatan nilai sosial suatu kota dan menjadikannya layak dihuni bagi semua orang. Kelembagaan yang efektif wajib dimiliki dalam pengelolaan dan tata kelola kota manapun. Institusi dan mekanisme terpercaya, yang memberdayakan dan merangkul seluruh pemangku kepentingan kota, sangatlah penting untuk meningkatkan nilai tambah suatu kota karena elemen ini dapat mendukung proses pembangunan dan kerja kota yang bermanfaat bagi mayoritas warganya. Seluruh karakter tersebut kurang cocok dengan perkotaan berkelanjutan. Perubahan kelembagaan yang paling relevan berdampak bagi wilayah perkotaan[77], dengan implikasi pada nilai perkotaan adalah:

- Pengarusutamaan secara bertahap atas isu keadilan oleh otoritas setempat, dalam koordinasi dengan pemerintah pusat
- Mengadopsi kegiatan dan tanggung jawab yang melebihi mandat tradisional pemerintah daerah, seperti untuk isu kesehatan, pendidikan, dan permukiman
- Konfigurasi kota baru yang dapat mengubah ukuran dan bentuk lembaga di tingkat kota, metropolitan, dan daerah/kabupaten
- Keuangan daerah yang lebih lemah, terutama di kota-kota kecil, yang tergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat
- Perluasan pajak kota yang lambat, sehingga tidak bisa mengimbangi pertumbuhan demografi
- Kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, yang menghambat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perkotaan
- Kurangnya atau lemahnya penegakan hukum dan peraturan terkait tata kelola perkotaan, yang diakibatkan oleh inefisiensi lembaga pemerintahan dan rendahnya partisipasi masyarakat sipil

Permukiman kumuh samping rel kereta Bijoy Sarani, Bangladesh, Dhaka. ©UN-Habitat/Kirsten Milhahn

UN-Habitat menunjukkan bukti bahwa dampak dari institusi yang tidak efektif dan lemah atas perkotaan berkelanjutan lebih terlihat di kota-kota di Afrika dan Arab, di mana lebih dari 40 persen pakar perkotaan menyatakan lemahnya kelembagaan sebagai hambatan terbesar. Tantangan ini kurang nyata di wilayah Asia dan Amerika Latin dan Karibia, di mana para pakar memberikan angka masing-masing 24 dan 27 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kota-kota di Afrika dan Arab perlu melakukan penguatan kelembagaan yang lebih efektif, demi meningkatkan nilai perkotaannya. Di banyak negara berkembang, lembaga yang diperlukan untuk tugas pembagian kesejahteraan warga, apabila ada, ternyata lemah. Institusi yang terpercaya, seperti disyaratkan dalam NUA, sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program perkotaan, di semua tingkatan pemerintahan, termasuk aktor non-negara.

Di banyak negara berkembang, lembaga yang diperlukan untuk tugas pembagian kesejahteraan warga, apabila ada, ternyata lemah

Membentuk institusi terpercaya memerlukan kerja sama efektif antara badan-badan publik dan aktor non-pemerintah. Organisasi kemasyarakatan yang dipercaya juga harus turut meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan politik dan sosial. Adanya kesepakatan sosio-politis diantara para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dapat berkontribusi kepada tata kelola perkotaan yang lebih baik (Bab 7). Kesepakatan-kesepakatan tersebut memerlukan kerangka koheren, berdasarkan pemahaman atas tata kelola perkotaan yang efektif dan lestari, serta didukung oleh pengetahuan dan informasi teknis terkini.

Kesepakatan-kesepakatan partisipasi harus diformalkan dalam program dan perencanaan perkotaan, demikian pula dalam kesepakatan sosial berorientasi aksi, agar sejalan dengan visi bersama kota. Beberapa pengalaman perkotaan telah menghasilkan pada proses distribusi fasilitas perkotaan yang lebih inklusif dan setara, dan penciptaan modal sosial melalui kolaborasi antara pemerintah kota, pemangku kepentingan dan aktor sosial, seperti terlihat dari Villa El Salvador (Peru), Barquisimeto (Venezuela), dan Porto Alegre (Brasil).[78] Secara umum, partisipasi aktif dari lembaga pemerintah dan sosial serta organisasi kemasyarakatan sangat menentukan dalam peningkatan nilai tak berwujud perencanaan perkotaan.

5.4.2 Bagaimana Kota-Kota dan Permukiman Dikelola

Para pemerintah daerah adalah pemangku kepentingan utama dalam membentuk tata kelola perkotaan dan metropolitan, di dalam keragaman struktur politik dan legislatif, serta dengan bermacam tanggung jawab di bidang eksekutif dan legislatif. Tata kelola adalah komponen kunci dari nilai tak berwujud perkotaan dan sangat penting dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemulihan jasa layanan dan kegiatan sosial, kelembagaan, dan ekonomi yang berkelanjutan dan berketahanan di kota-kota dan permukiman.[79] Tata kelola yang baik adalah syarat dasar bagi perkotaan yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.[80] Walaupun pandangan bahwa tata kelola akan berujung pada peningkatan layanan publik telah diterima secara luas, masih terdapat pertanyaan tentang bagaimana cara mencapai tujuan ini. Dalam kaitan ini, NUA menyediakan cetak biru untuk mencapai tata kelola yang baik dan komitmen-komitmen perubahannya menginspirasi kalangan pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi penguatan kelembagaan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.

Saat ini banyak pemerintah kota, terutama di negara-negara berkembang, yang tergolong lemah dalam penyediaan layanan publik bersifat kunci, seperti perencanaan, perumahan, jalan, transit, air, penggunaan lahan, saluran pembuangan, manajemen sampah dan standar bangunan. Banyak pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya keuangan untuk menciptakan kota dan permukiman yang bersifat inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Bab 1, 8). Apabila kapasitas tata kelola rendah, maka kota-kota memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah perkotaan, baik yang sudah menahun, maupun yang baru.[81]

Kota yang berkelanjutan, berketahanan, dan inklusif adalah produk dari tata kelola yang baik, yang meliputi kepemimpinan yang efektif; perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi; koordinasi yurisdiksi dan

antarlini; partisipasi inklusif warga; dan pendanaan yang cukup. Kepemimpinan yang kuat sangat signifikan untuk mengatasi perbedaan antarlembaga, tingkat pemerintahan dan sektor investasi yang beragam, dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama dan menyusun kegiatan tertentu.[82] Perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi untuk seluruh wilayah kota sangatlah penting untuk tata kelola yang efektif. Strategi kewilayahan dan spasial adalah kunci untuk menanggulangi risiko perubahan iklim dan krisis kesehatan publik seperti pandemi COVID-19, yang melampaui batas-batas yurisdiksi dan memerlukan strategi penanganan yang efektif dan tepat. Koordinasi antarlini adalah esensial, tidak hanya di sektor-sektor pertanahan, transportasi, energi, tanggap darurat, fiskal dan pendanaan, namun juga dalam penanganan masalah kemiskinan dan eksklusi sosial, melalui mekanisme solidaritas antarwilayah yang inovatif.[83]

Kota yang berkelanjutan, berketahanan, dan inklusif adalah produk dari tata kelola yang baik, yang meliputi kepemimpinan yang efektif; perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi; koordinasi yurisdiksi dan antarlini; partisipasi inklusif warga; dan pendanaan yang cukup

Tersedianya layanan dasar yang memadai, terjangkau dan berkualitas dinilai sebagai fungsi inti dari pemerintah kota, yang disiapkan melalui berbagai pengaturan dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan terkait. Namun di banyak kota, penyediaan layanan ini terhambat oleh tantangan koordinasi, tata kelola, keuangan dan kapasitas, dan selanjutnya diperburuk oleh kecepatan dan skala urbanisasi. Selama bertahun-tahun, penduduk perkotaan semakin diberdayakan untuk membuat suara mereka diperhitungkan dengan meminta pertanggungjawaban dari penyedia layanan atas kualitas layanan yang diberikan (Kotak 5.7).

Mengingat banyaknya aktor yang berpartisipasi di berbagai tingkat pengambilan keputusan, ada kebutuhan untuk mendorong tata kelola berbasis jaringan daripada hirarkis.[84] Misalnya, peran aktor swasta dan publik yang terus berkembang, dikombinasikan dengan bentuk-bentuk baru partisipasi politik, memfasilitasi transformasi tata kelola perkotaan. Dalam konteks tersebut, lembaga dan nilai-nilai landasannya memainkan peran penting dalam menyelaraskan dan menyatukan kepentingan dan mendorong paradigma bersama tentang tata kelola perkotaan. Salah satu contoh, Perjanjian Warga untuk Barcelona yang Inklusif (Citizen's Agreement for an Inclusive Barcelona) adalah sebuah strategi yang mengartikulasikan tujuan dan tindakan bersama antara Balai Kota Barcelona dan berbagai aktor di kota, mempromosikan produksi bersama melalui tindakan berbasis jaringan.[85] Program ini adalah hasil dari proses interaktif dua-arah yang melibatkan proses *top-down* dari usulan pemerintah kota, yang berpotongan dengan proses *bottom-up* dari upaya dan kepentingan berbagai organisasi dan jejaring sosial dalam sistem kesejahteraan sosial kota.[86]

5.4.3 Ragam Budaya di Wilayah Perkotaan

Budaya adalah nilai tak berwujud bagi pembangunan kota dengan perwujudan yang nyata.[87] Kebudayaan adalah darah kehidupan daerah perkotaan dan membahas berbagai bentuk integrasi sosial, yang meliputi pemahaman akan struktur kelembagaan formal dan informal di masa lalu dan masa kini. Seperti diperlihatkan sebelumnya, di banyak kota, jumlah penduduk kelahiran luar-negeri ternyata cukup signifikan dari seluruh populasi; menjadikan kota-kota ini lebih heterogen dan multikultural. Orang-orang dari latar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda sekarang hidup bersama. Keragaman budaya kota ini berkontribusi pada semangat, kemakmuran, inklusivitas, daya saing, daya tarik, persepsi positif, dan pembangunan secara keseluruhan. Keberagaman budaya kota dipandang sebagai aset sosial yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Kota-kota yang memiliki ragam budaya menyediakan tenaga kerja yang lebih inovatif karena memiliki jaringan pengetahuan internasional, penciptaan ide, dan pemecahan masalah yang lebih luas, serta pengambilan keputusan yang beragam.[88]

Kotak 5.7: Kartu lapor warga: sebuah alat untuk tata kelola perkotaan

Kartu Lapor Warga (*Citizen Report Card* (CRC)) adalah sebuah alat yang sederhana namun ampuh untuk memberikan masukan bagi lembaga layanan publik terkait kualitas dan daya jangkau layanannya. CRC adalah alat tata kelola yang dapat digunakan oleh kelompok masyarakat, pihak penyedia layanan dan pembuat kebijakan untuk mengukur layanan, kualitas, masalah, dan tantangan yang ada.

CRC juga dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi para pengguna, terutama warga miskin dan kurang mampu, dalam menggunakan layanan publik dan tingkat efektivitas para petugas penyedia layanan. Identifikasi ini berguna untuk membuat rekomendasi kebijakan-kebijakan sektoral, strategi-strategi program dan manajemen pemberian layanan, dalam rangka menjawab hambatan tersebut dan meningkatkan pemberian layanan.

CRC pertama kali dibuat di Bangalore pada tahun 1994 dan telah ditiru di kota-kota lainnya di India seperti Ahmedabad, Chennai, Delhi, Hyderabad, Mumbai, dan Pune, serta banyak kota lainnya di negara berkembang. Di Mumbai, organisasi sipil non-pemerintah PRAJA, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Kota, menggunakan temuan-temuan dari kartu lapor untuk menciptakan sebuah kesepakatan warga terkait layanan publik. Dua kota di Ukraina dan sebuah proyek pembangunan sosial di Filipina juga telah menyiapkan kartu-kartu lapor berdasarkan model ini, dengan dukungan dari Bank Dunia. Di kota kembar Sekondi-Takoradi di Ghana, KLW merupakan sebuah prakarsa baru untuk memperoleh umpan balik atas layanan air dan listrik, menindaklanjuti keluhan-keluhan dan memperjuangkan prioritas warga untuk memperoleh layanan publik.

Pada tahun 2010, Badan Tata Kelola Rwanda (Rwanda Governance Board) mulai menggunakan CRC sebagai alat untuk mengumpulkan masukan dari warga terkait maksud peningkatan kualitas pemberian layanan. Di tahun 2018, CRC digunakan untuk mengukur kepuasan warga sebagai komponen penilaian akuntabilitas pemerintahan. CRC Rwanda memberikan umpan balik kepada para penyedia layanan di 15 sektor, termasuk infrastruktur, pertahanan, swasta, kesehatan, sanitasi, kesejahteraan sosial, keluarga, keamanan dan partisipasi warga.

Temuan-temuan dari CRC telah mendorong langkah perbaikan pemberian layanan publik. Temuan bahwa 20 persen warga tidak memiliki kotak sampah di dekat rumah-rumah mereka telah memaksa Kota Bengaluru untuk meninjau kembali manajemen sampahnya. Kartu lapor juga mendorong Badan Listrik Karnataka (Karnataka Electricity Board) untuk melakukan survei mandiri untuk memperoleh umpan balik publik atas layanan mereka.

Satu isu utama yang muncul dari implementasi CRC adalah rendahnya informasi menjadi hambatan serius yang membatasi akses warga atas layanan publik. Hal ini telah menyebabkan para otoritas terkait untuk bekerja lebih transparan, sehingga interaksi antara penyedia layanan dengan kelompok masyarakat menjadi lebih dekat.

Di Bangalore, pengaruh dampak CRC terus meningkatkan dari tahun ke tahun, dari dampak terbatas (diseminasi umpan balik), kemudian dampak tambahan (dengan dialog dan tekanan warga untuk perubahan), hingga dampak yang lebih besar (adanya masukan untuk reformasi). Ketrampilan, sumber daya, dan kelembagaan yang diperlukan untuk tiga tahapan tersebut tidak selalu ada dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, kelompok-kelompok warga mandiri dapat memainkan peran penting untuk memberikan umpa balik, yang kemudian dapat menjadi umpan untuk melakukan perubahan.

Sumber: Administrative Staff College of India, 2008; Global Communities 2015; Citizen's Rwanda Governance Board, 2018; UN-Habitat, tak bertanggal.

Wilayah perkotaan menawarkan keragaman budaya, modal kreatif, vitalitas, infrastruktur sosial, dan pilihan karir untuk menarik keterampilan dan talenta yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan dan memanfaatkan pengetahuan, serta membangun keunggulan kompetitif yang dinamis. Migran baru ke

kota menciptakan peluang-peluang baru, menawarkan keterampilan baru, membawa perspektif baru, dan menghasilkan persyaratan baru untuk inovasi kelembagaan.[89] Banyak negara telah lama menyadari pentingnya keanekaragaman budaya dan memiliki inisiatif, kebijakan, dan program-program yang dapat meningkatkan keragaman populasi mereka.

Meskipun kota selalu menjadi *melting pot*, terdapat ciri-ciri tertentu dari keanekaragaman budaya kontemporer yang tergolong baru.[90] Pertama, keragaman budaya di kota semakin luas dan mendalam dari sebelumnya. Kedua, jauh lebih afirmatif, di mana kelompok minoritas dan pendatang dapat menuntut persamaan hak, akses ke peluang perkotaan dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan kolektif mereka. Ketiga, kekuatan globalisasi, yang mendorong pola migrasi internasional, memerlukan aliran ide, simbol-simbol dan makna yang berkelanjutan, yang secara permanen menghubungkan tempat asal dan tempat domisili saat ini.

Keragaman budaya berimplikasi penting kepada bagaimana kawasan perkotaan direncanakan dan dikelola, dan dalam prosesnya mempengaruhi nilai urbanisasi. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kelompok budaya yang ingin melestarikan identitas mereka di kota, dengan bagaimana menghindari bentuk-bentuk pemisahan yang ekstrim atau bahkan marginalisasi dan pemilahan-pemilahan (fragmentasi) di kota.[91] Terdapat kemungkinan bahwa keragaman budaya dapat menyebabkan tingkat partisipatif dalam perencanaan menjadi lebih sulit, karena kelompok sosial budaya yang berbeda memiliki harapan dan kebutuhan yang berbeda pula.

Keragaman budaya berimplikasi penting kepada bagaimana kawasan perkotaan direncanakan dan dikelola, dan dalam prosesnya mempengaruhi nilai urbanisasi

5.4.4 Budaya dan Urbanisasi yang Berkelanjutan

Agenda Baru Perkotaan mengakui pentingnya budaya dan keragaman budaya bagi pembangunan berkelanjutan kota dan permukiman. Lebih jauh, NUA mengakui bahwa budaya harus memainkan peran penting dalam promosi dan implementasi pola konsumsi dan produksi baru yang berkelanjutan, yang berkontribusi pada penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.[92] Unsur budaya sangat menonjol dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, di mana target 11.4 berusaha "untuk memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia." Oleh karenanya, kota harus merayakan dan memanfaatkan identitas budaya mereka dan mengintegrasikan elemen budaya tersebut ke dalam program dan kebijakan pembangunan untuk berkontribusi pada urbanisasi yang berkelanjutan.

NUA mengakui pentingnya budaya dan keragaman budaya bagi pembangunan berkelanjutan kota dan permukiman

Semakin banyak kota yang menempatkan budaya di jantung regenerasi dan pembaruan perkotaan. Hal ini tidak hanya memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga elemen non fisik ruang kota melalui cara-cara kreatif yang memajukan kualitas tempat, sehingga mempromosikan infrastruktur budaya.[93] Warisan budaya dan sejarah kota dapat mendorong regenerasi kota dan menggerakkan ekonomi lokal (Kotak 5.8). Strategi ini juga telah digunakan oleh kota-kota yang mengalami kemerosotan industri, diantaranya Glasgow (Inggris), Liverpool (Inggris), Barcelona (Spanyol) dan Bilbao (Spanyol), untuk mendongkrak peruntungan ekonomi mereka dengan mempromosikan identitas sebagai pusat budaya, dalam bentuk museum ikonik, festival populer, dan pendidikan tinggi yang berfokus pada seni.[94]

Elemen budaya dianggap dapat meningkatkan citra dan daya tarik sebuah kota.[95] Aset seperti museum, gedung teater, ruang konser, gedung opera dan galeri pusaka tidak hanya bermanfaat secara simbolis bagi citra kota, tetapi juga berfungsi sebagai magnet yang kuat bagi mereka yang kreatif, karena menawarkan peluang gaya hidup yang menarik, sehingga meningkatkan kekayaan ekonomi kota.

Orang Kuba sedang menampilkan Tarian Afrika di Kota Tua Havana, Ibu kota Kuba. © EB Adventure Photography/Shutterstock

Kotak 5.8: Model kewirausahaan inovatif untuk regenerasi perkotaan berbasis budaya di Ségou, Mali

Bekas ibu kota kerajaan Bambara kuno dari pertengahan abad ketujuh belas, Ségou terletak di sepanjang Sungai Niger, 240 kilometer dari Bamako. Warisan kotanya tampak dari arsitektur vernakular Sudan dengan batu bata merah dan bangunan bergaya kolonial. Dengan perkiraan populasi 163.000 jiwa, indikasi tingkat pembangunan Ségou adalah rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan sekitar 65 persen berbanding 49 persen secara nasional. Namun, kota ini memiliki potensi pembangunan yang menarik karena warisan perkotaan, vitalitas budaya, lokasi geografis dan basis ekonominya yang luar biasa.

Untuk memanfaatkan aset-aset tersebut, sekelompok pengusaha lokal, melalui Yayasan Festival di Niger meluncurkan *Festival sur le Niger* pada tahun 2005. Setiap tahun, festival tersebut mengumpulkan seniman dan musisi nasional dan internasional, yang menampilkan industri budaya lokal. Dengan rata-rata pengunjung sebanyak 30.000 per tahun, festival ini telah menjadi katalisator utama bagi perekonomian lokal, khususnya sektor seni, kerajinan, dan pertanian. Lebih dari 150 perusahaan lokal terlibat, yang berkontribusi pada 140 lapangan pekerjaan langsung dan 2.000 pekerjaan tidak langsung. Sektor pariwisata berkembang pesat, meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2005 dan 2010, yang telah mendorong perbaikan infrastruktur pariwisata secara berta hap.

Melihat perkembangan ini, inisiatif berbasis budaya lain pun muncul, termasuk Pusat Kebudayaan Kore, sebuah pusat pelatihan untuk profesi budaya, dan Ndomo *Centre*, pusat produksi tenun tradisional Bogolan, yang menargetkan para pemuda pengangguran. Dua sertifikasi telah dibuat melalui program SMARTS-Ségou yang berfokus pada kain tenun lokal dan pariwisata budaya. Kota ini baru-baru ini memulai proyek berjudul Ségou, Kota Kreatif untuk mengembangkan kebijakan pengembangan budaya kota yang terintegrasi dan program pengembangan budaya yang berkelanjutan.

Proyek tersebut menggunakan model kewirausahaan yang inovatif. Meskipun diprakarsai oleh pengusaha lokal, proyek ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah, yang menghasilkan kemitraan publik-swasta formal, yaitu Dewan Promosi Ekonomi Lokal. Lembaga ini melayani kerjasama dan promosi badan usaha dan pelaku ekonomi lokal, serta pemerintah daerah kota. Selain itu, lembaga dimaksud juga memberikan bimbingan konsultasi dan pelatihan kepada otoritas dan perusahaan lokal tentang program pengembangan sosio-ekonomi dan budayanya. Model ini memanfaatkan proses *Maaya*, sebuah konsep etika yang berasal dari budaya Mali, dengan prinsip-prinsip melayani dan melibatkan masyarakat, membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan, memobilisasi sumber daya lokal untuk mendorong otonomi dan keberlanjutan, serta menyatu dengan nilai-nilai lokal.

Sumber: UNESCO, 2016.

Industri kreatif, yang secara inheren bersifat urban, adalah pertemuan antara budaya, seni, bisnis dan teknologi. Industri kreatif dapat berkontribusi pada kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif (Bab 1). Kota-kota yang beragam seperti Austin (musik dan teknologi), Berlin (seni visual), Kota Meksiko (seni kontemporer dan televisi), Mumbai (film) dan Seoul (game dan media digital) memiliki industri kreatif yang berkembang pesat yang telah berkontribusi luar biasa bagi perekonomian masing-masing kota tersebut. Ekonomi kreatif di Austin, misalnya, telah menghasilkan sekitar 50.000 lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan seni, yang mencakup film, televisi, games, dan seni visual lainnya.[96] Di Meksiko, ekspor barang dan jasa kreatif telah menghasilkan lebih dari USD 5 miliar per tahun, menjadikan Meksiko sebagai negara eksportir budaya terbesar di Amerika Latin.[97] Bollywood dari Mumbai adalah pusat produksi film terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 900 film setahun, yang turut menarik industri kreatif lainnya seperti desain, media digital, fesyen, makanan dan musik.[98] Mengingat pengaruhnya yang terus meluas, industri kreatif telah berkembang pesat sebagai salah satu dimensi terpenting dari ekonomi baru di seluruh dunia.[99]

Dengan penyebaran informasi dan peningkatan mobilitas, kota-kota mengalami peningkatan pariwisata. Dengan pemandangan alam dan lingkungan, ditambah aset tradisional dan kontemporer tak berwujud, menjadikannya sebagai warisan budaya yang menarik wisatawan. Pariwisata perkotaan berbasis budaya yang berkembang semakin pesat menghasilkan pendanaan dan lapangan kerja, serta berbagai keterkaitan ke belakang dan ke depan, yang memiliki efek berganda dalam penciptaan lapangan kerja tambahan untuk melayani para pengunjung.

Banyak kota menjadi destinasi utama pariwisata untuk turis yang terkenal karena tengara (*landmark*) budaya, industri kreatif, dan hiburannya (Tabel 5.2). Pada tahun 2008, Dubai mencatat angka belanja tertinggi oleh pengunjung internasional yang mencapai USD 30,2 miliar.[100] Kota-kota lainnya dengan nilai belanja para pengunjung internasional tergolong tinggi adalah Bangkok (USD 20 miliar), Singapura (USD 16,6 miliar), London (USD 16,5 miliar) dan Paris (USD 14,1 miliar). Dalam hal pekerjaan, setiap 1.000 tambahan wisatawan dapat menghasilkan 409 pekerjaan di Bali, 105 di Dubai, 87 di Phuket, 16 di New York, 15 di London dan 11 di Paris.[101] Angka-angka ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja dari pariwisata perkotaan lebih tinggi di kota-kota dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Kota-kota di negara berkembang, di mana biaya tenaga kerja pada umumnya rendah, dapat menggunakan pariwisata perkotaan untuk menciptakan kesempatan kerja, terutama bagi kaum muda, yang pada gilirannya akan mengangkat banyak orang keluar dari kemiskinan, meskipun pandemi COVID-19 untuk sementara telah membatasi industri pariwisata dunia.

Budaya dapat digunakan sebagai instrumen politik dalam masyarakat majemuk untuk membantu menunjukkan identitas, dengan implikasi penting bagi perencanaan inklusif.[102] Keanekaragaman budaya menempatkan tuntutan baru dalam hal mediasi antara gaya hidup dan ekspresi budaya yang saling bertentangan. Contohnya, konflik seputar bangunan keagamaan, pengaturan pemakaman, penyembelihan hewan kurban dan estetika bangunan adalah masalah-masalah yang semakin banyak ditemui di perkotaan.[103] Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya ini dapat memicu kebencian anti-pendatang, pengucilan, dan bahkan konflik kekerasan.

Banyak kota menghadapi tantangan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kota kontemporer — perbaikan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan dorongan pertumbuhan ekonomi — tanpa merusak atau mengikis warisan budayanya. Kota-kota juga menghadapi tantangan bagaimana mengembangkan situs cagar budaya, sekaligus melestarikannya untuk jangka panjang. Program regenerasi dan revitalisasi perkotaan harus menghindari penggunaan cetak biru yang mencerminkan keinginan dan aspirasi elit minoritas atau mengusulkan solusi yang tidak mencerminkan warisan bersama mayoritas. Dalam rangka mengambil langkah-langkah konkret menuju pembinaan integrasi sosial, membangun rasa identitas bersama dan memelihara komunitas, diperlukan partisipasi yang efektif dari masyarakat lokal dan kelompok akar rumput dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan.[104]

Tabel 5.2: Kota-kota destinasi utama 2018

Peringkat	Kota	Pengunjung internasional (juta)	Peringkat	Kota	Pengunjung internasional (juta)
1.	Bangkok	22.78	11.	Seoul	11.25
2.	Paris	19.10	12.	Osaka	10.14
3.	London	19.09	13.	Mekkah	10.00
4.	Dubai	15.93	14.	Phuket	9.89
5.	Singapura	14.67	15.	Pattaya	9.44
6.	Kuala Lumpur	13.79	16.	Milan	9.10
7.	New York	13.60	17.	Barcelona	9.09
8.	Istanbul	13.40	18.	Mallorca	8.96
9.	Tokyo	12.93	19.	Bali	8.26
10.	Antalya	12.41	20.	Hong Kong SAR	8.23

Sumber: Mastercard, 2019

Pelestarian warisan budaya memainkan peran penting dalam penciptaan dan peningkatan nilai sosial, dengan kemampuan menginspirasi dan mendorong partisipasi warga dalam kehidupan publik, meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas, berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan mendorong inklusi sosial. [105]

Pelestarian warisan budaya memainkan peran penting dalam penciptaan dan peningkatan nilai sosial, dengan kemampuan menginspirasi dan mendorong partisipasi warga dalam kehidupan publik, meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas

5.4.5 Mengukur Kontribusi Budaya terhadap Urbanisasi Berkelanjutan

Kota semakin menjadi strategis dalam memperhitungkan nilai dan kontribusi budaya terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan juga menjadi pintu masuk bagi upaya advokasi promosi peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Diadopsinya Agenda 2030 dan Agenda Baru Perkotaan merupakan peluang untuk merefleksikan pendekatan yang ada untuk mengukur kontribusi budaya bagi pembangunan dan menilai apakah kerangka kerja alternatif masih diperlukan.

Budaya dan kreativitas berkontribusi langsung pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan — ekonomi, sosial, dan lingkungan — dan pada saat yang sama, ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan ini berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan pengembangan kreativitas (Gambar 5.4) .[106]

Sekelompok pemudi bersama-sama menggambar di pintu depan sebuah toko untuk menghidupkan suasana lingkungan sekitar dengan karya seni. Subang Jaya, Malaysia. © SWEEANN / Shutterstock

Gambar 5.4: **Kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan: Tiga model**

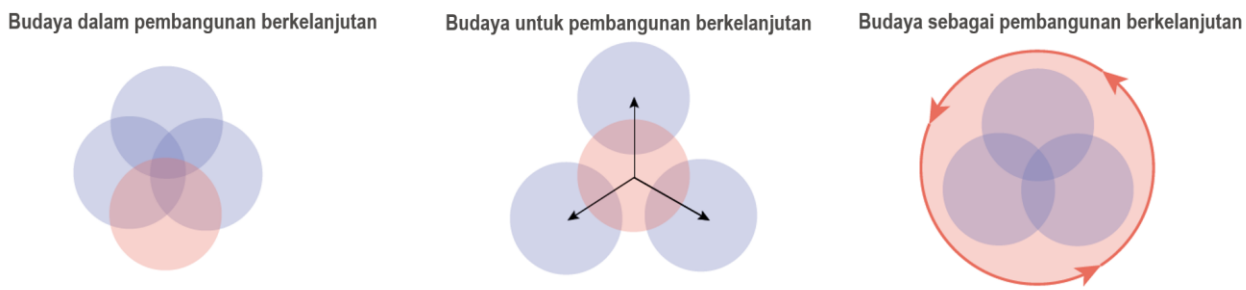

Tiga peran budaya (lingkaran oranye) dalam pembangunan berkelanjutan (tiga lingkaran mewakili tiga pilar). Budaya ditambahkan sebagai pilar keempat (diagram kiri), mediasi budaya antara tiga pilar (diagram tengah) dan budaya sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Tanda panah menunjukkan dinamika budaya dan pembangunan berkelanjutan yang terus bergerak (diagram kanan)

Sumber: Dessein, dkk, 2015

Tugas mengukur kontribusi nilai tak berwujud seperti budaya terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan telah menghasilkan sejumlah pendekatan.[107] Analisis komparatif dari pendekatan dan alternatif tersebut merupakan awal yang baik, namun prioritas sebenarnya adalah agar kota (atau negara) dapat mengukur stok budayanya sendiri dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada proses urbanisasi yang berkelanjutan (Kotak 5.9). Upaya-upaya lebih lanjut akan membutuhkan pelokalan langkah global dalam mengukur dan melacak kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengalaman proyek dan intervensi pembangunan telah dengan jelas menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.[108]

Budaya akan berperan penting dalam peralihan ke masa depan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan memberikan pandangan luas tentang budaya yang mencakup warisan budaya, industri kreatif, produk budaya, kreativitas, dan inovasi. Kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan adalah meliputi komunitas lokal, ekonomi, material dan keanekaragaman budaya. Pandangan ini menuntut agar kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan dilihat di luar nilai ekonomi yang dihasilkannya, tetapi mencakup cara-cara untuk mempromosikan dan mengukur kohesi sosial dan keragaman budaya. Memang, budaya dan inovasi memegang kunci tentang bagaimana kota dapat berkontribusi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.[109]

Ada kebutuhan yang nyata untuk memiliki data dan metrik budaya yang akurat dan tepat waktu, agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara luas. Kota membutuhkan sistem yang efektif dengan metrik berbasis kinerja yang memungkinkan otoritas lokal membuat keputusan tepat tentang kebijakan terbaik yang akan diambil. Dalam lingkungan perkotaan yang beragam budaya, adanya data yang tepat waktu sangat penting untuk memahami pola melalui visualisasi dan mengukur dampak budaya atas ekonomi dan sosial dalam kemajuan perkotaan. Sementara itu, upaya untuk membuat kota berkelanjutan harus dapat menjawab tantangan kesenjangan pengetahuan dan inovasi, memperluas partisipasi lintas pemangku kepentingan dan mendorong perubahan perilaku dan budaya di tingkat individu, lingkungan, perusahaan dan kota. Oleh karena itu, revolusi data budaya mungkin diperlukan untuk kota-kota yang sukses di masa depan.

Ada kebutuhan yang nyata untuk memiliki data dan ukuran budaya yang akurat dan tepat waktu, agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara luas

Budaya yang ada dalam kota sudah sama tuanya dengan peradaban itu sendiri. Sementara besaran dan ekonomi kota dapat mengalami pasang surut, budaya dan keterikatan dengan tanah dan integrasi dengan ekosistem alam relatif permanen. Wawasan penting dapat diperoleh dari kontribusi budaya dan warisan untuk pembangunan berkelanjutan, jika langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk mengukur, melacak dan memahami stok budaya berwujud dan tak berwujud yang di kota-kota di seluruh dunia.

UNESCO dan UN-Habitat, bersama mitra-mitra lainnya, telah mengembangkan indikator yang dapat secara efektif melacak kontribusi budaya terhadap perkotaan yang berkelanjutan.[110]

Indikator-indikator ini mencakup empat area tematik: lingkungan dan ketahanan; kemakmuran dan mata pencaharian; pengetahuan dan ketrampilan; dan inklusi dan partisipasi. Indikator-indikator ini dirancang untuk menilai kontribusi kuantitatif dan kualitatif dari budaya melalui kebijakan perkotaan dan tindakan publik yang diambil, yang mengintegrasikan budaya dalam pelaksanaan dan pemantauan agenda global.

Perubahan mendasar di banyak proses urbanisasi adalah ketertarikan pada peluang ekonomi, budaya, sosial dan pendidikan perkotaan, serta kualitas hidup di kota. Meskipun dapat terlihat, banyak perubahan tersebut yang tidak teranalisis dengan baik, diantaranya akibat kurangnya data warisan budaya atau sejarah. Dengan tekanan untuk mengumpulkan data baru terkait budaya dan warisan berdasarkan kota, akan muncul wawasan yang lebih besar terkait peran budaya dalam mendorong urbanisasi berkelanjutan terjadi dalam waktu pendek dan meliputi berbagai masalah.

Kotak 5.9: Keadilan distribusi dan akses ke sumber daya budaya di dalam negara

Infrastruktur budaya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi munculnya sektor dan klaster budaya yang dinamis, karena dapat menumbuhkan vitalitas budaya, ekonomi dan sosial. Tanpa infrastruktur dasar, pembangunan usaha budaya yang layak sangatlah sulit. Karenanya, infrastruktur budaya sangatlah esensial, jika aset budaya ingin digunakan untuk pembangunan.

Infrastruktur dan ruang budaya seringkali tidak terdistribusi dengan baik antara daerah perkotaan dan perdesaan, terutama di negara berkembang. Hasil dari Indikator Budaya untuk Pembangunan UNESCO (Culture for Development Indicators) periode tahun 2011 hingga 2017 di 15 negara menunjukkan bahwa distribusi condong (*skewed*) dari infrastruktur dan fasilitas budaya tertentu (museum, tempat pameran untuk seni pertunjukan, dan perpustakaan dan pusat media) adalah relatif dengan distribusi masyarakat di wilayah administratif di bawah tingkatan negara (standar deviasi). Pada skala 0 sampai 1 (di mana 1 adalah kondisi infrastruktur budaya terdistribusi merata di antara wilayah-wilayah sesuai jumlah populasi), skor rata-rata di 15 negara adalah 0,46, yang berkisar antara 0,14 di Kamboja hingga 0,66 di Bosnia Herzegovina dan Vietnam.

Distribusi infrastruktur budaya relatif terhadap distribusi populasi tepat di bawah tingkatan negara, 2011-2017

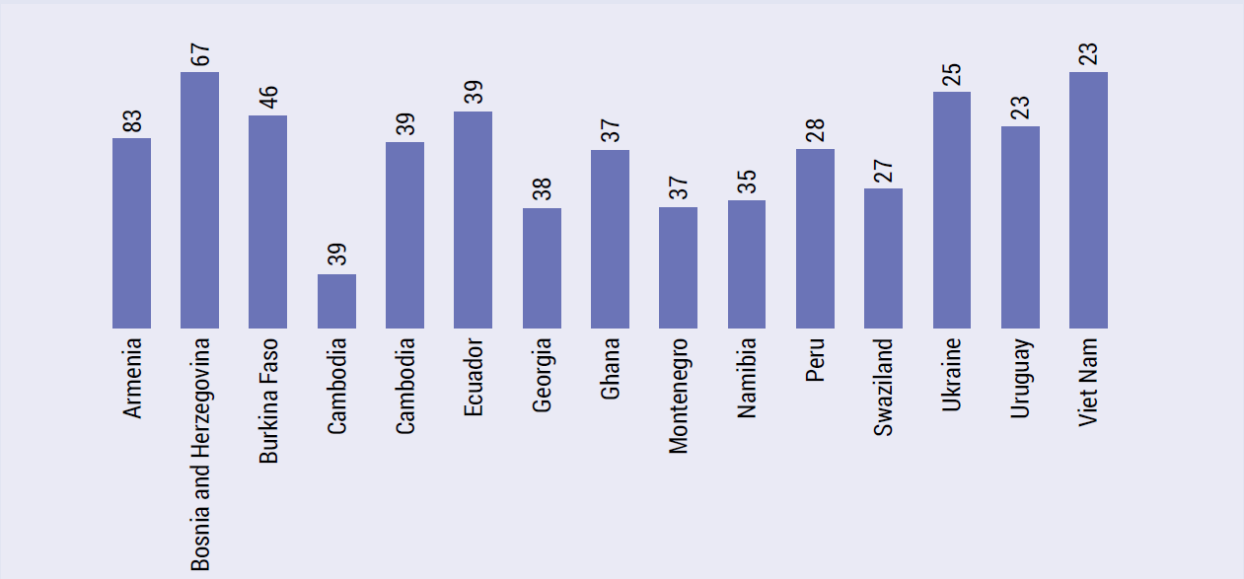

Untuk mengatasi tantangan bersama ini dan mendukung keadilan wilayah dalam distribusi sumber daya budaya dan infrastruktur, negara-negara menerapkan berbagai langkah. Selandia Baru, misalnya, akan memprioritaskan investasi baik untuk infrastruktur budaya berwujud dan tak berwujud, serta peluang riset untuk meningkatkan belanja publik, meninjau model pendanaan dan capaian strategis saat ini, serta menawarkan saran kebijakan terhadap kinerja dan kekuatan keuangan lembaga budaya dan media utama.

Contoh lainnya adalah Program Pengembangan Budaya Daerah di Lituania; pembangunan pusat budaya multifungsi di Siprus untuk membantu penciptaan komunitas berkelanjutan di daerah perkotaan dan perdesaan; Program Dukungan Diseminasi Budaya Daerah di Georgia yang mendorong inklusi budaya dan sosial untuk warga yang tinggal di daerah tersebut, mempromosikan ekspresi dan partisipasi budaya, serta memelihara dan mengembangkan situs budaya, ruang, dan infrastruktur; Panduan Kebijakan Daerah di Latvia tentang investasi dalam pengembangan layanan infrastruktur; dan Strategi Teritorial Nasional di Ekuador yang mendorong kesetaraan, kohesi, dan integrasi sosial dan kewilayahan.

5.5 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan

Jika dimanfaatkan dengan baik, nilai sosial dari urbanisasi yang berkelanjutan membuka peluang untuk meningkatkan inklusi sosial, mengurangi ketimpangan dan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya; sehingga, tidak mengabaikan satu orang pun dan satu wilayah pun. Tidak ada kota yang dapat mengaku setara, ketika sebagian besar penduduknya dikecualikan dari nilai urbanisasi berkelanjutan atau hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dengan memanfaatkan nilai sosial dan tak berwujud dari urbanisasi, kota dapat menjadi pintu masuk dalam Dekade Aksi untuk mewujudkan TPB, terutama dalam hal percepatan solusi berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Jika dimanfaatkan dengan baik, nilai sosial dari urbanisasi berkelanjutan membuka peluang untuk meningkatkan inklusi sosial, mengurangi ketimpangan dan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya; sehingga, tidak mengabaikan satu orang pun dan satu wilayah pun

Nilai sosial daerah perkotaan dapat menghapus kemiskinan melalui perumahan yang terjangkau, akses pertanahan dan keuangan, kesempatan kerja, lingkungan yang memfasilitasi kewirausahaan dan infrastruktur dasar. Akses ke berbagai barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan rekreasi akan memampukan warga untuk mencapai potensi penuhnya dengan mengembangkan kapasitas intelektual dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang penuh, produktif, dan memuaskan.

Untuk memanfaatkan nilai urbanisasi secara memadai, pihak berwenang harus mengatasi ancaman dalam mengembangkan kota yang lebih egaliter

Pemanfaatan nilai sosial dari urbanisasi memerlukan peningkatan kesetaraan gender dan kepastian jaminan hak atas kota untuk semuanya, terutama kelompok rentan dan marginal. Hal ini juga membutuhkan jaminan kesempatan yang sama dan akses ke sumber daya kota, barang dan jasa sambil mendorong partisipasi warga yang efektif dalam kebijakan lokal dengan tanggung jawab, memampukan pemerintah untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mengakui keragaman budaya sebagai sumber pengayaan sosial.

Untuk memanfaatkan nilai urbanisasi secara memadai, pihak berwenang harus mengatasi ancaman pengembangan kota yang lebih egaliter akibat kurang memadainya perencanaan, manajemen dan tata kelola; ketimpangan sistem distributif yang hanya menguntungkan pihak tertentu; hambatan sistemik yang menghalangi akses ke barang, jasa dan peluang; institusi yang lemah sehingga tidak mampu memperbaiki ketimpangan dan eksklusi sosial; kegagalan penegakan supremasi hukum; pembiayaan yang tidak memadai dan sulit diprediksi terutama di tingkat lokal; otonomi kota yang berkurang; lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan lainnya dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan; dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Memanfaatkan nilai sosial dari urbanisasi membutuhkan tata kelola yang baik yang mencakup kepemimpinan yang efektif; perencanaan kota dan kewilayahan yang terintegrasi; koordinasi yurisdiksi dan berjenjang; partisipasi warga yang inklusif; pembiayaan yang memadai; dan memanfaatkan budaya dan keragamannya untuk pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu diperlukan pula upaya bersama dan partisipatif di semua tingkat pemerintahan, sektor swasta, organisasi non-pemerintah dan warga yang didukung oleh kerangka kelembagaan dan kebijakan yang efektif, seperti yang disebutkan NUA.

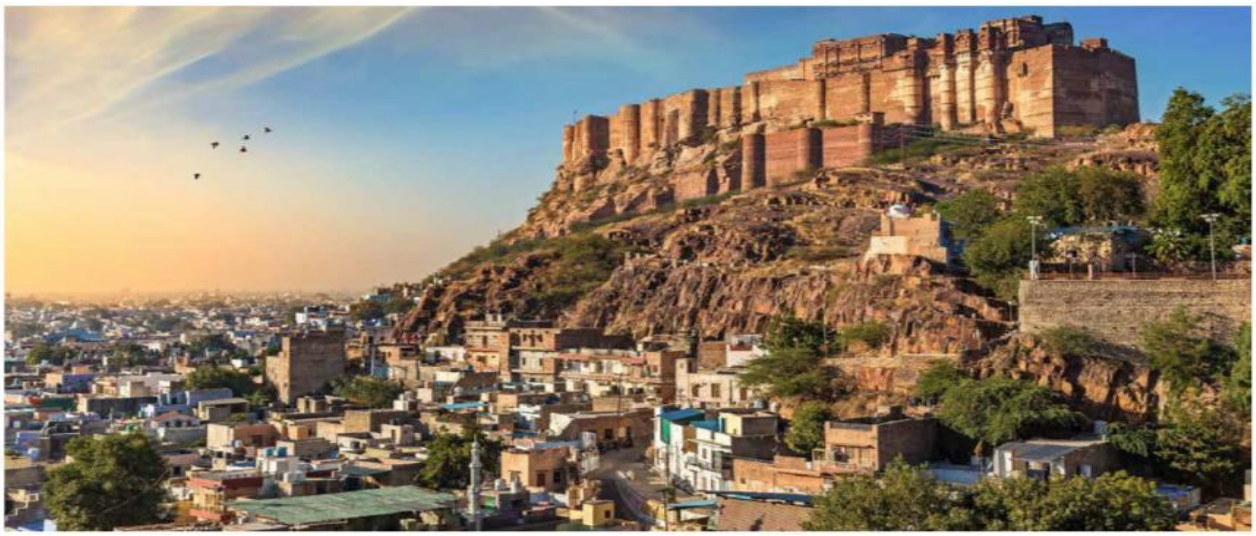

Benteng Mehrangarh dengan pemandangan Kota Jodhpur saat matahari terbenam. A UNESCO World heritage site at Jodhpur, Rajasthan, India. © Roop_Dey/Shutterstock

Catatan Akhir

1. UN-Habitat, 2008.
2. PBB, 2018b.
3. UNDESA, 2019.
4. PBB, 2017a.
5. PBB, 2017a: pp. 6-8.
6. PBB, 2017a.
7. Barnett dan Parnell, 2016.
8. PBB, 2017b: p.25.
9. Berrisford dan McAusian, 2017.
10. UN-Habitat, 2017 : p.5.
11. Berrisford dan McAusian, 2017.
12. Dublin Office for Integration, 2009.
13. UN-Habitat, 2016a.
14. PBB, 2017b.
15. Aristizabal dan Gomez, 2002.
16. OXFAM, 2020: p.12.
17. OXFAM, 2020: p.1.
18. Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México, 2020.
19. Henley dan Roy, 2020.
20. Garikipati dan Kambhampati, 2020.
21. LSE Cities, 2019.
22. Urbact Knowledge Hub, 2019.
23. Abouzeid, 2019.
24. IWPR, 2015.
25. Libertun de Duren et al, 2018.
26. Program Bersama Kota Ramah Perempuan PBB, 2014.
27. Cahill dan Ryan, 2019.
28. Público, 2016.
29. UNFPA, 2007, p.27.
30. Inisiatif Kota Ramah Anak, 2020.
31. UNDESA, 2019, p32.
32. Brown et al., 2019.
33. UNICEF, 2012.
34. UNICEF, 2018.
35. Brown et al, 2019.
36. Brown et al, 2019.
37. Global Partnership for Education, 2017.
38. Brown et al, 2019.
39. World Health Organization, 2007.
40. World Health Organization, 2007.
41. Grahame, 2018.
42. van Hoof et al., 2018.
43. Ciudades Amigables con Personas Mayores, Gobierno de España.
44. World Health Organization, 2015.
45. UN-Habitat, 2009.
46. UN-DESA, 2013.
47. UN-DESA, 2019.
48. UNICEF, 2012, p35.
49. UN-Habitat, 2016a.
50. TNS Opinion dan Social, 2014.
51. City Mayors, 2015.
52. UNESCO, 2016a.
53. OECD, 2014.
54. World Economic Forum, 2016.
55. World Economic Forum, 2017.
56. ILO, 2018.
57. Bank Dunia, 2019e.
58. Portal Data Migran Global, 2020.
59. Bank Dunia, 2019e.
60. UN-Habitat, 2013.
61. UN-Habitat, 2013.
62. UNDP, 2018.
63. Brown, 2020.
64. Maranhão, 2020.
65. European Union, 2020.
66. UN-Habitat, 2013.
67. Baker, 2008.
68. Bloom dan Khanna, 2007.
69. Chen dan Ravallion, 2007; UNHabitat, 2009.
70. Utz dan Mejia-Mantilla, 2019.
71. PBB, 2020.
72. UN-Habitat, 2010a, p.26.
73. UN-Habitat, 2016a.
74. UN-Habitat, 2013.
75. Cities Alliance, 2009.
76. Utz dan Mejia-Mantilla, 2019.
77. UN-Habitat, 2016a.
78. Putman, dalam Moncayo, 2002,p.85.
79. Jabareen, 2013.
80. Arku dan Sadler, 2017.
81. UN-Habitat, 2016a.
82. UN-Habitat, 2016a; Mahoney dan Klitgaard, 2019.
83. McCarney et al, 2011.
84. Jordan, 2008.
85. Ayuntamiento de Barcelona, 2018.
86. Montagut et al, 2016.
87. Rohit, 2014, p143.
88. Lee dan Nathan, 2011.
89. Beall et al, 2010.
90. UNESCO, 2016a.
91. UN-Habitat, 2009.
92. PBB, 2017a.
93. UN-Habitat, 2008.
94. UN-Habitat, 2004.
95. OECD, 2007.
96. The Economist Intelligence Unit, 2015.
97. The Economist Intelligence Unit, 2015.
98. The Economist Intelligence Unit, 2015.
99. UNESCO, 2016.
100. Mastercard, 2019.
101. Mastercard, 2019.
102. UN-Habitat, 2004.
103. UN-Habitat, 2009.
104. UN-Habitat, 2019.
105. Astara, 2012.
106. Hosagrahar, 2017; UCLC Committee on Culture, 2018.
107. Hosagrahar, 2017; UNESCO, 2019.
108. UCLC Committee on Culture, 2018.
109. Forum Budaya Kota Dunia, 2017.
110. UNESCO, 2019

Bab 6

Inovasi, Teknologi, dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Dunia ini secara pasti telah memasuki di Era Informasi. Teknologi membentuk kembali perekonomian dan masyarakat di tengah revolusi industri keempat, atau mendisrupsi secara eksponensial miliaran orang yang terhubung oleh gawai, dengan kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan akses menuju pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini diperkuat secara berlipat ganda dengan munculnya sejumlah terobosan teknologi di bidang kecerdasan buatan, robotika, *Internet of Things*, kendaraan otonom, cetak 3-D, teknologi nano, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum.

Kota merupakan pusat dari berbagai perubahan karena adanya sekumpulan orang berbakat dan aktivitas manusia yang mendorong terkonsentrasinya (*co-locate*) teknologi dan inovasi. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, kota menjadi tempat di mana fasilitas kesehatan dan lembaga penelitian terbaik berada dan bekerja keras untuk mengembangkan vaksin. Kota merupakan tempat berpusatnya perusahaan teknologi yang memproduksi alat dan kemudahan bagi jutaan orang untuk bekerja dari rumah. Keterkaitan erat antara teknologi dan inovasi berdampak pada pola urbanisasi dan akan membentuk masa depan kota.

Fakta Singkat

1. Banyak kota bergegas menggunakan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan.
2. Teknologi dan inovasi mutakhir memungkinkan kota untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan menciptakan nilai yang sangat besar dalam proses urbanisasi.
3. Pandemi COVID-19 mempercepat penerapan inovasi dan teknologi di perkotaan.
4. Permintaan global untuk mewujudkan kota cerdas terus berkembang pesat, dari USD 622 miliar pada 2017 menjadi USD 1 triliun pada 2019; dan diperkirakan mencapai USD 3,48 triliun pada 2026.
5. Masalah eksklusi digital dalam mengakses teknologi mutakhir masih terjadi, dan berpotensi memperburuk ketimpangan

Butir Kebijakan

1. Kota harus menerapkan kebijakan yang efektif untuk melindungi data warga dan mengedukasi warga untuk mampu melindungi data pribadi.
2. Kerangka kerja dan pengaturan kelembagaan yang jelas dan etis, diperlukan untuk pengumpulan dan pertukaran data.
3. Teknologi sangat efektif bila dipasangkan dengan inovasi kelembagaan, dan tidak bisa menggantikan tata kelola pemerintahan.
4. Eksperimen kota cerdas sangat beragam hasilnya, dan ada kecenderungan gagal bila hanya bergantung pada teknologi semata – dan tidak berbasis kepada manusia (*people-driven*).
5. Teknologi tidak dapat menggantikan keterlibatan warga dalam urusan terkait dengan masyarakat dan kota.

Kota sebagai pusat pertukaran seni, sains, dan ide, secara historis memainkan peran kunci sebagai katalisator "inovasi"; suatu istilah yang secara umum diartikan sebagai ide baru, metode, pendekatan, dan pengetahuan terkini.[1] Pengembangan teknologi baru, metode produksi, pengaturan kelembagaan dan pengetahuan adalah elemen penting yang menjelaskan bagaimana kota tumbuh dan terus berfungsi sebagai pusat kemakmuran, peluang, keragaman dan kreativitas.[2]

Di tengah urbanisasi dan perubahan teknologi yang serba cepat, di tengah krisis ekologi dan kesehatan masyarakat, serta kesenjangan sosial, kota tetap menjadi pengikat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk menggerakkan peluang urbanisasi dan menjadikannya "sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan dan inklusif, pengembangan sosial dan budaya, dan perlindungan lingkungan."[3] Inovasi ibarat pelumas untuk menjalankan mesin ini.

Kota menjadi tempat tinggal dengan penduduk yang beragam yang terhubung dalam jalinan kerjasama dan koordinasi yang komplek. Sebagai dampak dari kedekatan, kepadatan, keragaman dengan jumlah yang besar ini, kota menimbulkan serangkaian masalah komplek seperti kesehatan, pendidikan, mobilitas, logistik, ketahanan pangan, konsumsi, limbah, kemiskinan dan ketimpangan. Masalah-masalah tersebut, pada gilirannya, memaksa kota untuk mengembangkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global. Kota siap untuk menjawab berbagai tantangan mendesak tersebut dengan bermodalkan kekuatan kehidupan perkotaan. Kota yang terbuka, inklusif, dan memiliki keanekaragaman dapat melahirkan respon kreatif dan lingkungan permukiman yang dinamis; kondisi tersebut dapat menciptakan manusia yang lebih produktif[4] dan inovatif[5]. Kota, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga negara, berperan sebagai "laboratorium hidup" (*civic laboratory*) untuk menumbuhkan inovasi pembangunan berkelanjutan yang dapat ditiru dan diperluas.[6]

Kota berada di pusaran perubahan teknologi yang melahirkan revolusi industri keempat, berupa langkah menuju maha data, komputasi kuantum, *Internet of Things* (IoT), otomatisasi dan kecerdasan buatan

Kota berada di pusaran perubahan teknologi yang melahirkan revolusi industri keempat, berupa langkah menuju maha data (*big data*), komputasi kuantum, *Internet of Things* (IoT), otomatisasi dan kecerdasan buatan. Perusahaan teknologi tertarik dengan kota karena

adanya kumpulan orang-orang berbakat khusus dan beragam, serta sejumlah perusahaan dengan tujuan serupa. Akibatnya, beberapa kota mampu menuai manfaat langsung maupun tidak langsung dari inovasi teknologi, dan sekaligus mengatasi masalah baru seperti limbah elektronik,[7] pengawasan,[8] disrupsi ketenagakerjaan[9,] dan eksklusi digital dan spasial yang berpotensi meningkatkan ketimpangan dan masalah lingkungan.

Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang teknologi, arsitektur, dan teknik yang mempunyai kepentingan finansial dalam pengembangan perkotaan juga mempromosikan pandangan tentang bagaimana berinovasi dalam kerangka "kota cerdas." Oleh karena itu, kota harus menentukan arah dalam mengelola, mengatur, dan terkadang harus menolak tekanan untuk mengadopsi teknologi yang dipaksakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Sebaliknya kota harus menumbuhkembangkan inovasi dan teknologi yang bersifat *bottom-up*, yang menguntungkan warganya, dalam hal ini antara lain melindungi privasi dan data penduduk, sekaligus mampu mengatasi masalah yang mendesak. Terdepannya teknologi ini hanyalah salah satu lingkup yang mendapat perhatian kota dalam bertarung kritis untuk melaksanakan pembangunan manusia berkelanjutan yang berdampak luas.[11]

Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana kota di seluruh dunia mengatasi tantangannya melalui inovasi dan teknologi, dan sekaligus memenuhi komitmen Agenda Baru Perkotaan (NUA), TPB, dan Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim. Bab ini mengeksplorasi bagaimana kota secara kreatif bereksperimen untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (Bab 2). Bab ini juga akan membahas cara-cara kota meningkatkan dan memperkuat penyebaran inovasi dan teknologi di daerah perkotaan untuk kepentingan penduduk. Selain itu, bab ini juga membahas ancaman terhadap pembangunan perkotaan yang inklusif, aman, berkelanjutan, dan berketahanan yang diakibatkan oleh perubahan teknologi maupun masalah problematik terkait konsep dan dinamika terkait penerapan teknologi tersebut. Kekhawatiran yang ditimbulkan termasuk disrupsi pasar tenaga kerja, melebarnya ketimpangan dan pemisahan sosial (Bab 1); juga meningkatnya pengawasan elektronik dan bahaya lain seiring dengan laju perubahan yang tidak didukung oleh sistem regulasi maupun kapasitas kota untuk mengelola risiko terkait penerapan dengan teknologi terkini. Kekhawatiran ini muncul dari menjamurnya "kota cerdas" dan tidak sejalan dengan keberhasilan inovasi perkotaan yang mengutamakan manusia daripada teknologi. Pada bagian akhir, bab ini menawarkan beberapa rekomendasi ke depan bagi kota untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan urbanisasi berkelanjutan dan membantu menyelesaikan tantangan global kita semua.

6.1 Apa itu Inovasi dan Mengapa Penting?

Beberapa pihak memperingatkan bahwa istilah inovasi begitu sering digunakan dalam berbagai konteks sehingga menjadikannya jargon yang tidak berarti.[12] Anggapan ini menghendaki agar memahami makna inovasi secara lebih jelas. Secara umum, inovasi dipahami sebagai ide, metode, pendekatan, ataupun pengetahuan baru yang diterapkan untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah tersebut dapat mencakup pengembangan teknologi baru, namun lebih dari itu mencakup juga perubahan metode produksi maupun tata pengaturan dalam kelembagaan, ekologi, sosial, dan politik. Salah satu sejarawan di bidang inovasi mengatakan: "saat ini orang mengharapkan inovasi mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan dan etika, dan tidak sekedar aspek ekonomi saja."[13]

Pada saat dunia mengalami urbanisasi yang cepat di tengah tantangan berat akibat perubahan iklim, sumber daya, kesehatan masyarakat maupun ekologi, inovasi dipercaya menjadi suatu kekuatan tertentu. Dalam rangka mempercepat transisi menuju pengurangan karbon, serta mewujudkan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Bab 2), kota perlu berinovasi untuk mengembangkan rencana dan solusi baru untuk menghadapi tantangan yang problematik dan berkembang. Urgensi ini menjadikan inovasi sebagai landasan untuk mewujudkan masa depan perkotaan yang lebih baik, yang dapat menangkap manfaat dari suatu urbanisasi berkelanjutan.

Operator bekerja di Pusat Pengendali Lalu Lintas Jalan, Moskow, Rusia © Anton Gvozdikov/Shutterstock

Pada saat dunia mengalami urbanisasi yang cepat di tengah tantangan berat terkait dengan tantangan iklim, sumber daya, kesehatan masyarakat dan ekologis, kebutuhan akan inovasi dipercaya menjadi suatu kekuatan khusus

Karenanya, NUA menekankan pentingnya menciptakan "lingkungan yang mendukung dan cara implementasi yang beragam, termasuk akses pada sains dan teknologi, serta inovasi dan peningkatan tukar menukar pengetahuan."[15] Inovasi secara eksplisit merupakan bagian dari TPB 9, yang mengharuskan Negara Anggota membangun "infrastruktur yang berketahanan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan inovasi." Dengan demikian inovasi dipandang sebagai sarana penting untuk melaksanakan agenda pembangunan internasional terkait urbanisasi berkelanjutan, dan sekaligus sebagai tujuan akhir tersendiri dalam mewujudkan perbaikan melalui instrumen, produk, dan cara kerja baru. Dalam konteks ini, inovasi menawarkan gagasan untuk mendorong kemajuan dan kreativitas manusia dalam menghadapi tantangan sosial yang tercakup dalam TPB, NUA, dan Persetujuan Paris.

Pada era digital ini, inovasi sering dikaitkan dengan bisnis perusahaan perintis (*start-up)* dan wirausaha teknologi yang lebih mengarah pada efisiensi dan produktivitas secara ekonomi. OECD, misalnya, mendefinisikan inovasi "sebagai implementasi produk baru atau yang ditingkatkan secara signifikan (barang atau layanan), atau proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, pengorganisasian tempat kerja atau hubungan eksternal."[16] Dalam definisi ini, inovasi dianggap muncul dari sektor swasta, dengan peran pemerintah sebagai pemberdaya. Definisi ini terlalu sempit untuk membahas nilai-nilai urbanisasi berkelanjutan karena sesungguhnya inovasi perkotaan berlangsung dalam suatu jaringan tata kelola yang kompleks, di mana pemerintah kota dan nasional bermitra dengan sektor swasta, dan pemerintah juga tetap melakukan pengawasan. Dalam kerangka regulasi, pemerintah

dapat membantu mengarahkan investasi publik[17] dan menciptakan jaringan dengan pelaku kunci lainnya, sehingga mendorong perubahan yang bermanfaat bagi publik. Langkah-langkah ini termasuk inovasi dalam memberikan layanan kota, mengurangi emisi karbon, memperbaiki lingkungan perkotaan dan membina kota yang layak huni.

Pemerintah kota juga dapat menjadi inovator dengan memanfaatkan, dan dalam beberapa kasus menciptakan, teknologi baru serta mengembangkan inovasi kerangka hukum dan kelembagaan untuk meningkatkan dan melakukan transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik

Kota diakui dapat berperan sebagai platform inovasi, kreativitas dan pengembangan pengetahuan, pemerintah kota juga sekaligus sebagai inovator, dan dalam beberapa kasus menciptakan, teknologi baru serta mengembangkan inovasi kerangka hukum dan kelembagaan untuk meningkatkan dan mengubah tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Kota juga dapat melibatkan beragam pelaku utama ke dalam suatu jaringan kolaboratif dan mendukung ekosistem inovasi yang menggerakkan perubahan dalam bidang tertentu melalui fasilitasi kompetisi, mengadakan pertemuan dan memanfaatkan kemampuan pengadaan untuk mematangkan inovasi sosial dalam rangka pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Ini menekankan pentingnya kota inovatif untuk memaksimalkan peluang nilai-nilai urbanisasi berkelanjutan.

6.2 Teknologi Sipil untuk Inovasi Perkotaan

Urbanisasi terjadi dalam konteks perubahan teknologi yang cepat termasuk peningkatan eksponensial daya komputasi yang memungkinkan penyimpanan dan analisis maha data bersama dengan seluruh rangkaian kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, IoT, teknologi nano, dan *blockchain*. Salah satu aspek utama dari perubahan ini adalah otomatisasi, sehingga semakin banyak peran manusia tergantikan oleh mesin. Hal tersebut, kita lihat dengan munculnya robot[18] dan otomatisasi dalam pengambilan keputusan melalui algoritma yang mampu belajar (*machine learning*) dan dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk "berpikir" (*artificial intelligence*, atau kecerdasan buatan). Kemajuan teknologi ini menciptakan instrumen baru dan sekaligus masalah baru karena timbulnya sejumlah pertanyaan etis dan sosial yang mendasar.[19] Teknologi tidak netral dan nilai-nilai moral seperti bias dan diskriminasi sering tertanam dalam desain dan bekerjanya inovasi tersebut.[20]

Teknologi tidak bersifat netral dan nilai-nilai moral seperti bias dan diskriminasi sering tertanam dalam desain dan hasil kerja inovasi ini

Seperti halnya inovasi teknologi di masa lampau, komponen revolusi industri keempat ini sangat mendisrupsi pasar tenaga kerja perkotaan, khususnya dengan munculnya "pemikiran otomatis"[21] dan "interkoneksi mesin-mesin yang berinteraksi, memvisualisasikan seluruh rantai produksi dan membuat keputusan secara otonom."[22] Contohnya, sudah banyak perusahaan yang membuat kendaraan otonom dan solusi mobilitas. Inovasi ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi karbon, namun sekaligus berpotensi menggusur peran pengemudi taksi, kendaraan pesanan (*ridehail*) dan transportasi umum. Selain itu, jika diterapkan secara penuh, kendaraan otonom dapat menimbulkan masalah sosial dan perkotaan baru bagi kota-kota yang berusaha mengurangi pemakaian kendaraan. Pergeseran pekerjaan dan tenaga kerja secara mendasar ini berpotensi untuk memperburuk ketimpangan, apalagi tanpa kebijakan sosial yang memadai (Bab 1). Kota, di mana inovasi teknologi dan kegiatan ekonomi terkonsentrasi, akan mengalami peningkatan ketimpangan secara nyata.

6.2.1 Apa Itu Teknologi Sipil?

Kota, seringkali berkolaborasi dengan publik, masyarakat sipil dan pebisnis, berinovasi dengan memanfaatkan teknologi baru untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan. Pemerintah daerah semakin banyak belanja teknologi paten seperti sensor yang lebih murah dan lebih efektif untuk memantau dan berbagi informasi tentang air, udara, limbah padat, infrastruktur,

energi, lalu lintas dan transportasi umum, dalam rangka membangun kota cerdas. Dengan investasi semacam ini, perusahaan dapat menangkap dan membentuk persepsi tentang kota cerdas secara *top-down*. Sebaliknya, teknologi sipil adalah konsep yang bersumber dari orang/pemakai yang dilakukan secara partisipatif dan demokratis secara *bottom-up*.

Teknologi kota cerdas meliputi aplikasi gawai cerdas, dasbor data kota, informasi di ruang publik, pusat operasi cerdas, dan situs web bagi publik dengan informasi penting dan mekanisme umpan balik. Platform ini menggunakan perangkat keras, sensor milik publik yang memantau arus lalu lintas kendaraan hingga ponsel milik warga yang digunakan untuk memesan kendaraan atau layanan antar makanan. Layanan semacam ini menghasilkan maha data, atau terkumpulnya data secara masif, dan tidak mampu dianalisa dengan teknik dan perangkat lunak tradisional; untuk itu diperlukan daya komputasi skala besar, algoritma dan ilmu data untuk mengidentifikasi kecenderungan dan polanya. Analisis maha data, pemantauan waktu nyata, dan otomatisasi berbagai layanan kota dari lampu jalan hingga sistem pengaduan sangat berguna untuk perencanaan kota dan pengiriman layanan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi secara tepat adalah salah satu cara untuk membangun kota cerdas yang lebih efisien, responsif dan mampu memberikan layanan yang lebih baik dan baru dalam upaya memenuhi TPB dan NUA. Pada gilirannya, warga sebagai pengguna layanan, bisa mendapat akses informasi kota melalui portal data publik.

Aspek lain dari teknologi ini adalah kemampuannya untuk melakukan pengumpulan data tingkat kota secara terdesentralisasi, sehingga dalam batas tertentu terjadi demokratisasi komputasi dan pengumpulan data. Desentralisasi ini memungkinkan masyarakat sipil dan warga untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data, memantau layanan publik serta ikut berpartisipasi dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.

Mobil cerdas HUD), kendaraan autonomus yang dapat menyetir sendiri (*autonomous self-driving*) di jalanan kota besar dengan sistem sinyal radar sensor grafis dan sensor yang terhubung dengan internet © Zapp2Photo/Shutterstock

Kotak 6.1: Bagaimana pelaporan warga untuk respons kota berevolusi dari "Putar 311" ke SeeClickFix ke aplikasi sipil

Pada tahun 1996, kota Baltimore, AS, meluncurkan nomor telepon non-darurat tiga digit, 311, yang dapat digunakan warganya untuk melaporkan masalah kota seperti lubang di jalan, pembuangan ilegal, grafiti dan kendaraan yang terbengkalai. Sistem ini bertepatan dengan adanya keinginan di kalangan pemerintah agar sektor publik dapat dan harus lebih responsif terhadap warga dan kebutuhannya. Pada saat itu, 311 telah mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang kegiatan pemerintah.

Sistem s*erver*-nya, berupa perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan, menyimpan data rinci tentang setiap panggilan telepon, pencarian informasi, keluhan dan permintaan, yang mengakumulasi informasi menyangkut bagaimana pekerja memberikan layanan kota. Sistem ini dinilai sangat berguna dan pada tahun 2011 OpenPlans, organisasi nirlaba AS yang didedikasikan untuk membangun kota yang berfungsi lebih baik, memfasilitasi pengembangan perangkat lunak Open311 untuk memfasilitasi kota-kota lain mengadopsi sistem ini secara gratis.

Aplikasi ini memungkinkan komunikasi untuk semua orang. Suatu studi menemukan bahwa penduduk berpenghasilan rendah dan individu muda usia lebih cenderung menggunakan aplikasi 311 Boston daripada nomor telepon atau situs web tradisional. Untuk penduduk penyandang difabel tertentu, keterlibatan mereka melalui aplikasi menaikkan pelayanan ini, yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Aplikasi Mobile 311 membuka peluang bagi layanan daring seperti SeeClickFix, yang memungkinkan akses kota ke suatu platform pada tingkatan antara pusat panggilan 311 dengan jejaring sosial. SeeClickFix memungkinkan warga untuk melaporkan masalah melalui ponsel cerdas dan meng-klik peta lokasinya. Informasi lokasi tersebut kemudian dikirim ke bagian pemerintah kota terkait. Beberapa pemerintah kota memantau informasi yang disampaikan pengguna SeeClickFix tentang tempat mereka tinggal, sedangkan lainnya mengambil langkah lebih jauh dengan mengintegrasikan platform ke dalam sistem server kota. Beberapa kota juga memiliki aplikasi khusus, seperti aplikasi kualitas air pantai yang dimiliki kota San Francisco dan aplikasi adopsi hewan peliharaan Kota Calgary.

Saat ini, pemanfaatan aplikasi sudah lebih jauh berkembang. Melihat besarnya manfaat aplikasi pelaporan ini bagi warga, menyadarkan pemerintah bahwa sistem ini juga bermanfaat untuk operasi internal pemerintah. Dari SeeClickFix hingga aplikasi pelaporan khusus, sesuai pesanan yang diawali sebagai pusat panggilan sederhana telah berkembang menjadi cara yang lincah/fleksibel dan dapat diandalkan bagi pemerintah untuk menyalurkan ketersediaan sumber daya yang terbatas pada masalah yang paling menjengkelkan.

Sumber: Wood, 2016; Snow, 2017

Kota dapat membangun sistem yang memungkinkan warga menggunakan ponsel untuk mengumpulkan data. Misalnya, sistem 311 yang dimulai di Amerika Utara, dan sekarang sudah diterapkan di seluruh dunia, yang memungkinkan keluhan/laporan masyarakat mendapat respon dari pemerintah kota secara lebih cepat dengan biaya yang lebih murah (Kotak 6.1).

Kota dapat membangun sistem yang memungkinkan warga menggunakan ponsel untuk mengumpulkan data

6.2.2 Teknologi Sipil untuk Mobilitas Perkotaan

Aplikasi lain menggunakan data ponsel pasif untuk melacak pola mobilitas perkotaan. Proyek Digital Matatus di Nairobi, Kenya, menggunakan *Global Positioning System* (GPS) ponsel untuk melacak rute minibus dan lokasi pemberhentian untuk memperoleh data transportasi umum dan penumpang yang sebelumnya tidak mudah didapatkan (Kotak 6.2). Transportasi adalah sektor yang populer untuk penerapan sistem ini. Di India, pemerintah Kota Delhi mengeluarkan data transit dari pelacak GPS yang terpasang pada bus yang dikelola pemerintah kepada para peneliti dan pengembang aplikasi, termasuk

Google, untuk mengembangkan jadwal yang sesuai waktu nyata (*real time*).[24] Di Abidjan, Côte d'Ivoire, peneliti International Business Machine Corporation (IBM) menggunakan data anonim dari pemakai ponsel untuk mengidentifikasi rute bus yang paling sering digunakan dan dengan itu dapat merekomendasikan 65 rute yang dapat menghemat sekitar 10 persen waktu perjalanan. Pada kasus-kasus tersebut di atas, data dihasilkan tanpa mengharuskan pengguna ponsel melakukan suatu tindakan tertentu, tetapi dapat diperoleh melalui jejak digital, atau jejak data dari aktivitas daring, yang dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mengungkapkan pola mobilitas perkotaan.[26]

Tidak semua inovasi perkotaan membutuhkan keterampilan atau peralatan teknologi canggih.

Tidak semua inovasi perkotaan membutuhkan keterampilan atau peralatan teknologi canggih. Ecosandals adalah usaha sosial di Korogocho, suatu lingkungan permukiman miskin di Kota Nairobi, yang telah berhasil mengubah ban karet menjadi sandal dan sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi remaja. Demikian pula di Maroko, perusahaan kecil Upcyclemo mempekerjakan pemuda untuk membuat furnitur luar ruangan dan pot tanaman dari ban. Di Uganda dan Kenya, pengusaha sosial mengubah botol plastik menjadi batu bata dan *paving block*, memecahkan dua masalah sekaligus: sampah plastik dan bahan bangunan secara berkelanjutan. Ahli perangkat lunak di Lilongwe, Malawi menggunakan komputer untuk mengembangkan sistem catatan kesehatan elektronik yang sangat efektif untuk meningkatkan perawatan bagi pasien HIV. Sementara penyedia teknologi luar datang dengan keterampilan dan keahlian, inovasi yang dikembangkan secara lokal sering menghadapi tantangan dalam mengakses modal dan dukungan; hal ini menunjukkan bahwa kota perlu mengenali dan mendukung inovasi lokal yang secara kreatif dapat memecahkan masalah secara kontekstual.

Gambar 6.1: Peta transportasi publik Kota Nairobi

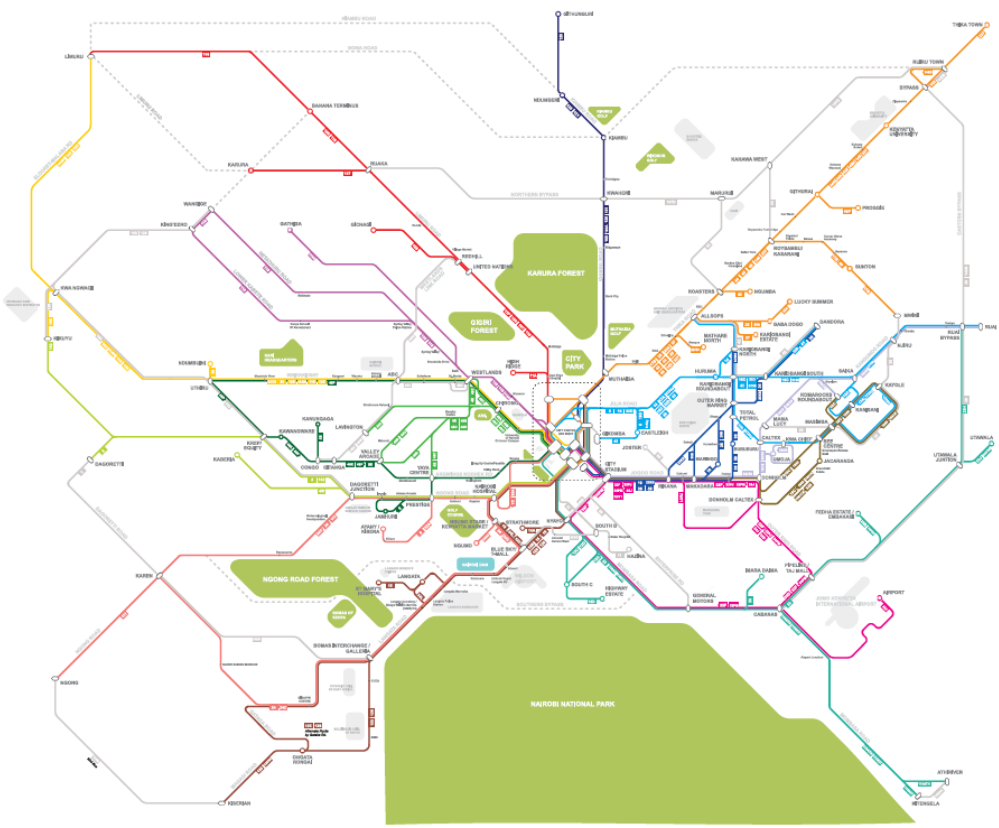

Sumber: Civic Data Design Lab/Digital Matatus Project (www.digitalmatatus.com).

Kotak 6.2: Proyek Matatus Digital memetakan minibus di Nairobi

Di kota di mana sistem transportasi informal menjadi sarana utama mobilitas perkotaan, otoritas setempat tidak memiliki data tentang sistem transit. Hal ini karena sistem transportasi dijalankan oleh banyak pelaku swasta yang berbeda, dan tidak mengumpulkan atau berbagi data tentang rute, penumpang, maupun frekuensinya. Proyek Digital Matatus merintis upaya pemetaan sebagai katalisator untuk memetakan sistem transportasi informal di kota-kota Afrika dan Amerika Latin.[29] Kerjasama antara University of Nairobi, Columbia University, MIT dan perusahaan desain Groupshot dari AS memetakan rute matatu (minibus) Nairobi dan pemberhentiannya dengan menggunakan ponsel yang diaktifkan GPS pada tahun 2013.[30] Tim menggunakan data ini untuk menciptakan peta skematik pada tahun 2014 yang terbukti populer. Data yang diperbarui secara berkala secara *open source* dan rute telah diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi termasuk Google Maps. Data ini juga digunakan untuk mengukur akses ke fasilitas kesehatan[31] dan RTH serta untuk mengukur proporsi penduduk dengan frekuensi akses transportasi umum, yang merupakan indikator untuk target SDG 11.2. [32] Banyak kota di Afrika dan Amerika Latin juga mengumpulkan data di akar rumput untuk sistem transit mereka. [33] Di Addis Ababa, Ethiopia, pengembang perangkat lunak memiliki ide untuk menempatkan kode QR sederhana pada bus yang berisi peta rute dan di Maputo, Mozambik, sebuah perusahaan mengembangkan layar informasi untuk publik.

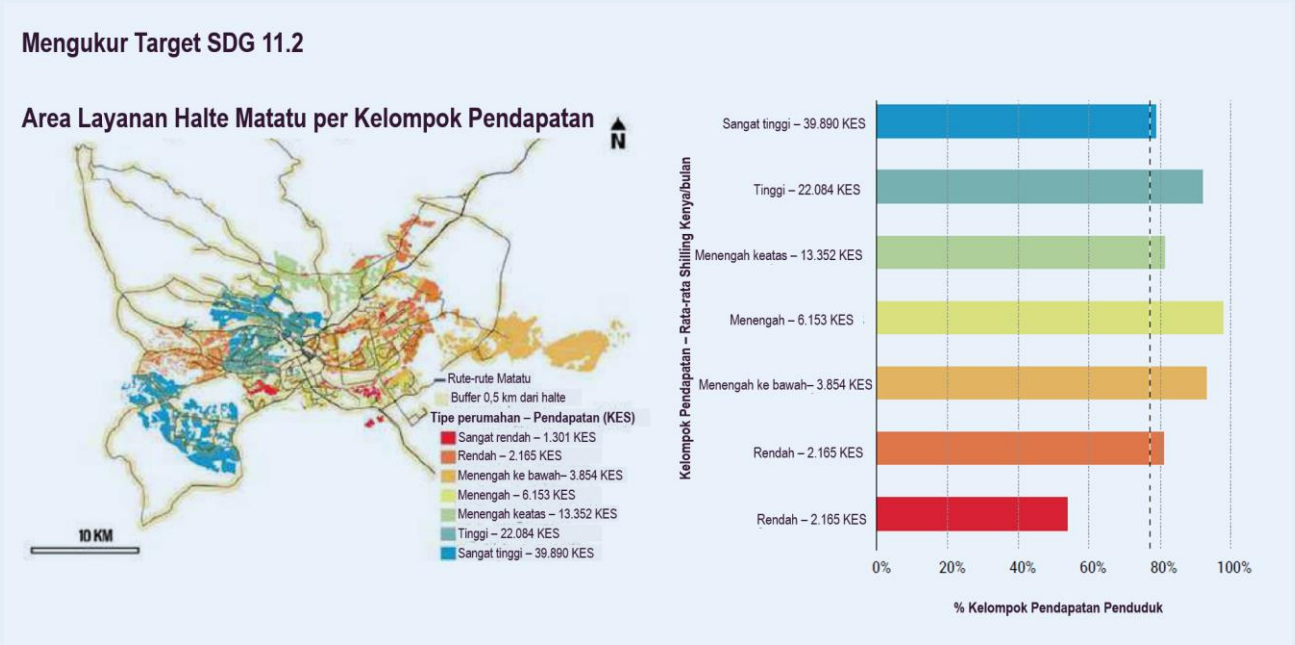

Sumber:Fried, dkk, 2020

6.2.3 Melacak COVID-19

Capaian terbaru untuk teknologi seluler dan maha data adalah memahami dan mengelola penyebaran COVID-19. Di Asia Timur, pemerintah pusat bermitra dengan pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi ponsel cerdas yang dapat memantau pergerakan orang dalam kaitannya dengan status COVID-19 dari pengguna lainnya.[34] Fitur informasi ini membantu warga untuk menghindari tempat-tempat yang mungkin terinfeksi. Misalnya, Corona 100m adalah aplikasi pelacakan dari Korea Selatan yang memperingatkan pengguna jika mereka berada dalam radius 100 meter dari lokasi pasien virus korona. Aplikasi ini tampaknya populer di Korea Selatan dan diunduh lebih dari 1 juta kali dalam 10 hari setelah diluncurkan. Australia dan Singapura masing-masing telah meluncurkan aplikasi pelacakan kontak—COVIDSafe dan TraceTogether—yang memfasilitasi penelusuran kontak jika terjadi

infeksi COVID-19 oleh individu yang ponselnya terhubung.

Capaian terbaru untuk teknologi seluler dan maha data adalah memahami dan mengelola penyebaran COVID-19

Aplikasi ini memungkinkan pemerintah untuk meredam tingkat infeksi, yang secara bersamaan melindungi kesehatan masyarakat dan membangun kepercayaan konsumen untuk melakukan aktivitas ekonomi. Namun, seperti kebanyakan teknologi, aplikasi ini harus dibarengi dengan kebijakan dan program kesehatan masyarakat yang efektif seperti *rapid testing*, pelacakan, dan isolasi wajib. Terlepas dari keberhasilan aplikasi ini, ada konsekuensi dan manfaat (*trade-off*) antara kesehatan masyarakat dan privasi, serta masalah keamanan data lainnya.[36]

Aplikasi pelacakan kontak hanyalah puncak gunung es dalam tren teknologi yang dipicu atau dipercepat oleh pandemi COVID-19. Inovasi ini sangat penting dalam menjaga orang agar tetap aman, produktif, dan terhubung ketika mereka terpisah secara fisik, serta memastikan bahwa aktivitas sosial tetap berlangsung selama karantina wilayah.[37] Sebagai catatan penting, di banyak kota di dunia tidak sedikit orang yang tidak dapat melakukan belajar jarak jauh dan tersisihkan dari teknologi ini. Beberapa dampak COVID-19 dari teknologi ini dapat terus terjadi di era pasca-COVID-19 dan berimplikasi jangka panjang dalam proses urbanisasi (Kotak 6.3).[38]

Sebagai catatan penting, di banyak kota di dunia tidak sedikit orang yang tidak dapat melakukan belajar jarak jauh dan tersisihkan dari teknologi ini

Kotak 6.3: Sepuluh tren teknologi dipercepat oleh COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mempercepat penerapan teknologi penting, termasuk pembayaran digital, *telehealth* dan robotika, yang dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit dan sekaligus membantu keberlangsungan usaha. Penerapan teknologi ini dapat membantu masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi pandemi dan ancaman lainnya, serta pertimbangan efeknya terhadap usaha/bisnis, perdagangan, pekerjaan, produksi barang dan jasa, pendidikan, perawatan kesehatan dan hiburan.

Belanja daring dan pengiriman oleh robot

COVID-19 telah mengubah belanja daring di seluruh dunia dari yang baik-untuk-dimiliki menjadi yang harus-dimiliki. Belanja daring perlu didukung dengan sistem logistik yang tangguh. Pengiriman oleh manusia rentan terhadap penularan virus. Banyak perusahaan pengiriman dan restoran di AS dan Tiongkok meluncurkan layanan pengiriman nirsentuh (*contactless*) di mana barang dijemput dan diturunkan di lokasi yang ditentukan, dan tidak dari atau ke tangan seseorang. Raksasa *e-commerce* Tiongkok juga meningkatkan pengembangan pengiriman robot mereka. Namun, sebelum layanan pengiriman robot menjadi lazim, perusahaan pengiriman perlu membuat protokol yang jelas untuk menjaga kondisi sanitasi barang yang dikirim.

Pembayaran digital dan nirsentuh

Uang tunai mungkin terkontaminasi virus, sehingga bank sentral di Tiongkok, AS dan Korea Selatan telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan uang kertas bersih sebelum diedarkan. Pembayaran digital nirsentuh, baik dalam bentuk kartu atau *e-walet*, adalah modus pembayaran yang disarankan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembelian daring dan pembayaran barang, layanan, dan bahkan pembayaran utilitas, serta menerima dana stimulus lebih cepat. Ketersediaan pembayaran digital bergantung pada ketersediaan internet, perangkat yang dilengkapi internet, dan jaringan untuk mengubah uang tunai menjadi format digital.

Kerja jarak jauh

Banyak organisasi menugaskan karyawannya untuk bekerja dari rumah. Bekerja jarak jauh dimungkinkan oleh teknologi termasuk jaringan virtual*, voice over internet protocols*, pertemuan virtual, teknologi *cloud*, instrumen kolaborasi dan bahkan teknologi pengenalan wajah. Bekerja dari jarak jauh menimbulkan tantangan bagi pemberi kerja dan karyawan. Keamanan informasi, privasi, dan dukungan teknis tepat waktu bisa menjadi masalah besar. Bekerja jarak jauh juga dapat menimbulkan masalah hukum ketenagakerjaan, seperti penyediaan lingkungan kerja yang aman dan masalah pajak penghasilan. Jika pekerjaan jarak jauh menjadi kebiasaan baru setelah pandemi COVID-19, pemberi kerja mungkin saja memutuskan untuk menghemat biaya dan mempekerjakan orang dari daerah dengan ketentuan upah minimum yang lebih rendah. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, dan hal ini berpotensi menciptakan dan mempertajam kesenjangan. Pekerja yang berpendidikan tinggi, kerah putih lebih memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Lain halnya dengan pekerja sektor informal dan mereka yang bekerja dalam bidang jasa layanan yang perannya dianggap penting selama karantina wilayah.

Belajar jarak jauh

Hingga pertengahan April 2020, 191 negara mengumumkan atau menerapkan penutupan sekolah dan universitas, yang berdampak pada 1,57 miliar siswa. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus daring untuk memastikan pendidikan tidak terganggu akibat karantina wilayah. Teknologi yang digunakan dalam belajar jarak jauh sama seperti untuk bekerja jarak jauh, dan diantaranya termasuk *virtual reality, augmented reality*, cetak 3D dan guru robot didukung kecerdasan buatan. Belajar jarak jauh menimbulkan kekhawatiran teknologi dapat menciptakan ketidaksetaraan digital yang lebih lebar terkait dengan kesiapan, ketersediaan, keterjangkauan dan tingkat pendapatan.

Telehealth

Telehealth dapat menjadi cara yang efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus memberikan perawatan primer yang penting. Perangkat IoT *wearable* dapat mencatat tanda-tanda vital. *Chatbot* dapat membuat diagnosis awal berdasarkan gejala yang diidentifikasi oleh pasien. Namun, di negara-negara dengan biaya medis mahal, layanan *telehealth* harus ditanggung oleh asuransi. *Telehealth* juga membutuhkan tingkat literasi teknologi tertentu untuk bisa beroperasi, serta koneksi internet yang baik.

Hiburan Daring

Meskipun tindakan karantina dapat mengurangi interaksi langsung secara signifikan, kreativitas telah memunculkan hiburan daring. *Cloud* berkembang dan konser melalui *online streaming* semakin banyak diselenggarakan di seluruh dunia. Perusahaan produksi film Tiongkok juga merilis film secara daring. Museum dan situs warisan internasional menawarkan tur virtual. Ada juga lonjakan lalu lintas *game online* sejak merebaknya COVID-19.

Rantai pasok 4.0

Pandemi virus korona telah menciptakan disrupsi pada rantai pasokan global. Dengan adanya langkah-langkah untuk menjaga jarak dan karantina, beberapa pabrik harus ditutup. Ketergantungan pada catatan dalam bentuk kertas, kurangnya visibilitas pada data dan kurangnya keragaman dan fleksibilitas telah membuat sistem rantai pasok yang ada rentan terhadap pandemi apa pun. Teknologi inti seperti maha data, komputasi cloud, IoT, dan *blockchain* tengah membangun sistem manajemen rantai pasok masa depan yang lebih tangguh dengan meningkatkan akurasi data dan mendorong pertukaran data.

Cetak 3D (3D Printing)

Teknologi cetak 3D telah digunakan untuk mengurangi hambatan pada rantai pasok, dan sebagai solusi akibat adanya larangan ekspor alat pelindung diri. Cetak 3D menawarkan fleksibilitas dalam produksi: printer yang sama dapat menghasilkan produk yang berbeda berdasarkan *file* dan bahan desain yang berbeda. Namun, penerapan Cetak 3D secara besar-besaran menghadapi beberapa hambatan. Pertama, potensi timbulnya pelanggaran kekayaan intelektual karena menggandakan suku cadang yang dilindungi paten. Kedua, produksi barang tertentu harus terlebih dulu mendapat persetujuan, yang membutuhkan waktu lama. Masalah lain yang belum terpecahkan adalah bagaimana melindungi hak kekayaan intelektual atas suatu desain, tempat asal, dampak pada volume perdagangan dan pertanggungjawaban sehubungan dengan hasil cetak 3D.

Robotika dan pesawat tanpa awak (*drone*)

COVID-19 menyadarkan kita betapa kegiatan ekonomi sangat bergantung pada interaksi manusia. Pandemi memberikan dorongan kuat untuk menginisiasi penggunaan robot, yang semakin banyak digunakan untuk mendisinfeksi suatu kawasan dan layanan antar makanan kepada orang-orang di karantina. Pesawat tanpa awak ini juga telah digunakan untuk mengajak jalan anjing peliharaan dan layanan antar barang-barang. Meskipun ada beberapa studi yang memprediksi pekerjaan manufaktur yang akan digantikan robot di masa depan, pada saat yang sama, tidak sedikit pekerjaan baru akan tercipta. Kebijakan harus diberlakukan untuk memberikan pelatihan dan kesejahteraan sosial yang cukup kepada angkatan kerja untuk merangkul perubahan ini.

5G dan teknologi informasi dan komunikasi

Semua teknologi ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, berkecepatan tinggi, dan terjangkau. Sementara 5G telah menunjukkan potensinya dalam pemantauan jarak jauh dan konsultasi kesehatan, namun disayangkan peluncurannya tertunda pada saat teknologi ini sangat dibutuhkan. Penerapan 5G akan meningkatkan biaya perangkat yang kompatibel dan biaya paket data. Hal ini harus diatasi untuk memastikan akses internet inklusif; dan akan terus menjadi tantangan dalam perkembangan global 5G.

Sumber: Xiao and Fan, 2020.

6.2.4 Mengukur Kualitas Udara dan Air

Selain ponsel, jenis sensor lain seperti alat pemantau kualitas udara atau air juga semakin murah dan tersedia luas; ini memungkinkan kota dan warganya untuk memantau kondisi lingkungan dengan lebih murah dan sering. Perkembangan ini memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas mewujudkan warga yang lebih terinformasi yang dapat mengadvokasi pengurangan polusi udara dan air.[39] Pemantauan tersebut juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian TPB 11.6: "Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita kota yang merugikan, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan limbah kota lainnya." Perangkat pemantauan ini dapat mengukur indikator TPB 11.6 seperti polusi udara perkotaan PM_{10} dan materi partikulat $PM_{2.5}$. Teknologi yang dimiliki kota dan warganya dapat mendukung urbanisasi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13).

Selain ponsel, jenis sensor lain seperti alat pemantau kualitas udara atau air juga semakin murah dan tersedia luas; ini memungkinkan kota dan warganya untuk memantau kondisi lingkungan dengan lebih murah dan sering.

Alat pemantau yang lebih murah memang sangat membantu dalam menghemat biaya, namun demikian tetap diperlukan sistem pemantauan kota untuk air dan udara yang lebih baik dan kontinu. Dukungan terhadap universitas setempat dan komunitas ilmiah perlu diberikan untuk menginterpretasikan data dari perangkat ini, mengalibrasi sensor sesuai kondisi lokal dan pada akhirnya menerapkan solusi kualitas udara dan air sesuai dengan NUA (Kotak 6.4).[40] Upaya tersebut

juga dapat membantu mengumpulkan data yang belum ada untuk pemantauan TPB 3 (kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk semua) serta mengidentifikasi kesenjangan antar-lingkungan permukiman yang berpotensi memicu tuntutan perubahan. Di kawasan kumuh Mukuru, di Kota Nairobi, penduduk menciptakan seni yang terinspirasi dari pengukuran kualitas udara untuk mengemukakan tentang distribusi polusi udara dan beban kesehatan yang tidak setara di komunitas mereka.[41]

6.3 Perusahaan Teknologi dan Kota Cerdas

Teknologi digital dapat membantu membuat kota "lebih cerdas" karena pengguna teknologi mengakses data secara berkelanjutan. Analisis data berkelanjutan tersebut dengan menggunakan algoritma, dapat membantu kota untuk melihat, berpikir, campur tangan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Misalnya, seorang penduduk mengakses aplikasi untuk memilih bus dengan waktu perjalanan tercepat atau apakah orang tersebut dapat ke luar dengan kondisi kualitas udara saat itu. Lampu lalu lintas mengidentifikasi kedatangan bus, dan lampu berganti hijau untuk memberikan prioritas kepada transportasi umum. Pada kondisi ideal, kota cerdas dapat didefinisikan sebagai "kota inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maupun cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi, dan layanan perkotaan serta daya saing, dengan tetap menjaga kebutuhan generasi sekarang dan masa depan terkait aspek-aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta budaya." [42]

Perusahaan teknologi semakin giat mempromosikan produk dan layanan kota cerdas kepada pemerintah kota, perusahaan non teknologi, bahkan secara langsung kepada warga. Perkiraan pasar global untuk kota cerdas sangat bervariasi. Permintaan global untuk membangun kota-kota cerdas berkembang pesat, dari USD 622 miliar pada 2017 menjadi USD 1 triliun pada 2019. Diperkirakan akan mencapai USD 3,48 triliun pada tahun 2026 (Bab 1).[43] Angka-angka ini menunjukkan penting dan berkembang pesatnya sektor ini, yang dapat dipandang sebagai peluang besar bagi perusahaan teknologi.

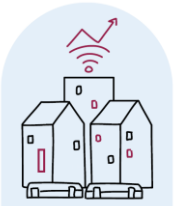

Permintaan global untuk kota-kota cerdas tumbuh pesat, dari USD 622 miliar pada 2017 menjadi USD 1 triliun pada 2019

Pendekatan kota cerdas yang paling ambisius melibatkan kemitraan pemerintah daerah dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan lingkungan permukiman eksperimental baru atau area permukiman *exurban* yang dikembangkan sebagai kota yang benar-benar baru. Meskipun spesifikasi setiap proyek kota cerdas atau lingkungan cerdas bervariasi, namun terdapat kesamaan dalam penggunaan teknologi seperti sensor, jaringan nirkabel, IoT, dan *smart meter*. Dengan teknologi ini, kota cerdas mengotomatisasi layanan seperti berkomunikasi dengan warga untuk menerima umpan balik. Pada rumah tangga, teknologi ini mampu menghemat biaya energi dengan secara otomatis mematikan lampu dan peralatan lainnya ketika tidak digunakan. Selain itu, *smart meters* juga mampu berkomunikasi dengan perabot cerdas lainnya untuk menghemat biaya listrik dengan cara mematikan atau menyalakan perabot, misalnya dengan menyalakan pencuci piring otomatis di tengah malam ketika konsumsi energi rendah.[44] Mengingat teknologi ini dimanfaatkan untuk menghemat konsumsi listrik dan menurunkan emisi, kota cerdas kadang disebut sebagai "kota ramah lingkungan". Sebuah gagasan yang sudah lama dicanangkan, sejak tahun 1970-an.[45]

Kotak 6.4: Mengukur polusi udara dengan jaringan pemantauan kualitas udara berbiaya rendah

Pada tahun 2012, buruknya kualitas udara mengakibatkan tujuh juta kematian dini, sehingga menjadikannya sebagai risiko kesehatan lingkungan terbesar di dunia. Polusi udara adalah masalah utama di kota-kota di seluruh dunia dan membutuhkan penyelesaian berbasis data. Namun demikian terdapat jurang antara yang lebar dalam kemampuan berbagai kota untuk mengukur dan melakukan pemodelan polusi udara. Selain itu, relatif sedikit kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara. Sensor kualitas udara berbiaya rendah berpotensi menjembatani jurang antara data ini. Dalam hal ini, UN Environment Programme (UNEP) bekerja sama dengan perusahaan Alphasense, University of Cambridge, NASA-GLOBE citizen science programme, Wajukuu Arts Collective, dan Kibera Girls Soccer Academy melakukan eksperimen dengan menempatkan enam monitor kualitas udara berbiaya rendah di sekolah-sekolah di Kota Nairobi.

Terlepas dari keterbatasan teknis yang ada, eksperimen ini menunjukkan bahwa sensor dapat memberikan pengukuran indikatif kualitas udara yang berharga bagi masyarakat setempat. Eksperimen ini juga menyimpulkan bahwa jaringan sensor semacam itu dapat memainkan peran penting dalam melibatkan dan mengedukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya mengatasi kualitas udara yang buruk. Di satu sisi, sensor merupakan perlengkapan yang penting, namun di lain pihak sensor tidak bisa menggantikan sistem pemantauan kualitas udara yang bermutu tinggi dan handal karena adanya masalah kalibrasi, sertifikasi, kontrol kualitas, dan pelaporan. Bila dilakukan dengan seksama, interpretasi data dari alat pemantauan berbiaya rendah ini dapat menghasilkan masukan informasikan untuk rencana pengelolaan kualitas udara kota Nairobi. Semakin banyak pemerintah di Afrika yang mendukung kota-kota untuk mengukur polusi udara. Baik Ghana maupun Senegal, misalnya, memiliki stasiun pemantauan, rencana manajemen kualitas udara dan indeks kualitas udara untuk warganya.

Monitor Kualitas Udara Berbiaya Rendah dipasang di Sekolah di Nairobi

Sumber: deSouza et al, 2017

Kota Baru Songdo, terletak di reklamasi lahan pasang surut di pinggiran Kota Incheon, Korea Selatan, adalah salah satu pengembangan kota cerdas pertama. Pemerintah Korea Selatan membangun kota baru dari nol untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi dan sekaligus kelestarian lingkungan melalui penerapan teknologi mutakhir untuk menarik sektor swasta serta membangun pusat bisnis dan inovasi nasional yang baru.

Pemerintah bekerjasama dengan perusahaan nasional dan asing untuk menyusun rencana induknya. Para arsitek merancang kota dengan prinsip keberlanjutan yang diperkuat oleh berbagi informasi melalui jaringan nirkabel, teknologi digital, dan perangkat komunikasi terintegrasi. Aliran data yang menerus dianalisis dan diteruskan untuk mengatur layanan dan infrastruktur agar tercipta metabolisme perkotaan dan layanan yang lebih efisien bagi penduduk dan bisnis.

Meskipun dengan investasi dan teknologi sebesar USD 40 miliar yang berhasil menarik minat berbagai perusahaan sekalipun, kota hanya dihuni oleh sebagian penduduk dan tidak memiliki kualitas sosial yang biasa terjadi dari pertumbuhan suatu kota organis.[46] Pada kenyataannya, permukiman pinggiran kota yang berkepadatan rendah, berorientasi mobil, mewah, dan eksklusif bergaya AS itu oleh sebagian penghuninya dianggap sebagai tempat yang sunyi.[47] Songdo, kota sebagai tempat uji coba atau etalase (*showcase*) bagi industri pembangunan kota internasional baru, menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengembangkan suatu lingkungan tempat tinggal, apalagi suatu kota, yang dirancang melalui "kemitraan pengembang real estat, investor, pemerintah nasional dan industri teknologi informasi"[48], daripada kota yang dibangun oleh dan untuk masyarakat secara *bottom-up*.

Songdo juga dirujuk sebagai kota baru yang bermasalah karena dikembangkan hanya berfokus pada metabolisme kota yang efisien tanpa mempertimbangkan aspek iklim dan ekologi yang lebih luas seperti netralitas karbon (*carbon neutrality*), keanekaragaman hayati, pelestarian lahan basah, dan pengelolaan zona pesisir dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.[49] Umumnya karena dirancang dan dilayani oleh perusahaan internasional di bidang arsitektur, teknik, dan teknologi yang sama, variasi dari model Songdo tidak mempan dikritik dan malah menyebar di seluruh dunia (Kotak 6.5). [50] Sementara dalam kasus lain, seperti Kota Eko-Atlantik di sebuah pulau buatan di Lagos, Nigeria, atau Kota Teknologi Konza di luar Nairobi, visi ini sebagian besar mendukung eksklusi sosial melalui pengembangan real estat kelas atas.[51] Skema pengembangan real estat ini adalah kebalikan dari urbanisasi yang inklusif secara sosial seperti yang diharapkan dalam NUA.

Taman Pusat, Incheon, Korea Selatan © Zapp2Photo/Shutterstoc

Kotak 6.5: Google Sidewalks Lab menghadapi perlawanan terhadap Toronto Tomorrow

Perusahaan teknologi raksasa Google dengan perusahaan mandiri baru terkait dengan perkotaan yaitu Sidewalks Lab adalah contoh utama dari model bisnis kota cerdas. Sidewalk Labs mempromosikan dirinya sebagai perusahaan yang "membayangkan/menggagas, merancang, menguji, dan membangun inovasi perkotaan untuk membantu kota memenuhi tantangan terbesar mereka." [52] Pada tahun 2017, Sidewalks Lab dengan Kota Toronto mencapai kesepakatan untuk membangun kembali lahan industri tepi danau seluas 12 acre (4,9 hektar) menjadi lingkungan futuristik. Rencana induk inovasi dan pengembangan yang eksperimental dari perusahaan ini, Toronto Tomorrow, diluncurkan pada tahun 2019 dengan gagasan trotoar yang dilengkapi pemanas otomatis, saluran pembuangan sampah bawah tanah, jalan fleksibel dan gedung pencakar langit terbuat dari *cross laminated timber* (CLT), kesemuanya mengumpulkan data yang masif untuk memastikan efisiensi energi dan mobilitas yang optimal. [53]

Meskipun perjanjian mengharuskan adanya negosiasi aktif antara Sidewalk Labs dengan entitas kota untuk memastikan kesesuaian dengan visi kota, kelompok warga tetap berpendapat bahwa 'pihak luar' dengan teknologi canggih itu mengelak dari proses pengawasan publik dan keterlibatan masyarakat. [54] Masyarakat juga khawatir terhadap tingkat pengawasan yang akan diperlukan Toronto Tomorrow dan berapa banyak data yang akhirnya akan dikendalikan oleh perusahaan teknologi tersebut. [55] Pada Juli 2020, Sidewalk Labs akhirnya membatalkan proyek ini dikarenakan ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Sumber: Sidewalk Labs, n.d.; Summers, 2019; Weiditz, 2020.

Pendekatan kota cerdas lainnya lebih banyak melibatkan pemerintah kota, ketimbang pemerintah pusat, sebagai pengendali dalam mengembangkan proyek kota cerdas. Namun, dalam beberapa kasus, proyek-proyek semacam ini mendapat insentif dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada tahun 2015, India meluncurkan Misi Kota Cerdas "untuk mempromosikan kota-kota yang menyediakan infrastruktur dasar dan memberikan kualitas hidup yang layak kepada warganya, lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, dan penerapan Solusi 'Cerdas'." [56] Program nasional ini menerapkan teknologi untuk berbagai macam masalah perkotaan dari pengolahan air limbah hingga *telemedicine* (Gambar 6.2). Program ini memilih 100 kota dan menyetujui rencana kota cerdas untuk pendanaan parsial. [57] Namun, penting untuk dicatat bahwa kemajuan proyek ini melambat, dengan beberapa kota bergerak maju lebih cepat daripada yang lain, yang mengungkapkan isu ketimpangan kapasitas lokal dalam membiayai dan mengimplementasikan inisiatif kota cerdas. [58]

Pendekatan kota cerdas lainnya melibatkan pemerintah kota, ketimbang pemerintah nasional, di kursi kemudi dalam mengembangkan proyek kota cerdas

Meskipun ada pengakuan atas kekuatan teknologi sipil baru dalam inovasi perkotaan, tetap ditemukan banyak keterbatasan. Pertama, teknologi tidak dapat menggusur keterlibatan warga dalam urusan lingkungan dan perkotaan. Platform digital bukan sebagai pengganti pertemuan, dialog, dan reformasi kelembagaan. Upaya untuk menggusur pertemuan ini atau memindahkannya menjadi daring sering bermasalah. Misalnya, inovasi kelembagaan penganggaran partisipatif yang dikembangkan oleh Kota Porto Alegre, Brasil, memberi ruang pada warga untuk mempertanyakan bagaimana anggaran kota dimanfaatkan. Ini efektif karena dialog yang dihasilkannya, yang memberi suara lebih besar kepada orang miskin dan menjadikan alat bagi warga untuk memastikan proyek-proyek yang mereka pilih dilaksanakan.[59] Ketika proses ini dilakukan secara daring, efektivitasnya akan berkurang. Yang terburuk adalah apabila hal ini menghasilkan lebih banyak ketidakpercayaan kepada pemerintah. [60]

Selain itu, teknologi ini paling efektif ketika digabungkan dengan inovasi kelembagaan dan bukan sebagai pengganti peningkatan tata kelola. Banyak proyek kota cerdas disesatkan oleh penekanan pada teknologi, dan bukan dengan tata kelola pemerintahan yang ada. Dalam kasus Toronto Tomorrow, warga sangat prihatin dengan

kekuatan perusahaan teknologi besar dan mutakhir untuk mendistorsi politik demokrasi dan melanggar hak privasi mereka. Ada potensi bagi kota-kota untuk menggunakan kerangka kerja tata kelola, regulasi, dan alat-alat seperti pengadaan publik yang menggunakan pendekatan proaktif terhadap transformasi digital yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa proyek-proyek yang melibatkan teknologi lebih selaras dengan tujuan kota dan warga-nya

6.4 Kota Cerdas yang *Bottom-up:* Laboratorium Perkotaan, Data Terbuka dan Gerakan *Open-Source*

Kota dan warganya menemukan cara-cara *bottom-up* untuk berinovasi agar kota mereka lebih baik. Strategi ini termasuk membangun hubungan dengan universitas setempat; memanfaatkan pengembang perangkat lunak lokal yang berpikiran sipil, perusahaan teknologi dan kolektif (*collectives*); membangun, mendorong, dan berbagi data terbuka anonim; dan memanfaatkan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*). Kota juga mengembangkan mekanisme regulasi bagi perusahaan teknologi perkotaan untuk menahan/mengendalikan kekuatan disruptif dengan hasil yang beragam.

Pada akhirnya, warga adalah sumber daya terbesar kota. Mereka memberikan ide-ide baru untuk inovasi, bertindak sebagai mata atau telinga kota, membantu memantau kondisi di lapangan dan melibatkan kota lebih aktif dalam menetapkan prioritas, misalnya melalui penganggaran partisipatif dan pemungutan suara untuk pejabat terpilih atau pada kebijakan dan program tertentu. Baik melalui SMS atau aplikasi, warga dengan ponsel dan perangkat pemantauan lainnya seperti monitor udara portabel berbiaya rendah atau sistem rekaman medis dapat membantu menghasilkan data penting. Kota juga menghasilkan data dari sistem mereka sendiri, baik bus dengan pelacak, meter utilitas di perumahan umum, pipa air limbah yang dilengkapi dengan sensor atau informasi keuangan tentang anggaran kota.

.

Gambar 6.2: Misi kota cerdas oleh Pemerintah India

6.4.1 Kota dan Data Terbuka (Transparansi Data)

Semakin banyak kota yang berupaya untuk menstandarkan data tersebut dan mempublikasikannya melalui portal data terbuka.

Kota dan warganya terus menerapkan cara-cara *bottom-up* untuk berinovasi untuk membuat kota mereka lebih baik

Gerakan "data terbuka" atau "pemerintah terbuka" berusaha membuat informasi sebanyak mungkin tentang operasi kota tersedia untuk umum baik untuk menginformasikan kepada warga sehari-hari dan untuk menginspirasi mereka yang mungkin akan membuat alat, aplikasi, atau analisis yang berguna dari data itu. Gerakan ini mendapatkan momentum karena kota mengakui bahwa mereka dapat menciptakan banyak nilai dalam hal inovasi teknologi yang meningkatkan pengiriman layanan, kepercayaan publik dan analisis untuk mewujudkan kebijakan yang lebih baik. [61]

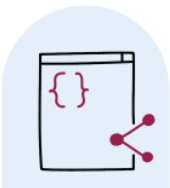

Data terbuka dan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) berkontribusi pada peningkatan pengembangan ekonomi serta ketahanan dalam perencanaan dan penyediaan layanan

Data terbuka dan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) berkontribusi pada peningkatan pengembangan ekonomi serta ketahanan dalam perencanaan dan penyediaan layanan. Alternatif berbiaya rendah untuk perangkat lunak memungkinkan pengusaha di kawasan ini untuk membangun bisnis baru yang meningkatkan layanan dan perencanaan serta peneliti dan analis untuk mengembangkan pengetahuan baru yang spesifik konteks untuk memandu pengambilan keputusan. Misalnya, pengembang perangkat lunak di Lilongwe dapat membangun perangkat lunak rekam medis berbiaya rendah untuk klinik kesehatan dengan menggambar di OpenMRS, platform sistem rekam medis elektronik perusahaan sumber terbuka yang berbagi dan membangun kode terbuka, sehingga mengurangi biaya pengembangan perangkat lunak. Menyadari pentingnya manfaat ini, komunitas pembangunan internasional telah mengembangkan prinsip untuk pengembangan digital (Gambar 6.3). [62]

Data terbuka *(open data*) didefinisikan sebagai "data yang dapat digunakan secara bebas, digunakan kembali, dan didistribusikan kembali oleh siapa pun dengan syarat menyebutkan sumbernya".[63] Menurut Institut Data Terbuka (Open Data Institute), data terbuka yang baik harus memiliki empat atribut: ditautkan ke internet sehingga dapat dengan mudah dibagikan dan dibicarakan; tersedia dalam format standar, terstruktur, sehingga dapat dengan mudah diproses; telah menjamin ketersediaan dan konsistensi dari waktu ke waktu, sehingga orang lain dapat mengandalkannya; dan dapat dilacak, melalui pemrosesan apa pun, kembali ke tempat asalnya, sehingga orang lain dapat mengetahui apakah akan mempercayainya. [64]

Salah satu contoh nyata di mana data standar yang terbuka memberikan dampak positif besar adalah di sektor transportasi. Pada tahun 2015, TriMet, badan transportasi umum di Portland, AS, setuju untuk memberi akses data rute dan jadwalnya untuk Google, yang mengintegrasikan informasi itu ke dalam aplikasi pemetaan populernya menggunakan format data transit yang akhirnya menjadi platform data terbuka. [65] Pergerakan data transit terbuka telah menyebar dan memberi dampak positif yang besar. Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat mensurvei 67 lembaga transportasi di seluruh dunia tentang pengalaman mereka dengan data terbuka dan menyimpulkan bahwa manfaat signifikan muncul dari membuat data transportasi umum terbuka termasuk bahwa publik lebih menyadari layanan transportasi umum. [6]

Data terbuka juga memungkinkan inovasi pihak ketiga seputar sistem informasi penumpang. Inovasi ini paling nyata dalam "ekosistem aplikasi pihak ketiga yang dikembangkan untuk platform ponsel pintar yang dominan." [67] Data terbuka tentang transportasi umum dapat membantu mendorong pengembangan bisnis, dan pengembang aplikasi dapat menghasilkan pendapatan dari aplikasi inovatif yang mereka buat menggunakan data terbuka. Biaya pengembangan aplikasi mandiri menjadi faktor kunci bagi Transport for London (TfL)

untuk bergerak menuju strategi data terbuka. [68] Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut mengembangkan beragam produk bermutu dengan memanfaatkan data. Transpot for London memperkirakan aplikasi yang menggunakan data busnya akan memberi manfaat senilai £ 83 (USD 106 juta) bagi pelanggannya selama 10 tahun, dengan biaya yang ditanggung TfL sebesar £ 820.000 (USD 105.000) per tahun. [69] Pada tahun 2012, 5.000 pengembang terdaftar telah memproduksi lebih dari 362 aplikasi yang didukung oleh data TfL. Aplikasi ini mencapai 4 juta orang dengan nilai perkiraan £ 15-58 juta (USD 19-74 juta) dalam bentuk penghematan waktu pengguna. [70]

Beberapa perusahaan semacam ini juga dapat menghasilkan lebih banyak data dari penggunaan aplikasi, yang pada gilirannya, memberi umpan balik ke penyimpanan data, yang pada gilirannya dapat menciptakan layanan transit baru. Misalnya, CityMapper, perusahaan di London, menggunakan datanya untuk mengidentifikasi kebutuhan jalur bus yang belum ada, dan sebagai solusinya meluncurkan layanan hibrida taksi bus pada rute ini. [71] TransitScreen, Inc. menggunakan data terbuka dari agen transportasi umum untuk mengembangkan layar informasi yang diletakkan di lobi dan ruang publik. Secara keseluruhan, banyak dari bisnis ini mengembangkan layanan yang membuat mobilitas bersama dan transportasi umum lebih menarik. Upaya ini membantu membangun ekosistem yang kaya dalam mendukung agenda global meningkatkan transportasi umum dan mengurangi penggunaan mobil pribadi, yang merupakan bagian penting dalam mengatasi perubahan iklim dan polusi udara di kota-kota. Bukti menunjukkan bahwa kekuatan pengembangan ekosistem data terbuka, tidak hanya di sektor transportasi tetapi di semua bidang. Bahkan, dengan perubahan iklim, kota-kota harus membangun data lingkungan dan demografis terbuka untuk perencanaan ketahanan iklim. [72] Pendekatan ini juga mengelaborasi cara mencapai target TPB 17.6 (meningkatkan kerja sama internasional dan akses ke sains, teknologi dan inovasi dan meningkatkan pertukaran pengetahuan) dan 17.7 (mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi dan penerapan teknologi berwawasan lingkungan) dengan menyediakan teknologi dengan ketentuan yang adil dan mendorong transfer dan pembelajaran pengetahuan di seluruh kota.

Dalam upaya memanfaatkan data terbuka sebagai sumber daya, kota-kota harus mengembangkan kemampuan TIK mereka sendiri untuk membangun dan menata data serta portal untuk berbagi data dalam format standar

Dalam upaya memanfaatkan data terbuka sebagai sumber daya, kota harus mengembangkan kemampuan TIK mereka sendiri untuk membangun dan menata data serta portal untuk berbagi data dalam format standar; banyak kota sekarang berbagi berbagai data anonim dan membuat kompetisi aplikasi atau "*hackathon*" untuk mendorong terciptanya aplikasi baru untuk mengatasi masalah perkotaan (Kotak 6.6). Portal data terbuka juga memiliki manfaat tambahan dalam meningkatkan kolaborasi di antara bagian/divisi dan memungkinkan lebih banyak interaksi dan kepercayaan antara warga dalam menyelesaikan masalah.[73]

Gambar 6.3: Prinsip digital untuk pembangunan

Sumber: www.digitalprinciples.org.

Kotak 6.6: *Hackathons* memanfaatkan data terbuka untuk membangun alat teknologi kota

Gagasan menjalankan *hackathon* untuk memanfaatkan ide-ide baru tentang cara menggunakan data terbuka di kota-kota telah dikenali di seluruh dunia. Salah satu kompetisi pertama yang dikelola kota di AS adalah Apps for Democracy, yang diadakan di Washington, DC pada tahun 2008 untuk memanfaatkan 200 kumpulan data yang dibuka di kota ini seperti yang dikatalogkan oleh perusahaan pihak ketiga. Kota ini mendapatkan sponsor untuk menyediakan hadiah uang sebesar USD 50.000 untuk tiga aplikasi teratas. *Hackathon* menghasilkan 47 desain yang sukses, yang membantu mengumpulkan sekitar USD 2,3 juta untuk kota itu sendiri. Tetapi nilai ini hanya dibuat ketika kota-kota memiliki sumber daya untuk membuat data tersedia dalam bentuk yang berguna dan membutuhkan komunitas teknologi yang berpikiran sipil yang ada. Selain itu, banyak ide inovatif yang tidak dikembangkan dan karenanya tidak berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang lebih iteratif dan kolaboratif. Komunitas "peretas sipil" berkembang di seluruh dunia dan kota-kota semakin menemukan cara untuk bermitra dengan mereka untuk memberikan layanan atau memahami masalah dengan lebih baik.

Sumber: Smith, 2017.

Strategi lain untuk kota adalah tantangan untuk berinovasi. Pendekatan ini ditujukan untuk memunculkan beragam ide, bakat, dari warga setempat maupun di sekitarnya untuk mengatasi tantangan tertentu. Sebagai contoh, ThinkCity, sebuah organisasi sosial di Kuala Lumpur, Malaysia, menciptakan "*climathon*" pada tahun 2019 untuk memunculkan ide-ide untuk mengatasi masalah ketahanan perubahan iklim. Pemenang *climathon* pertama di Penang mengembangkan prototipe sistem peringatan banjir untuk Kota Pulau Pinang yang sangat rentan terhadap banjir. Dengan memanfaatkan sensor dan kecerdasan buatan untuk mengirimkan data tinggi muka air secara *real time*, sistem akan membuat model hidrologi dengan cepat, mendeteksi kemungkinan bahaya banjir dan melakukan peringatan dini. ThinkCity bersama mitranya dari George Town, memenangkan Penghargaan Global EIT Climate-KIC Climathon untuk solusi alami untuk mencegah banjir, termasuk menanam spesies pohon yang sesuai dengan iklim dan sekaligus menyejukkan bagi masyarakat.[74]

Dalam ordo yang serupa, setelah Badai Sandy mendatangkan malapetaka di wilayah metropolitan Kota New York pada tahun 2012, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS bekerja sama dengan sektor nirlaba dan filantropi menyelenggarakan Rebuild by Design, suatu kompetisi desain untuk memfasilitasi dan mendanai solusi inovatif terkait ketahanan iklim. Proses kolaboratif publik-swasta ini terus berlangsung di berbagai kota di seluruh dunia. [75]

6.4.2 Laboratorium Perkotaan

Kota-kota yang memiliki pendidikan tinggi juga dapat mengembangkan kemitraan "*town and gown*" dengan universitas (Kotak 6.7). Banyak universitas berlokasi di daerah perkotaan dan semakin tinggi keinginan mereka untuk berkolaborasi dengan komunitas lokal dan perusahaan teknologi di laboratorium perkotaan untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan. Di negara maju, contohnya adalah MIT Senseable City Lab dan University of Chicago's Urban Labs. Inisiatif teknologi perkotaan kolaboratif lainnya adalah Hyderabad Urban Lab atau C4D Lab (Universitas Nairobi) dan iHub di Nairobi yang didukung oleh yayasan, masyarakat sipil, dan bantuan multilateral. Selain itu, ada lagi yang menjadi bagian dari pemerintah kota, seperti Laboratorio de Innovación Quito (LINQ), LABcapital di Bogotá dan Laboratorio para la Ciudad di Mexico City, yang sudah menghentikan kegiatannya pada tahun 2018. Jaringan dan kolaborasi teknologi perkotaan semacam ini berkembang secara global, dan kota-kota dapat memfasilitasi dengan menyediakan akses yang terjangkau, data secara terbuka, dan kolaborasi. Penelitian adalah bagian penting dari inovasi perkotaan yang menelurkan perusahaan teknologi baru yang berorientasi pada masyarakat.

Kotak 6.7: Program "Town and Gown" Kota New York

Diprakarsai pada tahun 2009-2010, *Town+Gown* adalah program kemitraan antara komunitas dengan universitas di kota New York, pegawai Departemen Desain dan Konstruksi Kota New York, menyatukan akademisi dan praktisi untuk membangun pengetahuan di lingkungan terbangun.

Town+Gown adalah program penelitian terbuka yang memanfaatkan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan penelitian yang dibimbing oleh dosen untuk melaksanakan proyek riset terapan pada lingkungan terbangun atas kerjasama akademisi dan praktisi melalui model inkuiri kolaboratif berbasis riset aksi yang sistemik.

Town+Gown bertujuan untuk meningkatkan analisis berbasis bukti, transfer informasi, dan pemahaman tentang lingkungan binaan, dengan menggunakan, dalam banyak kasus, lingkungan binaan di kota New York City sebagai laboratorium lapangan. Laboratorium ini digunakan oleh praktisi yang bekerja di ruang terbangun, and akademisi dalam bidang lingkungan terbangun dengan tujuan akhir untuk melakukan perubahan dalam prtaktek maupun kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Program ini melibatkan pemerintah kota yang bermitra dengan tim dari universitas dengan berbagi data dan pengetahuan tentang masalah yang dikerjakan tim universitas. Pemerintah kota kemudian menyelenggarakan kegiatan untuk menyajikan dan membahas hasil proyek-proyek. Solusi bersama untuk masalah kota muncul dari dinamika ini.

Sumber: https://www1.nyc.gov/site/ddc/about/town-gown.page

6.5 Kota dan Geografi Inovasi Teknologi yang Tidak Merata

Inovasi teknologi membutuhkan investasi publik dalam penelitian dan pengembangan (litbang) dan modal ventura, atau pendanaan yang masuk ke proyek atau usaha baru yang berisiko. Komponen-komponen ini didistribusikan secara tidak merata di seluruh dunia. Jaringan inovasi teknologi besar dan perusahaan di dalamnya hampir selalu terletak di kota-kota global yang juga dapat menarik pekerja muda dengan pendidikan yang baik, banyak di antaranya adalah pendatang, sementara kota-kota yang kurang terhubung secara global menjadi tertinggal. [76] Pekerja ini kadang-kadang disebut sebagai kelas kreatif, istilah yang mencakup seniman dan pengusaha dari semua jenis yang bekerja di industri kreatif yang menguntungkan. [77] Pada tahun 2015, industri kreatif menghasilkan lebih dari USD 2,2 triliun dengan lebih dari 29,5 juta pekerjaan di seluruh dunia, setara dengan tiga persen dari PDB dunia. [78] Sementara industri kreatif terbuka untuk orang-orang dari segala usia dan latar belakang, mereka menawarkan jalur yang signifikan untuk pekerjaan pemuda dan menghubungkan sektor formal dan informal, generasi dan wilayah, menanggung potensi yang sebagian besar belum dimanfaatkan untuk meningkatkan urbanisasi pada tahun 2030.

Meskipun sulit untuk diukur dengan tepat, beberapa perkiraan menunjukkan bahwa untuk ekonomi digital saja pada tahun 2016 bernilai USD 11,5 triliun secara global, setara dengan 15,5 persen PDB global, dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 24,3 persen dari PDB global pada tahun 2025. [79] Jika wilayah Silicon Valley adalah negara, wilayah ini akan menjadi salah satu wilayah yang terkaya di dunia dengan produksi tahunan senilai USD 275 miliar. [80] Seiring dengan menyebarnya teknologi dan pengetahuan terkait yang terjadi dengan cepat di era digital, inovasi baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung sektor perekonomian lainnya melalui pertumbuhan produktivitas. [81]

Geografi inovasi teknologi saat ini, bagaimanapun, penuh dengan ketimpangan, dengan banyak implikasi yang besar bagi masyarakat

Geografi inovasi teknologi saat ini, bagaimanapun, penuh dengan kesenjangan, dengan banyak implikasi yang besar bagi masyarakat yang mengekspresikan diri mereka pada tingkat yang berbeda: di dalam dan antara daerah metro, antara daerah metro dan daerah perdesaan, dan di seluruh kota dan negara di seluruh dunia. Saat ini, Wilayah Teluk San Francisco di AS adalah ekosistem inovasi teknologi terbesar di dunia. Banyak perusahaan teknologi terbesar, seperti Google, Facebook, Uber, dan Airbnb, berbasis di sana dan memiliki dampak yang lebih besar secara lokal karena kekayaan yang mereka hasilkan dan secara global karena dampaknya pada pasar rumah sewa, industri taksi, iklan

politik dan privasi data. Penting untuk memahami dinamika ini karena sebagian besar kota sekarang terkena dampak dari perusahaan teknologi raksasa ini, dalam banyak kasus, lebih kaya dan lebih kuat daripada berbagai negara dan memiliki dampak yang luas, termasuk pada tata kelola kota.

Modal ventura mendukung perusahaan teknologi dengan menurunkan batasan untuk menawarkan produk di pasar. Pembiayaan ini juga cenderung terkonsentrasi di AS, terutama di Wilayah Teluk San Francisco dan Koridor Timur Laut (Boston-New York-Washington), dengan sebagian besar teknologi perusahaan rintisan mutakhir yang didanai oleh modal ventura ditemukan di kota-kota global seperti London, Paris, Toronto, Beijing, Tel Aviv, Shanghai, Mumbai dan Bengaluru (Gambar 6.4 dan 6.5). [82] Walaupun banyak modal ventura memasukkan investasi ke dalam inovasi teknologi di level lokal, beberapa di antaranya diekspor untuk mendukung perusahaan teknologi global,[83] yang terkadang menciptakan konflik antara perusahaan teknologi lokal dengan pemain global dan kemudian membuat lapangan bermain yang sangat tidak seimbang dan membentuk istilah "kolonialisme teknologi atau digital." [84]

Investasi sektor publik dalam penelitian ilmiah, teknik, dan teknologi yang menjadi dasar dari sebagian besar inti inovasi teknologi juga sangat tidak terdistribusi secara merata di tingkat global, yang menjadi tantangan untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung seperti yang dibayangkan dalam NUA dan TPB: "akses ke sains, teknologi dan inovasi dan peningkatan berbagi pengetahuan." [85] Menurut UNESCO, sementara pengeluaran global untuk litbang telah mencapai rekor tertinggi hampir USD 1,7 triliun, hanya 10 negara yang menyumbang 80 persen dari pengeluaran yang terdiri dari dukungan sektor swasta dan publik. [86] Bagian dari dukungan litbang sektor publik ini berhasil masuk ke universitas yang di antaranya melakukan inkubasi atau pemandirian perusahaan rintisan atau memberikan terobosan sains yang mendukung kemajuan teknologi lanjutan.

Investasi sektor publik dalam penelitian ilmiah, teknik, dan teknologi yang menjadi dasar dari sebagian besar inti inovasi teknologi juga sangat tidak terdistribusi secara merata di tingkat global

Gambar 6.4: Distribusi global dari 100 perusahaan digital teratas dan kapitalisasi pasar (miliar USD)

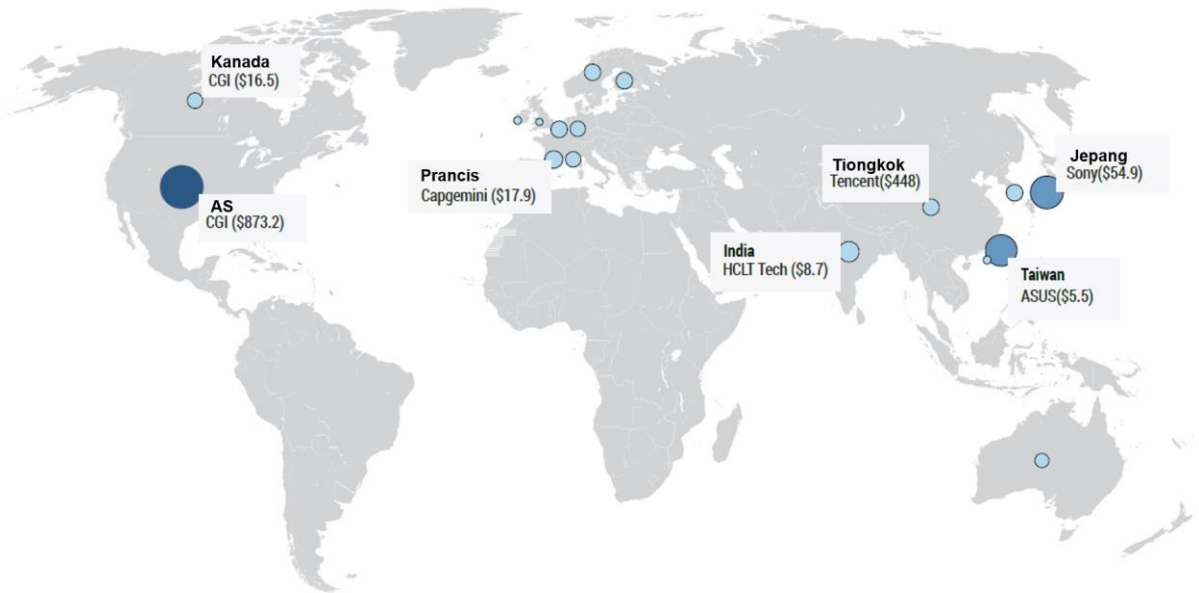

Sumber: Murphy, 2018.

Gambar 6.5: Distribusi global dari modal ventura

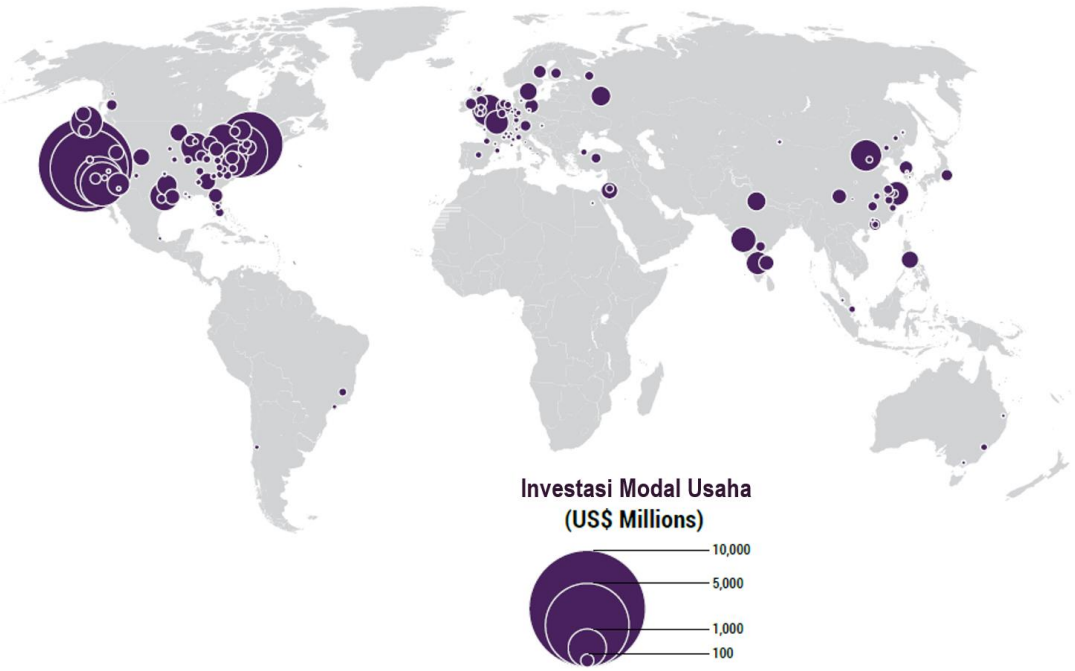

Sumber: Martin Prosperity Institute, 2016

Meskipun beberapa manfaat dari teknologi mutakhir tersebar di seluruh dunia, distribusi spasial dari modal ventura dan litbang dari sektor publik bersama dengan perusahaan teknologi sangat terkonsentrasi. Salah satu implikasinya adalah perusahaan teknologi besar bermain di banyak kota di seluruh dunia, menciptakan dinamika kekuatan baru seperti halnya Sidewalks Lab di Toronto.

Karena sektor teknologi dapat menghasilkan lapangan kerja dan dinamika ekonomi dengan produksi layanan baru dan peningkatan efisiensi, banyak kota berusaha untuk membangun lingkungan agar bisnis semacam ini dapat berkembang. Saksikan puluhan kota di seluruh dunia yang telah berusaha mencap diri mereka dengan julukan "Silicon," dari Silicon Wadi dari Tel Aviv hingga Silicon Savannah dari Nairobi. Namun, kota-kota juga sangat timpang dalam hal sejauh mana kota tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong perusahaan teknologi sebagai strategi ekonomi. Beberapa kota memiliki sumber daya yang lebih banyak berinvestasi di distrik inovasi, ruang inkubator dan akselerator, pusat pengetahuan dan universitas, serta menyediakan lahan atau potongan pajak untuk perusahaan teknologi. Kota-kota lain hanya menjadi 'tuan rumah' untuk perusahaan teknologi tetapi tidak fokus pada pembangunan sistem inovasinya. Secara keseluruhan, terdapat keragaman yang besar di antara kota-kota dalam hal orientasi mereka terhadap perusahaan inovasi dan teknologi yang semakin mendominasi kota-kota paling dinamis secara ekonomi di dunia. [87]

Terdapat keragaman yang besar di antara kota-kota dalam hal orientasi mereka terhadap perusahaan inovasi dan teknologi yang semakin mendominasi kota-kota paling dinamis secara ekonomi di dunia

Salah satu contoh paling dramatis dari hubungan ambivalen yang dimiliki kota-kota terhadap sektor teknologi adalah San Francisco. Pada 2015, Wali kota San Francisco menghadapi defisit anggaran dan memberlakukan jeda pajak bagi perusahaan teknologi untuk pindah ke kota. Insentif ini menciptakan pusat dinamis yang meningkatkan pekerjaan di kota dan menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi masuknya perusahaan-perusahaan ini ke kota berimplikasi pada meningkatnya harga sewa dan harga properti serta

menciptakan krisis perumahan, menjadikan San Francisco salah satu kota dengan ketimpangan yang paling tinggi di AS. [88] Tahun 2018, pemilih di kota merespon terhadap perubahan di kota mereka dengan menyetujui adanya pajak pada perusahaan teknologi untuk subsidi mendanai perumahan bagi tunawisma yang ada berseberangan dengan industri teknologi. [89] Tapi Silicon Valley lebih dari sekedar kebijakan satu kota. Analisis terperinci tentang ekosistem inovasi Wilayah Teluk oleh Konsorsium Inovasi dan Ilmu Pengetahuan Wilayah Teluk (Bay Area Science and Innovation Consortium (BASIC)), yang menyatukan pemerintah daerah, perusahaan, dan universitas dalam bentuk tata kelola jaringan koperasi yang inovatif, menunjukkan seperangkat aktor publik dan swasta yang berinteraksi untuk menghasilkan kemakmuran kawasan ini, termasuk universitas, akselerator, perusahaan besar, dan modal ventura (Gambar 6.6). [90]

Sejauh ini upaya untuk memulai sistem inovasi di daerah metropolitan lainnya telah membawa kesuksesan yang beragam namun biasanya lebih rendah dari yang diharapkan. [91] Hasil ini karena sulit untuk memelihara ekosistem yang kompleks yang melibatkan bentuk tata kelola kolaboratif dengan jaringan, yang sebetulnya ada di dalam dan dari dirinya sendiri yaitu inovasi kelembagaan. Kesimpulan ini memperkuat wawasan bahwa inovasi dalam arti luas terletak tidak hanya dalam perkembangan ilmiah dan teknologi, tetapi juga dalam tindakan kreatif pemerintah dan warga yang berusaha menggunakan pengaturan kelembagaan baru untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun sebuah kota tidak secara aktif mencoba membangun sistem inovasi lokal, dapat dilihat ada banyak cara bagi kota untuk memanfaatkan teknologi baru dari dasar untuk menjadi "lebih cerdas."

Gambar 6.6: Sistem inovasi Wilayah Teluk San Francisco

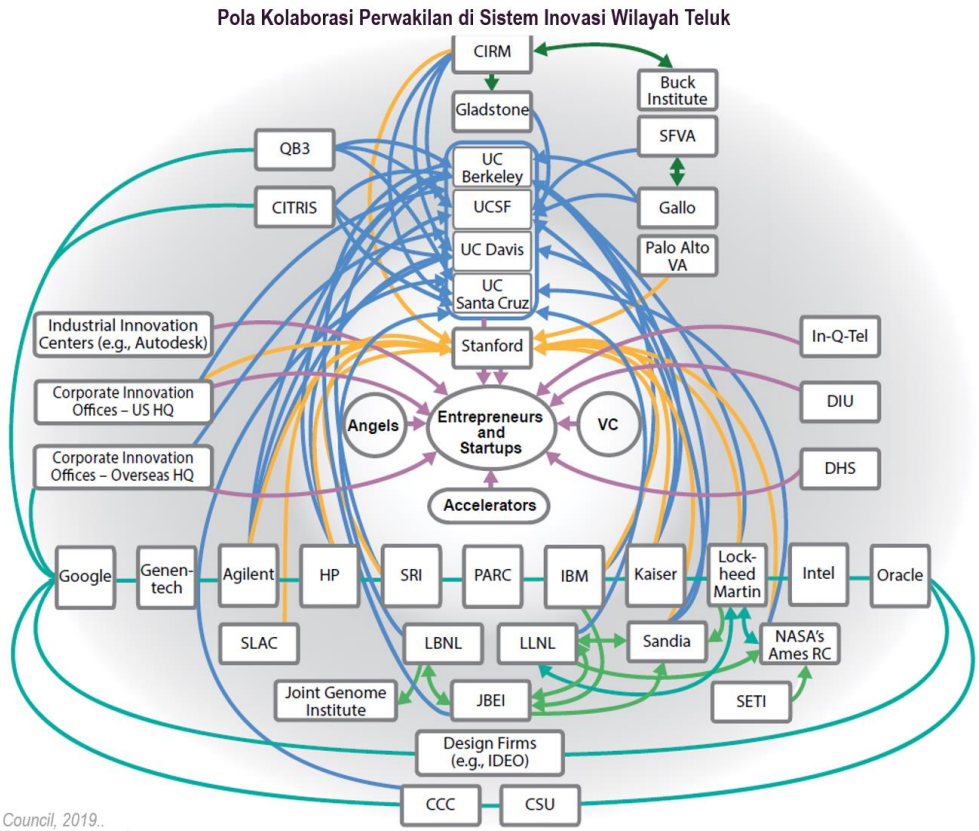

Sumber: Bay Area Economic Council, 2019..

6.6 Eksklusi Digital, Privasi Data, dan Maha Bahaya Teknologi Baru

Secara historis, setiap perubahan teknologi yang mendasar telah mengakibatkan transformasi dalam ketenagakerjaan, hubungan sosial, dan politik. Bagian ini secara sistematis meneliti beberapa risiko langkah menuju otomatisasi dan digitalisasi yang meluas. Ini termasuk eksklusi digital, pertanyaan tentang pengendalian data dan kolonialisme digital, masalah privasi dan pengawasan, penyalahgunaan platform sosial untuk kepentingan politik, dan dampak pada tenaga kerja, kemiskinan, dan ketimpangan.

Masalah eksklusi digital dan ketimpangan dalam memanfaatkan akses ke teknologi baru terus terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa penggunaan internet dan perangkat seluler berkembang pesat, dengan sekitar satu juta orang akan dalam jaringan setiap hari untuk pertama kalinya dan dengan dua pertiga dari populasi global yang memiliki perangkat seluler, sekitar setengah dari populasi dunia (3,9 miliar) tidak memiliki akses internet,[92] yang sebagian besar adalah penduduk perdesaan, berpenghasilan rendah, lansia, buta huruf, dan perempuan. Populasi luring menghadapi empat jenis hambatan: pendapatan rendah, keterjangkauan, kemampuan pengguna, dan infrastruktur penunjang. [93] Eksklusi digital adalah masalah yang cukup jelas di daerah perdesaan, namun uniknya daerah perkotaan dengan populasi penduduk miskin yang besar justru menghadapi masalah eksklusi digital yang juga serius, bahkan di kota-kota negara-negara yang lebih kaya. [94]

Masalah eksklusi digital dan ketimpangan dalam memanfaatkan akses ke teknologi baru terus terjadi

Disparitas ini berarti bahwa kota-kota perlu memiliki strategi untuk inklusi digital jika mereka menginginkan program kota atau warga cerdas dan penjangkauan agar program dapat bekerja dengan cara yang adil bagi semua penduduk kota. Beberapa strategi dimulai dari menyediakan wifi gratis di tempat umum seperti plaza dan angkutan umum hingga mensponsori *broadband* kota sebagai utilitas untuk mempromosikan literasi digital, terutama di kalangan wanita dan anak-anak, dengan mendistribusikan perangkat berbiaya rendah atau mengintegrasikan pelajaran pengodean ke dalam kurikulum sekolah. Namun, banyak kota di dunia lambat untuk mendigitalisasikan data dan memanfaatkan teknologi baru yang tersedia bagi mereka, yang berarti mereka juga lambat dalam mengatasi masalah inklusi digital.

Tantangan utama lainnya adalah privasi. Kota-kota harus bekerja untuk mempromosikan kebijakan yang baik untuk melindungi data warga negara yang dikumpulkan melalui layanan baru ini dan memberdayakan warga negara untuk memahami cara melindungi data pribadi mereka. Sementara data terbuka yang statis seperti jumlah tiang lampu atau lokasi perumahan menimbulkan beberapa masalah hukum, kekhawatiran mendalam ada pada menciptakan data terkait kesehatan dan *real-time* menjadi terbuka. [95] Kekhawatiran ini berlaku untuk banyak aplikasi yang muncul yang terkait dengan pelacakan dan penelusuran kontak kasus COVID-19. Lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk mengembangkan undang-undang perlindungan data, program pendidikan dan kebijakan terutama dalam konteks jika undang-undang yang ada saat ini lemah atau kurang berkembang. [96] Beberapa kota mempekerjakan staf yang bertugas mengelola portal data terbuka dan melindungi privasi. Perusahaan teknologi besar yang menawarkan layanan di kota sering memanfaatkan data pribadi dengan cara yang membuat warga tidak menyadarinya. Ketika kota merangkul dan mempromosikan teknologi digital dengan bermitra dengan perusahaan teknologi, mereka perlu bertindak untuk melindungi data pengguna, terutama pada saat pertanyaan etis dan politis muncul dalam penggunaan teknologi dengan tujuan pengawasan dan manipulasi untuk merusak proses demokrasi. [97]

Kota harus bekerja untuk mempromosikan kebijakan yang baik untuk melindungi data warga yang dikumpulkan melalui layanan baru ini dan memberdayakan warga untuk memahami cara melindungi data pribadi mereka

Masalah lainnya adalah bagaimana meregulasi perusahaan teknologi menyediakan jenis layanan baru yang mungkin dapat memberikan dampak yang bermasalah, terutama di ranah disrupsi tenaga kerja, regulasi, dan perencanaan kota. Kota, misalnya, sedang dibanjiri oleh layanan mobilitas baru dari kendaraan pesanan (*ride hailing*) dari mobil, van, hingga skuter, dengan perusahaan teknologi besar juga menguji kendaraan otonom. Dengan mengklaim sebagai perusahaan teknologi dan bukan perusahaan transportasi, perusahaan mobilitas baru sering berusaha menghindari peraturan, dan banyak kota perlu memperbarui kerangka hukum dan kebijakan mereka untuk mengatasi jenis layanan dan eksperimen baru ini.

Bagaimana cara mengelola dan meregulasi perusahaan teknologi adalah tantangan utama

Bagaimana cara mengelola dan mengatur perusahaan teknologi adalah tantangan utama. Misalnya, Uber dan banyak perusahaan serupa menyediakan layanan yang menghubungkan penumpang dengan perjalanan melalui aplikasi *e-hailing* yang menggunakan geolokasi dan algoritma untuk menghitung biaya. Di banyak kota seperti Johannesburg, Afrika Selatan, Uber telah menggusur pekerja berpenghasilan rendah di sektor taksi dengan pengemudi pendatang yang masih dibayar rendah,[98] memicu pertikaian dan menimbulkan persaingan yang tidak adil.[99] Adanya banyak bukti di beberapa kota, Uber menyebabkan bertambahnya kemacetan lalu lintas dengan menciptakan insentif bagi lebih banyak kendaraan untuk lalu lalang di jalan. [100] Dengan demikian, kota-kota perlu menemukan cara untuk mengelola layanan baru ini dan memastikan mereka memenuhi paradigma mobilitas yang ada.

Apakah perangkat kuat ini akan digunakan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan nantinya tergantung pada "siapa yang mengendalikan teknologi, siapa yang memiliki akses ke data, siapa yang menginterpretasikannya, dan tentu saja, apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan." [101] Dengan data dan analisis bisnis yang semakin menguntungkan, perebutan ada pada pengumpulan data perkotaan dengan banyak perusahaan yang menawarkan layanan tetapi tetap menyimpan data dan perangkat lunak yang mereka gunakan sebagai properti pribadi perusahaan. Kecenderungan ini menciptakan data yang semakin kuat dan meningkatkan ketergantungan pada teknologi, yang beberapa menyebutnya sebagai "kolonialisme digital" yang menahan inovasi potensial dan pemandirian dari data. Oleh karena itu, mengembangkan kerangka tata kelola yang kuat yang dibangun di atas hak digital adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi diterapkan dengan cara-cara yang dapat meningkatkan kehidupan publik di kota-kota dan memberi fungsi pada manfaat urbanisasi.

6.7 Pentingnya Tata Kelola dan Hak Digital

Mengingat konsentrasi kekuasaan ada pada perusahaan teknologi dan laju perubahan teknologi, pemerintah berada di bawah tekanan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam meningkatkan aspek positif dari teknologi sambil mengantisipasi efek negatif yang mungkin dapat diberikan. Pemerintah harus memastikan bahwa ada lingkungan regulasi yang komprehensif dan berfungsi yang membangun kepercayaan warga negara dan menetapkan aturan yang jelas bagi perusahaan teknologi.

Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah perlu menempatkan regulasi dan kebijakan yang mengatur perkembangan teknologi, mengatasi masalah seperti interoperabilitas, pengadaan, kemitraan publik-swasta dan masalah yang berencana dilakukan dengan peningkatan privasi dan keamanan akibat penggunaan platform digital dan pengumpulan data. Untuk membangun kepercayaan, pemerintah perlu memberlakukan undang-undang privasi yang menanggapi kekhawatiran warga negara, bisnis, dan masyarakat sipil dalam kaitannya dengan pelanggaran keamanan, penanganan data pribadi dan pengawasan.

Kerangka kerja dan pengaturan kelembagaan yang jelas dan etis harus diberlakukan ketika melakukan pengumpulan data dan berbagi data, terutama dalam kaitannya dengan data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda serta seputar algoritma dan penggunaan kecerdasan buatan, yang memiliki bias bawaan. [102] Kerangka kerja tata kelola ini perlu menetapkan standar

etika, termasuk siapa yang memiliki hak atas data, akses dan kepemilikan, dan siapa yang harus menikmati manfaat dari data. Di sini, penting bahwa sektor publik, sebagai penjaga hak-hak warga negara, memikul tanggung jawab terhadap tata kelola penuh. Bagi banyak pemerintah daerah, ini adalah area yang sama sekali baru, dan dengan demikian, kebijakan digital dan kapasitas tata kelola perlu diperkuat atau dibangun secara signifikan dari nol.

Kerangka kerja dan pengaturan kelembagaan yang jelas dan etis harus diberlakukan ketika melakukan pengumpulan data dan berbagi data

Data kota semakin menjadi sumber daya strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan misi dan program mereka secara efektif

Data kota semakin menjadi sumber daya strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan misi dan program mereka secara efektif. Akses yang tepat ke data kota secara signifikan meningkatkan nilai dari suatu informasi dan laba investasi dari modal memproduksi data tersebut. Seperti yang dibahas dalam kaitannya dengan teknologi sipil, data kota yang diatur dengan baik harus memastikan akuntabilitas dan transparansi, mempromosikan keterbukaan dan partisipasi publik dalam pemerintahan, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti menjadi aksi. Kota-kota dan pemerintah daerah mulai menyadari tanggung jawab mereka dalam hal tata kelola digital, data dan menjunjung tinggi hak digital warga negara.

Pada tahun 2018, Koalisi Kota untuk Hak Digital (Cities Coalition for Digital Rights) diluncurkan sebagai jaringan kota yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak digital dan didukung oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Hight Commisioner for Human Rights), UN-Habitat, Eurocities dan UCLG. Koalisi ini adalah inisiatif global yang menempatkan hak digital warga negara di pusat kebijakan yang berkaitan dengan data dan teknologi. Koalisi ini berbagi praktik terbaik dan mengoordinasikan inisiatif dan tindakan umum. Terinspirasi oleh Koalisi Hak dan Prinsip Internet (Internet and Principle Coalition), pekerjaan 300 pemangku kepentingan internasional selama sepuluh tahun terakhir, Koalisi Kota untuk Hak Digital berkomitmen untuk lima prinsip yang berkembang berikut:

i. Akses internet dan literasi digital yang universal dan merata: Setiap orang harus memiliki akses ke layanan internet dan digital yang terjangkau dan dapat diakses dengan merata, serta keterampilan digital untuk memanfaatkan akses ini dan mengatasi kesenjangan digital.

ii. Privasi, perlindungan data, dan keamanan: Setiap orang harus memiliki privasi dan kontrol atas informasi pribadi mereka melalui perlindungan data baik secara fisik maupun virtual, untuk memastikan kerahasiaan digital, keamanan, martabat dan anonimitas, dan kedaulatan atas data mereka, termasuk hak untuk mengetahui apa yang terjadi pada data mereka, siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa.

iii. Transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi data, konten, dan algoritma: Setiap orang harus memiliki akses ke informasi yang dapat dimengerti dan akurat tentang sistem teknologi, algoritmik, dan kecerdasan buatan yang berdampak pada kehidupan mereka, dan kemampuan untuk mempertanyakan dan mengubah sistem yang tidak adil, bias atau diskriminatif.

iv. Demokrasi partisipatif, keragaman, dan inklusi: Setiap orang harus memiliki representasi penuh di internet, dan kemampuan secara kolektif untuk terlibat dengan kota melalui proses digital yang terbuka, partisipatif, dan transparan. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk infrastruktur dan layanan digital lokal dan, lebih umum, pembuatan kebijakan kota untuk kebaikan bersama.

v. Standar layanan digital yang terbuka dan etis: Setiap orang harus dapat menggunakan teknologi pilihan mereka, dan mengharapkan tingkat interoperabilitas, inklusi, dan peluang yang sama dalam layanan digital mereka. Kota-kota harus mendefinisikan infrastruktur, layanan, dan agenda teknologi mereka sendiri, melalui standar dan

data layanan digital yang terbuka dan etis untuk memastikan bahwa mereka memenuhi janji ini.

Koalisi ini dan prinsip-prinsipnya adalah awal dari pergerakan global kota-kota yang memperhatikan hak-hak digital dengan serius untuk memastikan bahwa ekonomi digital baru memiliki efek positif pada kehidupan perkotaan. Barcelona, misalnya, yang penduduknya mengalami peningkatan besar dalam harga sewa dan perubahan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir, telah melarang tuan tanah menyewakan properti tanpa lisensi pariwisata di Airbnb. Namun, peraturan ini terbukti sulit ditegakkan karena para pejabat perlu menggulir ribuan listing dan memeriksanya terhadap daftar apartemen pariwisata. Pada tahun 2018, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas data, Dewan Kota Barcelona menandatangani perjanjian dengan Airbnb di mana kota itu diberi akses penuh ke properti yang terdaftar; dengan demikian, memungkinkan pejabat untuk dengan mudah mencocokkan data terhadap basis data apartemen wisata. Keberhasilan penegakan ini menunjukkan bagaimana upaya konservasi dari kota-kota dapat menegaskan kekuatan regulasi untuk memperbaiki dampak negatif perusahaan yang bekerja dalam ekonomi digital. [103]

6.8 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan

Kemajuan teknologi dan inovasi digital memicu potensi yang selama ini kurang berkembang untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya dan aset lokal secara maksimal dan dapat mengatasi tantangan perkotaan yang ekstensif. Teknologi baru juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, tetapi apakah teknologi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan mayoritas akan secara tegas berada di tangan kota-kota dan pemerintah nasional. Keputusan yang diambil oleh kota-kota tentang cara menggunakan dan mengatur pesatnya perubahan teknologi dalam strategi inovasi akan memiliki dampak yang mendalam serta menentukan seberapa besar kita menangkap manfaat urbanisasi untuk memenuhi aspirasi untuk masa depan yang berkelanjutan.

Teknologi dan inovasi baru memberikan peluang bagi kota-kota untuk memenuhi TPB dan menghasilkan manfaat yang besar dari proses urbanisasi

Teknologi dan inovasi baru memberikan peluang bagi kota-kota untuk memenuhi TPB dan menghasilkan manfaat yang besar dari proses urbanisasi. Tantangan serius juga ada, dan alat regulasi dan hukum perlu diterapkan untuk mengarahkan inovasi yang diperlukan dan mengelola teknologi baru yang dapat membahayakan ataupun membantu. Penting juga untuk menegaskan kembali bahwa tidak semua inovasi adalah tentang teknologi. Kota sendiri adalah inovator dan inkubator inovasi.

Kota-kota sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk melibatkan penduduk untuk memastikan kesetaraan dan keadilan termasuk akses ke dan regulasi dan manajemen teknologi baru. Mereka mengembangkan dan menumbuhkan cara-cara baru untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk mengatasi TPB dan NUA serta menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat dan ancaman pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Teknologi menjadi sangat efektif dalam memunculkan manfaat dari urbanisasi berkelanjutan ketika teknologi tersebut mendukung tata kelola kota dan inovasi termasuk dalam operasi, manajemen dan keterlibatan warga negara dan demokrasi.

Kota-kota sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk melibatkan penduduk untuk memastikan kesetaraan dan keadilan termasuk akses ke dan regulasi dan manajemen teknologi baru

Kota telah menjadi mahir dalam berbagi dan mengadaptasi inovasi baru, memperlancar difusi ide-ide bagus dan mempercepat pembelajaran global

Sangat penting bagi kota-kota untuk membangun kapasitas untuk mengelola perubahan yang berpotensi menggemparkan[104] dan menemukan jalur menuju kerja sama nasional dan global ketika menghadapi tantangan ini terutama karena dampak perubahan teknologi dan

iklim seringkali sangat tidak merata, memperlebar ketimpangan tanpa adanya langkah-langkah mitigasi.[105] Untungnya, kota telah menjadi mahir dalam berbagi dan mengadaptasi inovasi baru, memperlancar difusi ide-ide bagus dan mempercepat pembelajaran global. Lebih banyak yang harus dilakukan untuk mendukung tren ini.[106]

Beberapa pelajaran yang muncul dari diskusi dalam bab ini:

- Teknologi dan inovasi baru memberikan peluang bagi kota untuk memenuhi TPB dan menghasilkan manfaat besar dari proses urbanisasi. Kota yang mampu mendorong kegiatan, lingkungan permukiman, dan warga kreatif adalah yang paling mampu berinovasi.
- Kota terbuka yang menyambut dan mengangkat keberagaman dan migran serta menumbuhkan jaringan kreatif dan kolaboratif antara tingkat pemerintahan, universitas, sektor swasta dan warga cenderung membangun sistem inovasi produktif yang meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya.
- Perkembangan dalam maha data, komputasi kuantum, IoT berjaringan, otomatisasi dan kecerdasan buatan berpotensi membentuk kembali hubungan sosial, tenaga kerja, politik dan kehidupan kota dengan cara yang mendalam. Kota harus membangun kapasitas regulasi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan ini dan menegosiasikan apa yang menjadi kepentingan publik, idealnya mengadopsi kerangka kerja yang tegas untuk pengembangan dan hak digital.
- Perusahaan teknologi semakin berfokus pada kota sebagai pasar untuk teknologi kota cerdas. Hasil eksperimen kota cerdas beragam dan sangat buruk ketika upaya ini berbasis teknologi- daripada digerakkan oleh orang-orang. Kota-kota harus fokus pada masalah yang ada di dalam kota, menerapkan teknologi sipil yang dimiliki kota dan mendorong inovasi untuk mengatasi permasalahan sebelum mengejar produk teknologi dari pihak swasta.
- Teknologi tidak dapat menggusur keterlibatan warga dalam urusan lingkungan dan kota. Teknologi menjadi efektif bila dibarengi dengan inovasi kelembagaan dan teknologi tidak berperan sebagai pengganti tata kelola pemerintahan.
- Kota memerlukan data dan kapasitas data juga manfaat dari membangun data yang terbuka dan ekosistem data yang menjadi sumber terbuka. Mengembangkan portal data terbuka, *hackathon* dan tantangan inovasi dan dukungan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan lokal bersama dengan pelatihan ulang tenaga kerja yang diperlukan akan menumbuhkan ekosistem inovasi teknologi yang sehat.
- Masalah eksklusi digital dalam akses ke manfaat teknologi baru terus terjadi, dan berpotensi memperburuk ketimpangan. Sejalan dengan NUA dan TPB, kota harus secara aktif mengembangkan program dan strategi untuk mempromosikan inklusi dalam pengembangan teknologi, penggunaan dan pendidikan.
- Akhirnya, kebutuhan akan inovasi yang dalam makna filosofis Yunani kuno adalah "memperkenalkan perubahan untuk menggantikan kemapanan"[107] mungkin tidak sekritis sekarang karena kami berusaha untuk membangun orde sosial-ekologis baru berdasarkan TPB, NUA dan Persetujuan Paris. Kota adalah tempat utama di mana eksperimen teknologi, sosial, dan politik yang intens sedang berlangsung untuk mengatasi tantangan urbanisasi: ketimpangan, revolusi industri keempat dan krisis iklim. Nilai pekerjaan mereka dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini adalah tidak terukur.

Catatan Akhir

1. OECD, 2012.
2. Glaeser, 2011.
3. Agenda Baru Perkotaan, 2017.
4. Ottaviano and Peri, 2006.
5. Glaeser et al. 1992; Stolarick dan Florida, 2006; Hauge dan Hracs, 2010.
6. Townsend, 2013 p.xiv.
7. Cho, 2017.
8. Sprague, Grijpink, dan Manyika 2014; Broadband Commission for Sustainable Development 2017.
9. Rosenblatt, 2018;
10. Green, 2019.
11. Klopp dan Petretta, 2017.
12. Bliss 2016, Gasparro et al, 2019.
13. Godin, 2019.
14. Laporan Kota-Kota Dunia, 2016.
15. Agenda Perkotaan Baru, 2017.
16. OECD, 2012.
17. Mazzucato, 2015.
18. Ford, 2015.
19. Kaplan, 2015.
20. Green 2019; Noble, 2018.
21. Fursman dan King 2019; Ford, 2015.
22. Marr, 2018.
23. Union of Concerned Scientists 2017.
24. Hindustan Times, 2019
25. Talbot, 2013.
26. Ratti et al, 2006.
27. Bhalla, 2019.
28. Tweya et al, 2016; Olopade 2014.
29. Klopp dan Cavoli, 2019.
30. Williams et al, 2015; Klopp et al, 2015.
31. Campbell et al, 2019.
32. Fried et al, 2020.
33. See DigitalTransport4Africa.
34. Huang et al, 2020.
35. Smart Cities World, 2020.
36. Nature, 2020.
37. World Health Organization, 2020.
38. World Economic Forum, 2020c.
39. Citizen science secara aktif melibatkan warga dalam kegiatan sains atau proyek yang menghasilkan pengetahuan dan pemahaman baru. Warga dapat berperan sebagai kontributor, kolaborator atau pimpinan proyek dan memberikan peran yang berarti dalam pelaksanaan proyek (Robinson et al, 2018).
40. deSouza et al, 2018; Pinder et al, 2019.
41. Bower dan Price 2019.
42. International Telecommunications Union, 2015.
43. Smart Cities Association, 2017.
44. Townsend, 2013.
45. Shwayri, 2013.
46. Petit dan White, 2018; Poon, 2018.
47. Poon, 2018; Petit dan White, 2018.
48. Townsend, 2013 p. 25.
49. Dawson, 2018; Kuecker, 2015.
50. Wainright, 2019.
51. Caprotti, 2014.
52. Sidewalk Toronto Tomorrow, tak bertanggal.
53. Sidewalk Toronto Tomorrow, tak bertanggal.
54. Summers, 2019.
55. Weiditz, 2020.
56. Government of India, 2015 p.5.
57. Lee et al, 2014.
58. Deka, 2019.
59. Sgeuo, 2016.
60. Barros dan Sampaio, 2016.
61. Goldstein dan Dyson, 2013; Mergel, Kleibrink dan Sorvik, 2018.
62. Principles for Digital Development, 2015.
63. ODI, 2018.
64. ODI, 2018.
65. McHugh, 2013.
66. Schweiger et al, 2015.
67. O'Brien, 2017.
68. Hogge, 2016.
69. Reed, 2015 cited in Hogge, 2016.
70. Hogge, 2016.
71. Hern, 2018.
72. Hill et al, 2020 p.14
73. Mergel et al, 2018
74. Choong, 2020.
75. Rebuild by Design, 2013.
76. Royse, 2019.
77. Florida, 2002.
78. UNTAD, 2019.
79. Huawei and Oxford Economics, 2017.
80. Pulkkinen, 2019.
81. Cardon et al, 2013; Neibel, 2018.
82. Florida dan CityLab, 2016.
83. Florida dan Kenney, 1988.
84. Pilling, 2019.
85. PBB, 2015.
86. UNESCO, tak bertanggal.
87. Marceau, 2008.
88. Kuo, 2016.
89. Holder, 2018.
90. Bay Area Economic Council, 2019.
91. Rabelo dan Bernus, 2015.
92. World Economic Forum, 2020a.
93. Sprague et al, 2014; Broadband Commission for Sustainable Development, 2017.
94. Levin dan Downs, 2019.
95. Scassa dan Diebel, 2016.
96. Nyabola, 2018.
97. Helbing et al, 2017; Moore, 2018; Zuboff, 2019.
98. Rosenblat, 2018.
99. Burke, 2017.
100. Schaller, 2018.
101. Toensend, 2013.
102. Noble, 2018.
103. Tamajon et al, 2019.
104. Runde dan Milner, 2019.
105. Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Kerja sama Digital, 2019.
106. Townsend, 2013 p. 13.
107. Godin dan Lucier, 2012

Bab 7

Pemerintah Daerah dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Pemerintahan daerah adalah penggerak utama urbanisasi berkelanjutan. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan keseharian warga, mereka paling akrab dengan kebutuhan dan keinginan warganya. Keberhasilan implementasi dari agenda-agenda pembangunan global dan efektivitas untuk mendayagunakan nilai urbanisasi berkelanjutan bergantung pada fungsi tingkatan pemerintahan ini dalam tata kelola perkotaan yang demokratis, efisien, dan inklusif.

Fakta Singkat

1. Semakin banyak pemerintah daerah yang menerapkan agenda-agenda global untuk memanfaatkan nilai-nilai urbanisasi yang berkelanjutan.
2. Secara global, terdapat kemajuan desentralisasi dengan peran pemerintahan daerah yang meningkat signifikan dalam hal tata kelola sebagai proses desentralisasi yang dilaksanakan di berbagai wilayah.
3. Lingkungan kelembagaan yang lemah, ketidakberdayaan kekuasaan, kurangnya kapasitas dan sumber daya dapat menghalangi aksi lokal dalam perwujudan nilai-nilai urbanisasi.
4. Kota-kota memainkan peran sebagai pusat-pusat eksperimental di dalam implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda Baru Perkotaan (NUA), yang pengalamannya dapat digunakan untuk memperkaya kebijakan pada tingkat nasional.
5. Kota-kota semakin mendorong integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam kebijakan dan rencana strategisnya, yang sekaligus dapat meningkatkan nilai-nilai urbanisasi. Kota-kota juga sedang melembagakan kolaborasinya dengan para pelaku lokal sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Butir Kebijakan

1. Memperkuat daya pelokalan Agenda 2030 dan NUA dari kota-kota dan wilayah melalui pengarusutamaan strategi pelokalan dari semua rencana, program dan anggaran nasional ke tingkat daerah.
2. Pemerintahan Pusat harus memperkuat keterlibatan pemerintahan daerah dalam proses penetapan, implementasi dan monitoring KPN dan TPB.
3. Negara harus menciptakan ekosistem kelembagaan yang mendukung agar pemerintah daerah dapat secara efektif mewujudkan nilai-nilai urbanisasi berkelanjutan.
4. Kerangka tata kelola berjenjang yang kuat adalah penting untuk mendorong kerja sama horizontal dan vertikal antara tingkatan pemerintahan yang berbeda dan antara pemerintahan daerah. Selain itu, tata kelola pemerintahan metropolitan yang kuat dalam merespon realitas ekonomi dan sosial wilayah harus ditingkatkan.
5. Kota-kota harus pada jalur pelokalan agenda global untuk memastikan bahwa proses perencanaan pada semua tingkatan telah ditetapkan dengan sasaran yang realistis.

Pemerintah daerah adalah yang terdepan dalam tata kelola perkotaan dan merupakan pemain utama untuk kemajuan pelaksanaan agenda pembangunan global. Pengakuan ini selain telah termuat di dalam kesepakatan internasional, juga didukung oleh komitmen para pemerintah daerah dalam mewujudkan agenda-agenda tersebut. Pemerintah daerah tidak saja telah mempelajari agenda ini untuk dapat melaksanakannya, akan tetapi juga telah secara aktif terlibat di dalam proses negosiasinya. Memang, NUA secara eksplisit mengakui peran proaktif yang telah dilakukan oleh para pemimpin lokal dan Perkumpulan Dunia untuk Pemerintah Daerah dan Regional (World Assembly of Local and Regional Governments (WALRG)) selama proses Habitat III. Pengumpulan secara simbolis suara politik di Quito difasilitasi oleh Gugus Tugas Global untuk Pemerintah Daerah dan Regional (Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF)) , dibentuk tahun 2013 yang mengumpulkan jejaring global dan regional dari pemerintah daerah dan wilayah untuk berkontribusi pada proses pasca-2015.[1] Keterlibatan mereka telah diperkuat pula oleh upaya-upaya pemerintahan daerah yang sedang berjalan untuk "melokalkan" agenda global ini.[2]

Agenda-agenda global pada hakekatnya saling terkait dan tidak dapat dicapai dalam isolasi: semua aksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan memberikan dampak berbagai tantangan yang saling terkait dan berpengaruh kepada kota-kota dan wilayah

Dari perspektif pemerintahan daerah, agenda global pada hakekatnya saling terkait dan tidak dapat dicapai dalam isolasi: semua aksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan memberikan dampak berbagai tantangan yang saling terkait dan berpengaruh kepada kota-kota dan wilayah. NUA berkontribusi sebagai katalis dan melengkapi TPB, belum lagi juga tidak akan mungkin NUA atau TPB diwujudkan secara utuh dengan tanpa memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam

Persetujuan Paris dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pencegahan Risiko Bencana (Sendai Framework on Disaster Risk Prevention (SFDRP)).

Di samping itu, meskipun pemanfaatan sistem-sistem perkotaan yang potensial untuk memajukan pembangunan berkelanjutan merupakan ukuran yang menentukan dalam mencapai agenda global, realitas kota-kota dewasa ini, seperti ditunjukkan pada bab-bab sebelumnya, sangatlah menantang. Sering, kota-kota dan pemerintah daerahnya dibatasi dalam upaya mereka merespon tantangan-tantangan ini. Dampak kritis pandemi juga sedang membentuk modalitas selanjutnya dari tata kelola pemerintahan daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Implementasi NUA yang berhasil dan efektivitas manfaat urbanisasi berkelanjutan akan bergantung kepada pengembangan tata kelola perkotaan dan kerangka kelembagaan yang memadai, demokratis, efisien, dan inklusif.

Bagian pertama Bab ini menyampaikan contoh-contoh kepemimpinan lokal yang visioner dalam memajukan transformasi *bottom-up* dan gagasan-gagasan untuk menciptakan masa depan kota-kota yang lebih berkelanjutan dan inklusif, termasuk beberapa referensi ringkas tentang respon kota-kota terhadap pandemi COVID-19. Bagian kedua menyampaikan gambaran tantangan-tantangan tata kelola bagi kota-kota dengan fokus khusus tentang evolusi proses desentralisasi, dengan menjelaskan kerangka kelembagaan pemerintah daerah di berbagai wilayah dunia. Bagian ketiga mendiskusikan peran pemerintah daerah di dalam mempertemukan kekuatan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, menciptakan sinergi yang mendorong pengembangan sistem tata kelola perkotaan yang mampu mengarahkan transformasi pola-pola pembangunan perkotaan. Bagian selanjutnya mengidentifikasi instrumen-instrumen berbeda yang ada untuk mencapai tujuan, seperti perencanaan, partisipasi, dan tata kelola berjenjang. Bagian lebih lanjut mendiskusikan keterlibatan pemerintahan daerah di dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) dan dalam mekanisme koordinasi nasional untuk pelaksanaan TPB. Bagian akhir menjelaskan perubahan-perubahan yang diperlukan pemerintahan daerah dan lingkungan kelembagaannya untuk mampu mengungkit nilai-nilai urbanisasi berkelanjutan.

Pembersihan jalan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di perkampungan favela Santa Marta, Rio de Janeiro, Brazil. @Photocarioca/Shutterstock

7.1 Munculnya Alternatif Perkotaan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Kota-kota di berbagai belahan dunia sedang tampil sebagai contoh signifikan dari jalan baru pembangunan perkotaan, memperkaya kekuatan urbanisasi yang transformatif, dan mempertajam keterkaitan perkotaan-perdesaan.[3] Pemimpin-pemimpin lokal yang penuh semangat, didukung oleh jejaringnya, mendorong perubahan sosial, merangkul inovasi dan memimpin solusi-solusi menghadapi tantangan global. Tindakannya telah memberikan dampak langsung dan tidak langsung pada kehidupan warganya, sekaligus dapat memenuhi banyak kebutuhan kemanusiaan. Kota-kota dari berbagai ukuran dan organisasinya, seperti telah disebutkan di bagian awal, memimpin "pelokalan" dari agenda global (Kotak 7.1)

Pandemi COVID-19 telah mendorong peran kritis pemerintahan daerah di garis-depan dalam merespon, pemulihan, dan pembangunan kembali akibat krisis

Pandemi COVID-19 telah mendorong peran kritis pemerintahan daerah di garis-depan dalam merespon, pemulihan, dan pembangunan kembali akibat krisis.[4] Mereka telah berada di garis terdepan dalam melakukan penjabaran dan penyelarasan dampak krisis sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk membantu warganya dengan secara cepat memberikan respon, berfokus terutama pada keterkaitan antara akses kepada pelayanan publik, kemiskinan, inklusi sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Ketika kota-kota berinovasi dan mengembangkan kebijakan baru untuk merespon krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, UN-Habitat berkolaborasi dengan UCLG dan Metropolis membentuk program Kota untuk Kesehatan Global (Cities for Global Health), sebuah platform pertukaran pengetahuan dan basis data untuk para wali kota dan pemimpin daerah, di mana kota-kota di dunia dapat berbagi protokol, rencana, dan gagasan.[5]

7.1.1 Aksi Lingkungan

Sebagian besar kota berada di garis terdepan dalam aksi perubahan iklim dan strategi berketahanan. Pada 2019, lebih dari 10.000 kota dari 139 negara berkomitmen untuk melakukan aksi perubahan iklim yang terukur melalui Perjanjian Global Wali Kota untuk Iklim dan Energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) (Kotak 7.2). Banyak kota mengembangkan sistem energi terbarukan, divestasi bahan bakar fosil, mengembangkan sistem mobilitas publik yang lebih inklusif melalui sistem transportasi multimoda, mempromosikan mobilitas aktif dan memasukkan kawasan-kawasan terpencil ke dalam kesatuan ekonomi formal (*Metrocable* Medellin). Pada 2018, Guangzhou, Tiongkok, telah melakukan elektrifikasi seluruh armada 11.220 bis dan memasang 4.000 stasiun pengisian.[6] Banyak kota juga melakukan tindakan untuk mencapai bebas sampah, mengurangi timbulan sampah, berpindah dari praktik tempat pembuangan akhir (TPA) dan insinerator menjadi sampah untuk energi dan mengadopsi kebijakan bebas plastik. Misalnya, pada tahun 2016 pemerintahan Kota metro Accra di Ghana mengintegrasikan pengumpul sampah informal ke dalam sistem manajemen limbah kota dan telah meningkatkan pengumpulan sampah dari 28 menjadi 48 persen dalam dua tahun.[7]

Sejumlah kota mengembangkan alat untuk memantau polusi udara dan mengadopsi rencana aksi peningkatan kualitas udara dengan kebijakan seperti *Ultra Low Emission Zone* London.[8] Pada waktu yang bersamaan, kota-kota lainnya juga sedang berupaya untuk memperluas ruang terbuka hijau dan publik[9] untuk meningkatkan tutupan pohon perkotaannya, seperti Edmonton, Kanada, yang telah mengembangkan sebuah Rencana Pengelolaan Hutan Perkotaan yang ambisius. Beberapa kota di wilayah Selatan bergerak mempromosikan penggunaan gas memasak modern dan energi terbarukan untuk mengurangi polusi udara di dalam dan luar ruang, seperti contoh Rencana Energi Iklim Wilayah Dakar untuk mengurangi polusi di Senegal.

Kotak 7.1: Pelokalan agenda global pembangunan berkelanjutan

Sejak adopsi TPB 2030, gerakan pemerintahan daerah untuk pelokalan TPB telah secara progresif meluas ke seluruh belahan dunia, walaupun dengan kecepatan yang berbeda di dalam dan antara wilayah. Kemajuan tersebut sangat dapat disimak di negara-negara Eropa Utara dan Barat.

Di Amerika Utara, sejumlah kota dan negara bagian dengan semangat pelopor yang tinggi menunjukkan komitmen mereka. Contohnya, Kota New York dan Los Angeles menyiapkan program Tinjauan Lokal Sukarela (Voluntary Local Reviews (VLRs)) untuk memonitor kemajuan mereka dalam memenuhi TPB. Kemajuan juga beragam di Amerika Latin, digerakkan utamanya oleh asosiasi pemerintahan lokal di Brazil, Kosta Rika, Kolombia, Republik Dominica, Republik Equador, dan oleh pemerintahan wilayah dan kota-kota besar di Argentina dan Mexico. Di Brazil, misalnya tahun 2018 Sao Paolo mengadopsi Agenda 2030 sebagai sebuah kerangka kerja bagi kebijakan publik. Kota-kota Barcarena, Niteroi dan Santana de Parnaiba telah menyajikan hasil dan manfaat dari pelokalan TPB melalui VLR.

Di Afrika, upaya signifikan telah dilakukan untuk pengembangan rencana dan strategi lokal yang sejalan dengan TPB, seperti di Benin, Kenya, Rwanda, Afrika Selatan dan Togo. Di Benin dan Kenya, asosiasi pemerintah daerah mengembangkan beberapa untuk VNR negerinya. Di Rwanda, Asosiasi Otoritas Pemerintah Daerah Rwanda (Rwanda Association of Local Government Authorities (RALGA)), bermitra dengan pemerintah nasional dan mitra pembangunannya, memperkuat kapasitas pemerintahan lokal agar dapat efektif mengadaptasi TPB ke dalam konteks lokal. Demikian juga, Asosiasi Pemerintah Daerah Afrika Selatan (South African Local Government Association (SALGA)) mendorong harmonisasi rencana lokal dengan strategi nasional dan TPB.

Di wilayah Asia-Pasifik, para pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dan rencananya dengan TPB (Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan Indonesia, diikuti oleh Australia, Filipina, Selandia Baru dan beberapa negara bagian India). Sementara itu, kemajuan di negara-negara Eurasia, Timur Tengah dan Asia Barat baru tahap awal (kecuali Turki dan Federasi Rusia). Di Filipina, Liga Persatuan Kota (League of Cities (LCP)) dan Liga Persatuan Kotamadya (League of Municipalities (LMP)) yang memimpin dalam pelokalan TPB.

Tinjauan Lokal Sukarela (VLR)

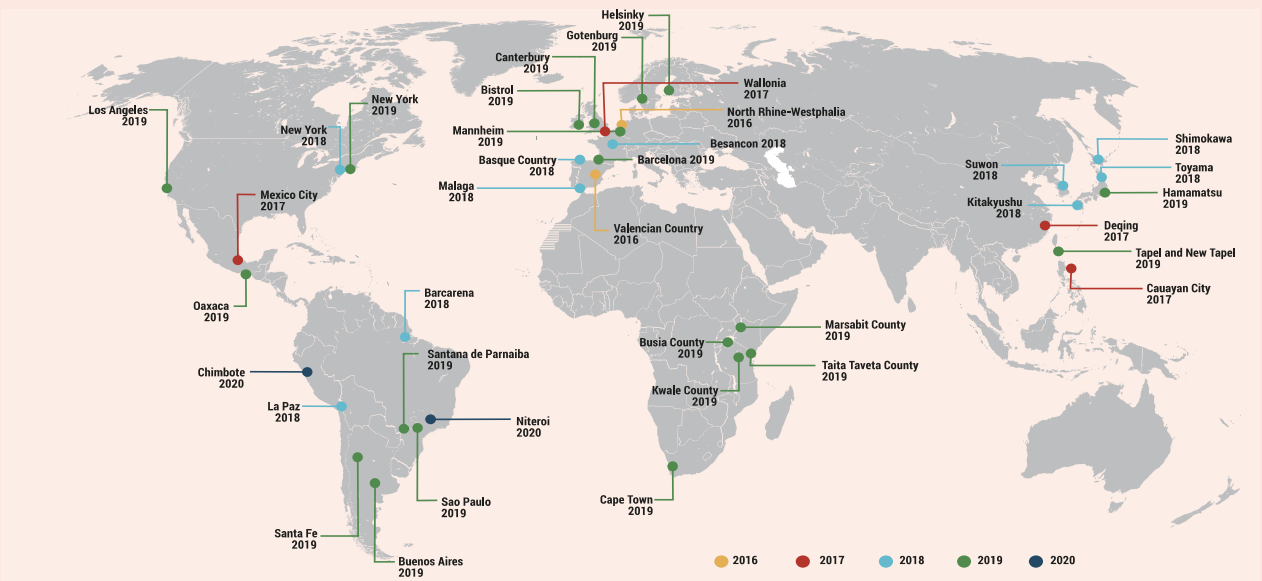

Sumber: GTF dan UCLG, 2020, GTF dan UCLG, 2019; GTF dan UCLG, 2018; GTF dan UCLG, 2017; UCLG 2019.

Kotak 7.2: Perjanjian Global para Wali Kota untuk Iklim dan Energi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM))

Perjanjian Global Wali Kota (Global Covenant of Mayors) mengumpulkan lebih dari 10,200 kota dari 139 negara di seluruh benua untuk berkomitmen mengurangi, sampai 2030, 24 miliar ton emisi CO_2 sejalan dengan TPB 13 dan Persetujuan Paris. Perjanjian ini didukung oleh aliansi global dari jaringan pemerintah daerah--C40, Climate Alliance, Eurocities, Council of European Municipalities and Regions, Energy Cities, Local Governements for Sustainability (ICLEI) dan UCLG--dan lembaga-lembaga internasional--European Commission, European Committee of Regions, UN-Habitat, Bloomberg Philanthropies dan European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment.

Anggota GCoM memiliki komitmen untuk menyiapkan pendataan emisi; menyampaikan rencana tindak energi berkelanjutan; melaksanakan pelaporan evaluasi secara reguler, memantau dan verifikasi; dan membagi pengalaman serta pengetahuan. Jaringan global telah juga mempromosikan aksi-aksi perubahan iklim kolaboratif lainnya, seperti kemitraan ICLEI dengan Carbon Disclosure Project (CDP) untuk mengembangkan registrasi iklim karbon yang mendukung pelaporan aksi perubahan iklim daerah. Selain itu, sejumlah jejaring kepemimpinan iklim telah berkembang pada tingkatan wilayah dan negara (misalnya Climate Mayors di AS, Climate Action di Eropa).

Sumber: https://www.globalcovenantofmayors.org/our-cities/;https://carbonn.org.

Dihadapkan dengan ancaman bencana yang semakin meningkat, kota-kota secara progresif mengarusutamakan program-program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko ke dalam strategi perencanaan kota dan wilayahnya. Bermitra dengan UN-Habitat dan organisasi internasional lainnya (seperti UN Office for Disaster Risk Reduction dan Global Resilient Cities Network)[10], banyak pemerintah daerah merancang dan melaksanakan strategi berketahanan yang komprehensif dan inovatif, mendorong penggunaan teknologi baru, mempromosikan keterlibatan komunitas dan penduduk yang paling rentan melalui proses perencanaan komprehensif dan pengarusutamaan ketahanan ke dalam rencana penataan kawasan. Kota-kota dengan berbagai ukuran juga melakukan penilaian saling ketergantungan sektoralnya untuk mengidentifikasi bagian-bagian kritis dari infrastrukturnya dan memberikan masukan kepada proses perencanaan, serta melibatkan komunitas di dalam pengembangan strategi berketahanan.

7.1.2 Prakarsa Pembangunan Ekonomi Lokal

Pemerintah daerah mengemban tanggung jawab yang besar dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, seperti disebutkan dalam Bab 3. Dalam merespon peningkatan kesenjangan akibat pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan, kota-kota mendukung model ekonomi alternatif dalam mengembangkan pekerjaan yang layak, sejalan dengan TPB 8 dan NUA.[11] Mereka membangun jejaring khusus untuk mempromosikan ekonomi yang berbudaya, kreatif, hijau, sirkular, kolaboratif, dan sosial dengan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah.[12] Contoh prakarsa ekonomi sirkular, dari Cape Town, program simbiosis industri Afrika Selatan atau Circular Gothenburg di Swedia sampai dengan berbagai prakarsa di Geneva (Swiss), Maribor (Slovenia), Phoenix (AS) atau Quezon (Filipina), yang bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya mengurangi dan mendaur-ulang sampah melalui kegiatan penggunaan kembali dan perbaikan barang.[13] Di saat yang bersamaan, banyak kota di negara-negara berkembang sedang mengusahakan keterpaduan sektor informal (seperti pengumpul sampah, transportasi informal dan PKL) ke dalam ekonomi formal melalui upaya meningkatkan kondisi tenaga kerja dan penggunaan ruang publik, seperti contoh di Belo Horizone (Brazil), Dhaka (Bangladesh) dan Manila (Filipina). Di Qalyubeya Governorate (Mesir), misalnya, sistem pengelolaan limbah padat berbasis komunitas yang terpadu dapat meningkatkan koleksi sampah serta meningkatkan kondisi kerja dari para tenaga kerja informal.[14]

Kota mendukung model ekonomi alternatif dengan menciptakan lapangan kerja yang layak yang sejalan dengan TPB 8 dan NUA

Seperti disebutkan pada Bab 6, pemerintah kota telah menganggap penting peran inovasi teknologi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan kerja dan tata kelola perkotaan, yang telah mendorong pertumbuhan solusi-solusi "kota cerdas".[15] Banyak kota, dengan berbagai ukuran dan wilayah, menampilkan penggunaan teknologi baru untuk manajemen dan pembangunan perkotaan. Contoh-contoh hal ini termasuk penyebaran teknologi pengawasan di Lahore untuk mengelola keselamatan publik, dan penggunaan data bergerak secara inovatif untuk merencanakan rute transportasi publik di Seoul.[16] Jejaring seperti Koalisi Kota untuk Hak Digital juga hadir untuk menyelesaikan kesenjangan digital dan memberikan bimbingan untuk penerapan maha data bagi pelayanan publik.[17]

Selain tentang kesenjangan digital, kesenjangan sosio-ekonomi semakin meluas baik di dalam maupun di antara kota-kota (misalnya antara wilayah metropolitan dan kota-kota pinggiran dan kota-kota yang menyusut), dan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk mengurangi kesenjangan sejalan dengan TPB 10 dan NUA, pemerintah daerah mengembangkan kerja sama antar-pemerintahan kotanya dan merintis kemitraan baru untuk mendorong spesialisasi cerdas yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri-urban di pinggiran perkotaan.[18] Komponen kunci dari kemitraan ini biasanya termasuk strategi pembangunan, seperti eko-wisata, promosi sistem makanan lokal dan pertanian perkotaan, penyediaan akses kepada pelayanan sosial untuk wilayah peri-urban dan perdesaan, serta perlindungan sumber daya lingkungan yang kritis bagi sistem perkotaan (misalnya manajemen batas air, konservasi perairan, perlindungan pesisir dan reforestasi). Kemitraan ini terdapat di antara berbagai jejaring nasional dan internasional.[19]

7.1.3 Kebijakan Inklusif

Meskipun kemiskinan ekstrim telah berkurang beberapa tahun terakhir ini, nyatanya kemiskinan perkotaan masih bertahan dan bahkan memburuk di sebagian kota dan wilayah, dan pandemi COVID-19 semakin mempertajam isu tersebut. Dengan pertimbangan sifat multidimensi dari kemiskinan di perkotaan, pemerintah daerah mendorong kebijakan sosial inklusif untuk mendukung penduduk yang paling rentan dalam mengakses pelayanan publik yang mendasar, sebagai komitmen dasar pemerintah daerah terhadap Agenda 2030 dan NUA.[20] Meskipun akses air bersih perpipaan telah meningkat secara global, tantangan masih dihadapi di banyak kota, khususnya di daerah Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Di dalam menghadapi meningkatnya masalah air, banyak pemerintah kota mengembangkan strategi manajemen air yang baru yang mengacu kepada pendekatan terpadu yang sesuai dengan agenda global (misalnya Brisbane, Australia; Cape Town, Afrika Selatan; dan Quito, Equador), sementara kota lainnya mengembangkan strategi manajemen air untuk mengurangi bencana banjir (seperti Jakarta, Indonesia) dan berinovasi untuk mengatasi masalah sanitasi (seperti Rajkot, India).

Informalitas dan berkembangnya permukiman informal merupakan dua dari banyak isu penting terkait dengan kemiskinan perkotaan, selain karakteristik menonjol dari permukiman perkotaan, khususnya di negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Pemerintah daerah melaksanakan program perbaikan secara bertahap dengan partisipasi masyarakat sipil, dan meninjau kembali prosedur pemberian hak tanah. Beberapa pemerintah daerah seperti Rosario (Argentina), Nairobi (Kenya) atau Harare (Zimbabwe), telah mengembangkan skema inklusif, partisipatif untuk kegiatan renovasi atau perbaikan lingkungan. Di Nairobi, misalnya, pendekatan komprehensif perbaikan permukiman kumuh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dilakukan di permukiman kumuh Mukuru melalui pengembangan rencana pembangunan terpadu yang inklusif. Upaya ini menindaklanjuti deklarasi tentang daerah kumuh sebagai "Kawasan Perencanaan Khusus" oleh Kota Nairobi pada 2017.[21] Meskipun respon pemerintah daerah untuk permukiman informal cenderung meningkat melalui kegiatan pemugaran, nyatanya juga masih terdapat kasus penggusuran permukiman. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memindahkan warga permukiman, dengan isu kompleks yang memerlukan terobosan inovasi kebijakan untuk menjamin penghormatan kepada hak asasi manusia.

Kotak 7.3: Prakarsa kota-kota untuk perumahan layak huni

Krisis perumahan global membuat beberapa kota mendorong HLPF PBB 2018 dengan janji yang pasti tentang hak atas perumahan layak huni dalam bentuk deklarasi Kota-kota untuk Perumahan Layak Huni.[22] Aksi ini dibangun setelah prakarsa "Make the Shift" yang dipromosikan oleh Rapporteur Khusus PBB tentang perumahan layak huni.

Melalui deklarasi ini, semakin banyak sejumlah kota yang berkomitmen mempromosikan strategi baru perumahan untuk mengatasi hambatan-hambatan realisasi hak atas perumahan yang layak huni, seperti keterbatasan pendanaan nasional, deregulasi pasar dan komodifikasi perumahan.

Deklarasi menuntut tambahan kekuatan untuk dapat lebih baik mengatur pasar real estat, tambahan dana untuk meningkatkan persediaan perumahan umum, tambahan alat untuk memproduksi bersama perumahan layak huni antara sektor publik dan swasta, perencanaan kota yang dapat menggabungkan perumahan inklusif dengan lingkungan yang berkelanjutan, serta adopsi kerjasama pemerintah kota dalam strategi perumahan dan permukiman.

Sumber: Kota-kota untuk Perumahan Layak Huni, 2018 (https://citiesforhousing.org/).

Bangunan rumah susun sederhana di Kualalumpur, Malaysia. @Hafiz Johari/Shutterstock

Pemerintah daerah mendorong kebijakan sosial inklusif untuk mendukung penduduk yang paling rentan dalam mengakses pelayanan publik yang mendasar, sebagai komitmen dasar pemerintah daerah terhadap Agenda 2030 dan NUA

Kota juga membangun aliansi para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi akses perumahan, seperti mendorong perumahan kooperatif di Montevideo (Uruguay) dan Bologna (Italia), dan prakarsa perserikatan lahan bersama komunitas di Brussels (Belgia) dan Burlington (Amerika)

Dalam kerangka krisis perumahan global, hak atas perumahan terjangkau dan layak huni semakin menonjol di dalam agenda pembangunan lokal dan global. Para pemimpin kota-kota terbesar, di negara maju dan negara berkembang, meluncurkan prakarsa global pada 2018 untuk memajukan hak warganya atas perumahan, dalam upaya menghadapi pengaruh komodifikasi perumahan, deregulasi pasar dan melangitnya harga tanah dan rumah (Kotak 7.3). Namun, aksi yang berasal dari berbagai wilayah tersebut masih jauh dari cakupan yang dibutuhkan, dengan memperhatikan besarnya krisis perumahan. Kota juga membangun aliansi lintas pemangku kepentingan untuk memfasilitasi akses perumahan, seperti mendorong perumahan kooperatif di Montevido (Uruguay) dan Bologna (Italia) dan prakarsa lahan bersama komunitas di Brussels (Belgia) dan Burlington (AS).

Krisis COVID-19 telah menyoroti dimensi-dimensi kritis dari masalah ketidaksetaraan dan peran pemerintah kota dalam memastikan bantuan sosial serta akses atas makanan dan hunian bagi penduduk rentan, seperti para lansia, difabel dan tuna wisma. Selama karantina wilayah, banyak pemerintah setempat mengambil tindakan khusus untuk tetap menjaga pelayanan publik yang vital pada tingkatan yang memadai dan menjamin tersedianya mata pencaharian pekerja formal dan informal meskipun terdapat pembatasan yang ketat, untuk mencegah krisis kesehatan dari pemburukan akibat kerentanan. Kota-kota semakin menghargai peran komunitas yang tinggal

di permukiman informal, dan ekonomi informal, dalam proses pemulihan karena pandemi. Kota-kota seperti Subang Jaya (Malaysia), Cali (Kolombia) dan Freetown (Sierra Leone) bekerja bersama jejaring informal terdiri atas banyak komunitas untuk menaikkan kesadaran tentang pandemi dan memasukkan peran komunitas dalam kegiatan tahap pemulihan.

7.1.4 Penguatan Pendekatan Berbasis Hak Asasi

Sejalan dengan semakin meningkatnya perwakilan perempuan di pemerintahan, agenda lokal semakin memiliki kesadaran tentang diskriminasi berbasis gender. Pemerintah daerah berupaya mengarusutamakan pendekatan khusus gender untuk manajemen perkotaan dan pengambilan keputusan melalui program-program yang tujuannya termasuk untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, mengakui peran perempuan dalam ekonomi informal dan mengembangkan inisiatif khusus untuk mempromosikan kesetaraan bagi perempuan yang sejalan dengan TPB 5 dan NUA.[23] Banyak pemerintah kota mengambil langkah preventif serta menyusun langkah-langkah untuk melawan kekerasan domestik dan pelecehan di ruang publik, seperti taman atau transportasi umum.[24]

Menindaklanjuti prinsip-prinsip TPB dan NUA, pemerintah daerah juga memilih pengarusutamaan pendekatan berbasis hak asasi ke dalam strategi pembangunannya untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi dan mendukung keragaman serta inklusi sosial

Menindaklanjuti prinsip-prinsip TPB dan NUA, pemerintah daerah juga memilih pengarusutamaan pendekatan berbasis hak asasi ke dalam strategi pembangunannya untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi dan mendukung keragaman serta inklusi sosial (misalnya kemiskinan ekstrim, pemuda, minoritas, difabel, dan pendatang). Dalam kerangka persiapan Habitat III yang lalu, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil telah mengembangkan prakarsa bersama untuk mendukung pendekatan "hak atas kota", dan telah berhasil memasukkannya ke dalam dokumen. Prakarsa ini mengakui "hak semua warga .... untuk tinggal, menggunakan, menempati, menghasilkan, mengatur dan menikmati kota, lingkungan, dan permukiman yang adil, inklusif, aman, dan berkelanjutan, sebagai hal utama bagi kehidupan yang layak."[25] Lebih dari 400 wali kota dari semua wilayah menandatangani *Piagam Global – Agenda Hak Asasi Manusia di Kota* (*Global Charter-Agenda for Human Rights in the City*) dan melaksanakan kampanye untuk menggugah kesadaran dan program pendidikan, serta membentuk komisi HAM, ombudsman, atau *mediateurs*.[26] Jejaring ini telah mengambil peran aktif di dalam proses yang dibuka oleh UN Human Rights Council (UNHRC) untuk mengakui peran pemerintah daerah dalam promosi dan perlindungan HAM.[27]

Kota-kota juga berupaya melindungi kaum migran di saat lebih banyak warga dunia yang harus mengungsi dibanding ketika Perang Dunia ke II

Kota-kota juga berupaya melindungi kaum migran di saat lebih banyak warga dunia yang harus mengungsi dibanding ketika Perang Dunia ke II. Lebih dari 500 wilayah di AS menggambarkan diri mereka sebagai "kota suaka." Lebih dari 80 kota di Eropa membentuk jaringan Kota Solidaritas untuk menampung pengungsi dan pencari suaka. Pada Desember 2018, Deklarasi Wali kota Marrakeseh telah diadopsi pada Forum Wali kota tentang Pembangunan, Migrasi, dan Mobilitas Manusia ke-5, yang mengakui peran pemerintahan kota dalam implementasi, tindak lanjut, dan peninjauan kesepakatan Global Compact for Safe,

Pemerintah kota juga mengambil langkah-langkah promosi budaya dan menghargai keragaman melalui kebijakan daerah (misalnya Belen, Kosta Rika), serta menempatkan budaya sebagai komponen prioritas dalam rencana dan strategi kota (misalnya Bilbao di Spanyol dan Canoas di Brazil).[28] Lebih dari 500 pemerintah daerah telah mengadopsi Agenda 21 tentang budaya yang mengangkat hak dan kebijakan budaya sebagai salah satu pilar strategi keberlanjutan dalam mengatasi keberagaman dan inklusivitas.[29]

7.2 Evolusi Kerangka Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Relevansinya dalam Memanfaatkan Potensi Urbanisasi Berkelanjutan

Meskipun terdapat contoh-contoh yang cukup membesarkan harapan, masih terdapat jurang antara pemerintah daerah yang lebih dinamis dan kota-kota lainnya yang rapuh dan kurang berkembang secara ekonomi, yang kemampuannya untuk menghadapi tantangan perkotaan terkendala oleh kapasitas lokal yang lemah, sumber daya minimal, kerangka kelembagaan nasional yang tidak memadai, serta pengaruh krisis nasional atau internasional.

Transformasi lanskap perkotaan, dengan ekspansi tanpa batas dari kawasan metropolitan dan wilayah perkotaan, serta peran kota-kota menengah yang meningkat, memiliki tantangan inkremental kepada tata kelola pemerintahan daerah dan nasional. Pada waktu yang bersamaan, globalisasi telah membentuk kembali ekonomi politik dari tata kelola perkotaan. Selain karena telah menciptakan berbagai peluang baru dan perubahan peran bagi kota-kota dan wilayah, globalisasi juga telah mendorong finansialisasi aset perkotaan dan komodifikasi pelayanan publik. Kecenderungan ini telah mempengaruhi sistem perkotaan dan meningkatkan kesenjangan sosial dan wilayah serta tantangan lingkungan. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap sistem politik dan kelembagaan publik harus juga dipertimbangkan sebagai tantangan kebijakan dalam menghadapi tata kelola perkotaan masa depan.

Di dalam konteks global, pengembangan kelembagaan nasional di era desentralisasi, evolusi legislasi perkotaan, dan ekonomi politik dari berbagai reformasi menentukan langkah-langkah aksi pemerintah daerah dalam berkontribusi meningkatkan peluang hasil urbanisasi berkelanjutan.

7.2.1 Tren Desentralisasi Global Berdasarkan Wilayah

Sejak 1980, dan khususnya sepanjang dekade terakhir, reformasi hukum, fiskal, dan kerangka administrasi pemerintah daerah telah menjadi perhatian dalam agenda kebijakan nasional. Mayoritas negara telah melaksanakan proses desentralisasi yang menghasilkan pemerintah daerah dengan kewenangan manajemen kota dan wilayah, termasuk penyediaan pelayanan dasar yang merespon kebutuhan komunitas lokal. Di semua wilayah, pemerintahan daerah berperan penting dalam tata kelola perkotaan. Rata-rata, mereka mewakili 24,1 persen pembelanjaan administrasi umum, 25,7 persen pendapatan publik dan 36,6 persen investasi publik (Gambar 7.1).[30]

Gambar 7.1: Rata-rata pembelanjaan, pendapatan dan investasi langsung pemerintah daerah sebagai bagian dari pembelanjaan, pendapatan dan investasi berdasarkan wilayah, 2016

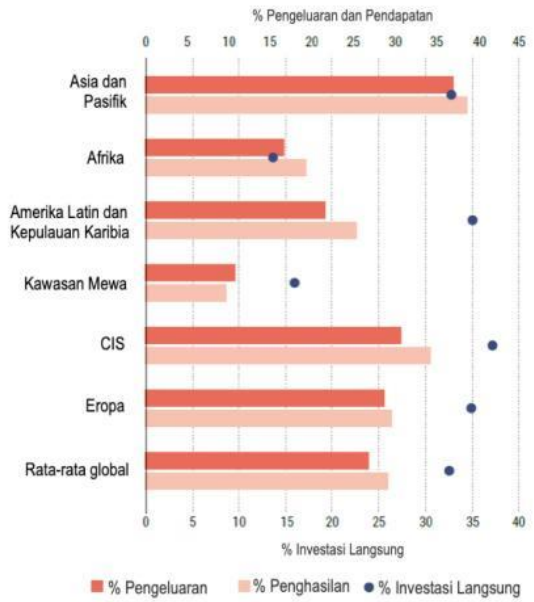

Sumber: Berdasarkan basis data Subnational Government Finance and Investment (SNG-WOFI) (http://www.sng-wofi.org/data/).

Sebagian kawasan metropolitan telah semakin mendukung upaya mengatasi tantangan kawasan perkotaan yang kompleks, beragam, dan luas mencakup banyak yurisdiksi. Secara global, perundang-undangan perkotaan masih tetap segmental dan kurang baik diartikulasikan ke dalam realitas permukiman perkotaan yang semakin berkembang dan realitas pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya ketika memiliki pendanaan yang terbatas.[31] Analisis tentang reformasi ini, dan khususnya tentang desentralisasi, menunjukkan bahwa implementasinya telah begitu rumit dan

bervariasi di seluruh wilayah yang berdampak langsung kepada kemampuan untuk mencapai agenda global.

Secara global, perundang-undangan perkotaan masih tetap tersegmentasi dan kurang dapat mengartikulasi dengan baik realita permukiman perkotaan yang terus berubah serta realita penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika memiliki pendanaan yang terbatas

Sebagian besar negara Eropa dan Amerika Utara, misalnya, telah memiliki tradisi yang panjang dalam praktik tata kelola sendiri di daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam manajemen perkotaan, penyediaan pelayanan publik dan infrastruktur dasar (TPB 11). Mereka juga memastikan pengembangan ekonomi lokal (TPB 8) dan mempengaruhi kohesi kewilayahan, serta perlindungan ekosistem (TPB 10 dan TPB 15). Karena banyak negara Eropa (khususnya Eropa Utara dan Barat) sangat terdesentralisasi, pemerintah daerah secara umumnya menyumbang pendapatan dan pembelanjaan publik secara signifikan (rata-rata 25,7 persen, tetapi dapat mencapai 52 persen di negara Utara) serta memiliki peran penting dalam investasi publik (40 persen).[32]

Di Amerika Latin, desentralisasi telah begitu maju sejak 1980. Pemerintah daerah rata-rata mewakili 19 persen pembelanjaan publik, 23 persen pendapatan, dan investasi publik (39 persen, walaupun bervariasi antara negara dan kota-kota). Namun, di banyak negara, desentralisasi pernah mengalami periode stagnan, kemunduran, serta evolusi yang lamban. Secara keseluruhan, pemerintah daerah telah sangat berperan dalam peningkatan cakupan pelayanan dasar, secara langsung atau melalui kemitraan dengan tingkat pemerintahan lainnya, sektor swasta dan komunitas. Meskipun kesenjangan di antara kota-kota telah berkurang secara global selama dekade yang lalu, kesenjangan ini masih saja terjadi atau bahkan memburuk di beberapa kota di suatu wilayah, yang berpengaruh kepada akses dan kualitas barang dan pelayanan publik bagi rumah tangga miskin.[33]

Di kawasan Asia Pasifik, urbanisasi telah membantu jutaan jiwa lolos dari kemiskinan, dan cepatnya urbanisasi telah menempatkan kawasan ini di garis depan inovasi perkotaan. Proses pengembangan perkotaan telah maju selama tiga dekade terakhir paralel dengan proses desentralisasi. Pada 2016, pemerintah daerah dan wilayah mewakili kira-kira 33 persen dan 34 persen untuk pembelanjaan dan pendapatan, serta 37 persen untuk investasi publik, tetapi dengan perbedaan besar sesuai dengan tingkatan pembangunan ekonomi masing-masing negara. Negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang tinggi memiliki korelasi dengan adanya lingkungan kelembagaan yang lebih nyaman bagi pemerintah daerah, serta kualitas pelayanan publik di daerah yang lebih baik dan manfaat kesejahteraan. Di negara berkembang, seperti Indonesia dan Filipina, proses desentralisasi terjadi lebih belakangan tapi relatif maju. Di Tiongkok, dengan memanfaatkan otonomi dan dukungan nasional, pemerintah daerah telah begitu mendorong pengembangan perkotaan dan berhasil menyediakan infrastruktur dan pelayanan dasar. Kawasan lainnya, reformasi pemerintahan daerah masih pada tahap awal, dan di banyak kasus, administrasi daerah lebih tepat digambarkan sebagai "dekonsentrasi" ketimbang desentralisasi. Kemajuan yang dibuat dalam hal dukungan terhadap akses pelayanan publik begitu mengesankan, meskipun untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah masih jauh tertinggal.[34]

Gelombang desentralisasi secara beruntun telah berkembang di Afrika sejak 1990, walau tingkat desentralisasi bervariasi antara/di dalam wilayah. Tahun 2019, 17 negara telah menandatangani *Piagam Afrika 2014 terkait Nilai dan Prinsip Desentralisasi, Pemerintahan Daerah, dan Pembangunan Daerah* (*African Charter 2014 on Values and Principles of Decentralization, Local Governance and Local Development*), akan tetapi masih terdapat jurang yang besar antara desentralisasi secara *de jure* dan realitas di lapangan. Partisipasi pemerintah daerah di Afrika pada anggaran dan belanja daerah masih tergolong rendah di semua wilayah. Mereka mewakili rata-rata 15 persen dan 17 persen untuk pembelanjaan dan pendapatan publik, dan hanya 15,5 persen untuk investasi publik. Tahun 2018 penilaian UCLG Afrika

menunjukkan hanya 14 negara yang memiliki "lingkungan kelembagaan yang mendukung" atau lingkungan yang "agak mendukung" untuk pemerintahan daerahnya. Sementara itu, 33 negara masih memerlukan reformasi signifikan untuk mencapai lingkungan yang nyaman untuk pemerintahan lokalnya, atau menunjukkan kebijakan reformasi yang stagnan atau menurun.[35] Sebagian besar kota di Afrika masih memiliki defisit serius untuk akses pelayanan publik yang berkualitas, dengan akses masih tetap terbatas pada permukiman informal.[36]

Sejak berakhirnya Uni Soviet, Persemakmuran Negara-negara Independen (Commonwealth of Independent States (CIS)) melakukan beberapa reformasi yang dapat memperkuat atau mengurangi otonomi pemerintahan daerah, yang mengarah kepada kesenjangan spasial yang semakin lebar. Kota-kota menengah menghadapi tantangan yang besar, termasuk fenomena "kota-kota yang menyusut" (*shrinking cities*), karena mereka kurang memiliki kendali kepada pengembangan perkotaan yang digerakkan pasar. Pemerintah daerah telah berupaya dalam meningkatkan pelayanan publik yang sempat menurun pada tahun 1990an. Tingkat desentralisasi bervariasi, mulai dari sistem yang sangat tersentralisasi di negara-negara Asia Tengah hingga pemerintah daerah yang relatif otonom di negara-negara Kaukasus di tingkat kota dan sistem dua tingkat pemerintah setempat yang mandiri di Rusia. Pemerintahan provinsi di wilayah ini mempunyai anggaran dan kapasitas investasi yang cukup besar (rata-rata 41,9 persen investasi publik). Namun, dalam praktiknya, mereka masih memiliki kendali yang terbatas atas kebijakan pembelanjaannya.[37]

Negara-negara di Timur Tengah dan Asia Barat juga dicirikan oleh sentralisasi yang tinggi, kecuali Turki dan Palestina (di mana proporsi pemerintah daerah sebesar 10,1 persen dan 10,8 persen untuk total pembelanjaan dan pendapatan, serta 18 persen untuk investasi publik).[38]

7.2.2 Desentralisasi Fiskal yang Tidak Merata dan Evolusi Model Penyediaan Layanan

Meskipun umumnya terdapat kemajuan global dari desentralisasi, namun tidak merata, pembiayaan masih menjadi dimensi yang kemajuannya terbatas, dan telah menimbulkan beberapa paradoks. Pertama, kota-kota menyumbangkan sekitar 80 persen dari PDB dunia, tetapi banyak kota yang tumbuh cepat telah gagal memetik manfaat yang diciptakannya, sehingga terus menghadapi keterbatasan anggaran dan menambah defisit infrastruktur.[39] Kedua, paradoks berasal dari tidak tersambungnya antara sumber pendanaan potensial "yang tersedia" di tingkat global dengan meningkatnya investasi yang sedang dibuat di kota-kota global, walaupun masih ada keterbatasan pembiayaan untuk menjangkau kota-kota dan wilayah yang paling membutuhkan.

Kota-kota menyumbangkan sekitar 80 persen dari PDB dunia, tetapi banyak kota yang tumbuh cepat telah gagal memetik manfaat yang diciptakannya, sehingga terus menghadapi keterbatasan anggaran dan defisit infrastruktur

Di seluruh wilayah, terdapat ketidakcocokan antara peningkatan tanggung jawab yang dialihkan kepada daerah dengan pendapatan yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah. Pemberdayaan keuangan yang efektif dari pemerintahan daerah untuk pencapaian TPB dan NUA adalah komitmen dalam merespon paragraf 34 dari Agenda Aksi Addis Ababa (AAAA) yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota PBB. Karena itu, sistem fiskal daerah perlu disesuaikan untuk mendorong pendekatan bertahap yang didasarkan pada sistem perpajakan daerah yang sederhana dan dinamis, yang memastikan bagian daerah dari pendapatan fiskal nasional lebih sepadan melalui transfer antar-pemerintahan yang transparan dan reguler, dan meningkatkan pinjaman yang bertanggungjawab untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebuah pemandangan jalan di Georgetown, Guyana. © UN-Habitat/Kristen Milhahn

Namun, skenario ini jauh dari realitas. Misalnya, akses pemerintah daerah untuk meminjam, meskipun secara formal diijinkan, dalam praktiknya masih ketat dan dibatasi untuk sebagian besar pemerintah daerah di negara berkembang. Sebuah studi global mengidentifikasi hanya 22 negara yang pemerintah kotanya diijinkan meminjam tanpa pengendalian yang sangat ketat.[40] Reformasi yang meningkatkan rasionalitas kekuasaan, kapasitas, dan sumber daya bagi pemerintah daerah merupakan salah satu dimensi penting yang mampu menggenjot tata kelola perkotaan. Pemerintah daerah harus diberdayakan agar mampu mengambil keputusan proaktif dalam pengembangan perkotaan dan investasi infrastruktur, daripada tetap mengabadikan *status quo*. Prioritas kebijakan lokal perlu dimasukkan ke dalam strategi pembiayaan yang lebih berkualitas dan terkoordinasi agar dapat mewadahi tingkat-tingkat pemerintahan lainnya dan pihak internasional guna memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan.[41]

Reformasi yang meningkatkan rasionalitas kekuasaan, kapasitas dan sumberdaya bagi pemerintahan daerah merupakan salah satu dimensi penting yang dapat menggenjot tata kelola perkotaan

Akhir-akhir ini, inisiatif pemerintah daerah yang berbeda-beda telah begitu maju dan membaik dengan pemetaan dan proyek-proyek yang sesuai dengan peluang pembiayaan. Sejumlah fasilitas persiapan proyek yang berfokus pada perkotaan telah mendukung proyek-proyek perubahan iklim untuk memenuhi standar kelayakan perbankan. Di antara fasilitas ini adalah Fasilitias Pembiayaan Kota C40 (C40 Cities Finance Facility) dan Program Aksi Transformatif ICLEI

(Transformative Actions Programme). Badan Kewilayahan Afrika yang dimotori oleh UCLG Afrika dan Dana Investasi Kota Internasional (International Municipal Investment Fund), disiapkan oleh UN Capital Development Fund (UNCDF) dan UCLG berkolaborasi dengan Global Fund for Cities Development (FMDV), juga sedang dalam proses pengembangan. Perjanjian Global para Wali Kota (Global Covenant of Mayors (GCoM)) dan Bank Investasi Eropa secara bersama-sama telah membantu "menyiapkan dan pembiayaan jalur cepat bagi proyek-proyek aksi perubahan iklim di perkotaan."[42]

Difasilitasi oleh sumber daya daerah yang terbatas, deregulasi pasar, dan keunggulan ekonomi finansial, model-model penyediaan pelayanan publik telah berkembang dalam merespon pengembangan perkotaan dan kebutuhan infrastruktur. Evolusi ini telah didukung oleh ekspansi yang menerus dari partisipasi sektor swasta dalam penyediaan pelayanan (seperti air bersih dan sanitasi, manajemen limbah, transportasi dan energi). Ekspansi ini telah terjadi melalui model eksternalisasi yang berbeda-beda, seperti konsesi, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan privatisasi yang telah berpindah dari sistem penyediaan pelayanan universal (sering dengan monopoli operator yang didukung secara publik) menjadi pasar yang lebih terfragmentasi untuk akses dengan moda distribusi yang berbeda (dari utilitas publik, menggunakan banyak subkontraktor, menjadi operator swasta kecil, LSM dan penyediaan informal).

Semula lazim di negara maju, proses ini segera meluas ke negara-negara berkembang, khususnya kota-kota besar.[43] Hasilnya sangat bervariasi, dengan kemanfaatan positif dan negatif yang bergantung kepada sektor dan konteks. Sebagai reaksi terhadap beberapa pengalaman negatif dengan aksesibilitas pelayanan dan kebutuhan untuk mendukung sinergi multi-layanan serta multi-pemangku kepentingan, banyak kota dan komunitas mencari alternatif dengan mengarahkan pelayanan publik yang penting melalui proses yang disebut "*remunicipalization*." Penelitian tahun 2019 telah mendaftar 1.408 kasus sejak 2000 yang melibatkan 2.400 pemerintahan kota dari 58 negara yang terkait dengan air bersih, energi, limbah, telekomunikasi, transportasi, kesehatan dan perlindungan sosial, pendidikan dan pelayanan pemerintahan daerah lainnya.[44]

7.2.3 Tantangan Metropolitan

Konteks kawasan metropolitan, dalam "abad metropolitan" telah menuntut pertimbangan khusus. Meskipun reformasi, seperti diuraikan di atas, terjadi pada tata kelola metropolitan di berbagai wilayah (seperti Australia, Bolivia, Brazil, Kolombia, Prancis, Italia, Jepang, Afrika Selatan, Inggris, dll.), langkahnya tidak diikuti oleh transformasi sosioekonomi dan kecepatan pengembangan metropolitan. Dewasa ini, tata kelola metropolitan menjadi lebih kompleks; kota-kota besar dikelola melalui skema pembagian kekuasaan dengan melibatkan tingkatan pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha yang berbeda-beda, swasta, dan publik, yang beroperasi dengan variasi tingkatan legitimasi dan transparansi, sementara juga masih harus memperebutkan sumber daya. Lanskap tata kelola yang berbelit-belit ini menimbulkan masalah yang mengkhawatirkan bagi integrasi spasial, politik, dan sosial, yang tercermin dalam cara pengelolaan dan penyediaan layanan kawasan perkotaan yang seringkali terfragmentasi.[45] Seperti yang disoroti di Bab 3, sistem tata kelola yang tidak efisien tersebut berdampak negatif pada ekonomi perkotaan.

Secara paradoks dan dengan sedikit pengecualian (misalnya Afrika Selatan), upaya *top-down* untuk menciptakan pemerintahan metropolitan baru seringkali tidak praktis secara politis dan operasional, sementara dalam banyak kasus upaya melalui kerja sama sukarela antarkota terbukti lebih efektif. Bergantung pada bagaimana penerapannya, tata kelola metropolitan dapat menjadi tantangan bagi demokrasi lokal jika legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan tidak ditangani dengan baik. Ini juga dapat melanggengkan fragmentasi dan kesenjangan sosial ekonomi atau memperburuk kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pengaturan tata kelola metropolitan yang tepat dan efektif — seperti pemerintah metropolitan atau mekanisme koordinasi yang lebih kuat yang mencakup seluruh wilayah fungsional metropolitan, tergantung pada konteks lokal dan nasional. Pengaturan ini harus transparan, akuntabel, dan didukung lembaga yang memungkinkan partisipasi warga, yang semuanya

merupakan elemen penting dalam mewujudkan visi urbanisasi berkelanjutan yang terpadu.

Di Inggris Raya, Undang-undang Devolusi Kota dan Pemerintah Daerah 2016 (Cities and Local Government Devolution Act 2016) mengatur pemilihan wali kota untuk wilayah, dan memberikan fungsi tambahan pada otoritas gabungan.[46] Delapan wilayah otoritas gabungan — terdiri dari 44 otoritas lokal dan mencakup hampir 12 juta orang - sekarang telah memilih wali kota metro.[47] Di Chile, Santiago telah dikonsolidasikan menjadi pemerintahan metropolitan. Di AS, perdebatan juga terjadi atas proposal untuk konsolidasi kota/ kabupaten di Syracuse, New York. Di seluruh dunia, batasan tata kelola pemerintahan kota bermacam-macam, antara lain, beradaptasi dengan struktur tata kelola yang baru dapat memiliki relevansi yang lebih tepat bagi kota-kota yang sedang bergulat dengan perubahan serupa.[48]

Lingkungan kelembagaan dan sistem pemerintahan lokal yang ada saat ini tidak sesuai dengan tujuannya. Evolusi lebih lanjut diperlukan untuk membuka potensi pemerintah daerah dalam membangun masa depan yang berkelanjutan

Seperti yang ditunjukkan di bagian ini, dinamika kekuasaan yang beragam — termasuk jenis lingkungan kelembagaan tempat pemerintah daerah beroperasi — menentukan otonomi daerah dalam pengelolaan kota. Secara umum, lingkungan kelembagaan dan sistem pemerintahan daerah yang ada saat ini tidak sesuai dengan tujuannya. Evolusi lebih lanjut diperlukan untuk membuka potensi pemerintah daerah dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Reformasi ini, termasuk revisi legislatif, peraturan, dan kerangka fiskal, harus dapat melampaui kebijakan sektoral; memupuk distribusi kekuasaan yang seimbang, kapasitas, dan sumber daya; serta meningkatkan kerja sama di antara berbagai bidang pemerintahan, dan keterlibatan para pelaku non-negara untuk mendukung kebijakan yang memungkinkan adopsi pendekatan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

7.3 Pemerintahan Daerah sebagai Pilar Perpaduan Kekuatan Lokal Transformatif

Kerangka hukum dan kelembagaan yang ada untuk tata kelola pemerintahan daerah dan perencanaan kota, sebagai kompetensi utama pemerintah daerah, merupakan pintu masuk untuk partisipasi warga yang lebih kuat dan pemerintahan yang kolaboratif. Pengelolaan yang kolaboratif merupakan penentu utama bagi kota-kota untuk mendorong koalisi kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan NUA dan mewujudkan nilai tambah dari urbanisasi yang berkelanjutan.

7.3.1 Perencanaan dan Agenda Global: Tren Kontradiktif

Di dalam NUA, perencanaan kota dan wilayah diperkenalkan sebagai pengungkit utama untuk mempromosikan pembangunan kota yang berkelanjutan.[49] Agenda global telah mengakui kelebihan perencanaan untuk memacu perubahan yang diperlukan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, yang kemudian telah menyebabkan kebangkitan perencanaan dalam kebijakan publik.[50] Selama dekade terakhir, UN-Habitat telah mendukung penemuan kembali prinsip-prinsip dan metodologi perencanaan kota untuk mendorong pendekatan yang lebih terpadu dan partisipatif.[51] *Pedoman Perencanaan Kota dan Wilayah Internasional* (*International Guidelines for Urban and Territorial Planning*) mengakui dimensi politik dari perencanaan dan relevansi utamanya bagi pengambilan keputusan lokal dan kesepakatan pembangunan jangka panjang. Di dalam NUA, perencanaan diakui sebagai pendorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, serta sebagai kompetensi lokal utama untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota, seperti kebutuhan untuk mengurangi perebakan kota, memperkuat ketahanan, mendorong mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan meningkatkan kualitas hidup.

Agenda global telah mengakui kelebihan perencanaan untuk memacu perubahan yang diperlukan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, yang kemudian telah menyebabkan kebangkitan perencanaan dalam kebijakan publik

Kota-kota tertentu berada di garda depan dalam merevisi kebijakannya atau mengembangkan rencana strategis untuk melokalkan agenda pembangunan global. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mendobrak menara yang ada di antara organisasi perangkat kota yang sudah mengakar dengan cara mendorong kolaborasi melalui proses konsultasi. Kota Meksiko, misalnya, melibatkan anggota pemerintah, pejabat dan perwakilan dari lembaga utama kota dalam memperkenalkan TPB sebagai peta jalan dari proses perencanaan baru yang dimulai setelah pemilihan kota 2018.[52] Strategi Berlin/Konsep Pembangunan Perkotaan Berlin 2030 (Berlin Strategy/Urban Development Concept 2030*)* menyediakan model antar-lembaga untuk pembangunan ibu kota jangka panjang yang berkelanjutan dan dikembangkan dengan proses partisipatif "Membentuk Kota Bersama," yang melibatkan lebih dari 100 asosiasi, otoritas, dan institusi lokal dari wilayah Berlin-Brandenburg.[53] Di eThekwini, Afrika Selatan, penyelarasan Agenda 2030 dengan rencana metropolitan dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up* sebagai bagian dari pendekatan strategis kota untuk keberlanjutan, dan berfokus pada empat pilar utama: hak asasi manusia, manusia, planet, dan kesejahteraan. Pada tahun 2019, Kota New York merilis rencana strategis "OneNYC 2050" yang menguraikan delapan tujuan dan 30 inisiatif yang sejalan dengan TPB.[54] Demikian pula, Kitakyushu (Jepang), Santana de Parnaíba (Brasil) dan Seoul (Korea Selatan) —seperti diilustrasikan dalam Kotak 7.4— adalah di antara kota-kota lain yang telah menyelaraskan proses perencanaan mereka dengan agenda pembangunan global.[55]

Namun, keberadaan instrumen dan kapasitas perencanaan, meski vital, tidak serta merta menjamin tercapainya tujuan masyarakat setempat. UN-Habitat telah menyatakan bahwa pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan saat menggunakan instrumen perencanaan dan tata kelola perkotaan yang konvensional. Selain itu, di banyak negara, terutama di negara berkembang, kapasitas kota-kota dan alat untuk mempromosikan perencanaan yang memadai masih kurang atau bahkan tidak ada. Instrumen perencanaan perlu ditautkan dan didukung oleh kerangka hukum dan keuangan. Dominasi informalitas juga menentukan kapasitas lembaga daerah dalam memandu bentuk-bentuk pembangunan perkotaan. Pada saat yang sama, studi tersebut menyerukan transformasi pendekatan perencanaan kota: belajar bekerja dengan informalitas. Misalnya, memanfaatkan informalitas sebagai kekuatan pembangunan dan membimbingnya menuju terciptanya kota yang lebih baik, dalam arti memanfaatkan modalitas "non-formal" alternatif yang diciptakan oleh masyarakat di lingkungannya.[56]

Kotak 7.4: Seoul: Perencanaan kota dan Agenda Global

Sejak 1995, setelah pemilihan wali kota pertama, Pemerintah Metropolitan Seoul telah memimpin tindakan keberlanjutan di banyak bidang: perencanaan kota partisipatif, teknologi baru, inklusi sosial, dan mitigasi perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya tersebut telah sejalan dengan agenda global. Pada tahun 2015, kota Seoul menetapkan Rencana Induk Pembangunan Berkelanjutan (2016-2035) dan juga mengadopsi strategi komprehensif untuk mengatasi perubahan iklim, "The Promise of Seoul, Taking Actions against Climate Change" ("Janji Seoul, Mengambil Tindakan Melawan Perubahan Iklim"), yaitu menguraikan upaya seputar energi, kualitas udara, transportasi, limbah, ekologi, pertanian perkotaan, kesehatan, keselamatan, dan perencanaan kota. Pada 2017, Seoul Plan 2030 untuk implementasi TPB ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*. Untuk mewujudkan visi 2030 ini, lima isu utama diidentifikasi, yaitu: "kota yang berpusat pada masyarakat tanpa diskriminasi; kota global yang dinamis dengan pasar kerja yang kuat; kota budaya dan bersejarah yang semarak; kota yang hidup dan aman; serta perumahan yang stabil, transportasi yang mudah, dan kota yang berorientasi pada komunitas."

(Sumber: Pemerintah Metropolitan Seoul, 2015; Pemerintah Metropolitan Seoul, 2018.

Keberadaan instrumen dan kapasitas perencanaan, meskipun vital, tidak serta merta menjamin tercapainya tujuan masyarakat setempat. UN-Habitat telah menyatakan bahwa pemerintah daerah menghadapi banyak hambatan saat menggunakan instrumen perencanaan dan tata kelola perkotaan yang konvensional.

Perbedaan wilayah dalam pendekatan perencanaan sangat signifikan. Di Eropa dan Amerika Utara, dan sampai batas tertentu di Amerika Latin, sistem perencanaan umumnya sudah matang.[57] Stimulus penting untuk reformasi positif dan perubahan budaya dalam perencanaan di wilayah ini selama dekade terakhir berupa perencanaan strategis dan terpadu, yang mempromosikan integrasi pembangunan yang memadukan kebijakan perkotaan dengan pembangunan ekonomi, kebijakan inklusif dan strategi pengelolaan.[58] Namun demikian, tidak semua rencana strategis bisa berhasil, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan. Sering kali, prioritas pembangunan diperebutkan dan adanya risiko partisipasi warga yang begitu berarti akan terancam oleh beberapa keputusan pemerintah atau kepentingan investasi swasta (misalnya oleh kaum elit). Selain itu, tatanan perkotaan yang "terpecah" terlihat jelas di banyak kota di dunia, dengan implikasi serius bagi tata kelola perkotaan dan kontradiktif terhadap dampak keberlanjutan.[59]

Di Amerika Latin, beberapa kota berada di garis depan pendekatan perencanaan strategis dengan dukungan lembaga internasional seperti Inter-American Development Bank, yang telah membantu 61 kota sekunder dalam penyiapan rencana aksi kota.[60] Dukungan multilateral seperti itu diperlukan karena kota kecil dan kota menengah sering kali kekurangan SDM dan dana untuk merencanakan secara efektif. Eksklusi dan kesenjangan sosial sering kali merusak penerapan proses perencanaan yang inklusif. Pemandangan yang kontras antara masyarakat yang tinggal di komplek perumahan berpagar (*gated community*) dengan yang tinggal di lingkungan yang termarginalkan masih terlihat di mana-mana, yang semakin diperburuk oleh krisis sosial dan meluasnya kekerasan di perkotaan.

Di Asia, meskipun pendekatan perencanaan tradisional *top-down* masih ada, pendekatan baru seperti yang mendukung peremajaan perkotaan kini bermunculan. Negara-negara di kawasan ini bergerak maju dengan kerangka tata ruang nasional, perencanaan kota-wilayah dan perencanaan daerah untuk regenerasi perkotaan. Pada saat yang sama, banyak kota memasukkan dimensi ketahanan dan lingkungan yang kuat ke dalam visi jangka panjang mereka.[61] Tiongkok telah bergerak cepat untuk mendesentralisasikan fungsi-fungsi perencanaan tertentu, meskipun kendali negara masih tetap ada. Di India, perencanaan cenderung terkonsentrasi di tingkat negara bagian daripada di tingkat pemerintah kota.[62] Negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi perlahan-lahan beralih dari sistem lama dengan pendekatan *top-down* kepada sistem desentralisasi yang lebih baru untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Di negara-negara CIS, peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan kota masih cukup terbatas. Dengan sedikit pengecualian, masih terdapat perencanaan induk *top-down*, implementasi rencana yang lemah di tingkat pemerintahan daerah, dan lemahnya kendali atas pembangunan perkotaan yang didorong oleh pasar. Di Kawasan Timur Tengah dan Asia Barat, rencana kota masih banyak dikembangkan oleh pemerintah pusat atau wilayah, dengan memberikan penugasan kepada pemerintah daerah untuk peran-peran konsultatif (Lebanon) atau proses tindak lanjut (Iran).

Di Afrika, sistem perencanaan kota masih sangat terpusat di sebagian besar negara, di mana kota-kota masih kekurangan sumber daya dan sering kali berjalan dalam kerangka hukum perkotaan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak memadai. Sementara kota-kota besar seperti Dakar (Senegal), eThekwini (Afrika Selatan), Johannesburg (Afrika Selatan), Lagos (Nigeria), Maputo (Mozambik), Marrakesh (Maroko) dan Nairobi (Kenya) merupakan titik-titik terang, walau secara keseluruhan masih memiliki kekurangan tenaga profesional perencanaan dan alat untuk menegakkan perencanaan dan peraturan tata guna lahan. Di tengah tantangan ini, kemitraan kolaboratif dengan organisasi dan komunitas permukiman kumuh telah

bermunculan.[63] Hal yang mendesak di Afrika Sub-Sahara adalah mengembangkan modalitas dan kapasitas perencanaan baru untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk di perkotaan.

Perlu dicatat bahwa, dalam kerangka TPB, pemerintah daerah di semua wilayah didorong untuk merancang rencana pembangunan daerah yang selaras dengan TPB, termasuk TPB 11. Di Kolombia, misalnya, pemerintah daerah diharuskan mengembangkan rencana pengelolaan daerah sejak tahun 1997. Sebagai hasilnya, sebagian besar ibu kota provinsi telah selaras rencananya dengan TPB.[64] Di negara-negara Amerika Latin lainnya, upaya untuk menyelaraskan TPB dengan rencana pembangunan daerah juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan penerapan pendekatan manajemen lahan dan perkotaan yang lebih terpadu (misalnya Sistem Perencanaan Partisipatif Kota Bolivia dan Sistem Perencanaan Partisipatif Terdesentralisasi di Ekuador).[65]

Demikian pula di Afrika, di mana rencana pembangunan daerah juga diwajibkan, negara-negara merevisi sistem perencanaan nasionalnya untuk mendukung upaya penyelarasan oleh pemerintah daerah (misalnya Benin, Burkina Faso, Ghana, Rwanda, dan Afrika Selatan). Di Asia, proses penyelarasan juga berkembang di negara-negara seperti Australia, Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Filipina.[66] Di Tiongkok, misalnya, kota-kota percontohan telah dipilih— Guilin, Shenzhen, dan Taiyuan — untuk mempromosikan inovasi, mendorong pembelajaran dan perubahan kebijakan, sementara banyak kota lain juga memperbarui kebijakan keberlanjutannya.[67] Beberapa kota telah mengadopsi TPB sebagai kerangka pedoman untuk merevisi rencana dan strategi pembangunan, misalnya, eThekwini (Afrika Selatan), Mannheim (Jerman) dan Seoul (Korea Selatan). Upaya ini diharapkan berdampak positif pada proses perencanaan.

Meskipun lingkungan kelembagaan yang mendukung dapat menentukan kualitas hasil perencanaan, kapasitas kota untuk merencanakan dengan cara yang partisipatif dan inklusif juga masih sangat bergantung pada kepemimpinan lokal dan kemampuannya untuk menyatukan kepentingan lokal yang heterogen ke dalam visi bersama, kemudian memobilisasi cara-cara bagaimana melaksanakan visi tersebut. Para pemimpin daerah, yang mampu mengadopsi pendekatan strategis yang memperhitungkan tekanan sistemik antara aspek inklusi dan keberlanjutan, memiliki posisi yang lebih baik untuk sukses. Kemungkinan untuk mencapai hasil yang diharapkan akan maksimal jika kepemimpinan visioner didukung oleh tata kelola perkotaan yang kuat, koordinasi kelembagaan, dan koalisi luas yang mendukung dan memastikan kesinambungan pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan dalam *Laporan Kota-Kota Dunia 2016*, "kota yang memiliki rencana" memungkinkan aktor lokal untuk belajar dan beradaptasi secara terus menerus untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian, serta untuk mendukung inovasi sistem yang menghubungkan institusi, bisnis, akademisi, dan gerakan sosial, sambil merangkul pandangan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya membangun masa depan yang diharapkan warga secara kolektif.[68]

Kapasitas kota untuk merencanakan dengan cara yang partisipatif dan inklusif juga masih sangat bergantung pada kepemimpinan lokal, dan kemampuannya untuk menyatukan kepentingan lokal yang heterogen ke dalam visi bersama, kemudian memobilisasi cara-cara bagaimana melaksanakan visi tersebut

7.3.2 Kebijakan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan dapat menciptakan rangkaian keterlibatan yang baik antara warga dan lembaga lokal, yang dapat mendorong kekuatan sosial yang positif dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Di seluruh dunia, banyak kota telah melembagakan berbagai bentuk partisipasi warga, sektor swasta dan komunitas, dan modalitas ini sedang diperluas sebagai bagian dari upaya pelokalan agenda global. Di hampir semua wilayah, pemerintah daerah sedang mengembangkan upaya konsultasi, lokakarya, dan laboratorium untuk melibatkan warga dalam rencana pelokalan tersebut.

Pertemuan di lapangan bersama organisasi perangkat teknis daerah Kota Saida untuk validasi data. © UN-Habitat

Bogotá, misalnya, menggunakan TPB untuk membuka platform baru bagi partisipasi warga. Amsterdam menyelenggarakan "Global Goals Jam" selama dua hari pada tahun 2017, yang mempertemukan tim kreatif perancang dan pengembang lokal bersama staf teknis dewan untuk mengerjakan ide-ide inovatif dalam berkontribusi menuju TPB. Jakarta telah mengintegrasikan prioritas rencana nasional Indonesia dan TPB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), didukung oleh pendekatan partisipatif perencanaan dan penganggaran elektronik yang dikenal sebagai e-Musrenbang. Amerika Latin memiliki tradisi partisipasi warga yang lebih lama dan terkonsolidasi, paling dapat dicatat adalah karya perintisan Porto Alegre dalam penganggaran partisipatif. Di Afrika, partisipasi warga dalam perencanaan kota baru dimulai, meskipun strategi pengembangan kota di Ouagadougou (Burkina Faso) dan Douala (Kamerun), serta forum pembangunan Kota Uganda, adalah beberapa contoh mekanisme partisipatif dinamis yang telah dilakukan. Pendekatannya masih sangat terbatas di Timur Tengah, Asia Barat, dan wilayah CIS. Secara keseluruhan, Observatorium Internasional tentang Demokrasi Partisipatif —mengumpulkan pengalaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai benua melalui modalitas yang berbeda— telah menyatakan bahwa terdapat kemajuan penting dalam pengalaman partisipatif di seluruh dunia. Misalnya, berbagai yurisdiksi telah mengadaptasi dan mengatur ulang "penganggaran partisipatif" atau mengembangkan seperangkat mekanisme untuk melibatkan penduduk dalam proses pengambilan keputusan lokal.[69]

Beberapa negara telah melangkah lebih jauh dalam mewajibkan perencanaan partisipatif, seperti Republik Dominika. Sementara itu, modalitas partisipasi warga berkembang ke teknik baru seperti penggunaan kartu skor untuk pemantauan berbasis komunitas di berbagai kota di Afrika dan Asia, dengan dukungan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kerja sama internasional. E-demokrasi juga telah mengubah partisipasi dalam dua dekade terakhir ini dengan mendukung keterlibatan warga dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan, melalui saluran seperti Warga Cerdas dan Peradaban Digital.[70] Dalam hal tersebut, Argentina, Estonia, Italia, Indonesia, Filipina dan Meksiko termasuk di antara negara-negara yang sedang mempromosikan praktik pemerintahan terbuka melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan LSM.[71] Keterlibatan sektor swasta dalam forum dan dialog lokal tentang pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan juga dapat membantu mendorong perubahan berkelanjutan dalam perilaku bisnis. Keterlibatan mereka dalam upaya-upaya seperti Program Kota Kompak Global PBB (United Nations Global Compact Cities Programme) telah mendorong adopsi prinsip-prinsip yang lebih berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, mempromosikan pekerjaan yang layak, dan memastikan akses pembiayaan untuk mendukung transisi menuju keberlanjutan.[72]

Keterpaduan berbagai saluran partisipasi merupakan cara untuk mendiversifikasi keterlibatan warga, mengakomodasi kepentingan yang berbeda dan dalam meningkatkan jumlah peserta. Misalnya, Canoas telah mengembangkan 13 alat inovatif untuk mendorong partisipasi publik melalui Sistem Partisipasi Warga, yang telah melibatkan lebih dari 185.000 penduduk. Di Seoul, pemerintah metropolitan baru-baru ini mempromosikan Program Balai Kota Warga yang menggabungkan kebijakan pintu terbuka untuk ide dan opini dengan kunjungan lapangan, yang memungkinkan administrasi publik menemukan solusi melalui keterlibatan komunitas secara langsung.[73]

Pendekatan partisipatif dan berbasis hak tengah mengembangkan kerangka kerja baru untuk kota dan wilayah ko-kreasi, dalam hal perancangan kota dan penyediaan layanan—misalnya, kebijakan perumahan melalui kemitraan bersama LSM, seperti Asian Coalition for Housing Rights (Koalisi Asia untuk Hak terhadap Rumah) atau prakarsa "Know Your City" (Kenali Kotamu) yang dikembangkan oleh Slum/Shack Dwellers International (Penghuni Kumuh/Gubuk Internasional) untuk mengintegrasikan masalah permukiman kumuh ke dalam proses perencanaan lokal.[74] Namun, gagasan partisipasi bukanlah obat mujarab. Eksperimen penganggaran partisipatif, misalnya, memiliki spektrum yang luas mulai dari gerakan partisipatif yang bersifat simbolis dengan sedikit dampak transformatif, hingga kepada penghasil perubahan struktural yang berarti dalam sistem tata kelola perkotaan yang mampu mengalokasikan sejumlah besar dana publik untuk memenuhi berbagai kebutuhan kelompok yang berbeda.[75] Beberapa praktik telah dikritik karena membatasi lingkup keterlibatan warga, lebih mendukung kelompok sosial yang sudah memiliki hak istimewa, bukan bagi warga yang lebih membutuhkan, menciptakan atau memperkuat jaringan nepotisme, memperlemah organisasi populer, dan manipulasi politik.[76] Di kota-kota lain, penganggaran partisipatif yang didorong oleh logika tata kelola yang baik telah berkontribusi untuk menata ulang hubungan dan tanggung jawab di antara para aktor dan lembaga di ranah publik, yang mengarah pada peningkatan terukur dalam kualitas hidup warga secara keseluruhan.[77]

Konsep partisipasi dalam tata kelola perkotaan sedang berubah dan bergerak dari sekedar konsultasi sederhana menjadi penciptaan bersama ruang yang mewadahi kontribusi untuk menyeimbangkan kembali distribusi kekuatan pengambilan keputusan di dalam masyarakat

Konsep partisipasi dalam tata kelola perkotaan sedang berubah dan bergerak dari sekedar konsultasi sederhana menjadi penciptaan bersama ruang yang mewadahi kontribusi untuk menyeimbangkan kembali distribusi kekuatan pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Pergeseran ini menuntut pemerintah daerah untuk mempertimbangkan beberapa kondisi dasar, seperti pemberdayaan dan otonomi gerakan sosial dan pemangku kepentingan daerah. Pelaksana keterlibatan warga harus bersikap sederhana, timbal balik,

representatif, inklusif, dan berorientasi pada orang. Warga perlu mengenali prosedur partisipasi formal dengan aturan bersama yang transparan dilengkapi dengan kemitraan kolaboratif, mengambil hak privasi dan inisiatif warga secara serius, serta memberi warga kekuatan untuk pengambilan keputusan yang nyata. Selain itu, pemerintah daerah harus mengembangkan proses partisipatif yang semakin meluas, baik secara daring maupun luring, secara seimbang serta dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. Di samping demokrasi partisipatif yang aktif, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama tata kelola perkotaan yang baru.[78]

7.3.3 Tata Kelola Pemerintahan Berjenjang

Meskipun merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dan koordinasi kebijakan pembangunan di kota dan wilayahnya, fungsi-fungsi yang relevan dengan tata kelola dan perencanaan perkotaan biasanya tersebar di beberapa departemen pemerintah serta di seluruh masyarakat sipil dan sektor swasta. Kolaborasi kebijakan vertikal dan horizontal antara berbagai tingkat pemerintahan (lokal, wilayah dan nasional) dan antarlembaga pada tingkat yang sama (misalnya kerja sama antarkota) adalah penting untuk memastikan pembangunan kawasan perkotaan yang koheren. Koherensi kebijakan dan kolaborasi merupakan inti dari NUA dan sangat penting untuk mencapai pendekatan “pemerintahan yang menyeluruh” dan “masyarakat yang menyeluruh” seperti yang diminta oleh TPB. Belakangan ini, krisis kesehatan masyarakat yang memiliki dimensi wilayah yang kuat dan memerlukan respons terpadu yang efektif (seperti pandemi COVID-19) telah meningkatkan kebutuhan akan pendekatan tata kelola pemerintahan yang berjenjang.

Pengaturan tata kelola pemerintahan berjenjang sangat penting untuk secara efektif melokalkan agenda global, menciptakan sinergi, mengurangi tumpang tindih dan jurang kritis antarlembaga, serta mempromosikan kepercayaan dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan koherensi kebijakan. Kemajuan proses desentralisasi yang telah diamati di berbagai wilayah mengarah kepada ketergantungan administrasi, keuangan dan sosial-ekonomi yang lebih besar antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga telah meningkatkan kompleksitas pengambilan keputusan dan pembangunan konsensus, karena menjadi lebih banyak aktor dan inisiatif sebagai bagian dari proses ini. Pengaturan tata kelola pemerintahan berjenjang yang disusun dengan baik dapat memfasilitasi peran lembaga dan pelaku lokal, serta menciptakan kepemilikan lokal, sambil mendorong inovasi dan eksperimen yang memungkinkan untuk mengadaptasi strategi nasional kepada kenyataan di lapangan.[79]

Pengaturan tata kelola berjenjang sangat penting untuk secara efektif melokalkan agenda global, menciptakan sinergi, mengurangi tumpang tindih dan jurang kritis antarlembaga

Dalam hal ini, kebijakan perkotaan nasional (KPN), yang dipahami sebagai "seperangkat keputusan koheren, melalui proses koordinasi dan pengumpulan masukan berbagai pemangku kepentingan yang dipandu oleh pemerintah, untuk memaksimalkan manfaat adanya urbanisasi," adalah bagian penting dari proses membangun sistem tata kelola pemerintahan berjenjang, seperti yang diakui dalam NUA.[80] Pelaksanaan NUA dan Agenda 2030 tidak diragukan lagi merupakan peluang untuk memperluas proses perubahan dan mengatasi banyak tantangan yang ada terkait dengan penguatan dan perluasan tata kelola pemerintahan berjenjang.

Evolusi kerangka kelembagaan untuk memfasilitasi tata kelola pemerintahan berjenjang memiliki banyak pola yang telah dijelaskan di atas terkait proses desentralisasi. Di Eropa, tata kelola pemerintahan berjenjang berkembang dengan baik di negara-negara yang menunjukkan tingkat desentralisasi yang tinggi dan mencakup struktur dialog yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat dan daerah di berbagai bidang, seperti perencanaan tata ruang, lingkungan, infrastruktur, transportasi, teknologi dan pembangunan, serta koordinasi fiskal di berbagai tingkatan. Negara-negara Eropa juga memiliki tradisi KPN sebagai pengungkit untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan koherensi kebijakan.[81] Eropa juga merupakan kawasan di mana pemerintah daerah paling

terlibat di dalam mekanisme koordinasi nasional untuk implementasi TPB (tren yang dapat diamati di 20 dari 37 Negara-negara Eropa yang telah melapor ke HLPF sejak 2016).[82] Terakhir, UE memberikan penekanan khusus pada konsep tata kelola perkotaan yang berjenjang. Agenda Perkotaan untuk Uni Eropa (Pakta Amsterdam) diadopsi pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan NUA dan TPB, bertujuan menangani adopsi pendekatan pembangunan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam kerangka kerja berjenjang yang luas.[83]

Di Amerika Latin, kemajuan menuju tata kelola pemerintahan yang berjenjang sering kali menghadapi tantangan terkait siklus politik dan ketidakstabilan. Brazil mengembangkan pendekatan berjenjang yang cukup inovatif pada tahun 2000-an melalui pembentukan Kementerian Kota dan Konferensi Kota Nasional, meskipun dengan pengaruh perubahan politik baru-baru ini, kedua upaya perintisan tersebut menghadapi peningkatan tantangan.[84] Negara-negara lain mengembangkan mekanisme untuk dialog, perencanaan dan kerja sama, serta membuat kemajuan dalam menyusun KPN (misalnya, Bolivia, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Peru dan El Salvador). Contoh dari Kolombia dan Ekuador menggambarkan kompleksitas pengembangan sistem tata kelola pemerintahan berjenjang. Kedua negara tersebut menghadapi masalah koordinasi —tidak hanya antara pemerintah nasional dan daerah, tetapi juga antarpemerintah daerah— yang berkisar mulai dari masalah kepekaan politik hingga masalah jurang antara kapasitas dan akses pembiayaan. Di kawasan ini, 14 dari 19 negara telah memiliki KPN dalam tahap implementasi, dengan tingkat keterlibatan pemerintah daerah yang berbeda.

Di Amerika Latin, 14 dari 19 negara memiliki KPN dalam tahap implementasi, dengan tingkat keterlibatan pemerintah daerah yang berbeda dalam definisinya

Di tingkat regional, Economic Commission for Latin America and the Carribean (ECLAC), bekerja sama dengan pemerintah nasional dan UN-Habitat, telah mengadopsi Rencana Aksi Regional untuk Implementasi NUA di Amerika Latin dan Karibia, dan mengusulkan pembentukan Platform Kota dan Perkotaan Amerika Latin dan Karibia untuk memfasilitasi proses-proses tindak lanjut dan pemantauan. Namun, keterlibatan pemerintah daerah masih terbatas dalam inisiatif regional ini dan mekanisme koordinasi nasional untuk implementasi TPB (hanya 6 dari 17 negara Amerika Latin yang melaporkan kemajuan mereka ke HLPF sejak 2016).

Di kawasan Asia-Pasifik, beberapa negara telah mengembangkan mekanisme tata kelola pemerintahan berjenjang yang sistematis, seperti Dewan Pemerintah Australia, Komisi Pemerintah Daerah di Selandia Baru, dan Persatuan Pemerintah Daerah dalam Otoritas Pembangunan dan Ekonomi Nasional di Filipina. Lainnya, seperti Indonesia, telah mempromosikan mekanisme koordinasi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Di Tiongkok, pengaturan tata kelola pemerintahan berjenjang sangat penting dalam banyak dimensi, misalnya, dalam menangani hak dan kondisi kehidupan untuk lebih dari 200 juta migran internal yang berpindah antara daerah perdesaan dan perkotaan di bawah sistem *hukou*.[85]

Pada 2018, 24 dari 43 negara di Wilayah Asia-Pasifik telah memiliki KPN dalam tahap implementasi atau lebih maju lagi

Pada saat yang sama, negara-negara sedang mengembangkan kebijakan khusus untuk memperkuat koordinasi dengan kota-kota dan pemerintah daerah guna melaksanakan agenda global. Misalnya, Pemerintah Jepang melibatkan pemerintah daerah dalam Meja Bundar Promosi TPB dengan banyak pemangku kepentingan. Ini juga memberikan dukungan intensif kepada pemerintah daerah terpilih dalam pelaksanaan TPB dan NUA melalui program yang berbeda, seperti Kota Masa Depan dan Kota *Ecomodel*.[86] Di Korea Selatan, pemerintahan baru telah merancang peta jalan di tahun 2018 untuk mengimplementasikan TPB dan meluncurkan Kesepakatan Baru Regenerasi Perkotaan berjangka lima tahun; sementara beberapa kota — seperti Seoul, Gwangju, Suwon, dan Daegu— secara

bersamaan melakukan upaya pelokalan. Indonesia dan Filipina juga memperkuat koordinasi vertikal antara berbagai tingkat pemerintah dan aktor non-negara untuk implementasi dan pemantauan TPB.[87] Di kedua negara tersebut, terdapat hambatan dan jurang antara untuk menyelaraskan proses yang berbeda ini, seperti peran yang tumpang tindih antara organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan perusahaan daerah, jadwal perencanaan yang berbeda, dukungan teknis yang tidak mencukupi, kapasitas lokal yang lemah, masalah dengan data dan indikator, serta masalah pembiayaan. Koordinasi masih sulit dilakukan di kota-kota metropolitan utama, yang mengakibatkan lemahnya perencanaan dan penyediaan layanan, seperti di Jakarta (Indonesia) dan Manila (Filipina).[88]

Perlu dicatat bahwa pada 2018, 24 dari 43 negara di Wilayah Asia-Pasifik telah memiliki KPN pada tahap implementasi atau bahkan lebih maju lagi. Partisipasi para pemangku kepentingan sangat tidak merata di seluruh kawasan —yang mencerminkan tatanan politik yang beragam.[89] Setiap negara menentukan pendekatannya sendiri untuk meningkatkan tata kelola perkotaan berjenjang, tetapi sangat sedikit yang menghubungkan antara strategi perkotaan dengan agenda global.

Di Afrika, pendekatan tata kelola pemerintahan berjenjang, meskipun baru dimulai, telah membuat beberapa kemajuan. Negara-negara di benua Afrika, seperti Benin, Kenya, dan Afrika Selatan, telah mempromosikan pendekatan "semua masyarakat" untuk implementasi TPB dan NUA melalui penciptaan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang berjenjang. Sementara beberapa tantangan telah muncul, seperti desentralisasi fiskal yang tidak lengkap disertai dengan kurangnya koherensi antara pedoman kebijakan lokal, agenda global yang berbeda, serta mekanisme tindak lanjut dan tinjauannya, walau perlu dicatat bahwa semua negara tersebut telah memiliki KPN. Setelah melalui proses konsultatif, pemerintah nasional Afrika Selatan mengadopsi Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Terpadu pada tahun 2016 untuk mengoordinasikan dan memandu manajemen perkotaan.

21 dari 38 negara Afrika telah memiliki KPN dalam tahap implementasi atau lebih maju lagi), tetapi banyak negara juga masih kekurangan sumber daya dan kapasitas teknis untuk menerapkan KPN secara komprehensif

Kolaborasi berjenjang juga mengalami kemajuan dalam hal kebijakan adaptasi perubahan iklim. Di eThekwini, koordinasi diberlakukan secara vertikal dan horizontal antara pemerintah daerah yang berdekatan dan melibatkan pemangku kepentingan lokal.[90] Berbagai negara memanfaatkan mekanisme koordinasi nasional yang dibuat untuk TPB yang memastikan kolaborasi lebih besar antara tingkat nasional dan provinsi. Benin, misalnya, melibatkan pemerintah daerah dalam Komite Pengarah Nasional untuk Perencanaan dan Pembangunan TPB dan membuat langkah signifikan dalam pengintegrasian TPB dalam rencana nasional dan lokal di 10 dari 12 departemen. Di Kenya, sekretariat Dewan Gubernur membentuk kantor penghubung TPB dan penjuru di 47 kabupaten untuk meningkatkan koordinasi antara dua tingkat pemerintahan. Ghana dan Burkina Faso, di antara negara-negara lain, memanfaatkan sistem perencanaan terdesentralisasi mereka untuk memastikan koordinasi yang lebih baik untuk pelaksanaan TPB, memperkuat koordinasi regional dan mendukung penyelarasan rencana daerah terhadap rencana nasional, sambil juga berfokus pada prioritas lokal. Upaya untuk mengadopsi dan melaksanakan KPN sedang dilakukan di seluruh benua (21 dari 38 negara Afrika telah memiliki KPN dalam tahap implementasi atau lebih maju lagi), tetapi banyak negara juga masih kekurangan sumber daya dan kapasitas teknis untuk menerapkan KPN secara komprehensif.[91]

Perumahan dibangun di atas reruntuhan permukiman kumuh tertua Afrika Selatan, Cape Town, Afrika Selatan. © Perjalanan Asli /Shutterstock

7.3.4 Memantau Kebijakan Perkotaan

Perlu diakui, masih terdapat masalah signifikan di banyak negara dalam produksi data terinci serta indikator bersama untuk pemerintah pusat dan daerah. Kedua faktor ini mempersulit pemantauan pelaksanaan TPB dan NUA, serta untuk memastikan proses perencanaan nasional dan daerah yang didasarkan pada target yang realistis. Banyak pemerintah daerah saat ini tidak memiliki akses ke data lokal, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan tepat yang memungkinkan mereka dapat memprioritaskan kebijakan daerah dengan lebih baik, serta dalam memastikan pelaksanaan yang efektif.

Keterbatasan ini, ditambah dengan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di semua wilayah untuk diikutsertakan dalam proses pelaporan di tingkat nasional, menjadikan pemantauan dan pelaporan sebagai salah satu tantangan inti pelokalan yang mendesak. UN-Habitat, organisasi-organisasi internasional, dan negara-negara termasuk Belgia, Kolombia, Indonesia, dan Afrika Selatan sedang mengembangkan solusi terkait ini. Indeks Kemakmuran Kota UN-Habitat, misalnya, menyediakan kerangka kerja pemantauan yang fleksibel untuk TPB, yang diterapkan di lebih dari 400 kota di semua wilayah.[92] Selain itu, UN-Habitat telah mengembangkan Platform NUA, sebuah platform daring untuk memfasilitasi pemantauan, pelaporan dan berbagi informasi tentang kemajuan implementasi NUA dan TPB (Bab 9). Secara paralel, pemerintah daerah dan jaringannya juga mempromosikan inisiatif untuk mendukung pemantauan. Misalnya, di Jerman, koalisi mitra publik dan swasta membangun platform nasional untuk mengumpulkan data-data TPB dari seluruh kotamadya. Di Brasil, Konfederasi Nasional Kotamadya mengembangkan dasbor TPB yang disebut Mandala ODS. Di Afrika, inisiatif Know Your City (Kenali Kotamu) telah lama mengumpulkan data tentang seluruh permukiman informal yang sekarang sudah dapat menginformasikan upaya pemantauan lokalnya.[93] Lebih dari 40 pemerintah daerah juga telah menyusun

VLR mereka sendiri, melengkapi VNR negara mereka dengan informasi kedaerahannya, yang sering kali termasuk rangkaian indikator yang berbeda (Kotak 7.1).[94] Komisi Eropa dan OECD juga telah mengembangkan berbagai proposal untuk mendukung data dan indikator lokal untuk memantau TPB dan memfasilitasi penetapan standar hasil.[95]

Tugas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB dan NUA akan membutuhkan dukungan dari kantor pusat statistik untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan organisasi internasional untuk memastikan tindak lanjut dari kebijakan publik. Pemerintah pusat harus mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di dalam penetapan, implementasi dan pemantauan kebijakan dan rencana perkotaan, serta dalam pemilahan data dan indikator.

Akhirnya, terlepas dari kemajuan penting yang disoroti dalam bagian ini, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena jalan masih panjang untuk mencapai transformasi tata kelola perkotaan yang efektif. Banyak kawasan perkotaan cukup menderita karena skema tata kelola pemerintahan berjenjang yang tidak memadai, pembagian tanggung jawab yang tidak jelas antara berbagai bidang pemerintahan, dan mekanisme kerja sama yang lemah. Perlu juga dicatat bahwa partisipasi pemerintah daerah di dalam mekanisme koordinasi nasional untuk implementasi TPB masih terbatas dan keterlibatan mereka bervariasi dalam penetapan dan pengembangan KPN.[96] Sistem tata kelola pemerintahan berjenjang yang tidak efektif tersebut mengganggu proses perencanaan dan menghambat keterlibatan dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan kunci. Oleh karena itu, menciptakan budaya kerja sama sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan berjenjang yang efektif sekaligus untuk membuka jalan bagi implementasi NUA dan TPB yang efektif.

Menciptakan budaya kerja sama sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan berjenjang yang efektif sekaligus untuk membuka jalan bagi implementasi NUA dan TPB yang efektif

7.4 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan

Tinjauan cepat atas inisiatif, peluang, dan tantangan pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam mengangkat potensi urbanisasi berkelanjutan ini memberikan gambaran yang menjanjikan tapi juga beragam. Peninjauan yang tepat waktu ini dilakukan pada permulaan sebuah dekade yang ditandai dengan seruan tindakan yang ambisius untuk mewujudkan TPB pada tahun 2030, Dekade Aksi. Pembahasan dalam Bab ini memang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan asosiasinya memiliki peran penting dalam memobilisasi tindakan untuk mempercepat solusi berkelanjutan, terutama di tiga bidang: aksi global, lokal, dan masyarakat.

Pemerintah daerah telah memimpin upaya untuk melokalkan agenda global. Kota-kota di garis depan dengan pemimpin visioner dan jaringan pemerintah daerah telah berkontribusi pada pergeseran pola pembangunan di berbagai dimensi, seperti mitigasi perubahan iklim, ketahanan perkotaan, model ekonomi alternatif, kebijakan inklusi sosial, dan pengarusutamaan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Mereka telah dan terus berada di garis depan selama krisis COVID-19 untuk memastikan kelangsungan layanan publik yang penting dan merespon keadaan darurat, dengan memberikan kepada publik informasi dan perlindungan yang diperlukan, serta memfasilitasi penyediaan makanan dan tempat tinggal sementara untuk mereka yang membutuhkan. Setelah pandemi, peran mereka juga akan sangat penting untuk mengejar pemulihan ekonomi hijau, tangguh, inklusif, dan kesetaraan gender yang diperlukan untuk mencapai TPB.[97] Kota-kota sudah memainkan peran penting sebagai pusat eksperimental, dan pengalaman mereka dapat digunakan sebagai masukan kebijakan yang bermanfaat pada tingkat nasional.

Namun dari perspektif global yang memperhitungkan besarnya tantangan, cakupan tindakan pemerintah daerah masih dapat dianggap sedikit, terkonsentrasi secara geografis, mengalami konflik serta siklus ekonomi yang merugikan. Memang, gerakan global yang dipimpin oleh pemerintah daerah telah membuat kemajuan

penting dalam empat tahun terakhir, namun kemajuan ini masih parsial dan harus diperkuat. Pada saat yang sama, di banyak daerah, lingkungan kelembagaan masih tidak sesuai untuk mencapai tujuan ini, menghambat kapasitas pemerintah daerah untuk memperluas dan meningkatkan tindakan yang paling ambisius dan inovatif. Pemerintah daerah tidak dapat bertindak sendiri, tetapi mereka dapat menjadi pilar yang mendukung penggabungan kekuatan transformatif yang memajukan urbanisasi berkelanjutan.

Dengan demikian, kebutuhannya sudah mendesak untuk memperkuat upaya **pelokalan agenda global di kota dan wilayah**. Strategi pelokalan harus diarusutamakan ke dalam semua rencana, program dan anggaran dari tingkat nasional hingga daerah. Kota-kota perlu mengadopsi TPB dan NUA sebagai kerangka acuan untuk memandu kebijakan dan rencana mereka, serta memastikan pelaksanaan yang koheren dan terpadu. Negara-negara perlu mengintegrasikan atau memperkuat pendekatan pelokalan yang terkoneksi ke dalam strategi dan rencana aksi pembangunan berkelanjutan untuk memperluas keterlibatan pemerintah dan aktor lokal, serta mempercepat dan meningkatkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Strategi terkoordinasi untuk agenda global —NUA, TPB, Persetujuan Paris, dan Kerangka Kerja Sendai— merupakan keharusan. Tidak ada agenda tunggal yang dapat ditangani secara terpisah.

Pemerintah daerah yang kuat dan mampu adalah pendorong utama untuk mewujudkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam upaya ini dan memperkuat kapasitas mereka, pemerintah daerah dan jaringannya, organisasi internasional dan pemerintah pusat harus **bekerja sama untuk memperkuat diseminasi agenda global, meningkatkan berbagi pengetahuan dan pelatihan, serta memanfaatkan pembelajaran *peer-to-peer* dan kerja sama yang terdesentralisasi** untuk membantu pemerintah daerah dan aktor lokal dalam pengembangan, implementasi dan tindak lanjut dari strategi pelokalan.

Untuk meningkatkan potensi transformatif dari tindakan pemerintah daerah dan secara memadai memanfaatkan kemungkinan urbanisasi, negara harus memastikan adanya **lingkungan kelembagaan yang mendukung untuk tindakan lokal**. Kebijakan desentralisasi yang efektif memperkuat kapasitas otoritas lokal untuk secara efektif berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kebijakan ini sangat mendesak di negara berkembang yang pertumbuhan perkotaannya akan terkonsentrasi dalam beberapa dekade mendatang, agar memungkinkan pemerintah daerah mampu berkontribusi meningkatkan akses kepada layanan dasar sebagai hak esensial, dan mengelola pengembangan perkotaan secara berkelanjutan, sehingga dapat mencegah kegagalan agenda global.

Sebagai bagian dari pemberdayaan pemerintah daerah, perhatian khusus harus diberikan pada **desentralisasi fiskal dan aliran pembiayaan yang memadai untuk mendukung investasi perkotaan**. Seperti yang dinyatakan dalam AAAA (paragraf 34) dan telah ditekankan pada bab-bab sebelumnya dari laporan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perpajakan lokal, termasuk kekuatan untuk mengambil bagian dari nilai tambah tanah dan properti, alokasi yang lebih baik dari pendapatan fiskal nasional melalui transfer antarpemerintah dan akses kepada pinjaman yang bertanggung jawab. Dana pemerataan juga diperlukan untuk memastikan redistribusi sumber daya yang memadai untuk mendukung kemajuan semua kota-kota menengah dan kota-kota kecil, agar tidak ada yang tertinggal. Spektrum pilihan pembiayaan utang yang tepat perlu dibuat atau disesuaikan agar dapat diakses untuk kota-kota dengan ukuran dan kapasitas keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan dan instrumen keuangan yang inovatif.

Perencanaan kota dan lahan yang partisipatif dan berkelanjutan penting untuk memanfaatkan penciptaan bersama kota-kota dan mendukung momentum transformasi perkotaan yang berkelanjutan. Pendekatan perencanaan terpadu, sebagaimana tercermin dalam NUA, sangat penting untuk memperkuat dimensi kota yang inklusif, memfasilitasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memperkuat strategi ketahanan perkotaan,

sehingga dapat melipatgandakan manfaat dari keterkaitan yang ada antara kawasan perkotaan dan wilayah. Perencanaan yang inklusif dan partisipatif adalah pendorong utama untuk melibatkan aktor lokal dalam mendefinisikan visi bersama dan mendukung penggabungan kekuatan lokal yang transformatif. Reformasi peraturan dan kerangka kerja perencanaan merupakan bagian penting dari pelokalan TPB dan NUA. Tindakan mendesak diperlukan untuk meningkatkan perencanaan kota yang diperlukan di wilayah dengan pertumbuhan kota yang cepat (Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan dan Asia Tenggara).

Yang juga penting adalah penciptaan **kerangka kerja tata kelola pemerintahan berjenjang yang kuat sebagai salah satu pilar NUA**, yang dibangun berdasarkan mekanisme yang dilembagakan untuk kolaborasi dan koordinasi vertikal dan horizontal, serta yang diabadikan dalam proses konsultasi yang luas. Tata kelola pemerintahan berjenjang yang efektif membutuhkan struktur hukum dan kelembagaan yang jelas, yang didasarkan pada prinsip subsidiaritas dan desentralisasi, serta alokasi sumber daya keuangan antarpemerintah yang memadai. Tata kelola pemerintahan berjenjang yang efektif penting untuk membangun KPN yang kuat sejalan dengan TPB serta kebijakan nasional dan wilayah yang mempromosikan sistem perkotaan yang seimbang dan polisentris.

Tata kelola metropolitan yang kuat adalah komponen kunci dari tata kelola perkotaan yang baru. Pemerintah pusat harus mengaktifkan tata kelola metropolitan, memastikan keterlibatan pemerintah daerah dan regional dalam proses reformasi ini. Pada saat yang bersamaan, kurangnya atau tidak memadainya kebijakan untuk kota-kota menengah akan menghalangi terciptanya sistem kota yang kuat dan, sudah barang tentu, pembangunan sosial ekonomi daerah yang seimbang.

Budaya baru partisipasi mencakup pengakuan yang jelas atas hak warga negara dan, lebih khusus lagi, adalah hak mereka atas kota. Pemerintah daerah harus mendorong peningkatan jumlah proses partisipatif, baik secara daring maupun luring, yang mampu melibatkan masyarakat sipil yang terorganisir dalam segala bentuknya (organisasi akar rumput, LSM, sektor swasta, mitra sosial, akademisi, dll.) dan yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok tertentu (misalnya perempuan, pemuda, lansia, penyandang difabel, minoritas rentan dan masyarakat miskin perkotaan). Proses-proses ini harus didasarkan pada aturan bersama dan transparan, memberikan warga negara kekuatan dalam pengambilan keputusan yang nyata dan dilaksanakan secara teratur dan kontinyu. Prosedur partisipasi formal harus dilengkapi dengan kemitraan kolaboratif yang melampaui konsultasi formal, dengan mengakui kelompok masyarakat sipil sebagai mitra aktif di dalam tata kelola perkotaan yang baru. Pola pikir ini menuntut lembaga publik untuk menghargai beberapa kondisi dasar, seperti pemberdayaan dan otonomi gerakan sosial serta pemangku kepentingan lokal.

Keterlibatan efektif dari pemerintah daerah sangat penting untuk **memperkuat tata kelola partisipatif NUA dan TPB** serta berkontribusi kepada nilai urbanisasi berkelanjutan. Di tingkat nasional, banyak yang harus dilakukan untuk pelibatan efektif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mekanisme koordinasi nasional untuk pelaksanaan TPB, serta dalam hal perkuatan keterlibatan mereka dalam penetapan, pelaksanaan dan pemantauan KPN. Konsultasi terbatas dan pengambilan keputusan yang tidak terkoordinasi akan menghalangi koherensi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai TPB dan NUA, serta mengurangi kepemilikan lokal. **Produksi dan diseminasi data untuk keperluan pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi dampak pelokalan agenda global** adalah kunci untuk memastikan bahwa proses perencanaan di semua tingkatan ditentukan dengan target yang realistis, dan bahwa implementasi yang efektif akan dapat dipantau, serta untuk memastikan akuntabilitas dan pelaksanaan tindak lanjut oleh warga.

Catatan Akhir

1. GTF menyatukan 25 organisasi global dan regional dari pemerintah daerah dan regional. GTF mendukung keterlibatan yang kuat dari para pemimpin lokal di dalam persiapan agenda pasca-2015, serta selama proses COP. Presiden UCLG, Walikota Istabul, dinominasikan oleh Ban Ki-moon sebagai anggota dari the High-Level Panel of Eminent Personalities untuk Agenda Pasca-2015 di 2012. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://www. global-taskforce.org/.
2. Lokalitas digambarkan sebagai 'proses pemahaman, pelaksanaan dan pemantauan strategi di tingkat lokal untuk mencapai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan nasional, regional dan global'. Secara khusus, perlu memperhitungkan konteks subnasional dalam pencapaian agenda 2030, dari penetapan tujuan dan target untuk penentuan sarana dalam pelaksanaan dan penggunaan indikator untuk mengukur dan memonitor kemajuannya. Lihat: GTF dan UCLG (2019); UNDP, UN Habitat dan GTF (2016), Peta jalan untuk pelokalan TPB: pelaksanaan dan pemantauan pada tingkat sub-nasional; kelompok pembangunan PBB (2014), proses lokalitas dari agenda pasca-2015 (hasil dari proses dialog PBB yang berlangsung dari Juni 2014 hingga oktober 2014).
3. Urbanisasi bukan hanya hasil dari pengembangan kota tetapi juga hasil dari transformasi kota kecil lama dan area perdesaan yang disebut 'urbanisasi in situ'. Setengah atau dua pertiga dari populasi perkotaan tumbuh sejak 1980 hingga 2000 di Tiongkok dan sekitar 30 persen dari PDB Tiongkok dihasilkan dari daerah perkotaan in situ di mana puncak dari pembangunan adalah pada akhir 1990 (Yu Shu, 2017).
4. PBB, 2020
5. Kota untuk kesehatan global (https://www.citiesforglobalhealth.org/)
6. C40 pusat pengetahuan, 2019a.
7. C40 pusat pengetahuan, 2019b.
8. NUA 63-64; SDG 11.6.
9. NUA 13, 37, 53, 67, 100; SDG 11.7.
10. Di tahun 2020, anggota dari program *100 Resilient Cities* adalah secara resmi berkumpul kembali dibawah jaringan kota baru, jaringan global kota berketahanan/ Global Resilient Cities Network (GRCN).
11. NUA 43-62; NUA 59, 100.
12. Beberapa jaringan berbagi ekonomi bermunculan seperti Sharing Cities Alliance yang mulai sejak 2012. Jaringan global sosial dan solidaritas ekonomi muncul dari tahun 2013 Global Social Economy Forum (GSEF) diselenggarakan di Seoul. Tahun 2016, GSEF meluncurkan Pusat Internasional untuk Inovasi dan Transfer Pengetahuan Sosial dan Solidaritas Ekonomi. Lihat: https://sharingcitiesalliance.com ; http:// www.gsef-net.org/en
13. C40 dan EIT Climate-KIC, 2018.
14. Pertukaran keterpaduan perkotaan, tidak ada informasi waktu.
15. Hal ini sejalan dengan NUA 156, SDG 8 & 9; UCLG Komite digital dan kota berbasis pengetahuan dan Bilbao, 2017.
16. ARUP, tidak ada informasi waktu.
17. Cities Coalition for Digital Rights (https://citiesfordigitalrights.org).
18. NUA 5 dan 136.
19. Dapat dilihat, sebagai contoh: Kota Pangan Berkelanjutan di UK, Red de ciudades por la Agroecología di Spanyol, Rete Città Sane di Italia, Kesepakatan kota: Agenda pangan untuk perkotaan di Belanda, BioStädte network di Jerman, AgroEco Cities European Network dan jaringan ICLEI-RUAF CITYFOOD. Satu yang paling bermakna adalah Milan Urban Food Policy Pact, dengan 203 kota yang menandatangani dari setiap benua yang mewakili 450 juta penduduk sejak 2015.
20. NUA 14.a, 25-42, 70, 91 dan 99; TPB khususnya 1, 6 dan 11.
21. Proyek Mejoramiento Integral de Barrios (http://isvimed.gov.co/programa/mejoramiento-integral- de-barrios); proyek kumuh Mukuru, (https://www.iied.org/special-approach-slum-upgrading-special-planning-area-mukuru-nairobi).
22. Deklarasi telah ditandatangan oleh: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Birmingham, Buenos Aires, Durban, Geneva, Jakarta, Lisbon, London, Mexico, Medellin, Montreal, Montevideo, New York, Paris, Seoul, Strasbourg, Taipei dan Vienna.
23. NUA 13.b, 14.c, 92.
24. Metropolis, 2018.
25. PBB, 2017.
26. https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda. European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) bersama dengan lebih dari 100 otoritas lokal Eropa dan telah bekerja pada isu ketidak-diskriminasi lebih dari satu dekade. Komisi regional serupa ada dibeda benua setelah di bawah ICCAR, mitra entitas UNESCO yang namanya berganti menjadi International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities (lihat: https://www.eccar.info/).
27. Peran pemerintah daerah dalam mempromosikan dan menjaga hak asasi manusia – Laporan final dari Human Rights Council Advisory Committee [A/HRC/30/49 (2015)]; Local government and human rights [A/HRC/RES/33/8(2016)].
28. NUA 10, 26, 124; SDG 4, 11.4.
29. Culture 21: Agenda 21 untuk Budaya (http://agenda21culture.net/sites/default/ les/ les/culture21-actions/c21_015_en.pdf); Database dengan kasus studi telah ada di (http://obs.agenda21culture.net/en/ home-grid).
30. OECD dan UCLG, 2019; Angka ini didasarkan pada contoh 106 negara untuk pengeluaran, 104 negara untuk pendapatan dan 99 negara untuk investasi public secara langsung.
31. UN-Habitat, 2016.
32. OECD dan UCLG, 2019.
33. UN-Habitat, CAF dan Fundación Avina, 2014; ECLAC Stat: Indeks gini di kawasan perkotaan bergerak dari 0.51 in 1990 to 0.46 in 2014(see: https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=250&idioma=i).
34. UCLG ASPAC, Cities Alliance, UNDP, 2018.
35. UCLG Africa, Cities Alliance, 2018.
36. UCLG, 2019a.
37. UCLG, 2019a.
38. UCLG, 2019a.
39. OECD dan UCLG, 2019.
40. Ivanyna,. dan Shah, 2014, p. 14. Studi termasuk 160 negara. Aturan pinjaman lokal lebih akomodatif di Eropa dan America Latin.
41. Satuan tugas antarlembaga terkait pembiayaan pembangunan, 2018
42. Kontribusi dari C40 ke GTF dan UCLG, 2019; Bank Investasi Eropa "Tantangan Kota Iklim Global.2019"
43. UCLG, 2014.; Villes en Développement n. 111 (2019).
44. S. Kishimoto et al, 2019.
45. OECD, 2015; Gómez Álvarez et al,2017.
46. Otoritas gabungan dapat dibentuk oleh dua atau lebih otoritas lokal. Mereka akan mengambil fungsi hukum yang dialihkan kepada mereka oleh perintah yang dibuat Sekretaris Negara, ditambah fungsi lainnya yang disetujui untuk dibagikan oleh otoritas konstituen (https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06649/)
47. Asosiasi Pemerintah Daerah, tidak ada informasi waktu; Centre for Cities, 2019.
48. Harkness. dan Katz, 2017.
49. Sidang Umum PBB (2017), seksi khusus "Perencanaan dan pengelolaan pembangunan spasial perkotaan", paragraf. 93-103; UN-Habitat, 2016.
50. Bhan et al, 2018.
51. UN-Habitat, 2009; UN-Habitat, 2015a.
52. lihat: https://proyectoallas.net/2018/03/02/fortalece-cdmx- trabajo-de-la-agenda-2030-de- desarrollo-sostenible/
53. Senat Berlin, 2018
54. OneNYC 2050 (https://onenyc.cityofnewyork.us/).
55. UCLG,2019; GTF dan UCLG (2018, 2019).
56. UN-Habitat, 2010c.
57. UN-Habitat, 2016; Bhan, et al, 2018; Di negara OECD pemerintah nasional menyediakan peraturan untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana startegis nasional dan perencanaan regional, dengan pemerintah daerah yang mengatur perencanaan tata guna lahan. Di negera federal (khususnya di Amerika) perencanaan berjalan terutama di tingkat negara bagian dan lokal.
58. UN-Habitat, 2016; perencanaan strategis berkembang pesat di kota-kota di semua bagian, seperti, Barcelona (sejak tahun 90s), Dar-es-Salaam, Johannesburg, Lima, London, Melbourne, Nairobi, New York, Quito, Seoul, Shanghai atau, Tokyo dan di kota-kota dari semua ukuran. Rencana strategis dan Strategi Pembangunan Kota juga didorong oleh jaringan kota dan lembaga internasional dengan tujuan untuk memberikan suara kepada penduduk tentang masa depan kota mereka (contoh Cities Alliance atau saat ini bersama partner yang berbeda, sebagai contoh, proyek Medinatouna di Sembilan kota ukuran menengah di Tunis).
59. UCLG, 2016; Graham dan Marvin. 2001; Sassen, 2018.
60. https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles: Programa de ciudades emergentes y sostenibles
61. UNESCAP dan UN-Habitat, 2019.
62. V. Watson, laporan kontribusi kepada pemerintah daerah dan regional yang ditujukan kepada HLPF di tahun 2018 (belum terbit)
63. SDI dan Know Your City, 2018.
64. POT, di mana termasuk pembangunan spasial dan lingkungan, tata guna lahan, pencegahan risiko, infrastruktur dan perumahan, dsb. Gobierno de Colombia (2017 dan 2019); UCLG, 2019a; Untuk mendorong implementasi TPB, pemerintah mengusulkan untuk memperkuat penggunaan berbagai mekanisme seperti kontrak perencanaan (untuk mendorong pembiayaan bersama dari pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta) dan proyek-proyek yang dibiayai melalui Sistem Umum Royalti (UN- Habitat, 2017).

65. https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/territorial-planning, Negara dengan rencana teritori dan mandate perkotaan di tingkat lokal: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela). Lihat juga UN- Habitat, 2017.
66. Republik Indonesia, 2019
67. UCLG, 2019a.
68. UN-Habitat, 2016.
69. Pengamatan internasional tentang demokrasi partisipatif mengumpulkan ribuan pengalaman yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di berbagai benua melalui modalitas yang berbeda (sebagai contoh komite dan majelis lingkungan, pertemuan dewan kota terbuka, dewan untuk orang tua dan pemuda, penganggaran dan perencanaan partisipatif, referendum dan e-demokrasi, lainnya) [IOPD (https://oidp.net/en/)]; Pengalaman ini ada di Brazil, Tiongkok, Korea Selatan, Russia, the US, sebagimana di Africa, Arab dan negara Eropa (Cabannes, 2018).
70. UN-Habitat, 2015b.
71. https://www.opengovpartnership.org/stories/new-approaches-new-opportunities-expanding-the-reach-of-local-open-government/; https://opengov.uclg.org/
72. Lihat. UN Global Compact.
73. Informasi lebih lanjut pada program Voice of the Mayors, the Seoul case, dan the activities of Metropolis tersedia online: http://www. metropolis.org/voice-mayors. https://www.uclg.org/en/media/news/citizen-participation-part-everyday-life-city-canoas
74. Asian Coalition for Housing Rights (ACHR), Laporan tentang Kebijakan Perumahan di wilayah Asia, (laporan disiapkan untuk UCLG-GOLD); https://knowyourcity. info/wp-content/uploads/2018/02/SDI_StateofSlums_LOW_FINAL.pdf.
75. Sejumlah besar solusi inovatif telah diujicobakan untuk masuk dan menguntungkan kelompok sosial tertentu yang dikucilkan: tunawisma (contoh Paris, São Paulo), LGBT+ (beberapa pengalaman di Brazil), pekerja migran (contoh Taoyuan, Taiwan Provinsi China), anak muda (berbagai contoh Valongo, Portugal), wanita (contoh Solo/Surakarta, Indonesia, Seville, Spain), etnis minoritas di perkotaan (contoh São Paulo, Brazil atau Rosario, Argentina), miskin (i.e. Yaoundé, Cameroon), dengan disabilitas (contoh Sanxia district, Taiwan Provinsi China; La Serena, Chile); komunitas desa di perkotaan (contoh Quito or Cuenca, Ecuador; Chengdu, China) dsb.
76. S. Langelier, 2011; Ghertner (2011; Allegretti et al, 2016; UN-Habitat,2016, p.110
77. Cabannes dan Lipietz, 2017.
78. Allegretti et al,2016; EIP-SCC,2015.
79. UNDESA, 2018.
80. NUA paragraphs 89 dan 149; UN-Habitat (2016), p.117
81. OECD, 2017; UN-Habitat dan OECD,2018; 10 negara di Eropa dan Amerika Utara mengadopsi eksplisit NUPs dan 23 bagian NUPs.
82. GTF dan UCLG, 2019.
83. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Agenda Perkotaan untuk EU (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/ themes/urban-development/agenda/ pact-of-amsterdam.pdf); Kepresidenan Belgia di EU pada tahun 2010 menerbitkan buku pegangan untuk tata kelola perkotaan berjenjang di Eropa (http://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/TA-8-2018-0273_EN.html)
84. Berdasarkan kerangka hukum yang dibuat oleh Statuta Kota (2001) dan didukung oleh Kementerian Kota, Brasil mempromosikan dialog nasional partisipatif – melalui Konferensi Kota Nasional - yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah serta organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan perkotaan nasional dan mempromosikan kerjasama multilevel. Namun pada 2017, pemerintah nasional membatasi kekuasaan Dewan Kota Nasional dan menunda konferensi nasional (Decree 9076/2017.SEP Lihat: UN-Habitat (2016) p. 106; E. Fernandez, "Urban Planning at a crossroads, A critical assessment of Brazil's City Statute, 15 years later," in Gautam Bhan et al (2018), pp. 48-57.
85. Untuk lebih detail lihat Zhu dan Lin, 2011; Pengaturan multilevel diperlukan untuk merancang kebijakan yang berkaitan dengan hak, jaminan sosial, serta penyediaan dan pembiayaan layanan publik
86. Lihat: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/pdf/about_sdgs.pdf
87. UCLG, 2019a.
88. UN-Habitat, 2015c.
89. UN-Habitat dan OECD,2018.
90. Leck dan Simon ,2013.
91. UN-Habitat dan OECD, 2018; Cartwright et. all. (2018) mengidentifikasi 18 negara Afrika yang memiliki strategi urbanisasi khusus yaitu NUPs: Algeria, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Gabon, Kenya, Malawi, Mali, Morocco, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Swaziland dan Uganda.
92. UN-Habitat (http://urbandata.unhabitat.org/partners).
93. Untuk informasi lebih, lihat untuk Germany (https://sdg-portal.de/); untuk Brazil (http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal); untuk Africa (https://knowyourcity.info/wp-content/uploads/2018/02/SDI_StateofSlums_LOW_FINAL.pdf.).
94. Lihat: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11/local; VLR pertama dielaborasi oleh New York, dan kota Toyama, Kitakyushu, dan Shimokawa di Jepang. Buenos Aires, Barcelona, the Basque Country, Bristol, Canterbury, Helsinki, La Paz, Los Angeles, Mexico City, Málaga, Mannheim, Oaxaca, Santana de Parnaíba, Sydney, Suwon, Taipei, Valencia mengikutinya.
95. OECD ,2020; EC-JRC, 2020.SEP
96. GTF dan UCLG,2019; Hanya di 47 negara dari 142 negara yang mempresentasikan VNR mereka ke HLPF antara tahun 2016 dan 2919, pemerintah daerah dikaitkan atau diajak berkonsultasi oleh mekanisme koordinasi nasional untuk tindak lanjut TPB Berkenaan dengan NUP, survei yang dilakukan oleh UCLG IN 2016 menunjukkan beberapa keterlibatan negara-negara Amerika Latin, tetapi keterlibatan terbatas di Asia dan Afrika.
97. PBB, 2020

Bab 8

Investasi dalam Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Investasi yang signifikan diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, lingkungan, sosial, termasuk juga kondisi kota yang tak berwujud, dari urbanisasi, yang kesemuanya penting untuk mewujudkan urbanisasi berkelanjutan. Seperti halnya semua aspek pembangunan, urbanisasi berkelanjutan membutuhkan pembiayaan yang memadai. Sejauh mana sebuah kota dan negara dapat menarik dan memanfaatkan investasi publik dan swasta untuk mencapai TPB 11 dan NUA merupakan kunci untuk meningkatkan nilai dari urbanisasi yang berkelanjutan. Untuk dapat menutup jurang antara investasi memerlukan koordinasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan, termasuk berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, serta lembaga bilateral dan multilateral

Fakta Singkat

1. Investasi dalam infrastruktur perkotaan termasuk aset fisik, modal SDM dan kelembagaan, struktur tata kelola yang efektif, serta inovasi teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai dari urbanisasi yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan dimensi perkotaan dari TPB memerlukan sekitar USD 38 Triliun. Sumber pembiayaan tersedia di tingkat global, namun tidak tersalurkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
3. Kebutuhan investasi berbagai kota dan negara untuk mencapai urbanisasi berkelanjutan bervariasi, tergantung pada ukuran kota, tren demografi, konfigurasi perkotaan, lokasi geografis, tingkat pembangunan kota negara dan kualitas dari aset yang ada.
4. Pandemi COVID-19 menciptakan iklim investasi yang tidak pasti karena hanya 5 persen dari pemimpin sektor publik dan swasta yakin bahwa investasi akan meningkat setelah pandemi.
5. Pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala dalam pembiayaan perkotaan. Ini meliputi kekurangan dana pemerintah pusat, kemampuan pengelolaan fiskal yang lemah, terbatasnya pendapatan dan kendala hukum.

Butir Kebijakan

1. Pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan potensi endogen pendapatan daerah secara inovatif, sehingga di jangka panjang dapat meningkatkan kemandirian lokal dan keberlanjutan pembiayaan.
2. Koherensi kebijakan antara pemangku kepentingan di tingkat global, regional, nasional dan lokal penting untuk memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan nilai urbanisasi.
3. Berbagai aktor dan kolaborasi bisnis dibutuhkan untuk mendanai infrastruktur perkotaan.
4. Institusi untuk pengelolaan investasi publik harus diperkuat sehingga dapat mencapai manfaat yang diharapkan sekaligus menjaga kualitas dan pengeluaran yang efisien untuk aset fisik kota.
5. Kebijakan dan investasi untuk meningkatkan nilai urbanisasi harus berdasarkan bukti (*evidence based*) dan didasarkan target yang realistik dan mudah dipantau.

Dekade Aksi untuk mencapai TPB tahun 2030 mewakili momen penting dalam agenda pembangunan global dan upaya menuju urbanisasi berkelanjutan melalui implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA). Hal ini memerlukan investasi cukup besar dalam meningkatkan kondisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan hal-hal tak berwujud dari kota, yang mana semuanya merupakan komponen penting untuk mewujudkan nilai-nilai dari urbanisasi yang berkelanjutan. Investasi ini meliputi aset fisik, SDM, kelembagaan, struktur tata kelola yang efektif, dan teknologi inovatif yang merupakan pondasi dari kota yang berkelanjutan.[1]

Karena tujuan 11 berkaitan dengan tujuan-tujuan TPB lainnya serta NUA, maka investasi dalam berbagai dimensi dari nilai urbanisasi sebagaimana dibahas dalam Laporan ini penting untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 secara lebih luas. Sebagai contoh, investasi dalam perumahan yang layak dan terjangkau, prasarana dasar dan peningkatan kualitas permukiman kumuh mempunyai dampak langsung terhadap sedikitnya tiga perempat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).[2] Demikian pula, investasi proyek-proyek energi yang moden, terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan mendukung pencapaian TPB 7. Demikian pula, investasi dalam pembangunan kapasitas staf pemerintah daerah dan kelembagaan mendukung TPB 16. Namun kini, masih terdapat kekurangan investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dari agenda ini, termasuk juga Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim dan SFDRR. Meskipun secara global terdapat kesenjangan biaya, namun di berbagai negara berkembang lebih terasa karena pendapatan negara yang tidak mencukupi.

Komitmen pembiayaan yang tetap berlanjut untuk ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur sosial menjadi kunci untuk mencapai urbanisasi yang inklusif yang menyediakan pelayanan publik dan perlindungan sosial untuk penduduk yang rentan seperti dibahas di Bab 2 dan Bab 5. Aksi oleh pemerintah daerah penting, tapi kalau berdiri sendiri, tidak mungkin menghasilkan kebutuhan investasi untuk sepenuhnya mendorong

terwujudnya nilai-nilai urbanisasi berkelanjutan. Menutup jurang antara investasi membutuhkan koordinasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, termasuk berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, institusi bilateral dan multilateral. Tren yang disorot dalam Bab 1 dan bab-bab lain mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah kekurangan pembiayaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Adanya pandemi COVID-19 meningkatkan kebutuhan mendesak mengenai isu-isu seperti kemiskinan, kelaparan, perumahan, sistem kesehatan dan perubahan iklim melalui kerangka kerja TPB.

Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini, kota menghasilkan 80 persen dari PDB global. Namun, banyak kota-kota yang tumbuh dengan cepat tidak menikmati langsung hasil dari kekayaan yang dihasilkan, dan harus terus berjuang dengan kekurangan anggaran dan akumulasi defisit infrastruktur. Sebagai tambahan, seperti ditunjukkan dalam Bab 7, meski ada sejumlah dana 'tersedia' di tingkat global dan investasi yang meningkat di kota-kota global, pembiayaan memadai tidak diarahkan untuk urbanisasi berkelanjutan di kota-kota dan wilayah yang paling membutuhkan sumber daya. Distribusi yang timpang ini terlihat dalam pola investasi untuk riset sains dan teknologi yang mendukung inovasi ekonomi (Bab 6), maupun investasi dalam pemantauan dan mekanisme pelaporan yang harus mendasari kebijakan dan aksi yang menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan (Bab 7).

Banyak kota yang tumbuh secara cepat tidak dapat memanfaatkan kekayaan di wilayahnya, malah harus tetap berjuang dengan anggaran yang tidak memadai serta akumulasi defisit infrastruktur.

Tram yang bergerak di Jalan Bahnhofstrasse Street, Pusat Kota Zurich, Zurich, Swiss © Roman Babakin/Shutterstock

Bab ini membahas bagaimana kota-kota dan negara-negara menarik dan mengungkit pembiayaan publik dan swasta dalam menciptakan dan mengelola investasi yang diperlukan untuk mencapai TPB 11 dan melaksanakan NUA, sehingga dapat meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan. Meski tidak ada jawaban yang mudah, jalan ke depan sudah jelas: harus tingkatkan pendapatan dalam negeri, bantuan teknis pembangunan, dan investasi swasta. Lebih lanjut, koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat global, nasional dan lokal perlu ditingkatkan untuk memastikan fasilitas pembiayaan yang ada sesuai dengan kondisi lokal, sehingga investasi efisien dan dapat diarahkan untuk yang paling membutuhkan. Meskipun iklim investasi saat ini diwarnai ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, kebutuhannya tetap penting. Keputusan investasi yang diambil hari ini akan menentukan bagaimana wajah dan fungsi kota ke depan.

8.1 Permintaan akan Investasi di Perkotaan

Saat ini, agenda pembangunan global –TPB, NUA, Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim, dan SFDRR– dilaksanakan tanpa sumber pembiayaan yang mengalir sesuai dengan kecepatan dan skala yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.[3] Disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 2015, Agenda Aksi Addis Ababa (AAAA) memberikan kerangka kerja untuk pembiayaan kolektif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dalam Konsensus Monterrey, AAAA mengakui bahwa pembiayaan TPB lebih dari sekedar aliran dana, tapi juga tergantung pada kebijakan publik yang memperkuat iklim fiskal nasional dan internasional.[4] Kedua kerangka ini meminta pemerintah dan mitra pemangku kepentingan berjenjang untuk memobilisasi sumber pembiayaan secara lebih terkoordinasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga lingkungan hidup, terutama di negara-negara berkembang.[5]

Lima tahun setelah AAAA, janji-janji untuk pembiayaan pencapaian TPB dan agenda pembangunan terkait belum juga terwujud. Secara global, pendapatan pemerintah masih merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan perkotaan, namun rata-rata di negara-negara berpenghasilan rendah masih di bawah 15 persen dari batas PDB yang diperlukan untuk fungsi negara yang efektif.[6] Aliran dana global ke negara-negara berpenghasilan rendah, menurun setelah krisis ekonomi global tahun 2008 dan tidak sepenuhnya pulih kembali.[7] Lebih lanjut, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kemunduran dalam kerja sama internasional, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap globalisasi, meningkatnya risiko pengembalian utang, dan frekuensi goncangan iklim yang membuat pembiayaan berkelanjutan lebih sulit.[8]

Menurunnya kerjasama internasional, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap globalisasi, meningkatnya resiko utang, serta meningkatnya frekuensi goncangan iklim membuat pembiayaan berkelanjutan lebih sulit.

Meskipun dampak menyeluruh (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) dari pandemi COVID-19 belum diketahui, cukup jelas bahwa guncangan ekonomi dan finansial terkait pandemi mengancam pelaksanaan TPB.[9] Adanya pandemi meningkatkan kebutuhan pembangunan dan mengurangi dana investasi, terutama investasi untuk pembangunan kota-kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai contoh, diperkirakan pandemi akan mendorong sekitar 71-100 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrim.[10] Pada saat yang sama, pendapatan pemerintah daerah diprediksi menurun sekitar 15-25 persen di tahun 2021.[11] Kondisi yang kontras ini akan membuat kota-kota makin sulit memberikan pelayanan yang dibutuhkan, tapi juga membatasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, lingkungan hidup dan sosial bagi penduduk yang rentan, misalnya masyarakat yang tinggal di permukiman informal dan kumuh. Dampak multidimensi COVID-19 baik keluaran kesehatan masyarakat dan ekonomi, banyak negara terpaksa merelokasi sumber dana dalam negeri untuk kebutuhan mendesak pandemi. Pada saat yang sama, banyak investor meninggalkan pasar yang sedang berkembang untuk memilih investasi yang lebih aman. Hal ini menyebabkan negara-negara yang berkembang

kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.[12]

Namun, permintaan untuk investasi masih tinggi dalam penyediaan perumahan layak, pelayanan dasar, sistem transportasi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan perkotaan, dan kebutuhan lain yang mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan, terutama di daerah yang berkembang dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat (Bab 1). Setiap negara mempunyai kebutuhan investasi yang berbeda-beda tergantung pada karakter spesifik lokal. Meskipun berbeda, hal mendasar adalah semua investasi terkait dengan dimensi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan dimensi tak berwujud diperlukan untuk mendukung fungsi sistem kota (Tabel 8.1). UN-Habitat memperkirakan total investasi untuk dimensi perkotaan dari TPB dan pembangunan infrastruktur sekitar USD 38 Triliun untuk tahun 2020-2030 (Kotak 8.3).[13]

Tabel 8.1: Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat dari Urbanisasi berkelanjutan

Nilai urbanisasi berkelanjutan	Elemen dari Investasi	Contoh Proyek
Ekonomi	Investasi pada aset-aset fisik, sistem, dan fasilitas penunjang ekonomi perkotaan	Proyek-proyek belanja modal seperti perumahan, jalan, jembatan, rel kereta berkecepatan tinggi, air dan sanitasi, ruang publik dan fasilitasnya, dan teknologi untuk manajemen perkotaan yang efisien
Lingkungan	Investasi yang melindungi dan meningkatkan ekosistem perkotaan, mengurangi emisi GRK dan polusi udara, meningkatkan efisiensi SDA, mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan bencana lainnya, melindungi ekosistem kritis dan keanekaragaman hayati	Proyek energi terbarukan, bangunan *retrofitting*, pengelolaan limbah berkelanjutan, penggunaan lahan berkelanjutan, NBS, konservasi keanekaragaman hayati, transportasi berkelanjutan, dan proyek adaptasi iklim
Sosial	Investasi yang mendorong inklusi dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Investasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan kota berkeadilan dengan mempromosikan hak dan kesetaraan, tapi juga meningkatkan integrasi, layak tinggal, kesehatan, dan kesejahteraan di ruang kota.	Perumahan terjangkau, peningkatan kualitas permukiman kumuh, fasilitas pemerintah daerah, kapasitas SDM, jaminan kesehatan, pembangunan pemuda, program dan pelatihan kerja, akses transportasi untuk semua, teknologi dan solusi inovatif yang meningkatkan kohesi sosial dan layanan yang menyasar kelompok tertentu (contohnya anak-anak, remaja, orang tua, keluarga, perempuan, lansia, penduduk migran, penduduk asli, dll.)
Tak Berwujud	Investasi dalam tata kelola perkotaan yang baik (dikarakteristikkan oleh norma yang saling bergantung dan memperkuat, yaitu: subsidiaritas, keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan sipil, keamanan, promosi dan perlindungan keanekaragaman budaya). Investasi yang memberikan daya ungkit untuk keragaman budaya dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan	Mengembangkan struktur tata kelola, institusi, kerangka hukum, kapasitas teknis, sistem pemantauan dan pelaporan, serta kolaborasi jaringan. Proyek yang melindungi dan mempromosikan infrastruktur dan fasilitas budaya.

**catatan: beberapa investasi berada di lebih dari satu dimensi*

Untuk mengungkit potensi urbanisasi berkelanjutan, investasi dalam infrastruktur keras dan lunak harus sejalan dengan Agenda 2030 dan agenda pembangunan lainnya

Untuk mengungkit potensi urbanisasi berkelanjutan, investasi dalam infrastruktur keras dan lunak harus sejalan dengan Agenda 2030, NUA, dan agenda pembangunan lainnya. Tujuannya bukan sekedar banyak pengeluaran, tapi pengeluaran yang lebih efisien dengan mengutamakan keberlanjutan. Investasi ini harus membumi dengan dimensi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dan mempunyai potensi meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara-cara yang lebih berarti, terlihat dan berwujud.[14]

Dalam dimensi ekonomi, investasi mendukung negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari potensi ekonomi aglomerasi dan transformasi struktur kota-kota. Dalam dimensi lingkungan hidup, investasi berpotensi punya dampak (positif) pada lingkungan hidup di tingkat lokal, regional, dan global dengan cara mengurangi emisi GRK, meningkatkan efisiensi SDA, mitigasi dampak negatif perubahan iklim, dan melindungi ekosistem kritis serta keanekaragaman hayati.[15] Dalam dimensi sosial, investasi mendorong inklusi dan mendorong akses ke peluang yang berkeadilan. Terakhir, investasi dalam ke tiga dimensi urbanisasi berkelanjutan dikelola oleh lembaga pada berbagai tingkatan pemerintah dengan sumber daya yang memadai.

8.1.1 Kebutuhan Investasi Kota yang Beragam

Beragam investasi lintas sektor dibutuhkan untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan (Tabel 8.1). Jumlah investasi tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran kota, tren kependudukan, konfigurasi kota, lokasi geografis, tingkat pembangunan ekonomi, pendapatan kota dan kemampuan memobilisasi sumber pembiayaan lokal, maupun kualitas dari aset perkotaan eksisting. Keberagaman kebutuhan investasi berdasarkan kota dan karakter spesifik negara digambarkan dalam studi uji coba UN-Habitat dan AidData tentang kebutuhan investasi untuk mencapai TPB (Kotak 8.1).

Kebutuhan kota-kota yang ekonominya maju, sebagai contoh, adalah peningkatan kualitas untuk memperbarui atau mengganti infrastruktur fisik yang kurang memadai seperti jembatan, sistem pembangkitan dan distribusi energi, jaringan air dan limbah, serta investasi baru dalam infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan hanya beberapa negara, seperti Australia dan Jepang, sudah melakukan investasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan ke depan akan mampu mengurangi porsi PDB untuk infrastruktur.[16] Secara kontras, negara Jerman, UK dan Amerika Serikat menghadapi jurang antara komitmen biaya saat ini dengan estimasi kebutuhan.[17]

Lebih lanjut, investasi dalam infrastruktur transportasi perkotaan didorong oleh budaya kendaraan roda empat. Di Eropa, sebagai contoh, jalan meliputi lebih dari separuh investasi infrastruktur transportasi.[18] Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran menuju mobilitas yang berkelanjutan dengan investasi dalam infrastruktur dan kebijakan yang mendorong transportasi non-motor, teknologi digital yang mendorong efisiensi dalam sistem transportasi secara keseluruhan, solusi mobilisasi bersama, kendaraan bebas emisi. Di wilayah Eropa, pada tahun 2025, dibutuhkan 1 juta stasiun Stasiun Pengisian Daya Listrik (SPDL) untuk 13 juta kendaraan tanpa emisi dan emisi rendah di jalan-jalan Eropa.[19]

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1, ada kebutuhan mendesak untuk perumahan yang layak dan terjangkau. Kota mega yang sudah mapan seperti London, New York, dan Paris menunjukkan bahwa permintaan akan perumahan melebihi penyediaan. Kota-kota ini memerlukan penyediaan perumahan terjangkau, sehingga menghindari penyediaan perumahan yang terlalu mahal bagi generasi pekerja muda.[20] Baik otoritas publik dan sektor real estat harus berkolaborasi (terkait regulasi dan insentif) untuk mendorong investasi ke sektor perumahan, sehingga mempercepat penyediaan perumahan. Agar kota-kota dapat mempertahankan iklim bisnis yang bersaing dan memastikan keterjangkauan, investasi yang agresif

diperlukan untuk mendukung solusi yang inovatif, terjangkau dan fleksibel, yang dapat menampung sektor-sektor inovatif yang tumbuh.[21]

Di kota-kota utama di negara berkembang seperti Bangkok, Delhi, Jakarta, Lagos, Mumbai dan Sao Paulo, terdapat tantangan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berbeda. Kota-kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk dan pekerja kelas menengah. Meskipun sistem infrastruktur merupakan tulang punggung persaingan antarkota dan keberhasilan jangka panjang, kota-kota ini mempunyai defisit dalam infrastruktur keras dan lunak. Permintaan akan investasi dalam transportasi berkelanjutan makin tinggi, terutama untuk sistem *Mass Rapid Transit* (MRT). Biaya kemacetan lalu lintas di Mumbai dan Delhi sekitar USD 4,8 miliar dan USD 9,6 miliar, sementara warga Sao Paulo menghabiskan satu bulan per tahun-atau 2,4 jam per hari- dalam lalu lintas.[22] Sao Paulo, sebagai contoh, sedang melakukan investasi untuk mendorong kualitas pelayanan transportasi perkotaan melalui implementasi BRT Aricanduva dan pembangunan Sao Paulo Metro Line- yang telah menghasilkan perbaikan waktu tempuh perjalanan.[23]

Demikian pula, kota-kota dengan ekonomi yang berkembang perlu meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup. Kawasan Delta Sungai Yangtze, kawasan paling sejahtera di Tiongkok tapi juga bertanggung jawab atas porsi besar konsumsi energi dan emisi karbon, mempunyai permintaan tinggi untuk investasi dalam sektor lingkungan hidup.[24] Tahun 2018-2020, kebutuhan investasi untuk perlindungan lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan Shanghai dan kota-kota sekitarnya sejumlah USD 41,2 miliar.[25]

Kota-kota dalam ekonomi yang berkembang membutuhkan investasi untuk fasilitas umum dan infrastruktur sosial seperti perumahan terjangkau, tempat asuh anak, sekolah, dan fasilitas kesehatan.[26] Perkembangan transisi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan telah mengakibatkan kebutuhan investasi dalam infrastruktur digital dan utilitas. Investasi ini mendorong persaingan dan efisiensi dan juga memberikan landasan kuat untuk perkembangan ke depan.[27] Investasi dalam riset, teknologi dan inovasi sangat penting bagi negara-negara dan kota-kotanya untuk bertransisi ke ekonomi hijau.[28]

Secara menyeluruh, di kawasan yang berkembang, terutama di negara terbelakang (LDCs), kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas infrastruktur di kota-kota tertinggal jauh dari kota-kota ekonomi maju dalam hal: perumahan, utilitas (listrik, air, TIK, limbah, dan pengelolaan sampah); pekerjaan umum (jalan, *waterway*, pelabuhan, dan bandara); kapasitas kelembagaan dan struktur tata kelola. Beberapa kawasan, seperti Afrika Sub-Sahara, secara historis infrastrukturnya kurang layak dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang melampaui modal investasi, sehingga mengarah pada kekurangan berbagai jenis infrastruktur.[29]

Kebutuhan akan perumahan layak dan terjangkau makin terasa di kawasan-kawasan tersebut; kekurangan perumahan semakin terasa sementara kemampuan kota terbatas untuk memenuhi penduduk perkotaan yang semakin bertambah. Namun beberapa negara, melakukan langkah untuk menangani kekurangan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Di Sri Lanka, Otoritas Pengembangan Perkotaan (Urban Development Authority) merencanakan untuk membangun 50,000 unit.[30] Program Perumahan Terjangkau di Kenya bertujuan untuk menyediakan 500,000 unit rumah yang bersertifikat *Excellence in Design for Greater Efficiencies* (EDGE) dalam upaya menangani defisit dua juta unit rumah (Gambar 8.1).[31]

Di samping investasi dalam infrastruktur, negara-negara berkembang juga memerlukan investasi dalam membangun dan meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan yang efektif, teknologi dan inovasi, serta struktur tata kelola yang kuat agar dapat menghadapi tantangan urbanisasi berkelanjutan. Beberapa negara Arab, sebagai contoh, tidak saja kehilangan aset perkotaan akibat dirusak tapi juga kehilangan sumber daya terampil dalam lembaga pemerintahan akibat kerusuhan dan migrasi.[32]

Gambar 8.1: Defisit perumahan di Afrika

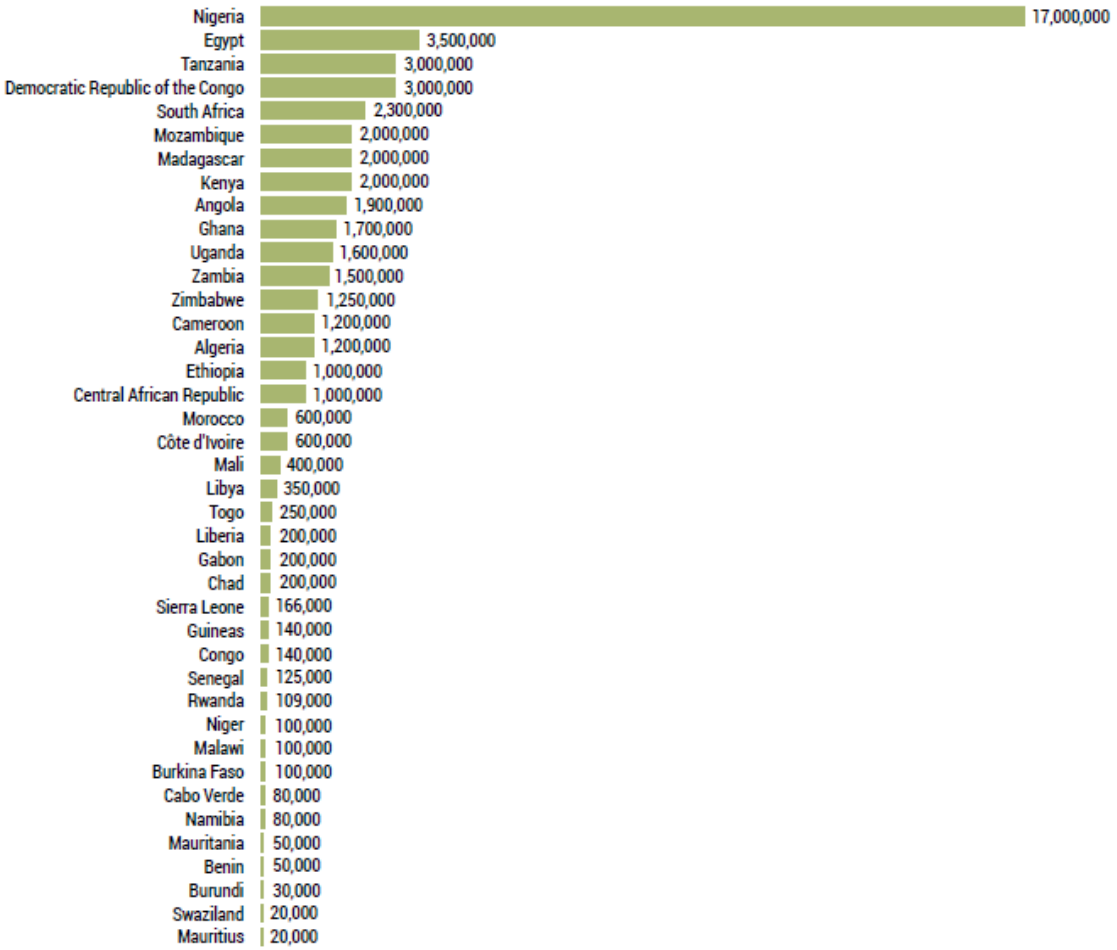

Sumber: Bah, dll, 2018

Investasi yang beragam di kota-kota sangat memerlukan koordinasi internal yang baik agar tujuan dan prioritas bersama antar-berbagai tingkatan pemerintahan dapat dibangun secara terpadu dan konsisten (Bab 7). Sebagai tambahan, pemberdayaan pemerintahan metropolitan, apabila dimungkinkan, perlu memastikan pendekatan yang lebih terpadu dan efisien terhadap pembangunan kewilayahan melalui kerja sama berbagai pemerintah kota, yang secara bersama-sama mengkaji kebutuhannya.[33] Pengambilan keputusan berdasarkan bukti sangat penting untuk memprioritaskan kebutuhan investasi (Kotak 8.2). Proses ini juga penting untuk mengkaji dampak langsung dan tidak langsung dari investasi (jangka pendek maupun jangka panjang), sehingga dapat memastikan ada manfaat lebih luas-yaitu, memastikan kesejahteraan inklusif dan peluang bagi semua.

8.1.2 Pentingnya Investasi di Infrastruktur Perkotaan

Lebih dari 70 persen permintaan global untuk infrastruktur berada di daerah perkotaan.[34] Menutup jurang antara kebutuhan investasi tidak mudah, tapi sangat penting, sangat memungkinkan, dan mendesak. Argumen sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk investasi dalam peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan tidak dapat dibantah. Investasi dalam infrastruktur perkotaan dapat membuka potensi pertumbuhan setempat. Diperkirakan setiap

tambahan 1 persen PDB yang dikeluarkan untuk investasi infrastruktur dapat memberikan efek berlipat ganda 1–2,5 dari investasi awal, dan efek berlipat ganda ini dapat lebih besar di negara-negara yang ekonominya berkembang.[35] Sebagai contoh di Afrika, investasi infrastruktur diperkirakan meningkatkan PDB per kapita sebesar 2,2 persen per tahun; tanpa investasi dapat menghambat pertumbuhan sebesar 2 persen.[36] Di Amerika Latin, 3 persen PDB digunakan untuk investasi dalam infrastruktur. Namun, kajian Bank Pembangunan untuk Amerika Latin (CAF) menunjukkan bahwa kawasan tersebut perlu meningkatkan investasi menjadi 5 persen agar dapat meningkatkan daya saing.[37] Di kondisi ekonomi maju, IMF memperkirakan bila negara-negara menambah investasinya sebesar 1 persen dari PDB untuk infrastruktur, maka akan terdapat peningkatan rata-rata 1,5 persen PDB selama empat tahun.[38]

Secara umum, investasi infrastruktur perkotaan mempunyai implikasi besar dalam setiap tahapan pembangunan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrim alam.[39] Di negara-negara berkembang, investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur memberikan akses ke pelayanan dasar, pendidikan, dan peluang kerja yang meningkatkan kualitas kehidupan. Ada banyak kajian yang memperlihatkan anggaran untuk infrastruktur mendorong pertumbuhan, terutama di negara-negara berkembang dengan jurang antara infrastruktur cukup besar.[40]

Foto dari udara Lingkungan Perumahan Umum Massal di Lagos, Nigeria © Tayvay/Shutterstock

Kotak 8.1: **Membiayai urbanisasi berkelanjutan: Penghitungan biaya**

Untuk mengisi jurang antara pengetahuan terkait investasi dalam pencapaian TPB 11, UN-Habitat dan AidData merancang upaya dua tahap untuk mengembangkan pendekatan yang sistematis, dapat direplikasi, dan diskalakan. Sehingga dapat menangkap biaya "keras" dan "lunak" sebagai ancang-ancang dalam mencapai kota berkelanjutan pada tahun 2030. Perhitungan tersebut melalui sudut pandang kekotaan terhadap biaya keberlanjutan perkotaan. Berbanding terbalik dengan studi sebelumnya yang melihat biaya pada skala nasional dan internasional. Metodologi penetapan biaya mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur fisik dan institusional (contohnya kapasitas perencanaan kota dan keterlibatan masyarakat). Hal tersebut juga memperhitungkan biaya untuk mewujudkan target SDG 11 yang terkait dengan lima bidang tematik: perumahan, transportasi, pengelolaan sampah, ruang publik, dan tata kelola dan perencanaan kota.

Telah dilaksanakan studi untuk menetapkan biaya tahunan rata-rata dalam mencapai TPB 11 dari 2019-2030 pada enam negara percontohan: Pantai Gading, India, Malaysia, Kolombia, Bolivia, dan Swedia. Namun, perkiraan hanya direalisasikan untuk empat negara sampel (Bolivia, India, Malaysia, dan Kolombia). Harus dipahami bahwa hasil estimasi biaya ini memiliki ukuran sampel yang kecil. Secara total, 129 kota dimasukkan dalam sampel akhir. Hasil dari empat negara sampel menunjukkan bahwa total biaya tahunan rata-rata pada kota-kota kecil untuk mencapai TPB 11 berkisar antara USD 18 juta di Malaysia hingga USD 54 juta di Bolivia. Untuk kota berukuran sedang, total biaya tahunan rata-rata berkisar dari USD 144 juta di India hingga USD 516 juta di Malaysia. Untuk kota-kota besar yang dijadikan sampel, total rata-rata tahunan berkisar dari USD 645 juta di Bolivia hingga sekitar USD 5,29 miliar di Malaysia.

Tabel A: Prakiraan Rata-Rata Biaya Tahunan untuk Mencapai TPB 11 di Kota Kecil (Penduduk < 100 Ribu Penduduk). Dalam Juta USD

Negara	Jumlah Sampel	Perumahan – Biaya Publik (Juta USD)	Transportasi (Juta USD)	Limbah Padat (Juta USD)	Ruang Publik (Juta USD)	Tata Kelola dan Perencanaan (Juta USD)	Total (Juta USD)
Bolivia	8	15,81	29,13	0,63	4,36	1,36	54,29
India	7	4,70	9,38	1,16	17,82	0,84	34,43
Malaysia	7	0,06	16,43	0,18	0,09	1,72	18,48
Kolombia	18	15,44	19,26	0,38	2,79	1,09	38,69.

Tabel B: Prakiraan Rata-Rata Biaya Tahunan untuk Mencapai TPB 11 di Kota Sedang (100 ribu s.d. 1 Juta Penduduk). Dalam Juta USD

Negara	Jumlah Sampel	Perumahan – Biaya Publik (Juta USD)	Transportasi (Juta USD)	Limbah Padat (Juta USD)	Ruang Publik (Juta USD)	Tata Kelola dan Perencanaan (Juta USD)	Total (Juta USD)
Bolivia	11	79,5	62,9	3,49	40,4	4,66	190,95
India	18	16,28	42,74	9,3	72,66	2,81	143,79
Malaysia	12	23,43	424,05	3,69	58,75	5,88	515,8
Kolombia	25	107,3	202,17	2,91	26,81	3,71	342,9

Tabel C: Prakiraan rata-rata biaya tahunan untuk Mencapai SDG 11 di Kota Besar (> 1 Juta Penduduk). Dalam Juta USD

Negara	Jumlah Sampel	Perumahan – Biaya Publik (Juta USD)	Transportasi (Juta USD)	Limbah Padat (Juta USD)	Ruang Publik (Juta USD)	Tata Kelola dan Perencanaan (Juta USD)	Total (Juta USD)
Bolivia	1	308,73	259,98	14,54	47,81	13,6	644,66
India	17	397,28	626,01	167,26	817,37	8,22	2.016,14
Malaysia	1	27,48	1.617,58	26,16	3.597,22	17,37	5.285,81
Colombia	4	1324,57	1.503,96	49,68	217,05	10,88	3.106,14

Studi pendahuluan ini menunjukkan bahwa kebutuhan investasi akan berbeda tergantung pada karakteristik setiap negara. Akan tetapi, studi ini menunjukkan bahwa untuk kota kecil di negara berkembang, total biaya rata-rata tahunan diperkirakan berkisar antara USD 20 juta - 50 juta. Untuk kota berkembang berukuran sedang, biayanya berkisar dari USD 140 juta sampai lebih dari USD 500 juta. Pada kota besar berkembang diperkirakan biaya rata-rata tahunannya mulai dari sekitar USD 600 juta hingga lebih dari USD 5 miliar, pada kebanyakan negara setiap tahunnya rata-rata mencapai miliaran USD per kota.

Pembelajaran yang dipetik

Studi ini menunjukkan bahwa biaya bersifat kontekstual. Tidak ada sama satu dan yang lain. Dalam menerjemahkan metodologi standar tersebut ke berbagai negara memerlukan penyesuaian yang signifikan terhadap input yang dimasukkan. Lebih lanjut, ambang bawah untuk negara kurang berkembang, berkembang, dan maju akan sangat berbeda. Hal ini terlihat di Swedia, di mana pengeluaran diarahkan untuk tingkat lanjut, seperti jalur sepeda dan infrastruktur digital untuk kota pintar. Sebaliknya, negara berkembang sedang berupaya menciptakan layanan bus bagi penduduknya. Sementara itu, negara kurang berkembang memiliki kelemahan dalam pencatatan dan data dasar terkait layanan publik. Sehingga tidak memiliki rencana untuk ditindaklanjuti dalam mencapai target yang ditetapkan.

Total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai TPB 11 meningkat seiring pertumbuhan kota, terutama karena jumlah penduduk. Banyak kota dalam sampel akan mengalami perubahan ukuran dari kecil ke menengah atau menengah ke besar dalam dekade mendatang. Untuk memaksimalkan skala ekonomi yang ditawarkan, dibutuhkan anggaran urbanisasi berkelanjutan per kapita untuk prasarana, perumahan, transportasi, dll. Menyusun investasi strategis pada saat ini penting sebelum kota tumbuh menjadi lebih besar.

Sumber: UN-Habitat, 2020e.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan dan pinggiran perkotaan, maka penyediaan perumahan layak dan terjangkau, transportasi berkelanjutan, akses ke listrik dan infrastruktur lingkungan hidup seperti air, sanitasi, drainase, dan pengelolaan limbah dan sampah sangat penting untuk membangun penghidupan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan. Investasi dalam infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan memperoleh manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan pentingnya infrastruktur perkotaan, terutama di permukiman informal di negara-negara berkembang yang sulit menerapkan pedoman kesehatan publik.[41] Pelayanan dasar juga berkontribusi terhadap ketahanan iklim; kondisi air bersih dan sanitasi yang kurang layak dapat dikaitkan dengan meningkatnya penyakit setelah peristiwa cuaca yang buruk.[42]

Infrastruktur perumahan merupakan bagian penting dari ekonomi perkotaan. Tanpa perumahan yang layak dan terjangkau untuk semua penghuni kota, maka pembangunan ekonomi akan terhambat. Investasi perumahan menunjukkan dampak positif terhadap lapangan kerja, peningkatan penghasilan, tabungan, produktifitas tenaga kerja dan pembangunan kewilayahan.[43] Lebih lanjut, sebagaimana telah

disebutkan, investasi perumahan yang layak, aman dan terjangkau, pelayanan prasarana dasar dan peningkatan kualitas permukiman kumuh mempunyai dampak langsung terhadap sedikitnya tiga per empat TPB.

Investasi dalam sistem transportasi yang berkelanjutan, ruang publik dan taman yang aman, inklusif dan dapat diakses semua masyarakat tanpa mengecualikan jenis kelamin, umur atau difabel, dapat meningkatkan daya tarik kota. Lingkup investasi, maupun tipe dan skala infrastruktur, mempunyai implikasi besar untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun terdapat ketidakpastian sehubungan dengan jumlah kebutuhan investasi, estimasi investasi harus selalu dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang dihasilkan dari investasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.

Estimasi investasi harus selalu dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang dihasilkan dari investasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan

Investasi dalam infrastruktur yang berketahanan dan efisien sumber daya merupakan kunci bagi urbanisasi yang berkelanjutan. Kini, potensi pasar untuk bangunan hijau di seluruh kawasan meningkat (Gambar 8.2). Di negara maju, beberapa kajian menunjukkan sekitar 20 persen bangunan yang perlu diperkuat dalam 5 tahun ke depan akan menurunkan sekitar seperlima emisi CO_2 yang berasal dari pemanasan.[44] Kajian New Climate Economy (Ekonomi Iklim Baru) tahun 2015 memperlihatkan dengan angka investasi bertahap dan cukup tinggi, investasi dalam infrastruktur perkotaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi dan menciptakan peluang ekonomi global sekitar USD 17 Triliun pada tahun 2050 (dalam *net present value*), berdasarkan penghematan energi saja, dalam masa pengembalian investasi yang terkendali.[45] Kajian McKinsey Institute juga memperlihatkan bahwa, meskipun teknologi bangunan hijau jauh lebih mahal daripada yang konvensional, namun *internal rate of return* berkisar 18 sampai 30 persen –dengan titik impas 3 sampai 5 tahun, tergantung pada wilayah dan teknologi yang digunakan.[46] Di Amerika Serikat, Institut Nasional Ilmu Bangunan (National Institute of Buildings Sciences) menemukan bahwa secara nasional, rasio manfaat biaya (BCR) rata-rata adalah 4:1 untuk sejumlah utilitas dan infrastruktur transportasi, dan BCR sebesar USD 6 untuk setiap USD 1 yang digunakan untuk membiayai mitigasi bencana.[47]

Gambar 8.2: Peluang investasi dalam bangunan hijau antarwilayah

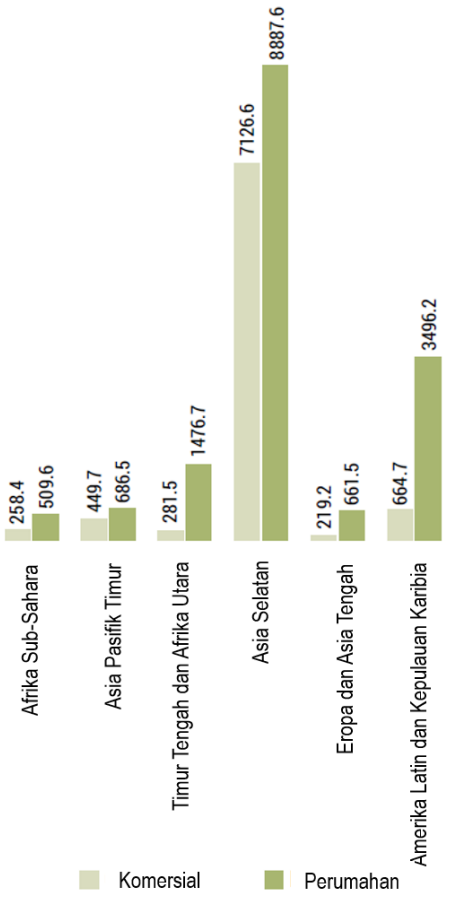

Sumber: IFC, 2019

Pasar di permukiman kumuh Dharavi selama karantina wilayah nasional sebagai upaya preventif melawan penyebaran COVID-19, Mumbai/India © Manoej Paateel/Shutterstock

Gabungan keputusan investasi yang dibuat para pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional pada masa Dekade Aksi terkait infrastruktur perkotaan akan menentukan apakah nilai yang diasosiasikan dengan urbanisasi berkelanjutan dapat diwujudkan di setiap wilayah. Pembiayaan yang memadai, termasuk mengatasi kegagalan pasar dan tata kelola pemerintahan, menjadi kunci dari keberhasilan Dekade Aksi.[48] Kecenderungan untuk mengurangi investasi dalam infrastruktur perkotaan tidak terbatas di wilayah-wilayah yang berkembang; kota-kota baik di negara maju dan negara berkembang menghadapi *backlog* dari permintaan infrastruktur. Karena puluhan tahun mengabaikan pembangunan infrastruktur, maka negara berkembang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan mengganti infrastruktur lama yang kurang berfungsi. Di wilayah yang kurang berkembang, kawasan permukiman yang menurun, perebakan kota, pertumbuhan permukiman kumuh, serta kelembagaan dan struktur pemerintahan yang lemah menjadi hasil dari, dan katalis untuk biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup akibat investasi yang kurang memadai.

Gabungan keputusan investasi infrastruktur perkotaan yang dibuat para pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional pada masa Dekade Aksi terkait infrastruktur perkotaan akan menentukan apakah nilai yang diasosiasikan dengan urbanisasi berkelanjutan dapat diwujudkan di setiap wilayah

Keterlambatan dalam investasi dan pengeluaran yang tidak efisien dapat menambah tekanan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, maupun meningkatkan biaya mitigasi yang diperlukan untuk menangani degradasi lingkungan hidup dan disrupsi masyarakat dan ekonomi

Meskipun terdapat kerugian individual pada setiap sektor yang dananya kurang, defisit investasi yang kronis ini saling mempengaruhi, sehingga akan menjadi kerugian finansial dan kemanusiaan yang terus bertumpuk jika tidak ditangani dengan cepat. Keterlambatan dalam investasi dan pengeluaran yang tidak efisien dapat menambah tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, maupun meningkatkan biaya mitigasi yang diperlukan untuk menangani degradasi lingkungan hidup dan disrupsi masyarakat dan ekonomi.[49] Karena investasi yang rendah dan infrastruktur tidak memberikan dampak negatif langsung selain distorsi permintaan,[50] sering kali infrastruktur perkotaan tetap menjadi korban penyesuaian fiskal dan kurangnya anggaran. Dengan dunia yang masih sibuk dengan dampak pandemi COVID-19, pengeluaran untuk infrastruktur yang terstruktur dengan baik perlu menjadi prioritas agar dapat mendorong ekonomi. Pemerintah dapat mengarahkan permintaan melalui paket stimulus berbasis infrastruktur yang meningkatkan aktivitas konstruksi dan pekerjaan.[51]

Di kebanyakan negara, infrastruktur perkotaan mencakup porsi besar investasi nasional, namun biaya ekonominya tinggi karena investasi yang kurang memadai, pengeluaran yang tidak efisien dalam infrastruktur baru, maupun kekurangan dalam pengelolaan infrastruktur eksisting cukup tinggi.[52] Infrastruktur perkotaan yang kurang memadai meningkatkan kesenjangan dan sering kali mengancam daya saing dan produktivitas dari kota-kota dan ekonomi nasional. Kondisi ini juga berpengaruh negatif terhadap biaya produksi dan produktivitas perusahaan, sehingga berpotensi mengarah kepada keputusan untuk relokasi atau tidak melakukan perluasan lini usaha.[53] Rendahnya investasi dalam infrastruktur, terutama di kota-kota, menjadi kendala pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sebagaimana sudah diindikasikan di atas. Sebagai tambahan, infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik juga mengarah pada ekonomi yang tidak efisien dan mempunyai dampak finansial jangka panjang, dalam rehabilitasi atau investasi pembangunan fasilitas baru, sebagaimana kasus banyak kota besar di negara-negara berkembang.

Meski kebutuhan akan investasi baru sangat mendesak, kebutuhan infrastruktur saat ini yang belum terpenuhi dan pengelolaan infrastruktur yang ada bila tidak segera ditangani akan berdampak negatif ke depan baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup. Lebih jauh, ketidakefisienan investasi berdampak pada menurunnya kesehatan dan pendidikan di negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah.[54] Kekurangan pelayanan dasar dan infrastruktur sosial akan mengganggu kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah daerah, yang berdampak pada menurunnya pendapatan. Tanpa sumber daya yang memadai, pemerintah kota akan sulit menyediakan jasa pelayanan.[55] Lingkaran setan ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan perkotaan dan kemampuan otorita kota untuk menarik investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kota.

Infrastruktur perkotaan yang kurang memadai meningkatkan kesenjangan dan sering kali mengancam daya saing dan produktivitas dari kota-kota dan ekonomi nasional. Kondisi ini juga berpengaruh negatif terhadap biaya produksi dan produktivitas perusahaan, sehingga berpotensi mengarah pada keputusan untuk relokasi atau tidak melakukan perluasan lini usaha.

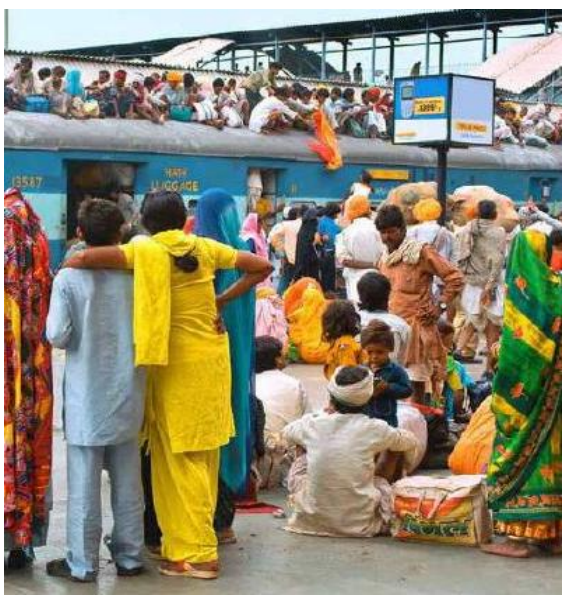

Pelataran stasiun penuh orang yang tidak mendapat tempat di kereta yang terlalu padat, Jodhpur, Rajasthan, India © Hari Mahidhar/Shutterstock

8.1.3 Investasi dalam Kapasitas Manusia dan Kelembagaan

Membangun kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan aset fisik, tapi juga investasi dalam tata kelola perkotaan yang efektif, kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang kuat, dan penguatan kapasitas (individu, masyarakat dan lembaga) untuk merumuskan, meningkatkan, mengelola, memantau, dan evaluasi implementasi kebijakan publik dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Rendahnya kapasitas kelembagaan -apakah dalam bentuk pegawai terlatih, keterampilan kepemimpinan atau struktur yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi- memberikan tantangan dalam meningkatkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Fragmentasi kelembagaan dan birokrasi yang berlebihan adalah beberapa isu yang mengganggu tata kelola perkotaan, dan sering berubah menjadi hilangnya peluang, ketidakefisienan, hal-hal yang tidak perlu dan keterlambatan. Seperti yang sudah dibahas di Bab 7, pemerintah daerah yang kuat dan mampu, dan juga kerangka kerja pemerintahan berjenjang yang kuat yang memfasilitas kolaborasi dan koordinasi vertikal dan horizontal, merupakan pengungkit utama dalam mendorong nilai-nilai urbanisasi berkelanjutan. Hal ini dapat menciptakan iklim pemberdayaan kelembagaan untuk aksi lokal, terutama bila ada implementasi yang konsisten sampai ke bawah (prinsip pendelegasian).

Batas di mana pemerintah daerah dapat secara efektif menangani tantangan perkotaan sangat ditentukan oleh kemampuan SDM. Desentralisasi tanggung jawab ke pemerintah daerah harus didampingi dengan peningkatan kapasitas dalam kelembagaan dan teknis untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan perkotaan dan kewilayahan yang efektif. Sebagai contoh, meningkatkan kapasitas staf dalam administrasi perkotaan adalah prasyarat untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan dan keberhasilan implementasi proses transformasi yang dapat membuka kunci kekuatan kota-kota. Investasi ini terutama penting untuk kapasitas kelembagaan dalam peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan strukturisasi pendanaan untuk modal investasi. Investasi juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas administrasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan dalam kemajuan teknologi digital dan inovasi pelayanan perkotaan dan realisasi TPB. Investasi yang memperkuat kapasitas statistik berbagai tingkat pemerintahan akan mendorong tata kelola perkotaan yang berbasis bukti (lihat Kotak 8.2). Investasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kota untuk formulasi kebijakan yang efektif, maupun membangun kerangka legislatif yang kuat, yang mendukung pengelolaan dan pembangunan perkotaan yang efektif.

Investasi dalam formasi SDM penting untuk pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, dan sejalan dengan TPB 8 untuk mendorong pekerjaan yang layak dan produktif untuk semua. Investasi ini membantu membangun dan memperkuat kapasitas produktif, sehingga memberdayakan nilai atau manfaat ekonomi dari urbanisasi untuk semua (Bab 4). Investasi ini juga membangun angkatan kerja yang sehat dengan ketrampilan dan pengetahuan yang mendukung ekonomi perkotaan yang inovatif dan kompetitif. Sumber daya manusia yang lebih kuat akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan teknologi.[58] Investasi juga meningkatkan kapasitas adaptasi iklim dari sebuah komunitas.[59] Meskipun mengukur keuntungan SDM masih menjadi tantangan karena investasi dalam pengembangan SDM mungkin tidak menghasilkan keuntungan ekonomi di jangka pendek, sasaran investasi bidang pendidikan, kesehatan, dan ketrampilan teknologi mempunyai dampak cukup besar untuk pertumbuhan ke depan. [60]

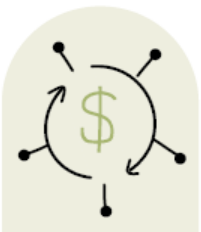

Sumber daya manusia yang lebih kuat mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. Investasi juga meningkatkan kapasitas adaptasi iklim dari sebuah komunitas.

Kotak 8.2: Berinvestasi dalam urbanisasi berkelanjutan melalui pengawasan dan pelaporan efektif

Kebijakan dan tindakan yang ditujukan untuk pembangunan kota yang berkelanjutan perlu didukung oleh mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Oleh karena itu, kebijakan perkotaan di semua tingkatan harus berdasarkan bukti dan target realistis yang dapat dipantau. Sistem tersebut memastikan akuntabilitas dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti. Dalam hal ini, UN-Habitat berada di garis depan dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung kepada berbagai tingkat pemerintahan (kota, daerah, dan pusat) di banyak negara, sehingga dapat melakukan pemantauan dan pelaporan kemajuan yang efektif menuju urbanisasi yang berkelanjutan. UN-Habitat melalui Unit Data dan Analisis (DAU), sebelumnya disebut Global Urban Observatory (GUO), telah mengembangkan dan menyempurnakan metodologi dan alat pendukung pengumpulan data dan pengawasan pembangunan perkotaan berkelanjutan di tingkat daerah.

Dalam mendukung pemantauan TPB 11 dan indikator perkotaan lainnya, UN-Habitat telah memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai organisasi mitra. Selanjutnya mengembangkan, menyempurnakan, dan menyebarluaskan metodologi yang mendukung penilaian kemajuan dalam melaksanakan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Di samping itu, UN-Habitat memberikan dukungan teknis dan program pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara menghasilkan data yang relevan dan akurat untuk memantau TPB dan NUA. DAU memberikan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan ke berbagai negara dan kota. Pelatihan tersebut menggunakan berbagai alat yang menawarkan panduan langkah demi langkah tentang cara menerapkan alur kerja penyusunan data yang berbeda. Saat ini, Unit ini mengawasi 143 observatorium perkotaan di Asia, 130 observatorium perkotaan di Amerika Latin dan Karibia, dan 101 observatorium perkotaan di Afrika.

Selain mengelola basis data indikator perkotaan global, UN-Habitat telah mengembangkan Indeks Kemakmuran Kota (CPI), kerangka kerja berbasis data yang memungkinkan kota untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data tentang kemakmuran perkotaan. Semua ini merupakan bagian integral dari perumusan kebijakan yang tepat, merancang dan melaksanakan program dan memantau kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Namun, ketidakadilan peluang menjadi kendala bagi SDM yang membuat kota produktif dan juga menghalangi kemajuan menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dengan demikian, sangat penting untuk segera mengatasi isu kesenjangan gender dalam pendidikan, gaji dan peluang, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas etnis, difabel dan pendatang. [61]

8.2 Tantangan Pembiayaan Perkotaan

Membiayai urbanisasi berkelanjutan merupakan investasi dalam kesejahteraan masa kini dan masa depan semua bangsa. Dengan pertambahan penduduk perkotaan, pemerintah daerah di seluruh dunia menghadapi tugas berat menyediakan infrastruktur dan jasa pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan yang terus tumbuh. Namun, kurangnya sumber daya untuk investasi dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan menimbulkan dilema bagi banyak negara berkembang, terutama negara terbelakang (*Least Developed Countries* (LDCs)). Survei 100 kota di seluruh dunia menemukan bahwa 55 persen kota mencatat kurangnya dana publik sebagai kendala untuk pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. [62]

Pembiayaan urbanisasi berkelanjutan merupakan investasi dalam kesejahteraan masa kini dan masa depan semua bangsa.

Pemerintah daerah menghadapi banyak kendala terkait pembiayaan perkotaan, seperti kurangnya dan tidak pastinya aliran dana dari pemerintah pusat, lemahnya pengelolaan fiskal, rendahnya pendapatan daerah, dan kendala hukum. Tantangan ini dan juga kendala kelembagaan yang lain menyebabkan hambatan besar. Sebagai contoh, pemerintah daerah umumnya membatasi akses ke pasar modal berdasarkan kriteria peringkat kredit (Gambar 8.3).[63] Dengan meningkatkan kelayakan kredit, kota-kota menanamkan prinsip-prinsip tata lelola pembiayaan yang baik dan transparan. [64] Hanya empat persen dari 500 kota di negara berkembang dianggap layak kredit di pasar lokal.[65] Sebagai tambahan, kota-kota

menghadapi tantangan mengakses sumber daya kegiatan prainvestasi seperti strukturisasi pembiayaan yang diperlukan untuk membawa proyek-proyek yang *bankable* dan proyek uji coba yang dapat memperlihatkan kapasitas pemerintah daerah. [66]

8.2.1 Pengelolaan Fiskal

Sebagaimana telah dibahas di Bab 7, desentralisasi dari otoritas administrasi dan fiskal tidak merata, dan sistem antarpemerintah dalam aliran dana dan kerja sama yurisdiksi sering kali terganggu oleh banyak masalah. Di banyak negara berkembang, devolusi keuangan dan pembagian pendapatan daerah sangat tidak memadai. Sistem aliran dana yang kurang berfungsi, mengurangi pendapatan yang efektif dan menghambat belanja daerah. Hambatan ini dipersulit dengan rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dan terlalu mengandalkan keputusan pemerintahan yang lebih tinggi.

Seperti disorot dalam berbagai bagian Laporan ini, perkuatan kapasitas kelembagaan dari pemerintah daerah merupakan bagian integral untuk memfasilitasi keberlanjutan pembiayaan lokal. Memperkuat kerangka kerja pengelolaan keuangan dan keahlian, misalnya, sangat penting untuk alokasi efisien dan penggunaan sumber daya publik. Porsi besar investasi banyak yang hilang akibat ketidakefisienan, dan menangani ini sangat kritis untuk mencapai TPB– dengan kata lain, bukan hanya perlu lebih banyak belanja, tapi belanja yang lebih baik. [67] Beberapa cara meningkatkan efisiensi dari investasi perkotaan termasuk memanfaatkan teknologi seperti pemanfaatan IT yang efisien biaya, memastikan keputusan berdasarkan data dan bukti, menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih peran dan tanggung jawab dalam pengaturan tata kelola yang berjenjang, memastikan transparansi dan akuntabilitas, mendorong pendekatan yang terintegrasi, dan meninjau kembali proses kelembagaan untuk mengurangi sampah. Tahun 2011, Dinas Perhubungan Kota Metropolitan New York meluncurkan inisiatif pengadaan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan penghematan sebesar paling sedikit USD 100 juta. [68] Di Afrika Selatan, Kota Tshwane, Cape Town, Ekurhuleni, Johannesburg, dan Kota Metropolitan Teluk Nelson Mandela mengimplementasikan praktek-praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, yang tidak saja cukup murah, tapi juga mendorong keberlanjutan. Beberapa pemerintah nasional telah meluncurkan portal daring untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Di India, sebagai contoh, portal Government e-Marketplace menyediakan informasi detail tentang proyek, kebijakan, jadwal, skema, dan anggaran untuk infrastruktur. [69]

Gambar 8.3 Contoh kriteria lembaga pemeringkat

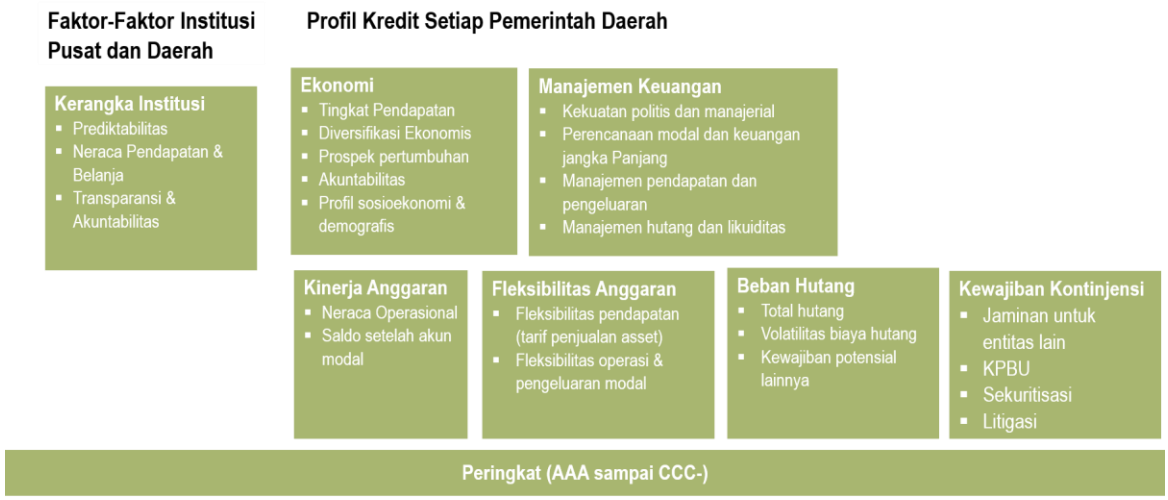

Catatan: Lembaga pemeringkat sering mengkategorikan kriteria mereka sebagai "kerangka institusional" atau di bawah "profil kredit individu" kota. Kerangka institusional mencakup semua faktor yang membentuk pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat diprediksi baik di tingkat daerah maupun pusat. Profil kredit individu merupakan sekumpulan faktor — ekonomi, manajerial dan performatif — yang berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban hutangnya. Sumber: UN Habitat 2017c.

Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi bagian tidak terpisahkan untuk memfasilitasi keberlanjutan pembiayaan.

8.2.2 Pendapatan yang Rendah

Umumnya kota-kota di negara berkembang bergantung pada aliran dana pemerintah pusat dan seringkali mempunyai keterbatasan instrumen pembiayaan dan mekanisme untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di banyak wilayah, pemerintah daerah mempuyai otonomi yang rendah dalam sumber dana dan pengelolaan keuangan. [70] Seringkali, sumber pendapatan yang lebih menguntungkan lebih berpotensi membiayai pembangunan perkotaan, misalnya pajak penghasilan, pajak penjualan, dan pajak usaha, dikuasai oleh pemerintah pusat – meninggalkan pemerintah kota dengan pendapatan yang lebih kecil yang berasal dari pajak properti dan biaya layanan, yang perlu diperkuat. Sebagai tambahan, tingginya informalitas ekonomi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Bab 3, skenario ini meninggalkan kota-kota di negara berkembang terkendala dalam keuangan seperti halnya yang secara tahunan berasal dari sistem pendapatan pemerintah daerah berkisar USD 100 – 500 per penduduk, dan lebih rendah lagi (di bawah USD 50) di kota-kota kecil di Afrika dan Asia Selatan. Sebaliknya, pendapatan daerah melampaui USD 3.000 per kapita setiap tahun di kota-kota ekonomi maju seperti New York, Stockholm, Seattle dan Tokyo.[71] Secara khusus, pajak provinsi di negara berkembang sebesar 2,3 persen dari PDB dibandingkan 6,4 persen di negara-negara maju.[72] Di kebanyakan negara berpenghasilan rendah, yang kurang efektif untuk peningkatan pendapatan berkontribusi terhadap ketidakmampuan mengembangkan peringkat kredit tingkat investasi. [73]

Pajak provinsi di negara berkembang adalah sebesar 2,3 persen dari PDB dibandingkan 6,4 persen di negara-negara maju

Kemampuan kota untuk memaksimalkan pengungkit sumber daya setempat bergantung pada pengaturan kelembagaan yang sesuai, maupun kapasitas teknis untuk perencanaan, mengakses, dan mengadministrasikan instrumen pembiayaan (lihat contoh instrumen berbasis tanah di Tabel 8.2). Skala dan efisiensi pengumpulan pendapatan dengan memanfaatkan instrumen ini sangat ditentukan oleh perencanaan dan pengelolaan perkotaan, penegakan kebijakan tata guna lahan (peningkatan hak atas properti melalui pendaftaran pertanahan), kapasitas produksi, dukungan politis, dan komitmen untuk mengimplementasi instrumen maupun keahlian manajemen keuangan.

Kemampuan kota untuk memaksimalkan pengungkit sumber daya setempat bergantung pada pengaturan kelembagaan yang sesuai, maupun kapasitas teknis untuk perencanaan, mengakses dan mengadministrasikan instrumen pembiayaan.

Di banyak negara berkembang, pajak properti tidak dipungut dan diadministrasikan secara efisien karena umumnya pemerintah daerah tidak punya kapasitas untuk memelihara dan mengkoordinasikan kadaster fisik dan fiskal secara sistematis; seringkali kemauan politis untuk administrasi pajak properti di segala tingkatan pemerintahan. Di negara-negara OECD, pajak properti meliputi sekitar 2 persen PDB, sementara di negara-negara Afrika angka rata-ratanya 0,38 persen (Gambar 8.4). [74] Di negara terbelakang (LDCs), properti bernilai tinggi sering kali malah dihargai di bawah atau tidak ada dalam pusat data kota. Meski pemerintah daerah mempunyai kemampuan teknis untuk membawa properti ini ke dalam perhitungan pajak, namun kemauan politis masih rendah. Sebagai tambahan, beberapa pajak perlu direformasi karena belum mencerminkan kondisi, kemampuan atau praktek baik terkini. Beberapa kota yang telah mereformasi rezim pajak properti memperlihatkan peningkatan pendapatan yang vital bagi investasi infrastruktur perkotaan. Di Sierra Leone, Kota Bo, Kenema, dan Makeni dapat meningkatkan pendapatan sebesar 200-400 persen antara tahun 2007 sampai tahun 2011 dengan

mengimplementasikan sistem penilaian properti yang sederhana dan transparan.[75] Demikian pula, otoritas di Bangalore melembagakan langkah-langkah untuk menyempurnakan penilaian pajak properti tahun 2000, di mana terjadi kenaikan pengumpulan pajak properti sebesar sepertiga. [76] Benin telah mengimplementasikan Registrasi Pertanahan Perkotaan (*Registre Foncier Urbain)* di Coronou, Porto-Novo, Parakou dan beberapa kota kecil; sistem informasi tanah ini telah berdampak positif untuk keuangan daerah. [77]

Di samping pajak properti, banyak kota di seluruh dunia meningkatkan aset lokal untuk menghasilkan pendapatan dan membiayai kebutuhan investasi. Sebagai contoh, di Kairo, lelang 3.100 hektare tanah gurun pasir untuk kota baru di tahun 2007 menghasilkan USD 3,12 miliar –jumlah yang 117 kali lebih besar dari pengumpulan pajak properti Mesir keseluruhan dan sekitar sepersepuluh pendapatan pemerintah nasional– untuk pembiayaan infrastruktur internal dan membangun jalan penghubung ke jalan lingkar Kairo. Demikian pula, Kota Mumbai mengumpulkan USD 1,2 miliar tahun 2006-2007 dengan cara menjual 13 hektar tanah di pusat keuangan Bandra-Kurla Complex untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur perkotaan yang diidentifikasi oleh Rencana Transportasi Metropolitan. Di Istanbul, penjualan stasiun bis tua dan bangunan pemerintah mengumpulkan USD 1,5 miliar, jumlah yang jauh lebih besar dari belanja fiskal dan investasi infrastruktur kota pada tahun 2005. [78] Di Shanghai, 46 persen pertumbuhan perkotaan didanai melalui mekanisme pembiayaan berbasis pertanahan di mana kota menjual tanah matang kepada operator zona komersial atau industri. [79] Di Santa Lusila, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tanah matang telah digunakan untuk Dana Bergulir Penyediaan Lahan (*Sites and Services Revolving Fund* (SSRF)).[80]

Gambar 8.4 Pajak peroperti sebagai persentase PDB di beberapa negara Afrika (sekitar tahun 2012)

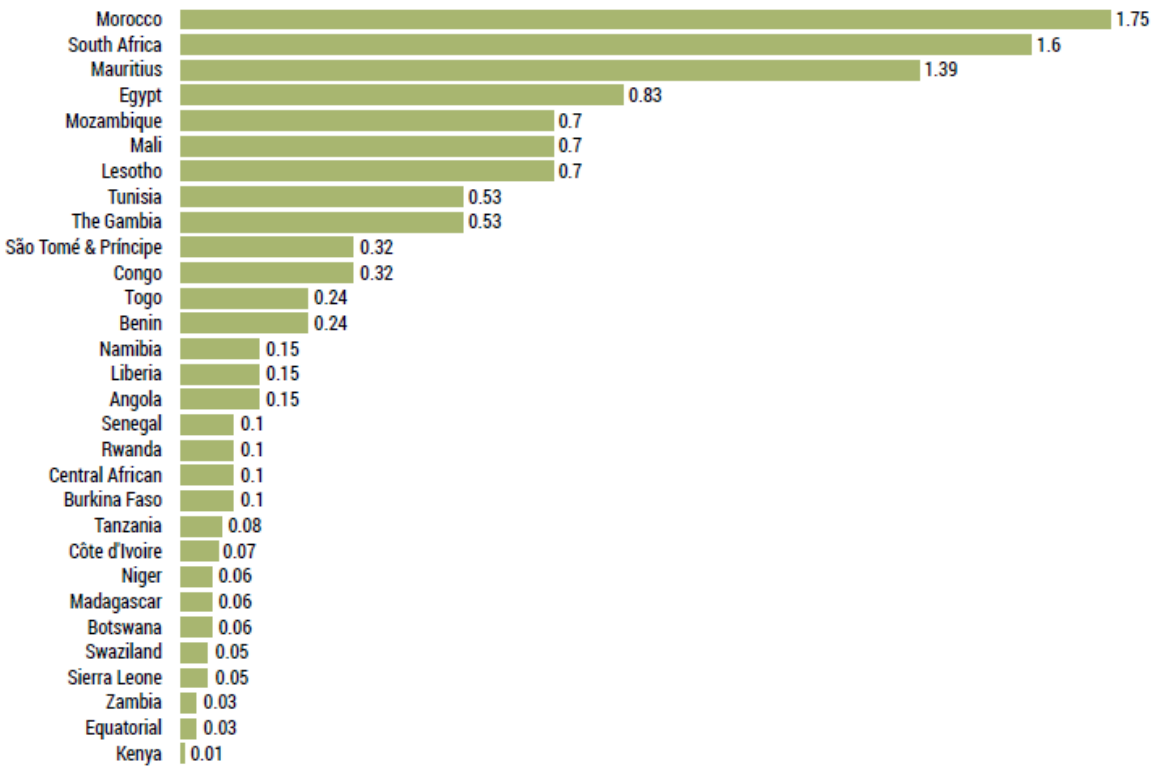

Sumber: Franzsen and McCluskey, 2017

Pemandangan Persimpangan Shibuya, salah satu pedestrian paling sibuk di dunia, Tokyo, Jepang. © Sean Pavone/Shutterstock

Tabel 8.2 Instrumen pembiayaan berbasis tanah

Instrumen	Uraian	Waktu	Insidensi Awal	Persyaratan Minimum
Pajak nilai tanah / bangunan berulang (pajak bumi dan bangunan)	• Pajak berulang berdasarkan taksiran nilai tanah atau bangunan	• Dinilai setiap tahun • Dapat diambil dengan angsuran	• Pemilik atau penghuni	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Kadaster fiskal (pendaftaran tanah) yang mencakup semua bidang tanah yang terkena pajak • Estimasi yang tepat dari nilai kena pajak • Kemampuan administrasi untuk menghitung pajak terutang, menyerahkan tagihan dan mengumpulkan pajak
Retribusi perbaikan	• Biaya dinilai terkait peningkatan infrastruktur tertentu • Terbatas untuk pemulihan biaya yang dikeluarkan	• Dinilai dan sekali penagihan	• Pemilik lahan yang mendapatkan manfaat dari perbaikan	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Identifikasi semua bidang tanah yang nilainya dipengaruhi oleh perbaikan • Estimasi dampak perbaikan pada nilai tanah di setiap plot yang terkena dampak • Perkiraan biaya perbaikan yang akurat • Metode untuk mengalokasikan biaya perbaikan ke setiap plot berdasarkan bagian manfaat yang diterima • Sistem penagihan dan pengumpulan satu kali yang memadai
Penilaian khusus	• Biaya dinilai sehubungan dengan peningkatan infrastruktur tertentu • Terbatas untuk pemulihan biaya yang dikeluarkan	• Dinilai sekali • Ditagihkan dalam satu periode, sering kali sebagai tambahan sementara untuk pajak properti berulang	• Pemilik lahan yang lahannya mendapatkan manfaat dari perbaikan	• Semua persyaratan untuk perbaikan retribusi • Sistem penagihan dan penagihan angsuran yang memadai • Persetujuan dari mayoritas pemilik tanah
Tuntutan Pengembang	• Biaya dinilai sehubungan dengan persetujuan pengembangan • Dapat dibayar dengan uang tunai, tanah atau barang	• Dinilai sekali • Ditagihkan ketika proyek disetujui dan diselesaikan	• Pengembang lahan mencari persetujuan kota	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Perkiraan dampak pembangunan yang diusulkan pada infrastruktur eksisting • Koordinasi administratif dengan fungsi tata kota • Metode untuk menghitung jumlah pembayaran • Sistem penagihan, pengumpulan dan pemantauan proyek yang memadai •
Kenaikan pajak progresif karena nilai tanah	• Pajak dinilai sebagai persentase kenaikan nilai tanah karena aksi publik atau tren pasar	• Dapat dinilai ketika transfer hak atas tanah atau ketika aksi publik spesifik menghasilkan peningkatan nilai tanah • Ditagihkan saat transfer hak milik atau dengan tagihan khusus	• Baik pemegang hak asli, pemegang hak baru, atau keduanya jika terikat dengan pengalihan hak • Pemilik lahan yang ada dengan tagihan khusus	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Perkiraan nilai tanah "sebelum" dan "setelah" • Kapasitas administratif untuk mengidentifikasi kapan pajak jatuh tempo • Sistem penagihan dan pengumpulan yang memadai
Penjualan hak pembangunan	• Pembayaran diterima sebagai imbalan atas izin untuk mengembangkan atau membangun kembali lahan dengan kepadatan yang lebih tinggi atau penggunaan lahan yang berubah • Hak dapat dijual di lelang atau dengan harga tetap • Hak dapat dialihkan ke lokasi lain atau dijual kembali	• Sekali penagihan	• Pembeli hak pengembangan	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Kontrol efektif atas hak pembangunan eksisting • Permintaan hak pembangunan tambahan • Kapasitas administrasi dan perencanaan untuk menentukan jumlah pembangunan tambahan yang dapat diterima • Kapasitas untuk mengelola proses penjualan hak pengembangan tambahan serta untuk memantau penggunaan dan penjualan kembali hak yang dijual
Penjualan tanah publik	• Pembayaran diterima sebagai ganti hak milik atas tanah publik	• Sekali penagihan	• Pembeli lahan	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Kapasitas administratif dan perencanaan untuk menentukan lahan mana yang harus

Instrumen	Uraian	Waktu	Insidensi Awal	Persyaratan Minimum
				dikembangkan swasta • Kapasitas untuk mengelola proses penjualan yang transparan dan adil serta untuk mengalokasikan dan mengelola hasil penjualan
Sewa	• Pembayaran diterima sebagai imbalan atas hak untuk menempati dan mendapatkan keuntungan dari tanah publik • Penjabaran Penggunaan lahan yang diizinkan • Jangka waktu bervariasi dari 2 hingga 99 tahun	• Dinilai dan ditagihkan satu kali atau berulang tergantung pada spesifikasi kontrak	• Pembeli aset yang disewakan	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Kapasitas administrasi dan perencanaan untuk menentukan tanah mana yang dapat disewakan • Estimasi nilai pasar tanah yang akan disewakan • Kapasitas administratif untuk meminta dan menegosiasikan sewa; memantau sewa selama masa sewa; dan untuk mengalokasikan dan mengelola hasil sewa
Transfer pajak dan bea materai	• Biaya yang dinilai untuk mencatat pengalihan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain • Dapat berupa biaya tetap atau persentase dari nilai properti yang diserahterimakan	• Dinilai dan ditagihkan satu kali	• Baik pemegang hak asli, pemegang hak baru, atau keduanya	• Kerangka hukum pendukung yang sesuai • Sistem pendaftaran tanah yang efektif • Kapasitas administratif untuk mengidentifikasi kapan pajak jatuh tempo • Kapasitas untuk memperkirakan nilai kena pajak • Sistem penagihan dan pengumpulan yang memadai

Sumber: Diadaptasi dari UN-Habitat, 2016f.

Sejak awal 2000-an, ada banyak kasus keberhasilan menggunakan *land value capture* untuk membiayai proyek-proyek di Kota Tokyo, Hongkong, New York, London, Delhi, Nanchang dan Sao Paulo. Di Hong Kong dan Tokyo, sebagai contoh, skema pembiayaan *land value capture* telah membantu kota-kota tersebut, tidak hanya mengumpulkan dana untuk investasi transit dan biaya operasi dan pengelolaan, tapi juga meningkatkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui *transit oriented development* (TOD). [81]

UN-Habitat telah memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyempurnakan kapasitas peningkatan pemasukan dengan berbagai cara seperti mekanisme pembiayaan berbasis tanah (Tabel 8.2). Di Afghanistan, sebagai contoh, UN-Habitat telah memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam menciptakan dan memelihara data pajak *safayi*. Sistem peningkatan pendapatan pemerintah kota ini telah menghasilkan kenaikan pendapatan sebesar 15 persen di beberapa kota dan 30 persen untuk pemerintah nasional di 11 kota dan pemerintah kota di mana telah diimplementasikan. [82] Melalui Program Bersama terkait Tata Kelola Daerah (Joint Program on Local Governance), UN-Habitat telah memperkuat kapasitas peningkatan pendapatan pemerintah kota di Somalia selama dasawarsa terakhir dengan hasil positif. Pemerintah Kota Hargeisa, sebagai contoh, melihat peningkatan pendapatan dari USD 1,3 juta di tahun 2018 menjadi USD 1,6 juta di tahun 2019, yang difasilitasi dengan penyediaan infrastruktur sosial dan fisik. Demikian pula dengan peningkatan pendapatan, pemerintah Kota Berbera telah melaksanakan 30 proyek pembangunan di tahun 2019, termasuk konstruksi jalan dan perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan. UN-Habitat telah mengembangkan alat Analisis Cepat Pendapatan Bersumber Sendiri (Rapid Own-Source Revenues Analysis (ROSRA)), yang diujicobakan pertama kali di Kisumu (Kenya) untuk mendukung pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatannya. Alat ini menguantifikasi kebocoran pendapatan dan mendekonstruksi hambatan, sehingga dapat mengidentifikasikan akar permasalahan dan titik masuk untuk reformasi.

UN-Habitat telah memperkuat kapasitas peningkatan pendapatan pemerintah kota di Somalia selama dasawarsa terakhir dengan hasil positif. Pemerintah Kota Hargeisa, sebagai contoh, melihat peningkatan

pendapatan dari USD 1,3 juta di tahun 2018 menjadi USD 1,6 juta di tahun 2019

Sering kali, dengan sumber daya terbatas yang dihasilkan, pemerintah kota cenderung membelanjakan pendapatan untuk biaya yang berulang, mengabaikan pemeliharaan infrastruktur dan meninggalkan hanya sedikit untuk modal investasi yang mempunyai kapasitas meningkatkan produktivitas. Tipe investasi ini justru dapat meningkatkan daya saing, yang menarik orang dan perusahaan–elemen kunci untuk meningkatkan pendapatan menyeluruh. Namun, kota dapat meningkatkan pendapatan dengan pertumbuhan setempat. Sebagaimana yang mendapat penekanan, kawasan perkotaan mempunyai banyak aset yang dapat membuka peluang investasi untuk pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga harus mencari jalan untuk mengaitkan peningkatan pendapatan dengan kegiatan yang sedang berjalan dan dengan pertumbuhan perkotaan supaya keuangan lokal dapat berkelanjutan di jangka panjang. [83]

Kawasan perkotaan mempunyai banyak aset yang dapat membuka peluang investasi untuk pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga harus mencari jalan untuk mengkaitkan peningkatan pendapatan dengan kegiatan yang sedang berjalan dan dengan pertumbuhan perkotaan supaya keuangan lokal dapat berkelanjutan di jangka panjang

8.2.3 Kendala Hukum

Membangun pendapatan daerah yang kuat bergantung pada pemberdayaan pemerintahan lokal untuk tumbuh dan diversifikasi pendapatan dari sumber sendiri agar dapat mengungkit aliran keuangan eksternal. Ada diversitas dari kerangka hukum dan kelembagaan antara dan di dalam negara, yang dapat memberi insentif atau menghambat kapasitas kota untuk meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi. Di banyak negara berkembang, ada kebutuhan reformasi nasional dan lokal untuk memastikan mekanisme hukum atau kelembagaan ada untuk kota-kota memaksimalkan pengungkit sumber keuangan setempat. Kerangka ini sering kali menghambat sumber pembiayaan karena meminjam dilarang oleh undang-undang. Akibatnya, banyak pemerintah daerah tidak diberdayakan secara keuangan atau kelembagaan untuk peran lebih besar dalam memberikan pelayanan, padahal ini adalah kunci untuk mencapai Tujuan Global.

Pengendalian ketat pemerintah pusat terhadap belanja dan persyaratan transfer dana fiskal antarpemerintahan seringkali membawa risiko yang memaksa pemerintah daerah untuk membelanjakan dana dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi

Sama pentingnya adalah mandat memberdayakan pemerintah daerah untuk belanja. Pengendalian ketat pemerintah pusat terhadap belanja dan persyaratan transfer dana fiskal antarpemerintahan sering kali membawa risiko yang memaksa pemerintah daerah untuk membelanjakan dana dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi.[84] Seperti ditunjukkan dalam Bab 7, negara harus memastikan iklim pemberdayaan kelembagaan untuk aksi daerah melalui kebijakan desentralisasi yang efektif untuk mewujudkan manfaat dari urbanisasi berkelanjutan. Kualitas dari desentralisasi keuangan sebagai contoh, mempunyai dampak penting untuk kapasitas investasi pemerintah daerah. Pemerintah nasional harus menunjukkan kemauan politis untuk membuat perubahan struktural antarpemerintahan yang diperlukan dan memastikan kerangka hukum sudah ada agar kota-kota dapat berperan serta aktif sejalan dengan prinsip pendelegasian.

8.3 Memobilisasi Pembiayaan untuk Urbanisasi Berkelanjutan

Berinvestasi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan membutuhkan mobilisasi sumber daya keuangan dari berbagai pelaku. Namun, tantangan terus-menerus yang dihadapi sebagian besar negara berkembang adalah bagaimana membangun lingkungan yang mendukung bagi pemerintah daerah

untuk memobilisasi sumber daya keuangan dari beragam sumber. Pemerintah nasional memiliki peran penting dalam menentukan lingkungan fiskal, peraturan, kebijakan, kelembagaan, investasi dan kredit, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, skala sumber daya untuk pembangunan kota yang berkelanjutan meningkat (Gambar 8.5). Karena kebutuhan investasi perkotaan yang besar tidak dapat dipenuhi sepenuhnya melalui sektor publik atau pembiayaan tradisional, jalan menuju pembiayaan berkelanjutan jangka panjang adalah dengan mendiversifikasi sumber dengan menggunakan keuangan dan aset publik sebagai daya ungkit. Dengan demikian, berbagai dimensi sektor swasta memainkan peran penting memajukan urbanisasi yang berkelanjutan. Studi UN-Habitat terkini menunjukkan meskipun kapasitas investasi publik dan swasta jauh melebihi total kebutuhan investasi, pendanaan ini saat ini tidak mengalir ke area yang tepat (Kotak 8.3). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras untuk memahami pendekatan sektor swasta dalam menjalankan bisnis, guna menunjukkan bagaimana proyek akan memberikan manfaat bagi pengguna dan investor. Perbaikan lain yang diperlukan termasuk manajemen keuangan publik yang lebih kuat, kelayakan kredit yang lebih baik untuk mengakses pasar keuangan dan birokrasi daerah yang lebih efisien.

Meningkatkan pembiayaan untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, juga membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satunya adalah memanfaatkan berbagai instrumen fiskal secara efektif dalam kerangka yang ditetapkan oleh KPN yang kuat, yang dirancang melalui proses kolaboratif (Bab 7 dan 9). [85] Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan investasi selaras dengan agenda pembangunan global dan kerangka pendanaan. Dengan tumbuhnya mitra investasi potensial termasuk lembaga pembiayaan pembangunan, dana publik-swasta, organisasi filantropi dan investor berdampak swasta yang sekarang bekerja bersama sektor publik, sangat penting untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk melepaskan kapasitas para investor ini dengan menyalurkan modal dan aktivitas mereka menuju pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan di kota.

Keterpaduan kebijakan antara pemangku kepentingan global, regional, nasional dan daerah merupakan syarat dasar yang diperlukan, untuk mewujudkan transformasi menuju urbanisasi berkelanjutan

Sebagaimana dibahas dalam Bab 2, keterpaduan kebijakan antara pemangku kepentingan global, regional, nasional, dan daerah merupakan syarat dasar yang diperlukan, untuk mewujudkan transformasi menuju urbanisasi berkelanjutan. Hal ini memastikan tindakan terkoordinasi yang memberikan daya ungkit terhadap dampak kolektif. Dalam sistem pembiayaan pembangunan berkelanjutan (*financing sustainable development* (FSD)), keterpaduan kebijakan memastikan keselarasan pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, dengan arah pembangunan negara dan TPB, akibatnya membawa pengembalian investasi yang lebih baik dalam sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.[86] Seiring dengan peningkatan jumlah aktor yang terlibat, meningkat pula kemungkinan kombinasi sumber daya dan pemanfaatan keunggulan komparatif tiap aktor. Pada saat yang sama, tantangan muncul. Contohnya, ada perbedaan antara desain proyek dan pendanaan yang tersedia, serta pertanyaan apakah investasi berdampak selaras dengan keberlanjutan seperti yang dibayangkan oleh agenda pembangunan global.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, UN-Habitat meluncurkan Fasilitas Investasi Kota (Cities Investment Facility), sebuah platform bantuan teknis dan pencocokan yang membantu kota menyusun proyek-proyek pembangunan perkotaan sehingga menjadi *bankable* dan menarik bagi calon investor. Selain itu, UN-Habitat juga mengembangkan Alat Penilaian Proyek TPB (*SDG Project Assessment Tool*), sebuah panduan interaktif yang mengintegrasikan serangkaian prinsip keberlanjutan yang komprehensif, untuk membantu menyelaraskan proyek perkotaan dengan TPB dan NUA. Alat ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan proyek dengan memfasilitasi dialog antara mitra sektor publik dan swasta.

Kotak 8.3: **Perkotaan: Kebutuhan investasi vs. kapasitas investasi pemerintah dan swasta**

Keberhasilan pencapaian agenda pembangunan perkotaan membutuhkan investasi yang besar pada wilayah perkotaan di seluruh dunia. UN-Habitat memperkirakan total kebutuhan investasi untuk infrastruktur dan TPB sebesar USD 38 triliun untuk tahun 2020 s.d. 2030. Selanjutnya, perkiraan berdasarkan tren investasi dari periode pra-pandemi menunjukkan masih terdapat jurang antara investasi sebesar USD 5,6 triliun. Dengan efek COVID-19 yang masih berlangsung, jurang antara dapat melebar karena tren investasi di negara-negara berkembang akan mengalami penurunan selama beberapa tahun, membuat perkiraan jurang antara investasi melebar.

Di negara pasar potensial dan berkembang, dilaporkan bahwa hanya sekitar setengah dari kebutuhan investasi TPB terpenuhi. Besarnya kebutuhan investasi di kota-kota dapat menopang upaya memanfaatkan mekanisme inovatif dan perangkat baru dalam mendanai pembangunan di kota. Tidak hanya sumber pendanaan daerah tradisional, seperti pajak, retribusi, dan transfer antarpemerintah. Lanskap pembiayaan yang berkembang menawarkan banyak peluang untuk memobilisasi sumber daya, termasuk skema publik, swasta, domestik, internasional, dan eksperimental. Selain itu, mitra pembangunan baru, lembaga keuangan, dana pemerintah-swasta, organisasi filantropi, dan investor dampak swasta telah muncul dan memperluas aktivitas mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka saat ini bekerja secara aktif bersama donor-donor tradisional.

Untuk menunjukkan total kapasitas investasi para pelaku keuangan global, UN Habitat juga mengembangkan perkiraan yang mengukur total aset investor publik dan swasta. Meskipun terdapat kebutuhan TPB dan investasi infrastruktur yang besar, hasil dari estimasi ini menunjukkan bahwa total kapasitas investasi publik dan swasta adalah USD 98 triliun. Nilai ini jauh melebihi total kebutuhan investasi. Bank umum memiliki kapasitas investasi lebih dari USD 33 triliun, hampir sama dengan total kebutuhan investasi untuk tahun 2020-2030. Bank investasi mengelola lebih dari USD 24 triliun, sementara perusahaan asuransi dan pensiun swasta mengelola hampir USD 22 triliun. Delapan puluh dua Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund) terbesar di dunia bersama-sama mengelola lebih dari USD 6,7 triliun dan sebagian besar belum dimanfaatkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Total kapasitas Investasi Pemerintah dan Swasta (2020-30) 98 Triliun Dolar AS

Kebutuhan investasi vs. kapasitas investasi pemerintah dan swasta 2020-2030 (Dalam Triliun Dolar AS)

Infrastruktur dan dana ekuitas swasta (aset yang dikelola sebesar USD 2,5 triliun) dan donor publik, wakaf, dan yayasan (USD 0,8 triliun) masih belum dapat memenuhi kebutuhan ini, bahkan untuk jurang antara yang telah disebutkan. Namun, investor institusi mengelola aset yang jauh melebihi yang dibutuhkan. Pembiayaan tradisional tidak cukup untuk menutupi total kebutuhan investasi untuk infrastruktur dan target TPB, tetapi gabungan aset investor kelembagaan dapat mencukupi. Dengan kata lain, meskipun kapasitas pembiayaan memang ada, saat ini tidak mengalir ke wilayah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengarahkan bahkan sebagian dari aset-aset ini akan membuat perubahan yang signifikan. Akan sangat penting jika aset-aset tersebut disesuaikan dengan infrastruktur dan proyek-proyek TPB untuk menutup jurang antara investasi saat ini. Jika investasi ditahan, kebutuhan tahunan akan terus terakumulasi. Dengan kata lain, ada biaya peluang yang signifikan dan meningkat yang timbul karena penundaan investasi dalam infrastruktur dan TPB. Awal Dekade Aksi untuk mencapai TPB dikombinasikan dengan peluang untuk membangun kembali secara lebih baik pasca-COVID-19 merupakan peluang unik untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Sumber: UN-Habitat 2020e.

Gambar 8.5: Menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan investasi

Sumber: Diadaptasi dari Ahmad et al 2019

Urbanisasi berkelanjutan menuntut pemerintah daerah untuk menyusun portofolio aliran pendapatan yang beragam, dan bergantung berlebihan pada aliran pendapatan tertentu, terutama sumber daya pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk memanfaatkan potensi setempat untuk secara inovatif meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan asli daerah. Keragaman sumber pendapatan ini meningkatkan otonomi daerah dan keberlanjutan jangka panjang.[87] Pendapatan yang dihasilkan secara internal

memastikan bahwa basis ekonomi kota tahan terhadap guncangan eksternal serta membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memenuhi prioritas yang bersaing.

Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk memanfaatkan potensi setempat untuk secara inovatif meningkatkan dan mendiversifikasi pendapatan asli daerah

Membangun portofolio pendapatan daerah yang beragam untuk membiayai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sangat penting dalam lingkungan ekonomi saat ini, di mana pemerintah nasional dan provinsi menghadapi defisit anggaran yang sangat besar, dan tingkat hutang signifikan yang mungkin membuat mereka tidak responsif terhadap kebutuhan daerah, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan penduduk kumuh di kota-kota, sehingga harus mencari modal dari sistem keuangan alternatif dalam memenuhi kebutuhan seperti hunian yang terjangkau (Kotak 8.4).

8.3.1 Memperkuat Sistem Keuangan Publik

Penguatan berbagai elemen hukum, kelembagaan, dan prosedural dari manajemen investasi publik, harus mendahului diskusi tentang investor yang terdiversifikasi, hutang publik dan/atau jaminan.[88] Mobilisasi pendapatan dalam negeri adalah langkah penting pertama, yang membutuhkan dan menunjukkan bahwa reformasi diperlukan untuk mendorong investasi eksternal. Secara global, kota-kota menerima porsi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berbeda. Hal ini tidak selalu dapat diprediksi, dan seringkali tidak cukup untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan. Porsi dana ini dalam keuangan pemerintah daerah bervariasi antarnegara dan wilayah, di mana proporsinya jauh lebih tinggi di negara berkembang, sekitar 70–72 persen, dibandingkan dengan 38–39 persen di negara maju. Pembangunan tersebut mengalami penurunan di beberapa negara.[89] Di negara-negara OECD pendanaan pemerintah pusat sebagai bagian dari total pendapatan kota turun rata-rata sekitar 12 persen antara tahun 2010 dan 2016.[90] Untuk infrastruktur perkotaan, kontribusi anggaran langsung dari pemerintah pusat merupakan sumber utama keuangan, memberikan kontribusi sekitar 40 persen dari investasi infrastruktur di negara maju dan 60–65 persen di negara berkembang dan negara berkembang.[91]

Untuk infrastruktur perkotaan, kontribusi anggaran langsung dari pemerintah pusat merupakan sumber utama keuangan, memberikan kontribusi sekitar 40 persen dari investasi infrastruktur di negara maju dan 60–65 persen di negara berkembang dan negara berkembang

Kotak 8.4: Dana masyarakat miskin perkotaan: Memanfaatkan keuangan masyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem keuangan alternatif yang dikembangkan oleh masyarakat miskin perkotaan, yang berkutat pada skema tabungan lokal, menantang praktik bantuan pembangunan tradisional. Beberapa lembaga bantuan pembangunan dan pemerintah telah menyadari potensinya dalam memobilisasi sumber daya untuk intervensi pembangunan daerah, seperti pengadaan tanah, penyediaan layanan dasar, perumahan baru dan perbaikan perumahan.

Saat ini, keuangan eksternal dari donor dicampur dengan tabungan berbasis komunitas untuk memungkinkan investasi yang lebih besar. Dana Internasional Masyarakat Miskin Perkotaan (Urban Poor Fund International) dan Asian Coalition for Community Action (Koalisi Asia untuk Aksi Komunitas) adalah dua dana desentralisasi utama yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan perkotaan yang memungkinkan masyarakat miskin perkotaan yang terorganisir untuk meningkatkan akses ke perumahan dan layanan dasar.

Urban Poor Fund International adalah anak perusahaan dari Shack/Slum Dwellers International/ Penghuni Kumuh/Gubuk Internasionalyang memberikan modal kepada anggota National Urban Poor Fund. Sedangkan Asian Coalition for Community Action Fund didirikan oleh Asian Coalition for Housing Rights.

Sumber: Walnycki, 2015; Asian Coalition for Housing Rights (http://www.achr.net/about-whatwedo.php); Urban Poor Fund International (*http://www.upfi.info/home/*)

Pendapatan daerah merupakan komponen penting dari anggaran untuk mencapai agenda pembangunan di kota. Oleh karena itu, penguatan mobilisasi sumber daya daerah sejalan dengan TPB 17 menjadi penting. Kira-kira setengah dari negara berkembang berpenghasilan rendah dan hampir sepertiga dari ekonomi pasar berkembang memiliki rasio pajak terhadap PDB kurang dari 13 persen, yang dianggap sebagai ambang batas untuk pembangunan. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa negara perlu memiliki tanggung jawab untuk mencapai TPB dengan membangun kapasitas pajak melalui kebijakan pajak yang dirancang dengan baik.[92] Strategi pengoptimalan pendapatan ini harus dapat diterima secara sosial, meminimalisasi dampak merugikan terhadap perekonomian, contohnya tidak menaikkan biaya hidup atau berdampak negatif pada daya saing kota, dan mudah diterapkan.[93]

Selain itu, berbagai tingkat pemerintahan perlu memperkuat keefektifan sistem perpajakan mereka, dengan mengidentifikasi dan menutup celah yang ada. Data eksisting menunjukkan semakin berkurangnya kontribusi pajak dari perusahaan multinasional. Penurunan ini disebabkan oleh budaya *"race to the bottom"* dari kebijakan pajak perusahaan yang dirancang untuk menarik investasi baru.[94] Misalnya, dari 2005 hingga 2017, tarif pajak perusahaan global turun dari rata-rata 27,5 persen menjadi 22,9 persen.[95] Sementara itu, keuntungan bersih dari sepuluh perusahaan global teratas dunia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat secara riil, menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada gabungan pendapatan domestik dari 180 negara termiskin di dunia.[96] Seiring dengan penurunan tingkat korporasi, negara-negara berkembang memiliki kemampuan yang lemah untuk mengumpulkan pajak secara efektif.

Penghindaran pajak perusahaan semakin diperumit dengan maraknya praktik-praktik seperti pengalihan laba dan suaka pajak. Perkiraan menunjukkan bahwa peralihan laba melalui akuntansi kreatif dan penetapan harga transfer dengan perusahaan afiliasi merugikan negara tuan rumah hingga USD 500 miliar per tahun di seluruh dunia.[97] Namun, mitra pembangunan sudah membantu memperbaiki celah dalam sistem pajak banyak negara. Platform Kolaborasi untuk Perpajakan (Platform for Collaboration on Tax (PCT)), yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh IMF, OECD, PBB dan Bank Dunia, mendukung negara-negara untuk mencapai TPB dengan memperkuat kolaborasi dalam mobilisasi sumber daya domestik.[98] Prakarsa Pajak Addis (Addis Tax Initiative), diluncurkan pada 2015 pada Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (Third International Conference on Financing for Development) di Addis Ababa, juga membantu membangun kapasitas dan mendorong upaya negara-negara mitra untuk meningkatkan ketergantungan pada pendapatan domestik untuk mendanai agenda pembangunan mereka dan memenuhi TPB pada tahun 2030.[99] Studi menunjukkan bahwa negara terbelakang (LDCs) dapat bergerak USD 36 miliar per tahun dalam pendapatan tambahan dengan tarif pajak perusahaan saat ini jika diterapkan dengan benar, dan hingga USD 50 miliar per tahun jika kerja sama global juga mengarah pada tarif pajak perusahaan yang lebih tinggi, ditambah penghapusan suaka pajak perusahaan.[100]

Negara terbelakang (LDCs) dapat bergerak USD 36 miliar per tahun dalam pendapatan tambahan dengan tarif pajak perusahaan saat ini jika diterapkan dengan benar, dan hingga USD 50 miliar per tahun jika kerja sama global juga mengarah pada tarif pajak perusahaan yang lebih tinggi, ditambah penghapusan suaka pajak perusahaan

Selain mengoptimalkan mobilisasi pendapatan, meningkatkan nilai uang dari investasi juga sama pentingnya. Hal ini menuntut penguatan kelembagaan untuk manajemen investasi publik guna mencapai hasil pembangunan yang diinginkan sekaligus, pada saat yang sama, mencapai kualitas dan efisiensi pengeluaran untuk aset fisik kota. Penggunaan aset yang efisien juga penting, misalnya dengan menyediakan sumber daya keuangan yang cukup untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur baru dan yang ada. Di Tanzania, misalnya, pemerintah pusat bekerja sama dengan UNCDF telah melatih 177 anggota komite investasi dari 60 otoritas pemerintah daerah tentang manajemen investasi publik.[101] Demikian pula, Bank Pembangunan Afrika membantu Dakar, Senegal, untuk

meningkatkan keuangan dan administrasi, sistem manajemen, serta membantu mereka menciptakan mekanisme keuangan untuk menarik investasi baru untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.[102]

Selain mengoptimalkan mobilisasi pendapatan, meningkatkan nilai uang dari investasi juga sama pentingnya

Di kawasan Asia-Pasifik, Prakarsa Pembangunan Kota-Kota untuk Asia (Cities Development Initiative for Asia (CDIA)) yang digagas oleh ADB, dengan dukungan finansial dari mitra pembangunan, memberikan bantuan manajemen investasi ke kota-kota berukuran menengah, yang merupakan kunci untuk menjembatani jurang antara rencana pengembangan dan implementasi investasi infrastruktur. Inisiatif ini telah bekerja pada 125 kota di 17 negara di Asia, memberikan dukungan yang diperlukan **mulai dari perencanaan induk strategis hingga kebijakan konkret dan proyek tertentu**, serta dukungan bagi kota-kota untuk memenuhi persyaratan lembaga keuangan untuk proyek infrastruktur yang dirumuskan dengan baik.[103]

Pasar tertutup di Addus Avava, Ethiopoa ©Andy Wasley /Shutterstock

8.3.2 Mendorong Investasi Swasta

Saat ini, antusiasme sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan semakin kuat dan berkembang. Ada dorongan bagi bisnis sektor swasta, lembaga filantropi, dan individu untuk membantu memenuhi agenda pembangunan global. Namun, menerjemahkan minat menjadi tindakan merupakan tantangan. Terlepas dari itu, ada peningkatan apresiasi terhadap peran investasi swasta dalam menutup jurang antara pembiayaan untuk investasi keras dan lunak yang diperlukan untuk pembangunan kota yang berkelanjutan. Sumber utama keuangan swasta berasal dari keuntungan perusahaan yang dapat diinvestasikan melalui industri keuangan, bank, atau lembaga keuangan lainnya seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, pengelola investasi global (*hedge fund*) dan bahkan yayasan.[104] Seperti Rencana Pensiun Guru Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan) (Kanada) memiliki saham dalam investasi infrastruktur seperti bandara, perusahaan utilitas, rel kecepatan tinggi, dan jalan tol di berbagai wilayah di dunia.[105]

Selain investasi dalam negeri, aliran investasi swasta di luar negeri akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur di banyak negara berkembang dan berpotensi, termasuk PMA yang sangat penting dalam menghasilkan kegiatan ekonomi baru. Untuk menarik investasi swasta dalam urbanisasi yang berkelanjutan, negara-negara harus menciptakan lingkungan yang mendukung dengan KPN yang kuat, kerangka perencanaan kota dan wilayah, serta sistem keuangan dan hukum. Ketersediaan investasi swasta untuk pembangunan kota yang berkelanjutan bergantung pada kriteria yang sudah ada sebelumnya untuk memberikan insentif bagian yang lebih besar dari total keuangan yang tersedia untuk diarahkan ke kota.

Untuk menarik investasi swasta dalam urbanisasi yang berkelanjutan, negara-negara harus menciptakan lingkungan yang mendukung dengan KPN yang kuat, kerangka perencanaan kota dan wilayah, serta sistem keuangan dan hukum

Investor institusi memiliki aset yang sangat besar dan merepresentasikan sumber potensial dari modal baru yang substansial (Kotak 8.3). Pengalihan beberapa aset tersebut akan lebih dari cukup untuk mendanai pembangunan kota yang berkelanjutan. Namun, salah satu tantangan kritisnya adalah mencocokkan aset yang tersedia dengan infrastruktur dan proyek TPB, dengan cara yang memenuhi kebutuhan investor kelembagaan dan memanfaatkan karakteristik yang sesuai dengan portofolionya.

Dari sekian banyak metode pembiayaan infrastruktur, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah menunjukkan banyak harapan dalam beberapa dekade terakhir, terutama ketika terstruktur dengan baik.

Investor institusi memiliki aset yang sangat besar dan merepresentasikan sumber potensial dari modal baru yang substansial

Fakta bahwa aliran modal swasta tetap di atas aliran bantuan pembangunan resmi sejak 2005, kecuali 2015 dan 2016, telah menopang minat banyak pihak untuk mencari peluang investasi yang menguntungkan dan berdampak pada penyediaan jasa di lingkungan perkotaan.[106] Namun, pelaksanaan KPBU marak dengan tantangan seperti: "(i) berfungsinya sektor publik dan sistem politik; (ii) sektor swasta dan realita komersial; dan (iii) penentangan terhadap keterlibatan sektor swasta. "[107] Jika KPBU harus memainkan peran penting terkait investasi dalam nilai urbanisasi berkelanjutan, diperlukan tindakan setidaknya pada dua bidang penting dan saling terkait: pertama menangani masalah walikota dilema tentang pilihan KPBU meningkatkan layanan lingkungan perkotaan, dan kedua adalah menilai kinerja semua mitra.[108]

Selain itu, ada banyak cara agar semua tingkat pemerintahan dapat bekerja dengan sektor swasta dalam memobilisasi investasi dengan menggunakan berbagai struktur kemitraan pemerintah-swasta untuk memberikan manfaat bagi publik. Selain memanfaatkan sumber daya fiskal, KPBU menawarkan manfaat potensial lainnya seperti memperkenalkan teknologi dan inovasi sektor swasta, serta mengamankan kemampuan sektor swasta dalam pembiayaan, desain, konstruksi, dan pengelolaan proyek-proyek besar.[109]

Untuk menumbuhkan investasi akan membutuhkan fokus pada perhitungan dampak pembangunan, dan konsolidasi kerangka dampak yang dipahami baik di sektor publik maupun swasta. Seperti disebutkan di atas, di negara berkembang dan berpenghasilan rendah, penguatan manajemen fiskal dan lembaga tata kelola harus mendahului diskusi KPBU, misalnya untuk mengelola risiko dan menghindari biaya tak terduga yang merusak kesinambungan fiskal.[110]

8.3.3 Memanfaatkan Sumber Daya Keuangan yang Inovatif

Selain memperkuat sumber pendanaan yang konvensional pada level provinsi (seperti pajak, retribusi dan transfer antarpemerintah), pendanaan berkelanjutan untuk pembangunan perkotaan memerlukan identifikasi dan penggunaan opsi pendapatan baru. Saat ini, ada beberapa jenis mekanisme dan instrumen pembiayaan inovatif yang dapat memanfaatkan sumber daya berkelanjutan untuk pembangunan perkotaan.

Pembiayaan campuran (*Blended Finance*): Penggunaan strategis modal katalis dari sumber publik dan filantropi untuk memobilisasi tambahan investasi sektor swasta telah muncul sebagai pendekatan penting untuk mendanai TPB.[111] Afrika Sub-Sahara telah menjadi wilayah yang paling sering menjadi sasaran dalam transaksi pembiayaan campuran, sebuah refleksi dari kebutuhan signifikan benua yang berkaitan dengan TPB (Gambar 8.6).[112] Potensi mekanisme ini terlihat dalam Program Peningkatan Permukiman Kumuh Partisipatif UN-Habitat (Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP)) di mana Komisi Eropa menguji coba mekanisme pembiayaan campuran untuk mendanai perbaikan permukiman kumuh untuk kota-kota di Afrika, Karibia, dan Pasifik. Pendekatan ini menggabungkan hibah UE dengan pinjaman atau ekuitas dari pemodal publik dan swasta dengan dana UE senilai lebih dari 23 miliar euro yang mendanai sekitar 280 proyek.[113] Dalam konteks pembiayaan campuran untuk infrastruktur, SDSN memperkirakan bahwa sekitar USD 50 miliar per tahun dalam pembiayaan pasar proyek infrastruktur dapat dikumpulkan melalui hutang dan ekuitas swasta.[114] Prinsip-prinsip OECD tentang pembiayaan campuran memberikan kerangka kerja panduan untuk memastikan bahwa keberlanjutan tercapai. Penggunaan pembiayaan campuran harus didasarkan pada alasan pembangunan, yang dirancang untuk meningkatkan keuangan komersial, disesuaikan dengan konteks lokal, dirancang untuk memastikan kemitraan yang efektif dan dipantau untuk transparansi dan hasil.[115]

Penggunaan pembiayaan campuran harus didasarkan pada alasan pembangunan, yang dirancang untuk meningkatkan keuangan komersial, disesuaikan dengan konteks lokal, dirancang untuk memastikan kemitraan yang efektif dan dipantau untuk transparansi dan hasilnya

Gambar 8.6 Pembiayaan campuran: Jumlah transaksi dan rata-rata besar transaksi menurut wilayah

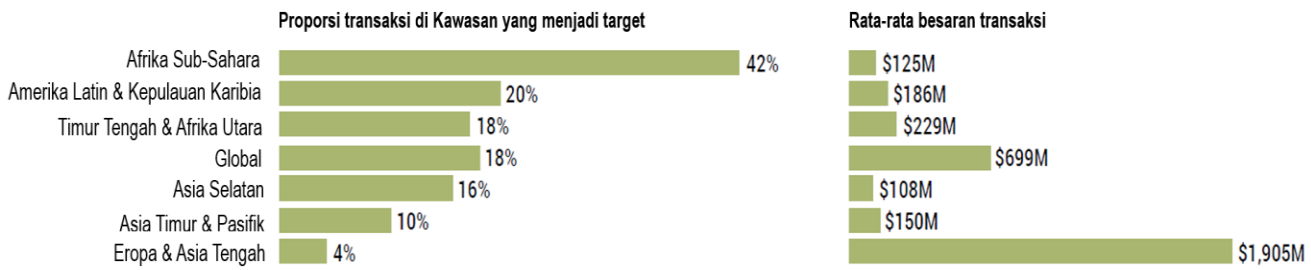

Catatan: "Global" merepresentasikan transaksi pembiayaan campuran yang tidak memiliki fokus lokasi
Sumber: Convergence, 2018.

Jalan yang sibuk di pusat kota Chicago, USA © Brandon/KleinVideo/Shutterstock

Mekanisme Pembiayaan Gabungan (***Pooled Financing Mechanisms*** **(PFM))**: Ini memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pengumpulan kebutuhan pinjaman dari sekelompok kota dan meningkatkan utang gabungan di pasar modal atau dari sumber keuangan lain. PFM dapat menjadi cara yang layak bagi sebagian besar pemerintah daerah menengah dan kecil untuk mengakses pembiayaan hutang jangka panjang dan harga yang memadai. Ini bisa dicapai baik melalui lembaga negara atau melalui kerja sama di antara pemerintah daerah.[116] Penyatuan aset memungkinkan diversifikasi risiko bagi investor. PFM menawarkan keuntungan potensial berikut:

- Memberi pemerintah daerah skala kecil dan menengah akses ke pasar modal;
- Mengurangi biaya pinjaman;
- Mengurangi biaya pemrosesan;
- Mengurangi risiko melalui diversifikasi, bahkan untuk kota-kota besar;
- Kurangi risiko dengan menyediakan keahlian keuangan;
- Memberi insentif untuk meningkatkan kelayakan kredit;
- Saluran untuk transfer pengetahuan; dan
- meningkatkan transparansi.[117]

PFM memiliki banyak bentuk berbeda bergantung pada konteksnya. Di Eropa, lembaga pendanaan pemerintah daerah (*local government funding agencies* (LGFAs)) adalah jenis pembiayaan gabungan yang paling umum

digunakan, misalnya *Kommuninvest* (Swedia), *Kommunekredi* (Denmark), *Bank Nederlandse Gemeenten* (Belanda), *Kommunalbanken* (Norwegia), *Munifin* (Finlandia), *Agence France Locale* (Prancis) dan *UK Municipal Bond Agency* (Inggris). Ini adalah badan-badan bertujuan khusus yang dimiliki dan dijamin oleh pemerintah daerah dan, dalam beberapa kasus, dengan kepemilikan saham minoritas oleh pemerintah pusat atau pemangku kepentingan publik lainnya. LGFA menerbitkan obligasi di pasar modal dan meminjamkan hasilnya kepada pemerintah daerah yang menjadi anggota atau pemegang saham agensi.[118] Demikian pula, di Wilayah Veneto di Italia, perusahaan air minum lokal mengumpulkan obligasi mini individu ke dalam *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk menerbitkan obligasi 150 juta euro di pasar. Struktur SPV didukung oleh badan keuangan regional dan utilitas di dalam SPV, kemudian diaktifkan oleh investor landasan (Bank Investasi Eropa).[119]

Otoritas Keuangan Kota British Columbia (Kanada) mengalami perluasan tujuan dan mandat dari waktu ke waktu untuk memasukkan dana investasi gabungan (*pooled investment fund* (PIF)) pada tahun 1989 dan pembiayaan peralatan pada tahun 1995. Pada tahun 2019, otoritas mengeluarkan lebih dari CAD 1,2 miliar sekuritas jangka panjang dan CAD 4,7 miliar sekuritas jangka pendek di pasar modal.

Di India, Pemerintah Pusat menyetujui Skema Pengembangan Dana dengan Pembiayaan Gabungan (*Pooled Finance Development Fund Scheme*) pada tahun 2006 untuk memberikan peningkatan kredit kepada "badan-badan lokal perkotaan" (kotamadya) untuk mengakses sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek mereka yang dapat diterima bank.[121] Pada tahun 2019, Tiongkok meluncurkan fasilitas perantara keuangan yang inovatif —Shanghai Green Urban Financing and Services Co., Ltd — yang memungkinkan kota-kota kecil di Wilayah Delta Sungai Yangtze untuk mengakses pendanaan komersial dengan mengumpulkan permintaan investasi mereka.[122] PFM muncul di Afrika Selatan sebagai alat tambahan untuk memobilisasi pendapatan. Singkatnya, PFM dapat diprioritaskan sebagai sumber pembiayaan kebutuhan infrastruktur perkotaan di negara berkembang dengan memberikan pemerintah daerah akses ke pasar modal domestik dan internasional dan dengan menyediakan investor institusi dengan kelas aset baru yang menarik.[123]

Platform investasi: Dalam beberapa tahun terakhir, platform investasi telah muncul sebagai cara untuk memanfaatkan modal swasta dan menyalurkannya ke dalam proyek yang sangat dibutuhkan. Platform semacam itu memiliki keuntungan dalam mencocokkan investor dengan proyek infrastruktur yang sesuai dan mengurangi biaya transaksi bagi investor. Platform ini dapat beroperasi di tingkat kota dan nasional. Platform investasi saat ini beroperasi di beberapa kota besar seperti Chicago, di mana pihak berwenang telah membentuk Chicago Infrastructure Trust (CIT) untuk menyesuaikan proyek infrastruktur publik dengan investor swasta. Pemerintah kota membayar biaya operasional CIT sebesar USD 2,5 juta, sementara lembaga keuangan swasta telah berkomitmen untuk menginvestasikan USD 1,7 miliar dalam skema tersebut.[124] Saat ini, platform investasi ada terutama di kota-kota mega, tetapi kota-kota kecil dapat memperoleh manfaat dari platform regional dan nasional, seperti Pertukaran Infrastruktur Pantai Barat (West Coast Infrastructure Exchange) di Amerika Serikat dan Bank Investasi Hijau (Green Investment Bank) di Inggris.[125] Fasilitas Investasi Kota yang disebutkan di atas akan menghubungkan mitra dari sektor swasta dan publik untuk mendorong investasi yang akan membantu mencapai dimensi perkotaan dari TPB. Karena Dekade Aksi menyerukan percepatan solusi yang berkelanjutan, jenis platform investasi ini akan menjadi instrumen untuk menunjukkan rangkaian proyek yang layak bank dan membantu kota-kota dalam menarik investasi sektor swasta. Selain itu, mereka adalah jalan untuk pengumpulan sumber daya, seperti yang dibahas sebelumnya.

Obligasi hijau: Obligasi hijau semakin dimobilisasi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur rendah karbon. Penerbitan obligasi hijau dan pinjaman hijau global mencapai USD 257,7 miliar pada 2019, naik 51 persen dari 2018. Saat ini, obligasi hijau pemerintah kota menempati pangsa yang sangat kecil dari pasar obligasi senilai USD 3,7 triliun, tetapi pasar tersebut diperkirakan akan tumbuh karena penerbit ingin mendiversifikasi

basis pembelinya dan menarik kelas investor yang berkembang menggunakan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola untuk menyaring investasi mereka. Kebutuhan akan teknologi yang hemat energi dan bersih secara global, terutama di negara-negara berkembang dengan permintaan tinggi, akan membantu mendorong penerbitan di masa mendatang.[127] Jika dikelola dengan baik, pasar obligasi hijau dapat menyediakan sumber pembiayaan penting untuk proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Pembiayaan obligasi hijau oleh publik dan/atau entitas swasta berpotensi mengurangi biaya pembiayaan, mengingat reseptif yang kuat yang didorong oleh permintaan atau mendorong proyek-proyek yang mendukung lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Obligasi hijau semakin dimobilisasi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur rendah karbon. Penerbitan obligasi hijau dan pinjaman hijau global mencapai USD 257,7 miliar pada 2019, naik 51 persen dari 2018

Sebagian besar penerbitan obligasi hijau pemerintah kota saat ini berada di Amerika Serikat, Eropa dan Asia.[129] Wilayah lain seperti Afrika dan Amerika Latin memiliki peluang untuk mengembangkan proyek inovatif untuk memasuki pasar obligasi hijau, tetapi penerbitan obligasi hijau akan bergantung pada kondisi pasar lokal, seperti lingkungan peraturan administratif, jenis proyek dan minat investor. Selanjutnya, obligasi hijau lebih mahal dibandingkan obligasi tradisional dan melibatkan proses penerbitan yang kompleks. Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas yang kuat untuk terlibat dalam penerbitan obligasi hijau, serta memantau dampak lingkungannya.

8.3.4 Memanfaatkan Bantuan Pembangunan Resmi

Bantuan pembangunan internasional tetap menjadi sumber pendanaan eksternal yang signifikan untuk pelaksanaan agenda pembangunan global; bantuan pembangunan internasional menjadi penyumbang signifikan pada pendanaan infrastruktur di seluruh negara terbelakang (LDCs). AAAA berkomitmen untuk membalikkan penurunan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance* (ODA)) ke negara-negara tersebut dan mendorong negara-negara maju untuk membuat komitmen ODA sebesar 0,2 persen dari PDB ke negara terbelakang (LDCs). Untuk mencapai tujuan Agenda 2030 dan NUA, ODA dan berbagai lembaga keuangan publik internasional lain harus dikerahkan dan digunakan secara lebih efektif. Mereka harus selaras dengan prioritas lokal dan intervensi pembangunan harus membawa standar kepemilikan lokal. Mereka harus dipimpin oleh negara dan khusus untuk kebutuhan lokal dan konteks lokal. Oleh karena itu, strategi mitra pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan perlu berkembang dan beradaptasi dengan situasi lokal — yang antara lain menggunakan sistem lokal, termasuk kerangka hasil dan sistem pengelolaan dan pengadaan keuangan publik. Bantuan internasional dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal, yang merupakan elemen penting dari kepemilikan lokal.

Untuk mencapai tujuan Agenda 2030 dan NUA, ODA dan berbagai lembaga keuangan publik internasional lain harus dikerahkan dan digunakan secara lebih efektif. Mereka harus selaras dengan prioritas lokal dan intervensi pembangunan harus membawa standar kepemilikan lokal

Pembiayaan diperlukan tidak hanya untuk investasi dalam aset fisik, tetapi juga untuk persiapan proyek, pelaksanaan, bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan penataan pendanaan investasi modal.[130] Lebih lanjut, bantuan internasional dapat mencakup dukungan akses ke pasar modal melalui pendanaan lunak dan hibah yang digabung dengan pinjaman. Instrumen jaminan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)) memainkan peran penting dalam menghasilkan sumber daya tambahan; instrumen tersebut mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan dengan membuka sumber daya keuangan yang ada dan memfasilitasi akses kredit ke kelompok sasaran. Pada tahun 2014 misalnya, SIDA memfasilitasi Fasilitas Jaminan Perumahan Palestina (Palestine Housing Guarantee Facility) sebesar USD 20 juta untuk

mempromosikan pinjaman dari bank Palestina kepada UKM di Yerusalem Timur, Gaza dan di Area C di Tepi Barat yang ketersediaan kreditnya terbatas. Instrumen tersebut juga mempromosikan pembiayaan perumahan di Yerusalem Timur dan Gaza. Jaminan tersebut diberikan kepada Inisiatif Investasi Timur Tengah (Middle East Investment Initiative (MEII)), yang pada gilirannya menjamin bank-bank lokal.[131]

Sejak 2010, Green Climate Fund (GCF) telah muncul sebagai pemain penting dalam ODA. UNFCCC membentuk GCF pada tahun 2010 "sebagai entitas operasi mekanisme keuangan Konvensi untuk mendukung aksi iklim global dengan mempromosikan transisi emisi rendah dan ketahanan iklim di negara-negara berkembang"[132] GCF mendukung ketahanan dan proyek pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di seluruh dunia, seperti jaringan metro di Tbilisi (Georgia); pengembangan, konstruksi dan pelaksanaan proyek energi terbarukan di sembilan negara Afrika yang miskin energi melalui fasilitas Climate Investor One (CIO); energi terbarukan dan teknologi hemat energi di Mongolia;[135] dan transisi ke pembangunan rendah karbon dan tahan iklim di Provinsi Shandong, Tiongkok, melalui Dana Pembangunan Hijau Shandong (Shandong Green Development Fund) (Gambar 8.7).[136]

Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan luar negeri dan belanja pembangunan Tiongkok semakin menonjol. Dalam konteks Inisiatif Belt and Road, Tiongkok memberikan pinjaman, hibah, dan sumber daya lain untuk investasi infrastruktur di beberapa negara (lihat Kotak 8.5)

Gambar 8.7: Dana pembangunan hijau Shandong: Distribusi portofolio

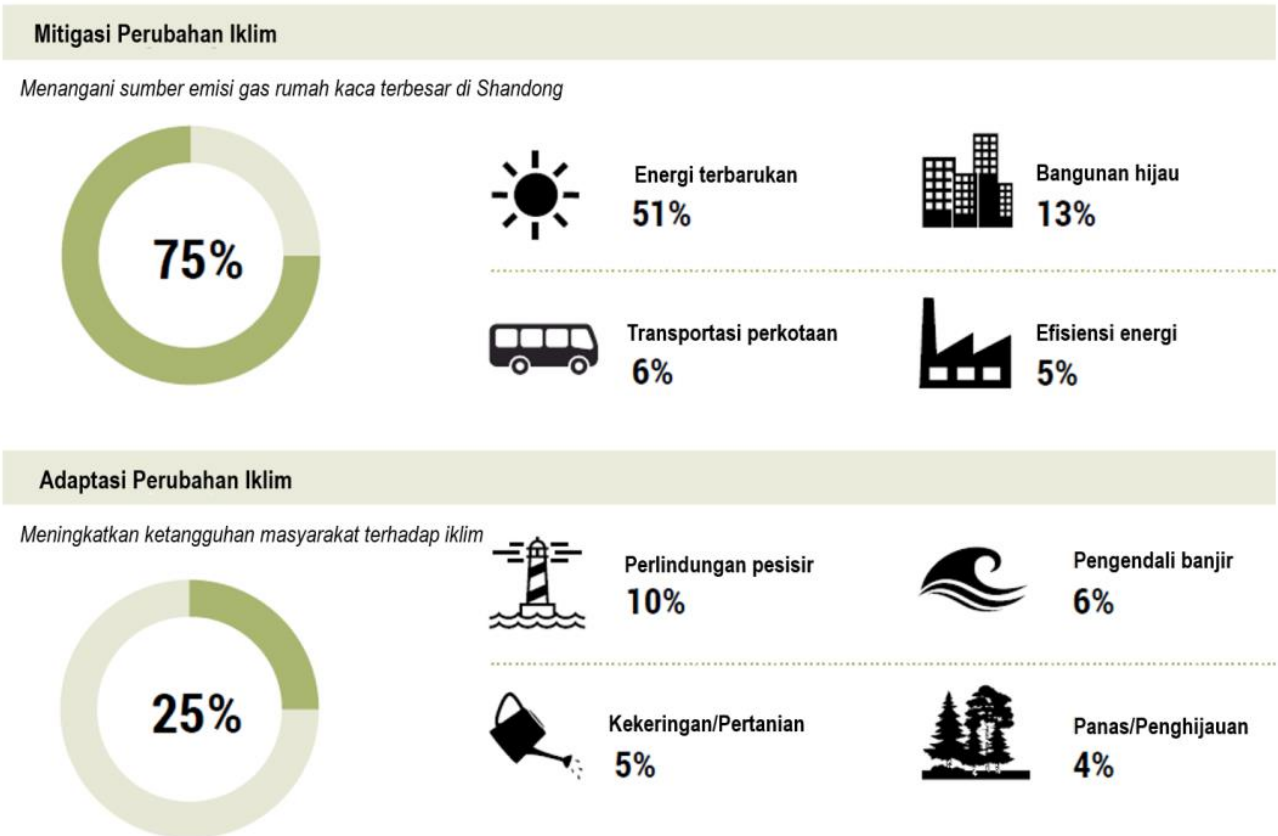

Sumber: Jenny, dkk. 2020

Kotak 8.5: Inisiatif Belt and Road Tiongkok

Tiongkok mendukung upaya global dalam infrastruktur investasi melalui Inisiatif Belt and Road (Belt and Road Initiative (BRI)). BRI bertujuan untuk membangun konektivitas dan kerjasama di enam koridor ekonomi utama yang mencakup Tiongkok, Mongolia dan Rusia, Negara-negara Eurasia, Asia Tengah dan Barat, Pakistan, negara lain di anak benua India, dan Indochina. Ekonomi yang berpartisipasi dalam BRI mewakili lebih dari sepertiga PDB dan lebih dari setengah populasi dunia. Inisiatif ini adalah proyek besar yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional melalui konektivitas antarnegara yang berada di jalur sutra kuno dan sekitarnya. Termasuk di dalamnya Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Darat (*Silk Road Economic Belt)* dan Jalur Sutra Maritim Abad 21 (*21st Century Maritime Silk Road*). Proyek investasi BRI diperkirakan akan menambah lebih dari USD 1 triliun pendanaan luar untuk infrastruktur asing selama dekade 2017-2027.

Tiongkok telah mengusulkan implementasi BRI secara holistik, mencakup sejumlah aspek luas yang akan menjadi penting untuk mencapai TPB. Jadi, meskipun investasi infrastruktur merupakan aspek kunci dari BRI, Tiongkok menyatakan bahwa BRI memiliki tujuan yang lebih luas, mencakup semua aspek pertumbuhan berkelanjutan untuk dirinya sendiri dan termasuk pertumbuhan regional yang lebih seimbang, peningkatan industri dan pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau di dalam negeri.

Sumber utama pendanaan adalah bank pembangunan Tiongkok: China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China China Exim Bank, China Construction Bank, Silk Road Fund, New Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), di mana Tiongkok memiliki hak suara.

Mengingat defisit pembiayaan infrastruktur global, tidak diragukan lagi bahwa BRI sejauh ini merupakan kontribusi paling signifikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Antara tahun 2005 dan 2018, proyek konstruksi global Tiongkok (terutama infrastruktur) di seluruh dunia berjumlah USD 814,3 miliar. USD 480,3 miliar berada di negara-negara peserta BRI, USD 170,7 miliar di Sub-Sahara Afrika, USD 63,4 miliar di Amerika Latin, dan USD 34 miliar di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang bukan bagian dari BRI. Proyek konstruksi Tiongkok relatif lebih kecil di negara-negara OECD, dengan Australia yang paling signifikan yaitu USD 17,1 miliar.

Investasi luar Tiongkok di sektor konstruksi, jumlah kumulatif nasional (dalam miliar Dolar AS), 2005-2018

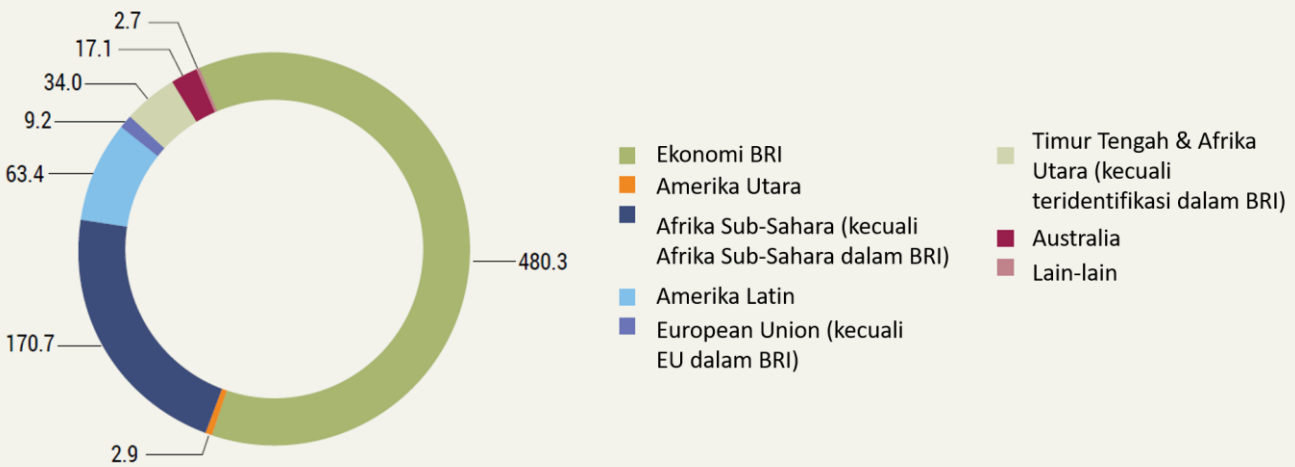

Sumber: OECD, 2018

Pemandangan udara Permukiman Informal Canterbury, Teluk Montego, Jamaica © UN-Habitat/Kirsten Milhahn

8.4 Catatan Kesimpulan dan Pembelajaran untuk Kebijakan

Cukup jelas bahwa pandemi COVID-19 telah menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi. Dampak pandemi global telah menggoncangkan kepercayaan terhadap investasi infrastruktur di mana hanya 5 persen pemimpin sektor publik dan swasta percaya bahwa investasi akan meningkat secara signifikan setelah pandemi, dengan penurunan tajam dari 34 persen sebelum krisis.[137]

Meskipun ada kemunduran sementara, jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka mencapai target NUA dan infrastruktur terkait TPB tersedia. Tantangan global adalah dana ini tidak diinvestasikan di daerah perkotaan yang memerlukan untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kenyataannya, tingkat investasi menurun di krisis ekonomi tahun 2008 dan stagnan. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk menutup jurang antara investasi, tapi ada berbagai aksi nyata, yang bila dilakukan dengan koordinasi, akan menciptakan lingkungan yang mendukung yang diperlukan untuk pemerintah memobilisasi pendapatan domestik dan bangun kelayakan kredit sehingga mampu menarik investasi sektor swasta. Institusi global mempunyai peran penting untuk mendukung negara terbelakang (LDCs). Juga ada kebutuhan negara-negara untuk memastikan bahwa investasi di kota-kota sejalan dengan agenda pembangunan global.

Kebutuhan investasi sektor swasta menunjukkan prioritas yang saling bersaing antara memaksimalkan keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Bergerak maju, prinsip kebijakan luas dalam NUA dan TPB harus selalu dilihat kembali dan digunakan sebagai pedoman untuk menyeimbangkan ketegangan yang bersaing (Gambar 8.8). Sementara AAAA telah menetapkan target investasi, ada kebutuhan untuk fokus pada target yang memerlukan investasi terbesar, yang dalam waktu yang sama mempunyai iklim investasi yang kurang kondusif, bila kota-kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan untuk semua. Negara terbelakang (LDCs) membutuhkan pembuat kebijakan yang fokus dan kerja yang strategis untuk meningkatkan

manajemen keuangan dan mengkatalisasi pendapatan dalam negeri agar menarik investasi. Pekerjaan ini membutuhkan kolaborasi kebijakan lintas yuridiksi dan tingkatan pemerintah, maupun di tingkat global dengan investasi internasional yang mendukung. Tujuan kebijakan tidak semuanya responsif terhadap prioritas setiap pemangku kepentingan, namun landasan global yang selalu membawa sektor publik dan swasta bersama tetaplah penting (Gambar 8.8). Untuk memastikan bahwa negara-negara yang rentan terwakili, dan kebutuhan mereka diakui, organisasi internasional harus terus memberikan bantuan teknis dan membangun kapasitas lintas tingkatan pemerintah.

Meskipun ada kemajuan dalam konteks tertentu, aksi untuk mewujudkan TPB tidak secepat dan pada skala yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal pada tahun 2030. Di antara tujuan kunci Dekade Aksi adalah mobilisasi Gerakan menuju pencapaian TPB dan membuka pembiayaan untuk investasi, terutama di kota-kota di mana porsi besar populasi global tinggal. Sebagaimana telah dibahas dalam bab ini, meningkatkan pembiayaan yang memadai memerlukan upaya yang konkrit. Berikut berapa opsi penting yang ditegaskan kembali:

- ***Keuangan pemerintah kota yang berkelanjutan.*** Untuk mewujudkan investasi yang diperlukan untuk urbanisasi berkelanjutan, keuangan pemerintah kota harus bergerak menuju posisi mandiri. Ini memerlukan kota-kota dengan portofolio sumber pendapatan yang beragam (dan juga peningkatan kapasitas untuk pengumpulan pendapatan), maupun mendorong instrumen dan mekanisme inovatif (misal PMF, pembiayaan campuran, obligasi hijau perkotaan dan instrumen pembiayaan berbasis tanah) untuk memobilisasi sumber-sumber yang diperlukan untuk infrastruktur. Diskusi mengenai diversifikasi sumber pendapatan menekankan fokus menerus pada praktek manajemen keuangan pada semua tingkat pemerintah, terutama di dalam pemerintah daerah. Melibatkan sektor swasta dan menarik dana investasi akan membutuhkan bukti manajemen keuangan yang efisien.

Gambar 8.8: Investasi perkotaan berkelanjutan: tantangan kunci dan opsi kebijakan bagi Negara terbelakang (LDCs)

Sumber: Diadaptasi dari UNCTAD, 2014

- ***Percepatan aksi.*** Waktu yang diperlukan untuk mewujudkan komitmen transformatif NUA dan mencapai target TPB terkait perkotaan sangat pendek; lima tahun telah berlalu. Sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengkatalisasi aksi untuk mendukung investasi dalam empat dimensi nilai urbanisasi berkelanjutan termasuk modal sumberdaya manusia, kelembagaan, inovasi dan teknologi, yang sangat penting untuk membuat kota yang aman, inklusif, berketahanan dan berkelanjutan. Bila investasi direncanakan dan dikelola dengan baik, maka dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kota dan berfungsi sebagai jembatan untuk keterlibatan yang sedang terjadi di pasar global dan sebagai hasilnya menciptakan iklim ang produktif yang menarik investasi tambahan.
- ***Keterpaduan kebijakan.*** Di tingkat global, urbanisasi dibentuk oleh kebijakan dan keputusan kerjasama internasional oleh setiap tingkatan pemerintahan. Agar kota-kota meningkatkan investasi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, butuh penyelarasan antara kerangka kerja internasional dan kebijakan daerah. Investasi dalam urbanisasi berkelanjutan membutuhkan kerangka kebijakan yang dapat menyelaraskan aliran keuangan daerah dengan tujuan publik di daerah. Tata kelola perkotaan harus dilandaskan pada upaya terkoordinasi dari desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi, tanggung jawab belanja daerah didukung oleh pemberdayaan fiskal dan aliran dana antarpemerintah yang dapat diandalkan (misal kapasitas hukum dan teknis untuk meningkatkan pajak). Urbanisasi berkelanjutan harus responsif terhadap konteks nasional dan sensitif terhadap konteks politis dan budaya, dilihat dari sudut pandang inklusivitas dan keadilan. NUA dan TPB memberikan landasan kerja luas yang mengarahkan investasi, tapi aktor internasional harus bekerja dengan dan mendukung pemerintah nasional dan lokal untuk berkolaborasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka mencapai agenda pembangunan internasional dengan cara-cara yang sesuai dengan realita lokal.
- ***Perhitungan tepat kebutuhan.*** Kebutuhan fiskal dan kombinasi dari potensi sumberdaya untuk setiap negara berbeda-beda. Negara perlu melakukan perhitungan yang tepat untuk kebutuhan keuangan. Juga membutuhkan bantuan teknis untuk mengembangkan agenda reformasi nasional yang memetakan kebutuhan infrastruktur dan TPB sesuai kondisi nasional dan menyelaraskan peran pendukung berbagai mitra pembangunan dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pemeliharaan.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab ini, kebutuhan investasi di daerah perkotaan sangat penting dan kebutuhan untuk mewujudkannya sangat mendesak. Meskipun tidak ada jawaban yang mudah untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara didunia, ada langkah-langkah awal yang jelas dan penting untuk memastikan investasi. Secara global pemerintah nasional dan pemerintah di bawahnya harus diberdayakan agar dapat membiayai secara optimal berbagai investasi dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk investasi membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan berkesinambungan terhadap pembangunan perkotaan berkelanjutan. Sangat penting memperkuat berbagai elemen hukum, institusi dan prosedur dari manajemen investasi publik sebelum membahas utang publik dan penjaminan. Investasi yang dibutuhkan tidak ditangani aktor sendiri-sendiri, tapi membutuhkan ekosistem yang fokus pada dampak terdiri atas para aktor, termasuk sektor swasta dan finansial, sektor publik, masyarakat, warga dan komunitas.

Catatan Akhir

1. Bab ini menggunakan infrastruktur pada pemahaman komprehensif, meliputi infrastruktur keras (aset fisik) maupun lunak (institusi yang vital terhadap ekonomi dan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, keamanan, hukum, peraturan, dan budaya).
2. TPB 1-10, 12, 13, 17
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019e.
4. UNDESA, 2015
5. OECD, 2019b.
6. Pada 2016, contohnya, pajak pendapatan di negara berkembang sebesar USD4.3 triliun (OECD, 2019b).
7. OECD, 2019b.
8. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020.
9. Perserikatan Bangsa-Bansga, 2020.
10. Mahler et al, 2020.
11. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020.
12. Brooks et al., 2020.
13. UN-Habitat, 2020e.
14. The Inter-American Development Bank, contohnya, mendefinisikan infrastruktur berkelanjutan sebagai "proyek infrastruktur yang direncanakan, dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dinonaktifkan dengan alasan menjamin keberlanjutan ekonomi dan keuangan, lingkungan (termasuk ketahanan iklim), dan kelembagaann dalam seluruh daur hidup proyek." (IADB, 2018)
15. Godfrey dan Zhao, 2016.
16. Woetzel et al, 2017.
17. Woetzel et al, 2017.
18. European Environment Agency, 2016.
19. European Commission, 2019.
20. UN-Habitat, 2017c.
21. UN-Habitat, 2017c
22. Boston Consulting Group, 2018; Zottis, 2014.
23. Bank Dunia, 2019f.
24. UN-Habitat, 2019e.
25. Bank Dunia, 2019g.
26. UN-Habitat, 2017c.
27. UN-Habitat, 2017c
28. UNDP, 2012.
29. Hommann dan Lall, 2019.
30. Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 2018.
31. Government of Kenya, 2018; - EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).
32. UN-Habitat, DERASAT dan UNDP, 2020.
33. Global Taskforce of Local and Regional Governments, 2016.
34. Cities Climate Finance Leadership Alliance, 2015.
35. Godfrey dan Zhao, 2016.
36. 2,2 persen ketika dibandingkan dengan Mauritus (pemimpin regional dalam infrastruktur); menyusul Korea Selatan akan meningkatkan pertumbuhan perkapita sebesar 2,6 persen poin (Foster dan Briceño-Garmendia, 2010).
37. CAF, 2017.
38. The New Climate Economy. 2016.
39. UN-Habitat, 2017c.
40. Gaspar et al., 2019; Romp dan de Haan, 2007; Hague dan Kim, 2003.
41. UN-Habitat dan UNICEF, 2020.
42. UN-Habitat, 2017c.
43. Tibaijuka, 2009.
44. IEA, 2020b
45. Godfrey dan Zhao, 2016.
46. Bouton et al, 2015.
47. National Institute of Building Sciences, 2019.
48. Godfrey dan Zhao, 2016.
49. Societe Generale dan UNEP FI, 2018; IMF, 2015
50. Walter (ed.), 2016
51. ILO, 2020f; Lieuw-Kie-Song, 2020.
52. Pemeliharaan aset fisik yang baik di perkotaan membangkitkan penghematan substansial dari mengurangi total biaya daur hidup.
53. Bank Dunia, 2010.
54. Grigoli dan Kapsoli, 2018; Grigoli,2015.
55. UN-Habitat, 2017c.
56. WBGU—German Advisory Council on Global Change, 2016.
57. United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, 2017.
58. Bank Dunia, 2018c.
59. Monslave dan Watsa, 2020.
60. Bank Dunia, 2018c; Jamison dan Summers, 2013; Hanushek and Woessmann, 2008; Barro, 2001.
61. Midgley, 2020.
62. Floater et al, 2017.
63. UN-Habitat, 2017c.
64. UN-Habitat, 2016e.
65. Bank Dunia, 2013a.
66. UN-Habitat, 2017c; Bonilla dan Zapparoli, 2017.
67. Sebagian besar pengembalian yang diharapkan dari pengeluaran kesehatan, pendidikan, antara lain infrastruktur adalah kerugian akibat inefisiensi pengeluaran. (Gaspar, et al., 2019).
68. McKinsey & Company, 2013.
69. Government e-Marketplace (https://www.india.gov.in/topics/infrastructure).
70. UCLG, 2010.
71. UN-Habitat, 2017b.
72. UN-Habitat, 2017c.
73. Ahmad et al., 2019.
74. OECD.Stat (https://stats.oecd.org/I); Franzsen dan McCluskey, 2017: Di negara OECD, pajak properti berulang mencapai sekitar satu persen dari PDB, yang lebih dari dua setengah kali lebih tinggi daripada nilai di negara-negara Afrika.
75. Collier et al, 2018.
76. Godfrey dan Zhao. Page 13; UNHabitat, 2011d.
77. UN-Habitat, 2012b.
78. Bank Dunia, 2013; UN-Habitat, 2017c.
79. UN-Habitat, 2017c.
80. UN-Habitat, 2020f.
81. Suzuki et al, 2015.
82. UN-Habitat, 2019f.
83. UN-Habitat, 2017c.
84. Hart dan Welham, 2016.
85. Kebijakan Perkotaan Nasional biasanya mengidentifikasi tindakan kebijakan baru yang membutuhkan pendanaan. Kebutuhan pendanaan pada gilirannya membutuhkan kerangka pembiayaan yang sesuai yang dapat mencapai tujuan pendanaan sesuai dengan kapasitas para pelaku di berbagai skala (nasional, regional, dan lokal). Bagaimana pendanaan dikumpulkan dan dialokasikan berpengaruh pada efektivitas kebijakan perkotaan. (UN-Habitat, 2019g).
86. OECD, 2019b.
87. Godfrey dan Zhao, 2016
88. IMF, 2015.
89. Alam, 2014.
90. AlMujadidi et al, 2019.
91. Godfrey dan Zhao, 2016.
92. Gaspar, et al., 2019: IMF merekomendasikan negara-negara untuk meningkatkan rasio pajak PDB sebanyak 5 persen poin dari PDB dekade ini (Gaspar, et al., 2019).
93. AlMujadidi et al, 2019
94. SDNS, 2019.
95. Jahnsen dan Pomerleau, 2017.
96. SDSN, 2019; McKinsey 2015; GlobalJustice Now, 2015.
97. SDSN, 2019.
98. The Platform for Collaboration on Tax (https://www.tax-platform.org/who-we-are).
99. SDNS, 2019; Addis Tax initiative (https://www.addistaxinitiative.net/ about).
100. SDSN, 2019.
101. United Republic of Tanzania, 2019; UCLG, 2019b.
102. AfDB, tak bertanggal.
103. Bonilla dan Zapparoli, 2017.
104. OECD, 2019b.
105. See:https://www.otpp.com/home
106. Dahiya dan Gentry, 2020
107. Dahiya dan Gentry, 2020.
108. Dahiya dan Gentry, 2020.
109. Ahmad, et al., 2019; Bank Dunia, 2016.
110. Irwin et al, 2018.
111. Convergence, 2018.
112. Convergence, 2018.
113. UN-Habitat, 2016g.
114. SDSN, 2019.
115. OECD Blended Finance Principles(https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/).
116. UN-Habitat, 2017c.
117. Andersson, 2015.
118. UN-Habitat, 2017c; Andersson, 2015.
119. Oliver, 2016.
120. Municipal Finance Authority of British Columbia (https://mfa.bc.ca/about-us/history); Municipal Finance Authority of British Columbia, 2020.
121. Government of India, tak bertanggal.
122. Bank Dunia, 2019g.
123. UN-Habitat, 2017c.
124. Godfrey dan Zhao, 2016.
125. Godfrey dan Zhao, 2016.
126. Climate Bonds Initiative, 2020.
127. UN-Habitat, 2017c.
128. Investment Industry Association of Canada, 2019.
129. See: GIZ, 2017; IISD dan DRC, 2015.
130. UN-Habitat, 2017c.
131. SIDA, 2017; SIDA 2006.
132. Green Climate Fund, 2019.
133. Green Climate Fund, 2020b.
134. Green Climate Fund, 2020c.
135. Green Climate Fund, 2020d.
136. Jenny et al, 2020; Green Climate Fund, 2020e.
137. The Construction Specifier, 2020.

Bab 9

Agenda Baru Perkotaan dan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Urbanisasi yang berkelanjutan menghasilkan nilai ekonomi, lingkungan, sosial, dan nilai tak berwujud yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua. Pesan ini dapat dan harus memandu upaya pembangunan selama Dekade Aksi untuk mencapai TPB dan bersamaan dengan dunia yang pulih dari pandemi COVID-19. Untungnya, terdapat peta jalan untuk urbanisasi yang berkelanjutan dalam NUA, yang memberikan kerangka komprehensif untuk membuka nilai yang melekat pada kota yang terencana, terkelola, dan dibiayai dengan baik.

Membuka nilai urbanisasi yang berkelanjutan adalah upaya yang berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah Pusat harus menciptakan lingkungan yang mendukung kota-kota untuk dapat berkembang. Pemerintah Daerah, harus memanfaatkan berbagai kesempatan yang mereka miliki dan mengelola wilayahnya secara efektif, sesuai dengan NUA. Sektor swasta harus berinvestasi dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan, mulai dari perumahan yang terjangkau hingga infrastruktur yang ramah lingkungan. Masyarakat sipil harus memperkuat kelembagaan, dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi beragam masyarakat. Filantropi harus mengisi jurang antara untuk membantu yang paling rentan. Universitas harus mengedukasi generasi selanjutnya dan mendorong kesempatan litbang untuk inovasi dan kesejahteraan yang inklusif. Ketika seluruh bagian terkait saling bekerja dalam harmoni dan didukung oleh kelembagaan dan kebijakan yang sesuai, kota-kota akan berkembang dan nilai mereka akan ditingkatkan serta dimanfaatkan oleh semua.

Butir Kebijakan

1. Harus ada rasa urgensi dan komitmen jangka panjang untuk mengimplementasikan NUA sebagai dasar untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan.
2. Implementasi yang efektif dari NUA melalui struktur tata kelola perkotaan yang mendukung, perencanaan kota dan wilayah dan cara-cara implementasi yang efektif, pembiayaan yang memadai, pengembangan kapasitas, informasi, teknologi dan inovasi, akan memanfaatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan di semua dimensinya.
3. Membuka nilai urbanisasi berkelanjutan adalah upaya multisektoral dan berbagai pemangku kepentingan.
4. Kolaborasi dan kerja sama lintas skala sangat penting untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan.
5. Kota harus melakukan audit berkala dan memetakan upaya mereka ke dalam komitmen transformatif NUA, TPB 11 dan dimensi perkotaan dari TPB lainnya.
6. Kerangka kelembagaan yang sesuai dan peraturan perkotaan perlu ada untuk mendukung tata kelola berjenjang yang efektif dan meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan
7. Platform data partisipatif dan sistem pemantauan yang efektif merupakan bagian integral untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan
8. Kota-kota perlu mengutamakan paket stimulus dan rencana pemulihan ekonomi setelah wabah COVID-19.
9. Pemerintah pada semua level harus mengimplementasikan NUA setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah, dalam konteks dampak dan ketidakpastian terkait dengan pandemi COVID-19.
10. COVID-19 memberikan kota-kota peluang unik untuk membangun kembali secara lebih baik, dengan berfokus pada pola bisnis dan konsumsi yang lebih hijau dan berkelanjutan, ekonomi digital, dan ruang perkotaan yang berkualitas.

Bab ini membahas bagaimana implementasi yang efektif dari Agenda Baru Perkotaan (NUA) dapat berkontribusi pada nilai ekonomi, lingkungan, sosial, dan nilai tak berwujud dari wilayah perkotaan dan dengan demikian meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan. Laporan ini telah menunjukkan bahwa urbanisasi yang terencana dan terkelola dengan baik dapat menghasilkan nilai yang saling berhubungan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun terdapat rasa urgensi yang nyata serta kebutuhan akan komitmen jangka panjang untuk mengimplementasikan NUA sebagai dasar untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan, khususnya TPB 11, yang menunjukkan bahwa NUA adalah akselerator kemakmuran dan pembangunan untuk berbagai target Tujuan 11 dan dimensi perkotaan dari TPB.

Laporan ini telah menunjukkan bahwa urbanisasi yang terencana dan terkelola dengan baik dapat menghasilkan nilai yang saling berhubungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk semua pemangku kepentingan perkotaan, kelambanan bukan lagi pilihan yang masuk akal atau bijaksana. Terlepas dari kekurangan data atau kendala sumber daya, ada banyak langkah yang sesuai dan penting yang harus segera diambil dalam setiap konteks oleh individu, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan internasional. Hanya dengan bertindak secara konsisten dan kolaboratif melintasi batas-batas administratif dan politik di semua level, dari komunitas lokal hingga organisasi internasional, cakupan global tantangan urbanisasi berkelanjutan dapat diatasi. Biaya kelambanan terlalu tinggi dan, seperti yang disoroti sebelumnya dalam Laporan ini, khususnya di Bab 4 dan 7, pemikiran ulang yang mendalam dan transformatif untuk merumuskan tindakan yang tepat sangat mendesak.[1] Kelangsungan hidup umat manusia dan planet kita yang semakin mengota, secara keseluruhan dipertaruhkan.

Sebagaimana diartikulasikan dalam Bab 1 hingga 5, nilai urbanisasi berkelanjutan dikonseptualisasikan sebagai totalitas kondisi, fitur, atau hasil ekonomi, lingkungan, sosial, dan hasil tak berwujud (kelembagaan, tata kelola pemerintahan, politik, budaya, dan sipil) kota yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup hunian. Definisi ini memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengakomodasi keragaman regional dan budaya, serta pengertian hukum yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan "nilai". Konsep ini selaras dengan tiga komitmen transformatif NUA, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan; kemakmuran perkotaan yang

berkelanjutan dan inklusif serta peluang untuk semua; dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh secara lingkungan. Bab ini juga menggunakan definisi kemakmuran UN-Habitat yang mencakup produktivitas; pembangunan infrastruktur; kualitas hidup; inklusi sosial; dan kelestarian lingkungan. [2]

Sebagaimana dijelaskan di Bab 1, memahami hubungan antara NUA dan TPB sangatlah penting, terutama TPB 11 dan elemen yang terkait dengan perkotaan dari tujuan lainnya, yang diartikulasikan dalam Laporan empat tahunan Sekretaris Jenderal tentang NUA. [3] Sejak laporan tersebut yang diluncurkan pada tahun 2018, UN-Habitat telah mendokumentasikan 550 kota yang sedang mengerjakan perbaikan pada alat pemantauan NUA dan TPB mereka.[4] Namun, upaya tersebut hanyalah titik awal. Melalui contoh spesifik, petunjuk kebijakan dan perangkat yang sedang dikembangkan, bab ini melangkah lebih jauh dengan menawarkan tindakan praktis untuk mencapai TPB dan mempercepat nilai urbanisasi melalui perubahan dalam cara kota direncanakan, dibangun, dikelola, dan didanai. Pemenuhan komitmen transformatif NUA dan pencapaian TPB bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai tujuan keberlanjutan perkotaan. Oleh karena itu, bab ini mengembangkan argumen yang positif dan berwawasan ke depan tentang perlunya hubungan yang erat antara NUA dan TPB, karena NUA tidak memiliki kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang spesifik dan formal sementara TPB memiliki target dan indikator yang tepat.

Pemenuhan komitmen transformatif NUA dan pencapaian TPB bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai tujuan keberlanjutan perkotaan.

Untuk itu, UN-Habitat mengembangkan alat pemantauan berharga yang dikenal sebagai Indeks Kemakmuran Kota (City Prosperity Index (CPI)). Alat ini merupakan indeks statistik komposit yang mencakup semua indikator TPB 11 dan komponen TPB lain yang dipilih untuk mencakup dimensi kemakmuran perkotaan, yaitu produktivitas; pembangunan infrastruktur; kualitas hidup; kesetaraan dan inklusi sosial; keberlanjutan lingkungan hidup; dan tata kelola dan legislasi.[5] Indeks ini berpotensi untuk menyelaraskan kemajuan di NUA, dalam semua keluasan dan ambisinya, dengan tinjauan TPB yang lebih rinci dan spesifik untuk kepentingan Negara Anggota, pemerintah provinsi, dan pada akhirnya semua penduduk perkotaan. Lebih dari 500 kota menggunakan CPI, yang menunjukkan bahwa ada antisipasi luas bahwa CPI akan menjadi alat yang berguna untuk membantu implementasi agenda pembangunan berkelanjutan global dan dengan demikian meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan.[6]

Dalam mengimplementasikan NUA, dengan semua perangkat pendukungnya, para pemangku kepentingan akan sangat terbantu dalam mencapai urbanisasi yang berkelanjutan.

Karenanya, dalam mengimplementasikan NUA, dengan semua perangkat pendukungnya, para pemangku kepentingan akan sangat terbantu dalam mencapai urbanisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan studi kasus dan bukti dari bab-bab sebelumnya, bab ini menunjukkan bahwa nilai urbanisasi berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan menerapkan NUA melalui kerangka aksi khusus yang merangkum komponen penting utama seperti kebijakan perkotaan nasional (KPN), peraturan, tata kelola, dan perencanaan kota dan wilayah.

Bab ini juga membahas cara untuk mengimplementasikan perjanjian internasional lainnya. Munculnya kesadaran bahwa planet ini berada dalam "darurat iklim" adalah bukti bahwa agenda perubahan iklim kini menjadi yang terpenting (Bab 1, 4, dan 5) dengan semakin banyaknya pemerintah daerah yang mengumumkan keadaan darurat iklim untuk mendorong tindakan bersama. Demikian pula, laporan Koalisi untuk Transisi Perkotaan tahun 2019 *"Darurat Iklim, Peluang Perkotaan"* menjadi alasan yang kuat untuk investasi di kota-kota kompak dan terhubung yang didukung oleh energi bersih untuk menghasilkan kemakmuran — dan dengan ekstensi meningkatkan nilai material urbanisasi — sambil menangani keadaan darurat iklim.[7]

Pusat kota Reykjavik. © Alexey Stiop/Shutterstock

Sisa dari bab ini dibagi menjadi empat bagian, masing-masing membahas pertanyaan mendasar berikut bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan:

a. Mengapa kita harus bergerak cepat untuk memanfaatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan?
b. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai urbanisasi?
c. Bagaimana kita dapat memanfaatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan?
d. Refleksi penutup — menerapkan NUA dalam konteks ketidakpastian dan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya

9.1 Menuju Dekade Aksi: Memanfaatkan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan dengan Cepat

Perjanjian dan agenda global PBB yang diadopsi sejak 2015 merupakan pengakuan penting atas tanggung jawab semua negara, terlepas dari lokasi geografis, keadaan historis, dan kondisi saat ini, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Bab 1). Selain itu, perjanjian ini mengakui pentingnya daerah perkotaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, mengingat sebagian besar penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Yang terpenting, perjanjian tersebut juga mengakui bahwa pemerintah regional dan daerah bersama dengan pemangku kepentingan perkotaan lainnya harus memainkan peran

penting karena pemerintah pusat tidak dapat mencapai pembangunan berkelanjutan sendiri.

Komisi Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai, memastikan bahwa generasi saat ini meninggalkan anak-anak dan cucu kita pada sebuah dunia di mana prospek mereka tidak terpengaruh oleh aktivitas kita sendiri dan sebelumnya.[8] Rumusan ini sering dianggap sebagai komitmen retoris. Namun, seperti dicatat di bab-bab sebelumnya, terutama Bab 4, generasi mendatang sudah memegang teguh kata-kata mereka yang berkuasa. Protes di seluruh dunia oleh anak-anak sekolah dan pemuda sejak Mei 2019 di bawah bendera "Fridays for Future" ("Jumat untuk Masa Depan") menggarisbawahi ketakutan mereka bahwa dunia sedang menuju arah yang berbahaya.

Saat kami mengumumkan Dekade Aksi untuk mempercepat solusi berkelanjutan bagi tantangan terbesar dunia -termasuk yang terkait dengan urbanisasi seperti kemiskinan, kesenjangan gender, dan perubahan iklim-, Negara-negara Anggota berhutang kepada warganya dan generasi mendatang untuk membuat perbedaan nyata. Memang, ruang untuk manuver dan waktu untuk bertindak semakin menyusut.[9] Baik secara moral maupun praktis, kelambanan tidak lagi menjadi pilihan: biaya ekonomi, manusia, dan akhirnya sosial dan politik sudah meningkat dan akan dengan cepat dan semakin melebihi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan mitigasi, adaptasi, dan tindakan transformatif. Seperti yang ditunjukkan pada bab-bab sebelumnya, contoh yang relevan sudah ada dalam konteks perkotaan yang berbeda, di mana pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berinovasi pada solusi untuk mengatasi peristiwa cuaca ekstrem; masalah kesehatan kronis yang disebabkan oleh perubahan pola penyakit dan polusi udara; dan hilangnya rumah, tanah, dan mata pencaharian terkait.

Negara - negara Anggota berhutang kepada warganya dan generasi masa depan untuk membuat perbedaan nyata

Tingkat Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDCs) secara Sukarela untuk pengurangan emisi GRK global yang disepakati dalam Persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim di COP21 pada Desember 2015, pada saat itu diketahui tidak memadai untuk menjaga suhu global pada tingkat yang berkelanjutan. Karenanya, COP25 di Madrid pada bulan Desember 2019 menyerukan NDCs yang baru dan lebih ambisius untuk disajikan pada COP26, yang telah ditunda hingga tahun 2021 karena pandemi penyakit virus korona (COVID-19). Negara-negara yang paling ambisius mengumumkan niat mereka untuk berkomitmen pada netralitas karbon antara tahun 2040 dan 2050. Pada akhir COP25, 73 pemerintah nasional, 14 kawasan, 398 kota, 786 bisnis dan 16 investor bekerja untuk mencapai emisi CO_2 nol bersih pada tahun 2050.[10] Komitmen ini menggarisbawahi peran penting yang telah dimainkan oleh pemerintah provinsi, terutama kota dan aktor non-negara di arena yang secara tradisional dipandang sebagai satu-satunya pelestarian oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan memberikan jangka waktu 15 tahun dari 2016-2030 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di berbagai target dalam setiap tujuan. Seperti disebutkan dalam Bab 1, dengan sisa sepuluh tahun untuk mencapai TPB, pentingnya urbanisasi yang berkelanjutan sebagai pintu masuk untuk memastikan kemajuan di berbagai tujuan Agenda 2030 perlu ditekankan kembali dengan memobilisasi tindakan secara global, lokal, individual, dan kolektif; menuntut urgensi dan ambisi dalam memanfaatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan; dan mendorong inovasi berkelanjutan, investasi keuangan dan teknologi. Sementara TPB 11 yang berfokus pada perkotaan dan komponen perkotaan dari banyak TPB lainnya adalah penting, tujuan-tujuan ini paling efektif jika dikejar dalam kaitannya dengan kerangka strategis yang luas untuk keberlanjutan perkotaan pada tahun 2036 seperti yang diabadikan dalam NUA.

Demi kejelasan dalam membuat kasus untuk tindakan mendesak dan terintegrasi untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan, Kotak 9.1 merangkum ambisi normatif esensial dari NUA (lihat Bab 1 untuk detail lebih lanjut) melalui implementasi yang efektif, yang dieksplorasi dan dicontohkan dalam bab ini dengan memanfaatkan pesan-pesan utama dari bab-bab sebelumnya.

Kotak 9.1: Memanfaatkan Agenda Baru Perkotaan (NUA) untuk mempercepat nilai urbanisasi

Sedangkan cakupannya secara luas, Sarana Implementasi NUA berisi seperangkat pedoman terintegrasi untuk memfasilitasi pencapaian nilai urbanisasi (Paragraf 131-141)

- Semua tingkat pemerintah harus menerapkan pendekatan yang sensitif konteks untuk mendanai urbanisasi dan meningkatkan kapasitas manajemen keuangan melalui penerapan instrumen dan mekanisme spesifik untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan.
- Sumber daya endogen dan pendapatan yang dihasilkan melalui pemanfaatan manfaat urbanisasi, bersama dengan efek katalisator dan dampak yang dimaksimalkan baik dari investasi publik maupun swasta, harus dimobilisasi.
- Bisnis harus menggunakan kreativitas dan inovasinya untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan perkotaan.
- Dengan dukungan yang tepat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus mencatat dan memperluas basis pendapatan potensial mereka, misalnya melalui kadaster serba guna, pajak daerah, retribusi dan tarif pelayanan, dengan cara yang adil dan merata secara sosial.
- mempromosikan sistem yang sehat dan transparan untuk melakukan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke provinsi dan daerah berdasarkan kebutuhan, prioritas, fungsi, mandat dan insentif berbasis kinerja.
- Mengembangkan model distribusi sumber daya keuangan vertikal dan horizontal untuk mengurangi ketimpangan di seluruh wilayah provinsi di dalam pusat kota, dan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta untuk mendorong pembangunan wilayah yang terintegrasi dan seimbang.
- Mempromosikan praktik terbaik untuk menangkap dan berbagi peningkatan nilai tanah dan properti yang dihasilkan melalui proses pembangunan perkotaan, proyek infrastruktur, dan investasi publik.
- Mendukung pemerintah provinsi dan daerah dalam upaya mereka untuk menerapkan instrumen kontrol pengeluaran yang transparan dan akuntabel untuk menilai kebutuhan dan dampak investasi dan proyek lokal, berdasarkan kontrol legislatif dan partisipasi publik.
- Mendukung penciptaan kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk pinjaman nasional dan kota yang berkelanjutan, berdasarkan pengelolaan hutang sesuai kemampuan (catatan pada *footnote* pada tabel 9.1) , serta pasar hutang kota yang berkelanjutan jika sesuai.
- Mendukung pengembangan produk pembiayaan perumahan yang sesuai dan terjangkau untuk mendorong partisipasi berbagai jenis lembaga keuangan eksternal untuk berinvestasi di semua bentuk perumahan yang terjangkau dan pembangunan perumahan yang inkremental.
- Pertimbangkan untuk membangun infrastruktur transportasi perkotaan dan wilayah, dan dana layanan di tingkat nasional.

Sumber: UN, 2017, Paragraf 131–141

Garis besar yang luas dan banyak parameter kunci dari tindakan terintegrasi yang diperlukan dalam semua konteks sudah diketahui dengan baik. Kampanye Perkotaan Dunia (World Urban Campaign) dan koalisi pemangku kepentingan perkotaan dengan jelas mengartikulasikan visi tersebut dalam *The City We Need 2.0* (Kota yang Kita Butuhkan 2.0), sebuah manifestasi yang disiapkan saat NUA dinegosiasikan pada tahun 2016.[11] Tak lama kemudian, AFINUA

menyempurnakan visi tersebut setelah agenda tersebut diadopsi pada konferensi Habitat III di Quito.[12]

Laporan ini diterbitkan empat tahun setelah masa hidup NUA dan lima tahun setelah TPB. Sebagai hasil dari ketidakpastian di banyak pemerintah pusat tentang cara terbaik untuk melanjutkan (Bab 1), ditambah dengan waktu tunggu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumentasi panduan oleh UN-Habitat dan SDSN, tahap awal implementasi berjalan lambat, namun temponya sekarang harus lebih dipercepat. Meskipun mungkin ada situasi khusus yang memerlukan penelitian atau data lebih rinci, faktor-faktor ini bukanlah alasan yang masuk akal untuk penundaan umum. Sebagaimana diuraikan dalam Bab 4, memanfaatkan nilai lingkungan dari urbanisasi dalam konteks data dan sumber daya yang terbatas memerlukan mobilisasi yang efektif dari data yang ada dari berbagai sumber, tetapi juga memerlukan penyampaian tindakan strategis melalui kolaborasi berbagai aktor dan memetakan kapabilitas saat ini, kesenjangan pengetahuan kritis dan informasi yang relevan dengan bentuk perubahan perkotaan tertentu. Seperti yang disoroti dalam Laporan empat tahunan pertama tentang NUA, yang paling penting adalah memanfaatkan berbagai sumber data yang inovatif seperti data berbasis masyarakat dan pencacahan data berbasis masyarakat seperti inisiatif global Know Your City (Kenali Kotamu) dari Shack/Slum Dwellers International (Penghuni Gubuk/Kumuh Internasional), yang membantu memperkuat data dan kapasitas statistik pemerintah di semua tingkatan dan memberikan landasan untuk meningkatkan nilai urbanisasi.[13]

Upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam mengimplementasikan NUA didukung oleh beragam program dan kegiatan UN-Habitat di tingkat global, regional, nasional, provinsi dan daerah.

Upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam mengimplementasikan NUA didukung oleh beragam program dan kegiatan UN-Habitat di tingkat global, regional, nasional, provinsi, dan daerah, banyak di antaranya dilaksanakan sebelum 2016. Kategori global mencakup Fase III Program Peningkatan Permukiman Kumuh Partisipatif di Afrika, Karibia, dan Pasifik (*Phase III of* the Participatory Slum Upgrading Programme *in Africa, the Caribbean, and the Pacific*) ; Fase III Jaringan Piranti Pertanahan Global (*Phase III of* the Global Land Tool Network); dan Rencana Perkotaan Terpadu dan Partisipatif serta Ruang Publik untuk Kota-Kota yang Padat, Terhubung, dan Inklusif (Integrated and Participatory Urban Plans and Public Space for Compact, Connected and Inclusive Cities). Program-program ini menyediakan cara-cara konkret untuk memenuhi kebutuhan konvergen dan umum dari Negara-negara Anggota yang relevan.[14]

Contoh-contoh ini menyoroti poin penting bahwa kemajuan tidak selalu membutuhkan kegiatan yang sepenuhnya baru yang didedikasikan khusus karena banyak program dan proyek yang sudah ada atau berkelanjutan sepenuhnya sesuai. Oleh karena itu, melakukan audit dan pemetaan kebijakan publik terhadap tiga komitmen transformatif NUA dan 17 TPB merupakan langkah pertama yang penting yang akan menunjukkan apa yang telah dilakukan dan dengan demikian membantu mengidentifikasi kelemahan dan jurang antara utama yang menjadi fokus intervensi baru dan sumber daya yang sesuai. Banyak intervensi dan tindakan pembangunan juga dapat menangani beberapa tujuan dan target secara bersamaan, sehingga memperkuat kebutuhan untuk harmonisasi dan koherensi kebijakan dari skala global ke lokal (Bab 2).

Mampu mendemonstrasikan kemajuan sejak awal bahkan tanpa investasi baru yang didedikasikan khusus memberikan manfaat tambahan ganda: Ini mengurangi skala biaya baru relatif yang diperlukan untuk memulai dari awal, dan juga mempermudah untuk mendapatkan dukungan dari perwakilan dan pejabat nasional terpilih yang harus melakukan konsekuensi dan manfaat (*trade-off*) antara beragam permintaan sumber daya yang bersaing.

9.2 Meningkatkan Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan

Urbanisasi menciptakan nilai ekonomi melalui penyediaan pekerjaan yang layak, pendapatan dan

kesempatan yang sama bagi semua (Bab 2 dan 3). Memastikan akses ke pekerjaan produktif yang berkelanjutan, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memelihara bakat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam ekonomi perkotaan modern, mengembangkan industri kreatif dan memanfaatkan bentuk-bentuk keuangan kota yang layak, semuanya memiliki peran kunci dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai ekonomi urbanisasi. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus mengembangkan program dan kebijakan untuk memanfaatkan nilai ekonomi urbanisasi untuk memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua. Kebijakan pemerintah harus disertai dengan penciptaan tata kelola yang tepat, kerangka kelembagaan dan hukum.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah di semua tingkatan untuk mengembangkan program dan kebijakan untuk memanfaatkan nilai ekonomi urbanisasi guna memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua.

Penciptaan lapangan kerja sangat penting untuk meningkatkan nilai ekonomi urbanisasi. Kota menurut sifatnya menawarkan peluang signifikan untuk pekerjaan formal dan informal; hal ini terutama berlaku untuk wilayah perkotaan yang direncanakan, dikelola, dan diatur secara efektif seperti yang dibahas dalam Laporan ini. Misalnya, Bab 3 menunjukkan bahwa daerah perkotaan menciptakan peluang kerja yang dibangun berdasarkan keunggulan komparatif dan karakteristik uniknya. Bank Dunia memperkirakan bahwa sektor swasta (termasuk pekerjaan sektor informal) menyumbang 9 dari 10 pekerjaan secara global, yang sebagian besar berada di daerah perkotaan.[15] Memastikan pekerjaan yang memadai di daerah perkotaan sangat penting jika negara ingin memenuhi TPB 8 tentang pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, yang merupakan hal penting untuk menghindari gangguan sosial dan keresahan yang disebabkan oleh pengangguran dan ketimpangan.[16] Selain itu, jika penduduk kota sudah bekerja penuh, mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sumber pendapatan endogen ini memberi pemerintah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan dasar kota.

Lapangan kerja merupakan jalan keluar dari kemiskinan bagi milyaran penduduk perkotaan dan merupakan landasan penting pembangunan ekonomi dan sosial.[17] Pekerjaan juga merupakan penentu utama kepuasan masyarakat dengan kehidupan kota. Negara-negara yang mengalami urbanisasi cepat yang diberkahi dengan banyak pemuda yang dapat dipekerjakan dapat berintegrasi ke dalam ekonomi global dan menghasilkan peluang kerja yang luas, terutama di bidang manufaktur ringan dan alih daya bidang jasa. Asia Timur telah menerapkan strategi ini selama lima dekade terakhir. Baru-baru ini, kota-kota besar di Bangladesh seperti Chittagong dan Dhaka telah berkembang pesat dengan industri garmen.[18] Kegiatan ekonomi tingkat tinggi juga dapat mempekerjakan pemuda di industri kreatif, yang berdekatan dengan seni, budaya, bisnis dan teknologi.[19]

Industri kreatif menonjol karena sangat 'kekotaan'. Ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi global, regional, dan perkotaan. Industri kreatif diperkirakan bernilai lebih dari USD 2,2 triliun di seluruh dunia, yang setara dengan 3 persen dari PDB dunia. Ini mempekerjakan 29,5 juta orang atau satu persen dari populasi dunia yang aktif secara ekonomi.[20]

Terlepas dari kapasitas penciptaan lapangan kerja di daerah perkotaan, pengangguran bisa menjadi tantangan yang sangat menantang, karena kota sering dikaitkan dengan tingginya konsentrasi pengangguran, sebuah fenomena yang disebut sebagai "paradoks perkotaan"[21]. Dalam Dekade Aksi untuk mewujudkan TPB, urgensi penciptaan lapangan kerja terlihat jelas karena tingkat pengangguran global mencapai 5,4 persen pada 2019.[22] Angka itu kemungkinan akan meningkat drastis karena dampak COVID-19. Lebih dari 600 juta pekerjaan tambahan akan dibutuhkan pada tahun 2030 untuk mengimbangi pendatang baru di pasar tenaga kerja, kebanyakan di daerah perkotaan.[23]

Mencari ikan di Accra, Ghana. © UN-Habitat/Kirsten Milhahn

Tantangan pengangguran memberikan dampak di negara berkembang maupun maju. Sekitar 60 persen dari pengangguran di Inggris, Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika Serikat terkonsentrasi di kawasan perkotaan.[24] Sejak perekonomian dunia terdampak pandemi COVID-19, kota akan menanggung beban pengangguran. Contohnya, kawasan metropolitan Las Vegas mengalami tingkat pengangguran sebesar 29 persen pada Mei 2020, tingkat tertinggi di antara seluruh perkotaan di Amerika Serikat ketika seluruh kota besar mengalami kenaikan tingkat pengangguran secara tajam dan mendadak. [25] Bab 1 telah menjelaskan bahwa kehilangan mata pencaharian akibat pandemi paling akut terjadi pada sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi kota, dengan perempuan, pemuda, dan migran terpengaruh secara tidak proporsional. Akibatnya paket stimulus COVID-19 yang disiapkan untuk mengungkit perekonomian seharusnya secara khusus ditujukan untuk menangani sektor ekonomi perkotaan. Kota harus menonjolkan paket stimulus nasional dan rencana pemulihan ekonomi setelah COVID-19.

Dalam konteks ekonomi yang tidak pasti ini, upaya pengembangan ekonomi daerah yang proaktif akan menjadi sangat penting dalam memfasilitasi mata pencaharian perkotaan dan memanfaatkan nilai ekonomi daerah perkotaan. Usaha pembangunan ekonomi daerah harus berupaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, memastikan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Selain merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, tujuan utama prakarsa pembangunan ekonomi daerah harus mencakup upaya khusus yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup untuk semua. Upaya pembangunan lokal akan memberikan hasil yang diinginkan jika berbasis luas, dengan banyak pelaku bekerja sama untuk merangsang dan meningkatkan ekonomi daerah di suatu wilayah. Pemerintah daerah harus memimpin upaya tersebut, tetapi harus mencakup masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga publik dan organisasi yang berbasis kemasyarakatan.[26]

Kebijakan perkotaan yang tepat, didukung oleh sistem pemerintahan yang efektif, kapasitas manusia, kelembagaan yang kuat, perencanaan kota dan wilayah jangka panjang, dan kerangka kerja pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan bertindak sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan dan inklusif.

Di tingkat nasional, lingkungan ekonomi makro yang stabil sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perkotaan; dalam praktiknya, lingkungan yang mendukung ini mengharuskan pemerintah untuk menghilangkan hambatan investasi dalam proyek perkotaan. Yang tidak kalah penting adalah investasi yang memadai dalam dimensi yang menjadi fondasi kota berkelanjutan: aset fisik, SDM, kelembagaan, struktur pemerintahan yang efektif, dan teknologi inovatif. Penggerak perubahan yang diidentifikasi di NUA sangat penting untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari urbanisasi yang berkelanjutan (Bab 3). Dalam hal ini, kebijakan perkotaan yang tepat, didukung oleh sistem pemerintahan yang efektif, kapasitas manusia, kelembagaan yang kuat, perencanaan kota dan wilayah jangka panjang, dan kerangka kerja pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan bertindak sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan dan inklusif. Mereka menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk kesempatan ekonomi baru, regulasi pasar tanah dan perumahan, dan penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai dan tepat waktu. Cara kota direncanakan dan diatur secara spasial memberikan indikasi tentang bagaimana sebuah nilai ekonomi urbanisasi dapat dimanfaatkan, karena proses perencanaan dapat memfasilitasi atau justru menghambat pembangunan. Misalnya, jika biaya perumahan dan transportasi tinggi karena hak milik yang ditetapkan dengan buruk dan peraturan penggunaan lahan yang membatasi pasokan perumahan, nilai ekonomi daerah perkotaan akan sangat terhambat.

Urbanisasi yang berkelanjutan dan kota-kota produktif berjalan beriringan. Dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi urbanisasi, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa kota yang produktif secara ekonomi juga berkelanjutan secara lingkungan, tangguh, inklusif secara sosial, dan aman. Melalui keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kuat, mereka juga harus mendorong transformasi perdesaan yang berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan Agenda 2030, terutama tujuan untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.[27]

Tindakan kebijakan khusus untuk meningkatkan kota secara produktif sebagian akan bergantung pada tingkat pembangunan kota.[28] Manajemen pertumbuhan perkotaan sangat penting untuk kota-kota yang berkembang pesat yang masih berada pada tahap pembangunan yang relatif awal, untuk memungkinkan mereka bisa memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari ekonomi aglomerasi dan manfaat produktivitas, dan untuk mengurangi inefisiensi di masa depan. Pengelolaan lahan yang tidak efektif, investasi yang tidak memadai dalam infrastruktur dan layanan dasar, skema perpajakan yang terdistorsi, dan bisnis dan lingkup peraturannya yang rumit sangat merugikan produktivitas perkotaan.

Penting untuk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi kota untuk memaksimalkan potensi produktivitasnya. Dengan demikian, mengatasi kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat aglomerasi lainnya, meningkatkan pilihan angkutan massal dan menyediakan layanan yang efisien dan dapat diandalkan adalah pendorong utama produktivitas perkotaan. Selain itu, kota-kota pada tingkat pembangunan menengah harus meningkatkan kapasitas teknologinya dengan fokus yang lebih tajam dalam memelihara kumpulan bakat (*talent pool*) dan mengembangkan kapasitas manusia secara luas.

Kota-kota di tingkat pembangunan menengah harus meningkatkan kapasitas teknologi mereka dengan fokus yang lebih tajam pada memelihara kumpulan bakat dan mengembangkan kapasitas manusia secara luas.

Untuk mempertahankan upah yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik, kota-kota yang lebih maju perlu memanfaatkan perolehan produktivitas yang didorong oleh inovasi yang dimungkinkan oleh maha data dan perkembangan teknologi lainnya seperti peningkatan otomatisasi, kecerdasan buatan, IoT, teknologi nano, dan *blockchain* (Bab 6). Untuk menarik dan mengembangkan bakat, pengalaman dari kota-kota seperti Bangalore, Boston, Dubai, London, Munich, New York, Shenzhen, Tokyo, dan Wina menunjukkan pentingnya mendukung litbang dalam pendidikan tinggi berkualitas dan lembaga penelitian dengan investasi publik dan perusahaan.[29]

Tetapi nilai urbanisasi yang berkelanjutan tidak dapat direalisasikan tanpa perbaikan mekanisme keuangan kota. Memanfaatkan nilai urbanisasi membutuhkan kemitraan pendanaan yang direvitalisasi, mobilisasi yang efektif dari berbagai sumber dan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta dan berbagai mitra pembangunan (Bab 8). Negara dan kota perlu memobilisasi pendapatan dari berbagai sumber domestik dan eksternal untuk berinvestasi dalam nilai urbanisasi. Masalah keuangan kota perlu ditangani dengan tegas dan segera agar kota dapat membiayai pengeluaran publik dan menyediakan berbagai barang dan jasa publik. Demikian pula, pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber endogen dan melalui pemanfaatan urbanisasi harus diintegrasikan ke dalam kerangka hukum dan kebijakan yang meningkatkan kondisi keuangan untuk pembangunan perkotaan dan memfasilitasi akses ke sumber tambahan. Mobilisasi dan penggunaan yang efektif dari sumber daya domestik sangat penting dalam meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan.[30]

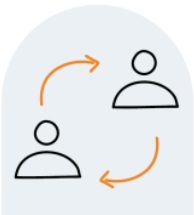

Memanfaatkan nilai urbanisasi membutuhkan kemitraan pendanaan yang direvitalisasi, mobilisasi yang efektif dari berbagai sumber dan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta dan berbagai mitra pembangunan

Akhirnya, rencana bisnis dan keuangan yang baik dapat menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung urbanisasi yang, pada gilirannya, dapat menjadi sumber penghasil nilai/manfaat lebih lanjut. Pemerintah daerah dapat memperoleh beberapa manfaat dari proses ini, yang diterjemahkan ke dalam nilai tanah dan properti yang lebih tinggi dan dapat ditangkap melalui berbagai mekanisme perpajakan. Siklus yang baik ini membutuhkan kerangka keuangan yang tepat dan struktur tata kelola yang efektif, yang mencakup kapasitas pemerintah kota untuk membiayai dan melaksanakan rencana infrastruktur; lembaga yang efektif dengan peran yang jelas dan kapasitas manusia dan keuangan yang memadai; mandat fiskal dan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak tanah dan properti; dan kerangka peraturan dan hukum yang jelas yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya.[31]

9.3 Meningkatkan Nilai Lingkungan Urbanisasi

Pembahasan berikut berfokus pada bagaimana NUA dapat meningkatkan nilai lingkungan dari urbanisasi, dengan manfaat tambahan ekonomi dan sosial yang penting. Beberapa bab dalam laporan ini memberikan contoh penting. Salah satu persyaratan utama untuk mempercepat keberlanjutan perkotaan dan meningkatkan lingkungan — tetapi, yang terpenting, juga nilai ekonomi — urbanisasi adalah agar semua pemangku kepentingan menganggap serius ekonomi hijau atau ekonomi sirkular dan mengambil langkah proaktif dalam mempromosikannya, "… sambil memfasilitasi konservasi ekosistem , regenerasi, restorasi dan ketahanan."[32]

Salah satu persyaratan utama untuk mempercepat keberlanjutan perkotaan dan meningkatkan lingkungan — namun, secara krusial, juga nilai ekonomi urbanisasi adalah agar semua pemangku kepentingan menganggap serius ekonomi hijau atau ekonomi sirkular dan membuat langkah proaktif dalam mempromosikannya

Mempromosikan ekonomi hijau tidak berarti mempertaruhkan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, seperti yang sering diklaim oleh para skeptis, karena tidak ada hubungan penting atau linier antara peningkatan urbanisasi dan pembangunan ekonomi secara konvensional.[33] Alih-alih, selama beberapa tahun terakhir, terdapat banyak bukti dari beragam konteks di semua wilayah bahwa intervensi ekonomi hijau yang ditargetkan dan dikalibrasi dengan tepat dapat menghasilkan sinergi dan manfaat tambahan yang penting, termasuk menghasilkan peningkatan lapangan kerja.[34] Memang, bukti ini memberikan dasar baik bagi pendekatan terpadu untuk keberlanjutan perkotaan yang diwakili oleh TPB dan NUA dan insentif untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat guna mempercepat pencapaian nilai lingkungan dari urbanisasi, sekaligus meningkatkan nilai sosial dan ekonomi urbanisasi.

Panel surya dan generator angin di depan pemandangan kota saat sunset. © Artjazz/Shutterstock

Ekonomi sirkular, atau pendekatan sistemik terhadap pembangunan ekonomi yang bersifat regeneratif dan bukan linier, menawarkan visi di mana nilai ekonomi dan lingkungan saling memperkuat. Pemangku kepentingan perkotaan harus menganggap metode ini lebih serius daripada model tradisional "buat-ambil-buang". Ada sumber daya yang terus meningkat yang tersedia bagi pembuat kebijakan dan pejabat untuk membantu transisi ke ekonomi sirkular, seperti inisiatif Ekonomi Sirkular dalam Kota dari Ellen MacArthur Foundation.[35]

Sebagaimana diuraikan dalam bab 4, kesepakatan tata kelola global seperti Persetujuan Paris yang merupakan hasil UNFCC 2015 – walaupun sifatnya tidak mengikat – dapat menjadi dorongan yang kuat untuk bekerjasama maupun berkompetisi bagi segelintir negara yang ingin mencapai target NDCs yang ambisius. Hal ini kemudian mengundang negara lain untuk menyamai atau bahkan membuat komitmen yang lebih jauh. OECD dan beberapa negara (seperti Inggris), negara bagian atau provinsi (seperti California di AS dan Helsinki) serta pemerintah daerah meningkatkan target pengurangan emisi maupun mempercepat waktu pencapaiannya. Hal ini termasuk dengan cara memajukan waktu pelarangan pembelian mobil disel sebagai bagian komitmen yang akan dibahas pada UNFCCC berikutnya. Pada akhirnya, kota-kota lah yang harus membuat tahapan-tahapan transformasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing dalam merespon perubahan iklim. [36]

Pemerintah pusat dan provinsi harus memainkan peran katalis dengan memberikan insentif yang efektif untuk mempromosikan industri, produk dan aktivitas hijau.

Pemerintah pusat dan provinsi harus memainkan peran katalis dengan memberikan insentif yang efektif untuk mempromosikan industri, produk, dan aktivitas hijau. Mereka juga harus meniadakan teknologi, produk, dan aktivitas lama yang padat karbon, mencemari, dan tidak dapat didaur ulang. Peningkatan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pemerintah untuk secara efektif mengelola, menyebarkan, dan mengatur penggunaan teknologi diperlukan untuk implementasi NUA yang efektif dan untuk meningkatkan keberlanjutan perkotaan (Bab 6). Selain itu, bukti dari seluruh dunia menunjukkan bahwa penghijauan perkotaan yang proaktif mengarah pada perolehan bersih dalam pekerjaan di berbagai kategori keterampilan, dengan demikian memperbaiki ketakutan tentang hilangnya pekerjaan karena menghapus produk dan layanan yang berpolusi dan tidak berkelanjutan.[37] Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok telah meningkatkan penekanan kebijakan pada efisiensi ekonomi hijau dan NBS untuk mengatasi perubahan iklim, seperti dalam Rencana Pembangunan 2016 untuk Aglomerasi Perkotaan Delta Sungai Yangtze yang sangat maju.[38]

Mandat ekonomi hijau berbasis luas seperti itu sering kali dikembangkan oleh jaringan kota seperti Kelompok Kepemimpinan Kota Iklim C40 (C40) dan 100 Kota Tangguh (100 Resilient Cities) (serta penerusnya, Jaringan Kota Tangguh Global (Global Resilient Cities Network) dan Katalis Kota Tangguh (Resilient Cities Catalyst)). Mereka dengan cepat menjadi sumber kebanggaan warga dan daya saing kota, sehingga mendorong orang lain untuk mengikutinya. Namun, meskipun NBS merupakan pendekatan terpadu yang utama untuk meningkatkan nilai lingkungan, menangani pemicu struktural kerentanan akan membutuhkan proses perubahan sosio-ekologis yang lebih transformatif, termasuk peningkatan perlindungan sosial, layanan kritis, dan infrastruktur (Bab 4).

Instrumen kebijakan yang beragam tersedia untuk mempercepat investasi ekonomi hijau, seperti peraturan, insentif atau sanksi fiskal, intervensi langsung dalam produksi, dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik. Kebutuhan instrumen ini akan bervariasi berdasarkan konteks, termasuk keseimbangan antara kepemilikan (misalnya publik atau swasta) dan kontrol operasional (misalnya melalui alih daya subkontrak atau KPBU) atas produksi langsung dan penyediaan layanan di bidang-bidang seperti transportasi dan utilitas.

Banyak intervensi lingkungan yang didorong oleh perilaku pribadi bekerja berdasarkan "teori dorongan", atau prinsip bahwa kebanyakan orang tidak berperilaku buruk dan akan "melakukan hal yang benar" jika didorong dan ditunjukkan bagaimana caranya. Mereka mengubah perilaku mereka secara sederhana tanpa perlu intervensi yang lebih formal. Intervensi yang mengubah perilaku tersebut bekerja paling baik jika dijelaskan dan dibenarkan secara luas kepada publik, dan di mana intervensi tersebut menanggapi tekanan publik untuk melindungi spesies yang terancam punah, melestarikan ruang hijau, mengatur polusi, atau menghilangkan limbah. Tren internasional yang mendadak sejak 2018 menjauhi plastik sekali pakai, terutama yang membahayakan satwa liar seperti sedotan plastik, menggambarkan fenomena ini. Dampak agregat yang dihasilkan dari perubahan progresif kecil yang tak terhitung banyaknya bisa sangat besar.

Pemerintah provinsi terutama pada kota-kota besar di negara maju, memiliki kewenangan yang cukup besar untuk memberlakukan peraturan dan pajak daerah yang menjadi pelopor dalam menerapkan langkah-langkah untuk mendukung dan meningkatkan nilai lingkungan dari urbanisasi yang berkelanjutan

Pemerintah provinsi terutama pada kota-kota besar di negara maju, memiliki kewenangan yang cukup besar untuk memberlakukan peraturan dan pajak daerah yang menjadi pelopor dalam menerapkan langkah-langkah untuk mendukung dan meningkatkan nilai lingkungan dari urbanisasi berkelanjutan yang sejalan dengan NUA. Memang, karena mereka menghadapi dampak tantangan lingkungan secara langsung, banyak pemerintah daerah telah mengadopsi langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang progresif dengan kecepatan yang lebih cepat daripada pemerintah pusat masing-masing. Banyak juga yang memberikan contoh melalui kebijakan dan praktik pengadaan mereka sendiri, portofolio pembangkit energi, dan aktivitas demonstrasi. Contoh

yang diterapkan oleh aktor sektor publik dan swasta termasuk perkuatan bangunan kota dan perumahan publik, memberi insentif pada dinding dan atap hijau, memasang sarana daur ulang air limbah, dan mendorong taman komunitas di lingkungan sekitar.

Pemerintah daerah dapat memaksimalkan dampak dengan kebijakan dan program yang koheren dari intervensi yang terintegrasi dan saling melengkapi daripada mengandalkan tindakan yang terisolasi. Pengelolaan limbah padat memberikan contoh kasus sesuai. Deposit kecil pada wadah minuman kaca, plastik, dan aluminium menciptakan insentif finansial untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Daur ulang "aliran tunggal" di pinggir jalan mendorong partisipasi yang lebih tinggi setelah rumah tangga tidak lagi harus memilah sampah yang dapat didaur ulang, sehingga mengurangi pemanfaatan tempat pembuangan akhir. Pusat pengomposan kota juga mengurangi jumlah sampah organik yang dikirim ke tempat pembuangan sampah, sekaligus menyediakan persediaan kompos untuk dijual dan digunakan di kota. Masing-masing skema ini juga menghasilkan lapangan kerja lokal. Perpaduan yang paling tepat antara pengumpulan dan operasi yang dikelola publik dan dikontrak swasta atau dialihdayakan akan bervariasi, tetapi kemitraan bisa efektif. Warga dapat didorong dengan target dan umpan balik rutin tentang seberapa baik kinerja mereka.

Salah satu perdebatan yang belum terselesaikan adalah seberapa jauh implementasi reformasi bertahap, seperti yang terkandung dalam TPB, dapat mencapai tingkat dan cakupan perubahan yang diperlukan untuk menjaga pemanasan global dalam batas aman. Memang, implementasi penuh dari Agenda 2030 dan NUA akan membutuhkan perubahan yang sangat substantif pada *status quo* — seperti yang diakui dalam sering merujuk pada kebutuhan untuk "transformasi" dan "komitmen transformatif" untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan dalam AFINUA. Ini sering disebut transformasi adaptif atau adaptasi transformatif.[39] Ini menyiratkan perubahan langkah dalam investasi, pengurangan kesenjangan dan reorientasi utama dari proses perencanaan kota, termasuk mengubah peraturan zonasi dan bangunan yang sudah ketinggalan zaman serta mendorong zona multiras daripada mono-fungsional untuk mengubah paradigma mobilitas untuk mengurangi jumlah dan jarak intra-perkotaan. perjalanan. Reorientasi besar seperti itu diantisipasi oleh paragraf 77-81 dari NUA. Memang, paragraf 81 secara eksplisit menyatakan bahwa "komitmen transformatif" ini akan membutuhkan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan saat ini. Diperlukan waktu dan upaya yang besar untuk membangun gelombang besar dan membuat perubahan hukum dan peraturan yang diperlukan, jadi ini harus dimulai sekarang untuk menghindari kemacetan yang membuat frustrasi menjelang akhir masa agenda global ini. Akan sangat membantu untuk mengembangkan jalur transformasi yang sesuai secara lokal, termasuk bagaimana menangani perubahan iklim di setiap kota dan wilayah.[40]

Inisiatif penghijauan perkotaan untuk keberlanjutan memiliki banyak manfaat tambahan yang dapat mendukung pencapaian berbagai tujuan dan target pembangunan secara bersamaan, sehingga meningkatkan nilai urbanisasi secara keseluruhan. Misalnya, ruang hijau yang aman yang dirancang dengan cara yang sensitif gender dapat membantu mengatasi diskriminasi dalam mendukung TPB 5 tentang kesetaraan gender dan TPB 16 tentang masyarakat yang damai dan inklusif, serta mendukung peningkatan kesehatan dan kohesi masyarakat (Bab 5). Selain itu, sebagaimana disinggung di atas, perlindungan dan peningkatan ruang hijau dan infrastruktur dapat mendukung pengurangan risiko bencana, tujuan adaptasi perubahan iklim, dan penyediaan lapangan kerja, yang kesemuanya merupakan kunci untuk menjaga dan meningkatkan nilai urbanisasi.

Perlindungan dan peningkatan ruang hijau dan infrastruktur dapat mendukung pengurangan risiko bencana, tujuan adaptasi perubahan iklim dan penyediaan lapangan kerja, yang semuanya merupakan kunci untuk menjaga dan meningkatkan nilai urbanisasi.

Perencanaan pembangunan terpadu yang efektif untuk wilayah perkotaan membutuhkan perhatian kritis pada keterkaitan antara kerentanan, paparan risiko, pembangunan, dan ketahanan. Ini adalah perhatian utama dalam TPB, NUA, dan SFDRR, sebagaimana

diuraikan dalam Bab 4. Proses akumulasi risiko didorong oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan mungkin sangat dibedakan di seluruh ruang perkotaan. Karenanya, dengan mengatasi siklus akumulasi risiko perkotaan dan mengurangi kerentanan, nilai urbanisasi yang berkelanjutan akan sangat meningkat. Orang-orang yang paling rentan di kota sebagian besar tinggal di ruang kota yang paling rentan.[41] Konsekuensinya, pendekatan yang berorientasi pada pembangunan untuk manajemen risiko bencana menjadi kunci dan perhatian kritis terhadap hubungan adaptasi perubahan iklim pengembangan risiko diperlukan. Tindakan pencegahan dan respons bencana merupakan penentu penting dari ketahanan perkotaan dan sejauh mana kota dapat pulih dari bencana, dengan manfaat tambahan yang cukup besar bagi kesehatan dan kesejahteraan warga.

9.4 Meningkatkan Nilai Sosial Urbanisasi

Meningkatkan keadilan, meningkatkan inklusi sosial, dan mengakhiri kemiskinan adalah hal penting untuk membuka nilai sosial urbanisasi. Sasaran kebijakan publik terhadap upaya itu termasuk memperbaiki permukiman kumuh dan informal, mengatasi ketidaksetaraan spasial, menciptakan lapangan kerja bagi pemuda, mempromosikan pemberdayaan perempuan dan mendukung pengungsi internal (*internally displaced persons* (IDPs)), migran, dan pengungsi (Bab 2 dan 5). Upaya-upaya ini harus mengadopsi lensa titik-temu yang mengenali kondisi dan identitas yang tumpang tindih yang mengarah pada kerentanan dan marginalisasi sosial. Meskipun sangat diakui dalam TPB dan NUA, masalah ini memerlukan keterlibatan yang lebih besar dalam rancangan kebijakan dan tindakan nasional dan lokal untuk keberlanjutan dan ketahanan perkotaan. Pemerintah daerah harus melihat *"Buku Pegangan untuk Perencanaan dan Desain Perkotaan yang Inklusif Gender"* (*"Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design"*) milik Bank Dunia untuk mengisi jurang antara bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip ke dalam praktik.[42]

Agenda Baru Perkotaan mengakui "hak atas kota" dan pentingnya warga secara aktif membentuk nilai urbanisasi di komunitas mereka dan sekitarnya. Sebagian besar prakarsa kota cerdas yang ada dirancang sebagai daerah kantong elit yang terkait dengan ekonomi dunia tetapi tidak berkelanjutan dalam hal sumber daya dan sedikit relevansinya dengan kaum miskin, yang seringkali merupakan populasi mayoritas di kota-kota (Bab 2 dan 5). Model-model yang terinspirasi oleh teknokratis dapat lebih jauh menanamkan kesenjangan sosial dan mengabaikan faktor-faktor struktural yang membentuk kesenjangan perkotaan dalam upaya mereka untuk mengakses teknologi masa depan (Bab 5). Lebih jauh lagi, inisiatif kota cerdas berbasis teknologi perlu berpusat dan berasal serta didorong dari masyarakat (Bab 6).

Agenda Baru Perkotaan mengakui "hak atas kota" dan pentingnya warga secara aktif membentuk nilai urbanisasi di komunitas mereka dan sekitarnya.

Dinamika dan norma gender sangat dibentuk oleh proses urbanisasi dan meskipun berbagai pengalaman sangat bervariasi di berbagai konteks, perempuan dan laki-laki mengalami tantangan dan peluang yang berbeda di kota, dengan perempuan sering menghadapi ancaman dan diskriminasi tambahan. Contohnya termasuk lebih seringnya kekerasan fisik dan pelecehan di ruang publik, pengucilan dari pengambilan keputusan, tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan contoh pekerjaan yang tidak dibayar atau eksploitatif.[43] Perawatan kesehatan wanita juga sering kali tidak diprioritaskan dibandingkan dengan unit keluarga dan pria.[44] Selain itu, pemuda dan orang non-biner gender masih sering terpinggirkan dalam kebijakan perkotaan, intervensi dan pengambilan keputusan (Bab 5).

Pengungsi dan kelompok pendatang juga sering diabaikan dalam perencanaan keberlanjutan kota, mungkin karena mereka dianggap sebagai penduduk sementara (*temporary and transitory resident*) (Bab 1 dan 5). Namun, di daerah perkotaan yang dekat dengan zona konflik dan pasca-konflik, mereka bisa menjadi proporsi populasi yang signifikan. Dengan demikian, mereka berkontribusi secara signifikan pada semua aspek kehidupan perkotaan dan mengintegrasikannya ke dalam kota tuan rumah adalah kunci untuk meningkatkan urbanisasi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, karena diskriminasi atau persepsi status sementara, mereka hampir selalu berada di antara penduduk yang paling rentan dan oleh karena itu pada prinsipnya lebih peduli dengan kelangsungan hidup

jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang.[45] Arus masuk pengungsi atau IDP yang besar dapat menambah populasi perkotaan secara substansial, sehingga menciptakan tekanan tambahan pada pemerintah daerah untuk penyediaan infrastruktur dan layanan utama (Bab 1 dan 5). Jika dipandu oleh kerangka kebijakan yang sesuai dan NUA, migrasi dapat menjadi mekanisme kunci untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan, baik di tempat asal maupun tujuan (Bab 1).

Keinginan politik untuk mengubah struktur tata kelola perkotaan diperlukan untuk mengatasi masalah lintas sektor di atas yang menopang nilai sosial urbanisasi (Bab 2 dan 5). Transformasi ini sudah terjadi di berbagai konteks. Di Afrika, Kenya, Namibia, Rwanda, Afrika Selatan, Eswatini, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe semuanya telah memperkenalkan ketentuan hukum untuk partisipasi masyarakat dan warga negara dengan fokus khusus pada kesetaraan gender.[46] Komitmen untuk mengatasi kesenjangan gender di tingkat benua didukung oleh *Piagam Afrika untuk Kesetaraan Gender Lokal* (*African Charter for Local Gender Equality*). Namun, hak penduduk yang mengidentifikasikan diri di luar definisi gender biner tidak diakui dan dilindungi di sebagian besar negara Afrika, dan memang terkadang masih dikriminalisasi.[47]

Wilayah Asia-Pasifik juga baru-baru ini menerapkan berbagai kebijakan dan layanan inovatif yang sensitif gender. Misalnya, menyusul serentetan serangan tingkat tinggi, delapan kota di India telah berkomitmen pada proyek Kota Aman Kementerian Dalam Negeri (Home Ministry's Safe City) untuk memerangi pelecehan seksual, dan akses dan keamanan transportasi telah ditingkatkan bagi perempuan di Bhopal.[48] Selanjutnya, pada 2015, Kerala memperkenalkan kebijakan untuk transgender; negara bagian pertama di India yang melakukannya.[49]

Pekerja kontrak dari luar negeri bekerja di salah satu lokasi konstruksi, Dubai, United Arab Emirates. © Rob Crandall/Shutterstock

Kota-kota juga mulai mengakui hak-hak para migran, yang dikenal dengan "kota perlindungan" di AS di mana penegakan hukum setempat tidak menyelidiki status migrasi individu ke jaringan Kota Solidaritas di Eropa yang berbagi ide antarkota di garis depan dari krisis pengungsi global. Namun, masih banyak hambatan bagi perlindungan dan integrasi migran, dari permusuhan populis dalam politik nasional hingga kurangnya sumber daya di tengah kebutuhan sosial lain yang mendesak. Untuk mencapai TPB melalui implementasi NUA yang efektif, ketegangan dan ketimpangan di atas perlu diperhitungkan ke dalam semua aspek kebijakan perkotaan, pengambilan keputusan dan intervensi untuk mendukung partisipasi yang bermakna dan inklusif dari semua kelompok yang terpinggirkan. Upaya semacam itu akan meningkatkan nilai sosial urbanisasi dengan memberdayakan mereka yang paling rentan dan mengurangi penggerak sosial, budaya dan politik yang mendasari risiko bagi kelompok marginal dalam proses urbanisasi sehingga tidak ada yang tertinggal dan semua dapat berkontribusi dengan kemampuan terbaik mereka.[50]

Meningkatnya jumlah pengungsi dan pendatang juga berkontribusi pada prevalensi permukiman informal dan kegiatan ekonomi informal di banyak daerah (Bab 1). Akses ke perumahan yang terjangkau merupakan tantangan utama bagi banyak kota, yang mengakibatkan semakin banyaknya pemukiman yang tidak direncanakan, terutama di seluruh Amerika Latin, Afrika, dan kawasan Asia Pasifik. Bentang alam perkotaan sangat dibentuk oleh sebagian besar wilayah yang kurang terlayani dan seringkali rentan. Dalam banyak kasus, perekonomian informal juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Tata kelola sektor informal, ruang dan aktor yang efektif dan adil dengan kerjasama antara aktor formal, tradisional dan informal serta asosiasi yang mewakili para aktor tersebut penting untuk mencapai TPB, terutama Tujuan 11, dan memajukan NUA untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan.

Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat memainkan peran kunci dalam mengakhiri kemiskinan

Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat memainkan peran kunci dalam mengakhiri kemiskinan. Kemakmuran ini dapat terjadi melalui akses ke infrastruktur dan layanan yang lebih baik yang difasilitasi oleh investasi publik skala besar, tata kelola berjenjang yang efektif, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Di Asia Timur, urbanisasi terencana membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan.[51] Namun, pengurangan kemiskinan yang terkait dengan urbanisasi tidak akan terjadi secara kebetulan (Bab 5). Sebaliknya, ini tergantung pada bagaimana pertumbuhan perkotaan dan tantangan yang berkembang dikelola, dan sejauh mana manfaat yang diperoleh dari urbanisasi didistribusikan secara adil. Melembagakan kebijakan tata kelola, perencanaan dan keuangan yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam NUA dan Agenda 2030 merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan nilai sosial urbanisasi, dan lebih jauh lagi, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.

Memungkinkan partisipasi warga untuk bersama-sama menciptakan kota sangat penting untuk mencapai nilai sosial urbanisasi. Dalam pengaturan seperti itu, masyarakat sipil dan pemerintah terlibat dalam aksi bersama, misalnya untuk bersama-sama memproduksi perumahan dan infrastruktur di permukiman informal. Metodologi ini telah diterapkan di Johannesburg untuk menciptakan RTH, memperbaiki drainase dan mengaspal kawasan pejalan kaki, dan di Kampala untuk membangun blok sanitasi masyarakat yang mengurangi wabah penyakit.[52] Inisiatif perencanaan dan pembangunan kota di mana hubungan antara negara dan warga negara telah direformasi dan diperkuat, mendukung implementasi NUA.

Penduduk permukiman informal perkotaan terus menghadapi tantangan kritis tanpa pengakuan resmi dan dukungan pemerintah. Perencanaan kolaboratif dan produksi bersama layanan untuk mengurangi perebakan kota, mendukung ekonomi informal, meningkatkan permukiman informal, dan menyediakan fungsi utama perkotaan lainnya sangat penting untuk meningkatkan nilai urbanisasi dan tata kelola ruang kota bersama. Salah

satu contoh yang lebih berhasil dari pendekatan inklusif untuk perbaikan permukiman kumuh adalah program Baan Mankong di Thailand yang dilaksanakan oleh Institut Pengembangan Organisasi Masyarakat Nasional (National Community Organizations Development Institute) dalam kemitraan dengan masyarakat sipil dan didukung oleh pemerintah daerah. Selama dekade terakhir, program ini telah mengamankan tanah dan perumahan bagi lebih dari 96.000 rumah tangga di 1.800 komunitas, meskipun ada kekhawatiran tentang keberlanjutan finansial.[53] Ada banyak potensi untuk belajar dari dan dibangun dari inisiatif tersebut dalam mengimplementasikan NUA dan meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan di berbagai konteks di seluruh dunia. Informalitas ada dalam berbagai bentuk, dan terkadang bahkan tumbuh subur di negara-negara OECD, meskipun dengan dinamika politik yang berbeda dibandingkan di negara-negara berkembang.[54]

AFINUA menekankan kolaborasi negara bagian-masyarakat sipil dan inisiatif yang dipimpin komunitas dalam penyampaian layanan. Aliansi dan jaringan seperti yang dijelaskan di atas membantu memperkuat suara dan meningkatkan kapasitas kelompok rentan dan marginal sekaligus menangani berbagai tujuan keberlanjutan perkotaan. Upaya tersebut secara kolektif meningkatkan nilai urbanisasi. Seperti yang dijelaskan di bab-bab sebelumnya, mencapai perkotaan berkeadilan untuk semua dan memanfaatkan nilai urbanisasi membutuhkan perencanaan dengan penduduk perkotaan yang memiliki pengetahuan rinci berbasis tempat untuk membangun keberlanjutan dan secara signifikan menambah kapasitas pemerintah di semua skala untuk meningkatkan nilai urbanisasi. Pertimbangan keadilan dan inklusi sosial seperti itu bersifat lintas sektor dan mendukung semua upaya untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan.

9.5 Tata Kelola, Kerangka Kelembagaan dan Legislasi Perkotaan

Pentingnya tata kelola berjenjang dalam memfasilitasi kemajuan menuju urbanisasi berkelanjutan telah dibahas pada Laporan ini (Bab 7). Agenda Baru Perkotaan menyerukan perubahan paradigma yang berkomitmen pada kemitraan banyak pihak dan kerja sama di antara semua tingkat pemerintahan. Perubahan ini untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua batas administratif yang relevan. Kerja sama lintas tingkatan, dan partisipasi inklusif dari warga kota merupakan aspek penting dari pembangunan dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Namun, tata kelola berjenjang yang efektif terbukti menantang untuk dilaksanakan dalam kondisi saat ini.

Ada beberapa alasan yang saling terkait. Wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya yang tersedia di tingkat dan kategori tertentu di pemerintahan sering kali tidak sesuai. Pemerintah kurang memprioritaskan tantangan yang kompleks, tersebar, dan berjangka panjang seperti perubahan iklim dan isu keberlanjutan. Pemerintah lebih mengutamakan isu kedaerahan dan penggunaan sumber daya secara langsung. Persaingan politik yang didorong oleh siklus pemilu mengarah pada cara berpikir jangka pendek, baik secara horizontal di antara para pemimpin pemerintah daerah yang berdekatan ataupun secara vertikal di antara para pemimpin dari berbagai tingkat otoritas.[55]

Kerangka kelembagaan dan peraturan perkotaan yang tepat diperlukan untuk mendukung tata kelola berjenjang yang efektif dan meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan

Kerangka kelembagaan dan peraturan perkotaan yang tepat diperlukan untuk mendukung tata kelola berjenjang yang efektif dan meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah adalah penting untuk pemerintahan berjenjang, mereka adalah agen kunci dalam memfasilitasi kemitraan dan perencanaan berbagai pemangku kepentingan lintas skalar dalam melaksanakan TPB dan NUA (Bab 7). Dalam konteks ini, UN-Habitat telah menekankan pentingnya KPN sebagai kerangka aksi nasional dan menghasilkan pedoman untuk mengatasi perubahan iklim.[56]

Banyak penekanan pada upaya "melokalkan" agenda global dan sentralitas kota dalam proses ini.[57] Dalam kaitannya dengan NUA, disagregasi spasial ini kadang-kadang juga disebut sebagai pendekatan wilayah.

Pendekatan ini dicontohkan dalam laporan OECD baru-baru ini tentang implementasi TPB. Sebagai pendahuluan dari daftar tindakan publik yang direkomendasikan, laporan tersebut merangkum penelitian yang menunjukkan seberapa banyak masih harus lakukan untuk mencapai target di kota dan wilayah OECD, dan karenanya seberapa banyak manfaat perkotaan yang masih harus direalisasikan.[58]

Kemunculan VLR, menandai inisiatif penting dari banyaknya pemerintah kota yang meningkatkan upaya mereka dalam melaksanakan TPB dan memenuhi tujuan Agenda 2030. Gerakan ini dimulai dengan deklarasi oleh Kota New York pada tahun 2018 yang akan melakukan gerakan seperti VNR secara lokal. Di mana negara bagian setiap tahun untuk memaparkan kemajuan TPB mereka. Inisiatif ini menginspirasi wali kota dan kota lain di seluruh dunia. Pada saat Forum Pemerintah Daerah Tingkat Tinggi Kedua (High Level Local and Regional Governemnet Forum) mengadopsi Deklarasi Kota New York tentang Tinjauan Lokal Sukarela pada September 2019, lebih dari 20 kota di 15 negara telah berkomitmen untuk melakukan tinjauan formal yang sama tentang bagaimana kegiatan, rencana, dan target lokal mereka selaras dengan TPB,[59] sementara lebih banyak lagi yang mendaftar selama WUF pada Februari 2020.

Kemunculan VLR, menandai inisiatif penting dari banyaknya pemerintah kota yang meningkatkan upaya mereka dalam melaksanakan TPB dan memenuhi tujuan Agenda 2030.

VLR harus menilai isu-isu keberlanjutan perkotaan lokal yang mungkin memerlukan data tambahan. Jika hasilnya kuat dan berwawasan ke depan, VLR dapat membantu meningkatkan tingkat capaian di VNR, ini adalah percontohan kolaborasi tata kelola berjenjang yang efektif. Sumber daya secara bertahap disediakan untuk membantu kota-kota yang ingin melakukan VLR, seperti yang dicontohkan oleh panduan untuk kota-kota di Inggris yang diterbitkan pada akhir 2019 oleh Bristol, kota pertama di Inggris yang melakukannya.[60] Institut untuk Strategi Lingkungan Global (Institute for Global Environmental Strategies) juga telah mengembangkan Laboratorium Tinjauan Lokal Sukarela Daring (Online Voluntary Local Review Lab) untuk membantu pemerintah daerah melakukan reviu.[61] Proses-proses ini merupakan kunci untuk lebih menanamkan sentralitas pemerintah daerah dalam melaksanakan TPB dan NUA, terutama karena mereka hanya diikutsertakan dalam persiapan VNR di 11 dari 28 negara yang melaporkan antara Tahun 2016 dan 2019.[62]

Mengadakan lokakarya atau forum multi-pemangku kepentingan dapat bertindak sebagai katalisator perubahan, menyatukan sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat dalam mensosialisasikan perubahan yang diperlukan, mengukur reaksi, dan mengeksplorasi jalur lintas disiplin serta mengarahkan kerjasama di masa depan. Pendekatan ini termasuk memahami manfaat dari intervensi terpadu dan terarah yang dapat memaksimalkan manfaat tambahan untuk membuka manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi dari urbanisasi yang berkelanjutan. Bentuk yang lebih dalam dari kreasi bersama multisektor dan produksi bersama menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan layanan publik yang sesuai serta dalam penelitian dan praktik untuk meningkatkan keberlanjutan (Bab 4, 5 dan 7).[63] Tata kelola berjenjang partisipatif yang efektif menumbuhkan kohesi sosial dan inklusivitas, dengan demikian memperkuat nilai urbanisasi yang tak berwujud.

9.6 Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Nilai Urbanisasi Berkelanjutan?

Bagian ini membahas bagaimana NUA dapat meningkatkan manfaat urbanisasi yang berkelanjutan ketika diterapkan melalui kerangka kerja yang efektif pada skala kelembagaan dan spasial yang berbeda. AFINUA adalah kunci arahan yang harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan. AFINUA memberikan wawasan tentang pendekatan UN-Habitat, merangkum 35 elemen dasar yang dibagi menjadi lima elemen utama urbanisasi yang saling terkait, yaitu: KPN; legislasi, peraturan, dan regulasi perkotaan; desain kota dan perencanaan wilayah terintegrasi; ekonomi perkotaan dan keuangan kota; dan implementasi lokal (Bab 1).[64] Berdasarkan nilai-nilai yang mendasari inklusi, inovasi, dan integrasi, kerangka kerja ini dipandu oleh tiga prinsip lintas sektor yaitu partisipasi, tata kelola, dan transparansi.

Untuk melengkapi AFINUA, terdapat dokumen *Perubahan Utama: Membawa NUA melalui Perencanaan Perkotaan dan Wilayah* (*Leading Change: Delivering the New Urban Agenda through Urban and Territorial Planning)*, sebuah tinjauan pedoman UN-Habitat tentang bagaimana perencanaan kota dan wilayah harus mendorong keberlanjutan kota melalui implementasi NUA.[65] Misalnya, analisa terbaru dari keberlanjutan dan iklim di kota-kota Meksiko menyimpulkan bahwa perencanaan wilayah kota, bersama dengan strategi restorasi ekologi yang efektif, harus diprioritaskan, dengan kebijakan pendukung yang jelas. Hal ini untuk menghindari perebakan dan memaksimalkan penggunaan RTH.[66] Panduan umum ini berlaku untuk sistem nasional kota di seluruh dunia. Namun demikian, seperti halnya semua tindakan, pendekatan teritorial dan model wilayah kota perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam kaitannya dengan konteks spesifik karakteristik, seperti batas administratif, kapasitas tata kelola, dan jaringan ekonomi perkotaan.[67] Tujuan utama dari penilaian tersebut harus mencakup panduan tentang bagaimana memanfaatkan dan menyesuaikan institusi dan struktur ini dengan tepat untuk mencapai nilai urbanisasi berkelanjutan secara paling efektif.

Pendekatan teritorial dan model wilayah kota perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam kaitannya dengan konteks spesifik karakteristik, seperti batas administratif, kapasitas tata kelola dan jaringan ekonomi perkotaan

Empat subbagian berikut memberikan cakupan inisiatif dan rekomendasi dalam hal implementasi dari agenda pembangunan berkelanjutan, terutama NUA dan TPB, serta elemen yang relevan dari SFDRR dapat meningkatkan nilai keseluruhan urbanisasi di daerah, tingkat nasional, provinsi, dan daerah.

9.6.1 Inisiatif yang Berfokus pada Kawasan

Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, antusiasme, dan penyerapan agenda keberlanjutan global dalam konteks kedaerahan, beberapa komitmen regional dan kerangka aksi telah dihasilkan selama dekade terakhir, seringkali dihasilkan dari kerja sama antara UN-Habitat, komisi regional PBB, dan mitra lainnya. Rencana aksi dan kerangka kerja tersebut dapat berfungsi sebagai panduan utama untuk pembuatan dan implementasi kerangka kerja nasional dan lokal, serta mendukung pengarusutamaan TPB dan NUA ke dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan nilai urbanisasi berkelanjutan dengan cara yang sesuai dengan wilayah.[68]

Contoh penting termasuk Rencana Aksi Regional untuk Implementasi NUA di Amerika Latin dan Karibia (2016-2036), yang disiapkan oleh beberapa badan regional dan internasional, termasuk UN-Habitat.[69] Selanjutnya, negara-negara Eropa menandatangani Pakta Amsterdam pada Mei 2016 untuk meluncurkan Agenda Perkotaan Uni Eropa, yang mempromosikan kerja sama berjenjang antara negara-negara anggota, kota-kota, komisi Eropa dan pemangku kepentingan lainnya.[70] Sebagai catatan penting, *Piagam Leipzig tentang Kota-Kota Eropa yang Berkelanjutan* tahun 2007 (*Leipzig Charter on Sustainable European Cities of 2007)* menekankan isu-isu inti serupa seperti pembangunan kota-wilayah dan kerjasama tata kelola.[71] Silsilah ini menegaskan kembali pentingnya membangun kemajuan yang dicapai melalui program dan kerangka kerja yang sudah ada, sambil mengatasi kesenjangan dan kekurangannya. Demikian pula, *Kerangka Kerja Regional yang Diselaraskan untuk Implementasi NUA di Afrika* (*Harmonized Regional Framework for the Implementation of the New Urban Agenda (NUA) in Africa*), selaras dengan tujuan Agenda Afrika tahun 2063, dan juga dengan komitmen regional dan global lainnya, termasuk SFDRR dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030.[72]

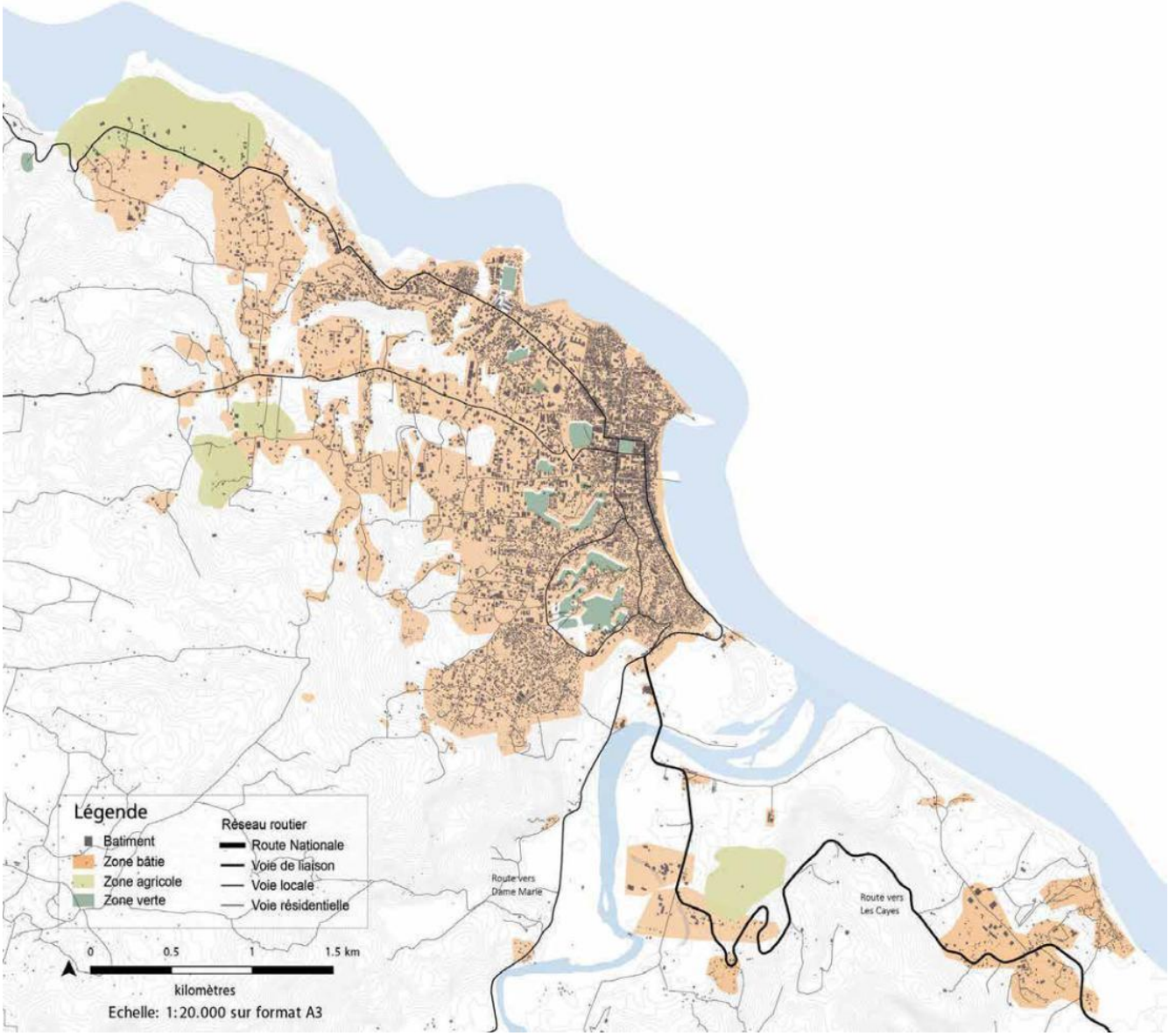

Kebijakan Perkotaan Nasional merupakan dasar dari pembangunan urbanisasi terencana. Struktur kota Jeremie, Haiti, adalah contoh pendekatan *bottom-up* ini.

Forum Mitra Regional ESCAP (ESCAP Regional Partners Forum) yang dimulai tahun 2017 merupakan tindak lanjut dan peninjauan regional langsung setelah mengadopsi NUA, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan Platform Penang untuk Urbanisasi Berkelanjutan (Penang Platform for Sustainable Urbanization) pada tahun 2019. Platform itu akan berfungsi sebagai mekanisme pelaporan regional dan dimasukkan ke dalam pelaporan global tentang NUA. Dokumen kerangka kerja lainnya termasuk *Strategi Arab untuk Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Berkelanjutan* (*Arab Strategy for Housing and Sustainable Urban Development*) dan Agenda Perkotaan Pasifik (Pacific Urban Agenda). Agenda Perkotaan Pasifik menggambarkan lintasan yang panjang dan sulit dari pemikiran kedaerahan seputar urbanisasi yang berdampak. Agenda Perkotaan Pasifik pertama dipersiapkan tahun 2003 dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pasifik pada tahun 2005. Pada tahun 2007, hasil dari Forum Perkotaan Pasifik kedua disempurnakan menjadi Kerangka Aksi Regional yang didukung oleh UN-Habitat. Namun, seperti upaya regional lama

lainnya untuk memajukan urbanisasi yang berkelanjutan, Agenda Perkotaan Pasifik belum menjadi prioritas. Agenda ini pun kekurangan dana, sumber daya dan dukungan politik.[73] Agenda Perkotaan Pasifik baru dikembangkan pada tahun 2015 sebagai masukan regional untuk Habitat III, dengan tujuan menghasilkan dukungan yang lebih besar dari berbagai lembaga lintas skala dan menekankan masalah-masalah utama yang terkait dengan NUA, termasuk keadilan sosial, ketahanan lingkungan, tata kelola perkotaan dan ekonomi perkotaan. Baru-baru ini, mitra di kawasan Asia-Pasifik membuat Penilaian Lingkungan Kota yang Mendukung (City Enabling Environment Rating) sebagai metode penting untuk mengukur keberadaan kebijakan, hukum, lembaga, sistem pemerintahan, otonomi fiskal dan tingkat keterlibatan publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendukung yang berkontribusi pada implementasi NUA.[74]

Terakhir, beberapa inisiatif regional tidak terlalu terikat pada geografi dan lebih pada sektor tertentu, seperti *Pakta dan Kerangka Kerja Pemantauan Kebijakan Pangan Perkotaan Milan* (*Milan Urban Food Policy Pact and Monitoring Framework*). Tujuan kerangka kerja pemantauan ini adalah "menjadi instrumen bagi pemangku kepentingan kota dan pangan perkotaan untuk mengidentifikasi kebijakan terkait pangan dan prioritas program dan untuk mendukung pelaksanaan Agenda tahun 2030."[75] Dua ratus sembilan kota di sebagian besar wilayah telah menandatangani Pakta Milan sejak perumusannya tahun 2015, dengan absennya kota-kota Asia di luar Tiongkok.[76] Memprioritaskan kebijakan dan program pangan yang sesuai secara lokal mendukung ekonomi perkotaan melalui penjualan hasil bumi, meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan akses ke buah-buahan dan sayuran segar, mendorong keanekaragaman budaya dan ekologi dengan mendukung tanaman asli, mengurangi biaya transportasi makanan dan emisi karbon dengan menanam makanan secara lokal. Secara kolektif, dampak pakta kebijakan pangan dan kerangka pemantauan ini meningkatkan manfaat urbanisasi.

9.6.2 Kebijakan Perkotaan Nasional dan Rencana Pembangunan Lainnya

Selama dekade terakhir, KPN kembali menonjol sebagai instrumen panduan penting untuk mempromosikan urbanisasi yang koheren dan konsisten dalam batasan negara. Kebijakan serupa sebelumnya bereputasi buruk dan sebagian besar ditinggalkan pada 1980-an karena terlalu teknokratis, preskriptif, dan tidak realistis. Kondisi ini mengucilkan kota-kota individual. Beberapa memiliki kapasitas untuk memasarkan diri mereka sendiri di panggung global, sementara yang lain merana. Perpindahan penduduk tak terkoordinasi dalam skala besar ke kota-kota sering memperparah permasalahan dan ketidaksetaraan, yang tidak dapat ditangani oleh badan resmi. Kasus untuk generasi baru KPN diterima secara luas; pemerintah nasional harus mengisi kekosongan dan menyediakan kerangka kerja yang lebih koheren dan memungkinkan, terutama mengingat urgensi penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim.[77] Pada 2018, 76 negara di seluruh dunia telah mengadopsi KPN eksplisit, sementara 74 memiliki kebijakan parsial. Implementasi telah dimulai di 92 negara tersebut, sedangkan 58 negara lainnya masih dalam tahap pengembangan.[78]

Selama dekade terakhir, KPN telah kembali menonjol sebagai instrumen panduan penting untuk mempromosikan urbanisasi yang koheren dan konsisten dalam batas-batas negara.

Fitur KPN menonjol di NUA: Pemerintah pusat berkomitmen pada perumusan dan pelaksanaannya dalam rangka mempromosikan tata kelola berjenjang yang kolaboratif dan efektif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional (paragraf 15, 21, 87, 89, 130 dan 149) yang meningkatkan nilai urbanisasi. Selain itu, KPN harus dirancang melalui proses kolaboratif termasuk pemerintah daerah dan provinsi, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta. Di negara-negara miskin, kendala sumber daya menghambat pengembangan dan implementasi KPN. Dalam kasus seperti itu, UN-Habitat dan lembaga lainnya dapat memberikan dukungan teknis dalam program bantuan teknis.

Kebijakan Perkotaan Nasional yang dirumuskan dengan baik dan ditargetkan akan menyediakan mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini melalui enam komponen utama, sebagaimana diuraikan dalam AFINUA, masing-masing menangani satu atau lebih indikator TPB 11 dan ditautkan ke beberapa paragraf NUA:

- Merumuskan proyeksi dan tren demografi perkotaan jangka menengah dan panjang, dengan disagregasi geografis, serta mempertimbangkan interaksi kekuatan ekonomi, sosial dan lingkungan;
- Menetapkan aturan nasional untuk menentukan kesesuaian lahan untuk urbanisasi dan untuk perlindungan lingkungan dan warisan budaya, pengurangan risiko bencana, pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan tetap mempertimbangkan pemerataan dan aksesibilitasnya;
- Mendefinisikan peran dan tanggung jawab yurisdiksi dari semua tingkat pemerintahan dan pemerintah daerah mengenai urbanisasi, perencanaan dan pengelolaan kota;
- Menyelaraskan KPN dengan rencana dan kebijakan pembangunan nasional dan sektoral di semua tingkat teritorial untuk memanfaatkan kekuatan transformatif urbanisasi dengan rencana perkotaan untuk energi, air, transportasi dan koridor infrastruktur lainnya;
- Mengadopsi kerangka kerja untuk mengurangi kesenjangan kota dan wilayah; dan
- Mempromosikan koordinasi dan koherensi yurisdiksi.[79]

Kemitraan multi-pemangku kepentingan di seluruh sektor yang diidentifikasi di atas sangat memfasilitasi implementasi KPN. Dua prasyarat tambahan untuk implementasi yang efektif adalah bahwa sumber daya untuk setiap tingkat pemerintahan harus sesuai dengan peran mereka masing-masing yang ditetapkan dalam KPN, dan bahwa pemerintah provinsi dan daerah harus dapat memenuhi peran dan tanggung jawab mereka masing-masing tanpa campur tangan politik.

Prinsip-prinsip penyelarasan kebijakan (Bab 2) dan penggunaan KPN untuk membingkai tata kelola berjenjang yang kolaboratif diilustrasikan dengan baik oleh laporan baru yang otoritatif dari Koalisi untuk Transisi Perkotaan (Coalition for Urban Transitions) tentang bagaimana pemerintah nasional dapat menyediakan perumahan yang terjangkau, dan pembangunan kota kompak secara bersamaan melalui intervensi bersama meskipun perumahan penyediaan bukan merupakan tanggung jawab nasional di kebanyakan negara.[80] Ini memiliki tiga rekomendasi kebijakan yang saling melengkapi dan mekanisme terkait.

1. Rancang insentif fiskal untuk mengembangkan kota yang kompak dan inklusif:
   - Mendesain ulang pajak properti untuk mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien melalui pengembangan perumahan yang lebih padat.
   - Menghambat pembangunan perumahan berkepadatan rendah di pinggiran dengan mengadopsi pajak pembangunan atau biaya dampak yang menginternalisasi biaya nyata yang dikeluarkan untuk pengembang properti.
2. Membuka potensi pasar penyewaan:
   - Menetapkan peraturan penyewa-tuan tanah yang jelas dan seimbang untuk meningkatkan transparansi, dan memastikan kedua belah pihak memiliki akses yang sama ke informasi dan jalur hukum.
   - Mengembangkan langkah-langkah untuk mendukung perumahan sewa sosial, dan memastikan perlindungan kepastian bermukim yang memadai tanpa menghambat mobilitas perumahan.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun kerangka kebijakan yang koheren:
   - Merancang KPN yang menyelaraskan berbagai kementerian dan tingkat pemerintahan di balik visi bersama untuk kota, serta merancang kerangka kerja kebijakan yang memungkinkan pemerintah provinsi untuk mempromosikan pembangunan yang lebih padat dan ragam fungsi.
   - Memperkenalkan mekanisme untuk kolaborasi antarkota yang lebih baik, untuk kebijakan perumahan sisi permintaan dan penawaran.

- Meningkatkan kapasitas lokal untuk membentuk portofolio pendapatan yang beragam, termasuk pajak bumi dan bangunan, dengan meninjau pengecualian pajak, dan memperkuat sistem nasional untuk mengidentifikasi bangunan kena pajak dan menilai nilai bangunan.

Beberapa negara di seluruh dunia telah mengembangkan atau merevisi KPN mereka untuk memfasilitasi perampingan implementasi NUA lintas skala dan mendukung tata kelola berjenjang yang efektif. Misalnya, Afrika Selatan memulai diskusi nasional tentang cara melokalkan NUA pada tahun 2018.[81] Hal ini selaras dengan Kerangka Kerja dan Rencana Aksi Pembangunan Perkotaan Terpadu pada tingkat nasional yang mencakup implementasi struktur lokal. Salah satu struktur penting tersebut adalah *Kerangka Kerja Pengembangan Tata Ruang Kota eThekwini 2019-2020* (*Municipal Spatial Development Framework*), yang bertujuan selaras dengan NUA, TPB, dan perjanjian internasional utama lainnya untuk mencapai kemajuan menuju urbanisasi berkelanjutan untuk eThekwini.[82] Hal terpenting adalah solusi yang dikembangkan secara lokal untuk menerapkan NUA dan meningkatkan manfaat urbanisasi difasilitasi melalui kebijakan nasional yang mengakui berbagai kebutuhan pemerintah daerah yang dibentuk oleh kedaerahan, ukuran, basis pajak dan karakteristik keberlanjutan yang ada.

Swedia merupakan yang terdepan di Eropa dalam hal di atas, dan telah memperkenalkan dokumen nasional penting yang ditujukan untuk pengembangan kebijakan: *Implementasi Lokal TPB dan NUA: Menuju KPN Swedia* ("*Local Implementation of the SDGs and New Urban Agenda: Towards a Swedish National Urban Policy*").[83] Laporan tersebut merefleksikan relevansi antara NUA dan TPB ke dalam konteks Swedia, di mana kota-kota besar memiliki otonomi besar. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi keberlanjutan pada skala lokal dan menyediakan platform bagi aktor lokal dan nasional untuk berbagi praktik dan pembelajaran yang baik melalui jaringan global, sehingga memperkuat nilai urbanisasi di seluruh perkotaan Swedia.

Studi OECD dan UN-Habitat yang komprehensif tentang KPN mengungkapkan beberapa perbedaan prioritas regional yang signifikan (Gambar 9.1).[84] Studi kasus di Rwanda, Ekuador dan Yordania mengungkapkan kesimpulan penting yang membantu negara lain yang ingin mengembangkan, memperluas atau memperbarui KPN untuk memaksimalkan nilai urbanisasi dan pembangunan perkotaan:

- Tingkat urbanisasi yang rendah, seperti di Rwanda, dapat bermanfaat bagi perencanaan strategis dan pengelolaan pembangunan kota
- Strategi pembangunan perkotaan Rwanda ditampilkan secara terpusat dalam strategi pembangunan nasional, yang menunjukkan sentralitas manajemen perkotaan yang efektif untuk pembangunan ekonominya
- Meskipun menempatkan prioritas tertinggi pada pembangunan ekonomi, KPN Rwanda mengintegrasikan dan mengoordinasikan semua sektor, termasuk bentuk perkotaan dan perlindungan lingkungan, dan memperkuat pemerintah provinsi dan daerah untuk memenuhi peran mereka masing-masing
- Pengakuan konstitusional atas hak atas kota dan prinsip-prinsip pembangunan manusia lainnya memberikan dasar hukum untuk dimasukkan ke dalam KPN Ekuador dan sangat membantu menangani kebutuhan masyarakat miskin perkotaan dan pemangku kepentingan lainnya yang terpinggirkan
- Keterlibatan aktif masyarakat di Ekuador memberikan legitimasi yang lebih besar untuk KPN
- Stabilitas politik dan keamanan berpengaruh secara substansial terhadap perkembangan KPN Yordania
- Desentralisasi tanggung jawab kepada pemerintah daerah di Yordania dapat membantu memaksimalkan kecocokan daerah, tetapi harus disertai dengan peningkatan kapasitas.

Gambar 9.1: Tinggi dan rendah prioritas tema di KPN per kawasan

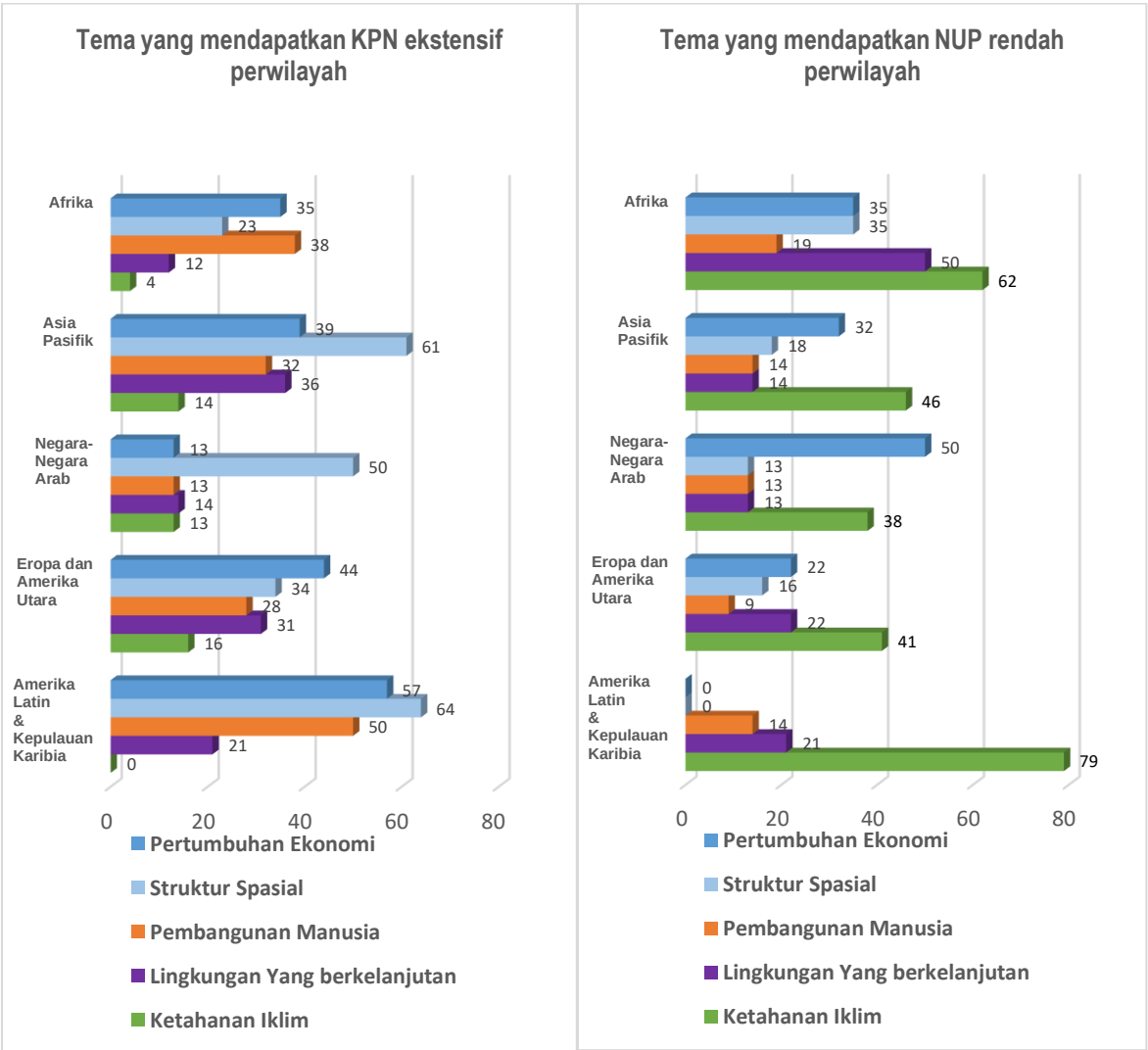

Sumber: OECD dan UN-Habitat, 2018, pp. 28-29.

Akhirnya, beberapa upaya pelengkap global telah dilaksanakan dan didanai dalam beberapa tahun terakhir untuk memantau kemajuan TPB 11 dan NUA secara regional. Misalnya, Prakarsa Indikator Pertanahaan Global (Global Land Indicators Initiative) berpusat pada pengembangan kerangka kerja umum untuk melacak kemajuan dalam masalah tanah dan mendorong penggunaan metode pengumpulan dan pencatatan data yang sebanding untuk pemantauan. Upaya ini penting karena TPB 11 dan NUA menyoroti sentralitas lahan dalam pembangunan perkotaan dan perlunya tata kelola lahan yang efektif, yang akan meningkatkan nilai urbanisasi.

9.6.3 Peran Pemerintah Provinsi

Meskipun tidak disorot melalui bagian terpisah di dalam AFINUA, lembaga daerah di provinsi menyediakan penghubung antara skala pusat dan daerah. Kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya yang tepat beragam di setiap negara, tetapi kebijakan dan instrumen daerah merupakan pemersatu tata kelola berjenjang yang efektif dan kolaboratif untuk pembangunan berkelanjutan dan urbanisasi. Sub-bagian ini memberikan beberapa contoh

dan rekomendasi terkait tindakan pemerintah provinsi yang sesuai.

Pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam setiap komponen KPN yang telah diidentifikasi. Mereka dan pemerintah daerah harus memimpin elemen desain kota teritorial dan proses perencanaan yang diidentifikasi di AFINUA. Demikian pula, mereka adalah salah satu pelaku utama dalam kaitannya dengan enam elemen ekonomi perkotaan dan keuangan kota dalam menetapkan prinsip-prinsip peningkatan peran pemerintah daerah, dan membantu pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kerangka keuangan yang sesuai, alat dan sistem pengembangan ekonomi lokal untuk memastikan akses yang adil ke utilitas dan layanan publik.[85]

Pemerintah provinsi dan daerah bertanggung jawab atas investasi publik yang signifikan dalam infrastruktur penting, kapasitas manusia, pengembangan kelembagaan dan layanan kota.

Pemerintah provinsi dan daerah bertanggung jawab atas investasi publik yang signifikan dalam infrastruktur penting, kapasitas manusia, pengembangan kelembagaan dan layanan kota; namun, sumber daya yang diturunkan dari tingkat nasional seringkali tidak memadai. Oleh karena itu, implementasi NUA yang efektif membutuhkan lingkungan yang mendukung, termasuk otonomi yang sesuai dan kebijakan nasional yang efektif, yang memfasilitasi pendanaan memadai sehingga memperkuat kapasitas daerah.

Sebagaimana dirinci dalam laporan OECD belakangan ini, pemerintah provinsi semakin memprioritaskan pelacakan dan pengukuran progres TPB kota dan daerah.[86] Studi tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen responden yang berbasis di Eropa yang saat ini mengimplementasikan pelacak progres TPB, sementara sekitar 58 persen menggunakan indikator untuk memantau kemajuan. Kolaborasi penting sedang dibentuk untuk mendukung sistem pemantauan dan akuntabilitas pada level provinsi.[87] Misalnya, negara bagian Paraná di Brasil, bermitra dengan perusahaan publik dan United Nations Development Programme (UNDP), telah menciptakan platform yang mengumpulkan 67 indikator lingkungan dan sosial di berbagai skala. Indikator tersebut kemudian digunakan di 114 kota di 14 negara bagian untuk memantau kemajuan TPB di berbagai skala.[88] Sistem pemantauan lintas skala tersebut memfasilitasi implementasi dan akuntabilitas untuk indikator sosial dan lingkungan, dengan demikian meningkatkan nilai urbanisasi.

Kantor statistik nasional di seluruh dunia berfokus pada pelokalan data yang mendukung pemantauan progres TPB perkotaan dan regional. Misalnya, Pemerintah Irlandia bekerja sama dengan Ordinance Survey Ireland, Kantor Pusat Statistik, dan Lembaga Penelitian Sistem Lingkungan, telah membuat platform TPB daring yang mencakup data dan peta pada skala regional, untuk beberapa indikator di bawah kerangka indikator PBB.[89] Demikian pula, Pemerintah Meksiko bermitra dengan Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía menyusun data tingkat negara bagian dalam platform nasional, Sistem Informasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SIODS dalam bahasa Spanyol), untuk melacak dan memantau evolusi negara bagian di Meksiko pada berbagai indikator TPB. Fokus teritorial yang sering diadopsi dalam sistem pemantauan ini membatasi perbandingan internasional langsung. Namun, praktik umum yang baik dan berbagi informasi antarkota dan wilayah masih bisa sangat efektif dan mendukung pencapaian dan peningkatan urbanisasi berkelanjutan.[90]

9.6.4 Inisiatif Perkotaan: Meningkatkan Nilai Urbanisasi melalui Implementasi Daerah

Kota sangat penting bagi perekonomian nasional dan secara unik ditempatkan sebagai penghubung utama antara aktor lokal dan global (Bab 2 dan 3). Dalam tata kelola berjenjang yang efektif untuk pembangunan perkotaan yang sesuai dan berkelanjutan, pemerintah daerah perkotaan harus memainkan peran penting (Bab 7). Di banyak negara, kebijakan dan peraturan nasional, daerah, negara bagian, atau provinsi memberikan ukuran untuk operasi pemerintah daerah. Tetapi di negara lain, masing-masing pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar. Secara umum, semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada sokongan dari pemerintah regional dan/atau nasional. Hal ini umum

terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di mana ketetapan persyaratannya semakin kuat. Ibu kota dan kota-kota besar lainnya dengan basis pendapatan daerah yang kuat dan beragam, seringkali memiliki otonomi yang lebih besar dan karenanya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang inovatif, bahkan mungkin bertindak lebih cepat dan melangkah lebih jauh dari kebijakan nasional.

Pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dalam sistem federal AS merupakan contoh baik tentang ruang lingkup tindakan praktis oleh pemerintah provinsi dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Menyusul pengumuman pada Juni 2017 bahwa AS akan menarik diri dari Persetujuan Paris mengenai perubahan iklim, berbagai negara bagian dan kota menyatakan akan tetap mematuhi ketentuan perjanjian, bahkan melakukan pengurangan emisi yang lebih substantif.

Pada akhir Oktober 2019, setidaknya 25 negara bagian dan teritori bergabung dengan US Climate Alliance (Aliansi Iklim AS) bersama lebih dari 400 pemimpin kota yang terdiri atas Wali kota Iklim. Sebagian besar kota dan negara bagian tersebut telah menandatangani janji "We Are Still In" untuk menegaskan dukungan mereka terhadap Persetujuan Paris, bersama dengan 2.200 bisnis, 350 universitas, dan 200 kelompok agama. Secara kolektif, para pelaku ini mewakili lebih dari separuh ekonomi negara, separuh populasinya, dan 37 persen emisi gas rumah kacanya. Pada tahun 2018, sebuah studi otoritatif menyimpulkan bahwa komitmen para pelaku di level provinsi tersebut dapat mencapai dua pertiga dari pengurangan emisi dalam target NDCs dari Persetujuan Paris.[91]

Koalisi provinsi, sektor swasta, dan masyarakat yang kuat ini menunjukkan bahwa mereka penting dalam mencapai inisiatif dekarbonisasi, meskipun bertentangan dengan janji NDCs oleh AS, yang ada akhirnya mengurangi biaya langsung dan tidak langsung dari urbanisasi sekarang dan mempromosikan nilai peningkatan keberlanjutan. Contoh: AS menunjukkan jika lingkungan kelembagaan dan administrasi pendukung diciptakan untuk pemerintah subnasional dan lokal, entitas ini dapat memainkan peran utama dalam memajukan nilai urbanisasi berkelanjutan, bahkan tanpa adanya kepemimpinan nasional. Terlepas dari potensi kemajuan oleh pelaku subnasional di AS, transisi energi perkotaan dan dekarbonisasi bukanlah kemenangan langsung atau mudah, hal ini membutuhkan negosiasi khusus kota dan navigasi dari keterkaitan yang kompleks antara karbon, modal dan infrastruktur, seperti diperlihatkan oleh penelitian terbaru di seluruh dunia.[92] Bagaimanapun, energi menggerakkan semua dimensi urbanisme dan urbanisasi, tidak terkecuali efisiensi ekonomi dan pembangunan.

Selain itu, memasukkan bidang tindakan lokal tambahan seperti mengurangi emisi dari limbah padat, memperbarui infrastruktur perkotaan yang sudah tua, mengalihkan moda perjalanan dari transportasi pribadi ke publik, dan mempercepat penghijauan perkotaan akan sangat meningkatkan skala potensi pengurangan emisi. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan investasi infrastruktur yang besar untuk mencapai TPB dan tujuan NUA, diperkirakan mencapai USD 38 triliun untuk tahun 2020-2030 (Bab 8).[93] Namun, sumber daya keuangan semakin tersedia dari sumber-sumber baru seperti dana publik-swasta dan mitra pembangunan dan lembaga keuangan yang sebelumnya tidak terlibat serta mekanisme pembiayaan inovatif seperti pembiayaan gabungan, pembiayaan campuran, obligasi hijau daerah dan instrumen keuangan berbasis lahan.[94] Memanfaatkan kapasitas ini untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan membutuhkan komitmen yang besar dan kesediaan dari aktor pemerintah dan non-pemerintah (Bab 8). Biaya kelambanan tinggi: tekanan lingkungan dan sosial ekonomi yang semakin parah, ditambah dengan meningkatnya biaya mitigasi, dan adaptasi untuk menangani lingkungan yang lebih terdegradasi, dan ekonomi serta masyarakat yang terpecah-pecah.[95]

Transportasi publik di Bugis, Kota Singapore. © By 2p2play/Shutterstock

Pada akhirnya, pemerintah daerah adalah agen perubahan utama untuk mencapai tujuan NUA. Namun, basis bukti untuk implementasi dan pemantauan masih agak terbatas dan tidak merata, dengan banyak contoh masih dalam tahap awal. Mistra Urban Futures melakukan studi komparatif longitudinal dari 2017-2019 tentang bagaimana tujuh pemerintah daerah di empat benua terlibat dan mencoba menerapkan TPB. Ditemukan bahwa hanya satu kota yang merujuk kepada NUA, dan itu pun hanya dalam istilah retorik.[96]

Terlepas dari munculnya VLR dan meningkatnya upaya oleh masing-masing pemerintah daerah, tanggapan ini secara umum mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran akan NUA dan persepsi pentingnya NUA terkait dengan TPB. Dalam beberapa kasus, pejabat juga mengutip kurangnya, atau niat untuk menunggu, panduan nasional untuk terlibat dengan NUA.[97] Keengganan ini menyoroti perlunya proses keterlibatan inklusif yang berkelanjutan dengan pemerintah kota dari semua ukuran dan antara kota dan pemerintah nasional di untuk mencapai tujuan luas NUA dan mengidentifikasi indikator yang sesuai untuk menilai kemajuan.

Jaringan kota memainkan peran utama dalam berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik yang baik dalam kaitannya dengan aksi iklim dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Meskipun penetrasi NUA relatif rendah empat tahun setelah diadopsinya, bertambahnya jumlah anggota jaringan kota memainkan peran utama dalam berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik yang baik dalam kaitannya dengan aksi iklim dan pembangunan kota yang berkelanjutan (Bab 7). Banyak negara telah lama memiliki asosiasi pemerintah daerah yang melobi pemerintah pusat. Ada juga organisasi penting

pemerintah daerah dengan keanggotaan internasional, terutama UCLG, ICLEI, dan Metropolis.[98] Forum Pemerintah Daerah Persemakmuran (Commonwealth Local Government Forum) patut mendapat pertimbangan khusus karena baru-baru ini mereorientasi dorongan strategisnya untuk memprioritaskan pelokalan solusi TPB dengan memperkuat demokrasi lokal dan menerapkan keberlanjutan perkotaan.[99]

Jaringan transnasional dari masing-masing kota adalah fenomena baru, membuktikan pengakuan bahwa para pemimpin dan pengelola kota di berbagai belahan dunia berbagi masalah yang sama dan menghargai nilai berbagi pengetahuan dan praktik yang baik. Jaringan ini mewakili forum untuk penyebaran inovasi dan peningkatan skala untuk mempercepat implementasi perkotaan dari agenda pembangunan berkelanjutan global yang kedaerahan. Jaringan terbesar adalah Kelompok Kepemimpinan Kota Iklim C40. Didirikan pada tahun 2005 dan memiliki 96 anggota di seluruh dunia, fokus utamanya adalah menangani perubahan iklim.[100] Jaringan 100 Kota Tangguh yang didanai oleh Rockefeller Foundation, didirikan pada tahun 2013, menciptakan posisi kepala petugas ketahanan pemerintah kota dan memimpin banyak kota untuk memproduksi yang pertama. strategi ketahanan. Itu dibubarkan pada pertengahan 2019 karena pergeseran prioritas di yayasan.[101]

Beberapa mekanisme pembagian dan penskalaan inovatif baru-baru ini dikembangkan dalam mendukung perampingan dan kolaborasi. Alat-alat ini berkisar dari platform dan portal daring hingga aliansi global-lokal antara beragam aktor untuk mendukung pencapaian TPB dan tujuan NUA. Misalnya, Platform Perkotaan dan Kota Amerika Latin dan Karibia sedang dikembangkan untuk mendukung implementasi dan pemantauan NUA di wilayah tersebut dengan memfasilitasi pembelajaran dari sesama dan pertukaran pola praktik terbaik dan pengembangan kapasitas.[102] Platform ini akan memiliki perkotaan observatorium dan platform virtual untuk mendukung pembelajaran ini.

Beberapa mekanisme pembagian dan penskalaan inovatif baru-baru ini dikembangkan dalam mendukung perampingan dan kolaborasi

Laporan Kegiatan Negara UN-Habitat tahun 2019 (*Country Activities Report 2019*) juga bersifat umum dan, mungkin tak terhindarkan pada tahap awal memobilisasi dukungan dan tindakan oleh Negara-negara Anggota, sebagian besar berfokus pada tingkat nasional.[103] Tingkat provinsi dan daerah menerima sedikit perhatian. Meskipun UN-Habitat memiliki portal berisi contoh yang mencakup kota-kota yang menerapkan NUA dalam berbagai konteks, hingga saat ini sebagian besar contoh ini berfokus pada program tertentu, seperti inisiatif Safer City (Kota yang Lebih Aman) di eThekwini (Afrika Selatan), dan tidak muncul dikarenakan implementasi melalui kerangka tindakan khusus.

UN-Habitat meluncurkan fitur yang disempurnakan dalam Platform Agenda Perkotaan (Urban Agenda Platform) ketika Sesi Kesepuluh WUF pada Februari 2020. Dirancang untuk sesuai dengan Panduan Pelaporan NUA dan proses pelaporan implementasi, dan juga kerangka target dan indikator TPB, platform akan memfasilitasi pemantauan, pelaporan dan berbagi informasi terkait kemajuan. Efeknya, seharusnya dapat memfasilitasi dan mempercepat implementasi NUA dan TPB dalam memaksimalkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan (Kotak 9.2). Evaluasi dan penyempurnaan akan dilakukan sampai tahun 2020, sehingga sistem tersebut dapat memainkan peran sentral dalam proses persiapan pengajuan nasional ke Laporan Kedua tentang Pelaksanaan NUA.

Kotak 9.2: Fitur utama dari Platform Agenda Perkotaan

1. **Pelaporan Sukarela:** Mekanisme pelaporan virtual terpusat berdasarkan Pedoman Pelaporan Agenda Baru Perkotaan yang dapat diakses oleh Negara Anggota akan memfasilitasi persiapan laporan negara. Laporan tersebut akan memberikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedapat mungkin, masukan dari pemangku kepentingan dan proses utama lainnya akan dimasukkan jika sesuai.
2. **Manajemen Pengetahuan:** Membangun di atas platform dan sumber pengetahuan baru yang sudah ada untuk memanfaatkan pengalaman kolektif dan pengetahuan mitra untuk menghindari duplikasi, memfasilitasi penciptaan pengetahuan dan berbagi dalam mendukung implementasi NUA dan TPB.
    - **Data:** Kaitan ke *Global Urban Indicators Database* (basis data Indikator Perkotaan Global); menyediakan mekanisme interaktif untuk memvisualisasikan data dari kemajuan dan mendemonstrasikan dampak implementasi NUA dan TPB.
    - **Basis Data Pola Praktik yang Terbaik**: Menyediakan dan mengelola lebih dari 5.500 praktik terbaik dengan fungsi pencarian lanjutan untuk mendorong saling berbagi dan saling menggunakan. Penyimpanan data dan dokumentasi yang seragam dan terdesentralisasi akan menangkap terobosan yang menginspirasi, berbagi kisah sukses, mendemonstrasikan hasil, mengukur dampak, dan mengidentifikasi praktik yang dapat ditingkatkan.
3. **Memperluas kerja platform pengetahuan** untuk memperkuat kolaborasi dan koherensi di area tematik seperti perumahan dengan Habitat for Humanity - Praktisi Perumahan Perkotaan yang terkoordinasi (Habitat for Humanity-coordinated Urban Housing Practitioners) dan untuk memperkuat platform tingkat regional yang sedang dikembangkan melalui komisi regional PBB (seperti Platform Penang (Penang Platform) dan Platform Perkotaan Amerika Latin dan Perkotaan Karibia (Latin America and Caribbean Urban and Cities Platform).
4. **Sinergi** dengan platform regional dan tematik dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan menciptakan warisan pengetahuan melalui rangkaian alat kolaborasi dan komunikasi digital yang kaya fitur.
5. **Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas:** Mendukung tindakan tingkat negara yang diinformasikan berdasarkan bukti untuk mendapatkan dampak melalui pengembangan kapasitas dan pengetahuan mutakhir yang dikurasi. Menyediakan satu set webinar pelengkap, pembelajaran virtual, lokakarya, dukungan teknis, memperluas sumber daya, dan publikasi.

Sumber: UN-Habitat, 2020g;UN-Habitat, 2020h.

Sebagai bagian dari Program Kota Masa Depan Global (Global Future Cities Programme*)* yang didanai oleh Inggris, UN-Habitat juga telah mengembangkan dan meluncurkan Alat Penilaian Proyek TPB (SDG Project Assessment Tool). Alat ini dirancang agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas, implementabilitas, kelangsungan jangka panjang dan keselarasan tiap-tiap proyek perkotaan dengan TPB dalam kerangka NUA. Pemerintah kota bekerja dengan mitra pengiriman dan UN-Habitat dalam mengoptimalkan hasil melalui lima fase, yaitu menetapkan prinsip-prinsip, meninjau proyek, membahas hasil, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan proyek dalam konteks yang lebih luas.[104] Hal ini penting dalam "menggabungkan" proyek individu untuk meningkatkan koherensi, dan karenanya memberikan daya ungkit pada penggandaan, sehingga keseluruhan menjadi lebih dari penjumlahan tiap bagiannya. Ini merupakan cara lain untuk memikirkan peningkatan nilai urbanisasi berkelanjutan.

9.7 Refleksi Penutup: Menerapkan Agenda Baru Perkotaan di Tengah Ketidakpastian dan Tantangan Global yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

Kita sekarang berada dalam Dekade Aksi untuk mewujudkan TPB pada tahun 2030. Jendela waktu sepuluh tahun tersebut telah memicu seruan untuk

bertindak dan menumbuhkan keterdesakan, dikarenakan biaya kelambanan sudah signifikan dan meningkat. Krisis iklim terus berlanjut. Ketimpangan pendapatan terus melanda kaum miskin dunia. Migrasi global dan konsekuensinya berlanjut pada tingkat rekor. Nasionalisme dan populisme mengancam tatanan internasional berbasis aturan, termasuk ekonomi global yang telah menciptakan konfigurasi perkotaan saat ini. Di tengah tantangan yang mendesak dalam empat tahun terakhir ini, pandemi virus korona telah memperburuk banyak masalah yang saling terkait ini. Mengabaikan kebutuhan akan solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia yang didominasi perkotaan tidak lagi masuk akal.

Mengabaikan kebutuhan akan solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia yang didominasi perkotaan tidak lagi masuk akal.

UN-Habitat telah memberi komunitas perkotaan global alat normatif dan platform global yang diperlukan untuk mengambil tindakan tegas, dan berkontribusi pada gerakan internasional untuk kota yang lebih baik. Seperti yang ditunjukkan dalam Laporan ini, pemerintah di semua tingkatan dan masyarakat secara global telah bertindak secara tegas dan berdampak dalam melaksanakan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan NUA. Namun demikian, kemajuan masih perlu dibuat sehubungan dengan mengatasi hambatan yang menghambat efektifitas implementasi NUA di semua konteks.

Menggambarkan bagaimana bab-bab sebelumnya telah menjelaskan nilai yang diciptakan oleh urbanisasi berkelanjutan, sambil merangkum upaya global untuk menggalang dukungan bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, bab ini telah menunjukkan bagaimana implementasi yang efektif dari TPB dan NUA dapat memperkuat integrasi nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial dan nilai tak berwujud daerah perkotaan. Sebagai bantuan untuk pembuatan kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan, Tabel 9.1 mensintesis pesan-pesan utama dan persyaratan dari masing-masing bab untuk meningkatkan nilai urbanisasi berkelanjutan dengan menangani elemen-elemen inti keberlanjutan yang terintegrasi. Aspek-aspek yang relevan dari implementasi NUA yang efektif untuk memfasilitasi pencapaian nilai urbanisasi berkelanjutan, yang disajikan bersama pesan-pesan utama ini. Beberapa dari pesan ini bersifat lintas batas dan berlaku untuk semua elemen urbanisasi berkelanjutan.

Lingkungan yang mendukung di semua skala merupakan prasyarat utama untuk memastikan koherensi kebijakan, dan menerapkan NUA secara efektif. Terlepas dari kemajuan yang disorot dalam Laporan ini, elemen-elemen kunci dari lingkungan yang mendukung, termasuk keuangan yang memadai di semua tingkat, pengembangan kapasitas dan ketersediaan data, tetap merupakan jurang antara utama yang harus diatasi. Seperti pada Tabel 9.1, menekankan beberapa masalah lintas sektor yang penting untuk mencapai NUA. Ini termasuk konsep-konsep seperti kebutuhan untuk mengarusutamakan dan memperluas kesetaraan gender, keragaman budaya, perlindungan hukum di bawah rubrik "hak atas kota," hak-hak kelompok yang terpinggirkan secara luas, tata kelola berjenjang yang didukung oleh perencanaan dan proses pengambilan keputusan yang adil dan kolaboratif, penerapan teknologi tepat guna dalam perencanaan dan pengelolaan kota, peran penting pemerintah daerah terkait dengan jaringan internasional, dan kebutuhan pembiayaan berkelanjutan serta pengumpulan data dan proses aplikasi yang inovatif.

Terlepas dari kemajuan yang disorot dalam Laporan ini, elemen-elemen kunci dari lingkungan yang mendukung, termasuk keuangan yang memadai di semua tingkat, pengembangan kapasitas dan ketersediaan data, tetap merupakan jurang antara utama yang harus diatasi

Urgensi dan tantangan besar untuk membuat kemajuan pesat menuju keberlanjutan perkotaan telah dijelaskan oleh kecepatan luar biasa, yang mana COVID-19 menjadi pandemi yang mematikan akibat ekonomi global kita yang sangat terintegrasi dan gaya hidup berpindah. Sementara dunia berebut untuk memahami virologi dan epidemiologi penyakit, menyebarkan tes antigen dan antibodi, dan akhirnya mengembangkan vaksin yang efektif, upaya untuk mengendalikan

penyebarannya membutuhkan pembatasan yang semakin ketat pada mobilitas dan perubahan perilaku. Pandemi ini menyebar di sepanjang koridor transportasi utama, awalnya di Tiongkok dan kemudian di seluruh dunia. Wilayah perkotaan menjadi episentrum transmisi komunitas, diikuti oleh difusi ke wilayah pinggiran kota dan perdesaan. Tantangan dalam memberlakukan dan mempertahankan karantina wilayah juga paling besar di daerah perkotaan, mulai dari menjaga persediaan makanan, operasional utilitas umum dan peralatan pelindung pribadi yang memadai untuk kesehatan dan pekerja kunci lainnya, hingga menjaga ketaatan pada jarak sosial dan tinggal di rumah kecuali untuk tujuan penting.

Kepemimpinan perkotaan yang proaktif dan berkaliber tinggi dalam menerapkan serangkaian tindakan penanggulangan komprehensif sangat penting, seperti yang ditunjukkan oleh Seoul, *hotspot* infeksi awal.[105] Pandemi telah memengaruhi warga di seluruh spektrum sosial ekonomi, tetapi tidak ada tantangan yang lebih ekstrem daripada di tempat kemiskinan, ketimpangan, eksklusi dan ketidakamanan mempengaruhi banyak sektor pada populasi perkotaan, yaitu permukiman informal dan kumuh, serta pengungsi, karena tingkat kepadatan yang tinggi, ketidakmungkinan jarak fisik yang memadai, kekurangan gizi dan kerentanan terhadap bahaya lingkungan kronis dan penyakit.[106]

Agenda pembangunan berkelanjutan global memberikan kerangka kerja dan peluang unik untuk berinvestasi untuk masa depan, serta membangun ketahanan terhadap pandemi karena dunia harus beradaptasi dan mengatasi COVID-19, dan penyakit sangat menular lainnya dalam jangka panjang. COVID-19 bukanlah pandemi pertama dan bukan yang terakhir yang akan dihadapi. Kota-kota telah memimpin pemulihan dan desain ulang setelah pandemi sebelumnya, dan mereka akan diwajibkan untuk melakukannya setelah COVID-19. Mengingat sifat global pandemi yang sedang berlangsung, pemulihan akan membutuhkan jenis kepemimpinan baru dari pemerintah kota yang proaktif, dengan mengembangkan kebijakan dan program untuk membangun ketahanan yang memadai terhadap ancaman kesehatan masyarakat di masa depan. Di seluruh dunia, COVID-19 dengan jelas menunjukkan bahwa semua negara berkepentingan untuk memiliki sistem kesehatan yang kuat untuk mengatasi pandemi. Kota dapat membantu menggalang sumber daya dari berbagai sumber untuk berinvestasi dalam infrastruktur kesehatan sebagai bagian dari program pembangunan ketahanan kota dan memastikan bahwa kesehatan masyarakat merupakan aspek integral dari pembangunan, manajemen dan tata kelola perkotaan, terutama di negara berkembang.

Agenda pembangunan berkelanjutan global memberikan kerangka kerja dan peluang unik untuk berinvestasi untuk masa depan, serta membangun ketahanan terhadap pandemi karena dunia harus beradaptasi dan mengatasi COVID-19

COVID-19 kemungkinan besar akan berdampak jangka panjang pada desain lingkungan binaan. Pandemi telah menyoroti bahwa sejumlah besar ruang publik yang didedikasikan untuk kendaraan pribadi perlu dipertimbangkan kembali dan diprioritaskan untuk sistem transportasi umum yang aman dan penggunaan lain seperti trotoar pejalan kaki, tempat duduk di luar ruangan untuk restoran dan area pameran untuk bisnis. Meskipun beberapa dari perubahan ini pada awalnya mungkin menantang, perubahan ini memberi kota kesempatan untuk merencanakan dan mengelola lingkungan perkotaan mereka berdasarkan prinsip NUA. Misalnya, COVID-19 memberikan pelajaran berharga tentang memiliki ruang publik yang luas untuk memungkinkan jarak fisik. Ke depan, pelajaran penting dari COVID-19 adalah bahwa sistem transportasi yang aman dan ramah lingkungan harus menjadi inti dari rencana pemulihan kota.

COVID-19 kemungkinan besar akan berdampak jangka panjang pada desain lingkungan binaan

Sebuah sekolah yang terdampak Badai Idai di Mozambique. © UN/Eskinder Debebe

Saat kota dibuka kembali, pihak berwenang harus memikirkan cara kreatif untuk mengurangi kemacetan di jalan dan polusi. COVID-19 memberikan peluang unik untuk membangun kembali secara lebih baik, dengan berfokus pada bisnis dan pola konsumsi yang lebih hijau dan berkelanjutan, ekonomi digital, dan ruang perkotaan berkualitas dirancang secara memadai untuk mengatasi pandemi di masa depan dan krisis terkait iklim yang membayangi. Secara global, kota sudah memikirkan kembali dan menata ulang keseluruhan visi dan desain lingkungan perkotaan mereka. Amsterdam telah menggunakan model "ekonomi donat" untuk memastikan bahwa kota pasca-COVID-19 berkelanjutan, inklusif, dan melingkar. Demikian pula, di Bristol, Inggris, wali kota telah mengusulkan rencana kota terpadu dengan TPB sebagai dasar untuk Perencanaan kota.[107] Di Melbourne, Australia, para perencana kota sedang mencari cara untuk memperluas penghijauan di ruang publik untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi pandemi di masa depan.[108]

COVID-19 memberikan peluang unik untuk membangun kembali secara lebih baik, dengan berfokus pada bisnis dan pola konsumsi yang lebih hijau dan berkelanjutan, ekonomi digital, dan ruang perkotaan berkualitas dirancang secara memadai untuk mengatasi pandemi di masa depan dan krisis terkait iklim yang membayangi

Dampak buruk COVID-19 tidak setara (Bab 1). Di negara maju, jutaan pekerja dengan pekerjaan dengan upah rendah menjadi pengangguran dan dipaksa membuat keputusan sulit dan penuh risiko untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Di negara berkembang, jutaan pekerja informal jatuh miskin tanpa perlindungan sosial. Di seluruh dunia, sulit untuk mengukur secara akurat dampak ekonomi, sosial dan kesehatan pada populasi yang paling rentan karena banyak yang tidak terpotret, pekerjaan informal dan tidak memiliki jaring pengaman atau perlindungan

sosial. Ke depan, ketimpangan sosial ini perlu diperbaiki.

Kota-kota dapat memainkan peran utama dalam mengembangkan kapasitas dan kerangka kelembagaan, untuk memahami realitas kehidupan dari penduduk paling rentan dan mengatasi dampak COVID-19 yang tidak proporsional, dan pandemi di masa depan di tingkat daerah. Peran ini dapat berupa pengembangan sistem perlindungan sosial baru bagi kelompok rentan dan marginal. Sistem baru semacam itu dapat berupa pendapatan dasar warga negara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan esensial di suatu wilayah tertentu. Ide ini memunculkan dukungan yang diujicobakan di berbagai skala, dengan kota-kota menciptakan model yang dapat ditingkatkan ke tingkat nasional.[109] Seiring dengan langkah-langkah jaring pengaman, kota-kota harus segera menangani kebutuhan infrastruktur ekonomi, lingkungan dan sosial dari permukiman kumuh dan informal untuk menghindari kondisi sulit yang akan dihadapi pada pandemi di masa depan.

COVID-19 mengingatkan dunia perlunya koordinasi yang efektif dari tata kelola berjenjang dan koherensi kebijakan di semua tingkat pemerintahan, seperti yang diserukan dalam NUA

COVID-19 mengingatkan dunia perlunya koordinasi yang efektif dari tata kelola berjenjang dan koherensi kebijakan di semua tingkat pemerintahan, seperti yang diserukan dalam NUA. Mengatasi pandemi saat ini dan masa depan memiliki dimensi teritorial yang kuat. Karena kedekatannya dengan penduduk, pemerintah kota adalah tempat terbaik untuk menangani masalah terkait pandemi dengan cara yang sesuai secara kontekstual. Kota memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menciptakan jalan menjawab tantangan. Pelajaran dari COVID-19 dapat digunakan dalam menata kembali keberlanjutan perkotaan dan keamanan manusia, sebagai dasar untuk membuat perubahan sistematis pada pengeluaran publik dan investasi. Memang, bagaimana kota menanggapi tantangan ini akan menentukan masa depan perkotaan, dan manfaat yang dirasakan dari peningkatan urbanisasi di tahun-tahun mendatang. Manusia selalu menanggapi pandemi dengan membangun kembali kota mereka. Agenda Baru Perkotaan adalah peta jalan untuk pemulihan pasca-pandemi dunia. Dengan jalur yang sesuai secara lokal, kami dapat membangun kembali secara lebih baik dengan menerapkan NUA di semua konteks.

Tabel 9.1 Meningkatkan Nilai Urbanisasi: Pesan utama dan mekanisme implementasi

Elemen Inti Terintegrasi dari Urbanisasi Berkelanjutan	Persyaratan dan Pesan Utama	Sarana Implementasi NUA
Mengurai Nilai Urbanisasi Berkelanjutan (Bab. 2)	• Kemakmuran dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kinerja ekonomi daerah perkotaan. • Pembangunan yang harmonis dan seimbang, secara aktif melestarikan karakteristik alam, melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat aset lingkungan. • Distribusi sumber daya yang adil secara spasial yang menyediakan badan politik individu dan kelompok, dan keragaman sosial, ekonomi dan budaya. • Rasa kebanggaan individu dan kolektif masyarakat terhadap budaya sebuah kota, yang memberikan superstruktur agar nilai urbanisasi dapat terwujud sepenuhnya. • Kebijakan yang koheren, perencanaan yang tepat, manajemen yang efektif dan tata kelola perkotaan yang baik. • Berpusat pada masyarakat, inklusif dan berakar pada keadilan. • Fokus prioritas untuk menangani kebutuhan unik dari populasi yang kurang terwakili.	• Kawasan perkotaan harus direncanakan dan dikelola untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan. • Urbanisasi berkelanjutan membutuhkan upaya terkoordinasi di semua skala. • Koherensi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan.

Elemen Inti Terintegrasi dari Urbanisasi Berkelanjutan	Persyaratan dan Pesan Utama	Sarana Implementasi NUA
Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan (Bab. 3)	• Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi serta akselerator pertumbuhan ekonomi • Pembiayaan kota yang efektif merupakan bagian integral dari perencanaan dan pembangunan yang adil. • Kemakmuran inklusif dan kesempatan yang sama untuk semua. • Hak kemakmuran yang didefinisikan dengan jelas dan peraturan penggunaan lahan. • Akses yang adil ke infrastruktur dan sistem transportasi yang berfungsi dengan baik. • Keberlanjutan dan produktivitas saling terkait erat. • Perencanaan kota dan wilayah sangat penting untuk mewujudkan kemakmuran kota yang inklusif. • Sistem tata kelola berjenjang yang efektif menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi	• Mendukung penciptaan kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk pinjaman nasional dan kota yang berkelanjutan berdasarkan pengelolaan hutang sesuai kemampuan, serta pasar hutang kota yang berkelanjutan jika sesuai. • Pertimbangkan untuk membangun dana pelayanan infrastruktur transportasi perkotaan dan wilayah di tingkat nasional.
Nilai Lingkungan dari Urbanisasi yang Berkelanjutan (Bab. 4)	• Perencanaan kota yang adil, kolaboratif, dan spesifik konteks • Pengakuan atas ruang kota bersama dan integrasi kebutuhan ekologi dan sosial untuk umpan balik dalam proses jangka panjang perencanaan pembangunan kota • Optimisme perkotaan dibarengi dengan pragmatisme di mana aktor perkotaan menunjukkan efektivitas dari tindakan yang ada. • Menangani sekuritisasi dan fragmentasi untuk memberikan manfaat bagi semua • Mobilisasi data lingkungan dan memberikan tindakan strategis yang efektif dalam batasan data saat ini. • Mengatasi pendorong struktural degradasi lingkungan dan bagaimana mereka membentuk kehidupan masyarakat.	• Mengembangkan model distribusi sumber daya keuangan vertikal dan horizontal untuk mengurangi ketimpangan di seluruh wilayah provinsi di dalam pusat kota, dan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta untuk mendorong pembangunan wilayah yang terintegrasi dan seimbang. • Menerapkan kebijakan pembangunan wilayah yang terintegrasi dan seimbang. • Menerapkan sistem transportasi umum multimoda yang berkelanjutan termasuk pilihan kendaraan tidak bermotor
Nilai Sosial dan Tak Berwujud dari Urbanisasi Berkelanjutan (Bab. 5)	• Skala ekonomi perkotaan dapat mendorong inklusi dan integrasi sosial. • “Hak atas kota” adalah instrumen kebijakan utama untuk mendukung persamaan hak, peluang, dan kebebasan fundamental. • Tata kelola pemerintahan yang baik, peraturan dan lembaga yang sesuai membantu mendukung urbanisasi yang terencana dan terkelola dengan baik melalui proses yang demokratis dan partisipatif. • Atasi kesenjangan di dalam dan antara pusat kota untuk mendorong inklusivitas. • Kebijakan sosial yang adil dan dilaksanakan dengan tepat mendorong integrasi sosial. • Tata kelola berjenjang partisipatif yang efektif mendorong kohesi sosial dan inklusivitas. • Pendekatan pembangunan perumahan yang berbasis hak untuk mendukung akses ke perumahan yang layak dan terjangkau. • Memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan berarti tidak menelantarkan siapa pun dengan fokus utama pada gender dan keragaman budaya.	• Mendukung pengembangan produk pembiayaan perumahan yang sesuai dan terjangkau dan mendorong partisipasi berbagai jenis lembaga keuangan eksternal untuk berinvestasi di semua bentuk perumahan yang terjangkau dan pembangunan perumahan inkremental • Mendukung pemerintah provinsi dan daerah dalam upaya mereka untuk menerapkan instrumen kontrol pengeluaran yang transparan dan akuntabel untuk menilai kebutuhan dan dampak investasi dan proyek lokal, berdasarkan kontrol legislatif dan partisipasi publik • Menerapkan pendekatan partisipatif, tanggap usia dan gender untuk kebijakan dan perencanaan perkotaan. • Mewujudkan partisipasi penuh perempuan di semua bidang dan semua tingkat pengambilan keputusan
Inovasi, Teknologi dan Nilai Inovasi (Bab 6)	• Peran multidimensi inovasi dan teknologi di perkotaan dalam membentuk (kembali) hubungan sosial, pasar tenaga kerja dan pemerintahan. • Inovasi dan teknologi membantu meningkatkan sistem inovasi produktif. • Pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola, menyebarkan, dan mengatur penggunaan teknologi secara efektif. • Inisiatif kota cerdas berbasis teknologi harus berpusat pada manusia dan didorong oleh manusia. • Ketimpangan dan pengecualian digital perlu ditangani.	• Bisnis harus menerapkan kreativitas dan inovasinya untuk memecahkan tantangan pembangunan berkelanjutan perkotaan. • Menerapkan alat digital, termasuk sistem informasi geospasial untuk meningkatkan perencanaan kota dan wilayah, administrasi pertanahan dan akses ke layanan perkotaan. • Menerapkan alat digital, termasuk sistem informasi geospasial, untuk meningkatkan perencanaan kota dan

Elemen Inti Terintegrasi dari Urbanisasi Berkelanjutan	Persyaratan dan Pesan Utama	Sarana Implementasi NUA
		wilayah, administrasi pertanahan dan akses ke layanan perkotaan
Pemerintah Daerah dan Nilai Urbanisasi yang Berkelanjutan (Bab 7)	• Pemerintah daerah dan regional memainkan peran kunci dalam melokalkan dan mengimplementasikan agenda pembangunan global. • Lingkungan kelembagaan yang mendukung sangat penting untuk tata kelola perkotaan. • Pemimpin kota yang berkomitmen adalah kunci untuk memajukan urbanisasi yang berkelanjutan. • Desentralisasi fiskal dan aliran pembiayaan yang memadai dibutuhkan untuk mendukung investasi perkotaan. • Kerangka kerja tata kelola berjenjang yang kuat diperlukan untuk mendorong kerja sama vertikal dan horizontal. • Kuncinya adalah pemantauan dan evaluasi yang diperkuat dan sesuai secara lokal. • Mengarusutamakan pelokalan dan menyederhanakan tujuan berbagai strategi global dari tingkat nasional hingga lokal. • Kebijakan desentralisasi yang efektif adalah kunci untuk mengembangkan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan untuk meningkatkan nilai urbanisasi yang berkelanjutan. • Secara proaktif mengatasi terputusnya dana yang tersedia dan kurangnya pembiayaan untuk urbanisasi yang berkelanjutan. • Perencanaan terintegrasi sangat penting untuk menciptakan kota yang inklusif dan memperkuat hubungan antara daerah perkotaan dan perdesaan. • Membangun budaya partisipasi baru dengan mengakui hak setiap warga negara, terutama hak atas kota.	• Dengan dukungan yang tepat, pemerintah provinsi dan lokal harus mendaftarkan dan memperluas basis pendapatan potensial mereka dengan cara yang adil dan merata secara sosial, misalnya melalui kadaster serba guna, pajak daerah, retribusi dan tarif pelayanan. *(fees and service charge)* • Mempromosikan sistem yang sehat dan transparan untuk melakukan transfer keuangan dengan insentif berbasis kinerja dari pemerintah pusat ke provinsi dan daerah berdasarkan kebutuhan, prioritas dan fungsi yang terakhir. • Bangun kapasitas pemerintah daerah untuk memantau secara efektif pelaksanaan kebijakan pembangunan perkotaan. • Membangun kapasitas pemerintah daerah untuk bekerja dengan kelompok rentan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kota dan wilayah.
Berinvestasi dalam Nilai Urbanisasi yang Berkelanjutan (Bab 8)	• Pendanaan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan dibutuhkan untuk mencapai NUA, TPB dan tujuan pembangunan lain yang relevan dengan urbanisasi berkelanjutan. • Terdapat kekurangan dana yang dibutuhkan untuk mencapai TPB, NUA dan tujuan pembangunan lain yang relevan dengan urbanisasi berkelanjutan. • Tindakan yang dipercepat untuk menutup jurang antara keuangan dan investasi dalam nilai urbanisasi sangat dibutuhkan. • Daerah perkotaan memiliki kebutuhan investasi yang berbeda dan kemampuan yang berbeda untuk memobilisasi sumber daya keuangan. • Pemerintah daerah menghadapi tantangan yang saling terkait berupa transfer yang tidak memadai dan tidak dapat diprediksi dari pemerintah pusat, pengumpulan pajak yang buruk, dan manajemen fiskal yang lemah. • Biaya sosial, ekonomi dan lingkungan yang tinggi dari infrastruktur yang tidak memadai. • Investasi dalam berbagai aspek pembangunan manusia / modal sangat penting untuk urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang berkembang pesat. • Diperlukan banyak aktor dan usaha kolaboratif untuk pendanaan infrastruktur perkotaan yang memadai. • Penataan kembali kerangka keuangan dengan tujuan dan prioritas masyarakat daerah (lokal) adalah kuncinya.	• Semua tingkat pemerintahan harus menerapkan pendekatan yang sensitif konteks untuk mendanai urbanisasi dan meningkatkan kapasitas manajemen keuangan melalui penerapan instrumen dan mekanisme khusus untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan. • Memobilisasi sumber daya dan pendapatan endogen yang dihasilkan melalui pemanfaatan manfaat urbanisasi, bersama dengan efek katalisator dan dampak yang dimaksimalkan baik dari investasi publik maupun swasta. • Mempromosikan pola praktik yang terbaik untuk menangkap dan berbagi peningkatan nilai tanah dan properti yang dihasilkan melalui proses pembangunan perkotaan, proyek infrastruktur, dan investasi publik. • pembiayaan berkelanjutan membutuhkan ekosistem pelaku yang berfokus pada dampak termasuk sektor swasta, sektor publik, mitra pembangunan, masyarakat sipil, penduduk dan masyarakat. • Pastikan koherensi kebijakan: antar-yurisdiksi antarkota, antarpemerintah lintas tingkat pemerintahan dan secara global dengan investasi yang didukung secara internasional.

Catatan Akhir

1. Simon et al, 2018.
2. UN-Habitat, 2013, p11.
3. Barnett and Parnell, 2016; Rudd et al, 2018; Simon et al, 2018; UN-Habitat, 2018d.
4. UN-Habitat, 2020g, p2.
5. https://cpi.unhabitat.org/platform measure-urban-sdgs; https://cpi.unhabitat.org/sites/default/files/resources/CPI%20METADATA.2016.pdf.
6. UN-Habitat, 2020g, p3.
7. Coalition for Urban Transitions, 2019.
8. WCED, 1987.
9. IPCC, 2014; NUA para 79.
10. UNFCCC, 2019.
11. UN-Habitat, 2016h.
12. UN-Habitat, 2017a.
13. UN-Habitat, 2018d.
14. UN-Habitat, 2019h.
15. Farole et al, 2017.
16. Bank Dunia, 2015c.
17. Bank Dunia, 2013c.
18. Bank Dunia, 2013c.
19. UNCTAD, 2010.
20. UNCTAD, 2010.
21. OECD. 2006.
22. ILO, 2020g.
23. Farole et al, 2017.
24. OECD, 2006.
25. Iacurci, 2020
26. UN-Habitat dan EcoPlan, 2005.
27. UN-Habitat, 2016a.
28. UN-Habitat, 2013.
29. UN-Habitat, 2013.
30. PBB, 2017a, paragraph 132.
31. UN-Habitat, 2016j.
32. NUA para 71.
33. Turok, 2014.
34. Simon et al, 2011; UN-Habitat, 2013; Simon, 2016b; Simon, 2016a; Swilling et al, 2016.
35. Ellen MacArthur Foundation, 2019.
36. Rosenzweig et al, 2018a.
37. UN-Habitat 2012, 2018; Simon 2016a, 2016b
38. Wang et al, 2019
39. Pelling et al, 2018; Few et al, 2017.
40. Rosenzweig et al, 2018a.
41. Adelekan et al, 2015; Dodman et al, 2018; Fraser et al, 2018; Romero-Lankao et al, 2018.
42. Kiddle et al, 2017; Bank Dunia dan Kounkuey Design Initiative, 2020.
43. Chant, 2013; Dodman et al, 2017.
44. Chant, 2013.
45. IIED, 2019.
46. UCLG, 2019a.
47. UCLG, 2019a.
48. UCLG, 2019a.
49. UCLG, 2019a.
50. Dodman et al, 2017.
51. UN-Habitat, 2016i.
52. Coletto, 2010; Adegun, 2015; Dobson et al, 2015; Dodman et al, 2017.
53. Bhatkal dan Lucci, 2015.
54. Angélil dan Hehl, 2012; McFarlane,2012; Mukhija dan Loukaitou-Sideris, 2014; Iveson et al, 2019.
55. Leck dan Simon, 2013; Simon dan Leck, 2014; Castán Broto, 2017b; Leck dan Simon, 2018, Bulkeley, 2019.
56. UN-Habitat, 2016a.
57. Pelokalan dapat didefinisikan sebagai “proses menetapkan, menerapkan, dan memantau strategi di tingkat lokal untuk mencapai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan di tingkat global, nasional, dan provinsi.” (UN Development Group, 2014: 6).
58. OECD, 2020.
59. City of New York, 2019; Croese, 2019.
60. Macleod dan Fox, 2019.
61. Institute of Global Environmental Strategies, 2020.
62. UCLG, 2019a.
63. Durose dan Richardson, 2016; Nature, 2018; Simon et al, 2020; Hemström et al, 2020.
64. UN-Habitat, 2017.
65. UN-Habitat, 2018d.
66. Estrada et al, 2020.
67. Watson, 2019; OECD 2020.
68. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2018a.
69. ECLAC, 2018.
70. European Commission, 2017.
71. European Commission, 2007.
72. UNECA, 2018.
73. Kiddle et al, 2017.
74. Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2018a.
75. Milan Urban Food Policy Pact, 2015a.
76. Milan Urban Food Policy Pact, 2015b.
77. Parnell dan Simon, 2014; Pieterse, 2014; UN-Habitat dan Cities Alliance, 2014.
78. OECD dan UN-Habitat, 2018.
79. UN-Habitat, 2017, section 1; see also UN-Habitat, 2015d.
80. Moreno-Monroy et al, 2020.
81. South African Cities Network, 2018b.
82. eThekwini Municipality, 2019.
83. Fabre, 2017.
84. OECD dan UN-Habitat, 2018.
85. UN-Habitat, 2017.
86. OECD, 2020.
87. OECD, 2020.
88. UCLG, 2019a.
89. irelandsdg.geohive.ie.
90. OECD, 2020.
91. Rosen, 2019.
92. Luque-Ayala et al, 2018; Stripple dan Bulkeley, 2019, Bulkeley, 2019.
93. UN-Habitat 2020c.
94. UN-Habitat 2020c.
95. UN-Habitat 2020c.
96. Valencia et al, 2019.
97. Valencia et al, 2019.
98. Rosenzweig et al, 2018a.
99. https://www.clqf.org.uk/.
100. C40 dan Ramboll, 2018.
101. Rosen, 2019.
102. UCLG, 2019a.
103. UN-Habitat, 2019h.
104. UN-Habitat, 2019i; UN-Habitat 2019j.
105. UN-Habitat, 2020i; Cities Today, 2020.
106. Visagie dan Turok, 2020; Simon, 2020.
107. World Economic Forum, 2020d.
108. World Economic Forum, 2020d.
109. Hughes, 2018.
110. Washbourne, 2020.

Glosarium

Agenda Aksi Addis Ababa	Addis Ababa Action Agenda adalah Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan yang menjadi dasar untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)
Agenda Baru Perkotaan	New Urban Agenda adalah kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan hasil dari Konferensi Habitat III di Quito
COVID-19	Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis baru virus korona. Penyakit ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020.
Dekade Aksi	Decade of Actions adalah dekade atau sepuluh tahun yang difokuskan untuk percepatan solusi berkelanjutan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.
exurban	Wilayah di luar kawasan suburban dari kawasan metropolitan yang memiliki kepadatan rendah dan umumnya dihuni masyarakat menengah ke atas
Gig economy	Tren perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja lepas atau freelance dan pekerja kontrak daripada pekerja penuh waktu
Habitat III	Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan ketiga yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 2016
Hackathons	Kegiatan pengerjaan proyek tantangan pemrograman yang merupakan kolaborasi berbagai pihak pengembang perangkat lunak, yang berlangsung untuk beberapa jam hingga beberapa hari.
IoT /Internet of Things	Suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia.
Kota Mega	Kota-kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa
Karantina Wilayah	Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. (UU 6/2018)
Kebijakan Perkotaan Nasional	Instrumen kebijakan utama yang bisa digunakan oleh pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan manfaat pembangunan berkelanjutan baik utamanya di daerah perkotaan.
Kecerdasan Buatan (AI)	*Artificial Intelligent* atau kecerdasan buatan merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir.
Kerangka Kerja Aksi Implementasi NUA (AFINUA)	Kerangka Kerja Aksi Implementasi NUA menetapkan 35 bahan penting untuk implementasi Agenda Perkotaan Baru. Untuk masing-masing elemen penting ini,

	diuraikan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan bagaimana itu harus dipantau (UN-Habitat 2018b).
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana	Sendai Framework on Disaster Risk Reduction adalah Kerangka kerja untuk pengurangan risiko bencana yang menguraikan tujuh target dan empat prioritas tindakan yang jelas untuk mencegah bencana yang baru dan mengurangi risiko bencana yang ada.
Koefisien Dasar Bangunan	Angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK (Keterangan Rencana Kota). (PP 16/2021)
Koefisien Lantai Bangunan	Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK (Keterangan Rencana Kota). (PP 16/2021)
Kontinum Perkotaan-Perdesaan (*urban-rural continuum*).	Bersatunya perkotaan dan perdesaan tanpa penanda yang jelas yang menggambarkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan
Kota yang Menyusut (*shrinking cities*)	Kota besar/metropolitan yang mengalami penurunan jumlah penduduk secara signifikan dalam waktu cepat
Mega-region	Gabungan beberapa metropolitan
Membangun Kembali secara Lebih Baik (Build Back Better)	Build Back Better adalah strategi untuk mengurangi risiko bencana melalui integrasi pengurangan risiko bencana dengan restorasi infrastruktur serta revitalisasi sosial, ekonomi, dan lingkungan
Nilai Ekonomi Urbanisasi Berkelanjutan	Hasil dari fenomena urbanisasi berkelanjutan di perkotaan yang berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian namun juga memiliki risiko-risiko
Nilai Sosial Urbanisasi Berkelanjutan	Perkotaan dapat mengangkat para keluarga keluar dari kemiskinan, membebaskan perempuan dari diskriminasi berbasis gender, mengarahkan masa depan cerah untuk anak-anak dan remaja, menawarkan kenyamanan dan dukungan untuk para lanjut usia di tahun-tahun emas mereka dan menyambut para pendatang yang mencari kehidupan yang lebih baik
Nilai Lingkungan Urbanisasi Berkelanjutan	Hasil dari fenomena urbanisasi berkelanjutan yang dapat mengurangi tantangan lingkungan perkotaan serta memberikan peluang yang berkontribusi pada nilai lingkungan
Nilai Tak Berwujud Urbanisasi Berkelanjutan	Nilai tak berwujud urbanisasi berkelanjutan antara lain kelembagaan (supremasi hukum, hak milik dan sistem partisipasi demokratis) yang memungkinkan kota berfungsi secara efektif, elemen budaya kota, dimulai dari keberagaman latar belakang penduduknya hingga aset warisan budaya yang dimilikinya.
Perebakan Kota (*urban sprawl*)	Perluasan kota yang kurang direncanakan, berkepadatan rendah, pembangunan yang auto-dependent yang menyebabkan sulit untuk menjangkau fasilitas kota dengan nyaman tanpa mobil, yang menyebar dengan luasan yang besar, jarak yang jauh antar perumahan, pertokoan, perkantoran dan menciptakan segregasi tinggi antara

	perumahan dan perdagangan dengan dampak negatif terhadap masyarakat serta lingkungan.
Persetujuan Paris (Paris Agreement)	Perjanjian internasional terkait perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca untuk membatasi peningkatan suhu global.
Resources Rent	Surplus laba yang didapatkan pemerintah tuan rumah (penghasil sumber daya) dari selisih antara nilai produksi dan biaya yang dikeluarkan seperti biaya eksplorasi, biaya pengembangan dan biaya operasi.
Ruang Kota Bersama (*urban commons*)	Bagian dari fisik kota yang sudah sewajarnya dapat diakses bersama dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas perkotaan untuk menghasilkan dan mendukung keberlanjutan penduduk perkotaan, terutama kelompok rentan. Contohnya seperti: ruang publik, lahan perkotaan, infrastruktur, dll.
Ruang udara Bersama (*Atmospheric Commons*)	Atmosfer yang sudah sewajarnya dapat diakses dan dapat dimanfaatkan bersama
Sempadan Pertumbuhan Perkotaan (*Urban Growth Boundaries*)	Upaya untuk mengontrol perebakan kota dengan menentukan batas kewilayahan dan mengatur guna lahannya
Solusi Berbasis Alam (*Nature-Based Solution*)	Aksi untuk melindungi, mengelola, dan merestorasi alam atau ekosistem buatan secara berkelanjutan, yang mengatasi tantangan sosial lingkungan secara efektif dan adaptif, yang menyediakan manfaat untuk manusia dan biodiversitas secara bersamaan.
Sekuritisasi	"sekuritiasasi" dalam konteks hubungan internasional artinya isu keamanan yang dasarya bukan merupakan hal urgent dan ancaman, melainkan karena hasil wacana atau promosi dari aktor (elit politik)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developmnet Goals)	Rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs/TPB berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
Triple Dividend	Yang dipahami terdiri atas (1) Menghindari kerugian yang dialami ketika terjadi bencana; (2) Mendorong aktivitas ekonomi karena risiko bencana yang berkurang; dan (3) Terwujudnya penggunaan dan manfaat bersama dari investasi pengelolaan risiko bencana yang spesifik.
UN-Habitat	Program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja menuju masa depan perkotaan yang lebih baik. Misinya adalah untuk mempromosikan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan dan pencapaian tempat tinggal yang layak untuk semua.
Urbanisasi Berkelanjutan	Fenomena urbanisasi atau pertumbuhan perkotaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan
Wildland-Urban Interface	Zona transisi alam liar dan kawasan terbangun manusia

Lampiran Statistik

Penafian umum: Sebutan yang digunakan dan penyajian data dalam Lampiran Statistik tidak menyiratkan opini apapun dari Sekretariat Perserikan Bangsa-Bangsa tentang status hukum negara, kota, atau wilayah mana pun yang menjadi kewenangannya, atau terkait dengan batas-batas atau perbatasannya.

Tabel A.1: Jumlah Populasi Perkotaan dan Laju Pertumbuhan

	Populasi perkotaan pertengahan tahun per Negara, 2015-2030 (ribu)				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)			Persentase penduduk pertengahan tahun yang tinggal di negara dan kawasan perkotaan, 2015-2030				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan persentase perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)		
Wilayah, subwilayah, negara, atau daerah	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030
WORLD	3,981,498	4,378,994	4,774,646	5,167,258	1.90	1.73	1.58	53.9	56.2	58.3	60.4	0.82	0.75	0.71
More developed regions	979,089	1,003,640	1,027,097	1,049,699	0.50	0.46	0.44	78.1	79.1	80.2	81.4	0.24	0.27	0.30
Less developed regions	3,002,409	3,375,354	3,747,549	4,117,558	2.34	2.09	1.88	49.0	51.7	54.3	56.7	1.09	0.97	0.88
Least developed countries	305,951	372,038	449,498	538,529	3.91	3.78	3.61	32.0	34.6	37.4	40.4	1.60	1.56	1.50
Less developed regions, excluding least developed countries	2,696,458	3,003,315	3,298,051	3,579,029	2.16	1.87	1.64	52.1	55.1	57.8	60.4	1.10	0.97	0.87
Less developed regions, excluding China	2,201,145	2,473,276	2,763,104	3,071,076	2.33	2.22	2.11	46.8	48.8	50.9	53.1	0.82	0.83	0.85
High-income countries	955,213	988,586	1,019,399	1,048,879	0.69	0.61	0.57	80.9	81.9	82.8	83.9	0.22	0.24	0.26
Middle-income countries	2,825,252	3,144,887	3,456,425	3,756,587	2.14	1.89	1.67	50.8	53.7	56.5	59.0	1.11	0.99	0.90
Upper-middle-income countries	1,659,611	1,821,036	1,957,223	2,068,825	1.86	1.44	1.11	64.1	68.2	71.7	74.8	1.23	1.01	0.82
Lower-middle-income countries	1,165,641	1,323,851	1,499,202	1,687,762	2.55	2.49	2.37	39.2	41.6	44.2	47.0	1.16	1.20	1.22
Low-income countries	198,536	242,877	296,030	358,848	4.03	3.96	3.85	30.9	33.2	35.7	38.3	1.40	1.44	1.45
Sub-Saharan Africa	375,827	458,670	555,123	666,165	3.98	3.82	3.65	38.8	41.4	44.2	47.0	1.33	1.28	1.22
AFRICA	**491,531**	**587,738**	**698,149**	**824,014**	**3.58**	**3.44**	**3.32**	**41.2**	**43.5**	**45.9**	**48.4**	**1.09**	**1.08**	**1.06**
Eastern Africa	106,096	132,520	164,482	202,579	4.45	4.32	4.17	26.6	29.0	31.6	34.5	1.74	1.75	1.74
Burundi	1,232	1,637	2,147	2,780	5.68	5.43	5.17	12.1	13.7	15.5	17.6	2.53	2.51	2.48
Comoros	221	255	296	345	2.87	2.97	3.06	28.5	29.4	30.7	32.5	0.63	0.89	1.14
Djibouti	718	781	844	906	1.67	1.56	1.42	77.4	78.1	78.9	80.0	0.17	0.22	0.26
Eritrea	1,852	2,246	2,699	3,210	3.86	3.67	3.47	38.2	41.3	44.6	47.8	1.58	1.50	1.40
Ethiopia	19,403	24,463	30,487	37,496	4.63	4.40	4.14	19.4	21.7	24.2	26.9	2.21	2.16	2.11
Kenya	12,120	14,975	18,372	22,383	4.23	4.09	3.95	25.7	28.0	30.6	33.4	1.74	1.77	1.78
Madagascar	8,529	10,670	13,200	16,102	4.48	4.26	3.97	35.2	38.5	41.9	45.2	1.81	1.68	1.53
Malawi	2,867	3,535	4,407	5,551	4.19	4.41	4.62	16.3	17.4	18.9	20.9	1.32	1.66	1.96
Mauritius	516	519	527	539	0.11	0.28	0.45	41.0	40.8	41.0	41.9	- 0.12	0.14	0.39
Mayotte	113	125	139	157	2.05	2.19	2.41	47.0	45.8	45.3	45.7	- 0.53	- 0.18	0.18
Mozambique	9,636	11,978	14,811	18,195	4.35	4.24	4.12	34.4	37.1	39.9	42.9	1.50	1.47	1.44
Réunion	858	893	927	956	0.82	0.73	0.62	99.3	99.7	99.8	99.9	0.06	0.03	0.01
Rwanda	1,977	2,281	2,660	3,144	2.86	3.07	3.34	17.0	17.4	18.3	19.6	0.50	0.96	1.40
Seychelles	52	55	58	61	1.26	0.99	0.81	55.4	57.5	59.7	61.7	0.76	0.72	0.69
Somalia	6,015	7,431	9,169	11,229	4.23	4.20	4.05	43.2	46.1	49.1	52.1	1.30	1.25	1.20
South Sudan	2,240	2,749	3,378	4,164	4.10	4.12	4.18	18.9	20.2	21.9	24.1	1.38	1.66	1.90
Uganda	8,856	11,775	15,431	19,914	5.70	5.41	5.10	22.1	25.0	28.0	31.2	2.47	2.31	2.15
United Republic of Tanzania	17,035	22,113	28,245	35,529	5.22	4.89	4.59	31.6	35.2	38.9	42.4	2.16	1.96	1.76
Zambia	6,747	8,336	10,257	12,549	4.23	4.15	4.03	41.9	44.6	47.5	50.5	1.26	1.25	1.22
Zimbabwe	5,109	5,700	6,430	7,370	2.19	2.41	2.73	32.4	32.2	32.9	34.2	- 0.09	0.38	0.83
Middle Africa	73,632	90,619	110,579	133,728	4.15	3.98	3.80	47.9	50.6	53.4	56.2	1.11	1.07	1.03
Angola	17,676	21,937	26,848	32,437	4.32	4.04	3.78	63.4	66.8	69.9	72.5	1.04	0.89	0.75
Cameroon	12,463	14,942	17,740	20,857	3.63	3.43	3.24	54.6	57.6	60.5	63.2	1.06	0.98	0.90

Tabel A.1: Lanjutan

Wilayah, subwilayah, negara, atau daerah	Populasi perkotaan pertengahan tahun per Negara, 2015-2030 (ribu)				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)			Persentase penduduk pertengahan tahun yang tinggal di negara dan kawasan perkotaan, 2015-2030				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan persentase perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)		
	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Central African Republic	1,831	2,077	2,452	2,918	2.52	3.32	3.48	40.3	42.2	44.7	47.6	0.93	1.14	1.29
Chad	3,154	3,830	4,701	5,819	3.88	4.10	4.27	22.5	23.5	25.0	27.1	0.87	1.25	1.60
Congo	3,274	3,857	4,524	5,290	3.28	3.19	3.13	65.5	67.8	70.1	72.3	0.69	0.65	0.62
Democratic Republic of the Congo	32,567	40,848	50,723	62,343	4.53	4.33	4.13	42.7	45.6	48.7	51.8	1.31	1.29	1.23
Equatorial Guinea	830	1,028	1,232	1,445	4.28	3.62	3.18	70.6	73.1	75.3	77.2	0.69	0.59	0.50
Gabon	1,701	1,938	2,171	2,403	2.61	2.27	2.03	88.1	90.1	91.6	92.7	0.44	0.33	0.24
Sao Tome and Principe	137	162	188	215	3.33	2.96	2.67	70.2	74.4	77.6	80.0	1.16	0.85	0.62
Northern Africa	115,705	129,068	143,026	157,849	2.19	2.05	1.97	51.4	52.5	53.8	55.3	0.41	0.49	0.58
Algeria	28,248	31,951	35,292	38,232	2.46	1.99	1.60	70.8	73.7	76.2	78.3	0.80	0.66	0.54
Egypt	40,123	44,041	48,427	53,613	1.86	1.90	2.03	42.8	42.8	43.4	44.8	- 0.00	0.31	0.60
Libya	4,942	5,376	5,780	6,140	1.68	1.45	1.21	79.3	80.7	82.2	83.6	0.36	0.37	0.34
Morocco	21,164	23,552	25,869	28,069	2.14	1.88	1.63	60.8	63.5	66.2	68.7	0.88	0.81	0.75
Sudan	13,099	15,349	18,220	21,775	3.17	3.43	3.56	33.9	35.3	37.2	39.7	0.79	1.07	1.31
Tunisia	7,672	8,281	8,854	9,372	1.53	1.34	1.14	68.1	69.6	71.2	73.0	0.44	0.47	0.49
Western Sahara	455	519	583	647	2.61	2.34	2.08	86.5	86.8	87.3	87.8	0.07	0.10	0.13
Southern Africa	39,358	43,688	47,900	51,909	2.09	1.84	1.61	62.1	64.6	67.1	69.4	0.81	0.75	0.68
Botswana	1,484	1,712	1,937	2,151	2.87	2.47	2.10	67.2	70.9	74.1	76.8	1.08	0.89	0.72
Lesotho	585	674	774	887	2.83	2.77	2.71	26.9	29.0	31.4	34.0	1.52	1.56	1.60
Namibia	1,138	1,403	1,684	1,972	4.20	3.64	3.16	46.9	52.0	56.7	60.8	2.08	1.71	1.39
South Africa	35,844	39,551	43,113	46,457	1.97	1.72	1.49	64.8	67.4	69.8	72.1	0.76	0.71	0.65
Swaziland	307	348	393	442	2.48	2.42	2.38	23.3	24.2	25.2	26.5	0.73	0.87	1.00
Western Africa	156,740	191,842	232,162	277,949	4.04	3.82	3.60	44.5	47.7	50.7	53.6	1.39	1.25	1.11
Benin	4,833	5,869	7,076	8,461	3.89	3.74	3.57	45.7	48.4	51.2	54.1	1.16	1.13	1.10
Burkina Faso	4,986	6,398	8,113	10,163	4.99	4.75	4.51	27.5	30.6	33.8	37.1	2.12	1.99	1.86
Cabo Verde	343	378	414	450	1.97	1.83	1.65	64.3	66.7	68.8	70.9	0.72	0.64	0.58
Côte d'Ivoire	11,426	13,532	16,022	18,912	3.38	3.38	3.32	49.4	51.7	54.1	56.7	0.89	0.92	0.93
Gambia	1,171	1,435	1,731	2,055	4.07	3.75	3.43	59.2	62.6	65.7	68.5	1.10	0.97	0.84
Ghana	14,918	17,626	20,539	23,641	3.34	3.06	2.81	54.1	57.3	60.5	63.4	1.17	1.06	0.95
Guinea	4,249	5,071	6,083	7,300	3.54	3.64	3.65	35.1	36.9	39.0	41.4	0.96	1.10	1.22
Guinea-Bissau	746	884	1,038	1,209	3.41	3.22	3.03	42.1	44.2	46.3	48.5	0.96	0.94	0.91
Liberia	2,242	2,659	3,150	3,722	3.41	3.39	3.33	49.8	52.1	54.6	57.3	0.89	0.94	0.97
Mali	6,986	8,907	11,191	13,850	4.86	4.57	4.26	40.0	43.9	47.7	51.2	1.87	1.64	1.42
Mauritania	2,137	2,647	3,207	3,808	4.28	3.84	3.44	51.1	55.3	59.2	62.7	1.59	1.35	1.14
Niger	3,233	4,003	5,068	6,542	4.27	4.72	5.11	16.2	16.6	17.4	18.7	0.46	0.94	1.40
Nigeria	86,673	107,113	130,312	156,300	4.23	3.92	3.64	47.8	52.0	55.8	59.2	1.65	1.41	1.19
Saint Helena	2	2	2	2	0.73	0.98	1.12	39.5	40.1	41.1	42.7	0.27	0.52	0.75
Senegal	6,869	8,277	9,904	11,778	3.73	3.59	3.47	45.9	48.1	50.6	53.2	0.96	1.00	1.02
Sierra Leone	2,955	3,454	4,017	4,651	3.12	3.02	2.93	40.8	42.9	45.3	47.8	1.00	1.06	1.11
Togo	2,974	3,588	4,296	5,106	3.76	3.60	3.46	40.1	42.8	45.6	48.6	1.30	1.29	1.26
ASIA	**2,119,873**	**2,361,464**	**2,589,655**	**2,802,262**	**2.16**	**1.84**	**1.58**	**48.0**	**51.1**	**54.0**	**56.7**	**1.26**	**1.10**	**0.98**
Eastern Asia	**977,010**	**1,078,435**	**1,160,857**	**1,222,479**	**1.98**	**1.47**	**1.03**	**59.8**	**64.8**	**69.2**	**72.8**	**1.63**	**1.31**	**1.02**
China	775,353	875,076	956,554	1,017,847	2.42	1.78	1.24	55.5	61.4	66.5	70.6	2.03	1.58	1.21
China, Hong Kong SAR	7,246	7,548	7,769	7,987	0.82	0.58	0.56	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
China, Macao SAR	601	652	701	746	1.63	1.46	1.23	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
China, Taiwan Province of China	18,064	18,802	19,421	19,902	0.80	0.65	0.49	76.9	78.9	80.8	82.4	0.52	0.46	0.40
Dem. People's Republic of Korea	15,469	16,120	16,816	17,531	0.82	0.85	0.83	61.3	62.4	63.8	65.6	0.36	0.45	0.54
Japan	116,944	116,100	114,646	112,710	- 0.14	- 0.25	- 0.34	91.4	91.8	92.2	92.7	0.09	0.10	0.10

Tabel A.1: Lanjutan

Wilayah, subwilayah, negara, atau daerah	Populasi perkotaan pertengahan tahun per Negara, 2015-2030 (ribu)				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)			Persentase penduduk pertengahan tahun yang tinggal di negara dan kawasan perkotaan, 2015-2030				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan persentase perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)		
	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Mongolia	2,031	2,203	2,363	2,514	1.63	1.40	1.24	68.2	68.7	69.5	70.6	0.12	0.23	0.33
Republic of Korea	41,302	41,934	42,587	43,241	0.30	0.31	0.30	81.6	81.4	81.6	82.0	- 0.05	0.03	0.12
South-Central Asia	**661,808**	**745,069**	**835,323**	**931,437**	**2.37**	**2.29**	**2.18**	**35.0**	**37.1**	**39.4**	**42.0**	**1.17**	**1.23**	**1.28**
Central Asia	33,057	35,681	38,432	41,414	1.53	1.49	1.49	48.1	48.3	49.1	50.5	0.09	0.33	0.56
Kazakhstan	10,151	10,829	11,494	12,185	1.29	1.19	1.17	57.2	57.7	58.6	60.0	0.17	0.32	0.48
Kyrgyzstan	2,098	2,323	2,574	2,862	2.03	2.05	2.12	35.8	36.9	38.6	40.9	0.59	0.90	1.18
Tajikistan	2,286	2,606	2,988	3,444	2.62	2.73	2.85	26.7	27.5	28.8	30.8	0.56	0.94	1.30
Turkmenistan	2,800	3,167	3,541	3,917	2.46	2.23	2.02	50.3	52.5	55.1	57.9	0.86	0.95	1.00
Uzbekistan	15,720	16,756	17,836	19,005	1.28	1.25	1.27	50.8	50.4	50.7	51.8	- 0.13	0.13	0.40
Southern Asia	**628,751**	**709,388**	**796,892**	**890,024**	**2.41**	**2.33**	**2.21**	**34.5**	**36.6**	**39.1**	**41.7**	**1.22**	**1.27**	**1.31**
Afghanistan	8,368	9,904	11,705	13,818	3.37	3.34	3.32	24.8	26.0	27.6	29.6	0.96	1.18	1.38
Bangladesh	55,305	64,815	74,838	84,689	3.17	2.88	2.47	34.3	38.2	42.0	45.6	2.14	1.90	1.67
Bhutan	305	353	401	444	2.98	2.51	2.05	38.7	42.3	45.6	48.6	1.80	1.51	1.25
India	429,069	483,099	542,743	607,342	2.37	2.33	2.25	32.8	34.9	37.4	40.1	1.27	1.36	1.42
Iran (Islamic Republic of)	58,217	63,421	67,760	71,205	1.71	1.32	0.99	73.4	75.9	78.1	80.1	0.67	0.59	0.51
Maldives	161	187	210	231	2.93	2.34	1.88	38.5	40.7	42.8	45.0	1.08	1.04	1.00
Nepal	5,318	6,226	7,266	8,408	3.15	3.09	2.92	18.6	20.6	22.8	25.4	2.07	2.09	2.09
Pakistan	68,227	77,438	87,777	99,360	2.53	2.51	2.48	36.0	37.2	38.7	40.7	0.62	0.81	0.99
Sri Lanka	3,781	3,945	4,193	4,528	0.85	1.22	1.54	18.3	18.7	19.6	21.1	0.49	0.97	1.42
South-Eastern Asia	**299,412**	**334,419**	**369,699**	**404,497**	**2.21**	**2.01**	**1.80**	**47.2**	**50.0**	**52.8**	**55.6**	**1.16**	**1.09**	**1.03**
Brunei Darussalam	320	348	374	397	1.66	1.44	1.21	76.7	78.3	79.7	81.1	0.41	0.37	0.34
Cambodia	3,443	4,050	4,721	5,458	3.25	3.06	2.90	22.2	24.2	26.5	29.0	1.76	1.80	1.82
Indonesia	137,635	154,189	170,361	185,755	2.27	1.99	1.73	53.3	56.6	59.8	62.8	1.21	1.09	0.98
Lao People's Democratic Republic	2,206	2,600	3,019	3,452	3.28	2.99	2.68	33.1	35.3	39.6	42.9	1.84	1.73	1.61
Malaysia	22,801	25,362	27,845	30,109	2.13	1.87	1.56	74.2	77.2	79.7	81.8	0.78	0.64	0.52
Myanmar	15,647	17,068	18,722	20,615	1.74	1.85	1.93	29.9	31.1	32.8	35.0	0.84	1.07	1.26
Philippines	47,078	52,009	57,606	63,844	1.99	2.04	2.06	46.3	47.4	49.0	50.9	0.48	0.64	0.79
Singapore	5,535	5,935	6,157	6,342	1.39	0.74	0.59	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Thailand	32,746	35,698	38,344	40,676	1.73	1.43	1.18	47.7	51.4	55.0	58.4	1.51	1.35	1.20
Timor-Leste	366	433	511	600	3.35	3.31	3.23	29.5	31.3	33.2	35.2	1.20	1.18	1.16
Viet Nam	31,635	36,727	42,039	47,248	2.98	2.70	2.34	33.8	37.3	40.9	44.5	1.99	1.83	1.66
Western Asia	**181,644**	**203,541**	**223,776**	**243,848**	**2.28**	**1.90**	**1.72**	**70.4**	**72.3**	**73.8**	**75.4**	**0.55**	**0.41**	**0.42**
Armenia	1,840	1,861	1,882	1,906	0.22	0.23	0.25	63.1	63.3	64.1	65.5	0.07	0.26	0.43
Azerbaijan	5,262	5,696	6,101	6,491	1.58	1.38	1.24	54.7	56.4	58.4	60.8	0.61	0.71	0.79
Bahrain	1,221	1,520	1,679	1,828	4.38	1.99	1.71	89.0	89.5	90.1	90.8	0.11	0.14	0.15
Cyprus	777	807	838	873	0.75	0.76	0.81	66.9	66.8	67.2	68.1	- 0.04	0.11	0.26
Georgia	2,270	2,318	2,359	2,394	0.42	0.35	0.30	57.4	59.5	61.6	63.9	0.69	0.71	0.72
Iraq	25,252	29,423	34,039	39,208	3.06	2.91	2.83	69.9	70.9	72.1	73.6	0.28	0.34	0.40
Israel	7,434	8,068	8,698	9,337	1.64	1.51	1.42	92.2	92.6	93.0	93.5	0.09	0.10	0.10
Jordan	8,267	9,333	9,802	10,364	2.43	0.98	1.12	90.3	91.4	92.4	93.2	0.26	0.21	0.17
Kuwait	3,936	4,303	4,603	4,874	1.78	1.35	1.14	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Lebanon	5,155	5,353	5,033	4,864	0.75	- 1.23	- 0.68	88.1	88.9	89.8	90.6	0.19	0.19	0.18
Oman	3,417	4,443	4,990	5,407	5.25	2.32	1.61	81.4	85.3	89.5	91.7	1.18	0.74	0.47
Qatar	2,455	2,770	3,011	3,217	2.41	1.66	1.32	98.9	99.2	99.4	99.5	0.06	0.04	0.02
Saudi Arabia	26,249	29,256	31,843	34,143	2.17	1.69	1.40	83.2	84.3	85.4	86.5	0.26	0.26	0.25
State of Palestine	3,514	4,083	4,708	5,371	3.00	2.85	2.64	75.4	76.7	78.2	79.7	0.36	0.38	0.39
Syrian Arab Republic	9,774	10,498	13,736	16,423	1.43	5.38	3.57	52.2	55.5	58.7	61.7	1.23	1.12	1.01
Turkey	57,617	63,803	67,446	70,951	2.04	1.11	1.01	73.6	76.1	78.3	80.2	0.67	0.57	0.49

Tabel A.1: Lanjutan

Wilayah, subwilayah, negara, atau daerah	Populasi perkotaan pertengahan tahun per Negara, 2015-2030 (ribu)				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)			Persentase penduduk pertengahan tahun yang tinggal di negara dan kawasan perkotaan, 2015-2030				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan persentase perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)		
	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030
United Arab Emirates	7,843	8,542	9,207	9,865	1.71	1.50	1.38	85.7	87.0	88.2	89.2	0.32	0.27	0.23
Yemen	9,361	11,455	13,802	16,330	4.06	3.71	3.36	34.8	37.9	41.1	44.4	1.72	1.63	1.51
EUROPE	**547,147**	**556,684**	**565,026**	**572,890**	**0.35**	**0.30**	**0.28**	**73.9**	**74.9**	**76.1**	**77.5**	**0.28**	**0.32**	**0.36**
Eastern Europe	**203,146**	**203,296**	**203,360**	**203,271**	**0.01**	**0.01**	**- 0.01**	**69.3**	**69.9**	**70.9**	**72.2**	**0.18**	**0.28**	**0.37**
Belarus	7,321	7,484	7,590	7,631	0.44	0.28	0.11	77.2	79.5	81.5	83.3	0.59	0.50	0.43
Bulgaria	5,311	5,253	5,179	5,082	- 0.22	- 0.28	- 0.38	74.0	75.7	77.4	79.0	0.45	0.44	0.42
Czechia	7,791	7,875	7,953	8,009	0.21	0.20	0.14	73.5	74.1	74.9	76.1	0.16	0.23	0.30
Hungary	6,898	6,922	6,938	6,940	0.07	0.05	0.01	70.5	71.9	73.5	75.1	0.40	0.43	0.44
Poland	23,065	22,782	22,598	22,533	- 0.25	- 0.16	- 0.06	60.3	60.0	60.5	61.5	- 0.08	0.14	0.35
Republic of Moldova	1,728	1,722	1,729	1,749	- 0.07	0.09	0.23	42.5	42.8	43.9	45.5	0.17	0.46	0.74
Romania	10,711	10,507	10,431	10,456	- 0.38	- 0.15	0.05	53.9	54.2	55.1	56.6	0.11	0.34	0.54
Russian Federation	106,549	107,486	108,062	108,337	0.18	0.11	0.05	74.1	74.8	75.8	77.1	0.19	0.27	0.34
Slovakia	2,931	2,931	2,955	2,998	- 0.00	0.17	0.28	53.9	53.8	54.3	55.6	- 0.05	0.22	0.47
Ukraine	30,841	30,335	29,924	29,537	- 0.33	- 0.27	- 0.26	69.1	69.6	70.5	71.7	0.16	0.25	0.34
Northern Europe	**83,943**	**87,488**	**90,892**	**94,053**	**0.83**	**0.76**	**0.68**	**81.4**	**82.6**	**83.8**	**85.0**	**0.30**	**0.29**	**0.28**
Channel Islands	51	52	54	56	0.45	0.68	0.88	31.0	31.0	31.4	32.2	0.00	0.26	0.52
Denmark	4,979	5,108	5,248	5,389	0.51	0.54	0.53	87.5	88.1	88.8	89.4	0.13	0.15	0.15
Estonia	900	900	899	895	0.01	- 0.03	- 0.08	68.4	69.2	70.2	71.4	0.24	0.29	0.33
Faeroe Islands	20	21	22	23	0.74	0.89	1.05	41.6	42.4	43.4	44.8	0.36	0.48	0.60
Finland	4,672	4,772	4,874	4,970	0.42	0.42	0.39	85.2	85.5	86.0	86.5	0.07	0.11	0.14
Iceland	309	322	334	345	0.81	0.74	0.64	93.7	93.9	94.1	94.4	0.04	0.05	0.06
Ireland	2,939	3,111	3,295	3,484	1.14	1.15	1.12	62.5	63.7	65.1	66.8	0.35	0.44	0.51
Isle of Man	43	45	48	50	0.89	0.97	1.04	52.2	52.9	54.0	55.4	0.25	0.39	0.53
Latvia	1,355	1,293	1,250	1,222	- 0.93	- 0.68	- 0.46	68.0	68.3	69.0	69.9	0.10	0.19	0.28
Lithuania	1,971	1,941	1,929	1,920	- 0.31	- 0.12	- 0.10	67.2	68.0	69.2	70.6	0.24	0.33	0.41
Norway	4,217	4,522	4,830	5,130	1.40	1.32	1.20	81.1	83.0	84.6	86.1	0.46	0.40	0.34
Sweden	8,451	8,905	9,309	9,669	1.05	0.89	0.76	86.6	88.0	89.2	90.3	0.33	0.28	0.24
United Kingdom	54,035	56,495	58,799	60,899	0.89	0.80	0.70	82.6	83.9	85.1	86.3	0.31	0.29	0.27
Southern Europe	107,618	109,342	110,832	112,280	0.32	0.27	0.26	70.6	72.1	73.8	75.4	0.43	0.44	0.45
Albania	1,679	1,827	1,949	2,038	1.69	1.29	0.90	57.4	62.1	66.1	69.5	1.57	1.25	0.99
Andorra	69	68	68	69	- 0.31	0.11	0.12	88.3	87.9	87.7	87.8	- 0.10	- 0.04	0.02
Bosnia and Herzegovina	1,668	1,715	1,768	1,824	0.55	0.61	0.62	47.2	49.0	51.2	53.6	0.77	0.85	0.92
Croatia	2,379	2,369	2,375	2,394	- 0.08	0.05	0.16	56.2	57.6	59.3	61.5	0.49	0.61	0.70
Gibraltar	34	35	36	36	0.45	0.28	0.22	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Greece	8,755	8,850	8,897	8,926	0.22	0.11	0.06	78.0	79.7	81.3	82.8	0.42	0.39	0.36
Holy See	1	1	1	1	- 0.05	0.0	- 0.10	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Italy	41,394	42,007	42,569	43,161	0.29	0.27	0.28	69.6	71.0	72.6	74.3	0.42	0.44	0.45
Malta	404	412	417	420	0.38	0.28	0.11	94.4	94.7	95.1	95.4	0.07	0.07	0.07
Montenegro	413	425	435	443	0.54	0.45	0.37	65.8	67.5	69.2	70.9	0.50	0.49	0.48
Portugal	6,617	6,776	6,926	7,049	0.47	0.44	0.35	63.5	66.3	68.9	71.4	0.86	0.78	0.69
San Marino	32	33	34	34	0.67	0.41	0.28	96.7	97.5	98.0	98.4	0.16	0.11	0.07
Serbia	4,930	4,913	4,924	4,953	- 0.07	0.04	0.12	55.7	56.4	57.6	59.3	0.27	0.42	0.56
Slovenia	1,116	1,148	1,179	1,211	0.56	0.54	0.53	53.8	55.1	56.8	58.8	0.49	0.60	0.70
Spain	36,933	37,544	37,995	38,420	0.33	0.24	0.22	79.6	80.8	82.1	83.3	0.30	0.31	0.30
TFYR Macedonia	1,194	1,221	1,259	1,303	0.45	0.61	0.69	57.4	58.5	60.3	62.7	0.37	0.61	0.80
Western Europe	**152,441**	**156,558**	**159,942**	**163,286**	**0.53**	**0.43**	**0.41**	**79.4**	**80.2**	**81.2**	**82.2**	**0.21**	**0.24**	**0.26**
Austria	5,009	5,159	5,338	5,531	0.59	0.68	0.71	57.7	58.7	60.1	61.8	0.35	0.46	0.56
Belgium	11,048	11,397	11,614	11,811	0.62	0.38	0.34	97.9	98.1	98.3	98.4	0.04	0.04	0.03

Tabel A.1: Lanjutan

Wilayah, subwilayah, negara, atau daerah	Populasi perkotaan pertengahan tahun per Negara, 2015-2030 (ribu)				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)			Persentase penduduk pertengahan tahun yang tinggal di negara dan kawasan perkotaan, 2015-2030				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan persentase perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)		
	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030
France	51,343	53,218	55,019	56,789	0.72	0.67	0.63	79.7	81.0	82.3	83.6	0.33	0.33	0.32
Germany	63,078	63,930	64,346	64,871	0.27	0.13	0.16	77.2	77.5	78.0	78.9	0.07	0.15	0.23
Liechtenstein	5	6	6	6	0.81	1.15	1.44	14.3	14.4	14.8	15.5	0.16	0.54	0.91
Luxembourg	511	552	593	629	1.55	1.43	1.17	90.2	91.5	92.4	93.2	0.28	0.22	0.17
Monaco	38	39	40	41	0.51	0.50	0.52	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Netherlands	15,274	15,847	16,319	16,671	0.74	0.59	0.43	90.2	92.2	93.7	94.8	0.45	0.32	0.22
Switzerland	6,133	6,409	6,668	6,937	0.88	0.79	0.79	73.7	73.9	74.5	75.4	0.05	0.15	0.24
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	**505,392**	**539,427**	**571,254**	**600,480**	**1.30**	**1.15**	**1.00**	**79.9**	**81.2**	**82.4**	**83.6**	**0.31**	**0.30**	**0.28**
Caribbean	**30,319**	**32,251**	**34,069**	**35,729**	**1.24**	**1.10**	**0.95**	**70.0**	**72.2**	**74.3**	**76.2**	**0.61**	**0.57**	**0.52**
Anguilla	15	15	16	16	0.90	0.47	0.28	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Antigua and Barbuda	25	26	27	28	0.55	0.87	1.15	25.0	24.4	24.4	24.8	- 0.45	- 0.06	0.35
Aruba	45	47	48	50	0.67	0.77	0.87	43.1	43.7	44.7	45.2	0.27	0.46	0.63
Bahamas	320	339	356	373	1.13	1.02	0.89	82.7	83.2	83.9	84.7	0.12	0.16	0.19
Barbados	89	90	92	95	0.20	0.46	0.70	31.2	31.2	31.7	32.8	- 0.04	0.32	0.67
British Virgin Islands	14	16	17	19	2.42	1.73	1.52	46.6	48.5	50.6	52.8	0.81	0.84	0.85
Caribbean Netherlands	18	20	21	21	1.37	0.88	0.81	74.8	75.0	75.6	76.5	0.08	0.16	0.23
Cayman Islands	60	64	68	71	1.27	1.13	1.00	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Cuba	8,813	8,874	8,957	9,048	0.14	0.19	0.20	76.9	77.2	77.8	78.7	0.08	0.16	0.23
Curaçao	141	146	150	154	0.62	0.57	0.52	89.4	89.1	89.1	89.3	- 0.07	- 0.00	0.06
Dominica	51	53	56	58	0.94	0.84	0.67	69.6	71.1	72.6	74.2	0.43	0.43	0.42
Dominican Republic	8,272	9,169	9,950	10,618	2.06	1.64	1.30	78.6	82.5	85.5	87.8	0.99	0.71	0.51
Grenada	38	40	42	44	0.76	0.86	0.87	36.0	36.5	37.5	38.9	0.30	0.52	0.72
Guadeloupe	443	442	441	442	- 0.08	- 0.04	0.04	98.4	98.5	98.6	98.7	0.01	0.02	0.02
Haiti	5,616	6,492	7,343	8,144	2.90	2.47	2.07	52.4	57.1	61.3	64.9	1.70	1.41	1.16
Jamaica	1,575	1,640	1,707	1,770	0.82	0.79	0.73	54.8	56.3	58.2	60.3	0.53	0.65	0.74
Martinique	343	344	344	344	0.02	0.03	0.00	89.0	89.1	89.5	90.1	0.04	0.08	0.13
Montserrat	0	0	1	1	0.64	0.94	1.20	9.0	9.1	9.4	9.9	0.16	0.58	0.98
Puerto Rico	3,439	3,416	3,395	3,376	- 0.14	- 0.12	- 0.11	93.6	93.6	93.7	94.0	- 0.01	0.03	0.06
Saint Kitts and Nevis	17	18	18	20	0.92	1.06	1.22	30.8	30.8	31.4	32.4	0.01	0.34	0.66
Saint Lucia	33	34	36	38	0.80	0.98	1.14	18.5	18.8	19.5	20.4	0.35	0.64	0.92
Saint Vincent and the Grenadines	56	59	62	64	1.03	0.94	0.84	51.0	53.0	55.2	57.3	0.80	0.78	0.76
Sint Maarten (Dutch part)	39	41	44	46	1.31	1.16	0.98	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Trinidad and Tobago	725	733	742	753	0.22	0.23	0.30	53.3	53.2	53.7	54.8	- 0.04	0.19	0.40
Turks and Caicos Islands	32	35	37	40	1.77	1.46	1.24	92.2	93.6	94.6	95.3	0.30	0.21	0.15
United States Virgin Islands	100	101	100	99	0.10	- 0.11	- 0.29	95.4	95.9	96.4	96.8	0.12	0.10	0.07
Central America	**127,304**	**138,768**	**149,898**	**160,493**	**1.72**	**1.54**	**1.37**	**73.7**	**75.4**	**76.9**	**78.5**	**0.44**	**0.41**	**0.40**
Belize	163	183	205	230	2.32	2.30	2.23	45.4	46.0	47.1	48.6	0.27	0.46	0.63
Costa Rica	3,695	4,074	4,391	4,647	1.95	1.50	1.14	76.9	80.8	83.7	85.8	0.99	0.71	0.50
El Salvador	4,400	4,759	5,085	5,371	1.57	1.33	1.09	69.7	73.4	76.6	79.2	1.05	0.84	0.66
Guatemala	8,121	9,284	10,568	11,963	2.68	2.59	2.48	50.0	51.8	54.0	56.4	0.73	0.82	0.88
Honduras	4,943	5,672	6,421	7,169	2.75	2.48	2.20	55.2	58.4	61.4	64.3	1.13	1.02	0.92
Mexico	99,813	108,074	115,926	123,198	1.59	1.40	1.22	79.3	80.7	82.1	83.5	0.36	0.35	0.33
Nicaragua	3,521	3,787	4,071	4,387	1.45	1.45	1.49	57.9	59.0	60.5	62.3	0.38	0.49	0.58
Panama	2,647	2,935	3,230	3,528	2.06	1.92	1.77	66.7	68.4	70.3	72.2	0.51	0.53	0.55
South America	**347,768**	**368,409**	**387,288**	**404,258**	**1.15**	**1.00**	**0.86**	**83.5**	**84.6**	**85.6**	**86.5**	**0.25**	**0.24**	**0.23**
Argentina	39,728	41,920	44,010	45,994	1.07	0.97	0.88	91.5	92.1	92.7	93.2	0.13	0.13	0.12
Bolivia (Plurinational State of)	7,335	8,095	8,887	9,700	1.97	1.87	1.75	68.4	70.1	71.9	73.7	0.50	0.50	0.50

Tabel A.1: Lanjutan

Wilayah, subwilayah, negara, atau daerah	Populasi perkotaan pertengahan tahun per Negara, 2015-2030 (ribu)				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)			Persentase penduduk pertengahan tahun yang tinggal di negara dan kawasan perkotaan, 2015-2030				Rata-rata laju pertumbuhan tahunan persentase perkotaan per Negara, 2015-2030 (persen)		
	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2015	2020	2025	2030	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Brazil	176,654	186,217	194,452	201,296	1.05	0.87	0.69	85.8	87.1	88.2	89.3	0.30	0.27	0.23
Chile	15,517	16,206	16,850	17,446	0.87	0.78	0.69	87.4	87.7	88.2	88.8	0.08	0.11	0.14
Colombia	38,469	40,892	43,011	44,804	1.22	1.01	0.82	79.8	81.4	82.9	84.3	0.41	0.37	0.33
Ecuador	10,235	11,124	12,063	13,049	1.66	1.62	1.57	63.4	64.2	65.3	66.7	0.24	0.34	0.44
Falkland Islands (Malvinas)	2	2	2	2	0.76	0.53	0.34	76.3	78.5	80.4	82.0	0.58	0.48	0.40
French Guiana	227	261	296	334	2.78	2.55	2.38	84.5	85.8	87.0	87.9	0.31	0.26	0.22
Guyana	203	212	223	236	0.83	1.01	1.12	26.4	26.8	27.5	28.6	0.26	0.51	0.76
Paraguay	4,033	4,394	4,771	5,154	1.71	1.64	1.55	60.8	62.2	63.8	65.7	0.47	0.53	0.58
Peru	24,272	26,082	27,880	29,643	1.44	1.33	1.23	77.4	78.3	79.4	80.5	0.24	0.27	0.29
Suriname	365	382	399	417	0.90	0.88	0.86	66.1	66.1	66.7	67.6	0.03	0.16	0.28
Uruguay	3,262	3,338	3,405	3,461	0.46	0.40	0.33	95.0	95.5	95.9	96.3	0.10	0.09	0.08
Venezuela (Bolivarian Republic of)	27,465	29,284	31,038	32,722	1.28	1.16	1.06	88.2	88.3	88.6	89.0	0.03	0.07	0.10
NORTHERN AMERICA	**290,616**	**304,761**	**319,702**	**334,780**	**0.95**	**0.96**	**0.92**	**81.6**	**82.6**	**83.6**	**84.7**	**0.22**	**0.24**	**0.26**
Bermuda	62	61	60	59	- 0.44	- 0.20	- 0.26	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Canada	29,212	30,670	32,164	33,663	0.97	0.95	0.91	81.3	81.6	82.1	82.9	0.07	0.13	0.19
Greenland	49	50	51	51	0.42	0.41	0.21	86.1	87.3	88.4	89.3	0.28	0.24	0.21
Saint Pierre and Miquelon	6	6	6	6	0.36	0.75	0.75	89.9	90.0	90.2	90.5	0.02	0.05	0.08
United States of America	261,288	273,975	287,421	301,001	0.95	0.96	0.92	81.7	82.7	83.7	84.9	0.24	0.26	0.27
OCEANIA	26,938	28,919	30,860	32,831	1.42	1.30	1.24	68.1	68.2	68.5	68.9	0.03	0.07	0.11
Australia/New Zealand	24,381	26,095	27,724	29,319	1.36	1.21	1.12	85.8	86.3	86.9	87.7	0.12	0.14	0.16
Australia	20,397	21,904	23,335	24,740	1.43	1.27	1.17	85.7	86.2	86.9	87.6	0.13	0.15	0.17
New Zealand	3,984	4,191	4,388	4,579	1.01	0.92	0.85	86.3	86.7	87.2	87.8	0.08	0.12	0.14
Melanesia	1,903	2,138	2,418	2,757	2.33	2.46	2.63	19.2	19.6	20.3	21.4	0.46	0.72	1.01
Fiji	488	529	567	601	1.62	1.37	1.17	54.7	57.2	59.7	62.0	0.90	0.83	0.76
New Caledonia	187	205	224	242	1.89	1.72	1.56	69.4	71.5	73.5	75.3	0.61	0.54	0.48
Papua New Guinea	1,031	1,168	1,351	1,592	2.51	2.91	3.28	13.0	13.3	14.1	15.2	0.51	1.04	1.55
Solomon Islands	131	160	191	225	3.91	3.57	3.28	22.4	24.7	26.9	29.1	1.97	1.76	1.56
Vanuatu	66	75	85	97	2.55	2.55	2.58	25.0	25.5	26.3	27.4	0.45	0.62	0.80
Micronesia	353	375	397	421	1.21	1.18	1.14	67.9	69.2	70.4	71.5	0.37	0.33	0.31
Guam	153	160	167	173	0.92	0.84	0.72	94.5	94.9	95.3	95.7	0.09	0.08	0.07
Kiribati	58	68	78	88	3.19	2.77	2.36	51.6	55.6	59.1	62.2	1.48	1.23	1.01
Marshall Islands	40	41	43	45	0.61	0.61	1.09	75.8	77.8	79.5	81.1	0.52	0.44	0.38
Micronesia (Fed. States of)	23	25	27	29	1.05	1.52	1.86	22.5	22.9	23.7	24.9	0.42	0.70	0.96
Nauru	11	11	11	11	- 0.06	0.18	0.22	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Northern Mariana Islands	50	51	52	53	0.29	0.36	0.35	91.4	91.8	92.3	92.8	0.10	0.10	0.11
Palau	17	18	20	21	1.77	1.59	1.36	78.2	81.0	83.3	85.0	0.71	0.55	0.43
Polynesia	301	312	321	334	0.67	0.57	0.83	44.5	44.4	44.5	45.0	- 0.04	0.05	0.22
American Samoa	48	49	49	50	0.07	0.26	0.37	87.2	87.2	87.3	87.8	- 0.02	0.04	0.10
Cook Islands	13	13	14	14	0.37	0.52	0.48	74.4	75.5	76.6	77.8	0.29	0.30	0.31
French Polynesia	171	180	186	195	1.01	0.65	0.91	61.7	62.0	62.6	63.5	0.09	0.19	0.29
Niue	1	1	1	1	1.69	1.43	1.61	42.6	46.2	49.5	52.5	1.64	1.38	1.15
Samoa	37	36	36	37	- 0.47	- 0.03	0.51	18.9	17.9	17.4	17.3	- 1.11	- 0.61	- 0.07
Tokelau	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tonga	25	26	27	29	0.71	0.99	1.36	23.3	23.1	23.3	23.8	- 0.15	0.15	0.47
Tuvalu	7	7	8	9	2.27	2.08	1.83	59.7	64.0	67.6	70.5	1.39	1.09	0.84
Wallis and Futuna Islands	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Sumber: PBB, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018), World Urbanization Prospects: The 2018 Revision

Tabel B.1: Populasi Rumah Tangga (%) dengan air minum layak, sanitasi layak, dan layanan dasar lain di perkotaan, Negara terpilih

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Angola	2006	43.0	94.9	14.7	1.4	84.0	..	87.8	..	..	100.0	82.6	45.9	66.6	86.3
Angola	2011	62.0	95.9	..	19.3	88.7	..	88.3	85.7	97.8	61.8	..	92.8	82.9	88.5
Angola	2015	52.0	86.6	58.6	11.7	87.3	60.9	76.9	72.2	98.0	64.5	4.1	86.3	66.4	80.3
Benin	2001	66.8	78.0	71.6	6.1	35.9	14.4	80.8	62.6	88.7	..	10.4	..	51.2	1.8
Benin	2006	61.7	79.4	74.1	0.1	27.2	10.0	78.1	64.4	90.3	69.1	6.8	45.1	54.7	7.3
Benin	2011	62.1	84.1	79.7	..	22.4	..	80.8	74.4	87.0	59.5	..	..	66.7	10.7
Botswana	2015/16	96.8	98.2	..	36.3	74.3	..	96.1	92.2	97.7	77.2	..	..	79.2	71.4
Burkina Faso	2003	86.4	94.2	82.4	8.2	77.8	44.3	93.4	..	..	..	19.8	..	53.9	10.1
Burkina Faso	2006	87.6	98.4	..	..	9.5	8.7	96.7	54.6	96.6	79.3	17.9	58.7	61.9	14.3
Burkina Faso	2010	78.1	94.7	85.4	1.9	81.9	49.3	86.2	75.8	92.1	76.8	12.4	87.3	50.2	14.1
Burkina Faso	2014	79.3	94.0	70.0	1.7	92.3	51.9	83.2	74.7	96.0	76.4	7.2	96.9	59.4	25.3
Cameroon	2004	67.7	85.5	73.9	15.7	57.2	36.6	75.9	..	..	80.4	4.6	..	76.9	22.6
Cameroon	2005	68.3	86.5	..	22.3	97.4	..	80.2	84.6	95.1	75.2	..	..	79.5	29.2
Cameroon	2006	67.6	89.4	..	1.7	51.1	37..7	72.9	0.0	94.8	80.8	3.9	59.3	82.3	24.0
Cameroon	2011	65.2	90.3	75.9	1.5	83.3	55.4	82.1	83.6	94.8	79.6	5.8	89.9	87.4	28.2
Central African Republic	2000	52.1	88.1	64.4	1.9	23.8	..	37.1	93.4	71.8	99.9	..	..	19.9	..
Central African Republic	2006	56.6	88.8	65.6	0.7	65.8	42.0	33.5	97.9	74.1	99.8	3.5	25.7	25.4	1.1
Central African Republic	2010	50.2	85.3	45.9	0.1	73.4	42.1	35.3	64.5	73.8	97.8	1.6	73.6	27.2	0.4
Chad	2000	..	55.5	59.8	0.9	35.4	..	79.1	..	..	56.6	..	..	..	..
Chad	2004	44.9	59.6	39.0	7.0	19.5	..	21.3	95.4	82.2	61.9	4.3	..	20.2	..
Chad	2010	23.2	52.4	21.4	0.8	15.3	10.5	7.0	53.5	21.8	95.8	1.1	46.6	6.4	1.7
Chad	2014	48.7	87.5	67.9	0.0	52.5	27.7	30.3	70.7	79.5	56.8	2.0	87.9	36.6	13.2
Congo	2009	84.1	96.6	..	6.7	76.3	17.9	92.5	71.9	98.4	75.1	1.6	91.1	53.3	19.9
Congo	2011	78.8	95.8	78.9	2.5	59.4	17.9	91.0	76.4	99.4	67.7	1.8	93.7	58.9	25.5
Congo	2014	68.7	98.6	88.6	23.7	76.0	31.5	94.1	88.6	99.4	100.0	2.9	96.9	80.2	39.2
Cote divoire	2000	68.5	95.8	79.9	28.1	65.7	..	76.8	..	..	56.2	..	..	..	..
Cote d'ivore	2005	76.7	82.4	..	33.9	42.9	..	96.8	..	..	..	48.0	..	87.5	..
Cote divoire	2006	69.3	96.1	16.2	6.2	84.8	40.2	97.3	92.8	97.1	99.2	10.9	62.6	88.5	22.1
Cote d'ivore	2012	73.3	96.5	92.5	15.0	77.6	..	97.5	..	..	..	5.9	..	89.7	..
Cote divoire	2016	74.5	95.0	91.2	11.0	77.1	48.4	98.4	95.3	95.7	100.0	3.4	97.4	93.1	53.5
Democratic Republic of the Congo	2000	43.5	66.1	64.4	4.1	57.4	..	99.9	75.4	95.8	35.3	..	..	..	..
Democratic Republic of the Congo	2007	60.8	80.6	57.9	14.9	53.6	21.4	49.4	..	74.0	..	1.4	51.1	38.9	10.8
Democratic Republic of the Congo	2010	61.8	83.1	17.4	0.9	35.9	13.9	55.5	71.4	81.6	61.6	2.5	69.9	44.7	8.7
Democratic Republic of the Congo	2014	36.3	84.9	58.9	0.8	56.5	24.4	51.5	67.3	79.5	60.2	2.2	82.4	43.2	5.3
Equatorial Guinea	2000	18.8	60.4	45.8	30.6	92.28	..	82.94	..	..	68.61	..	..	..	..
Ethiopia	2000	80.3	85.3	57.2	2.4	4.2	2.2	33.6	..	86.8	..	11.0	..	77.4	1.7
Ethiopia	2005	89.5	93.5	75.8	1.4	52.3	22.6	54.6	18.1	93.8	49.9	35.5	14.5	86.1	2.5
Ethiopia	2011	85.6	94.6	69.8	2.8	45.4	18.4	49.8	19.1	94.1	58.5	24.7	67.2	83.7	4.2
Ethiopia	2016	86.8	97.6	59.1	2.8	51.5	20.3	66.5	24.9	93.3	64.4	18.2	90.1	92.4	25.9
Gabon	2000	92.4	93.4	77.4	31.8	58.7	38.0	89.9	95.7	99.1	76.1	20.2	..	90.8	80.0

Tabel B.1: Lanjutan

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Gabon	2012	94.8	97.3	62.5	38.0	64.6	40.9	92.5	99.3	99.7	76.6	2.4	97.4	97.8	90.6
Gambia	2000	90.7	94.6	46.1	19.1	47.58	...	81.5	69.91	96.26	75.36	...	...	50.97	...
Gambia	2006	87.5	91.2	60.0	7.7	93.34	50.68	93.87	75.04	97.56	72.38	33.1	74.46	55.24	3.03
Ghana	2003	72.2	88.8	78.6	22.7	61.8	15.4	96.1	...	...	...	17.1	...	77.1	15.9
Ghana	2008	67.1	96.4	88.7	3.8	86.7	17.9	95.5	90.5	97.0	65.8	7.2	80.4	83.8	23.0
Ghana	2008	59.4	99.0	91.7	10.2	93.9	28.6	96.0	96.8	99.4	71.8	12.4	91.2	90.5	44.2
Ghana	2011	50.0	69.6	...	2.9	72.6	18.0	94.1	95.3	82.3	70.3	3.7	91.0	81.8	24.2
Ghana	2014	41.5	96.5	86.7	12.9	85.6	20.4	98.1	89.4	98.6	68.8	2.8	93.7	90.3	35.2
Ghana	2016	42.6	96.0	89.3	0.9	88.5	22.7	87.7	83.7	98.5	68.4	1.0	96.1	89.9	34.0
Guinea	2005	66.3	77.9	68.9	7.6	59.9	25.8	90.5	...	...	...	23.7	...	63.1	0.6
Guinea	2012	70.2	95.2	74.2	7.5	86.1	39.5	94.1	92.4	96.8	68.9	1.8	95.6	75.4	0.6
Guinea	2016	64.3	98.4	46.1	2.7	87.42	43.26	97.29	97.44	97.25	58.8	...	96.67	83.37	1.65
Guinea Bissau	2000	36.4	71.5	48.0	2.8	11.61	2.31	99.79	92.56	77.53	43.77	...	...	...	...
Guinea Bissau	2006	45.7	82.3	56.1	13.0	28.81	21.69	75.91	44.63	87.81	55.63	11.62	56.68	36.57	2.46
Guinea Bissau	2014	58.7	91.7	71.6	1.7	49.3	25.93	75.9	19.91	96.65	67.28	1.51	98.13	35.9	1.43
Kenya	2003	70.2	77.9	51.5	39.1	50.4	25.7	77.5	...	89.6	66.5	37.4	...	51.5	13.3
Kenya	2008	76.8	93.0	75.4	33.9	82.8	35.0	88.2	79.6	96.4	69.9	8.1	85.1	64.9	22.8
Kenya	2014	65.9	88.7	70.0	18.2	75.3	30.9	80.2	69.2	97.0	65.7	0.8	94.7	65.1	22.6
Kenya	2015	60.4	91.6	65.9	21.1	76.8	38.2	83.0	67.8	95.7	72.7	1.9	96.6	72.6	...
Lesotho	2000	81.9	88.9	70.7	4.9	65.8	...	84.4	...	...	77.3	...	...	13.5	...
Lesotho	2004	88.6	94.9	79.9	8.4	47.3	24.9	93.1	...	...	...	46.8	...	28.7	65.9
Lesotho	2009	82.4	90.7	68.9	3.3	59.6	31.2	95.3	89.6	97.7	73.9	17.7	89.1	48.6	73.1
Lesotho	2014	92.8	96.3	81.1	3.7	94.1	49.3	94.0	93.2	97.5	80.4	7.8	96.5	65.1	78.5
Liberia	2007	19.3	88.8	83.9	7.5	47.0	23.2	82.7	65.0	90.9	56.1	...	65.9	7.0	0.1
Liberia	2009	17.7	93.6	...	5.0	63.7	0.0	77.5	68.8	90.6	52.2	0.0	74.6	3.4	0.0
Liberia	2011	14.5	84.6	76.0	1.2	53.2	19.4	84.0	78.1	95.1	52.2	...	81.7	7.9	0.4
Liberia	2013	5.0	90.2	78.0	1.7	58.2	26.3	76.7	71.7	95.5	60.6	...	83.8	17.0	0.2
Liberia	2016	14.9	95.1	85.6	2.0	67.7	30.1	81.3	78.1	97.0	60.8	...	81.4	32.0	0.4
Madagascar	2000	72.5	77.5	48.9	10.1	22.5	18.6	58.5	...	...	41.5	...	...	...	...
Madagascar	2003	63.9	72.7	62.6	6.9	73.7	25.5	59.0	...	...	...	11.9	...	52.2	3.2
Madagascar	2008	74.2	87.6	81.9	0.5	19.2	10.6	70.0	66.4	86.0	55.0	9.6	75.4	69.4	2.6
Madagascar	2011	69.2	87.4	...	0.2	21.2	9.2	64.7	68.5	76.9	57.7	6.6	73.7	63.7	1.6
Madagascar	2013	54.9	80.9	...	1.3	35.2	14.8	62.3	48.7	74.1	58.4	5.4	70.0	60.5	1.8
Madagascar	2016	71.3	87.3	73.6	0.9	32.2	13.0	67.1	69.1	81.8	57.8	3.2	73.4	68.2	1.4
Malawi	2000	84.4	95.0	73.6	18.8	19.8	17.4	69.8	...	...	...	...	...	32.5	15.6
Malawi	2004	75.0	91.4	77.1	17.9	20.3	17.4	66.2	...	...	75.6	26.7	...	34.0	11.0
Malawi	2006	78.3	96.0	48.6	1.0	38.4	22.0	64.9	82.5	73.9	99.9	5.8	35.6	30.2	7.3
Malawi	2010	76.0	92.1	70.1	10.7	36.3	22.0	68.7	83.5	80.0	78.0	8.6	76.0	37.0	9.0
Malawi	2012	69.3	91.9	83.0	14.2	45.1	32.8	69.3	95.0	82.1	73.9	7.1	76.7	37.1	10.3
Malawi	2014	84.4	95.9	87.7	14.1	52.2	29.1	78.3	94.0	89.0	77.2	5.5	81.3	47.4	9.9
Malawi	2014	88.7	95.9	77.1	2.4	84.8	49.0	76.9	82.9	88.3	98.3	6.4	85.6	48.0	10.4
Malawi	2017	89.7	65.3	65.4	2.8	55.4	31.2	81.0	87.8	91.2	81.1	5.3	86.5	57.6	9.5

Tabel B.1: Lanjutan

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Mali	2001	61.1	71.9	70.7	14.5	35.6	18.3	61.5	...	...	...	13.1	...	41.5	0.8
Mali	2006	69.4	79.3	78.3	6.4	47.9	22.9	57.9	...	...	67.3	13.7	46.5	49.0	0.7
Mali	2012	74.4	94.0	91.2	6.8	86.5	45.3	64.3	70.2	88.0	75.8	7.8	95.2	77.3	1.5
Mali	2015	77.7	91.3	85.7	3.5	81.9	52.8	74.6	84.6	86.9	100.0	6.4	97.8	79.0	2.2
Mali	2015	81.3	96.1	92.6	2.4	89.0	57.4	74.2	84.7	93.4	71.4	8.3	98.6	85.1	0.8
Mauritania	2001	76.8	91.0	63.9	4.1	12.7	9.6	57.8	...	...	34.8	8.0	...	50.6	...
Mozambique	2003	62.6	71.8	60.2	8.2	8.2	8.0	62.1	...	...	72.7	6.1	...	29.8	6.7
Mozambique	2009	63.2	79.8	...	4.2	54.0	42.4	58.4	68.1	63.8	82.7	2.9	60.0	47.7	6.0
Mozambique	2011	71.7	84.8	67.9	0.0	47.4	39.3	57.9	49.0	69.9	78.7	2.4	71.8	59.3	2.1
Mozambique	2015	76.5	92.2	63.6	26.0	47.3	40.3	68.9	59.4	79.1	76.0	2.5	84.3	73.2	2.8
Namibia	2000	97.9	98.1	88.3	78.7	80.6	57.1	86.2	...	...	73.2	43.7	...	74.6	...
Namibia	2007	96.5	97.4	84.2	73.1	80.2	61.9	83.3	81.8	81.1	77.8	34.4	79.5	78.4	76.3
Namibia	2013	96.6	97.9	85.7	63.6	73.8	53.5	78.5	91.1	92.6	80.4	15.8	95.9	74.1	72.0
Niger	2006	90.8	93.4	84.2	6.9	40.9	24.7	60.1	...	...	51.8	5.0	40.5	50.5	3.1
Niger	2012	94.1	97.0	72.1	2.8	77.9	40.2	72.2	40.8	56.7	54.8	4.4	84.8	62.7	3.9
Nigeria	2003	32.4	74.9	60.6	27.9	33.2	18.2	86.7	...	...	65.9	11.7	...	83.9	46.7
Nigeria	2008	20.1	83.8	75.2	10.2	76.6	37.5	88.2	85.8	92.9	63.6	4.1	77.5	84.2	3.3
Nigeria	2010	20.2	81.6	...	17.1	61.5	...	81.0	75.9	89.2	69.2	1.6	81.2	78.0	2.2
Nigeria	2013	15.7	89.8	74.9	8.6	76.9	42.7	85.0	86.0	96.5	66.5	4.1	89.1	83.0	4.6
Nigeria	2015	17.1	92.6	84.3	14.3	75.8	48.1	87.4	88.8	93.0	66.7	3.5	91.2	82.0	9.1
Nigeria	2016	16.9	82.9	...	11.5	77.6	49.4	84.1	89.8	96.3	65.0	4.0	91.0	86.3	16.9
Rwanda	2000	77.1	81.5	55.9	8.1	41.3	28.9	64.4	...	...	...	10.2	...	42.6	1.6
Rwanda	2005	56.7	62.0	47.2	6.3	54.9	40.5	51.1	...	...	...	6.1	...	27.4	0.4
Rwanda	2008	60.3	64.4	52.2	4.3	44.5	35.0	50.2	...	...	...	5.8	47.2	30.0	0.0
Rwanda	2010	65.0	89.2	63.7	3.8	88.1	56.3	58.5	69.1	98.7	83.0	1.9	76.1	47.3	0.2
Rwanda	2013	73.4	97.6	72.4	0.0	85.8	53.6	62.4	77.2	99.7	85.8	0.7	84.6	61.9	0.9
Rwanda	2015	81.4	90.4	69.4	7.4	86.6	49.7	70.4	69.5	99.8	87.4	1.2	88.4	73.9	1.3
Senegal	2005	88.3	90.7	60.5	64.3	25.1	18.5	89.4	...	...	1.0	...	56.9	81.9	74.9
Senegal	2006	77.9	99.9	...	9.6	96.4	73.6	93.7	...	...	62.4	35.2	81.9	84.8	74.7
Senegal	2008	85.4	93.5	...	15.4	90.2	...	87.3	90.4	96.0	68.2	22.9	91.5	85.7	68.3
Senegal	2011	89.1	94.1	69.7	19.0	80.3	61.7	87.2	93.0	96.1	65.1	23.0	97.2	89.5	57.1
Senegal	2012	86.7	92.2	64.1	12.7	87.1	63.6	92.3	92.0	95.6	64.3	12.3	97.9	87.7	40.9
Senegal	2014	86.8	91.9	63.3	11.7	85.5	65.3	90.1	92.8	94.9	63.1	9.3	97.5	87.5	40.4
Senegal	2015	81.0	89.5	63.4	13.6	86.6	60.7	93.7	92.3	97.7	68.2	8.6	98.1	88.7	39.8
Senegal	2016	85.0	93.7	45.2	11.3	89.7	65.7	92.9	92.3	98.4	75.9	7.5	98.2	89.8	49.0
Sierra Leone	2008	43.6	81.9	60.5	0.3	75.1	26.1	75.2	61.3	89.4	68.4	2.1	67.4	31.0	0.1
Sierra Leone	2013	44.6	88.9	71.2	0.7	76.7	21.9	81.8	78.9	95.5	60.7	0.9	86.0	41.7	0.2
Sierra Leone	2016	37.9	91.4	81.1	1.2	76.8	28.1	78.5	86.7	93.6	62.5	0.5	90.4	43.9	0.7
Sierra Leone	2017	27.4	86.6	...	2.0	72.9	70.2	85.1	0.0	99.0	75.3	1.0	89.4	39.1	0.9
South Africa	2016	97.4	99.6	98.4	81.5	88.6	71.9	98.7	94.1	97.8	83.4	10.0	97.3	93.7	90.7
Eswatini	2006	86.6	93.3	71.1	49.2	60.4	42.6	97.4	87.8	99.0	78.2	27.7	78.1	65.2	69.5
Eswatini	2014	93.7	95.5	...	30.3	91.8	50.8	99.4	94.1	99.7	83.4	19.2	98.8	81.0	78.3

Tabel B.1: Lanjutan

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Tanzania	2004	67.5	85.0	80.4	10.1	22.8	14.5	70.7	51.5	86.7	0.8	31.7	..	39.0	0.9
Tanzania	2007	67.9	86.7	76.2	0.0	28.1	14.8	72.5	70.1	91.3	0.8	3.3	65.5	42.2	1.6
Tanzania	2010	58.5	82.3	60.0	1.4	48.6	29.5	76.7	48.6	93.0	0.8	5.5	80.9	46.9	4.7
Tanzania	2011	70.0	91.1	85.5	2.0	71.6	40.9	78.5	91.0	94.5	81.9	2.0	89.4	47.1	2.4
Tanzania	2015	61.3	92.3	82.5	1.8	91.0	54.8	81.0	91.8	94.7	80.2	1.2	94.0	55.6	7.6
Togo	2010	55.1	87.3	...	0.4	73.1	28.0	95.2	93.2	97.0	71.1	12.4	86.1	76.0	5.6
Togo	2013	49.5	91.4	89.1	0.1	78.5	28.0	96.6	91.2	98.8	68.0	6.2	92.6	84.1	12.4
Uganda	2001	62.1	89.1	77.4	10.9	19.7	12.1	74.9	64.8	93.9	..	18.6	..	47.6	6.2
Uganda	2006	56.8	90.3	62.6	8.3	64.0	21.0	72.2	58.9	82.4	56.9	3.7	54.5	41.0	1.0
Uganda	2009	50.2	93.9	...	9.5	72.5	..	79.9	78.8	93.4	63.3	6.7	80.6	46.4	2.5
Uganda	2011	67.6	94.0	79.6	9.1	78.2	25.9	79.4	73.6	91.4	62.1	4.8	86.9	54.8	3.8
Uganda	2014	62.4	90.6	84.1	2.8	70.0	31.6	67.4	67.7	91.9	63.8	2.3	89.3	50.9	1.5
Uganda	2016	67.6	91.5	78.1	2.6	70.0	31.8	72.1	73.9	90.3	67.8	3.0	91.2	57.7	2.1
Zambia	2002	82.7	90.4	84.4	46.9	49.0	37.3	80.1	..	...	..	11.3	..	50.2	...
Zambia	2007	76.3	82.2	79.7	28.4	72.0	44.2	84.4	91.0	92.3	63.7	6.4	68.1	52.4	41.5
Zambia	2013	73.3	89.3	83.2	24.9	73.3	39.3	85.7	92.4	92.7	69.5	3.1	91.4	62.9	25.1
Zimbabwe	2005	97.5	99.6	99.0	85.7	98.2	65.1	99.1	99.2	99.6	79.3	24.9	38.8	92.1	88.4
Zimbabwe	2010	76.7	95.6	93.1	76.4	93.8	49.9	97.0	97.8	98.8	76.8	12.1	92.1	84.7	74.3
Zimbabwe	2015	65.0	97.4	93.6	75.5	95.6	52.3	97.2	97.5	99.1	81.5	9.3	97.4	81.3	73.0
Algeria	2012	76.0	94.6	...	91.7	97.7	91.5	22.6	91.7	97.1	74.6	32.8	97.5	99.3	99.8
Egypt	2000	98.8	99.7	81.0	55.1	58.8	57.5	95.1	..	...	93.0	43.6	..	99.4	95.0
Egypt	2003	99.6	99.9	92.1	63.9	64.9	64.8	96.2	..	...	95.8	64.1	..	99.8	98.0
Egypt	2005	98.4	99.9	86.3	67.9	69.5	68.8	97.6	..	...	95.5	73.7	40.1	99.7	98.9
Egypt	2008	98.7	100.0	74.0	74.5	75.8	75.3	98.1	..	...	96.4	63.6	56.4	99.9	..
Egypt	2014	96.8	99.8	88.3	91.7	99.8	98.9	98.7	..	...	92.2	29.4	94.9	99.9	..
Morocco	2004	96.1	98.0	...	98.0	98.6	91.3	92.6	..	...	78.5	67.9	..	94.8	99.1
Sudan	2014	73.0	94.8	68.6	2.1	69.3	57.0	26.8	50.2	52.9	55.9	3.7	88.1	73.0	48.5
Afghanistan	2015	30.4	92.1	74.0	9.9	69.2	55.6	89.6	61.3	29.4	0.5	5.8	94.2	93.0	81.8
Bangladesh	2004	30.2	97.1	...	..	50.1	..	48.1	70.5	25.2	0.6	18.2	..	77.8	33.1
Bangladesh	2007	28.8	99.6	...	8.6	61.2	41.1	56.8	80.0	97.5	68.2	8.0	57.8	82.9	2.9
Bangladesh	2011	43.4	99.5	95.2	10.9	73.8	46.9	67.0	88.3	98.7	75.1	8.5	91.0	90.3	3.8
Bangladesh	2014	29.8	99.6	92.2	10.8	84.4	53.8	66.3	89.8	99.5	75.5	4.5	94.5	90.8	5.2
India	2006	69.5	96.1	85.0	28.1	77.1	54.7	80.0	89.3	92.3	53.0	28.0	38.0	93.1	59.3
India	2016	67.9	97.7	88.7	22.4	85.3	71.2	84.9	92.7	92.7	63.7	7.4	97.2	97.6	79.5
Iran	2006	84.0	92.1	...	98.4	98.4	..	32.5	..	...	90.6	71.6	..	97.7	91.0
Maldives	2009	56.9	99.3	34.1	99.2	99.9	97.5	98.8	98.4	99.6	61.3	48.2	99.6	99.9	99.3
Nepal	2001	52.9	87.0	86.7	57.5	65.4	38.2	58.0	..	...	..	20.7	..	86.4	25.5
Nepal	2006	47.7	90.4	92.3	20.4	77.0	42.5	68.1	79.1	93.9	67.9	31.2	23.6	89.8	43.4
Nepal	2012	53.0	94.9	94.7	26.5	87.8	58.0	76.6	82.6	96.6	81.2	28.6	92.8	96.9	64.1
Nepal	2016	50.3	95.9	94.6	11.2	86.3	64.9	50.2	58.5	53.4	83.1	11.0	95.8	94.6	44.1
Pakistan	2012	58.9	98.7	85.6	68.6	95.1	87.3	91.9	95.8	92.4	42.2	18.8	95.6	99.8	85.2
Kazakhstan	2015	87.4	90.7	...	65.3	99.9	97.6	99.7	93.0	99.5	92.9	79.9	98.4	100.0	99.8

Tabel B.1: Lanjutan

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Krygystan	2012	92.1	96.0	94.5	35.5	98.7	91.7	81.2	72.9	76.6	88.2	47.0	97.6	99.8	93.7
Kyrgyztan	2014	96.3	97.7	...	35.3	99.6	94.6	98.8	71.3	99.2	83.6	44.8	99.1	99.9	89.6
Nepal	2014	56.1	93.3	...	19.6	91.3	66.2	68.9	72.6	95.8	83.8	24.1	97.0	96.1	61.8
Pakistan	2014	27.3	87.8	...	40.3	81.6	72.7	82.1	88.3	81.3	54.0	10.9	87.2	90.0	69.5
Palestine	2014	57.0	98.4	...	62.0	99.7	98.5	61.3	99.3	99.9	73.7	36.9	48.7	99.9	1.1
Tajikistan	2005	89.8	93.1	...	55.3	97.5	89.4	86.8	74.4	91.1	82.5	54.7	26.3	94.0	89.3
Turkmenstein	2015	97.7	85.7	...	55.4	100.0	98.2	99.4	99.9	99.8	92.4	87.0	99.2	99.9	100.0
Uzbekistan	2006	98.4	99.8	...	45.9	99.9	97.7	99.0	99.0	98.8	89.5	62.3	22.0	99.7	99.1
Mongolia	2013	43.7	91.7	...	32.6	92.7	64.1	40.1	55.0	67.2	86.2	13.0	93.6	92.4	58.1
Cambodia	2000	35.0	67.0	24.3	35.8	35.8	30.5	35.5	84.4	...	...	18.7	...	62.0	16.0
Cambodia	2004	55.1	64.6	...	75.5	77.9	...				48.2	3.7	75.8	83.7	36.1
Indonesia	2002	29.3	82.8	72.8	...	83.4	...	86.0	77.3	96.9	...	26.4	...	98.0	19.8
Indonesia	2007	28.4	82.1	40.6	...	88.6	77.4	88.7	99.1	98.8	...	63.6	...	98.2	21.5
Indonesia	2012	18.4	63.0	39.5	...	90.7	...	91.2	97.6	98.3	84.7	12.4	93.6	99.3	73.6
Myanmar	2016	11.3	93.3	82.0	0.9	78.9	67.6	54.5	52.3	93.6	67.2	12.9	94.2	92.8	57.7
Philippines	2003	66.7	98.4	92.1	92.2	93.8	...	73.9	...	...	...	54.8	52.2	92.2	...
Philippines	2008	42.9	98.2	89.3	3.5	93.8	75.3	82.3	79.9	95.0	61.9	21.5	83.1	93.8	52.2
Philippines	2013	35.5	98.4	92.6	6.9	94.1	73.8	84.3	80.6	95.7	63.2	13.7	92.4	94.2	56.0
Thailand	2015	39.2	97.5	...	11.2	99.6	97.6	71.8	96.3	99.2	84.8	18.9	70.5	99.3	3.7
Timor Leste	2009	63.2	88.6	85.7	19.9	82.9	65.9	70.3	62.9	93.0	71.0	1.8	75.6	84.4	8.3
Timor Leste	2016	55.8	97.0	94.6	0.0	88.9	76.8	85.0	69.1	95.1	79.1	14.6	97.5	98.4	21.9
Vietnam	2002	76.4	96.9	25.8	82.8	86.5	...	94.8	...	97.5	71.8	58.5	...	99.4	...
Vietnam	2005	63.7	98.3	...	80.8	86.9	83.3	96.2	94.4	98.6	80.5	68.4	...	99.6	67.4
Vietnam	2013	53.4	98.2	98.1	2.1	92.0	89.4	99.1	95.4	99.4	84.5	37.7	97.1	99.9	78.3
Iraq	2018	53.8	76.6	...	0.0	99.6	96.4	98.1	63.5	98.7	99.9	61.0	...	...	...
Jordan	2002	87.8	99.8	...	0.9	91.8	...	100.0	...	...	0.7	59.2	35.9	1.0	99.8
Jordan	2007	71.6	99.7	...	64.6	99.8	96.8	99.9	99.4	...	0.7	38.7	93.5	99.0	99.9
Jordan	2009	61.2	99.8	...	67.4	100.0	98.6	100.0	99.8	...	0.7	25.0	98.7	99.5	99.8
Jordan	2012	52.3	99.8	...	68.7	99.9	99.7	100.0	99.7	99.0	0.8	20.2	99.2	99.5	100.0
Syria	2006	87.6	94.1	...	91.5	94.4	91.3	93.9	92.6	94.5	78.7	75.1	61.5	94.5	94.6
Turkey	2004	68.9	94.6	12.9	91.3	96.9	95.4	87.7	...	...	83.1	81.7	76.4	...	...
Yemen	2006	53.9	74.8	...	39.7	97.2	90.4	82.3	...	...	50.7	54.2	61.6	95.5	95.4
Yemen	2013	42.0	96.7	95.0	64.5	90.6	86.3	94.2	92.4	37.6	56.0	39.1	95.0	98.6	93.9
Armenia	2000	98.1	98.4	40.9	89.7	90.1	84.3	61.8	...	...	...	75.4	...	99.4	90.4
Armenia	2001	96.9	98.0	...	90.7	90.7	...		0.1		0.9	26.8	...	...	52.8
Armenia	2005	99.1	99.5	74.4	93.9	99.0	97.6	75.9	...	...	0.9	0.9	0.5	1.0	99.2
Armenia	2010	97.9	99.9	95.1	95.8	98.1	97.0	83.7	98.6	99.2	0.9	91.0	93.4	99.8	99.8
Armenia	2011	95.5	96.9	...	93.8	93.8	...		0.1		0.9	78.4	...	...	...
Armenia	2016	98.7	100.0	98.5	95.3	96.7	96.2	88.5	93.7	99.8	0.9	79.3	98.2	100.0	99.7
Azerbaijan	2006	77.6	97.4	76.4	71.0	92.2	82.0	21.2	93.3	98.8	75.6	75.7	67.1	99.7	98.9
Austria	2001	100	100	...	100	100	100	...	...	...	99.72	...	...	...	...
Italy	2001	93.9	99.2	...	...	99.0	...	...	...	...	...	85.8	...	...	...

Tabel B.1: Lanjutan

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Switzerland	2000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99.68	...	...	...	...
Moldova	2005	73.3	98.9	...	67.1	91.6	84.7	88.1	99.5	99.1	1.0	89.3	23.3	99.5	99.0
Ukraine	2007	82.0	99.6	...	69.9	99.2	95.8	71.5	96.8	97.8	98.0	70.4	82.4	99.9	97.9
Argentina	2001	96.6	99.1	...	46.8	99.1	...	95.8	93.5	95.5	85.3	58.3	27.6	...	96.4
Argentina	2011	86.3	98.3	...	...	...	...	97.55	...	...	91.46	55.49	88.64	88.64	...
Barbados	2012	99.1	99.9	30.2	7.0	98.51	95.1	85.14	90.93	98.23	97.83	...	94.85	99.09	99.81
Belize	2006	38.0	99.2	36.1	24.2	96.11	89.9	90.83	88.91	99.44	85.52	45.52	72.32	98.44	95.11
Belize	2011	26.3	99.5	99.8	22.7	98.34	92.9	70.71	90.12	98.48	89.19	29.83	94.35	96.94	96.51
Belize	2015	21.9	97.4	97.4	19.3	96.75	92.9	74.67	87.32	98.96	89.21	17.21	97.6	97.36	95.27
Bolivia	2000	91.7	95.9	26.5	68.8	78.37	...	99.16	...	...	62.97	...	...	...	...
Bolivia	2001	85.8	94.7	...	81.3	81.3	...					35.9	...	...	86.2
Bolivia	2004	89.6	93.2	43.7	56.9	56.9	17.0	85.3	61.9	40.1	62.2	29.5	35.8	93.8	90.1
Bolivia	2008	93.8	96.9	29.5	55.2	79.7	56.0	75.1	96.2	97.8	68.6	30.6	80.2	97.6	94.1
Colombia	2000	97.8	98.5	59.7	89.0	95.5	79.0	94.5	...	...	82.7	67.1	...	99.4	94.4
Colombia	2005	91.9	98.1	31.1	91.0	97.8	12.7	58.7	92.5	...	84.0	69.5	...	99.4	95.1
Colombia	2005	89.5	95.1	...	95.4	100.0	...	95.3	91.6		92.1	66.0	...	98.3	9.4
Colombia	2010	91.9	98.3	45.0	90.6	98.0	89.0	61.0	93.4	...	88.4	51.4	...	99.4	96.5
Colombia	2015	89.7	98.7	61.6	92.9	98.6	92.7	70.8	95.0	...	93.5	47.1	97.8	99.8	98.5
Costa Rica	2000	98.0	99.1	...	34.7	97.9	...	98.2			98.6	...	...	99.2	96.1
Costa Rica	2011	99.5	99.7	99.7	31.5	97.19	95.1	93.71	91.19	97.43	94.66	62.31	94.44	99.74	98.84
Costa Rica	2011	...	98.9	...	26.5	96.9	...	98.3	64.2	98.8	98.9	62.7	92.8	99.4	60.7
Cuba	2006	82.5	98.3	44.5	52.8	97.06	92.7	...	...	...	...	...	...	...	...
Cuba	2010	84.6	98.6	91.5	56.7	96.24	92.9	...	...	...	...	...	...	...	...
Cuba	2014	86.4	98.1	86.6	58.8	95.8	91.6	...	...	...	...	...	...	...	...
Dominican Republic	2000	34.6	98.0	98.0	74.6	81.0	68.8	97.9	92.5	99.5	81.0	...	...	99.4	1.6
Dominican Republic	2002	28.7	98.8	80.2	70.4	89.0	81.9	97.1	94.9	39.3	80.7	50.0	...	98.9	95.4
Dominican Republic	2007	18.5	99.4	98.0	78.3	96.1	86.8	98.3	95.7	47.0	86.2	36.0	78.2	98.9	95.0
Dominican Republic	2013	7.0	99.2	90.5	82.6	96.5	86.4	98.0	95.3	47.0	86.3	...	93.4	99.5	93.2
Dominican Republic	2014	6.4	98.4	44.8	27.8	94.7	84.1	98.5	92.5	99.5	88.9	32.9	95.0	99.0	95.4
El Salvador	2007	91.7	98.1	...	56.1	62.7	...	86.8	92.5	65.9	80.9	49.8	69.1	94.9	2.7
El Salvador	2014	68.1	99.2	85.5	53.8	99.02	89.8	91.51	91.26	99.59	82.52	37.73	96.82	98.22	91.28
Guatemala	2002	89.0	96.6	...	69.2	94.4	...	84.6	85.5	98.8	70.8	...	...	94.5	3.6
Guatemala	2014	49.5	99.4	80.4	73.4	89.9	78.9	86.3	84.8	99.6	0.7	20.2	93.6	96.5	62.2
Guyana	2000	72.8	84.6	9.4	71.4	72.34	...	...	...	...	76.77	...	...	...	54.88
Guyana	2005	45.8	99.4	99.2	8.7	94.8	82.6	76.2	83.0	98.9	79.5	59.1	71.2	81.4	68.1
Guyana	2006	55.1	98.0	90.7	8.7	99.4	89.4	88.21	94.19	99.52	79.71	57.02	71.48	81.76	98.12
Guyana	2009	30.4	98.6	71.6	11.7	96.1	90.7	73.2	95.7	96.0	85.4	78.2	90.8	90.2	75.9
Guyana	2014	34.0	99.0	48.9	7.4	97.84	91.0	87.71	53.95	99.7	86.45	72.58	95.95	93.75	80.73
Haiti	2000	82.3	90.4	82.9	8.8	76.0	33.4	87.6	...	...	...	11.6	...	82.3	4.6
Haiti	2003	27.5	88.8	...	10.6	84.4	...	86.8	90.9	98.4	69.1	15.6	...	57.9	0.1
Haiti	2006	51.9	93.1	81.8	3.0	51.0	27.8	89.6	92.4	99.1	61.0	10.3	37.5	69.2	5.7
Haiti	2012	36.3	94.2	85.7	2.0	82.3	38.8	86.5	85.6	93.6	59.3	3.7	92.8	72.7	6.1

Tabel B.1: Lanjutan

		Air Minum			Sanitasi			Rumah yang Tahan Lama				Layanan Dasar Lainnya			
Negara	Tahun	Sambungan air minum perpipaan	Air minum layak	Akses menuju layanan dasar air minum	Sambungan pengolahan limbah	Sanitasi layak	Akses menuju layanan dasar sanitasi	Material lantai yang tahan lama	Material dinding yang tahan lama	Material atap yang tahan lama	Luas yang memadai	Jaringan Telepon	Telepon Genggam	Jaringan listrik	Bahan bakar bersih untuk masak
Haiti	2017	25.3	98.4	90.8	0.6	79.5	47.0	90.2	91.5	96.6	66.2	1.2	92.3	76.4	8.7
Hondurus	2005	50.6	96.6	46.8	57.0	87.7	77.1	47.0	74.7	99.2	69.5	44.5	54.4	...	65.0
Hondurus	2012	39.7	98.4	50.5	60.3	91.3	80.1	50.3	76.4	99.0	75.8	35.0	93.2	...	68.1
Jamaica	2000	82.5	82.5	...	...	...	...	...	...	...	88.87	...	...	...	...
Jamaica	2005	85.5	95.9	40.2	10.7	97.21	83.2	...	...	...	...	...	...	...	...
Jamaica	2011	88.1	99.2	77.2	14.5	98.58	87.8	88.81	85.92	99.55	90.7	23.58	97.61	95.48	89.66
Nicaragua	2001	90.3	95.9	95.1	29.2	71.8	66.9	67.4	61.7	98.9	54.3	19.3	11.8	94.3	56.1
Panama	2013	98.1	99.9	88.6	45.4	95.98	88.3	95.76	99.86	99.98	86.14	39.12	95.81	98.5	...
Paraguay	2016	71.6	98.6	71.5	14.8	95.67	91.8	93.12	94.55	99.29	87.65	23.86	98.44	99.89	82.84
Peru	2000	88.0	94.3	93.3	75.8	83.7	76.5	72.3	66.4	55.1	74.0	37.7	...	93.1	59.7
Peru	2004	92.4	95.2	93.6	83.9	89.6	78.6	78.4	74.1	90.7	78.9	46.4	...	96.5	74.6
Peru	2007	81.6	90.6	...	...	89.5	...	49.2	84.9	...	0.9	39.2	54.3	89.4	73.5
Peru	2012	86.6	95.5	94.5	80.5	89.6	80.0	79.3	70.7	92.2	0.8	39.3	92.5	98.4	86.8
Saint Lucia	2012	75.6	99.8	86.2	11.0	93.15	89.09	86.04	68.09	99.41	95.96	46.45	94.31	96.39	96.85
Suriname	2000	91.2	98.2	2.5	84.3	99.08	79.7	99.28	...	...	...	...	...	...	...
Suriname	2006	81.5	98.2	12.6	0.6	97.95	89.86	82.96	97.92	99.28	88.55	46.47	81.49	95.22	89.74
Suriname	2010	81.3	99.1	49.1	1.7	97.79	87.67	85.85	98.21	99.55	90.1	42.66	96.51	97.28	93.67
Trinidad and Tobago	2000	83.0	92.7	9.4	31.3	71.04	62.92	...	96.78	...	89.02	...	...	...	...
Trinidad and Tobago	2006	83.4	95.7	35.1	19.2	98.67	92.07	80.18	92.07	99.48	94.44	67.52	91.22	97.47	99.6
Uruguay	2013	94.3	99.9	93.8	59.5	98.37	94.38	95.85	94.78	98.12	93.87	66.22	94.83	98.96	99.81
Venezuela	2000	87.3	93.0	92.1	69.2	87.86	90.87	99.96	96.51	99.53	80.18	...	...	...	97.15
Canada	2001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99.97	...	...	...	...
USA	2000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	95.32	...	97.64	...	...
USA	2005	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98.38	...	95.55	...	...
USA	2010	100	100	...	...	...	...	...	...	...	98.37	...	97.89	...	...
Fiji	2007	97.2	98.7	...	0	99.6	...	0	73.4	0	87.6	52.5	81.9	93.3	0.0

Catatan:
a Akses menuju layanan air minum dasar (sumber air layak adalah yang dapat ditempuh tidak lebih dari 30 menit untuk bolak balik)
b Akses menuju layanan sanitasi dasar (fasilitas layak yang tidak digunakan bersama)

Sumber: United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), Global Urban Indicators Database 2020

Tabel B.3: Perkiraan Permukiman Kumuh Regional

	Proporsi daerah kumuh										Proporsi daerah kumuh (Ribu)[a]									
	1990	1995	2000	2005	2007	2010	2012	2014	2016	2018	1990	1995	2000	2005	2007	2010	2012	2014	2016	2018
Dunia	43.3	40.4	28.0	25.9	25.2	24.4	24.1	23	23.5	24.0	723,023	779,678	817,221	853,740	945,943	925,965	940,120	928,063	1,003,083	1,033,545
Australia dan Selandia Baru								0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	7	7	8
Eropa dan Amerika Utara			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	764	787	815	820	824	833	842	1,022
Afrika Utara dan Asia Barat	28.4	25.0	23.0	19.8	19.6	19.4	19.0	22	22.6	25.6	44,194	44,701	46,335	45,217	51,275	52,061	52,354	63,814	71,720	83,052
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia	33.7	31.5	29.0	25.7	25.0	23.9	23.5	21	20.8	20.9	106,118	112,253	115,148	111,311	117,263	113,942	113,790	104,652	112,602	114,207
Asia Timur dan Asia Tenggara	46.6	42.7	38.0	33.8	31.8	30.0	29.6	28	28.0	27.2	284,293	307,593	317,123	332,067	360,326	348,756	352,708	349,409	364,684	369,967
Asia Tengah dan Asia Selatan	57.1	51.7	46.0	40.3	38.3	35.3	35.0	32	32.3	31.2	193,216	201,838	205,661	206,888	224,040	212,024	214,952	206,704	223,643	226,780
Oseania (kecuali Australia dan Selandia Baru)	24.1	24.1	24.0	24.1	24.2	24.1	24.1	24	23.6	23.7	386	430	468	514	565	572	583	602	648	670
Afrika Sub-Sahara	70.0	67.6	65.0	63.2	62.7	62.1	61.7	56	55.6	56.2	94,816	112,864	131,716	156,950	191,653	197,782	204,901	202,042	228,936	237,840

Catatan

a Populasi daerah kumuh dihitung berdasarkan *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*

Sumber: United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), Global Urban Indicators Database 2020

Tabel B.4: Penduduk Perkotaan di Permukiman Kumuh di Beberapa Negara Terpilih, 1990-2018

Negara	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh								Populasi permukiman kumuh perkotaan (Ribu)[a]							
	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2016	2018	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2016	2018
Sub Saharan Africa																
Angola	...	...	86.5	86.5	65.8	55.5	48.4	47.0			7,123	9,471	9,197	9,372	8,947	9,476
Benin	79.3	76.8	74.3	71.8	69.8	61.5	59.6	59.2	1,361	1,667	1,956	2,324	2,767	2,857	2,993	3,216
Burkina	78.8	72.4	65.9	59.5	...	65.8	58.5	56.6	960	1,105	1,366	1,720		3,117	3,071	3,283
Burundi	...	...	...	64.3	...	57.9	48.6	50.5				447		674	634	738
Cameroon	50.8	49.6	48.4	47.4	46.1	37.8	27.1	24.6	2,362	2,843	3,364	4,008	4,751	4,533	3,499	3,422
Central African Republic	87.5	89.7	91.9	94.1	95.9	93.3	97.5	98.5	947	1,119	1,299	1,479	1,660	1,683	1,819	1,930
Chad	98.9	96.4	93.9	91.3	89.3	88.2	87.0	86.6	1,227	1,449	1,695	2,005	2,334	2,678	2,851	3,065
Comoros	65.4	65.4	65.4	68.9	...	69.6	69.6	69.6	75	88	100	118		150	159	168
Congo	...	...	...	53.4	49.9	46.9	48.0	47.3				1,211	1,385	1,487	1,624	1,708
Cote d'Ivoire	53.4	54.3	55.3	56.2	57.0	56.0	59.2	61.1	2,575	3,254	3,979	4,662	5,501	6,188	6,995	7,733
Djibout	...	...	...	...	...	65.6	65.6	65.6						463	480	496
Democratic Republic of Congo	...	...	...	76.4	61.7	74.8	79.1	80.4				15,678	15,930	23,260	26,988	30,018
Equatorial Guinea	...	...	...	66.3	...	66.2	66.1	66.1				290		524	575	626
Ethiopia	95.5	95.5	88.6	81.8	76.4	73.9	65.9	66.2	5,794	7,565	8,693	9,855	11,597	13,670	13,413	14,775
Gabon	...	...	...	38.7	...	37.0	36.6	36.5				448		608	641	674
Gambia	...	...	...	45.4	...	34.8	26.0	24.3				341		391	318	322
Ghana	65.5	58.8	52.1	45.4	40.1	37.9	30.4	29.2	3,490	3,955	4,335	4,630	4,983	5,457	4,596	4,826
Guinea	80.4	68.8	57.3	45.7	...	43.3	49.2	50.7	1,361	1,597	1,557	1,427		1,781	2,162	2,392
Guinea Bissau	...	...	...	83.1	...	82.3	78.9	78.2				438		592	609	647
Kenya	54.9	54.8	54.8	54.8	54.7	56.0	46.5	46.1	2,151	2,739	3,429	4,279	5,335	6,500	5,887	6,354
Lesotho	...	...	...	35.1	53.7	50.8	59.7	61.9				152	272	289	359	394
Liberia	...	...	...	...	68.3	65.7	70.3	66.6					1,289	1,425	1,630	1,654
Madagascar	93.0	88.6	84.1	80.6	76.2	77.2	67.7	73.3	2,541	3,078	3,598	4,259	5,148	6,289	6,042	7,164
Malawi	66.4	66.4	66.4	66.4	68.9	66.7	67.0	66.9	724	873	1,104	1,303	1,626	1,837	1,999	2,172
Mali	94.2	84.8	75.4	65.9	65.9	56.3	47.0	46.0	1,860	2,078	2,344	2,706	3,578	3,743	3,451	3,720
Mauritania	...	...	...	...	...	79.9	79.5	79.5						1,630	1,777	1,936
Mozambique	75.6	76.9	78.2	79.5	80.5	80.3	76.7	76.9	2,505	3,333	4,112	4,990	6,208	7,403	7,719	8,444
Namibia	34.4	34.1	33.9	33.9	33.5	39.4	42.3	42.8	134	169	209	252	303	428	503	554
Niger	83.6	83.1	82.6	82.1	81.7	70.1	61.8	61.1	1,030	1,242	1,518	1,816	2,176	2,176	2,081	2,238
Nigeria	77.3	73.5	69.6	65.8	62.7	50.2	53.9	53.3	21,859	25,554	29,675	35,706	43,227	41,618	48,788	52,605
Rwanda	96.0	87.9	79.7	71.6	65.1	53.2	45.5	44.1	376	513	955	1,089	1,129	1,024	925	949
Sao Tome & principe	...	...	...	...	...	86.6	86.6	86.6						115	123	132
Senegal	70.6	59.8	48.9	43.3	38.8	39.4	29.5	28.4	2,075	2,071	1,950	2,033	2,195	2,604	2,102	2,185
Sierra Leone	...	...	...	97.0	...	75.6	59.8	59.6				2,026		2,164	1,824	1,936
Somalia				73.5	73.6	73.6	73.6	73.6				2,778	3,488	4,245	4,618	5,025
South Africa	46.2	39.7	33.2	28.7	23.0	23.0	26.3	26.4	9,030	9,104	8,637	8,342	7,382	8,067	9,639	10,059
Sudan South	...	...	...	...	...	95.6	97.3	97.3						2,053	2,272	2,467
Swaziland	...	...	...	...	...	32.7	32.7	32.7						98	103	108
Tanzania	77.4	73.7	70.1	66.4	63.5	50.7	41.7	40.2	3,720	4,537	5,343	6,504	8,230	8,184	7,484	8,021
Togo	...	...	...	62.1	...	51.2	53.0	53.3				1,242		1,465	1,639	1,776
Uganda	75.0	75.0	75.0	66.7	60.1	53.6	47.5	46.0	1,449	1,980	2,666	3,230	3,949	4,476	4,460	4,838
Zambia	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	54.0	53.3	53.3	1,804	1,936	2,096	2,545	3,124	3,491	4,458	4,853
Zimbabwe	4.0	3.7	3.3	17.9	24.1	25.1	28.3	29.0	118	133	137	790	1,129	1,257	1,475	1,579
Western Asia & Northern Africa																
Armenia	...	...	...	...	...	14.4	9.3	8.2						264	172	152
Egypt	50.2	39.2	28.1	17.1	13.1	10.6	4.1	3.1	12,525	10,680	8,415	5,649	4,740	4,169	1,572	1,296
Georgia							34.1	34.1							774	781

Tabel B.4: Lanjutan

Negara	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh								Populasi permukiman kumuh perkotaan (Ribu)[a]							
	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2016	2018	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2016	2018
Iraq	16.9	16.9	16.9	52.8	52.8	47.2	46.4	46.4	2,059	2,350	2,730	9,806	11,224	11,526	12,109	12,865
Jordan	...	...	...	15.8	19.6	12.9	21.1	20.7				718	1,212	1,023	1,807	1,862
Morocco	37.4	35.2	24.2	13.1	13.1	13.1	10.1	9.0	4,503	4,927	3,716	2,206	2,463	2,709	2,185	2,042
Palestine							39.3	20.5	-	-	-	-	-	-	1,424	787
Sudan	...	...	...	...	...	91.6	93.6	93.7						11,646	12,644	13,470
Syria	...	...	...	10.5	...	19.3	15.3	13.8				1,033		1,909	1,494	1,369
Tunisia	...	...	...	...	...	8.0	8.0	8.0						604	624	643
Turkey	...	...	...	26.0	27.0	25.0	8.1	7.0				11,977	13,831	14,073	4,769	4,320
Yemen	...	...	...	67.2	...	60.8	56.4	56.0				4,002		5,452	5,511	5,937
Eastern Asia and South-Eastern Asia																
Cambodia	...	...	...	78.9	...	55.1	47.7	45.6				2,008		1,833	1,697	1,733
Indonesia	50.8	42.6	34.4	26.3	23.0	21.8	30.9	30.4	28,188	30,281	30,597	27,347	27,822	29,275	43,593	44,859
Lao PDR	...	...	...	79.3	...	31.4	20.8	18.5				1,240		671	473	451
Mongolia	68.5	66.7	64.9	57.9	...	42.7	38.3	37.1	853	871	889	914		850	792	792
Myanmar	...	...	...	45.6	...	41.0	56.6	57.1				6,178		6,312	9,012	9,404
Philippines	54.3	50.8	47.2	43.7	40.9	38.3	43.5	44.3	15,812	16,513	16,998	17,233	17,363	17,672	20,884	22,144
Thailand	...	...	...	26.0	27.0	25.0	24.6	24.5				6,364	7,958	8,029	8,222	8,471
Timor Leste							34.0	30.1							129	122
Viet Nam	60.5	54.6	48.8	41.3	35.2	27.2	14.4	13.5	8,360	9,107	9,544	9,499	9,473	8,336	4,683	4,670
Central Asia and Southern Asia																
Afghanstan	...	...	...	...	...	62.7	71.3	73.5						5,050	6,180	6,813
Bangladesh	87.3	84.7	77.8	70.8	61.6	55.1	49.4	47.6	18,356	21,811	24,134	27,225	28,550	29,454	28,254	29,025
India	54.9	48.2	41.5	34.8	29.4	24.0	35.4	34.8	122,141	123,237	120,910	116,324	111,937	100,560	155,434	160,330
Iran							23.9	23.9							14,175	14,681
Kazakhstan							16.1	10.5							1,658	1,112
Kyrgystan							9.7	8.5							208	189
Maldives							32.1	32.1	-	-	-	-	-	-	54	57
Nepal	70.6	67.3	64.0	60.7	58.1	54.3	51.0	49.3	1,172	1,567	2,035	2,358	2,631	2,796	2,799	2,882
Pakistan	51.0	49.8	48.7	47.5	46.6	45.5	40.8	38.0	16,792	19,487	22,235	24,843	27,796	30,240	28,531	27,954
Tajikistan							26.0	23.6							611	583
Uzbekistan							52.2	58.5							8,314	9,556
Latin America and The Carbbean																
Argentina	30.5	31.7	32.9	26.2	20.8	16.7	14.7	14.7	8,683	9,780	10,868	9,234	7,802	6,559	5,891	6,022
Belize	...	...	...	...	...	10.8	5.1	3.5						17	8	6
Bolivia	62.2	58.2	54.3	50.4	47.3	43.5	49.5	49.9	2,359	2,607	2,799	2,951	3,114	3,126	3,708	3,882
Brazil	35.7	34.1	31.5	29.0	26.9	22.3	16.3	15.2	40,468	42,949	44,889	44,878	44,711	38,933	29,082	27,826
Colombia	31.2	26.8	22.3	17.9	14.3	13.1	28.1	28.5	7,433	7,197	6,675	5,890	5,137	4,972	10,941	11,383
Costa Rica	...	...	...	10.9	...	5.5	3.9	3.6				304		199	148	141
Cuba							6.6	6.6	-	-	-	-	-	-	583	584
Dominican Republic	27.9	24.4	21.0	17.6	14.8	12.1	14.8	14.3	1,106	1,111	1,110	1,093	1,081	978	1,249	1,260
Ecuador	...	...	...	21.5	...	36.0	20.3	17.1				1,822		3,622	2,117	1,839
El Salvador	...	...	...	28.9	...	28.9	22.4	19.8				1,074		1,250	1,002	915
Guatemala	58.6	53.3	48.1	42.9	38.7	34.5	31.0	31.0	2,278	2,424	2,541	2,635	2,741	2,727	2,587	2,729
Guyana	...	...	...	33.7	33.2	33.1	32.6	32.5				70	66	67	67	68
Haiti	93.4	93.4	93.4	70.1	70.1	74.4	65.9	77.8	1,891	2,380	2,843	2,769	3,330	4,047	3,819	4,777
Honduras	...	...	...	34.9	...	27.5	40.4	40.5				1,250		1,321	2,054	2,179
Jamaica	...	...	...	60.5	...	60.5	59.8	59.6				877		945	950	962
Mexico	23.1	21.5	19.9	14.4	...	11.1	16.0	15.1	14,082	14,835	15,125	11,919		10,892	16,281	15,803

Tabel B.3: Lanjutan

Negara	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh								Populasi permukiman kumuh perkotaan (Ribu)[a]							
	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2016	2018	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2016	2018
Nicaragua	89.1	74.5	60.0	45.5	...	45.5	43.2	41.8	1,960	1,872	1,665	1,368		1,579	1,542	1,537
Panama	...	...	...	23.0	...	25.8	22.1	21.3				488		669	596	601
Peru	66.4	56.3	46.2	36.1	...	34.2	33.8	33.1	9,987	9,604	8,746	7,479		8,175	8,320	8,396
Saint Lucia	...	...	...	11.9	...	11.9	11.9	11.9				4		4	4	4
Suriname	...	...	...	3.9	...	7.3	5.9	5.5				13		26	22	21
Trinidad & Tobago	...	...	...	24.7	...	24.7	5.4	1.9				176		179	39	14
Venezuela	...	...	...	32.0	...	32.0	34.9	35.8				7,538		8,670	9,703	10,218
Northern America and Europe																
Albania							13.2	13.2							226	234
Austria							6.1	6.1							308	311
Belarus							45.2	45.2							3,328	3,358
Bosnia and herzegovina							7.6	8.3							128	140
Greece							3.0	3.0							263	264
Hungary							13.6	13.6							939	940
Ireland							1.1	1.1							33	33
Italy							7.2	7.2							2,989	3,007
Macedonia							8.3	6.4							99	77
Moldova							63.5	70.4							1,095	1,213
Montenegro							27.1	27.1							113	114
Portugal							3.6	3.6							239	242
Romania							14.4	14.4							1,535	1,523
Serbia							3.6	3.6							177	177
Slovenia							3.7	3.7							42	42
Spain							7.8	7.8							2,886	2,907
Ukraine							19.0	18.0							5,839	5,497
Oceania																
Fiji							10.8	10.8							5	55

Catatan:
a Populasi permukiman kumuh dihitung berdasarkan *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*

Sumber: United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), Global Urban Indicators Database 2020

Tabel C.1: Indikator Urbanisasi Spasial di Beberapa Negara Terpilih, 2000-2015

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Australia	HobartCity	0.43	1.50	0.287	574	489	6.69
Australia	Cessnock	0.55	1.52	0.363	736	637	8.61
Australia	Cairns	0.66	1.52	0.435	491	432	10.40
Australia	Sydney	1.19	1.61	0.737	276	260	18.11
Australia	Shepparton	1.28	1.57	0.817	691	662	21.19
Australia	Melbourne	1.24	1.51	0.821	441	424	20.51
Australia	Darwin	1.28	1.53	0.836	523	503	21.16
Australia	Launceston	1.36	1.51	0.901	589	576	22.71
Australia	Gold Coast	1.48	1.52	0.974	471	468	24.87
Australia	Canberra	1.60	1.50	1.064	433	439	27.11
Australia	Bunbury	1.54	1.43	1.074	709	721	26.00
Australia	Wollogong	1.80	1.50	1.196	482	503	30.94
Australia	Muswellbrook	1.72	1.28	1.342	605	646	29.42
Australia	Adeliade	2.11	1.51	1.400	405	444	37.31
Australia	Geelong	2.25	1.52	1.482	453	506	40.16
Australia	Kingaroy	2.56	1.56	1.646	831	966	46.90
Australia	Brisbane	2.59	1.51	1.714	273	321	47.41
Australia	Alice Spring	2.68	1.47	1.825	433	519	49.45
Australia	Perth	3.06	1.52	2.017	357	450	58.27
New Zealand	Auckland	0.84	1.50	0.559	301	272	13.40
New Zealand	Wellington	0.75	1.21	0.619	228	213	11.94
New Zealand	Palmerston	0.59	0.78	0.751	396	384	9.20
New Zealand	LowerHutt	0.50	0.42	1.214	352	356	7.86
New Zealand	Tauranga	2.35	1.77	1.328	308	336	42.23
New Zealand	Napier	1.27	0.82	1.552	397	425	21.07
New Zealand	Hamilton	3.28	1.64	2.002	341	436	63.51
New Zealand	Dunedin	1.49	0.54	2.780	375	433	25.04
New Zealand	Christ Church	1.83	0.06	30.474	315	411	31.66
Afghanistan	Kabul	2.85	4.15	0.688	62	51	49.11
Afghanistan	Herat	5.40	4.82	1.120	52	56	124.73
Afghanistan	Lashkar Bah	5.24	4.38	1.195	72	81	119.31
Afghanistan	Charikar	2.83	2.34	1.208	28	30	52.80
Afghanistan	Jalalabad	5.58	3.76	1.486	69	91	131.08
Afghanistan	Pol-e Khomri	2.94	1.64	1.799	46	57	55.50
Afghanistan	Kandahar	6.22	3.42	1.818	65	100	154.27
Afghanistan	Farah	8.46	4.42	1.915	69	127	255.99
Afghanistan	Mazar-e Sharif	5.12	2.15	2.381	95	148	115.67
Afghanistan	Khanabad	7.61	..	..	11	44	213.31
Bangladesh	Dhaka	3.47	3.28	1.060	19	19	68.37
Bangladesh	Rajshahi	3.78	1.42	2.668	53	67	45.90
Bangladesh	Saidpur	5.62	1.24	4.516	26	45	107.65
India	Parbhani	0.73	1.71	0.427	50	44	9.15
India	Sitapur	1.20	1.72	0.694	18	16	18.23
India	Ahmedabad	1.87	1.80	1.035	33	33	27.46
India	Jaipur	2.67	2.02	1.323	49	54	45.39
India	Mumbai	1.69	1.24	1.362	24	25	24.49
India	Vijayawada	0.57	0.40	1.430	37	38	8.37
India	Jalna	1.81	1.17	1.549	35	39	28.87
India	Hyderabad	2.82	1.48	1.901	47	58	52.69

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
India	Pune	6.86	3.52	1.948	37	52	98.49
India	Kanpur	1.26	0.55	2.289	36	40	20.76
India	Singrauli	5.46	2.13	2.568	37	52	72.60
India	Coimbatore	2.23	0.78	2.850	53	65	36.70
India	Malegaon	4.85	1.27	3.817	11	18	97.32
India	Kolkata	3.77	0.74	5.082	27	38	51.35
India	Belgaum	5.23	0.77	6.796	19	35	108.02
India	Hindupur	5.78	0.28	20.382	14	31	124.56
India	Kozhikode	6.41	0.17	38.693	32	72	130.10
Iran	Eshfana	0.76	2.43	0.314	93	73	12.12
Iran	Gorgan	1.31	3.90	0.337	122	85	20.18
Iran	Bandar Abbas	1.28	3.14	0.408	108	82	21.16
Iran	Bojnurd	2.16	2.68	0.805	56	52	38.18
Iran	Shadegan	1.96	2.34	0.838	81	77	34.18
Iran	Qom	4.54	4.21	1.077	82	84	50.44
Iran	Ahvaz	1.91	1.62	1.180	99	103	30.64
Iran	Kashan	2.57	2.00	1.283	162	177	47.03
Iran	Piranshahr	3.82	2.30	1.661	69	87	77.24
Iran	Sanandaj	4.05	2.36	1.718	62	80	83.51
Iran	Kashmar	2.55	1.46	1.741	76	89	46.51
Iran	Babol	3.29	1.46	2.246	125	165	63.76
Iran	Salmas	2.24	0.95	2.353	70	85	39.97
Iran	Aradabil	2.70	1.07	2.512	55	70	49.88
Iran	Arak	1.76	0.20	8.692	59	75	30.28
Iran	Sari	1.74	0.11	16.270	109	139	29.88
Iran	Tehran	1.97	..	..	60	65	21.80
Iran	Dehdasht	4.02	..	..	22	73	82.81
Kazakhstan	Shymkent	3.33	4.22	0.791	227	202	54.26
Kazakhstan	Astana (Nur-Sultan)	4.46	5.08	0.878	122	112	95.35
Kazakhstan	Aktobe	3.18	3.29	0.967	151	149	61.11
Kazakhstan	Almaty	3.22	2.46	1.308	119	133	61.98
Kazakhstan	Oskemen	1.79	..	..	120	166	30.75
Kazakhstan	Pavlodar	1.90	..	..	113	140	33.05
Kazakhstan	Qaragandy	1.48	..	..	151	175	24.87
Kazakhstan	Semei	3.33	..	..	151	215	64.71
Kazakhstan	Taraz	3.38	..	..	142	209	65.92
Nepal	Pokhara	1.95	..	..	50	72	28.94
Pakistan	Sialkot	1.06	1.96	0.542	53	47	15.99
Pakistan	Mardan	1.30	2.08	0.625	57	51	21.52
Pakistan	Hyderabad	1.34	1.91	0.698	37	34	22.19
Pakistan	Karachi	1.72	2.23	0.772	31	29	25.09
Pakistan	Gujranwala	1.66	2.06	0.807	52	49	28.35
Pakistan	Peshawar	1.91	1.78	1.075	96	97	33.20
Pakistan	Daska	1.87	1.67	1.123	36	37	32.37
Pakistan	Shikarpur	1.26	0.84	1.507	34	35	20.79
Pakistan	Lahore	3.25	1.87	1.733	28	34	52.55
Pakistan	Islamadad	4.77	2.56	1.866	59	83	104.67

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Pakistan	Multan	3.51	1.77	1.981	54	70	69.36
Pakistan	Faisalabad	3.98	1.81	2.196	35	49	81.74
Pakistan	Quetta	4.37	0.67	6.482	78	136	92.69
Pakistan	Khanpur	2.72	0.15	17.584	82	120	50.43
Pakistan	Sargodha	1.90	..	..	51	67	33.08
Pakistan	Jhang	2.27	..	..	70	100	40.47
Pakistan	Layyah	2.57	..	..	121	234	46.96
Pakistan	Turbat	2.26	..	..	30	40	40.46
Pakistan	Nawabshah	2.81	..	..	91	123	52.52
Sri-Lanka	Chilaw, Ferry Street	0.16	0.24	0.686	277	274	2.49
Sri-Lanka	Hambantota	1.28	1.61	0.794	304	290	21.14
Sri-Lanka	Anuradhapura	0.75	0.48	1.564	223	232	11.99
Sri-Lanka	Embilipitiya	2.57	0.95	2.718	210	268	47.07
Sri-Lanka	Jaffna	1.42	0.41	3.505	203	237	23.74
Sri-Lanka	Haputale	2.10	..	..	167	259	36.95
Sri-Lanka	Batticaloa	2.49	..	..	165	242	45.27
Uzbekistan	Nukus	2.43	3.32	0.732	133	116	43.98
Uzbekistan	Kokand	1.06	1.38	0.767	239	228	17.25
Uzbekistan	Qarshi	1.07	1.28	0.834	174	169	17.40
Uzbekistan	Tashkent	0.75	0.55	1.355	179	184	11.01
Uzbekistan	Denau	2.29	1.47	1.556	135	152	40.94
Uzbekistan	Andijan	2.22	1.40	1.586	206	233	39.41
Uzbekistan	Bukhara	2.35	1.31	1.791	313	359	35.74
Uzbekistan	Navoi_Karmana	4.35	0.85	5.117	205	346	92.11
Uzbekistan	Bekobod	2.57	..	..	279	376	47.03
China	Beijing, Beijing	3.11	4.01	0.776	130	117	45.23
China	Shanghai, Shanghai	2.63	3.22	0.817	136	124	48.28
China	Shenzhen, Guangdong	4.06	4.23	0.959	68	66	69.46
China	Zhuji, Zhejiang	1.62	1.29	1.257	361	377	23.39
China	Haikou, Hainan	5.42	3.41	1.592	51	64	91.73
China	Kaiping, Guangdong	1.36	0.85	1.597	78	84	20.93
China	Hong Kong, Hong Kong	0.79	0.49	1.617	21	21	10.81
China	Zhengzhou, Henan	4.18	2.35	1.781	152	199	87.10
China	Guangzhou, Guangdong	4.32	2.30	1.881	95	126	83.15
China	Jinan, Shandong	2.80	1.33	2.101	106	128	43.93
China	Tianjin, Tianjin	6.46	2.89	2.236	90	143	131.68
China	Wuhan, Hubei	4.19	1.65	2.539	85	119	72.46
China	Changzhou, Jingsu	4.83	1.86	2.601	110	167	96.56
China	Chengdu, Sichuan	9.13	3.43	2.663	67	112	127.35
China	Hangzhou, Zhejiang	5.90	2.19	2.691	109	177	115.30
China	Yucheng, Zhejiang	2.60	0.94	2.769	148	187	43.89
China	Taipei, Taiwan	3.13	0.95	3.288	58	77	50.17
China	Pingxiang, Jiangxi	1.84	0.50	3.644	161	194	29.38
China	Qingdao, Shandong	7.44	1.49	5.005	81	176	163.15
China	Yanggu, Shandong	3.66	0.58	6.275	167	257	67.01
China	Yulin, Guangxi	5.50	0.67	8.168	105	162	64.02
China	Tangshan, Hebei	4.17	0.50	8.402	140	226	71.92

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
China	Changzhi, Hunan	1.77	0.08	20.948	129	164	28.15
China	Anqing, Anhui	7.16	0.19	37.855	61	152	153.66
China	Xingping, Shaanxi	5.01	0.05	101.751	69	132	91.88
China	Yiyang, Hunan	4.13	...	..	87	166	78.23
China	Chengguan, Guizhou	5.19	...	..	30	70	96.37
China	Guixi, Chongqing	7.08	...	..	32	99	189.04
China	Xucheng, Jiangsu	10.20	...	..	69	266	276.56
China	Suining, Sichuan	5.73	...	..	24	56	110.56
China	Zunyi, Guizhou	6.85	...	..	32	84	127.39
China	Bicheng, Chongqing	11.19	...	..	34	165	328.21
China	Gaoyou, Jiangsu	5.54	...	..	90	228	142.47
China	Leshan, Sichuan	4.15	...	..	101	188	71.43
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Sinuiju	0.64	1.12	0.568	34	32	10.03
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Kanggye	1.76	1.36	1.294	28	30	30.15
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Chongjin	1.24	0.47	2.646	36	40	20.53
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Songnim	2.75	0.91	3.027	30	39	50.98
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Ranson	2.79	0.30	9.218	41	59	51.93
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Hamhung	2.57	0.15	16.852	26	38	47.07
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Pyongyang	0.08	...	..	47	50	1.07
Indonesia	Kendari	3.32	3.48	0.953	124	121	64.48
Indonesia	Jambi	2.95	2.53	1.166	111	118	55.58
Indonesia	Parepare	2.02	1.25	1.608	52	58	32.62
Indonesia	makassar	2.82	1.60	1.767	66	79	52.75
Indonesia	Bandung	3.80	1.50	2.533	48	68	76.69
Indonesia	Medan	3.57	1.16	3.069	76	101	53.57
Indonesia	Purwakarta	4.02	1.25	3.228	62	94	82.82
Indonesia	Garut Kota	2.97	0.75	3.941	26	36	56.20
Indonesia	Subang	5.06	1.20	4.207	49	87	113.75
Indonesia	Surabaya	3.20	0.75	4.249	59	85	61.59
Indonesia	Semarang	3.19	0.71	4.493	67	97	61.28
Indonesia	Bengkulu	5.10	0.66	7.764	66	129	115.05
Indonesia	BandaAceh	2.61	0.13	20.034	148	215	47.99
Indonesia	Cirebon	6.19	0.18	34.894	26	60	138.03
Indonesia	Pekalongan	3.99	...	..	59	112	82.06
Indonesia	Palembang	1.96	...	..	85	113	25.54
Indonesia	Pati	2.78	...	..	69	124	51.75
Indonesia	Pematangtiantar	1.16	...	..	49	67	16.20

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Indonesia	Pemalang	2.84	...	..	50	89	53.19
Indonesia	Jombang	4.14	...	..	68	124	85.96
Japan	Tokyo	1.73	0.66	2.628	112	130	27.41
Japan	Osaka	0.54	0.09	5.890	108	114	7.28
Japan	Fukuoka	0.82	0.03	25.275	146	161	11.23
Japan	Okayama	0.57	...	..	328	366	8.28
Japan	Yamaguchi	0.32	...	..	406	473	4.97
Malaysia	Ipoh	1.81	1.61	1.126	315	323	24.29
Malaysia	Rawang	2.22	1.80	1.234	234	247	33.44
Mongolia	Ulaanbaatar	2.99	4.85	0.618	150	118	47.58
Myanmar	Lashio	0.44	3.26	0.134	153	100	6.76
Myanmar	Mandalay	0.21	1.03	0.203	76	67	3.20
Myanmar	Myitkyina	0.94	3.55	0.265	240	163	15.14
Myanmar	Tachiliek	0.66	2.15	0.306	179	143	10.34
Myanmar	Yangon	1.58	3.85	0.410	88	62	26.69
Myanmar	Loikaw	0.74	1.48	0.501	172	154	11.80
Myanmar	Taunggyi	1.38	2.34	0.589	114	98	22.91
Myanmar	Pathein	0.67	1.00	0.666	95	91	10.56
Myanmar	Myeik	3.79	2.67	1.419	35	40	51.66
Myanmar	Mawlamyine	0.59	...	..	74	81	9.28
Myanmar	Myede	1.63	...	..	38	49	27.69
Philippines	Manila	0.99	1.77	0.559	42	38	14.85
Philippines	Bacolod	0.71	0.97	0.734	89	86	9.71
Philippines	Cebu City	3.16	3.77	0.839	61	56	55.71
Republic of Korea (South Korea)	Cheonan	2.90	3.07	0.946	185	180	50.14
Republic of Korea (South Korea)	Seoul	2.66	1.11	2.394	69	86	45.07
Republic of Korea (South Korea)	Gwangju	3.13	0.84	3.744	75	106	59.86
Republic of Korea (South Korea)	Jinju	4.75	...	..	172	363	94.41
Republic of Korea (South Korea)	Busan	1.83	...	..	67	88	26.78
Singapore	Singapore	1.18	3.24	0.363	62	50	13.82
Thailand	Bangkok	3.33	3.35	0.994	111	111	59.34
Thailand	ChiangMai	2.86	1.14	2.509	175	226	53.49
Thailand	Chaam	7.04	...	..	221	641	187.68
Thailand	Khon Kaen	3.31	...	..	145	261	64.21
Thailand	ChiangRai	3.30	...	..	132	225	64.05
Thailand	Chumpon	5.78	...	..	71	173	138.07
Thailand	Phattalung	2.26	...	..	82	138	40.39
Vietnam	Ho Chi Minh City	3.73	3.41	1.094	58	61	81.50
Vietnam	Vinh Long	10.55	...	..	30	131	337.96
Cuba	Las Tunas	2.89	0.84	3.431	53	72	54.16
Argentina	Buenos Aires	1.51	1.35	1.112	101	103	21.61
Argentina	Cordoba	1.25	0.48	2.595	151	167	17.67
Bolivia	Cochabamba	2.20	2.42	0.911	152	148	33.15
Brazil	Palmas	1.87	5.72	0.327	396	240	27.50
Brazil	Ribeirao Preto	1.12	1.98	0.565	197	176	15.63

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Brazil	Sao Paulo	0.58	0.91	0.643	90	86	8.52
Brazil	Belo Horizonte	0.91	1.33	0.684	119	114	9.50
Brazil	Florianopolis	2.13	2.23	0.955	154	152	34.79
Brazil	Curitiba	1.99	1.27	1.574	143	159	32.19
Brazil	Jequie	0.69	0.28	2.522	173	183	9.45
Brazil	Ilheus	1.36	...	..	81	127	17.69
Chile	Santiago	1.36	1.10	1.231	90	93	20.97
Costa Rica	Liberia	2.65	2.79	0.950	186	182	48.77
Costa Rica	Puerto Limon	1.63	0.94	1.738	138	154	27.77
Costa Rica	Cartago	3.53	1.27	2.773	115	162	69.92
Costa Rica	San Hose	2.62	0.92	2.838	119	154	48.12
Costa Rica	Puntar Arenas_ Barranca	2.19	0.16	13.432	133	181	38.97
Cuba	Holguin	0.25	0.68	0.368	81	77	3.30
Cuba	Bayamo	2.01	0.77	2.615	40	48	35.23
Cuba	Cienfuego	1.28	0.43	2.973	55	63	21.25
Cuba	Guantanamo	1.28	0.43	2.973	55	63	21.25
Cuba	Santa Clara	1.91	0.12	15.287	63	82	33.09
Cuba	Camaguey	2.45	...	..	78	114	44.42
Cuba	LacHabana	1.12	...	..	70	92	18.21
Cuba	Santiago De Cuba	1.16	...	..	64	76	18.92
Ecuador	Quito	4.00	2.17	1.841	76	96	68.19
El Salvador	San Salvador	1.88	...	..	77	104	32.62
Guatemala	Guatemala City	2.27	1.32	1.720	85	96	31.28
Mexico	Reynosa	2.34	2.87	0.815	190	177	35.48
Mexico	Tijuana	2.17	1.89	1.146	154	160	35.42
Mexico	Guadalajara	2.02	1.18	1.721	93	106	35.49
Mexico	Culiacan	2.35	1.34	1.751	130	150	38.95
Mexico	Mexico City	2.95	0.54	5.462	57	80	51.12
Nicaragua	Leon	1.96	...	..	87	113	21.64
Uruguay	Maldonaldo	1.38	2.67	0.518	387	319	23.05
Uruguay	LasPiedras	0.58	0.32	1.782	196	203	9.03
Uruguay	Tacuarembo	1.51	0.67	2.249	196	222	25.34
Uruguay	Paysandu	2.86	0.62	4.609	181	253	53.54
Uruguay	Salto	2.59	0.55	4.707	144	196	47.53
Uruguay	Montevideo + CiudadDeLaCosta	0.76	0.13	5.738	154	169	12.06
Uruguay	Melo	2.31	0.25	9.271	131	178	41.38
Uruguay	Mercedes	1.39	...	..	133	167	23.10
Uruguay	Riviera	1.31	...	..	156	205	21.71
Venezuela	Cabimas	1.13	1.66	0.682	192	178	17.18
Venezuela	Caracas	0.58	0.40	1.443	54	55	7.84
Austria	Vienna	0.82	1.00	0.819	185	180	11.27
Belarus	Gomel	0.55	0.38	1.444	175	179	7.44
Belarus	Hrodna	1.73	0.46	3.733	139	169	29.69
Belarus	Minsk	4.82	0.88	5.451	68	122	106.05
Belarus	Brest	4.43	0.59	7.499	159	283	94.28
Belarus	Viciebsk	3.51	0.15	23.749	129	213	69.37

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Belarus	Kobyrn	3.56	...	..	228	422	70.47
Belarus	Salihorsk	1.92	...	..	277	413	33.47
Belarus	Polack	6.50	...	..	124	376	164.94
Belarus	Mazyr	7.97	...	..	84	291	230.32
Belarus	Babrujsk	0.90	...	..	197	239	14.51
Belgium	Antwerp	0.99	0.72	1.386	355	358	13.80
Canada	Victoria	0.82	0.89	0.928	414	411	11.31
Canada	Montreal	0.94	0.83	1.133	258	262	13.07
France	Paris	1.17	0.58	2.014	164	178	17.83
France	Toulousse	3.24	1.18	2.738	249	339	62.56
France	Lyon	1.90	0.53	3.584	179	220	33.04
France	Nimes	0.93	0.25	3.725	266	295	14.90
France	Grenoble	0.57	0.15	3.760	269	287	8.89
France	Nantes	1.31	0.28	4.718	228	266	21.80
France	Marseille	1.75	0.34	5.072	200	247	29.96
France	Strasbourg	1.68	0.14	12.201	162	204	28.70
France	Nice	2.09	0.11	19.066	182	244	36.74
France	Le Mans	0.37	...	..	305	343	5.28
France	Metz	0.48	...	..	287	316	7.46
France	Besancon	0.59	...	..	239	266	9.28
France	Lille	0.85	...	..	192	218	13.55
Germany	Oldenburg	1.89	0.13	14.391	188	241	30.37
Germany	Berlin	1.82	0.03	52.160	140	177	26.73
Germany	Halle	0.95	...	..	251	292	11.01
Greece	Thessaloniki	2.60	0.16	16.396	94	124	33.11
Hungary	Budapest	2.52	0.99	2.556	187	221	31.97
Italy	Milan	3.30	0.76	4.350	213	275	39.08
Italy	Palermo	2.12	...	..	118	158	31.75
Lithuania	Kaunas	0.39	...	..	195	273	5.59
Netherlands	Zwolle	0.90	1.07	0.847	288	281	13.47
Poland	Lomza	1.44	0.40	3.572	439	513	24.17
Poland	Warsaw	1.97	0.24	8.081	167	209	29.12
Poland	Poznan	0.76	0.03	26.812	264	294	12.07
Poland	Mielec	3.06	...	..	168	269	58.31
Poland	Lodz	2.44	...	..	80	133	44.20
Poland	Lublin	3.95	...	..	75	141	80.95
Poland	Wroclaw	2.66	...	..	95	145	48.93
Romania	Bucharest	1.28	...	..	127	167	21.11
Romania	Targu Jiu	0.88	...	..	225	352	14.09
Romania	Craiova	0.59	...	..	158	224	9.27
Romania	Falticeni	0.46	...	..	200	274	7.17
Romania	ARad	0.50	...	..	230	313	7.77
Romania	Reghin	0.80	...	..	276	376	12.80
Romania	CampiaTurzii	2.12	...	..	227	368	37.38
Romania	Navodari	0.79	...	..	208	280	12.64
Romania	Mangalia	0.80	...	..	310	416	12.67
Russia	Moscow	1.25	1.34	0.938	142	140	17.72

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Russia	Saint Petersburg	1.14	0.64	1.782	131	141	17.30
Russia	Tyumen	1.55	0.55	2.845	197	223	20.46
Russia	Astrakhan	0.68	0.05	14.363	234	254	9.31
Russia	Berezniki	0.55	...	..	299	367	7.36
Russia	Dzerzhinsk	0.98	...	..	225	286	10.32
Serbia	Novi Sad	0.71	0.81	0.884	219	216	11.30
Serbia	Novi Pazar	4.55	1.17	3.898	77	129	97.93
Serbia	Borca	3.26	0.80	4.085	92	132	63.14
Serbia	Belgrade	0.95	...	..	98	114	13.14
Serbia	Nis	4.64	...	..	81	165	100.60
Serbia	Kragujevac	2.95	...	..	136	225	55.68
Serbia	Kikinda	5.72	...	..	141	449	135.79
Serbia	Zrenjanin	1.92	...	..	186	307	33.39
Spain	Madrid	4.28	2.03	2.110	88	105	40.81
Switzerland	Wetzikon	0.17	1.84	0.092	317	247	2.58
Switzerland	Zurich	0.44	1.17	0.377	210	188	6.86
Switzerland	Winterhur	0.76	1.39	0.544	249	226	12.02
Switzerland	Lausanne	1.05	1.29	0.814	227	220	15.79
Switzerland	Emmen_Lucerne	0.76	0.74	1.032	222	223	12.14
Switzerland	Fribourg	1.70	1.57	1.078	226	231	28.98
Switzerland	Neuchatel	1.03	0.54	1.910	243	261	16.67
Switzerland	Bern	0.50	0.26	1.969	198	206	7.85
Switzerland	St Gallen	2.28	0.45	5.088	174	229	40.70
Switzerland	Basel	1.45	0.23	6.384	206	248	24.24
Ukraine	Rovno	1.50	...	..	163	206	23.41
Ukraine	Nikolaev	0.05	...	..	149	161	0.67
United Kingdom	Manchester	0.32	1.32	0.246	205	189	2.63
United Kingdom	London	0.34	1.22	0.277	171	153	4.48
United Kingdom	Sheffield	0.36	0.67	0.533	240	232	4.03
United States	Gainesville, FL	0.79	1.26	0.625	469	441	10.80
United States	Houston	2.07	2.32	0.893	500	483	33.66
United States	Raleigh	3.12	3.37	0.927	606	587	50.07
United States	Portland, OR	1.38	1.42	0.973	450	448	21.29
United States	Los Angeles	0.61	0.60	1.021	304	304	8.98
United States	New York	0.28	0.27	1.033	407	407	3.11
United States	Killeen	2.54	2.29	1.109	700	723	39.19
United States	Modesto	1.62	1.41	1.152	470	484	25.52
United States	Minneapolis	0.79	0.65	1.213	532	542	11.66
United States	Chicago	0.72	0.31	2.298	557	587	9.86
United States	Philadelphia	1.49	0.35	4.284	441	517	23.17
United States	Springfield, MA	1.18	0.11	10.908	599	696	18.00
United States	Toledo	2.06	...	..	499	697	33.36
United States	Cleveland	2.23	...	..	449	653	33.56
Fiji	Suva	1.20	1.14	1.057	141	143	19.77
Angola	Luanda	4.96	18.68	0.265	411	60	100.12
Benin	Kandy	0.98	5.19	0.190	159	85	15.90
Benin	Parakou	1.22	4.26	0.286	341	216	20.04

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Benin	Djougou	0.76	2.32	0.328	187	148	12.11
Benin	Natitingou	1.33	2.09	0.637	151	135	22.06
Benin	Bohicon-Abomey	3.63	2.27	1.600	246	301	72.45
Congo Dem. Rep.	Lubumbashi	3.96	7.08	0.559	118	74	81.13
Congo Dem. Rep.	Kinshasa	3.51	1.00	3.502	43	60	57.77
Ethiopia	Adama Nazreth	2.59	3.20	0.810	97	89	47.51
Ethiopia	Gondar	4.55	2.65	1.721	45	60	98.03
Ethiopia	Addis Ababa	5.16	2.95	1.750	47	59	67.50
Ethiopia	Dire Dawa	4.17	2.28	1.830	39	52	86.85
Ethiopia	Harar	4.81	2.32	2.073	35	50	105.73
Ethiopia	Awassa	8.97	2.95	3.046	37	90	284.25
Ethiopia	BahirDar	6.06	1.86	3.260	26	49	148.19
Ghana	Accra	3.56	3.35	1.062	134	138	64.57
Kenya	Eldoret	1.25	3.43	0.365	137	99	20.70
Kenya	Malaba	1.79	2.09	0.858	91	87	30.83
Kenya	Nairobi	2.73	2.86	0.954	97	95	50.52
Kenya	Kisumu	2.38	1.63	1.454	100	112	42.81
Kenya	Nakuru	4.73	3.23	1.464	81	100	93.80
Kenya	Meru	6.20	1.40	4.424	96	197	153.33
Kenya	Nyeri	7.00	1.07	6.515	58	142	185.62
Madagascar	Mahajanga	0.86	4.95	0.174	222	120	13.79
Madagascar	Marovoay	0.76	2.32	0.329	100	79	12.11
Madagascar	Toliara	1.47	4.21	0.349	638	423	24.68
Madagascar	Antsiranana	3.55	4.35	0.817	360	319	70.44
Madagascar	Taolanaro	1.19	1.18	1.009	101	101	19.47
Madagascar	Antsirabe	2.72	1.71	1.585	295	343	50.27
Madagascar	Antananarivo	8.87	4.66	1.906	62	117	278.50
Madagascar	Toamasina	8.42	4.12	2.047	356	679	253.79
Madagascar	Amparafaravola	1.53	0.42	3.646	82	96	25.85
Madagascar	Fianarantsoa	3.27	...	..	870	1,439	63.35
Malawi	Mzuzu	2.04	4.28	0.476	266	190	35.76
Malawi	Blantyre	4.58	2.52	1.817	79	108	98.72
Mali	Bamako	4.37	6.43	0.679	80	61	76.45
Mozambique	Nacala Porto	0.42	2.46	0.172	207	152	6.56
Mozambique	Alto Molocue	1.11	4.48	0.247	95	57	18.05
Mozambique	Nampula	1.19	4.19	0.285	154	99	19.63
Mozambique	Mocuba	0.80	2.78	0.287	95	71	12.69
Mozambique	Gurue	1.22	2.99	0.408	51	39	20.06
Mozambique	Manhica	1.99	2.79	0.713	240	213	34.80
Mozambique	Maputo	2.07	2.71	0.763	213	193	36.37
Mozambique	Maxixe	1.07	1.18	0.909	339	333	17.45
Mozambique	Pemba	4.91	4.79	1.025	78	79	108.87
Mozambique	Beira	1.49	0.81	1.838	97	107	23.23
Niger	Agadez	5.84	25.16	0.232	1,863	103	140.28
Niger	Maradi	3.36	4.33	0.776	55	47	65.55
Niger	Dosso	2.40	2.29	1.045	18	18	43.28
Niger	Zinder	4.26	3.79	1.124	27	29	89.41

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Niger	Niamey	3.71	3.00	1.238	70	78	74.47
Nigeria	Lagos	2.05	2.91	0.705	55	50	30.61
Nigeria	Ibadan	2.19	3.01	0.728	129	116	32.92
Nigeria	Oyo	3.84	2.09	1.836	62	79	71.12
Nigeria	Gombe	6.54	3.28	1.996	70	107	134.03
Rwanda	Ruhengeri	1.66	3.87	0.427	88	67	21.97
Rwanda	Gisenyi	5.17	5.48	0.943	77	74	85.98
Rwanda	Gitarama	3.82	2.85	1.339	40	45	58.07
Rwanda	Kigali	7.73	3.33	2.319	51	99	219.04
Rwanda	Butare	4.42	1.74	2.542	43	64	94.10
Rwanda	Kayonza	7.99	1.71	4.681	35	90	231.43
Rwanda	Cyangugu	2.62	...	...	24	35	48.04
Senegal	Ziguinchor	0.81	2.59	0.314	120	92	12.96
Senegal	Diorbel	1.21	2.54	0.476	64	52	19.86
Senegal	Dakar	1.61	2.81	0.571	63	52	27.25
Senegal	SaintLouis	0.47	0.59	0.797	62	61	7.36
Senegal	Kaolack	2.87	2.75	1.044	62	63	53.74
Senegal	Louga	2.63	2.35	1.122	106	110	48.37
Senegal	MBour	4.21	2.62	1.608	66	84	88.13
Senegal	Touba	9.28	2.82	3.286	53	140	302.11
Senegal	Thies	6.26	1.66	3.776	45	90	155.68
Tanzania	Arusha	5.41	5.12	1.058	41	42	81.35
Uganda	Kampala	2.84	5.17	0.549	110	83	40.61
Uganda	Lira	2.26	3.78	0.598	148	118	40.37
Uganda	Mbarara	2.04	2.79	0.732	132	118	35.88
Uganda	Mbale	3.74	3.77	0.992	87	87	75.25
Uganda	Gulu	3.81	3.53	1.080	61	63	77.14
Uganda	Kasese	2.95	2.50	1.180	87	93	55.71
Uganda	Masaka	4.35	3.50	1.242	118	133	92.15
Uganda	Jinja	3.44	1.80	1.906	91	116	67.52
Zambia	Ndola	2.16	3.10	0.695	122	109	29.52
Algeria	Tolga	1.15	2.53	0.454	108	88	18.80
Algeria	Djelfa	3.75	5.52	0.679	76	59	75.53
Algeria	Chlef	1.34	1.59	0.840	124	119	22.21
Algeria	Blida	2.09	2.31	0.904	105	101	36.81
Algeria	El Khroub	4.42	4.61	0.960	95	93	94.13
Algeria	Tebessa	2.18	2.02	1.077	115	118	32.68
Algeria	Algiers	2.85	2.22	1.283	75	81	44.76
Algeria	Oran	3.04	1.87	1.628	72	86	57.83
Algeria	Khemis Miliana	2.45	1.07	2.293	77	95	44.40
Algeria	Tamanrasset	3.90	1.50	2.595	185	265	79.39
Algeria	Tiaret	4.61	1.57	2.929	62	98	99.70
Algeria	M'Sila	6.57	1.91	3.434	65	130	167.89
Algeria	Batna	3.96	0.96	4.126	60	94	81.03
Algeria	Mila	4.62	1.07	4.307	68	116	100.09
Algeria	Annaba	0.92	0.21	4.307	89	99	14.79
Azerbaijan	Baku	2.03	1.73	1.174	97	101	30.19

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Bahrain	Al Manamah[v]	2.52	4.78	0.528	185	132	45.98
Egypt	Asyut	1.46	2.05	0.710	46	42	24.51
Egypt	Al_Manshah	1.68	1.91	0.880	55	53	28.64
Egypt	Alexandria	2.02	1.72	1.176	48	50	32.67
Egypt	Port Said	2.03	1.68	1.207	32	34	35.52
Egypt	Al_zaqaziq	2.46	1.87	1.314	32	35	44.67
Egypt	Diyarb Najm	3.00	1.95	1.538	56	66	56.95
Egypt	Cairo	4.29	2.57	1.666	42	50	53.53
Egypt	Al_Ghurdaqah	3.86	1.36	2.828	167	243	78.35
Iraq	Baghdad	1.57	1.65	0.950	109	108	24.56
Israel	Tel Aviv	1.71	1.99	0.859	134	129	27.03
Jordan	Irbid	2.20	2.86	0.771	130	118	39.19
Jordan	Amman[i]	3.28	2.85	1.151	82	88	63.45
Kuwait	Kuwait[ii]	2.26	--	--	135	96	40.37
Lebanon	Beirut	1.74	4.88	0.357	119	74	29.83
Lebanon	Tripoli	2.40	4.30	0.557	211	159	43.28
Lebanon	Zahle	1.98	3.13	0.631	323	272	34.54
Lebanon	Baalbek	3.39	3.03	1.118	164	173	66.37
Lebanon	Sidon	5.52	4.02	1.372	48	60	128.84
Lebanon	Tyre	5.34	2.02	2.637	37	61	122.73
Morocco	Aitemelloul	1.39	2.35	0.593	68	59	23.24
Morocco	Temara	2.15	3.51	0.612	82	67	38.09
Morocco	Sidi slimane	1.04	1.53	0.678	76	71	16.84
Morocco	Tanger	2.42	2.94	0.823	70	64	43.71
Morocco	Midelt	0.91	1.10	0.826	60	58	14.65
Morocco	Fez	1.45	1.44	1.006	53	53	24.32
Morocco	Oujda	2.05	1.36	1.506	83	93	36.00
Morocco	Safi	0.96	0.59	1.635	59	63	15.45
Morocco	Marrakesh	4.04	2.43	1.663	83	101	62.33
Morocco	Casablanca[iii]	2.16	1.22	1.769	43	49	38.32
Morocco	Maknes	2.95	1.46	2.020	54	68	55.68
Morocco	Sefrou	1.18	0.52	2.295	47	52	19.43
Morocco	Fikh Ben Salah	2.70	0.77	3.501	50	67	49.96
Morocco	Azrou	3.35	0.57	5.898	39	59	65.17
Morocco	Oulad teima	4.73	0.60	7.889	38	71	103.20
Oman	Sohar	2.75	5.33	0.516	93	63	51.06
Oman	Salalah	3.19	3.18	1.000	146	146	61.24
Oman	Muscat[iv]	6.84	5.03	1.360	79	104	179.02
Oman	Al Buryami	2.89	--	--	80	90	54.26
Palestinian territories	Al-Quds	0.38	1.53	0.249	180	151	5.89
Palestinian territories	Rafah	3.95	2.97	1.330	74	85	80.84
Palestinian territories	Jenin	3.46	1.84	1.879	99	126	67.99
Palestinian territories	Nabulus(Nablus)	5.84	2.56	2.283	60	98	140.27

i termasuk lingkungan sekitar
ii termasuk: Az-zarqa, Ar-Rusayfah, Al-Quwaysimah,Tila al-Ali, Wadi as-sir, Al-Jubayhah, Khraibat as-suq and Sahab
iii termasuk kota-kota besar Hawalli, Al-Farwānīyah, Al-Fintās, Al-Jahrā', Janūb al-Kuwayt, Al-Manqaf, Al-Firdaws and Mubarāk al-Kabīr
iv termasuk kota Mohammedia
v termasuk: Bawashar, Matrah, Aseed (Assib)

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Palestinian territories	Khān Yūnis (includes Dayr al Balah)	5.84	2.56	2.283	60	98	140.27
Palestinian territories	Al-Khalīl	3.44	1.47	2.342	136	183	67.59
Palestinian territories	An-Nu ayrāt	8.64	2.95	2.933	36	85	265.52
Qatar	Doha	3.24	8.74	0.371	420	184	62.67
Qatar	Al Shahaniya	6.22	9.46	0.658	567	349	154.19
Qatar	Mesaieed	6.35	8.45	0.752	793	579	159.34
Qatar	AlKhor_AlThakhira	6.69	8.70	0.768	183	136	172.71
Saudi Arabia	Jiddah including Al Khubar	1.20	2.44	0.492	167	139	19.73
Saudi Arabia	Al-Jubayl	1.34	2.56	0.522	462	385	22.19
Saudi Arabia	Makkah	1.31	2.11	0.623	125	111	21.76
Saudi Arabia	Al- awiyah	1.54	2.28	0.676	197	176	26.01
Saudi Arabia	Al-Madinah	1.94	2.13	0.909	164	159	33.77
Saudi Arabia	Al-Kharj	2.55	2.60	0.980	188	186	46.64
Saudi Arabia	Ar-Rass	2.68	2.35	1.139	520	546	49.43
Saudi Arabia	Riyadh	5.02	3.60	1.396	132	159	92.08
Saudi Arabia	Tabuk	2.68	1.77	1.514	103	118	49.43
Saudi Arabia	Al-Hufuf	5.30	2.86	1.851	127	183	121.30
Saudi Arabia	Al-Khafji	4.91	2.57	1.911	315	447	108.73
Saudi Arabia	Ha'il	3.63	1.87	1.947	182	238	72.41
Saudi Arabia	Rafha'	3.67	1.73	2.127	101	135	73.42
Saudi Arabia	Ad-Dammam	6.31	2.76	2.287	123	209	157.57
Saudi Arabia	'Ar'ar	3.17	1.33	2.375	88	116	60.79
Saudi Arabia	At-Ta'if	6.38	2.24	2.854	60	113	160.48
Sudan	Bur Sudan	2.52	4.57	0.551	136	100	45.87
Sudan	Alfashir	4.32	3.57	1.211	62	69	91.14
Sudan	Wad Madani	2.21	1.53	1.444	69	77	39.32
Sudan	Khartoum	3.71	2.46	1.503	77	91	68.01
Sudan	Dunqula	3.13	1.78	1.759	123	151	59.82
Sudan	Atbara	2.83	1.40	2.026	97	120	52.81
Sudan	Kassala	4.05	1.84	2.204	51	71	83.45
Sudan	Sannar	4.38	1.50	2.924	56	87	92.81
Sudan	Sinjah	5.41	1.55	3.478	50	89	125.00
Sudan	Al Qadarif	2.77	0.76	3.632	90	122	51.54
Tunisia	Susah	1.15	2.42	0.475	125	104	18.87
Tunisia	Monastir	1.23	2.38	0.518	149	125	20.26
Tunisia	Banzart	0.90	1.38	0.654	144	134	14.51
Tunisia	Tozeur	1.19	1.81	0.657	399	363	19.49
Tunisia	Al_Qayrawan	1.43	1.17	1.228	133	138	24.01
Tunisia	Tunis (includes At-Tadamun and Sukrah)	2.46	1.44	1.710	88	102	44.68
Tunisia	Qabis	2.59	1.39	1.859	82	98	47.47
Tunisia	Safaqis	2.31	0.98	2.363	115	140	41.40
Turkey	Ankara	1.47	2.96	0.495	96	77	24.61
Turkey	Agri	0.93	1.69	0.550	145	129	14.91
Turkey	Gaziantep	2.87	4.20	0.682	80	65	53.70
Turkey	Balikesir	1.48	2.02	0.731	153	142	24.80

Tabel C.1: Lanjutan

Negara	Kota	Laju Penggunaan lahan 2000-2015 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015 (%)	Rasio Laju Penggunaan Lahan terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2015	Daerah Terbangun per Kapita 2000 (m^2 per Kapita)	Daerah Terbangun per Kapita 2015 (m^2 per Kapita)	Perubahan seluruh dari daerah terbangun 2000-2015(%)
Turkey	Denzili	2.82	3.64	0.775	145	128	52.61
Turkey	Kayseri	3.94	4.72	0.834	134	121	66.85
Turkey	Elbistan	1.07	1.20	0.896	171	167	17.45
Turkey	Corum	1.92	2.07	0.927	144	141	33.32
Turkey	Konya	3.70	3.96	0.935	257	247	74.21
Turkey	Sanliurfa	3.98	4.09	0.973	105	103	81.77
Turkey	Bursa	3.85	3.69	1.043	96	98	78.18
Turkey	Antalya	2.44	2.30	1.061	182	186	44.26
Turkey	Adapazari	3.02	2.69	1.124	205	216	57.23
Turkey	Sivas	3.38	2.48	1.362	86	99	65.92
Turkey	Istanbul	4.60	2.97	1.547	60	72	65.85
Turkey	Malatya	1.39	0.58	2.404	108	121	21.41
Turkey	Carasamba	3.80	1.20	3.175	65	96	76.81
Turkey	Adiyaman	7.44	1.42	5.244	49	122	205.19
Turkey	Uzunköprü	2.99	...	...	183	298	56.67
Turkey	Tarsus	2.77	...	...	100	160	51.42
Turkey	Viransehir	2.47	...	...	54	92	44.87
Turkey	Izmir	1.83	...	...	67	81	31.62
UAE	Dubai[v]	5.01	8.15	0.614	159	99	111.90
UAE	Al Ain	3.17	4.92	0.644	202	155	60.88
UAE	Al Fujayrah	6.23	6.52	0.956	189	181	154.57
UAE	Ras Al Khaymah	5.16	5.06	1.019	245	248	116.84
UAE	Abu Dhabi	10.63	5.25	2.025	96	216	392.57
Yemen	Adan	0.47	2.94	0.161	75	52	7.38
Yemen	Al Hudaydah	1.03	2.71	0.382	59	46	16.78
Yemen	Yarim	3.85	5.02	0.767	30	25	78.09
Yemen	Radaa	1.85	2.39	0.773	55	51	31.93
Yemen	Sana	2.65	2.95	0.900	91	87	44.96
Yemen	Dhamar	5.37	4.46	1.203	62	71	123.62
Yemen	Taizz	3.75	3.04	1.233	37	41	75.54
Yemen	Tarim	3.44	2.49	1.381	65	75	67.51
Yemen	Amran	7.32	1.86	3.943	18	42	200.04

v Includes Ajman and Ash Shariqa

Catatan:
Laju penggunaan lahan adalah perkiraan berdasarkan klasifikasi Landsat imagey untuk tahun 1990, 2000, dan 2015
Data populasi yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah GHS-POP
Kota/perkotaan yang digunakan pada analisis dihasilkan menggunakan pendekatan klasifikasi Perluasan Perkotaan atau Derajat Urbanisasi.

Sumber: United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), Global Urban Indicators Database 2020

Tabel C.3: Indikator Ruang Terbuka di Beberapa Negera Terpilih, 2019

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Australia	Sydney	2.28	11.22	13.50	33.38
Australia	Wollogong	3.45	9.71	13.16	46.40
Australia	HobartCity	6.92	9.54	16.46	65.09
Australia	Laucenston	7.69	8.62	16.31	71.74
Australia	Adeliade	6.25	12.56	18.80	72.15
Australia	Brisbane	8.02	12.04	20.06	80.55
Australia	Muswellbrook	7.70	7.87	15.57	80.78
Australia	Shepparton	6.49	9.15	15.64	84.08
Australia	Melbourne	8.50	11.87	20.36	84.43
Australia	Alice Spring	7.30	9.63	16.93	85.20
Australia	Perth	7.60	13.56	21.16	85.62
Australia	Bunbury	9.13	9.71	18.84	85.91
Australia	Darwin	7.06	10.12	17.18	86.74
Australia	Gold Coast	12.21	9.32	21.52	88.21
Australia	Geelong	8.86	11.15	20.01	88.86
Australia	Cairns	11.37	9.63	21.00	93.18
Australia	Canberra	14.48	15.19	29.67	97.52
New Zealand	Dunedin	5.23	15.07	20.30	76.83
New Zealand	LowerHutt	4.79	16.18	20.98	78.14
New Zealand	Wellington	9.08	19.21	28.28	82.46
New Zealand	Christ Church	8.71	17.65	26.36	83.37
New Zealand	Tauranga	8.04	15.15	23.18	83.93
New Zealand	Hamilton	7.69	16.41	24.10	86.43
New Zealand	Palmerston	7.65	13.70	21.35	87.07
New Zealand	Auckland	9.23	16.19	25.43	88.44
New Zealand	Napier	8.56	20.28	28.84	90.28
Afghanistan	Kandahar	1.06	11.22	12.28	11.22
Afghanistan	Kabul	0.50	12.95	13.45	13.04
Afghanistan	Herat	2.66	7.30	9.96	20.99
Afghanistan	Mazar-e Sharif	0.78	15.88	16.66	39.08
Afghanistan	Charikar	1.38	16.60	17.98	44.58
Afghanistan	Lashkar Bah	1.58	9.82	11.40	49.16
Afghanistan	Jalalabad	1.71	9.96	11.67	51.29
Afghanistan	Khanabad	2.60	11.04	13.63	59.61
Bangladesh	Saidpur	33.18	7.17	40.36	18.41
Bangladesh	Dhaka	1.26	12.24	13.50	31.38
India	Jaipur	4.37	16.78	21.15	18.51
India	Coimbatore	0.40	11.16	11.56	18.85
India	Singrauli	4.89	8.25	13.15	27.96
India	Ahmedabad	1.13	11.67	12.80	29.38
India	Pune	2.24	12.07	14.32	30.83
India	Mumbai	1.77	11.26	13.04	35.35
India	Belgaum	1.52	11.44	12.96	39.68
India	Hyderabad	1.51	19.42	20.93	40.18
India	Vijayawada	4.22	17.11	21.33	45.74
Iran	Sari	0.81	11.76	12.57	31.17
Iran	Bojnurd	2.36	15.92	18.28	45.19
Iran	Qom	2.28	15.27	17.55	47.50

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Iran	Gorgan	1.86	12.34	14.19	49.16
Iran	Eshfana	1.83	16.99	18.82	50.78
Iran	Kashan	2.89	13.26	16.15	51.42
Iran	Salmas	1.83	12.87	14.70	51.88
Iran	Ahvaz	3.11	11.96	15.07	52.33
Iran	Piranshahr	1.36	11.81	13.18	52.48
Iran	Shadegan	0.88	10.61	11.49	53.88
Iran	Sanandaj	3.91	13.55	17.46	54.82
Iran	Bandar Abbas	2.46	19.96	22.43	59.52
Iran	Tehran	4.57	15.50	20.07	61.14
Iran	Dehdasht	1.67	15.19	16.86	64.78
Iran	Arak	5.56	16.77	22.33	67.66
Iran	Kashmar	2.26	13.52	15.77	73.33
Iran	Aradabil	4.06	18.24	22.31	79.45
Kazakhstan	Shymkent	0.98	12.29	13.26	7.35
Kazakhstan	Taraz	1.24	13.60	14.85	10.96
Kazakhstan	Semei	1.47	10.69	12.17	19.84
Kazakhstan	Astana (Nur-Sultan)	4.42	15.13	19.54	26.21
Kazakhstan	Almaty	2.29	13.34	15.62	28.08
Kazakhstan	Oskemen	2.25	12.88	15.13	29.50
Kazakhstan	Qaragandy	3.79	14.44	18.23	35.40
Kazakhstan	Pavlodar	3.45	12.21	15.66	38.94
Kazakhstan	Aktobe	2.95	13.68	16.63	44.82
Nepal	Pokhara	4.65	9.09	13.74	74.46
Pakistan	Sialkot	0.41	10.45	10.86	14.77
Pakistan	Sargodha	1.72	8.31	10.02	28.46
Pakistan	Islamadad	3.55	9.88	13.43	31.27
Pakistan	Faisalabad	1.30	13.02	14.32	34.08
Pakistan	Layyah	1.34	8.82	10.16	37.12
Pakistan	Hyderabad	1.70	14.24	15.94	43.38
Pakistan	Karachi	3.14	15.46	18.60	45.39
Pakistan	Lahore	2.89	16.75	19.64	47.29
Sri-Lanka	Haputale	1.66	10.72	12.38	33.93
Sri-Lanka	Anuradhapura	2.32	9.49	11.81	51.37
Sri-Lanka	Batticaloa	1.69	10.84	12.53	55.75
Uzbekistan	Tashkent	0.56	12.94	13.51	4.20
Uzbekistan	Navoi_Karmana	1.45	8.96	10.42	12.18
Uzbekistan	Nukus	1.13	15.97	17.10	13.28
Uzbekistan	Qarshi	1.43	12.80	14.23	15.89
Uzbekistan	Bukhara	0.94	9.46	10.40	16.47
Uzbekistan	Andijan	0.96	11.31	12.27	17.22
Uzbekistan	Bekobod	4.99	9.94	14.92	54.02
China	Shenzhen, Guangdong	4.74	13.08	17.83	21.94
China	Zunyi, Guizhou	8.23	8.21	16.44	25.37
China	Jinan, Shandong	3.04	8.31	11.35	26.08
China	Beijing, Beijing	3.11	7.21	10.31	26.13
China	Qingdao, Shandong	3.64	8.51	12.15	28.49
China	Kaiping, Guangdong	0.66	9.91	10.57	34.66

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
China	Taipei, Taiwan	1.63	16.70	18.32	35.07
China	Hong Kong, Hong Kong	6.51	24.98	31.49	89.11
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	Ranson	4.02	5.91	9.94	47.97
Japan	Yamaguchi	4.64	13.40	18.04	35.88
Japan	Okayama	8.28	14.92	23.19	64.02
Japan	Fukuoka	6.10	20.65	26.75	70.07
Japan	Osaka	4.74	22.96	27.70	72.21
Japan	Tokyo	3.49	19.66	23.15	74.82
Malaysia	Rawang	1.71	10.64	12.35	22.36
Malaysia	Ipoh	3.01	7.85	10.85	43.79
Myanmar	Yangon	0.96	11.24	12.20	16.24
Myanmar	Mawlamyine	1.18	10.50	11.68	37.17
Philippines	Cebu City	0.69	14.37	15.06	17.71
Philippines	Manila	1.56	20.68	22.24	28.75
Republic of Korea (South Korea)	Cheonan	2.28	10.61	12.89	31.16
Republic of Korea (South Korea)	Jinju	3.35	7.65	11.00	38.39
Republic of Korea (South Korea)	Busan	5.50	14.79	20.28	48.66
Republic of Korea (South Korea)	Seoul	3.03	12.70	15.73	48.75
Republic of Korea (South Korea)	Gwangju	7.05	15.62	22.68	65.37
Singapore	Singapore	7.46	19.42	26.87	70.26
Thailand	Bangkok	0.73	14.20	14.94	11.77
Thailand	Chumpon	0.53	9.46	9.99	16.45
Thailand	Khon Kaen	1.90	14.47	16.36	22.22
Thailand	ChiangRai	1.27	11.37	12.64	22.30
Thailand	Phattalung	2.14	12.81	14.95	29.98
Thailand	ChiangMai	1.44	13.38	14.82	37.05
Thailand	Chaam	4.25	8.43	12.68	48.03
Vietnam	Ho Chi Minh City	0.76	13.86	14.62	30.40
Cuba	Las Tunas	1.96	16.68	18.64	38.43
Argentina	Buenos Aires	1.83	21.61	23.45	49.55
Argentina	Cordoba	3.62	20.52	24.14	70.69
Bolivia	Cochabamba	1.80	15.99	17.78	63.62
Brazil	Belo Horizonte	5.30	16.55	21.85	41.55
Brazil	Sao Paulo	1.68	17.12	18.80	53.76
Brazil	Ilheus	2.41	14.14	16.55	54.72
Brazil	Jequie	0.75	15.67	16.42	60.31
Brazil	Ribeirao Preto	1.84	17.87	19.71	62.29
Brazil	Florianopolis	4.87	15.36	20.24	76.18
Brazil	Curitiba	5.46	14.66	20.12	83.75
Brazil	Palmas	8.96	18.39	27.35	93.45
Chile	Santiago	2.22	15.10	17.32	43.47
Colombia	Valledupar	2.21	21.10	23.31	35.44
Colombia	Bogota	6.31	23.01	29.32	87.50
Costa Rica	Cartago	1.77	15.16	16.93	50.60
Costa Rica	Puerto Limon	3.75	16.50	20.25	55.71
Costa Rica	San Hose	1.91	14.90	16.81	59.13
Costa Rica	Liberia	2.37	17.90	20.27	70.86

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Costa Rica	Puntar Arenas_Barranca	4.26	16.51	20.77	76.28
Cuba	Cienfuego	3.45	11.63	15.08	40.07
Cuba	Holguin	1.88	13.62	15.50	43.45
Cuba	Guantanamo	2.37	14.35	16.72	48.21
Cuba	Santiago De Cuba	2.41	14.91	17.32	53.72
Cuba	Camaguey	2.65	14.55	17.20	55.37
Cuba	Santa Clara	1.74	15.20	16.94	58.38
Cuba	Bayamo	4.45	17.50	21.96	64.77
Cuba	LacHabana	4.42	17.15	21.57	68.84
Ecuador	Quito	2.25	12.07	14.32	45.08
El Salvador	San Salvador	1.92	9.97	11.88	16.75
Guatemala	Guatemala City	1.71	11.69	13.39	31.95
Mexico	Reynosa	1.28	10.44	11.71	27.84
Mexico	Tijuana	0.87	12.31	13.18	29.47
Mexico	Mexico City	3.71	12.70	16.40	46.26
Mexico	Guadalajara	2.32	13.28	15.60	50.50
Mexico	Culiacan	3.56	13.83	17.38	72.51
Nicaragua	Leon	2.49	11.39	13.88	52.24
Uruguay	LasPiedras	0.68	13.62	14.30	49.83
Uruguay	Riviera	0.38	14.10	14.48	58.92
Uruguay	Salto	1.23	15.68	16.91	67.97
Uruguay	Melo	0.93	15.51	16.45	69.19
Uruguay	Tacuarembo	0.97	12.74	13.71	69.79
Uruguay	Paysandu	2.23	13.81	16.04	70.39
Uruguay	Mercedes	0.95	15.63	16.59	71.22
Uruguay	Maldonaldo	1.48	17.14	18.62	81.20
Uruguay	Montevideo+CiudadDeLaCosta	3.82	14.46	18.28	82.66
Venezuela	Cabimas	0.41	11.79	12.21	19.43
Venezuela	Caracas	4.97	13.54	18.51	38.10
Austria	Vienna	3.19	11.66	14.85	72.42
Belarus	Gomel	3.54	12.03	15.58	39.89
Belarus	Kobyrn	4.39	10.94	15.32	43.96
Belarus	Babrujsk	5.23	12.91	18.14	48.66
Belarus	Viciebsk	2.73	16.03	18.76	51.27
Belarus	Brest	7.99	13.70	21.70	53.03
Belarus	Salihorsk	4.57	14.61	19.18	55.38
Belarus	Polack	5.67	13.62	19.29	66.09
Belarus	Mazyr	8.66	13.04	21.70	72.11
Belarus	Hrodna	7.49	19.38	26.87	80.88
Belarus	Minsk	11.46	19.00	30.46	83.28
Belgium	Antwerp	3.04	11.96	15.00	39.76
Canada	Victoria	3.51	10.68	14.19	72.65
Canada	Montreal	8.64	13.84	22.49	89.17
France	Nice	0.24	11.39	11.63	8.04
France	Nimes	3.49	12.68	16.17	34.36
France	Metz	3.12	15.64	18.77	39.04
France	Marseille	5.62	14.00	19.62	46.50
France	Toulousse	2.48	15.84	18.32	47.21

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
France	Paris	3.65	12.46	16.10	51.58
France	Lyon	4.59	14.26	18.85	66.51
France	Lille	3.96	18.06	22.02	67.01
France	Nantes	5.93	15.32	21.25	67.57
France	Strasbourg	4.92	17.70	22.62	73.24
France	Grenoble	4.48	14.85	19.33	75.52
France	Le Mans	6.47	17.66	24.13	81.20
France	Besancon	6.45	20.55	27.00	91.07
Germany	Berlin	8.06	22.20	30.26	68.19
Germany	Halle	8.03	22.42	30.45	76.43
Germany	Oldenburg	7.63	26.19	33.82	90.56
Greece	Thessaloniki	1.62	14.47	16.09	65.70
Hungary	Budapest	2.96	17.59	20.55	58.84
Italy	Palermo	1.66	8.58	10.24	42.24
Italy	Milan	4.02	9.00	13.01	76.22
Lithuania	Kaunas	6.37	15.41	21.78	61.43
Netherlands	Zwolle	7.43	15.01	22.43	91.93
Poland	Lublin	2.89	19.12	22.00	49.11
Poland	Lodz	4.23	17.07	21.30	49.39
Poland	Katowice	3.45	15.34	18.81	50.70
Poland	Mielec	2.46	10.42	12.89	52.34
Poland	Wroclaw	4.88	17.42	22.30	55.98
Poland	Poznan	7.63	14.97	22.60	61.59
Poland	Warsaw	5.95	14.58	20.54	64.84
Poland	Lomza	3.04	18.43	21.46	67.12
Romania	ARad	2.54	8.65	11.19	41.44
Romania	Reghin	4.60	6.14	10.74	48.76
Romania	Bucharest	3.46	9.54	13.00	54.10
Romania	Mangalia	2.84	7.34	10.17	54.51
Romania	Craiova	4.73	8.07	12.80	60.63
Russia	Astrakhan	1.23	9.64	10.87	37.10
Russia	Saint Petersburg	3.24	21.76	25.00	40.94
Russia	Dzerzhinsk	4.41	11.96	16.37	60.83
Russia	Tyumen	5.05	18.25	23.31	64.24
Russia	Berezniki	9.42	13.75	23.17	73.73
Russia	Moscow	8.34	16.22	24.56	83.31
Serbia	Borca	5.94	8.12	14.06	36.82
Serbia	Pozarevac	3.79	8.86	12.65	37.56
Serbia	Kragujevac	5.69	8.46	14.15	44.96
Serbia	Novi Sad	4.43	10.75	15.18	52.92
Serbia	Nis	3.70	10.23	13.93	57.20
Serbia	Belgrade	23.41	12.48	35.89	63.83
Serbia	Novi Pazar	3.04	9.43	12.48	73.16
Spain	Madrid	6.70	17.25	23.94	63.13
Switzerland	Zurich	3.64	18.32	21.96	67.59
Switzerland	Neuchatel	2.97	17.33	20.29	70.09
Switzerland	Lausanne	5.05	18.55	23.60	76.89
Switzerland	Bern	6.17	19.61	25.78	77.11

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Switzerland	Fribourg	7.72	15.66	23.38	80.30
Switzerland	Basel	4.47	16.90	21.36	81.79
Switzerland	Winterhur	4.66	20.05	24.71	81.93
Switzerland	St Gallen	6.60	16.27	22.88	82.95
Switzerland	Wetzikon	3.05	16.36	19.41	85.43
Switzerland	Emmen_Lucerne	8.00	15.83	23.83	87.83
Ukraine	Nikolaev	3.69	6.77	10.46	49.39
United Kingdom	Sheffield	5.30	11.82	17.11	58.18
United Kingdom	London	12.94	11.95	24.88	81.29
United Kingdom	Manchester	8.98	13.21	22.19	81.56
United States	Raleigh	2.41	9.63	12.04	25.45
United States	Houston	3.36	11.81	15.17	27.00
United States	Toledo	2.22	9.29	11.51	27.54
United States	Cleveland	4.21	9.56	13.77	29.81
United States	Springfield, MA	2.88	7.41	10.29	36.84
United States	Philadelphia	2.93	9.98	12.90	37.30
United States	Modesto	2.16	9.76	11.92	41.36
United States	Gainesville, FL	5.34	13.04	18.38	43.11
United States	Chicago	6.10	9.83	15.93	47.85
United States	Minneapolis	6.14	11.84	17.98	54.77
United States	Portland, OR	4.35	13.42	17.78	57.45
United States	New York	9.10	9.76	18.86	71.03
Fiji	Suva	3.66	7.38	11.04	28.31
Angola	Luanda	0.62	18.35	18.97	17.31
Benin	Parakou	0.78	13.15	13.93	32.37
Benin	Kandy	0.43	13.10	13.53	35.15
Benin	Djougou	1.49	11.97	13.46	40.69
Benin	Natitingou	1.50	8.91	10.42	53.78
Congo Dem. Rep.	Lubumbashi	0.38	14.22	14.60	6.78
Congo Dem. Rep.	Kinshasa	1.42	16.61	18.03	17.31
Ethiopia	Dire Dawa	0.88	17.37	18.25	38.69
Ethiopia	Harar	1.17	11.25	12.42	40.00
Ethiopia	Gondar	1.40	12.82	14.22	40.32
Ethiopia	Addis Ababa	2.53	21.77	24.30	41.77
Ethiopia	Awassa	2.84	14.81	17.66	62.38
Ethiopia	Adama Nazreth	1.42	18.58	20.00	64.08
Ethiopia	BahirDar	1.41	14.36	15.78	89.99
Ghana	Accra	0.41	13.63	14.05	12.01
Kenya	Eldoret	0.51	11.17	11.68	10.82
Kenya	Kisumu	0.35	10.00	10.36	11.15
Kenya	Nairobi	1.02	11.13	12.14	17.93
Madagascar	Antsiranana	1.12	14.93	16.05	30.21
Madagascar	Toamasina	1.94	8.50	10.43	31.91
Madagascar	Marovoay	3.83	7.65	11.48	46.11
Madagascar	Taolanaro	3.04	7.92	10.96	68.59
Malawi	Blantyre	2.07	9.08	11.15	22.63
Malawi	Mzuzu	0.99	11.79	12.78	23.25
Malawi	Zomba	3.16	8.99	12.15	43.75

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Mali	Bamako	1.36	19.59	20.95	29.94
Mozambique	Nampula	0.21	9.90	10.11	9.31
Mozambique	Manhica	0.26	12.94	13.19	10.12
Mozambique	Maputo	0.83	14.97	15.80	15.35
Mozambique	Maxixe	0.42	10.64	11.06	25.50
Mozambique	Pemba	2.08	13.98	16.06	49.89
Niger	Zinder	0.84	19.21	20.05	13.78
Niger	Niamey	0.63	19.43	20.06	26.09
Niger	Maradi	2.89	19.11	22.00	32.04
Niger	Dosso	1.17	15.12	16.29	32.96
Niger	Agadez	1.21	16.99	18.20	45.76
Nigeria	Lagos	0.50	13.76	14.26	6.95
Nigeria	Ibadan	0.38	13.46	13.85	8.89
Nigeria	Oyo	0.77	12.99	13.76	13.48
Nigeria	Gombe	0.57	16.40	16.97	20.65
Rwanda	Cyangugu	0.05	10.02	10.07	4.81
Rwanda	Butare	0.24	12.05	12.30	6.40
Rwanda	Ruhengeri	0.13	10.06	10.19	9.47
Rwanda	Gisenyi	1.09	15.82	16.91	12.22
Rwanda	Kigali	0.74	11.19	11.93	18.11
Rwanda	Kayonza	0.45	11.13	11.58	21.59
Rwanda	Gitarama	1.00	10.16	11.16	21.76
Senegal	Touba	0.31	21.88	22.19	14.85
Senegal	Diorbel	0.93	21.08	22.01	32.04
Senegal	Kaolack	1.33	21.29	22.62	44.06
Senegal	Ziguinchor	1.22	16.58	17.80	44.37
Senegal	Louga	3.05	18.54	21.59	45.85
Senegal	Dakar	1.76	25.39	27.15	48.19
Senegal	Thies	1.12	20.03	21.15	55.66
Senegal	MBour	1.86	22.09	23.95	66.93
Senegal	SaintLouis	1.46	23.67	25.12	85.57
South Africa	Johannesburg	1.85	10.84	12.70	15.40
South Africa	Port Elizabeth	3.41	9.27	12.68	29.05
Uganda	Masaka	1.01	9.01	10.02	17.84
Uganda	Kasese	0.76	14.64	15.40	20.83
Uganda	Lira	1.50	11.55	13.05	33.76
Uganda	Gulu	4.65	11.12	15.76	76.02
Zambia	Ndola	0.26	11.14	11.40	7.95
Algeria	Tolga	0.31	11.84	12.15	13.37
Algeria	Tiaret	1.49	18.09	19.57	32.05
Algeria	Tebessa	3.74	10.61	14.35	34.86
Algeria	Algiers	2.49	12.39	14.89	41.23
Algeria	Batna	1.92	17.61	19.53	42.04
Algeria	Annaba	3.09	11.71	14.80	49.59
Algeria	Blida	2.00	12.66	14.66	54.01
Algeria	Oran	2.42	16.61	19.02	56.54
Algeria	Chlef	3.66	10.85	14.52	62.75
Algeria	M'Sila	2.82	14.21	17.03	65.33

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Algeria	El Khroub	3.07	11.91	14.98	67.46
Algeria	Tamanrasset	4.02	12.78	16.80	67.62
Algeria	Djelfa	3.40	21.26	24.66	70.55
Algeria	Khemis Miliana	1.84	16.24	18.07	74.51
Algeria	Mila	3.99	16.13	20.12	81.60
Azerbaijan	Baku	4.02	19.30	23.32	57.02
Bahrain	AlManamah	1.45	22.08	23.53	45.19
Egypt	Cairo	0.79	10.15	10.94	11.23
Egypt	Asyut	0.98	16.53	17.51	34.93
Egypt	Al_zaqaziq	0.59	17.62	18.21	38.99
Egypt	Al_Qhurdaqah	2.06	18.96	21.01	72.27
Egypt	Port Said	1.96	14.06	16.02	95.08
Iraq	Baghdad	1.32	13.37	14.69	20.33
Israel	Tel Aviv	4.30	12.61	16.91	75.85
Jordan	Amman[i]	1.31	17.96	19.27	33.88
Jordan	Irbid	0.63	21.97	22.60	55.04
Kuwait	Kuwait[ii]	1.53	22.52	24.05	49.42
Lebanon	Beirut	0.78	14.72	15.49	20.75
Lebanon	Zahle	0.68	12.06	12.75	36.52
Lebanon	Baalbek	1.02	12.79	13.81	45.14
Lebanon	Tyre	1.53	9.87	11.40	45.87
Lebanon	Sidon	0.88	12.76	13.64	61.16
Lebanon	Tripoli	1.36	11.54	12.90	72.81
Morocco	Aitemelloul	0.21	12.54	12.75	21.25
Morocco	Temara	2.56	13.84	16.39	25.65
Morocco	Casablanca[iii]	1.23	17.88	19.11	29.18
Morocco	Maknes	1.95	18.99	20.94	29.35
Morocco	Fez	1.37	17.91	19.28	32.55
Morocco	Oulad teima	1.44	9.42	10.87	34.77
Morocco	Sidi slimane	0.50	10.46	10.96	37.40
Morocco	Oujda	1.26	23.75	25.01	45.51
Morocco	Tanger	2.00	16.59	18.58	46.88
Morocco	Midelt	1.25	14.04	15.29	54.38
Morocco	Safi	4.71	17.56	22.27	55.23
Morocco	Fikh Ben Salah	1.63	16.93	18.56	55.85
Morocco	Marrakesh	1.64	13.24	14.88	61.32
Morocco	Sefrou	3.38	15.28	18.66	63.58
Morocco	Azrou	6.94	16.42	23.36	69.87
Oman	Al Buryami	0.43	11.75	12.18	13.20
Oman	Muscat[iv]	0.75	18.24	18.98	13.24
Oman	Sohar	1.01	13.92	14.93	18.19
Oman	Salalah	0.87	16.76	17.63	20.31
Palestinian territories	Jenin	1.11	13.41	14.52	4.91
Palestinian territories	Al-Khalil	0.16	10.75	10.91	13.22
Palestinian territories	Nabulus(Nablus)	0.95	11.45	12.39	21.60

i termasuk Az-zarqa, Ar-Rusayfah, Al-Quwaysimah,Tila al-Ali, Wadi as-sir, Al-Jubayhah, Khraibat as-suq and Sahab
ii termasuk seluruh kota besar Hawalli, Al-Farwānīyah, Al-Fintās, Al-Jahrā', Janūb al-Kuwayt, Al-Manqaf, Al-Firdaws and Mubarāk al-Kabīr
iii termasuk kota Mohammedia
iv termasuk: Bawashar, Matrah, Aseed(Assib)

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Palestinian territories	Ghazzah[v]	0.25	13.16	13.41	21.85
Palestinian territories	An-Nu ayrāt	0.58	12.80	13.38	23.64
Palestinian territories	Rafa	0.36	13.75	14.10	30.53
Palestinian territories	Khān Yūnis[vi]	0.22	13.01	13.23	33.35
Palestinian territories	Al-Quds	4.97	12.29	17.26	39.96
Qatar	Doha	1.60	21.24	22.85	14.41
Qatar	Mesaieed	0.31	11.39	11.70	26.64
Qatar	AlKhor_AlThakhira	2.39	20.93	23.32	41.49
Saudi Arabia	Al-Kharj	0.47	15.86	16.33	9.88
Saudi Arabia	Riyadh	2.38	13.91	16.29	10.35
Saudi Arabia	Tabuk	0.68	17.06	17.73	13.40
Saudi Arabia	Al-Khafji	0.90	11.36	12.27	14.26
Saudi Arabia	Al-Madinah	1.46	15.18	16.64	17.62
Saudi Arabia	'Ar'ar	2.25	12.30	14.55	20.74
Saudi Arabia	Ha'il	3.15	14.62	17.76	22.16
Saudi Arabia	Makkah	0.83	16.81	17.64	22.40
Saudi Arabia	At-Ta'if	1.30	10.49	11.78	23.56
Saudi Arabia	Jiddah including Al Khubar	0.80	14.43	15.24	24.11
Saudi Arabia	Al-Jubayl	2.43	10.11	12.54	24.11
Saudi Arabia	Al-Hufuf	4.68	9.19	13.87	30.05
Saudi Arabia	Ad-Dammam	1.79	13.80	15.60	34.59
Saudi Arabia	Ar-Rass	3.20	15.89	19.09	47.59
Saudi Arabia	Rafha'	2.76	16.30	19.06	53.79
Sudan	Khartoum	0.86	23.23	24.09	14.81
Sudan	Kassala	0.79	22.65	23.45	30.74
Sudan	Atbara	0.42	20.90	21.33	32.07
Sudan	Sannar	0.96	20.33	21.29	32.78
Sudan	Alfashir	0.83	23.17	24.01	40.37
Sudan	Bur Sudan	1.29	21.65	22.94	44.17
Sudan	Wad Madani	1.71	21.33	23.03	47.90
Sudan	Sinjah	1.51	15.05	16.56	61.19
Sudan	Al Qadarif	2.41	21.14	23.55	67.15
Tunisia	Safaqia	0.33	15.31	15.64	27.46
Tunisia	Banzart	1.53	15.60	17.13	40.95
Tunisia	Tunis[vii]	2.92	22.20	25.11	45.30
Tunisia	Susah	1.26	19.42	20.68	53.85
Tunisia	Qabis	3.07	22.42	25.49	63.06
Tunisia	Al_Qayrawan	1.89	24.08	25.97	66.68
Tunisia	Monastir	2.50	21.57	24.07	71.79
Tunisia	Tozeur	14.97	21.92	36.89	90.96
Turkey	Adapazari	1.82	20.03	21.85	41.80
Turkey	Malatya	1.00	15.20	16.20	58.76
Turkey	Istanbul	3.07	23.81	26.87	59.78
Turkey	Elbistan	1.35	9.20	10.55	60.56
Turkey	Konya	3.00	19.22	22.21	65.32

v Includes: Jabaiyah and Bayt Lāhīyā
vi Includes Dayr al Balah
vii Includes At-Tadamun and Sukrah

Tabel C.3: Lanjutan

Negara	Kota	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk ruang terbuka publik (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan (%)	Porsi alokasi wilayah perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka publik (%)	Proporsi penduduk yang tinggal dalam jarak nyaman berjalan kaki ke ruang terbuka publik (%)
Turkey	Kayseri	2.04	17.84	19.87	66.70
Turkey	Uzunköprü	1.47	21.16	22.63	67.15
Turkey	Izmir	3.83	25.82	29.65	68.95
Turkey	Çerkezköy	1.19	18.30	19.49	69.21
Turkey	Antalya	3.66	16.33	20.00	69.79
Turkey	Tarsus	2.18	22.60	24.78	70.28
Turkey	Agri	1.59	15.07	16.65	70.56
Turkey	Bursa	2.89	27.01	29.90	70.68
Turkey	Samsun	2.70	22.67	25.37	71.21
Turkey	Nigde	1.44	15.11	16.55	71.46
Turkey	Sivas	1.80	21.25	23.05	71.99
Turkey	Denzili	3.81	25.11	28.92	76.71
Turkey	Ankara	5.12	21.07	26.19	76.78
Turkey	Carasamba	3.00	15.02	18.02	77.30
Turkey	Corum	2.58	18.87	21.46	80.34
Turkey	Gaziantep	6.00	27.55	33.55	83.10
Turkey	Sanliurfa	4.03	24.42	28.45	83.80
Turkey	Viransehir	3.22	20.00	23.21	84.13
Turkey	Adiyaman	2.92	22.04	24.96	84.62
Turkey	Balikesir	2.69	29.02	31.71	90.30
UAE	Abu Dhabi	2.72	19.45	22.17	37.57
UAE	Dubai[viii]	2.65	20.47	23.13	40.60
UAE	Al Ain	1.84	15.81	17.65	41.27
UAE	Ras Al Khaymah	0.61	19.12	19.73	41.46
UAE	Al Fujayrah	1.47	23.99	25.47	82.32
Yemen	Taizz	0.25	14.76	15.02	9.04
Yemen	Yarim	1.08	9.90	10.98	13.83
Yemen	Tarim	3.46	22.99	26.45	26.26
Yemen	Radaa	0.25	11.70	11.95	26.49
Yemen	Amran	0.77	16.05	16.82	27.70
Yemen	Dhamar	0.76	10.45	11.20	36.20
Yemen	Al Hudaydah	0.57	20.66	21.23	39.43
Yemen	Adan	1.93	22.94	24.86	51.74

viii termasuk Ajman and Ash Shariqa
Catatan:
Indikator dihitung sebagai porsi lahan perkotaan untuk jalan dan ruang terbuka public, juga porsi penduduk yang dapat mengakses ruang terbuka publik dalam jarak 400 meter
Ruang terbuka publik didefinisikan sebagai ruang yang dapat diakses seluruh penduduk secara terbuka dan bebas (tanpa beban biaya). Identifikasi ruang terbuka publik berdasarkan data yang dikompilasikan dari rencana guna lahan kota juga data dari sumber terbuka seperti OSM dan google
Data digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk dengan akses menuju ruang terbuka publik berdasarkan diagregasi penduduk di tingkat "grid" langsung dari data kota/negara, HRSL (facebook dan CIESIN) atau WorldPop, tahun analisis 2019, yang dalam beberapa kasus termasuk data penduduk tahun 2018.
Kota/perkotaan yang digunakan dalam analisis sudah dihasilkan menggunakan pendekatan klasifikasi berdasarkan Perluasan Perkotaan atau Derajat Urbanisasi.
Perkotaan/kota yang digunakan untuk penghitungan indikator mungkin lebih besar atau lebih kecil dari batas resmi perkotaan.

Sumber: United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat), Global Urban Indicators Database 2020

Tabel D.1: PDB dan Koefisien Gini di Beberapa Kota Terpilih

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)		
Country	Metropolitan areas	2017
Australia	Greater Sydney	259,813
Australia	Greater Melbourne	208,411
Australia	Greater Brisbane	113,090
Australia	Greater Perth	135,365
Australia	Greater Adelaide	53,531
Australia	Canberra	23,198
Austria	Vienna	159,274
Austria	Graz	33,854
Austria	Linz	35,496
Austria	Salzburg	24,247
Austria	Innsbruck	19,080
Austria	Klagenfurt	11,632
Belgium	Brussels	195,763
Belgium	Antwerp	64,970
Belgium	Gent	34,082
Belgium	Charleroi	15,470
Belgium	Liege	27,780
Switzerland	Zurich	103,562
Switzerland	Geneva	44,609
Switzerland	Basel	49,010
Switzerland	Lausanne	22,773
Chile	Antofagasta	24,763
Chile	Coquimbo-La Serena	7,618
Chile	Valparaiso	19,205
Chile	Santiago	161,134
Czech Republic	Prague	127,326
Czech Republic	Brno	24,819
Czech Republic	Ostrava	21,307
Czech Republic	Plzen	11,537
Germany	Berlin	231,498
Germany	Hamburg	197,838
Germany	Munich	237,829
Germany	Cologne	121,399
Germany	Frankfurt am Main	184,622
Germany	Stuttgart	185,964
Germany	Leipzig	40,869
Germany	Dresden	52,164
Germany	Dusseldorf	109,324
Germany	Bremen	61,115
Germany	Hanover	69,146
Germany	Nuremberg	78,727
Germany	Bielefeld	16,163
Germany	Halle an der Saale	16,613
Germany	Magdeburg	19,193
Germany	Wiesbaden	28,251
Germany	Gottingen	19,285
Germany	Darmstadt	25,731
Germany	Trier	9,753
Germany	Freiburg im Breisgau	30,581

Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional		
Country	City/Region	2017
Australia	Greater Sydney	21.9
Australia	Greater Melbourne	17.6
Australia	Greater Brisbane	9.5
Australia	Greater Perth	11.4
Australia	Greater Adelaide	4.5
Australia	Canberra	2.0
Austria	Vienna	35.3
Austria	Graz	7.5
Austria	Linz	7.9
Austria	Salzburg	5.4
Austria	Innsbruck	4.2
Austria	Klagenfurt	2.6
Belgium	Brussels	36.3
Belgium	Antwerp	12.0
Belgium	Gent	6.3
Belgium	Charleroi	2.9
Belgium	Liege	5.2
Switzerland	Zurich	18.9
Switzerland	Basel	8.9
Switzerland	Geneva	8.1
Switzerland	Lausanne	4.2
Chile	Antofagasta	5.9
Chile	Coquimbo-La Serena	1.8
Chile	Valparaiso	4.6
Chile	Santiago	38.4
Czech Republic	Prague	33.5
Czech Republic	Brno	6.5
Czech Republic	Ostrava	5.6
Czech Republic	Plzen	3.0
Germany	Berlin	5.7
Germany	Hamburg	4.8
Germany	Munich	5.8
Germany	Cologne	3.0
Germany	Frankfurt am Main	4.5
Germany	Stuttgart	4.6
Germany	Leipzig	1.0
Germany	Dresden	1.3
Germany	Dusseldorf	2.7
Germany	Bremen	1.5
Germany	Hanover	1.7
Germany	Neubrandenburg	0.2
Germany	Bielefeld	0.4
Germany	Halle an der Saale	0.4
Germany	Magdeburg	0.5
Germany	Wiesbaden	0.7
Germany	Gottingen	0.5
Germany	Darmstadt	0.6
Germany	Trier	0.2
Germany	Freiburg im Breisgau	0.7

Koefisien gini (pendapatan yang siap dibelanjakan, setelah pajak dan hibah)				
Country	City/region	2010	2015	2017
Kazakhstan	Akmola	0.27	0.27	0.27
Kazakhstan	Aktobe	0.27	0.27	0.25
Kazakhstan	Almaty	0.26	0.26	0.28
Kazakhstan	Almaty City	0.24	0.27	0.29
Kazakhstan	Atyrau	0.22	0.22	0.23
Kazakhstan	City of Astana	0.29	0.22	0.23
Kazakhstan	East Kazakhstan	0.28	0.28	0.31
Kazakhstan	Karaganda	0.27	0.29	0.30
Kazakhstan	Kostanai	0.26	0.25	0.25
Kazakhstan	Kyzylorda	0.23	0.21	0.24
Kazakhstan	Mangistau	0.18	0.21	0.17
Kazakhstan	North Kazakhstan	0.27	0.27	0.29
Kazakhstan	Pavlodar	0.25	0.23	0.25
Kazakhstan	South Kazakhstan	0.21	0.19	0.21
Kazakhstan	West Kazakhstan	0.25	0.26	0.28
Kazakhstan	Zhambyl	0.22	0.22	0.23
Philippines	Manila	..	0.39	..
Singapore	Singapore	0.40	0.39	0.38
Thailand	Bangkok	..	0.31	0.32
Vietnam	Can Tho	0.37	..	..
Vietnam	Da Nang	0.39	..	..
Vietnam	Ha noi	0.42	..	..
Vietnam	Hai Phong	0.41	..	..
Vietnam	Ho Chi Minh City	0.38	..	..
Vietnam	Vinh Long	0.36	..	..
Argentina	Buenos Aires	0.51	..	..
Argentina	Cordoba	0.51	..	..
Argentina	Formosa	0.45	..	..
Colombia	Armenia	0.53	0.49	0.45
Colombia	Barranquilla	0.50	0.44	0.44
Colombia	Bogota	0.53	0.50	0.50
Colombia	Bucamaranga	0.45	0.41	0.41
Colombia	Cali	0.53	0.48	0.46
Colombia	Cartagena	0.49	0.47	0.45
Colombia	Cucuta	0.48	0.44	0.43
Colombia	Floencia	0.48	0.49	0.47
Colombia	Ibagué	0.50	0.44	0.43
Colombia	Manizales AM	0.50	0.46	0.46
Colombia	Medellin	0.56	0.49	0.46
Colombia	Monteria	0.53	0.45	0.46
Colombia	Neiva	0.49	0.45	0.45
Colombia	Pasto	0.52	0.49	0.47
Colombia	Pereira AM	0.46	0.44	0.40
Colombia	Popayan	0.51	0.50	0.49
Colombia	Quibdó	0.53	0.53	0.53
Colombia	Riohacha	0.52	0.52	0.52
Colombia	Santa Marta	0.49	0.46	0.47
Colombia	Sincelejo	0.47	0.45	0.44
Colombia	Tunja	0.47	0.47	0.46

Tabel D.1: Lanjutan

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)			Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional			Koefisien gini (pendapatan yang siap dibelanjakan, setelah pajak dan hibah)				
Germany	Regensburg	27,537	Germany	Regensburg	0.7	Colombia	Valledupar	0.51	0.45	0.46
Germany	Schwerin	10,954	Germany	Schwerin	0.3	Colombia	Villavicencio	0.47	0.45	0.45
Germany	Erfurt	21,315	Germany	Erfurt	0.5	Costa Rica	San Jose	0.47	..	..
Germany	Augsburg	31,184	Germany	Augsburg	0.8	Dominican Republic	Santo Domingo	0.58	..	..
Germany	Bonn	50,253	Germany	Bonn	1.2	Ecuador	Quito	0.51	..	..
Germany	Karlsruhe	44,922	Germany	Karlsruhe	1.1	El Salvador	San Salvador	0.41	..	..
Germany	Monchengladbach	11,011	Germany	Monchengladbach	0.3	Honduras	Resto Urbano	0.54	0.49	0.52
Germany	Mainz	24,235	Germany	Mainz	0.6	Honduras	San Pedro Sula	0.54	0.50	0.51
Germany	Ruhr	204,334	Germany	Ruhr	5.0	Honduras	Tegucigalpa	0.54	0.52	0.51
Germany	Kiel	27,584	Germany	Kiel	0.7	Mexico	Culiacan	0.37	..	..
Germany	Saarbrucken	37,549	Germany	Saarbrucken	0.9	Mexico	Guadalajara	0.42	..	..
Germany	Koblenz	18,260	Germany	Koblenz	0.4	Mexico	Mexico City	0.49	..	..
Germany	Rostock	16,268	Germany	Rostock	0.4	Mexico	Tijuana	0.50	..	..
Germany	Kaiserslautern	10,431	Germany	Kaiserslautern	0.3	Panama	Panama City	0.46	..	..
Germany	Iserlohn	19,029	Germany	Iserlohn	0.5	Paraguay	Asuncion	0.5	..	..
Germany	Flensburg	11,328	Germany	Flensburg	0.3	Peru	Lima	0.4	..	..
Germany	Constance	12,059	Germany	Constance	0.3	Uruguay	Montevideo	0.43	..	..
Germany	Giessen	11,649	Germany	Giessen	0.3	Venezuela	Caracas	0.38	..	..
Germany	Aschaffenburg	18,712	Germany	Aschaffenburg	0.5	United States	Ada	..	0.36	..
Germany	Neubrandenburg	8,781	Germany	Nuremberg	1.9	United States	Albany	..	0.32	..
Germany	Rosenheim	14,313	Germany	Rosenheim	0.4	United States	Albuquerque	..	0.43	..
Germany	Offenburg	21,286	Germany	Offenburg	0.5	United States	ampa-Pinellas	..	0.39	..
Germany	Gorlitz	8,348	Germany	Gorlitz	0.2	United States	Atlanta	..	0.39	..
Germany	Schweinfurt	14,248	Germany	Schweinfurt	0.3	United States	Boston	..	0.38	..
Germany	Wetzlar	10,505	Germany	Wetzlar	0.3	United States	Brevard	..	0.36	..
Germany	Braunschweig-Salzgitter Wolfsburg	62,369	Germany	Braunschweig-Salzgitter Wolfsburg	1.5	United States	Charleston	..	0.35	..
Germany	Mannheim-Ludwigshafen	67,466	Germany	Mannheim-Ludwigshafen	1.7	United States	Charlotte	..	0.38	..
Germany	Muenster	30,054	Germany	Muenster	0.7	United States	Chicago	..	0.41	..
Germany	Aachen	25,854	Germany	Aachen	0.6	United States	Cincinnati	..	0.36	..
Germany	Lubeck	17,339	Germany	Lubeck	0.4	United States	Columbus	..	0.36	..
Germany	Kassel	22,142	Germany	Kassel	0.5	United States	Cuyahoga	..	0.39	..
Germany	Osnabruck	23,899	Germany	Osnabruck	0.6	United States	Dallas	..	0.41	..
Germany	Oldenburg (Oldenburg)	18,073	Germany	Oldenburg (Oldenburg)	0.4	United States	Dane	..	0.34	..
Germany	Heidelberg	33,935	Germany	Heidelberg	0.8	United States	Dauphin	..	0.33	..
Germany	Paderborn	13,682	Germany	Paderborn	0.3	United States	Davidson	..	0.39	..
Germany	Wurzburg	25,436	Germany	Wurzburg	0.6	United States	Denver	..	0.37	..
Germany	Bremerhaven	10,866	Germany	Bremerhaven	0.3	United States	Detroit (Greater)	..	0.38	..
Germany	Heilbronn	29,142	Germany	Heilbronn	0.7	United States	Douglas (NE)	..	0.34	..
Germany	Ulm	27,246	Germany	Ulm	0.7	United States	East Baton Rouge	..	0.37	..
Germany	forzheim	13,809	Germany	Pforzheim	0.3	United States	El Paso (CO)	..	0.34	..
Germany	Ingolstadt	38,034	Germany	Ingolstadt	0.9	United States	El Paso (TX)	..	0.40	..
Germany	Reutlingen	14,188	Germany	Reutlingen	0.3	United States	Erie (NY)	..	0.33	..
Germany	Siegen	18,218	Germany	Siegen	0.4	United States	Fayette	..	0.37	..
Germany	Hildesheim	9,726	Germany	Hildesheim	0.2	United States	Forsyth	..	0.38	..
Germany	Zwickau	12,417	Germany	Zwickau	0.3	United States	Fresno (Greater)	..	0.40	..
Germany	Wuppertal	16,134	Germany	Wuppertal	0.4	United States	Greene	..	0.37	..
Germany	Duren, Stadt	9,418	Germany	Duren, Stadt	0.2	United States	Guilford	..	0.39	..
Germany	Bocholt, Stadt	16,814	Germany	Bocholt, Stadt	0.4	United States	Hamilton (TN)	..	0.37	..
Denmark	Copenhagen	116,136	Denmark	Copenhagen	39.5	United States	Hampden	..	0.36	..
Denmark	Aarhus	22,971	Denmark	Aarhus	7.8	United States	Hartford	..	0.35	..

Tabel D.1: Lanjutan

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)			Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional			Koefisien gini (pendapatan yang siap dibelanjakan, setelah pajak dan hibah)				
Denmark	Odense	14,961	Denmark	Odense	5.1	United States	Hidalgo	..	0.43	..
Denmark	Aalborg	13,464	Denmark	Aalborg	4.6	United States	Houston	..	0.43	..
Spain	Madrid	332,275	Spain	Madrid	19.3	United States	Indianapolis	..	0.39	..
Spain	Barcelona	213,713	Spain	Barcelona	12.4	United States	Jackson (MO)	..	0.37	..
Spain	Valencia	57,081	Spain	Valencia	3.3	United States	Jacksonville	..	0.39	..
Spain	Seville	44,701	Spain	Seville	2.6	United States	Jefferson (AL)	..	0.38	..
Spain	Saragossa	30,131	Spain	Saragossa	1.8	United States	Jefferson (KY)	..	0.35	..
Spain	Malaga	22,857	Spain	Malaga	1.3	United States	Kent	..	0.36	..
Spain	Las Palmas	18,337	Spain	Las Palmas	1.1	United States	Kern	..	0.38	..
Spain	Valladolid	15,738	Spain	Valladolid	0.9	United States	Lancaster (PA)	..	0.31	..
Spain	Palma de Mallorca	28,999	Spain	Palma de Mallorca	1.7	United States	Las Vegas	..	0.39	..
Spain	Vitoria	14,748	Spain	Vitoria	0.9	United States	Lee	..	0.40	..
Spain	Pamplona	16,736	Spain	Pamplona	1.0	United States	Lehigh	..	0.34	..
Spain	Santander	13,476	Spain	Santander	0.8	United States	Los Angeles (Greater)	..	0.42	..
Spain	Bilbao	45,357	Spain	Bilbao	2.6	United States	Lucas	..	0.38	..
Spain	Vigo	16,795	Spain	Vigo	1.0	United States	Memphis	..	0.39	..
Spain	Santa Cruz de Tenerife	16,564	Spain	Santa Cruz de Tenerife	1.0	United States	Miami (Greater)	..	0.44	..
Spain	Granada	14,839	Spain	Granada	0.9	United States	Milwaukee	..	0.38	..
Estonia	Tallinn	18,112	Estonia	Tallinn	43.2	United States	Minneapolis	..	0.33	..
Finland	Helsinki	86,078	Finland	Helsinki	34.9	United States	Montgomery (OH)	..	0.37	..
Finland	Tampere	17,881	Finland	Tampere	7.2	United States	New Haven	..	0.43	..
Finland	Turku	14,903	Finland	Turku	6.0	United States	New Orleans	..	0.41	..
Finland	Oulu	9,344	Finland	Oulu	3.8	United States	New York (Greater)	..	0.42	..
France	Paris	891,730	France	Paris	31.7	United States	Oklahoma	..	0.39	..
France	Lyon	111,077	France	Lyon	4.0	United States	Onondaga	..	0.33	..
France	Toulouse	67,315	France	Toulouse	2.4	United States	Orange	..	0.38	..
France	Strasbourg	32,851	France	Strasbourg	1.2	United States	Philadelphia (Greater)	..	0.39	..
France	Bordeaux	51,565	France	Bordeaux	1.8	United States	Phoenix	..	0.40	..
France	Nantes	42,217	France	Nantes	1.5	United States	Pima	..	0.41	..
France	Lille	53,623	France	Lille	1.9	United States	Pittsburgh	..	0.38	..
France	Montpellier	24,786	France	Montpellier	0.9	United States	Polk	..	0.34	..
France	Saint-Etienne	16,169	France	Saint-Etienne	0.6	United States	Portland	..	0.36	..
France	Rennes	29,072	France	Rennes	1.0	United States	Providence	..	0.38	..
France	Amiens	10,981	France	Amiens	0.4	United States	Pulaski	..	0.36	..
France	Nancy	16,437	France	Nancy	0.6	United States	Richland	..	0.33	..
France	Reims	13,526	France	Reims	0.5	United States	Richmond (Greater)	..	0.36	..
France	Orleans	16,522	France	Orleans	0.6	United States	Rochester (NY)	..	0.34	..
France	Dijon	16,523	France	Dijon	0.6	United States	Sacramento	..	0.38	..
France	Poitiers	9,704	France	Poitiers	0.3	United States	Salt Lake	..	0.35	..
France	Clermont-Ferrand	18,737	France	Clermont-Ferrand	0.7	United States	San Antonio	..	0.39	..
France	Caen	15,764	France	Caen	0.6	United States	San Diego	..	0.39	..
France	Limoges	11,466	France	Limoges	0.4	United States	San Joaquin	..	0.37	..
France	Grenoble	26,525	France	Grenoble	0.9	United States	Sarasota	..	0.40	..
France	Fort-de-France	9,739	France	Fort-de-France	0.3	United States	Seattle	..	0.39	..
France	Toulon	16,173	France	Toulon	0.6	United States	Sedgwick	..	0.34	..
France	Tours	18,493	France	Tours	0.7	United States	Spokane	..	0.38	..
France	Angers	14,172	France	Angers	0.5	United States	St. Louis	..	0.40	..
France	Le Mans	13,160	France	Le Mans	0.5	United States	Stanislaus	..	0.38	..
France	Mulhouse	13,525	France	Mulhouse	0.5	United States	Summit	..	0.38	..
France	Perpignan	11,391	France	Perpignan	0.4	United States	Tampa-Hillsborough	..	0.40	..

Tabel D.1: Lanjutan

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)			Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional			Koefisien gini (pendapatan yang siap dibelanjakan, setelah pajak dan hibah)				
France	Marseille	52,814	France	Marseille	1.9	United States	Tulsa	..	0.38	..
France	Nice	42,676	France	Nice	1.5	United States	Utah	..	0.34	..
France	Les Abymes	7,875	France	Les Abymes	0.3	United States	Ventura	..	0.37	..
United Kingdom	London	840,175	United Kingdom	London	29.2	United States	Virginia Beach	..	0.33	..
United Kingdom	West Midlands urban area	109,023	United Kingdom	West Midlands urban area	3.8	United States	Volusia-Daytona Beach	..	0.38	..
United Kingdom	Leeds	94,036	United Kingdom	Leeds	3.3	United States	Wake	..	0.34	..
United Kingdom	Glasgow	65,110	United Kingdom	Glasgow	2.3	United States	Washington (Greater)	..	0.36	..
United Kingdom	Liverpool	49,746	United Kingdom	Liverpool	1.7	United States	Washoe	..	0.40	..
United Kingdom	Edinburgh	48,815	United Kingdom	Edinburgh	1.7	Austria	Graz	..	0.27	..
United Kingdom	Manchester	133,767	United Kingdom	Manchester	4.7	Austria	Linz	..	0.25	..
United Kingdom	Cardiff	31,564	United Kingdom	Cardiff	1.1	Austria	Vienna	..	0.27	..
United Kingdom	Sheffield	35,998	United Kingdom	Sheffield	1.3	Belgium	Antwerp	..	0.30	..
United Kingdom	Bristol	44,820	United Kingdom	Bristol	1.6	Belgium	Gent	..	0.29	..
United Kingdom	Belfast	33,317	United Kingdom	Belfast	1.2	Belgium	Liege	..	0.31	..
United Kingdom	Newcastle upon Tyne	37,322	United Kingdom	Newcastle upon Tyne	1.3	Canada	Montreal	..	0.35	..
United Kingdom	Leicester	32,723	United Kingdom	Leicester	1.1	Canada	Calgary	..	0.45	..
United Kingdom	Aberdeen	27,351	United Kingdom	Aberdeen	1.0	Canada	Halifax	..	0.34	..
United Kingdom	Cambridge	17,312	United Kingdom	Cambridge	0.6	Canada	Hamilton	..	0.34	..
United Kingdom	Exeter	16,310	United Kingdom	Exeter	0.6	Canada	London	..	0.35	..
United Kingdom	Portsmouth	20,307	United Kingdom	Portsmouth	0.7	Canada	Saskatoon	..	0.36	..
United Kingdom	Coventry	33,872	United Kingdom	Coventry	1.2	Canada	Sherbrooke	..	0.30	..
United Kingdom	Kingston upon Hull	19,552	United Kingdom	Kingston upon Hull	0.7	Canada	Toronto	..	0.41	..
United Kingdom	Stoke-on-Trent	15,157	United Kingdom	Stoke-on-Trent	0.5	Canada	Vancouver	..	0.41	..
United Kingdom	Nottingham	32,578	United Kingdom	Nottingham	1.1	Canada	Victoria	..	0.35	..
United Kingdom	Wirral	7,940	United Kingdom	Wirral	0.3	Canada	Windsor	..	0.36	..
United Kingdom	Sunderland	10,844	United Kingdom	Sunderland	0.4	Canada	Winnipeg	..	0.36	..
United Kingdom	Medway	7,978	United Kingdom	Medway	0.3	France	Rennes	..	0.25	..
United Kingdom	Brighton and Hove	17,583	United Kingdom	Brighton and Hove	0.6	France	Bordeaux	..	0.26	..
United Kingdom	Plymouth	13,237	United Kingdom	Plymouth	0.5	France	Grenoble	..	0.27	..
United Kingdom	Swansea	12,606	United Kingdom	Swansea	0.4	France	Lille	..	0.28	..
United Kingdom	Derby	17,329	United Kingdom	Derby	0.6	France	Lyon	..	0.28	..
United Kingdom	Southampton	29,375	United Kingdom	Southampton	1.0	France	Marseille	..	0.29	..
United Kingdom	Milton Keynes	20,829	United Kingdom	Milton Keynes	0.7	France	Montpellier	..	0.28	..
United Kingdom	Northampton	20,569	United Kingdom	Northampton	0.7	France	Nantes	..	0.24	..
United Kingdom	Bournemouth	20,108	United Kingdom	Bournemouth	0.7	France	Nice	..	0.28	..
United Kingdom	Colchester	10,064	United Kingdom	Colchester	0.4	France	Paris	..	0.33	..
United Kingdom	Dundee City	8,421	United Kingdom	Dundee City	0.3	France	Rouen	..	0.27	..
United Kingdom	Blackburn with Darwen	10,447	United Kingdom	Blackburn with Darwen	0.4	France	Saint-Etienne	..	0.25	..
United Kingdom	Middlesbrough	16,843	United Kingdom	Middlesbrough	0.6	France	Strasbourg	..	0.27	..
United Kingdom	Oxford	25,596	United Kingdom	Oxford	0.9	France	Toulon	..	0.26	..
United Kingdom	Preston	11,744	United Kingdom	Preston	0.4	France	Toulouse	..	0.27	..
United Kingdom	Norwich	14,205	United Kingdom	Norwich	0.5	Italy	Bari	..	0.33	..
United Kingdom	Cheshire West and Chester	20,699	United Kingdom	Cheshire West and Chester	0.7	Italy	Bologna	..	0.31	..
Greece	Athens	132,525	Greece	Athens	44.9	Italy	Catania	..	0.29	..
Greece	Thessaloniki	24,856	Greece	Thessaloniki	8.4	Italy	Florence	..	0.31	..
Hungary	Budapest	129,911	Hungary	Budapest	46.4	Italy	Genoa	..	0.30	..
Hungary	Debrecen	6,759	Hungary	Debrecen	2.4	Italy	Milan	..	0.31	..
Hungary	Gyor	8,711	Hungary	Gyor	3.1	Italy	Naples	..	0.32	..
Hungary	Szekesfehervar	7,632	Hungary	Szekesfehervar	2.7	Italy	Padua	..	0.31	..
Ireland	Dublin	174,706	Ireland	Dublin	48.0	Italy	Palermo	..	0.30	..

Tabel D.1: Lanjutan

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)		
Ireland	Cork	52,523
Italy	Rome	216,147
Italy	Milan	300,231
Italy	Naples	86,497
Italy	Turin	75,673
Italy	Palermo	25,111
Italy	Genoa	32,138
Italy	Florence	39,582
Italy	Bari	20,647
Italy	Bologna	41,747
Italy	Catania	15,283
Italy	Venice	22,239
Italy	Verona	22,899
Italy	Taranto	9,882
Italy	Cagliari	15,719
Italy	Padua	23,591
Italy	Prato	11,690
Italy	Parma	16,972
Italy	Reggio nell'Emilia	13,383
Italy	Rimini	10,057
Korea	Seoul	1,005,538
Korea	Gimhae	147,574
Korea	Dalseong	61,319
Korea	Gwangsan	47,546
Korea	Seo	45,337
Korea	Ulsan	67,566
Korea	Heungdeok	41,158
Korea	Jeju	17,392
Lithuania	Vilnius	24,836
Lithuania	Kaunas	9,809
Mexico	Mexico City	518,787
Mexico	Guadalajara	103,732
Mexico	Monterrey	158,951
Mexico	Queretaro	38,553
Mexico	Merida	23,541
Mexico	Cuernavaca	14,110
Mexico	Aguascalientes	21,581
Netherlands	The Hague	58,288
Netherlands	Amsterdam	195,944
Netherlands	Rotterdam	99,751
Netherlands	Utrecht	56,542
Netherlands	Eindhoven	45,572
Netherlands	Tilburg	14,088
Netherlands	Groningen	25,051
Netherlands	Enschede	16,721
Netherlands	Arnhem	18,964
Netherlands	Breda	19,048
Netherlands	Leiden	15,311
Netherlands	Zwolle	16,525
Netherlands	Alkmaar	11,203

Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional		
Ireland	Cork	14.4
Italy	Rome	9.4
Italy	Milan	13.0
Italy	Naples	3.7
Italy	Turin	3.3
Italy	Palermo	1.1
Italy	Genoa	1.4
Italy	Florence	1.7
Italy	Bari	0.9
Italy	Bologna	1.8
Italy	Catania	0.7
Italy	Venice	1.0
Italy	Verona	1.0
Italy	Taranto	0.4
Italy	Cagliari	0.7
Italy	Padua	1.0
Italy	Prato	0.5
Italy	Parma	0.7
Italy	Reggio nell'Emilia	0.6
Italy	Rimini	0.4
Korea	Seoul	49.0
Korea	Gimhae	7.2
Korea	Dalseong	3.0
Korea	Gwangsan	2.3
Korea	Seo	2.2
Korea	Ulsan	3.3
Korea	Heungdeok	2.0
Korea	Jeju	0.8
Lithuania	Vilnius	27.7
Lithuania	Kaunas	11.0
Mexico	Mexico City	22.2
Mexico	Guadalajara	4.4
Mexico	Monterrey	6.8
Mexico	Queretaro	1.6
Mexico	Merida	1.0
Mexico	Cuernavaca	0.6
Mexico	Aguascalientes	0.9
Netherlands	The Hague	6.5
Netherlands	Amsterdam	21.9
Netherlands	Rotterdam	11.1
Netherlands	Utrecht	6.3
Netherlands	Eindhoven	5.1
Netherlands	Tilburg	1.6
Netherlands	Groningen	2.8
Netherlands	Enschede	1.9
Netherlands	Arnhem	2.1
Netherlands	Breda	2.1
Netherlands	Leiden	1.7
Netherlands	Zwolle	1.8
Netherlands	Alkmaar	1.3

Koefisien gini (pendapatan yang siap dibelanjakan, setelah pajak dan hibah)				
Italy	Rome	..	0.32	..
Italy	Turin	..	0.32	..
Italy	Venice	..	0.29	..
Italy	Verona	..	0.31	..
Norway	Oslo	..	0.27	..
Portugal	Lisbon	..	0.40	..
Portugal	Porto	..	0.39	..
Sweden	Gothenburg	..	0.28	..
Sweden	Malmo	..	0.33	..
Sweden	Stockholm	..	0.31	..
South Africa	Ekurhuleni	..	0.62	..
South Africa	Ethekwini (Durban)	..	0.62	..
South Africa	Johannesburg	..	0.67	..
South Africa	Port Elizabeth	..	0.65	..
South Africa	Tshwane (Pretoria)	..	0.67	..
Turkey	Istanbul	0.37	0.40	..

Sumber: OECD - http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CITIES

Tabel D.1: Lanjutan

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)			Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional		
Norway	Oslo	92,462	Norway	Oslo	28.5
Norway	Bergen	21,384	Norway	Bergen	6.6
Norway	Trondheim	13,880	Norway	Trondheim	4.3
Norway	Stavanger	18,167	Norway	Stavanger	5.6
Poland	Warsaw	192,249	Poland	Warsaw	17.4
Poland	Lodz	29,904	Poland	Lodz	2.7
Poland	Cracow	51,046	Poland	Cracow	4.6
Poland	Wroclaw	37,800	Poland	Wroclaw	3.4
Poland	Poznan	46,242	Poland	Poznan	4.2
Poland	Gdansk	39,841	Poland	Gdansk	3.6
Poland	Bydgoszcz	14,266	Poland	Bydgoszcz	1.3
Poland	Lublin	17,530	Poland	Lublin	1.6
Poland	Katowice	80,837	Poland	Katowice	7.3
Poland	Bialystok	10,005	Poland	Bialystok	0.9
Poland	Rzeszow	12,271	Poland	Rzeszow	1.1
Poland	Czestochowa	9,937	Poland	Czestochowa	0.9
Poland	Bielsko-Biala	10,764	Poland	Bielsko-Biala	1.0
Poland	Tarnow	5,586	Poland	Tarnow	0.5
Portugal	Lisbon	119,484	Portugal	Lisbon	36.8
Portugal	Porto	37,888	Portugal	Porto	11.7
Portugal	Coimbra	7,674	Portugal	Coimbra	2.4
Slovak Republic	Bratislava	32,700	Slovak Republic	Bratislava	19.1
Slovenia	Ljubljana	25,966	Slovenia	Ljubljana	36.8
Slovenia	Maribor	8,903	Slovenia	Maribor	12.6
Sweden	Stockholm	155,127	Sweden	Stockholm	30.8
Sweden	Gothenburg	50,143	Sweden	Gothenburg	10.0
Sweden	Malmo	28,943	Sweden	Malmo	5.8
Sweden	Uppsala	14,295	Sweden	Uppsala	2.8
United States	New York (Greater)	1,676,319	United States	New York (Greater)	8.8
United States	Los Angeles (Greater)	1,138,721	United States	Los Angeles (Greater)	6.0
United States	Chicago	641,022	United States	Chicago	3.4
United States	Washington (Greater)	949,948	United States	Washington (Greater)	5.0
United States	San Francisco (Greater)	785,176	United States	San Francisco (Greater)	4.1
United States	Philadelphia (Greater)	440,309	United States	Philadelphia (Greater)	2.3
United States	Dallas	477,088	United States	Dallas	2.5
United States	Houston	437,076	United States	Houston	2.3
United States	Miami (Greater)	334,968	United States	Miami (Greater)	1.8
United States	Atlanta	358,026	United States	Atlanta	1.9
United States	Boston	400,894	United States	Boston	2.1
United States	Phoenix	232,110	United States	Phoenix	1.2
United States	Detroit (Greater)	254,055	United States	Detroit (Greater)	1.3
United States	Seattle	350,638	United States	Seattle	1.8
United States	Minneapolis	242,197	United States	Minneapolis	1.3
United States	San Diego	224,202	United States	an Diego	1.2
United States	St. Louis	149,353	United States	St. Louis	0.8
United States	Denver	196,188	United States	Denver	1.0
United States	San Antonio	122,777	United States	San Antonio	0.6
United States	Portland	146,760	United States	Portland	0.8
United States	Cincinnati	129,939	United States	Cincinnati	0.7
United States	Las Vegas	111,336	United States	Las Vegas	0.6

Tabel D.1: Lanjutan

PDB (juta dolar AS, harga konstan, PPP konstan)			Porsi PDB kawasan Metropolitan terhadap PDB Nasional		
United States	Orange	127,120	United States	Orange	0.7
United States	Jackson (MO)	121,428	United States	Jackson (MO)	0.6
United States	Indianapolis	130,402	United States	Indianapolis	0.7
United States	Cuyahoga	124,990	United States	Cuyahoga	0.7
United States	New Haven	134,539	United States	New Haven	0.7
United States	Charlotte	137,241	United States	Charlotte	0.7
United States	Sacramento	133,623	United States	Sacramento	0.7
United States	Austin	132,970	United States	Austin	0.7
United States	Columbus	119,809	United States	Columbus	0.6
United States	Milwaukee	96,527	United States	Milwaukee	0.5
United States	Jacksonville	79,606	United States	Jacksonville	0.4
United States	Salt Lake	103,794	United States	Salt Lake	0.5
United States	Tampa-Pinellas	59,732	United States	Tampa-Pinellas	0.3
United States	Jefferson (KY)	71,194	United States	Jefferson (KY)	0.4
United States	Memphis	70,118	United States	Memphis	0.4
United States	Davidson	102,456	United States	Davidson	0.5
United States	Oklahoma	71,927	United States	Oklahoma	0.4
United States	Hartford	94,974	United States	Hartford	0.5
United States	Pittsburgh	103,144	United States	Pittsburgh	0.5
United States	New Orleans	69,980	United States	New Orleans	0.4
United States	Virginia Beach	64,715	United States	Virginia Beach	0.3
United States	Erie (NY)	64,742	United States	Erie (NY)	0.3
United States	Fresno (Greater)	49,785	United States	Fresno (Greater)	0.3
United States	Richmond (Greater)	73,909	United States	Richmond (Greater)	0.4
United States	Wake	74,061	United States	Wake	0.4
United States	Jefferson (AL)	58,265	United States	Jefferson (AL)	0.3
United States	Tampa-Hillsborough	82,215	United States	Tampa-Hillsborough	0.4
United States	Pima	41,257	United States	Pima	0.2
United States	Tulsa	52,923	United States	Tulsa	0.3
United States	Albany	60,515	United States	Albany	0.3
United States	Providence	51,281	United States	Providence	0.3
United States	Albuquerque	40,614	United States	Albuquerque	0.2
United States	Douglas (NE)	59,331	United States	Douglas (NE)	0.3
United States	Rochester (NY)	50,189	United States	Rochester (NY)	0.3
United States	Kern	46,490	United States	Kern	0.2
United States	Ventura	55,950	United States	Ventura	0.3
United States	El Paso (TX)	29,885	United States	El Paso (TX)	0.2
United States	East Baton Rouge	49,518	United States	East Baton Rouge	0.3
United States	Worcester	42,469	United States	Worcester	0.2
United States	Hidalgo	21,488	United States	Hidalgo	0.1
United States	Richland	40,128	United States	Richland	0.2
United States	Lehigh	37,453	United States	Lehigh	0.2
United States	Sarasota	31,293	United States	Sarasota	0.2
United States	Montgomery (OH)	35,118	United States	Montgomery (OH)	0.2
United States	San Joaquin	29,455	United States	San Joaquin	0.2
United States	Kent	41,839	United States	Kent	0.2
United States	Charleston	39,145	United States	Charleston	0.2
United States	Onondaga	38,896	United States	Onondaga	0.2
United States	El Paso (CO)	34,988	United States	El Paso (CO)	0.2

Sumber: OECD - http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CITIES

Referensi

Abdel-Rahman, H. M. and A. Anas (2004) 'Theories of systems of cities' in J. V. Henderson and J. F. Thisse (eds) *Handbook of Regional and Urban Economics*, vol. 4, Elsevier, Oxford, pp.2293–2339

Abouzeid, R. (2019) 'How women are stepping up to remake Rwanda', https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/10/how-women-are-remaking-rwanda-feature/, last accessed 24 September 2020

Acemoglu, D., S. Naidu, P. Restrepo, and J. A. Robinson (2019) 'Democracy Does Cause Growth', *Journal of Political Economy* **127**(1): 47–100

ADB (Asian Development Bank) (2013) *Annual report: Promoting environmentally sustainable growth in Asia and the Pacific*, https://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/ 42741/adb-annual-report-2013.pdf, last accessed 22 September 2020

Adegun, O.B. (2015) 'State-led versus community- initiated: Storm water drainage and informal settlement intervention in Johannesburg, South Africa', *Environment and Urbanization* **27** (2): 407–420

Adelekan, I., C. Johnson, M. Manda, D. Matyas, B.U. Mberu, S. Parnell, M. Pelling, D. Satterthwaite, and J. Vivekananda (2015) 'Disaster risk and its reduction: An agenda for urban Africa', *International Development Planning Review* **37** (1): 33–43

Ades, A. F. and E. L. Glaeser (1995) 'Trade and Circuses: Explaining Urban Giants', *The Quarterly Journal of Economics* **110**(1): 195–227

Adjei Mensah, C., L. Andres, P. Baidoo, J. K. Eshun, and K. B. Antwi (2017) 'Community Participation in Urban Planning: The Case of Managing Green Spaces in Kumasi, Ghana', *Urban Forum* **28** (2):125–141

Administrative Staff College of India (2008) *Social Accountability in Urban Governance: Indian Case Studies*, Final Report Submitted to The World Bank Institute, https://cuts-cart.org/pdf/Social_Accountability_in_Urban_Governance.pdf, last accessed 24 September 2020

African Development Bank Group (AfDB) (undated) 'Senegal and the AfDB', https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/senegal/senegal-and-the-afdb/, last accessed 25 September 2020

African Union (2020) *Impact of the Coronavirus (COVID-19) on The African Economy*, https://au.int/sites/default/files/documents/38326-doc-covid19_impact_on_african_economy.pdf, last accessed 21 September 2020, last accessed 22 September 2020

Agarwal.V, K. Pokharel and R. Roy (2020) 'Village life in India won't be the same as coronavirus chases migrants out of cities' *The Wall Street Journal*, 18 June, https://www.wsj.com/articles/village-life-in-indiawont-be-the-same-as-coronavirus-chasesmigrants-out-of-cities-11592478003, last accessed 23 September 2020

Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México (2020) https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencionviolencia-mujeres-durante-contingenciacovid19/information/, last accessed 24 September 2020

Agencia EFE (2015) 'Sexual harassment of women on public transit remains a problem in Mexico City', https://www.efe.com/efe/english/life/sexual-harassment-of-womenon-public-transit-remains-a-problem-inmexico-city/50000263-2639795, last accessed 22 September 2020

Agyeman, J. (2013) *Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, And Practice*, Zed Books Ltd.

Agyeman, J., D. Schlosberg, L. Craven, and C. Matthews (2016) 'Trends and directions in environmental justice: From inequity to everyday life, community, and just sustainabilities', *Annual Review of Environment and Resources* **41**:321–340

Ahmad E., D. Dowling, C. Denise, S. Colenbrander, and N. Godfrey (2019) *Scaling Up Investment for Sustainable Urban Infrastructure: A Guide to National and Subnational Reform*, London and Washington D. C., http://newclimateeconomy.net/content/cities-workingpapers, last accessed 25 September 2020

Ahmad, E., D. Dowling, D. Chan, S. Colenbrander and N. Godfrey (2019) *Scaling Up Investment for Sustainable Urban Infrastructure: A Guide to National and Subnational Reform* Coalition for Urban Transitions, London and Washington, DC, http://newclimateeconomy.net/content/citiesworking-papers, last accessed 25 September 2020

Ahn, M.J. (2020) 'Combating COVID-19: Lessons from South Korea' *TechTank,* 13 April, https://www.brookings.edu/blog/techtank/2020/04/13/combating-covid-19-lessons-from-south-korea/, last accessed 20 April 2020

Al Jazeera and News Agencies (2020) 'Concerns after Mumbai's Dharavi slum reports COVID-19 cases', *Al Jazeera* ,3 April, https://www.aljazeera.com/news/2020/04/concerns-mumbai-dharavi-slum-reportscovid-19-cases-200403053646046.html, last accessed 21 September 2020

Alam, M. (2014) *Intergovernmental Fiscal Transfers in Developing Countries: Case Studies from the Commonwealth*, Commonwealth Secretariat, London

Albino, V., U. Berardi, and R. M. Dangelico (2015) 'Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives', *Journal of Urban Technology* **22** (1):3–21. doi: 10.1080/10630732.2014.942092

Albouy, D. (2008*) Are Big Cities Bad Places to Live? Estimating Quality of Life Across Metropolitan Areas*, NBER Working Paper 14472

Albouy, D. and B. Stuart (2014) *Urban Population and Amenities: The Neoclassical Model of Location*, NBER Working Paper 19919

Alderman, L. (2020) 'Corona cycleways' become the new post-confinement commute', *The New York Times*, 12 June, https://www.nytimes.com/2020/06/12/business/parisbicycles-commute-coronavirus.html, last accessed 22 September 2020

Allegretti, G., N. Duxbury, M. Serapioni, E. García Chueca, and M. Fricaudet (2016) 'More inclusive cities and territories', GOLD IV Think Piece, Centros de Estudos Sociais (CES) and UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, https://www.uclg.org/sites/default/files/inclusive_cities_tp_en_final.pdf, last accessed 25 September 2020

AlMujadidi, L., C. Azoury, D. Schmautzer, and J. Woetzel (2019) 'Unlocking the full potential of city revenues' McKinsey and Company, https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/unlocking-thefull-potential-of-city-revenues, last accessed 25 September 2020

Andersson, L. (2015) *Overview of Municipal Pooled Financing Practices —Prepared for the participants of the European Study Tour,* https://www.maproductions.se/wpcontent/2016/04/Overview-of-municipalpooled-financing-practices-study-tour-2015.pdf, last accessed 25 September 2020

Andrewartha, J. (2019) 'Support greta's call for a global climate strike', *Green Left Weekly* (1223):7

Angel, S. (2012) *Planet of Cities*, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA

Angélil, M. and R. Hehl (eds) (2012) *Informalize! Essays on the Political Economy of Urban Form*, Ruby Press, Berlin

Anguelovski, I., J. J. Connolly, L. Masip, and H. Pearsall (2018) 'Assessing green gentrification in historically disenfranchised neighborhoods: A longitudinal and spatial analysis of Barcelona', *Urban Geography* **39** (3):458–491

Anguelovski, I., J. J. T. Connolly, H. Pearsall, G. Shokry, M. Checker, J. Maantay, K. Gould, T. Lewis, A. Maroko, and J. T. Roberts (2019) 'Opinion: Why green "climate gentrification" threatens poor and vulnerable populations', *Proceedings of the National Academy of Sciences* **116** (52):26139–26143. doi: 10.1073/pnas.1920490117

Arimah, B. C. (2010) 'The Face of Urban Poverty: Explaining the Prevalence of Slums in

Developing Countries' in J. Beall, B. Guha-Khasnobis and R.i Kanbur (eds) *Urbanization and Development: Multidisciplinary Perspectives*, Oxford University Press, Oxford

Aristizabal, N. and A.O. Gomez (2002) 'Are services more important than titles in Bogotá?', in G. Payne (ed), *Land, Rights and Innovation: Improving Tenure Security for the Urban Poor*, ITDG Publishing, London

Arku, G. (2006) 'Housing and economic development debate revisited: Economic significance of housing in developing countries', *Journal of Housing and the Built* Environment **21** (4): 377–395

Arku, G. (2009a) 'Rapidly growing African cities need to adopt smart growth policies to solve urban problems', *Urban Forum* **20** (3): 253–270

Arku, G. (2009b) 'The economics of housing programmes in Ghana, 1929–1966' *Planning Perspectives* **24** (3): 281-300

Arku, G. (2009c) 'Housing policy changes in Ghana in the 1990s', *Housing Studies* **24** (2): 261–272

Arku, G. and R. Harris (2005) 'Housing as a tool of economic development since 1929', *International Journal of Urban and Regional Research* **29** (4): 895–915

Arku, G. and R. Sadler (2017) 'Healthy cities', in A. Bain and L. Peak (eds) *Urbanization in a Global Context: A Canadian Readers Guide*, Oxford University Press, pp 361–376

Aronson, M. F., F. A. La Sorte, C. H. Nilon, M. Katti, M. A. Goddard, C. A. Lepczyk, P. S. Warren, N. S. Williams, S. Cilliers, and B. Clarkson (2014) 'A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers', *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* **281** (1780):20133330

ARUP (undated) 'The Lahore safe city project—Advanced digital and security technologies help promote a safer Lahore', https://www.arup.com/projects/the-lahore-safe-cityproject, last accessed 25 September 2020

Asher, S. (2020) 'Coronavirus in Singapore: The garden city learning to love the wild', *BBC News*,14 June, https://www.bbc.com/news/world-asia-52960623

Asher, S., J. P. Chauvin, and P. Novosad (2019) *Rural Spillovers of Urban Growth*, Inter-American Development Bank, Washington, DC

Associated Press and dailymail.com (2020) 'Black people make up one third of coronavirus deaths making up 14 percent of the American population, new data shows', https://www.dailymail.co.uk/news/article-8231955/Racial-toll-virus-growsstarker-data-emerges.html, last accessed 21 September 2020

Astara, H. (2012) *Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development*, http://sdct-journal.com/images/Issues/2015/7.pdf, last accessed 24 September 2020

Au, C. and J. V. Henderson (2006) 'Are Chinese Cities Too Small?', *The Review of Economic Studies* **73**(3): 549–576

Ayuntamiento de Bacerlona (2018) *Estrategia de inclusion y de reduccion de las desiguladades sociales de Barcelona 2017-2027,* http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/, last accessed 24 September 2020

Bäckstrand, K., J. W. Kuyper, B.-O. Linnér, and E. Lövbrand (2017) 'Non-state actors in global climate governance: From Copenhagen to Paris and beyond', Routledge

Badgett, M.V. L. (2014) *The Economic Cost of Stigma and the Exclusion of LGBT People: A Case Study of India*, World Bank, Washington, DC

Bah E.M., I. Faye, and Z.F. Geh (2018) 'The housing sector in Africa: Setting the scene', in *Housing Market Dynamics in Africa*, Palgrave Macmillan, London

Bai, X., R. J. Dawson, D. Ürge-Vorsatz, G. C. Delgado, A. S. Barau, S. Dhakal, D. Dodman, L. Leonardsen, V. Masson-Delmotte, and D. C. Roberts (2018) 'Six research priorities for cities and climate change', Nature Publishing Group

Bai, X., T. McPhearson, H. Cleugh, H. Nagendra, X. Tong, T. Zhu, and Y.-G. Zhu (2017) 'Linking Urbanization and the Environment: Conceptual and Empirical Advances', *Annual Review of Environment and Resources* **42** (1):215–240

Bain, P. G., T. L. Milfont, Y. Kashima, M. Bilewicz, G. Doron, R. B. Garðarsdóttir, V. V. Gouveia, Y. Guan, L.-O. Johansson, and C. Pasquali (2016) 'Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the world', *Nature Climate Change* **6** (2):154–157

Baker, J. L. (2008) *Urban Poverty: A Global View*, World Bank Urban Papers, http://documents1.worldbank.org/curated/en/954511468315832363/pdf/430280NWP0Glob10Box327344B01PUBLIC1.pdf, last accessed 24 September 2020

Bakker, J. D., C. Parsons, and F. Rauch (2019) *Migration and Urbanization in Post-Apartheid South Africa*, World Bank, Washington DC Balmer. C. (2020) Italy's coronavirus deaths surge by 627 in a day, elderly at high risk, https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirus-italy-tally/italys-coronavirusdeaths-surge-by-627-in-a-day-elderly-athigh-risk-idUSKBN2172VL, last accessed 22 September 2020

Bangladeshi and Garment Manufacturers Exporters Association (2020) 'Impact of COVID-19 on the Bangladesh RMG Industry', https://www.bgmea.com.bd/, last accessed 22 September 2020

Barber, B. (2016) 'Can mayors really rule the world?' in *A new urban paradigm: Pathways to sustainable development —Policy in Focus* **13**(3):9–11

Barbier, E. B. (2009) *A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery*, https://www.cbd.int/development/doc/UNEPgloba l-green-new-deal.pdf, last accessed 22 September 2020

Barnett, C. and S. Parnell (2016) 'Ideas, implementation and indicators: Epistemologies of the post-2015 urban agenda' *Environment and Urbanization* **28**(1): 87–98

Barragan, J.M. and M. De Andrés (2015) 'Analysis and trends of the world's coastal cities and agglomerations', *Ocean and Coastal Management* **114**:11–20

Barro, R. (2001) 'Human capital and growth', *American Economic Review* **91**(2): 12–17,

Barros, R. and J. Sampaio (2016) 'Do citizens trust electronic participatory budgeting? Public expression in online forums as an evaluation method in Belo Horizonte' *Policy and Internet* **8**(3): 292–312

Bartlett, S. and D. Satterthwaite (2016) *Cities on a Finite Planet: Towards Transformative Responses to Climate Change*, Routledge

Bartolini, D. (2015) *Municipal Fragmentation and Economic Performance of OECD TL2 Regions,* OECD Regional Development Working Papers 2015/02, https://dx.doi.org/10.1787/5jrxqs60st5h-en, last accessed 28 April 2020

Batty, M., K. W. Axhausen, F. Giannotti, A. Pozdnoukhov, A. Bazzani, M. Wachowicz, G. Ouzounis, and Y. Portugali (2012) 'Smart cities of the future', *The European Physical Journal Special Topics* **214** (1):481–518

Baum-Snow,N. and R. Pavan (2012) 'Understanding the city size wage gap'*, Review of Economic Studies* **79**: 88–127

Bay Area Economic Council (BASIC) (2019) 'The Bay Area Innovation System', http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/BayAreaInnovationSystem2019.pdf, last accessed 24 September 2020

BBC (2019) 'Essex lorry deaths: What we know', *BBC News*, 4 November, https://www.bbc.com/news/world-europe-50159748, last accessed 22 September 2020

BBC (2020) 'Coronavirus wreaks havoc in African American neighbourhoods, *BBC News*, 7 April, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52194018 , last accessed 22 September 2020

Beall, J., B. Guha-Khasnobis, and R. Kanbur (eds) (2010) *Urbanisation and Development: Multidisciplinary Perspectives*, Oxford University Press, Oxford

Benson, M. and S. Faiez (2020) *Reflexivity in The Age of Pandemia: Adaptive Policy Making and The Covid-19 Crisis,* Urban Policy Series, Issue No. (3April) Thinkcity Institute, Kuala Lumpur

Berrisford, S. and P. McAusian, (2017) *Reforming Urban Laws in Africa. A Practical Guide*, Centre for Cities (ACC), Cities Alliance, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) and Urban LandMark, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/ulr-report_final_lr.pdf, last accessed 24 September 2020

Bhalla, N. (2019) 'Kenyan scientist builds with bottles to beat plastic pollution', *Reuters*, 13 December, https://www.reuters.com/article/us-kenya-environment-pollutiontrfn/kenyan-scientist-builds-with-bottlesto-beat-plastic-pollution-idUSKBN1YH0UL, last accessed 24 September 2020

Bhan, G., S. Srinivas and V. Watson (2018) *The Routledge Companion to Planning in the Global South*, Routledge, London and New York

Bhatkal, T and T. Lucci (2015) *Community-Driven Development in the Slums: Thailand's experience*, ODI Development Progress, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiasset/publications-opinion-files/9669.pdf, last accessed 28 September 2020

Bigio, A. G. and Dahiya, B. (2004) *Urban Environment and Infrastructure: Toward Livable Cities*, Directions in Development Series, World Bank, Washington, DC

Bigio, A.G. and Dahiya, B. (2003) *World Bank Investments for the Urban Environment*, Environment Strategy Note No. 8, World Bank, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/366001468151475459/World-Bank-investments-for-the-urbanenvironment, last accessed 25 September 2020

Blakeley, G. (2010) 'Governing ourselves: Citizen participation and governance in Barcelona and Manchester', *International Journal of Urban and Regional Research* **34** (1):130–145

Bliss, L. (2016) 'How "maintainers," not "innovators," make the world Turn' *CityLab*, https://www.citylab.com/design/2016/04/how-maintainersnot-innovators-make-the-worldturn/477468/?utm_campaign=citylab&utm_term=2019-10-25T21%3A31%3A53&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=edit-promo, last accessed 24 September 2020

Bloom, D. E. and T. Khanna (2007) 'The urban revolution' *Finance and Development Quarterly*, **44** (3): 9-14, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/09/pdf/bloom.pdf, last accessed 24 September 2020

Bloom, D., D. Canning, and G. Fink (2008) 'Urbanization and the wealth of nations', *Science* **319**: 772–775

BLS (Bureau of Labor Statistics) (2020) *The Employment Situation — August 2020*, https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf, last accessed 21 September 2020

Bodansky, D. (2016) 'The Paris climate change agreement: A new hope?', *American Journal of International Law* **110** (2):288–319

Bonanno, M (2017) 'The real impact of US withdrawal from the Paris Climate Accord', https://impakter.com/real-impact-us-withdrawal-paris-climate-accord/, last accessed 22 September 2020

Bond, P. (2016) 'Who Wins From" Climate Apartheid"?: African Climate Justice Narratives About the Paris COP21', *New Politics* **15** (4):83

Bonilla, M. and I. Zapparoli (2017) *The Challenge of Financing Urban Infrastructure for Sustainable Cities*, Inter-American Development Bank (IDB) https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Challenge-of-Financing-Urban-Infrastructurefor-Sustainable-Cities.pdf, last accessed 25 September 2020

Borck, R. and J. K. Brueckner (2018) 'Optimal energy taxation in cities', *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists* **5**(2): 481–516

Boston Consulting Group (2018) *Unlocking Cities: The Impact of Ridesharing Across India,* The Boston Consulting Group, https://imagesrc.bcg.com/Images/BCG-Unlocking-Cities-Ridesharing-India_tcm9-185213.pdf, last accessed 25 September 2020

Boston Consulting Group (2020) 'COVID-19 threatens to shutter Latin America's small businesses' April 19, https://www.bcg.com/publications/2020/covid-19-impacts-smallbusinesses-latin-america.aspx, last accessed 13 May 2020

Bouchet, M., S. Liu, J. Parilla, and N. Kabbani (2018) *Global Metro Monitor 2018*, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/Brookings-Metro_Global-Metro-Monitor-2018-Executive-summary.pdf, last accessed 22 September 2020

Bouton, S., D. Newsome, and J.Woetzel (2015) 'Building the cities of the future with green districts', McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/building-thecities-of-the-future-with-green-districts, last accessed 25 September 2020

Brenner, N. (2013) 'Theses on urbanization', *Public culture* **25** (1 (69)):85–114

Broadband Commission for Sustainable Development (2017) *The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development September 2017*, https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POLBROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf, last accessed 24 September 2020

Brooks, R., E. Ribakova, S. Lanau, J. Fortun, and B. Hilgenstock (2020) *Capital Flows Report: Suden Stop in Emerging Markets*, Institute of International Finance, https://www.iif.com/portals/0/files/content/2_IIF2020_April_CFR.pdf, last accessed 25 September 2020.

Brown, C., A. de Lannoy, D. McCracken, T. Gill, M. Grant, H. Wright and S. Williams (2019) 'Special issue: Child-friendly cities', *Cities & Health* **3**:(1-2): 1–7

Brown, D. and G. McGranahan (2016) 'The urban informal economy, local inclusion and achieving a global green transformation', *Habitat international* **53**:97–105

Brown, D., G. McGranahan, and D. Dodman (2014) *Urban Informality and Building a More Inclusive, Resilient and Green Economy*, IIED, London

Brown, K. (2020) 'Global issues to watch in 2020', https://unfoundation.org/blog/post/5-global-issues-to-watch-in-2020/, last accessed 24 September 2020

Brueckner, J. K. and K. S. Sridhar (2012) 'Measuring welfare gains from relaxation of land-use restrictions: The case of India's building-height limits', *Regional Science and Urban Economics* **42**(6): 1061–1067

Buchanan, L., Q. Bui, and J. K. Patel (2020) 'Black Lives Matter may be the largest movement in U.S. history' *The New York Times*, 3 July, https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floydprotests-crowd-size.html, last accessed 24 September 2020

Buhaug, H. and H. Urdal (2013) 'An urbanization bomb? Population growth and social disorder in cities', *Global Environmental Change* **23** (1):1–10

Bulkeley, H. (2019) *Accomplishing Climate Governance,* Cambridge University Press, Cambridge

Burdet, R. and P. Rodes (eds) (2018) *Shaping Cities in an Urban Age*, Phaidon Press, London

Burger, M. J., B. Van der Knaap, and R. S. Wall (2012) 'Revealed competition for greenfield investments between European regions', *Journal of Economic Geography* **13**(4): 619–648

Butt, N., F. Lambrick, M. Menton, and A. Renwick (2019) 'The supply chain of violence', *Nature Sustainability* **2** (8):742–747

C40 and Ramboll (2018) 'Urban climate impacts action framework; A framework for describing and measuring the wider impacts of urban climate action', https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1605_C40_UCAIF_report_V3.original.pdf?1518203136, last accessed 28 September 2020

C40 Cities (2019) 'Hanoi's bus rapid transit system – The key to sustainable urban development', https://www.c40.org/case_studies/hanoi-s-bus-rapid-transit-systemthe-key-to-sustainable-urban-development

C40 Cities (2020) "Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force Statement of Principles"https://www.c40.org/other/covid-taskforce, last accessed 22 September 2020

C40-and EIT Climate-KIC (2018) *Municipalityled circular economy case studies*, C40, London

Cabannes, Y. and B. Lipietz (2017) 'Revisiting the democratic promise of participatory budgeting in light of competing political, good governance and technocratic logics', *Environment and Urbanization*, IIED, London, pp. 1–18

Cabannes, Y. (eds) (2018) *Highlights on some Asian and Russian Participatory Budgeting Pioneers*, KKF, IODP, UCL/DPU, https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/pub_asiarussia_2.pdf, last accessed 29 September 2020

CAF (Development Bank of Latin America) (2017) 'Latin America must invest at least 5 percent per year in infrastructure to take the leap toward competitiveness', https://www.caf.com/en/currently/news/2017/05/latin-america-must-invest-at-least-5-percent-per-year-in-infrastructure-to-makethe-leap-toward-competitiveness/, last accessed 25 September 2020

Cahill, F. and E. Ryan (2019) 'Women and Cities', Global Compact Cities Programme, https://citiesprogramme.org/wp-content/uploads/2019/10/Case-Study-Porto-Alegre-Chocolatao.pdf, last accessed 24 September 2020

Calì, M. and C. Menon (2013) 'Does urbanization affect rural poverty? Evidence from Indian

districts', *World Bank Economic Review* **27** (2): 171–201
Calnec-Sugin, T. and C. Heeckt (2020) 'Mobility for the masses: The essential role of informal transport in the COVID-19 recovery', LSE, https://www.lse.ac.uk/cities/publications/blogs/Mobility-for-the-Masses, last accessed 23 September 2020
Campante, F. R. and Q. Do (2014) 'Isolated capital cities, accountability, and corruption: Evidence from US States', *American Economic Review* **104**(8): 2456–2481
Campante, F. R., Q. Do, and B. Guimaraes (2019) 'Capital cities, conflict, and misgovernance', *American Economic Journal: Applied Economics* **11**(3): 298–337
Campbell K, J. Rising, J.M. Klopp and J. Mwikali (2019) 'Accessibility Across Transport Modes and Residential Types in Nairobi', *Journal of Transport Geography* **74**: 77–90
Caprotti, F., R. Cowley, A. Datta, V. Castán Broto, E. Gao, L. Georgeson, C. Herrick, N. Odendaal, and S. Joss (2017) 'The New Urban Agenda: Key opportunities and challenges for policy and practice', *Urban research & practice* **10** (3):367–378
Carlos, V., J. Vetterly, J. Anderson, S. Goldstein, and V. J. DeSantis (2015) *Why Project Bonds Are on the Rise in Latin America*, https://www.whitecase.com/publications/insight/why-project-bonds-are-rise-latin-america
Carmin, J., I. Anguelovski, and D. Roberts (2012) 'Urban Climate Adaptation in the Global South: Planning in an Emerging Policy Domain', *Journal of Planning Education and Research* **32** (1):18–32
Carozzi, F., S. Provenzano and S. Roth (2020) *Urban Density and Covid-19,* CEP Discussion Paper No 1711, London School of Economics and Political Science, London, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1711.pdf, last accessed 23 September 2020
Cartwright, A., I. Palmer, A. Taylor, E. Pieterse, S. Parnell, and S. Colenbrander (2018) *Developing Prosperous and Inclusive Cities in Africa - National Urban Policies to the Rescue?* Coalition for Urban Transitions, London and Washington, DC
Cartwright, A., J. Blignaut, and M. De Wit, (2013) 'Economics of climate change adaptation at the local scale under conditions of uncertainty and resource constraints: The case of Durban, South Africa' *Environment and Urbanization* **25** (1):139–156
Carvalho, B., M. Cavalcanti and V. R. Venuturupalli (eds) (2016) *Occupy All Streets: Olympic Urbanism and Contested Futures in Rio de Janeiro*, Terreform, New York
Castán Broto, V. (2014) 'Planning for climate change in the African city', *International Development Planning Review* **36** (3):257–264
Castán Broto, V. (2017a) 'Energy sovereignty and development planning: The case of Maputo, Mozambique', *International Development Planning Review* **39** (3):229–248
Castán Broto, V. (2017b) 'Urban governance and the politics of climate change', *World development* **93**:1–15
Castán Broto, V. and H. Sudhira (2019) 'Engineering modernity: Water, electricity and the infrastructure landscapes of Bangalore, India', *Urban Studies*:0042098018815600
Castán Broto, V. and L. Westman (2017) 'Just sustainabilities and local action: Evidence from 400 flagship initiatives', *Local environment* **22** (5):635–650
Castan Broto, V. and L. Westman (2020) 'Ten years after Copenhagen: Re-imagining climate change governance in urban areas', *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*
Castán Broto, V. and S. Neves Alves (2018) 'Intersectionality challenges for the coproduction of urban services: Notes for a theoretical and methodological agenda', *Environment and Urbanization* **30** (2):367–386
Castán Broto, V., L. Stevens, E. Ackom, J. Tomei, P. Parikh, I. Bisaga, L. S. To, J. Kirshner, and Y. Mulugetta (2017) 'A research agenda for a people-centred approach to energy access in the urbanizing global south', *Nature Energy* **2** (10):776–779
Castillo Cabrera, F. and D. Haase (2018) 'Guatemala City: A socio-ecological profile', *Cities* **72**:379–390
Catalytic Communities (2018) *Sustainable Favela Network: Map (2017),* http://catcomm.org/wp-content/uploads/2018/02/Sustainable-Favela-Network-Map-2017-Final-Report.pdf, last accessed 23 September 2020
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (2020) 'Health equity considerations and racial and ethnic minority groups', https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnicminorities. html, last accessed 22 September 2020
CDC COVID-19 Response Team (2020) Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) —United States, February 12–March 16, 2020, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6912e2-H.pdf, last accessed 21 September 2020
Cerdà, A., Ó. González-Pelayo, A. Giménez-Morera, A. Jordán, P. Pereira, A. Novara, E. C. Brevik, M. Prosdocimi, M. Mahmoodabadi, and S. Keesstra (2016) 'Use of barley straw residues to avoid high erosion and runoff rates on persimmon plantations in Eastern Spain under low frequency– high magnitude simulated rainfall events', *Soil Research* **54** (2):154–165
Cervero, R. and A. Golub (2007) 'Informal transport: A global perspective', *Transport policy* **14** (6):445–457
Chami, J. (2020) 'As cities grow, so do the numbers of homeless', https://yaleglobal.yale.edu/content/cities-grow-so-do-numbers-homeless, last accessed 22 September 2020
Chan, S., H. van Asselt, T. Hale, K. W. Abbott, M. Beisheim, M. Hoffmann, B. Guy, N. Höhne, A. Hsu, P. Pattberg, P. Pauw, C. Ramstein, and O. Widerberg (2015) 'Reinvigorating International Climate Policy: A Comprehensive Framework for Effective Nonstate Action', *Global Policy* **6** (4):466–473
Chang, Y., C. Lee and Y. Jung (2018) 'Revival of bus: Seoul Bus Reform in 2004', *City Voices* **9** (1):13–15
Chant, S. (2013) 'Cities through a "gender lens": A golden 'urban age' for women in the global South?', *Environment and Urbanization* **25** (1): 1–21
Chant, S. and C. Mcilwaine, (2013) 'Gender, urban development and the politics of space, e-international relations', https://www.e-ir.info/2013/06/04/gender-urbandevelopment-and-the-politics-of-space/,last accessed 22 September 2020
Chatwin, M. and G. Arku (2018) 'Co-creating open government action plans: The case of Sekondi-Takoradi Metropolitan Assembly, Ghana' *Growth and Change*, **49**(2):374–393
Chatwin, M., G. Arku, and E. Cleave (2019) 'Defining subnational open government: Does local context influence policy and practice' *Policy Sciences* **52** (3):451–479
Chauvin, J. P., E. Glaeser, Y. Ma, and K. Tobio (2017) 'What is different about urbanization in rich and poor countries? Cities in Brazil, China, India and the United States', *Journal of Urban Economics* **98**(C): 17–49
Chemnick, J. (2018) 'U.S. Stands with Russia and Saudi Arabia against climate science', Scientific American, 10 December, https://www.scientificamerican.com/article/us-stands-with-russia-and-saudi-arabiaagainst-climate-science/, last accessed 22 September 2020
Chen, K., M. Wang, C. Huang, P.L. Kinney, and A.T. Paul (2020) *Air Pollution Reduction and Mortality Benefit during the COVID-19 Outbreak in China*, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039842v1.full.pdf, last accessed 21 September 2020
Chen, S. and M. Ravallion (2007) *Absolute Poverty Measures for the Developing World, 1981–2004*, Proceedings of the National Academy of Sciences, www.pnas.org/content/104/43/16757.full.pdf, last accessed 24 September 2020
Cheung, H.(2020) 'Coronavirus: US unemployment claims hit 33.3 million amid virus', *BBC News*, https://www.bbc.com/news/business-52570600, last accessed 22 September 2020
Child Friendly Cities Initiative (2020) 'Growing cities', https://childfriendlycities.org/growing-cities/#:~:text=Of%20the%204%20billion%20people,many%20of%20them%20in%20slums, last accessed 24 September 2020
Chinese Center for Disease Control and Prevention (2020) 'The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)—China, 2020', *CCDC Weekly* 2(**8**): 113–122
Cho, R. (2017) 'What can we do about the growing E-waste problem?' *State of the Earth Blog*, 27 August, Earth Institute, Columbia University, https://blogs.ei.columbia.

edu/2018/08/27/growing-e-waste-problem/, last accessed 24 September 2020
Ciccone, A. and R. E. Hall (1996) *Productivity and the Density of Economic Activity,* NBER Working Papers 4313
Ćirković, S. (2019) 'Bolsa Família in Brazil', Centre for Public Impact, https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/bolsa-familia-in-brazil/, last accessed 22 September 2020
Cities Alliance (2015) *Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for a successful New Urban Agenda,* https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Opportunities%20for%20the%20New%20Urban%20Agenda.pdf, last accessed 21 September 2020
Cities Climate Finance Leadership Alliance (2015) *State of City Climate Finance 2015*, Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA), New York
Cities Today (2020)'Seoul mayor explains how the city is tackling COVID-19', *Cities Today*, 26 March, https://cities-today.com/howseoul-contained-covid-19, last accessed 28 September 2020
City for All Women Initiative (2015) *Advancing Equity and Inclusion: A Guide for Municipalities*, https://www.cawi-ivtf.org/sites/default/files/publications/advancing-equity-inclusion-web_0.pdf, last accessed 24 September 2020
City Mayors (2015) 'German mayors welcome refugees despite the immediate challenges' *Metro News*, 23 September, http://www.citymayors.com/news/metronews_ europe.html
City of Buenos Aires (2018) *Buenos Aires Action Plan. A Report,* https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/Buenos_Aires_Action_Plan.pdf, last accessed 22 September 2020
City of New York (2019) 'Voluntary Local Review Declaration' https://www1.nyc.gov/site/international/programs/voluntary-local-review-declaration.page, last accessed 28 September 2020
City of Vienna (2013) *Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development*, https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf, last accessed 22 September 2020
Cleave, E., G. Arku, and M. Chatwin (2017) 'Cities' economic development efforts in a changing global economy: Content analysis of economic development plans in Ontario, Canada', *Area.* **49**(3):359–368
Climate Bonds Initiative (2020) '2019 Green Bond Market Summary–February 2020', https://www.climatebonds.net/files/reports/2019_annual_highlights-final.pdf, last accessed 25 September 2020
Coalition for Urban Transitions (2019) *Climate Emergency, Urban Opportunity: How National Governments can Secure Economic Prosperity and Avert Climate Catastrophe by Transforming Cities*, https://urbantransitions.global/urban-opportunity, last accessed 28 September 2020
Cobbinah, P., M. Erdiaw-Kwasie, and P. Amoateng (2015) 'Africa's urbanisation: Implications for sustainable development' *Cities* **47**: 62–72
Cobham, A. and P. Janský (2017) *Global Distribution Of Revenue Loss From Tax Avoidance: Re-Estimation And Country Results*, WIDER Working Paper 2017/55,UNU-WIDER, Helsinki
Coletto, D. (2010) *The Informal Economy and Employment in Brazil: Latin America, Modernization and Social Changes*, Palgrave Macmillan, New York.
Collier, P., E. Glaeser, A. Venables, P. Manwaring, and M. Blake (2018) *Land and Property Taxes for Municipal Finance*, International Growth Center, London School of Economicand Political Science, London
Combes, P. and L. Gobillon (2015) 'The empirics of agglomeration economies', in G. Duranton, J. V. Henderson and W. C. Strange (eds) *Handbook of Regional and Urban Economics*, vol. 5, Elsevier, Oxford, pp.247–348
Combes, P., G. Duranton, L. Gobillon, D. Puga, and S. Roux (2012) 'The productivity advantages of large cities: Distinguishing agglomeration from firm selection', *Econometrica* **80**(6): 2543–2594
Conger, K. (2020) 'Uber and Lyft Are Searching for Lifelines', *The New York Times*, 17 April, https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/uber-lift-coronavirus.html, last accessed 21 September 2020
Convergence (2018) *The State of Blended Finance 2018,* https://www.convergence.finance/resource/7LEqTu0YeceaQugSWaSKSk/view, last accessed 25 September 2020
Correia, T. P (1993) 'Threatened landscape in Alentejo, Portugal: The 'montado'and other 'agro-silvo-pastoral'systems', *Landscape and Urban Planning* **24** (1-4):43–48
Coulibaly, S., U. Deichmann, W. R. Dillinger, M. I. Heroiu, I. N. Kessides, C. Kunaka, and D. Saslavsky (2012) *Eurasian Cities: New Realities along the Silk Road*, World Bank, Washington, DC
Critical Ecosystem Partnership Fund (2020) 'Explore the biodiversity hotspots' https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots, last accessed 22 September 2020
Croese, S. (2019) 'Cities stepping up the game', https://www.mistraurbanfutures.org/en/blog/cities-stepping-game, last accessed 28 September 2020
Dahiya B. and B. Gentry (2020) 'Public-private partnerships to improve urban environmental services', in S. Cheema (eds) *Governance for Urban Services: Access, Participation, Accountability, and Transparency. Advances in 21st Century Human Settlements*. Springer, Singapore
Dasgupta, B., S. V. Lall, and N. Lazano-Garcia (2014) *Urbanization and Housing Investment*. Policy Research Paper 7100, WorldBank. Washington, DC
Datta, A. (2015) 'New urban utopias of postcolonial India: 'Entrepreneurial urbanization'in Dholera smart city, Gujarat', *Dialogues in Human Geography* **5** (1):3–22
Davis, J. C. and J. V. Henderson (2003) 'Evidence on the political economy of the urbanization process', *Journal of Urban Economics* **53**(1): 98–125
Davoudi, S. (2014) 'Climate change, securitisation of nature, and resilient urbanism', *Environment and Planning C: Government and Policy* **32** (2):360–375
Dawson, R.J., M.S.A. Khan, V. Gornitz, M. F. Lemos, L. Atkinson, J. Pullen, and J. C. Osorio (2018) 'Urban areas in coastal zones', in C. Rosenzweig, W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S. A. Ibrahim (eds) *Climate Change and Cities: Second Assessment Report of the Urban Climate Change,* Research Network, Cambridge University Press, New York, pp.319–362
de Waal, A. and P. Richards (2020) Coronavirus: Why lockdowns may not be the answer in Africa, https://www.bbc.com/news/worldafrica-52268320, last accessed 22 September 2020
Dearden, L. (2020) 'Coronavirus: Calls to domestic abuse helpline up 25% during UK lockdown', *Independent*, 6 April, https://www.independent.co.uk/news/uk/homenews/coronavirus-uk-domestic-abusehelpline-lockdown-isolation-a9449236.html, last accessed 21 September 2020
Deka, K. (2019) 'Why the smart cities mission will miss its deadline' *India Today*, 29 July, https://www.indiatoday.in/india-todayinsight/story/why-the-smart-cities-missionwill-miss-its-deadline-1574728-2019-07-29, last accessed 24 September 2020
den Herder, M., G. Moreno, R. M. Mosquera-Losada, J. H. Palma, A. Sidiropoulou, J. J. S. Freijanes, J. Crous-Duran, J. A. Paulo, M. Tomé, and A. Pantera (2017) 'Current extent and stratification of agroforestry in the European Union', *Agriculture, Ecosystems & Environment* **241**:121–132
deSouza, P., V. Nthusi, J.M. Klopp, B. E. Shaw, W. On Ho, J. Saffell, R. Jones and C. Ratti (2017) 'A Nairobi experiment in using low cost monitors' *Clean Air Journal* **27** (2):12–42
Dessein, J., K. Soini, G. Fairclough and L. G. Horlings (eds) (2015) *Culture in, for and as Sustainable Development: Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability*, http://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf, last accessed 24 September 2020
Díaz, S., U. Pascual, M. Stenseke, B. Martín-López, R. T. Watson, Z. Molnár, R. Hill, K. M. A. Chan, I. A. Baste, K. A. Brauman, S. Polasky, A. Church, M. Lonsdale, A. Larigauderie, P. W. Leadley, A. P. E. van Oudenhoven, F. van der Plaat, M. Schröter, S. Lavorel, Y. Aumeeruddy-Thomas, E. Bukvareva, K. Davies, S. Demissew, G. Erpul, P. Failler, C. A. Guerra, C. L. Hewitt, H. Keune, S. Lindley, and Y. Shirayama (2018) 'Assessing nature's contributions to

people', *Science* **359** (6373):270–272
Dobson, S., H. Nyamweru, and D. Dodman (2015) 'Local and participatory approaches to building resilience in informal settlements in Uganda', *Environment and Urbanization* **27**(2): 605–620
Dodman, D., H. Leck, S. Colenbrander, and M. Rusca (2017) 'African urbanisation and urbanism: Implications for risk accumulation and reduction', *International Journal for Disaster Risk Reduction* **26:**7–15
Doumar, K. (2018) 'Urban sprawl and wildfires: A dire combination for Californians', *Pacific Standard,* 30 Nov, https://psmag.com/environment/how-urban-sprawl-affectswildfires, last accessed 23 September 2020
Dovey, K. and R. King (2011) 'Forms of informality: Morphology and visibility of informal settlements', *Built Environment* **37** (1):11–29
Drummond, P., V. Thakoor and S. Yu (2014) *African Department Africa Rising: Harnessing the Demographic Dividend*, Working Paper WP14/143, IMF, Washington, DC
du Toit, M. J., S. S. Cilliers, M. Dallimer, M. Goddard, S. Guenat, and S. F. Cornelius (2018) 'Urban green infrastructure and ecosystem services in sub-Saharan Africa', *Landscape and Urban Planning* **180**:249–261
Du, S., C. He, Q. Huang, and P. Shi (2018) 'How did the urban land in floodplains distribute and expand in China from 1992–2015?', *Environmental Research Letters* **13** (3):034018
Dublin Office for Integration (2009) 'Did you know you can vote? Cities and democracy at work', Cities of Migration Conference, Ryerson University, Toronto
Duranton, G. (2016) 'Agglomeration effects in Colombia', *Journal of Regional Science* **56**(2): 210–238
Duranton, G. and D. Puga (2001) 'Nursery cities: Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products', *American Economic Review* **91**(5): 1454–1477
Duranton, G. and D. Puga (2004) 'Micro-foundations of urban agglomeration economies', in J.V. Henderson and J. F. Thisse (eds) *Handbook of Regional and Urban Economics*, vol. 4, Elsevier, Oxford, pp.2063–2117
Dyer, C. (2019) 'Mother is granted new inquest over daughter's death from asthma', *BMJ* **364**:l192
Ebeke, C. H. and S. M. Ntsama Etoundi (2017) 'The Effects of Natural Resources on Urbanization, Concentration, and Living Standards in Africa', *World Development* **96**:408–417
ECLAC(United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean) (2018) *Regional Action Plan for the implementation of the New Urban Agenda in Latin America and the Caribbean 2016–2036*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42146/7/S1800032_en.pdf, last accessed 28 September 2020
ECLAC (2019) 'CepalStat', https://cepalstatprod.cepal.org/, last accessed 25 September 2020
ECLAC (2020a) *Latin America and the Caribbean and the COVID-19 pandemic Economic and social effects,* https://www.cepal.org/en/publications/45351-latin-america-and-caribbean-and-covid-19-pandemic-economicand-social-effects, last accessed 13 May 2020
ECLAC (2020b) 'COVID-19 Pandemic will lead to the biggest contraction in economic activity in the region's history: A -5.3% drop in 2020', https://www.cepal.org/en/pressreleases/covid-19-pandemic-will-lead-biggestcontraction-economic-activity-regionshistory-53, last accessed 13 May 2020
EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) (2015.) *Principles and Enablers for Citizen Engagement: The Experience from the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities,* EIP-SCC, Brussels. http://www.remourban.eu/kdocs/1229105/Principles_and_enabler_for_citizen_engagement.pdf, last accessed 25 September 2020
Ellen MacArthur Foundation (2019) 'Circular economy in cities: A project guide' https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ourwor/activities/circular-economy-in-cities, last accessed 28 September 2020
Ellis, J.M.(2018) 'The Gap on the Block: Aboriginality, Subjectivity, and Agency in Contemporary Urban Australia', College of William and Mary: Dissertations, Theses, and Masters Projects
Ellis, P. and M. Roberts (2016) *Leveraging Urbanization in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability*, World Bank, Washington, DC
Elmqvist, T., M. Fragkias, J. Goodness, B. Güneralp, P.J. Marcotullio, R.I. McDonald, S. Parnell, M. Schewenius, M. Sendstad, and K.C. Seto (eds)(2013) *Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities*, Springer, London
Elmqvist, T., W. Zipperer, and B. Güneralp (2016) 'Urbanization, habitat loss, biodiversity decline: Solution pathways to break the cycle', in K. Seta,W.D. Solecki, and C.A. Griffith (eds) *Routledge Handbook of Urbanization and Global Environmental Change,* Routledge, London and New York, pp.139–151
EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità (2020) 'Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy', https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/sars-cov-2-analysis-ofdeaths, last accessed 22 September 2020
ESPON (2017) *The Geography of New Employment Dynamics in Europe*, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/1.%20ESPON%20EMPLOY_Final%20report_Main%20Report.pdf, last accessed 21 September 2020
Estrada, F., J. Velasco, A. Martinez-Arroyo1, and O. Calderón-Bustamante (2020) 'An analysis of current sustainability of Mexican Cities and their exposure to climate change', *Frontiers of Environmental Science* **8** (25): 1–16
eThekwini Municipality (2019) *Municipal Spatial Development Framework 2019-2020*, http://www.durban.gov.za/City_Services/development_planning_management/Documents/FINAL_%20SDF2019-2020%20May%202019.pdf, last accessed 28 September 2020
European Commission (2007) *Leipzig Charter on Sustainable European Cities,* https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf, last accessed 28 September 2020
European Commission (2017) *The Urban Agenda for the EU*, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urbandevelopment/agenda/, last accessed 28 September 2020
European Commission (2019) *Global Human Settlement*, https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/index.php, last accessed 3 November 2019
European Commissions- Joint Research Centre (2020) *Handbook of Sustainable Urban Development Strategie*s, EU Publication Office, Luxembourg
European Environment Agency (2016) 'Investment in transport infrastructure', https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/infrastructure-investments/assessment-3, last accessed 25 September 2020
European Environment Agency (2020) *Healthy Environment, Healthy Lives: How the Environment Influences Health and Well-Being in Europe*, Publications Office of the European Union, Luxenborg, https://www.eea.europa.eu/highlights/tackling-pollution-andclimate-change
European Space Agency (2020) Coronavirus lockdown leading to drop in pollution across Europe, https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe, last accessed 22 September 2020
European Union (2020) 'Cities against social exclusion', https://keep.eu/projects/725
Fabre, E. A (2017) *Local Implementation of The SDG & The New Urban Agenda: Towards A Swedish National Urban Policy;* https://www.local2030.org/library/384/Local-implementation-of-the-SDGs-the-New-Urban-Agenda-towards-a-Swedish-national-urbanpolicy.pdf, last accessed 28 September 2020
Fafchamps, M. and F. Shilpi (2005) 'Cities and specialisation: Evidence from South Asia', *Economic Journal* **115** (503): 477–504
Families USA (2020) The COVID-19 Pandemic and Resulting Economic Crash Have Caused the Greatest Health Insurance Losses in American History, https://www.familiesusa.org/wp-content/uploads/2020/07/COV-254_Coverage-Loss_Report_7-17-20.pdf, last accessed 21 September 2020
Farole, T., E. Ferro, and V. Michel Gutierrez (2017) *Job Creation in the Private Sector : An Exploratory Assessment of Patterns and*

Determinants at the Macro, Sector, and Firm Levels,Jobs Working Paper Number 5, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28370/AUS22807-WP-PUBLIC-24-8-2017-18-50-23-JobCreationThomasFarole.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fay, M. and C. Opal (2000) *Urbanization Without Growth: A Not-So-Uncommon Phenomenon*, Policy Research Working Paper 2412, World Bank, Washington, DC

Ferreyra, M. M. and M. Roberts (eds) (2018) *Raising the Bar for Productive Cities in Latin and the Caribbean*, World Bank Group, Washington, DC

Floater, G., D. Dowling, D. Chan, M. Ulterino, J. Braunstein, T.McMinn, and E. Ahmad (2017) *Global Review of Finance for Sustainable Urban Infrastructure*, Coalition for Urban Transitions, London and Washington, DC, http://newclimateeconomy.net/content/cities-working-papers, last accessed 25 September 2020

Florida, R. (2002) *The Rise of the Creative Class: And how It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life,* Basic Books, New York

Florida, R. (2017) 'How urbanization drives Southeast Asia's development', https://www.citylab.com/life/2017/01/southeastasia-martin-prosperity-institute/511952/, last accessed 22 September 2020

Florida, R. (2018) 'The rise of "urban tech"', *Citylab*, 7 August, https://www.citylab.com/life/2018/07/the-rise- of-urbantech/564653/, last accessed 24 September 2020

Florida, R. (2019) 'The real powerhouses that drive the world's economy', *CityLab*, 28 February, https://www.citylab.com/life/2019/02/global-megaregions-economicpowerhouse-megalopolis/583729/, last accessed 8 March 2020

Florida, R. (2020) 'COVID-19 has shut down our cities. Here's how we bring them back to life' *Globe and Mail,* 2 April, https://www.theglobeandmail.com/opinion/articlecovid-19-has-shut-down-our-cities-hereshow-we-bring-them-back-to/, last accessed 20 April 2020

Florida, R. and CityLab (2016) 'The global cities where tech venture capital is concentrated' *The Atlantic,*26 January, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/01/global-startup-citiesventure-capital/429255/, last accessed 24 September 2020

Florida, R. and M. Fasche (2017) The Rise of the Urban Creative Class in Southeast Asia, Martin Prosperity Institute, http://www-2.rotman.utoronto.ca/mpi/content/insightthe-rise-of-the-urban-creative-class-insoutheast-asia/, last accessed 22 September 2020

Florida, R. and M. Kenney (1988) 'Venture capital and high technology entrepreneurship' *Journal of Business Venturing* **3** (4): 301–319

Ford, J. D. (2012) 'Indigenous health and climate change', *American Journal of Public Health* **102** (7):1260–1266

Ford, J. D., L. Cameron, J. Rubis, M. Maillet, D. Nakashima, A. C. Willox, and T. Pearce (2016) 'Including indigenous knowledge and experience in IPCC assessment reports', *Nature Climate Change* **6** (4):349

Ford, M. (2015) *Rise of the Robots*, Basic Books, New York

Forester, J. (1999) *The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes*, MIT Press

Forsyth, T. (2006) 'Cooperative environmental governance and waste-to-energy technologies in Asia', *International Journal of Technology Management & Sustainable Development* **5** (3):209-220

Foster, S. R (2006) 'The city as an ecological space: Social capital and urban land use', *Notre Dame L. Rev.* **82**:527

Foster, S. R (2011) 'Collective action and the urban commons', *Notre Dame L. Rev.* **87**:57

Foster, S. R. and C. Iaione (2015) 'The city as a commons', *Yale L. & Pol'y Rev.* **34**:281

Foster, S. and C. Iaione (2019) 'Ostrom in the city: Design principles and practices for the urban commons',in D. Cole, B.Hudson and J. Rosenbloom (eds) *Routledge Handbook of the Study of the Commons*, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315162782-19, last accessed 23 September 2020

Foster, V. and C. Briceño-Garmendia (eds) (2010) *Africa's Infrastructure: A Time for Transformation*, The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, Washington, DC

Frank Knight (2020) *Global Residential Cities Index*, https://content.knightfrank.com/research/1026/documents/en/global-residential-cities-index-q1-2020-7274.pdf, last accessed 22 September 2020

Frantzeskaki, N., V. Castán Broto, L. Coenen, and D. Loorbach (2017) *Urban Sustainability Transitions*, Routledge, London

Franzsen, R. and W. McCluskey (eds) (2017) *Property Tax in Africa: Status, Challenges, and Prospects,* Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts

Fraser, N. (2007) 'Identity, exclusion, and critique: A response to four critics' *European Journal of Political Theory* **6**(3):305–338

Freire, M.E. Lall, S. and D. Leipziger, (2014) *Africa's Urbanization: Challenges and Opportunities*, The Growth Dialogue, Working Paper Number 7, http://growthdialogue.org/growthdialog/wp-content/uploads/2017/09/Working-Paper-Africa-Urbanizatoin.pdf, last accessed 21 September 2020

Fried, T., T. H. Tun, J. M. Klopp, and B. Welle (2020) 'Measuring accessibility and the sustainable development goal (SDG) transport target: A case study of Nairobi's matatus' *Transport Research Record*.matatus', *Transport Research Record* **2674**(5), https://doi.org/10.1177/0361198120914620, last accessed 24 September 2020

Fuller, G. (2019) *The Invisible Killer: The Rising Global Threat of Air Pollution- and How We can Fight Back,* Melville House, UK.

Fursman, A. and G.F. King (2019) We're thinking about the fourth industrial revolution all wrong', *Quartz* , 29 January, https://qz.com/1515869/were-thinking-about-thefourth-industrial-revolution-all-wrong/, last accessed 24 September 2020

Garikipati, S. and U. Kambhampati, (2020) *Leading the Fight Against the Pandemic: Does Gender 'Really' Matter?*, https://rady.ucsd.edu/faculty/directory/gneezy/pub/docs/gender-differences-preference.pdf, last accessed 24 September 2020

Garnett, N. S (2011) 'Managing the urban commons', *U. Pa. L. Rev.* **160**:1995

Garschagen, M., L. Porter, D. Satterthwaite, A. Fraser, R. Horne, M. Nolan, W. Solecki, E. Friedman, E. Dellas, and F. Schreiber (2018) 'The New Urban Agenda: From Vision to Policy and Action/Will the New Urban Agenda Have Any Positive Influence onGovernments and International Agencies?/Informality in the New Urban Agenda: From the Aspirational Policiesof Integration to a Politics of Constructive Engagement/Growing Up or Growing Despair? Prospects for Multi-Sector Progresson City Sustainability Under the NUA/Approaching Risk and Hazards in the New Urban Agenda: ACommentary/Follow-Up and Review of the New Urban Agenda', *Planning Theory & Practice* **19** (1):117–137

Gaspar, V., Amaglobeli, D., Garcia-Escribano, M., Prady, D., & Soto, M. (2019) Fiscal policy and development: Human, social, and physical investment for the SDGs. *IMF Staff Discussion Note,* https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444

Gelles, D. (2020) 'Coronavirus shutdown the "experience economy". can it come back?', *The New York Times*, 20 May, https://www.nytimes.com/2020/05/20/business/publicgathering-events-coronavirus.html, last accessed 22 September 2020

Gentilini, U. (2015) *Entering the City: Emerging Evidence and Practices with Safety Nets in Urban Areas,* Social Protection and Labor Discussion Paper; No. 1504 World Bank Group, Washington, DC

Ghertner, D. A. (2011) 'Gentrifying the state, gentrifying participation: Elite governance programs in Delhi', *International Journal of Urban and Regional Research* **35**(3): 504–32

Gilmore, A. (2014) *Raising Our Quality of Life: The Importance of Investment in Arts and Culture,* Centre for Labour and Social Studies, London

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)(2017) *Green Municipal Bonds in India: Potential, Barriers and Advantages*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, : https://smartnet.niua.org/csc/assets/pdf/

RepositoryData/UP_Green_Cover/GIZ_Green_Municipal_Bonds_eReport.pdf, last accessed 25 September 2020
Glaeser, E. L. (1994) 'Cities, information, and economic growth', *Cityscape* **1**: 9–47
Glaeser, E. L. (1998) 'Are Cities Dying?' *The Journal of Economic Perspectives*, 12, 139–160
Glaeser, E. L. (1999) 'Learning in Cities', *Journal of Urban Economics* **46**(2), 254–277
Glaeser, E. L. (2011) *Triumph of the City,* Penguin Group, New York
Glaeser, E. L. (2012) *Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier* Pan Macmillan, London
Glaeser, E. L. (2014) 'A World of Cities: The causes and consequences of urbanization in poorer countries', *Journal of the European Economic Association* **12**(5): 1154–1199
Glaeser, E. L. and B. Millett Steinberg (2017) 'Transforming cities: Does urbanization promote democratic change?', *Regional Studies* **51**(1): 58–68
Glaeser, E. L. and D. C. Maré (2001) 'Cities and Skills', *Journal of Labor Economics* **19**(2): 316–342
Glaeser, E. L. and M.G. Resseger (2009) *The Complementarity Between Cities and Skills, NBER* Working Papers 15103
Glaeser, E. L., H. Kallal, J. Scheinkman, and A. Shleifer (1992) 'Growth in cities', *Journal of Political Economy* **100**(61):1126–1152
Glaeser, E. L., J. Kolko, and A. Saiz (2001) 'Consumer city', *Journal of Economic Geography* **1**(1): 27–50
Global Commission on Adaptation (2019) *Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience*, https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf, last accessed 21 September 2020
Global Communities (2015) 'Citizen's report card: Improving water & electricity services in Ghana', https://www.globalcommunities.org/node/38135, last accessed 24 September 2020
Global Justice Now (2015) *10 Biggest Corporations Make More Money Than Most Countries in the World Combined*, https://www.globaljustice.org.uk//sites/default/files/files/resources/corporations_vs_governments_final.pdf, last accessed 25 September 2020
Global Migration Data Analysis Centre (2018) *Global Migration Indicators 201*8, International Organization for Migration, https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf, last accessed 21 September 2020
Global Migration Data Portal (2020) 'Remittances', https://migrationdataportal.org/themes/remittances, last accessed 24 September 2020
Global Partnership for Education (2017) 'A long way to school in Kenya', https://www.globalpartnership.org/blog/long-wayschool-kenya, last accessed 24 September 2020
Global Taskforce of Local and Regional Governments (2016) *Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at Subnational Level*, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/commitments/818_11195_commitment_ROADMAP%20LOCALIZING%20SDGS.pdf, last accessed 25 September 2020
Globalization and World Cities Research Network (2018) 'The world according to GaWC 2018', https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2018t.html, last accessed 22 September 2020
Gobierno de Colombia (2016) *Reporte Nacional Voluntario,* Bogotá
Gobierno de Colombia (2018) Reporte Nacional Voluntario, Bogotá
Godfrey, N. and X. Zhao (2016) *Financing the Urban Transition for Sustainable Development: Better Finance for Better Cities,* Contributing paper for The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development. New Climate Economy, London and Washington, DC, http://newclimateeconomy.report/misc/workingpapers/, last accessed 25 September 2020
Godin B. and P. Lucier (2012) *Innovation and Conceptual Innovation in Ancient Greece*, http://www.csiic.ca/PDF/Antiquity.pdf, last accessed 24 September 2020
Godin, B. (2015) *Innovation Contested: The Idea of Innovation over the Centuries,* Routledge, New York
Godin, B. (2019) 'Innovation theology', Project on the Intellectual History of Innovation, Montreal: INRS, http://www.csiic.ca/en/the-idea-of-innovation/, last accessed 24 September 2020
Goldstein, B. and L. Dyson (2013) *Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation*, Code for America, San Francisco
Gollin, D. (2014) 'The Lewis Model: A 60-year retrospective', *Journal of Economic Perspectives* **28**(3): 71–88
Gollin, D., D. Lagakos, and M. E. Waugh (2014) 'The agricultural productivity gap', *The Quarterly Journal of Economics* **129**(2): 939–993
Gollin, D., R. Jedwab, and D. Vollrath (2016) 'Urbanization with and without industrialization', *Journal of Economic Growth* **21**(1): 35–70
Gómez Álvarez, D, R. Rajack, E. López-Moreno, and D. Gonzalez Canada (eds) (2017) *Steering the Metropolis, Metropolitan Governance for Sustainable Urban Development*, IDB, Washington, DC
Goodfellow, T. (2015) 'Taming the "rogue" sector: Studying state effectiveness in Africa through informal transport politics', *Comparative Politics* **47** (2):127–147
Gopinath, G. (2020) 'The great lockdown: Worst economic downturn since the Great Depression', https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worsteconomic-downturn-since-the-great-depression/, last accessed 22 September 2020
Gould, K. A. and T. L. Lewis (2012) 'The environmental injustice of green gentrification: The case of Brooklyn's Prospect Park', *The World in Brooklyn: Gentrification, Immigration, and Ethnic Politics in a Global City*, pp.113–146
Gould, K. A. and T. L. Lewis (2016) *Green Gentrification: Urban Sustainability and The Struggle for Environmental Justice*, Routledge
Government of India (2015) 'Smart cities: Mission statements and guidelines', http://smartcities.gov.in/upload/uploadfiles/files/SmartCityGuidelines(1)pdf, last accessed 24 September 2020
Government of India (undated) *Pooled Finance Development Scheme— Toolkits*, Ministry of Urban Development, http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/toolkit_pfds(1).pdf, last accessed 25 September 2020
Government of Kenya (2018) *Kenya Affordable Housing Programme: Development Framework Guidelines*, https://www.housingandurban.go.ke/wp-content/uploads/2018/11/Development-Framework-Guidelines-Release-Version.pdf, last accessed 25 September 2020
Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (2018) *Sri Lanka Voluntary National Review on the Status of Implementing the Sustainable Development Goal*, Ministry of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development, Rajagiriya
Graham, S. and S. Marvin (2001) *Splintered Urbanism, Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition*, Routledge, London
Grahame, A (2018) 'What would an age-friendly city look like?' https://www.theguardian.com/cities/2018/oct/10/what-would-anage-friendly-city-look-like, last accessed 24 September 2020
Grand View Research (2019) *Smart Cities Market Analysis*, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-cities-market, last accessed 24 September 2020
Green Climate Fund (2019) *GCF: Driving the Transformation to a Climate-Resilient Financial System.* Green Climate Fund, Incheon.
Green Climate Fund (2020a) 'Green Climate Fund: Overview', https://www.greenclimate.fund/about, last accessed 25 September 2020
Green Climate Fund (2020b) 'GCF Spotlight: Eastern Europe', 21 August. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-spotlight-eastern-europe.pdf, last accessed 25 September 2020
Green Climate Fund (2020c) 'GCF Spotlight: Africa' 21 August, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-spotlight-africa.pdf, last accessed 25 September 2020
Green Climate Fund (2020d) 'GCF Spotlight: Asia-Pacific' 21 August, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-spotlight-asia-pacific.pdf, last accessed 25 September 2020
Green Climate Fund (2020e) 'Catalyzing Climate Finance (Shandong Green Development Fund)' https://www.greenclimate.

fund/project/fp082, last accessed 25 September 2020
Green, B. (2019) *The Smart Enough City,* MIT Press, Cambridge, MA
Green, R. (1997) 'Follow the leader: How changes in residential and non-residential investment predict changes in GDP', *Real Estate Economics* **25**(2): 253–270
Greenfield, A. (2013) *Against the Smart City,* Do Projects, New York
Grigoli, F. (2015) 'A hybrid approach to estimating the efficiency of public spending on education in emerging and developing economies', *Applied Economics and Finance* **2**(1):19–32
Grigoli, F. and J. Kapsoli (2018) 'Waste not, want not: The efficiency of health expenditure in emerging and developing economies' *Review of Development Economics* **22**(1), https://doi.org/10.1111/rode.12346, last accessed 25 September 2020
GTF (Global Taskforce of Local and Regional Governments) and UCLG (United Cities and Local Governments) (2017) *Towards the Localization of the SDGs— Local and Regional Government's Report to the HLPF,1st Report,* UCLG, Barcelona
GTF and UCLG (2018) *Towards the Localization of the SDGs— Local and Regional Government's Report to the HLPF, 2nd Report,* UCLG, Barcelona
GTF and UCLG (2019) *Towards the Localization of the SDGs— Local and Regional Government's Report to the HLPF, 3rd Report,* UCLG, Barcelona
GTF and UCLG (2020) *Towards the Localization of the SDGs— Local and Regional Government's Report to the HLPF, 4th Report,* UCLG, Barcelona
Guibrunet, L. (2017) 'The contribution of the informal economy to urban sustainability– case study of waste management in Tepito, Mexico City', UCL (University College London)
Guibrunet, L. (2019) 'The interplay of tacit and explicit knowledge in the informal economy: The atypical case of a recycling family business in Mexico City', *International Development Planning Review*:1–19
Gunder, M., A. Madanipour, and V. Watson (2017) *The Routledge Handbook of Planning Theory*, Routledge
Güneralp, B. and K. C. Seto (2013) 'Futures of global urban expansion: Uncertainties and implications for biodiversity conservation', *Environmental Research Letters* **8** (1):014025
Güneralp, B., S. Lwasa, H. Masundire, S. Parnell, and K. C. Seto (2017) 'Urbanization in Africa: Challenges and opportunities for conservation', *Environmental Research Letters* **13** (1):015002
Güneralp, B., Y. Zhou, D. Ürge-Vorsatz, M. Gupta, S. Yu, P. L. Patel, M. Fragkias, X. Li, and K. C. Seto (2017) 'Global scenarios of urban density and its impacts on building energy use through 2050', *Proceedings of the National Academy of Sciences* **114** (34):8945-8950
Gutman, J. and N. Patel (2018) 'Addressing spatial inequity in Latin American cities', https://www.brookings.edu/research/addressing-spatial-inequity-in-latin-american-cities, last accessed 22 September 2020
Gyourko, J. and R. Molloy (2014) *Regulation and Housing Supply*, NBER Working Paper 20536
Hagen-Zanker, J., E. M. Vidal, and G. Sturge (2018) 'Social protection, migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development' in *Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Overseas Development Institute, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12422.pdf, last accessed 21 September 2020
Hagen-Zanker, J., H. Postel, and E. M. Vidal(2018) 'Poverty, migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development' in *Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development,* Overseas Development Institute, https://www.odi.org/publications/10913-migration-and-2030-agenda-sustainable-development, last accessed 22 September 2020
Haila, A. (2000) 'Real estate in global cities: Singapore and Hong Kong as property states' *Urban Studies* **37**(12):2241–2256
Hale, T. (2016) '"All hands on deck": The Paris agreement and nonstate climate action', *Global Environmental Politics* **16** (3):12–22
Hall, M. J. and D. C. Weiss (2012) 'Avoiding adaptation apartheid: Climate change adaptation and human rights law', *Yale J. Int'l L.* **37**:309
Hallegatte, S., C. Green, J. Robert, R. J. Nicholls, and J. Corfee-Morlot (2013) 'Future flood losses in major coastal cities', *Nature Climate Change* **3**(9):802-806
Hancock, J (2019) *Environmental Human Rights: Power, Ethics and Law*, Routledge
Hanushek, E. and L. Woessmann (2008) The role of cognitive skills in economic development. *Journal of Economic Literature* **46** (3): 607–68
Haque, E. and D. H. Kim (2003) *Public Investment in Transportation and Communication and Growth: A Dynamic Panel Approach*, Centre for Growth and Business Cycle Research Discussion Paper, Manchester, United Kingdom, http://hummedia.manchester.ac.uk/schools/soss/economics/discussionpapers/EDP-0324.pdf, last accessed 25 September 2020
Harkness, A. J. and B. Katz (2017) 'Make way for mayors: Why the UK's biggest power shift may not be the June 8 general election', https://www.brookings.edu/blog/metropolitan-revolution/2017/05/01/make-way-for-mayors/, last accessed 25 September 2020
Harlan, S. L. and D. M. Ruddell (2011) 'Climate change and health in cities: Impacts of heat and air pollution and potential co-benefits from mitigation and adaptation', *Current Opinion in Environmental Sustainability* **3** (3):126–134
Harris, R. and G. Arku (2006) 'Housing and economic development: The evolution of an idea since 1945', *Habitat International* **30** (4): 1007–1017
Harris, R. and G. Arku (2007) The rise of housing in international development: The effects of economic discourse', *Habitat International* **31** (1): 1–11
Hart, T. and B. Welham (2016) *Fiscal Decentralisation: A Public Financial Management Introductory Guide*, ODI, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11063.pdf, last accessed 25 September 2020
Harvey, J. and A. C. Ogando (2019) 'In times of crisis, grassroots organizations re-imagine democratic practice', WIEGO, https://www.wiego.org/blog/times-crisis-grassrootsorganizations-re-imagine-democratic-practice, last accessed 23 September 2020
Hasan, A. (2006) 'Orangi Pilot Project: The expansion of work beyond Orangi and the mapping of informal settlements and infrastructure', *Environment and Urbanization* **18** (2):451–480
Hauge, A. and B. J. Hracs (2010) 'See the sound, hear the style: Collaborative linkages between indie musicians and fashion designers in local scenes', *Industry and Innovation* **17** (1):113–129
Healy, J. and A. Liptak (2020) 'Landmark supreme court ruling affirms Native American rights in Oklahoma' *The New York Times*, 9 July, https://www.nytimes.com/2020/07/09/us/supreme-courtoklahoma-mcgirt-creek-nation.html, last accessed 23 September 2020
Helbing D., B.S. Frey, G. Gigerenzer, E. Hafen, M. Hagner, Y. Hofstetter, J. van den Hoven, R.V. Zicari and A. Zwitter (2017) 'Will democracy survive big data and artificial intelligence?' *Scientific American*, 25 February, https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-dataand-artificial-intelligence/, last accessed 24 September 2020
Henderson, J. V., T. Regan and A. J. Venables (2016) 'Building the city: Urban transition and institutional frictions', Spatial Economic Research Center Discussion Paper 0196, London School of Economics
Henley, J. and E. A. Roy (2020) 'Are female leaders more successful at managing the coronavirus crisis?', *The Guardian*, 25 April, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-bemore-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis, last accessed 24 September 2020
Henry-Nickle, M., K. Frimpong and H. Sun (2019) *Trends in the Information Technology Sector,* Brookings Policy Report, https://www.brookings.edu/research/trends-inthe-information-technology-sector/, last accessed 24 September 2020
Hepburn, C., B. O'Callaghan, N. Stern, J. Stiglitz and D. Zenghelis (2020) 'Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?' Forthcoming in the *Oxford Review of Economic Policy* **36**(S1)
Hernandez, F. and P. Kellett (2008) *Rethinking the Informal City: A Radical Perspective from Latin America*, Berghahn, London and New

York
Hernandez, M. (2020) 'This is the effect coronavirus has had on air pollution all across the world', https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-airpollution-enviroment-nature-lockdown/, last accessed 22 September 2020
Heynen, N., M. Kaika, and E. Swyngedouw (2006) *In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism*, Routledge
Hill, A and L. Martinez-Diaz (2020) *Building a Resilient Tomorrow,* Oxford University Press
Hill, D. (2013) 'On the smart city, a call for smart citizens instead', *City of Sound*, http://www.cityofsound.com/blog/2013/02/on-the-smart-city-a-call-for- smart-citizens-instead.html#more, last accessed 24 September 2020
Hill, E., A. Tiefenthäler, C.Triebert, D. Jordan, H. Willis, and R. Stein (2020) 'How George Floyd was killed in police custody', *The New York Times*, 31 May, https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floyd-investigation.html, last accessed 24 September 2020
Hindustan Times (2019) 'How data can help improve mobility', *Hindustan Times*, 30 March, https://www.hindustantimes.com/delhi-news/how-data-can-help-improvemobility/story-P8mOW6mFCzwzk7J1ml-RVEP.html, last accessed 24 September 2020
HM Government (2011) 'Unlocking growth in cities', www.cabinetoffice.gov.uk, last accessed 22 September 2020
Hodson, M. and S. Marvin (2009) "Urban ecological security': A new urban paradigm?' *International Journal of Urban and Regional Research* **33** (1):193–215
Hodson, M. and S. Marvin (2010) *World cities And Climate Change: Producing Urban Ecological Security*, McGraw-Hill Education (UK)
Hogge, B. (2016) *Open Data's Impact: Transport for London Get Set, Go!* http://odimpact.org/files/case-studies-transport-for-london.pdf, last accessed 24 September 2020
Holder, S. (2016) 'The tech companies spending to oppose (and support) San Francisco's homelessness tax', *CityLab*, 26 October, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-26/what-big-tech-is-spendingon-san-francisco-s-prop-c, last accessed 24 September 2020
Holifield, R., J. Chakraborty, and G. Walker (2017) *The Routledge Handbook of Environmental Justice*, Routledge
Holland, J. (2014) '"Tale of Two Cities:" New York has become the capital of inequality', *Moyers on Democracy*, 18 September, https://billmoyers.com/2014/09/18/tale-of-twocities-new-york-has-become-the-capitol-ofinequality/, last accessed 22 September 2020
Hommann, K. and S. V. Lall (2019) *Which Way to Livable and Productive Cities? A Road Map for Sub-Saharan Africa*, International Development in Focus, World Bank Group; Washington, DC
Hosagrahar, J. (2017) 'Culture: At the heart of SDGs',https://en.unesco.org/courier/aprilju ne-2017/culture-heart-sdgs, last accessed 24 September 2020
Hsieh, C. and E. Moretti (2019) 'Housing constraints and spatial misallocation', *American Economic Journal: Macroeconomics* **11**(2): 1–39
Hu, B and C. Chen (2015) 'New urbanization under globalization and the social implications in China' *Asia and the Pacific Policy Studies* **2**(1):34–43
Huang, Y., M. Sun, and Y. Sui (2020) 'How digital contact tracing slowed Covid-19 in East Asia' *Harvard Business Review,* 15April, https://hbr.org/2020/04/how-digital-contact-tracing-slowed-covid-19-in-east-asia, last accessed 24 September 2020
Huawei and Oxford Economics (2017) *Digital Spillover: Measuring the True Impact of the Digital Economy*, https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf, last accessed 24 September 2020
Huggins, C. M. and J. S. Debies-Carl (2015) 'Tolerance in the city: The multilevel effects of urban environments on permissive attitudes', *Journal of Urban Affairs* **37**(3): 255-269
Hughes, C. (2018) *Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn*, St. Martin's Press
Hughes, S., E. K. Chu, and S. G. Mason (2018) *Climate Change in Cities: Innovations in Multi-Level Governance*, Springer, Amsterdam Hulchanski, J. D. (1995) 'The concept of housing affordability: Six contemporary uses of the expenditure to income ratio', *Housing Studies* **10**(4): 471–491
Iacurci, G. (2020) 'A second Great Depression? Unemployment crisis hits big cities hard' *CNBC,* 21 July, https://www.cnbc.com/2020/07/21/some-big-cities-are-hittinggreat-depression-unemployment-levels.html, last accessed 29 September 2020 IADB (Inter-American Development Bank) (2016) 'The relationship between gender and transport', IADB, https://publications.iadb.org/en/relationship-between-gender-andtransport, last accessed 22 September 2020
IADB (2018) *What is Sustainable Infrastructure? A Framework to Guide Sustainability Across the Project Cycle,* IADB, https://publications.iadb.org/en/what-sustainable-infrastructure-framework-guide-sustainability-acrossproject-cycle, last accessed 25 September 2020
IADB (2020) 'Coronavirus impact dashboard', IADB, https://www.iadb.org/en/topicseffectiveness-improving-lives/coronavirusimpact-dashboard , last accessed 22 September 2020
ICLEI (2019) *The Nagano Declaration on Partnership for Collaborative Action for Sustainable Development*, http://japan.iclei.org/fileadmin/user_upload/Japan/Documents/events/The_Nagano_Declaration/The_Nagano_Declaration_final.pdf, last accessed 22 September 2020
IEA (International Energy Agency) (2020a) *Global Energy Review 2020*, IEA, Paris
IEA (2020b) *Sustainable Recovery: World Energy Outlook Special Report*, https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery/buildings#, last accessed 25 September 2020
IFC (International Finance Corporation) (2019) *Green Buildings: A Finance and Policy Blueprint,* IFC, Washington, DC
Ihlanfeldt, K. R. (2007) 'The effect of land use regulation on housing and land prices', *Journal of Urban Economics* **61**(3): 420–435
IIED (International Institute for Environment and Development) (2019) *Cities for All? Rethinking urban displacement, London, Briefing, March,* https://pubs.iied.org/17642IIED/, last accessed 28 September 2020
IISD and DRC (2015*) Greening China's Financial System*, the International Institute for Sustainable Development and the Development Research Center of the State Council, https://www.iisd.org/publications/greeningchinas-financial-system, last accessed 25 September 2020
ILO(International Labour Organization) (2015) *Recommendation 204: Transition from the Informal to the Formal Economy*, https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previoussessions/104/texts-adopted/WCMS_377774/lang--en/index.htm, last accessed 20 April 2020
ILO (2017) *Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204) – Workers' Guide,* ILO, Geneva ILO (2018) *ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology, International Labour Office – Geneva,* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_652001.pdf, last accessed 24 September 2020
ILO (2019) *World Employment and Social Outlook – Trends 2019*, ILO, Geneva
ILO (2020a) 'ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second Edition', https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf, last accessed 21 September 2020
ILO (2020b) 'ILO Monitor: COVID-19 and the world of work Third Edition' https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf, last accessed 21 September 2020
ILO (2020c) 'COVID-19 eliminates the equivalent of 14 million jobs in Latin America and the Caribbean, and challenges the region to seek measures to face the crisis', https://www.ilo.org/caribbean/newsroom/WCMS_741225/lang--en/index.htm, last accessed 22 September 2020
ILO (2020d) 'COVID-19 cruelly highlights inequalities and threatens to deepen them', https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740101/lang--en/

index.htm, last accessed 13 May 2020
ILO (2020e) 'COVID-19 crisis and the informal economy: Immediate responses and policy challenges', *ILO Brief*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf, last accessed 13 May 2020
ILO (2020f) 'Pillar 1: Stimulating the economy and employment', ILO Policy Brief on COVID-19, 18 May, https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-andresponses/WCMS_739048/lang--en/index.htm, last accessed 25 September 2020
ILO (2020g) *World Employment and Social Outlook: 2020 Report*, International Labour Organisation, Geneva
IMF (International Monetary Fund) (2015) *Making Public Investment More Efficient*, IMF, Washington, DC, https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061115.pdf, last accessed 25 September 2020
IMF (2017) *Regional Economic Outlook – Asia and Pacific: Preparing for Choppy Seas,* IMF, Washington, DC
IMF (2018) *Lessons for Effective Fiscal Decentralization in Sub-Saharan Africa*, Working Paper, NO 18/10, IMF, Washington, DC
IMF (2020*) World Economic Outlook: The Great Economic Lockdown*, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020, last accessed 22 September 2020
IMF, OECD, United Nations, and World Bank. (2016*) Enhancing the effectiveness of external support in building tax capacity in developing countries*. Policy Paper prepared for submission to G20 finance ministers, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Enhancing-the-Effectiveness-of-External-Support-in-Building-Tax-Capacity-in-Developing-PP5059.Inequality.org (2018) 'New York, New York, What a less than wonderful town' https://inequality.org/great-divide/new-york-newyork-less-wonderful-town/, last accessed 22 September 2020
Innes, J. E. and D. E. Booher (2010) *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*, Routledge
Institute for Social and Economic Research (2020) 'New analysis of the impact of lockdown on UK jobs', https://www.iser.essex.ac.uk/2020/04/18/new-analysis-ofthe-impact-of-lockdown-on-uk-jobs, last accessed 22 September 2020
Institute of Global Environmental Strategies (2020) 'Online voluntary local review (VLR) lab' https://iges.or.jp/en/projects/vlr, last accessed 28 September 2020
Inter-Agency Task Force on Financing for Development (2018) *Financing for Development: Progress and Prospects 2018*, UN, New York
Investment Industry Association of Canada (2019) *Opportunities in the Canadian Green Bond Market V3.0,*https://iiac.ca/wpcontent/uploads/Opportunities-in-the Canadian-Green-Bond-Market_June-2019.pdf, last accessed 25 September 2020
IOM (2015) *World Migration Report 2015: Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility,* International Organization for Migration, Geneva
IPBES (2019) *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services,* Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), https://ipbes.net/global-assessment, last accessed 23 September 2020
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2018a) *Global Warming of 1.5°C*, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf, last accessed 21 September 2020, last accessed 22 September 2020
IPCC (2018b) *Progress Report: International Conference on Climate Change and Cities* https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/100920181041-INF1Rev1CitiesReport.pdf, last accessed 22 September 2020
IRP (International Resource Panel)(2019) Land restoration for achieving the sustainable development goals: An international resource panel think piece, United Nations Environment Programme, Nairobi
Irwin, T., S. Mazraani, and S. Saxena (2018) *How to Control the Fiscal Costs of Public-Private Partnerships,* IMF How to Note 18/04, IMF, Washington, DC, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/HowToNotes/howtonote1804.ashx, last accessed 25 September 2020
Islam, A., R. Jedwab, P. Romer, and D. Pereira (2019) 'Returns to experience and the sectoral allocation of labor', working paper
ITU (International Telecommunication Union)(2015) 'Focus group on smart sustainable cities', https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx
IUCN (International Union for Conservation of Nature)(2016) 'WCC-2016-Res-069-EN: Defining nature-based solutions', https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_069_EN.pdf, last accessed 23 September 2020
Ivanyna, M. and A. Shah, (2014) 'How close is your government to its people? Worldwide indicators on Localization and Decentralization', *Economics* 8(2014-3), http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-3, last accessed 25 September 2020
Iveson, K., C. Lyons, S. Clark, and S. Weir (2019) 'The informal Australian city', *Australian Geographer* **50** (1): 11–27
IWPR (Institute for Women's Policy Research) (2015) *Gender, urbanization and democratic governance*; https://www.ndi.org/sites/default/files/Gender%20Urbanization%20and%20Local%20Governance%20White%20Paper.pdf, last accessed 24 September 2020
Jabareen, Y. (2013) 'Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk', *Cities* **31**: 220–229
Jackson, K. K. (2018) 'Regulation, land constraints, and California's boom and bust', *Regional Science and Urban Economics* **68**: 130–147
Jacobs, J. (1961) *The Death and Life of Great American Cities,* Random House, New York
Jacobs, J. (1984) *Cities and the Wealth of Nations*, Random House, New York
Jahnsen, K. and K. Pomerleau (2017) 'Corporate income tax rates around the world, 2017', Tax Foundation,7 September, https://taxfoundation.org/corporate-income-taxratesaround-the-world-2017/, last accessed 25 September 2020
Jain-Chandra, S., N. Khor , R. Mano, J. Schauer, P. Wingender, and J. Zhuang (2018) *Inequality in China – Trends, Drivers and Policy Remedies*, IMF Working Paper, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18127.ashx, last accessed 22 September 2020
Jamison, D. and L. Summers (2013) 'Global health 2035: A world converging within a generation', *The Lancet Commissions,* http://www.globalhealth2035.org/sites/default/files/report/global-health-2035.pdf, last accessed 25 September 2020.
Jedwab, R. and D. Vollrath (2015) 'Urbanization without growth in historical perspective', *Explorations in Economic History* **58**(C): 1–21
Jedwab, R. and D. Vollrath (2019) 'The urban mortality transition and poor-country urbanization', *American Economic Journal: Macroeconomics* **11**(1): 223–75
Jedwab, R., D. Pereira, and M. Roberts (2019) 'Cities of workers, children or seniors? Age structure and economic growth in a global cross-section of cities', Institute for International Economic Policy Working Paper 2019-13, The George Washington University
Jedwab, R., L. Christiaensen, and M. Gindelsky (2017) 'Demography, urbanization and development: Rural push, urban pull and… urban push?', *Journal of Urban Economics* **98**(C): 6–16
Jenny, H., F. Asseline, Y. Wang, A. Mehta, B. Dahiya, and M. Lindfield, (2020) *Catalyzing Climate Finance with the Shandong Green Development Fund.* ADB Briefs. No. 144. DOI: http://dx.doi.org/10.22617/BRF200192-2, last accessed 25 September 2020
Johns Hopkins University Center for Systems Science Engineering (2020) 'COVID-19 dashboard', https://coronavirus.jhu.edu/map.html, last accessed 21 September 2020
Johnson, L. C. (2016) *Cultural Capitals: Reevaluating the Arts, Remaking Urban Spaces*. *Routledge*, London and New York
Joint Research Centre – European Commission (2019) *The Future of Cities – Opportunities, Challenges and the Way Forward*, Publications Office of the European Union, Luxembourg
Jones, P, O. D'Aoust, and L. Bernard (2017) 'The urban wage premium in Africa' In S. Johnson-Lans (ed) *Wage Inequality in Africa,* pp. 33–53

Jordan, A. (2008) 'The governance of sustainable development: Taking stock and looking forward', *Environment and Planning: Government and Policy* **26** (1):17–33

Jowett, P. (2020) 'An overview of Germany's response to Covid-19' *LGIU blog*, 6 April, https://lgiu.org/an-overview-of-germanysresponse-to-covid-19/, last accessed 20 April 2020

Kabisch, N., N. Frantzeskaki, S. Pauleit, S. Naumann, M. Davis, M. Artmann, D. Haase, S. Knapp, H. Korn, and J. Stadler (2016) 'Nature-based solutions to climate change mitigation and adaptation in urban areas: Perspectives on indicators, knowledge gaps, barriers, and opportunities for action', *Ecology and Society* **21** (2): 39

Kaika, M. (2017) "'Don't call me resilient again!": The New Urban Agenda as immunology… or… what happens when communities refuse to be vaccinated with "smart cities" and indicators', *Environment and Urbanization* **29** (1):89-102

Kalantari, Z. and L. Folkeson (2013) 'Road drainage in Sweden: Current practice and suggestions for adaptation to climate change', *Journal of Infrastructure Systems* **19** (2):147–156

Kaplan, J. (2015) *Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence,* Yale University Press

Karanja, I. (2010) 'An enumeration and mapping of informal settlements in Kisumu, Kenya, implemented by their inhabitants', *Environment and Urbanization* **22** (1):217–239

Karvonen, A. and B. Van Heur (2014) 'Urban laboratories: Experiments in reworking cities', *International Journal of Urban and Regional Research* **38** (2):379–392

Keesstra, S., J. Nunes, A. Novara, D. Finger, D. Avelar, Z. Kalantari, and A. Cerdà (2018) 'The superior effect of nature based solutions in land management for enhancing ecosystem services', *Science of The Total Environment* **610–611**:997–1009

Keesstra, S., O. van Dam, G. Verstraeten, and J. van Huissteden (2009) 'Changing sediment dynamics due to natural reforestation in the Dragonja catchment, SW Slovenia', *Catena* **78** (1):60–71

Kenya National Bureau of Statistics (2020) *Survey on Socio Economic Impact of COVID-19 on Households Report: Wave 2—30th June 2020,* KNBS, Nairobi

Kiddle, G., D. McEvoy, D. Mitchell, P. Jones, and S. Mecartney (2017) 'Unpacking the Pacific urban agenda: Resilience challenges and opportunities', *Sustainability* **9** (10): 1–15

Kilroy, A. F. L., M. Mukim, and S. Negri (2015) *Competitive Cities for Jobs and Growth: What, Who, and How,* World Bank Group, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/902411467990995484/Competitive-cities-for-jobs-and-growth-whatwho-and-how, last accessed 22 September 2020

King, B. (2020) 'Unemployment rate: How many people are out of work?', *BBC News*, 15 September, https://www.bbc.com/news/business-52660591

Kishimoto, S., L. Stinfort, and O. Petitjean, (2019) **'**The Future is Public. Towards Democratic Ownership of Public Services' draft presented at the *Future is Public Conference* in Amsterdam, http://futurispublic.org, last accessed 25 September 2020

Kitchin, R. (2015) 'Making sense of smart cities: Addressing present shortcomings', *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* **8** (1):131–136

Kivuva, E. (2020) 'City dwellers retreat to the villages for a fresh start', *Business daily*, 13 August, https://www.businessdailyafrica.com/datahub/City-dwellers-retreat-tothe-villages-for-a-fresh-start/3815418-5608170-nrq9j3z/index.html, last accessed 23 September 2020

Klopp, J.M. and C. Cavoli. (2019) 'Mapping mass mini-bus transit in Maputo and Nairobi: Engaging "paratransit" in transportation planning for African cities', *Transport Reviews* **39**(5):657–676

Klopp, J.M. and D. Petretta (2017) 'The urban sustainable development goal: Indicators, complexity and the politics of measuring cities' *Cities* **63**: 92–97

Kolko (2017) 'The myth of the return to cities', *New York Times.* 22 May, https://www.nytimes.com/2017/05/22/upshot/seattlecimbs-but-austin-sprawls-the-myth-ofthe-return-to-cities.html, last accessed 21 September 2020

Kondo, K. (2015) 'Why are wages higher in large cities?' Research Institute of Economy, Trade and Industry, https://www.rieti.go.jp/users/kondo-keisuke/serial/en/002.html, last accessed 20 April 2020

Koutroumpis, P. and F. Lafond (2018) *Disruptive Technologies and Regional Innovation Policy*, https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/KoutroumpisLafond(2018)Disruptive%20technologies%20and%20regional%20innovation%20policy_FI.pdf, last accessed 21 September 2020

Krader, K and R. Vines (2020) 'Overwhelmed by the virus, the golden age of restaurants is over', *Bloomberg Businessweek*, 27 March, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/coronavirus-impacton-new-york-and-london-restaurants, last accessed 22 September 2020

Krugman, P. (1991) *Geography and Trade,* MIT Press, Cambridge, MA

Krugman, P. (1996) *The Self-Organising Economy*, Blackwell Publishers, Oxford

Kuecker, G. D. (2015) 'New Songdo City: A bridge to the future?', Case study in: The Second Assessment Report on Climate Change and Cities (ARC3-2)

Kuo, F. (2016) 'San Francisco has become one huge metaphor for inequality in America' *Quartz*, 21 June, https://qz.com/711854/the-inequality-happening-now-in-san-francisco-will-impact-america-for-generationsto-come/, last accessed 24 September 2020

Kurth, M. (2016) 'How partnerships can help cities make the New Urban Agenda a reality', https://www.urbanet.info/partnerships-new-urban-agenda/, last accessed 22 September 2020

Laberenne, R. and P. Lamson-Hall (2018) 'Planning for urban growth for a more resilient future', http://100resilientcities.org/planning-urban-growth-resilient-future/, last accessed 22 September 2020

LabGov.City (2018) 'The co-city cycle' *https://labgov.city/commonspress/the-co-city-cycle/*, last accessed 23 September 2020

Lall, S. V., J. V. Henderson, and A. J. Venables (2017*) Africa's Cities: Opening Doors to the World*, World Bank, Washington, DC

Lamson-Hall, P., S. Angel, D. DeGroot, R. Martin, and T. Tafesse (2018) 'A new plan for African cities: The Ethiopia urban expansion initiative', *Urban Studies* **56**(6): 1234–1249

Landry, C. (2006) *The Art of City Making*, Routledge, London

Landry, J.-N., K. Webster, B. Wylie, and P. Robinson (2016) 'How can we improve urban resilience with open data', Open Data Institute, London

Langelier, S. (2011) 'Que Reste-T-Il de L'expérience Pionnière de Porto Alegre?' *Le Monde Diplomatique*. https://www.monde-diplomatique.fr/2011/10/A/21113, last accessed 25 September 2020

Lawrence, L. D. and M. S. Low (1990) 'The Built Environment and Spatial Form', *Annual Review of Anthropology* **19**:453–505

Leck, H. and D. Simon (2013) 'Fostering multiscalar collaboration and co-operation for effective governance of climate change adaptation', *Urban Studies* **50**(6) 1221–1238

Leck, H. and D. Simon (2018) 'Local authority responses to climate change in South Africa: The challenges of transboundary governance', *Sustainability* **10**(7): 2542, https://doi.org/10.3390/su10072542, last accessed 28 September 2020

Lee, B. (2020) 'America's cities were designed to oppress', *Bloomberg Citylab*, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/how-to-design-justice-into-america-s-cities, last accessed 24 September 2020

Lee, J.H., M.G. Hancock M, and M.C. Hu (2014) 'Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco', *Technological Forecasting and Social Change* **89**: 80–89

Lee, N. and M. Nathan (2011) *Does Cultural Diversity Help Innovation in Cities: Evidence from London Firms*, SERC Discussion Paper 69, http://eprints.lse.ac.uk/33579/1/sercdp006.pdf, last accessed 24 September 2020

Legatum Institute (2016) *2016 Africa Prosperity Report*, https://li.com/reports/2016-africa-prosperity-report/, last accessed 22 September 2020

Leichenko, R. and K. O'Brien (2008) *Environmental Change and Globalization: Double Exposures*, Oxford University Press

Leipzig Charter on Sustainable European Cities

(2007) https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf, last accessed 28 September 2020

Lejano, R. P. and E. R. Gonzalez (2017) 'Sorting through Differences: The Problem of Planning as Reimagination', *Journal of Planning Education and Research* **37** (1):5–17

Levin B. and L. Downes (2019) 'Cities, not rural areas, are the real Internet deserts', *The Washington Post,* 13 September, https://www.washingtonpost.com/technology/2019/09/13/cities-not-rural-areasare-real-internet-deserts/, last accessed 24 September 2020

Li, K. and B. Lin (2015) 'Impacts of urbanization and industrialization on energy consumption/CO2 emissions: Does the level of development matter?', *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **52**:1107–1122

Liang, L., Z. Wang, and J. Li (2019) 'The effect of urbanization on environmental pollution in rapidly developing urban agglomerations', *Journal of Cleaner Production* **237**:117649

Libertun de Duren, N., A. Hiramatsu, M.A. Ariza, and M. P. Silva de Anzorena, (2018) *Inclusive Cities: Urban Productivity Through Gender Equality*, https://publications.iadb.org/publications/english/document/Ciudades-Inclusivas-Productividad-urbanaa-partir-de-la-igualdad-de-g%C3%A9nero.pdf, last accessed 24 September 2020

Liddle, B. and S. Lung (2010) 'Age-structure, urbanization, and climate change in developed countries: Revisiting STIRPAT for disaggregated population and consumptionrelated environmental impacts', *Population and Environment* **31** (5):317–343

Lieuw-Kie-Song, M. (2020) 'The construction sector can help lead the economic recovery – Here's how', *ILO Blog,* 11 May, https://iloblog.org/2020/05/11/the-constructionsector-can-help-lead-the-economic-recovery-heres-how/, last accessed 25 September 2020

Lincoln Institute of Land Policy (2016) *Atlas of Urban Expansion*, Lincoln Institute of Land Policy, https://www.lincolninst.edu/research-data/data/atlas-urban-expansion, last accessed 7 January 2020

Lind (2018) 'The migrant caravan, explained' https://www.vox.com/2018/10/24/18010340/caravan-trump-border-honduras-mexico, last accessed 25 September 2020

Long, J. and J. L. Rice (2019) 'From sustainable urbanism to climate urbanism', *Urban Studies* **56** (5):992–1008

Lorrain, D. (2011) 'The discrete hand, global finance and the city', *Revue française de science politique* **6**(61):1097–1122

LSE Cities (2019) *How cities are governed: Building a global Database for current models of urban governance;* https://urbangovernance.net/en/, last accessed 24 September 2020

Luque-Ayala, A., S. Marvin, and H. Bulkeley (eds) (2018) *Rethinking Urban Transitions: Politics in the Low Carbon City*, Routledge, London and New York

Macleod, A. and S. Fox (2019) *Voluntary Local Reviews: A Handbook for UK Cities*, https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cabot-institute-2018/documents/uk-citiesvoluntary-local-review-handbook.pdf, last accessed 28 September 2020

Mahler, D., C. Lakner, R. Aguilar, and H. Wu (2020) 'Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty', *World Bank Blogs,*8 June, https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impactcovid-19-global-poverty, last accessed 23 September 2020

Mahoney, M. and R. Klitgaard (2019) 'Revitalizing Mandaue City: Obstacles in implementing a performance governance system', *Policy Design and Practice* **2** (4): 383–399

Mansueto Institute for Urban Innovation (2019) 'Million neighborhoods initiative', University of Chicago, www.millionneighborhoods.org, lat accessed 23 September 2020

Maranhão, B. (2020) 'Bolsa Família, Brazil's admired anti-poverty programme, is flailing', https://www.economist.com/the-americas/2020/01/30/bolsa-familiabrazils-admired-anti-poverty-programmeis-flailing, last accessed 24 September 2020

Marceau J. (2008) 'Innovation in the city and innovative cities', *Innovation: Management, Policy and Practice* **10** (2-3): 136–145

Marquardt, N. and V. Schreiber (2015) 'Mothering urban space, governing migrant women: The construction of intersectional positions in area-based interventions in Berlin', *Urban Geography* **36** (1):44–63

Marr, B. (2018) 'The fourth industrial revolution is here: Are you ready?', *Forbes*, 13 August, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/08/13/the-4th-industrial-revolution-is-here-are-you-ready/#5bbde830628b, last accessed 24 September 2020

Marsden, G., A. Ferreira, I. Bache, M. Flinders, and I. Bartle (2014) 'Muddling through with climate change targets: A multi-level governance perspective on the transport sector', *Climate Policy* **14** (5):617–636

Martin, R., B. Gardiner, and P. Tyler (2014) *The Evolving Economic Performance of UK Cities: City growth patterns 1981-2011*, Foresight, Government Office for Science, London

Marvin, S., H. Bulkeley, L. Mai, K. McCormick, and Y. V. Palgan (2018) *Urban Living Labs: Experimenting with City Futures*, Routledge

Mastercard (2019) *Global Destination Cities Index 2019*, https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/09/GDCIGlobal-Report-FINAL-1.pdf, last accessed 24 September 2020

Mbah, P. O. and T. C. Nzeadibe (2017) 'Inclusive municipal solid waste management policy in Nigeria: Engaging the informal economy in post-2015 development agenda', *Local environment* **22** (2):203–224

McCarney, P., H. Blanco, J. Carmin, and M. Colley(2011) 'Cities and climate change: The challenges for governance', in C. Rosenzwieg, W. D. Solecki, S. A. Hammer,and S. Mehrotra (eds) *Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network,* Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 249–269

McFarlane, C. (2012) 'Rethinking informality: Politics, crisis, and the city', *Planning Theory and Practice* **13**(1): 89–102

McFarlane, C., R. Desai, and S. Graham (2014) 'Informal urban sanitation: Everyday life, poverty, and comparison', *Annals of the Association of American Geographers* **104** (5):989–1011

McGranahan, G., D. Schensul, and G. Singh, (2016) 'Inclusive urbanization: Can the 2030 Agenda be delivered without it?' *Environment and Urbanization* **28**(1):13–34

McGrath, M. (2017) 'Five effects of US pull out from Paris climate deal', *BBC News*, 1 June, https://www.bbc.com/news/scienceenvironment-40120770, last accessed 22 September 2020

McGrath, M. (2020) 'Coronavirus: Air pollution and CO2 fall rapidly as virus spreads', *BBC News*, 19 March, https://www.bbc.com/news/science-environment-51944780, last accessed 22 September 2020

McKinsey & Company (2013*) How to Make a City Great,* McKinsey Cities Special Initiative, https://www.mckinsey.com/featuredinsights/urbanization/how-to-make-a-citygreat, last accessed 25 September 2020

McKinsey & Company (2015) 'Building the cities of the future with green districts' https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/building-thecities-of-the-future-with-green-districts , last accessed 25 September 2020

McKinsey Global Institute (2011) *Urban World: Mapping the economic power of cities*, McKinsey Global Institute, New York

McKinsey Global Institute (2014) 'A blueprint for addressing the global affordable housing challenge', https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Urbanization/Tackling%20the%20worlds%20affordable%20housing%20challenge/MGI_Affordable_housing_Full%20Report_October%202014.ashx, last accessed 22 September 2020

Medium.com (2018) 'The cities coalition for digital rights: A global initiative to put citizens' digital rights at the centre of the policy debate', https://medium.com/dsi4eu/the-cities-coalition-for-digital-rights-aglobal-initiative-to-put-citizens-digitalrights-at-601963879c90, last accessed 24 September 2020

Meerow, S. (2017) 'Double exposure, infrastructure planning, and urban climate resilience in coastal megacities: A case study of Manila', *Environment and Planning A: Economy and Space* **49** (11):2649–2672

Mekonnen, M., S. D. Keesstra, L. Stroosnijder, J. E. Baartman, and J. Maroulis (2015) 'Soil conservation through sediment trapping: A review', *Land Degradation & Development* **26**

(6):544–556
Mendes, K. (2018) 'Rio favela takes lead with green solution amid infrastructure shortfall', *Thomson Reuters Foundation News*, 5 March, https://news.trust.org/item/20180305172139-nh72v, last accessed 23 September 2020
Mergel I, A. Kleibrink and J. Sorvik (2018) 'Open Data Outcomes: US Cities between product and process innovation', *Government Information Quarterly* (35): 622-632.
Mergel, I. (2012) 'Distributed democracy: SeeClickFix.Com for crowdsourced issue reporting', http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1992968, last accessed 24 September 2020
Metropolis (2018) *Safety and public space: Mapping Metropolitan Gender Policies*, Metropolis, Barcelona
Midgley, J. (2020) *Inequality, Social Protection and Social Justice*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, USA
MIER (2015) *The Case for Agglomeration Economies*, Manchester Independent Economic Review, Manchester
Migration Data Portal (2019) 'Types of migration', https://migrationdataportal.org/themes/irregular-migration#definition, last accessed 22 September 2020
Migration Data Portal (2020) 'Urbanization and migration', https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration, last accessed 22 September 2020
Milan Urban Food Policy Pact (2015a)*Urban Food Policy Framework for Action*, http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf, last accessed 28 September 2020
Milan Urban Food Policy Pact (2015b) The 210 Cities of The Milan Urban Food Policy Pact; http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/signatory-cities, last accessed 28 September 2020
Moncayo, E. (2002) 'Glocalización: Nuevos enfoques teóricos sobre el desarrollo regional', in *Desafíos*, 7, II semester, 2002, Bogotá, pp.50–99
Monslave, C. and K. Watsa (2020) 'Human capital and climate action: Outcomes that deliver for people and planet' *World Bank Blogs*, 12 May, https://blogs.worldbank.org/climatechange/human-capital-and-climateaction-outcomes-deliver-people-and-planet, last accessed 25 September 2020
Montagut T., G. Vilà, and S. Riutort (2016) 'Barcelona: A citizen's agreement for an inclusive city', in T. Brandsen, S. Cattacin, A. Evers and A. Zimmer (eds) *Social Innovations in the Urban Context*, Springer Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London
Moore, M. (2018) *Democracy Hacked: Political Turmoil and Information Warfare in the Digital Age,* Oneworld Publications, London
Morales, M., M. Villacís Taco, V. Gutiérrez Reyes, and J.J. Herrera (2016) *National Level Implications of SDGs Implementation in Ecuador. Southern Voice, Occasional Paper Series 35*, http://southernvoice.org/nationallevel-implications-of-sdg-implementationin-ecuador/, last accessed 25 September 2020
Moreno, E. M. and A. Panda (2017) Urban Africa in the 21st century – Potential and challenges', Keynote Address, Conference on Refractions of the National, the Popular, and the Global in African cities, July 31 to August 1, 2017
Moreno-Monroy, A., J. Gars, T. Matsumoto, J. Crook, R. Ahrend, and A. Schumann (2020) *Housing Policies for Sustainable and Inclusive Cities: How National Governments can Deliver Affordable Housing and Compact Urban Development*, Coalition for Urban Transitions, https://urbantransitions.global/publications, last accessed 28 September 2020
Moretti, E. (2004a) 'Estimating the social return to higher education: Evidence from longitudinal and repeated cross-sectional data', *Journal of Econometrics* **121**(1-2):175–212
Moretti, E. (2004b) 'Human capital externalities in cities', in J. V. Henderson and J. F. Thisse (eds) *Handbook of Regional and Urban Economics*, ed. 1, vol. 4, Elsevier, Oxford, pp. 2243–2291
Moretti, E. (2004c) 'Workers' education, spillovers, and productivity: Evidence from plant-level production functions', *American Economic Review* **94**(3): 656–690
Muggah, R., O. Geray, and K. A. Eik, (2019) 'Innovative urban financing can make our cities stronger', https://www.weforum.org/agenda/2019/03/innovative-urbanfinancing-can-unlock-stronger-cities/, last accessed 22 September 2020
Mukhija, V. and A. Loukaitou-Sideris (eds) (2014) *The Informal American City: Beyond Taco Trucks and Day Labour*, MIT Press, Cambridge, MA
Müller, D. B., G. Liu, A. N. Løvik, R. Modaresi, S. Pauliuk, F. S. Steinhoff, and H. Brattebø (2013) 'Carbon Emissions of Infrastructure Development', *Environmental Science & Technology* **47** (20):11739–11746
Municipal Finance Authority of British Columbia (2020) *2019 Annual Report*, https://mfa.bc.ca/sites/default/files/Investors/Annual%20Report/2019_annual_report.pdf, last accessed 25 September 2020
Muro, M. (2020) 'Could Big Tech's move to permanent remote work save the American heartland?' https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/05/26/could-bigtechs-move-to-permanent-remote-worksave-the-american-heartland/, last accessed 22 September 2020
Muro, M., T. H. Loh, M. Ross, J. Schuetz, A. Goger, N. Bateman, W. H. Frey, J. Parilla, S. Liu, and A. Tomer (2020) 'How COVID-19 will change the nation's long-term economic trends, according to Brookings Metro scholars', https://www.brookings.edu/research/how-covid-19-willchange-the-nations-long-term-economictrends-brookings-metro/, last accessed 22 September 2020
Murphy, A. (2018) 'The 2018 Digital 100' *Forbes*, 20 September, https://www.forbes.com/sites/andreamurphy/2018/09/20/the-2018-digital-100/#289c85106137, last accessed 24 September 2020
Myllyvirta, L. (2020) 'Coronavirus has temporarily reduced China's CO2 emissions by a quarter' https://www.eco-business.com/news/coronavirus-has-temporarily-reducedchinas-co2-emissions-by-a-quarter/ , last accessed 22 September 2020
Nakamura, S., R. Harati, S. Lall, Y. Dikhanov, N. Hamadeh, W. V. Oliver, M. O. Rissanen and M. Yamanaka (2016) 'Is living in African cities expensive?' *Policy Research Working Paper 7641*, World Bank, Washington, DC
National Institute of Building Sciences (2019*) Natural Hazard Mitigation Saves: 2019 Report,* National Institute of Building Sciences. Washington, DC
Nature (2020) 'Show evidence that apps for COVID-19 contact-tracing are secure and effective' Editorial, 29April,: https://www.nature.com/articles/d41586-020-01264-1, last accessed 24 September 2020
NDRC (Natural Resources Defense Council) (2019) *Watered Down Justice*, https://www.nrdc.org/resources/watered-down-justice, last accessed 22 September 2020
Neiderud, C. (2015) 'How urbanization affects the epidemiology of emerging infectious diseases', *Infection Ecology & Epidemiology* 5(1), https://doi.org/10.3402/iee.v5.27060, last accessed 20 April 2020
Nenova, T. (2010) *Expanding Housing Finance to the Underserved in South Asia: Market Review and Forward Agenda*, World Bank, Washington, DC
Newburger, E. (2020) 'Carbon emissions sharply rebound as countries lift coronavirus restrictions', *CNBC*, 18 June, https://www.cnbc.com/2020/06/18/coronavirus-carbonemissions-rebound-sharply-as-countriesstates-open.html, last accessed 21 September 2020, last accessed 22 September 2020
Nightingale, A. J (2011) 'Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal', *Geoforum* **42** (2):153–162
Nobel, S. (2018) *Algorithms of Oppression*, NYU Press, New York
Nolte, M. (2020) 'Covid-19 is forcing an exodus from Peru's cities' *The Nation*, 11 May, https://www.thenation.com/article/world/peru-coronavirus-covid-19/, last accessed 23 September 2020
Novara, A., S. Keesstra, A. Cerdà, P. Pereira, and L. Gristina (2016) 'Understanding the role of soil erosion on CO2-C loss using 13C isotopic signatures in abandoned Mediterranean agricultural land', *Science of the Total Environment* **550**:330–336
Nzeadibe, T. C. and P. O. Mbah (2015) 'Beyond urban vulnerability: Interrogating the social sustainability of a livelihood in the informal economy of Nigerian cities', *Review of African Political Economy* **42** (144):279–298
O'Brien, O. (2017) 'Smart mobility and open

data: A global and personal perspective transport matters' , ITDP, https://www.itdp.org/2017/11/20/smart-mobility-opendata/,
last accessed 24 September 2020
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2006) *Competitive Cities in the Global Economy*, OECD Publishing, Paris
OECD (2007) *Competitive Cities: A New Entrepreneurial Paradigm in Spatial Development*, OECD Publishing, Paris.
OECD (2012) 'Innovation to strengthen growth and address global and social challenges', http://www.oecd.org/sti/45326349.pdf, last accessed 24 September 2020
OECD (2014) Is migration good for the economy? Migration Policy Debates; https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf, last accessed 24 September 2020
OECD (2014) *The Competitiveness of Global Port-Cities: Synthesis Report,* OECD Publishing, Paris
OECD (2015) *Governing the City,* OECD Publishing, Paris
OECD (2017) *National Urban Policy in OECD Countries*, OECD Publishing, Paris
OECD (2017) *OECD Affordable Housing Database 2017*, OECD, Paris
OECD (2018) *OECD Business and Finance Outlook 2018: China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape*, https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-theglobal-trade-investment-and-finance-landscape.pdf, last accessed 25 September 2020
OECD (2019a) 'Affordable housing', in *Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators*, OECD Publishing, Paris
OECD (2019b) Global outlook on financing for sustainable development 2019: Time to face the challenge, https://www.oecd.org/development/global-outlook-onfinancing-for-sustainable-development-2019-9789264307995-en.htm , last accessed 25 September 2020
OECD (2020) *A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis Report*, OECD Publishing, Paris
OECD and UCLG (2019) *2019 Report of the World Observatory on Subnational Government Finance and Investment – Key Findings*, OECD Publishing, Paris.
OECD and UN-Habitat (2018) *Global State of National Urban Policy*, OECD Publishing, Paris/UN-HABITAT, Nairobi
Oka, R. (2011) 'Unlikely cities in the desert: The informal economy as causal agent for permanent "urban" sustainability In Kakuma Refugee Camp, Kenya', *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*:223-262
Oliver, P. (2016) *Green Bonds for Cities: A Strategic Guide for City-Level Policymakers in Developing Countries*, Climate Policy Initiative, https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/green-bonds-guide-city-policymakers-developing-countries/, last accessed 25 September 2020
O'Neill, J. and C. L. Spash (2000) 'Conceptions of value in environmental decision-making', *Environmental Values* **9** (4):521–536
O'Sullivan, F. (2017) 'Paris is tripling its tax on second homes' *Citilab*, 26 January, https://www.citylab.com/equity/2017/01/paris-france-property-taxes-vacationhomes/514496/, last accessed 20 April 2020
Osuteye, E., C. Johnson, and D. Brown (2017) 'The data gap: An analysis of data availability on disaster losses in sub-Saharan African cities', *International Journal of Disaster Risk Reduction* **26**:24-33
Oteh, A. (2019) 'Leveraging innovative finance for realizing the Sustainable Development Goals' https://www.worldbank.org/en/news/speech/2018/05/15/leveraginginnovative-finance-for-realizing-the-sustainable-development-goals, last accessed 22 September 2020
Ottaviano, G. I. P. and G. Peri (2006) 'The economic value of cultural diversity: Evidence from US cities', *Journal of Economic Geography* **6**(1):9–44
OXFAM (2020) *Time to Care: Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality Crisis*, OXFAM Briefing Paper, https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-careinequality-200120-en.pdf, last accessed 24 September 2020
Panter, E. R. E., T. Primiani, T. Hasan, and E. Calderon Pontaza (2017) *Antidiscrimination Law and Shared Prosperity: An Analysis of the Legal Framework of Six Economies and their Impact on the Equality of Opportunities of Ethnic, Religious, and Sexual Minorities,* Policy Research Working Paper 7992,World Bank, Washington, DC
Parnell, S. (2016) 'Defining a global urban development agenda', *World Development* **78**:529–540
Parnell, S. (2018) 'Globalization and sustainable development: At the urban crossroad', *The European Journal of Development Research* **30** (2):169–171
Parnell, S. and D. Simon (2014) 'National urbanization and urban strategies: Necessary but absent policy instruments in Africa', in S.
Parnell and E. Pieterse (eds) *Africa's Urban Revolution,* Zed Books, London, pp. 237–256
Parnell, S. and R. Walawege (2011) 'Sub-Saharan African urbanisation and global environmental change', *Global Environmental Change* **21** (Supplement 1):S12–S20
Parnell, S., O. Crankshaw and M. Acuto (2016) '2030 policy endorsement of a sustainable future: Implications for urban research', http://www.urbantransformations.ox.ac.uk/debate/2030-policy-endorsement-of-asustainable-future-implications-for-urbanresearch/,last accessed 22 September 2020
Partington, R. (2019) 'The UK ranks among the most unequal nations in Europe and many people feel they are not sharing in the country's wealth', *The Guardian*, 9 September, https://www.theguardian.com/news/2019/sep/09/inequality-is-it-rising-and-can-wereverse-it, last accessed 22 September 2020
Patel, A. D. and G. Steinhauser (2020) 'South Africa's economy shrinks 51 per cent as lockdown restrictions hurt businesses', *The Wall Street Journal*, 8 September, https://www.wsj.com/articles/south-africaseconomy-shrinks-51-as-lockdown-restrictions-hurt-businesses-11599563965, last accessed 22 September 2020
Patel, S., C. Baptist, and C. D'Cruz (2012) 'Knowledge is power – informal communities assert their right to the city through SDI and community-led enumerations', *Environment and Urbanization* **24** (1):13–26
Patel, Z., S. Greyling, S. Parnell, and G. Pirie (2015) 'Co-producing urban knowledge: experimenting with alternatives to 'best practice'for Cape Town, South Africa', *International Development Planning Review* **37** (2):187–203
Pearson, N. O. (2019) 'The taxes that sent Vancouver's luxury housing market reeling', *Bloomberg,*16 April, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-16/the-taxesthat-sent-vancouver-s-luxury-housingmarket-reeling, last accessed 22 September 2020
Peck, J. (2002) 'Political economies of scale: Fast policy, interscalar relations, and neoliberal workfare', *Economic geography* **78** (3):331–360
Pelling, M. and B. Wisner (2012) *Disaster Risk Reduction: Cases from Urban Africa*, Routledge
Pelling, M., H. Leck, L. Pasquini, I. Ajibade, E. Osuteye, S. Parnell, S. Lwasa, C. Johnson, A. Fraser, A. Barcena, and S. Boubacar (2018) 'Africa's urban adaptation transition under a 1.5° climate', *Current Opinion in Environmental Sustainability* **31**: 10–15
Persistence Market Research (2017) 'Global market study on smart cities: Massive potential resides in Asia Pacific, https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/smart-cities-market.asp, last accessed 22 September 2020
Pescaroli, G. and D. Alexander (2018) 'Understanding compound, interconnected, interacting, and cascading risks: A holistic framework', *Risk Analysis* **38** (11):2245–2257
Pettit, H. and C. White (2018) 'A glimpse into the future? $39 billion high-tech smart city in South Korea turns into a "Chernobyllike ghost town" after investment dries up', *MailOnline*, 28 March, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5553001/28-billion-project-dubbed-worlds-Smart-City-turned-Chernobyl-like-ghosttown.html, last accessed 21 September 2020
Pieterse, E. (2014) 'Filling the void: An agenda for tackling African urbanisation', in S.
Parnell and E. Pieterse (eds) *Africa's Urban Revolution,* Zed Books, London, pp. 200–220
Pieterse, E. (2019) 'Promoting sustainable infrastructure to underpin African urbanisation'

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/promoting-sustainable-infrastructure-underpin-afri-can-urbanisation-23217, last accessed 22 September 2020

Pilling, D. (2019) 'Are tech companies Africa's new colonialists?' *The Financial Times,* https://www.ft.com/content/4625d9b8-9c16-11e9-b8ce-8b459ed04726, last accessed 24 September 2020

Pinder, R, J.M. Klopp, G. Kleiman, G.S.W. Hagler, Y. Awe and S. Terry (2019) 'Filling the gaps: Improving measurement of air quality in low and middle-income countries' *Atmospheric Environment* **215**:116794

Poon, L. (2018) 'Sleepy in Songdo, Korea's Smartest City', *Bloomberg CityLab,*22 June, https://www.citylab.com/life/2018/06/sleepy-in-songdo-koreas-smartestcity/561374/, last accessed 24 September 2020

Population Reference Bureau (2017) *2017 World Population Data Sheet with a Special Focus on Youth*, https://www.prb.org/wp-content/uploads/2017/08/WPDS-2017.pdf, last accessed 21 September 2020

Porter, E. (2020) 'Coronavirus threatens the luster of superstar cities', *The New York Times*, 21 July, https://www.nytimes.com/2020/07/21/business/economy/coronavirus-cities.html, last accessed 22 September 2020

Porter, L., S. Jackson, and L. Johnson (2018) 'Indigenous communities are reworking urban planning, but planners need to accept their history', https://theconversation.com/indigenous-communities-arereworking-urban-planning-but-plannersneed-to-accept-their-history-92351, last accessed 22 September 2020

Poumanyvong, P., S. Kaneko, and S. Dhakal (2012) 'Impacts of urbanization on national transport and road energy use: Evidence from low, middle and high income countries', *Energy Policy* **46**:268–277

Powell, J. (2016) *Targeted universalism: Equity 2.0.*, Haas Institute, https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/Targeted_Universalism_Equity_622281_7.pdf, last accessed 22 September 2020

Prime Minister's Office Singapore (2019) 'Formation smart nation and digital government group prime minister's office', https://www.pmo.gov.sg/newsroom/formationsmart-nation-and-digital-governmentgroup-prime-minister%E2%80%99s-office, last accessed 22 September 2020

Prorok, T., A. Todorović, D. Pichler, M. Ivanović, L. Rücker and M. Pejčić (2019) *Agenda 2030 in my municipality: A handbook for practitioners for localizing the Sustainable Development Goals (SDGs)*, https://socialrights-balkan.org/wp-content/uploads/Handbook_2030-Agenda-in-my-Municipality-4.pdf, last accessed 25 September 2020

Pskowski, M. (2018) 'Abandoned by the U.S. media, the migrant caravan rolls into Mexico City', *Bloomberg CityLab*, 8 November, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-08/mexico-citygreets-the-central-american-migrant-caravan, last accessed 22 September 2020

Public Health England (2020) *Disparities in the Risk and Outcomes of COVID-19*, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892085/disparities_review.pdf, last accessed 22 September 2020

Público (2016) *Urbanismo feminista o cómo humanizar las ciudades desde la experiencia de las mujeres.* https://www.publico.es/sociedad/urbanismo-feminista-humanizarciudad-experiencia.html

Publish0x.com. (2019) 'How disruptive technologies are driving the fourth industrial revolution', https://www.publish0x.com/mina-down/how-disruptive-technologiesare-driving-fourth-industrial-re-xjjwwv, last accessed 22 September 2020

Pulkkinen, L. (2019) 'If Silicon Valley were a country, it would be among the richest on Earth' *The Guardian,*30 April*,* https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/30/silicon-valley-wealth-second-richestcountry-world-earth, last accessed 24 September 2020

QiangYan, C. Z., Y. Liu, M. Paganini and V. Steenbergen (2020) 'Foreign direct investment and global value chains in the wake of COVID-19' *World Bank Blogs,*1 May, https://blogs.worldbank.org/psd/foreign-directinvestment-and-global-value-chains-wakecovid-19, last accessed 13 May 2020

Quintero, L. E. and M. Roberts (2018) *Explaining Spatial Variations in Productivity: Evidence from Latin America and the Caribbean*, Policy Research Working Paper 8560, World Bank, Washington, DC

Rabelo, R. J. and P. Bernus, (2015) 'A holistic model of building innovation ecosystems', in *15th IFAC Symposium on Information Control in Manufacturing*, Ottawa, Canada Rand Corporation (undated) 'Preparing for an aging world', https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB5058/index1.html, last accessed 21 September 2020

Ranganathan, M. and C. Balazs (2015) 'Water marginalization at the urban fringe: Environmental justice and urban political ecology across the North–South divide', *Urban Geography* **36** (3):403–423

Ranganathan, M., L. Kamath, and V. Baindur (2009) 'Piped water supply to greater bangalore: Putting the cart before the horse?', *Economic and Political Weekly* **44**(33):53–62

Rapoport, E. (2015) 'Globalising sustainable urbanism: The role of international masterplanners', *Area* **47** (2):110–115

Ratcliffe, R. (2020) 'We're in a prison': Singapore's migrant workers suffer as Covid-19 surges back), *The Guardian*, 23 April, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/23/singapore-million-migrant-workers-sufferas-covid-19-surges-back, last accessed 22 September 2020

Ratcliffe, R., L. Ford, L. McMullan, P. Gutiérrez, and G. Blight (2020) Cox's Bazar refugee camps: Where social distancing is impossible, *The Guardian*, 29 June, https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jun/29/not-fit-for-a-humancoronavirus-in-coxs-bazar-refugee-camps, last accessed 22 September 2020

Ratti, C, D. Frenchman, R.M. Pulsell and S.Williams (2006) 'Mobile landscapes: Using location data from cell phones for urban', *Environment and Planning B: Planning and Design* **33**:727–748

Rauch, J. E. (1993) 'Productivity Gains from geographic concentration of human capital: Evidence from the cities', *Journal of Urban Economics* **34**(3): 380–400

Raymond, C. M., M. Breil, M. Nita, N. Kabisch, M. de Bel, V. Enzi, N. Frantzeskaki, G. Geneletti, L. Lovinger, and M. Cardinaletti (2017) *An Impact Evaluation Framework to Support Planning and Evaluation of Nature-Based Solutions Projects: An EKLIPSE Expert Working Group report*, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, UK

Rebuild by Design (2013) 'Hurricane Sandy Design Competition', http://www.rebuildbydesign.org/our-work/sandy-projects, last accessed 24 September 2020

Reckien, D. (2018) 'How are cities planning to respond to climate change? Assessment of local climate plans from 885 in the EU-28' *Journal of Cleaner Production* **191**:207–219

Regan, H and C. Ulloa (2019) 'Chile extends curfew again as violent unrest paralyzes one of Latin America's biggest cities', *CNN*, 22 October, https://edition.cnn.com/2019/10/22/americas/chile-protestsinequality-curfew-intl-hnk/index.html, last accessed 21 September 2020

Regional Plan Association (2017) 'Northeast Corridor: A megaregion of national and international significance', http://fourthplan.org/places/northeast-corridor, last accessed 22 September 2020

Reidy (2020) 'The COVID-19 excuse? How migration policies are hardening around the globe' https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/04/17/coronavirus-globalmigration-policies-exploited, last accessed 22 September 2020

Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Review, Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, Government of Indonesia, Jakarta

Rimmer, W. G. (1970) *British Factory Towns during the First Industrial Revolution*, Frederick Warne &Co., London

Ripley, S. (2010) Culturally *Diverse Arts and Culture Programming in After School Settings for Culturally Diverse Children and Youth: A Review of Literature*, Creative Mosaics, Scarborough, ON

Robin, E. and M. Acuto (2018) 'Global urban policy and the geopolitics of urban data', *Political Geography* **66**:76–87

Robinson L.D., J.L. Cawthray, S.E. West, A. Bonn, and J. Ansine (2018) 'Ten principles

of citizen science', in S. Hecker, M. Haklay, A. Bowser, Z. Makuch, J. Vogel, and A. Bonn (eds) *Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy*, UCL Press, London, pp.1–23

Rogan, M. and P. Cichello (2017) Can informal employment actually reduce poverty? *WIEGO Blog,* 16 February, https://www.wiego.org/blog/can-informal-employmentactually-reduce-poverty, last accessed 20 April 2020

Rogelj, J., M. Den Elzen, N. Höhne, T. Fransen, H. Fekete, H. Winkler, R. Schaeffer, F. Sha, K. Riahi, and M. Meinshausen (2016) 'Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 C', *Nature* **534** (7609):631–639

Rohit J. (2014) ´The intangible dimension of urban heritage´, in F. Bandarin, and R. van Oers (eds) *Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage*, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey

Romero-Lankao, P., O. Wilhelmi, and M. Chester (2018) 'Live with risk while reducing vulnerability', in T. Elmqvist, X. Bai, N. Frantzeskaki, C. Griffith, D. Maddox, T. McPhearson, S. Parnell, P. Romero-Lankao, D. Simon, and M. Watkins (eds) *Urban Planet*, Cambridge, University Press, Cambridge, pp. 92–112

Romp, W. E. and J. de Haan. (2007) 'Public capital and economic growth: A critical survey', *Perspektiven der Wirtschaftspolitik (Economic Policy Perspectives)* **8**(S1), https://doi.org/10.1111/j.1468-2516.2007.00242.x, last accessed 25 September 2020

Rosen, J. (2019) 'Cities, states and companies vow to meet U.S. climate goals without Trump. Can they?' *Los Angeles Times,* 4 November, https://www.latimes.com/environment/story/2019-11-04/cities-statescompanies-us-climate-goals-trump, last accessed 28 September 2020

Rosenblat, A. (2018) *Uberland: How Algorithms are Rewriting the Rules of Work,* University of California Press Rosenthal, M. J. (2018) 'The United States isn't the only country downplaying climate change', The Washington Post, 11 December, https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/12/11/unitedstates-isnt-only-country-downplayingclimate-change/, last accessed 22 September 2020

Rosenthal, S. and W. Strange (2004) 'Evidence on the nature and sources of agglomeration economies', in J. V. Henderson and J. F. Thisse (eds) *Handbook of Regional and Urban Economics*, vol. 4, Elsevier, Oxford, pp.2119–2171

Rosenzweig, C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S.A. Ibrahim (2018a) 'Pathways to urban transformation', in C. Rosenzweig, W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S.A. Ibrahim (eds) *Climate Change and Cities; Second Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network,* Cambridge University Press, Cambridge, pp. 3-26

Rosenzweig, C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S.A. Ibrahim (2018b) (eds) *Climate Change and Cities; Second Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network*, Cambridge University Press, Cambridge

Routley, N. (2018) 'Megacity 2020: The Pearl River Delta's astonishing growth', https://www.visualcapitalist.com/pearl-river-deltamegacity-2020, last accessed 22 September 2020

Rowlatt, J. (2020) 'India's carbon emissions fall for first time in four decades', *BBC News*, https://www.bbc.com/news/world-asiaindia-52614770, last accessed 22 September 2020

Rudd, A., D. Simon, M. Cardama, E.L. and A. Birchand Revi (2018) 'The UN, the Urban Sustainable Development Goal, and the New Urban Agenda', in T. Elmqvist, X. Bai, N. Frantzeskaki, C. Griffith, D. Maddox, T. McPhearson, S. Parnell, P. Romero-Lankao, D. Simon, and M. Watkins (eds) *Urban Planet*, Cambridge University Press, Cambridge, pp.180–196

Runde, D. and A. Milner (2019) 'Evolution of revolutions: The human element of technological change' in *Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World* Center for Strategic and International Studies, Washington DC

Ruzek, W. (2015) 'The informal economy as a catalyst for sustainability', *Sustainability* **7** (1):23–34

Rwanda Governance Board (2018) *Citizen Report Card 2018*, http://rgb.rw/fileadmin/Publications/Citizen_Report_Card_all/CRC_Report_ENG_2018.pdf, last accessed 24 September 2020

Rydin, Y. (2011) *The Purpose of Planning: Creating Sustainable Towns and Cities*, Policy Press Sánchez-Páramo, C. (2020) 'COVID-19 will hit the poor hardest. Here's what we can do about it', *World Bank Blogs* April 23, https://blogs.worldbank.org/voices/covid-19-willhit-poor-hardest-heres-what-we-can-doabout-it, last accessed 13 May 2020

Sanzana Calvet, M.G (2016) 'The greening of neoliberal urbanism in Santiago de Chile: Urbanisation by green enclaves and the production of a new socio-nature in Chicureo' Doctoral dissertation, University College London

Sarkar, S. (2012) *Environmental Philosophy: From Theory to Practice*, John Wiley & Sons Sassen, S. (2018) 'Who own the city?' in R. Burdett and P. Rode (eds) *Shaping Cities in an Urban Age*. Phaidon Press, London and New York

Satterwaite, D. (2010) *The Role of Cities in Sustainable Development*. Sustainable Development Insights. Boston University, http://www.bu.edu/pardee/files/2010/04/UNsdkp004fsingle.pdf, last accessed 22 September 2020

Schenck, R. and P. F. Blaauw (2011) 'The work and lives of street waste pickers in Pretoria—A case study of recycling in South Africa's urban informal economy', *Urban Forum* **22**:411–430

Scott, A. J. (2000) *The Cultural Economy of Cities*, Sage, London

Scott, A.J. (2001) 'Capitalism, cities and the production of symbolic forms', *Transactions of the Institute of British Geographers* **26**:11–22

SDI and Know Your City (2018) *Know Your City: Slum Dwellers Count*, https://knowyourcity.info/wp-content/uploads/2018/02/SDI_StateofSlums_LOW_FINAL.pdf, last accessed 25 September 2020

SDSN (United Nations Sustainable Development Solutions Network) (2014) 'Why the world needs an urban SDG?', https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5448revi.pdf, last accessed 21 September 2020

SDSN (2015) *Investment Needs to Achieve the Sustainable Development Goals: Understanding the Billions and Trillions*, SDSN Working Paper, https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/151112-SDGFinancing-Needs.pdf, last accessed 25 September 2020

SDSN (2016) *Getting Started with the SDGs in Cities: A Guide for Stakeholders*, https://irp-cdn.multiscreensite.com/6f2c9f57/files/uploaded/Cities-SDG-Guide.pdf, last accessed 21 September 2020

SDSN (2018) *Closing the SDG Budget Gap. Move Humanity*, https://irp-cdn.multiscreensite.com/6f2c9f57/files/uploaded/Move%20Humanity%20Report_2018.pdf, last accessed 25 September 2020

SDSN (2019) *SDG Costing and Financing for Low-Income Developing Countries*, https://sdgfinancing.unsdsn.org/static/files/sdg-costingand-finance-for-LIDCS.pdf, last accessed 25 September 2020

Sefa Dei, G., B. Hall, and D. Rosenberg (eds.) (2000) *Indigenous Knowledges in Global Contexts: Multiple Readings of Our World,* University of Toronto Press, Toronto

Senate of Berlin (2018) *Berlin Strategy, Urban Development Concept Berlin 2030*, Senate Department for Urban Development and the Environment, Berlin, https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungskonzept/download/strategie/BerlinStrategie_Broschuere_en.pdf, last accessed 25 September 2020

Seoul Metropolitan Government (2015) *Promise of Seoul: Taking Action Against Climate Change*, see: https://ccacoalition.org/en/resources/promise-seoul-taking-action-againstclimate-change, last accessed 25 September 2020

Seoul Metropolitan Government (2018) *The Seoul Sustainable Development Goals 2030, 17 Ways to Change Seoul*, http://www.urbansdgplatform.org/board/viewPublicationDetail.msc?no=146, last accessed 25 September 2020

Seto, K. C., B. Güneralp, and L. R. Hutyra (2012) 'Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools', *Proceedings of the National Academy of Sciences* **109** (40):16083–16088

Seto, K. C., J. S. Golden, M. Alberti, and B. L. Turner (2017) 'Sustainability in an urbanizing planet', *Proceedings of the National Academy of Sciences* **114** (34):8935–8938

Sgeuo, G. (2016) *Participatory Budgeting: An Innovative Approach*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2712213, last accessed 24 September 2020

Shaikh, M. (2020) 'Mumbai: Dharavi reports 30 new Covid-19 cases, area's tally reaches 168', *India Today*, 20 April, https://www.indiatoday.in/india/story/mumbai-dharavireports-30-new-covid-19-cases-area-stally-reaches-168-1669118-2020-04-20, last accessed 22 September 2020

Sharp, R. (2020) 'Black people in NYC are TWICE as likely to die from coronavirus as white people, shocking new data reveals', *MailOnline*, 17 April, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8231077/Black-people-NYC-TWICE-likely-die-coronavirus-whitepeople-data-shows.html, last accessed 21 September 2020

Shepherd, M. (2018) 'How urbanization makes wildfires and hurricanes worse'*Forbes,* 21 Nov, https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2018/11/21/how-urbanization-makes-wildfires-and-hurricanesworse/#7e05022918b3, last accessed 23 September 2020

SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) (2017) *Sida Guarantee Portfolio,* SIDA, Stockholm, https://www.sida.se/contentassets/95cc74d7ae78433db642fbe82a552138/10201165_guarantee_portfolios_2017_webb.pdf, last accessed 25 September 2020

Sidewalk Toronto Tomorrow (undated)A new approach for inclusive growth, https://www.sidewalktoronto.ca/, last accessed 24 September 2020

Simon, D. (2016a) 'Green cities: From tokenism to incrementalism and transformation', in Simon, D. (ed.) *Rethinking Sustainable Cities: Accessible, Green and Fair*, Policy Press, Bristol, pp. 61–105

Simon, D. (2016b) 'The potential of the green economy in addressing urban environmental change', in K.C. Seto, W.D. Solecki, and C.A. Griffith (eds) *Handbook on Urbanization and Global Environmental Change*, Routledge, London and New York. pp. 455–469

Simon, D. (2020) 'Cities are at centre of coronavirus pandemic – understanding this can help build a sustainable, equal future', *The Conversation*, 23 April. https://theconversation.com/cities-are-at-centreof-coronavirus-pandemic-understandingthis-can-help-build-a-sustainable-equalfuture-136440, last accessed 28 September 2020

Simon, D. and H. Leck (2014) 'Understanding Urban Adaptation Challenges in Diverse Contexts' (Editorial introduction: Special issue on Urban Adaptation to Climate/ Environmental Change), *Urban Climate*, **7**: 1–5

Simon, D., Griffith, C. and H. Nagendra (2018) 'Rethinking urban sustainability and resilience', in T. Elmqvist, X. Bai, N. Frantzeskaki, C. Griffith, D. Maddox, T. McPhearson, S. Parnell, P. Romero-Lankao, D. Simon, and M. Watkins (eds) *Urban Planet*, Cambridge University Press, Cambridge, pp.149–162

Simon, D., H. Arfvidsson, G. Anand, A. Bazaz, G. Fenna, K. Foster, G. Jain, S. Hansson, L. M. Evans, N. Moodley, C. Nyambuga, M. Oloko, D. C. Ombara, Z. Patel, B. Perry, N. Primo, A. Revi, B. Van Niekerk, A. Wharton, and C. Wright (2016) 'Developing and testing the Urban Sustainable Development Goal's targets and indicators – a five-city study', *Environment and Urbanization* **28** (1):49–63

Simon, D., M. Fragkias, R. Leichenko, R. Sánchez-Rodríguez, K.C. Seto, and W. Solecki (2011) *The Green Economy and the Prosperity of Cities*, Background Paper for the UN-HABITAT State of World Cities Report 2012/3, available at http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GreenEconomyCityProsperity5Aug11.pdf, last accessed 28 September 2020

Simone, A. and E. Pieterse (2018) *New Urban Worlds: Inhabiting Dissonant Times*, John Wiley & Sons

Smart Cities Association (2017) 'Global smart cities market to reach a whopping $3.5 trillion by 2026', https://www.smartcitiesassociation.org/index.php/media-corner/news/1-global-smart-cities-market-toreach-a-whopping-3-5-trillion-by-2026, last accessed 22 September 2020

Smart Cities World (2020) 'South Korea to step-up online coronavirus tracking', https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-onlinecoronavirus-tracking-5109, last accessed 24 September 2020

Smith, L. (2017) 'Benefits of open data for smart cities', https://hub.beesmart.city/en/solutions/benefits-of-open-data-for-smartcities, last accessed 24 September 2020

Snow, J. (2017) '8 city mobile apps driving citizen engagement', https://www.smartcitiesdive.com/news/8-city-mobile-appsdriving-citizen-engagement/442952/, last accessed 24 September 2020

Societe Generale, and UNEP FI (2018) 'Rethinking impact to finance the SDGs: A position paper and call to action prepared by the positive impact initiative', https://www.unepfi.org/publications/rethinkingimpact-to-finance-the-sdgs-a-position-paper-and-call-to-action/, last accessed 25 September 2020

South African Cities Network (2018a) *The People's Guide to the State of City Finances*, http://www.sacities.net/wp-content/uploads/2019/04/WEB_72DPI_SACN%20SoCF%20People's%20Guide.pdf, last accessed 21 September 2020

South African Cities Network (2018b) *Localising the New Urban Agenda* (South Africa Discussion Document), http://www.sacities.net/wp-content/uploads/2018/03/SA%20NUA%20Localisation%20Discussion%20Paper.pdf, last accessed 28 September 2020 Stakeholder Group on Ageing (2018) 'Goal 11: Building Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities for All Ages, Including Older Persons', Position paper submitted to the High-Level Political Forum 2018,

Statistics South Africa (2019) 'Unemployment rises slightly in third quarter of 2019', http://www.statssa.gov.za/?p=12689, last accessed 22 September 2020

Stephens, M. (2005) 'A critical analysis of housing finance reform in a 'super' homeownership state: The case of Armenia', *Urban Studies* **42**(10):1795–1815

Stolarick, K. and R. Florida (2006) 'Creativity, connections and innovation: A study of linkages in the Montreal region', *Environment and Planning A* **38**(10):1799–1817 Stouffer, S. A. (1955) *Communism, Conformity and Civil Liberties*, Doubleday, Garden City, NJ

Stripple, J. and H. Bulkeley (2019) 'Towards a material politics of socio-technical transitions: Navigating decarbonisation pathways in Malmö', *Political Geography* **72**: 52–63.

Summers, N. (2019) 'Toronto is reining in Sidewalk Labs' smart city dream', https://www.engadget.com/2019/10/31/sidewalklabs-waterfront-toronto-threshold-issues/, last accessed 24 September 2020

Sumner, A., C. Hoy and E. Ortiz-Juarez (2020) 'Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty', WIDER Working Paper 2020/43, https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf, last accessed 21 September 2020

Suzuki, H., J. Murakami, Y. Hong, and B. Tamayose (2015) *Financing Transit-Oriented Development with Land Values: Adapting Land Value Capture in Developing Countries*, World Bank, Washington, DC

Swilling, M., J.K. Musango, and J. Wakeford (eds) (2016) *Greening the South African Economy: Scoping the issues, challenges and opportunities*, University of Cape Town Press, Cape Town

Swilling, M., M. Hajer, T. Baynes, J. Bergesen, F. Labbé, J. K. Musango, A. Ramaswami, B. Robinson, S. Salat, and S. Suh (2018*) The Weight of Cities: Resource Requirements of Future Urbanization*, International Resource Panel, https://www.resourcepanel.org/reports/weight-cities, last accessed 23 September 2020

Tait, R. and S. Walker (2020) 'Coronavirus: Central Europe faces worse second wave after avoiding worst of first'*, The Guardian*, 10 September, https://www.theguardian.

com/world/2020/sep/10/czechs-face-secondcoronavirus-wave-as-cases-soar-in-europe, last accessed 22 September 2020

Talbot, D. (2013) 'African bus routes redrawn using cellphone data', *MIT Technology Review*, 30 April, https://www.technologyreview.com/s/514211/african-bus-routesredrawn-using-cell-phone-data/, last accessed 24 September 2020

Tamajon, L.G., S.M. Perez, and J. Wilson (2019) 'The Airbnb effect and digital narratives of collaborative tourism platforms. The cases of Madrid and Barcelona' Presentation to the *8th Nordic Geographers Meeting*, Trondheim, Norway, June 16–19 2019

Teale, C. (2020) 'COVID-19 may sport the thinnest silver lining: A cleaner climate', https://www.smartcitiesdive.com/news/coronavirus-impact-cities-climate-changeefforts/574450/, last accessed 22 September 2020

Temper, L., D. Del Bene, and J. Martinez-Alier (2015) 'Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: The EJAtlas', *Journal of Political Ecology* **22** (1):255–278

Tengö, M., R. Hill, P. Malmer, C. M. Raymond, M. Spierenburg, F. Danielsen, T. Elmqvist, and C. Folke (2017) 'Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—Lessons learned for sustainability', *Current Opinion in Environmental Sustainability* **26-27**:17–25

Thaman, R. R., W. Clarke, H. I. Manner, B. G. Decker, and I. Ali (2017) *Agroforestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability*, United Nations University Press

Tharoor, I. (2018) 'How Brazil's Bolsonaro threatens the planet', *The Washington Post*, 19 October, https://www.washingtonpost.com/world/2018/10/19/how-brazils-bolsonarothreatens-planet, last accessed 22 September 2020

The C40 Knowledge Hub (2019a) 'Cities100: Citywide rapid bus electrification in Guangzhou', https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities100-Citywide-rapid-bus-electrificationin-Guangzhou?language=en_US, last accessed 25 September 2020

The C40 Knowledge Hub (2019b) 'Cities100: Recognition and inclusion of informal waste collectors reaps large benefits in Accra', https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities100-Recognition-and-inclusion-ofinformal-waste-collectors-reaps-large-benefits-in-Accra?language=en_US, last accessed 25 September 2020

The Construction Specifier (2020) COVID-19 'pandemic shakes confidence in infrastructure investment', https://www.constructionspecifier.com/covid-19-pandemic-shakesconfidence-in-infrastructure-investment/, last accessed 25 September 2020

The Economic Times (2016) 'IT Minister approves 9,000 seats for call centres in small towns', *The Economic Times*, 3 October, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/it-minister-approves-9000-seats-for-call-centres-in-small-towns/articleshow/54659119.cms, last accessed 3 November 2019

The Economist (2020a) 'New York is fast becoming the world's next coronavirus hotspot', *The Economist,* 29 April, https://www.economist.com/unitedstates/2020/03/29/new-york-is-fastbecoming-the-worlds-next-coronavirushotspot, last accessed 22 September 2020

The Economist (2020b) 'Covid-19 has led to a pandemic of plastic pollution', *The Economist,* 22 June, https://www.economist.com/international/2020/06/22/covid-19-has-ledto-a-pandemic-of-plastic-pollution, last accessed 23 September 2020

The Economist Intelligence Unit (2015) Future cities: Driving growth through the creative economy; http://creativecities.eiu.com/ last accessed 24 September 2020

The Economist Intelligence Unit (2020) 'Q2 global forecast 2020: Coronavirus sinks global growth forecasts for 2020', https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=q2globalforecast, last accessed 22 September 2020

The Local (2016) 'How Cologne sexual assaults "changed German mood completely"' https://www.thelocal.de/20161215/year-after-cologne-sex-assaults-germanyfrets-over-integration, last accessed 22 September 2020

The New Climate Economy (2016) *The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development:The 2016 New Climate Economy Report,* http://newclimateeconomy.report/2016/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/NCE_2016Report.pdf/, last accessed 25 September 2020

Tibaijuka, A. K. (2009) *Building Prosperity: Housing and Economic Development*, Earthscan, London-Sterling, VA

TNS Opinion and Social (2014) *Public Opinion in The European Union, First Results*, European Commission, Directorate-General for Communication, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb82/eb82_publ_en.pdf, last accessed 24 September 2020

Tobías, A., C. Carnerero, C. Reche, J. Massagué, M. Via, M. C. Minguillón, A. Alastuey, and X. Querol (2020) 'Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into the SARS-CoV-2 epidemic', *Science of The Total Environment* **726**: 1–4

TomTom (2018) *Traffic Index 2018*, https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking, last accessed 7 January 2020

Tornaghi, C. (2017) 'Urban agriculture in the food-disabling city:(Re) defining urban food justice, reimagining a politics of empowerment', *Antipode* **49** (3):781–801

Townsend, A. (2013) *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers and the Quest for a New Utopia,* W. W. Norton and Co, New York and London

Transparency Market Research (2014) 'Global smart cities market - Industry analysis, size, share, growth trends and forecast, 2013 – 2019', http://www.transparencymarketresearch.com/smart-cities-market.html, last accessed 24 September 2020

Truth and Reconciliation Commission of Canada (2015) *Honouring the Truth, Reconciling for the Future*, http://www.trc.ca/assets/pdf/Honouring_the_Truth_Reconciling_for_the_Future_July_23_2015.pdf, last accessed 23 September 2020

Tsen, W. H. and F. Furuoka (2005) 'The relationship between population and economic growth in Asian economies', *ASEAN Economic Bulletin*, Hong Kong, ASEAN Economic Bulletin.

Tuch, S. A. (1987) 'Urbanism, region, and tolerance revisited: The case of racial prejudice", *American Sociological Review* **52**(4): 504–510

Turok, I. (2014) 'Linking urbanisation and development in Africa's economic revival', in S. Parnell and E. Pieterse (eds) *Africa's Urban Revolution Zed Books*, London, pp. 60–81

Turok, I. and G. McGranahan (2013) 'Urbanization and economic growth: The arguments and evidence for Africa and Asia', *Environment and Urbanization* **25**(2): 465–482

Turok, I. and S. Parnell (2009) Reshaping cities, rebuilding nations: The role national urban policies' *Urban Forum* **20**:157–174

Tuxford, K. (2020) 'Leading cities on climate action revealed', https://cities-today.com/leading-cities-on-climate-actionrevealed/?utm_source=cities-today&utm_medium=newsletter&utm_campaign=20200305, last accessed 22 September 2020

UCLG (United Cities and Local Governments) (2010*) Local Government Finance: The Challenges of the 21st Century—Second Global Report on Decentralization and Local Democracy (GOLD II),* Edward Elgar. Cheltenham (UK) and Northampton, MA (US)

UCLG (2014) *Basic Services for All in an Urbanizing World, Third Global Report on Local Democracy and Decentralization— GOLD III 2013*, https://www.uclg.org/en/media/news/gold-iii-report-basic-services-all-urbanizing-world, last accessed 29 September 2020

UCLG (2016) *Co-creating the Urban Future: The agenda of metropolises, cities and territories, GOLD IV Report 2016*, UCLG, Barcelona

UCLG (2018) *Culture in The Sustainable Development Goals: A Guide for Local Action*, United Cities and Local Governments Committee on Culture http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturesdgs_web_en.pdf, last accessed 24 September 2020

UCLG (2019a) *The Localization of the Global Agendas: How Local Action is Transforming Territories and Communities, GOLD V Report,* UCLG, Barcelona

UCLG (2019b) *Towards the Localization of the*

SDGs. Local and Regional Governments, Report to the 2019 HLPF. 3rd Report. United Cities and Local Governments, Barcelona

UCLG Africa and Cities Alliance (2018) *Assessing the Institutional Environment of Local Governments in Africa*, UCLG Africa-Cities Alliance, Belgium-Morocco

UCLG ASPAC, Cities Alliance and UNDP (2018*) City Enabling Environment Rating: Assessment of the Countries in Asia and the Pacific*, ASPAC-Cities Alliance, Belgium-Indonesia

UCLG Committee Digital and Knowledge-Based Cities and Bilbao (2017) *Smart Cities, Study 2017*, Committee Digital and Knowledge-Based Cities, Bilbao

UK Parliament (2020) 'Climate Assembly UK publishes report on path to net zero emissions', 10 September, https://www.parliament.uk/business/news/2020/september/climate-assembly-uk-new/,last accessed 23 September 2020

UN Development Group (2014) *Localizing the Post-2015 Agenda*, Dialogues on Implementation, New York

UN Environment (2019) *Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People*. Cambridge University Press. DOI 10.1017/9781108627146, last accessed 29 September 2020

UN General Assembly (2017) *New Urban Agenda, Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2016*, A/RES/71/256, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_256.pdf, last accessed 25 September 2020

UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2018) *Report of the United Nations High Commissioner for Refugees Part II Global compact on refugees*, https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf, last accessed 21 September 2020

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2010) *The Creative Economy Report, 2020: Creative Economy*, *A Feasible Development Option*; https://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf, last accessed 28 September 2020

UNCTAD (2014) *World Investment Report 2014: Investing in The SDGs, an Action Plan*, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf, last accessed 25 September 2020

UNCTAD (2019) 'UNCTAD's work on the creative economy', https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy, last accessed 28 September 2020

UNCTAD. (2020) *Impact of the COVID-19 pandemic on Global FDI and GVCs: Updated Analysis*, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf, last accessed 25 September 2020

UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs)(2013) Crossnational *Comparisons of Internal Migration: An Update on Global Patterns and Trends*, United Nations, New York, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2013-1.pdf, last accessed 21 September 2020

UNDESA (2015) *Financing Sustainable Development and Developing Sustainable Finance: A DESA Briefing Note on the Addis Ababa Action Agenda*, https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/DESABriefing-Note-Addis-Action-Agenda.pdf, last accessed 25 September 2020

UNDESA (2018) *Working together: Integration, Institutions and the Sustainable Development Goals, World Public Sector Report 2018,* UNDESA, New York

UNDESA (2019) *International Migrant Stock 2019*, United Nations, New York,https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationStock2019_TenKeyFindings.pdf, last accessed 21 September 2020

UNDESA (2020a) *World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World,* https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-FullReport.pdf, last accessed 21 September 2020

UNDESA (2020b) 'Everyone included: Social impact of COVID-19', https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-includedcovid-19.html, last accessed 21 September 2020

UNDESA and UNCDF (undated*) Financing Sustainable Urban Development in the Least Developed Countries,* https://www.uncdf.org/financing-sustainable-urban-developmentin-the-least-developed-countries, last accessed 25 September 2020

UNDP (United Nations Development Programme) (2012) *Green Economy in Action: Articles and Excerpts that Illustrate Green Economy and Sustainable Development Efforts*, https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/green_economy_in_action_eng.pdf, last accessed 25 September 2020

UNDP (2018) *Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update*, United Nations Development Programme, New York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf, last accessed 24 September 2020

UNDP (2019) *Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in the 21st Century. Human Development Report,* http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf, last accessed 22 September 2020

UNDP, UN-Habitat and GTF (2016) *Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at Sub-national Level*, GTF, Barcelona

UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) (2018) 'ECA presents new harmonized regional framework for the implementation of the New Urban Agenda (NUA) in Africa to local authorities', https://www.uneca.org/stories/eca-presentsnew-harmonized-regional-frameworkimplementation-new-urban-agenda-nuaafrica, last accessed 28 September 2020

UNECA (2020) 'The economic impact of COVID-19 on African cities likely to be acute through a sharp decline in productivity, jobs and revenues, says ECA', https://www.uneca.org/stories/economic-impactcovid-19-african-cities-likely-be-acutethrough-sharp-decline-productivity, last accessed 12 May 2020

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) (2014) *Main Findings and Recommendations from the Draft UNECE Social Housing Study 'Social Housing in the UNECE Region: Models, Trends and Challenges'*, UNECE, Geneva.

UNECE (2020) 'UN supports socio-economic response to COVID-19 crisis in Europe and Central Asia', http://www.unece.org/info/media/news/sdgs/2020/un-supports-socioeconomic-response-to-covid-19-crisis-ineurope-and-central-asia/doc.html, last accessed 13 May 2020

UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (2020) *The Impact and Policy Responses for COVID-19 in Asia and the Pacific*, https://www.unescap.org/resources/impact-andpolicy-responses-covid-19-asia-and-pacific, last accessed 13 May 2020

UNESCAP and UN-Habitat (2019) *The Future of Asia and Pacific Cities: Transformative Pathways Towards Sustainable Urban Development*, UN, Bangkok

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2016a) *Cities Welcoming Refugees and Migrants*, UNESCO, Paris, https://www.refworld.org/pdfid/5a5f429a4.pdf, last accessed 24 September 2020

UNESCO (2016b*) Culture Urban Future: Global Report on Culture for Sustainable Urban Development,* UNESCO, Paris.

UNESCO (2019) *Culture: 2030 Indicators*, UNESCO, Paris

UNESCO (undated) 'R&D Spending by Country', http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-developmentspending/, last accessed 24 September 2020

UNESCWA (United Nations Economic and Social Commission for West Asia) (2020) *Regional Emergency Response to Mitigate the Impact of COVID-19,* https://www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impactcovid-19-policy-briefs, last accessed 13 May 2020

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (2019) 'Climate Ambition Alliance: Nations renew their push to upscale action by 2020 and achieve net zero CO2 emissions by 2050', Press release, 11 December, https://unfccc.int/news/climate-ambition-alliancenations-renew-their-push-to-

upscaleaction-by-2020-and-achieve-net-zero, last accessed 28 September 2020
UNFCCC (undated) 'Nationally Determined Contributions',https://unfccc.int/processand-meetings/the-paris-agreement/theparis-agreement/nationally-determinedcontributions-ndcs, last accessed 23 September 2020
UNFPA (United Nations Population Fund) (2007) *State of the World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth*, UNFPA, New York, NY
UN-Habitat (2004) *The State of the World's Cities 2004/2005: Globalization and Urban Culture,* Earthscan, London
UN-Habitat (2006) *State of the World Cities Report 2006/2007,* Earthscan, London
UN-Habitat (2007) *Global Report on Human Settlements 2007: Enhancing Safety and Security*, Earthscan, London
UN-Habitat (2008) *State of the World's Cities Report 2008, Harmonious Cities*, Earthscan, London
UN-Habitat (2009a) *Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainable Cities*, Earthscan, London and Sterling, VA
UN-Habitat (2010a) *State of World Cities Report 2010/2011: Bridging the Urban Divide*, Earthscan, London
UN-Habitat (2010b) *Urban Equity in Development - Cities for Life*, World Urban Forum 7 Concept Paper, https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12320_1_595236.pdf, last accessed 21 September 2020
UN-Habitat (2010c) *Planning Sustainable Cities, UN-Habitat Practices and Perspectives*, UNHabitat, Nairobi
UN-Habitat (2011a) *Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements 2011*, Earthscan, London
UN-Habitat (2011b) *Ghana Housing Profile,* UNHabitat, Nairobi
UN-Habitat (2011c) *The Economic Role of Cities. The Global Urban Economic Dialogue Series*, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi.
UN-Habitat (2011d) *Innovative Land and Property Taxation*, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi
UN-Habitat (2012a) Zambia Urban Housing Sector Profile, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2012b) *Guide du maître d'ouvrage les registres fonciers urbains (RFU),*UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2013) *State of the World's Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities,* Earthscan, London
UN-Habitat (2014) *The Evolution of National Urban Policies. A Global Overview*, Nairobi, Kenya
UN-Habitat (2015a) *International Guidelines on Urban and Territorial Planning*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2015b) *E-Governance and Urban Policy Design in Developing Countries,* UNHabitat, Nairobi
UN-Habitat (2015c) *National Urban Policy: Asia and Pacific Report*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2015d) *National Urban Policy: A guiding framework*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016) *Urbanization and Development: Emerging Futures, World Cities Report 2016*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016a) *World Cities Report 2016: Urbanization and Development: Emerging Urban Futures*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016b) *The Fundamentals of Urbanization: Evidence base for Policy Making*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016c) *Enhancing Productivity in the Urban Informal Economy*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016d) *Slum Almanac 2015–2016: Tracking Improvement in the Lives of Slum Dwellers*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016e) *Financing Sustainable Urban Development: Challenges And Opportunities*, https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Financing-Urban-Development_UN-Habitat.pdf, last accessed 25 September 2020
UN-Habitat (2016f) *Leveraging Land: Land-based Finance for Local Governments—A Reader,* UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016g) 'New Euro 30 Million fund for Participatory Slum Upgrading Programme (PSUP)', World Urban Campaign, https://www.worldurbancampaign.org/psup/new-euro-30-million-fund-participatory-slum-upgrading-programme-psup
UN-Habitat (2016h) 'The city we need: Towards a new urban paradigm' www.worldurbancampaign.org, last accessed 28 September 2020
UN-Habitat (2016i) *Addressing Climate Change in National Urban Policy: A policy guide for lowcarbon and climate-resilient urban development*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2016j) *The Economics of the Threepronged Approach to Urbanization: Planned City Extensions, Legal Framework and Municipal Finance*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2017a) *Action Framework for Implementation of the New Urban Agenda (AFINUA)*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2017b) *Economic Foundations for Sustainable Urbanization: A Study on Three-Pronged Approach: Planned City Extensions, Legal Framework, and Municipal Finance,* UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2017c) *Finance for City Leaders: Handbook on Improving Municipal Finance to Deliver Better Services*, Nairobi
UN-Habitat (2018a) *The State of African Cities 2018: The Geography of African Investment,* UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2018b) *Prosperity for all: Enhancing the Informal Economy Through Participatory Slum Upgrading,* UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2018c) *Planning Law Assessment Framework* UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2018d) *Leading Change: Delivering the New Urban Agenda through Urban and Territorial Planning*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019a) 'Sustainable Development Goal 11: Content analysis of Voluntary National Reviews 2018', Unpublished background document.
UN-Habitat (2019b) 'UN-Habitat opens a 'One Stop Youth Centre' in Wau, South Sudan', https://www.unhabitatyouth.org/2019/03/06/un-habitat-opens-a-onestop-youth-centre-in-wau-south-sudan/, last accessed 22 September 2020
UN-Habitat (2019c) *Global Future Cities Programme Iskandar Malaysia—City Context Report*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019d) 'Draft Ministerial Declaration: Innovation for better quality of life in cities and communities: accelerated implementation of the New Urban Agenda towards the achievement of the Sustainable Development Goals', UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019e*) Net-Zero Carbon Village Planning Guidelines for the Yangtze River Delta Region in China*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019f) *Annual Progress Report 2019*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019g) *How to Formulate a National Urban Policy: A Practical Guide*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019h) *Country Activities Report 2019: Supporting the New Urban Agenda,* UNHabitat, Nairobi
UN-Habitat (2019i) *SDG Project Assessment Tool Vol 1: General Framework*,UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2019j) *SDG Project Assessment Tool Vol 2: User Guide*,UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2020a) *Abu Dhabi Declared Actions*, https://wuf.unhabitat.org/sites/default/files/2020-02/WUF10_final_declared_actions.pdf, last accessed 21 September 2020
UN-Habitat (2020b) *Effectiveness of Planning Law in Land-Rich Developed Countries*, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/effectiveness_of_planning_law_in_land-rich_developed_countries_volume10_final_draft.pdf, last accessed 21 September 2020
UN-Habitat (2020c) *UN-Habitat COVID-19 Response Plan*, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/final_un-habitat_covid-19_response_plan.pdf, last accessed 21 September 2020
UN-Habitat (2020d) *COVID-19 in African Cities: Impacts, Responses and Policies*, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies2.pdf, last accessed 21 September 2020
UN-Habitat (2020e) *The Sustainable Investment Gap and How to Close It: Cities, Infrastructure and SDG Investment Gap*, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/02/the_sustainable_investment_gap_and_how_to_close_it_february_2020.pdf, last accessed 25 September 2020
UN-Habitat (2020f) *Caribbean Strategy for Informal Settlements Upgrading: A guide to Inclusive and Resilient Urbanisation,* UNHabitat, Nairobi
UN-Habitat (2020g) 'Informal briefing to Member States by the Executive Director of UN-Habitat on the New Urban Agenda

Monitoring Framework', February, Nairobi
UN-Habitat (2020h) *Concept Note: New Urban Agenda Platform*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (2020i) *UN-Habitat Covid-19 Key Messages*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat (undated) 'Citizen report card' https://mirror.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=635&cid=7660, last accessed 24 September 2020
UN-Habitat (undated) *Urban Planning in a State of Flux*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat and CAF (2014) *Construction of More Equitable Cities: Public Policies for Inclusion in Latin America*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat and Cities Alliance (2014) *The Evolution of National Urban Policies*, https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/National%20Urban%20Policies.pdf, last accessed 28 September 2020
UN-Habitat and CLGF (Commonwealth Local Government Forum) (2015) *Pacific Urban Forum 2015: Towards a New Urban Agenda. Harnessing Opportunities in a Post-2015 Environment,* http://www.clgfpacific.org/userfiles/3/file/2015%20Pacific%20Urban%20Forum%20Resolution%20and%20Outcomes%20Document.pdf, last accessed 28 September 2020
UN-Habitat and EcoPlan (2005) *Promoting Local Economic Development through Strategic Planning*, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi
UN-Habitat and OECD (2018) *Global State of National Urban Policy*, UN-Habitat, Nairobi
UN-Habitat and the UK Government Department for International Development (UNHabitat/DFID) (2002*) Sustainable Urbanisation-Achieving Agenda 21* http://www.chs.ubc.ca/archives/files/Sustainable_urbanization.pdf, last accessed 22 September 2020
UN-Habitat and UNICEF (2020) 'Interim technical note on water, sanitation and hygiene for COVID-19 response in slums and informal urban settlements', https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-habitat-unicef_wash_technical_note-_urban_wash_for_covid_in_informal_settlements.pdf, last accessed 25 September 2020
UN-Habitat, CAF and Fundación Avina (2014) *Construction of More Equitable Cities: Public Policies for Inclusion in Latin America*, UNHabitat, Nairobi
UN-Habitat, DERASAT and UNDP (2020) *State of Arab Cities Report 2020: Financing Sustainable Urban Development in the Arab Region,*United Nations Publications, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/sacr_2020_executive_summary_en.pdf, last accessed 25 September 2020
UNICEF (United Nations Children's Fund) (2012) *State of the World's Children 2012. Children in an Urban World,* United Nations Children's Fund, New York, https://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-Main-Report_EN_21Dec2011.pdf, last accessed 24 September 2020
UNICEF (2018) *Shaping Urbanization for Children: A Handbook on Child-Responsive Urban Planning,* United Nations, New York
UNICEF and WHO (2019) *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2017. Special Focus on Inequalities*, https://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf, last accessed 21 September 2020
Union of Concerned Scientists (2017) *Maximizing the Benefits of Driving Vehicles. Policy Brief*, https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2017/02/Maximizing-Benefits-Self-Driving-Vehicles.pdf, last accessed 24 September 2020
United Nations (2001) *The Components of Urban Growth in Developing Countries*, United Nations, New York
United Nations (2015) 'Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development', https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, last accessed 24 September 2020
United Nations (2016) *Urbanization and Sustainable Development: A United Nations System Input to a New Urban Agenda*, United Nations System Chief Executives Board for Coordination, https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/Urbanization%20and%20Sustainable%20Development_a%20UN%20system%20input%20to%20the%20New%20Urban%20Agenda-ODS.pdf, last accessed 21 September 2020
United Nations (2017a) *New Urban Agenda*, A/RES/71/256*, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English-With-Index-1.pdf, last accessed 21 September 2020
United Nations (2017b) *Habitat III Policy papers: Policy paper 1—The Right to The City and Cities for All,* United Nations, New York
United Nations (2018a) *Progress on the Implementation of the New Urban Agenda*; https://digitallibrary.un.org/record/1628008/files/A_73_83%26E_2018_62-EN.pdf, last accessed 28 September 2020
United Nations (2018b) *2018 Revision of World Urbanization Prospects,* Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York
United Nations (2018c) *World Youth Report: Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development*, https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf, last accessed 21 September 2020
United Nations (2018d) *Ageing Related Policies and Priorities in the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development - As reported in the Voluntary National Reviews of 2016, 2017 and 2018,* https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2019/07/Analysis-Ageing_VNRs_Final28122018.pdf, last accessed 23 September 2020
United Nations (2019a) *World Population Prospects 2019: Highlights*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division ST/ESA/SER.A/423, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf, last accessed 21 September 2020
United Nations (2019b) *UN System-Wide Strategy on Sustainable Urban Development*, Chief Executive Board for Coordination, CEB/2019/4/Add., https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2019/05/UN-System-Wide-Strategy-on-Sustainable-Urban-Development-1.pdf, last accessed 21 September 2020
United Nations (2019c) *SDG Report 2019,* https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/,last accessed 4 April 2020
United Nations (2019d) *Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals*, Report of the Secretary-General, Economic and Social Council, E/2019/68
United Nations (2019e) *UN Secretary-General's Roadmap for Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development,* https://www.un.org/sustainabledevelopment/sg-financestrategy/
United Nations (2020) *Financing for Sustainable Development Report 2020*, Inter-agency Task Force on Financing for Development, United Nations, New York
United Nations (2020a) 'Decade of Action: Ten years to transform our world', https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-ofaction/,last accessed 22 September 2020
United Nations (2020b) *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socioeconomic impacts of COVID-19*, https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf, last accessed 21 September 2020
United Nations (2020c) *Policy Brief: Covid-19 In an Urban World*, https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-urban-world, last accessed 25 September 2020
United Nations (2020d) *The Sustainable Development Goals Report2020,* https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf, last accessed 25 September 2020
United Nations (undated) 'Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable', https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/, last accessed 22 September 2020
United Nations High Level Panel on Digital Cooperation (2019) *The Age of Digital Interdependence*, United Nations, New York
United Nations Women Friendly Cities Joint Programme (2014) 'Women friendly cities', http://www.womenfriendlycities.com/wfcwomen-friendly-city.php, last accessed 24 September 2020
United Republic of Tanzania (2019) *Voluntary National Review 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness And Equality*, https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/SDGs/VNR_Report_Tanzania_2019.pdf, last accessed 25 September 2020
Unnikrishnan, H. (2018) 'Thinking beyond fairy lights and fountains: lessons from the waterscape of Bengaluru', *Ecology, Economy*

and Society—The INSEE Journal **1** (2):95–99
Unnikrishnan, H., S. Sen, and H. Nagendra (2017) 'Traditional water bodies and urban resilience: A historical perspective from Bengaluru, India', *Water History* **9** (4):453–477
UNSG (United Nations Secretary-General) (2016) *New York Declaration for Refugees and Migrants*, A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1, last accessed 22 September 2020
UN-Women (2017) *Safe Cities and Safe Public Spaces: Global Results Report,* https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/safe-cities-and-safe-public-spaces-globalresults-report-en.pdf?la=en&vs=45, last accessed 22 September 2020
Urbact Knowledge Hub (2019) *Gender Equal Cities,* https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-genderequalcities-edition-pagesweb.pdf, last accessed 24 September 2020
Urban 20 (U20) (2018) 'Gender inequalities in cities: Urban 20 white paper', www.urban20.org, last accessed 22 September 2020
Urban Sustainability Exchange (undated) 'Integrated community based solid waste management', https://use.metropolis.org/case-studies/integrated-community-basedsolid-waste-management, last accessed 25 September 2020
US Department of State (2019) 'On the US withdrawal from the Paris Agreement', https://www.state.gov/on-the-u-s-withdrawalfrom-the-paris-agreement/, last accessed 22 September 2020
USAID (United States Agency for International Development) (2019) 'Beyond the grid', https://www.usaid.gov/powerafrica/beyondthegrid, last accessed 25 September 2020
Utz, P. and C. Mejia-Mantilla (2019) 'More than just growth: Accelerating poverty reduction in Kenya', https://blogs.worldbank.org/africacan/more-than-just-growth-acceleratingpoverty-reduction-in-kenya, last accessed 24 September 2020
Valencia, S., D. Simon, S. Croese,J. Nordqvist, M. Oloko, TSharma, N. Taylor Buck and I. Versace (2019) 'Adapting the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda to the city level: Initial reflections from a comparative research project', *International Journal of Urban Sustainable Development* **11**(1): 4–23
Valentine, G. (2007) 'Theorizing and researching intersectionality: A challenge for feminist geography', *The professional geographer* **59** (1):10–21
van den Bosch, M. and Å. Ode Sang (2017) 'Urban natural environments as naturebased solutions for improved public health – A systematic review of reviews', *Environmental Research* **158**:373–384
van Dorn, A., R.E. Cooney and M.L. Sabin (2020) 'COVID-19 exacerbating inequalities in the US', *Lancet* **395**:1243–1244
Van Duijne, R. J. and J. Nijman (2019) 'India's emergent urban formations', *Annals of the American Association of Geographers* **109** (6):1–21
van Hoof, J., J. K. Kazak, J. M. Perek-Białas and S. T. M. Peek (2018) 'The challenges of urban ageing: Making cities age-friendly in Europe', *International Journal of Environmental Research and Public Health* **15**: 1–17
Van Huijstee, M. M., M. Francken, and P. Leroy (2007) 'Partnerships for sustainable development: A review of current literature', *Environmental sciences* **4** (2):75–89
Vandercasteelen, J., S. Beyene, S. Tamru, B. Minten, and J. Swinnen (2018) 'Cities and agricultural transformation in Africa: Evidence from Ethiopia', *World Development* **105**(C): 383–399
Venkataraman, L. N (2015) 'Social construction of capabilities and intersectional complexities in a Tamil village', *Development in Practice* **25** (8):1170–1181
Venter, C., G. Jennings, D. Hidalgo, and V. Pineda (2018) 'The equity impacts of bus rapid transit: A review of the evidence and implications for sustainable transport', *International Journal of Sustainable Transportation* **12** (2):1556–8318
Villes en Développement (2019) 'Urbanisation and financiarisation', *Villes en Développement* (Bulletin n°111 – Janvier 2019) ADP, Paris Visagie, J. and I. Turok (2020) 'Getting urban density to work in informal settlements in Africa', *Environment and Urbanization*, https://doi.org/10.1177/0956247820907808, last accessed 28 September 2020
Vizina, Y. and P. Wilson (2019) 'Reconciliation with Indigenous Peoples: A Holistic Approach', Canadian Commission for UNESCO (CCUNESCO), Ottawa:
Voce, A., A. Kirk, and R. Partington (2020) 'UK coronavirus job losses: The latest data on redundancies and furloughs', https://www.theguardian.com/world/2020/jul/31/ukcoronavirus-job-losses-the-latest-data-onredundancies-and-furloughs, last accessed 22 September 2020
Wahba, S., M. M. Sharif, M. Mizutori, and L. Sorkin (2020) 'Cities are on the front lines of COVID-19', https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/cities-are-front-linescovid-19?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT, last accessed 25 September 2020
Wainright, O. (2019) 'The next era of human progress': What lies behind the global new cities epidemic' *The Guardian*, 8 July, https://www.theguardian.com/cities/2019/jul/08/the-next-era-of-human-progresswhat-lies-behind-the-global-new-citiesepidemic, last accessed 24 September 2020
Walker, J., A. A. Frediani, and J. F. Trani (2013) 'Gender, difference and urban change: Implications for the promotion of wellbeing?', *Environment and Urbanization* **25** (1):111–124.
Walker, R., T. Jojola, and D. Natcher (2013) *Reclaiming Indigenous Planning*, McGill-Queen University Press, Montreal
Wall, R. S. and G. A. Van der Knaap (2011) 'Sectoral differentiation and network structure within contemporary worldwide corporate networks', *Economic Geography* **87**(3): 267–308
Wall, R. S. and S. Stavropoulos (2016) 'Smart cities within world city networks', *Applied Economics Letters* **23**(12): 875–879
Wallace, J. (2013) 'Cities, Redistribution, and Authoritarian Regime Survival', *The Journal of Politics* **75**(3): 632–645
Walnycki, A. (2015)'The architecture of aid: How decentralised finance can drive sustainable development', https://www.iied.org/files/kiln/architecture-of-aid.html, last accessed 25 September 2020
Walter, I. (ed.) (2016) *The Infrastructure Finance Challenge*, Open Book Publishers, Cambridge, UK
Wang, Z., X. Wang, and L. Liang (2019) 'Green economic efficiency in the Yangtze River Delta: Spatiotemporal evolution and influencing factors', *Ecosystem Health and Sustainability* **5** (1): 20–35
Wanli, F. and S. Wahba (2020) 'Urban density is not an enemy in the coronavirus fight: Evidence from China' *World Bank Blogs*, 20 April, https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/urban-density-not-enemycoronavirus-fight-evidence-china , last accessed 20 April 2020
Washbourne, C. (2020) 'UCL Blog: Urban science advice and COVID-19', *UCL Blog*, 2 April, https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/washbourne-urban/, last accessed 28 September 2020
Watson, V. (2016) 'Locating planning in the New Urban Agenda of the urban sustainable development goal', *Planning Theory* **15**(4):435–448
Watson, V. (2019) 'The return of the city-region in the new urban agenda: Is this relevant in the Global South?', *Regional Studies,* DOI: 10.1080/00343404.2019.1664734, /, last accessed 28 September 2020
Watt, J. (2018) 'Brazil reneges on hosting UN climate talks under Bolsonaro presidency', https://www.theguardian.com/world/2018/nov/28/brazil-reneges-on-hosting-unclimate-talks-under-bolsonaro-presidency, last accessed 22 September 2020
WBGU (German Advisory Council on Global Change) (2016) *Humanity on the Move: Unlocking the Transformative Power of Cities*, WBGU, Berlin
WCED (World Commission on Environment and Development) ((1987) *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford and New York
Welsh, T. (2020) .Inequality and corruption: Why Peru is losing its COVID-19 battle', https://www.devex.com/news/inequalityand-corruption-why-peru-is-losing-itscovid-19-battle-97604, last accessed 22 September 2020
Westra, L. (2012) *Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples: International and Domestic Legal Perspectives*, Routledge
Wheeler, S. M. and T. Beatley (2014) *Sustainable Urban Development Reader*, Routledge

WHO (World Health Organization) (2007) *Global Age-friendly Cities: A Guide*, https://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf, last accessed 24 September 2020

WHO (2015) *World Report on Ageing and Health,* https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf?sequence=1, last accessed 24 September 2020

WHO (2018) *Global Health Observatory data repository*, https://apps.who.int/gho/data/view.main.SDGPM25UNREGION6v?lang=en, last accessed 4 April 2020

WHO (2020) 'WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020', https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020, last accessed 22 September 2020

WHO and ITU (2020) 'ITU-WHO Joint Statement: Unleashing information technology to defeat COVID-19', https://www.who.int/news-room/detail/20-04-2020-ituwho-joint-statement-unleashing-information-technology-to-defeat-covid-19, last accessed 24 September 2020

WIEGO (2020) 'Mexico City: May 2020 - COVID-19 update', https://www.wiego.org/mexico-city, last accessed 23 September 2020

Williamson, B. (2015) 'Governing methods: policy innovation labs, design and data science in the digital governance of education', *Journal of Educational Administration and History* **47** (3):251–271

Williamson, J. (1990) *Coping with City Growth During the British Industrial Revolution,* Cambridge
University Press, Cambridge

Winter, S., M.N. Dzombo and F. Barchi, (2019) 'Exploring the complex relationship between women's sanitation practices and household diarrhea in the slums of Nairobi: a cross-sectional study', *BMC Infectious Diseases* **19**(242):1–13

Wirth, L. (1938) 'Urbanism as a Way of Life', *The American Journal of Sociology* **44**(1): 1–24

Woetzel, J., N. Garemo, J. Mischke, P. Kamra, and R. Palter (2017) 'Bridging infrastructure gaps: Has the world made progress?' McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com/industries/capital-projectsand-infrastructure/our-insights/bridginginfrastructure-gaps-has-the-world-madeprogress, last accessed 25 September 2020

Wood, C. (2016) 'What is 311?' *Government Technology,* 4 August, https://www.govtech.com/dc/articles/What-is-311.html, last accessed 24 September 2020

World Bank (2009) *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*, World Bank, Washington, DC

World Bank (2010) *Assessing the Impact of Infrastructure Quality on Firm Productivity in Africa: Cross-Country Comparisons Based on Investment Climate Surveys from 1999 to 2005*, Policy Research Working Paper No. WPS 5191, World Bank Group, Washington, DC

World Bank (2013a) 'Financing sustainable cities: How we're helping Africa's cities raise their credit ratings', World Bank Group; Washington, DC, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/24/financing sustainable-cities-africa-creditworthy, last accessed 25 September 2020

World Bank (2013b) *Global Monitoring Report 2013: Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals,* World Bank Group, Washington, DC

World Bank (2013c) *World Development Report 2013: Jobs*, World Bank, Washington, DC

World Bank (2014a) 'A model from Mexico to the world', https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/19/un-modelode-mexico-para-el-mundo, last accessed 22 September 2020

World Bank (2014b) *Social Inclusion: The Key for Prosperity for All,* World Bank, Washington, DC

World Bank (2015a) 'Urban Development', https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1, last accessed 22 September 2020

World Bank (2015b) *World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior*, World Bank, Washington, DC

World Bank (2015c) *Competitive Cities for Jobs and Growth*: *What, Who, and How*, World Bank, Washington, DC

World Bank (2016) 'Government objectives: Benefits and risks of PPPs', https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives, last accessed 25 September 2020

World Bank (2017) *World Bank Global Consumption Database*, World Bank, Washington, DC

World Bank (2018a) *Overcoming Poverty and Inequality in South Africa: An Assessment of Drivers, Constraints and Opportunities*, http://documents.worldbank.org/curated/en/530481521735906534/pdf/124521-REV-OUO-South-Africa-Povertyand-Inequality-Assessment-Report-2018-FINAL-WEB.pdf, last accessed 21 September 2020

World Bank (2018b) *Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle*, World Bank, Washington, DC

World bank (2018c) *The Human Capital Project*, World Bank Publications, Washington, DC

World Bank (2019a) 'GDP per capita (current US$) - Sub-Saharan Africa', World Bank national accounts data, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZG

World Bank (2019b) 'World Development Indicators', https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, last accessed 22 September 2020

World Bank (2019c) *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*, World Bank, Washington, DC http://documents1.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/2019-WDR-Report. pdf, last accessed 21 September 2020

World Bank (2019d) *World Development Indicators*, World Bank, Washington, DC

World Bank (2019e) 'Data release: Remittances to low- and middle-income countries on track to reach $551 billion in 2019 and $597 billion by 2021', https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittanceslow-and-middle-income-countries-trackreach-551-billion-2019, last accessed 24 September 2020

World Bank (2019f) 'Boosting quality of urban transport service in São Paulo', https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/25/boosting-quality-of-urban-transportservice-in-sao-paulo, last accessed 25 September 2020

World Bank (2019g) *China – Green Urban Financing and Innovation Project (English),* World Bank Group, Washington, DC

World Bank (2020a) 'The World Bank in China', https://www.worldbank.org/en/country/china/overview, last accessed 22 September 2020

World Bank (2020b) 'World Bank predicts sharpest decline of remittances in recent history', Press Release April 22, https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2020/04/22/world-bank-predictssharpest-decline-of-remittances-in-recenthistory, last accessed 13 May 2020

World Bank (2020c) *"Public Banks" South Asia Economic Focus* (April), World Bank, Washington, DC

World Bank (2020d) 'East Asia and Pacific in the Time of COVID-19', *East Asia and Pacific Economic Update* (April), World Bank, Washington, DC

World Bank and Kounkuey Design Initiative (2020) *Handbook for Gender Inclusive Urban Planning and Design*, World Bank, Washington, DC

World Cities Culture Forum (2017) *Culture and Climate Change*, http://www.worldcitiesculture forum.com/assets/others/WCCF_Report_June_28_FINAL_v4.pdf, last accessed 24 September 2020

World Economic Forum (2014) Accelerating Infrastructure Delivery New Evidence from International Financial Institution, https://www.weforum.org/reports/acceleratinginfrastructure-delivery-new-evidence-international-financial-institutions, last accessed 25 September 2020

World Economic Forum (2015) *Top Ten Urban Innovations*, http://www3.weforum.org/docs/Top_10_Emerging_Urban_Innovations_report_2010_20.10.pdf, last accessed 21 September 2020

World Economic Forum (2016) *The Global Risks Report 2016*, 11th Edition, http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisksReport2016.pdf, last accessed 24 September 2020

World Economic Forum (2017) *Migration and its Impacts on Cities,* http://www3.weforum.org/

docs/Migration_Impact_Cities_report_2017_HR.pdf, last accessed 24 September 2020
World Economic Forum (2019) *Global Gender Gap Report 2020*, Cologny, Geneva
World Economic Forum (2020a) *The Global Risk Report 2020*, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf, last accessed 21 September 2020
World Economic Forum (2020b) 'This is how cities are helping homeless people self-isolate', https://www.weforum.org/agenda/2020/03/homeless-self-isolationcities-coronavirus/, last accessed 22 September 2020
World Economic Forum (2020c) Ten technology trends to watch in the COVID-19 pandemic, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trendscoronavirus-covid19-pandemic-roboticstelehealth/, last accessed 24 September 2020
World Economic Forum (2020d) *Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World*, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Challenges_and_Opportunities_Post_COVID_19.pdf, last accessed 28 September 2020
Xiao, Y. and Z. Fan (2020) '10 technology trends to watch in the COVID-19 pandemic', https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trendscoronavirus-covid19-pandemic-roboticstelehealth/, last accessed 24 September 2020
Yon, A. and S. Nadimpalli (2017) 'Cities for whom? Re-examining identity, to reclaim the right to the city for women', *Australian Planner* **54** (1):33–40
Yuval-Davis, N (2006) 'Intersectionality and feminist politics', *European journal of women's studies* **13** (3):193–209
Zeigermann, U. (2018) 'Governing sustainable development through "policy coherence"? The production and circulation of knowledge in the EU and the OECD' *European Journal of Sustainable Development,* **7**(1):133–149.
Zhang, N., K. Yu, and Z. Chen (2017) 'How does urbanization affect carbon dioxide emissions? A cross-country panel data analysis', *Energy Policy* **107**:678–687
Zhu, Y. (2017) 'In Situ Urbanization in China: Processes, Contributing Factors, and Policy Implications', *China Population and Development Studies* 1(1): 45–66
Zhu, Y. and L. Liyue (2011) *The mobility patterns of rural-urban migrants and their social protection in China: Beyond the extension of urbanbased approaches*, CSP Research Report 01, Institute of Development Studies, University of Sussex
Zinkernagel, R., J. Evans, and L. Neij (2018) 'Applying the SDGs to cities: Business as usual or a new dawn?', *Sustainability* **10** (9):3201
Zottis, L. (2014) 'Perdemos um mês por ano no trânsito', *TheCityFixBrasil*, 2 July, http://www.thecityfixbrasil.org/2014/07/02/perdemos-um-mes-por-ano-no-transito/, last accessed 25 September 2020
Zuboff, S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, Public Affairs, New York__

TERJEMAHAN WORLD CITIES REPORT 2020 (LAPORAN KOTA-KOTA DUNIA 2020)

Hak Cipta © Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Cetakan pertama

TIM PENYUSUN:

Pengarah : Dr. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D

Koordinator : Benny Hermawan, ST, M.Sc

Tim Penerjemah : Ir. Hadi Sucahyono, Ph.D., MPP; Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc; Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP; Ir. Sarwo Handayani, MSi; Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, MCP; Agustaviano Sofjan, S.IP, M.M; Ir. M. Maliki Moersid, MCP; Ir. Nirwono Joga, MLA; Akhyar Farizal; Ruth Isabela Simamora; Melda Magiafitri; Panji Estutama; Zhein Adhi Mahendra; Dwi Agus Prastiyo; Jane Runkat; Nurulitha Andini S.; Ardina Putri R.; Anangga Wirasatya; Dhaneswara Nirwana Indrajoga; Chintya Jasmine Gunarso; Zahra Mufidah.

Tim penyunting : Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, MCP; Ir. Teti Armiati Argo MES, Ph.D; Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP; Prof. Ir. Tommy Firman M.Sc., Ph.D; Chintya Jasmine Gunarso; Zahra Mufidah

Jakarta, Agustus 2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Kerjasama dengan:

KEMITRAAN HABITAT INDONESIA

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110
Telp/Fax. (021) 27513545

Laporan Kota-Kota Dunia 2020

Nilai Urbanisasi Berkelanjutan

Dunia yang kita huni sudah berubah. Pandemi virus korona telah memicu krisis kesehatan publik dan penurunan ekonomi terburuk sejak *Great Depression*. Di dunia yang dengan cepat mengota dan mengglobal, kota telah menjadi episentrum COVID-19. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia: awalnya, di antara kota-kota yang terkoneksi secara global, dan sekarang, melalui transmisi komunitas dan dari kota ke desa.

Laporan Kota-Kota Dunia 2020 menunjukan bahwa nilai intrinsik dari urbanisasi berkelanjutan bisa dan seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan untuk semua. Laporan ini menyediakan bukti dan analisis kebijakan dari nilai urbanisasi mulai dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan; termasuk nilai yang tak berwujud yang memberikan kota suatu karakteristik unik; dan juga mengeksplorasi peran teknologi dan inovasi, pemerintah daerah, investasi tertarget, dan implementasi efektif dari Agenda Baru Perkotaan dalam mendorong nilai urbanisasi berkelanjutan.

Laporan Kota-Kota Dunia 2020 menegaskan bahwa kota yang terencana, terkelola, dan terdanai dengan baik menciptakan nilai yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kota yang tangguh yang dapat bangkit kembali dari dampak pandemi, meningkatkan kualitas hidup, dan dapat menjadi pengungkit melawan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, perubahan iklim, dan tantangan global lainnya.

Dengan telah masuknya dunia ke dalam Dekade Aksi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, rekomendasi kebijakan dalam laporan ini akan bermanfaat bagi pemerintah di seluruh tingkat, mendukung mereka untuk mewujudkan strategi dan program yang mendorong nilai urbanisasi berkelanjutan, dan pada prosesnya, berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui implementasi efektif Agenda Baru Perkotaan.

UN HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME
P.O. Box 30030, Nairobi 00100
E: infohabitat@unhabitat.org

www.unhabitat.org
@UNHABITAT